TEMA PEMBANGUNAN 2027

Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Sektor Unggulan Daerah, Penguatan Infrastruktur dan Optimalisasi Potensi Desa.



2027 RKPD

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NO. 60 TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 131);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 133);
36. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 134);

37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Lampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati.

14. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2027 dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan Program Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional;
   e. program Strategis Nasional; dan
   f. hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026.

(3) RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(4) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh rencana kerja perangkat daerah yang mempedomani pada strategis perangkat daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII : PENUTUP

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2026 NOMOR 60

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Gambar..... ii
Daftar Grafik..... iii-iv
Daftar Tabel..... v
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-3
1.4. Maksud dan Tujuan..... I-5
1.5. Sistematika..... I-6
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah..... II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD..... II-181
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-224
2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... II-240
2.5. Inovasi Daerah..... II-250
BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-20
BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV.1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027..... IV.19
BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Rencana Kerja..... V.1
5.2. Rencana Kerja dalam Rangka Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi Lampung..... V.77
5.3. Rencana Kerja dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas/ Unggulan Kabupaten Lampung Utara..... V.92
BAB 6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... VI.1
6.2. Kinerja Utama (IKU)..... VI.5
6.3. Kinerja Daerah (IKD)..... VI.6
BAB 7. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Skema Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah.....	I.4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara.....	II.1
Gambar 2.2.	Peta Rencana Struktur Ruang.....	II.10
Gambar 2.3.	Peta Rencana Pola Ruang.....	II.12
Gambar 2.4.	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Utara.....	II.14
Gambar 2.5.	Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lampung Utara.....	II.16
Gambar 2.6.	Diagram Rantai Nilai Hortikultura (*value chain diagram*).....	II.128
Gambar 2.7.	Diagram Kuadran Komoditas Perkebunan (LQ vs Pertumbuhan)...	II.132
Gambar 2.8.	Rantai Nilai Industri Singkong.....	II.141
Gambar 4.1.	Ilustrasi Visi RPJMD Tahun 2025-2029.....	IV.2
Gambar 4.2.	Kerangka Keterkaitan Prioritas Nasional, Subtema, Fokus Pembangunan, dan Klaster PKPN RKP Tahun 2027.....	IV.20
Gambar 4.3.	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027.....	IV.21
Gambar 4.4.	Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029.....	IV.189
Gambar 4.5.	Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II.....	IV.192

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..	II.19
Grafik 2.2.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025.....	II.19
Grafik 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB ADHK.....	II.28
Grafik 2.4.	PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025.....	II.29
Grafik 2.5.	Indeks Gini Tahun 2021 s.d 2025.....	II.30
Grafik 2.6.	Persentase Penduduk Miskin Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2025.....	II.31
Grafik 2.7.	Capaian IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025.....	II.35
Grafik 2.7.a	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021 -2025.....	II.40
Grafik 2.8.	Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2020-2024.....	II.44
Grafik 2.9.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025.....	II.45
Grafik 2.9.a	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.46
Grafik 2.10.	Prevalensi Balita Stunting berdasarkan Survey Status Gizi Balita di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2024(%).....	II.48
Grafik 2.10.a	Persentase Keaktifan Peserta JKN Tahun 2021-2025.....	II.61
Grafik 2.11.	Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2025.....	II.65
Grafik 2.12.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024.....	II.69
Grafik 2.13.	Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2020-2024.....	II.72
Grafik 2.14.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.74
Grafik 2.15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.79
Grafik 2.16.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II.80
Grafik 2.17.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025.....	II.82
Grafik 2.18.	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Tahun 2021-2025.....	II.83
Grafik 2.19.	Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024.....	II.83
Grafik 2.20.	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024.....	II.84
Grafik 2.21.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II.85
Grafik 2.22.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.86
Grafik 2.23.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2021-2025..	II.87
Grafik 2.24.	Tren Perubahan Nilai IKLH per Tahun.....	II.92
Grafik 2.25.	Rasio Penduduk Mempunyai Akte Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Tahun 2020-2024.....	II.95
Grafik 2.26.	Rasio Penduduk Mempunyai KTP Tahun 2020-2024.....	II.95
Grafik 2.27.	Persentase Posyandu Aktif Tahun 2020-2024.....	II.98
Grafik 2.28.	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2025.....	II.98
Grafik 2.29.	Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020-2024.....	II.99
Grafik 2.30.	Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2021-2025.....	II.99
Grafik 2.31.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2020-2024.....	II.102
Grafik 2.32.	Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020-2024.....	II.105

Grafik 2.33.	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2019-2023.....	II.105
Grafik 2.34.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet.....	II.106
Grafik 2.35.	Perkembangan Realisasi Investasi (PMDN) Periode 2021 s.d 2025.	II.109
Grafik 2.36.	Cakupan Pembinaan Olah Raga Tahun 2020-2024.....	II.112
Grafik 2.37.	Jumlah Pelatih Yang Bersertifikasi Tahun 2020-2024.....	II.112
Grafik 2.38.	Persentase Pelajar yang Dibina Tahun 2020-2024.....	II.113
Grafik 2.39.	Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2020-2024.....	II.113
Grafik 2.40.	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 dan 2024...	II.114
Grafik 2.41.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2020-2024.....	II.117
Grafik 2.42.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	II.117
Grafik 2.43.	Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	II.117
Grafik 2.44.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2025.....	II.118
Grafik 2.45.	Tingkat Konsumsi Ikan Kab. Lampung Utara Tahun 2021-2025....	II.126
Grafik 2.46.	Kunjungan Wisata Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024..	II.128
Grafik 2.47.	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha) (Ku/ha) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025.....	II.132
Grafik 2.48.	Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.156
Grafik 2.49.	Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang DItamatkan...	II.178
Grafik 2.50.	Nilai IDSD Provinsi Lampung dan Lampung Utara Tahun 2022-2025.....	II.178
Grafik 2.51.	Dependency Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.180

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Administrasi Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.....	II.2
Tabel 2.2.	Tinggi Wilayah Pusat Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.....	II.3
Tabel 2.3.	Luasan Kemiringan Lereng Kabupaten Lampung Utara.....	II.4
Tabel 2.4.	Kondisi Geologi Kabupaten Lampung Utara.....	II.5
Tabel 2.5.	Kondisi Hidrologi Kabupaten Lampung Utara.....	II.5
Tabel 2.6.	Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara.....	II.6
Tabel 2.7.	Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara Kabupaten Lampung Utara.....	II.7
Tabel 2.8.	Panjang Elevasi Garis Kontur Kabupaten Lampung Utara.....	II.7
Tabel 2.9.	Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara.....	II.8
Tabel 2.10.	LP2B Kabupaten Lampung Utara.....	II.8
Tabel 2.11.	Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Utara.....	II.10
Tabel 2.12.	Rencana Pola Ruang.....	II.13
Tabel 2.13.	Resiko Bencana Banjir.....	II.15
Tabel 2.14.	Luas Bencana Gempa Bumi.....	II.16
Tabel 2.15.	Resiko Bencana Kekeringan.....	II.17
Tabel 2.16.	Adaptasi Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim.....	II.18
Tabel 2.17.	Komposisi Penduduk Tahun 2021-2025.....	II.20
Tabel 2.18.	Kondisi Umum Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025.....	II.21
Tabel 2.19.	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.22
Tabel 2.20.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021–2025.	II.23
Tabel 2.21.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s.d 2025.....	II.25
Tabel 2.22.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025.....	II.26
Tabel 2.23.	Penurunan Kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar.....	II.32
Tabel 2.24.	Pertumbuhan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara terhadap Capaian Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II.33
Tabel 2.25.	Capaian Komponen Pembentuk IPM Kab. Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.34
Tabel 2.26.	Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara.....	II.36
Tabel 2.27.	Cabang Olahraga di Kabupaten Lampung Utara.....	II.37
Tabel 2.28.	Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara.....	II.38
Tabel 2.29.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara terhadap Capaian Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II.38
Tabel 2.30.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.39
Tabel 2.31.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.42
Tabel 2.32.	Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025.....	II.42
Tabel 2.33.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.....	II.43
Tabel 2.34.	Status Gizi Balita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025.....	II.47
Tabel 2.35.	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara,	

Provinsi, dan Nasional Tahun 2021-2025..... II.50
Tabel 2.36. Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024..... II.50
Tabel 2.37. Kondisi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024..... II.52
Tabel 2.38. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024..... II.52
Tabel 2.39. Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 – 2024..... II.54
Tabel 2.40. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2021-2025..... II.55
Tabel 2.41. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025..... II.56
Tabel 2.42. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.57
Tabel 2.43. Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.58
Tabel 2.44. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.59
Tabel 2.45. SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025..... II.62
Tabel 2.46. Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.63
Tabel 2.47. Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.63
Tabel 2.48. Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025 II.64
Tabel 2.49. Kondisi Irigasi Kabupaten..... II.66
Tabel 2.50. Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020-2024..... II.67
Tabel 2.51. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020-2024..... II.67
Tabel 2.52. Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2025..... II.68
Tabel 2.53. Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh..... II.70
Tabel 2.54. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025..... II.71
Tabel 2.55. Jumlah Kejahatan Tahun 2020-2024..... II.71
Tabel 2.56. Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023-2025..... II.73
Tabel 2.57. Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023..... II.75
Tabel 2.58. SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025..... II.76
Tabel 2.59. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2020-2025..... II.77
Tabel 2.60. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2025..... II.77
Tabel 2.61. Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2025..... II.78
Tabel 2.62. Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.80
Tabel 2.63. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020-2024..... II.88
Tabel 2.64. Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Tingkat Kerawanan Pangan Tahun 2021-2025..... II.89
Tabel 2.65. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024..... II.90
Tabel 2.66. Trend Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.91
Tabel 2.67. Data-Data Persampahan Tahun 2024 dan 2025..... II.93
Tabel 2.68. Rata-Rata Nilai IDM Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020-2024..... II.96

Tabel 2.69. Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2020-2024..... II.100
Tabel 2.70. Lokasi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2024..... II.103
Tabel 2.71. Indikator Kinerja Lainnya pada Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024..... II.104
Tabel 2.72. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s.d 2025..... II.106
Tabel 2.73. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menegah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s.d 2025..... II.108
Tabel 2.74. Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020 s.d 2024..... II.111
Tabel 2.75. Wirausaha Muda di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 s.d 2024..... II.112
Tabel 2.76. Daftar Cagar Budaya yang Ditetapkan Tahun 2025..... II.117
Tabel 2.77. IKK untuk Urusan Kearsipan Tahun 2024..... II.118
Tabel 2.78. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2025..... II.120
Tabel 2.79. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya..... II.121
Tabel 2.80. Infrastruktur Penunjang Bidang Perikanan..... II.123
Tabel 2.81. Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya KKP RI..... II.123
Tabel 2.82. Produksi Komoditas Perikanan..... II.125
Tabel 2.83. Direktori Hotel di Kab. Lampung Utara tahun 2025..... II.128
Tabel 2.84. Jumlah Rumah Makan/Restoran Tahun 2022-2025..... II.128
Tabel 2.85. Tanaman Pangan (Padi) Tahun 2021-2025..... II.130
Tabel 2.86. CAGR Tahun 2021-2025..... II.130
Tabel 2.87. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Tahun 2022-2025..... II.133
Tabel 2.88. Kecamatan Penghasil Sayuran dan Buah-Buahan Terbanyak di Tahun 2025..... II.134
Tabel 2.89. Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2025..... II.136
Tabel 2.90. Wilayah Produsen Tanaman Biofarmaka Terbesar di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025..... II.137
Tabel 2.91. Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan Menurut Jenisnya Tahun 2025..... II.138
Tabel 2.92. Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025..... II.140
Tabel 2.93. Populasi Ternak dan Produksi Daging Kab. Lampung Utara Tahun 2022-2025..... II.141
Tabel 2.94. Jumlah Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN yang Terjual Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025..... II.143
Tabel 2.95. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2025..... II.144
Tabel 2.96. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dan 2025..... II.144
Tabel 2.97. Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dan 2025..... II.145
Tabel 2.98. Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang Diterbitkan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dan 2025..... II.145
Tabel 2.99. Jumlah Perusahaan Industri Besar..... II.146
Tabel 2.100. Analisi SWOT Pengembangan Industri..... II.148
Tabel 2.101. Tabel Komoditas Unggulan dan Potensi Industri Hilir Lampung Utara..... II.149
Tabel 2.101. Tabel Komoditas Unggulan dan Potensi Industri Hilir Lampung Utara..... II.149
Tabel 2.102. Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025..... II.150

Tabel 2.103. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2025..... II.152
Tabel 2.104. Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Tahun 2025..... II.153
Tabel 2.105. Capaian Kinerja Perencanaan Daerah..... II.153
Tabel 2.106. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan.... II.154
Tabel 2.107. Capaian Kinerja Keuangan Daerah..... II.155
Tabel 2.108. Realisasi APBD Tahun 2021-2025..... II.161
Tabel 2.109. Realisasi dan Alokasi Pendapatan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Utara Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rp) Tahun 2024 dan 2025..... II.163
Tabel 2.110. Realisasi dan Alokasi Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Utara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) Tahun 2024 dan 2025..... II.165
Tabel 2.111. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah..... II.167
Tabel 2.112. Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan..... II.168
Tabel 2.113. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan..... II.169
Tabel 2.114. Capaian Indikator Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Tahun 2025..... II.170
Tabel 2.115. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan..... II.173
Tabel 2.116. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Tahun 2024-2025..... II.173
Tabel 2.117. Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.174
Tabel 2.118. Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025..... II.175
Tabel 2.119. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2025..... II.176
Tabel 2.120. Jumlah Kejahatan Tahun 2020-2024..... II.176
Tabel 2.121. Tabel Perbandingan Skor IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung..... II.179
Tabel 2.122. Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 1..... II.181
Tabel 2.123. Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 2..... II.184
Tabel 2.124. Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 3..... II.187
Tabel 2.125. Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 4..... II.189
Tabel 2.126. Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 5..... II.191
Tabel 2.127. Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025..... II.195
Tabel 2.128. Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 dan Tw. 1 Tahun 2026..... II.197
Tabel 2.129. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025..... II.223
Tabel 2.130. Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis Tahun 2027..... II.240
Tabel 2.131. Hasil Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027..... II.241
Tabel 2.132. Daftar Inovasi Perangkat Daerah..... II.250
Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah..... III.11
Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah..... III.11
Tabel 3.3. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2027.. III.13
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2024 s.d Tahun 2028..... III.24
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2024 s.d Tahun 2028..... III.29
Tabel 3.6. Realisasi Komponen SiLPA Tahun 2021-2025..... III.30
Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2024 s.d Tahun 2028..... III.31

Tabel 4.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025..... IV.1
Tabel 4.2. 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat..... IV.7
Tabel 4.3. Kegiatan Prioritas Utama (KPU)..... IV.8
Tabel 4.4. Daftar Program Kerja Prioritas Nasional..... IV.10
Tabel 4.5. Arah Kebijakan serta Strategi Pembangunan Tahun 2027..... IV.13
Tabel 4.6. Prioritas Sasaran dan Indikator Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027..... IV.21
Tabel 4.7. Target dan Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2027..... IV.26
Tabel 4.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... IV.26
Tabel 4.9. Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... IV.28
Tabel 4.10. Sub Kegiatan dan Program Prioritas Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2027..... IV.31
Tabel 4.11. Mapping Sub Kegiatan Pendukung PHTC Tahun 2027..... IV.85
Tabel 4.12. Mapping Sub Kegiatan Pendukung 14 Program Unggulan Daerah Tahun 2027..... IV.98
Tabel 4.13. Mapping Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2027..... IV.105
Tabel 4.14. Mapping Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2027..... IV.117
Tabel 4.15. Mapping Sub Kegiatan Pendukung Tematik Pembangunan Nasional Tahun 2027..... IV.128
Tabel 4.16. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027..... IV.133
Tabel 4.17. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027..... IV.151
Tabel 4.18. Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara Pada RPJMN 2025-2029..... IV.190
Tabel 4.19. Arah Pengembangan Infastruktur Kewilayahan Kabupaten Lampung Utara..... IV.192
Tabel 5.1. Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2027..... V.2
Tabel 5.2. Rencana Dukungan Kabupaten Lampung Utara terhadap Pro-SN Tahun 2027..... V.5
Tabel 5.3. Rencana Dukungan Kabupaten Lampung Utara terhadap Tematika Pembangunan Tahun 2027..... V.15
Tabel 5.4. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita Tahun 2027..... V.19
Tabel 5.5. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027..... V.40
Tabel 5.6. Sinkronisasi Program Unggulan Provinsi Lampung Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... V.77
Tabel 5.7. Sinkronisasi Program Prioritas Pendukung Tujuan dan Sasaran Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027..... V.92
Tabel 5.8. Sinkronisasi 8 Program Hasil Terbaik Cepat Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027..... V.179
Tabel 5.9. Sinkronisasi 14 Program Unggulan Daerah Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027..... V.199

Tabel 5.10. Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara Tahun 2027. V.213
Tabel 5.11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara Tahun 2027..... V.216
Tabel 6.1. Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... VI.2
Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... VI.5
Tabel 6.3. Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027..... VI.7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana program prioritas daerah dalam RKPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dan substansi.

Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses menggunakan 4 (empat) pendakatan yaitu : 1). teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 2). partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 3). politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, 4). atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu : 1). holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2). Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; 3). Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahun 2027 merupakan periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 dan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sinkronisasi kebijakan dengan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakasanakan dalam penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten, serta pembangunan antar Daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi dilakukan oleh Daerah kabupaten dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Startegis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) sebagai bahan penyusunan RKPD.

RKPD yang sudah ditetapkan kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten. Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kemudian disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Renja Perangkat daerah dengan RKPD dilakukan penyelarasan melalui program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah diperlukan untuk tercapainya tujuan perencaan pembangunan daerah yaitu mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, sehingga diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 131);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 133);
35. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 134);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 Nomor 23).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

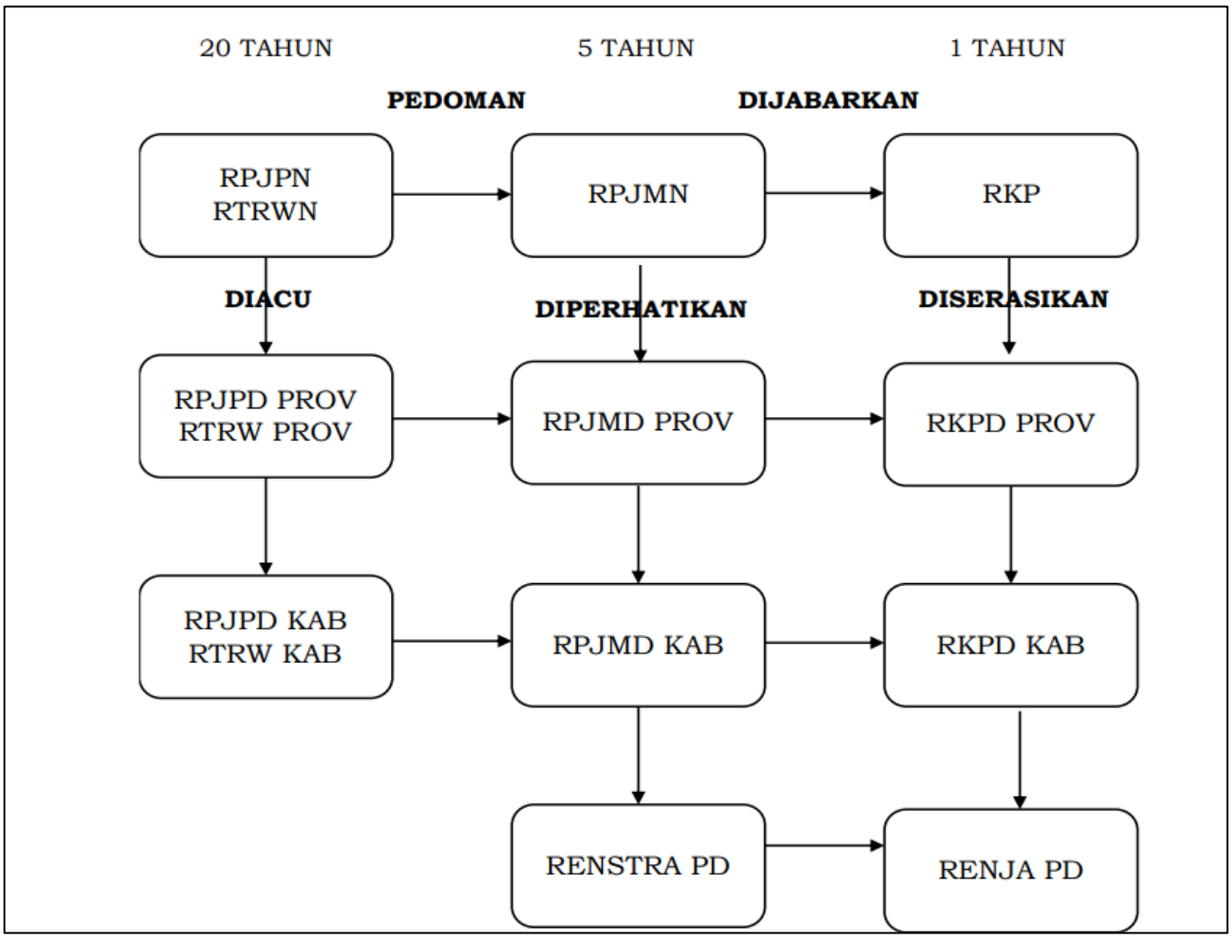
Sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten, serta pembangunan antar Daerah sehingga perlu :

1. Mempedomani RPJMD dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelarasakan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
2. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, agenda pembangunan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya;
3. Mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran

dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Skema hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Skema Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah



Sumber : Diolah, 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat penting dan memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Hubungan ini bersifat hierarkis dan saling melengkapi, memastikan konsistensi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut beberapa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya :

1. Hubungan RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD):
   - RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJPD memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan RKPD menjabarkannya menjadi program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terukur untuk jangka menengah (5 tahun).
   - RPJPD menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD. Prioritas pembangunan dan sasaran yang tercantum dalam RPJPD harus diintegrasikan ke dalam RKPD.

- Indikator keberhasilan dalam RPJPD akan dijabarkan lebih detail dan diukur melalui indikator kinerja dalam RKPD.

2. Hubungan RKPD dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah):
   - RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk satu tahun anggaran.
   - RPJMD berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah, sedangkan RKPD menjabarkan program dan kegiatan yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan tersebut.
   - Konsistensi antara RKPD dan RPJMD memastikan bahwa program yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan jangka menengah.
4. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah:
   - RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah harus menyesuaikan program dan kegiatannya dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD.
   - Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD di tingkat Perangkat Daerah.
   - RKPD memastikan sinkronisasi dan keselarasan program antar Perangkat Daerah, mencegah duplikasi dan inefisiensi.
5. Hubungan RKPD dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional:
   - RKPD harus selaras dengan RKP Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat.
   - Program dan kegiatan dalam RKPD harus mendukung prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.
   - Sinkronisasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan RKPD dijadikan sebagai :

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
2. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten. Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

1.5. Sistematika

RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dirumuskan latar belakang penyusunan RKPD berupa kondisi yang mendasari disusunnya RKPD; mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD serta disusun dengan menggunakan kaidah penyusunan produk hukum; menjelaskan secara singkat hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMD Kabupaten, RKP Nasional, dan RKPD Provinsi, dan dokumen sektoral lainnya disertai gambar keterkaitannya; menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RKPD; serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan empat aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Adapun keempat aspek tersebut meliputi :
   a. Aspek Geografi dan Demografi;
   b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c. Aspek Daya Saing Daerah;
   d. Aspek Pelayanan Umum.
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
3. Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja daerah dan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan bahwa dokumen RKPD merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

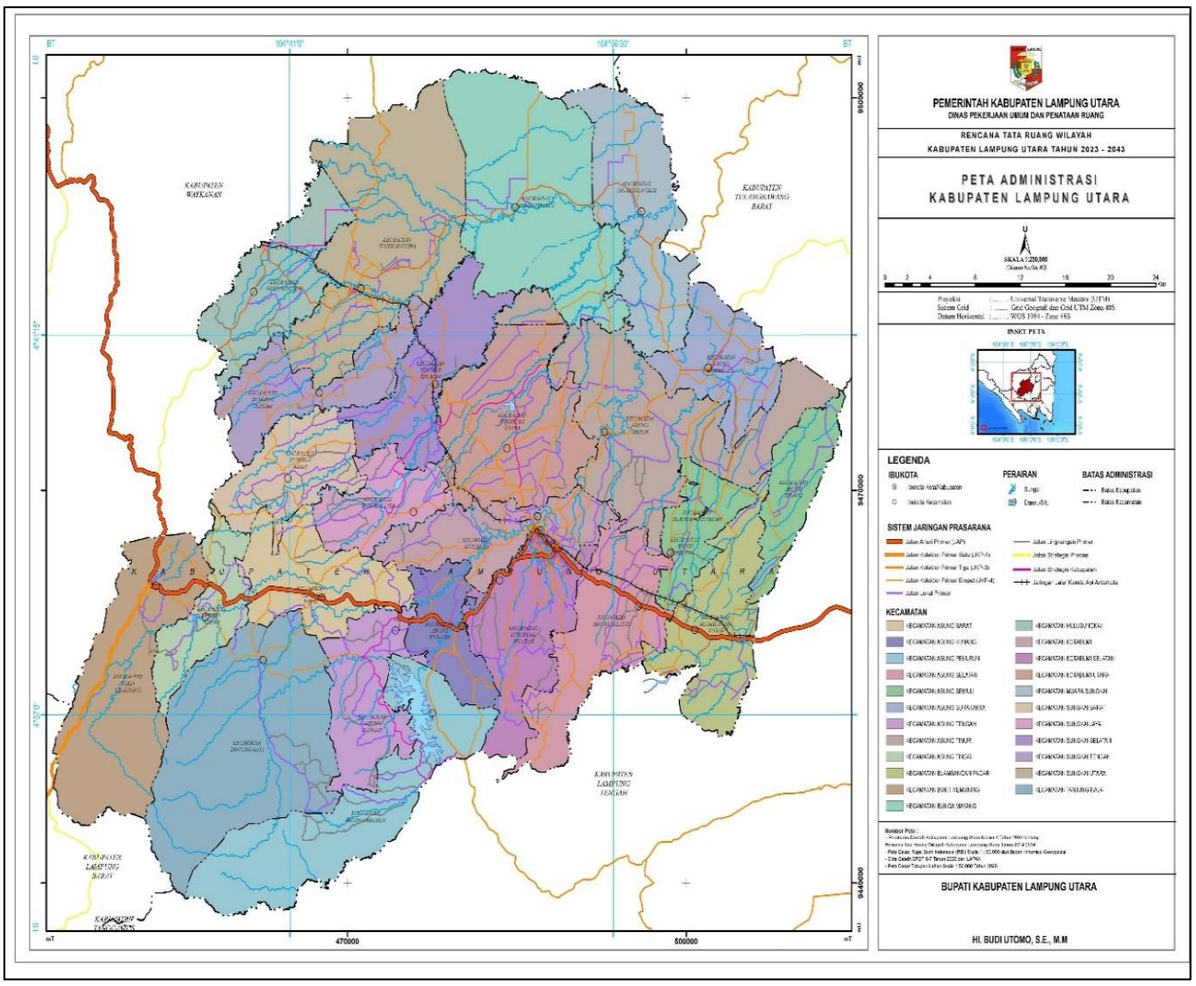
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Utara di Provinsi l.ampung merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kabupaten Lampung Utara harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara



Sumber : Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dengan terbentukanya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung maka ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kabupaten Lampung Utara mempunyai batas daerah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Utara terletak diantara 4,34˚ - 5,06˚ Lintang Selatan dan 104,30˚ – 105,08˚ Bujur Timur. Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.669,30 $km^{2.}$ Kabupaten Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 15 hingga 339 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan. Dikarenakan pada Kepmendagri tersebut tidak menampilkan secara rinci luas wilayah per Kecamatan (belum ada regulasi yang mengatur secara rinci mengenai luas wilayah kecamatan), maka untuk luas Kecamatan, berpedoman kepada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Administrasi Kecamatan Kabupaten Lampung Utara

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS TOTAL AREA (km2/sq.km)	PROPORSI	JUMLAH DESA/KEL
1	2	3	4	5
1	Bukit Kemuning	163,25	6,12	8
2	Abung Tinggi	56,21	2,11	8
3	Tanjung Raja	228,20	8,56	19
4	Abung Barat	89,74	3,36	14
5	Abung Tengah	78,59	2,95	11
6	Abung Kunang	51,67	1,94	7
7	Abung Pekurun	162,23	6,08	9
8	Kotabumi	81,25	3,05	13
9	Kotabumi Utara	143,38	5,38	8
10	Kotabumi Selatan	100,40	3,76	14
11	Abung Selatan	110,31	4,14	16
12	Abung Semuli	100,89	3,78	7
13	Blambangan Pagar	100,72	3,78	7
14	Abung Timur	192,50	7,22	12
15	Abung Surakarta	72,84	2,73	9
16	Sungkai Selatan	91,38	3,43	11
17	Muara Sungkai	123,52	4,63	11
18	Bunga Mayang	209,19	7,84	11
19	Sungkai Barat	74,41	2,79	10
20	Sungkai Jaya	58,78	2,20	9
21	Sungkai Utara	207,70	7,79	15

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS TOTAL AREA (km2/sq.km)	PROPORSI	JUMLAH DESA/KEL
1	2	3	4	5
22	Hulu Sungkai	89,91	3,37	10
23	Sungkai Tengah	80,13	3,00	8
	TOTAL	2.667,24	100,00	247

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Wilayah Kecamatan yang paling memiliki proporsi luas wilayah terbesar terhadap luas wilayah Kabupaten adalah Kecamatan Tanjung Raja, Blambangan Pagar, dan Abung Pekurun. Dan Kecamatan yang paling kecil proporsi luas wilayahnya terhadap luas wilayah Kabupaten adalah Kecamatan Sungkai Jaya, Abung Kunang dan Kotabumi.

2.1.1.2 Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara topografi dan kemiringan lereng bagian sebelah barat wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian perbukitan yang terdiri dari kemiringan lereng miring, terjal, dan sangat terjal dan memiliki ketinggian antara 1000–3000 mdpl di atas permukaan laut, yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan lindung. Wilayah ketinggian meliputi Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Abung Tengah, dan Kecamatan Abung Pekurun. Sedangkan wilayah lainnya Kabupaten Lampung Utara merupakan dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 - 900 mdpl dari permukaan laut, dan juga memiliki kemiringan lereng rata-rata datar hingga landai.

Tabel 2.2

Tinggi Wilayah Pusat Kecamatan Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan	0-250 Mdpl	250-500 Mdpl	500-1500 Mdpl	1500-3000 Mdpl	>3000 Mdpl
	Luas (Ha)				
1	2	3	4	5	6
Abung Barat	8.981,14				
Abung Kunang	5.171,52				
Abung Pekurun	6.895,04	5.268,95	4.060,20		
Abung Selatan	11.031,35				
Abung Semuli	10.089,31				
Abung Surakarta	7.287,69				
Abung Tengah	5.833,08	1.344,53	679,75		
Abung Timur	19.264,06				
Abung Tinggi	3.635,42	1.416,85	571,65		
Blambangan Pagar	10.070,60				
Bukit Kemuning	2.944,95	4.399,55	8.358,36	587,79	
Bunga Mayang	20.930,80				
Hulu Sungkai	8.982,71				
Kotabumi	8.131,83				
Kotabumi Selatan	10.047,18				
Kotabumi Utara	14.349,17				
Muara Sungkai	12.351,53				0,36
Sungkai Barat	7.445,97				
Sungkai Jaya	5.882,29				
Sungkai Selatan	9.144,98				
Sungkai Tengah	8.012,03	4,87			
Sungkai Utara	20.781,13				
Tanjung Raja	4.539,85	7.703,43	9.750,06	784,85	
Total	221.803,63	20.138,18	23.420,01	1.372,64	0,36

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Secara topografi, bagian barat Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian Bukit Barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal dengan ketinggian antara 450-1500 m dari permukaan laut dan kawasan tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan alam primer. Pada bagian timur Kabupaten Lampung Utara merupakan dataran rendah, yang sebagian besar tertutup vulkanis, dibagian ini merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Pada bagian utara Kabupaten Lampung Utara, terdapat lapisan sedimen vulkasnis dan celah (*fisaves errutium*) yang mengalami pelipatan di zaman *Pleitosin Tua* yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang di tandai dengan adanya singkapan endapan *tulfa masam.*

Tabel 2.3
Luasan Kemiringan Lereng Kabupaten Lampung Utara

Kelerengan	Luas
1	2
0-2%	62.883,78
2-5%	110.568,01
5-15%	69.813,06
15-40%	22.311,60
>40%	1.129,96
Total	266.720,84

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Lampung Utara, dibedakan menjadi 5 (lima) wilayah yaitu :

a. Wilayah datar dan agak landai dengan kemiringan lereng 0–8%
b. Wilayah agak miring atau bergelombang dengan kemiringan lereng 8–15%
c. Wilayah miring atau berbukit dengan kemiringan lereng 15-25%
d. Wilayah agak curam dengan kemiringan lereng 25-40%
e. Wilayah curam dengan kemiringan lereng >40%

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kabupaten Lampung Utara terletak dalam Cekungan Sumatera Selatan dan di bagian Selatan masuk dalam Lajur Bukit Barisan yang membatasi Cekungan Sumatera Selatan di sebelah barat yang umumnya ber-*facies volcanic.* Lajur ini merupakan *volcanic inner arc*, yang membantang sepanjang bagian tengah pulau Sumatera. Pada lajur ini terdapat cekungan-cekungan setempat yang dibatasi oleh patahan vertikal. Cekungan-cekungan setempat tersebut dikenal sebagai *interamontana basin* yang berperan sebagai salah satu cekungan sedimentasi endapan batubara.

Pada wilayah Lampung Utara bagian utara terdapat lapisan sedimen vulkanis dan celah (*fisaves errution*) yang mengalami pelipatan di zaman pleistosin tua yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai dengan singkapan endapan tulfa masam. Wilayah barat Kabupaten Lampung Utara adalah bagian luar dari Lajur Bukit Barisan yang merupakan *geantiklinal,* dengan *sinklinal* di sebelah timur punggung pegunungan. Punggung Bukit Barisan ini mengalami *dekormas* pada zaman tersier seperti patahan, intrusi serta pembentukan jalur gunung berapi. Gejala lainnya adalah depresi tektonik yang ditutupi oleh sedimen-sedimen vulkanis.

Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang. Kondisi geologi Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang berdasarkan fisiografi terbagi menjadi empat satuan yaitu *Middle and Upper Palembang Beds, Andesites And Tuffs*,

Undeterentiated Sedimentary Tuffs dan Lacrustrin Deposit Of Way Lima Basin And Aludepol. Satuan *Andesites And Tuffs dan Undeterentiated Sedimentary Tuffs* menempati daerah pengunungan dan perbukitan yang berada di hulu DAS Tulang Bawang. Satuan *Middle and Upper Palembang Beds dan Lacrustrin Deposit Of Way Lima Basin And Aludepol* menempati dataran rendah yang berada di DAS Tulang Bawang.

Tabel 2.4
Kondisi Geologi Kabupaten Lampung Utara

Formasi	Luas (Ha)
1	2
Aluvial	13.769,63
Formasi Air Benakat	743,23
Formasi Baong	127,52
Formasi Gumai	941,59
Formasi Hulusimpang	336,19
Formasi Kasai	3.792,87
Formasi Kikim	762,78
Formasi Lampung	21.463,62
Formasi Ranau	109.273,92
Formasi Talangakar	2.500,08
Granit Kapur	668,36
Gunungapi Dempo	40,01
Gunungapi Masurai	67.722,99
Gunungapi Sekincau	45.114,68
Total	266.720,84

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi yang besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan bagi sektor pertanian. Di sisi lain, potensi air permukaan dari sungai-sungai yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi maupun budidaya perikanan darat untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Potensi ini juga dapat dikembangkan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum dikelola secara optimal. Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa sungai dengan DAS yang cukup panjang. Sungai-sungai tersebut yaitu :

Tabel 2.5
Kondisi Hidrologi Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	2	3	4	5	6
1	Kali Caci	4,34	26	Way Campang Kanan	11,61
2	Kali Jaling	8,75	27	Way Campang Kiri	29,96
3	Tulang Buringlunik	7,28	28	Way Campangkeramat	13,55
4	Tulung Balak	0,00	29	Way Capan	2,48
5	Tulung Jago	7,69	30	Way Cupang	5,67
6	Tulung Kakan	5,36	31	Way Darau	4,36
7	Tulung kelok	3,03	32	Way Doni	1,31
8	Tulung Ketibung	5,30	33	Way Galing	13,94
9	Tulung Pies	4,51	34	Way Gitan	17,89
10	Tulung Putih	0,00	35	Way Hanakau	6,99
11	Tulung Sengring	2,79	36	Way Hilianmerbau	5,64
12	Way Abung	79,51	37	Way Ibuldalam	4,97
13	Way Agan	2,30	38	Way Jehan	11,24
14	Way Anak Pengubuan	8,44	39	Way Kapuan	5,38
15	Way Balak	11,61	40	Way Kawur	6,01
16	Way Banyuurip	7,84	41	Way Kebab	4,39
17	Way Batuantek	1,55	42	Way Kenyanyam	14,78

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	2	3	4	5	6
18	Way Bawang Kelasi	0,84	43	Way Kistang	15,63
19	Way Belabuh	5,48	44	Way Klawas	6,69
20	Way Benatau	0,00	45	Way Kongki	29,56
21	Way Besay	3,73	46	Way Kulur	8,67
22	Way Binjai	6,77	47	Way Kuning	18,37
23	Way Buah	12,75	48	Way Lianhelau	10,24
24	Way Buring	25,13	49	Way Mati	3,29
25	Way Campang	18,65	50	Way Melan	12,28
51	Way Melum	8,12	76	Way Sido	8,95
52	Way Melungun	56,49	77	Way Simpu	5,43
53	Way Mengeja	18,71	78	Way Suban	5,56
54	Way Merah	48,58	79	Way Sulur	2,00
55	Way Muarabalak	9,14	80	Way Sungkai	48,40
56	Way Muaratanjung	4,18	81	Way Sungkailunik	4,18
57	Way Nakau	4,11	82	Way Tabak	17,77
58	Way Papanlunik	12,14	83	Way Tahala	4,75
59	Way Pendingingan	1,81	84	Way Tambah	15,86
60	Way Pengubuan	27,48	85	Way Tambak	16,38
61	Way Pengubuhan	28,70	86	Way Terusan	50,41
62	Way Pereca	5,29	87	Way Tujok	13,41
63	Way Petanggis	7,01	88	Way Tulung	14,59
64	Way Pijang	2,96	89	Way Tulungbalak	5,89
65	Way Piyuh	5,08	90	Way Tulungbuluh	36,56
66	Way Puntung	0,99	91	Way Tulungbuyut	73,94
67	Way Putung	23,76	92	Way Tulungcercah	7,55
68	Way Raho	0,91	93	Way Tulungheni	14,12
69	Way Rarem	116,68	94	Way Tulunglayas	2,08
70	Way Repongmerbau	6,61	95	Way Tulungmas	101,55
71	Way Sabar	9,08	96	Way Tulungmaslunik	33,43
72	Way Sabuk	47,72	97	Way Tulungmili	9,19
73	Way Sekipi	15,89	98	Way Umban	9,33
74	Way Semuli	21,03	99	Way Urup	5,53
75	Way Sesah	10,59			
Total		1498,47			

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2.1.1.5 Jenis Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), di Kabupaten Lampung Utara terdiri atas tiga klasifikasi tanah utama, yaitu :

a. Tanah aluvial merupakan hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai. Penyebarannya terdapat di daerah dengan bentuk wilayah datar yang tersebar di daerah pantai bagian timur.
b. Tanah Andosol tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang berasal dari gunung berapi.
c. Granit adalah salah satu jenis batuan beku yang memiliki warna cerah, butirannya kasar, tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar, serta sedikit mineral mika dan amfibol.

Tabel 2.6

Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara

No	Jenis Tanah	Luas
1	2	3
1	Aluvial	122.454,35
2	Andosol	144.451,70
3	Granit	86,40

No	Jenis Tanah	Luas
1	2	3
Total		266.720,84

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Lampung Utara termasuk dalam daerah beriklim tropis, terdiri dari dua musim yaitu musim penghujan dari bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau dari bulan April sampai dengan September, secara bergantian sepanjang tahun, dengan jumlah hujan rata-rata 153,5 mm/bulan atau jumlah hari hujan rata-rata dalam sebulan adalah 12 hari/bulan. Suhu udara rata-rata minimum berkisar 22,0 ^{0}C, sedangkan suhu udara rata-rata maksimum berkisar 34,1 ^{0}C. Kelembaban udara rata-rata 78,3% dan tekanan udara rata-rata 1004,90-1007,30 mlbar. Sedangkan rata-rata kecepatan angin maksimum yang terjadi adalah sebesar 3 knot.

Tabel 2.7
Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara Kabupaten Lampung Utara

Bulan	Suhu Udara (˚C)			Kelembapan Relatif (%)
	Min	Max	Rata-rata	
1	2	3	4	5
Januari	23	31,8	26,2	81,7
Februari	22,6	34,0	26,6	79,3
Maret	22,6	33,4	26,9	80,1
April	22,6	33,6	27,1	79,3
Mei	23,4	34,8	27,4	80,3
Juni	21,8	33,2	27,2	82,2
Juli	20,6	33,2	27	80,9
Agustus	22,2	34,2	30,4	81,9
September	20,6	36,4	27,7	78,5
Oktober	21,7	36,4	28,7	82,3
November	22	36,8	28,2	82,4
Desember	22	34,6	27,2	82,7

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2.1.1.7 Kontur

Garis kontur atau disebut dengan garis tranches, garis tinggi, atau garis tinggi horizontal, adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah.

Tabel 2.8
Panjang Elevasi Garis Kontur Kabupaten Lampung Utara

Elevasi Kontur	Panjang (Km)
1	2
25-250	6.304,67
251-625	2.417,39
626-1000	1.420,67
1001-1450	865,15
1451-2050	321,81
Total	11.329,68

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki elevasi garis kontur yang dominan pada angka 25-250 dengan Panjang mencapai 6.304 km. Hal tersebut menandakan bahwa kontur tersebut dominan mengelilingi kontur yang lebih tinggi. Kontur tinggi Kabupaten Lampung utara dapat dilihat berada di Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Bukit Kemuning yang dapat ditafsirkan bahwa kecamatan tersebut memiliki sudut kemiringan atau lereng yang cukup curam. Berikut merupakan peta garis kontur di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.1.8 Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan pada suatu wilayah akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tutupan lahan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 2.9
Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara

Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	2
Badan Air	1.899,00
Hutan Lahan Kering Primer	27.495,14
Lahan Terbuka	615,16
Perkebunan Campuran	197.718,20
Permukiman	17.316,11
Pertanian Lahan Kering / Ladang	2.016,40
Rawa Pedalaman	555,61
Sawah Irigasi	13.468,52
Semak Belukar	5.629,92
Tambak	6,80
TOTAL	266.720,84

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Tutupan lahan Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh Perkebunan Campur dengan luas 197.718,20 Ha, kemudian diikuti oleh tutupan lahan permukiman dan Perkebunan. Sedangkan tutupan lahan terkecil di Kabupaten Lampung Utara adalah semak belukar rawa dengan luas 6,80 Ha.

2.1.1.9 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat 3.

Tabel 2.10
LP2B Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan	Luas (Ha)				
	Sawah Irigasi	Sawah Lebak	Sawah Tadah Hujan	Tegalan	Total
1	2	3	4	5	6
Abung Barat	63,37	134,11	11,69	18,31	227,49
Abung Kunang	77,35	40,90	18,26	7,63	144,15
Abung Pekurun	17,01	55,07	7,76	3,18	83,01
Abung Selatan	13,05	22,66	425,58	40,02	501,31
Abung Semuli	466,28	77,47	356,07	35,26	935,08
Abung Surakarta	2.348,47	37,92	18,89	39,39	2.444,67
Abung Tengah	571,05	18,43	33,67	72,02	695,17

Kecamatan	Luas (Ha)				
	Sawah Irigasi	Sawah Lebak	Sawah Tadah Hujan	Tegalan	Total
1	2	3	4	5	6
Abung Timur	3.356,33	19,95	361,29	166,41	3.903,97
Abung Tinggi	203,71	98,44		3,30	305,45
Blambangan Pagar	189,17	27,56	219,05	27,46	463,25
Bukit Kemuning	154,10	84,56		6,40	245,06
Bunga Mayang	25,54	193,44	243,99	36,27	499,24
Hulu Sungkai	18,00	7,25	171,87	22,93	220,05
Kotabumi	37,58	62,96	132,62	17,41	250,58
Kotabumi Selatan	15,88	34,58	54,15	21,09	125,70
Kotabumi Utara	367,96	51,75	197,53	28,87	646,12
Muara Sungkai	103,57	6,15	286,11	42,76	438,60
Sungkai Barat	14,05	29,74	109,18	7,61	160,58
Sungkai Jaya	221,07	89,39	71,64	51,57	433,67
Sungkai Selatan	174,99	62,07	82,38	35,68	355,11
Sungkai Tengah	69,87	91,51	126,21	22,16	309,74
Sungkai Utara	67,41	27,88	161,49	7,17	263,95
Tanjung Raja	519,12	73,25		13,99	606,35
TOTAL	9.094,94	1.347,04	3.089,44	726,90	14.258,31

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa LP2B Kabupaten Lampung Utara terbesar berada di sawah irigasi dengan luas 9.094,94 ha dari keseluruhan luas LP2B Kabupaten Lampung Utara yaitu 14.258,31 ha. Kemudian diikuti oleh sawah tadah hujan dengan luas 3.089,44 ha, sawah lebak dengan luas 1.347,04 ha, serta tegalan 726,90 ha. Luas lahan tersebut dapat berubah seiring beberapa faktor seperti terjadinya alihfungsi lahan pertanian ke non-pertanian, peningkatan jumlah penduduk, pengawasan yang minim, luas lahan yang berbeda, dan penggunaan lahan yang berbeda.

2.1.1.10 Biodiversitas

Biodiversitas menurut undang-undang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Biodiversitas dalam undang-undang tersebut dijelaskan sebagai keanekaragaman hayati yang mencakup keanekaragaman jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk di dalamnya keanekaragaman genetik dan ekosistemnya. Perlindungan dan pengelolaan biodiversitas merupakan salah satu bagian penting dari upaya pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki peraturan-peraturan teknis yang lebih rinci terkait dengan perlindungan biodiversitas, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati untuk Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati. Peraturan ini memberikan arahan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait dalam melakukan inventarisasi dan pengelolaan biodiversitas. Dengan adanya regulasi-regulasi ini, pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam upaya pelestarian biodiversitas, termasuk perlindungan terhadap ekosistem dan spesies-spesies yang ada di dalamnya, serta memastikan pengelolaan sumber daya hayati dilakukan secara berkelanjutan untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

A. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020, Kabupaten Lampung Utara memiliki total kawasan hutan seluas 34.807,45 Ha atau 13% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Utara. Berikut adalah distribusi Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Utara menurut fungsinya berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung terbaru.

Tabel 2.11
Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Utara

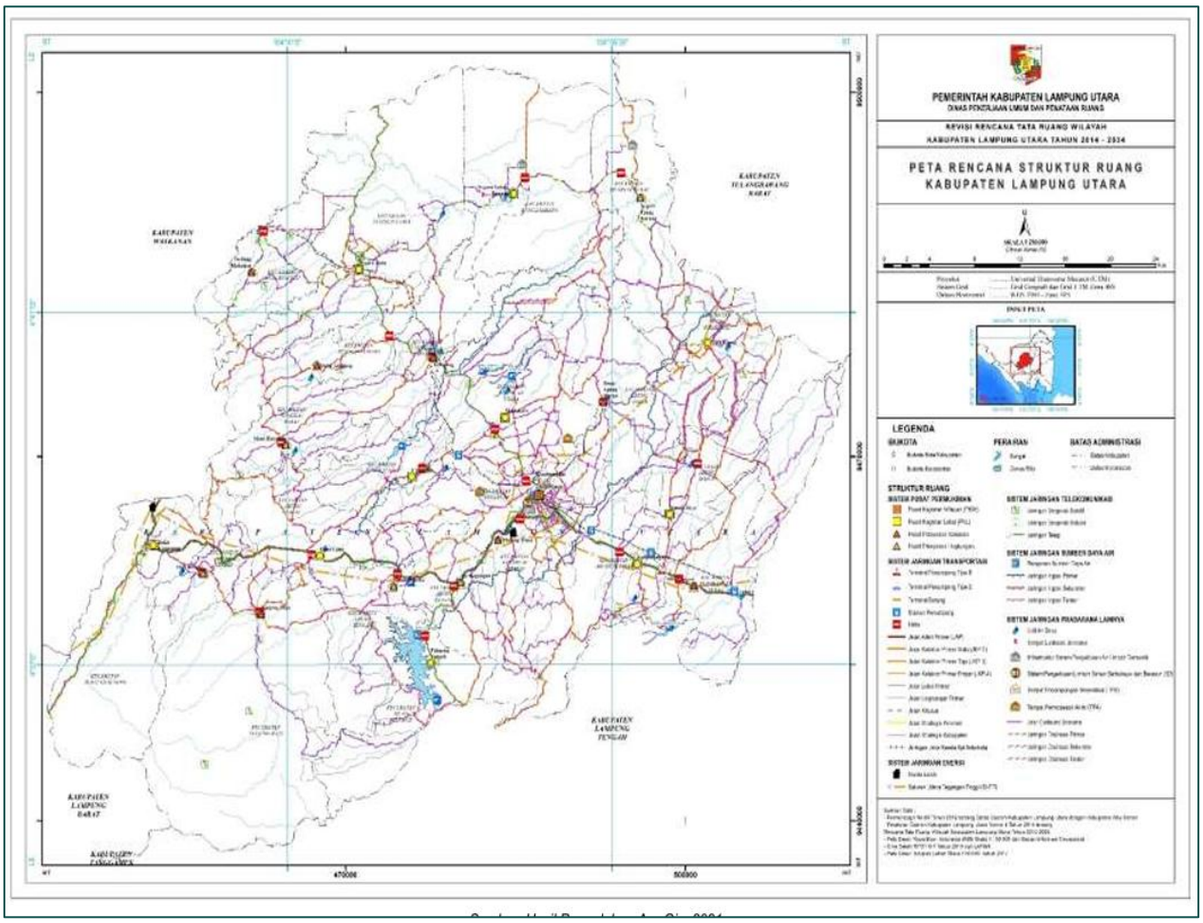
No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%	Uraian
1	Hutan Lindung	27.178,756	78,08	Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
2	Hutan Produksi Tetap	7.628,693	21,92	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2.1.1.11 Potensi Pengembangan Wilayah

Arah Pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, yang merujuk pada kebijakan RTRW bagian Struktur Ruang dan kebijakan Pola Ruang sebagai berikut :

Gambar 2.2
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber : Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046

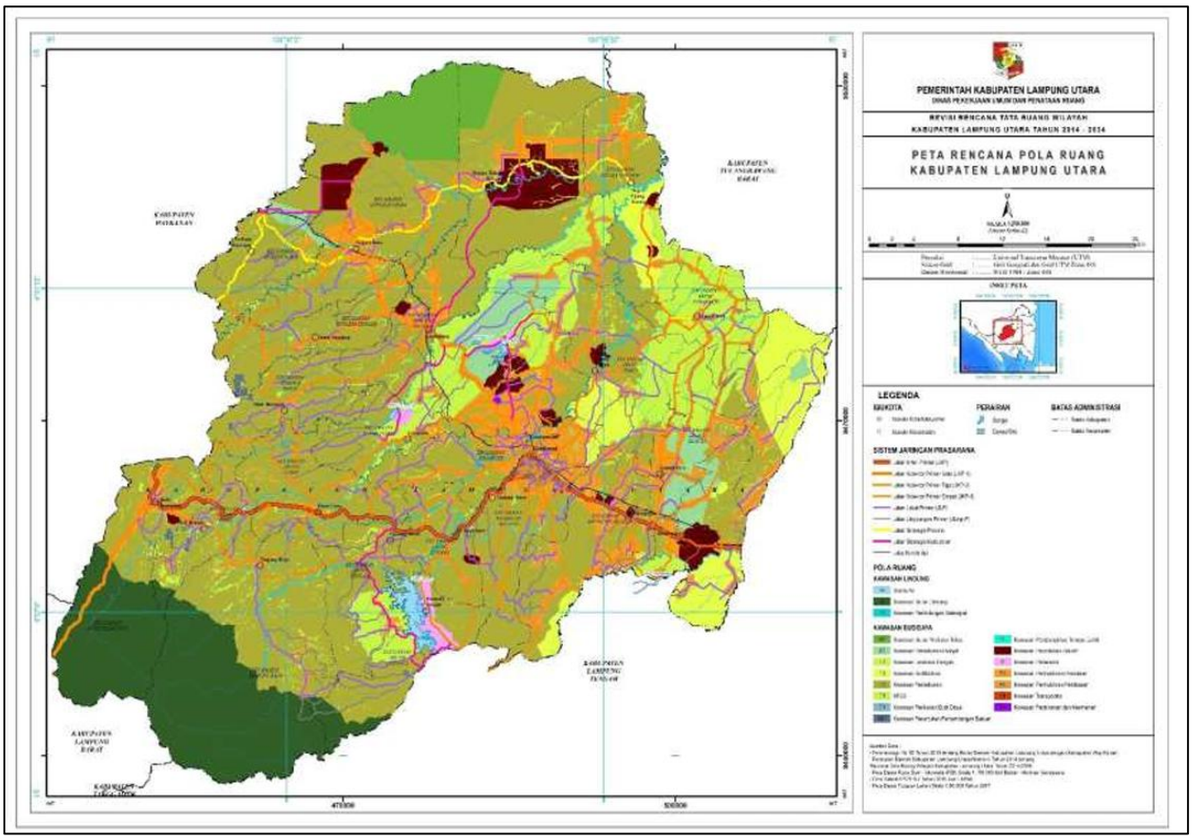
Beberapa arahan pembangunan yang akan dilakukan terhadap struktur ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 antara lain :

1. Pengembangan sistem jaringan transportasi dalam wilayah kabupaten bertujuan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan dan antar pusat-pusat permukiman dan mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan pusat-pusat permukiman meliputi :
   a. Jalan Umum meliputi Jaringan Arteri Primer (JAP-1), Jaringan Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (J Ling P) dan Jalan Strategis Provinsi (JSP).
   b. Jalan Khusus, meliputi jalan unit usaha PTPN VII Bunga Mayang di Kecamatan Bunga Mayang.
   c. Pengembangan Halte tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.
   d. Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Lampung Utara berupa terminal Penumpang Tipe B di Simpang Propau.
   e. Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Lampung Utara berupa terminal Penumpang Tipe C di Terminal Abung Barat, Terminal Abung Selatan, Terminal Abung Surakarta, Terminal Kotabumi dan Terminal Sungkai Utara.
   f. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi :
      (1) Jaringan jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi Jaringan jalur kereta api Jalur ganda (double track) Tanjung Karang – Kertapati;

(2) Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang, meliputi : a. Stasiun Blambangan Pagar; b. Stasiun Kalibalangan; c. Stasiun Candimas; d. Stasiun Kotabumi; e. Stasiun Cempaka; f. Stasiun Ketapang; g. Stasiun Negara Ratu; dan h. Stasiun Tulung Buyut.

2. Pengembangan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastuktur ketenagalistrikan yang merupakan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta gardu listrik Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
3. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Lampung Utara berupa sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air, seperti berikut ini:
   a. Sistem Jaringan Irigasi, meliputi : a. Jaringan Irigasi Primer, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Irigasi Way Abung; Saluran Induk Way Rarem; Saluran Irigasi Way Tulung Mas; Saluran Induk Way Tebabeng; Saluran Irigasi Way Merah; dan Saluran Irigasi Way Tirta Shinta. b. Jaringan Irigasi Sekunder, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Induk Sekunder Way Rarem; Saluran Irigasi Way Rarem; dan Saluran Irigasi Way Tulung Mas c. Jaringan Irigasi Tersier, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Irigasi Way Pengubuan; Saluran Irigasi Way Rarem; dan Saluran Irigasi Way Tulung Mas.
   b. Bangunan Sumber Daya Air, meliputi : a. Bendungan Rarem; b. Bendungan Tirta Shinta; c. Bendungan Tulung Mas; d. Bendungan Way Merah; e. Bendungan Way Tebabeng; f. Sabo DAM Way Galih; dan g. Sabo DAM Way Rarem.
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang berkesinambungan cukup diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi bisa terjaga untuk hari ini dan waktu-waktu mendatang. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari :
   a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. Sistem pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3);
   d. Sistem jaringan persampahan;
   e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. Sistem drainase.

Gambar 2.3
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046

Rencana pemanfaatan ruang mengacu pada rumusan-rumusan hasil analisis identifikasi kawasan lindung dan kesesuaian kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam rencana tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini deliniasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan rencana kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya. Adapun rencana pola ruang di Kabupaten Lampung Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rencana Pola Ruang

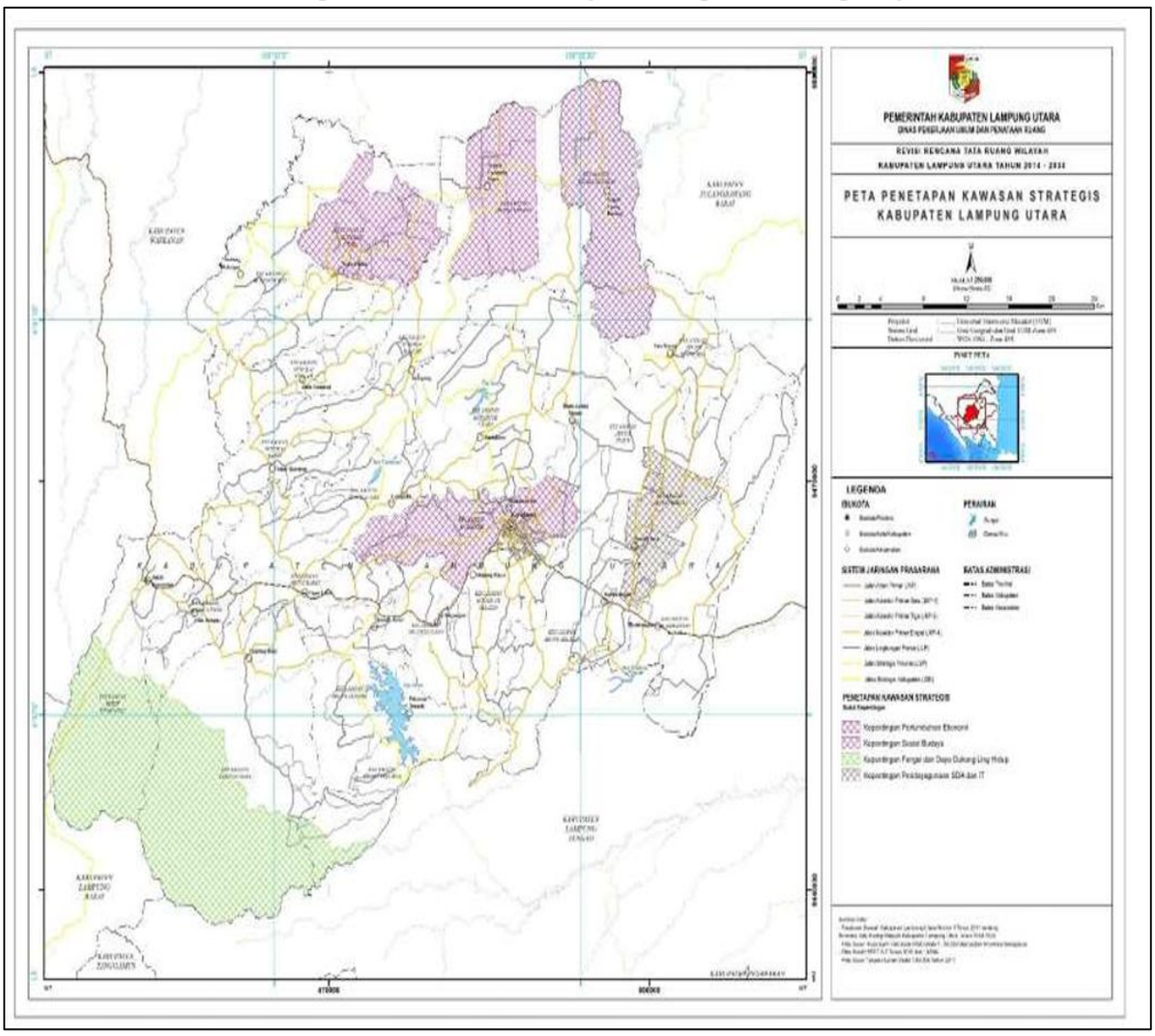
NO	RENCANA POLA RUANG	Luas (Ha)
A	Kawasan Lindung	
1	Badan Air	2.283,17
2	Kawasan Hutan Lindung	27.215,07
3	Kawasan Perlindungan Setempat	4.159,56
B	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	7.601,35
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	6.475,18
3	Kawasan Tanaman Pangan	15.936,36
4	Kawasan Hortikultura	12.810,63
5	Kawasan Perkebunan	126.834,96
6	KP2B	14.979,52
7	Kawasan Perikanan Budi Daya	93,58
8	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	24,25
9	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	431,6

NO	RENCANA POLA RUANG	Luas (Ha)
10	Kawasan Peruntukan Industri	7.344,57
11	Kawasan Pariwisata	1.209,29
12	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.590,95
13	Kawasan Permukiman Perkotaan	25.327,54
14	Kawasan Transportasi	53,16
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	106,53

Sumber : Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034.

Adapun kawasan strategis tersebut yakni kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Gambar 2.4
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Utara



Sumber : Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026-2046

1. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara berada di Kecamatan Kotabumi, Bunga Mayang, dan Sungkai Utara hal ini dikarenakan kecamatan tersebut merupakan pusat perdagangan dan jasa, serta industri di Kabupaten Lampung Utara. Kawasan

Pusat perdagangan dan jasa serta industri memiliki pengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi dan pengembangan wilayah secara progresif.

2. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Lampung Utara berada di Kecamatan Abung Semuli, mengingat kecamatan ini sebagai pusat agropolitan.
3. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Lampung Utara yang berada di Kecamatan Muara Sungkai.
4. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di Kecamatan Tanjung Raja, mengingat di kecamatan tersebut terdapat hutan lindung yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2.1.1.12 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Utara termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana alam tanah longsor, gempa, kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim.

A. Bencana Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai; aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.

Tabel 2.13
Resiko Bencana Banjir

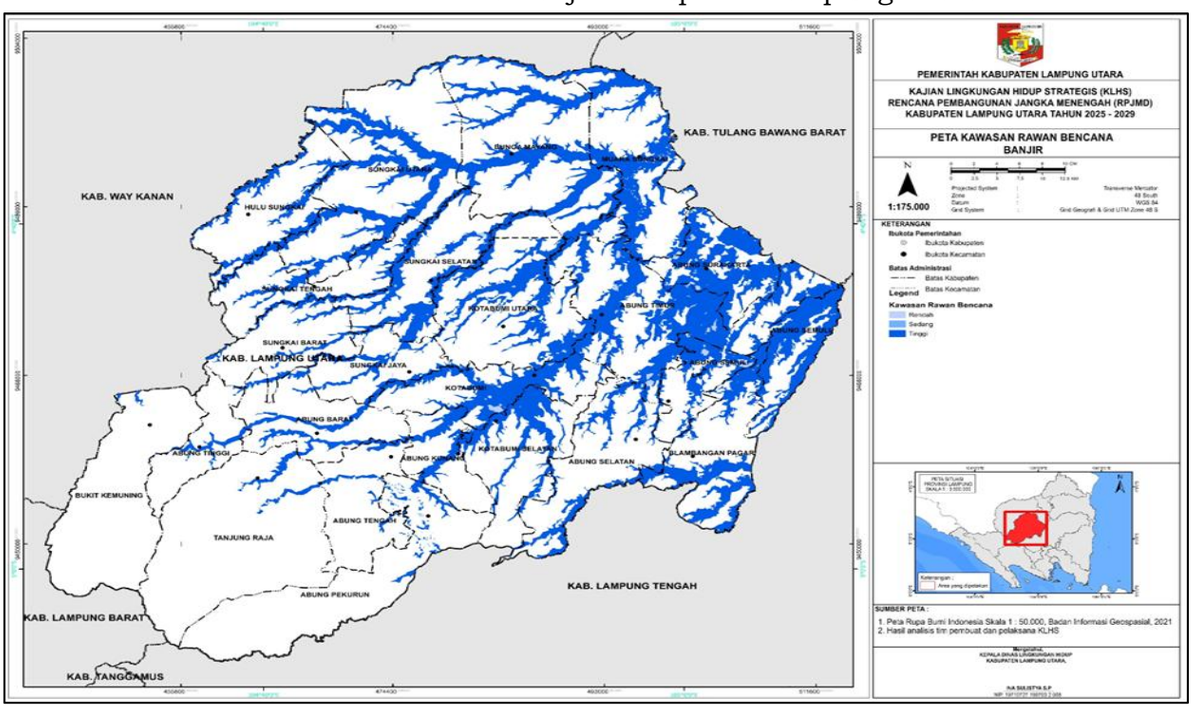
Kecamatan	Katagori			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Luas (Ha)
1	2	3	4	5
Abung Barat	10,54	-	1.473,25	1.483,79
Abung Selatan	-	-	1.182,87	1.182,87
Abung Tengah	103,08	-	613,36	716,43
Abung Timur	24,85	-	2.262,12	2.286,97
Abung Kunang	192,10	0,99	5.476,55	5.669,64
Abung Pekurun	145,24	3,97	4.606,43	4.755,64
Abung Semuli	28,63	-	569,05	597,68
Abung Surakarta	301,35	-	9.141,83	9.443,18
Abung Tinggi	-	-	434,63	434,63
Blambangan Pagar	52,69	-	3.802,16	3.854,85
Bukit Kemuning	-	-	89,67	89,67
Bunga Mayang	29,24	-	6.007,32	6.092,56
Hulu Sungkai	5,60	-	2.081,72	2.087,32
Kotabumi	89,92	-	3.448,36	3.538,27
Kotabumi Selatan	4,96	1,99	2.700,75	2.707,70
Kotabumi Utara	78,92	-	4.605,57	4.684,49
Muara Sungkai	122,57	-	5.071,28	5.193,85
Sungkai Barat	-	-	1.061,01	1.061,01
Sungkai Selatan	1,99	-	1.198,61	1.200,60

Kecamatan	Katagori			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total Luas (Ha)
1	2	3	4	5
Sungkai Tengah	38,90	-	3.067,59	3.106,50
Sungkai Utara	10,08	-	1.979,00	1.989,08
Sungkai Jaya	8,46	-	5.758,67	5.767,14
Tanjung Raja		-	551,36	551,36
Total	1.249,13	6,95	67.183,16	68.441,24

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data diatas resiko bencana banjir di Kabupaten Lampung Utara dominan tidak membahayakan hal tersebut ditandai dengan dominasi luas pada kategori resiko banjir tinggi, dengan total luas 67.183 Ha, diikuti dengan kategori rendah 1.249 ha dan yang terakhir kategori sedang 6,95 Ha Visualisasi data diatas tergambar pada peta sebagai berikut:

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lampung Utara



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

B. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.

Tabel 2.14
Luas Bencana Gempa Bumi

Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3
Rendah	225.142,83	84%
Sedang	4.424,40	2%
Tinggi	37.153,61	14%
Total	266.720,84	100%

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data diatas resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Utara dominan pada kategori rendah dengan luas 225.142 Ha (84%). Namun, perlu diketahui terdapat resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Utara dengan kategori tinggi dengan luasan yaitu 37.153 ha (14%) dan kategori sedang seluas 4.424 Ha (2%).

C. Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Berdasarkan data diatas resiko bencana kekeringan di Kabupaten Lampung Utara dominan pada kategori rendah dengan luas 52.721 Ha.

Tabel 2.15
Resiko Bencana Kekeringan

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4
Abung Barat	9,13	-	8.972,01
Abung Kunang	-	-	5.171,52
Abung Pekurun	1.071,56	-	15.164,19
Abung Selatan	2,25	-	11.037,86
Abung Semuli	13,52	-	10.083,93
Abung Surakarta	-	-	7.290,29
Abung Tengah	61,53	-	7.803,58
Abung Timur	124,69	-	19.140,39
Abung Tinggi	12,96	-	5.612,40
Blambangan Pagar	86,74	-	9.993,01
Bukit Kemuning	-	-	16.337,16
Bunga Mayang	107,82	-	20.827,58
Hulusungkai	-	-	8.997,87
Kotabumi	5,00	-	8.126,84
Kotabumi Selatan	-	-	10.047,90
Kotabumi Utara	148,94	-	14.100,23
Muara Sungkai	90,20	-	12.271,81
Sungkai Barat	3,03	-	7.444,12
Sungkai Jaya	34,42	-	5.847,87
Sungkai Selatan	68,63	-	9.076,25
Sungkai Tengah	9,95	-	8.009,16
Sungkai Utara	37,06	-	20.640,11
Tanjung Raja	5,61	8,14	22.823,59
TOTAL	1.893,03	8,14	264.819,67

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

D. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan, yang akan berdampak pada ketersediaan dan kebutuhan dasar masyarakat, mencakup antara lain produksi dan distribusi pangan, ketersediaan air dan energi. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas adaptasi secara menyeluruh dengan membangun ketahanan ekonomi, sosial, diversifikasi mata pencaharian masyarakat yang lebih tidak sensitif terhadap perubahan iklim, perbaikan tata ruang dan manajemen ekosistem.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilihat dari data indeks kerentanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada alamat Web *Sidik.menlhk.go.id* melalui data SIDIK, yang menunjukkan nilai indeks kerentanan terhadap perubahan iklim per wilayah. Nilai indeks kerentanan berkisar mulai dari 1 sampai dengan 5 dengan kelas dari Tidak Rentan sampai dengan Sangat Rentan. Distribusi indeks kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan standar nasional pada skala desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Adaptasi Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

No	Kecamatan	Indeks Kerentanan (Ha)			
		Sangat Rentan	Cukup Rentan	Agak Rentan	Tidak Rentan
1	Abung Barat		8.023,23		957,91
2	Abung Kunang		5.171,52		
3	Abung Pekurun		15.255,22	980,52	
4	Abung Selatan		11.006,49	18,79	14,83
5	Abung Semuli		8.666,29		1.431,15
6	Abung Surakarta		7.290,29		
7	Abung Tengah		5.948,15	1.916,95	
8	Abung Timur		17.874,96	821,95	568,17
9	Abung Tinggi		5.320,15	305,20	
10	Blambangan Pagar		9.954,47		125,28
11	Bukit Kemuning		16.297,24		
12	Bunga Mayang		15.595,78		
13	Hulu Sungkai	845,72	8.148,90	2,05	
14	Kotabumi		7.443,83		688,01
15	Kotabumi Selatan		9.313,95		733,95
16	Kotabumi Utara		12.067,47	2.281,71	
17	Muara Sungkai		11.124,38	391,88	
18	Sungkai Barat		6.496,50	16,60	934,06
19	Sungkai Jaya		5.573,04	309,26	
20	Sungkai Selatan		8.408,62	736,36	
21	Sungkai Tengah		6.964,44	1.007,02	47,65
22	Sungkai Utara	5,04	16.347,53		
23	Tanjung Raja	381,12	12.515,98		
	Total	1.231,88	230.808,43	8.788,29	5.501,00

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Menurut Indeks Kerentanan Perubahan iklim, Kabupaten Lampung Utara dominan masuk kedalam posisi indeks tiga dalam arti masuk kategori "**Cukup Rentan**". Perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemanasan global diperkirakan akan menciptakan pola-pola risiko baru. Beberapa wilayah akan terpengaruh secara serius oleh perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan berubahnya curah hujan menambah potensi banjir dan kekeringan. Indeks kerentanan iklim sangat rentan juga banyak ditemui di wilayah Kabupaten Lampung Utara, setidaknya terdapat 1.231,88 Ha berada pada kelas sangat rentan. Untuk itu arah pembangunan untuk wilayah tersebut harus mempertimbangkan akan potensi bahaya perubahan iklim. Berikut peta spasial Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan lklim di Kabupaten Lampung Utara.

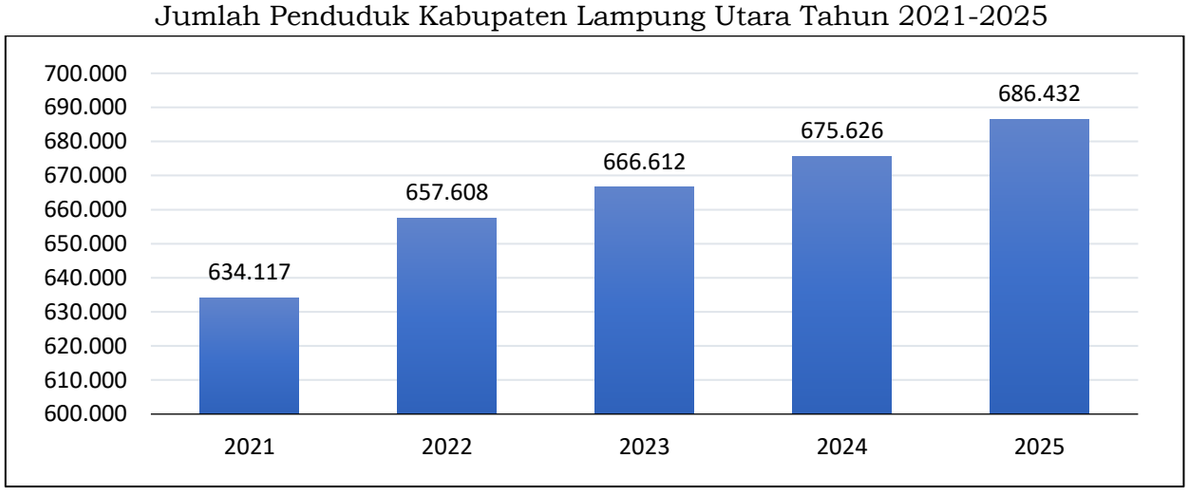
2.1.1.13 Demografi

2.1.1.13.1 Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Menurut BPS, karakteristik penduduk dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu: 1. Penduduk muda, apabila kelompok penduduk yang berusia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. 2. Penduduk tua, apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk. Pada piramida penduduk di atas, dalam 10 tahun tahun terakhir terlihat bahwa ada perubahan struktur menjadi meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu pada kelompok usia mulai dari 40 sampai dengan 54 tahun. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan angka yang sangat fluktuatif hal ini dikarenakan adanya perubahan basis data, sejak tahun 2022 BPS menggunakan basis data dari Catatan Sipil sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sementara di tahun 2021 basis masih menggunakan angka estimasi. Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2020–2024 sebagai berikut :

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

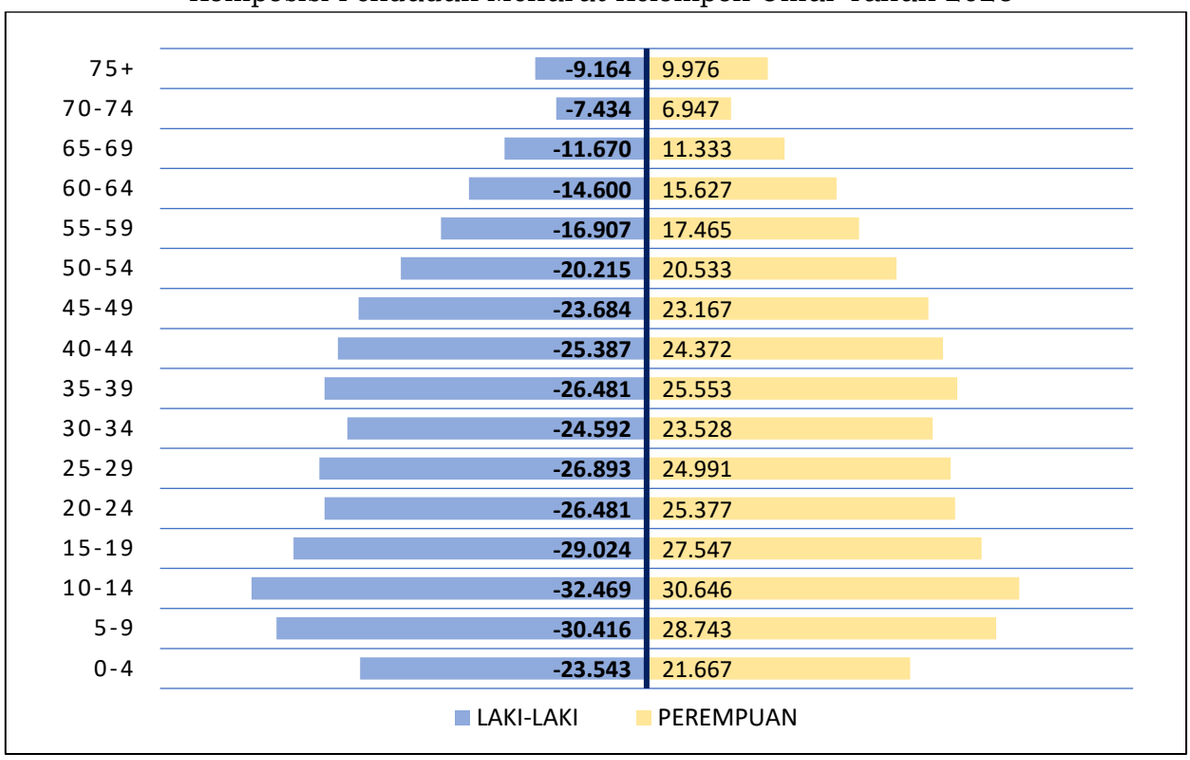


Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data jumlah penduduk Tahun 2021 sampai dengan 2025, terlihat adanya tren peningkatan yang relatif stabil setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk tercatat sebesar 634.117 jiwa, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2022 menjadi 657.608 jiwa atau tumbuh sekitar 3,70 persen. Kenaikan yang cukup tinggi pada periode tersebut menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi masuk, maupun pembaruan basis data kependudukan. Selanjutnya pada Tahun 2023 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 666.612 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,37 persen. Tren pertumbuhan yang lebih moderat berlanjut pada Tahun 2024 sebesar 1,35 persen dengan jumlah penduduk mencapai 675.626 jiwa. Hingga Tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebesar 686.432 jiwa atau meningkat 1,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2021–2025 terjadi penambahan penduduk sebanyak 52.315 jiwa atau sekitar 8,25 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, serta pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan penduduk ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kapasitas fiskal dan daya dukung wilayah.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025



Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, struktur penduduk menunjukkan komposisi yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 63.115 jiwa, diikuti kelompok umur 5–9 tahun sebanyak 59.159 jiwa dan 15–19 tahun sebanyak 56.571 jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peningkatan signifikan pada kelompok usia angkatan kerja sebagai dampak dari besarnya populasi usia remaja saat ini.

Kelompok usia produktif (15–64 tahun) secara kumulatif memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas), sehingga menunjukkan potensi bonus demografi apabila dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sektor ekonomi produktif. Namun demikian, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, terutama pada kelompok 75+ yang mencapai 19.140 jiwa, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi lansia juga perlu menjadi perhatian.

Dari sisi jenis kelamin, komposisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang di hampir seluruh kelompok umur, meskipun pada kelompok usia lanjut perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan harapan hidup perempuan yang umumnya lebih tinggi. Struktur penduduk seperti ini menuntut kebijakan pembangunan yang adaptif, baik dalam penyediaan layanan pendidikan, penciptaan kesempatan kerja, penguatan layanan kesehatan, maupun perencanaan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Tahun 2021-2025

Tahun	Kelompok Umur			Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+	
1	2	3	4	5
2021	171.696	425.223	37.198	49,13

Tahun	Kelompok Umur			Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+	
1	2	3	4	5
2022	170.758	425.565	38.806	49,24
2023	172.050	437.380	44.430	49,49
2024	171.650	441.660	46.610	49,42
2025	167.484	462.424	56.524	48,44

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Pada tahun 2025, jumlah penduduk paling besar masih didominasi oleh Kecamatan Kotabumi Selatan sebanyak 74.602 jiwa dengan kepadatan penduduk 743 jiwa per Km² kemudian Kecamatan Kotabumi sebesar 58.816 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 724 jiwa per Km², dan Kecamatan Abung Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 56.347 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 511 jiwa per Km². Berikut sebaran jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 :

Tabel 2.18
Kondisi Umum Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Bukit Kemuning	45.860	2,33	6,68	281	103,3
2	Abung Tinggi	19.765	2,22	2,88	352	105,2
3	Tanjung Raja	35.068	2,17	5,11	154	105,3
4	Abung Barat	22.069	1,43	3,22	246	104,2
5	Abung Tengah	18.606	2,02	2,71	237	103,4
6	Abung Kunang	10.664	1,49	1,55	206	104,6
7	Abung Pekurun	13.697	2,03	2,00	84	104,9
8	Kotabumi	58.816	1,32	8,57	724	104,5
9	Kotabumi Utara	36.687	0,70	5,34	256	102,6
10	Kotabumi Selatan	74.602	1,61	10,87	743	101,0
11	Abung Selatan	56.347	1,49	8,21	511	104,3
12	Abung Semuli	29.286	2,66	4,27	290	104,0
13	Blambangan Pagar	21.022	1,26	3,06	209	104,3
14	Abung Timur	40.372	1,76	5,88	210	104,5
15	Abung Surakarta	30.900	1,20	4,50	424	102,2
16	Sungkai Selatan	24.718	1,21	3,60	270	102,6
17	Muara Sungkai	15.828	1,76	2,31	128	102,5
18	Bunga Mayang	35.151	1,60	5,12	168	103,4
19	Sungkai Barat	13.076	1,47	1,90	176	103,1
20	Sungkai Jaya	10.457	1,82	1,52	178	103,5
21	Sungkai Utara	38.636	1,32	5,63	186	103,7
22	Hulusungkai	15.645	0,33	2,28	174	104,6
23	Sungkai Tengah	19.160	1,63	2,79	239	104,1
LAMPUNG UTARA		686.432	1,60	100,00	257	103,5

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Struktur dan Laju PDRB Menurut Lapangan Usaha

Gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara sebelum (2019), semasa pandemi (2020) dan setelah pandemi COVID-19 (masa pemulihan) yaitu tahun 2021-2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari tabel terlihat bahwa proporsi atau kontribusi sektoral di PDRB ADHB dalam 6 (enam) periode tersebut cenderung tidak berubah. Hal ini dapat kita lihat dari besar rerata kontribusi sektoral sebelum COVID (2019) dengan besarannya setelah penurunan pandemi COVID-19, yaitu periode 2021-2025. Dalam tiga periode tersebut, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar, disusul oleh sektor industri pengoahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Tabel 2.19
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,60	35,49	33,68	32,00	32,28
2	Pertambangan dan Penggalian	3,50	3,39	3,38	3,21	3,14
3	Industri Pengolahan	13,70	13,34	13,18	13,52	13,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
5	Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
6	Kontruksi	8,37	8,40	8,43	8,73	8,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	13,82	14,54	14,86	15,09
8	Transportasi dan Pergudangan	5,42	6,05	7,56	8,31	8,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,13	1,21	1,21	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	4,75	4,76	4,82	4,87	4,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96	1,91	1,86	1,79	1,77
12	Real Estate	2,59	2,48	2,35	2,32	2,28
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,1	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,65	3,37	3,49	3,36
15	Jasa Pendidikan	3,77	3,58	3,5	3,54	3,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	0,96	0,95	0,96	0,92
17	Jasa Lainnya	0,70	0,85	0,94	0,97	0,96
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara yang diukur berdasarkan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 35,60 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan bertahap menjadi 32,28 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan proporsi, sektor ini tetap menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB, yang menunjukkan karakteristik ekonomi daerah yang masih berbasis agraris.

Di sisi lain, sektor tersier menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang naik dari 13,41 persen pada tahun 2021 menjadi 15,09 persen pada tahun 2025, serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang meningkat signifikan dari 5,42 persen menjadi 8,34 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya aktivitas distribusi barang dan jasa serta meningkatnya mobilitas ekonomi masyarakat.

Sektor Industri Pengolahan relatif stabil dengan kontribusi sebesar 13,70 persen pada tahun 2021 dan 13,7 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sektor industri dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah masih perlu diperkuat guna mempercepat transformasi struktur ekonomi.

Secara umum, komposisi PDRB Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 memperlihatkan adanya pergeseran bertahap dari dominasi sektor primer menuju penguatan sektor tersier, meskipun transformasi struktural tersebut belum berlangsung secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor pertanian, peningkatan daya saing industri pengolahan, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta penguatan konektivitas wilayah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021–2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,39	1,35	0,15	-5,28	4,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,92	-0,14	4,13	3,30	4,39
C	Industri Pengolahan	3,81	4,68	0,75	8,39	6,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,21	0,18	5,83	6,78	7,1
E	Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,73	3,27	0,52	-0,69	2,18
F	Kontruksi	6,92	1,34	6,80	11,33	4,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,84	5,72	6,86	5,54	4,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,48	9,75	17,79	19,42	8,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,10	2,00	12,50	6,34	12,63
J	Informasi dan Komunikasi	7,74	6,17	9,60	9,90	5,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	-2,13	4,39	2,90	4,3
L	Real Estate	1,28	0,45	1,23	5,34	3,13
M, N	Jasa Perusahaan	1,03	3,10	4,07	8,62	4,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	-0,20	4,31	9,29	2,3
P	Jasa Pendidikan	1,14	3,17	4,59	2,90	3,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,32	-0,60	6,34	7,49	1,8
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-1,97	23,06	14,38	9,60	4,19
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,82	3,16	4,22	4,10	5,12

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang positif dan semakin menguat. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 2,82 persen pada tahun 2021 menjadi 5,12 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah secara bertahap. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh signifikan, yakni sebesar 17,79 persen pada tahun 2023 dan 19,42 persen pada tahun 2024, sebelum melambat menjadi 8,56 persen pada tahun 2025. Tingginya pertumbuhan sektor ini menunjukkan meningkatnya mobilitas barang dan jasa serta

perbaikan konektivitas wilayah yang berkontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 8,39 persen pada tahun 2024 dan tetap tinggi sebesar 6,66 persen pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi dan pengolahan yang berpotensi memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai tambah. Sementara itu, sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif namun relatif tinggi, dengan puncak pertumbuhan sebesar 11,33 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan investasi di daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh stabil pada kisaran 4–10 persen selama periode 2021–2025, yang mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas distribusi yang tetap terjaga. Demikian pula sektor Informasi dan Komunikasi konsisten tumbuh positif di atas 5 persen setiap tahun, menunjukkan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor dominan mengalami fluktuasi, dengan kontraksi sebesar -5,28 persen pada tahun 2024 sebelum kembali tumbuh 4,62 persen pada tahun 2025. Fluktuasi ini menunjukkan kerentanan sektor pertanian terhadap faktor cuaca, harga komoditas, dan dinamika pasar. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara menunjukkan pola yang semakin menguat dengan kontribusi pertumbuhan yang mulai didorong oleh sektor-sektor tersier dan industri pengolahan. Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap proses transformasi ekonomi daerah, meskipun penguatan sektor pertanian sebagai basis ekonomi tetap menjadi prioritas guna menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah. Ke depan, kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, percepatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan, penguatan konektivitas dan infrastruktur, serta pengembangan sektor jasa modern guna mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I Tahun 2026 (c-to-c), perekonomian Kabupaten Lampung Utara tumbuh sebesar 5,62 persen dibandingkan Triwulan I Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan relatif kuat di tengah dinamika perekonomian regional maupun nasional. Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara sebesar 5,62 persen berada di atas rata-rata beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, seperti Lampung Barat (5,49 persen), Tulang Bawang Barat (5,52 persen), Pesawaran (5,22 persen), Tanggamus (5,09 persen), Lampung Timur (4,86 persen), dan Pringsewu (4,83 persen). Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah beberapa daerah lain seperti Lampung Selatan (5,89 persen), Lampung Tengah (5,88 persen), Pesisir Barat (5,84 persen), Mesuji (5,73 persen), Bandar Lampung (5,72 persen), Way Kanan (5,71 persen), Metro (5,71 persen), dan Tulang Bawang (5,67 persen).

Dari 15 kabupaten/kota yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2026, Kabupaten Lampung Utara menempati peringkat ke-8, yang menunjukkan posisi pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kelompok menengah atas di Provinsi Lampung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor-sektor ekonomi utama masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan nilai tambah perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62 persen tersebut mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi rumah tangga, serta kegiatan usaha masyarakat. Namun demikian, tantangan yang masih perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut semakin berkualitas dan inklusif melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sektor basis daerah, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Secara keseluruhan, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup baik dan lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten di Provinsi Lampung. Ke depan, diperlukan upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat sektor-sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

2.1.2.1.2 Struktur dan Laju PDRB Menurut Pengeluaran

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran tahun 2025, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 65,32%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Lampung yang mempengaruhi daya beli masyarakat pada konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 secara umum memiliki pengeluaran sebesar Rp. 966.828 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, 55,12 persen, atau Rp. 567.417 digunakan untuk komoditi makanan. Sementara sisanya Rp. 399.411 digunakan untuk komoditi bukan makanan. Dari pengeluaran yang dikeluarkan untuk komoditi makanan, pengeluaran untuk kelompok Makanan dan Minuman memiliki persentase terbesar. Kelompok ini memiliki persentase 11,53 persen. Di urutan berikutnya ada Rokok dengan persentase 10,30 persen dan Padi-padian 9,21 persen. Sisanya digunakan untuk komoditi makanan yang lain. Sementara untuk pengeluaran di komoditi non makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak berada di kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga, dengan persentase 23,32 persen dari total pengeluaran non makanan. Di urutan berikutnya adalah Aneka komoditas dan jasa dengan 8,71 persen.

Tabel 2.21
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s.d 2025

No	Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
		%	%	%	%	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,12	61,79	63,51	64,50	65,32
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,2	3,17	3,34	3,54	3,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,87	6,38	6,13	6,06	5,64
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,76	33,31	33,13	31,99	31,99
5	Perubahan Inventori	0,01	0	0,01	-0,02	-0,18
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-4,96	-4,66	-6,11	-6,07	-6,4
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara menurut pendekatan pengeluaran selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah

masih didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus mengalami peningkatan proporsi, dari 61,12 persen pada tahun 2021 menjadi 65,32 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih sangat ditopang oleh tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan peran daya beli masyarakat yang cukup dominan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dari 3,20 persen pada tahun 2021 menjadi 3,63 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren menurun dari 6,87 persen pada tahun 2021 menjadi 5,64 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin terbatasnya peran belanja pemerintah dalam mendorong permintaan agregat dibandingkan dengan komponen konsumsi masyarakat.

Pada sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih memberikan kontribusi cukup besar meskipun mengalami sedikit penurunan dari 33,76 persen pada tahun 2021 menjadi 31,99 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran investasi dalam mendorong ekspansi kapasitas produksi daerah perlu terus diperkuat guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan produktif.

Komponen perubahan inventori relatif kecil dan cenderung fluktuatif, sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa selama periode tersebut bernilai negatif dan cenderung meningkat defisitnya, dari -4,96 persen pada tahun 2021 menjadi 6,40 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi dan struktur produksi daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun memperkuat daya saing ekspor.

Secara keseluruhan, struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih bersifat *consumption driven economy*, dengan kontribusi investasi yang relatif stabil namun belum optimal, serta kinerja perdagangan luar daerah yang masih defisit. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan difokuskan pada penguatan investasi produktif, peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi komoditas unggulan, pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta peningkatan daya saing produk lokal guna memperbaiki kinerja neraca perdagangan antarwilayah. Dengan struktur pengeluaran yang lebih seimbang antara konsumsi dan investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara dapat menjadi lebih berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025

No	Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
		%	%	%	%	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,61	4,49	5,71	4,87	4,91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,58	2,59	9,93	11,26	6,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,48	-2,63	1,65	5,54	-1,68

No	Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
		%	%	%	%	%
1	2	4	5	6	7	8
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,18	2,46	3,84	1,23	3,97
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	PDRB	2,82	3,16	4,22	4,10	5,12

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar dalam struktur PDRB menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan positif, yaitu sebesar 1,61 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 5,71 persen pada tahun 2023, serta tetap terjaga pada kisaran 4,87–4,91 persen pada periode 2024–2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 9,93 persen dan 11,26 persen, sebelum melambat menjadi 6,61 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan kontraksi pada tahun 2022 sebesar -2,63 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar -1,68 persen. Hal ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal serta penyesuaian belanja pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sepanjang periode pengamatan, meskipun dengan kecenderungan fluktuatif. Pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 4,18 persen pada tahun 2021, melambat pada tahun 2024 menjadi 1,23 persen, dan kembali meningkat menjadi 3,97 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi mulai menunjukkan perbaikan, namun masih memerlukan penguatan untuk mendorong ekspansi kapasitas produksi secara lebih signifikan.

Secara umum, pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan, sementara peran investasi dan belanja pemerintah perlu terus dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

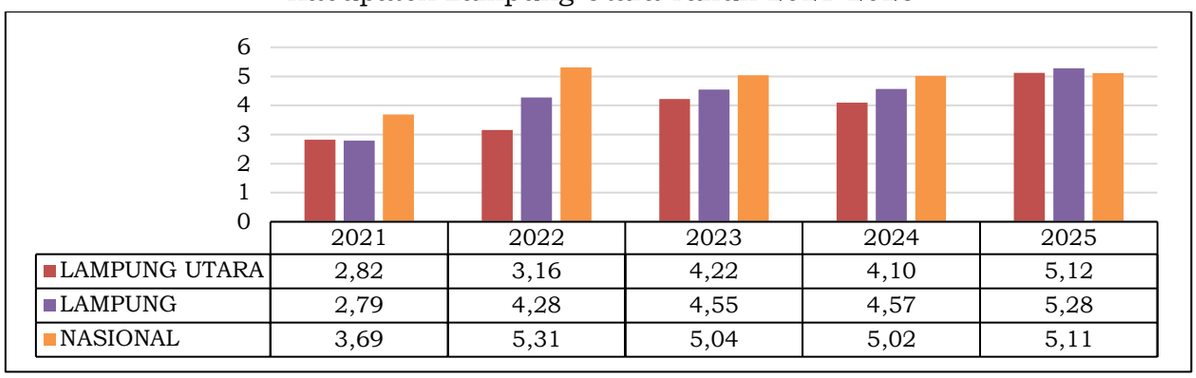
2.1.2.1.3 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB atau lebih populer dengan istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi perlu direlasikan dengan tingkat inflasi meskipun Kabupaten Lampung Utara tidak menjadi lokus perhitungan inflasi, tetapi untuk inflasi digunakan angka Kabupaten dengan karakteristik yang mendekati Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini yaitu Kota Bandar Lampung. Karena tingkat pertumbuhan yang lebih rendah daripada tingkat inflasi mengindikasikan bahwa kenaikan PDRB terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasanya. Namun perlu dicatat bahwa kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong

peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB ADHK
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	2,82	3,16	4,22	4,10	5,12
LAMPUNG	2,79	4,28	4,55	4,57	5,28
NASIONAL	3,69	5,31	5,04	5,02	5,11

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Konvergensi pertumbuhan ekonomi dianalisis melalui perbandingan selisih (gap) laju pertumbuhan antara Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung dan Nasional selama periode 2021–2025.

1. Konvergensi terhadap Nasional

Pada tahun 2021, selisih pertumbuhan antara Lampung Utara (2,82%) dan Nasional (3,69%) tercatat sebesar -0,87 persen. Pada tahun 2022, gap melebar menjadi -2,15 persen (3,16% berbanding 5,31%). Namun demikian, sejak tahun 2023 terjadi perbaikan selisih pertumbuhan, yaitu pada tahun 2023 gap -0,82 persen, pada tahun 2024 gap -0,92 persen dan pada tahun 2025 gap +0,01 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan Lampung Utara (5,12%) hampir setara bahkan sedikit melampaui Nasional (5,11%), yang menunjukkan terjadinya proses konvergensi (catching up) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, dalam periode 2021–2025 dapat disimpulkan bahwa terhadap Nasional terjadi pola konvergensi bertahap, khususnya setelah tahun 2022.

2. Konvergensi terhadap Provinsi Lampung

Terhadap Provinsi Lampung, selama periode 2021–2025 Lampung Utara secara konsisten tumbuh sedikit lebih rendah. Selisih pertumbuhan tercatat sebagai berikut : pada tahun 2021 +0,03 persen (sedikit lebih tinggi), pada 2022 -1,12 persen, pada tahun 2023 -0,33 persen, pada tahun 2024 -0,47 persen, dan pada tahun 2025 -0,16 persen. Meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi, selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan tren yang semakin mengecil hingga tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya proses konvergensi moderat terhadap Provinsi Lampung, meskipun belum sepenuhnya terjadi akselerasi yang mampu melampaui rata-rata provinsi secara konsisten.

Secara umum, selama periode 2021–2025 :

- Terhadap Nasional, Lampung Utara menunjukkan pola *catching up* (konvergen), terutama pada tahun 2025 ketika pertumbuhan hampir setara.
- Terhadap Provinsi Lampung, terjadi konvergensi parsial, dengan selisih yang semakin kecil namun belum sepenuhnya melampaui rata-rata provinsi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,62%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,58% dan nasional sebesar 5,61%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Utara tumbuh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, dengan selisih masing-masing sebesar 0,04 poin persen dan 0,01 poin persen.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga dan mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat provinsi maupun nasional. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas sektor-sektor unggulan daerah, khususnya sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang secara umum juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026.

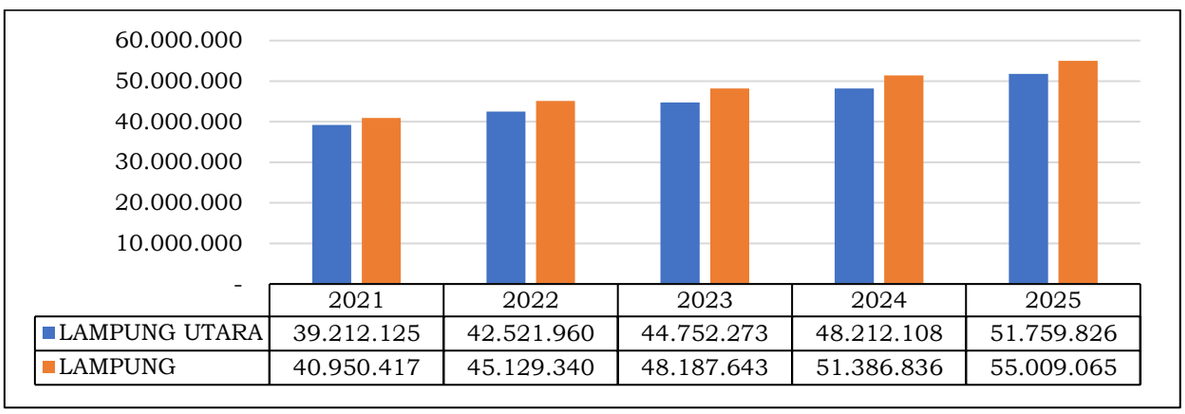
Dengan capaian yang berada di atas rata-rata Provinsi Lampung dan nasional, Kabupaten Lampung Utara memiliki modal yang kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan investasi, pengembangan UMKM, serta percepatan realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lampung Utara memiliki kapasitas untuk tumbuh sejalan dengan tren nasional, namun masih memerlukan akselerasi sektor unggulan dan penguatan investasi produktif untuk meningkatkan daya saing di tingkat provinsi. Dalam konteks target RPJMD 2025–2029 sebesar 6–7 persen, strategi pembangunan perlu difokuskan pada penciptaan sumber pertumbuhan baru (*new growth drivers*), peningkatan produktivitas sektor basis, hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan konektivitas dan iklim investasi agar proses konvergensi dapat berlanjut menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita adalah ukuran ekonomi yang menghitung nilai PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduknya. Ini memberikan gambaran tentang pendapatan rata-rata per orang di wilayah tersebut, dan sering digunakan untuk mengukur standar hidup atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi capaian PDRB per kapita Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2025 ditunjukkan pada gambar berikut.

Grafik 2.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung
Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	39.212.125	42.521.960	44.752.273	48.212.108	51.759.826
LAMPUNG	40.950.417	45.129.340	48.187.643	51.386.836	55.009.065

Sumber : BPS Lampung, 2026

Perkembangan PDRB per kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada periode 2021–2025. PDRB per

kapita Kabupaten Lampung Utara meningkat dari Rp.39.212.125 pada tahun 2021 menjadi Rp.51.759.826 pada tahun 2025. Secara nominal, capaian tersebut tumbuh rata-rata sebesar 7,2 persen per tahun. Setelah disesuaikan dengan inflasi rata-rata periode berjalan, pertumbuhan riil PDRB per kapita diperkirakan berada pada kisaran 3,7 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat terjadi secara nyata dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan harga.

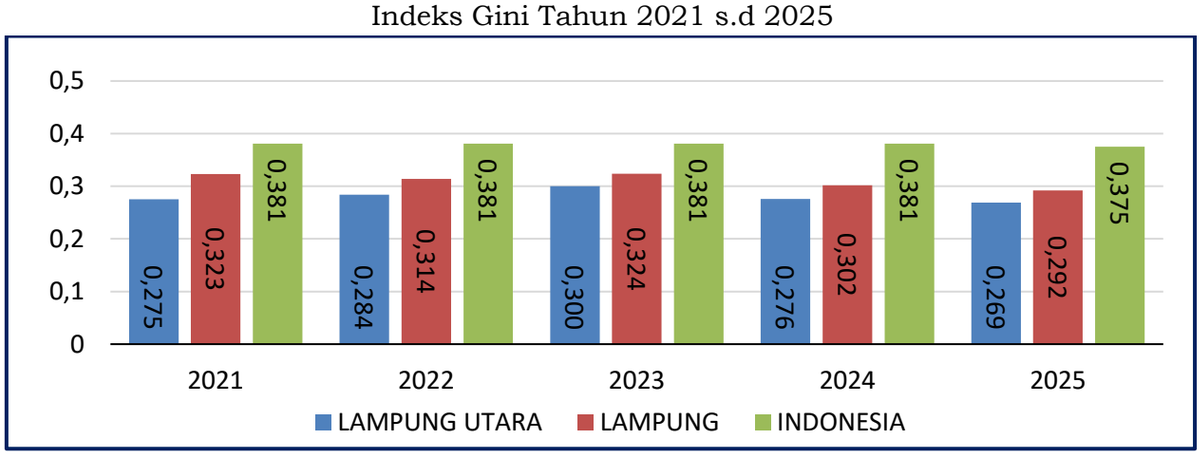
Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah capaian provinsi yang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp.55.009.065. Pertumbuhan riil Provinsi Lampung dalam periode yang sama diperkirakan sekitar 4,1 persen per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lampung Utara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemulihan ekonomi pascapandemi berjalan cukup stabil, percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah masih diperlukan guna mempersempit kesenjangan pendapatan regional.

Secara struktural, pertumbuhan PDRB per kapita mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor unggulan daerah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan investasi pada sektor bernilai tambah tinggi. Dengan strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan inklusif.

2.1.2.1.5 Rasio/Indeks Gini

Gini ratio atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Sebagai sebuah alat ukur, gini ratio digunakan agar bisa mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan.

Grafik 2.5
Indeks Gini Tahun 2021 s.d 2025



Sumber : BPS Lampung, 2026

Gini Ratio Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 adalah 0,300 dan pada tahun 2024 sebesar 0,276 berada di bawah rasio gini Provinsi Lampung dan Nasional hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Rasio gini dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan pendapatan yang membuat ketimpangan tersebut mengalami penurunan.Dalam kurun waktu sejak tahun 2011, gini ratio tertinggi pada tahun 2016 dan paling rendah pada tahun 2021, pada tahun 2021 pencapaian terbaik dikarenakan gini ratio mendekati 0 dapat didefinisikan bahwa kesetaraan semakin baik dan ketimpangan semakin kecil. Pada tahun 2023, kondisi gini ratio Provinsi Lampung sebesar 0,324, dan Lampung Utara masih lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi, Kabupaten dengan nilai gini ratio paling tinggi (ketimpangan paling tinggi) adalah Kota Bandar Lampung sebesar 0,381 dan yang paling rendah (ketimpangan paling rendah) adalah Tanggamus sebesar 0,256.

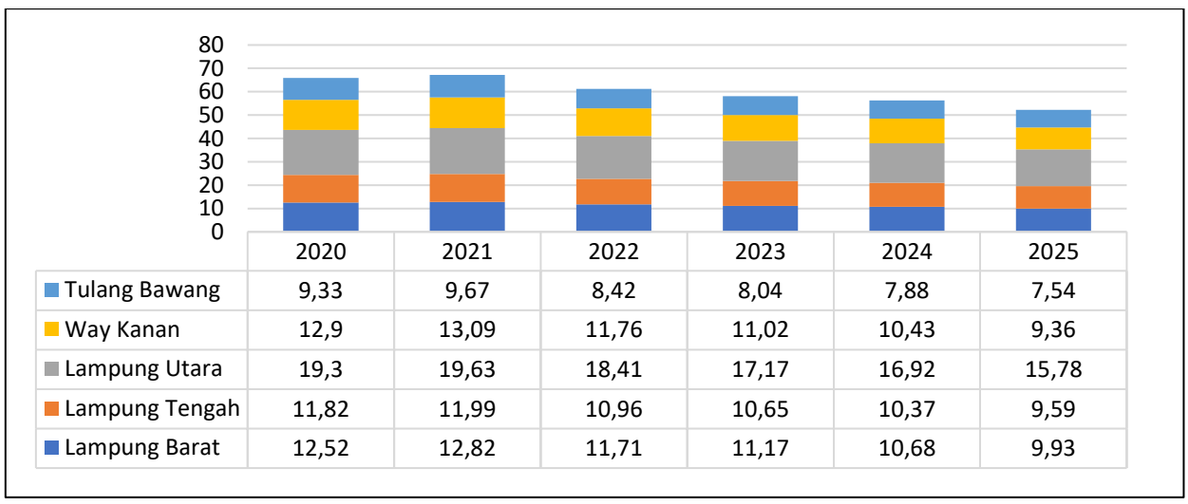
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang menjadi tantangan utama kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Kemiskinan disebut sebagai tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat (tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia. Disebut kompleks karena wujud kemiskinan sangat beragam dan faktor penyebabnya pun beragam; berbeda antar wilayah, budaya, gender, usia, generasi, dan variabel sosial ekonomi lainnya, yang umumnya saling terkait satu sama lain.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yaitu: GK=GKM+GKNM. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori Per kapita perhari. Sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

Grafik 2.6
Persentase Penduduk Miskin Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar
Tahun 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tulang Bawang	9,33	9,67	8,42	8,04	7,88	7,54
Way Kanan	12,9	13,09	11,76	11,02	10,43	9,36
Lampung Utara	19,3	19,63	18,41	17,17	16,92	15,78
Lampung Tengah	11,82	11,99	10,96	10,65	10,37	9,59
Lampung Barat	12,52	12,82	11,71	11,17	10,68	9,93

Sumber : BPS Lampung, 2025

Di Kabupaten Lampung Utara perkembangan persentase kemiskinan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 cenderung menurun, di tahun 2020 kemiskinan sebesar 19,30% dan angka ini masih jauh di atas Provinsi Lampung dan Indonesia, dan pada

tahun 2025 persentase kemiskinan menjadi 15,78%. Di atas dapat dilihat bila dibandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten sekitar bahwa kemiskinan Lampung Utara masih paling tinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 2.23
Penurunan Kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar

Kabupaten	2021	2025	Penurunan
Lampung Utara	19,63	15,78	-3,85
Lampung Barat	12,82	9,93	-2,89
Lampung Tengah	11,99	9,59	-2,40
Way Kanan	13,09	9,36	-3,73
Tulang Bawang	9,67	7,54	-2,13
Pesawaran	15,11	10,93	-4,18
Lampung Timur	15,08	12,15	-2,93

Sumber : BPS Lampung, 2025 (diolah)

Lampung Utara mencatat penurunan terbesar kedua setelah Pesawaran selama tahun 2021-2025. Namun secara level, angka kemiskinan 2025 masih menjadi yang tertinggi dibanding daerah pembanding. Selisih dengan kabupaten terendah (Tulang Bawang) masih sekitar 8,24 poin. Periode 2021–2025 merupakan fase pemulihan pascapandemi. Penurunan kemiskinan yang cukup tajam di 2022 dan 2023 menunjukkan dampak positif dari pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan PDRB per kapita riil, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, karena basis kemiskinan awal Lampung Utara relatif tinggi, maka meskipun laju penurunannya cepat, tingkat kemiskinan absolut masih tertinggal dibanding kabupaten lain.

Pada periode yang sama, PDRB per kapita Lampung Utara tumbuh riil sekitar 3–4 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Namun, elastisitasnya belum optimal. Artinya pertumbuhan ekonomi sudah berdampak pada penurunan kemiskinan, tetapi distribusi manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya merata.

Meskipun demikian, dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Utara masih relatif tinggi. Pada tahun 2025, sebagian besar kabupaten pembanding telah berada pada kisaran satu digit, sementara Lampung Utara masih berada pada level 15,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laju penurunan kemiskinan cukup progresif, tantangan struktural masih dihadapi, terutama terkait produktivitas sektor unggulan, kualitas kesempatan kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, penurunan kemiskinan perlu terus dipercepat melalui penguatan transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif. Arah kebijakan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja produktif, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa, serta penguatan integrasi program perlindungan sosial berbasis data presisi. Dengan strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga secara signifikan mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh

terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025 untuk garis kemiskinan, di tahun 2020 sebesar Rp. 441.045 dan di tahun 2025 menjadi Rp. 573.039. Tantangan dalam penanganan kemiskinan di daerah, salah satunya adalah pemenuhan data *By Name By Address* (BNBA) yang lebih akurat dalam upaya pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran di tengah terbatasnya sumber daya yang ada.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu Negara maupun antar Negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak, yang tersusun atas 4 (empat) komponen indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Tabel 2.24
Pertumbuhan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lampung Utara terhadap Capaian Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025

Tahun	Kab. Lampung Utara		Provinsi Lampung		Nasional	
	IPM	Pertumbuhan (%)	IPM	Pertumbuhan (%)	IPM	Pertumbuhan (%)
2021	69,78	0,28	71,25	0,30	73,18	0,51
2022	70,19	0,59	71,79	0,76	73,77	0,81
2023	70,78	0,84	72,48	0,96	74,39	0,84
2024	71,42	0,90	73,13	0,90	75,02	0,85
2025	72,28	1,20	73,98	1,16	75,90	1,17
Rata-Rata Pertumbuhan IPM		0,76		0,81		0,92

Sumber : BPS Lampung, 2025 (diolah)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM meningkat dari 69,78 pada tahun 2021 menjadi 72,28 pada tahun 2025 atau bertambah 2,50 poin selama lima tahun. Secara rata-rata, pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara mencapai 0,76 persen per tahun.

Meskipun mengalami peningkatan yang konsisten, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung (0,81 persen) maupun Nasional (0,92 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Utara terus membaik, namun kecepatannya relatif lebih lambat dibandingkan capaian di tingkat provinsi maupun nasional. Dari sisi level capaian, IPM Kabupaten Lampung Utara juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung maupun Nasional. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 72,28, lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung

sebesar 73,98 dan Nasional sebesar 75,90. Selisih tersebut masing-masing mencapai 1,70 poin terhadap provinsi dan 3,62 poin terhadap nasional. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan kualitas pembangunan manusia yang perlu dipercepat. Jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan yang semakin baik. Pertumbuhan IPM meningkat dari 0,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,20 persen pada tahun 2025, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan IPM tersebut sejalan dengan membaiknya beberapa indikator pembentuk IPM, seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, serta Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Namun demikian, peningkatan tersebut masih perlu dipercepat agar kesenjangan dengan provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan IPM yang konsisten setiap tahun. Namun, tingkat IPM maupun rata-rata pertumbuhannya masih berada di bawah Provinsi Lampung dan Nasional, sehingga diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan perkembangan IPM tersebut, beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Utara antara lain:

- Laju pertumbuhan IPM masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional sehingga proses konvergensi kualitas pembangunan manusia berlangsung relatif lambat.
- Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, dan perluasan akses pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.
- Permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya prevalensi stunting dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Daya beli masyarakat masih perlu diperkuat melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi bernilai tambah.
- Pemerataan akses terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masih perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan kelompok rentan.

Oleh karena itu, pembangunan tahun-tahun mendatang perlu difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga pertumbuhan IPM Kabupaten Lampung Utara dapat lebih cepat dan mampu mendekati rata-rata Provinsi Lampung maupun Nasional.

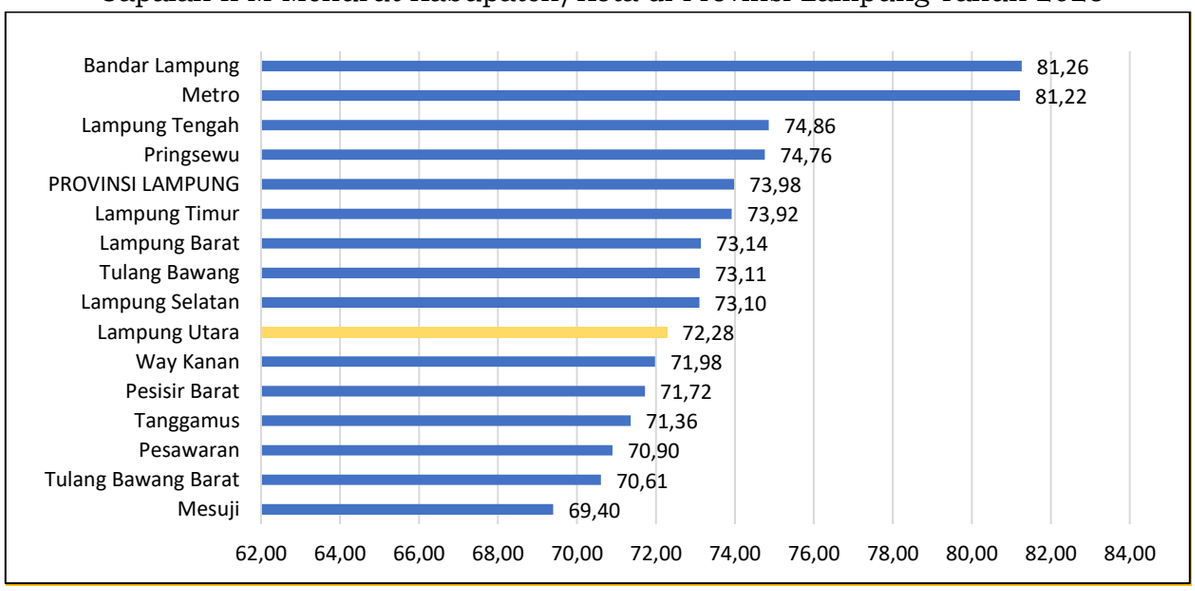
Tabel 2.25
Capaian Komponen Pembentuk IPM Kab. Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Komponen IPM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Harapan Hidup	73,54	73,73	73,91	74,12	74,41
2	Harapan Lama Sekolah	12,49	12,54	12,55	12,56	12,64
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,34	8,35	8,36	8,38	8,63
4	Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	8.737	8.951	9.374	9.837	10.160

Sumber : BPS Lampung, 2026

Dilihat dari capaian komponen IPM di atas, pada tahun 2024 Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Utara mencapai 74,12 tahun, yang artinya bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 74,12 tahun. Selanjutnya pada tahun 2025, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Utara meningkat menjadi 74,41 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Grafik 2.7
Capaian IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber : BPS Lampung, 2026

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 sebesar 12,56 tahun, yang artinya peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada tahun 2024 selama 12,56 tahun atau setara dengan Diploma I. Pada tahun 2025, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara meningkat menjadi 12,64 tahun. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 sebesar 8,38 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,38 tahun atau menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas VII sampai awal kelas VIII SMP. Pada tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Lampung Utara meningkat menjadi 8,63 tahun.

Terlihat akibat dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah menurunkan rata-rata pengeluaran per kapita riil masyarakat. Namun pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran per kapita riil masyarakat kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita riil masyarakat Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar Rp. 9.837.000, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp.10.160.000.

Dari tabel juga terlihat bahwa capaian komponen pembentuk IPM Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Dalam kondisi seperti ini maka, selain perlu peningkatan capaian pada setiap komponen, diperlukan program/kegiatan yang tepat untuk meningkatkan capaian IPM terutama pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga yang merupakan cerminan peradaban manusia di Kabupaten Lampung Utara ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni, kebudayaan serta olahraga daerah serta mempertahankan jati

diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lampung Utara diselenggarakan secara terintegrasi, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Utara.

Jumlah Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya pada tahun 2024 ada sebanyak sebanyak 35 kelompok. Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya yang ada di Kabupaten Lampung Utara cukup beragam, baik berupa kesenian tradisional (bermacam-macam kebudayaan daerah), maupun kesenian moderen. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Ketua	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	Cangget Budaya	Tari dan Musik	Dra. Nani Rahayu, MM	Kotabumi
2	Keratun Budaya	Tari, Musik Klasik, Teater	Dra. Maryantina	Kotabumi
3	Jyas Way Rarem	Tari dan Gitar Klasik	Sri Yusmi, SH	Kotabumi
4	Raden Ayu	Tari dan Gitar Klasik	Dra. Masyani	Kotabumi
5	Munggah Dabung	Gitar Klasik	Saiful Dermawan	Kotabumi
6	Betik Budaya	Tari, Musik, Vocal & Teater	dr. Amrin	Kotabumi
7	Sai Sikep	Tari	Nilawati	Kotabumi
8	Deni Budaya Kuda Lumping	Kuda Lumping	Didit	Kotabumi Utara
9	Kuda Lumping YLK	Kuda Lumping	S. Warto	Kotabumi Utara
10	Tunas Kota Bhirawa	Kuda Lumping	Mardi	Kotabumi Utara
11	PK3P	Kuda Lumping	Suryono	Kotabumi Kota
12	Mekar Arum Sari	Kuda Lumping	Sutardi	Kotabumi Kota
13	Pegon Margo Rukun	Kuda Lumping	Suparmin	Kotabumi Utara
14	Sanggar Merdeka	Teater dan sastra	Drs. Bambang Karyawan	Kotabumi
15	Ngest Budaya	Paguyuban (Kuda Kepang, Sintreng, Karawitan, Ketoprak)	Gitono	Kotabumi
16	Padepokan Yayasan "Raden Fatah"	Grup Musik Soneta, Kuda Kepang, Campur Sari	KH. Rahmat Hamdani	Kotabumi
17	Sanggar Seni Kreasi Lampung "Putih Jadi" Marga Beliuk	Kulintang, Tari, Syair, Kuda Kepang, Campur Sari, Klasik	Jemi Agus	Kotabumi
18	Pak likur Dawoh	Seni budaya Lampung	Samsi Eka Putra	Kotabumi Selatan
19	Dendeng Ghayo	Tari Cipta Lagu Daerah, Pencak Silat, Paduan Suara, Olahraga Keterampilan	Taryono	Abung Pekurun
20	Paguyuban Sintreng Tayub	Sintreng	Paidi	Sungkai Selatan
21	Resnada	Orkes Keroncong	Gandung Hatono, Bsc.	Kotabumi Kota
22	Sembayo Putra	Kuda Lumping	Kuswanto	Kotabumi Kota
23	Sanggar Seni "Bunga Cempaka"	Seni Suara, Musik Tari, Sastra dan lukis	drs. Hj. Suryati Sri Ayu	Sungkai Selatan
24	Sanggar Klasik "Puari Jaya"	Tari, Gitar Klasik, Pisa'an	Johansyah	Sungkai Jaya
25	Anggun Ria	Gitar Klasik	Sep Marga	Abung Timur
26	Kemalo Bumi Rayo	Musik Tradisional dan Tari	A. Taslim	Abung Timur
27	Banding Dalem	Gitar Klasik		Abung Timur
28	Krido Yakso	Kuda Lumping	Parasit	Abung Timur

No	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Ketua	Kecamatan
1	2	3	4	5
29	Dikir Serasan Sekudang	Zikir, Rukiyah	Ansyori Amin	
30	Bunga Tanjung	Seni Suara, Musik dan Tari	Nurhasanah	Tanjung Raja
31	Ngudi Roso	Teater Tradisional/ Ketoprak	Sugino	Kotabumi Kota
32	Sanggar Gampingan	Teater Tradisional & Perfilman	Septo Rio Basuki	Abung Selatan
33	Sanggar Koenang Tuho	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Abdul Hakim	Abung Kunang
34	Banding Agung	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Merwan	Abung Timur
35	Budaya Agung	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Johan	Abung Timur

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. LU, 2025

Kabupaten Lampung Utara masih memerlukan sarana/prasarana seni dan budaya yang lebih representatif, sebagai ruang ekspresi para seniman dan budayawan serta sentuhan – sentuhan spesifik dari berbagai pihak, sehingga lima tahun kedepan potensi seni dan budaya Lampung Utara, dapat memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang bernilai produktif atau komersial, dan dapat dijadikan salah satu alternatif sumber penghidupan, bagi masyarakat pelaku seni dan budaya. Berangkat dari kesadaran bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui olah raga, akan memicu dan memacu terciptanya sumber daya manusia yang produktif, jujur, sportif dan memiliki semangat serta daya juang dan daya saing yang tinggi. Maka Kebijaksanaan pembangunan olah raga di Kabupaten Lampung Utara, diarahkan meliputi mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga, pembinaan olah raga prestasi, pembinaan tenaga keolahragaan, pembinaan kelembagaan dan organisasi induk olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan. Perkembangan cabang olahraga, pelatih dan jumlah atlet yang dibina serta data sarana dan prasarana Olahraga, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Cabang Olahraga di Kabupaten Lampung Utara

No	Organisasi Cabang Olahraga	Jumlah Pelatih		Jumlah Atlet	
		Bersertifikat	Keseluruhan	Yang Dibina	Keseluruhan
1	2	3	4	5	6
1	Atletico (PASI)	2	25	25	38
2	Bola Basket (PERBASI)	4	-	-	-
3	Bola Volly (PBVSI)	2	23	-	-
4	Bulu Tangkis (PBSI)	1	23	-	-
5	Bridge (GABSI)	1	2	-	-
6	Catur (PERCASI)	-	3	-	-
7	Karate (FORKI)	20	50	400	1500
8	Panahan (PERPANI)	1	3	-	-
9	Panjat Tebing (FPTI)	2	7	8	13
10	Pencak Silat (IPSI)	-	27	15	475
11	Sepak Bola dan Futsal(PSSI)	25	63	75	800
12	Tenis Lapangan (PELTI)	3	3	15	36
13	Taekwondo (T I)	5	10	-	-
14	Tarung Derajat (KODRAT)	1	1	-	-
15	Tinju (PERTINA)	2	3	-	-
16	Drum Band (PDBI)	2	10	-	-
17	Renang (PRSI)	1	5	15	300
18	Wushu (W.I)	1	2	-	-
19	Hapkido (H I)	-	2	-	-
20	Kick Boxing (KBI)	-	2	-	-
21	Elektronik Sport (E-Sport)	-	2	-	-

No	Organisasi Cabang Olahraga	Jumlah Pelatih		Jumlah Atlet	
		Bersertifikat	Keseluruhan	Yang Dibina	Keseluruhan
1	2	3	4	5	6
22	Muaythai (MI)	-	1	-	-
23	Dancesport (IODI)	2	10	-	-
24	Binaraga dan Fitnes (PBFI)	1	2	13	13
25	Persatuan Wanita Olahraga (PERWOSI)	-	-	-	-
	J U M L A H	76	279	566	3175

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Dari data terakhir terdapat 17 lembaga keolahragaan cabang olah raga, yang ada dan berkembang di Kabupaten Lampung Utara. Demikian juga terdapat prasarana olahraga yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.28
Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara

No	Prasarana Olahraga	Jumlah
1	2	3
1	Gedung olahraga	7
2	Stadion	1
3	Lapangan Sepak Bola	156
4	Lapangan Tenis	12
5	Lapangan Futsal	9
6	Kolam Renang	5
7	Lapangan Bulu Tangkis	70
8	*Fitness centre*	2
9	Lapangan Bola Voli	96
10	Lapangan Bola Basket	16

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

2.1.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Lampung Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun demikian perkembangan rata-rata lama sekolah di Lampung Utara menunjukkan perkembangan yang cukup lambat jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Lampung Utara sebesar 7,64 tahun berada di bawah capaian Provinsi Lampung maupun Nasional. Angka 7,64 tahun artinya secara rata-rata penduduk Lampung Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,64 tahun atau menyelesaikan kelas VII/sampai awal kelas VIII SMP.

Tabel 2.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara terhadap Capaian Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kab. Lampung Utara		Provinsi Lampung		Nasional	
	RLS	Pertumbuhan (%)	RLS	Pertumbuhan (%)	RLS	Pertumbuhan (%)
2021	8,34	1,58	8,08	0,37	8,54	0,37
2022	8,35	0,12	8,18	1,24	8,69	1,76
2023	8,36	0,12	8,29	1,34	8,77	0,92
2024	8,38	0,24	8,36	0,84	8,85	0,91
2025	8,63	2,98	8,61	2,99	9,07	2,49
Rata-Rata Pertumbuhan RLS		1,01		1,35		1,29

Sumber : BPS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 8,34 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,35 tahun pada 2022, 8,36 tahun pada 2023, 8,38 tahun pada 2024, dan mencapai 8,63 tahun pada tahun 2025. Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,24%, dan pada tahun 2025 meningkat cukup signifikan sebesar 2,98%.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung mencapai 8,36 tahun dengan pertumbuhan sebesar 0,84%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 8,61 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,85 tahun dan meningkat menjadi 9,07 tahun pada 2025, dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa besaran pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan peningkatan capaian pendidikan di Kabupaten Lampung Utara belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, antara lain melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan, pemenuhan pembiayaan pendidikan, pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik, penarikan kembali (retrieval) anak putus sekolah, serta optimalisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Selain itu, diperlukan pula dorongan kepada masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

2.1.2.3.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025 (%)

No	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata pertumbuhan per tahun (%/tahun)
1	7 – 12 tahun	99,26	99,61	99,61	99,68	99,23	-0,03
2	13 – 15 tahun	94,74	97,90	97,87	95,60	96,49	+1,85
3	16 – 18 tahun	73,16	75,78	71,89	66,24	71,85	-1,7
4	19 - 23 tahun			13,25	12,43	15,86	+19,70

Sumber : BPS Kab. Lampung Utara, 2026

Kelompok usia 7–12 tahun menunjukkan kondisi yang sangat baik dan telah mendekati universal access pendidikan dasar. APS relatif stabil pada kisaran 99 persen selama periode 2021–2025 dengan penurunan sangat kecil sebesar 0,03 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Utara telah terjaga dengan baik dan sejalan dengan target pemenuhan layanan pendidikan dasar.

Namun demikian, masih terdapat sekitar 0,77 persen anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah sehingga penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tetap diperlukan. Kelompok usia 13–15 tahun mengalami peningkatan dari 94,74 persen menjadi 96,49 persen atau tumbuh 1,85 persen selama periode 2021–2025. Capaian ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama. Meski demikian, masih terdapat sekitar 3,51 persen penduduk usia SMP yang belum mengakses pendidikan sehingga upaya pencegahan putus sekolah dan peningkatan keberlanjutan pendidikan perlu terus diperkuat.

Kelompok usia 16–18 tahun menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan daerah. APS menurun dari 73,16 persen menjadi 71,85 persen atau turun 1,79 persen selama periode 2021–2025. Artinya, hampir 3 dari 10 penduduk usia SMA/SMK tidak lagi bersekolah. Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya risiko putus sekolah pada jenjang menengah atas yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, masuk ke dunia kerja pada usia muda, maupun keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Fenomena penurunan APS pada jenjang yang lebih tinggi juga merupakan pola umum yang terjadi dalam statistik pendidikan.

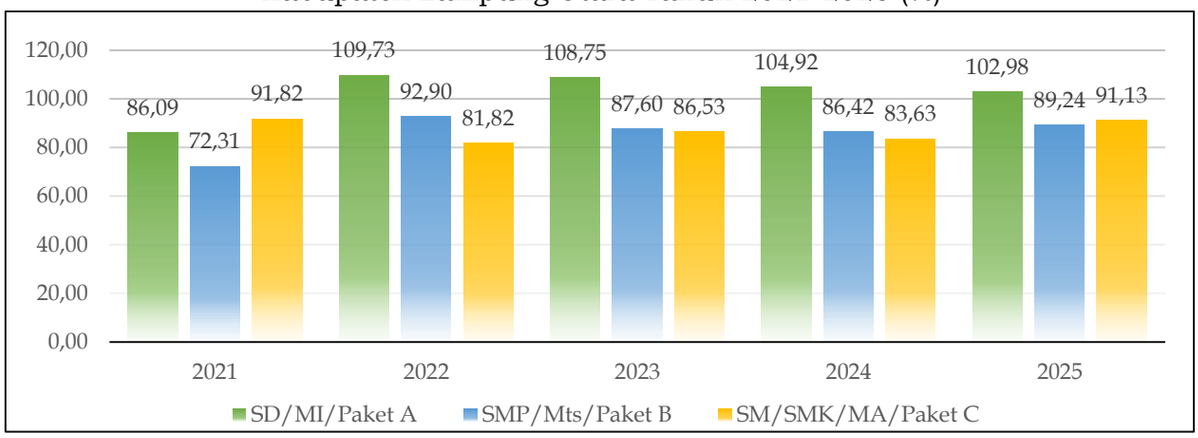
Kelompok usia 19–23 tahun menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. APS meningkat dari 13,25 persen pada tahun 2023 menjadi 15,86 persen pada tahun 2025 atau tumbuh 19,70 persen. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah karena hanya sekitar 16 dari 100 penduduk usia kuliah yang masih menempuh pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi.

2.1.2.3.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100% karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021–2025, secara umum tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah menunjukkan kondisi yang cukup baik pada jenjang SD/MI dan mulai membaik pada jenjang SMA/SMK/MA, namun masih memerlukan perhatian serius pada jenjang SMP/MTs yang relatif lebih rendah. APK merupakan perbandingan jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan usia terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Nilai APK yang melebihi 100 persen menunjukkan adanya peserta didik yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah yang semestinya pada jenjang tersebut.

Grafik 2.7.a
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025 (%)



Sumber : BPS Lampung, 2026

Jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan capaian yang sangat tinggi. APK meningkat dari 86,09 persen pada tahun 2021 menjadi 109,73 persen pada tahun 2022, kemudian relatif stabil di atas 100 persen hingga tahun 2025 sebesar 102,98 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tampung pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Utara telah mampu menjangkau hampir seluruh penduduk usia 7–12 tahun, bahkan menampung peserta didik di luar kelompok usia standar. Meskipun demikian, tren penurunan dari 109,73 persen pada tahun 2022 menjadi 102,98 persen pada tahun 2025 perlu menjadi perhatian agar tidak berlanjut pada penurunan akses pendidikan dasar. Jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan signifikan dari 72,31 persen pada tahun 2021 menjadi 92,90 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 86,42 persen pada tahun 2024 sebelum meningkat menjadi 89,24 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan menengah pertama belum optimal karena masih terdapat sekitar 10 persen penduduk usia 13–15 tahun yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan transisi dari SD ke SMP, risiko putus sekolah, serta perlunya penguatan program wajib belajar dan peningkatan akses pendidikan di wilayah pedesaan maupun kelompok rentan.

Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. APK sebesar 91,82 persen pada tahun 2021 menurun hingga 81,82 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 91,13 persen pada tahun 2025. Perbaikan pada tahun terakhir mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah atas. Namun demikian, capaian tersebut masih mengindikasikan bahwa belum seluruh penduduk usia sekolah menengah atas dapat mengakses pendidikan secara optimal. Tantangan utama yang perlu diatasi antara lain faktor ekonomi keluarga, jarak tempuh sekolah, serta peningkatan minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, capaian APK Kabupaten Lampung Utara tahun 2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar telah mencapai kondisi sangat baik, sedangkan pendidikan menengah pertama dan menengah atas masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Fokus pembangunan pendidikan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan keberlanjutan sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA/SMK, penanganan anak tidak sekolah (ATS), penguatan pendidikan kesetaraan, serta perluasan akses pendidikan yang merata guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan target pembangunan manusia daerah.

2.1.2.3.3 Angka Partisipasi Murni

Secara umum, capaian APM tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Utara telah berada pada tingkat yang sangat tinggi, Sementara peningkatan partisipasi pada jenjang menengah atas menjadi capaian yang paling menonjol. Namun demikian, penurunan APM pada jenjang SD serta stagnasi APM SMP perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pendidikan guna menjamin pemerataan dan keberlanjutan akses pendidikan bagi seluruh kelompok usia sekolah.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025(%)

No	Angka Partisipasi Murni (APM)	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata pertumbuhan per tahun (%/tahun)
1	SD/MI/Paket A	99,26	99,05	98,87	97,85	95,11	-1,05%
2	SMP/Mts/Paket B	78,26	78,62	80,28	82,21	78,64	0,12%
3	SM/SMK/MA/Paket C	56,57	62,19	69,34	65,27	70,98	5,84%

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2021–2025, APM jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan tren menurun dari 99,26 pada tahun 2021 menjadi 95,11 pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,05 persen per tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan proporsi penduduk usia sekolah dasar yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya, meskipun tingkat partisipasinya masih tergolong tinggi. Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APM berfluktuasi namun relatif stabil, meningkat dari 78,26 pada tahun 2021 menjadi 78,64 pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan 0,12 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang menengah pertama masih terjaga, meskipun diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Sementara itu, APM SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 56,57 pada tahun 2021 menjadi 70,98 pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan 5,84 persen per tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin membaiknya akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah atas, yang mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi sekolah bagi penduduk usia 16–18 tahun.

2.1.2.3.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.32
Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020-2025

No	Angka Harapan Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Harapan Lama Sekolah Lampura	12,48	12,49	12,54	12,55	12,56	12,64
	Pertumbuhan	0,08	0,08	0,40	0,08	0,08	0,64
2	Harapan Lama Sekolah Lampung	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78	12,79
	Pertumbuhan	0,16	0,63	0,08	0,24	0,08	0,08
3	Harapan Lama Sekolah Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21	13,3

No	Angka Harapan Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pertumbuhan	0,39	0,77	0,15	0,38	0,46	0,68

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa besaran pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 sebesar 0,64%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Kabupaten Lampung Utara pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan HLS Nasional sebesar 0,68% dan masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Provinsi Lampung sebesar 0,08% di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa dorongan peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan capaian di tingkat Nasional. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,64 tahun, yang menunjukkan bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal di Kabupaten Lampung Utara adalah selama 12,64 tahun atau setara dengan Diploma I. Capaian tersebut berada di bawah capaian nasional yang sebesar 13,30 tahun, dan Provinsi Lampung yang mencapai 12,79 tahun.. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian Harapan Lama Sekolah antara kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Secara umum, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun, dengan lonjakan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara masih tertinggal.

2.1.2.3.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Jumlah pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kabupaten Lampung Utara terbesar di tingkat SD/MI, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah untuk usia di atas 15 tahun baik yang bekerja maupun tidak bekerja (pengangguran terbuka).

Tabel 2.33
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Penduduk Usia 15 Keatas Bukan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)	Penduduk Usia 15 keatas Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (Jiwa)			Jumlah	Proporsi (%)
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja		
≤ Sekolah Dasar (SD)	63.936	115.391	5.424	120.815	184.751	37,76
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	52.697	60.826	2.949	63.775	116.472	23,80
Sekolah Menengah Atas (SMA)	42.601	98.627	8.018	106.645	149.246	30,50
Perguruan Tinggi	4.457	31.745	2.644	34.389	38.846	7,94
Jumlah	163.691	306.589	19.035	325.624	489.315	100

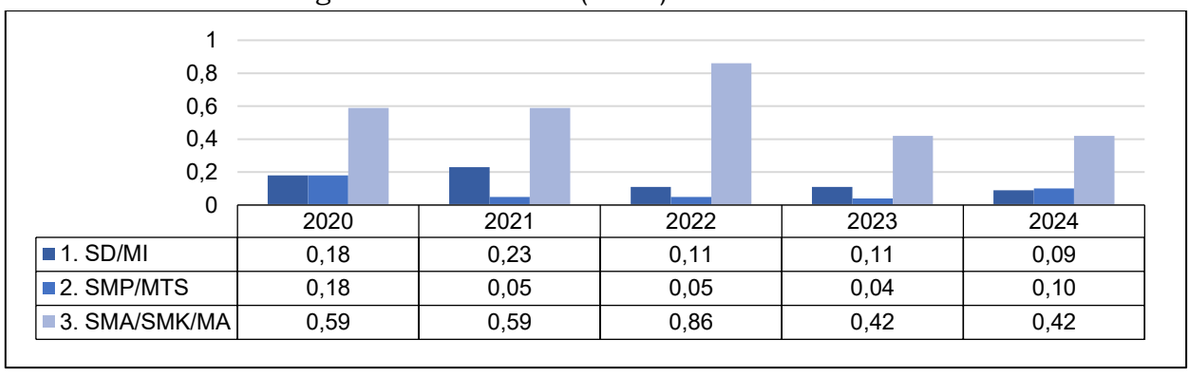
*) Data 2025 belum rilis

Sumber : BPS Lampung Utara, 2025 (diolah)

2.1.2.3.6 Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren penurunan.

Grafik 2.8
Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
1. SD/MI	0,18	0,23	0,11	0,11	0,09
2. SMP/MTS	0,18	0,05	0,05	0,04	0,10
3. SMA/SMK/MA	0,59	0,59	0,86	0,42	0,42

*) Data 2025 belum rilis

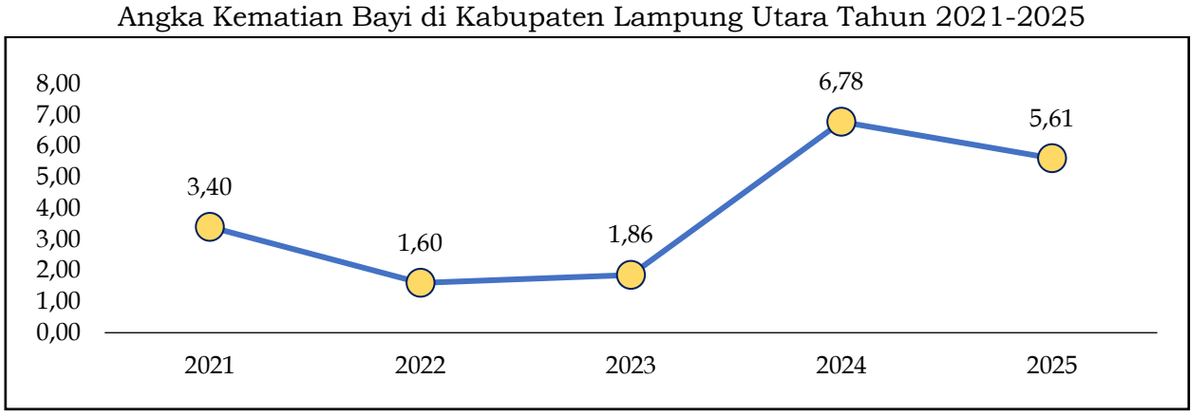
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, 2025 (diolah)

Dari 0,29% pada 2019 menjadi 0,09% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program pencegahan dan penanganan putus sekolah. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan upaya pencegahan untuk mencapai target pendidikan dasar yang lebih tinggi. Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren penurunan signifikan dari 2019 hingga 2023. Namun, terjadi sedikit peningkatan pada 2024 menjadi 0,10%. Penurunan sebelumnya mengindikasikan keberhasilan program pencegahan dan penanganan putus sekolah. Perlu evaluasi untuk mengetahui penyebab peningkatan pada 2024.

2.1.2.3.7 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Berdasarkan data Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian AKB mengalami fluktuasi yang cukup tajam. AKB turun signifikan dari 3,40 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 1,60 pada tahun 2022, kemudian sedikit meningkat menjadi 1,86 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga mencapai 6,78 per 1.000 kelahiran hidup, sebelum kembali menurun menjadi 5,61 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

Grafik 2.9
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara, 2026

Secara teknokratis, AKB merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat yang menggambarkan jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, status gizi, kondisi lingkungan, serta efektivitas sistem rujukan

kesehatan. Semakin rendah AKB, semakin baik kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah.

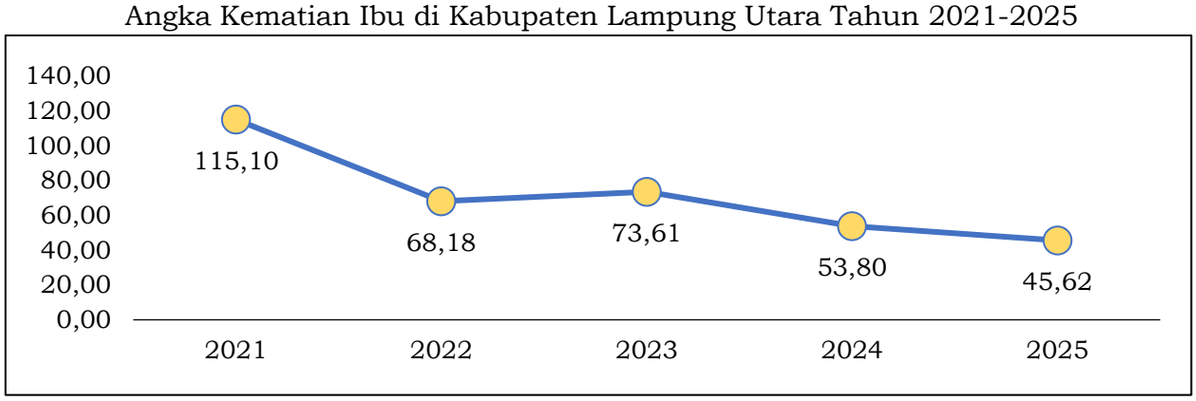
Jika dilihat dari tren lima tahun terakhir, Kabupaten Lampung Utara masih berada pada tingkat AKB yang relatif rendah. Namun lonjakan pada tahun 2024 menunjukkan adanya tekanan serius terhadap sistem pelayanan kesehatan bayi, terutama pada periode neonatal (0–28 hari) yang secara nasional merupakan penyumbang terbesar kematian bayi. Penyebab utama kematian bayi di Indonesia didominasi oleh prematuritas, gangguan pernapasan saat lahir (asfiksia), sepsis, dan kelainan bawaan. Penurunan AKB pada tahun 2025 menjadi 5,61 per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi mulai memberikan hasil, namun capaian tersebut masih perlu diwaspadai karena belum kembali ke level terbaik tahun 2022–2023. Dengan demikian, fokus kebijakan kesehatan daerah tidak cukup hanya mempertahankan penurunan angka, tetapi harus memastikan penurunan tersebut bersifat konsisten dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan kesehatan nasional dalam transformasi layanan primer dan target pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu memperkuat:

- Pelayanan antenatal terpadu bagi ibu hamil risiko tinggi;
- Persalinan di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan kompeten;
- Pelayanan neonatal esensial pada 28 hari pertama kehidupan;
- Sistem rujukan maternal dan neonatal yang cepat dan efektif;
- Pemantauan bayi berat lahir rendah, prematur, dan bayi dengan komplikasi;
- Surveilans kematian bayi dan audit maternal perinatal untuk mengidentifikasi penyebab kematian secara lebih akurat.

Kesimpulannya, AKB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 sebesar 5,61 per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2024, tetapi lonjakan yang terjadi pada tahun 2024 menjadi sinyal bahwa penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, khususnya pada periode neonatal, masih harus menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan daerah.

Grafik 2.9.a
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 115,10 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 45,62 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. Secara kumulatif terjadi penurunan sebesar 69,48 poin atau sekitar 60,36 persen dalam lima tahun terakhir. Setelah mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2021, AKI berhasil ditekan menjadi 68,18 pada tahun 2022, sempat meningkat menjadi 73,61 pada tahun 2023, kemudian kembali menurun secara konsisten pada tahun 2024 dan 2025.

Penurunan tersebut mengindikasikan semakin baiknya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, mulai dari pelayanan antenatal terpadu, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan ibu nifas, penguatan sistem rujukan maternal-neonatal, hingga peningkatan deteksi dini faktor risiko kehamilan. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan semakin meningkatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kesehatan ibu melalui perbaikan gizi, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, serta penguatan edukasi kesehatan reproduksi.

Meskipun menunjukkan capaian yang sangat positif, kematian ibu pada prinsipnya merupakan kejadian yang dapat dicegah (preventable death) apabila faktor risiko dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai faktor penyebab kematian ibu, seperti komplikasi obstetri, keterlambatan dalam pengambilan keputusan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan medis yang memadai.

Sejalan dengan arah kebijakan kesehatan nasional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu terus memperkuat pelayanan kesehatan ibu melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, optimalisasi pelayanan kesehatan ibu hamil risiko tinggi, penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan maternal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penguatan surveilans kematian ibu dan audit maternal perinatal. Upaya tersebut penting untuk mempertahankan tren penurunan AKI sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah dan nasional. Dengan capaian AKI sebesar 45,62 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi capaian tersebut melalui penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi, sehingga setiap ibu memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga pascapersalinan.

2.1.2.3.8 Status Gizi Balita

Penilaian status gizi anak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Untuk menilai status gizi balita dilakukan antara lain melalui pengukuran: indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan. Berdasar hasil pengukuran, berikut data status gizi balita tahun 2021-2025 di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.34
Status Gizi Balita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

Indeks	Kategori Status Gizi	2021		2022		2023		2024		2025	
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	BB Sangat Kurang	0,30%	102	0,40%	144	0,40%	125	0.3%	133	0.3%	97
	BB Kurang	2,60%	952	2,40%	890	2,40%	703	2,1%	847	2,0%	650
	BB Normal	92,90%	33875	89%	32924	87,0%	24995	90,30%	37249	80,30%	26066
	Risiko BB lebih	4,0%	1473	8,10%	2986	8,80%	2516	7,10%	2912	15,20%	4950

Indeks	Kategori Status Gizi	2021		2022		2023		2024		2025	
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat Pendek	0,40%	157	0,50%	181	0,60%	182	0,60%	245	0,60%	185
	Pendek	2,40%	890	2,90%	1070	2,60%	737	1,80%	736	2%	637
	Normal	96,10%	35025	94,80%	35069	93,80%	26955	96.5%	39803	94,10%	30569
	Tinggi	0,60%	213	1,30%	477	1,10%	317	0,80%	342	1,50%	486
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi Buruk	0,01%	7	0,01%	6	0,01%	3	0,01%	1	1	1,00%
	Gizi Kurang	3.6%	1316	2,70%	998	2,50%	724	2.0%	837	1,80%	578
	Giz Baik	89,60%	32681	83,90%	31039	83,40%	23952	84,10%	34692	73,10%	23752
	Berisiko Gizi Lebih	4,60%	1675	6,80%	2520	8,30%	2377	9,30%	3850	17,90%	5811
	Gizi Lebih	0,70%	267	2,70%	995	2,10%	599	2,70%	1133	3,90%	1254
	Obesitas	0,20%	82	2,30%	834	1,30%	361	1,30%	532	0,70%	213

Sumber : e-PPGBM Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara, 2025

Secara umum, indikator Berat Badan menurut Umur (BB/U) menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Persentase BB Sangat Kurang relatif rendah dan stabil pada kisaran 0,3–0,4 persen. Persentase BB Kurang cenderung menurun dari 2,60 persen (2021) menjadi 2,0 persen (2025), yang mengindikasikan perbaikan pada kasus underweight. Namun demikian, persentase BB Normal mengalami penurunan cukup signifikan pada 2025 menjadi 80,30 persen dibandingkan 92,90 persen pada 2021. Pada saat yang sama, kategori risiko berat badan lebih meningkat tajam dari 4,0 persen (2021) menjadi 15,20 persen (2025). Hal ini menunjukkan mulai munculnya pergeseran permasalahan gizi dari kekurangan gizi menuju risiko kelebihan gizi.

Pada indikator panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), persentase sangat pendek relatif stabil di kisaran 0,4–0,6 persen. Persentase pendek (stunting) cenderung menurun dari 2,40 persen (2021) menjadi 2,0 persen (2025), yang menunjukkan perbaikan meskipun masih memerlukan intervensi berkelanjutan. Persentase kategori normal tetap dominan di atas 93 persen, meskipun sedikit menurun pada 2025.

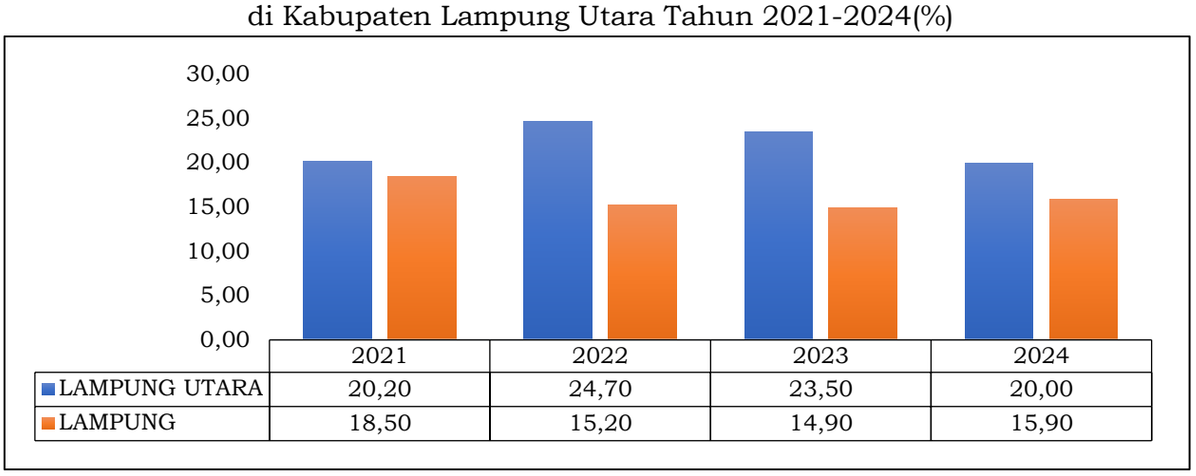
Sementara itu, pada indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), kategori gizi buruk sangat rendah dan terkendali (sekitar 0,01 persen). Gizi kurang menurun secara konsisten dari 3,6 persen (2021) menjadi 1,8 persen (2025). Namun, terjadi peningkatan signifikan pada kategori beresiko gizi lebih yang melonjak dari 4,60 persen menjadi 17,90 persen, serta kenaikan gizi lebih dari 0,70 persen menjadi 3,90 persen. Meskipun obesitas relatif rendah (0,70 persen pada 2025), tren kenaikan pada 2022–2024 menunjukkan perlunya perhatian terhadap pola konsumsi dan aktivitas fisik anak.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa masalah kekurangan gizi cenderung membaik, tetapi muncul tantangan baru berupa peningkatan risiko kelebihan gizi (*double burden of malnutrition*). Oleh karena itu, kebijakan intervensi ke depan perlu menyeimbangkan upaya penurunan stunting dan underweight dengan pengendalian overweight melalui edukasi gizi seimbang, penguatan posyandu, serta intervensi berbasis keluarga dan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi antara lain penyebab langsung (asupan zat gizi dan penyakit infeksi penyerta), penyebab tidak langsung (akses terhadap makanan, perawatan anak dan ibu hamil, sanitasi/pelayanan kesehatan) dan penyebab

utama (pola asuh, kemiskinan, pengetahuan, ketrampilan, perilaku). Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan status gizi tetap baik antara lain pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu setiap bulan, pemberian Vitamin A pada balita di bulan Februari dan Agustus, serta penyuluhan tentang pemberian makan bayi dan anak. Saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan nasional. Di mana terdapat dua sumber data prevalensi stunting yang ada di Lampung Utara, pertama bersumber dari Survey Status Gizi Indonesia/Survey Kesehatan Indonesia dan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Data prevalensi stunting dari hasil SSGI/SKI digunakan untuk mengukur capaian intervensi yang telah dilakukan dalam penanggulangan stunting. Sasaran dalam SSGI/SKI diambil sampel pada 500-700 balita yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan data prevalensi stunting dari e-PPGBM digunakan untuk melakukan intervensi penggulangan stunting dengan sasaran seluruh balita yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara. Berikut ini prevalensi stunting Kabupaten Lampung Utara berdasarkan hasil SSGI/SKI:

Grafik 2.10
Prevalensi Balita Stunting berdasarkan Survey Status Gizi Balita
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2024(%)



	2021	2022	2023	2024
LAMPUNG UTARA	20,20	24,70	23,50	20,00
LAMPUNG	18,50	15,20	14,90	15,90

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Survey Status Gizi Balita, 2025

Dari gambar di atas, dapat dilihat Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 20,20%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 24,70% pada tahun 2022. Namun, memasuki tahun 2023, tren tersebut mulai menunjukkan perbaikan dengan prevalensi turun menjadi 23,50%, dan penurunan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 20,0%.

Upaya penurunan stunting di Kabupaten Lampung Utara ditempuh dengan berbagai upaya yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Lembaga, swasta/pelaku usaha, masyarakat dan media masa/media sosial. Prioritas Pencegahan stunting dengan konsumsi sumber protein hewani pada sasaran 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), di samping itu pemberian makanan tambahan berbasis makanan lokal dengan bahan baku seperti susu, telur, kacang hijau, gula merah, dan abon serta fortifikasi (penambahan zat gizi) dalam kudapan berbahan baku ikan dan daun kelor merupakan salah satu contoh kegiatan yang bekerjasama dengan BRIN/LIPI.

Intervensi penurunan stunting dilakukan secara sensitif, spesifik dan intens dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan, desa dan masyarakat. Intervensi spesifik melalui: Pelayanan kesehatan dan Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja, Pasangan Usia Subur (PUS)/calon pengantin (catin), ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita gizi kurang, imunisasi dasar lengkap, Audit Kasus Stunting, *Therapeutic Feeding Center*

(TFC)/Klinik Perawatan Gizi Buruk, Makanan Pendamping ASI. Intervensi sensitif: bantuan pangan pada pasangan usia subur miskin, penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Jaringan air minum layak, Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), penyediaan sanitasi, jambanisasi, pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Keluarga Risiko Stunting (KRS), Kampanye Makan Ikan, Pemeriksaan Sampel Air, Kursus Laik Sehat, Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan dan Tempat Fasilitas Umum, Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Sosialisasi Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK), Orientasi Kelas Ibu balita, Refreshing Tatalaksana Gizi Buruk, Refreshing Konselor ASI, Penyediaan Media Cetak (leaflet dll), Pelatihan Tumbuh Kembang pada Kader, Koordinasi Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) kabupaten dan desa, Pembekalan Tim pelaksana Kegiatan (TPK) dan pemberian materi buku saku dan format pelaporan audit stunting, Rapat koordinasi petugas terkait, Kelurahan, IBI, Operasional Pendampingan Calon Pengantin, keluarga berisiko, dan balita stunting di Kelurahan, Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah, Publikasi melalui media cetak/elektronik, Pengelolaan media komunikasi publik, Pelayanan informasi publik, Pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Sosialisasi pangan asal hewan, Pengawasan rutin keamanan pangan asal hewan, Bimbingan Perkawinan, Bimbingan remaja usia sekolah, dan Evaluasi implementasi kebijakan terkait Stunting.

2.1.2.3.9 Usia Harapan Hidup

Indikator usia harapan hidup menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai Usia Harapan Hidup yang tinggi. Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Usia Harapan Hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Tabel 2.35
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara, Provinsi, dan Nasional
Tahun 2021-2025

No	Usia Harapan Hidup	2021	2022	2023	2024	2025
1	UHH Lampung Utara	73,54	73,73	73,91	74,12	74,41
	Pertumbuhan	0,08	0,26	0,24	0,28	0,39
2	UHH Lampung	73,73	73,95	74,17	74,39	74,71
	Pertumbuhan	0,18	0,30	0,30	0,30	0,43
3	UHH Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47
	Pertumbuhan	0,12	0,33	0,31	0,30	0,43

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2021, Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 73,54 tahun, kemudian meningkat menjadi 73,73 tahun pada 2022, 73,91 tahun pada 2023, pada 2024 menjadi sebesar 74,12 tahun, dan kembali meningkat

pada 2025 menjadi 74,41 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Lampung Utara mengalami perbaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung, Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Angka Usia Harapan Hidup tersebut bermakna bahwa secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup hingga usia 74,12 tahun, sedangkan bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki peluang hidup hingga 74,41 tahun. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara yang masih berada di bawah Provinsi dan Nasional mengindikasikan perlunya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya promotif dan preventif, guna mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

2.1.3.1.1.1 Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 10 (sepuluh) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Tabel 2.36
Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Satuan Pendidikan	931	913	927	909	917
	PAUD	384	369	378	373	383
	SD	434	434	435	424	423
	SMP	113	110	114	112	111
2	Ruang Kelas	5.015	5.251	4.976	5.074	5.647
	PAUD	748	773	783	795	864
	SD	3.271	3.363	3.170	3.233	3.596
	SMP	996	1.115	1.023	1.046	1.187
3	Kondisi Ruang Kelas					
	Kondisi Baik	3.589	1.830	1.876	1.548	5.424
	PAUD	748	425	489	423	856
	SD	2.098	952	894	750	3.453
	SMP	743	453	493	375	1.115
	Kondisi Rusak Ringan	0	3.417	1.376	1.594	223
	PAUD	0	348	240	295	8
	SD	0	2.407	908	960	143
	SMP	0	662	228	339	72
	Kondisi Rusak Sedang	946	0	1.122	1.287	5
	PAUD	0	0	40	58	0
	SD	783	0	875	1.003	5
	SMP	163	0	207	226	0
	Kondisi Rusak Berat	484	9	602	645	0
	PAUD	0	0	14	19	0
	SD	394	9	493	520	0
	SMP	90	0	95	106	0
4	Akses Internet pada Satuan Pendidikan					
	Tersedia	0	562	585	545	0
	PAUD	0	155	168	223	0
	SD	0	309	314	241	0

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	SMP	0	98	103	81	0
	Tidak Tersedia	0	351	342	364	0
	PAUD	0	214	210	150	0
	SD	0	125	121	183	0
	SMP	0	12	11	31	0

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, 2025

Berdasarkan data Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara, jumlah ruang kelas tercatat sebanyak 5.647 ruang dengan total peserta didik (PAUD, SD, SMP) sebanyak 120.203 siswa. Dengan demikian, secara agregat rata-rata keterisian ruang kelas berada pada kisaran ±21 siswa per ruang kelas. Jika dirinci per jenjang : PAUD 11.392 siswa dengan 864 ruang kelas yaitu ±13 siswa per ruang; SD 85.323 siswa dengan 3.596 ruang kelas yaitu ±24 siswa per ruang dan SMP 23.488 siswa dengan 1.187 ruang kelas yaitu ±20 siswa per ruang.

Bila dibandingkan dengan standar nasional kapasitas ideal (±28–32 siswa per rombongan belajar untuk SD/SMP), maka secara kuantitatif kondisi ruang kelas di Kabupaten Lampung Utara tergolong cukup memadai dan belum menunjukkan indikasi kelebihan daya tampung secara umum. Selain aspek kuantitas, kondisi fisik ruang kelas Tahun 2024 juga menunjukkan perbaikan signifikan, dimana 5.424 ruang (±96 persen) dalam kondisi baik dan tidak terdapat lagi ruang kelas rusak berat. Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi rehabilitasi sarana pendidikan.

Meskipun secara agregat kecukupan ruang kelas telah memadai, perencanaan pembangunan pendidikan tetap perlu mempertimbangkan :
1. Pemerataan antar wilayah, karena potensi kekurangan ruang kelas dapat terjadi pada sekolah tertentu dengan jumlah rombongan belajar tinggi.
2. Pemeliharaan preventif, untuk menjaga agar ruang kelas dalam kondisi baik tetap terpelihara dan tidak kembali mengalami kerusakan.
3. Penyesuaian dengan tren demografi, khususnya mengingat adanya dinamika jumlah peserta didik pada jenjang SD Tahun 2024 yang meningkat signifikan.
4. Integrasi dengan penguatan sarana digital, terutama memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki akses internet yang memadai.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan sarana dan prasarana pendidikan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik baru, tetapi lebih pada optimalisasi pemanfaatan, pemerataan distribusi, serta peningkatan kualitas infrastruktur pembelajaran secara berkelanjutan.

2.1.3.1.1.2 Peserta Didik

Tabel 2.37
Kondisi Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peserta Didik					
	PAUD	11.975	11.246	11.757	11.504	11.392
	SD	61.827	59.920	58.847	58.578	85.323
	SMP	27.487	23.985	24.697	23.695	23.488

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, 2025

Perkembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Lampung Utara pada jenjang PAUD, SD, dan SMP selama periode Tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RKPD tahun berjalan. Pada jenjang PAUD, jumlah peserta didik mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun secara moderat dari 11.975 peserta didik pada Tahun 2020 menjadi 11.392 peserta didik pada Tahun 2024. Kondisi ini menuntut penguatan strategi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD serta perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata.

Pada jenjang SD, jumlah peserta didik mengalami tren penurunan pada periode 2020–2023, dari 61.827 peserta didik menjadi 58.578 peserta didik. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 85.323 peserta didik. Peningkatan ini perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data, sekaligus menjadi dasar dalam penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana, rasio guru terhadap murid, serta distribusi layanan pendidikan dasar secara proporsional.

Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah peserta didik menunjukkan kecenderungan menurun dari 27.487 peserta didik pada Tahun 2020 menjadi 23.488 peserta didik pada Tahun 2024. Dinamika ini perlu diantisipasi melalui penguatan program keberlanjutan pendidikan, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah pertama.

2.1.3.1.1.3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 2.38
Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidik					
	PAUD	1.324	898	890	905	1.161
	SD	4.647	4.506	4.689	4.505	5.941
	SMP	1.793	1.731	1.738	1.682	2.375
2	Tenaga Kependidikan					
	PAUD	0	51	48	55	72
	SD	274	323	406	378	552
	SMP	324	314	317	308	390
3	Status Guru					
	PNS (%)	0	35,40	31,77	29,77	29,68
	PAUD	0	7,20	6,90	6,50	6,88
	SD	0	48,60	41,10	37,90	38,72
	SMP	0	50,40	47,30	44,90	43,43
	Non PNS (%)	0	64,60	68,23	70,43	70,32
	PAUD	0	92,80	93,10	93,50	93,12
	SD	0	51,40	58,90	62,70	61,28
	SMP	0	49,60	52,70	55,10	56,57
4	Kualifikasi Guru					
	Pendidikan (> D4/S1) (%)	60,47	76,27	74,73	85,63	74,00
	PAUD	48,70	41,50	33,90	65,70	45,34
	SD	40,60	90,70	93,60	94,60	85,10
	SMP	92,10	96,60	96,70	96,60	91,57
	Pendidikan (< D4/S1) (%)	39,53	23,73	25,27	14,37	26,00
	PAUD	51,30	58,50	66,10	34,30	54,66
	SD	59,40	9,30	6,40	5,40	14,90
	SMP	7,90	3,40	3,30	3,40	8,43
5	Guru Tersertifikasi					
	Sudah Tersertifikasi (%)	33,03	24,5	21,9	21,03	27,56
	PAUD	13,40	2,40	2,80	3,20	11,39
	SD	38,90	29,90	24,90	23,20	29,61

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	SMP	46,80	41,20	38,00	36,70	41,69
	Belum Tersertifikasi (%)	66,97	75,50	78,10	78,97	72,44
	PAUD	86,60	97,60	97,20	96,80	88,61
	SD	61,10	70,10	75,10	76,80	70,39
	SMP	53,20	58,80	62,00	63,30	58,31

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, 2025

Berdasarkan ketentuan standar proses dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, rasio ideal guru terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar secara umum berkisar antara 1:20 sampai dengan 1:28 (tergantung jenjang dan karakteristik satuan pendidikan), dengan prinsip utama pemenuhan kebutuhan guru per rombongan belajar dan kesesuaian mata pelajaran. Pada Tahun 2024, kondisi di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa: PAUD memiliki rasio sekitar 1:10 (11.392 peserta didik dan 1.161 guru); SD memiliki rasio sekitar 1:14 (85.323 peserta didik dan 5.941 guru) dan SMP memiliki rasio sekitar 1:10 (23.488 peserta didik dan 2.375 guru). Secara kuantitatif, rasio tersebut berada di bawah batas maksimum rasio nasional, yang berarti jumlah guru relatif mencukupi bahkan cenderung lebih baik dibandingkan standar minimal. Namun demikian, kecukupan secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Tantangan yang dihadapi lebih terletak pada :
1. Distribusi guru antar wilayah dan satuan pendidikan, terutama pada sekolah di wilayah pinggiran atau dengan jumlah rombongan belajar terbatas.
2. Kesesuaian kualifikasi dan linearitas mata pelajaran, khususnya pada jenjang SMP.
3. Komposisi status kepegawaian, dimana lebih dari 70 persen guru berstatus Non-PNS, yang berimplikasi pada stabilitas dan keberlanjutan layanan pendidikan.
4. Kualifikasi akademik dan sertifikasi, terutama pada jenjang PAUD yang masih memiliki proporsi guru belum berkualifikasi S1 dan belum tersertifikasi dalam jumlah signifikan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, arah kebijakan pendidikan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara difokuskan pada : Penataan dan pemerataan distribusi guru berbasis kebutuhan rombongan belajar; Peningkatan kualifikasi akademik minimal S1/D4; Fasilitasi percepatan sertifikasi pendidik; Optimalisasi perencanaan kebutuhan ASN dan PPPK secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat mutu layanan pendidikan serta berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator makro pembangunan daerah, khususnya dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.3.1.1.3 Akreditasi Satuan Pendidikan

Tabel 2.39
Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akreditasi Sekolah					
a	PAUD					
	A	0,30	1,08	1,06	0,08	0,78
	B	13,50	20,33	19,58	23,32	22,72
	C	2,90	36,86	35,71	44,50	43,60
	Belum Terakreditasi	83,30	41,73	43,65	31,38	32,90

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
b	SD					
	A	4,80	2,76	2,76	3,07	3,31
	B	33,20	35,25	35,40	33,96	34,99
	C	57,40	57,14	57,70	55,90	59,57
	Belum Terakreditasi	4,60	4,85	4,14	7,07	2,13
c	SMP					
	A	26,70	20,00	18,42	18,75	20,00
	B	38,40	44,55	44,74	43,75	44,55
	C	29,50	30,00	28,07	28,57	31,82
	Belum Terakreditasi	5,40	5,45	8,77	8,93	3,64

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, 2025

Perkembangan akreditasi satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara selama periode Tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika capaian mutu layanan pendidikan pada setiap jenjang.

1. Jenjang PAUD
   Pada jenjang PAUD, persentase satuan pendidikan yang belum terakreditasi masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan perbaikan dibanding Tahun 2020. Pada Tahun 2020, PAUD yang belum terakreditasi mencapai 83,30 persen, dan menurun menjadi 32,90 persen pada Tahun 2024. Sementara itu, akreditasi peringkat B dan C mendominasi komposisi akreditasi Tahun 2024, masing-masing sebesar 22,72 persen dan 43,60 persen. Adapun akreditasi A masih relatif sangat rendah (0,78 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu PAUD masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan pendampingan proses akreditasi.
2. Jenjang SD
   Pada jenjang SD, mayoritas satuan pendidikan berada pada peringkat C, yaitu sebesar 59,57 persen pada Tahun 2024. Peringkat B sebesar 34,99 persen, sedangkan peringkat A masih terbatas pada 3,31 persen. Persentase SD yang belum terakreditasi relatif kecil dan menurun menjadi 2,13 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif hampir seluruh SD telah mengikuti proses akreditasi, namun peningkatan kualitas menuju peringkat B dan A masih menjadi tantangan utama.
3. Jenjang SMP
   Pada jenjang SMP, distribusi akreditasi relatif lebih baik dibanding jenjang lainnya. Pada Tahun 2024, SMP dengan peringkat B mencapai 44,55 persen, peringkat C sebesar 31,82 persen, dan peringkat A sebesar 20,00 persen. Persentase SMP yang belum terakreditasi menurun menjadi 3,64 persen pada Tahun 2024. Komposisi ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada jenjang SMP relatif lebih merata, meskipun peningkatan proporsi peringkat A tetap menjadi prioritas.

2.1.3.1.1.4 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.40
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2021-2025

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,35	94,9	94,74	93,57	96,55
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	94,65	82,94	82,93	64,23
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	94,52	81,96	85,58	93,94

Sumber : Bagian Tapem Setdakab, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada masing-masing jenis layanan pendidikan. Secara umum, capaian layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini menunjukkan tren yang positif, sedangkan layanan pendidikan kesetaraan masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada layanan Pendidikan Dasar, persentase warga negara usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) mengalami peningkatan dari 83,35 persen pada tahun 2021 menjadi 96,55 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar semakin baik. Meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada tahun 2023 dan 2024, capaian tahun 2025 berhasil meningkat secara signifikan dan mendekati target pelayanan universal. Kondisi ini mencerminkan semakin optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh warga usia sekolah.

Pada layanan Pendidikan Kesetaraan, persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 64,23 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan masih rendahnya partisipasi sasaran dalam program pendidikan kesetaraan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan, keterbatasan jangkauan layanan, faktor sosial ekonomi, serta meningkatnya jumlah sasaran yang belum dapat terlayani secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan sosialisasi, pendataan sasaran yang lebih akurat, dan penguatan layanan pendidikan nonformal untuk menjamin hak pendidikan bagi masyarakat yang tidak mengikuti jalur pendidikan formal.

Sementara itu, layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan tren perbaikan setelah mengalami penurunan pada periode 2022–2023. Capaian partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam pendidikan PAUD meningkat dari 85,58 persen pada tahun 2024 menjadi 93,94 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran usia 5–6 tahun sehingga perlu terus didorong melalui perluasan akses layanan PAUD yang berkualitas dan merata.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini telah berjalan cukup baik dan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Namun demikian, layanan pendidikan kesetaraan masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan akses, pemerataan layanan, serta partisipasi masyarakat guna memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal dan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Fasilitas Kesehatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2.41
Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Puskesmas					
	Rawat Inap	8	8	8	8	8
	Non Rawat Inap	19	19	19	19	19
2	Rumah Sakit	5	5	5	6	6
3	Klinik Utama	0	0	0	2	2
4	Klinik Pratama	18	18	18	18	18
5	Puskesmas Pembantu	90	98	98	98	98
6	Apotek	25	34	34	34	38

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Kebutuhan tenaga kesehatan dihitung berdasarkan rasio terhadap jumlah penduduk sesuai standar nasional. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan ideal, terutama pada tenaga dokter umum dan perawat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan ASN/PPPK, redistribusi tenaga, serta pemberian insentif untuk wilayah prioritas guna menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Tenaga Kesehatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tenaga Medis	95	115	113	224	236
2	Tenaga Keperawatan	594	647	609	808	751
3	Tenaga Kebidanan	769	876	876	906	799
4	Tenaga Kefarmasian	45	81	72	97	101
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	75	114	100	84	109

No	Tenaga Kesehatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	61	65	51	52	50
7	Tenaga Gizi	37	54	52	54	59
8	Tenaga Keterapian	0	6	4	9	9
9	Tenaga Keteknisan Medis	65	50	12	118	187
10	Tenaga Teknik Biomedika	-	79	46	177	177
11	Tenaga Kesehatan Tradisional	-	0	5	5	5

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor determinan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada kelompok tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, serta keteknisan medis. Jumlah tenaga medis meningkat dari 95 orang pada tahun 2021 menjadi 236 orang pada tahun 2025 atau bertambah sebesar 148 persen. Peningkatan juga terjadi pada tenaga keperawatan yang bertambah dari 594 orang menjadi 751 orang, serta tenaga kefarmasian dari 45 orang menjadi 101 orang. Penguatan signifikan turut terjadi pada tenaga keteknisan medis yang meningkat dari 65 orang pada tahun 2021 menjadi 187 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas layanan kuratif dan diagnostik, termasuk dukungan terhadap pelayanan rumah sakit dan puskesmas.

Namun demikian, tidak seluruh kategori tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang konsisten. Tenaga kesehatan lingkungan menunjukkan kecenderungan menurun dari 61 orang pada tahun 2021 menjadi 50 orang pada tahun 2025. Sementara itu, tenaga kebidanan relatif stagnan dan mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat peran tenaga promotif dan preventif sangat strategis dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Apabila dianalisis dengan pendekatan rasio terhadap jumlah penduduk, ketersediaan tenaga medis dan keperawatan pada tahun 2025 telah mendekati standar kebutuhan minimal, meskipun masih diperlukan optimalisasi distribusi antar wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain aspek kuantitas, tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan penempatan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, serta keberlanjutan pengadaan formasi melalui mekanisme ASN dan/atau PPPK sesuai kebutuhan riil daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, kebijakan penguatan SDM kesehatan ke depan diarahkan pada : (1) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis analisis beban kerja dan rasio penduduk; (2) pemerataan distribusi tenaga hingga wilayah prioritas dan terpencil; (3) penguatan tenaga promotif-preventif; serta (4) peningkatan kualitas dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan dasar dapat semakin efektif, merata, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.1.2.2 Kasus Penyakit

Secara umum, tren penyakit menunjukkan adanya pergeseran beban penyakit (*double burden of disease*), yaitu tingginya kasus penyakit menular yang belum sepenuhnya

terkendali bersamaan dengan meningkatnya penyakit tidak menular. Hal ini menuntut pendekatan pembangunan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup penguatan layanan primer di puskesmas, peningkatan kapasitas surveilans epidemiologi, optimalisasi sistem rujukan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks perencanaan tahunan dalam RKPD, sajian data penyakit menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya kesehatan, serta penetapan target kinerja yang lebih terarah dan berbasis masalah kesehatan aktual di daerah.

Tabel 2.43
Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kasus Penyakit - Angka Penemuan TBC	45,3	40	45	61,2	54
2	Jumlah Kasus Penyakit - Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	94,5	96,1	94,2	93	90,6
3	Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Baru	47	55	2	4	5
4	Jumlah Kasus Penyakit - Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	1,62	9	2,75	1,62	1,78
5	Jumlah Kasus Penyakit - Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	–	–	–	0,01	–
6	Jumlah Kasus Penyakit - Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	7,56	25,59	24,8	271,09	301,31

Sumber : BPS Lampung, 2026

Perkembangan indikator penyakit menular selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah. Pada indikator tuberkulosis (TBC), angka penemuan kasus menunjukkan fluktuasi, dari 45,3 persen pada tahun 2021, turun menjadi 40 persen pada 2022, kemudian meningkat menjadi 61,2 persen pada 2024 dan kembali menurun menjadi 54 persen pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam intensifikasi penemuan kasus (case finding), khususnya pascapandemi, meskipun capaian tahun 2025 masih perlu ditingkatkan agar mendekati target nasional. Di sisi lain, angka keberhasilan pengobatan TBC mengalami tren penurunan dari 94,5 persen (2021) menjadi 90,6 persen (2025). Meskipun masih relatif tinggi, kecenderungan menurun ini menjadi sinyal perlunya penguatan kepatuhan pengobatan dan pengawasan minum obat (PMO) guna mencegah resistensi obat.

Kasus baru HIV/AIDS menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan 47 kasus pada 2021, meningkat menjadi 55 kasus pada 2022, kemudian turun tajam pada 2023 dan sedikit meningkat kembali hingga 5 kasus pada 2025. Pola ini dapat mencerminkan variasi intensitas skrining dan pelaporan, sehingga penguatan surveilans aktif dan skrining populasi berisiko tetap menjadi prioritas. Untuk kusta, angka penemuan kasus baru per 100.000 penduduk berfluktuasi, dengan lonjakan pada 2022 (9 per 100.000 penduduk) sebelum kembali stabil pada kisaran 1,6–1,8 pada 2024–2025. Stabilitas ini menunjukkan pengendalian relatif baik, namun tetap memerlukan kewaspadaan untuk mencegah transmisi baru dan kecacatan akibat keterlambatan diagnosis.

Angka kesakitan malaria relatif sangat rendah, dengan temuan 0,01 per 1.000 penduduk pada 2024 dan tidak tercatat kasus signifikan pada tahun lainnya, yang menunjukkan kondisi eliminasi lokal tetap terjaga. Sementara itu, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari 7,56 per 100.000 penduduk pada 2021, meningkat menjadi 25,59 pada 2022 dan 24,8 pada 2023, kemudian melonjak tajam menjadi 271,09 pada 2024 dan 301,31 pada 2025. Lonjakan ini mengindikasikan terjadinya peningkatan transmisi yang serius dan

memerlukan intervensi komprehensif, termasuk penguatan surveilans epidemiologi, gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), peningkatan partisipasi masyarakat, serta mitigasi faktor lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor.

Berdasarkan sajian data tersebut, prioritas kebijakan kesehatan daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas penemuan serta keberhasilan pengobatan TBC.
2. Penguatan skrining dan edukasi pencegahan HIV/AIDS pada kelompok berisiko.
3. Pengendalian DBD secara terintegrasi berbasis kewaspadaan dini dan intervensi lingkungan.
4. Penguatan surveilans epidemiologi dan sistem pelaporan berbasis fasilitas kesehatan.

Dengan pendekatan promotif dan preventif yang lebih intensif serta dukungan SDM dan pembiayaan yang memadai, diharapkan beban penyakit menular dapat ditekan dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Utara meningkat secara berkelanjutan.

2.1.3.1.2.3 Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kepesertaan aktif JKN menjadi indikator penting dalam mendukung *Universal Health Coverage* (UHC). Cakupan jaminan kesehatan yang tinggi berkontribusi terhadap penurunan hambatan finansial (*financial barrier*) dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, serta mendukung keberlanjutan pembiayaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit.

Tabel 2.44
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

NO	JUMLAH PESERTA	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)						
1	PBI APBN	301.590	439.772	449.556	431.736	54.927
2	PBI APBD	38.135	42.678	65.086	68.186	52.546
	JUMLAH	339.725	482.450	514.642	499.922	107.473
NON PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)						
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	49.339	90.531	86.408	89.970	49.323
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	62.927	56.622	56.726	54.180	19.183
3	Bukan Pekerja (BP)	10.106	10.845	16.841	16.155	7.890
	JUMLAH	122.372	157.998	159.975	160.305	76.396
	JUMAH TOTAL	462.097	640.448	674.617	660.227	183.869
	JUMLAH PENDUDUK	634.117	635.129	657.608	675.626	183.746
	CAKUPAN KEPESERTAAN	72,87%	100,84%	102,59%	97,72%	±100% (berdasarkan kesesuaian angka total dengan jumlah penduduk, namun perlu verifikasi konsistensi data)

Sumber : BPS Lampung, 2026

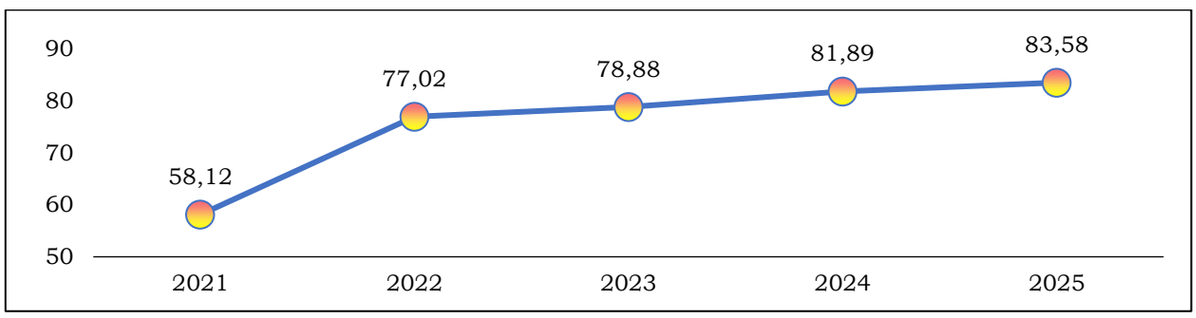
Secara umum, jumlah peserta jaminan kesehatan mengalami peningkatan signifikan pada periode 2021–2023, kemudian relatif stabil pada 2024, dan mengalami penurunan tajam pada 2025 (kemungkinan akibat pembaruan atau cleansing data kepesertaan). Pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), jumlah peserta meningkat dari 339.725 jiwa (2021) menjadi 514.642 jiwa (2023), sebelum sedikit menurun menjadi 499.922 jiwa (2024). PBI APBN mendominasi komposisi peserta, mencerminkan tingginya proporsi penduduk yang masuk kategori miskin dan rentan. Namun pada 2025 tercatat 107.473 peserta, yang secara signifikan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sehingga perlu klarifikasi apakah terjadi pemutakhiran data, pengalihan segmen, atau perubahan kebijakan pembiayaan.

Pada segmen Non-PBI, jumlah peserta meningkat dari 122.372 jiwa (2021) menjadi 160.305 jiwa (2024), dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU). Hal ini menunjukkan adanya perluasan perlindungan bagi pekerja formal. Sementara itu, peserta PBPU/mandiri cenderung stagnan bahkan menurun, mengindikasikan tantangan dalam kepatuhan pembayaran iuran dan keberlanjutan kepesertaan segmen informal.

Capaian 2022–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara secara administratif telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) ≥95%. Namun, fluktuasi dan anomali data tahun 2025 mengindikasikan perlunya validasi dan sinkronisasi data kepesertaan dengan data kependudukan. Tren 2021–2024 menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada 2023–2024, yang berdampak pada kenaikan beban fiskal daerah hingga di atas Rp34 miliar per tahun. Tahun 2025 terjadi penurunan jumlah peserta, sehingga estimasi beban fiskal ikut turun menjadi sekitar Rp26,48 miliar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh : Pemutakhiran dan verifikasi data PBI, Pengalihan peserta ke PBI APBN, dan rasionalisasi anggaran daerah. Kenaikan PBI APBD berimplikasi langsung pada ruang fiskal daerah, terutama pada belanja urusan kesehatan yang bersifat wajib dan pelayanan dasar.

Keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat keberlanjutan kepesertaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tingginya tingkat keaktifan peserta JKN menunjukkan semakin besarnya penduduk yang terlindungi dan dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan tanpa menghadapi hambatan pembiayaan.

Grafik 2.10.a
Persentase Keaktifan Peserta JKN Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 58,12 persen, keaktifan peserta JKN terus meningkat menjadi 77,02 persen pada tahun 2022, 78,88 persen pada tahun 2023, 81,89 persen pada tahun 2024, dan mencapai 83,58 persen pada tahun 2025. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 25,46 poin,

yang menunjukkan semakin baiknya keberlanjutan kepesertaan JKN di Kabupaten Lampung Utara.

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan kepesertaan JKN, baik melalui pemutakhiran data peserta, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta mandiri, maupun dukungan pembiayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan keaktifan kepesertaan. Meskipun menunjukkan tren yang positif, capaian keaktifan peserta JKN sebesar 83,58 persen pada tahun 2025 masih menunjukkan bahwa terdapat sebagian penduduk yang telah terdaftar namun belum aktif sebagai peserta JKN. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan status kepesertaan, ketidakmampuan membayar iuran bagi peserta mandiri, data kepesertaan yang belum mutakhir, maupun perpindahan segmen kepesertaan yang belum teradministrasi secara optimal.

Sesuai arah kebijakan nasional menuju Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan kualitas perlindungan sosial bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu terus memperkuat sinergi dengan penyelenggara JKN, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan keaktifan peserta. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui pemutakhiran data kepesertaan secara berkala, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, perluasan cakupan peserta aktif, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai kemampuan keuangan daerah. Secara keseluruhan, capaian keaktifan peserta JKN Kabupaten Lampung Utara menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan mengindikasikan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan kesehatan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan tren peningkatan tersebut guna mendukung pencapaian target keaktifan peserta JKN yang lebih tinggi serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2.1.3.1.2.4 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, serta pelayanan bagi penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, dan tuberkulosis. Pemenuhan target SPM menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata.

Dalam konteks RKPD, capaian SPM kesehatan berfungsi sebagai dasar penentuan prioritas program, pengalokasian anggaran, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan primer. Optimalisasi pemenuhan SPM diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan layanan antarwilayah.

Tabel 2.45
SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025

No	Jenis Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	92,26	90,99	90,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	97,34	88,02	79,17
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	95,43	85,64	80,39

No	Jenis Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	91,47	91,21	84,46
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	79,74	96,51	90,17
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	49	64,68	76,67	82,86
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	100	83,84	74,31	91,50
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	72	75,22	91,49	94,68
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	79,58	94,17	95,91
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	89	70,11	91,11	91,41
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	57,02	95,7	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	73	49,39	65,16	70,96
	SPM Bidang Kesehatan	100,00	90,25	78,01	86,75	87,62

Sumber : Bagian Tapem Setdakab, 2026

2.1.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penanganan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan.

2.1.3.1.3.1.1 Jalan dan Jembatan

A. Jalan

Rincian panjang jalan di Kabupaten Lampung Utara menurut kewenangannya adalah jalan nasional sepanjang 90 km sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, jalan provinsi sepanjang 156 km sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK/2023, dan jalan kabupaten sepanjang 1.025,27 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor B/486/06-LU/HK/2023 dengan jumlah ruas sebanyak 215 ruas.

Tabel 2.46
Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021-2025 (Km)

No	Status Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nasional (Km)	177	130	90	90	90
2	Provinsi (Km)	154	154	156	156	156
3	Kabupaten (Km)	2.475	2.143	2.143	1.025	1.025

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Panjang jalan berdasarkan status kewenangan menunjukkan dinamika pada periode 2021–2025. Jalan nasional tercatat sepanjang177 km pada tahun 2021, menjadi 130 km pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 90 km pada periode 2023–2025. Penurunan ini dikarenakan adanya penyesuaian klasifikasi atau perubahan

kewenangan penanganan ruas jalan sesuai dengan kebijakan penetapan status jalan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, panjang jalan provinsi relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dari 154 km (2021–2022) menjadi 156 km sejak 2023 hingga 2025. Hal ini karena adanya penambahan atau penegasan status ruas tertentu menjadi kewenangan provinsi.

Adapun panjang jalan kabupaten mengalami perubahan signifikan, dari 2.143 km pada periode 2022–2023 menjadi 1.025 km pada 2024–2025. Penurunan ini sangat besar dan disebabkan oleh reklasifikasi status jalan (alih kewenangan ke nasional atau provinsi) atau pembaruan data hasil verifikasi jaringan jalan. Secara teknokratik, perubahan struktur kewenangan jalan berdampak langsung terhadap tanggung jawab pembiayaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan penegasan kembali basis data panjang jalan sesuai status kewenangan terbaru, agar perencanaan program pembangunan dan alokasi anggaran infrastruktur lebih akurat, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Tabel 2.47
Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025 (Km)

No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Baik	234,10	262,14	405,94	235,52	185,40
2	Sedang	1.210,30	734,62	543,89	309,33	293,12
3	Rusak	458,70	451,76	302,97	139,96	146,18
4	Rusak Berat	571,60	694,62	890,34	340,46	400,57

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Perkembangan kondisi jalan kabupaten selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, komposisi jalan didominasi oleh kondisi sedang (1.210,30 km), disusul rusak berat (571,60 km) dan rusak (458,70 km), sementara jalan dalam kondisi baik tercatat 234,10 km. Pada tahun 2022–2023 terjadi peningkatan signifikan jalan kondisi baik, mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 405,94 km. Pada saat yang sama, panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat menunjukkan tren fluktuatif, dengan rusak berat meningkat hingga 890,34 km pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan metode penilaian kondisi jalan atau pembaruan data inventarisasi. Memasuki tahun 2024–2025, terlihat penurunan cukup besar pada seluruh kategori panjang jalan, yang selaras dengan penurunan total panjang jalan kabupaten akibat reklasifikasi status kewenangan. Pada 2025, panjang jalan kondisi baik tercatat 185,40 km, kondisi sedang 293,12 km, rusak 146,18 km, dan rusak berat 400,57 km. Secara proporsional pada tahun 2025, jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat masih mendominasi dibandingkan kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan infrastruktur jalan daerah terletak pada peningkatan kualitas dan rehabilitasi jaringan jalan eksisting, bukan semata pada pembangunan ruas baru. Dalam konteks perencanaan dalam RKPD, data kondisi jalan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan struktur jalan. Pendekatan berbasis preservasi perlu diperkuat guna mencegah peningkatan ruas jalan ke kategori rusak berat yang membutuhkan biaya penanganan lebih tinggi, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

B. Jembatan

Kondisi jembatan di Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian integral dari sistem jaringan jalan yang berperan penting dalam menjamin konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Secara umum, keberadaan jembatan mendukung keterhubungan kawasan produksi pertanian dan permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan jembatan menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas struktur, usia konstruksi yang telah melampaui umur rencana, serta dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan gerusan (*scouring*) pada pondasi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kemantapan jaringan jalan secara keseluruhan apabila tidak diimbangi dengan program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai. Jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terdapat 179 jembatan terbangun.

Tabel 2.48
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jembatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Baik					
2	Sedang					
3	Rusak					
4	Rusak Berat					
	Jumlah Total	22	21	25	22	79

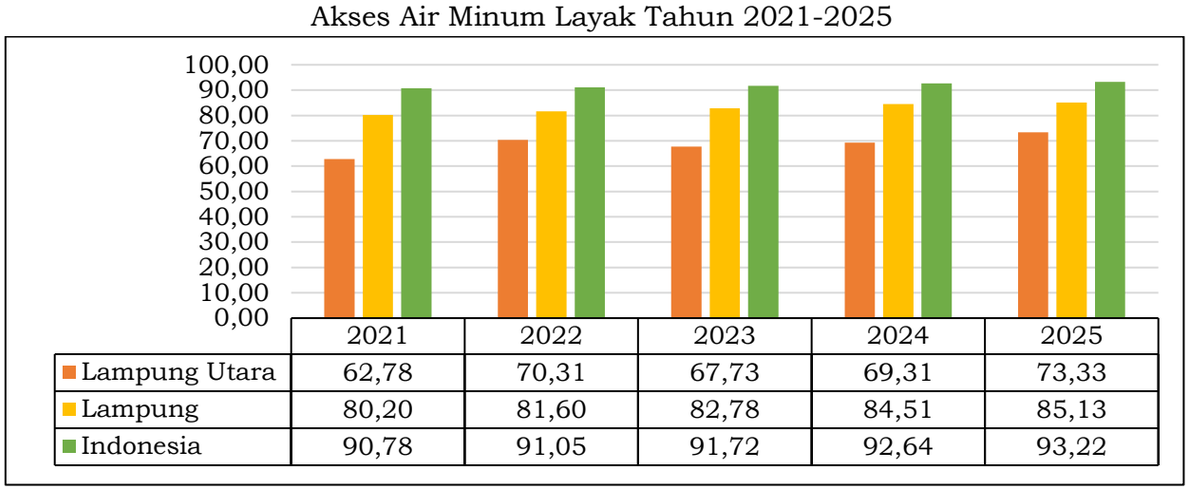
Sumber : Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kab. Lampung Utara, 2026

2.1.3.1.3.1.2 Air Bersih

Ketersediaan dan akses terhadap air bersih di Kabupaten Lampung Utara merupakan indikator penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta produktivitas sosial-ekonomi. Secara umum, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat masih bersumber dari kombinasi layanan perpipaan, sumur gali, sumur bor, serta sumber air permukaan. Namun demikian, tingkat akses terhadap air minum layak dan aman masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas layanan.

Dari aspek layanan perpipaan, cakupan pelayanan air minum oleh BUMD penyedia air bersih belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, khususnya kawasan perdesaan dan permukiman terpencil. Keterbatasan jaringan distribusi, kapasitas produksi, serta tingkat kehilangan air (non-revenue water) menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Sementara itu, ketergantungan masyarakat terhadap sumber air tanah dan air permukaan rentan terhadap fluktuasi musim, terutama pada periode kemarau yang dapat menurunkan debit dan kualitas air. Dari sisi kualitas, tantangan utama meliputi pencemaran sumber air akibat aktivitas domestik, pertanian, dan limbah, serta belum meratanya perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi ini memiliki korelasi langsung dengan kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan penyakit kulit.

Grafik 2.11
Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Lampung Utara	62,78	70,31	67,73	69,31	73,33
Lampung	80,20	81,60	82,78	84,51	85,13
Indonesia	90,78	91,05	91,72	92,64	93,22

Sumber : BPS Lampung, 2026 (diolah)

Perkembangan capaian Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 sebesar 62,78%, meningkat signifikan pada 2022 menjadi 70,31%, kemudian mengalami penurunan pada 2023 menjadi 67,73%, dan kembali meningkat pada 2024–2025 hingga mencapai 73,33%. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung dan nasional (Indonesia), posisi Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Tahun 2025, capaian kabupaten sebesar 73,33%, sementara Provinsi Lampung telah mencapai 85,13% dan nasional sebesar 93,22%. Kesenjangan (gap) tahun 2025 tercatat : Terhadap provinsi sebesar 11,80 poin dan terhadap nasional sebesar 19,89 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan kinerja di tingkat kabupaten, percepatan peningkatan capaian masih diperlukan agar konvergen dengan target provinsi dan nasional. Secara teknokratik, strategi akselerasi perlu difokuskan pada :

1. Identifikasi faktor penghambat pada level layanan dasar.
2. Penguatan intervensi berbasis wilayah dengan capaian terendah.
3. Optimalisasi dukungan anggaran dan tata kelola program.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja.

2.1.3.1.3.1.3 Drainase

Kondisi drainase di Kabupaten Lampung Utara secara umum masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas, keterpaduan jaringan, dan pemeliharaan rutin. Di sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi, sistem drainase belum sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan jalan dan tata ruang, sehingga berpotensi menimbulkan genangan saat intensitas hujan tinggi. Permasalahan utama meliputi sedimentasi saluran, penyempitan akibat bangunan liar, serta terbatasnya saluran tersier di kawasan padat penduduk. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan drainase berbasis daerah aliran sungai menyebabkan aliran air tidak mengalir secara efektif menuju saluran pembuangan utama.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, penanganan drainase perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas saluran, rehabilitasi jaringan eksisting, pembangunan sistem drainase terpadu, serta penguatan operasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko genangan dan banjir lokal, menjaga kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung ketahanan infrastruktur daerah terhadap perubahan iklim.

2.1.3.1.3.1.4 Pengairan/Irigasi

Sistem jaringan sumber daya air berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 merupakan prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air. Pada Tahun 2022, 56,68% irigasi di Kabupaten Lampung Utara dalam kondisi baik.

Tabel 2.49
Kondisi Irigasi Kabupaten

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	6
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	251.108,0	251.108,0	194.245,0	206.736,1	206.736,1
Luas irigasi kabupaten	342.675,5	342.675,5	342.675,5	342.675,5	342.675,5

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	6
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	73,28	73,28	56,68	60,33	60,33

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas SDABMBK Kab. Lampung Utara, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Utara dibagi 2 tingkatan kewenangan, yaitu : Kewenangan Pusat, kategorinya DI yang dikelola > 3.000 Ha, termasuk:

A. Kewenangan Pusat, kategorinya DI yang dikelola 17.709 Ha dengan rincian DI sebagai berikut:
   - DI Way Pengubuan (10 Ha)
   - DI Way Rarem (9.259 Ha)
   - DI Bumi Agung (5.240 Ha)
   - DI Way Tulung Mas (3.200 Ha)

B. Kewenangan Kabupaten, kategorinya DI yang dikelola seluas 13.320 Ha dengan jumlah 158 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dari tabel di atas, secara ringkas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Daya dukung irigasi Way Rarem di Lampung Utara sebesar 85% (6.822 ha).
- Daya dukung irigasi Way Tulung Mas sebesar 22% (639 ha).
- Daya dukung irigasi Way Bumi Agung sebesar 11% (35,5 ha), hal ini disebabkan adanya kerusakan saluran primer di BBA 4 desa Sri Jaya, Kecamatan Sungkai Jaya sejak Mei 2014.
- Daya dukung Irigasi Sederhana (kewenangan Dinas Pengairan kabupaten) mencapai 47% (6.176 ha). Tersebar di 179 daerah irigasi/sungai pada 23 kecamatan di Lampung Utara.

2.1.3.1.3.1.5 Sarana dan Prasarana Kantor

Perbaikan kondisi gedung/kantor Perangkat Daerah dilakukan mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Pada tahun 2024 gedung/kantor kondisi baik ada 36 unit (88,68%), kondisi rusak ringan ada 5 unit (5.67%), dan kondisi rusak sedang ada 2 unit (5,67%).

Tabel 2.50
Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Tingkat Kerusakan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	36	36	36	36	36
2	Rusak Ringan (kerusakan <30%)	5	5	5	5	5
3	Rusak Sedang (kerusakan 30-50%)	10	10	10	2	2
4	Rusak Berat (kerusakan >50%)	20	20	20	28	28
	Jumlah	71	71	71	71	71

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Lampung Utara, 2025

2.1.3.1.3.1.6 Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lampung Utara masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat. Limbah domestik yang bersumber dari aktivitas rumah tangga, seperti air limbah mandi, cuci, kakus (MCK), serta sampah organik dan anorganik, sebagian besar masih dikelola secara individual melalui sistem setempat (on-site), seperti tangki septik, yang belum seluruhnya memenuhi standar teknis kedap dan aman.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya cakupan layanan pengelolaan air limbah terpusat (off-site), keterbatasan sarana pengangkutan lumpur tinja terjadwal, serta belum optimalnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang layak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan sumber air, serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, penguatan sistem pengelolaan limbah domestik perlu diarahkan pada peningkatan akses sanitasi layak dan aman, pembangunan serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penguatan regulasi dan pengawasan, serta edukasi perubahan perilaku masyarakat. Upaya tersebut penting untuk mendukung pencapaian target pelayanan dasar bidang sanitasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta terwujudnya permukiman yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.51
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020-2024

No	Akses Sanitasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Akses Sanitasi Layak	79,69	75,03	80,82	80,23	77,74	77,23
2	Akses Sanitasi Aman	1,25	2,71	2,59	3,36	Belum rilis	Belum rilis

Sumber : BPS Lampung, 2026

Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Capaian akses sanitasi layak pada tahun 2020 sebesar 79,69%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 75,03%. Pada 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 80,82%, namun kembali sedikit menurun pada 2023 (80,23%), 2024 (77,74%) dan 2025 menjadi 77,23%. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar penduduk telah memiliki akses sanitasi layak, keberlanjutan dan kualitas fasilitas masih menjadi tantangan.

Sementara itu, akses sanitasi aman masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2020 sebesar 1,25% dan meningkat bertahap menjadi 3,36% pada 2023. Data tahun 2024 belum dirilis. Rendahnya angka sanitasi aman menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas yang dikategorikan “layak” belum memenuhi standar pengelolaan air limbah domestik secara aman (termasuk pengolahan lumpur tinja dan pembuangan akhir yang memenuhi ketentuan teknis).

2.1.3.1.3.1.7 Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan telah menyusun Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026–2046. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Dalam peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Lampung Utara pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

2.1.3.1.3.1.8 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum kabupaten/kota terdiri atas dua pelayanan, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.52
Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2025

No	PEKERJAAN UMUM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari	100	100	39,80	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	100	57,96	100	100
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100	100	48,88	100	100

Sumber : Bagian Tapem Setdakab, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Utara pada periode 2021–2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, capaian tahun 2021 dan 2022 mencapai 100%, namun turun signifikan pada 2023 menjadi 39,80%. Pada 2024 dan 2025 kembali mencapai 100%. Pola yang sama juga terjadi pada indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, yang mencapai 100% pada 2021–2022, turun menjadi 57,96% pada 2023, kemudian kembali pulih menjadi 100% pada 2024–2025.

Secara agregat, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menunjukkan kondisi identik, yakni 100% pada 2021–2022, turun menjadi 48,88%

pada 2023, dan kembali mencapai 100% pada 2024–2025. Penurunan signifikan pada 2023 disebabkan oleh :

1. Penyesuaian metode penghitungan atau perubahan indikator berbasis regulasi terbaru.
2. Keterbatasan dukungan anggaran atau kendala teknis pelaksanaan program.
3. Pembaruan data verifikasi capaian layanan dasar.

Kembalinya capaian ke angka 100% pada 2024–2025 menunjukkan adanya perbaikan tata kelola, penguatan intervensi program, dan konsolidasi pelaporan kinerja pelayanan dasar.

2.1.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

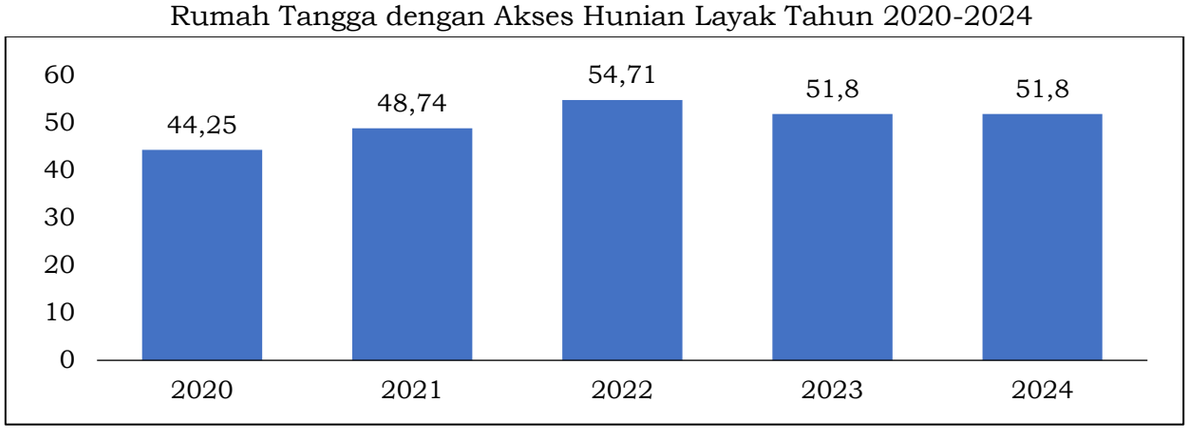
2.1.3.1.4.1.1 Akses Hunian Layak

Di Kabupaten Lampung Utara, tantangan dalam pemenuhan hunian layak masih berkaitan dengan keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH), keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kondisi infrastruktur dasar permukiman yang belum merata. Permukiman di wilayah perdesaan dan kawasan padat penduduk menjadi prioritas intervensi karena umumnya memiliki kualitas bangunan dan akses prasarana dasar yang relatif lebih rendah.

Dalam konteks RKPD, peningkatan akses hunian layak memiliki korelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, kebijakan perumahan dan kawasan permukiman perlu dirumuskan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.12

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis

Sumber : BPS Lampung, 2025

2.1.3.1.4.1.2 Kawasan Kumuh

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Tabel 2.53

Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh

No	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	Ket
	Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotabumi Selatan	Kelapa Tujuh	4,51	2.238	2.277	

No	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	Ket
	Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7
2	Kotabumi Selatan	Tanjung Aman	9,94	2.111	2.126	
3	Kotabumi Selatan	Tanjung Harapan	12,98	1.825	1.849	
4	Kotabumi Selatan	Tanjung Senang	4,99	618	653	
5	Kotabumi	Kotabumi Tengah	7,64	766	781	
6	Kotabumi	Cempedak	2,01	1.014	1.029	
7	Kotabumi	Sri Basuki	8,65	1.626	1.639	
8	Abung Selatan	Candimas	13,35	904	925	
9	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	13,61	8.310	8.685	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Lampung Utara, 2025

2.1.3.1.4.1.3 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat. SPM ini mencakup layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman. Pemenuhan SPM perumahan tidak hanya berorientasi pada kuantitas unit rumah yang dibangun atau direhabilitasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hunian sesuai standar keselamatan bangunan, kecukupan ruang, serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan integrasi perencanaan tata ruang, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur dasar. Dikarenakan tidak terjadi bencana, maka realisasi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah 100% pada tahun 2025.

2.1.3.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Di Kabupaten Lampung Utara, dinamika tindak kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi, kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, serta perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Jenis tindak kriminal yang umumnya terjadi meliputi pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan pelanggaran ketertiban umum.

Upaya pengendalian kriminalitas dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, termasuk penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), peningkatan patroli, edukasi hukum, serta program pencegahan berbasis komunitas. Pendekatan preventif menjadi kunci dalam menekan potensi gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Tabel 2.54

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Lampung Utara	68	70	71	74	74

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. LU, 2025

Dalam upaya menciptakan rasa aman di Kabupaten Lampung Utara Pemerintah Kabupaten selalu berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resort Lampung Utara, Kodim 0412 Lampung Utara,

Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri, yaitu dengan bersinergi dan memfasilitasi dalam rangka penegakan hukum wilayah Lampung Utara.

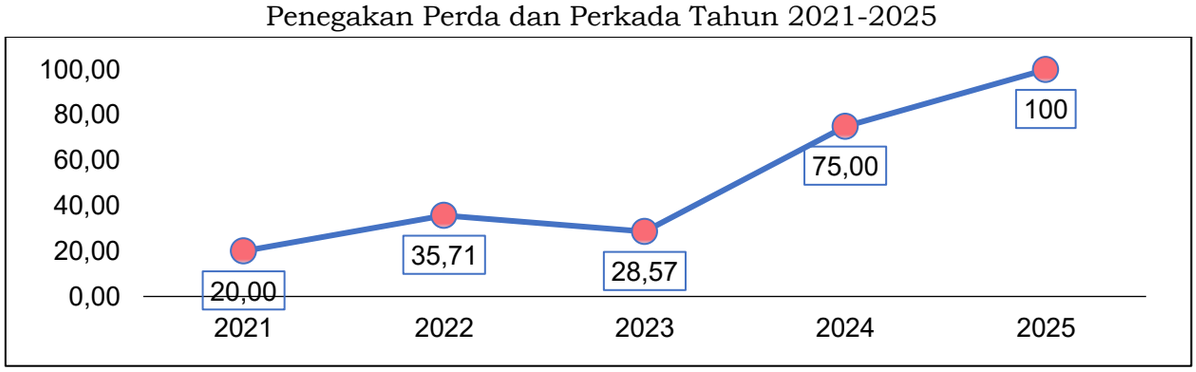
Tabel 2.55
Jumlah Kejahatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		1.127	1.400	1.600	1.600
2	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk		12,3	15	17	17
3	Persentase Penyelesaian Kejahatan		11,4	50,9	56,6	56,6

Sumber : BPS Lampung, 2025

Perkembangan indikator kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 1.127 kasus, meningkat menjadi 1.400 kasus pada 2023, dan kembali naik menjadi 1.600 kasus pada 2025. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya dinamika gangguan kamtibmas, meskipun juga dapat dipengaruhi oleh membaiknya sistem pelaporan dan akses masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus, risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk turut mengalami kenaikan, dari 12,3 (2022) menjadi 15 (2023) dan 17 (2024 dan 2025). Tren ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap tindak kriminal relatif meningkat dan memerlukan penguatan strategi pencegahan. Namun demikian, terdapat perkembangan positif pada aspek persentase penyelesaian kejahatan, yang meningkat signifikan dari 11,4% pada 2022 menjadi 50,9% pada 2023 dan 56,6% pada 2024 dan 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja penegakan hukum dan efektivitas proses penyidikan dalam menyelesaikan perkara. Di Kabupaten Lampung Utara telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang terdiri dari 10 Tata Tertib.

Grafik 2.13
Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2021-2025



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. LU, 2026

Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian berada pada 100%, namun mengalami penurunan tajam pada 2021 menjadi 20%, kemudian meningkat menjadi 35,71% pada 2022, kembali menurun pada 2023 menjadi 28,57%, dan meningkat signifikan pada 2024 menjadi 75%.

Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa konsistensi penegakan regulasi daerah masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, pengawasan, maupun koordinasi antarperangkat daerah. Penurunan capaian pada periode 2021–2023 dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas kebijakan, atau belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi penegakan regulasi.

Peningkatan pada tahun 2024 menjadi 75% menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pengawasan dan implementasi regulasi. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan efektivitas kebijakan daerah.

Dalam konteks RKPD, penguatan penegakan Perda dan Perkada perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur penegak perda, optimalisasi fungsi pengawasan, digitalisasi sistem pemantauan kepatuhan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Konsistensi penegakan hukum daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berwibawa.

2.1.3.1.5.2 Pencegahan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

2.1.3.1.5.2.1 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Komponen penilaian IKD Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 71 Indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 Prioritas, yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (9 indikator);
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu (4 indikator);
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan Logistik (13 indikator);
4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana (5 indikator);
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (12 indikator);
6. Perkuatan kesiap-siagaan dan penanganan darurat bencana (24 indikator); 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (4 indikator).

Tingkat kapasitas daerah dikelompokan dalam 3 kategori berdasarkan nilai IKD, yaitu nilai IKD ≤ 0,4 merupakan kategori rendah, 0,41 - 0,8 sedang, dan nilai IKD >0,8 merupakan kategori tinggi.

Tabel 2.56
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023-2025

No	Uraian	2023	2024	2025	Ket
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,31	0,29	0,32	

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Utara, 2026

Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Utara selama periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, namun secara keseluruhan mengalami perbaikan. Pada tahun 2023, IKD tercatat sebesar 0,31, kemudian menurun menjadi 0,29 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,45 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya pelemahan kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan, maupun risiko bencana. Pada tahun 2025, IKD meningkat menjadi 0,32, atau tumbuh sebesar 10,34 persen dibandingkan tahun 2024 dan meningkat sekitar 3,23 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, serta pemulihan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan.

Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2025, nilai IKD masih relatif rendah sehingga menunjukkan bahwa ketahanan daerah belum sepenuhnya kuat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Lampung Utara masih memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi maupun dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan ketahanan daerah perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem peringatan dini, penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta

integrasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, perkembangan Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan tren yang membaik pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, fluktuasi nilai IKD mengindikasikan bahwa ketahanan daerah masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Ke depan, diperlukan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan risiko secara terpadu agar pembangunan daerah menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

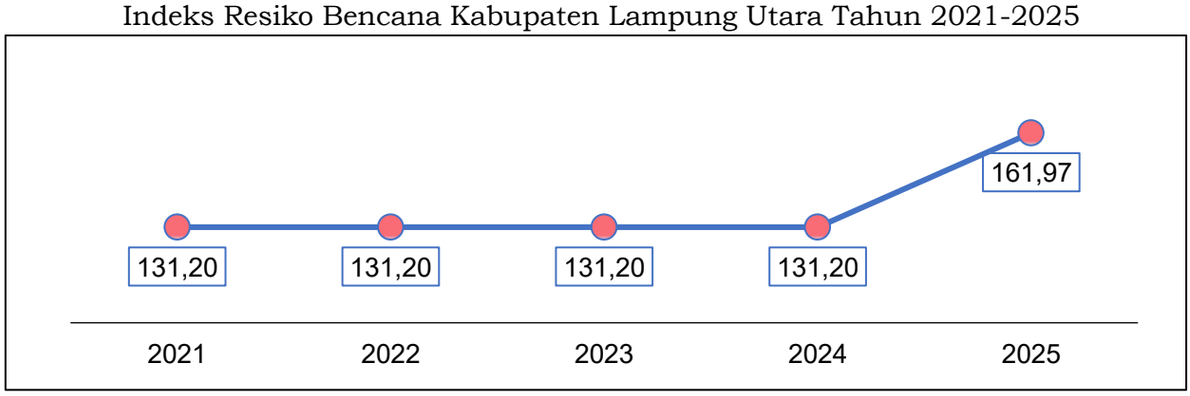
Secara konseptual, indeks ketahanan daerah menggambarkan kemampuan wilayah dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan diri dari berbagai potensi gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan pembangunan. Penurunan nilai indeks dapat mengindikasikan meningkatnya kerentanan pada salah satu atau beberapa dimensi, seperti stabilitas sosial, daya tahan ekonomi masyarakat, atau kapasitas kelembagaan.

2.1.3.1.5.2.2 Kejadian Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indeks yang digunakan untuk menilai dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman (hazard) berubah menjadi bencana. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi Pemerintah dan stakeholder lainnya tentang tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana memberikan informasi mengenai perbandingan antara besarnya potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Risiko Bencana juga menunjukkan kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin tinggi nilai Indeks Risiko Bencana menggambarkan semakin rendah upaya peningkatan kapasitas dan sebaliknya semakin rendah nilai Indeks Risiko Bencana menggambarkan upaya peningkatan kapasitas yang semakin baik. Setiap tahun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan daftar Indeks Risiko Bencana untuk berbagai wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Grafik 2.14

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Buku IRBI, 2026

Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lampung Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya peningkatan risiko bencana yang cukup signifikan. Selama tahun 2020–2024, nilai IRB relatif stagnan pada angka 131,20, yang mengindikasikan belum adanya perubahan yang berarti terhadap tingkat risiko bencana di daerah. Namun pada tahun 2025, nilai IRB meningkat menjadi 161,97, atau naik 30,77 poin dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan peningkatan sekitar 23,45 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Lampung Utara semakin tinggi. Peningkatan IRB menggambarkan adanya peningkatan tingkat ancaman bencana, bertambahnya jumlah penduduk dan aset yang

berpotensi terdampak, serta masih perlunya penguatan kapasitas daerah dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana. Kondisi ini menjadi perhatian karena tingginya risiko bencana berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah, terutama pada sektor pertanian, infrastruktur, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya risiko bencana juga menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan dasar, meningkatkan kerentanan masyarakat, serta memperbesar beban pembiayaan pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya penanggulangan bencana harus lebih menitikberatkan pada pengurangan risiko melalui pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, mitigasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan ketahanan daerah. Oleh karena itu, peningkatan IRB pada tahun 2025 menjadi sinyal bahwa aspek pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan secara lebih kuat dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, kondisi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2025 setelah relatif stabil selama lima tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana semakin tinggi sehingga diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan daerah, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana secara terpadu. Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana tersebut, beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah adalah:

- Meningkatnya tingkat risiko bencana menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengurangi risiko belum mampu mengimbangi peningkatan ancaman dan kerentanan wilayah.
- Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur masih perlu diperkuat.
- Kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui edukasi, simulasi, dan penguatan desa tangguh bencana.
- Infrastruktur pengendalian bencana seperti sistem peringatan dini, pengendalian banjir, konservasi daerah aliran sungai, dan perlindungan kawasan lindung masih memerlukan peningkatan untuk mengurangi tingkat paparan risiko.
- Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu semakin diperkuat agar upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi.
- Ketersediaan data kebencanaan yang mutakhir dan komprehensif masih perlu ditingkatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, dan pengambilan keputusan berbasis risiko (*risk-informed development*).

Dengan kondisi tersebut, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara agar pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan serta lebih tangguh terhadap berbagai ancaman bencana dan perubahan iklim.

2.1.3.1.5.3 Kejadian Bencana

Tabel 2.57
Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023

No	Waktu Kejadian		Jenis Bencana	Lokasi
1	2023	Februari	Angin Puting Beliung	Kecamatan Bukit Kemuning
			Banjir	Kecamatan Bunga Mayang
		02 Maret	Kebakaran	Kecamatan Abung Surakarta Desa Bumi Restu
			Angin Puting Beliung	Kecamatan Abung Pekurun Desa Nyapah Banyu
2	2022	Maret	Angin Puting Beliung	Desa Bumi Raya (167 rumah)
		10-Nov	Banjir	Kecamatan Kota Bumi
3	2020	12-Apr	Banjir	Kecamatan Kotabumi Selatan Desa Tanjung Harapan
4	2019	21Januari	Gempa Tektonik	Pada Koordinat episenter 4.90 LS dan 104.79 BT. Pusat gempa pada jarak 11 Km barat daya Lampung Utara di kedalaman 181 Km
			Banjir	Kecamatan Kota Bumi: Desa Talang Bojong, Desa Kotabumi Tengah Barat, Desa Sabuk Empat

Sumber : BPBD Lampung Utara, 2024

Berdasarkan data kejadian bencana periode 2019–2023, Kabupaten Lampung Utara tergolong wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan angin puting beliung. Selain itu, tercatat pula kejadian gempa tektonik yang berdampak pada wilayah kabupaten. Pada tahun 2019 terjadi gempa tektonik dengan episenter pada koordinat 4,90 LS dan 104,79 BT, berjarak ±11 km barat daya wilayah Lampung Utara dengan kedalaman 181 km. Pada tahun yang sama, bencana banjir terjadi di Kecamatan Kotabumi, meliputi Desa Talang Bojong, Kotabumi Tengah Barat, dan Sabuk Empat. Tahun 2020 kembali terjadi banjir di Kecamatan Kotabumi Selatan (Desa Tanjung Harapan), menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki kerentanan berulang terhadap limpasan air dan sistem drainase yang belum optimal.

Memasuki tahun 2022, kejadian angin puting beliung terjadi di Desa Bumi Raya dengan dampak kerusakan mencapai 167 rumah, serta banjir di Kecamatan Kotabumi. Tahun 2023 tercatat beberapa kejadian bencana, antara lain angin puting beliung di Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Abung Pekurun (Desa Nyapah Banyu), banjir di Kecamatan Bunga Mayang, serta kebakaran di Kecamatan Abung Surakarta (Desa Bumi Restu). Secara teknokratik, pola kejadian tersebut menunjukkan dominasi bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh faktor curah hujan tinggi, perubahan tata guna lahan, kapasitas drainase, serta kerentanan struktur bangunan masyarakat. Wilayah Kotabumi dan sekitarnya tercatat sebagai kawasan dengan frekuensi banjir yang relatif berulang, sehingga memerlukan penanganan prioritas.

2.1.3.1.5.4 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.58
SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2025

No	Jenis Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan informasi rawan bencana	75	73.19	99,50	100	96,67
2	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	75	89.70	98,90	100	96,67

No	Jenis Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	99,60	100	95
4	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	96,67
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100
	SPM Trantibumlinmas	90	77,94	99,6	100	97,00

Sumber : Bagian Tapem Setdakab, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Secara agregat, nilai SPM Trantibumlinmas meningkat dari 90% pada 2021, sempat menurun menjadi 77,94% pada 2022, kemudian melonjak menjadi 99,6% pada 2023, mencapai 100% pada 2024, dan relatif terjaga tinggi pada 2025 sebesar 97%.

2.1.3.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

2.1.3.1.6.1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penetapan KPM dilakukan melalui pemanfaatan basis data terpadu kesejahteraan sosial yang diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala. Ketepatan sasaran menjadi aspek krusial agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok desil terbawah dan rumah tangga rentan. Oleh karena itu, proses validasi, verifikasi lapangan, dan integrasi data dengan kependudukan menjadi bagian penting dalam tata kelola program.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan KPM bantuan sosial pangan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi pangan, serta pencegahan kerawanan sosial. Namun demikian, ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap peluang usaha agar keluarga penerima dapat bertransformasi menuju kemandirian.

Tabel 2.59

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2020-2025

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	2021	2022	2023	2024	2025
Rencana		454.206	413.451	308.389	308.389
Realisasi		434.050	408.309	304.652	304.652
Persentase		95,56	98,76	98,79	98,79

Sumber : BPS Lampung, 2026 (diolah)

Pada tahun 2023, dari rencana sebanyak 413.451 KPM, terealisasi 408.309 KPM atau sebesar 98,76%. Pada tahun 2024, target menurun menjadi 308.389 KPM dengan realisasi 304.652 KPM atau 98,79%. Kondisi yang sama berlanjut pada tahun 2025 dengan rencana dan realisasi identik seperti tahun 2024, serta tingkat capaian tetap 98,79%.

Beberapa poin analitis yang dapat disampaikan:

1. Tingkat Ketepatan Penyaluran Tinggi. Persentase realisasi yang konsisten di atas 98% menunjukkan tata kelola distribusi bantuan relatif efektif, baik dari sisi penetapan sasaran maupun mekanisme penyaluran.
2. Penurunan Jumlah KPM Sejak 2024. Penurunan signifikan jumlah rencana KPM dari 413.451 (2023) menjadi 308.389 (2024–2025) mengindikasikan adanya pemutakhiran dan rasionalisasi data penerima, atau perubahan kebijakan kuota nasional, atau perbaikan kondisi sosial ekonomi sebagian rumah tangga.

3. Konsistensi 2024–2025. Target dan realisasi yang stagnan pada 2024–2025 menunjukkan stabilisasi jumlah penerima, namun juga mengindikasikan belum adanya transformasi signifikan dari KPM menuju graduasi (keluar dari kepesertaan).

2.1.3.1.6.2 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Dalam kerangka pembangunan yang inklusif, penyandang disabilitas bukan dipandang sebagai objek bantuan semata, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, serta kontribusi bagi kemajuan daerah. Pendekatan pembangunan terhadap disabilitas perlu bergeser dari paradigma belas kasihan (*charity based approach*) menuju paradigma berbasis hak (*rights based approach*). Artinya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta fasilitas publik yang ramah disabilitas. Penyediaan infrastruktur yang aksesibel, layanan administrasi yang inklusif, serta kesempatan kerja yang adil menjadi indikator penting keberpihakan kebijakan.

Tabel 2.60
Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2025

No	Penyandang Disabilitas	2022	2023	2024	2025
1	Disabilitas Fisik				
	Daksa	308	308	308	308
	Eks Kusta/ Penyakit Kronis	23	23	23	23
2	Disabilitas Mental				
	Mental (Gangguan Jiwa)	100	100	100	100
	Autis	4	4	4	4
3	Disabilitas Sensorik				
	Rungu	42	42	42	42
	Wicara	17	17	17	17
	Penglihatan Rendah	19	19	19	19
	Buta Total	56	56	56	56
4	Disabilitas Intelektual				
	Lambat Belajar	7	7	7	7
	Grahita	85	85	85	85
	Sindrom Down	8	8	8	8
5	Disabilitas Ganda	355	355	355	355
	Jumlah	1.024	1.024	1.024	1.024

Sumber : BPS Lampung, 2026 (diolah)

2.1.3.1.6.3 Capaian SPM Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan korban bencana sosial. SPM ini menjadi instrumen untuk memastikan pelayanan sosial dilaksanakan secara terukur, merata, dan berkualitas sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Tabel 2.61
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2025

No	SOSIAL	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	97,49	97,85	96,92

No	SOSIAL	2021	2022	2023	2024	2025
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	67,43	96,72	96,67
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	78,98	96,86	93,85
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	100	95,18	96,96	95
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100	97	90,53	99,36	98,93
	Jumlah	100,00	99,40	85,92	97,55	96,27

Sumber : Bagian Tapem Setdakab, 2026 (diolah)

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

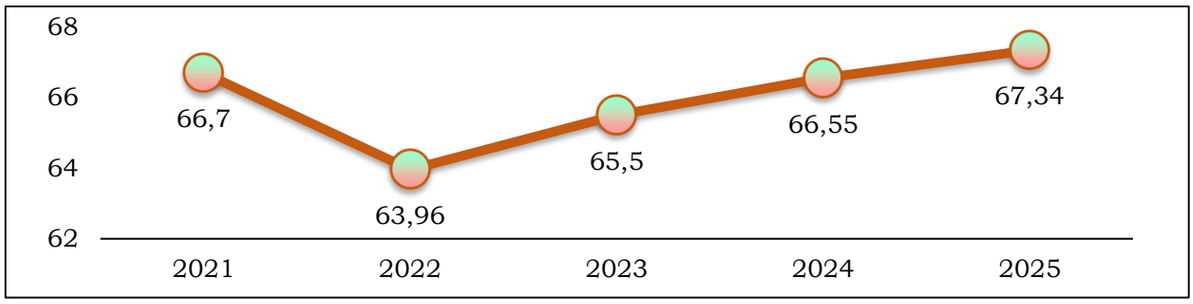
2.1.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1 Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja menggambarkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan karena mencerminkan dinamika pasokan tenaga kerja serta tekanan terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi menunjukkan meningkatnya partisipasi penduduk dalam aktivitas ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor demografi (bonus demografi), peningkatan tingkat pendidikan, serta membaiknya akses terhadap informasi dan peluang kerja. Namun, apabila pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai, maka berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka dan memperbesar beban sosial ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan angkatan kerja yang moderat dan sejalan dengan ekspansi sektor produktif akan menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan investasi dan sektor-sektor padat karya, sehingga pertumbuhan angkatan kerja dapat terserap secara optimal dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Lampung, 2026 (diolah)

Pada periode 2021–2025, indikator Lampung Utara menunjukkan pola penurunan di awal periode kemudian berangsur pulih. Tahun 2021 tercatat sebesar 66,7, kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 63,96, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan atau gangguan yang berdampak pada capaian indikator tersebut. Memasuki tahun 2023 terjadi pemulihan menjadi 65,5, dilanjutkan peningkatan pada tahun 2024 menjadi 66,55, dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 67,34. Tren ini menunjukkan proses recovery yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Kesimpulan Analitis, pada tahun 2021–2022 merupakan fase kontraksi/penurunan. Tahun 2023–2025 merupakan fase pemulihan bertahap dan stabil. Kemudian tahun 2025 telah melampaui capaian 2021, namun masih perlu dorongan kebijakan agar peningkatan lebih progresif dan berkelanjutan. Secara umum, periode 2023–2025 menjadi momentum positif yang perlu diperkuat melalui intervensi kebijakan yang lebih terarah agar tren kenaikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pengangguran merujuk pada seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum berhasil mendapatkannya. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan isu sosial dan pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Angka TPT dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

Grafik 2.16
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lampung Utara,
Lampung, dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	6,14	6,15	5,73	5,85	5,78
LAMPUNG	4,69	4,52	4,23	4,19	4,21
NASIONAL	5,83	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : BPS, 2026 (diolah)
*Agustus 2025

Perkembangan tingkat pengangguran/indikator ketenagakerjaan Lampung Utara periode 2021–2025 menunjukkan tren menurun secara gradual (6,14 menjadi 5,78). Namun jika dikaitkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), analisisnya menjadi lebih komprehensif karena TPAK mencerminkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja.

Secara konseptual :

- Jika TPAK meningkat dan pengangguran menurun, berarti pasar kerja membaik: lebih banyak penduduk masuk angkatan kerja dan terserap.
- Jika TPAK meningkat tetapi pengangguran juga tinggi, berarti penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi tambahan angkatan kerja.
- Jika TPAK menurun dan pengangguran turun, bisa jadi penurunan pengangguran disebabkan oleh keluarnya penduduk dari pasar kerja (*discouraged workers*), bukan karena terserapnya tenaga kerja.

Dalam konteks Lampung Utara 2021–2025, Penurunan angka dari 6,14 (2021) menjadi 5,78 (2025) menunjukkan perbaikan relatif. Namun posisi masih lebih tinggi dibanding Provinsi Lampung dan Nasional, yang mengindikasikan tekanan struktural pasar kerja daerah.Apabila TPAK Lampung Utara dalam periode yang sama cenderung tinggi, maka ini menandakan dinamika ekonomi cukup aktif tetapi daya serap lapangan kerja belum optimal. Jika TPAK justru stagnan atau menurun, maka perbaikan indikator pengangguran perlu dicermati karena bisa dipengaruhi oleh berkurangnya partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2.62

Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	2.563	2.468	2.476	2.077	1.704
2	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	384	978	314	941	134
3	Persentase Penempatan Kerja	14,98	39,63	12,68	45,31	7,86
4	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	2.461.850	2.440.486	2.656.089	2.716.497	2.893.070
5	Jumlah Layanan Pekerja Migran			868	1.044	996

Sumber : BPS Lampung, 2026 (diolah)

Data menunjukkan dinamika pasar kerja yang cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi pencari kerja, penempatan tenaga kerja, maupun kebijakan pengupahan. Jumlah pencari kerja terdaftar mengalami tren menurun dari 2.563 orang (2021) menjadi 1.704 orang (2025). Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai berkurangnya tekanan pencari kerja baru, perubahan pola pendaftaran (tidak semua pencari kerja mendaftar), dan sebagian terserap ke sektor informal/mandiri. Penempatan tenaga kerja menunjukkan pola sangat fluktuatif dimana pada tahun 2021 sebanyak 384 orang, tahun 2022 naik signifikan menjadi 978, tahun 2023 turun menjadi 314, tahun 2024 kembali melonjak 941 dan tahun 2025 turun tajam menjadi 134. Fluktuasi ini berdampak langsung pada persentase penempatan kerja, yang tertinggi pada 2024 (45,31%) dan terendah pada 2025 (7,86%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem matching tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja belum stabil. UMK menunjukkan tren meningkat dari Rp2.461.850 (2021) menjadi Rp2.893.070 (2025), meskipun sempat turun pada 2022. Kenaikan ini berdampak positif terhadap daya beli pekerja, namun berpotensi mempengaruhi keputusan perekrutan tenaga kerja oleh pelaku usaha, terutama sektor padat karya. Jumlah layanan pekerja migran mulai tercatat sejak 2023 (868), meningkat pada 2024 (1.044), lalu sedikit menurun pada 2025 (996). Hal ini menunjukkan tingginya minat atau kebutuhan masyarakat untuk bekerja di luar daerah/luar negeri sebagai alternatif kesempatan kerja.

2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.2.1 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Lampung Utara juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Lampung Utara, baik perempuan maupun laki-laki. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah :

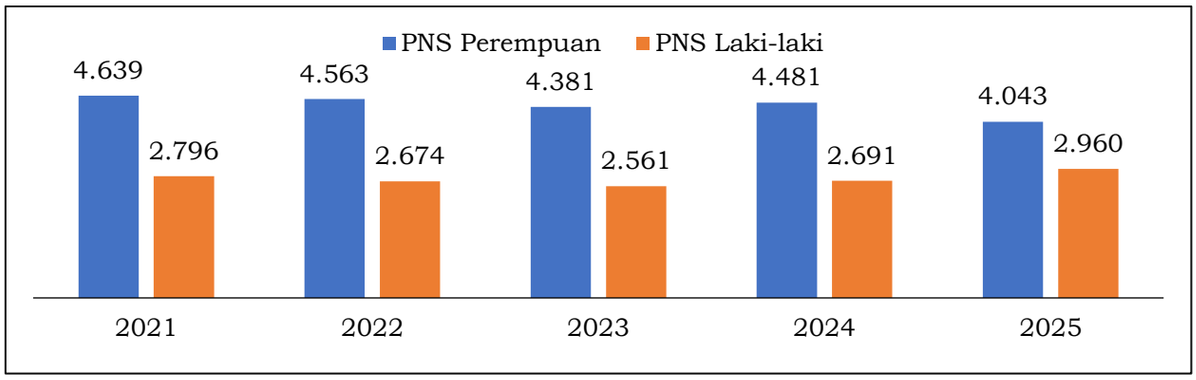
a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan
c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu pengakuan Kementerian PPPA atas komitmen dan peran serta para pimpinan di daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan berbagai bidang pembangunan yang telah dilakukan adalah dengan pemberian Anugrah Parahita Ekapraya (APE). APE diberikan 2 tahun sekali sesuai evaluasi dari Kementerian PPPA. Pada 2 tahun terakhir Kabupaten Lampung Utara mendapatkan APE peringkat Pratama. Pada tahun 2025 diharapkan akan naik ke peringkat Madya.tentunya dengan peningkatan peran serta dan komitmen semua pihak.

2.1.3.2.2.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan jenis kelamin, serta data pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara :

Grafik 2.17
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Jumlah PNS perempuan mengalami tren menurun dari 4.639 orang (2021) menjadi 4.043 orang (2025). Penurunan cukup signifikan terjadi pada 2022 dan 2023, sempat meningkat pada 2024 (4.481), lalu kembali turun pada 2025. Secara kumulatif, terjadi pengurangan sekitar 596 orang dalam lima tahun. Jumlah PNS laki-laki juga menurun pada periode 2021–2023 (2.796 menjadi 2.561), namun sejak 2024 mengalami kenaikan hingga 2.960 pada 2025. Artinya, dalam dua tahun terakhir terjadi penguatan komposisi PNS laki-laki. Tahun 2021, proporsi perempuan sekitar ±62% dari total PNS. Tahun 2025, proporsi perempuan menurun menjadi sekitar ±58%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi yang lebih seimbang, meskipun perempuan tetap menjadi mayoritas. Penurunan jumlah PNS perempuan dipengaruhi oleh faktor pensiun, mutasi, atau formasi rekrutmen baru yang lebih banyak terisi laki-laki, kenaikan jumlah PNS laki-laki pada 2024–2025 dapat mencerminkan perubahan kebutuhan jabatan tertentu atau hasil seleksi ASN. Secara umum, keseimbangan gender dalam birokrasi penting untuk mendukung prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

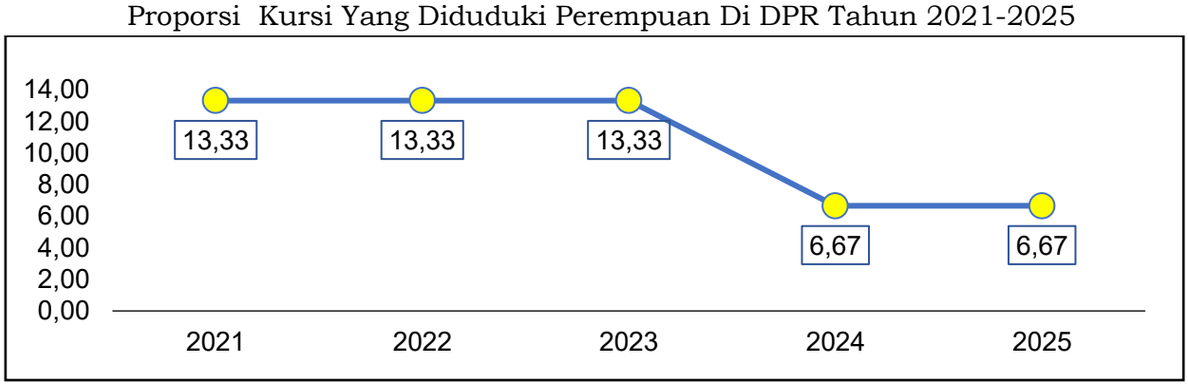
2.1.3.2.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen, begitu juga di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lampung Utara merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Keterwakilan perempuan di DPRD tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga memperkuat kualitas kebijakan publik melalui perspektif yang lebih beragam dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keberadaan perempuan di parlemen daerah memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan, anak, kelompok rentan, serta isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Partisipasi yang optimal juga mendukung implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Namun demikian, tantangan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan proporsi keterwakilan, dinamika politik elektoral, serta penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam arena legislatif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan dalam proses

politik. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif, diharapkan proses pengambilan keputusan di Lampung Utara menjadi lebih partisipatif, adil, dan mampu merepresentasikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara seimbang. Partisipasi perempuan di Lembaga Legilatif di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

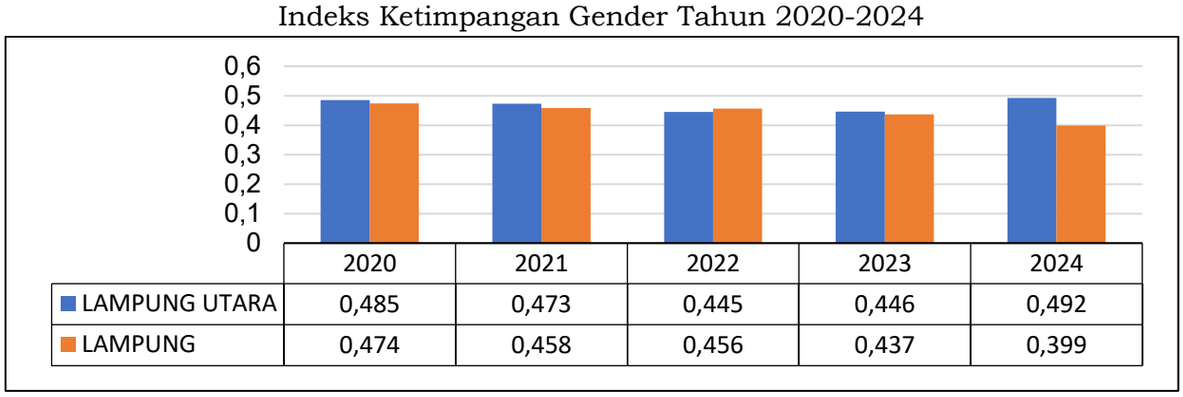
Grafik 2.18
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

2.1.3.2.2.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
erkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan dinamika yang berbeda antara Lampung Utara dan Provinsi Lampung.

Grafik 2.19
Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
LAMPUNG UTARA	0,485	0,473	0,445	0,446	0,492
LAMPUNG	0,474	0,458	0,456	0,437	0,399

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : BPS Lampung, 2025

Untuk Nilai IKG di Lampung Utara mengalami penurunan dari 0,485 (2020) menjadi 0,445 (2022), yang menunjukkan perbaikan ketimpangan gender dalam dua tahun awal periode tersebut. Tahun 2023 relatif stagnan di angka 0,446. Namun pada 2024 terjadi kenaikan cukup signifikan menjadi 0,492, yang berarti tingkat ketimpangan gender kembali meningkat dan bahkan lebih tinggi dibanding tahun 2020. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pelebaran kesenjangan, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), maupun partisipasi ekonomi perempuan.

Sementara untuk Provinsi Lampung, Sebaliknya, Provinsi Lampung menunjukkan tren perbaikan yang lebih konsisten, dari 0,474 (2020) menjadi 0,399 (2024). Artinya, secara agregat provinsi berhasil menekan ketimpangan gender secara bertahap. Pada 2022–2023, posisi Lampung Utara relatif sejalan dengan provinsi. Tahun 2024 terjadi divergensi yang cukup lebar, di mana Lampung Utara (0,492) jauh di atas Provinsi Lampung (0,399), hal ini menunjukkan bahwa perbaikan di tingkat provinsi belum sepenuhnya tercermin di kabupaten.

Peningkatan IKG tahun 2024 perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan daerah, dengan fokus pada:

1. Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan (akses kerja dan usaha).
2. Penguatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.
3. Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan perempuan.
4. Integrasi anggaran responsif gender dalam RKPD.

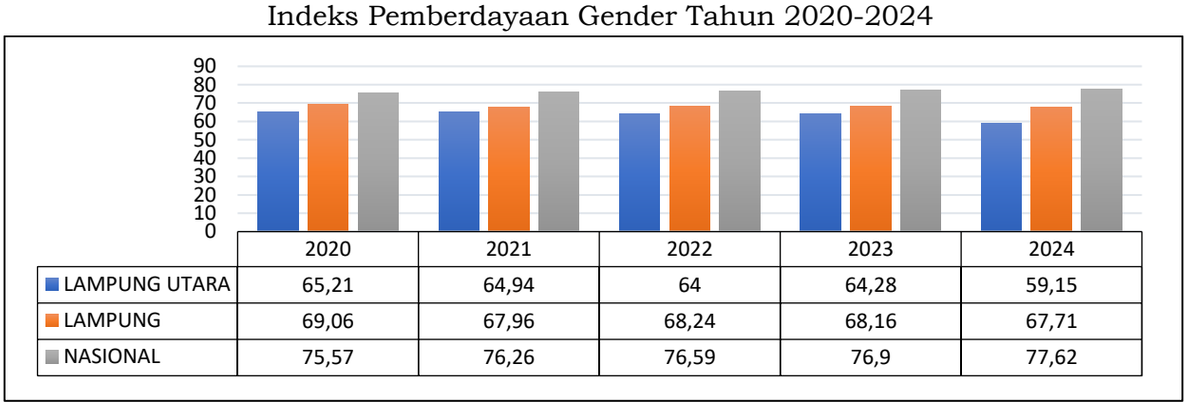
Secara umum, tahun 2024 menjadi sinyal bahwa pengarusutamaan gender di Lampung Utara perlu diperkuat kembali agar ketimpangan dapat ditekan dan selaras dengan capaian perbaikan di tingkat provinsi.

2.1.3.2.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.20

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
LAMPUNG UTARA	65,21	64,94	64	64,28	59,15
LAMPUNG	69,06	67,96	68,24	68,16	67,71
NASIONAL	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62

*) Data 2025 belum rilis

Sumber : BPS Lampung, 2025

Berdasarkan data 2020–2024, terlihat adanya kesenjangan yang cukup lebar antara Lampung Utara, Provinsi Lampung, dan Nasional, serta tren penurunan yang perlu menjadi perhatian. Untuk di Kabupaten Lampung Utara nilai indikator mengalami penurunan bertahap dari 65,21 (2020) menjadi 64,00 (2022), sempat naik tipis pada 2023 menjadi 64,28, namun pada 2024 turun signifikan menjadi 59,15. Penurunan tajam pada 2024 (sekitar -5,13 poin dari 2023) menunjukkan adanya tekanan atau kemunduran yang cukup serius pada aspek yang diukur indikator ini. Provinsi Lampung relatif stabil di kisaran 67–69 poin. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, pada 2024 masih berada di angka 67,71, jauh di atas capaian Lampung Utara. Secara nasional, tren justru meningkat konsisten dari 75,57 (2020) menjadi 77,62 (2024). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan di tingkat nasional yang belum diikuti oleh daerah. Kesenjangan Lampung Utara terhadap Provinsi pada 2024 mencapai sekitar 8,5 poin. Kesenjangan terhadap Nasional bahkan mencapai lebih dari 18 poin. Tren 2024 menunjukkan divergensi, di mana nasional meningkat, provinsi relatif stabil, namun kabupaten mengalami penurunan tajam.

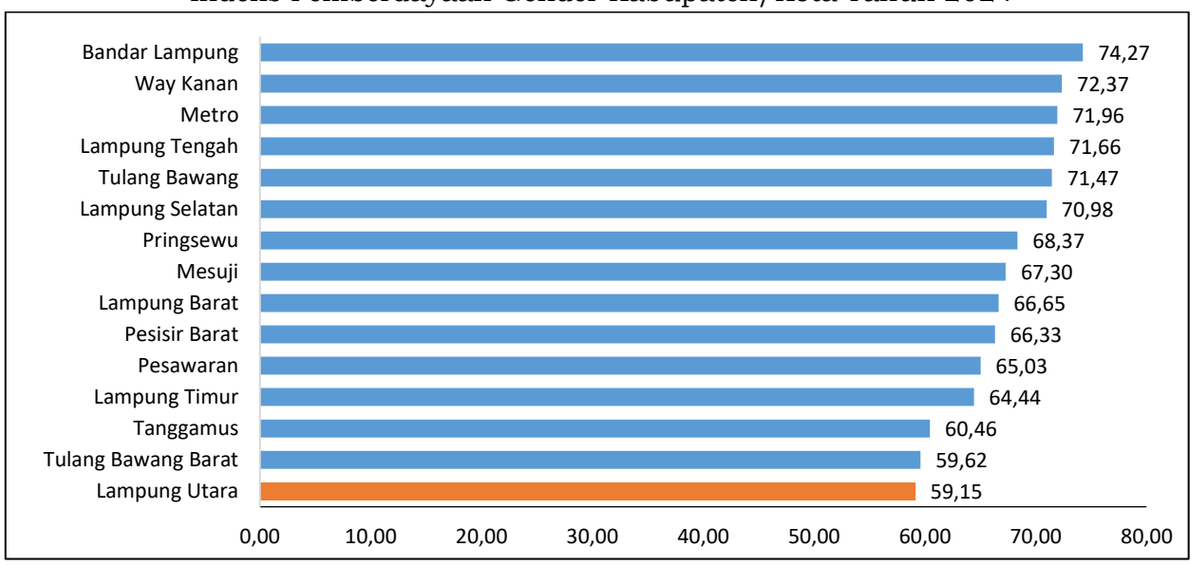
Implikasi Strategis :

1. Tahun 2024 menjadi titik kritis yang perlu evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab penurunan.

2. Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data pada sektor-sektor penyumbang utama indikator tersebut.
3. Perlu sinkronisasi program daerah dengan strategi provinsi dan nasional agar tidak semakin tertinggal.

Secara umum, periode 2020–2023 menunjukkan kondisi relatif stagnan, namun 2024 menjadi alarm penting bahwa penguatan kebijakan dan program prioritas harus segera dilakukan agar capaian tidak semakin menjauh dari rata-rata provinsi dan nasional.

Grafik 2.21
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Tahun 2024



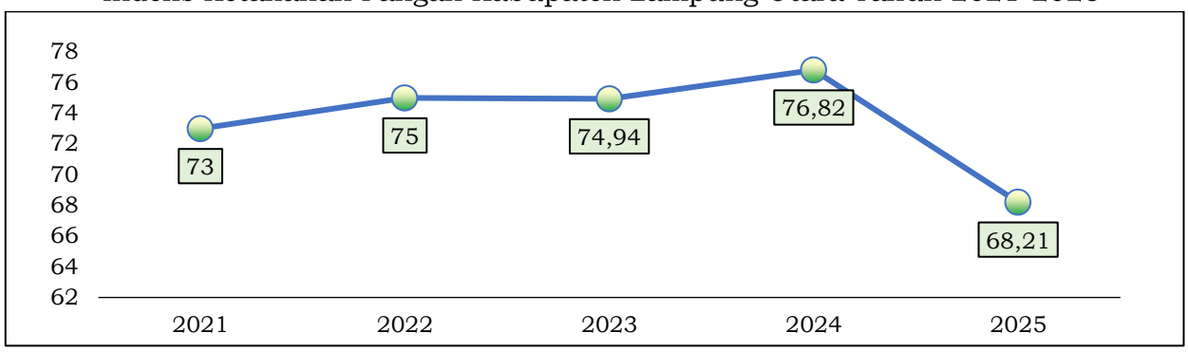
*) Data 2025 belum rilis
Sumber : BPS Lampung, 2025

2.1.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

2.1.3.2.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Secara kumulatif, IKP Kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan sebesar 4,79 poin dari 73,00 pada tahun 2021 menjadi 68,21 pada tahun 2025 atau terkontraksi 6,56 persen selama periode tersebut. Dari sisi perkembangan tahunan, capaian tahun 2021–2024 menunjukkan tren positif. IKP meningkat dari 73,00 menjadi 76,82 atau naik 3,82 poin. Kondisi ini mengindikasikan semakin baiknya kondisi ketahanan pangan daerah yang didukung oleh aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan tajam menjadi 68,21 sehingga menghapus capaian peningkatan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.22
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, nilai IKP Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 sebesar 76,82 dan berada pada kelompok daerah dengan status tahan pangan, meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten maju di Provinsi Lampung

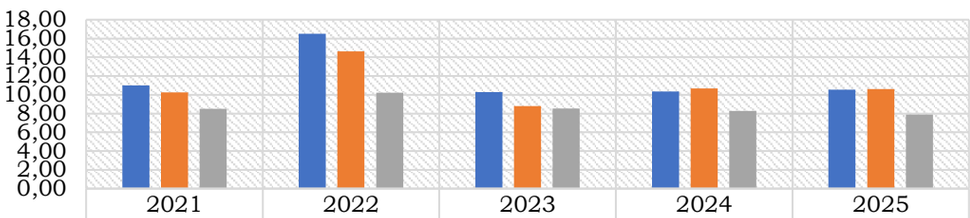
seperti Tulang Bawang, Mesuji, Pringsewu, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Apabila dibandingkan dengan tingkat provinsi, IKP Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 sebesar 76,82 masih berada di bawah IKP Provinsi Lampung yang mencapai 81,56. Dengan demikian terdapat selisih sekitar 4,74 poin yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Lampung Utara masih perlu ditingkatkan agar mampu menyamai rata-rata kondisi ketahanan pangan provinsi. Sementara itu, pada tahun 2025 IKP Provinsi Lampung tercatat sebesar 73,06 dan IKP Nasional sebesar 73,00. Dengan capaian Kabupaten Lampung Utara sebesar 68,21, maka posisi daerah berada 4,85 poin di bawah Provinsi Lampung dan 4,79 poin di bawah Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Secara umum, ketahanan pangan Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2024 menunjukkan perbaikan yang konsisten, mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pangan, stabilitas pasokan pangan, dan pemanfaatan pangan yang lebih baik. Namun penurunan tajam pada tahun 2025 menjadi sinyal bahwa masih terdapat kerentanan pada sistem pangan daerah, baik dari sisi produksi, distribusi, daya beli masyarakat, maupun kualitas konsumsi pangan.

Oleh karena itu, isu strategis pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Utara ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga penguatan cadangan pangan pemerintah, pengendalian kerawanan pangan wilayah, stabilisasi harga pangan, penguatan diversifikasi pangan lokal, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional yang menekankan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berdaya saing. Meskipun Lampung Utara sempat menunjukkan tren peningkatan IKP hingga tahun 2024, penurunan menjadi 68,21 pada tahun 2025 menyebabkan posisi daerah berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah guna mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

2.1.3.2.3.2 Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang konsumsi energinya berada di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Semakin rendah nilai PoU menunjukkan kondisi ketahanan pangan masyarakat yang semakin baik karena semakin sedikit penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan.

Grafik 2.23
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	11,00	16,50	10,28	10,36	10,56
LAMPUNG	10,25	14,63	8,81	10,68	10,62
INDONESIA	8,49	10,21	8,53	8,27	7,89

Sumber : BPS, 2026

Selama periode 2021–2025, PoU Kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan dari 11,00 persen menjadi 10,56 persen atau membaik sebesar 0,44 poin. Secara kumulatif terjadi penurunan sebesar 4,00 persen dibandingkan tahun 2021. Meskipun demikian, perkembangan indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan PoU yang signifikan menjadi 16,50 persen atau naik 50 persen dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, yang dapat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kenaikan harga pangan, maupun menurunnya daya beli masyarakat pascapandemi. Namun demikian, pada tahun 2023 kondisi ketahanan pangan masyarakat membaik secara signifikan dengan turunnya PoU menjadi 10,28 persen atau menurun 37,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan ini menunjukkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan dan membaiknya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Pada tahun 2024 dan 2025, indikator relatif stabil pada kisaran 10 persen, meskipun terdapat sedikit kenaikan menjadi 10,56 persen pada tahun 2025.

Dibandingkan dengan Provinsi Lampung, PoU Kabupaten Lampung Utara pada periode 2021–2023 cenderung lebih tinggi, yang menunjukkan tingkat kerawanan konsumsi pangan masyarakat masih lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi. Pada tahun 2024, Lampung Utara mencatat nilai PoU sebesar 10,36 persen, sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Lampung yang mencapai 10,68 persen. Tahun 2025 kondisi keduanya relatif sama, yaitu 10,56 persen di Lampung Utara dan 10,62 persen di Provinsi Lampung. Sementara itu, dibandingkan dengan rata-rata nasional, PoU Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 selalu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, PoU Lampung Utara sebesar 10,56 persen masih lebih tinggi 2,67 poin persentase dibandingkan nasional yang sebesar 7,89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Lampung Utara masih lebih besar dibandingkan rata-rata Indonesia. Perkembangan PoU menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021, namun tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan masih relatif tinggi. Fakta bahwa lebih dari 10 persen penduduk masih berada pada kondisi konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga akses ekonomi masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan harus diwujudkan melalui terpenuhinya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi pangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta penguatan intervensi pada wilayah dan kelompok masyarakat rentan pangan. Meskipun PoU Kabupaten Lampung Utara tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2021, capaian sebesar 10,56 persen masih menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh penduduk berisiko mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Selain itu, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga penurunan kerawanan pangan dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat perlu tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

2.1.3.2.3.3 Ketersediaan Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil

kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam makanan tersebut. Angka kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2019, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2100 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 2.63
Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Protein Perkapita	kkal/kap/hari	2.842	1.900	2.100	2.100	2.400
Ketersediaan Energi Perkapita	gr/kap/hari	68,55	65,00	68,00	68,00	71,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab LU, 2025

Tahun 2020 tercatat sebesar 2.842 kkal/kap/hari, kemudian turun signifikan pada 2021 menjadi 1.900 kkal/kap/hari. Pada 2022–2023 meningkat menjadi 2.100 kkal, dan kembali naik pada 2024 menjadi 2.400 kkal/kap/hari. Secara umum, setelah penurunan tajam pada 2021, terjadi tren pemulihan bertahap hingga 2024, meskipun belum kembali ke level 2020. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya kapasitas produksi, distribusi, atau akses masyarakat terhadap pangan sumber energi. Ketersediaan protein pada 2020 sebesar 68,55 gr/kap/hari, turun pada 2021 menjadi 65 gr, kemudian meningkat kembali menjadi 68 gr pada 2022–2023, dan mencapai 71 gr/kap/hari pada 2024. Tren ini menunjukkan perbaikan kualitas konsumsi protein masyarakat, bahkan pada 2024 telah melampaui capaian 2020.

2.1.3.2.3.4 Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan di desa merupakan kondisi ketika sebagian rumah tangga tidak memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan produksi pangan, rendahnya daya beli masyarakat, fluktuasi harga bahan pokok, keterisolasian wilayah, hingga faktor bencana alam dan perubahan iklim. Di wilayah perdesaan, kerawanan pangan seringkali berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, serta terbatasnya akses terhadap infrastruktur distribusi dan pasar. Desa dengan akses jalan yang kurang memadai atau jauh dari pusat perdagangan cenderung lebih rentan terhadap gangguan pasokan dan kenaikan harga pangan. Selain itu, rendahnya diversifikasi konsumsi dan minimnya pemahaman gizi juga dapat memperburuk kualitas ketahanan pangan rumah tangga. Penanganan kerawanan pangan desa perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, serta intervensi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan berbasis data desa menjadi penting agar intervensi lebih tepat sasaran dan mampu mencegah terjadinya kerawanan pangan kronis. Dengan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa, stabilitas sosial ekonomi masyarakat dapat terjaga, risiko kemiskinan ekstrem dapat ditekan, serta kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 2.64
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Tingkat Kerawanan Pangan
Tahun 2021-2025

No	Nama Kecamatan	Tahun 2024					Tahun 2025			
		Rentan Pangan Sedang	Rentan Pangan Rendah	Tahan Pangan Rendah	Tahan Pangan Sedang	Tahan Pangan Tinggi	Rentan Pangan Rendah	Tahan Pangan Rendah	Tahan Pangan Sedang	Tahan Pangan Tinggi
1	Bukit Kemuning			4	3	1		1		7

No	Nama Kecamatan	Tahun 2024					Tahun 2025			
		Rentan Pangan Sedang	Rentan Pangan Rendah	Tahan Pangan Rendah	Tahan Pangan Sedang	Tahan Pangan Tinggi	Rentan Pangan Rendah	Tahan Pangan Rendah	Tahan Pangan Sedang	Tahan Pangan Tinggi
2	Abung Tinggi		1	5	2			1	2	5
3	Tanjung Raja	3	6	9	1		2	1	7	9
4	Abung Barat		1	7	5	1		2	4	8
5	Abung Tengah			1	9	1		1	1	9
6	Abung Kunang				7		1		1	5
7	Abung Pekurun		2	3	4			2	4	3
8	Kotabumi			5	7	1		1		12
9	Kotabumi Utara				7	1			1	7
10	Kotabumi Selatan			4	9	1		3		11
11	Abung Selatan			2	10	4			1	15
12	Abung Semuli			1	3	3			1	6
13	Blambangan Pagar				6	1		1	3	3
14	Abung Timur			4	3	5				12
15	Abung Surakarta		1		5	3		1	4	4
16	Sungkai Selatan			4	7			1		10
17	Muara Sungkai	1		5	4	1		2		9
18	Bunga Mayang			3	7	1			2	9
19	Sungkai Barat	1	2	6	1			2	2	6
20	Sungkai Jaya		2	4	3		1	2	1	5
21	Sungkai Utara		1	10	4			2	2	11
22	Hulu Sungkai			5	4	1		2	1	7
23	Sungkai Tengah		3	2	3				1	7
	Jumlah	5	19	84	114	25	4	25	38	180

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Interpretasi Strategis :

1. Penurunan Desa Rentan. Jumlah desa dalam kategori rentan pangan berkurang, menandakan perbaikan akses, ketersediaan, maupun stabilitas pangan di tingkat desa.
2. Lonjakan Tahan Pangan Tinggi. Peningkatan signifikan desa tahan pangan tinggi menunjukkan adanya penguatan intervensi ketahanan pangan, baik melalui peningkatan produksi, distribusi, maupun daya beli masyarakat.
3. Perlu Validasi dan Konsistensi Data. Pergeseran yang sangat besar dalam satu tahun perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan konsistensi metodologi pengukuran dan validitas data.

2.1.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah. Di Kabupaten Lampung Utara, penyelenggaraan urusan pertanahan diarahkan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, serta penyelesaian berbagai permasalahan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan urusan pertanahan meliputi fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung program reforma agraria dan penataan penggunaan tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.65

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk pembangunan	2	4	5	3	2
Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah	-	90,6 Ha .451, 1 M	-	-	-
Persentase Tanah Bersertifikat	64,5	66,7%	67,2%	68,6%	69,8%

Sumber : ATR BPN Lampung Utara, 2025

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu sumber daya penting yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Aset tanah tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain pembangunan fasilitas pelayanan publik, perkantoran pemerintahan, sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ruang terbuka publik. Namun demikian, pengelolaan aset tanah pemerintah daerah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya tertib administrasi dan legalitas kepemilikan tanah, seperti belum seluruh aset tanah memiliki sertifikat kepemilikan. Selain itu, masih diperlukan penataan pemanfaatan aset tanah agar lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan urusan pertanahan di daerah juga memiliki keterkaitan dengan berbagai program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Salah satu program nasional yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program PTSL merupakan upaya percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh pada suatu wilayah desa atau kelurahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat. Melalui program ini, masyarakat memperoleh kemudahan dalam proses sertifikasi tanah sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan di kemudian hari.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berperan dalam mendukung pelaksanaan program PTSL melalui fasilitasi pendataan objek dan subjek tanah, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait guna memperlancar proses pelaksanaan program di lapangan. Dukungan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat, sehingga tercipta tertib administrasi pertanahan serta mendukung kelancaran pembangunan daerah. Selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, keberhasilan pelaksanaan PTSL juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan serta mendorong pemanfaatan tanah yang lebih produktif. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan menjadi penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk

menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli.

Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara menggunakan 3 Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), untuk Pehitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merupakan kewenangan Provinsi.

Tabel 2.66
Trend Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025

No	Tahun	IKLH	IKA	IKU	IKL	Ket
1	2021	62,38	57,5	86,75	25,70	
2	2022	62,38	55,93	88,20	25,70	
3	2023	41,74	0	86,98	29,72	
4	2024	68,62	63,33	91,95	34,57	
5	2025	71,62	76,64	74,48	57,72	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara, 2026

Kinerja pembangunan lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun dengan kecenderungan membaik pada akhir periode. IKLH pada tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 62,38 (kategori sedang), kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 41,74. Penurunan tersebut dipengaruhi terutama oleh rendahnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) serta belum optimalnya kualitas lahan.

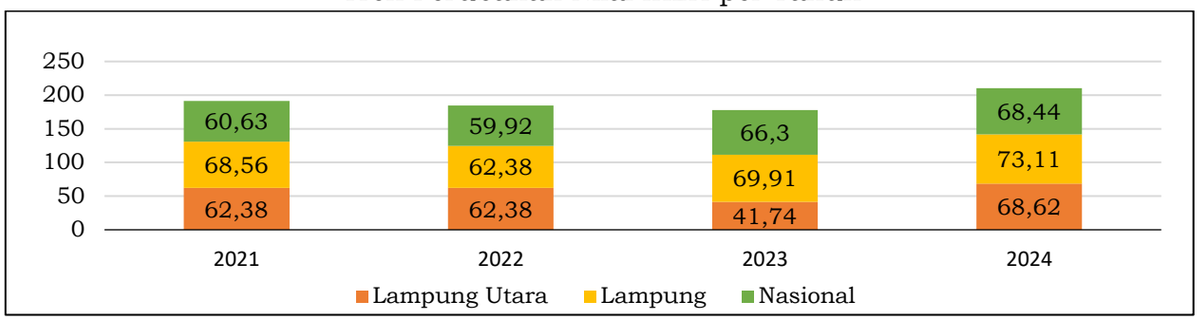
Memasuki tahun 2024 dan 2025, terjadi perbaikan yang cukup signifikan. IKLH meningkat menjadi 68,62 pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 71,62 pada tahun 2025, sehingga masuk dalam kategori baik. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya Indeks Kualitas Air (IKA) yang pada tahun 2025 mencapai 76,64 serta meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) menjadi 57,72. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) yang sebelumnya stabil pada kategori sangat baik hingga tahun 2024, mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 74,48, meskipun masih berada pada kategori cukup baik.

Secara umum, tren dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, serta pengelolaan sumber daya alam mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi pada periode sebelumnya menjadi catatan penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program, peningkatan kualitas pemantauan lingkungan, serta penguatan upaya preventif dalam pengendalian pencemaran air dan udara.

Dalam rangka penyusunan RKPD tahun mendatang, arah kebijakan difokuskan pada penguatan pengendalian kualitas air melalui peningkatan pengelolaan limbah domestik dan non-domestik, pengendalian emisi dan peningkatan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas udara, serta percepatan rehabilitasi lahan kritis guna menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan langkah

tersebut, diharapkan capaian IKLH dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Grafik 2.24
Tren Perubahan Nilai IKLH per Tahun



Sumber : 1. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2024 Kementerian LHK. 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara, 2025.

Memasuki tahun 2024, terjadi pemulihan yang cukup signifikan di Kabupaten Lampung Utara dengan peningkatan IKLH menjadi 68,62. Nilai ini kembali mendekati capaian nasional sebesar 68,44, meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang mencapai 73,11. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas langkah perbaikan yang telah dilakukan, khususnya dalam pengendalian kualitas air dan peningkatan kualitas lahan.

Secara komparatif, tren tahun 2024 mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Utara telah kembali berada pada jalur konvergensi terhadap capaian nasional, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengejar dan menyamai rata-rata Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, penguatan konsistensi program pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, serta peningkatan sistem pemantauan kualitas lingkungan menjadi prioritas strategis guna memastikan stabilitas dan peningkatan IKLH secara berkelanjutan.

2.1.3.2.5.2 Persampahan

Pengelolaan persampahan di daerah masih menghadapi tantangan dalam aspek pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat berdampak pada bertambahnya volume timbulan sampah setiap tahun. Di sisi lain, cakupan pelayanan pengangkutan sampah, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.67
Data-Data Persampahan Tahun 2024 dan 2025

No	Keterangan	2024	2025
1	Jumlah Timbulan Sampah	99.987,27	101.987,02
2	Jumlah Pengurangan Sampah	14.068,41	15.053,20
	% Pengurangan Sampah	14,07	14,76
3	Jumlah Penanganan Sampah	67.854,76	68.533,31
	% Penanganan Sampah	67,86	67,20
4	Pengolahan	8.968,97	9.148,35
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	8.968,97	9.148,35
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00
5	Pemrosesan Akhir	58.885,79	59.384,96

No	Keterangan	2024	2025
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	58.885,79	59.384,96
6	SAMPAH YANG DIKELOLA	81.923,17	83.586,51
	% Sampah Terkelola	81,93	81,96
7	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	18.064,10	18.400,51
	% Sampah Tidak Terkelola	18,07	18,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara, 2026

Kinerja pengelolaan persampahan daerah tahun 2024–2025 menunjukkan peningkatan volume timbulan sampah seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat. Jumlah timbulan sampah pada tahun 2024 tercatat sebesar 99.987,27 ton dan meningkat menjadi 101.987,02 ton pada tahun 2025. Dari sisi pengurangan sampah, terjadi peningkatan kinerja dari 14.068,41 ton (14,07%) pada tahun 2024 menjadi 15.053,20 ton (14,76%) pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya penguatan upaya pengurangan sampah melalui pemilahan dari sumber, optimalisasi bank sampah, serta kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sementara itu, jumlah penanganan sampah relatif stabil, yakni 67.854,76 ton (67,86%) pada tahun 2024 dan 68.533,31 ton (67,20%) pada tahun 2025. Dari total tersebut, pengolahan sampah meningkat dari 8.968,97 ton menjadi 9.148,35 ton, seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku seperti kompos, pakan ternak, daur ulang dan upcycle. Adapun pemanfaatan sampah menjadi sumber energi belum terlaksana. Sampah yang diproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga meningkat dari 58.885,79 ton menjadi 59.384,96 ton.

Secara keseluruhan, jumlah sampah yang berhasil dikelola meningkat dari 81.923,17 ton (81,93%) pada tahun 2024 menjadi 83.586,51 ton (81,96%) pada tahun 2025. Meskipun persentase sampah terkelola relatif stagnan, secara absolut terjadi peningkatan volume pengelolaan. Namun demikian, masih terdapat sampah yang belum terkelola sebesar 18.400,51 ton (18,04%) pada tahun 2025, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perluasan cakupan layanan dan peningkatan efektivitas sistem pengelolaan. Ke depan, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan pengurangan sampah di hulu, optimalisasi pengolahan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur dan manajemen TPA sesuai standar lingkungan, serta pengembangan inovasi pemanfaatan sampah menjadi energi guna menekan proporsi sampah yang belum terkelola dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Analisis Kesenjangan terhadap Target Nasional Pengelolaan Sampah :
Mengacu pada kebijakan nasional pengelolaan sampah yang menargetkan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah, capaian daerah tahun 2024–2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Pada aspek pengurangan sampah, capaian tahun 2024 sebesar 14,07% dan meningkat menjadi 14,76% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih terpaut sekitar 15 poin persentase dari target nasional 30%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah di sumber, termasuk pemilahan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta optimalisasi bank sampah dan TPS3R, perlu diperkuat secara lebih masif dan sistematis.

Sementara itu, pada aspek penanganan sampah, capaian daerah tahun 2024 sebesar 67,86% dan tahun 2025 sebesar 67,20%. Capaian ini relatif mendekati target nasional 70%, dengan selisih sekitar 2–3 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sistem pengumpulan dan pemrosesan akhir telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan cakupan layanan, efisiensi operasional, serta penguatan standar pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Secara keseluruhan, persentase sampah terkelola telah mencapai 81,96% pada tahun 2025, namun dominasi masih berada pada pendekatan penanganan di hilir melalui pemrosesan akhir. Ke depan, strategi pembangunan persampahan perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari *end of pipe management* menuju penguatan pengurangan di hulu, peningkatan kapasitas pengolahan, serta pengembangan inovasi pemanfaatan sampah menjadi sumber daya dan energi. Dengan langkah tersebut, diharapkan kesenjangan terhadap target nasional dapat ditekan secara bertahap dan sistem pengelolaan sampah daerah menjadi lebih berkelanjutan.

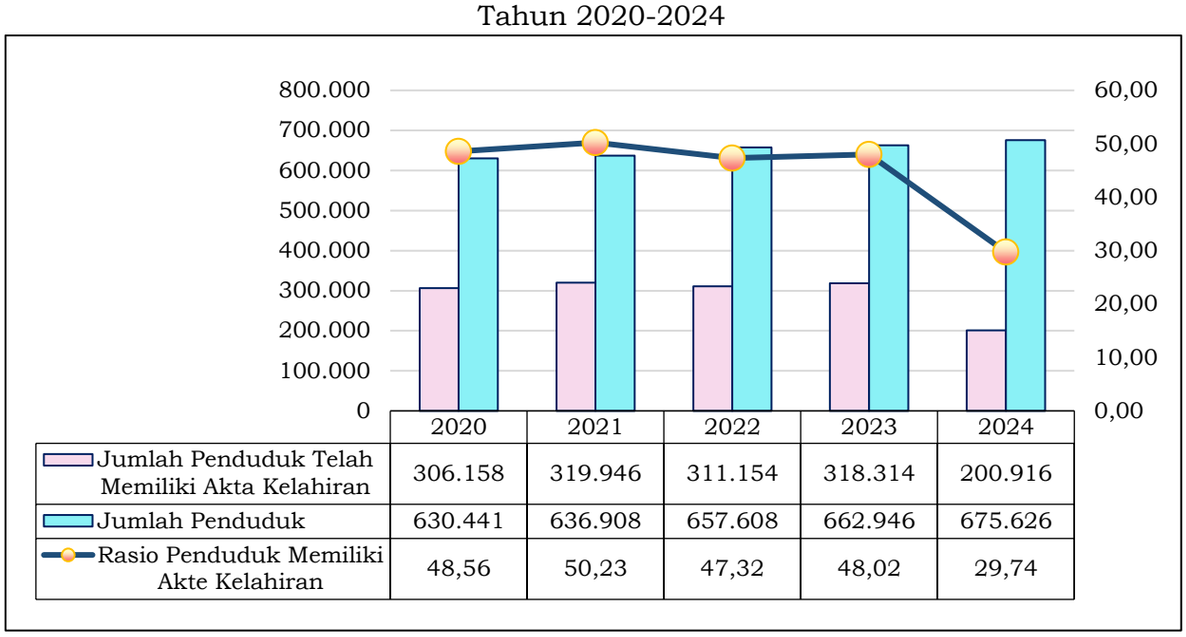
2.1.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kepemilikan akta kelahiran sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian. Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2020 tercatat sebanyak 306.158 jiwa dari total penduduk 630.441 jiwa, dengan rasio kepemilikan sebesar 48,56%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 319.946 jiwa atau 50,23%.

Namun demikian, pada periode 2022–2023 rasio kepemilikan mengalami penurunan menjadi masing-masing 47,32% dan 48,02%, meskipun secara absolut jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran relatif stabil. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan jumlah penduduk yang tercatat memiliki akta kelahiran menjadi 200.916 jiwa, dengan rasio turun menjadi 29,74% dari total penduduk 675.626 jiwa. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan basis data, pemutakhiran sistem administrasi kependudukan, atau faktor teknis lainnya yang mempengaruhi pencatatan.

Grafik 2.25
Rasio Penduduk Mempunyai Akte Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun
Tahun 2020-2024



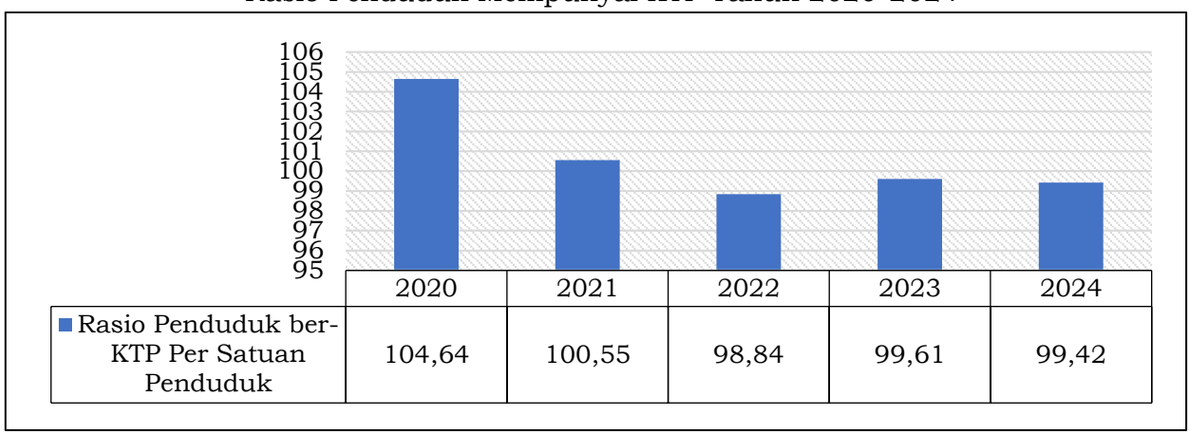
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	306.158	319.946	311.154	318.314	200.916
Jumlah Penduduk	630.441	636.908	657.608	662.946	675.626
Rasio Penduduk Memiliki Akte Kelahiran	48,56	50,23	47,32	48,02	29,74

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Lampung Utara, 2025

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan indikator penting dalam mengukur tertib administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan publik. Tingkat

kepemilikan KTP yang tinggi menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan administrasi, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga hak politik dalam pemilu. Oleh karena itu, peningkatan cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el perlu terus didorong melalui pelayanan yang responsif, jemput bola, serta pemanfaatan sistem digital guna memastikan seluruh penduduk wajib KTP terlayani secara optimal.

Grafik 2.26
Rasio Penduduk Mempunyai KTP Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	104,64	100,55	98,84	99,61	99,42

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Lampung Utara, 2025

Rasio penduduk ber-KTP periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan mendekati angka ideal 100 persen. Setelah sempat berada pada angka 104,64 persen pada tahun 2020, rasio secara bertahap terkoreksi dan stabil pada kisaran 98–100 persen hingga tahun 2024 (99,42 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan kepemilikan KTP-el sudah hampir merata dan sistem administrasi kependudukan semakin tertib dan akurat.

Dari perspektif pelayanan publik, tingginya rasio kepemilikan KTP berdampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perbankan, serta pemenuhan hak politik. Data kependudukan yang valid juga menjadi fondasi penting dalam penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.

Dalam kerangka RKPD, kondisi ini perlu dijaga melalui strategi peningkatan kualitas data kependudukan berbasis digital, pelayanan jemput bola bagi kelompok rentan, serta penguatan integrasi data kependudukan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, kepemilikan KTP tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.7.1 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan instrumen pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. IDM digunakan untuk memetakan status desa serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah dan berbasis data.

Penilaian IDM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. Hasil pengukuran tersebut mengklasifikasikan desa ke dalam lima kategori status: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Secara substantif, peningkatan nilai IDM mencerminkan membaiknya kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi desa, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, IDM tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.68
Rata-Rata Nilai IDM Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rata-rata NILAI IDM	Status IDM	Rata-rata NILAI IDM	Status IDM	Rata-rata NILAI IDM	Status IDM	Rata-rata NILAI IDM	Status IDM	Rata-rata NILAI IDM	Status IDM
1	Kotabumi Utara	0,6858	Berkembang	0,7099	Maju	0,7326	Maju	0,74493	Maju	0,7717	Maju
2	Abung Tinggi	0,6607	Berkembang	0,6591	Berkembang	0,6694	Berkembang	0,67991	Berkembang	0,7398	Maju
3	Abung Timur	0,6383	Berkembang	0,6490	Berkembang	0,6698	Berkembang	0,65873	Berkembang	0,7288	Maju
4	Abung Selatan	0,6516	Berkembang	0,6648	Berkembang	0,6870	Berkembang	0,69206	Berkembang	0,7277	Maju
5	Bukit Kemuning	0,6630	Berkembang	0,6657	Berkembang	0,6809	Berkembang	0,68853	Berkembang	0,7121	Maju
6	Abung Kunang	0,6340	Berkembang	0,6356	Berkembang	0,6606	Berkembang	0,67130	Berkembang	0,7034	Berkembang
7	Sungkai Barat	0,6054	Berkembang	0,6266	Berkembang	0,6651	Berkembang	0,67086	Berkembang	0,7026	Berkembang
8	Abung Surakarta	0,6570	Berkembang	0,6579	Berkembang	0,6739	Berkembang	0,68441	Berkembang	0,6979	Berkembang
9	Tanjung Raja	0,6095	Berkembang	0,6553	Berkembang	0,6634	Berkembang	0,67039	Berkembang	0,6951	Berkembang
10	Hulu Sungkai	0,6786	Berkembang	0,6861	Berkembang	0,6868	Berkembang	0,69334	Berkembang	0,6942	Berkembang
11	Sungkai Utara	0,6402	Berkembang	0,6518	Berkembang	0,6865	Berkembang	0,69569	Berkembang	0,6934	Berkembang
12	Abung Barat	0,6229	Berkembang	0,6301	Berkembang	0,6480	Berkembang	0,66476	Berkembang	0,6913	Berkembang
13	Kotabumi	0,6180	Berkembang	0,6249	Berkembang	0,6452	Berkembang	0,65703	Berkembang	0,6909	Berkembang
14	Bunga Mayang	0,6413	Berkembang	0,6473	Berkembang	0,6656	Berkembang	0,66248	Berkembang	0,6874	Berkembang
15	Abung Semuli	0,6474	Berkembang	0,6586	Berkembang	0,6725	Berkembang	0.67593	Berkembang	0,6872	Berkembang
16	Abung Tengah	0,6308	Berkembang	0,6392	Berkembang	0,6563	Berkembang	0,66424	Berkembang	0,6776	Berkembang
17	Abung Pekurun	0,6593	Berkembang	0,6509	Berkembang	0,6713	Berkembang	0,66718	Berkembang	0,6739	Berkembang
18	Sungkai Selatan	0,6161	Berkembang	0,6306	Berkembang	0,6583	Berkembang	0,66225	Berkembang	0,6680	Berkembang
19	Blambangan Pagar	0,6557	Berkembang	0,6693	Berkembang	0,6829	Berkembang	0,66590	Berkembang	0,6674	Berkembang
20	Sungkai Tengah	0,6368	Berkembang	0,6422	Berkembang	0,6686	Berkembang	0,66915	Berkembang	0,6643	Berkembang
21	Sungkai Jaya	0,5942	Tertinggal	0,5946	Tertinggal	0,6568	Berkembang	0,65679	Berkembang	0,6587	Berkembang
22	Kotabumi Selatan	0,6047	Berkembang	0,6157	Berkembang	0,6293	Berkembang	0,64344	Berkembang	0,6614	Berkembang
23	Muara Sungkai	0,5790	Tertinggal	0,5879	Tertinggal	0,6246	Berkembang	0,65200	Berkembang	0,6518	Berkembang
	LAMPUNG UTARA	0,6342	Berkembang	0,6458	Berkembang	0,6676	Berkembang	0,67370	Berkembang	0,6938	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, 2025

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) periode 2020–2024, secara umum terjadi tren peningkatan kinerja pembangunan desa di Kabupaten Lampung Utara. Nilai rata-rata IDM kabupaten meningkat dari 0,6342 (2020) menjadi 0,6938 (2024), dengan status tetap berada pada kategori Berkembang, namun semakin mendekati ambang batas Maju sebagaimana klasifikasi Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Secara spasial, dinamika peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, dimana beberapa kecamatan berhasil naik status menjadi Maju, yaitu Kotabumi Utara (0,7717), Abung Tinggi (0,7398), Abung Timur (0,7288), Abung Selatan (0,7277), dan Bukit Kemuning (0,7121). Kotabumi Utara menunjukkan performa paling progresif dan konsisten sejak 2021 telah berada pada status Maju.

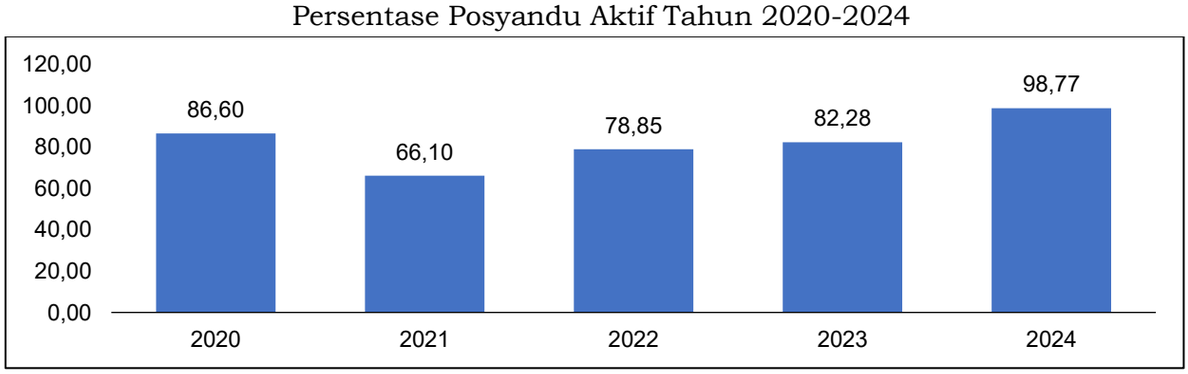
Sementara itu, kecamatan yang sebelumnya berstatus Tertinggal seperti Sungkai Jaya dan Muara Sungkai berhasil meningkat menjadi Berkembang sejak 2022 dan mampu mempertahankan status tersebut hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan desa. Meskipun belum mencapai status kabupaten dengan dominasi desa Maju dan Mandiri, tren peningkatan nilai rata-rata IDM menunjukkan arah yang positif dan mengindikasikan efektivitas intervensi pembangunan desa. Tantangan ke depan adalah mempercepat akselerasi kecamatan dengan nilai di bawah 0,68 agar dapat mendorong transformasi status secara lebih merata menuju kategori Maju, sehingga dalam beberapa tahun mendatang Lampung Utara berpotensi menembus rata-rata IDM di atas 0,70 secara agregat kabupaten.

2.1.3.2.7.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan masalah kesehatan. Posyandu juga bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Manfaat Posyandu Mendapatkan informasi kesehatan yang lebih lengkap, Memantau pertumbuhan anak balita, Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita, Memanfaatkan potensi dan fasilitas setempat. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Pelatihan dan sosialisasi kepada kader posyandu, Penyuluhan gizi dan pola hidup sehat, Program imunisasi dan kesehatan anak, Pemeriksaan rutin dan pemantauan pertumbuhan, Memberikan intervensi dini terhadap potensi stunting. Peran Kader Posyandu Berperan sebagai motivator kesehatan, Melakukan penyuluhan kesehatan, Melakukan pelayanan kesehatan, Memberikan pendampingan, Meningkatkan pemahaman praktis terkait perawatan balita.

Posyandu merupakan bentuk peran serta masyarakat yang nyata khususnya oleh Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi wanita lainnya. Peranan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu makin efektif setelah didukung oleh peran serta masyarakat dalam bentuk Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Peningkatan peran serta PKK tersebut memungkinkan Posyandu sebagai lembaga masyarakat dapat berkembang dengan pesat. Posyandu purnama yaitu posyandu yang melaksanakan hari buka lebih dari 8 kali per tahun, jumlah kader yang bertugas sama dengan atau lebih dari 5 orang, cakupan program utama (KIA, KB,Gizi, imunisasi >50%, dan sudah ada satu atau lebih program tambahan serta cakupan dana sehat <50%). Posyandu Purnama dan Mandiri saat ini disebut juga dengan posyandu aktif.

Grafik 2.27
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas PMD dan Transmigrasi, 2025

Posyandu aktif adalah posyandu yang buka minimal 10 kali dalam setahun dan kader 5 orang dengan 5 program, angka menunjukkan posyandu aktif di lampung utara semakin baik tiap tahunnya.

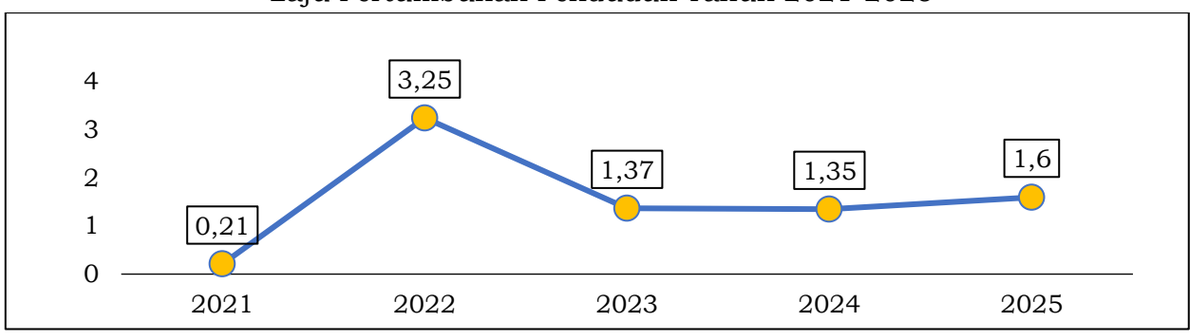
2.1.3.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.8.1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur pengendalian penduduk dan keluarga berencana yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kegiatan layanan KB kepada masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk Pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi dan upaya terencana untuk

mewujudkan penduduk tumbuh masyarakat dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari metode yang dilaksanakan ada berbagai cara ber KB yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terdiri dari: Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW), IUD, dan Implan dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) yang terdiri dari: Suntikan, Pil dan Kondom. Upaya mewujudkan penduduk tumbuh masyarakat dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk dilakukan melalui pengembangan Kader KB dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga di tingkat Kalurahan. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil jika dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran.

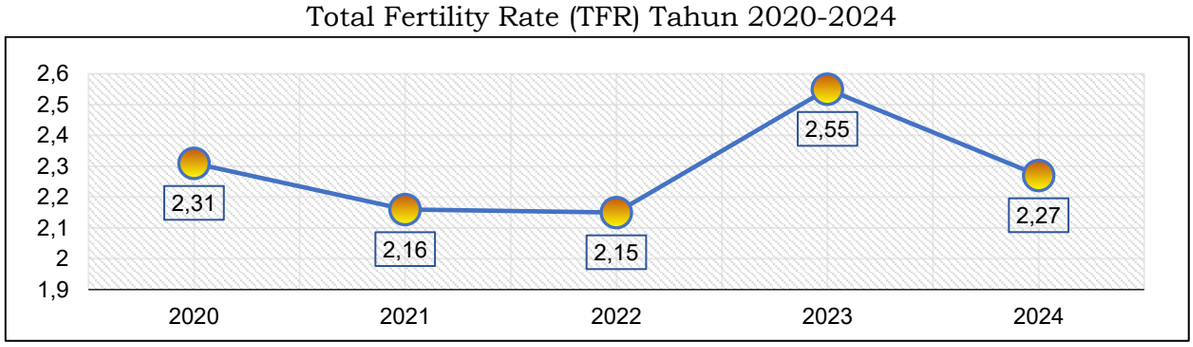
Grafik 2.28
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif namun relatif terkendali. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan tercatat sangat rendah sebesar 0,21 persen. Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 3,25 persen, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor penyesuaian data administrasi kependudukan, migrasi masuk, atau pemutakhiran basis data penduduk. Memasuki tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan kembali stabil pada kisaran 1,37 persen dan 1,35 persen. Tahun 2025 tercatat sedikit meningkat menjadi 1,6 persen, namun masih berada pada kategori pertumbuhan moderat. Secara umum, tren 2023–2025 menunjukkan kondisi demografis yang relatif stabil dengan laju pertumbuhan di kisaran 1–1,6 persen. Kondisi ini memberikan peluang dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengendalian kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan, agar tetap seimbang dengan dinamika jumlah penduduk.

Grafik 2.29
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020-2024



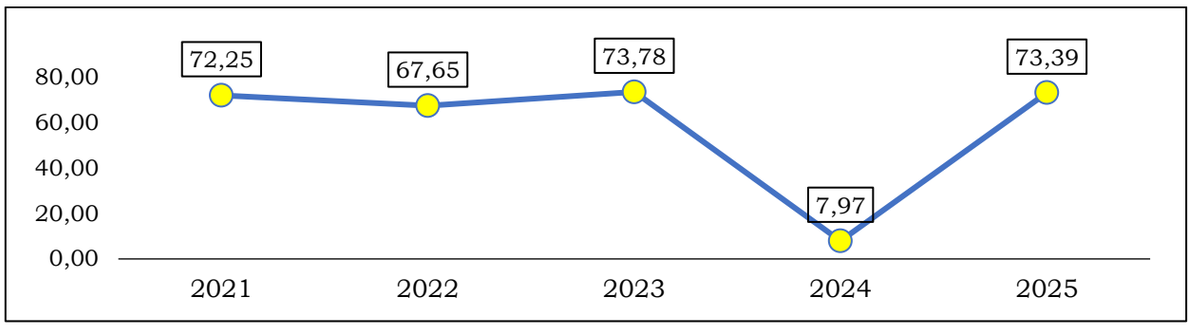
*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. LU, 2025

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang relatif terkendali di kisaran angka 2 anak per perempuan. Pada tahun 2020 TFR

tercatat sebesar 2,31, kemudian menurun pada 2021 menjadi 2,16 dan relatif stabil pada 2022 sebesar 2,15. Namun pada 2023 dan 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 2,25 dan 2,27. Secara demografis, angka TFR di kisaran 2,1–2,3 menunjukkan tingkat fertilitas yang mendekati *replacement level fertility* (sekitar 2,1), yaitu kondisi di mana jumlah kelahiran cukup untuk menggantikan generasi sebelumnya. Kenaikan dalam dua tahun terakhir mengindikasikan perlunya penguatan kembali program pengendalian kelahiran dan pelayanan keluarga berencana agar tren tidak terus meningkat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, stabilitas TFR sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, beban ketergantungan, serta kebutuhan layanan dasar di masa mendatang. Oleh karena itu, intervensi melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi, akses kontrasepsi, serta peningkatan kualitas keluarga tetap menjadi prioritas strategis.

Grafik 2.30
Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. LU, 2026

Indikator Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan salah satu ukuran kinerja dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Perkembangan capaian tahun 2020–2025 menunjukkan dinamika sebagai berikut :
Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah Peserta KB Aktif tercatat sebesar 102.752 dari total 142.222 PUS, dengan persentase capaian sebesar 72,25%. Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif stabil dan konsisten selama dua tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2022 terjadi penurunan jumlah peserta menjadi 63.550 dari 93.936 PUS, dengan persentase sebesar 67,65%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penyesuaian dan pemutakhiran basis data kependudukan serta dampak lanjutan dari kondisi pascapandemi yang mempengaruhi pelayanan KB di lapangan.

Pada tahun 2023, capaian menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya jumlah peserta menjadi 69.499 dari 94.194 PUS, sehingga persentase mencapai 73,78%. Angka ini merupakan capaian tertinggi selama periode evaluasi dan mencerminkan efektivitas upaya intensifikasi pelayanan serta penguatan koordinasi lintas sektor. Tahun 2024 tercatat adanya anomali data, di mana jumlah Peserta KB Aktif hanya sebesar 7.569 dari 95.016 PUS (7,97%). Secara analitis, angka ini tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan diduga kuat dipengaruhi oleh kendala pelaporan atau proses integrasi sistem data. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi lanjutan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar perencanaan. Pada tahun 2025, capaian kembali menunjukkan kondisi normal dengan jumlah 66.257 peserta dari 90.282 PUS, atau sebesar 73,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat partisipasi KB aktif di Kabupaten Lampung Utara berada pada kisaran stabil 67–74% dalam lima tahun terakhir (dengan pengecualian anomali 2024).

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	50,5	54,16	55,18	60,9	62,97
2	Persentase Kebutuhan ber-KB (unmet need)	12,4	12,08	12,24	10,8	8,2
3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contrceptive Prevalence Rate / mCPR	62,3	63,2	65,7	66,3	67,2

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. LU, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, dari 50,5 pada tahun 2021 menjadi 62,97 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 12,47 poin tersebut mencerminkan perbaikan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga, baik pada dimensi ketenteraman, kemandirian, maupun kebahagiaan keluarga. Peningkatan signifikan pada periode 2023–2024 mengindikasikan efektivitas penguatan intervensi pembangunan keluarga, termasuk sinergi program pemberdayaan ekonomi keluarga, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan akses layanan dasar.

Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2027, capaian IBANGGA menjadi modal sosial yang strategis untuk memperkuat pembangunan manusia berbasis keluarga. Pembangunan keluarga yang berkualitas berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan mempertahankan tren pertumbuhan rata-rata 3 poin per tahun, nilai IBANGGA diproyeksikan dapat mencapai kisaran 66–68 pada tahun 2027.

Meskipun menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain:
1. Ketimpangan kualitas keluarga antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Kerentanan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga prasejahtera yang terdampak fluktuasi ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja.
3. Permasalahan stunting dan gizi keluarga, yang masih memerlukan penguatan intervensi berbasis keluarga.
4. Ketahanan keluarga terhadap dinamika sosial, termasuk perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengasuhan anak di era digital.
5. Kualitas data dan pemutakhiran basis data keluarga, yang menjadi dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

2.1.3.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

2.1.3.2.9.1 Penjagaan Ketertiban Lalu Lintas

Dalam kegiatan sehari-hari, penjagaan ketertiban lalu lintas dilakukan di titik titik rawan kemacetan, persimpangan utama, kawasan padat aktivitas, serta area publik seperti pasar, sekolah, dan terminal. Petugas Dinas Perhubungan dikerahkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, menertibkan parkir, dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pengguna jalan. Selain kegiatan rutin tersebut, Dinas Perhubungan juga secara aktif mengambil bagian dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada acara-acara khusus pemerintahan, seperti peringatan hari besar nasional, pelantikan pejabat daerah, kunjungan kerja pejabat pusat, upacara kenegaraan, dan kegiatan seremonial lainnya.

Dalam kegiatan ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Satpol PP, dan TNI untuk memastikan keamanan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi acara. Melalui sinergi dan kesiapsiagaan personel di lapangan, Dinas Perhubungan terus berkomitmen memberikan dukungan teknis dan operasional demi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus menjaga wajah Kabupaten Lampung Utara sebagai daerah yang tertib, aman, dan ramah bagi semua pengguna jalan.

2.1.3.2.9.2 Bus Sekolah Gratis

Dalam upaya mendukung akses pendidikan yang merata dan aman bagi para pelajar, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan layanan bus sekolah gratis sebagai salah satu program pelayanan transportasi publik yang berpihak kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu siswa-siswi yang tinggal di wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh dari pusat pendidikan, sekaligus mengurangi risiko penggunaan kendaraan pribadi atau angkutan tidak layak oleh pelajar. Bus sekolah gratis ini beroperasi setiap hari sekolah dengan rute yang telah ditetapkan dan menjangkau wilayah-wilayah prioritas. Saat ini, terdapat tiga rute utama yang dilayani, yaitu:

1. Rute Kotabumi – Bukit Kemuning
2. Rute Kotabumi – Blambangan Pagar
3. Rute Kotabumi – Sungkai Utara

Setiap armada dilengkapi dengan standar keselamatan dan kenyamanan bagi pelajar, serta diawaki oleh pengemudi yang berpengalaman dan terlatih. Petugas juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan dan ketepatan waktu pelayanan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan tidak hanya meringankan beban transportasi bagi keluarga siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi yang inklusif, ramah pelajar, dan mendukung keberhasilan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.2.9.3 LANSIA (Layanan Siaga PJU)

Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi dan infrastruktur pendukung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara meluncurkan inovasi pelayanan bernama LANSIA (Layanan Siaga PJU) sejak tahun 2023. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum (PJU) yang andal, cepat tanggap, dan responsif terhadap laporan kerusakan. LANSIA merupakan sistem layanan siaga yang dirancang untuk menangani aduan masyarakat terkait gangguan atau kerusakan PJU secara lebih terorganisir dan efisien.

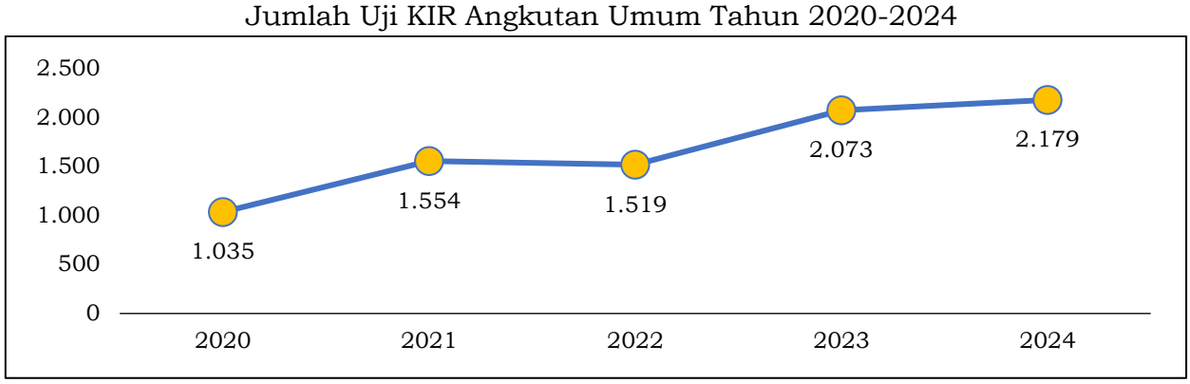
Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan lampu jalan yang padam, rusak, atau tidak berfungsi melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan, baik secara langsung ke kantor Dinas Perhubungan, melalui telepon layanan siaga, maupun kanal digital seperti WhatsApp dan media sosial resmi. Tim teknis Dinas Perhubungan akan segera melakukan penanganan berdasarkan laporan yang masuk, dengan sistem respons cepat dan pengawasan berkelanjutan. Kehadiran LANSIA tidak hanya meningkatkan kualitas penerangan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga, terutama pada malam hari. Inovasi ini merupakan langkah nyata Dinas Perhubungan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga infrastruktur penerangan jalan sebagai bagian penting dari ekosistem transportasi dan kehidupan sosial.

2.1.3.2.9.4 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Uji KIR)

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara menetapkan peningkatan kualitas pelayanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Uji KIR) sebagai salah satu program prioritas strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Sejak tahun 2020, inovasi pelayanan telah dilakukan melalui penerapan Smart Card sebagai pengganti buku Uji KIR konvensional. Smart Card ini merupakan bentuk digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis nasional, sehingga mendukung transparansi, akurasi, dan keamanan data kendaraan.

Grafik 2.31

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2025

2.1.3.2.9.5 Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pelayanan Parkir Tepi Jalan memberikan manfaat ganda selain bermanfaat untuk masyarakat juga bermanfaat untuk pemerintah daerah. Memberi manfaat bagi masyarakat yaitu pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Kenyamanan pada pelayanan parkir tepi jalan dapat meberikan kenyamanan pada pengendara karena dapat memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan nyaman sedangkan keamanan pada pelayanan parkir tepi jalan dapat meningkatkan kemanan kendaraan karena adanya pengawasan dan penjagaan yang lebih baik. Selain itu Pelayanan Parkir Tepi Jalan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jasa Retribusi Parkir Tepi Jalan. Sebanyak 37 titik lokasi Parkir yang tersebar diwilayah Kabupaten Lampung Utara, titik lokasi parkir sebagai berikut:

Tabel 2.70

Lokasi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2024

No	Nama Lokasi	Alamat	Kecamatan
1	Pasar Sentral	Kota Alam	Kotabumi Selatan
2	Pasar Pagi	Kotabumi Udik	Kotabumi
3	Pasar simpang Propau	Propau	Abung Selatan
4	Pasar Dekon I Kotabumi Udik Kotabumi Kota	Kotabumi Udik	Kotabumi
5	Pasar Dekon II	Kotabumi Udik	Kotabumi
6	Jalan Trio Deso	Kotabumi Udik	Kotabumi
7	Stadion sukung Kelapa Tujuh	Jl. Ethshiko siomi	Kotabumi Selatan
8	Payan Mas	Jl. Jendral Sudirman	Kotabumi Selatan
9	Bawah Cinema	Kotabumi Udik	Kotabumi
10	Triodeso/Masjid Muslimin	Kotabumi Udik	Kotabumi
11	Pasar Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning
12	Kantor Pos Bukit Kemuning Kotabumi Udik	Bukit Kemuning	Kotabumi
13	Jl. Raja dibukit	Kotabumi Udik	Kotabumi
14	Depan Ex Ramayana	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
15	Dalam terminal Kota	Kotabumi Udik	Kotabumi
16	Taman Sahabat	Kel. Cempedak	Kotabumi

No	Nama Lokasi	Alamat	Kecamatan
17	Pasar Tanjung Raja	Tanjung Raja	Tanjung Raja
18	Depan toko terusan	Kel. Cempedak	Kotabumi
19	Pasar Tata Karya	Tata Karya	Abung Surakarta
20	Ujung Batu	Ujung Batu	Abung Surakarta
21	Puskesmas II Kotabumi	Kota Alam	Kotabumi Selatan
22	Simpang Badarco	Kotabumi Udik	Kotabumi
23	Depan Toko Mr DIY	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
24	Pasar Desa Trimodadi	Trimodadi	Abung Selatan
25	Pasar Desa Candimas	Candimas	Abung Selatan
26	Pasar Desa Manggris	Madukoro	Kotabumi Utara
27	Pasar Desa Isorejo	Isorejo	Abung Timur
28	Pasar Desa Gunung Sari	Bonglai	Abung Tengah
29	Pasar Pagi Jl. Hi. Muhammad Yasin	Kotabumi Udik	Kotabumi
30	Toko Es Krim Bixue Jl. Jendral Sudirman	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
31	Toko Es Krim Momoyoo Jl. Jendral Sudirman	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
32	Toko Cia Jl. Jendral Sudirman	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
33	Toko C-MC Galeri Muslimah Kebon 4 Jl. Kapten Mustofa	Kebon Empat	Kotabumi Selatan
34	Toko Dapur Pintar jl. Jeruk Kelapa Tujuh Gg. Akasia	Kelapa Tujuh	Kotabumi Selatan
35	Rumah Makan Warung seruit bu Melly Jl. Jensu	Jl. Jendral Sudirman	Kotabumi Selatan
36	Depan Bank Mandiri	Tanjung Aman	Kotabumi Selatan
37	Halama Stasiun PT.K.AI.	Kel. Cempedak	Kotabumi

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2025

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan teratur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara secara rutin melaksanakan kegiatan penjagaan ketertiban di tiga Sub Terminal Tipe C yang tersebar di wilayah Kecamatan Kotabumi dan Kotabumi Selatan. Ketiga sub terminal tersebut meliputi:

1. Sub Terminal Stasiun di Kel. Cempedak, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara; 2. Sub Terminal Pasar Sentral di Kel. Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara;
2. Sub Terminal Pasar Dekon di Kel. Kotabumi Udik, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang melintasi Kabupaten Lampung Utara, yaitu 60.400 km terbentang antara perbatasan Lampung Tengah dan Way Kanan. Jaringan jalur kereta api terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jalur double track, sepanjang ±40 km antara Stasiun Kotabumi-Stasiun Tulung Buyut
2. Jalur single track, sepanjang ±20 km antara Stasiun Kotabumi-Stasiun Blambangan.

Sepanjang jaringan perlintasan kereta api, dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi dan meminimalisir potensi kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara melaksanakan program penjagaan secara rutin perlintasan sebidang pada sejumlah titik. Perlintasan sebidang, perlintasan kereta api, silang datar, atau jalur perlintasan langsung (JPL) adalah jalur perpotongan antara jalan rel kereta api dengan jalan raya, jalan setapak, atau landasan pacu bandara, yang berada pada satu bidang datar. Pelintasan sebidang ini merupakan salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya pada jalur-jalur yang belum

dilengkapi dengan sistem palang otomatis atau fasilitas pengamanan permanen. Upaya penjagaan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung keselamatan pengguna jalan, sekaligus mendukung kelancaran operasional perkeretaapian yang melintasi Kabupaten Lampung Utara. Penempatan petugas penjaga dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, frekuensi perjalanan kereta api, serta hasil evaluasi terhadap potensi risiko kecelakaan di masing-masing lokasi.

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Lainnya pada Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	712.080	897.840	1.063.440	1.121.040	1.132.250
2	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,9	0,8	2,1	3,8	4,81
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	10,4	15,27	13,87	19,19	20,03
4	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	1,03	1,1	1,04	0,95	0,0044
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	6.914.160	6.967.440	7.153.200	4.634.640	4.692.240
6	Jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, terminal per tahun	6.255.360	6.255.360	357.120	3.571.200	1.421.040

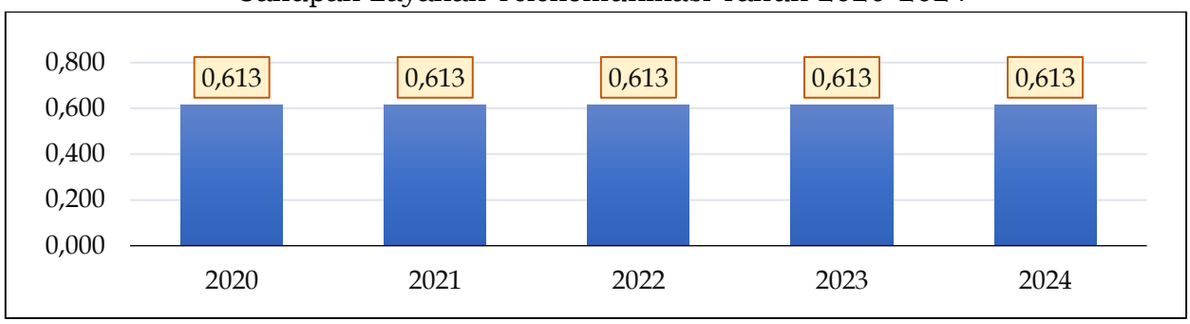
*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2025

2.1.3.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.1.3.2.10.1 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, dalam pelaksanaannya, bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tema pembangunan Kabupaten Lampung Utara. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Lampung Utara. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara Luas Wilayah Yang Tercoverage layanan telekomunikasi seluas 163.615,26 Km² dibagi dengan luas wilayah total Kabupaten Lmpung Utara yaitu 266.720 Km², sehingga cakupan layanan telekomunikasi sebesar 61%. Sementara berdasarkan data Survei Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tahun 2024, ada sebesar 41,70% desa sudah ada BTS, 65,99% desa sudah mendapatkan sinyal telepon seluler yang kuat, 38,46% desa sudah mendapatkan sinyal 4G dan 55,87% desa sudah mendapatkan sinyal 3G.

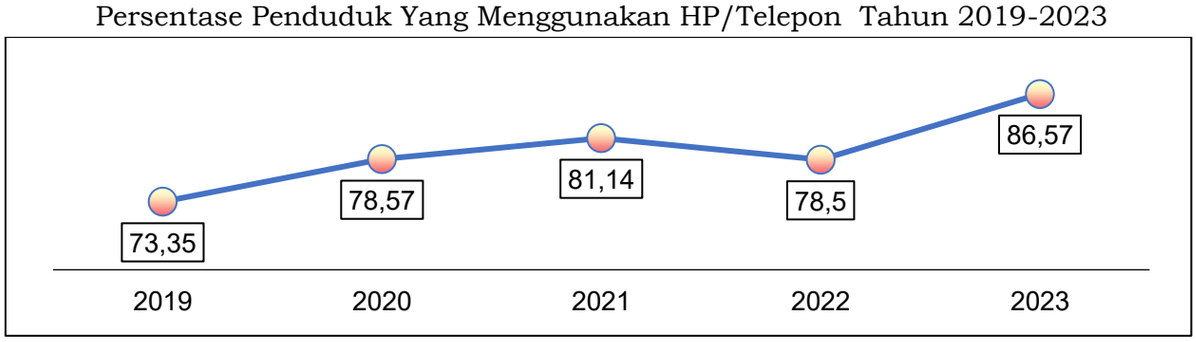
Grafik 2.32
Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Kominfo Lampung Utara, 2025

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Utara tercatat stabil pada angka 0,61 dari tahun 2019 hingga 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 61% wilayah telah terlayani jaringan telekomunikasi, sementara sisanya masih menghadapi keterbatasan akses, terutama di daerah terpencil dan perbukitan. Pemerataan infrastruktur jaringan masih menjadi tantangan utama dalam mendukung transformasi digital di seluruh wilayah kabupaten. Di Kabupaten Lampung Utara Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) dalam tiga bulan terakhir sebagai berikut :

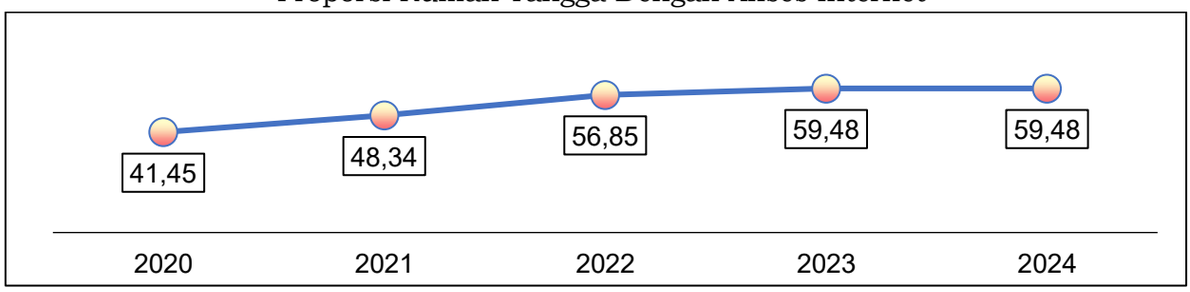
Grafik 2.33
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2019-2023



*) Data 2025 belum rilis
Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Lampung Utara mengalami tren peningkatan dari 73,35% pada 2019 menjadi 86,57% pada 2023, mencerminkan tumbuhnya akses dan adopsi teknologi komunikasi di masyarakat. Namun, data untuk tahun 2024 belum dipublikasikan sehingga belum dapat diketahui tren terbaru secara pasti. Untuk data proporsi rumah tangga dengan akses internet tahun 2020 s.d 2024 semakin meningkat di Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 2.34
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet



*) Data 2025 belum rilis
Sumber : BPS Lampung Utara, 2025

Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan peningkatan signifikan, dari 30,39% pada 2019 menjadi 59,48% pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan ketersediaan layanan internet di masyarakat. Namun, data tahun 2024 belum dipublikasikan sehingga tren terkini belum dapat dikonfirmasi.

2.1.3.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.1.3.2.11.1 Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat, termasuk dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran koperasi terhadap UMKM antara lain melalui pengembangan usaha secara kolektif, koperasi serba usaha, serta penyediaan akses pembiayaan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sehingga keberadaan koperasi dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.72

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi Aktif	154	156	163	168	269
2	Koperasi Tidak Aktif	186	186	186	183	82
3	Jumlah Koperasi	340	342	349	351	351
4	Persentase Koperasi Aktif	45,29	45,61	46,70	47,86	76,53

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. LU, 2026

Perkembangan koperasi di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren yang relatif positif, khususnya pada peningkatan jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi aktif meningkat secara bertahap dari 150 unit pada tahun 2020 menjadi 168 unit pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola, pembinaan kelembagaan, serta upaya reaktivasi koperasi yang sebelumnya tidak beroperasi secara optimal.

Di sisi lain, jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan secara perlahan, dari 189 unit pada tahun 2020 menjadi 183 unit pada tahun 2024. Meskipun penurunannya tidak signifikan, tren ini menunjukkan adanya proses penataan kelembagaan melalui pembinaan, penggabungan, maupun pembubaran koperasi yang tidak memenuhi standar operasional.

Secara keseluruhan, jumlah koperasi meningkat dari 339 unit pada tahun 2020 menjadi 351 unit pada tahun 2024. Namun demikian, peningkatan kuantitas belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas, sebagaimana tercermin dari persentase koperasi aktif yang masih berada pada kisaran 47,86% pada tahun 2024. Persentase koperasi aktif menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dari 44,25% pada tahun 2020 menjadi 47,86% pada tahun 2024. Artinya, hampir setengah dari total koperasi telah beroperasi aktif, namun masih terdapat ruang perbaikan yang cukup besar untuk meningkatkan rasio keaktifan hingga di atas 50% dalam beberapa tahun ke depan.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan koperasi antara lain:

1. Rendahnya kualitas manajemen dan tata kelola koperasi, termasuk pelaporan keuangan dan RAT yang belum rutin.
2. Terbatasnya akses permodalan dan penguatan usaha anggota.

3. Kapasitas SDM pengurus koperasi yang belum merata.
4. Transformasi digital koperasi yang masih terbatas.
5. Rendahnya partisipasi anggota dalam penguatan usaha koperasi.

Pembentukan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Lampung Utara, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dilaksanakan pada seluruh desa dan kelurahan (100%) dan semuanya sudah berbadan hukum, hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai unit usaha produktif, seperti penyediaan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian, layanan simpan pinjam, distribusi bahan pokok, serta pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan desa.

Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih inklusif. Selain itu, koperasi berperan sebagai instrumen dalam mendukung stabilisasi harga komoditas, memperkuat rantai pasok pangan, dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada aspek pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola koperasi, kapasitas sumber daya manusia pengelola, penguatan permodalan, digitalisasi layanan, serta pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan kelurahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, profesional, dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan optimalnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.2.11.2 Perkembangan UMKM

Data perkembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh usaha mikro. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak ekonomi daerah.

Tabel 2.73
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menegah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usaha Mikro	Orang	27.410	27.410	17.310	28.655	17.706
2	Usaha Kecil	Orang			160	1	143
3	Usaha Menengah	Orang			143	0	0
4	Usaha Mikro & Usaha Kecil	Orang	27.410	27.410	17.470	28.656	17.849
5	Total UMKM	Orang	27.410	27.410	17.613	28.656	17.849
6	Persentase Usaha Mikro Kecil	%	100,00	100,00	99,19	99,19	99,19

Sumber : BPS Lampung, 2026

Selama periode 2021–2025, jumlah total UMKM mengalami penurunan dari 27.410 unit menjadi 17.849 unit, atau berkurang 9.561 unit (34,88 persen). Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah usaha mikro, yang turun sebesar 35,40 persen dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, jumlah usaha kecil mulai tercatat sejak tahun 2023 dan meningkat menjadi 143 unit pada tahun 2025, sedangkan usaha menengah tidak lagi tercatat pada tahun 2024 dan 2025. Dinamika tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perubahan pada basis data UMKM, baik akibat pemutakhiran data, penyesuaian klasifikasi usaha sesuai kriteria peraturan perundang-undangan, maupun perubahan status usaha. Oleh karena itu, penurunan jumlah pelaku UMKM tidak serta-merta mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, namun perlu dikonfirmasi dengan hasil pendataan dan validasi pelaku usaha. Struktur UMKM Kabupaten Lampung Utara masih sangat didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil, yang secara konsisten mencapai 99,19–100 persen dari total UMKM. Pada tahun 2025, usaha mikro dan kecil masih mencapai 99,19 persen dari keseluruhan pelaku UMKM, sedangkan usaha menengah praktis tidak berkembang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih bertumpu pada usaha berskala kecil dengan karakteristik keterbatasan modal, teknologi, produktivitas, dan akses pasar. Di sisi lain, masih sangat sedikit usaha yang mampu naik kelas menjadi usaha kecil maupun usaha menengah.

Meskipun UMKM tetap menjadi sektor ekonomi yang dominan, tantangan utama Kabupaten Lampung Utara bukan hanya meningkatkan jumlah UMKM, tetapi juga mendorong transformasi kualitas usaha. Dominasi usaha mikro menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada skala usaha dengan produktivitas relatif rendah.
Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada:

- meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan produktivitas pelaku UMKM;
- memperluas akses pembiayaan dan permodalan;
- memperkuat legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- mendorong digitalisasi pemasaran dan pengembangan ekosistem ekonomi digital;
- meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi dan hilirisasi;
- mendorong graduasi usaha, yaitu peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah.

Keberhasilan pembangunan sektor UMKM tidak lagi cukup diukur dari banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari meningkatnya kelas usaha, produktivitas, daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selama periode 2021–2025, jumlah UMKM di Kabupaten Lampung Utara mengalami penurunan 34,88 persen, dengan usaha mikro tetap mendominasi lebih dari 99 persen dari total UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih

bertumpu pada usaha berskala mikro dan kecil, sementara transformasi menuju usaha yang lebih produktif masih sangat terbatas. Oleh karena itu, fokus pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan kualitas dan daya saing UMKM, bukan semata-mata peningkatan jumlah pelaku usaha, sehingga UMKM mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

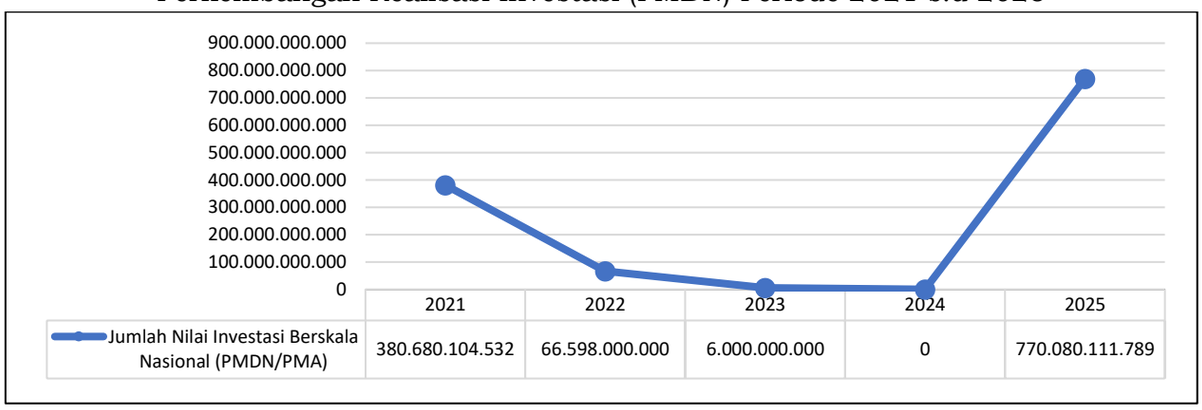
2.1.3.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1 Investasi

Nilai investasi berskala nasional yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur daya tarik investasi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas basis penerimaan daerah.

Grafik 2.35

Perkembangan Realisasi Investasi (PMDN) Periode 2021 s.d 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	380.680.104.532	66.598.000.000	6.000.000.000	0	770.080.111.789

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. LU, 2026

Selama periode 2021–2024, realisasi investasi berskala nasional di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam. Nilai investasi turun dari Rp380,68 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp66,60 miliar pada tahun 2022, atau mengalami kontraksi sebesar 82,50 persen. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 menjadi hanya Rp6 miliar, atau kembali turun 90,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencapai titik terendah pada tahun 2024, dimana tidak terdapat realisasi investasi PMDN/PMA yang tercatat (Rp0). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun tersebut tidak terdapat investasi baru berskala nasional yang direalisasikan atau belum terdapat laporan realisasi investasi yang masuk ke dalam sistem pelaporan. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap iklim investasi daerah, efektivitas promosi investasi, kemudahan perizinan, maupun kesiapan proyek investasi yang ditawarkan kepada investor.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi lonjakan investasi yang sangat signifikan menjadi Rp770,08 miliar. Nilai tersebut merupakan realisasi investasi tertinggi selama tujuh tahun terakhir, bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian tahun 2021. Karena nilai investasi tahun 2024 sebesar nol, pertumbuhan secara persentase tidak dapat dihitung (tidak terdefinisi secara matematis). Akan tetapi, secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp770,08 miliar, yang menunjukkan masuknya proyek investasi berskala besar ke Kabupaten Lampung Utara. Fluktuasi investasi yang sangat ekstrem selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa iklim investasi Kabupaten Lampung Utara masih belum stabil dan masih bergantung pada masuknya proyek-proyek investasi berskala besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan investasi belum terbentuk secara konsisten.

Di sisi lain, capaian investasi tahun 2025 merupakan peluang strategis bagi daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Masuknya investasi baru berpotensi memberikan dampak positif terhadap:

- peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi;
- penciptaan lapangan kerja;
- peningkatan pendapatan masyarakat;
- berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok;
- peningkatan penerimaan daerah melalui aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Namun demikian, agar investasi tersebut memberikan manfaat jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah, termasuk melalui penggunaan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM lokal, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, dan penguatan industri hilir.

Implikasi Kebijakan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta kebijakan kemudahan berusaha, upaya yang perlu terus diperkuat antara lain:

- meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan perizinan berbasis risiko;
- mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung kawasan investasi;
- memperkuat promosi potensi investasi daerah;
- menyiapkan proyek investasi (*investment project ready to offer*);
- meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menarik investasi strategis.

Perkembangan investasi berskala nasional di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Setelah mengalami penurunan berturut-turut hingga tidak terdapat realisasi investasi pada tahun 2024, tahun 2025 mencatat rebound yang sangat kuat dengan realisasi sebesar Rp770,08 miliar, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara masih memiliki daya tarik bagi investor, namun tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan arus investasi agar lebih stabil, terdiversifikasi, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN sejak tahun 2020, terjadi penurunan hanya pada tahun 2020, dimana realisasi PMDN turun sebesar -90,01% dibandingkan tahun 2019.Kemudian mulai meningkat di tahun 2022, tetapi terjadi penurunan kembali di tahun 2023 dan 2024. Berikut tersaji pada grafik di bawah ini :

2.1.3.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

2.1.3.2.13.1 Kepemudaan

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lampung Utara didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda.

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu

indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi agent of change. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda.

Tabel 2.74
Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Organisasi Pemuda Seluruhnya	Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persentase
1.	2020	117	1	1%
2.	2021	117	3	3%
3.	2022	117	13	13%
4.	2023	117	12	12%
5.	2024	117	30	25,64%

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Persentase organisasi pemuda aktif di Lampung Utara fluktuatif selama 2020–2024. Dari 15% (2020), naik ke 25% (2021), turun ke 18% (2022), kembali 25% (2023), lalu melonjak ke 64,29% (2024). Kenaikan signifikan 2024 menunjukkan peningkatan pembinaan dan partisipasi organisasi kepemudaan. Menurut WHO pengertian pemuda adalah seseorang yang memiliki rentang usia 10 sampai 24 tahun, sedangkan untuk usia 10 sampai 19 tahun disebut dengan remaja. Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan. Pada dasarnya pemuda memiliki peran yang sentral untuk kemajuan bangsa Indonesia. Peran organsiasi kepemudaan saat ini sayangnya sedang mengalami kemerosotan khususnya dalam membangun karakter pemuda, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak pemuda yang melakukan tindakan kriminal yang akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia khusunya Lampung Utara di masa mendatang.

Tabel 2.75
Wirausaha Muda di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 s.d 2024

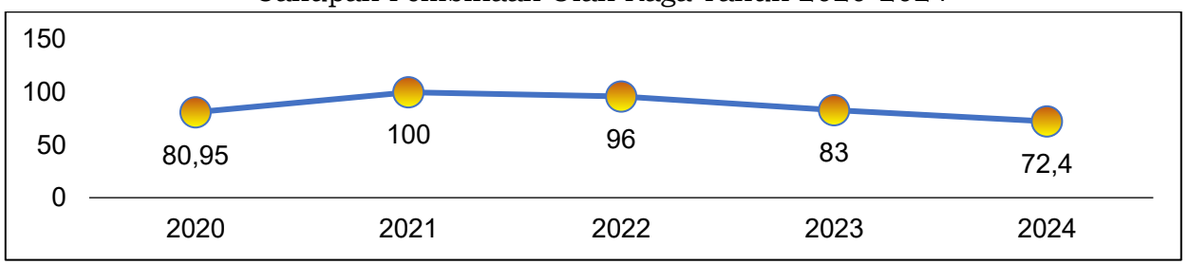
No	Tahun	Jumlah Pemuda Seluruhnya	Wirausaha Muda	Persentase
1	2022	27.407	6.204	22,64
2	2023	17.456	6.571	37,64
3.	2024	17.456	1.403	8,04

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

2.1.3.2.13.2 Olahraga

Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga baik di Tingkat Provinsi Lampung, nasional maupun internasional. Pada tahun 2020 jumlah olah raga yang dibina sebesar 80,95% sampai di tahun 2024 menjadi 72,4%.

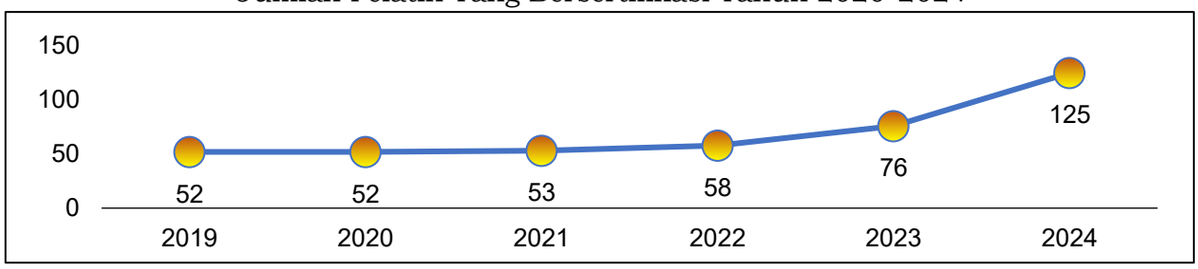
Grafik 2.37
Cakupan Pembinaan Olah Raga Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Cakupan pembinaan olahraga yang menurun dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga, kurangnya dana untuk pembinaan, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta. Selain itu, olahraga juga belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pendidikan, sehingga potensi atlet muda tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Pelatih yang bersertifikat jumlahnya masih rendah jika dibandingkan dengan seluruh jumlah pelatih yang ada, hal ini akan mempengaruhi keberhasilan atlet dalam memperoleh prestasi di cabang olahraganya. Rata-rata pelatih yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2023 berada pada angka 23,50 persen.

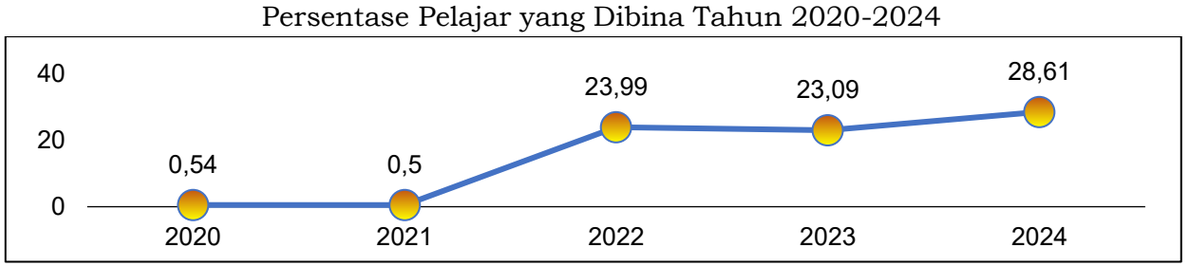
Grafik 2.38
Jumlah Pelatih Yang Bersertifikasi Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Jumlah pelatih bersertifikasi di Lampung Utara meningkat dari 52 orang pada 2019–2020 menjadi 125 orang pada 2024. Kenaikan signifikan terjadi sejak 2022, mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelatih melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan di bidang olahraga dan kepelatihan. Atlet muda di Kabupaten Lampung Utara merupakan pelajar yang menjadi atlet di beberapa cabang olahraga dengan jumlah yang cukup banyak di tahun 2024 yaitu 2.359 orang sedangkan yang mendapatkan pembinaan hanya berjumlah 556 orang atau 28,61 persen. Jika dilihat berdasarkan Organisasi dan cabang olah raga maka jenis olahraga dengan jumlah atlet muda terbanyak yang dibina adalah cabang olahraga Karate (Forki) dan Sepak Bola/Futsal (PSSI), untuk lebih lengkapnya data cabang olahraga dengan atlet yng dibina dapat disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2.39
Persentase Pelajar yang Dibina Tahun 2020-2024

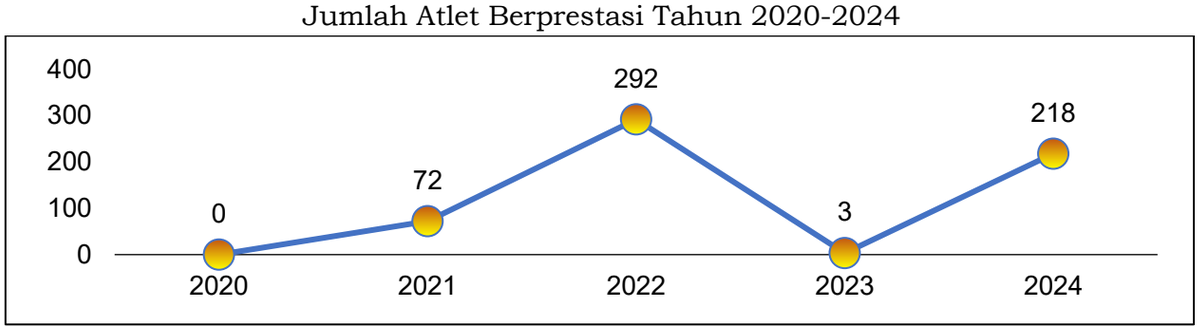


*) Data 2025 belum rilis
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Cakupan pembinaan atlet muda Lampung Utara meningkat pesat dari 0,34 pada 2019–2020 menjadi 0,5 di 2021, lalu melonjak tajam ke 23,09 pada 2022–2023. Pada 2024, mencapai 28,61. Ini menunjukkan peningkatan perhatian dan upaya serius dalam pengembangan atlet muda daerah.

Kabupaten Lampung Utara mengikuti beberapa ajang kompetisi olahraga yang diselenggarakan oleh Provinsi Lampung dengan jumlah cabang olahraga yang mengikuti dan mendapatkan prestasi berjumlah 22 cabang olahraga dan atlet yang memperoleh juara sebanyak 203 orang dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024.

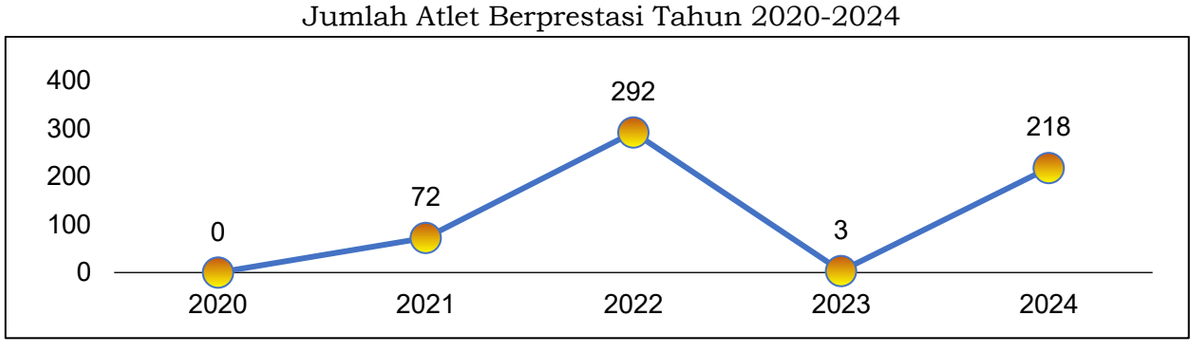
Grafik 2.40
Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Lampung Utara berfluktuasi dari 2019 hingga 2024. Tertinggi pada 2022 sebanyak 292 atlet, terendah pada 2020 dengan nol atlet. Setelah penurunan drastis di 2023 (3 atlet), jumlah kembali naik tajam di 2024 menjadi 218 atlet berprestasi. Data menunjukkan tren tidak stabil dengan capaian 10 cabang (2019), turun ke 0 (2020) karena pandemi, kemudian 5 (2021), melonjak ke 22 (2022), anjlok ke 1 (2023), dan naik signifikan ke 16 (2024). Fluktuasi ini mengindikasikan: (1) ketergantungan pada atlet andalan, (2) dampak pembatasan kegiatan selama pandemi, dan (3) belum optimalnya sistem pembinaan berkelanjutan. Pencapaian 2024 yang lebih baik perlu dipertahankan dengan program jangka panjang.

Grafik 2.41
Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025

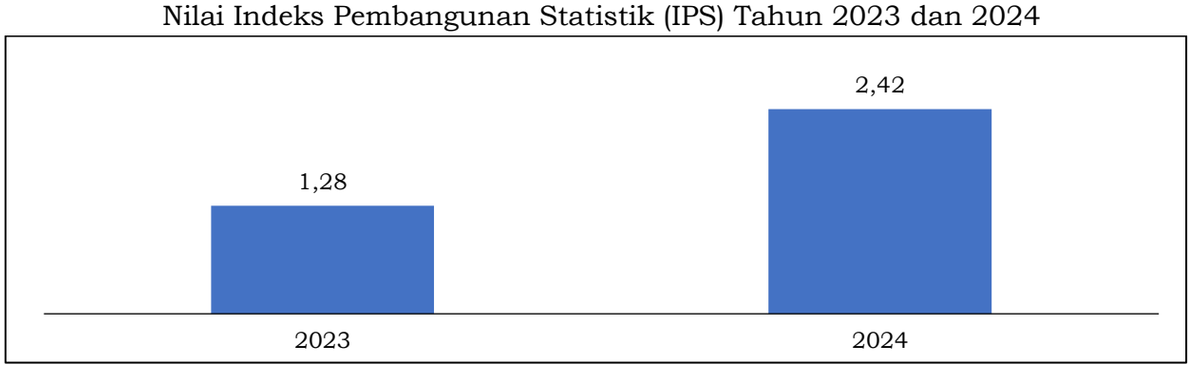
2.1.3.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyediaan data/informasi yang akurat dan 5 dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik itu pula, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

Sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pemenuhan data di Kabupaten Lampung Utara ada sedikit permasalahan pada data sectoral, namun disadari bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara menyeluruh, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bertahap telah berupaya untuk penyelesainnya untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penyelenggaraan Satu Data Inodnesia Kabupaten Lampung Utara Nomor 47 Tahun 2021 yang mana Peraturan Bupati ini adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejak penetapan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, sampai saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : Sudah dibuat portal satu Data Indonesia dengan alamat website: https://satudata.lampungutarakab.go.id serta Daftar data tersedia dan dapat diakses secara transparan dalam portal dan buku statistik Tahun 2022.

Grafik 2.42
Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 dan 2024



Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), 2024

Perkembangan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Lampung Utara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Nilai IPS meningkat dari 1,28 pada tahun 2023 menjadi 2,42 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 1,14 poin dengan laju pertumbuhan sekitar 89,06 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Meningkatnya nilai IPS menunjukkan bahwa kualitas tata kelola data statistik semakin baik, antara lain melalui penguatan koordinasi antara BPS sebagai Pembina Data, Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data, dan Perangkat Daerah sebagai Produsen Data. Perbaikan tersebut juga mengindikasikan meningkatnya pemenuhan aspek penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari tata kelola data, kualitas data, interoperabilitas data, hingga pemanfaatan data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Namun demikian, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, nilai IPS sebesar 2,42 masih menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan statistik sektoral belum optimal. Masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas data, memperkuat kelembagaan Satu Data Indonesia, serta meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menghasilkan data yang memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Secara umum, Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren yang sangat positif dengan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam tata kelola statistik sektoral dan penguatan implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Meskipun demikian, nilai IPS masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data (*data-driven government*) dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan perkembangan IPS tersebut, beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian adalah:

- Kualitas penyelenggaraan statistik sektoral antar perangkat daerah belum merata sehingga masih terdapat perbedaan tingkat kematangan dalam pengelolaan data.
- Kelengkapan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data yang diinput ke dalam sistem Satu Data.
- Pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 masih belum optimal di seluruh perangkat daerah.
- Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan masih perlu diperkuat agar seluruh proses perencanaan benar-benar berbasis data yang valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Kapasitas sumber daya manusia pengelola data serta koordinasi antara Walidata, Produsen Data, dan Pembina Data masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia secara berkelanjutan.

Ke depan, peningkatan IPS perlu diarahkan pada penguatan tata kelola data pemerintah daerah, percepatan implementasi Satu Data Indonesia, optimalisasi platform e-Walidata/SIPD, serta peningkatan kualitas statistik sektoral sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2.1.3.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Lampung Utara, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah. *Government–Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Indonesia, disingkat Gov-CSIRT Indonesia merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Siber dan Sandi Negara dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk : triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk : *cyber security drill test*; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

2.1.3.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu modal sosial strategis dalam pembangunan daerah yang berfungsi memperkuat identitas, karakter, serta kohesi sosial masyarakat. Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi budaya yang beragam berupa adat istiadat, seni tradisional, bahasa daerah, serta warisan sejarah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pelestarian budaya telah dilaksanakan melalui pembinaan lembaga adat, fasilitasi kegiatan seni budaya, serta penyelenggaraan event kebudayaan daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa terbatasnya pendataan objek pemajuan kebudayaan, regenerasi pelaku seni, serta belum optimalnya integrasi sektor kebudayaan dengan ekonomi kreatif dan pariwisata. Pada Tahun 2027, pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan, peningkatan partisipasi generasi muda dalam pelestarian seni tradisi, serta pemanfaatan budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat jati diri daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.76

Daftar Cagar Budaya yang Ditetapkan Tahun 2025

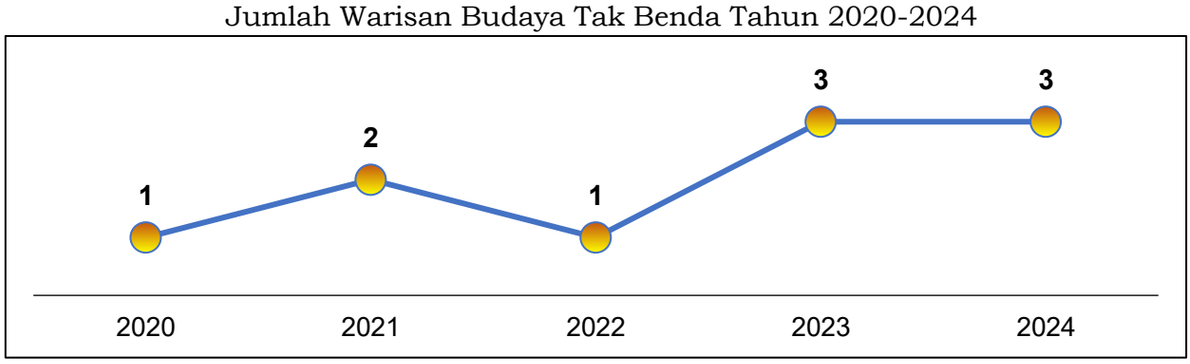
No	Jumlah Cagar Budaya ditetapkan	Ket
1	Makam Minak Terio Diso	
2	Makam Minak Peduko Begeduh	
3	Makam Minak Penatih Tuho	
4	Makam Unyi	
5	Makam Minak Majew Lemaweng	
6	Makam Minak Munggah Dabung	
7	Makam Nuban	
8	Lambang Ulew Radjo Dilawek	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2025

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara bersama Tim Ahli Cagar Budaya telah menyusun rekomendasi penetapan cagar budaya kabupaten Lampung Utara dan disahkan menjadi cagar budaya oleh Bupati melalui SK Bupati Lampung Utara No : B/406/22-LU/HK/2024.

Grafik 2.43

Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2025

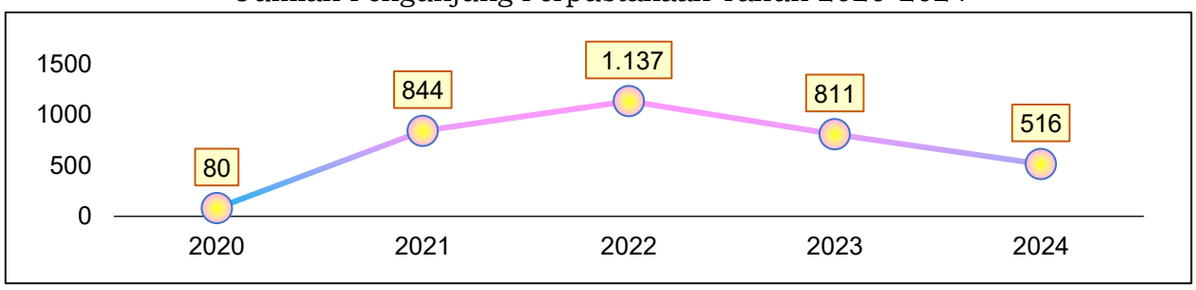
2.1.3.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

2.1.3.2.17.1 Pengunjung Perpustakaan Per Tahun dan Koleksi Buku

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan tingkat kabupaten, sarana prasarana perpustakaan (kecuali koleksi buku) yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memadai. Hal tersebut terlihat dari hasil akreditasi perpustakaan tingkat kabupaten yang belum dapat dinilai.

Grafik 2.44

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2024



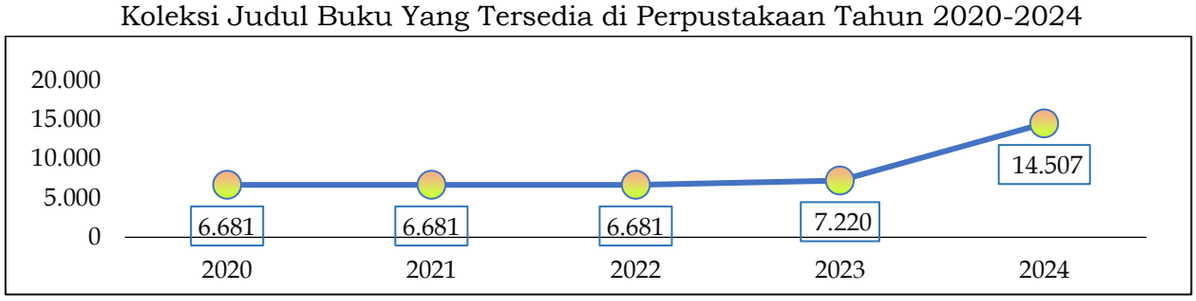
*) Data 2025 belum rilis

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LU, 2025

Untuk jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah pada tahun 2020 s.d 2024 meningkat cukup signifikan.

Grafik 2.45

Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2020-2024



*) Data 2025 belum rilis

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LU, 2025

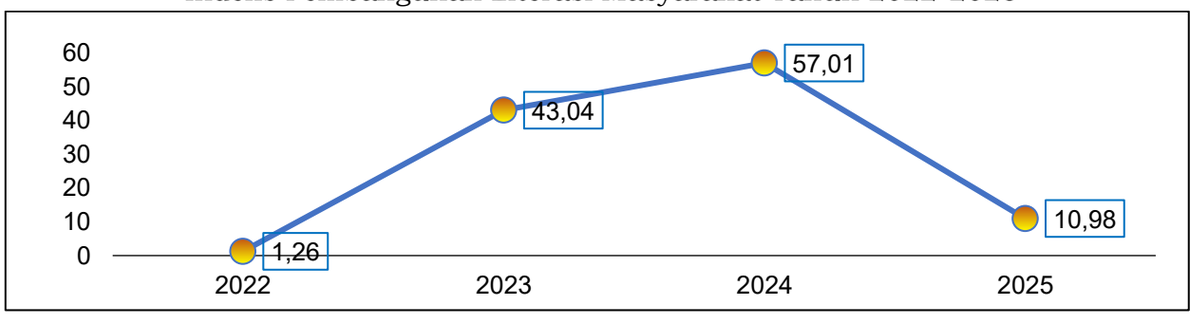
Koleksi judul buku Perpustakaan Daerah Lampung Utara meningkat dari 4.685 judul pada 2019 menjadi 14.507 judul pada 2023. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2023, mencerminkan komitmen perpustakaan dalam meningkatkan literasi dan menyediakan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

2.1.3.2.17.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan Anggota perpustakaan.

Grafik 2.46

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2025



Sumber : BPS Lampung, 2026

2.1.3.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip berfungsi sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta instrumen pertanggungjawaban nasional. Pada Tahun 2024, tingkat ketersediaan arsip di Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 37,50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang terdokumentasi dan tersedia sesuai standar masih berada di bawah kondisi ideal. Jika dibandingkan dengan arah kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menargetkan peningkatan kualitas dan ketersediaan arsip secara nasional hingga berada pada kisaran di atas 70 persen, maka capaian Lampung Utara masih memerlukan percepatan yang signifikan.

Tabel 2.77

IKK untuk Urusan Kearsipan Tahun 2024

No	Uraian IKK		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persen	0	0	0	0	37,50
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	0	0	0	0	33,30

*) Data 2025 belum rilis

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LU, 2025

Dalam konteks Provinsi Lampung, penguatan pengawasan kearsipan terus dilakukan melalui evaluasi eksternal dan penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik. Beberapa daerah di provinsi ini telah menunjukkan kategori pengelolaan arsip yang lebih baik, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut menempatkan Lampung Utara pada posisi yang masih perlu pembenahan dalam tata kelola arsip, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Rendahnya tingkat ketersediaan arsip dipengaruhi oleh belum optimalnya penataan arsip dinamis dan statis pada perangkat daerah, keterbatasan SDM kearsipan yang kompeten, serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem informasi kearsipan secara elektronik. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya dukungan arsip terhadap penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tata kelola pemerintahan berbasis bukti.

Dalam RKPD Tahun 2027, peningkatan indikator ini diarahkan melalui strategi: (1) penguatan implementasi sistem kearsipan elektronik terintegrasi pada seluruh perangkat daerah; (2) peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM pengelola arsip; (3) percepatan penataan arsip inaktif dan statis; serta (4) pelaksanaan pengawasan internal kearsipan secara berkala. Dengan langkah tersebut, ditargetkan tingkat ketersediaan arsip di Kabupaten Lampung Utara dapat meningkat secara bertahap hingga mencapai minimal 55–60 persen pada Tahun 2027, sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Secara substantif, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian 33,30 persen menunjukkan bahwa baru sepertiga dari keseluruhan arsip yang seharusnya tersedia dan terjaga

keutuhannya telah memenuhi standar pengelolaan kearsipan. Hal ini masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan arah kebijakan nasional di bidang kearsipan yang mendorong terwujudnya tata kelola arsip yang andal dan komprehensif sebagaimana dibina oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:
1. Belum optimalnya penataan arsip statis dan arsip vital pada seluruh perangkat daerah.
2. Keterbatasan SDM pengelola arsip yang memiliki kompetensi teknis kearsipan.
3. Belum sepenuhnya terintegrasinya sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik.
4. Rendahnya kesadaran tertib arsip di tingkat unit kerja.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan dan keutuhan arsip memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas kinerja, penyelesaian sengketa hukum, perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta pelestarian memori kolektif daerah. Dengan demikian, peningkatan indikator ini menjadi bagian penting dalam penguatan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis bukti (*evidence-based governance*).

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

2.1.3.3.1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat di Kabupaten Lampung Utara memiliki karakteristik khusus karena wilayah ini tidak memiliki laut. Oleh karena itu, kegiatan perikanan tangkap lebih banyak difokuskan pada sumber daya air tawar seperti sungai, danau, rawa dan bendungan. Meskipun tidak memiliki laut, potensi perikanan tangkap perairan darat di Lampung Utara cukup besar dengan beragam jenis ikan air tawar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produksi ini juga berperan penting dalam menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama bagi komunitas yang menggantungkan hidup pada sumber daya perairan darat.

Tabel 2.78
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Produksi perikanan tangkap (Perairan umum darat)	-	163,37	157,79	29,20	121

Sumber : Dinas Perikanan Kab. LU, 2026

Produksi perikanan tangkap di perairan umum darat Kabupaten Lampung Utara selama periode 2022–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022 produksi mencapai 163,37 ton, kemudian sedikit menurun menjadi 157,79 ton pada tahun 2023 atau turun sekitar 3,42 persen. Penurunan tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan dipengaruhi oleh dinamika hasil tangkapan serta kondisi sumber daya perikanan. Pada tahun 2024, produksi mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 29,20 ton, atau turun sekitar 81,49 persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan yang signifikan ini mengindikasikan adanya gangguan terhadap aktivitas perikanan tangkap, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi hidrologi perairan umum, menurunnya populasi ikan, keterbatasan aktivitas penangkapan, perubahan metode pendataan, maupun faktor teknis lainnya yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pada tahun 2025, produksi kembali meningkat menjadi 121 ton, atau tumbuh sekitar 314,38 persen dibandingkan tahun 2024. Meskipun menunjukkan pemulihan yang cukup baik, capaian tersebut masih lebih rendah sekitar 23,98 persen dibandingkan produksi tahun 2023 dan 25,94 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan produksi perikanan tangkap belum sepenuhnya kembali pada kondisi sebelum terjadi penurunan tajam pada tahun 2024. Secara umum, perkembangan produksi perikanan tangkap di perairan umum darat masih menunjukkan tingkat produksi yang belum stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan tangkap masih rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya ikan, serta efektivitas pengelolaan perairan umum darat. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan perlu terus diarahkan pada prinsip keberlanjutan sumber daya, peningkatan produktivitas nelayan, serta konservasi ekosistem perairan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Produksi perikanan tangkap perairan umum darat Kabupaten Lampung Utara mengalami fluktuasi yang cukup tinggi selama periode 2022–2025. Meskipun terjadi pemulihan produksi pada tahun 2025, capaian tersebut masih belum menyamai tingkat produksi sebelum penurunan tajam pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan sumber daya perikanan agar produksi dapat meningkat secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan produksi tersebut, beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- Produksi perikanan tangkap belum stabil, yang menunjukkan tingginya kerentanan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sumber daya perairan.
- Produktivitas perairan umum darat masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan.
- Kondisi ekosistem perairan umum darat berpotensi mengalami penurunan kualitas akibat sedimentasi, pencemaran, perubahan tata guna lahan, maupun perubahan iklim yang memengaruhi habitat ikan.
- Data produksi perikanan perlu terus diperkuat dari aspek akurasi dan konsistensi agar dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan sektor perikanan.
- Pemberdayaan nelayan dan peningkatan sarana-prasarana penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada perikanan tangkap.

2.1.3.3.1.2 Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan kegiatan produksi perikanan melalui pemeliharaan dan pembesaran ikan di lingkungan terkontrol, baik pada kolam, tambak, keramba, maupun sistem bioflok dan teknologi intensif lainnya. Sub-sektor ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Di Kabupaten Lampung Utara, perikanan budidaya memiliki potensi yang cukup besar didukung oleh ketersediaan lahan, sumber air tawar, serta tingginya permintaan pasar terhadap komoditas ikan konsumsi seperti lele, nila, dan patin. Dibandingkan perikanan tangkap yang sangat bergantung pada kondisi alam, budidaya memberikan kepastian produksi yang lebih terukur dan berkelanjutan apabila dikelola dengan teknologi dan manajemen yang tepat. Konsep pengembangan perikanan budidaya diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan dan berorientasi agribisnis, dengan prinsip:

1. Produktivitas – peningkatan produksi melalui penerapan teknologi budidaya modern, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, serta pengendalian penyakit ikan.

2. Keberlanjutan – pengelolaan kualitas air dan limbah budidaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
3. Nilai tambah – pengembangan hilirisasi produk perikanan melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran berbasis UMKM.
4. Kelembagaan – penguatan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan akses pembiayaan melalui kemitraan dan perbankan.

Tabel 2.79
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Produksi perikanan budidaya	6.325,15	12.007,45	8.848,34	8.508.76	8.960

Sumber : Dinas Perikanan Kab. LU, 2026

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, namun masih berada pada tingkat produksi yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, produksi meningkat signifikan dari 6.325,15 ton menjadi 12.007,45 ton, atau tumbuh sekitar 89,84 persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas budidaya, baik melalui perluasan usaha maupun meningkatnya produktivitas pembudidaya ikan. Namun demikian, pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 8.848,34 ton, atau turun sekitar 26,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 8.508,76 ton, meskipun dengan laju penurunan yang lebih kecil, yaitu sekitar 3,84 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor budidaya perikanan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga pakan, perubahan kondisi cuaca, kualitas air, serangan penyakit ikan, maupun keterbatasan akses terhadap sarana produksi.

Pada tahun 2025, produksi kembali meningkat menjadi 8.960 ton, atau tumbuh sekitar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren pemulihan, capaian tersebut masih berada di bawah produksi tahun 2022 yang merupakan produksi tertinggi selama periode pengamatan. Dibandingkan tahun 2021, produksi tahun 2025 masih lebih tinggi sekitar 41,66 persen, yang menunjukkan bahwa secara jangka menengah sektor perikanan budidaya tetap mengalami perkembangan positif.
Secara umum, perkembangan produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyediaan sumber protein hewani. Oleh karena itu, pengembangan budidaya perikanan perlu terus didorong melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, penguatan kelembagaan pembudidaya, serta pengembangan rantai nilai hasil perikanan.

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren yang cukup baik, meskipun mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023–2024, produksi kembali meningkat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya masih memiliki daya tahan dan prospek yang baik untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Berdasarkan perkembangan produksi perikanan budidaya tersebut, beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan antara lain:

- Produksi perikanan budidaya belum stabil, yang menunjukkan adanya pengaruh faktor teknis, ekonomi, dan lingkungan terhadap produktivitas usaha budidaya.
- Biaya produksi, terutama harga pakan dan sarana produksi, masih relatif tinggi sehingga memengaruhi efisiensi usaha pembudidaya.
- Penerapan teknologi budidaya yang lebih modern dan ramah lingkungan masih belum merata sehingga produktivitas antar pembudidaya masih bervariasi.

- Pengendalian penyakit ikan dan kualitas air masih perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan produksi.
- Akses pembudidaya terhadap permodalan, pasar, dan hilirisasi produk perikanan masih perlu ditingkatkan agar nilai tambah dan daya saing produk budidaya semakin meningkat.
- Pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan pembudidaya perlu terus ditingkatkan guna mendukung pengembangan usaha budidaya yang lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3.1.3 Infrastruktur Penunjang Perikanan

Dinas Perikanan memiliki beberapa unit Balai Benih Ikan dan Unit Percontohan Rakyat yang terdiri dari Balai Benih Ikan Tanjung Raja Desa Tulung Balak di Kecamatan Tanjung Raja, UPR Percontohan Kebon Lima di Kelurahan Tanjung Senang, dan Balai Benih Ikan Semuli Raya di Desa Semuli Raya.

Tabel 2.80
Infrastruktur Penunjang Bidang Perikanan

Uraian	Lokasi	Ket
UPTD Dinas Perikanan		
- Balai Benih Ikan Tanjung Raja	Desa Tulung Balak Kec. Tanjung Raja	Belum Optimal dan dibutuhkan Revitalisasi
- UPR Percontohan Kebon Lima	Kelurahan Tanjung Senang	
- Balai Benih Ikan Semuli Raya	Desa Semuli Raya	

Sumber : Dinas Perikanan Kab. LU, 2026

Data Luas Lahan Budidaya Perikanan Produktif di berbagai wilayah kecamatan Lampung Utara menunjukkan potensi besar dalam sektor perikanan air tawar. Total luas lahan budidaya perikanan produktif di wilayah Lampung Utara mencapai 617.667 m², memperlihatkan potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan pada ketahanan pangan daerah. Lampung Utara memiliki potensi besar dalam sektor budidaya air tawar, yang terlihat dari jumlah kolam air tawar yang tersebar di beberapa kecamatan dengan luas yang sangat signifikan. Terdapat total 1.464 kolam air tawar dengan luas lahan mencapai 1.628.548,75 meter persegi di seluruh Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan yang memiliki kolam paling banyak dan luas terbesar adalah Abung Tinggi dengan 670 unit kolam seluas 877.888,25 m², diikuti oleh Tanjung Raja dan Bukit Kemuning. Kecamatan-kecamatan lain seperti Abung Barat dan Abung Tengah juga memiliki potensi yang cukup besar dengan puluhan unit kolam serta luas lahan ribuan meter persegi.

Kabupaten Lampung Utara memiliki total 1.464 titik kolam dengan luas keseluruhan mencapai 162,8 hektar atau sekitar 1.628.548,75 meter persegi. Sebaran lokasi sentra budidaya air tawar mencakup lima kecamatan utama, yaitu Abung Barat, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bukit Kemuning, dan Tanjung Raja. Penyebaran lokasi sentra budidaya ini menunjukkan adanya konsentrasi kegiatan perikanan budidaya air tawar yang sangat tinggi di Kecamatan Abung Tinggi, baik dari segi jumlah maupun luasan kolam. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain masih memiliki potensi untuk pengembangan budidaya sesuai dengan luasan yang ada.

2.1.3.3.1.4 Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya KKP RI

Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya KKP RI untuk Kabupaten Lampung Utara memperlihatkan perkembangan pada berbagai jenis usaha dan kegiatan selama periode 2019 hingga 2023. Pada jenis usaha budidaya pembesaran kolam air tenang, terjadi peningkatan signifikan dari 828 rumah tangga pada 2019 menjadi puncaknya sebanyak 2.540 rumah tangga pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 2.111 pada 2023.

Pola yang serupa, yaitu peningkatan di awal kemudian penurunan di tahun terakhir, juga terlihat pada jenis usaha pembenihan air tawar dan jaring apung tawar.

Tabel 2.81
Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya KKP RI

Jenis Usaha	Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
BUDIDAYA IKAN HIAS	Ikan Hias Air Tawar	1	1	5	5	0
BUDIDAYA PEMBENIHAN	Pembenihan Air Tawar	10	13	15	0	0
BUDIDAYA PEMBESARAN	Jaring Apung Tawar	464	464	463	360	360
BUDIDAYA PEMBESARAN	Keramba	68	68	68	0	0
BUDIDAYA PEMBESARAN	Kolam Air Tenang	828	828	1.253	2.540	2.111
BUDIDAYA PEMBESARAN	Minapadi (Sawah)	1	1	1	0	0
BUDIDAYA PEMBESARAN	Tambak Sederhana	8	9	0	0	0
BUDIDAYA PEMBESARAN	Tambak Semi Intensif	2	12	0	0	0

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : KKP RI, 2025

Struktur usaha perikanan budidaya di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika perubahan pola usaha yang cukup signifikan, baik pada kegiatan pembenihan maupun pembesaran. Pada kelompok Budidaya Ikan Hias Air Tawar, jumlah unit usaha relatif kecil dan stabil pada Tahun 2020–2021 (1 unit), meningkat menjadi 5 unit pada Tahun 2022–2023, namun pada Tahun 2024 tidak tercatat aktivitas (0 unit). Kondisi ini mengindikasikan belum stabilnya pasar dan keberlanjutan usaha ikan hias di daerah.

Untuk Budidaya Pembenihan Air Tawar, terjadi peningkatan dari 10 unit pada Tahun 2020 menjadi 15 unit pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023–2024 tidak tercatat kegiatan (0 unit). Penurunan drastis ini dapat disebabkan oleh konsolidasi usaha, perubahan metode pencatatan, atau beralihnya pelaku usaha ke sektor pembesaran yang dinilai lebih menguntungkan.

Pada kategori Budidaya Pembesaran, terlihat variasi yang cukup tajam:

- Jaring Apung Air Tawar relatif stabil pada kisaran 463–464 unit (2020–2022), kemudian menurun menjadi 360 unit pada Tahun 2023–2024.
- Keramba stabil pada 68 unit hingga Tahun 2022, namun tidak tercatat lagi pada Tahun 2023–2024.
- Kolam Air Tenang justru mengalami peningkatan signifikan, dari 828 unit (2020–2021) menjadi 1.253 unit (2022), melonjak tajam ke 2.540 unit (2023), dan sedikit menurun menjadi 2.111 unit pada Tahun 2024.
- Minapadi (Sawah) tercatat sangat terbatas (1 unit hingga 2022) dan tidak berlanjut pada 2023–2024.
- Tambak Sederhana dan Semi Intensif mengalami penurunan hingga tidak tercatat lagi sejak Tahun 2022.

Data tersebut menunjukkan adanya pergeseran dominasi usaha budidaya ke sistem kolam air tenang, yang menjadi pilihan utama pembudidaya dalam dua tahun terakhir. Hal ini dapat dipengaruhi oleh:

1. Biaya investasi yang relatif lebih terjangkau;
2. Kemudahan pengendalian kualitas air;
3. Risiko usaha yang lebih terkendali dibanding keramba atau jaring apung;
4. Ketersediaan lahan pekarangan atau lahan perdesaan yang memadai.

Sebaliknya, menurunnya usaha keramba, tambak, dan pembenihan menunjukkan adanya tantangan pada aspek teknis, modal, maupun keberlanjutan pasar.

2.1.3.3.1.5 Data Kusuka Berdasarkan Tahun (satu Data KKP RI)

KUSUKA adalah singkatan dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yaitu kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar hasil perikanan, serta penyedia jasa pendukung lainnya.

Manfaat utama KUSUKA antara lain :

- Sebagai basis data nasional untuk pendataan, perencanaan kebijakan, dan integrasi program perlindungan serta pemberdayaan pelaku usaha.
- Mempermudah akses terhadap program pemerintah, seperti bantuan, pembiayaan (KUR), pelayanan asuransi nelayan, serta potensi transaksi online.
- Mendukung dalam monitoring, evaluasi, dan efisiensi pelaksanaan berbagai program KKP agar tepat sasaran.

Dengan demikian, KUSUKA sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, pembinaan, serta perlindungan hukum pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Jumlah KUSUKA berdasarkan tahun dari 2019 hingga 2024, yang berasal dari satu data KKP-RI. Dalam grafik tersebut tampak tren kenaikan yang signifikan setiap tahun. Pada tahun 2019, jumlah KUSUKA hanya 10, kemudian meningkat menjadi 69 di tahun 2020, mengalami sedikit penurunan di 2021 menjadi 62. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan lonjakan dengan masing-masing 170 dan 182 KUSUKA.Peningkatan terbesar tercatat di tahun 2024, yaitu sebanyak 317 KUSUKA. Secara keseluruhan, total jumlah KUSUKA selama periode tersebut mencapai 810. Pola ini memperlihatkan adanya peningkatan minat atau kebijakan yang mendorong penerbitan KUSUKA dari tahun ke tahun, terutama setelah 2022, sehingga program KUSUKA semakin berkembang di Indonesia

2.1.3.3.1.6 Produksi Komoditas Perikanan

Secara umum,produksi perikanan di Lampung Utara dalam tiga tahun terakhir cukup fluktuatif. Penurunan tajam pada beberapa komoditas seperti Mas dan Gurame pada tahun 2023. Namun, naiknya produksi Nila, Gurame, dan Lele di tahun 2024 menandakan adanya upaya pemulihan yang berhasil dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, baik melalui adopsi teknologi, dukungan pemerintah, maupun perbaikan tata kelola budidaya. Patin di tahun 2024 memberikan peluang diversifikasi komoditas serta potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan di daerah. Penting untuk terus memantau kebijakan, inovasi budidaya, dan kondisi pasar agar produksi komoditas perikanan Lampung Utara dapat terus meningkat secara berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2.82
Produksi Komoditas Perikanan

Jenis Ikan	Satuan	2022	2023	2024	2025
Nila	Ton	6.360,64	5.020,30	5.902,90	6.905,30
Mas	Ton	5.359,67	3.783,10	2.240,80	1.829,00
Gurame	Ton	28,34	6,60	33,60	30,40
Lele	Ton	258,85	38,40	304,90	180,20
Patin	Ton	0,00	0,00	26,70	15,50

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Komoditas ikan nila masih menjadi tulang punggung produksi budidaya daerah. Pada Tahun 2022 produksi tercatat sebesar 6.360,64 ton, menurun pada Tahun 2023 menjadi 5.020,30 ton, kemudian kembali meningkat menjadi 5.902,90 ton pada Tahun 2024 dan mencapai 6.905,30 ton pada Tahun 2025. Tren ini menunjukkan pemulihan dan penguatan posisi nila sebagai komoditas utama yang memiliki daya saing tinggi dan permintaan pasar stabil. Sebaliknya, produksi ikan mas menunjukkan tren penurunan

yang cukup tajam. Dari 5.359,67 ton pada Tahun 2022, turun menjadi 3.783,10 ton (2023), kemudian 2.240,80 ton (2024) dan 1.829,00 ton (2025). Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi pembudidaya maupun pasar dari ikan mas ke komoditas lain yang lebih produktif atau lebih menguntungkan secara ekonomi.

Untuk komoditas ikan gurame, produksi relatif kecil namun fluktuatif, yaitu 28,34 ton (2022), turun menjadi 6,60 ton (2023), meningkat menjadi 33,60 ton (2024) dan sedikit menurun menjadi 30,40 ton (2025). Meskipun volumenya terbatas, gurame memiliki nilai jual relatif tinggi sehingga berpotensi dikembangkan sebagai komoditas bernilai tambah. Produksi ikan lele mengalami fluktuasi tajam, dari 258,85 ton (2022) turun drastis menjadi 38,40 ton (2023), kemudian melonjak ke 304,90 ton (2024) dan kembali menurun menjadi 180,20 ton (2025). Pola ini menunjukkan bahwa usaha lele sangat responsif terhadap dinamika harga pakan dan permintaan pasar. Sementara itu, ikan patin mulai menunjukkan perkembangan sejak Tahun 2024 dengan produksi 26,70 ton, kemudian menurun menjadi 15,50 ton pada Tahun 2025. Meskipun masih relatif kecil, kemunculan produksi patin menandakan adanya diversifikasi komoditas budidaya di daerah. Secara komposisi, struktur produksi perikanan budidaya Lampung Utara saat ini didominasi oleh ikan nila, yang secara konsisten menjadi kontributor terbesar. Penurunan produksi ikan mas mengindikasikan terjadinya transformasi struktur usaha menuju komoditas yang lebih adaptif dan efisien. Diversifikasi pada gurame, lele, dan patin menunjukkan potensi pengembangan pasar yang lebih luas, namun masih memerlukan penguatan teknologi, permodalan, dan kepastian rantai distribusi.

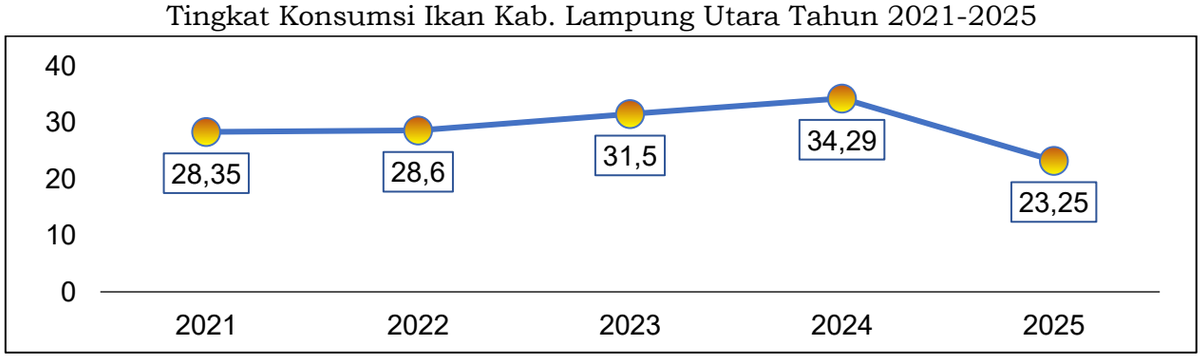
Dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap perekonomian daerah, arah kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada:
1. Penguatan komoditas unggulan nila sebagai basis produksi utama;
2. Revitalisasi budidaya ikan mas melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya;
3. Diversifikasi komoditas bernilai tinggi seperti gurame dan patin;
4. Pengembangan sistem budidaya intensif dan ramah lingkungan;
5. Penguatan hilirisasi dan akses pasar untuk menjaga stabilitas harga.

Dengan strategi tersebut, struktur produksi perikanan budidaya diharapkan semakin seimbang, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pembudidaya serta ketahanan pangan daerah Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.3.1.7 Tingkat Komsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan atau sekarang dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita pertahun. Angka konsumsi ikan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Grafik 2.47
Tingkat Konsumsi Ikan Kab. Lampung Utara Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lampung Utara, 2026

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 konsumsi ikan tercatat sebesar 28,35 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 28,60 kg/kapita/tahun pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 0,88 persen. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 31,50 kg/kapita/tahun (naik 10,14 persen) dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 34,29 kg/kapita/tahun, atau meningkat 8,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2025 tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 23,25 kg/kapita/tahun, atau turun sekitar 32,20 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menghapus tren peningkatan konsumsi yang telah berlangsung selama tiga tahun sebelumnya dan menjadi capaian terendah dalam lima tahun terakhir.
Secara keseluruhan, meskipun konsumsi ikan sempat meningkat hingga tahun 2024, capaian tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan yang perlu mendapat perhatian serius. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2025 masih lebih rendah sekitar 17,99 persen, yang mengindikasikan belum terjaganya kesinambungan peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Penurunan konsumsi ikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan daya beli masyarakat, fluktuasi harga ikan, keterbatasan pasokan, perubahan pola konsumsi pangan, maupun aspek metodologi pengumpulan data yang perlu diverifikasi. Mengingat ikan merupakan salah satu sumber protein hewani utama yang berperan penting dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting. Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta kebijakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren yang positif hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan konsumsi ikan belum berkelanjutan dan masih rentan terhadap berbagai faktor yang memengaruhi akses maupun preferensi konsumsi masyarakat. Berdasarkan perkembangan tersebut, beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian adalah:

- Terjadi penurunan konsumsi ikan yang cukup signifikan pada tahun 2025, sehingga mengindikasikan menurunnya akses atau minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan.
- Konsumsi ikan masyarakat masih belum stabil, sehingga keberhasilan program peningkatan konsumsi ikan belum berkelanjutan.
- Daya beli masyarakat dan fluktuasi harga ikan berpotensi memengaruhi tingkat konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- Distribusi dan ketersediaan produk perikanan yang belum merata dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap ikan, khususnya di wilayah yang jauh dari sentra produksi.
- Edukasi mengenai pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas masih perlu diperkuat melalui kampanye GEMARIKAN dan sinergi lintas sektor, sehingga konsumsi ikan dapat mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, pencegahan stunting, serta pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

2.1.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor perhotelan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dinamika aktivitas pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah. Keberadaan hotel tidak hanya berfungsi sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan, tetapi juga sebagai penunjang kegiatan pemerintahan, bisnis, serta pertemuan dan event daerah. Di Kabupaten Lampung Utara, perkembangan usaha hotel menunjukkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata lokal. Meskipun belum termasuk daerah tujuan wisata utama di Provinsi Lampung, Lampung Utara memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang dapat menjadi daya tarik kunjungan, seperti kawasan air terjun, wisata sungai, serta situs budaya dan religi.

Hubungan antara hotel dan pariwisata bersifat timbal balik. Peningkatan kunjungan wisatawan akan mendorong tingkat hunian hotel (*occupancy rate*), sementara ketersediaan akomodasi yang layak dan representatif akan meningkatkan daya tarik destinasi serta memperpanjang lama tinggal wisatawan (*length of stay*). Dengan demikian, kualitas dan kapasitas hotel menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Selain itu, sektor hotel juga memberikan dampak ekonomi berganda (*multiplier effect*) melalui:

1. Penyerapan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan permintaan produk UMKM (kuliner, kerajinan, jasa transportasi);
3. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel;
4. Pendorong pertumbuhan sektor jasa lainnya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah hotel berbintang, variasi layanan yang masih terbatas, serta belum optimalnya integrasi promosi pariwisata dengan pelaku usaha perhotelan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata daerah perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sarana akomodasi, standarisasi pelayanan, serta kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha hotel.

Tabel 2.83
Direktori Hotel di Kab. Lampung Utara tahun 2025

No	Nama	Kecamatan	Alamat	Jumlah Kamar
1	Bukit Bedugul Hotel	Bukit Kemuning	Jalan Lintas Sumatera Rt 02/Rw 01, Desa Sukamenanti, Bukit Kemuning	15
2	Gundaling Penginapan	Bukit Kemuning	Jalan Baturaja, Lk IX Bukit Kemuning, Rt 01/Rw 13	32
3	Hotel Family	Bukit Kemuning	Jalan Lintas Sumatera Rt 01 Rw 02, Desa Suka Menanti, Kec. Bukit Kemuning	14
4	Kemuning Hotel	Bukit Kemuning	Jl. Kantor Pos No.36 Bukit Kemuning	26
5	Srikandi Hotel	Kotabumi	Jl. Jend. Sudirman No. 16 Kotabumi	26
6	Hotel OYO Pahlawan	Kotabumi	Jl. Pahlawan Kotabumi	23
7	Cahaya Hotel	Kotabumi Selatan	Jl. Alamsyah RPN No. 25	33
8	Duta Hotel	Kotabumi Selatan	Jl. Alamsyah RPN No. 1	92
9	Sederhana Hotel	Kotabumi Selatan	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Alam	15
10	Surya Indah Hotel	Kotabumi Selatan	Jl. Lintas Sumatera Km. 3 Bernah	24
11	Graha Wisata Hotel	Abung Selatan	Jl. Lintas Sumatera No. 9 Sripandowo	42
12	Hotel Jaya Raya Lodya	Blambangan Pagar	Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Iman	18
	Jumlah			360

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Di Kabupaten Lampung Utara, perkembangan rumah makan memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika kunjungan wisata. Semakin meningkat arus wisatawan dan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun event daerah, maka permintaan terhadap jasa kuliner turut mengalami peningkatan. Kondisi ini menciptakan hubungan timbal balik antara sektor pariwisata dan usaha rumah makan.

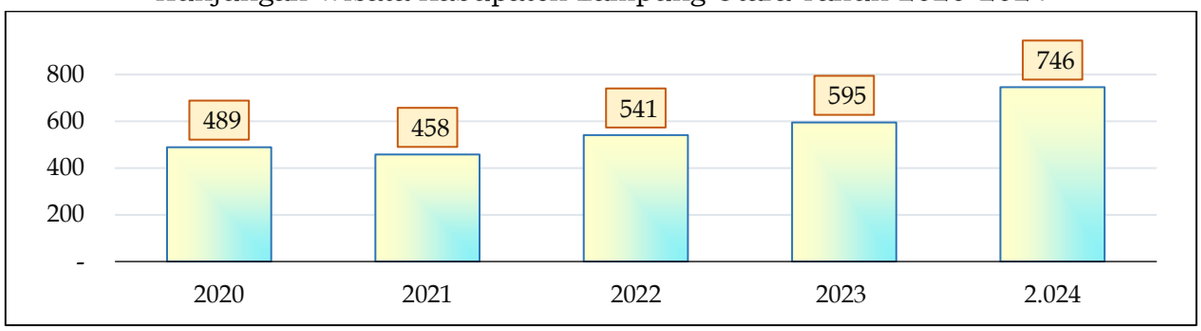
Tabel 2.84
Jumlah Rumah Makan/Restoran Tahun 2022-2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rumah Makan/Restoran	87	91	134	141

Sumber : BPS Lampung, 2026

Dari perspektif daya tarik destinasi, keberagaman dan kualitas kuliner menjadi faktor penting dalam meningkatkan *experience value* wisatawan. Kuliner khas daerah dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan (*length of stay*) dan mendorong kunjungan ulang (*repeat visit*). Oleh karena itu, penguatan standar kebersihan, kualitas pelayanan, serta inovasi menu berbasis potensi lokal menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan pariwisata. Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota dibagi dengan Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota dikalikan dengan 100%.

Grafik 2.48
Kunjungan Wisata Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2025

Jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung Utara sangat fluktuatif setiap tahunnya, sejak tahun 2020 yang merupakan tahun dengan kunjungan wisatawan mencapai 489 kunjungan, dan pada tahun 2021 dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 maka jumlah pengunjungpun mengalami penurunan menjadi 458 dalam 1 tahun. Di Kabupaten Lampung Utara juga sudah dikembangkan desa wisata sampai dengan tahun 2024 yang berjumlah 25 Desa. Di Kabupaten Lampung Utara juga sudah terdapat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sampai dengan tahun 2024 sudah berjumlah 23 Pokdarwis. Pada tahun 2024 kunjungan wisata meningkat dikarenakan banyak even-even kebudayaan yang ditampilkan pada perayaan hari-hari besar baik keagamaan maupun nasional yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Secara konseptual, peningkatan produktivitas diarahkan pada optimalisasi hasil per hektare melalui pendekatan intensifikasi pertanian, tanpa harus memperluas lahan secara signifikan. Hal ini penting mengingat keterbatasan lahan dan adanya tekanan alih fungsi lahan pertanian. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, efisiensi biaya produksi dapat ditingkatkan sehingga margin keuntungan petani menjadi lebih baik. Produktivitas tanaman pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Ketersediaan pasokan yang memadai akan menjaga keseimbangan pasar serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi dan jagung turut mendukung program ketahanan pangan nasional.

2.1.3.3.3.1 Kinerja Sub Sektor Tanaman Pangan Komoditas Padi

Perkembangan kinerja subsektor tanaman pangan, khususnya komoditas Padi, selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif baik dari sisi luas panen, produktivitas maupun produksi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pengaruh berbagai faktor produksi seperti kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, serta intensitas pemanfaatan lahan pertanian. Dari sisi luas panen, selama periode lima tahun terakhir terjadi pola naik turun yang cukup signifikan. Luas panen pada tahun 2021 tercatat sebesar 16.940,92 hektare, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 13.705,47 hektare. Pada tahun 2023 luas panen kembali meningkat menjadi 17.834,92 hektare, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 15.092,55 hektare. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan luas panen mencapai 23.689,00 hektare. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas budidaya padi yang kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi lahan pertanian maupun meningkatnya intensitas tanam.

Tabel 2.85

Tanaman Pangan (Padi) Tahun 2021-2025

Tanamana Pangan (Padi)	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Panen (ha)	16.940,92	13.705,47	17.834,92	15.092,55	23.689,00
Produktivitas (ku/ha)	43,83	46,30	40,59	41,86	45,28
Produksi(ton)	74.260,22	63.452,76	72.390,72	63.178,90	107.276,00
Produksi Padi - Produksi Beras (ton) (Ton)	42.688,72	36.475,98	41.614,01	36.318,58	61.668,00

Sumber : BPS Lampung, 2026

Dari aspek produktivitas, perkembangan yang terjadi relatif lebih stabil dibandingkan luas panen. Produktivitas padi selama periode tersebut berada pada kisaran 40–46 kuintal per hektare. Produktivitas tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 46,30 ku/ha, sementara produktivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 40,59 ku/ha. Pada tahun 2025 produktivitas kembali meningkat menjadi 45,28 ku/ha, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan teknologi budidaya maupun penggunaan sarana produksi pertanian. Perkembangan produksi padi pada dasarnya mengikuti dinamika luas panen dan produktivitas. Produksi padi pada tahun 2021 tercatat sebesar 74.260,22 ton, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 63.452,76 ton. Pada tahun 2023 produksi kembali meningkat menjadi 72.390,72 ton, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 63.178,90 ton. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan produksi mencapai 107.276,00 ton, yang terutama dipengaruhi oleh peningkatan luas panen yang cukup besar disertai dengan perbaikan produktivitas. Jika dilihat dari hasil konversi produksi padi menjadi beras, produksi beras juga menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan perkembangan produksi padi. Produksi beras meningkat dari 42.688,72 ton pada tahun 2021 menjadi 61.668,00 ton pada tahun 2025, sehingga menunjukkan kontribusi penting subsektor tanaman pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, tren perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa variabel luas panen menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi fluktuasi produksi padi, sementara produktivitas relatif lebih stabil. Peningkatan kinerja pada tahun 2025 menjadi indikator positif bagi penguatan sektor tanaman pangan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi padi perlu terus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan intensitas tanam, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien guna menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk melihat kecenderungan pertumbuhan jangka menengah digunakan indikator *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) serta rata-rata pertumbuhan tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.86
CAGR Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2025	CAGR (%)
Luas Panen (ha)	16.940,92	23.689,00	8,73 %
Produktivitas (ku/ha)	43,83	45,28	0,82 %
Produksi Padi (ton)	74.260,22	107.276,00	9,63 %
Produksi Beras (ton)	42.688,72	61.668,00	9,63 %

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Produksi padi tumbuh rata-rata 9,63% per tahun, menunjukkan kinerja subsektor tanaman pangan yang relatif ekspansif dalam periode lima tahun terakhir. Luas panen meningkat 8,73% per tahun, yang berarti peningkatan produksi sebagian besar dipengaruhi oleh ekspansi atau intensifikasi area panen. Dan produktivitas hanya tumbuh 0,82% per tahun, menunjukkan bahwa peningkatan produksi lebih banyak berasal dari faktor luas tanam dibandingkan peningkatan efisiensi produksi. Secara ekonometrik dapat disimpulkan bahwa model pertumbuhan produksi padi di daerah masih bersifat ekstensif, yaitu bertumpu pada peningkatan luas panen, bukan pada peningkatan produktivitas lahan.

Perubahan produksi padi dalam periode 2021–2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama dalam sistem produksi pertanian sebgai berikut :

1. Faktor Iklim
   Variabilitas iklim seperti perubahan pola curah hujan, potensi kekeringan, maupun kejadian cuaca ekstrem berpengaruh langsung terhadap kalender tanam dan tingkat keberhasilan panen. Ketidaksesuaian antara musim tanam dengan kondisi curah hujan dapat menyebabkan penurunan luas panen maupun produktivitas tanaman padi.
2. Kondisi Infrastruktur Irigasi
   Ketersediaan dan kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi padi. Daerah dengan sistem irigasi yang baik cenderung memiliki intensitas tanam lebih tinggi serta risiko gagal panen yang lebih rendah. Sebaliknya, kerusakan jaringan irigasi atau keterbatasan pasokan air dapat mengurangi luas tanam efektif.
3. Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
   Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, rice transplanter, dan combine harvester dapat meningkatkan efisiensi proses budidaya serta mengurangi kehilangan hasil panen. Peningkatan penggunaan alsintan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi meningkatkan produktivitas serta mempercepat proses panen.
4. Akses terhadap Pupuk dan Sarana Produksi
   Ketersediaan pupuk bersubsidi dan sarana produksi pertanian lainnya sangat mempengaruhi tingkat produktivitas tanaman padi. Ketidakstabilan distribusi pupuk atau keterbatasan akses petani terhadap pupuk dapat menurunkan produktivitas lahan.
5. Intensitas Tanam dan Pola Budidaya
   Perubahan intensitas tanam (IP) juga mempengaruhi luas panen. Peningkatan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan sawah beririgasi dapat mendorong peningkatan produksi secara signifikan tanpa harus membuka lahan baru.

Subsektor Padi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, stabilitas harga pangan, serta kesejahteraan masyarakat perdesaan.

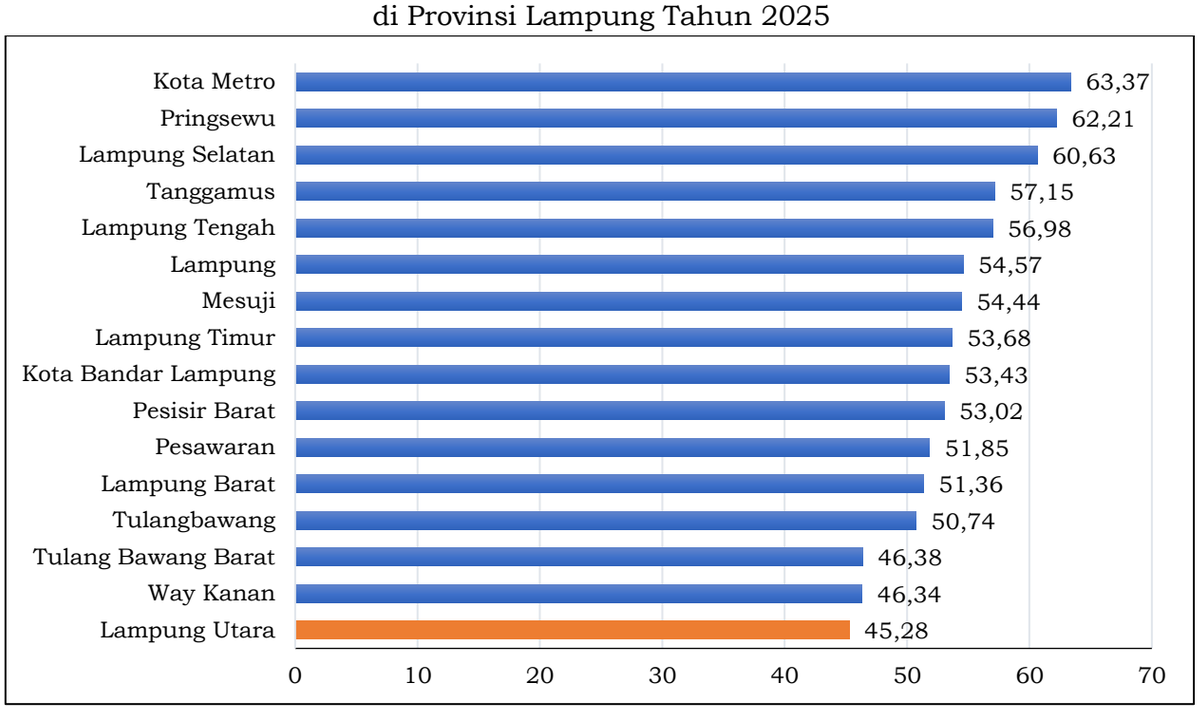
1. Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan

Padi merupakan komoditas utama penyedia bahan pangan pokok berupa Beras bagi masyarakat. Peningkatan produksi padi berkontribusi langsung terhadap ketersediaan pangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Produksi beras yang meningkat dari 42,69 ribu ton pada 2021 menjadi 61,67 ribu ton pada 2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

2. Dampak terhadap Pendapatan Petani
   Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan. Peningkatan produksi padi berpotensi meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan volume hasil panen maupun nilai tambah kegiatan usaha tani.
3. Hubungan dengan Tingkat Kemiskinan
   Secara empiris, peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian memiliki korelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan, terutama di wilayah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian. Ketika produksi padi meningkat, maka terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga petani serta peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan pengolahan hasil pertanian.

Dengan demikian, penguatan subsektor tanaman pangan tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Grafik 2.49
Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha) (Ku/ha) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber : BPS Lampung, 2026

Berdasarkan data produktivitas padi kabupaten/kota di Provinsi Lampung, produktivitas padi di Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 45,28 kuintal per hektare, yang masih berada di bawah rata-rata produktivitas Provinsi Lampung sebesar 54,57 kuintal per hektare. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan produktivitas (yield gap) sebesar 9,29 kuintal per hektare atau sekitar 17 persen dibandingkan rata-rata provinsi. Apabila dibandingkan dengan daerah dengan produktivitas tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro yang mencapai 63,37 kuintal per hektare, kesenjangan produktivitas yang terjadi bahkan mencapai 18,09 kuintal per hektare atau sekitar 28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis masih terdapat

potensi peningkatan produktivitas yang cukup besar melalui optimalisasi sistem produksi dan penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien.

Analisis yield gap tersebut mengindikasikan bahwa kinerja produksi padi di Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi sejumlah kendala struktural maupun teknis. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya produktivitas antara lain keterbatasan infrastruktur irigasi yang menyebabkan sebagian lahan sawah masih bergantung pada sistem tadah hujan, tingkat adopsi teknologi budidaya yang belum merata, serta keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian seperti benih unggul dan pupuk. Selain itu, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta efektivitas sistem penyuluhan pertanian juga turut mempengaruhi tingkat efisiensi usaha tani padi.

Dengan mempertimbangkan luas panen padi di Kabupaten Lampung Utara yang mencapai sekitar 23,7 ribu hektare, peningkatan produktivitas hingga mendekati rata-rata provinsi berpotensi meningkatkan produksi padi secara signifikan tanpa perlu melakukan perluasan lahan pertanian. Secara estimatif, apabila kesenjangan produktivitas sebesar 9,29 kuintal per hektare dapat ditutup, maka tambahan produksi padi dapat mencapai lebih dari 20 ribu ton gabah per tahun. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan daerah, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas padi perlu menjadi salah satu fokus kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Utara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan penggunaan benih unggul, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, penguatan sistem penyuluhan pertanian, serta peningkatan akses petani terhadap sarana produksi. Dengan strategi tersebut diharapkan efisiensi produksi padi dapat meningkat sehingga mampu memperkecil kesenjangan produktivitas dengan daerah lain di Provinsi Lampung.

2.1.3.3.3.2 Kinerja Sub Sektor Hortikultura Komoditas Sayuran dan Buah-Buahan Semusim.

2.1.3.3.3.2.1. Sayuran dan Buah-Buahan

Subsektor hortikultura, khususnya produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung diversifikasi pangan serta peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data produksi tahun 2022–2025, perkembangan produksi komoditas sayuran menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif antar jenis tanaman.

Tabel 2.87
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Tahun 2022-2025

Jenis Tanaman	2022	2023	2024	2025
Sayuran:				
Bawang Daun	2.170,00	2.747,00	2.629,00	2.050,00
Bawang Merah	426,00	1.230,00	0	0
Bayam	12.124,00	8.120,00	7.155,00	7.155,00
Buncis	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabai Rawit	7.953,00	5.131,00	7.155,00	7.320,00
Kacang Panjang	18.983,00	10.953,00	11.390,00	10.488,00
Kangkung	16.247,00	14.340,00	20.452,00	16.960,00
Ketimun	9.051,00	5.163,00	8.036,00	6.503,00
Labu Siam	670,00	0,00	0,00	0,00
Petsai/Sawi	8.020,00	10.206,00	6.672,00	4.643,00
Terung	17.328,00	10.076,00	13.094,00	10.749,00
Tomat	5.612,00	1.473,00	2.629,00	1.317,00
Cabai Besar	354,00	1.402,00	72,00	0
Cabai Keriting	15.636,00	9.592,00	12.945,00	6.583,00

Jenis Tanaman	2022	2023	2024	2025
Jamur Tiram	68,90	52,22	111,50	154,50
Buah-Buahan				
Melon	821,00	1.093,00	2.112,00	859,00
Semangka	15.039,00	4.611,00	6.845,00	5.164,00

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Beberapa komoditas sayuran dengan tingkat produksi relatif tinggi antara lain kacang panjang, terung, kangkung, bayam, dan cabai keriting. Pada tahun 2022, komoditas dengan produksi terbesar adalah kacang panjang sebesar 18.983 ton, diikuti terung sebesar 17.328 ton, kangkung sebesar 16.247 ton, dan cabai keriting sebesar 15.636 ton. Komoditas tersebut menunjukkan peran penting sebagai sumber produksi hortikultura daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, sebagian komoditas mengalami penurunan produksi. Produksi kacang panjang misalnya menurun dari 18.983 ton pada tahun 2022 menjadi 10.488 ton pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada komoditas bayam yang turun dari 12.124 ton pada tahun 2022 menjadi sekitar 7.155 ton pada tahun 2025. Sementara itu, produksi terung mengalami fluktuasi dari 17.328 ton pada tahun 2022, turun menjadi 10.076 ton pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 13.094 ton pada tahun 2024 sebelum kembali turun pada tahun 2025. Beberapa komoditas lainnya menunjukkan kecenderungan peningkatan pada periode tertentu. Produksi kangkung misalnya meningkat dari 14.340 ton pada tahun 2023 menjadi 20.452 ton pada tahun 2024, meskipun kembali menurun pada tahun 2025. Komoditas cabai rawit juga menunjukkan peningkatan dari 5.131 ton pada tahun 2023 menjadi 7.320 ton pada tahun 2025, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas budidaya pada komoditas tersebut.

Pada kelompok buah-buahan semusim, komoditas utama yang diusahakan masyarakat adalah melon dan semangka. Produksi melon menunjukkan peningkatan signifikan dari 821 ton pada tahun 2022 menjadi 2.112 ton pada tahun 2024, meskipun kembali menurun menjadi 859 ton pada tahun 2025. Sementara itu produksi semangka mengalami penurunan dari 15.039 ton pada tahun 2022 menjadi 5.164 ton pada tahun 2025. Fluktuasi produksi hortikultura tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi iklim, perubahan luas tanam, harga komoditas di tingkat petani, serta tingkat serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, ketersediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, serta dukungan teknologi budidaya juga turut mempengaruhi tingkat produksi tanaman hortikultura. Secara umum, subsektor hortikultura di Kabupaten Lampung Utara masih memiliki potensi pengembangan yang cukup besar, terutama pada komoditas sayuran yang memiliki permintaan pasar relatif stabil seperti cabai, terung, kacang panjang, dan kangkung. Pengembangan komoditas tersebut perlu didukung melalui peningkatan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tabel 2.88
Kecamatan Penghasil Sayuran dan Buah-Buahan Terbanyak di Tahun 2025

Jenis Tanaman	Kecamatan Penghasil Terbesar	Jumlah Produksi	% Produksi dibandingkan Total Kabupaten
Sayuran			
Bawang Daun	Abung Selatan	1.392	67,90
Bayam	Kotabumi Utara	1.211	16,93
Cabai Rawit	Kotabumi Utara	942	12,87
Kacang Panjang	Abung Timur	1.259	12,00
Kangkung	Abung Selatan	2.823	16,65
Ketimun	Abung Timur	1.769	27,20
Petsai/Sawi	Abung Selatan	2.328	50,14

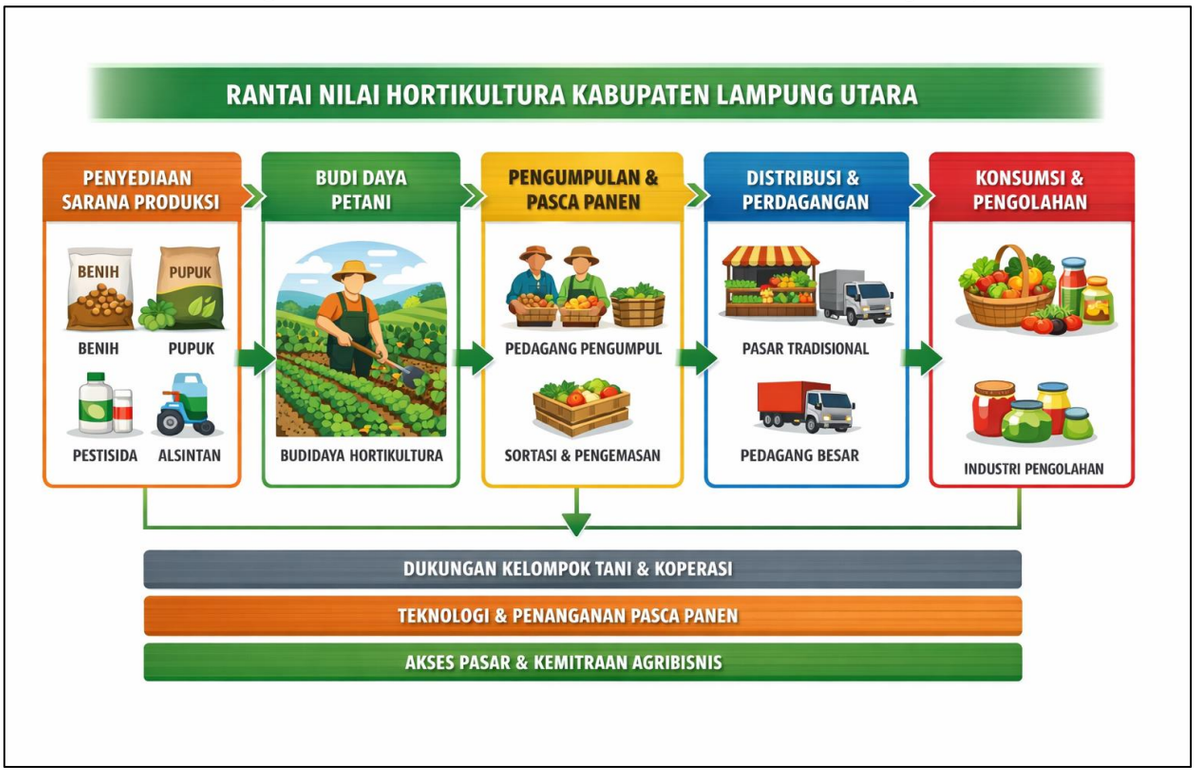
Jenis Tanaman	Kecamatan Penghasil Terbesar	Jumlah Produksi	% Produksi dibandingkan Total Kabupaten
Terung	Abung Timur	1.704	15,85
Tomat	Sungkai Tengah	428	32,50
Cabai Keriting	Kotabumi Utara	748	11,36
Buah-Buahan			
Melon	Kotabumi Utara	476	55,41
Semangka	Bunga Mayang	2.499	48,39

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Sebaran produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya konsentrasi produksi pada beberapa kecamatan tertentu yang berperan sebagai sentra produksi komoditas sayuran maupun buah-buahan semusim. Konsentrasi produksi ini dipengaruhi oleh kondisi agroklimat, kesesuaian lahan, serta pengalaman dan pola usaha tani masyarakat di masing-masing wilayah. Pada kelompok tanaman sayuran, beberapa kecamatan memiliki kontribusi produksi yang cukup dominan. Kecamatan Abung Selatan menjadi sentra utama produksi bawang daun dengan produksi sebesar 1.392 ton atau sekitar 67,90 persen dari total produksi kabupaten. Kecamatan ini juga merupakan sentra produksi komoditas petsai/sawi dengan kontribusi sekitar 50,14 persen dari total produksi kabupaten, serta memiliki produksi kangkung yang cukup tinggi yaitu 2.823 ton atau sekitar 16,65 persen dari total produksi daerah.

Sementara itu, Kecamatan Kotabumi Utara berperan sebagai sentra produksi beberapa komoditas hortikultura penting seperti bayam, cabai rawit, dan cabai keriting. Produksi bayam di kecamatan ini mencapai 1.211 ton atau sekitar 16,93 persen dari total produksi kabupaten, sedangkan produksi cabai rawit mencapai 942 ton atau sekitar 12,87 persen. Selain itu, Kotabumi Utara juga menjadi sentra produksi buah melon dengan kontribusi produksi sebesar 476 ton atau sekitar 55,41 persen dari total produksi melon di Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan Abung Timur juga memiliki peran penting sebagai sentra produksi beberapa komoditas sayuran seperti kacang panjang, ketimun, dan terung. Produksi kacang panjang di wilayah ini mencapai 1.259 ton atau sekitar 12 persen dari total produksi kabupaten, sementara produksi ketimun mencapai 1.769 ton atau sekitar 27,20 persen, yang merupakan kontribusi terbesar untuk komoditas tersebut. Produksi terung di kecamatan ini juga cukup signifikan dengan kontribusi sekitar 15,85 persen dari total produksi kabupaten. Selain itu, Kecamatan Sungkai Tengah tercatat sebagai sentra produksi utama komoditas tomat dengan kontribusi sekitar 32,50 persen dari total produksi kabupaten. Pada kelompok buah-buahan semusim, Kecamatan Bunga Mayang merupakan wilayah dengan produksi semangka terbesar yaitu sekitar 2.499 ton atau 48,39 persen dari total produksi semangka di Kabupaten Lampung Utara. Secara umum, pola sebaran produksi hortikultura di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya spesialisasi wilayah produksi untuk komoditas tertentu. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan sentra hortikultura berbasis komoditas unggulan, sehingga pengembangan sektor hortikultura dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Penguatan kawasan produksi tersebut perlu didukung melalui peningkatan sarana produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan sistem pemasaran hasil hortikultura guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di daerah.

Gambar 2.6
Diagram Rantai Nilai Hortikultura (*value chain diagram*)



Sumber : Analisis, 2026

Rantai nilai hortikultura menggambarkan alur kegiatan ekonomi mulai dari penyediaan input produksi hingga produk hortikultura sampai kepada konsumen akhir. Struktur rantai nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan hortikultura tidak hanya melibatkan petani sebagai produsen utama, tetapi juga berbagai aktor lain seperti penyedia sarana produksi, pedagang pengumpul, distributor, hingga industri pengolahan.

Berdasarkan analisis rantai nilai hortikultura di Lampung Utara, beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi yang berkualitas
2. memperkuat kelembagaan kelompok tani dan koperasi
3. mengembangkan fasilitas pascapanen hortikultura
4. memperpendek rantai distribusi melalui kemitraan pemasaran
5. mendorong pengembangan industri pengolahan hortikultura lokal

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk hortikultura, memperkuat daya saing sektor pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.3.3.2.2. Tanaman Biofarmaka

Pengembangan tanaman biofarmaka memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk herbal dan obat tradisional. Selain memberikan manfaat kesehatan, komoditas ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani karena dapat diusahakan pada lahan pekarangan maupun lahan pertanian skala kecil. Oleh karena itu, pengembangan tanaman biofarmaka perlu didukung melalui peningkatan budidaya, pengolahan hasil, serta penguatan akses pasar agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tabel 2.89
Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2025

Jenis Tanaman	2024	2025
Jahe	1.005.890	184.092

Jenis Tanaman	2024	2025
Kencur	399.801	189.741
Kunyit	39.155	32.002
Lengkuas	53.833	29.420
Lempuyang	4.000	0
Mengkudu	1.000	0
Temuireng	0	800
Temukunci	0	800
Temulawak	7.425	1.200
Jeruk Nipis	81.000	46.500
Serai	5.865	12.150

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data produksi tahun 2024–2025, perkembangan tanaman biofarmaka di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Komoditas jahe masih menjadi tanaman biofarmaka dengan volume produksi terbesar pada tahun 2024, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Penurunan produksi juga terjadi pada beberapa komoditas lain seperti kencur, kunyit, lengkuas, serta temulawak. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan pola tanam atau berkurangnya luas panen yang dipengaruhi oleh faktor iklim, pergeseran komoditas yang diusahakan petani, serta dinamika harga komoditas di pasar.

Di sisi lain, terdapat komoditas yang menunjukkan perkembangan positif, seperti serai yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2025. Selain itu, munculnya produksi komoditas temuireng dan temukunci menunjukkan adanya upaya diversifikasi komoditas biofarmaka oleh petani, meskipun masih dalam skala produksi yang relatif kecil. Sementara itu, beberapa komoditas seperti lempuyang dan mengkudu tidak tercatat produksinya pada tahun 2025, yang mengindikasikan penurunan aktivitas budidaya pada komoditas tersebut. Secara teknokratik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tanaman biofarmaka di Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi tantangan pada aspek kesinambungan produksi dan penguatan sistem budidaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan teknologi budidaya, pengembangan kawasan sentra biofarmaka, serta penguatan hilirisasi produk herbal agar komoditas biofarmaka dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan perekonomian daerah.

Tabel 2.90
Wilayah Produsen Tanaman Biofarmaka Terbesar di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2025

Jenis Tanaman	Kecamatan Penghasil Terbesar	Produksi	% Produksi
Jahe	Abung Selatan	85.300	46,34
Kencur	Abung Semuli	37.150	19,58
Kunyit	Abung Tinggi	8.000	25,00
Lengkuas	Abung Tinggi	14.600	49,63
Lempuyang	Sungkai Tengah	2.300	#DIV/0!
Mengkudu	Abung Selatan	1.000	#DIV/0!
Temulawak	Abung Pekurun	6.505	542,08
Jeruk Nipis	Sungkai Tengah	46.500	100,00
Serai	Sungkai Jaya	6.000	49,38

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data produksi, Kecamatan Abung Selatan menjadi sentra utama produksi jahe dengan kontribusi sekitar 46,34 persen dari total produksi kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kondisi agroklimat dan pengalaman budidaya yang mendukung pengembangan komoditas jahe sebagai tanaman biofarmaka utama. Selain itu, kecamatan yang sama juga tercatat menghasilkan komoditas mengkudu meskipun dalam skala produksi yang relatif kecil. Sementara itu,

Kecamatan Abung Semuli menjadi sentra produksi kencur dengan kontribusi sekitar 19,58 persen dari total produksi kabupaten. Komoditas ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri jamu dan produk herbal.

Untuk komoditas kunyit dan lengkuas, sentra produksi berada di Kecamatan Abung Tinggi, yang masing-masing menyumbang sekitar 25,00 persen dan 49,63 persen dari total produksi kabupaten. Konsentrasi produksi ini menunjukkan adanya potensi pengembangan kawasan biofarmaka di wilayah tersebut. Di wilayah lain, Kecamatan Sungkai Tengah tercatat sebagai sentra produksi jeruk nipis dengan kontribusi mencapai 100 persen dari total produksi kabupaten, serta menghasilkan komoditas lempuyang dalam skala terbatas. Sementara itu, Kecamatan Abung Pekurun menjadi sentra produksi temulawak, sedangkan Kecamatan Sungkai Jaya merupakan sentra produksi serai dengan kontribusi sekitar 49,38 persen.

Pola distribusi produksi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tanaman biofarmaka di Kabupaten Lampung Utara masih bersifat terpusat pada beberapa kecamatan tertentu. Kondisi ini memberikan peluang untuk pengembangan kawasan sentra biofarmaka berbasis komoditas unggulan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong pengembangan industri pengolahan herbal di tingkat lokal. Penguatan budidaya, dukungan teknologi pascapanen, serta pengembangan rantai pemasaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan subsektor tanaman biofarmaka di daerah.

Pengembangan tanaman biofarmaka memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi berbasis herbal serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Tanaman biofarmaka seperti Jahe, Kunyit, Kencur, Lengkuas, dan Temulawak merupakan bahan baku utama dalam pembuatan berbagai produk herbal tradisional seperti jamu, minuman kesehatan, rempah instan, serta produk olahan lainnya. Ketersediaan bahan baku biofarmaka dari sektor pertanian memberikan peluang bagi pengembangan industri pengolahan herbal skala rumah tangga maupun UMKM. Produk-produk berbasis biofarmaka seperti jamu tradisional, minuman herbal instan, minyak atsiri, dan rempah olahan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan penjualan bahan mentah. Oleh karena itu, pengolahan komoditas biofarmaka dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi lokal.
Selain itu, tren peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan produk alami turut mendorong permintaan pasar terhadap produk herbal. Kondisi ini membuka peluang bagi UMKM daerah untuk mengembangkan berbagai produk olahan berbasis biofarmaka dengan memanfaatkan potensi bahan baku lokal.

Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan keterkaitan antara subsektor tanaman biofarmaka dengan sektor UMKM dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain pengembangan sentra produksi biofarmaka, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam pengolahan produk herbal, serta penguatan akses pemasaran melalui jaringan pasar lokal maupun digital. Dengan pengembangan yang terintegrasi antara sektor pertanian dan industri pengolahan, komoditas biofarmaka berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.3.3.3 Kinerja Sub Sektor Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu komponen penting dalam sektor pertanian yang berperan dalam mendukung perekonomian daerah, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas perkebunan

umumnya diusahakan oleh perkebunan rakyat maupun skala usaha yang lebih besar dengan memanfaatkan kondisi agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai tanaman perkebunan. Di wilayah Kabupaten Lampung Utara, subsektor perkebunan didominasi oleh komoditas unggulan seperti Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, dan Kelapa. Komoditas-komoditas tersebut memiliki peran strategis karena memberikan kontribusi terhadap produksi pertanian daerah serta menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah perdesaan.

Tabel 2.91
Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan Menurut Jenisnya Tahun 2025

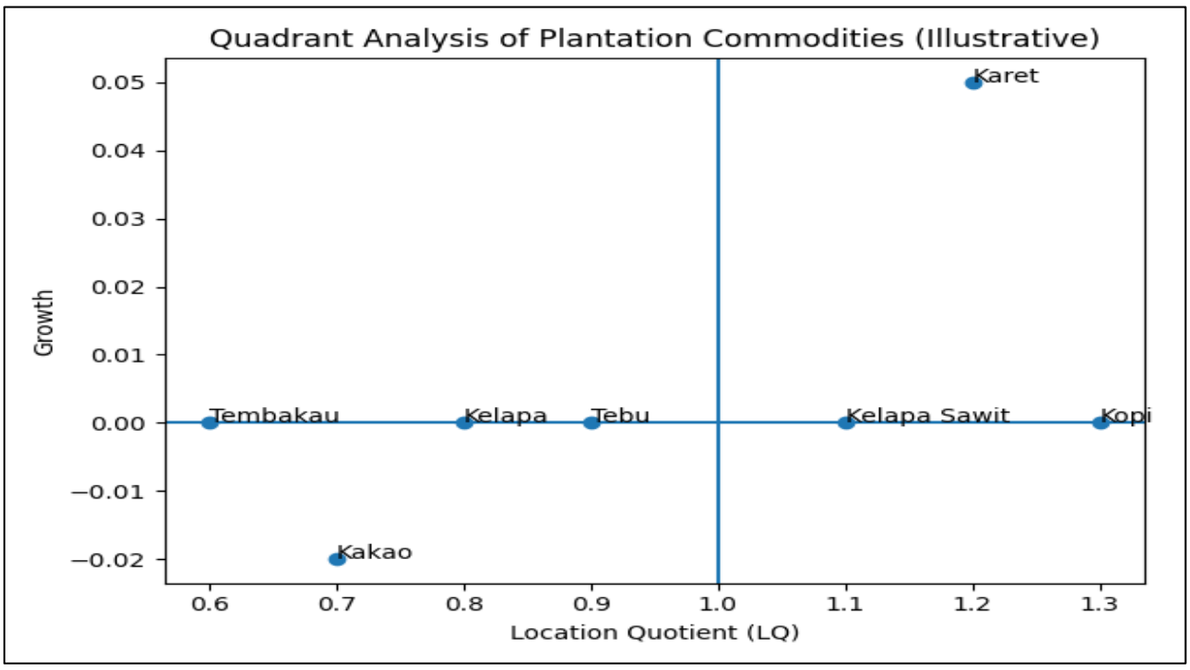
Jenis Tanaman	Produksi (ton)		Luas Areal (ha)	
	2024	2025	2024	2025
Kelapa Sawit	5.235	5.235	7.642	7.642
Kelapa	367	367	726	726
Karet	12.353	12.353	9.166	14.315
Kopi	9.838	9.838	22.976	22.976
Kakao	152	152	634	634
Tebu	7.415	7.415	2.391	2.391
Tembakau	9	9	11	11

Sumber : BPS Lampung, 2026

Pada tahun 2025, komoditas tebu menunjukkan tingkat produktivitas tertinggi yaitu sekitar 3,10 ton per hektare, yang mencerminkan tingkat intensitas budidaya yang relatif tinggi dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Komoditas karet memiliki produktivitas sekitar 0,86 ton per hektare, sementara kelapa sawit memiliki produktivitas sekitar 0,68 ton per hektare. Kedua komoditas ini merupakan komoditas penting dalam struktur perkebunan daerah, meskipun produktivitasnya masih berpotensi untuk ditingkatkan melalui perbaikan teknologi budidaya dan pengelolaan tanaman.

Komoditas kopi, yang memiliki luas areal terbesar di Kabupaten Lampung Utara, menunjukkan produktivitas sekitar 0,43 ton per hektare. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komoditas kopi memiliki skala areal yang luas, tingkat produktivitasnya masih relatif rendah sehingga memerlukan upaya peningkatan melalui peremajaan tanaman dan peningkatan kualitas pengelolaan kebun. Sementara itu, komoditas kakao memiliki produktivitas paling rendah yaitu sekitar 0,24 ton per hektare, yang mengindikasikan bahwa komoditas ini masih diusahakan dalam skala terbatas dengan tingkat intensitas budidaya yang relatif rendah. Secara umum, variasi produktivitas antar komoditas menunjukkan adanya peluang peningkatan kinerja subsektor perkebunan melalui peningkatan teknologi budidaya, penggunaan bibit unggul, serta penguatan sistem pengelolaan kebun oleh petani. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan memperkuat kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah.

Gambar 2.7
Diagram Kuadran Komoditas Perkebunan (LQ vs Pertumbuhan)



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Pada struktur subsektor perkebunan di Kabupaten Lampung Utara, komoditas Karet, Kopi, dan Tebu memberikan kontribusi produksi terbesar terhadap total produksi perkebunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menopang perekonomian subsektor perkebunan serta menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Sementara itu, komoditas seperti Kelapa Sawit dan Kelapa memberikan kontribusi menengah terhadap total produksi perkebunan, sedangkan komoditas Kakao dan Tembakau masih memiliki kontribusi relatif kecil dalam struktur subsektor perkebunan. Berdasarkan analisis kuadran komoditas, kopi dan karet berada pada kelompok komoditas basis yang memiliki peran strategis dalam struktur perkebunan daerah. Komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif serta potensi pengembangan yang cukup besar sehingga dapat diarahkan sebagai komoditas prioritas dalam pengembangan subsektor perkebunan.

Tabel 2.92
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

Kabupaten	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
Lampung Barat	78	444	42	62.980	901		11
Tanggamus	13	19.037	102	32.832	7.100		52
Lampung Selatan	9.751	20.640	6.062	350	7.630		6
Lampung Timur	7.433	11.932	6.703	233	3.644		250
Lampung Tengah	43.153	6.619	5.160	355	3.192	68.489	19
Lampung Utara	5.235	367	12.353	9.838	152	7.415	9
Way Kanan	27.953	2.816	52.603	8.759	539	93.054	22
Tulangbawang	35.059	744	35.400	74	153		1
Pesawaran	1.115	8.822	1.068	1.267	21.573		82
Pringsewu	1.094	3.505	1.033	700	2.597		89
Mesuji	47.447	1.730	32.011	0	2		7
Tulang Bawang Barat	3.808	284	20.457	21	2	671	1
Pesisir Barat	20.281	6.203	300	3.369	468		5
Kota Bandar Lampung	18	174	30	14	124		1
Kota Metro	0	54	1	1	30		2

Kabupaten	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Tembakau
Lampung	202.439	83.372	173.324	120.793	48.110	169.628	556

Sumber : BPS Lampung, 2026

Struktur subsektor perkebunan di Provinsi Lampung menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi produksi komoditas antar kabupaten. Dalam konteks ini, Kabupaten Lampung Utara memiliki peran yang cukup penting terutama pada beberapa komoditas perkebunan tertentu yang menjadi basis ekonomi masyarakat perdesaan. Berdasarkan perbandingan data produksi antar kabupaten, Lampung Utara memiliki posisi yang relatif kuat pada komoditas Karet dan Kopi. Produksi karet di Lampung Utara mencapai sekitar 12.353 ton, menjadikannya salah satu daerah produsen karet di provinsi ini meskipun masih berada di bawah wilayah seperti Kabupaten Way Kanan yang memiliki produksi terbesar. Sementara itu, produksi kopi mencapai sekitar 9.838 ton yang menunjukkan bahwa komoditas kopi masih menjadi salah satu komoditas utama perkebunan rakyat di daerah ini. Untuk komoditas Kelapa Sawit, Lampung Utara memiliki produksi sekitar 5.235 ton yang relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten lain seperti Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan sentra utama perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit bukan merupakan komoditas dominan dalam struktur perkebunan Lampung Utara. Pada komoditas Tebu, Lampung Utara menghasilkan sekitar 7.415 ton, namun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan wilayah sentra produksi seperti Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki produksi tebu jauh lebih besar. Sementara itu, komoditas lain seperti Kakao, Kelapa, dan Tembakau diusahakan dalam skala yang relatif kecil sehingga kontribusinya terhadap total produksi provinsi masih terbatas.

Secara keseluruhan, posisi Kabupaten Lampung Utara dalam struktur perkebunan Provinsi Lampung dapat dikategorikan sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan rakyat berbasis karet dan kopi, dengan peran yang lebih terbatas pada komoditas perkebunan industri seperti kelapa sawit dan tebu. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik perkebunan di Lampung Utara lebih didominasi oleh sistem usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha yang relatif kecil hingga menengah. Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut memberikan peluang untuk memperkuat posisi Lampung Utara sebagai sentra pengembangan komoditas kopi dan karet melalui peningkatan produktivitas tanaman, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan hilirisasi produk perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas di tingkat regional maupun nasional.

2.1.3.3.3.4 Kinerja Sub Sektor Peternakan

Di Kabupaten Lampung Utara, kegiatan peternakan umumnya diusahakan oleh masyarakat dalam skala usaha kecil hingga menengah melalui sistem peternakan rakyat. Komoditas ternak yang berkembang antara lain Sapi, Kambing, Ayam, dan Itik, yang dimanfaatkan sebagai sumber daging, telur, maupun bibit ternak. Pengembangan subsektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas hasil ternak, serta penguatan sistem budidaya dan kesehatan hewan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan peternak.

Tabel 2.93

Populasi Ternak dan Produksi Daging Kab. Lampung Utara Tahun 2022-2025

Populasi Ternak dan Produksi Daging	2022	2023	2024	2025
Populasi Ternak (ekor)				
Sapi Potong	29.133	29.968	30.716	31.701
Kerbau	945	810	779	778
Kambing	84.303	118.951	157.623	153.513

Populasi Ternak dan Produksi Daging	2022	2023	2024	2025
Domba	2.625	3.402	4.228	4.626
Babi	619	559	724	694
Ayam Buras/Kampung	908.534	853.694	736.359	733.678
Ayam Ras Petelur	368.709	359.670	629.892	647.290
Ayam Ras Pedaging	4.520.455	4.012.045	3.546.197	4.849.556
Itik	12.102	14.616	11.023	11.888
Produksi Daging Ternak (kg)				
Sapi Potong	1.169.523	1.153.006	1.542.449	1.021.069
Kerbau	3.800	1.900	3.800	3.610
Kambing	82.320	83.460	179.760	113.840
Domba	931	421	700	780
Babi	44.235	45.180	45.360	4.590
Ayam Buras/Kampung	223.176	226.536	228.791	204.405
Ayam Ras Petelur	107.286	107.380	108.454	105.080
Ayam Ras Pedaging	1.870.977	1.875.652	1.894.537	1.896.107
Itik	3.219	3.235	3.288	2.242

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan dinamika perkembangan yang bervariasi baik dari sisi populasi ternak maupun produksi daging selama periode 2022–2025. Beberapa komoditas ternak utama yang berkembang di daerah ini antara lain Sapi Potong, Kambing, Ayam Ras Pedaging, serta Ayam Ras Petelur, yang menjadi sumber utama penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Dari sisi populasi ternak, sapi potong menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari 29.133 ekor pada tahun 2022 menjadi 31.701 ekor pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan usaha peternakan sapi yang cukup baik serta potensi peningkatan produksi daging di daerah. Sebaliknya, populasi kerbau cenderung mengalami penurunan dari 945 ekor pada tahun 2022 menjadi 778 ekor pada tahun 2025, yang mengindikasikan berkurangnya minat masyarakat dalam mengusahakan ternak kerbau.

Pada kelompok ternak kecil, populasi kambing mengalami peningkatan yang signifikan dari 84.303 ekor pada tahun 2022 menjadi 153.513 ekor pada tahun 2025, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kambing merupakan salah satu komoditas ternak rakyat yang berkembang pesat karena relatif mudah dipelihara dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Pada subsektor unggas, populasi ayam ras pedaging merupakan yang terbesar dengan jumlah mencapai 4.849.556 ekor pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, populasi ayam ras petelur juga mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2024 hingga mencapai 647.290 ekor pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor unggas memiliki peran dominan dalam struktur peternakan daerah. Sementara itu, populasi ayam buras/kampung cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih menjadi salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat perdesaan.

Dari sisi produksi daging, kontribusi terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan produksi sekitar 1,89 juta kilogram pada tahun 2025. Produksi daging sapi potong juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar meskipun mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Sementara itu, produksi daging dari ternak kecil seperti kambing dan domba relatif lebih kecil namun tetap memberikan kontribusi terhadap penyediaan protein hewani masyarakat. Secara keseluruhan, struktur subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh komoditas unggas, khususnya ayam ras pedaging, diikuti oleh ternak ruminansia seperti sapi potong dan kambing. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan subsektor peternakan ke depan perlu diarahkan

pada peningkatan produktivitas ternak, penguatan sistem budidaya dan kesehatan hewan, serta pengembangan usaha peternakan berbasis agribisnis guna meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Masalah utama pada sub sektor ini adalah produktivitas dan daya saing subsektor peternakan masih rendah yang disebabkan oleh skala usaha kecil, ketersediaan pakan terbatas, kualitas bibit ternak rendah, teknologi budidaya sederhana, kelembagaan peternak lemah dan akses pasar terbatas. Berdasarkan masalah tersebut, strategi pengembangan peternakan di Kabupaten Lampung Utara dapat diarahkan pada:

1. Peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan bibit unggul, peningkatan kualitas pakan ternak dan penerapan teknologi budidaya.
2. Penguatan kelembagaan peternak melalui pembentukan kelompok ternak dan peningkatan akses pembiayaan usaha
3. Pengembangan agribisnis peternakan melalui integrasi usaha ternak dengan pertanian dan pengembangan kemitraan usaha
4. Penguatan rantai pasok peternakan melalui peningkatan akses pasar dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak
5. Pengendalian penyakit ternak melalui peningkatan layanan kesehatan hewan dan penguatan sistem biosekuriti.

2.1.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Luas areal hutan menurut berdasarkan data BPS Provinsi Lampung SK.NO. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 bahwa luas kawasan hutan lindung sebesar 28.000 Hektar dan kawasan hutan produksi tetap seluas 178 Hektar. Sementara berdasarkan data dari RTRW berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2007 berlokasi pada Register 24 Bukit Punggur dan Register 34 Tangkit Tebak yang tersebar di Kecamatan Abung Pekurun seluas 1.220,15 Hektar, Kecamatan Abung Tinggi seluas 292,76 Hektar, Kecamatan Bukit Kemuning seluas 9.805,89 Hektar dan Kecamatan Tanjung Raja seluas 15.896,27 Hektar.

2.1.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan energi di Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ketersediaan energi listrik di daerah ini sebagian besar dipasok melalui sistem jaringan yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang menjadi penyedia utama tenaga listrik bagi sektor rumah tangga, perdagangan, industri kecil, serta fasilitas pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, kebutuhan energi listrik di Lampung Utara juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas jaringan distribusi, perluasan akses listrik, serta peningkatan keandalan pasokan energi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain energi listrik, kebutuhan energi masyarakat juga dipenuhi melalui penggunaan bahan bakar seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahan bakar minyak, serta energi biomassa yang masih digunakan di sebagian wilayah perdesaan. Penggunaan LPG terutama meningkat dalam sektor rumah tangga seiring dengan program konversi energi dari minyak tanah ke gas yang telah dilaksanakan secara nasional oleh Pertamina. Namun demikian, di beberapa wilayah perdesaan masih terdapat pemanfaatan kayu bakar sebagai sumber energi alternatif, terutama untuk kegiatan memasak dan usaha kecil.

Dalam konteks pembangunan daerah, penyediaan energi di Kabupaten Lampung Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil. Ketersediaan energi yang

memadai dan andal dapat meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur energi, peningkatan rasio elektrifikasi, serta pengembangan potensi energi baru dan terbarukan menjadi salah satu arah kebijakan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.94
Jumlah Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN yang Terjual Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025

Golongan Tarif	Jumlah listrik yang terjual (Kwh)		
	2023	2024	2025
Rumah Tangga	215.163.301	221.147.158	184.560.731
Pelayanan Sosial	12.440.034	15.254.472	13.453.777
Bisnis	28.431.674	36.770.588	34.384.312
Industri	62.385.734	63.956.808	55.455.925
Kantor Pemerintah (JPU)	17.048.643	16.037.552	14.944.423
Traksi	-	-	-
Curah	-	-	-
Layanan Khusus	159.018	685.053	693.184
TOTAL	335.628.404	353.851.631	303.492.352

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Pada tahun 2023 total penjualan listrik mencapai 335,63 juta kWh, kemudian meningkat menjadi 353,85 juta kWh pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 303,49 juta kWh. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti efisiensi penggunaan energi, perubahan jumlah pelanggan aktif, maupun kondisi ekonomi yang mempengaruhi tingkat konsumsi listrik. Dilihat dari struktur konsumsi listrik, golongan rumah tangga merupakan pengguna energi listrik terbesar. Pada tahun 2024 konsumsi listrik rumah tangga mencapai 221,15 juta kWh, atau sekitar 62,5 persen dari total konsumsi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan listrik di Lampung Utara masih didominasi oleh kebutuhan domestik masyarakat, seperti penerangan, peralatan rumah tangga, dan kegiatan usaha rumah tangga.

Golongan industri menjadi pengguna listrik terbesar kedua dengan konsumsi sekitar 63,96 juta kWh pada tahun 2024, atau sekitar 18 persen dari total konsumsi listrik. Besarnya konsumsi listrik pada sektor ini menunjukkan adanya aktivitas industri pengolahan di daerah yang memerlukan pasokan energi listrik secara cukup signifikan. Sementara itu, golongan bisnis juga menunjukkan peningkatan konsumsi listrik dari 28,43 juta kWh pada tahun 2023 menjadi 36,77 juta kWh pada tahun 2024, yang mengindikasikan perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa di daerah.
Pada sisi lain, konsumsi listrik pada golongan pelayanan sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah relatif lebih kecil namun mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sedangkan konsumsi listrik pada kantor pemerintah menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode tersebut, yang dapat disebabkan oleh upaya efisiensi energi pada instansi pemerintah. Secara keseluruhan, struktur konsumsi listrik di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa sektor rumah tangga masih menjadi pengguna listrik dominan, sementara sektor industri dan bisnis memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keandalan jaringan listrik menjadi hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat.

Tabel 2.95
Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023- 2025

Sumber Penerangan Utama	2023	2024	2025
Listrik PLN	99,26	99,83	100

Sumber Penerangan Utama	2023	2024	2025
Listrik Non PLN	0,74	0	0
Bukan Pengguna Listrik	0	0,17	0

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

2.1.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Lampung Utara, terutama dalam mendistribusikan berbagai komoditas hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Aktivitas perdagangan di daerah ini didukung oleh keberadaan pasar tradisional, toko, serta usaha perdagangan skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai kecamatan. Perdagangan tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi penghubung distribusi barang dengan wilayah lain di Provinsi Lampung. Perkembangan sektor perdagangan sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perbaikan infrastruktur transportasi yang mempermudah arus barang dan jasa. Dengan demikian, sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perputaran ekonomi daerah serta mendukung penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.96
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2024 dan 2025

Jenis Sarana Perdagangan	2024	2025
Pasar	67	68
Minimarket/Swalayan/ Supermarket	94	91
Restoran/Rumah Makan/	142	127

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Sarana perdagangan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan perkembangan yang relatif dinamis selama periode 2024–2025. Jumlah pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan tradisional tercatat meningkat dari 67 unit pada tahun 2024 menjadi 68 unit pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan fasilitas perdagangan bagi masyarakat. Sementara itu, jumlah minimarket, swalayan, dan supermarket mengalami sedikit penurunan dari 94 unit menjadi 91 unit, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika usaha ritel modern maupun penyesuaian kondisi pasar. Demikian pula jumlah restoran dan rumah makan tercatat menurun dari 142 unit pada tahun 2024 menjadi 127 unit pada tahun 2025. Meskipun demikian, keberadaan berbagai sarana perdagangan tersebut tetap berperan penting dalam mendukung aktivitas distribusi barang, memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta menggerakkan perekonomian lokal di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.97
Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2024 dan 2025

Bulan	2024			2024		
	PMDA	PMDN	Total	PMDA	PMDN	Total
Triwulan 1	407	30.247	30.654	1.050	65.559	66.609
Triwulan 2	7.978	48.351	56.328	310	494.510	494.820
Triwulan 3	0	50.197	50.197	18.285	104.634	122.919
Triwulan 4	20	69.143	69.163	2.015	105.377	107.392
TOTAL	8.405	197.938	206.342	21.660	770.080	791.740

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Realisasi investasi di Kabupaten Lampung Utara yang diukur melalui jumlah izin usaha menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam periode dua tahun

terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 206 izin usaha yang diterbitkan, terdiri dari 197 izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 8 izin Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah izin usaha meningkat menjadi 791 izin usaha, yang terdiri dari 770 izin PMDN dan 21 izin PMA. Peningkatan jumlah izin usaha ini menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas investasi dan minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di daerah.

Dilihat dari distribusi triwulanan, penerbitan izin usaha pada tahun 2024 relatif stabil dengan jumlah tertinggi terjadi pada Triwulan IV, sedangkan pada tahun 2025 peningkatan paling signifikan terjadi pada Triwulan II yang didominasi oleh izin usaha PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Lampung Utara masih sangat bergantung pada investasi domestik, sementara kontribusi investasi asing masih relatif kecil. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah izin usaha tersebut mencerminkan adanya perbaikan iklim investasi serta meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha baru, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.98
Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang Diterbitkan di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2024 dan 2025

Bulan	2024				2025			
	Fungsi Hunian	Fungsi Usaha	Tower	Sosial dan Budaya	Fungsi Hunian	Fungsi Usaha	Tower	Sosial dan Budaya
Triwulan 1	0	2	0	0	6	4	23	2
Triwulan 2	1	0	5	2	3	28	0	0
Triwulan 3	4	6	10	3	3	13	0	1
Triwulan 4	0	3	5	1	1	1	4	1
TOTAL	5	11	20	6	13	46	27	4

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Penerbitan izin bangunan di Kabupaten Lampung Utara selama periode 2024–2025 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, terutama pada bangunan dengan fungsi usaha dan infrastruktur telekomunikasi. Pada tahun 2024 tercatat total 42 izin bangunan, yang terdiri dari 5 izin fungsi hunian, 11 izin fungsi usaha, 20 izin tower, serta 6 izin fungsi sosial dan budaya. Sementara itu pada tahun 2025 jumlah izin bangunan meningkat cukup signifikan menjadi 90 izin, yang terdiri dari 13 izin fungsi hunian, 46 izin fungsi usaha, 27 izin tower, dan 4 izin fungsi sosial dan budaya. Peningkatan terbesar terjadi pada bangunan fungsi usaha, yang meningkat dari 11 izin pada tahun 2024 menjadi 46 izin pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan usaha di daerah. Selain itu, peningkatan izin tower telekomunikasi juga cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya penguatan infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Di sisi lain, izin bangunan fungsi hunian juga mengalami peningkatan meskipun dalam jumlah yang lebih terbatas, mencerminkan bertambahnya kebutuhan perumahan masyarakat. Sementara itu, bangunan fungsi sosial dan budaya relatif stabil namun jumlahnya masih terbatas.

Secara keseluruhan, peningkatan penerbitan izin bangunan ini menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas pembangunan fisik di Kabupaten Lampung Utara, baik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, infrastruktur telekomunikasi, maupun kebutuhan permukiman masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan layanan masyarakat.

2.1.3.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor perindustrian di Kabupaten Lampung Utara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi komoditas utama wilayah tersebut. Kegiatan industri di daerah ini umumnya didominasi oleh industri kecil dan menengah yang bergerak pada pengolahan pangan, kerajinan, serta produk berbasis sumber daya lokal. Keberadaan sektor perindustrian tidak hanya memberikan nilai tambah terhadap komoditas daerah, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat serta mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan dukungan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, serta akses distribusi ke berbagai wilayah di Provinsi Lampung, sektor perindustrian di Lampung Utara memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Tabel 2.99
Jumlah Perusahaan Industri Besar

Kabupaten	2025
Lampung Barat	1
Tanggamus	2
Lampung Selatan	83
Lampung Timur	34
Lampung Tengah	83
Lampung Utara	11
Way Kanan	9
Tulangbawang	8
Pesawaran	8
Pringsewu	10
Mesuji	7
Tulang Bawang Barat	9
Pesisir Barat	
Kota Bandar Lampung	98
Kota Metro	13
Lampung	376

Sumber : BPS Lampung, 2026

Jumlah perusahaan atau industri besar di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 tercatat sebanyak 11 unit. Jika dibandingkan dengan total industri besar di Provinsi Lampung yang mencapai 376 unit, kontribusi Kabupaten Lampung Utara masih tergolong relatif kecil. Posisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Utara berada pada kelompok kabupaten dengan jumlah industri menengah, di bawah daerah yang memiliki konsentrasi industri tinggi seperti Kota Bandar Lampung (98 unit), Kabupaten Lampung Selatan (83 unit), dan Kabupaten Lampung Tengah (83 unit), namun masih lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus yang memiliki jumlah industri sangat terbatas. Perbedaan jumlah industri antar wilayah tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam perkembangan sektor industri di Provinsi Lampung. Wilayah dengan jumlah industri yang lebih besar umumnya didukung oleh aksesibilitas transportasi yang baik, kedekatan dengan pusat perdagangan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung industri. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara meskipun memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu wilayah penghubung antar kabupaten di bagian utara Provinsi Lampung, namun pengembangan industri pengolahan masih belum berkembang secara optimal.

Ditinjau dari struktur ekonomi daerah, perekonomian Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor primer, terutama sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan daerah seperti singkong, kelapa sawit, dan karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai basis industri pengolahan yang

mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Pengembangan industri pengolahan singkong misalnya, dapat diarahkan pada produksi tepung tapioka, pakan ternak, maupun produk turunan lainnya yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Demikian pula dengan komoditas kelapa sawit dan karet yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan bahan baku bagi sektor manufaktur maupun industri hilir.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan industri berbasis komoditas lokal memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Industri pengolahan dapat membuka peluang kerja baru baik secara langsung pada kegiatan produksi maupun secara tidak langsung melalui kegiatan distribusi, transportasi, dan perdagangan. Dengan meningkatnya aktivitas industri, diharapkan terjadi peningkatan proporsi tenaga kerja formal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan sektor industri pengolahan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah produk, pengembangan rantai pasok, serta tumbuhnya kegiatan usaha pendukung lainnya. Dengan demikian, penguatan sektor industri pengolahan di Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong pengembangan industri di Kabupaten Lampung Utara, diperlukan strategi pembangunan yang terarah melalui penguatan kawasan industri berbasis komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam struktur ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka merumuskan strategi pengembangan sektor industri, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal daerah melalui pendekatan SWOT.

Tabel 2.100
Analisi SWOT Pengembangan Industri

Kekuatan (Strengths)
Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan yang dapat menjadi bahan baku industri pengolahan. Selain itu, ketersediaan lahan yang relatif luas serta posisi geografis yang strategis menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan industri.
Kelemahan (Weaknesses)
Jumlah industri besar dan menengah yang masih terbatas menunjukkan bahwa sektor industri belum berkembang secara optimal. Keterbatasan infrastruktur pendukung serta belum berkembangnya kawasan industri yang terintegrasi juga menjadi kendala dalam menarik investasi industri.
Peluang (Opportunities)
Meningkatnya permintaan terhadap produk olahan berbasis komoditas pertanian memberikan peluang besar bagi pengembangan industri pengolahan di daerah. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan peningkatan investasi daerah dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan sektor industri di Kabupaten Lampung Utara.
Ancaman (Threats)
Persaingan antar daerah dalam menarik investasi industri menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Selain itu, fluktuasi harga komoditas serta ketergantungan pada pasar bahan baku dapat mempengaruhi keberlanjutan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Singkong merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lampung Utara yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam industri pengolahan. Pengembangan industri berbasis singkong dapat dilihat melalui rantai nilai berikut:

Gambar 2.8
Rantai Nilai Industri Singkong



Sumber : Analisis, 2026

Jika rantai nilai ini berkembang secara lengkap di daerah, maka nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah, sehingga pendapatan petani, tenaga kerja industri, dan pendapatan daerah dapat meningkat.

Tabel 2.101
Tabel Komoditas Unggulan dan Potensi Industri Hilir Lampung Utara

Komoditas Unggulan	Potensi Industri Hilir	Produk yang Dihasilkan
Singkong	Industri tapioka	Tepung tapioka, pati termodifikasi
Singkong	Industri bioenergi	Bioetanol
Singkong	Industri pangan	Kerupuk, mie, snack
Kelapa Sawit	Industri minyak sawit	CPO, minyak goreng
Kelapa Sawit	Industri oleokimia	Sabun, kosmetik, biodiesel
Karet	Industri karet olahan	Crumb rubber
Karet	Industri manufaktur	Ban, sarung tangan
Jagung	Industri pakan ternak	Pakan unggas
Padi	Industri penggilingan padi	Beras kemasan

Sumber : Analisis, 2026

Tabel ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian, sehingga pengembangan industri di Lampung Utara sebaiknya diarahkan pada industri berbasis komoditas lokal. Hasil analisis struktur ekonomi melalui pendekatan Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor basis daerah, sementara sektor industri pengolahan masih berada pada kategori sektor non-basis namun memiliki potensi untuk dikembangkan. Analisis Shift Share juga menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi daerah masih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi pada tingkat provinsi dan belum sepenuhnya didukung oleh keunggulan kompetitif daerah pada sektor industri. Di sisi lain, potensi

pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah sangat terbuka melalui penguatan rantai nilai (value chain) komoditas seperti singkong, kelapa sawit, dan karet. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong diversifikasi struktur ekonomi daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pengembangan sektor industri pengolahan berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, serta penguatan keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri menjadi langkah strategis yang perlu didorong dalam pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Lampung Utara, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah tujuan utama program transmigrasi di Indonesia sejak masa kolonial. Program transmigrasi pertama ke Lampung dimulai pada tahun 1905, ketika pemerintah kolonial Belanda memindahkan 155 penduduk dari Kedu, Jawa Tengah ke wilayah Lampung untuk bekerja di sektor perkebunan. Program tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya pada masa Presiden Soekarno dan semakin berkembang pesat pada masa Orde Baru. Lampung menjadi salah satu daerah yang menerima transmigran dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi komposisi penduduk dan perkembangan wilayah. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah yang berkembang melalui program transmigrasi. Beberapa wilayah permukiman transmigrasi dibangun untuk membuka lahan pertanian dan mempercepat pembangunan wilayah. Contoh data transmigrasi di Lampung Utara dapat dilihat pada program permukiman Prokimal yang dihuni oleh sekitar 1.543 kepala keluarga transmigran pada periode 1971–2009.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk, posisi Lampung dalam program transmigrasi mengalami perubahan.

- Pada masa awal pembangunan, Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi utama.
- Namun sejak tahun 2007, Lampung mulai berperan sebagai daerah pengirim transmigran ke wilayah lain di Indonesia.

Dalam periode 2007–2023, tercatat sekitar 738 kepala keluarga atau 2.901 jiwa warga Lampung mengikuti program transmigrasi ke berbagai provinsi di Indonesia.
Daerah tujuan transmigrasi tersebut antara lain: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Kabupaten Lampung Utara termasuk salah satu daerah yang masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam program transmigrasi tersebut.

Program transmigrasi memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan wilayah Lampung Utara, antara lain:

1. Pembukaan wilayah permukiman baru dan pengembangan desa-desa transmigrasi.
2. Peningkatan produksi pertanian, karena sebagian besar transmigran mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan.
3. Perubahan struktur penduduk, dengan masuknya berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Bali, dan lainnya.
4. Perkembangan ekonomi lokal, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa di kawasan permukiman transmigrasi.

Dengan demikian, program transmigrasi tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemerataan penduduk, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam

pembentukan struktur sosial, ekonomi, dan demografi wilayah di Kabupaten Lampung Utara.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengokoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan serta Bagian Layanan Pengadaan. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Rumah Tangga sertan Bagian Organisasi.

Tabel 2.102
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Hukum				57,88	86,18
				CC (Cukup)	A (Sangat Baik)
Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,37	3,85	4,42	4,22
	B (Baik)	A- (Sangat Baik)	B (Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)
Indeks SPBE	1,86	2,43	2,7	3,12	3,25
	Kurang	Kurang	Baik	Baik	Baik
Indeks Reformasi Birokrasi	41,31	48,86	51,79	61,87	67,02
	C	C	CC	B	B
Indeks Sakip	50,04	52	53,53	60,02	61,26
	CC	CC	CC	B	B

Sumber : Setdakab LU, 2026

Kinerja tata kelola pemerintahan daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator nasional seperti Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perkembangan indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Reformasi Hukum menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025 dengan nilai 86,18 atau predikat A (Sangat Baik), meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang masih berada pada nilai 57,88 dengan predikat CC (Cukup). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pembentukan regulasi daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan reformasi hukum di daerah.

Indeks Pelayanan Publik selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dan stabil. Nilai IPP meningkat dari 3,76 (Baik) pada tahun 2021 menjadi 4,22 (Sangat Baik) pada tahun 2025. Meskipun pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi 3,85, secara umum tren kinerja pelayanan publik menunjukkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, yang ditandai dengan perbaikan standar pelayanan, sarana prasarana pelayanan, serta peningkatan inovasi pelayanan publik. Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga

menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Nilai SPBE meningkat dari 1,86 (Cukup) pada tahun 2021 menjadi 3,25 (Baik) pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan, pengembangan sistem informasi pemerintahan, serta integrasi layanan berbasis elektronik untuk mendukung efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan secara bertahap dari 41,31 (C) pada tahun 2021 menjadi 67,02 (B) pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek penataan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Sementara itu, Indeks SAKIP juga menunjukkan tren peningkatan dari 50,04 (CC) pada tahun 2021 menjadi 61,26 (B) pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan berbagai indeks tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah terus mengalami perbaikan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan implementasi reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung DPRD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis operasional kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan dukungan administrasi persidangan, pengelolaan keuangan dan fasilitas DPRD, serta pelayanan administrasi bagi pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi hubungan kerja DPRD dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.103
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI−P)	5	0	5
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	8	0	8
Partai Demokrat	5	0	5
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	0	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	5	2	7
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	0	0
Partai Berkarya	0	0	0
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	0	0	0
JUMLAH	42	3	45

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara, jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang yang terdiri dari 42 laki-laki dan 3 perempuan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lampung Utara sebesar 6,67 persen dari total anggota. Jika dibandingkan dengan ketentuan afirmasi politik nasional yang mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif, proporsi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lampung Utara masih relatif rendah. Anggota DPRD perempuan berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 orang dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebanyak 2 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih terbatas, sehingga diperlukan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan melalui penguatan kaderisasi partai politik, peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan politik, serta dorongan terhadap keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di daerah.

Komposisi kursi DPRD Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa kekuatan politik di lembaga legislatif tersebar pada beberapa partai politik dengan perolehan kursi yang relatif berimbang. Partai dengan jumlah kursi terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan 8 kursi, diikuti Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan 7 kursi. Sementara itu, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing memperoleh 5 kursi, serta Partai Amanat Nasional memperoleh 5 kursi. Beberapa partai politik lainnya seperti PPP, PERINDO, Berkarya, dan HANURA tidak memperoleh kursi pada periode ini. Struktur komposisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu partai politik yang memiliki dominasi mayoritas di DPRD.

Berdasarkan distribusi kursi partai politik, struktur DPRD Kabupaten Lampung Utara menunjukkan pola kekuatan politik yang relatif plural dan seimbang. Tidak adanya partai yang memiliki mayoritas kursi menyebabkan proses pengambilan keputusan di DPRD cenderung memerlukan koordinasi dan komunikasi antarfraksi. Kondisi ini dapat mendorong terbentuknya mekanisme checks and balances yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di sisi lain, komposisi kursi yang tersebar juga menuntut adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah agar proses perumusan kebijakan daerah dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Secara umum, keseimbangan komposisi politik di DPRD Kabupaten Lampung Utara memberikan peluang bagi terciptanya proses demokrasi yang lebih partisipatif dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.104
Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Tahun 2025

Uraian	Jumlah Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan tahun 2025	10
Jumlah Peraturan Daerah yang target Propemperda 2025	4
Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan yang berasal dari Inisiatif (Prakarsa) DPRD Tahun 2025	2

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun

di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan. lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis. terpadu. transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan. kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya. Perencanaan yang optimal, membutuhkan data yang akurat dan mempertimbangkan evaluasi terhadap hasil perencanaan periode sebelumnya. Ketersediaan data di tingkat Daerah dipenuhi oleh BPS dalam bentuk data makro dan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk data sektoral. Kendala yang dihadapi Daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang akurat adalah ketergantungan terhadap data statistik dan kurang lengkapnya data sektoral sehingga kebijakan perencanaan belum didukung data statistik yang up to date dan data sektoral yang lengkap.

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Perencanaan Daerah

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya RTRW yang ditetapkan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	96,1	77,2	83,89	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	90,75	92,81	72,84	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	47	51	53		

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara, 2026

2.1.3.5.2 Penelitian dan Pengembangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung. Kelitbangan utama menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selain mendorong inovasi, kelitbangan utama juga mendorong kebijakan daerah dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Tahapan kelitbangan utama adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara kelitbangan pendukung lebih kepada urusan internal seperti penguatan ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan turut memberikan andil bagi terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kebijakan daerah yang dihasilkan dari

pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	Persen	38	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Sida	Persen	80	100	100	100	100
4	Persentase dalam kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah penerapan Sida	Persen	75	75	75	75	75

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara, 2026

2.1.3.5.3 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah terus dilakukan melalui penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.5.3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Secara umum, struktur keuangan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi sehingga upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah perlu terus didorong. Di sisi belanja daerah, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja dan penguatan sistem pengendalian internal.

Tabel 2.107
Capaian Kinerja Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-6,72	-12,95	-9,11	-5,03	−12,02
2	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-14,79	-44,93	-29,94	-23,12	−16,03
3	Manajemen Aset	Ya/Tidak	1,00	Ya	4,00	3,00	Ya
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	2,85	2,64	1,56	1,48	2,72

Sumber : BPKAD Lampung Utara, 2026

Berdasarkan indikator pengelolaan keuangan daerah tahun 2021–2025, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada aspek *budget execution*, deviasi realisasi belanja terhadap total belanja APBD masih bernilai negatif selama periode 2021–2025, yang menunjukkan realisasi belanja belum sepenuhnya mencapai anggaran yang ditetapkan. Deviasi membaik dari -12,95 persen pada tahun 2022 menjadi -5,03 persen pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi -12,02 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen perencanaan, serta kemampuan eksekusi anggaran oleh perangkat daerah. Semakin kecil nilai deviasi, semakin tinggi efektivitas pelaksanaan APBD dan semakin besar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pada aspek *revenue mobilization*, deviasi realisasi PAD terhadap target PAD menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan. Deviasi yang mencapai -44,93 persen pada tahun 2022 berhasil ditekan menjadi -16,03 persen pada tahun 2025. Perbaikan ini mencerminkan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Meskipun demikian, realisasi PAD masih berada di bawah target yang ditetapkan sehingga diperlukan penguatan tata kelola pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

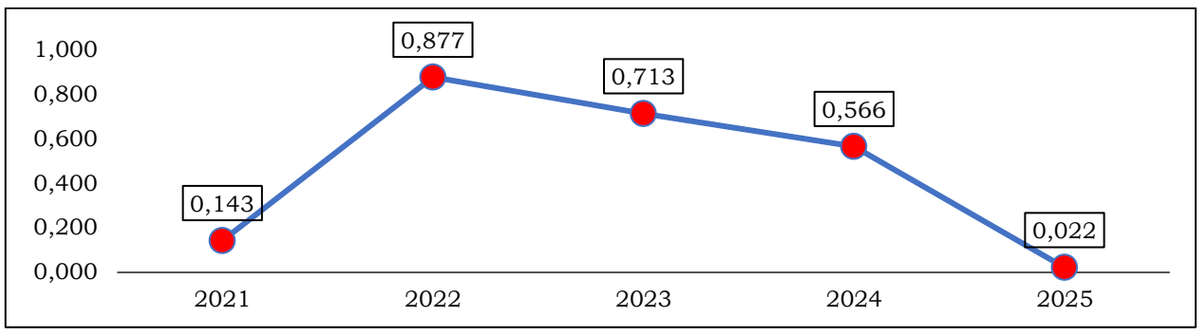
Pada aspek manajemen aset, capaian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan aset daerah, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan aset yang tertib melalui inventarisasi, legalisasi, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan aset akan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan serta membuka peluang optimalisasi pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah.

Sementara itu, pada aspek *cash management*, rasio anggaran sisa terhadap total belanja APBD tahun sebelumnya berada pada kisaran 1,48–2,85 persen. Rasio yang relatif rendah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kas daerah telah berjalan cukup baik karena sisa anggaran yang tidak termanfaatkan dapat dijaga dalam batas yang wajar. Namun demikian, peningkatan rasio menjadi 2,72 persen pada tahun 2025 mengindikasikan masih terdapat ruang untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan penyerapan anggaran agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, indikator pengelolaan keuangan daerah menunjukkan adanya perbaikan pada sisi optimalisasi pendapatan dan pengelolaan kas, namun efektivitas pelaksanaan belanja masih perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penguatan kualitas perencanaan, peningkatan akurasi penganggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, dan berkelanjutan.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah yang disebut Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Grafik 2.50
Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021-2025



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan, 2021-2025

Berdasarkan hasil pengukuran kapasitas fiskal daerah tahun 2021–2025, Kabupaten Lampung Utara secara umum masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemetaan kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah.

Pada tahun 2021, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Utara sebesar 0,143 dengan kategori rendah, yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan masih terbatas dan relatif bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2022, indeks kapasitas fiskal tercatat sebesar 0,877 dan masuk kategori sangat rendah, yang mengindikasikan ruang fiskal daerah masih belum memadai untuk mendanai kebutuhan pembangunan secara optimal. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, kapasitas fiskal masing-masing sebesar 0,713 dan 0,566, yang tetap berada pada kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika penerimaan dan belanja daerah, kemampuan fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara mandiri.

Pada tahun 2025, indeks kapasitas fiskal sebesar 0,022 dengan kategori rendah. Meskipun kategori meningkat dari sangat rendah menjadi rendah, nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah, penguatan investasi daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Secara keseluruhan, kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah masih belum kuat untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan fiskal yang berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.5.3.1.1 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan realisasi APBD Tahun 2021–2025, kondisi keuangan daerah Kabupaten Lampung Utara menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap pendapatan transfer, sementara kapasitas fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan karakteristik fiskal daerah yang tercermin dari rendahnya kapasitas fiskal daerah selama periode yang sama.

1. Analisis Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp1,60 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,68 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 5,13 persen selama periode tersebut. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer yang kontribusinya mencapai lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya. PAD menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, dari Rp104,33 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp162,28 miliar pada tahun 2025 atau meningkat sekitar 55,55 persen. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2025 baru mencapai 9,64%. Kontribusi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dan belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Analisis Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah berfluktuasi selama periode 2021–2025. Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp1,74 triliun, sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,63 triliun. Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi. Pada tahun 2025 komposisinya untuk belanja operasi sebesar 75,25%, belanja modal sebesar 5,37%, belanja tak terduga sebesar 0,17%, belanja transfer sebesar 19,21%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, sedangkan ruang fiskal untuk investasi pembangunan melalui belanja modal relatif terbatas.

Belanja modal mengalami penurunan signifikan dari Rp281,62 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp87,66 miliar pada tahun 2025 atau turun sekitar 68,87 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena belanja modal merupakan instrumen utama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

3. Analisis Surplus/Defisit APBD

Kondisi APBD menunjukkan perbaikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022 APBD mengalami defisit masing-masing sebesar Rp21,25 miliar dan Rp135,08 miliar. Namun sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 APBD mengalami surplus berturut-turut sebesar Rp35,09 miliar, Rp31,36 miliar, dan Rp50,18 miliar. Surplus tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan fiskal daerah, meskipun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja agar tidak hanya menghasilkan surplus administratif tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Analisis Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah cenderung menurun dari Rp72,09 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp25,50 miliar pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya sumber pembiayaan yang berasal dari pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya. Pembiayaan netto mengalami perubahan dari positif pada tahun 2021–

2022 menjadi negatif pada tahun 2023–2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembiayaan lebih besar dibandingkan penerimaan pembiayaan sehingga pemerintah daerah mulai mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan non-pendapatan.

5. Analisis SILPA

SILPA berfluktuasi selama periode 2021–2025. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp47,11 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp42,28 miliar. Rasio SILPA terhadap total belanja tahun 2025 adalah 2,59% dengan nilai silpa sebesar 42.281.460.443. Rasio tersebut masih berada pada tingkat yang relatif rendah sehingga menunjukkan pengelolaan kas daerah cukup efektif. Namun demikian, keberadaan SILPA tetap perlu dievaluasi untuk memastikan tidak terdapat program prioritas yang tertunda atau gagal dilaksanakan.

Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah dikenal *Mandatory Spending* (belanja wajib) adalah pengeluaran anggaran yang harus dialokasikan secara hukum atau regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib menyediakan anggaran dalam jumlah minimal tertentu untuk bidang-bidang yang ditetapkan, sehingga sifatnya tidak fleksibel dan tidak bisa dikurangi. Mandatory spending tersebut yaitu :

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat UU 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 49 ayat (1);
b. Dana transfer umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitasi pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU No, 6 tahun 2014 tentang desa).

Berikut adalah rekapitulasi pengeluaran wajib (*mandatory spending*) Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2025 dan sudah sesuai dengan ketentuan untuk besar alokasinya :

1. Fungsi Pendidikan
   Anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp. 620.274.318.379 dan total belanja daerah sebesar Rp. 1.808.495.989.709 atau sebesar 34,30%.
2. Fungsi Kesehatan
   Anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp. 259.482.099.023 dan belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp. 1.371.699.034.709 atau sebesar 18,92%.
3. Infrastruktur Pelayanan Publik
   Anggaran belanja infrastruktur publik sebesar Rp. 581.640.445.048 dari total belanja daerah atau sebesar 30,56%.
4. Anggaran Pengawasan sebesar Rp. 18.510.458.859 dan telah sesuai dengan kriteria.
5. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.802.472.082.
6. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.091.980.892.
7. Alokasi Dana Desa kepada Pemerinta Desa sebesar Rp. 98.279.484.499.
8. Pendanaan Iuran JKN sebesar Rp. 26.069.631.252.

Belanja Negara tahun 2025-2029 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan fokus kebijakan yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Ketahanan pangan diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.

2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan lifting migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi.
3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan.
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dalam rangka peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah.
5. Penguatan sektor kesehatan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaaan Kesehatan Gratis.
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini utamanya untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan dan ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan.
7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alutsista dan pertahanan siber.
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan total belanja daerah yang cukup konsisten. Total belanja daerah tercatat sebesar Rp. 1,73 triliun pada tahun 2022, turun menjadi Rp. 1,54 triliun pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp. 1,65 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperluas cakupan layanan publik dan memperkuat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, struktur belanja daerah Kabupaten Lampung Utara dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan pada belanja yang bersifat operasional dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan belanja ke depan perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, guna memastikan efektivitas APBD dalam mendorong pencapaian visi pembangunan daerah yaitu "Bersama Menuju Lampung Utara Bermartabat (Maju, Aman, Sejahtera)", serta mendukung prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi belanja daerah dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

1. Proyeksi belanja daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai; belanja bunga diproyeksi berdasarakan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Kabupaten Lampung Utara; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

3. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan.
4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran, juga alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Perangkat Daerah, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
7. Pada belanja pegawai, di tahun 2025, realisasi belanja pegawai di Kabupaten Lampung Utara sebesar 47,31% (Rp. 844.260.708.051) dari total APBD Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 (Rp. 1.784.500.664.021) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Gaji DPRD Rp. 24.264.829.262
   b. Gaji KDH/WKDH Rp. 1.041.507.004
   c. Gaji ASN Rp. 601.865.803.766
   d. Insentif dan TPP sebesar Rp. 217.088.568.019.

   Dengan nilai sebesar Rp. 535.350.199.206 (30%) apabila akan menyesuaikan dengan ketentuan porsi belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD Kabupaten.

Dalam rangka menyesuaikan porsi belanja pegawai yang melebihi batas 30% dari total belanja APBD, berikut langkah-langkah strategis dan teknis yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara:

a. Evaluasi Struktur Belanja Pegawai
   - Melakukan telusur komponen belanja pegawai: gaji pokok, tunjangan, tambahan penghasilan (TPP), honorarium, lembur.
   - Melakukan identifikasi unit kerja yang belanja pegawainya paling besar.
b. Pengendalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
   - Revisi kebijakan pemberian TPP agar lebih berbasis kinerja dan disiplin anggaran.
   - Batasi kenaikan TPP yang tidak sebanding dengan kinerja atau beban kerja.
   - Gunakan hasil evaluasi capaian kinerja OPD sebagai dasar pemberian TPP secara proporsional.
c. Optimalisasi Struktur Organisasi
   - Melakukan evaluasi kelembagaan dan kebutuhan formasi untuk menghindari kelebihan pegawai di bidang tertentu.
   - Moratorium atau pembatasan rekrutmen pegawai baru (kecuali tenaga pendidikan dan kesehatan).
   - Melakukan rasionalisasi jabatan yang bersifat administratif (selaras dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi).
d. Peningkatan Belanja Produktif
   - Mendorong peningkatan belanja modal dan belanja barang/jasa yang mendukung layanan publik dan pembangunan ekonomi.
   - Memastikan belanja non-pegawai naik secara proporsional agar porsi belanja pegawai terhadap total belanja menurun.

Upaya-upaya yang akan dilakukan tersebut, tentunya tidak akan berdampak optimal apabila tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dikarenakan untuk diketahui bahwa Lampung Utara pada tahun 2024 memiliki kapasitas fiskal sangat rendah.

Tabel 2.108
Realisasi APBD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	104.328.396.790	67.759.042.941	100.321.508.061	119.317.446.395	162.281.949.596
	B. Pendapatan Transfer	1.421.645.267.970	1.527.463.468.663	1.520.376.632.898	1.570.207.234.421	1.521.683.637.406
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	75.848.018.000	7.029.918.512	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.601.821.682.760	1.602.252.430.116	1.620.698.140.959	1.689.524.680.816	1.683.965.587.002
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	1.158.089.914.005	1.137.643.449.041	1.136.195.211.689	1.210.568.966.399	1.229.504.037.117
	B. Belanja Modal	116.686.232.476	281.624.827.416	156.611.275.049	131.999.981.511	87.662.518.427
	C. Belanja Tak Terduga	7.469.956.812	6.867.505.000	769.000.000	1.507.500.000	2.796.392.700
	D. Belanja Transfer	340.829.958.616	311.195.767.531	292.036.717.240	314.083.858.922	313.818.688.391
	JUMLAH BELANJA	1.623.076.061.909	1.737.331.548.988	1.585.612.203.978	1.658.160.306.832	1.633.781.636.635
	SURPLUS/DEFISIT	-21.254.379.149	-135.079.118.872	35.085.936.981	31.364.373.984	50.183.950.367
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	72.086.647.483	168.224.160.031	21.554.484.596	27.944.254.240	25.502.827.212
	B. Pengeluaran Pembiayaan	3.726.384.319	11.231.294.046	28.381.540.708	33.405.317.136	33.405.317.136
	PEMBIAYAAN NETTO	68.360.263.164	156.992.865.985	-6.827.056.112	-5.461.062.896	-7.902.489.924
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	47.105.884.015	21.913.747.113	28.258.880.869	25.903.311.088	42.281.460.443

Sumber : BPKAD LU, 2026

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; penerimaan pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah. Komponen pengeluaran pembiayan daerah meliputi: penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2020-2024, terjadi surplus pada tahun 2020, 2023 dan 2024, sementara pada tahun 2021 dan 2022 terjadi defisit hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi secara global sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun secara

drastis hampir di seluruh wilayah Indonesia maupun Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Lampung Utara.

Secara agregat, total aset Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp. 2,5 triliun meningkat dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2020–2023, total aset mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,38% per tahun. Komponen aset baik berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya mengalami pertumbuhan positif yaitu dengan nilai rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 4,41%, 13,60%, 1,03%, dan 3,64% per tahun. Komponen kewajiban mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 48,43% per tahun, seluruh kewajiban yang dimiliki Kabupaten Lampumg Utara merupakan kewajiban yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

A. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran (SILPA) sebesar Rp. 27.944.254.240,57.
B. Pengeluaran pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah padal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 31.405.317.136,00 masing-masing terealisasi 100%.
C. Pengeluaran pembiayaan akun penyertaan modal daerah pada BUMD adalah penyertaan modal pada Bank Lampung Cabang Kotabumi sebesar Rp. 1,000.000.000,00 dan Bank Syariah Kotabumi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran kewajiban jatuh tempo sebesar Rp. 31.405.317.136,00 terdiri dari pembayaran cicilan pembayaran kewajiban jatuh tempo untuk kewajiban Pemerintah Daerah (atas hutang PDAM Way Bumi) sebesar Rp1.120.000.000,00, pembayaran kewajiban pokok utang dari Pererintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PEN sebesar Rp. 30.285.317.136,00.

2.1.3.5.3.2 Kinerja Keuangan Desa

Kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa bersumber dari berbagai pendapatan, antara lain dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan pemerintah daerah, serta sumber pendapatan desa lainnya yang sah.

Secara umum, pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan di tingkat desa. Penggunaan anggaran desa diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Selain itu, penerapan sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi juga telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib dan akuntabel, diharapkan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan

memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 2.109
Realisasi dan Alokasi Pendapatan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Utara Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rp) Tahun 2024 dan 2025

Jenis Pendapatan	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025
1. PENDAPATAN DESA	315.405.742.929	346.982.874.038	313.094.385.178
1.1. Pendapatan Asli Desa	144.529.685	153.927.506	219.000.071
1.2. Transfer	314.971.761.380	346.432.754.499	311.814.830.711
Dana Desa	212.459.336.724	203.009.195.999	200.913.635.220
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	4.237.137.289	18.211.507.104	5.447.026.510
Alokasi Dana Desa	97.824.196.787	125.212.051.396	105.454.168.981
Bantuan Keuangan Provinsi	451090580	0	0
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	0	0	
1.3. Pendapatan Lain–lain	289.451.864	396.192.033	1.060.554.396

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Realisasi Pendapatan Desa Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2025 mencapai Rp313,09 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp315,41 miliar, atau mengalami penurunan sekitar Rp2,31 miliar (0,73 persen). Dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp346,98 miliar, tingkat realisasi pendapatan desa mencapai sekitar 90,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan desa dapat direalisasikan dengan baik, meskipun belum seluruh target pendapatan dapat dicapai. Struktur pendapatan desa masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang pada Tahun 2025 mencapai Rp311,81 miliar atau sekitar 99,59 persen dari total pendapatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal desa masih relatif rendah, karena kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp219 juta, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp144,53 juta, atau tumbuh sekitar 51,53 persen. Meskipun pertumbuhannya cukup tinggi, kontribusi PADesa terhadap total pendapatan desa masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,07 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pada komponen transfer, Dana Desa masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan realisasi Rp200,91 miliar, meskipun mengalami penurunan sekitar 0,76 persen dibandingkan Tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai penyesuaian formula dan alokasi Dana Desa. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) meningkat menjadi Rp105,45 miliar dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp97,82 miliar, atau tumbuh sekitar 7,80 persen, yang menunjukkan meningkatnya dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Realisasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai Rp5,45 miliar, meningkat sekitar 28,56 persen dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, realisasi tersebut masih jauh di bawah alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp18,21 miliar, sehingga tingkat penyerapannya hanya sekitar 29,91 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan daerah yang menjadi dasar

pengalokasian bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pendapatan Lain-lain Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp289,45 juta pada Tahun 2024 menjadi Rp1,06 miliar pada Tahun 2025, atau meningkat sekitar 266,41 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya optimalisasi sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, struktur pendapatan desa di Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2025 masih sangat bergantung pada dana transfer, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal desa belum sepenuhnya mandiri sehingga keberlanjutan pembangunan desa masih dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan perkembangan pendapatan desa tersebut, beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian adalah:

- Kemandirian fiskal desa masih rendah, tercermin dari dominasi pendapatan transfer yang mencapai hampir seluruh total pendapatan desa.
- Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) masih sangat kecil sehingga potensi ekonomi lokal, aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan desa.
- Realisasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih jauh di bawah alokasi anggaran, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target penerimaan daerah dengan realisasi pendapatan yang dapat dibagihasilkan kepada desa.
- Masih terdapat ketergantungan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah akan berpengaruh terhadap kapasitas pembiayaan pembangunan desa.
- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa yang sah masih perlu diperkuat melalui pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan aset desa secara produktif, serta penguatan tata kelola BUMDes agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Tabel 2.110

Realisasi dan Alokasi Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Utara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) Tahun 2024 dan 2025

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran 2025
2. BELANJA	312.582.009.325	300.029.330.514	271.028.664.574
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	135.496.004.232	170.239.004.795	143.663.252.868
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	123.402.879.680	82.680.375.713	87.472.100.959
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22.695.017.077	25.124.574.170	19.610.185.537
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.563.537.569	3.599.427.547	3.020.670910
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	25.424.570.767	18.385.948.289	17.262.454.300

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Realisasi Belanja Desa Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2025 mencapai Rp271,03 miliar, menurun sebesar Rp41,55 miliar atau 13,29 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp312,58 miliar. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp300,03 miliar, tingkat realisasi belanja mencapai sekitar 90,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan APBDes telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat anggaran yang belum terealisasi hingga akhir tahun. Berdasarkan struktur belanja, Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp143,66 miliar atau sekitar 53,01 persen dari total belanja desa. Dibandingkan Tahun 2024, belanja pada bidang ini meningkat sebesar 6,03 persen, mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk operasional pemerintahan, penghasilan tetap aparatur desa, serta pelayanan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terealisasi sebesar Rp87,47 miliar atau sekitar 32,27 persen dari total belanja desa. Meskipun realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran bidang tersebut (sekitar 105,80 persen), jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 29,12 persen. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya kapasitas pembiayaan pembangunan fisik maupun nonfisik di desa, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan penggunaan Dana Desa, penyesuaian prioritas pembangunan nasional, maupun efisiensi belanja. Realisasi Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp19,61 miliar mengalami penurunan sekitar 13,59 persen dibandingkan Tahun 2024. Demikian pula Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menurun cukup signifikan dari Rp5,56 miliar menjadi Rp3,02 miliar, atau turun sekitar 45,70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta penguatan kelembagaan masyarakat masih relatif terbatas dibandingkan belanja operasional pemerintahan.

Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa, realisasi belanja Tahun 2025 mencapai Rp17,26 miliar, menurun sekitar 32,10 persen dibandingkan Tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk keadaan darurat relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan penggunaan Dana Desa setelah berakhirnya beberapa program penanganan kondisi khusus yang menjadi prioritas nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, struktur belanja desa masih didominasi oleh Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang secara kumulatif mencapai sekitar 85 persen dari total belanja desa. Komposisi ini pada dasarnya telah sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa dan APBDes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menekankan penggunaan anggaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja desa Tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik, namun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur belanja masih didominasi oleh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan alokasi untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan keseimbangan belanja agar APBDes semakin berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perkembangan belanja desa tersebut, beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian antara lain:

- Proporsi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa masih cukup besar, sehingga ruang fiskal untuk belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

- Belanja pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan, sehingga upaya penguatan ekonomi desa, pengembangan UMKM, BUMDes, dan peningkatan kapasitas masyarakat belum optimal.
- Belanja pembangunan desa menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang berpotensi memengaruhi percepatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa.
- Masih terdapat anggaran yang belum terealisasi pada beberapa bidang belanja, sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian APBDes agar efektivitas penyerapan anggaran semakin baik.
- Ke depan, komposisi belanja desa perlu semakin diarahkan pada belanja yang produktif dan berkualitas, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penguatan ketahanan pangan, pengembangan potensi ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kemandirian desa melalui pemanfaatan Dana Desa yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2.1.3.5.4 Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penting yang menyangkut internal pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan. Capaian dari indikator urusan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.111
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Angka	29	33	33	33	33
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Angka	3,356	3,442	3,442	3,442	3,442
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Angka	4,068	4,943	4,943	4277	4.388
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		73,12	73,12	73,12	76,62
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		13,72	13,72	13,72	18,56
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio		54,04	54,04	54,04	54,8
7	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah	Angka		297	297	297	297
8	Jumlah pemangku jabatan pengawas (Eselon IV)	Angka		683	683	683	653

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		55 (sangat rendah)	55 (sangat rendah)	55 (sangat rendah)	65,87
10	Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	Indeks		0,8	0,8	0,8	-
11	Indeks Merit	Indeks		0,53 (kurang)	0,53 (kurang)	0,53 (kurang)	-

Sumber : BKPSDM Kab. Lampung Utara, 2026

Kondisi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dari komposisi jabatan struktural, jabatan administrasi, jabatan fungsional, serta indikator profesionalitas dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Dari sisi struktur jabatan, jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi pemerintah daerah menunjukkan peningkatan dari 29 jabatan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 33 jabatan pada tahun 2022 dan 2023, serta meningkat menjadi 39 jabatan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, jumlah jabatan administrasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.828 jabatan, kemudian menurun menjadi 3.356 jabatan pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 3.442 jabatan pada tahun 2022 dan 2023, serta mengalami penyesuaian menjadi 212 jabatan pada tahun 2024 seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan sebagian jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menunjukkan dinamika dari 4.447 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 4.068 orang pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 4.943 orang pada tahun 2022 dan 2023, dan menjadi 4.277 orang pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya penguatan jabatan fungsional dalam mendukung transformasi birokrasi menuju organisasi yang lebih profesional dan berbasis keahlian. Dilihat dari komposisi kompetensi ASN, rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah terhadap pegawai berpendidikan dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 73,12 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Sementara itu, rasio pegawai fungsional tercatat sebesar 13,72 persen, serta rasio jabatan fungsional yang telah bersertifikat kompetensi sebesar 54,04 persen, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi aparatur masih perlu terus didorong.

Dalam aspek tata kelola manajemen ASN, Indeks Profesionalitas ASN masih berada pada nilai 55 dengan kategori sangat rendah pada periode 2022–2024. Selain itu, Indeks Merit juga tercatat sebesar 0,53 dengan kategori kurang, serta persentase penataan ASN sesuai dengan kompetensi sebesar 0,8. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN di Kabupaten Lampung Utara masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penempatan pegawai berbasis kompetensi, pengembangan kapasitas aparatur, serta peningkatan profesionalitas ASN. Secara umum, kondisi ASN di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya upaya penyesuaian struktur organisasi dan penguatan jabatan fungsional sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. Namun demikian, peningkatan kualitas manajemen ASN, penguatan sistem merit, serta peningkatan profesionalitas aparatur masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan profesional.

2.1.3.5.5 Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah. Harapannya semakin banyak pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, semakin baik pula kualitas SDM sehingga dapat berpengaruh pada kinerja.

Tabel 2.112
Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata rata Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	16,5	6,4	22,6	20,0	16
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara Formal	Persen	1,88	1,35	0,58	0,58	0,78
3	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	6,88	6,4	8,17	21,05	17,96

Sumber : BKPSDM Kab. Lampung Utara, 2026

Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi masih rendah, demikian pula dengan persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan upaya strategi pengembangan kompetensi yang diawali dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis jabatan, pemetaan kompetensi untuk seluruh ASN, membuat analisis kesenjangan kompetensi, dan melaksanakan pengembangan kompetensi dari hasil analisis tersebut.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.1.3.6.1 Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam memberikan pembinaan dan konsultasi kepada perangkat daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik penyimpangan, sehingga mendukung peningkatan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase tindak lanjut Temuan	Persen	89	79,74	84,45	86,22	100
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	-	-	0,01	0,15	0,09
3	Jumlah Temuan BPK	Angka	46	15	36	49	138
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	2,751 (Level 2)

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Predikat	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	3,00 (Level 3)

Sumber : Inspektorat Kab. Lampung Utara, 2025

Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pembinaan terhadap perangkat daerah guna memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator kinerja pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, yang menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Pada periode 2020–2024, persentase tindak lanjut temuan menunjukkan fluktuasi, yaitu 96,1 persen pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 89 persen pada tahun 2021 dan 79,74 persen pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 84,45 persen pada tahun 2023 dan 86,22 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengalami dinamika, yaitu sebanyak 45 temuan pada tahun 2020, meningkat menjadi 46 temuan pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 15 temuan pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 36 temuan pada tahun 2023 serta 49 temuan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan yang perlu terus diperbaiki. Dalam hal penguatan sistem pengendalian internal, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan peningkatan dari Level 2 pada tahun 2021–2023 menjadi Level 3 pada tahun 2024. Demikian pula dengan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meningkat dari Level 2 menjadi Level 3 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah.

Selain itu, indikator persentase pelanggaran pegawai masih berada pada tingkat yang relatif rendah, yaitu 0,01 persen pada tahun 2023 dan 0,15 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran disiplin aparatur masih dapat dikendalikan. Jika dibandingkan dengan target nasional yang mendorong pemerintah daerah untuk mencapai minimal Level 3 SPIP dan Level 3 APIP, maka posisi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 telah memenuhi standar minimum tersebut. Namun demikian, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efektif, peningkatan kapasitas pengawasan internal masih perlu terus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kompetensi auditor internal, serta optimalisasi fungsi pengawasan dalam mendukung perbaikan kinerja perangkat daerah. Secara umum, kinerja pengawasan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, khususnya dalam peningkatan kapasitas pengawasan internal dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Namun demikian, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta percepatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan masih perlu terus menjadi perhatian guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

2.1.3.7.1 Kecamatan

Kecamatan merupakan unsur kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kecamatan memiliki peran strategis sebagai

perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah serta sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsinya, kecamatan berperan dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kelurahan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Selain itu, kecamatan juga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai program pembangunan daerah agar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah. Melalui peran tersebut, kecamatan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tingkat wilayah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67,8	49,93	73,64
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	83	55,26	66,58
Nilai kepuasan layanan kecamatan	85	56,89	66,93
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	61,70	61,70
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100	87,80	87,80
Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100	57,96	57,96
RATA-RATA	89,3	61,59	69,10

Sumber : 23 Kecamatan, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kecamatan mencapai 69,10 persen, dengan rata-rata realisasi sebesar 61,59 dari rata-rata target 89,30. Berdasarkan kategori evaluasi kinerja, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan kecamatan belum optimal, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci, indikator dengan capaian tertinggi adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Desa, dengan realisasi 87,80 persen dari target 100 persen atau tingkat capaian 87,80 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan relatif baik, meskipun masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Indikator Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memperoleh capaian 73,64 persen, dengan realisasi 49,93 dari target 67,80. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja, pengukuran kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat kecamatan masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya mencapai 66,58 persen, sedangkan Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan mencapai 66,93 persen. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ruang

perbaikan dalam kualitas pelayanan administrasi, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun indikator dengan capaian terendah adalah Persentase Tingkat Partisipasi Forkopimcam dalam Deteksi Dini dan Penanganan Konflik di Kecamatan, yaitu sebesar 57,96 persen, diikuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti sebesar 61,70 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat masih perlu diperkuat agar mampu merespons berbagai potensi gangguan secara lebih cepat dan terintegrasi. Secara keseluruhan, hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan desa, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kinerja penyelenggaraan urusan kecamatan pada Tahun 2025 masih berada pada tingkat cukup, dengan rata-rata capaian 69,10 persen. Sebagian besar indikator belum mencapai target yang ditetapkan, terutama pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi Forkopimcam, dan penanganan ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyelenggaraan fungsi kecamatan sebagai koordinator pemerintahan di wilayah. Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut, beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi adalah:

- Akuntabilitas kinerja kecamatan masih belum optimal sehingga penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target program perlu diperkuat.
- Kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat belum memenuhi target, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan, inovasi pelayanan, dan kapasitas aparatur kecamatan.
- Koordinasi Forkopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik masih belum berjalan secara optimal sehingga efektivitas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan.
- Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum mencapai target, yang mengindikasikan perlunya penguatan sinergi antara kecamatan, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat.
- Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap desa masih perlu ditingkatkan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tepat waktu dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.8.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta politik dalam negeri di daerah. Peran Kesbangpol sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kesbangpol menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan ketahanan nasional di daerah, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai

politik, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, Kesbangpol juga berperan dalam memantau dinamika sosial politik di masyarakat guna menjaga kondusivitas daerah. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Badan Kesbangpol diharapkan mampu mendukung terciptanya kehidupan politik yang demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif sebagai landasan bagi keberhasilan pembangunan daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemampuan daya beli penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup. Indikator ini menunjukkan rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mencerminkan dinamika kondisi ekonomi masyarakat. Peningkatan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga umumnya menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, sementara penurunan dapat mengindikasikan adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran konsumsi juga dapat menggambarkan perubahan struktur konsumsi masyarakat, di mana semakin meningkatnya porsi pengeluaran nonmakanan biasanya menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.115
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Lampung Utara)	827.499,11	858.543,76	956.338,00	966.828,00	1.047.227,00
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Lampung)	1.030.578,58	1.074.987,43	1.203.017,00	1.201.473,00	1.239.613,00

Sumber : BPS Lampung, 2026

Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp827.499,11, kemudian meningkat menjadi Rp858.543,76 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp956.338,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai tersebut mencapai Rp966.828,00, dan meningkat menjadi Rp1.047.227,00 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Lampung, tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1.239.613,00, sedangkan di Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp1.047.227,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Utara masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Tabel 2.116
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Tahun 2024-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Lampung Utara					

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Makanan	56,85	58,02	55,12	58,69	56,94
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Bukan Makanan	43,15	41,98	44,88	41,31	43,06
Provinsi Lampung					
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Makanan	52,39	53,55	52,19	54,68	53,54
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Bukan Makanan	47,61	46,45	47,81	45,32	46,46

Sumber : BPS Lampung, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan di Kabupaten Lampung Utara masih mendominasi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2021, proporsi pengeluaran untuk makanan tercatat sebesar 56,85 persen, kemudian meningkat menjadi 58,02 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 proporsinya menurun menjadi 55,12 persen, namun kembali meningkat menjadi 58,69 persen pada tahun 2024, dan berada pada 56,94 persen pada tahun 2025. Sementara itu, pengeluaran untuk bukan makanan berada pada kisaran 41,31 persen hingga 44,88 persen selama periode yang sama. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, proporsi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lampung Utara cenderung lebih tinggi. Di tingkat provinsi, persentase pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran 52,19 persen hingga 54,68 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan berkisar antara 45,32 persen hingga 47,81 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur konsumsi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara masih lebih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan makanan dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung, sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan yang relatif masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap lapangan kerja perlu terus didorong agar struktur pengeluaran masyarakat semakin bergeser ke arah pengeluaran bukan makanan yang umumnya berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan lainnya.

mplikasi kebijakan yang perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2027 antara lain adalah peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi nonprimer, seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Penguatan sektor ini penting untuk memperluas kesempatan kerja serta mendorong diversifikasi ekonomi daerah sehingga ketergantungan terhadap sektor primer dapat berkurang.

Prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing

daerah dalam jangka panjang. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama infrastruktur jalan, pasar, sarana distribusi hasil pertanian, serta akses terhadap layanan ekonomi digital. Infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.1.4.2.1.1 Kondisi Jalan

Rincian panjang jalan di Kabupaten Lampung Utara menurut kewenangannya adalah jalan nasional sepanjang 90 km sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, jalan provinsi sepanjang 156 km sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK/2023, dan jalan kabupaten sepanjang 1.025,27 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor B/486/06-LU/HK/2023 dengan jumlah ruas sebanyak 215 ruas.

Tabel 2.117
Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021-2025 (Km)

No	Status Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nasional (Km)	177	130	90	90	90
2	Provinsi (Km)	154	154	156	156	156
3	Kabupaten (Km)	2.475	2.143	2.143	1.025	1.025

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Panjang jalan berdasarkan status kewenangan menunjukkan dinamika pada periode 2021–2025. Jalan nasional tercatat sepanjang177 km pada tahun 2021, menjadi 130 km pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 90 km pada periode 2023–2025. Penurunan ini dikarenakan adanya penyesuaian klasifikasi atau perubahan kewenangan penanganan ruas jalan sesuai dengan kebijakan penetapan status jalan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, panjang jalan provinsi relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dari 154 km (2021–2022) menjadi 156 km sejak 2023 hingga 2025. Hal ini karena adanya penambahan atau penegasan status ruas tertentu menjadi kewenangan provinsi. Adapun panjang jalan kabupaten mengalami perubahan signifikan, dari 2.143 km pada periode 2022–2023 menjadi 1.025 km pada 2024–2025. Penurunan ini sangat besar dan disebabkan oleh reklasifikasi status jalan (alih kewenangan ke nasional atau provinsi) atau pembaruan data hasil verifikasi jaringan jalan. Secara teknokratik, perubahan struktur kewenangan jalan berdampak langsung terhadap tanggung jawab pembiayaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan penegasan kembali basis data panjang jalan sesuai status kewenangan terbaru, agar perencanaan program pembangunan dan alokasi anggaran infrastruktur lebih akurat, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Tabel 2.118
Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025 (Km)

No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Baik	234,10	262,14	405,94	235,52	185,40
2	Sedang	1.210,30	734,62	543,89	309,33	293,12
3	Rusak	458,70	451,76	302,97	139,96	146,18
4	Rusak Berat	571,60	694,62	890,34	340,46	400,57

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026 (diolah)

Perkembangan kondisi jalan kabupaten selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, komposisi jalan didominasi oleh kondisi sedang (1.210,30 km), disusul rusak berat (571,60 km) dan rusak (458,70 km),

sementara jalan dalam kondisi baik tercatat 234,10 km. Pada tahun 2022–2023 terjadi peningkatan signifikan jalan kondisi baik, mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 405,94 km. Pada saat yang sama, panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat menunjukkan tren fluktuatif, dengan rusak berat meningkat hingga 890,34 km pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan metode penilaian kondisi jalan atau pembaruan data inventarisasi. Memasuki tahun 2024–2025, terlihat penurunan cukup besar pada seluruh kategori panjang jalan, yang selaras dengan penurunan total panjang jalan kabupaten akibat reklasifikasi status kewenangan. Pada 2025, panjang jalan kondisi baik tercatat 185,40 km, kondisi sedang 293,12 km, rusak 146,18 km, dan rusak berat 400,57 km. Secara proporsional pada tahun 2025, jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat masih mendominasi dibandingkan kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan infrastruktur jalan daerah terletak pada peningkatan kualitas dan rehabilitasi jaringan jalan eksisting, bukan semata pada pembangunan ruas baru. Dalam konteks perencanaan dalam RKPD, data kondisi jalan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan struktur jalan. Pendekatan berbasis preservasi perlu diperkuat guna mencegah peningkatan ruas jalan ke kategori rusak berat yang membutuhkan biaya penanganan lebih tinggi, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.2.1.2 Ketersediaan Daya Listrik

Secara keseluruhan, struktur konsumsi listrik di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa sektor rumah tangga masih menjadi pengguna listrik dominan, sementara sektor industri dan bisnis memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keandalan jaringan listrik menjadi hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan energi bagi masyarakat.

Tabel 2.119
Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023- 2025

Sumber Penerangan Utama	2023	2024	2025
Listrik PLN	99,26	99,83	100
Listrik Non PLN	0,74	0	0
Bukan Pengguna Listrik	0	0,17	0

Sumber : BPS Lampung Utara, 2026

Berdasarkan data tahun 2023–2025, akses masyarakat terhadap sumber penerangan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kondisi yang sangat baik dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber penerangan utama tercatat sebesar 99,26 persen, kemudian meningkat menjadi 99,83 persen pada tahun 2024, dan mencapai 100 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di wilayah tersebut telah memperoleh akses terhadap layanan listrik dari PLN.

Sementara itu, penggunaan sumber penerangan dari listrik non-PLN mengalami penurunan dari 0,74 persen pada tahun 2023 menjadi 0 persen pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penggunaan sumber listrik masyarakat menuju layanan listrik yang lebih formal dan stabil melalui jaringan PLN. Adapun rumah tangga yang belum menggunakan listrik tercatat sebesar 0 persen pada tahun 2023, sempat meningkat menjadi 0,17 persen pada tahun 2024, namun kembali menjadi 0 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perluasan akses listrik dan pemerataan layanan energi di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa akses listrik di

Kabupaten Lampung Utara telah mencapai tingkat universal. Ketersediaan listrik yang merata diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi rumah tangga, serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam upaya menciptakan rasa aman di Kabupaten Lampung Utara Pemerintah Kabupaten selalu berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resort Lampung Utara, Kodim 0412 Lampung Utara, Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri, yaitu dengan bersinergi dan memfasilitasi dalam rangka penegakan hukum wilayah Lampung Utara.

Tabel 2.120
Jumlah Kejahatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			1.127	1.400	1.600
2	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk			12,3	15	17
3	Persentase Penyelesaian Kejahatan			11,4	50,9	56,6

*) Data 2025 belum rilis
Sumber : BPS Lampung, 2025

Perkembangan indikator kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 1.127 kasus, meningkat menjadi 1.400 kasus pada 2023, dan kembali naik menjadi 1.600 kasus pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya dinamika gangguan kamtibmas, meskipun juga dapat dipengaruhi oleh membaiknya sistem pelaporan dan akses masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus, risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk turut mengalami kenaikan, dari 12,3 (2022) menjadi 15 (2023) dan 17 (2024). Tren ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap tindak kriminal relatif meningkat dan memerlukan penguatan strategi pencegahan. Namun demikian, terdapat perkembangan positif pada aspek persentase penyelesaian kejahatan, yang meningkat signifikan dari 11,4% pada 2022 menjadi 50,9% pada 2023 dan 56,6% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja penegakan hukum dan efektivitas proses penyidikan dalam menyelesaikan perkara.

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Stabilitas sosial dan ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif kondusif. Data mencatat jumlah aksi demonstrasi atau unjuk rasa berkisar antara 1 hingga 2 kejadian per tahun, dan seluruhnya berhasil difasilitasi serta dikendalikan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial yang meluas. Selain itu, tidak tercatat adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat, yang menunjukkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, desa, dan kabupaten.Karakter aksi demonstrasi yang terjadi umumnya berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun isu nasional yang berdampak lokal, seperti kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Kejadian tersebut mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal sekaligus menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan

publik. Meskipun kondisi relatif stabil, data menunjukkan perlunya peningkatan upaya preventif dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik di masa depan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi aparat keamanan, penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, serta peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa dalam melakukan mediasi konflik. Selain itu, peningkatan komunikasi publik dan transparansi kebijakan daerah juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan potensi ketegangan.

Implikasi Kebijakan untuk Tahun 2027

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial – Membangun mekanisme pemantauan dini di tingkat kecamatan dan desa untuk mendeteksi isu sosial yang berpotensi memicu ketegangan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Pemerintah Desa/Kecamatan – Pelatihan mediasi, fasilitasi dialog publik, dan manajemen risiko sosial untuk mencegah eskalasi konflik.
3. Transparansi dan Komunikasi Publik – Penyampaian informasi kebijakan pembangunan dan layanan publik secara jelas kepada masyarakat untuk menurunkan potensi ketidakpuasan.
4. Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Secara Terstruktur – Memperkuat mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sehingga aspirasi dapat tersalurkan tanpa menimbulkan demonstrasi yang menimbulkan risiko ketertiban.

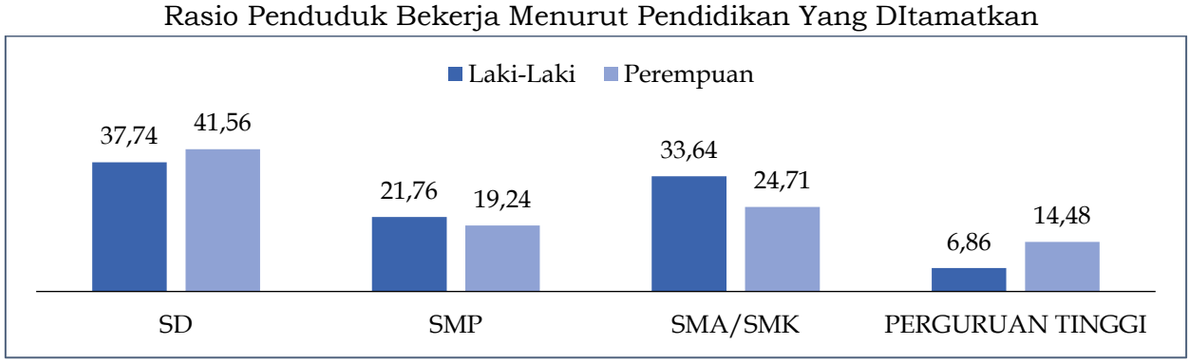
Dengan implementasi kebijakan tersebut, Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat mempertahankan kondisi sosial yang kondusif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan mendukung tercapainya pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Angkatan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah individu yang berusia bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu populasi. Ini mencakup orang-orang yang sudah bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan aktif. Sementara penduduk bekerja mengacu pada jumlah individu di suatu populasi yang sedang bekerja, baik secara penuh waktu, paruh waktu, atau dengan status pekerjaan kontrak. Ini mencakup individu yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Penduduk bekerja adalah bagian dari angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup semua individu yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif dalam suatu populasi. Pada tahun 2024 jumlah penduduk usia kerja di Lampung Utara sebesar 460.228 Orang. Sebesar 306.994 merupakan Angkatan kerja atau sebanyak 68,38 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 288.147 orang (93,86 persen) dan pengangguran sebanyak 18.847 orang (6,14 persen).

Grafik 2.51
Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang DItamatkan



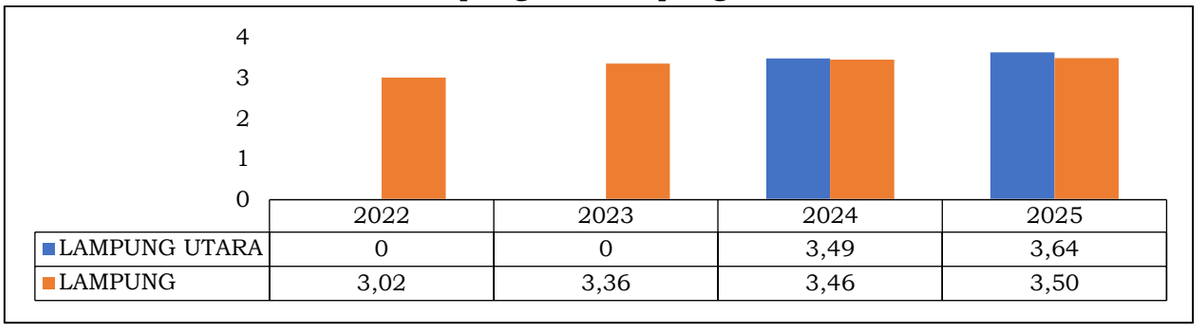
Sumber : BPS Lampung Utara, 2025

2.1.4.4.2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024–2025, Kabupaten Lampung Utara mencatat skor 3,64 pada tahun 2025, meningkat sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,50. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi daya saing daerah yang mencerminkan semakin meningkatnya kapasitas daerah dalam menciptakan lingkungan yang produktif, mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola dan ekosistem pendukung pembangunan.

Grafik 2.52

Nilai IDSD Provinsi Lampung dan Lampung Utara Tahun 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	0	0	3,49	3,64
LAMPUNG	3,02	3,36	3,46	3,50

Sumber : BRIN, 2026

Secara komparatif, capaian IDSD Kabupaten Lampung Utara berada di atas rata-rata Provinsi Lampung dan rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 3,50, serta lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung, seperti Lampung Tengah (3,45), Lampung Barat (3,45), Way Kanan (3,45), Tanggamus (3,40), Tulang Bawang (3,38), Tulang Bawang Barat (3,38), Mesuji (3,28), dan Pesisir Barat (3,13). Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Lampung Utara berada pada kelompok daerah dengan kinerja relatif baik di tingkat provinsi.

Tabel 2.121

Tabel Perbandingan Skor IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Skor IDSD Tahun 2024	Skor IDSD Tahun 2025
Lampung Utara	3,50	3,64
Kota Metro	4,18	4,19
Bandar Lampung	3,71	4,14
Pringsewu	3,70	3,86
Lampung Selatan	3,54	3,71
Pesawaran	3,44	3,57
Lampung Barat	3,42	3,45
Lampung Tengah	3,40	3,45
Tanggamus	3,37	3,40
Lampung Timur	3,37	3,53
Way Kanan	3,33	3,45
Tulang Bawang	3,32	3,38
Tulang Bawang Barat	3,25	3,38
Mesuji	3,18	3,28
Pesisir Barat	3,06	3,13
RATA-RATA KAB/KOTA		3,57
PROVINSI LAMPUNG	3,46	3,50
NASIONAL		3,50

Sumber : BRIN, 2026

Meskipun demikian, capaian Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro (4,19), Kota Bandar Lampung (4,14), Pringsewu (3,86), dan Lampung Selatan (3,71). Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek-aspek yang menjadi pembentuk daya saing daerah, seperti penguatan kualitas

infrastruktur, peningkatan produktivitas ekonomi, pengembangan inovasi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta kemudahan berusaha dan investasi.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, capaian IDSD Kabupaten Lampung Utara yang terus meningkat menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memperkuat faktor-faktor pengungkit daya saing melalui peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan inovasi, serta pembangunan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

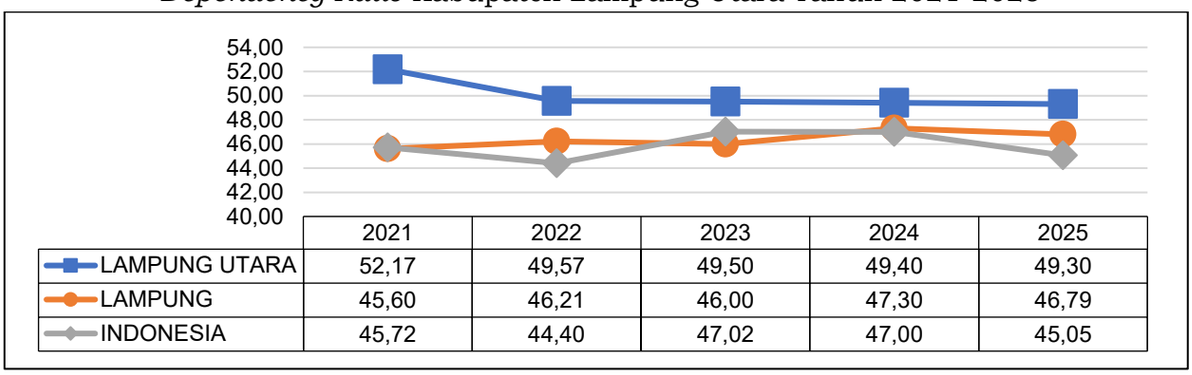
Secara keseluruhan, peningkatan skor IDSD Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menggambarkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak terhadap penguatan daya saing daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi peningkatan tersebut agar Kabupaten Lampung Utara mampu memperkecil kesenjangan dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat daya saing lebih tinggi serta memperkuat posisinya sebagai salah satu kabupaten dengan daya saing yang kompetitif di Provinsi Lampung.

2.1.4.4.3 Tingkat Ketergantungan

Berdasarkan data Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Tahun 2021–2025, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren penurunan yang positif, dari 52,17 pada tahun 2021 menjadi 49,30 pada tahun 2025. Angka ketergantungan menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang menjadi tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun). Dengan demikian, semakin rendah angka ketergantungan, semakin kecil beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Grafik 2.53

Dependency Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LAMPUNG UTARA	52,17	49,57	49,50	49,40	49,30
LAMPUNG	45,60	46,21	46,00	47,30	46,79
INDONESIA	45,72	44,40	47,02	47,00	45,05

Sumber : BPS, 2026

Penurunan angka ketergantungan sebesar 2,87 poin selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Lampung Utara semakin didominasi oleh penduduk usia produktif. Pada tahun 2025, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sekitar 52 penduduk usia nonproduktif. Kondisi ini mengindikasikan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja yang berpotensi menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun mengalami perbaikan, angka ketergantungan Kabupaten Lampung Utara masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung dan nasional. Pada tahun 2025,

angka ketergantungan Kabupaten Lampung Utara tercatat 49,30, sedangkan Provinsi Lampung sebesar 46,79 dan nasional sebesar 45,05. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Lampung Utara masih relatif lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Dengan kata lain, proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Lampung Utara belum seoptimal wilayah pembanding dalam mendukung produktivitas ekonomi.

Dari perspektif pembangunan, tren penurunan angka ketergantungan ini merupakan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Namun, bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan berusaha. Tanpa intervensi yang tepat, besarnya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi meningkatkan pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan langkah tersebut, penurunan angka ketergantungan dapat menjadi modal strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD hingga tahun berjalan merupakan langkah strategis untuk menilai capaian pembangunan daerah dan keterkaitannya dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara. Evaluasi ini tidak hanya melihat pencapaian kuantitatif, tetapi juga kualitas implementasi, relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Berdasarkan monitoring dan evaluasi, sebagian besar program prioritas RKPD telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dan rencana kerja tahunan. Capaian indikator kinerja menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa sektor strategis, seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas SDM. Namun, beberapa kegiatan masih mengalami deviasi target, baik akibat keterbatasan kapasitas, koordinasi antar OPD, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Realisasi program RKPD menunjukkan keterkaitan yang erat dengan indikator RPJMD, di mana beberapa target jangka menengah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur, menunjukkan tren positif. Misalnya, capaian sektor ekonomi dan pengembangan UMKM telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator RPJMD yang belum sepenuhnya tercapai, seperti peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan penyelesaian konflik sosial di tingkat masyarakat, yang memerlukan perhatian lebih lanjut pada perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan RKPD tahun berikutnya, sekaligus memperkuat integrasi perencanaan tahunan dengan target jangka menengah RPJMD. Rekomendasi yang muncul dari evaluasi meliputi peningkatan koordinasi antar OPD, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan efisiensi belanja daerah, serta prioritas pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan RKPD hingga tahun berjalan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas

perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa implementasi kegiatan tahun berikutnya dapat lebih terfokus pada pencapaian tujuan strategis RPJMD Kabupaten Lampung Utara. Berikut akan disajikan evaluasi tujuan dan sasaran, evaluasi indikator kinerja utama daerah, dan indikator kinerja daerah tahun 2025.

2.2.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025

2.2.1.1 Prioritas 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam prioritas ini terdapat 5 sasaran dengan 10 indikator sasaran dan 2 indikator tujuan, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.122
Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 1

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,41-5,77	5,12	Tercapai
				2	Indeks Gini	Persen	0,275	0,269	Tercapai
		T1.S1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,2	13,70	Tidak Tercapai
				4	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0,22	1,27	Tercapai
				5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,25	1,21	Tidak Tercapai
		T1.S2	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	6	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,91-15,91	15,78	Tercapai
				7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60-5,79	5,78	Tercapai
				8	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	80,75	83,58	Tercapai
		T1.S3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	45	NA	0
		T1.S4	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	10	Indeks Desa	Persen	3,88	7,33	Tercapai
				11	Persentase BUMDes Berkembang dan Maju	Persen	18,1	15,95	Tidak Tercapai

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		T1.S5	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	12	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	1,3	5,28	Tercapai

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan Tujuan 1 menunjukkan kinerja yang positif. Dari 12 indikator kinerja yang diukur, 8 indikator (66,67%) telah mencapai target, 3 indikator (25,00%) belum mencapai target, dan 1 indikator (8,33%) belum dapat diukur karena data belum tersedia. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

1. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan kualitas yang semakin baik
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 5,12 persen, berada dalam rentang target 4,41–5,77 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah mampu tumbuh secara positif meskipun masih menghadapi dinamika perekonomian global dan nasional. Dari sisi pemerataan, Indeks Gini berhasil ditekan menjadi 0,269, lebih baik dari target 0,275, yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya mendorong peningkatan output ekonomi, tetapi juga relatif lebih inklusif.

2. Penguatan ekonomi kerakyatan menunjukkan hasil yang baik, namun transformasi ekonomi masih menjadi tantangan
Kontribusi UMKM terhadap PDRB mencapai 1,27 persen, jauh melampaui target 0,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM semakin berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dan mampu bertahan di tengah dinamika perekonomian. Namun demikian, transformasi struktur ekonomi menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi masih menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari Rasio PDRB Industri Pengolahan yang hanya mencapai 13,70 persen, masih di bawah target 14,20 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses hilirisasi dan pengembangan industri berbasis potensi lokal belum berjalan optimal sehingga struktur ekonomi masih didominasi sektor primer.

Selain itu, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hanya mencapai 1,21 persen, sedikit di bawah target 1,25 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum sepenuhnya pulih dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Tantangan utama masih berada pada peningkatan daya tarik destinasi wisata, lama tinggal wisatawan, pengeluaran wisatawan, serta pengembangan usaha jasa pendukung pariwisata.

3. Penurunan kemiskinan berjalan efektif dan didukung kondisi pasar kerja yang membaik
Kinerja sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang sangat baik. Tingkat Kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,78 persen, lebih rendah

dari target 15,91–16,91 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,78 persen masih berada dalam rentang target. Di sisi lain, cakupan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 83,58 persen, melampaui target 80,75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan sosial berjalan efektif dan turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kerentanan sosial.

4. Pembangunan desa menunjukkan kemajuan, namun penguatan kelembagaan ekonomi desa masih perlu ditingkatkan
Indikator Indeks Desa mencapai 7,33, jauh melampaui target 3,88, yang menunjukkan peningkatan kapasitas pembangunan desa dan kualitas pelayanan dasar di wilayah perdesaan. Namun demikian, Persentase BUMDes Berkembang dan Maju baru mencapai 15,95 persen, masih di bawah target 18,10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan desa semakin baik, kelembagaan ekonomi desa belum berkembang secara optimal. Penguatan tata kelola, kapasitas manajemen, diversifikasi usaha, dan sinergi dengan program strategis seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja ekonomi desa.

5. Investasi menunjukkan kinerja sangat baik
Indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5,28 persen, jauh melampaui target 1,30 persen. Capaian ini mencerminkan meningkatnya aktivitas investasi di Kabupaten Lampung Utara yang berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

6. Masih terdapat indikator yang belum dapat diukur
Indeks Infrastruktur Daerah belum dapat dievaluasi karena data belum tersedia (NA). Ke depan diperlukan penguatan sistem statistik sektoral dan koordinasi antar perangkat daerah agar seluruh indikator kinerja dapat diukur secara tepat waktu sesuai prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kesimpulan :
Secara keseluruhan, Tujuan 1 RKPD Tahun 2025 dapat dinilai berhasil dicapai. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, ketimpangan menurun, kemiskinan berhasil ditekan, investasi meningkat, serta UMKM semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, terdapat beberapa isu strategis yang masih memerlukan perhatian, yaitu belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan, rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, belum optimalnya perkembangan BUMDes, serta belum tersedianya data Indeks Infrastruktur Daerah.
Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu difokuskan pada percepatan hilirisasi sektor unggulan, penguatan daya saing industri pengolahan, pengembangan destinasi dan ekonomi pariwisata, penguatan kelembagaan ekonomi desa, peningkatan investasi yang berkualitas, serta penguatan sistem data pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran RPJMD dan arah pembangunan nasional.

2.2.1.2 Prioritas 2 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing.
Dalam prioritas ini terdapat 5 sasaran dengan 11 indikator sasaran dan 1 indikator tujuan, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.123
Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 2

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing.			13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,75	72,28	Tercapai
		T2.S1	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Tahun	8,395	8,63	Tercapai
				15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,57	12,64	Tercapai
		T2.S2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	16	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,28	74,41	Tercapai
				17	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	17,3	20	Tidak Tercapai
		T2.S3	Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	18	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	9.984	10.160	Tercapai
				19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	58.349.445	112.790.000	Tercapai
		T2.S4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	64,3	62,97	Tidak Tercapai
				21	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,55	63,2	Tidak Tercapai
				22	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,445	0,492	Tidak Tercapai
		T2.S5	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	23	Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	58,5	72,4	Tercapai
				24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	58,12	86,18	Tercapai

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian Tujuan 2 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari 12 indikator kinerja, sebanyak 8 indikator (66,67%) telah mencapai target, sedangkan 4 indikator (33,33%) belum mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami kemajuan, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, standar hidup, ketahanan sosial, dan reformasi hukum. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara lebih merata dan berkelanjutan.

Pada indikator tujuan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,28, melampaui target 71,75. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang didukung oleh membaiknya dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menjadi indikator bahwa pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pada sasaran meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata, seluruh indikator berhasil mencapai target. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,63 tahun, lebih tinggi dari target 8,395 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,64 tahun, melampaui target 12,57 tahun. Hal ini menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan meningkatnya peluang penduduk usia sekolah untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, RLS yang masih berada di bawah sembilan tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah secara penuh sehingga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendidikan masih perlu terus didorong.

Pada sasaran terwujudnya kesehatan untuk semua, Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 74,41 tahun, lebih tinggi dari target 74,28 tahun, yang mencerminkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, Prevalensi Stunting masih sebesar 20 persen, belum mencapai target 17,3 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih memerlukan penguatan melalui intervensi yang lebih terintegrasi, mengingat stunting merupakan salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia yang menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Pada sasaran meningkatnya standar hidup layak dan produktivitas masyarakat, seluruh indikator berhasil melampaui target. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan mencapai Rp10,16 juta, lebih tinggi dari target Rp9,984 juta, sedangkan Produktivitas Tenaga Kerja mencapai Rp112,79 juta, jauh melampaui target Rp58,35 juta. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, pada sasaran keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, seluruh indikator belum mencapai target. Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) hanya mencapai 62,97 dibanding target 64,30, Indeks Perlindungan Anak mencapai 63,20 dibanding target 63,55, dan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,492, lebih tinggi dari target 0,445. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga, pemenuhan hak anak, serta kesetaraan gender masih perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun pada sasaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, seluruh indikator berhasil melampaui target. Indeks Ketahanan Sosial Budaya mencapai 72,40, jauh di atas target 58,50, sedangkan Indeks Reformasi Hukum mencapai 86,18, melampaui target 58,12. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya kohesi sosial masyarakat, meningkatnya kesadaran hukum, serta semakin baiknya tata kelola pemerintahan yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Kesimpulan dan Identifikasi Permasalahan

Secara keseluruhan, Tujuan 2 telah berhasil dicapai dengan didukung oleh meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, standar hidup, produktivitas tenaga kerja, ketahanan sosial budaya, serta reformasi hukum. Peningkatan IPM menjadi bukti bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Utara berjalan sesuai arah pembangunan daerah. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi fokus pembangunan pada periode berikutnya, yaitu:

- Belum optimalnya percepatan penurunan prevalensi stunting, yang menunjukkan masih perlunya penguatan intervensi gizi, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial secara konvergen.
- Kualitas pembangunan keluarga yang belum optimal, tercermin dari belum tercapainya target Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA).
- Perlindungan anak yang masih perlu diperkuat melalui peningkatan pemenuhan hak anak dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak.
- Ketimpangan gender yang masih relatif tinggi, menunjukkan bahwa kesempatan dan akses perempuan dalam pembangunan belum sepenuhnya setara dengan laki-laki.
- Meskipun indikator pendidikan telah mencapai target, rata-rata lama sekolah masih relatif rendah, sehingga peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tetap menjadi agenda penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan tahun berikutnya agar peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak hanya tercermin dari capaian indikator makro, tetapi juga dari semakin kuatnya kualitas keluarga, meningkatnya kesehatan generasi muda, terwujudnya kesetaraan gender, dan pembangunan manusia yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

2.2.1.3 Prioritas 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif

Dalam prioritas ini terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran dan 1 indikator tujuan, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.124

Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 3

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif			25	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/Skor	4,45	4,42	Tidak Tercapai
						Predikat / Status	A-	A-	
		T3.S1	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	26	Indeks Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	91	78,85	Tidak Tercapai
						Predikat / Status	(A) Kualitas tertinggi	Baik	
		T3.S2	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	27	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	71,8	65	Tidak Tercapai
				28	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	Tercapai

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian Tujuan 3 masih memerlukan perhatian. Dari 4 indikator kinerja yang diukur, hanya 1 indikator (25,00%) yang mencapai target, sedangkan 3 indikator (75,00%) belum mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penyelenggaraan pemerintahan telah mampu menjaga stabilitas sosial, kualitas pelayanan publik dan persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan Reformasi Birokrasi yang menekankan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada indikator tujuan, Indeks Pelayanan Publik (IPP) memperoleh nilai 4,42, sedikit di bawah target 4,45, sehingga belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Meskipun demikian, predikat kinerja tetap berada pada kategori A-, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum sudah berada pada kategori baik. Selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, namun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek pemenuhan standar pelayanan, digitalisasi layanan, inovasi pelayanan publik, serta peningkatan kepuasan masyarakat agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran terwujudnya layanan publik yang akuntabel, transparan, inovatif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencapai 78,85, masih berada di bawah target 91. Meskipun memperoleh predikat Baik, capaian tersebut belum mencapai kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu diperbaiki, antara lain pemenuhan standar pelayanan sesuai ketentuan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, kompetensi penyelenggara pelayanan, serta penyediaan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif, indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya hanya mencapai 65 persen, lebih rendah dibandingkan target 71,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan lingkungan masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun kondisi keamanan secara umum relatif terkendali, persepsi rasa aman masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti potensi gangguan ketertiban umum, kriminalitas, penerangan lingkungan, maupun efektivitas sistem keamanan berbasis masyarakat.

Di sisi lain, indikator Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan berhasil mencapai 100 persen, sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menangani setiap konflik sosial yang terjadi secara efektif sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Kesimpulan dan Identifikasi Permasalahan

Secara keseluruhan, Tujuan 3 belum tercapai secara optimal karena indikator utama pelayanan publik dan sebagian besar indikator sasaran masih berada di bawah target

yang ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan penyelesaian seluruh konflik sosial menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan keamanan daerah tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya meliputi:

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum mencapai target yang ditetapkan.
- Masih perlunya peningkatan pemenuhan standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, termasuk penguatan digitalisasi layanan, inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, pengelolaan pengaduan, dan peningkatan kompetensi aparatur.
- Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bagi kelompok rentan sehingga prinsip pelayanan publik yang inklusif perlu terus diperkuat.
- Persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggal masih relatif rendah, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- Meskipun penyelesaian konflik sosial telah mencapai target, upaya pencegahan konflik melalui deteksi dini, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial tetap perlu ditingkatkan agar kondisi kondusif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi transformasi digital pelayanan, peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, serta penguatan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, akuntabel, inklusif, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

2.2.1.4 Prioritas 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan

Dalam prioritas ini terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran dan 1 indikator tujuan, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.125
Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 4

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T.4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan			29	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	67,02	Tercapai
						Kategori	B	B	
		T4.S1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	30	Nilai SAKIP	Skor	61,5	61,26	Tidak Tercapai
						Predikat	B	B	
				31	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	Tercapai
				32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15	3,25	Tercapai
						Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	
				33	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/ Skor	64,5	77,78	Tercapai
						Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		T4.S2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	34	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,12	15,21	Tercapai

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Tujuan 4 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 6 indikator kinerja yang diukur, 5 indikator (83,33%) berhasil mencapai target, sedangkan 1 indikator (16,67%) belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami kemajuan, terutama pada aspek reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, transformasi digital pemerintahan, inovasi daerah, serta penguatan kapasitas fiskal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, serta kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang menekankan birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada indikator tujuan, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencapai 67,02, melampaui target 63, dengan kategori B. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami perbaikan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, penyederhanaan proses bisnis, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori B, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi menuju kategori yang lebih tinggi.

Pada sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah yang akuntabel dan adaptif, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang baik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh skor 61,26, sedikit di bawah target 61,50 sehingga belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Walaupun demikian, predikat SAKIP tetap berada pada kategori B, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik. Selisih capaian yang relatif kecil mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome based performance*). Di sisi lain, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Transformasi digital pemerintahan juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,25, melampaui target 3,15, dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin terintegrasi dan mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik, tata kelola

pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, Indeks Inovasi Daerah mencapai 77,78, jauh melampaui target 64,50, dengan predikat Sangat Inovatif. Capaian ini mencerminkan semakin berkembangnya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi perangkat daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 15,21 persen, jauh melampaui target 7,12 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Meningkatnya kontribusi PAD mencerminkan semakin baiknya kinerja pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Kesimpulan dan Identifikasi Permasalahan

Secara keseluruhan, Tujuan 4 telah berhasil dicapai dengan kinerja yang sangat baik. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh tercapainya sebagian besar indikator strategis, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Opini WTP atas LKPD, Indeks SPBE, Indeks Inovasi Daerah, serta Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Utara semakin efektif, akuntabel, adaptif terhadap transformasi digital, inovatif, dan memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan beberapa permasalahan strategis yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Implementasi SAKIP belum optimal, terutama dalam penguatan kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, pengukuran kinerja berbasis hasil (*outcome*), serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja perangkat daerah.
- Pelaksanaan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya mempertahankan kategori B, tetapi mampu mencapai kategori yang lebih tinggi melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan budaya kerja berorientasi hasil, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Integrasi pemanfaatan SPBE antar perangkat daerah masih perlu diperkuat untuk mendukung interoperabilitas data, pengambilan keputusan berbasis data, dan percepatan implementasi pemerintahan digital sesuai arah kebijakan nasional.
- Tingginya capaian PAD perlu diikuti dengan upaya menjaga keberlanjutan peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, optimalisasi digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah agar kapasitas fiskal tetap terjaga.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan reformasi birokrasi yang berdampak, optimalisasi pemerintahan digital, pengembangan inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2.1.5 Prioritas 5 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi

Dalam prioritas ini terdapat 6 sasaran dengan 6 indikator sasaran, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.126
Tabel Capaian Indikator Sasaran Daerah Prioritas 5

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi			35	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	0,2	4,62	Tercapai
		T5.S1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	36	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Jeruk)	Persen	4,25	9,78	Tercapai
				37	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Karet, Lada, Kopi dan Tebu)	Persen	0,25	4,00	Tercapai
				38	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Peternakan (Sapi, Kambing, Kerbau, dan Unggas)	Persen	1,5	0,00	Tidak Tercapai
				39	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan	Persen	1	6,37	Tercapai
		T5.S2	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	40	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,59	68,21	Tidak Tercapai
				41	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	450,19	442,15	Tidak Tercapai
				42	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum	Persen	97,6	97,52	Tidak Tercapai
		T5.S3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,68	71,62	Tercapai
				44	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,30	0,32	Tercapai
				45	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	86.393,74	NA	0

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian Tujuan 5 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator strategis yang belum

mencapai target. Dari 11 indikator kinerja yang diukur, 5 indikator (45,45%) mencapai target, 5 indikator (45,45%) belum mencapai target, dan 1 indikator (9,09%) belum dapat dievaluasi karena data belum tersedia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sektor primer telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat pembangunan sektor pertanian dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim. Pada indikator tujuan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan mencapai 4,62 persen, jauh melampaui target 0,20 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Lampung Utara. Pertumbuhan ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi sektor primer yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan PDRB daerah.

Pada sasaran meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura meningkat sebesar 9,78 persen, melampaui target 4,25 persen, sedangkan produktivitas komoditas perkebunan meningkat 4,00 persen, jauh di atas target 0,25 persen. Demikian pula produktivitas perikanan meningkat 6,37 persen, melebihi target 1 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan komoditas unggulan daerah telah berjalan efektif melalui peningkatan produktivitas lahan, penerapan teknologi budidaya, serta pembinaan kepada pelaku usaha pertanian dan perikanan.

Namun demikian, produktivitas komoditas peternakan tidak mengalami peningkatan (0 persen), sehingga tidak mencapai target 1,50 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsektor peternakan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi produktivitas ternak, penyediaan bibit unggul, pakan, pengendalian penyakit hewan, maupun penguatan kelembagaan peternak. Pada sasaran meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan, seluruh indikator belum mencapai target. Indeks Ketahanan Pangan hanya mencapai 68,21, lebih rendah dibanding target 77,59, yang menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek keterjangkauan, akses, dan pemanfaatan pangan. Selanjutnya, Konsumsi Listrik per Kapita mencapai 442,15 kWh, sedikit di bawah target 450,19 kWh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energi listrik masyarakat masih belum optimal dan dapat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi maupun pemerataan akses energi.

Sementara itu, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Kecukupan Air Minum mencapai 97,52 persen, hanya sedikit di bawah target 97,60 persen. Walaupun selisihnya relatif kecil, capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh akses air minum layak secara memadai. Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana serta perubahan iklim, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 71,62, melampaui target 68,68. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Utara berada dalam kondisi yang relatif baik sebagai hasil dari upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam.

Namun demikian, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) hanya mencapai 0,29, sedikit di bawah target 0,30. Meskipun selisihnya relatif kecil, capaian tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta pengurangan risiko bencana. Adapun indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif belum dapat dievaluasi karena data tahun 2025 masih belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran dan pelaporan emisi GRK masih memerlukan penguatan agar mendukung evaluasi pembangunan rendah karbon secara lebih komprehensif.

Kesimpulan dan Identifikasi Permasalahan

Secara keseluruhan, Tujuan 5 telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama ditandai oleh tingginya pertumbuhan sektor pertanian, meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, serta membaiknya kualitas lingkungan hidup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Lampung Utara.
Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Produktivitas subsektor peternakan belum mengalami peningkatan sehingga kontribusinya terhadap pembangunan sektor pertanian masih relatif rendah.
- Ketahanan pangan daerah belum optimal, yang menunjukkan perlunya penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, keamanan, dan diversifikasi pangan.
- Pemenuhan akses energi dan akses air minum layak belum sepenuhnya mencapai target sehingga masih diperlukan perluasan layanan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
- Ketangguhan daerah terhadap bencana masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Belum tersedianya data penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menunjukkan bahwa sistem inventarisasi dan pelaporan pembangunan rendah karbon masih perlu diperkuat agar evaluasi kinerja lingkungan hidup dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat waktu.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penguatan hilirisasi sektor pertanian, peningkatan produktivitas subsektor peternakan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pemerataan akses energi dan air minum, penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana, serta pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan inventarisasi emisi GRK yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara diharapkan semakin produktif, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan IKU Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah selama periode perencanaan. IKU disusun sebagai alat ukur kinerja yang bersifat strategis, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga mampu menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Selain itu, penyusunan IKU juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa indikator kinerja harus memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).

Pada level pemerintah daerah, IKU diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang bersifat lintas sektor melalui indikator-indikator makro maupun indikator strategis yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, IKU menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, pengukuran kinerja tahunan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam implementasinya, capaian IKU tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja satu perangkat daerah, tetapi merupakan hasil kontribusi seluruh perangkat daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi. Dengan demikian, pencapaian IKU menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya pembangunan diarahkan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), IKU juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Oleh karena itu, setiap target IKU harus didukung oleh data yang valid, metode pengukuran yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tabel 2.127
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2025		Kriteria
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,41-5,77	5,12	Tercapai
2	Indeks Gini	Persen	0,275	0,269	Tercapai
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,91-15,91	15,78	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60-5,79	5,78	Tercapai
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	45	93,29	Tercapai
6	Indeks Desa	Persen	3,88	7,33	Tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,75	72,28	Tercapai
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	17,3	20 *)	Tidak Tercapai
9	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,55	63,2	Tidak Tercapai
10	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,445	0,492 *)	Tidak Tercapai
11	Ketahanan Sosial Budaya	Persen	58,5	57,82	Tidak Tercapai
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	67,02	Tercapai
		Kategori	B	B	
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,59	68,21	Tidak Tercapai
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,68	71,62	Tercapai
15	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,3	0,32	Tercapai
16	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	86.393,74	Belum Rilis	NA

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025, dari 16 indikator strategis yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebanyak 10 indikator (62,50%) telah mencapai target, 5 indikator (31,25%) belum mencapai target, sedangkan 1 indikator (6,25%) belum dapat dievaluasi karena data realisasinya belum dirilis oleh

instansi yang berwenang. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek strategis yang memerlukan penguatan. Pada aspek pembangunan ekonomi, seluruh indikator utama menunjukkan kinerja yang positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar 5,12 persen, berada dalam rentang target 4,41–5,77 persen, yang mencerminkan aktivitas perekonomian daerah tetap tumbuh secara positif. Indeks Gini sebesar 0,269 juga lebih baik dibandingkan target 0,275, menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif terkendali. Demikian pula Tingkat Kemiskinan sebesar 15,78 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,78 persen berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja.

Pada aspek pembangunan wilayah, Indeks Infrastruktur Daerah mencapai 93,29, jauh melampaui target sebesar 45. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik. Selain itu, Indeks Desa juga mencapai 7,33, lebih tinggi dari target 3,88, yang mencerminkan meningkatnya tingkat perkembangan dan kemandirian desa sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,28, melampaui target sebesar 71,75. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, beberapa indikator pendukung kualitas hidup masyarakat masih menghadapi tantangan. Prevalensi Stunting masih sebesar 20 persen, lebih tinggi dibandingkan target 17,3 persen, yang menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting belum berjalan sesuai harapan. Selain itu, Indeks Perlindungan Anak hanya mencapai 63,2 dari target 63,55, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,492, lebih tinggi dari target 0,445, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam akses dan kesempatan pembangunan. Pada aspek sosial dan tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 67,02 dengan kategori B, melampaui target sebesar 63. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, Ketahanan Sosial Budaya hanya mencapai 57,82 persen, sedikit di bawah target 58,5 persen, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan kohesi sosial, ketahanan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Pada aspek pembangunan berkelanjutan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 71,62, melampaui target sebesar 68,68, yang menunjukkan kondisi lingkungan hidup daerah semakin baik. Demikian pula Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,32 telah melampaui target 0,30, mencerminkan meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana dan risiko lainnya. Namun demikian, Indeks Ketahanan Pangan hanya mencapai 68,21, masih berada di bawah target 77,59, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah masih perlu diperkuat, baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan. Adapun indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif belum dapat dievaluasi karena data realisasi Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan dan belum dirilis oleh kementerian/lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, capaian indikator tersebut akan dievaluasi setelah data resmi tersedia.

Secara keseluruhan, capaian IKU Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator strategis telah mencapai target. Keberhasilan tersebut terutama terlihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengendalian pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur, pembangunan desa, pembangunan manusia,

reformasi birokrasi, kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih agar pembangunan daerah semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Tahun 2025, beberapa permasalahan strategis yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah adalah:

- Percepatan penurunan stunting belum optimal, sehingga intervensi spesifik dan sensitif perlu diperkuat secara terpadu.
- Ketahanan pangan daerah masih belum mencapai target, yang menunjukkan perlunya peningkatan produktivitas sektor pangan, distribusi pangan, dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
- Perlindungan anak dan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan, perempuan, dan anak.
- Ketahanan sosial budaya masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan kohesi sosial, toleransi, partisipasi masyarakat, serta ketahanan terhadap dinamika sosial.
- Meskipun pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran telah memenuhi target, tantangan ke depan adalah menjaga kualitas pertumbuhan agar semakin inklusif, mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif, meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing secara berkelanjutan.
- Penguatan monitoring, evaluasi, dan kualitas data kinerja perlu terus ditingkatkan agar seluruh indikator strategis dapat diukur secara tepat waktu, akurat, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*) sesuai prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, indikator kinerja daerah disusun secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagai dasar pengendalian, evaluasi kinerja pembangunan, serta penilaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 2.128

Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 dan Tw. 1 Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	76,82	77,59	68,21	Tidak Tercapai	77,7	68,21	Tidak Tercapai	BapanasRI, Dinas Ketahanan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	10,36	10,3	10,56	Tidak Tercapai	9,8	10,56	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	449,2	450,19	5,09	Tidak Tercapai	465,9	5,09	Tidak Tercapai	PT PLN, BPS
4	Intensitas Energi Primer *	SBM/Rp milyar	NA	175	116,41	Tidak Tercapai	170	116,41	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK, Dinas Perkimciptaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman Menurut Kabupaten/Kota (%)	Persen	54,01	54,46	4,58	Tidak Tercapai	54,63	4,58	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum	Persen	97,52	97,6	97,90	Tercapai	97,8	97,90	Tercapai	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
7	Kapasitas Air Baku *	(m3/detik)	NA	0,1	0,421	Tercapai	0,2	0,421	Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	NA	67,75	72,00	Tercapai	68,56	72,00	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	68,62	68,68	71,62	Tercapai	68,94	71,62	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	4,33	4,58	4,58	Tercapai	4,7	4,58	Tercapai	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	12,55	13	14,76	Tercapai	13,5	14,76	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	17,76	18	17,76 *)	Tidak Tercapai	19	17,76 *)	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau									
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK *	Persen	NA	91504,465	270 (3,16%)	Tidak Tercapai	96615,19	270 (3,16%)	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkimciptaru, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *	Persen	NA	38	28,37	Tidak Tercapai	38,2	28,37	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK, Dinas Perkimciptaru, Dinas

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Indeks Risiko Bencana	Skor	131,2	131,1	161,97	Tidak Tercapai	129,6	161,97	Tidak Tercapai	BPBD
15	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,29	0,3	0,32	Tidak Tercapai	0,31	0,32	Tidak Tercapai	BPBD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,35	1,36	1,60	Tidak Tercapai	1,37	1,60	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17	Rasio Penduduk	Persen	103,55	103,23	103,5	Tercapai	103,8	103,5	Tercapai	BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18	Kepadatan Penduduk	Orang/m²	247	255	257	Tidak Tercapai	256	257	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	100	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,1	4,41-5,77	5,12	Tercapai	4,60-5,20	5,62	Tercapai	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,92	16,91-15,91	15,78	Tercapai	15,50-16,30	15,78	Tidak Tercapai	BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	48,21	51,41	51,76	Tercapai	54,73	51,76	Tidak Tercapai	BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,85	5,60-5,79	5,78	Tercapai	5,50-5,70	5,78	Tidak Tercapai	BPS
5	Indeks Gini	Indeks	0,276	0,275-0,270	0,269	Tercapai	0,269-0,265	0,269	Tercapai	BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,42	71,75	72,28	Tercapai	72,34	72,28	Tidak Tercapai	BPS
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,12	74,28	74,41	Tercapai	74,46	74,41	Tidak Tercapai	BPS
8	Angka Melek Huruf	Persen	97,04	97,25	97,67	Tercapai	97,35	97,67	Tercapai	BPS
9	Prevalensi Stunting	Persen	20	17,3	20 *)	Tidak Tercapai	16,72	20 *)	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	53,08	52,05	53,08	Tidak Tercapai	50	53,08	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
11	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	6,78	6,5	6,78	Tidak Tercapai	5,5	6,78	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
12	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case notification rate*)	Persen	61,62	61,65	61,62	Tidak Tercapai	62	61,62	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen	100	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(*treatment success rate*)									
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,56	12,57	12,64	Tercapai	12,58	12,64	Tercapai	BPS, Dinas Pendidikan
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,38	8,39	8,63	Tercapai	8,4	8,63	Tercapai	BPS, Dinas Pendidikan
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	a. Literasi Membaca	Persen	NA	57,18	56,54	Tidak Tercapai	59,68	56,54	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	b. Numerasi	Persen	NA	52,05	56,54	Tercapai	54,95	56,54	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	a. Literasi Membaca	Persen	NA	28,75	24,03	Tidak Tercapai	30,12	24,03	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	b. Numerasi	Persen	NA	22,4	24,03	Tercapai	24,3	24,03	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	NA	10	6,3	Tidak Tercapai	15	6,3	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Pendidikan
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	NA	5	56,2	Tercapai	7	56,2	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Pendidikan
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	Persen	NA	1	4,1	Tercapai	2	4,1	Tercapai	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	57,01	60,01	10,98	Tidak Tercapai	63,01	10,98	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Indeks Literasi Digital	Indeks	78	79	49,99	Tidak Tercapai	79,5	49,99	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informastika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	31,17	34	31,17	Tidak Tercapai	37,5	31,17	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan
24	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	80,74	80,75	83,58	Tercapai	82	83,58	Tercapai	Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama*	Indeks	73,35	75	74,5	Tidak Tercapai	75,3	74,5	Tidak Tercapai	Badan Kesbangpol dan Kanwil Kementerian Agama
26	Indeks Perlindungan Anak*	Indeks	63,2	64,85	63,2	Tidak Tercapai	65,2	63,2	Tidak Tercapai	BPS, Dinas PP dan PA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Indeks Pemenuhan Hak Anak*	Indeks	61,65	61,8	61,65	Tidak Tercapai	62	61,65	Tidak Tercapai	Dinas PP dan PA
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*	Indeks	76,49	76,5	76,49	Tidak Tercapai	77	76,49	Tidak Tercapai	Dinas PP dan PA dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
29	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,492	0,445	0,492	Tidak Tercapai	0,44	0,492	Tidak Tercapai	BPS, Dinas PP dan PA
30	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,17	53,51	53,17	Tidak Tercapai	53,68	53,17	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	9.837	9.984	10.160	Tercapai	10.183	10.160	Tidak Tercapai	BPS
32	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	Badan Kesbangpol
33	Indeks Zakat Nasional	Persen	0	0,2	0	Tidak Tercapai	0,23	0	Tidak Tercapai	Baznas, Setdakab, Kemenag
34	Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	NA	58,5	72,4	Tercapai	59,6	72,4	Tercapai	Badan Kesbangpol, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	Persen	49,4	49,45	48,44	Tidak Tercapai	49,6	48,44	Tidak Tercapai	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	13,53	14,2	13,70	Tidak Tercapai	15,25	13,70	Tidak Tercapai	BPS
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,21	1,25	1,27	Tercapai	1,28	1,27	Tidak Tercapai	BPS
4	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	1,2	2	1,2	Tidak Tercapai	2,2	1,2	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	1,82	1,92	2,8	Tercapai	1,95	2,8	Tercapai	BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	35	40	1,7	Tidak Tercapai	45	1,7	Tidak Tercapai	BPS dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten	Persen	1,5	2	94,2	Tidak Tercapai	2,5	94,2	Tidak Tercapai	BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,1	0,65	0,68	Tercapai	0,755	0,68	Tidak Tercapai	BPS dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	0	0,06	2,3	Tercapai	0,01	2,3	Tercapai	Bagian Perekonomian Setdakab
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	0,1	1	34,5	Tercapai	1,5	34,5	Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Rasio Kewirausahaan	Persen	5,41	5,7	2,85	Tidak Tercapai	5,8	2,85	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,55	67	67,34	Tercapai	68	67,34	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	48,64	48,75	50,44	Tercapai	48,8	50,44	Tercapai	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Dinas PP dan PA
14	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	57.496.990	58.349.445	112.790.000	Tercapai	59.225.836	112.790.000	Tercapai	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	64,3	64,5	77,78	Tercapai	64,7	77,78	Tercapai	BRIN, Bappeda
16	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	20	29,63	Tercapai	25	29,63	Tercapai	Dinas Perikanan
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	NA	5,82	5,91	Tercapai	5,85	5,91	Tercapai	BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten *	Persen	NA	4,78	5,15	Tercapai	4,75	5,15	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	1,23	1,3	5,28	Tercapai	1,4	5,28	Tercapai	BPS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	55,9	58,8	55,9	Tidak Tercapai	60,2	55,9	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perumahan Permukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
21	Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	46,67 (2025)	46,67	46,67	Tidak Tercapai	48,62	46,67	Tidak Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
22	Rasio Konektivitas	Persen	0,33	0,34	0,56	Tercapai	0,38	0,56	Tercapai	Dinas Perhubungan
23	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	NA	45		Tidak Tercapai	47,5		Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Permukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan
24	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	Persen	2,15	3,88	7,33	Tercapai	5,6	7,33	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan
25	Persentase BUMDes Berkembang dan Maju	Persen	15,95	18,1	15,95 *)	Tidak Tercapai	20,26	15,95 *)	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan
26	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	-14	2	231,66	Tercapai	2,5	231,66	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Milyar)	Rp	5.555,62	5.639,96	5.776,40	Tercapai	5.729,56	5.776,40	Tercapai	BPS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,16	0,18	0,25	Tercapai	0,2	0,25	Tercapai	BPS dan Bapenda
29	Tingkat Inflasi	Persen	1,67	2,5+1	1,67	Tercapai	2,5+1	1,67	Tercapai	BPS
30	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,5	3,5	3,5	Tercapai	3,55	3,5	Tercapai	BRIN, Bappeda
31	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (ADHB)	Persen	6,52	6,66	6,58	Tidak Tercapai	6,7	6,58	Tidak Tercapai	BPS
32	Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	NA	45	70,4	Tercapai	50	70,4	Tercapai	Bagian Kerjasama Setdakab
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	16	16,3	3,1	Tidak Tercapai	17,2	3,1	Tidak Tercapai	Bank Lampung, BPS, BPKAD
34	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,04	0,05	0,19	Tercapai	0,1	0,19	Tercapai	Bank Lampung, BPS, BPKAD
35	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Nilai	3.000	3.100	3.000	Tidak Tercapai	4.100	3.000	Tidak Tercapai	Bank Lampung, BPS, BPKAD
36	Total Kredit/PDRB	Persen	15	16	15,6	Tidak Tercapai	17	15,6	Tidak Tercapai	Bank Lampung, BPS, BPKAD
37	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,7	3,76	3,7	Tidak Tercapai	3,78	3,7	Tidak Tercapai	Bappenas, Bagian Perekonomian Setdakab
38	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0,2	0,22	1,27	Tercapai	0,22	1,27	Tercapai	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
39	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-6,07	-5,9	-6,4	Tercapai	-5,7	-6,4	Tercapai	BPS
40	Tingkat Kriminalitas	Per 100.000 penduduk per tahun	125	126	17	Tercapai	125	17	Tercapai	BPS dan Polres
41	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Indeks	-5,28	0,2	4,62	Tercapai	0,3	4,62	Tercapai	BPS
42	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Jeruk)	Persen	4	4,25	4	Tidak Tercapai	5	4	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
43	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Karet, Lada, Kopi dan Tebu)	Persen	0,2	0,25	0,2	Tidak Tercapai	0,5	0,2	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perkebunan dan Peternakan
44	Persentase Peningkatan Produktivitas	Persen	1	1,5	1	Tidak Tercapai	2	1	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Komoditas Unggulan Peternakan (Sapi, Kambing, Kerbau, dan Unggas)									
45	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan	Persen	1	1	6,38	Tercapai	1	6,38	Tercapai	BPS dan Dinas Perikanan
46	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% Kontribusi)	Persen	31,99	34,1	31,99	Tidak Tercapai	34,3	31,99	Tidak Tercapai	BPS
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	57,88	58,12	86,18	Tercapai	60,5	86,18	Tercapai	Sekretariat Daerah
		Predikat	(Cukup)	Cukup	A (Sangat Baik)		Baik	A (Sangat Baik)		
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,12	3,15	3,25	Tercapai	3,25	3,25	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik		
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	4,45	4,42	Tidak Tercapai	4,51	4,42	Tidak Tercapai	Menpan RB, Sekretariat Daerah
4	Indeks Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	90,43	91	78,85	Tidak Tercapai	92	78,85	Tidak Tercapai	Ombudsman, Sekretariat Daerah
		Predikat / Status	(A) Kualitas tertinggi	(A) Kualitas tertinggi	Baik		(A) Kualitas tertinggi	Baik		
5	Persentase Penduduk Rentan/Marjinal yang Terlayani dalam Program Layanan Publik (Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dsb.)	Persen	NA	40	71	Tercapai	45	71	Tercapai	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	63	67,02	Tercapai	64,5	67,02	Tercapai	Menpan RB dan Sekretariat Daerah
		Kategori	B	B	B		B	B		
7	Nilai SAKIP	Skor	60,02	61,5	61,26	Tidak Tercapai	62,5	61,26	Tidak Tercapai	Menpan RB, Sekretariat Daerah
		Predikat	B	B	B		B	B		
8	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	Tercapai	BPK, BPKAD
9	Indeks Profesional ASN	Indeks	74,18	75	74,18	Tidak Tercapai	76	74,18	Tidak Tercapai	BKPSDM
		Kategori	Sedang	Sedang	Sedang		Sedang	Sedang		
10	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2 (2,678)	Level 2 (2,80)	Level 3 (3,0)	Tercapai	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,0)	Tercapai	BPKP, Inspektorat
11	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,06	7,12	15,21	Tercapai	7,38	15,21	Tercapai	BPKAD dan Bapenda
12	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	#REF!	6,12	19,58	Tercapai	6,38	19,58	Tercapai	Bapenda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Penegakan Hukum Perda	Persen	75	80	75 *)	Tidak Tercapai	82	75 *)	Tidak Tercapai	Satpol PP
14	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	88,62	88,75	88,62 *)	Tidak Tercapai	88,9	88,62 *)	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah, Bappeda
15	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	78,32	79	78,32 *)	Tidak Tercapai	80	78,32 *)	Tidak Tercapai	Badan Kesbangpol
16	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	65	71,8	65 *)	Tidak Tercapai	72,31	65 *)	Tidak Tercapai	BPS, Polres, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Perhubungan
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**									
	URUSAN PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	63,53	100	68,00	Tidak Tercapai	100	55,81	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,27	100	97,00	Tidak Tercapai	100	102,98	Tercapai	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	84,88	100	99,00	Tidak Tercapai	100	89,24	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1,77	100	20,00	Tidak Tercapai	100	33,51 *)	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
5	Persentase Penduduk Rentan/Marjinal (Anak-Anak Berkebutuhan Khusus serta Kelompok Rentan Lainnya) yang Terlayani Layanan Pendidikan Inklusif agar Memperoleh Hak Pendidikan yang Layak	Persen	13,84	13,84	13,84	Tercapai	14,2	13,84 **)	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN									
6	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,05	1,1	1,20	Tercapai	1,15	1,2	Tercapai	Dinas Kesehatan
7	Persentase RS Rujukan Tingkat	Persen	100	100	67,00	Tidak Tercapai	100	67	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kabupaten/kota yang terakreditasi									
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,77	100	90,00	Tidak Tercapai	100	24.45 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	85,67	100	79,17	Tidak Tercapai	100	27.81 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	83,8	100	80,39	Tidak Tercapai	100	27.46 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93,66	100	84,46	Tidak Tercapai	100	26.76 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,09	100	90,17	Tidak Tercapai	100	25.08 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,78	100	82,86	Tidak Tercapai	100	32.73 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	87,22	100	91,50	Tidak Tercapai	100	29.71 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	89,58	100	94,68	Tidak Tercapai	100	45.80 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
16	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,02	100	95,91	Tidak Tercapai	100	38.69 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	91,89	100	91,41	Tidak Tercapai	100	51.74 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	93,69	100	100,00	Tercapai	100	22.34 %	Tercapai	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	59,68	100	70,96	Tidak Tercapai	100	21.69 %	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	5		Tidak Tercapai	6		Tidak Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	47,82	55,03	23,99	Tidak Tercapai	57	23,99	Tidak Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	68,45	68,96	71,35	Tercapai	69,25	3.33 %	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81,7	82	99,18	Tercapai	82,3	5.00 %	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	20,00	Tidak Tercapai	100	25,00	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	46,67 (2025)	46,67	46,67	Tidak Tercapai	48,62	46,67	Tidak Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0	100	5,00	Tidak Tercapai	100	5,00	Tidak Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	100	100,00	Tercapai	100	0.00 %	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	100	100,00	Tercapai	100	1.04 %	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	2,69	2,76	0,60	Tidak Tercapai	2,84	0,60	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	11,28	12	2,76	Tidak Tercapai	12,3	2,76	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	10	10,53	5,30	Tidak Tercapai	10,53	5,30	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA									
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	75	100	100,00	Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Angka	100	100	96,67	Tidak Tercapai	100	46.04 %	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Angka	0,33	100	96,67	Tidak Tercapai	100	26.42 %	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Angka	100	100	95,00	Tidak Tercapai	100	35.28 %	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	evakuasi korban bencana									
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	93,00	Tidak Tercapai	100	24.23 %	Tidak Tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
39	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	-	30		Tidak Tercapai	25		Tidak Tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	URUSAN SOSIAL									
40	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	14,2	10	10,00	Tercapai	10	10*	Tercapai	Dinas Sosial
41	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tergraduasi	Persen	82	98,25	13,30	Tidak Tercapai	98,25	13,30	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
42	Persentase Penduduk Rentan (Lansia, disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, orang terlantar, dan kelompok miskin ekstrem) yang Terlayani dalam Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Persen	82,59	100	49,71	Tidak Tercapai	100	49,71	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
43	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	65,41	100	96,27	Tidak Tercapai	100	66.37 %	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
44	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	98,67	Tidak Tercapai	100		Tidak Tercapai	Dinas Sosial
	URUSAN TENAGA KERJA									
45	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	100	0,00	Tidak Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0	100	78,75	Tidak Tercapai	100	78,75	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
47	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	168,7	20,43	112.790.000 ,00	Tercapai	20,59	112.790.000 ,00	Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
48	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	62,94	100	62,94	Tidak Tercapai	100	62,94	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
49	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	40,51	0	40,51	Tidak Tercapai	0	40,51	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
50	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	22,14	35	21,89	Tidak Tercapai	35	21,89	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	3,05	0,5	16,20	Tercapai	0,5	16,20	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53	Strata Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Strata	madya	nindya	Pratama	Tidak Tercapai	nindya	Pratama	Tidak Tercapai	
	URUSAN PANGAN									
54	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	59,35	100	122,75	Tercapai	100	122,75	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	URUSAN PERTANAHAN									
55	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									
56	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	0	0,00	Tidak Tercapai	0	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
57	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100	0,00	Tidak Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
58	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks/ Skor	68,62	68,68	71,62	Tercapai	68,94	71,62	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
60	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	81,93	82,33	81,96	Tidak Tercapai	82,83	81,96	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
61	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	75	62,00	Tidak Tercapai	75	62,00	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
62	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,17	100	97,30	Tidak Tercapai	100	97,30	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	63,43	63	73,37	Tercapai	65	73,37	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
64	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	99,92	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
65	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	17	18	50,00	Tercapai	21	50,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
66	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks	84,75	84,75	87,99	Tercapai	85	87,99	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Kependudukan									
67	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persen	100	100	95,28	Tidak Tercapai	100	95,28	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
68	Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar	Persen	0	15	0,00	Tidak Tercapai	15	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
69	Persentase Penduduk Rentan (Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dsb.) yang Terlayani Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
70	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2,16	3,88	7,33	Tercapai	5,6	7,33	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
71	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Indeks	0,6938	0,71	0,70	Tidak Tercapai	0,712	0,700	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Status	Berkembang							
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
72	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,27	2,26	2,32	Tercapai	2,25	2,32	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
73	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,21	68,64	70,00	Tercapai	68,7	70,00	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
74	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,81	9,17	10,60	Tercapai	8,79	10,60	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PERHUBUNGAN									
75	Rasio Konektivitas	Rasio	0,34	0,34	0,56	Tercapai	0,38	0,56	Tercapai	Dinas Perhubungan
76	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,38	0,44	0,47	Tercapai	0,45	0,47	Tercapai	Dinas Perhubungan
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	3,03	0,03	3,03	Tercapai	0,03	3,03	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
78	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	0	0,09	27,03	Tercapai	0,13	27,03	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
79	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	80	65	65,08	Tercapai	70	65,08	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
80	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	100	48,24	0,00	Tidak Tercapai	48,6	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
81	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,18	7	1,18	Tidak Tercapai	10	1,18	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
82	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-19,06	3,63	231,66	Tercapai	3,73	231,66	Tercapai	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
83	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	8,04	8,3	6,04	Tidak Tercapai	8,8	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
84	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,81	10.15	13,00	Tercapai	11,2	10,10	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
85	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	38	10	3,90	Tidak Tercapai	20	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
	URUSAN STATISTIK									
86	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	0,31	100,00	Tercapai	0,47	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Persentase PD yang menggunakan data	Persen	100	0,31	100,00	Tercapai	0,47	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah									
88	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	0	0,00	Tidak Tercapai	10%	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN KEBUDAYAAN									
89	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	0	100	60,00	Tidak Tercapai	100	60,00	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	URUSAN PERPUSTAKAAN									
90	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		65,35	70	59,24	Tidak Tercapai	75	59,24	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
91	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks/ Skor	57,01	60	10,98	Tidak Tercapai	62	10,98	Tidak Tercapai	BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN KEARSIPAN									
92	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persen	37,5	42,5	15,00	Tidak Tercapai	47,5	15	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
93	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	33,3	38,3	0,00	Tidak Tercapai	43,3	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PERIKANAN									
94	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	71,25	6.665,00	9.082,42	Tercapai	6.874,00	9.082,42	Tercapai	Dinas Perikanan
	URUSAN PARIWISATA									
95	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	100	25	0,00	Tidak Tercapai	30	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	Persen	16,81	60	9,98	Tidak Tercapai	64	9,98	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota									
97	Tingkat hunian akomodasi	Persen	0,25	2,7	0,25	Tidak Tercapai	3	0,25	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
98	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,21		1,21	Tidak Tercapai	2	1,21	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
99	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,11	1,5	0,11	Tidak Tercapai	1,7	0,11	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	URUSAN PERTANIAN									
100	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	0,02	0,02	0,02	Tercapai	0,02	0,02	Tercapai	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
101	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan	Desa/Kel	4,5	5	4,5	Tidak Tercapai	5	4,5	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
102	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis Kab/Kota	Persen	-24,84	100	0,00	Tidak Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
103	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Persen	100	100	0,00	Tidak Tercapai	100	0,00	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PERDAGANGAN									
104	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	85	100,00	Tercapai	85	100,00	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
105	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	57,35	80		Tidak Tercapai	80		Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
106	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,86	20	57,24	Tercapai	25	57,24	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PERINDUSTRIAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	-6,88	90		Tidak Tercapai	90		Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
108	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0	100		Tidak Tercapai	100		Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
109	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100		Tidak Tercapai	100		Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
110	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100		Tidak Tercapai	100		Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
111	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	0	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	95	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)									
113	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,53	20,00	39,34	Tercapai	30	39,34	Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
114	Rasio PAD	Persen	7,06	7,19	9,64	Tercapai	7,23	9,64	Tercapai	Bapenda
115	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,678	Level 2 (2,80)	Level 2	Tercapai	Level 3 (3,00)	Level 2	Tercapai	Inspektorat
116	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Level	3	Level 3 (3,00)	2,75	Tercapai	Level 3 (3,10)	2,75	Tercapai	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)									
117	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	68,92		Level 3	Tercapai	91,75	Level 3	Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
118	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)									
119	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0,00	Tidak Tercapai	0	0,00	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah
120	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	56	56,5	2,44	Tidak Tercapai	57	2,44	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah
121	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	41,75	42	0,00	Tidak Tercapai	42,2	0,00	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah
122	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	15,65	20	35,02	Tercapai	25	35,02	Tercapai	Sekretariat Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)									
123	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76,62	77	33,92	Tidak Tercapai	77,2	25,10	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
124	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	18,56	19	13,55	Tidak Tercapai	19,2	13,55	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
125	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	5,48	5,5	77,46	Tercapai	6	55,00	Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TAHUN 2025			TAHUN 2026			Perangkat Daerah Pengampu Komposit Data
			2024	TARGET	REALISASI	Status Capaian	TARGET	REALISASI TW 1	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)									
126	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	5,03	-4	-10,04	Tidak Tercapai	-8	-10,04	Tidak Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
127	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	23,12	-10	-15,94	Tidak Tercapai	-22,5	-15,94	Tidak Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
128	Manajemen Aset	Ya/Tidak	3	Ya	Ya	Tercapai	Ya	Ya	Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
129	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	1,48	1,3	2,62	Tercapai	1,25	2,62	Tercapai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)									
130	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
131	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
132	Persentase perda yang di tetapkan	Persen	100	100	100,00	Tercapai	100	100,00	Tercapai	Sekretariat DPRD
133	Persentase Ranperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	100	100	66,67	Tidak Tercapai	100	66,67	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD
134	Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	100	100	85,00	Tidak Tercapai	100	85,00	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD

Sumber : Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, 2026

Secara umum, **pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025** menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya sejumlah indikator makro pembangunan, terutama pada pertumbuhan ekonomi, penurunan

kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, khususnya pada bidang ketahanan pangan, pelayanan dasar, infrastruktur, lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah yang menjadi fokus perbaikan pada tahun berikutnya.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup beragam. Indikator yang berhasil mencapai target antara lain Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Kecukupan Air Minum, Kapasitas Air Baku, Akses Air Siap Minum Perpipaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah, Ketaatan terhadap RTRW, serta Rasio Penduduk. Sebaliknya, indikator Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Akses Air Minum Aman, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah, Penurunan Intensitas Emisi GRK, Porsi Energi Baru Terbarukan, Indeks Risiko Bencana, serta indikator kependudukan seperti Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek dengan capaian yang relatif baik. Indikator makro pembangunan menunjukkan hasil positif, di antaranya:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,12 persen, berada dalam rentang target RKPD sebesar 4,41–5,77 persen.
- Tingkat Kemiskinan turun menjadi 15,78 persen, melampaui target yang ditetapkan.
- Indeks Gini sebesar 0,269, menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,28.
- Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, serta Keaktifan Peserta JKN juga berhasil mencapai target.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target, antara lain Prevalensi Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, penemuan kasus Tuberkulosis, literasi membaca, penduduk berpendidikan tinggi, literasi masyarakat, literasi digital, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai indikator pembangunan keluarga, gender, kepemudaan, dan perlindungan anak.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kinerja sangat baik. Beberapa indikator yang berhasil melampaui target meliputi:

- Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif;
- Rasio Volume Usaha Koperasi;
- Return on Asset (ROA) BUMD;
- Proporsi Lapangan Kerja Formal;
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;
- Produktivitas Tenaga Kerja;
- Indeks Inovasi Daerah;
- Indeks Ekonomi Biru;
- Indeks Pembangunan TIK;
- Pertumbuhan PMTB;
- Rasio Konektivitas;
- Persentase Desa Mandiri;
- Peningkatan Investasi;
- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
- Tingkat Inflasi;

- Indeks Daya Saing Daerah;
- Efektivitas Kerja Sama Daerah;
- Kontribusi UMKM terhadap PDRB;
- Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.

Sementara itu, indikator yang masih memerlukan perhatian meliputi Rasio PDRB Industri Pengolahan, Jumlah Wisatawan, Pengembangan UMKM, Rasio Kewirausahaan, Kemantapan Jalan Kabupaten, Hunian Layak, BUMDes Berkembang, Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi, Akses Keuangan Daerah, serta peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

4. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja tata kelola pemerintahan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang berhasil mencapai target antara lain:

- Indeks Reformasi Hukum;
- Indeks SPBE;
- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah;
- Maturitas SPIP;
- Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- Pertumbuhan PAD.

Namun demikian, beberapa indikator tata kelola masih belum mencapai target, seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik, Nilai SAKIP, Indeks Profesional ASN, Penegakan Perda, Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Persepsi Keamanan Masyarakat, yang memerlukan penguatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci menunjukkan bahwa beberapa urusan pemerintahan telah mencapai target, terutama pada:

- administrasi kependudukan;
- pengelolaan lingkungan hidup;
- ketahanan pangan;
- konektivitas transportasi;
- pengelolaan keuangan daerah;
- pengadaan barang dan jasa;
- pelayanan komunikasi dan informatika;
- produksi perikanan;
- investasi daerah.

Di sisi lain, sebagian besar indikator pelayanan dasar, terutama pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, ketenagakerjaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, dan industri masih belum memenuhi target. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 dapat dikategorikan cukup baik, ditandai dengan tercapainya sebagian besar indikator makro pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, menjaga stabilitas inflasi, memperkuat investasi, serta mempertahankan opini WTP menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan pada sektor pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, dan kualitas

pelayanan publik agar target pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya dapat dicapai secara lebih optimal.

Kemudian secara umum untuk capaian **indikator kinerja daerah Kabupaten Lampung Utara pada Triwulan I Tahun 2026** masih menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian indikator makro daerah telah menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada aspek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi daerah, namun masih terdapat cukup banyak indikator yang belum mencapai target karena sebagian besar merupakan indikator tahunan yang realisasinya baru dapat dihitung pada akhir tahun atau masih menggunakan data tahun sebelumnya dari instansi penyedia data. Oleh karena itu, hasil Triwulan I lebih menggambarkan perkembangan awal pelaksanaan pembangunan dibandingkan pencapaian akhir target tahun 2026.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi, kinerja masih didominasi indikator yang belum mencapai target. Beberapa indikator lingkungan hidup menunjukkan capaian positif, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kapasitas Air Baku, Akses Air Minum Perpipaan, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, serta Timbulan Sampah Terolah yang telah memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, akses air minum aman, pengelolaan sampah, serta indikator pengendalian risiko bencana dan kependudukan yang masih berada di bawah target.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memperlihatkan perkembangan yang cukup baik pada indikator makro ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,62 persen, lebih tinggi dari target RKPD sebesar 4,60–5,20 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi daerah yang terus membaik. Di sisi lain, Tingkat Kemiskinan (15,78%), PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia masih belum memenuhi target tahun 2026 karena menggunakan data publikasi tahunan BPS. Pada sektor pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta capaian numerasi telah menunjukkan hasil yang baik. Namun indikator kualitas pendidikan seperti literasi membaca, partisipasi pendidikan tinggi, serta Indeks Literasi Digital masih memerlukan peningkatan.

Di sektor kesehatan, sebagian besar indikator pelayanan dasar, seperti Prevalensi Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Case Notification Rate Tuberkulosis, masih belum mencapai target sehingga memerlukan penguatan intervensi pelayanan kesehatan dasar dan percepatan program penurunan stunting.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Beberapa indikator berhasil melampaui target, antara lain:

- Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif;
- Return on Asset (ROA) BUMD;
- Proporsi Lapangan Kerja Formal;
- Indeks Inovasi Daerah;
- Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Pertumbuhan PMTB;
- Persentase Desa Mandiri;
- Pertumbuhan Investasi;
- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
- Tingkat Inflasi;
- Indeks Daya Saing Daerah.

Namun demikian, masih terdapat indikator strategis yang perlu menjadi perhatian, seperti kemantapan jalan, pengembangan UMKM, rasio kewirausahaan, kontribusi PDRB industri pengolahan, kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi, serta

produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang belum mencapai target.

4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, reformasi tata kelola pemerintahan menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator Indeks Reformasi Hukum, SPBE, Reformasi Birokrasi, Opini WTP, Maturitas SPIP, dan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah telah memenuhi target.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik, Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik, Nilai SAKIP, Indeks Profesional ASN, penegakan Perda, Aksi HAM, dan Indeks Demokrasi Indonesia masih memerlukan peningkatan melalui penguatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas aparatur.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada kelompok Indikator Kinerja Kunci, capaian masih didominasi indikator yang belum memenuhi target. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- sebagian besar merupakan indikator pelayanan dasar yang bersifat kumulatif hingga akhir tahun;
- beberapa indikator masih menggunakan data semesteran atau tahunan;
- beberapa pelayanan baru berjalan pada awal tahun anggaran sehingga realisasi Triwulan I masih rendah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target, antara lain:

- Partisipasi pendidikan usia 7–12 tahun;
- Rasio daya tampung rumah sakit rujukan;
- Pelayanan TBC;
- Pengelolaan air minum dan air limbah;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Administrasi kependudukan;
- Peningkatan desa mandiri;
- Program keluarga berencana;
- Konektivitas transportasi;
- Layanan digital pemerintah;
- Produksi perikanan;
- Transparansi informasi publik;
- Pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kabupaten Lampung Utara pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa indikator makro ekonomi dan tata kelola pemerintahan telah memberikan hasil yang positif, terutama pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui target, stabilitas inflasi, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, SPBE, serta opini WTP. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, infrastruktur, lingkungan hidup, dan daya saing ekonomi yang memerlukan percepatan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa banyak indikator masih menggunakan data tahunan atau data dari instansi pembina, sehingga capaian Triwulan I belum sepenuhnya mencerminkan kinerja akhir Tahun 2026 dan akan mengalami pembaruan setelah tersedia data resmi dari instansi terkait.

2.2.4 Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala pelaksanaan, serta menjadi dasar

dalam penyempurnaan kebijakan, penetapan prioritas, dan penyusunan program, kegiatan, serta subkegiatan pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2027 agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.129
Hasil Evaluasi Kinerja RKPD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**615.692.699.143**		**114.708.282.673**		**94.568.430.898**		**113.439.282.715**		**247.392.763.411**		570.108.759.697	**72,96**	**92,6**		
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**458.366.291.240**		**70.630.052.673**		**86.329.665.732**		**77.093.941.883**		**186.421.944.319**		420.475.604.607	**75,48**	**91,73**	DINAS PENDIDIKAN	
			Tercapainya kinerja urusan pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									66.36		66.36		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75								0		0		0			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000		-		9.000.000		14.898.750		11.752.500		35.651.250	100	99,03		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.000.000		-		9.000.000		14.898.750		11.752.500		35.651.250	100	99,03		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			456.759.033.049		70.603.601.964		86.075.440.576		76.795.255.976		185.463.719.224		418.938.017.740	66,67	91,72		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4148		641		781		697		1.684		3.803		91,68			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12				3		2		5		10		83,33			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4								1		1		25			
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			456.465.333.449		70.603.601.964		85.995.640.576		76.735.670.976		185.321.711.724		418.656.625.240	91,68	91,72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4148		641		781		697		1.684		3.803		91,68			
		1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			261.600.000		-		73.050.000		52.880.000		128.680.000		254.610.000	83,33	97,33		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12				3		2		5		10		83,33			
		1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			32.099.600		-		6.750.000		6.705.000		13.327.500		26.782.500	25	83,44		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4								1		1		25			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.180.165		-		9.293.000		-		25.039.300		34.332.300	81,33	75,99		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75				23				24		47		62,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12								12		12		100			
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.980.165		-		9.293.000		-		9.839.300		19.132.300	62,67	63,82		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75				23				24		47		62,67			
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.200.000		-		-		-		15.200.000		15.200.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12								12		12		100			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.220.678.026		26.450.709		155.389.703		283.787.157		705.637.495		1.171.265.064	83,33	95,95		
			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		3		5		3		9		20		83,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12				1		2		7		10		83,33			
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			167.939.360		26.450.709		36.454.703		23.554.907		64.956.745		151.417.064	83,33	90,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		3		5		3		9		20		83,33			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.052.738.666		-		118.935.000		260.232.250		640.680.750		1.019.848.000	83,33	96,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12				1		2		7		10		83,33			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.400.000		-		80.542.453		-		215.795.800		296.338.253	50	97,03		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6				1				2		3		50			
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			305.400.000		-		80.542.453		-		215.795.800		296.338.253	50	97,03		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6				1				2		3		50			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**154.762.268.193**		**44.074.000.000**		**8.182.488.350**		**36.149.113.314**		**60.064.367.703**		148.469.969.367	**73,34**	**95,93**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)									100		100		0			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)									0		0		0			
				Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	96								100		100		104,17			
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	95								100		100		105,26			
				Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)									100		100		0			
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)									100		100		0			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			85.161.956.778		26.416.820.000		3.208.007.250		18.338.462.850		35.350.626.295		83.313.916.395	80,1	97,83		
			Jumlah Sarana dan Prasaran Sekolah Dasar yang dikelola	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4								4		4		100			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1								1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10				6		1		3		10		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	22										0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300						91		77		168		56			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0						423				423		0			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	420						135		67		202		48,1			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	9314								9.028		9.028		96,93			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	19								19		19		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10								10		10		100			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	39								39		39		100			
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.096.000.000		-		-		-		1.094.968.000		1.094.968.000	100	99,91		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4								4		4		100			
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			274.000.000		-		-		-		273.727.000		273.727.000	100	99,9		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1								1		1		100			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.019.995.898		-		3.192.347.250		706.566.750		1.083.710.309		4.982.624.309	100	99,26		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10				6		1		3		10		100			
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	22										0		0			
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			202.000.000		-		-		61.503.300		51.931.516		113.434.816	56	56,16		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300						91		77		168		56			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			-		-		-		4.485.000		-		4.485.000	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0						423				423		0			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			54.327.562.880		26.416.820.000		15.660.000		17.565.907.800		8.761.604.900		52.759.992.700	48,1	97,11		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	420						135		67		202		48,1			
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.964.398.000		-		-		-		1.919.036.820		1.919.036.820	96,93	97,69		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	9314								9.028		9.028		96,93			
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.108.000.000		-		-		-		1.102.613.000		1.102.613.000	100	99,51		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	19								19		19		100			
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.600.000.000		-		-		-		1.598.072.750		1.598.072.750	100	99,88		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10								10		10		100			
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			19.570.000.000		-		-		-		19.464.962.000		19.464.962.000	100	99,46		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	39								39		39		100			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			53.149.352.950		13.149.180.000		4.873.906.600		13.656.646.400		19.709.150.828		51.388.883.828	69,66	96,69		
			Jumlah Sarana dan Prasaran Sekolah Menengah Pertama yang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20								1		1		5			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6				2				4		6		100			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	125								125		125		100			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1								1		1		100			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	7										0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5								5		5		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11								11		11		100			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150								31		31		20,67			
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	112				2		2		12		16		14,29			
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	109		52				52				104		95,41			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	100						29		31		60		60			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112				20		42		21		83		74,11			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2								2		2		100			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8643								6.515		6.515		75,38			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22								22		22		100			
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			264.000.000		-		-		-		263.798.000		263.798.000	5	99,92		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20								1		1		5			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			13.722.442.000		-		4.805.315.250		360.729.000		8.486.293.075		13.652.337.325	100	99,49		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6				2				4		6		100			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			4.950.000.000		-		-		-		4.921.846.000		4.921.846.000	100	99,43		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	125								125		125		100			
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			680.000.000		-		-		-		679.157.000		679.157.000	100	99,88		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1								1		1		100			
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	7										0		0			
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			180.000.000		-		-		-		179.830.000		179.830.000	100	99,91		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5								5		5		100			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.705.000.000		-		-		-		1.700.971.000		1.700.971.000	100	99,76		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11								11		11		100			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			173.994.550		-		-		-		35.680.550		35.680.550	20,67	20,51		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150								31		31		20,67			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			275.250.000		-		6.251.000		6.250.000		31.173.650		43.674.650	14,29	15,87		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	112				2		2		12		16		14,29			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			27.504.525.200		13.149.180.000		38.520.000		13.199.412.400		71.220.190		26.458.332.590	95,41	96,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	109		52				52				104		95,41			
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			145.000.000		-		-		42.075.000		43.585.580		85.660.580	60	59,08		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	100						29		31		60		60			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			129.825.200		-		23.820.350		48.180.000		23.250.533		95.250.883	74,11	73,37		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112				20		42		21		83		74,11			
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.093.500.000		-		-		-		1.092.505.000		1.092.505.000	100	99,91		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2								2		2		100			
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.585.816.000		-		-		-		1.440.470.250		1.440.470.250	75,38	90,83		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8643								6.515		6.515		75,38			
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			740.000.000		-		-		-		739.370.000		739.370.000	100	99,91		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22								22		22		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			11.762.222.645		3.208.200.000		28.614.000		3.321.078.000		3.231.408.195		9.789.300.195	68,13	83,23		
			Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang dikelola	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	400								304		304		76			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100				8		17		11		36		36			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	391		195				195		1		391		100			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200				12		79		84		175		87,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4								2		2		50			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3										0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2								2		2		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3								3		3		100			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	11								7		7		63,64			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			755.674.410		-		-		-		573.501.363		573.501.363	76	75,89		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	400								304		304		76			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			227.440.000		-		19.020.000		38.040.000		23.670.000		80.730.000	36	35,5		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100				8		17		11		36		36			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			6.456.000.000		3.208.200.000		-		3.203.500.000		8.250.000		6.419.950.000	100	99,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	391		195				195		1		391		100			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			151.716.110		-		9.594.000		59.660.000		63.604.843		132.858.843	87,5	87,57		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200				12		79		84		175		87,5			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			141.540.750		-		-		-		63.156.931		63.156.931	50	44,62		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4								2		2		50			
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			109.828.575		-		-		-		-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan			118.171.400		-		-		-		108.226.830		108.226.830	100	91,58		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2								2		2		100			
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			754.545.000		-		-		19.878.000		659.798.000		679.676.000	100	90,08		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3								3		3		100			
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			3.047.306.400		-		-		-		1.731.200.228		1.731.200.228	63,64	56,81		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	11								7		7		63,64			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.688.735.820		1.299.800.000		71.960.500		832.926.064		1.773.182.385		3.977.868.949	79,08	84,84		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	30								26		26		86,67			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	19								7		7		36,84			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	16		7				4				11		68,75			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	32				11		17				28		87,5			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5				1				4		5		100			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	114								108		108		94,74			
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			221.111.475		-		-		-		185.969.308		185.969.308	86,67	84,11		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	30								26		26		86,67			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			21.798.125		-		-		-		8.700.000		8.700.000	36,84	39,91		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	19								7		7		36,84			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			2.734.600.000		1.299.800.000		-		800.500.000		-		2.100.300.000	68,75	76,8		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	16		7				4				11		68,75			
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			63.579.220		-		21.145.000		32.426.064		-		53.571.064	87,5	84,26		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	32				11		17				28		87,5			
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.620.000.000		-		50.815.500		-		1.552.480.000		1.603.295.500	100	98,97		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5				1				4		5		100			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			27.647.000		-		-		-		26.033.077		26.033.077	94,74	94,16		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	114								108		108		94,74			
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**434.131.205**		**4.230.000**		**6.750.000**		**15.097.500**		**265.734.931**		291.812.431	**100**	**67,22**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal									38,77		38,77		0			
				Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen	45,13								38,77		38,77		85,91			
				Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk pendidikan	22,23								38,77		38,77		174,4			
				Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen	48,94								38,77		38,77		79,22			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			306.738.280		-		6.750.000		6.637.500		165.022.866		178.410.366	100	58,16		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1								1		1		100			
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1								1		1		100			
		1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			197.825.280		-		-		-		111.967.866		111.967.866	100	56,6		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1								1		1		100			
		1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			108.913.000		-		6.750.000		6.637.500		53.055.000		66.442.500	100	61,01		
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1								1		1		100			
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			127.392.925		4.230.000		-		8.460.000		100.712.065		113.402.065	100	89,02		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang	2								2		2		100			
		1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			127.392.925		4.230.000		-		8.460.000		100.712.065		113.402.065	100	89,02		
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang	2								2		2		100			
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**2.040.100.710**		**-**		**43.046.816**		**168.935.018**		**602.499.177**		814.481.011	**50**	**39,92**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatknya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)									97,98		97,98		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar (%)	97,31								97,98		97,98		100,69			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)									97,98		97,98		0			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.040.100.710		-		43.046.816		168.935.018		602.499.177		814.481.011	50	39,92		
			Jumlah Dokumen dan Laporan pemerataan tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Menengah, Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	2								2		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1		0		0		0		0		0			
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			781.375.560		-		24.868.060		34.095.000		500.456.500		559.419.560	100	71,59		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	2								2		2		100			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.258.725.150		-		18.178.756		134.840.018		102.042.677		255.061.451	0	20,26		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1		0		0		0		0		0			
		1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**89.907.795**		**-**		**6.480.000**		**12.195.000**		**38.217.281**		56.892.281	**0**	**63,28**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)									74,74		74,74		0			
				Persentase penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan masyarakat	100								74,74		74,74		74,74			
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			89.907.795		-		6.480.000		12.195.000		38.217.281		56.892.281	0	63,28		
			Jumlah Dokumen Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	10										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	0						1				1		0			
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			89.907.795		-		-		-		-		-	0	0		
			Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	10										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh			-		-		6.480.000		12.195.000		38.217.281		56.892.281	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	0						1				1		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**223.465.395.865**		**30.294.543.548**		**48.430.170.206**		**39.083.538.528**		**86.849.087.498**		204.657.339.780	**149,34**	**91,58**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**98.097.999.097**		**19.666.453.470**		**33.593.782.390**		**20.131.807.176**		**21.875.979.505**		95.268.022.541	**90,63**	**97,12**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.121.400		-		8.237.000		-		16.200.000		24.437.000	100	64,1		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		0		2		0		2		4		100			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.641.300		-		757.000		-		16.200.000		16.957.000	100	55,34		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.480.100		-		7.480.000		-		-		7.480.000	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		0		2		0		2		4		100			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95.419.375.416		19.666.453.470		33.348.006.281		19.963.593.646		20.517.859.657		93.495.913.054	100	97,98		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1340		1.340		13.340		1.340		1.340		1.340		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			94.431.524.702		19.666.453.470		33.076.605.281		19.914.283.646		19.931.796.017		92.589.138.414	100	98,05		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1340		1.340		13.340		1.340		1.340		1.340		100			
		1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			915.570.000		-		246.550.000		49.310.000		573.980.000		869.840.000	100	95,01		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58.908.900		-		17.799.900		-		5.763.000		23.562.900	100	40		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			13.371.814		-		7.051.100		-		6.320.640		13.371.740	100	100		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.653.500		-		3.699.650		-		4.999.600		8.699.250	100	49,28		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			17.653.500		-		3.699.650		-		4.999.600		8.699.250	100	49,28		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			304.540.405		-		27.688.132		-		197.343.702		225.031.834	62,5	73,89		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		0		1		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.898.370		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			194.420.550		-		-		-		166.777.500		166.777.500	100	85,78		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		3		3		100			
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.998.970		-		-		-		2.999.000		2.999.000	50	29,99		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		0		1		50			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			95.222.515		-		27.688.132		-		27.567.202		55.255.334	100	58,03		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545.978.376		-		206.151.327		114.493.530		197.712.880		518.357.737	100	94,94		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		3		4		5		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.578.376		-		76.948.577		37.099.030		48.905.880		162.953.487	100	92,81		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		3		4		5		12		100			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			370.400.000		-		129.202.750		77.394.500		148.807.000		355.404.250	100	95,95		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.772.330.000		-		-		53.720.000		941.863.666		995.583.666	100	56,17		
			Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		0		0		0		60		60		100			
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			208.830.000		-		-		53.720.000		104.843.696		158.563.696	100	75,93		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			31.000.000		-		-		-		4.919.740		4.919.740	100	15,87		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.532.500.000		-		-		-		832.100.230		832.100.230	100	54,3		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		0		0		0		60		60		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**41.518.652.264**		**-**		**7.301.500**		**53.430.000**		**36.186.875.324**		36.247.606.824	**77,65**	**87,3**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama [deleted] (%)	100		0		0		0		67		67		67			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		92,87		92,87		92,87			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			16.455.811.220		-		-		-		13.570.316.879		13.570.316.879	74,82	82,47		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	27		0		0		0		27		27		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4		0		0		0		4		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	98		0		0		24		24		24		24,49			
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke	137		0		34		34		68		136		99,27			
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			2.926.669.000		-		-		-		2.879.910.000		2.879.910.000	100	98,4		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	27		0		0		0		27		27		100			
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			1.551.236.750		-		-		-		1.551.236.750		1.551.236.750	100	100		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			1.834.744.750		-		-		-		1.745.784.050		1.745.784.050	100	95,15		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	4		0		0		0		4		4		100			
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			3.829.690.250		-		-		-		2.467.056.850		2.467.056.850	100	64,42		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	12		0		0		0		12		12		100			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas			6.186.728.870		-		-		-		4.854.003.629		4.854.003.629	24,49	78,46		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	98		0		0		24		24		24		24,49			
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			12.350.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke			114.391.600		-		-		-		72.325.600		72.325.600	99,27	63,23		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	137		0		34		34		68		136		99,27			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.974.351.044		-		5.640.000		53.430.000		22.586.008.445		22.645.078.445	81,41	90,67		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11614		2.792		1.718		3.195		2.623		10.328		88,93			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11564		1.877		2.293		2.402		2.166		8.738		75,56			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11519		1.868		2.279		2.395		2.178		8.720		75,7			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44710		13.528		11.685		12.504		8.100		45.817		102,48			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	102847		10.987		21.326		28.950		33.400		94.663		92,04			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414412		99.531		85.548		80.029		70.212		335.320		80,91			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77060		21.611		14.369		18.582		15.264		69.826		90,61			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137197		46.746		20.646		26.279		36.290		129.961		94,73			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	6347		1.620		1.722		1.167		1.606		6.115		96,34			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1122		226		446		234		136		1.042		92,87			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	8610		2.216		2.297		2.438		3.534		10.485		121,78			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	17213		1.184		1.309		4.840		1.142		8.475		49,24			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		0		1		1		2		4		33,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	468708		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	20		0		0		0		20		20		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	35		0		0		0		35		35		100			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	668		0		0		0		668		668		100			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	57		0		0		0		7		7		12,28			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		0		0		1		4		5		71,43			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			20.000.000		-		1.800.000		-		7.893.600		9.693.600	88,93	48,47		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11614		2.792		1.718		3.195		2.623		10.328		88,93			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			45.950.000		-		-		7.500.000		-		7.500.000	75,56	16,32		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11564		1.877		2.293		2.402		2.166		8.738		75,56			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			20.000.000		-		-		7.500.000		-		7.500.000	75,7	37,5		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11519		1.868		2.279		2.395		2.178		8.720		75,7			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			20.000.000		-		-		-		-		-	102,48	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44710		13.528		11.685		12.504		8.100		45.817		102,48			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20.000.000		-		-		-		8.100.000		8.100.000	92,04	40,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	102847		10.987		21.326		28.950		33.400		94.663		92,04			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			21.260.000		-		-		-		1.590.000		1.590.000	80,91	7,48		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414412		99.531		85.548		80.029		70.212		335.320		80,91			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			36.200.000		-		-		7.500.000		7.920.000		15.420.000	90,61	42,6		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77060		21.611		14.369		18.582		15.264		69.826		90,61			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			21.260.000		-		1.590.000		11.700.000		-		13.290.000	94,73	62,51		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	137197		46.746		20.646		26.279		36.290		129.961		94,73			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			21.260.000		-		-		12.150.000		-		12.150.000	96,34	57,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6347		1.620		1.722		1.167		1.606		6.115		96,34			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.260.000		-		-		-		10.650.000		10.650.000	92,87	50,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1122		226		446		234		136		1.042		92,87			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			45.770.330		-		-		-		-		-	121,78	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8610		2.216		2.297		2.438		3.534		10.485		121,78			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			25.000.000		-		-		-		1.520.000		1.520.000	49,24	6,08		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	17213		1.184		1.309		4.840		1.142		8.475		49,24			
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			10.380.000		-		-		-		1.800.000		1.800.000	100	17,34		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau			50.000.000		-		-		-		49.354.000		49.354.000	100	98,71		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			145.250.000		-		-		-		11.280.000		11.280.000	100	7,77		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			47.205.000		-		-		-		24.830.000		24.830.000	100	52,6		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.000.000		-		450.000		-		5.120.000		5.570.000	100	55,7		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			196.350.000		-		1.800.000		-		167.239.352		169.039.352	100	86,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			7.500.000		-		-		-		7.200.000		7.200.000	100	96		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			205.230.675		-		-		-		95.880.675		95.880.675	33,33	46,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		0		1		1		2		4		33,33			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			353.850.000		-		-		-		118.200.000		118.200.000	100	33,4		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		0		0		0		12		12		100			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			23.084.546.039		-		-		-		21.756.010.368		21.756.010.368	100	94,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	468708		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			23.030.000		-		-		-		22.043.150		22.043.150	100	95,71		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	20		0		0		0		20		20		100			
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			50.000.000		-		-		-		43.731.800		43.731.800	100	87,46		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			63.933.000		-		-		-		16.200.000		16.200.000	8,33	25,34		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-		4.650.000		4.650.000	100	23,25		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	35		0		0		0		35		35		100			
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			10.380.000		-		-		7.080.000		-		7.080.000	100	68,21		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			20.000.000		-		-		-		3.900.000		3.900.000	100	19,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	668		0		0		0		668		668		100			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			20.000.000		-		-		-		3.900.000		3.900.000	12,28	19,5		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	57		0		0		0		7		7		12,28			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			92.714.500		-		-		-		57.000.000		57.000.000	71,43	61,48		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		0		0		1		4		5		71,43			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			226.021.500		-		-		-		159.995.500		159.995.500	100	70,79		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			16.040.000		-		-		-		3.000.000		3.000.000	0	18,7		
			Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			16.040.000		-		-		-		3.000.000		3.000.000	0	18,7		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			72.450.000		-		1.661.500		-		27.550.000		29.211.500	25,48	40,32		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	12		0		2		1		3		6		50			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	105		0		0		0		1		1		0,95			
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			25.000.000		-		-		-		25.000.000		25.000.000	50	100		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	12		0		2		1		3		6		50			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			47.450.000		-		1.661.500		-		2.550.000		4.211.500	0,95	8,88		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	105		0		0		0		1		1		0,95			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1.407.746.200**		**-**		**62.000**		**24.861.000**		**719.645.670**		744.568.670	**92,39**	**52,89**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatn	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar [deleted] (%)	100		0		0		0		75		75		75			
				Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar (%)	100		0		0		0		75		75		75			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang			0		0		0		75		75		0			
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			6.385.600		-		62.000		4.500.000		1.823.600		6.385.600	100	100		
			Tersedianya Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			6.385.600		-		62.000		4.500.000		1.823.600		6.385.600	100	100		
			Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah			785.953.100		-		-		-		717.822.070		717.822.070	99,52	91,33		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	2029		0		500		500		1.000		2.000		98,57			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			35.070.280		-		-		-		15.989.250		15.989.250	100	45,59		
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			720.000.000		-		-		-		675.000.000		675.000.000	98,57	93,75		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	2029		0		500		500		1.000		2.000		98,57			
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			30.882.820		-		-		-		26.832.820		26.832.820	100	86,89		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			615.407.500		-		-		20.361.000		-		20.361.000	63,38	3,31		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	2029		0		0		643		643		1.286		63,38			
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			615.407.500		-		-		20.361.000		-		20.361.000	63,38	3,31		
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	2029		0		0		643		643		1.286		63,38			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**466.710.006**		-		**39.989.790**		-		**119.680.300**		159.670.090	**91,67**	**34,21**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi	100		0		0		0		100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			123.385.620		-		-		-		62.027.300		62.027.300	100	50,27		
			Tersedianya Dokumen Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional			123.385.620		-		-		-		62.027.300		62.027.300	100	50,27		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh			152.512.755		-		-		-		33.593.000		33.593.000	100	22,03		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi			152.512.755		-		-		-		33.593.000		33.593.000	100	22,03		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			15.000.000		-		8.520.000		-		4.500.000		13.020.000	100	86,8		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			15.000.000		-		8.520.000		-		4.500.000		13.020.000	100	86,8		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri			175.811.631		-		31.469.790		-		19.560.000		51.029.790	66,67	29,03		
			Tersedianya Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	30		0		10		0		10		20		66,67			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			175.811.631		-		31.469.790		-		19.560.000		51.029.790	66,67	29,03		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30		0		10		0		10		20		66,67			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**436.468.950**		**-**		**-**		**45.834.800**		**9.186.000**		55.020.800	**66,67**	**12,61**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah			29.238.950		-		-		-		9.186.000		9.186.000	100	31,42		
			Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			29.238.950		-		-		-		9.186.000		9.186.000	100	31,42		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.350.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			250.350.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			156.880.000		-		-		45.834.800		-		45.834.800	100	29,22		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			156.880.000		-		-		45.834.800		-		45.834.800	100	29,22		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.883.824.458**		**3.539.342.018**		**1.718.787.590**		**1.421.578.979**		**2.949.590.509**		9.629.299.096	**100**	**108,39**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM.	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.883.824.458		3.539.342.018		1.718.787.590		1.421.578.979		2.949.590.509		9.629.299.096	100	108,39		
			tersedianya dokumen peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8.883.824.458		3.539.342.018		1.718.787.590		1.421.578.979		2.949.590.509		9.629.299.096	100	108,39		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.268.806.327**		**279.696.412**		**509.429.318**		**12.000.000**		**1.248.178.376**		2.049.304.106	**100**	**32,69**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM.	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0		0		0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita													0			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			438.770.026		-		-		-		425.336.876		425.336.876	100	96,94		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	100		0		0		0		100		100		100			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			438.770.026		-		-		-		425.336.876		425.336.876	100	96,94		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	100		0		0		0		100		100		100			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.830.036.301		279.696.412		509.429.318		12.000.000		822.841.500		1.623.967.230	100	27,86		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			5.830.036.301		279.696.412		509.429.318		12.000.000		822.841.500		1.623.967.230	100	27,86		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.880.000.000**		**373.995.837**		**345.805.089**		**404.613.106**		**432.694.467**		1.557.108.499	**100**	**82,82**	PUSKESMAS KOTABUMI 1	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.880.000.000		373.995.837		345.805.089		404.613.106		432.694.467		1.557.108.499	100	82,82		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.880.000.000		373.995.837		345.805.089		404.613.106		432.694.467		1.557.108.499	100	82,82		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**998.859.000**		**-**		**169.005.500**		**133.243.553**		**195.637.712**		497.886.765	**56,73**	**49,85**	PUSKESMAS KOTABUMI 1	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100								81,6		81,6		81,6			
				Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan			0		0		0		13,4		13,4		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)													0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			998.859.000		-		169.005.500		133.243.553		195.637.712		497.886.765	56,73	49,85		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	757		171		175		184		189		719		94,98			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754		143		144		149		154		590		78,25			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2914		590		586		576		590		2.342		80,37			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	6702		0		563		661		658		1.882		28,08			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26766		661		630		760		780		2.831		10,58			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412		1.265		1.309		1.245		1.314		1.314		318,93			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8861		519		494		655		556		2.224		25,1			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	72		16		22		20		8		66		91,67			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	649		6		32		20		29		87		13,41			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	938		118		125		116		101		460		49,04			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		0		0		0		1		1		8,33			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	25671		16		22		20		8		66		0,26			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		3		3		3		2		11		91,67			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	649		6		32		20		29		87		13,41			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	938		118		125		116		101		460		49,04			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12										0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			174.300.000		-		60.295.000		44.295.000		59.115.000		163.705.000	94,98	93,92		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	757		171		175		184		189		719		94,98			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-		-		-		-		-		-	78,25	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754		143		144		149		154		590		78,25			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			10.000.000		-		-		-		-		-	80,37	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2914		590		586		576		590		2.342		80,37			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.000.000		-		3.040.000		6.365.000		6.840.000		16.245.000	28,08	85,5		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6702		0		563		661		658		1.882		28,08			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.000.000		-		-		-		-		-	10,58	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26766		661		630		760		780		2.831		10,58			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.000.000		-		-		-		-		-	318,93	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412		1.265		1.309		1.245		1.314		1.314		318,93			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000		-		-		-		-		-	25,1	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8861		519		494		655		556		2.224		25,1			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.120.000		-		3.800.000		2.280.000		2.280.000		8.360.000	91,67	43,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	72		16		22		20		8		66		91,67			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.450.000		-		3.420.000		-		7.030.000		10.450.000	13,41	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	649		6		32		20		29		87		13,41			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-		-		-		-		-	49,04	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	938		118		125		116		101		460		49,04			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			249.672.000		-		33.070.000		42.250.000		40.660.000		115.980.000	8,33	46,45		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			11.970.000		-		1.130.000		1.140.000		-		2.270.000	100	18,96		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			9.880.000		-		3.705.000		-		2.375.000		6.080.000	8,33	61,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			38.570.000		-		2.970.500		1.140.000		3.420.000		7.530.500	100	19,52		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		0		0		0		12		12		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			13.680.000		-		5.700.000		3.420.000		3.230.000		12.350.000	0,26	90,28		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25671		16		22		20		8		66		0,26			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			136.705.000		-		42.750.000		28.975.000		37.145.000		108.870.000	91,67	79,64		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		3		3		3		2		11		91,67			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			245.133.000		-		9.125.000		3.378.553		25.317.712		37.821.265	100	15,43		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.819.000		-		-		-		8.225.000		8.225.000	100	83,77		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		0		0		0		12		12		100			
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		-		-		-		-	13,41	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	649		6		32		20		29		87		13,41			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		-		-	49,04	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	938		118		125		116		101		460		49,04			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			8.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12										0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.040.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.120.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12										0		0			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**27.110.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	PUSKESMAS KOTABUMI 1	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			27.110.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12										0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			27.110.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12										0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.122.000.000**		**484.630.975**		**682.688.633**		**669.830.517**		**663.606.102**		2.500.756.227	**100**	**80,1**	PUSKESMAS KOTABUMI 2	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			3.122.000.000		484.630.975		682.688.633		669.830.517		663.606.102		2.500.756.227	100	80,1		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.122.000.000		484.630.975		682.688.633		669.830.517		663.606.102		2.500.756.227	100	80,1		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.088.708.000**		**10.023.956**		**187.173.416**		**228.330.252**		**414.125.915**		839.653.539	**86,75**	**77,12**	PUSKESMAS KOTABUMI 2	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.088.708.000		10.023.956		187.173.416		228.330.252		414.125.915		839.653.539	86,75	77,12		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	890		250		185		111		117		663		74,49			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	836		152		206		121		117		596		71,29			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89		150		203		123		138		138		155,06			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3108		804		560		570		502		2.436		78,38			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	7610		557		954		2.566		450		4.527		59,49			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29716		6.513		7.121		8.167		6.390		6.390		21,5			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4504		272		256		337		392		1.257		27,91			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10227		815		714		1.141		847		3.517		34,39			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	185		185		49		54		58		346		187,03			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	79		27		7		15		9		58		73,42			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	786		306		326		411		407		1.450		184,48			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1590		117		106		130		132		485		30,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	145		0		34		50		38		122		84,14			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	78										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			74.700.000		-		16.600.000		23.000.000		25.600.000		65.200.000	74,49	87,28		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	890		250		185		111		117		663		74,49			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			2.720.000		-		-		-		-		-	71,29	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	836		152		206		121		117		596		71,29			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			10.000.000		-		-		-		5.320.000		5.320.000	155,06	53,2		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89		150		203		123		138		138		155,06			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			10.000.000		-		-		-		6.080.000		6.080.000	78,38	60,8		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3108		804		560		570		502		2.436		78,38			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			42.750.000		-		13.585.000		1.425.000		22.230.000		37.240.000	59,49	87,11		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7610		557		954		2.566		450		4.527		59,49			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.000.000		-		-		-		5.035.000		5.035.000	21,5	50,35		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29716		6.513		7.121		8.167		6.390		6.390		21,5			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.000.000		-		-		-		9.975.000		9.975.000	27,91	99,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4504		272		256		337		392		1.257		27,91			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000		-		-		-		9.785.000		9.785.000	34,39	97,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10227		815		714		1.141		847		3.517		34,39			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.425.000		-		-		-		-		-	187,03	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	185		185		49		54		58		346		187,03			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		5.700.000		5.700.000		9.120.000		20.520.000	73,42	90		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	79		27		7		15		9		58		73,42			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.820.000		-		2.850.000		2.660.000		-		5.510.000	184,48	37,18		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	786		306		326		411		407		1.450		184,48			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			10.000.000		-		-		-		-		-	30,5	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1590		117		106		130		132		485		30,5			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			163.140.000		-		26.720.000		92.475.000		17.045.000		136.240.000	100	83,51		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			10.070.000		-		570.000		-		3.040.000		3.610.000	100	35,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			36.480.000		-		4.940.000		4.940.000		14.060.000		23.940.000	100	65,63		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.390.000		-		12.730.000		5.660.000		2.850.000		21.240.000	100	52,59		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			13.680.000		-		2.850.000		4.750.000		6.080.000		13.680.000	84,14	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	145		0		34		50		38		122		84,14			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			230.360.000		-		48.545.000		61.075.000		99.275.000		208.895.000	100	90,68		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			304.743.000		10.023.956		27.218.416		16.670.252		149.015.915		202.928.539	100	66,59		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			20.140.000		-		5.035.000		5.035.000		5.035.000		15.105.000	100	75		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			760.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	78										0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			30.920.000		-		15.270.000		380.000		15.270.000		30.920.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			570.000		-		-		-		190.000		190.000	100	33,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.240.000		-		4.560.000		4.560.000		9.120.000		18.240.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**840.117.671**		**155.734.079**		**155.689.058**		**233.507.866**		**288.797.172**		833.728.175	**100**	**99,24**	PUSKESMAS WONOGIRI	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			840.117.671		155.734.079		155.689.058		233.507.866		288.797.172		833.728.175	100	99,24		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			840.117.671		155.734.079		155.689.058		233.507.866		288.797.172		833.728.175	100	99,24		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**766.452.765**		**5.800.308**		**150.413.248**		**175.451.748**		**252.411.504**		584.076.808	**95,96**	**76,21**	PUSKESMAS WONOGIRI	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			766.452.765		5.800.308		150.413.248		175.451.748		252.411.504		584.076.808	95,96	76,21		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	413		50		56		103		107		316		76,51			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1454		0		1.454		0		1.454		2.908		200			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5257		0		3.653		3.653		3.653		10.959		208,46			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13895		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2153		0		0		0		1.076		1.076		49,98			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2153		0		0		0		538		538		24,99			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	13895		0		13.895		0		13.895		27.790		200			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	368		90		122		88		68		368		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	30		0		17		0		17		34		113,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	941		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			51.535.000		-		21.720.000		16.605.000		11.620.000		49.945.000	76,51	96,91		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413		50		56		103		107		316		76,51			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			24.700.000		-		-		-		11.875.000		11.875.000	200	48,08		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1454		0		1.454		0		1.454		2.908		200			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			63.840.000		-		10.640.000		10.640.000		15.200.000		36.480.000	208,46	57,14		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5257		0		3.653		3.653		3.653		10.959		208,46			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.830.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13895		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			11.970.000		-		-		-		5.320.000		5.320.000	49,98	44,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2153		0		0		0		1.076		1.076		49,98			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			20.900.000		-		-		-		7.030.000		7.030.000	24,99	33,64		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2153		0		0		0		538		538		24,99			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			8.550.000		-		5.700.000		-		2.850.000		8.550.000	200	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	13895		0		13.895		0		13.895		27.790		200			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			18.810.000		-		7.980.000		6.745.000		4.085.000		18.810.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	368		90		122		88		68		368		100			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			204.330.000		-		23.656.880		63.711.120		27.330.000		114.698.000	100	56,13		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6.840.000		-		3.420.000		3.420.000		-		6.840.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3.800.000		-		2.280.000		1.520.000		-		3.800.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.099.000		-		10.295.000		1.995.000		-		12.290.000	100	71,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.700.000		-		2.850.000		-		2.850.000		5.700.000	113,33	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	30		0		17		0		17		34		113,33			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			93.803.000		-		29.640.000		25.460.000		24.635.000		79.735.000	50	85		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			189.495.765		5.800.308		19.906.368		38.895.628		124.911.504		189.513.808	100	100,01		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	941		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			17.340.000		-		5.675.000		2.470.000		9.195.000		17.340.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		190.000		190.000	100	20		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.960.000		-		6.650.000		3.990.000		5.320.000		15.960.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			-		-		-		-		-		-	**0**	**0**	PUSKESMAS WONOGIRI	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.674.419.663**		**345.366.538**		**395.141.853**		**561.450.030**		**691.010.978**		1.992.969.399	**100**	**74,52**	PUSKESMAS MADUKORO	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.674.419.663		345.366.538		395.141.853		561.450.030		691.010.978		1.992.969.399	100	74,52		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.674.419.663		345.366.538		395.141.853		561.450.030		691.010.978		1.992.969.399	100	74,52		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.203.439.000**		**10.516.190**		**155.244.290**		**370.852.518**		**359.440.557**		896.053.555	**90,41**	**74,46**	PUSKESMAS MADUKORO	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		0		0		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.203.439.000		10.516.190		155.244.290		370.852.518		359.440.557		896.053.555	90,41	74,46		
			Tersedianya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	610		95		113		90		89		387		63,44			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578		96		113		90		89		388		67,13			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0		96		112		92		86		386		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2148		699		713		700		673		2.785		129,66			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5257		0		0		5.036		605		5.641		107,3			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20529		2.753		3.871		2.918		3.121		12.663		61,68			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3181		1.538		1.248		474		593		593		18,64			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7065		734		668		754		684		684		9,68			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	327		150		60		59		57		326		99,69			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	55		25		11		8		12		56		101,82			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	543		149		85		157		131		131		24,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		1		0		1		2		200			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		1		0		1		2		200			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	855		0		200		186		255		641		74,97			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83.415.000		-		13.280.000		47.725.000		22.410.000		83.415.000	63,44	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610		95		113		90		89		387		63,44			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			8.260.000		-		-		-		-		-	67,13	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578		96		113		90		89		388		67,13			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			3.800.000		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0		96		112		92		86		386		0			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			11.970.000		-		-		-		7.030.000		7.030.000	129,66	58,73		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2148		699		713		700		673		2.785		129,66			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.850.000		-		6.650.000		21.375.000		12.825.000		40.850.000	107,3	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5257		0		0		5.036		605		5.641		107,3			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			21.025.000		-		-		-		4.940.000		4.940.000	61,68	23,5		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20529		2.753		3.871		2.918		3.121		12.663		61,68			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			24.320.000		-		-		-		20.520.000		20.520.000	18,64	84,38		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3181		1.538		1.248		474		593		593		18,64			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			15.200.000		-		-		-		-		-	9,68	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7065		734		668		754		684		684		9,68			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			15.200.000		-		-		-		9.120.000		9.120.000	99,69	60		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	327		150		60		59		57		326		99,69			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		7.220.000		10.450.000		5.130.000		22.800.000	101,82	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	55		25		11		8		12		56		101,82			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			30.400.000		-		9.500.000		10.830.000		8.455.000		28.785.000	24,13	94,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	543		149		85		157		131		131		24,13			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			274.907.000		-		16.730.000		143.430.000		60.630.000		220.790.000	200	80,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		1		0		1		2		200			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			10.830.000		-		570.000		760.000		1.520.000		2.850.000	100	26,32		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.570.000		-		7.220.000		8.930.000		3.420.000		19.570.000	200	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		1		0		1		2		200			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			22.895.000		-		4.560.000		760.000		285.000		5.605.000	100	24,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			29.260.000		-		9.690.000		9.500.000		5.510.000		24.700.000	74,97	84,42		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	855		0		200		186		255		641		74,97			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			202.160.000		-		46.865.000		56.145.000		51.920.000		154.930.000	50	76,64		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			333.977.000		10.516.190		22.484.290		48.407.518		140.025.557		221.433.555	100	66,3		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			25.950.000		-		7.435.000		9.500.000		5.700.000		22.635.000	100	87,23		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			570.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.080.000		-		3.040.000		3.040.000		-		6.080.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**100**	**0**	PUSKESMAS MADUKORO	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksnaaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.318.463.751**		**394.668.949**		**375.864.670**		**552.100.796**		**423.975.050**		1.746.609.465	**100**	**75,33**	PUSKESMAS KALIBALANGAN	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.318.463.751		394.668.949		375.864.670		552.100.796		423.975.050		1.746.609.465	100	75,33		
			Tersedianya Dokumen peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.318.463.751		394.668.949		375.864.670		552.100.796		423.975.050		1.746.609.465	100	75,33		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.037.357.000**		**9.000.000**		**174.079.500**		**278.596.844**		**343.037.095**		804.713.439	**91,1**	**77,57**	PUSKESMAS KALIBALANGAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita									54		54		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.037.357.000		9.000.000		174.079.500		278.596.844		343.037.095		804.713.439	91,1	77,57		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597		126		127		134		123		510		85,43			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2103		653		693		636		502		2.484		118,12			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5147		0		0		0		5.152		5.152		100,1			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20099		4.862		4.724		4.642		3.616		17.844		88,78			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3114		864		636		610		1.297		3.407		109,41			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6640		1.638		1.607		1.501		1.117		5.863		88,3			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	54		22		14		13		10		59		109,26			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	532		173		120		65		170		528		99,25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	0		22		14		13		10		59		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1123		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			85.080.000		-		18.900.000		46.260.000		21.720.000		86.880.000	85,43	102,12		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597		126		127		134		123		510		85,43			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			25.200.000		-		-		-		11.020.000		11.020.000	118,12	43,73		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2103		653		693		636		502		2.484		118,12			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			31.350.000		-		-		-		10.640.000		10.640.000	100,1	33,94		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5147		0		0		0		5.152		5.152		100,1			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			11.400.000		-		-		-		-		-	88,78	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20099		4.862		4.724		4.642		3.616		17.844		88,78			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			-		-		-		-		-		-	109,41	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3114		864		636		610		1.297		3.407		109,41			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			11.400.000		-		-		-		-		-	88,3	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6640		1.638		1.607		1.501		1.117		5.863		88,3			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		7.600.000		3.800.000		11.400.000		22.800.000	109,26	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	54		22		14		13		10		59		109,26			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			39.710.000		-		13.300.000		-		26.410.000		39.710.000	99,25	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	532		173		120		65		170		528		99,25			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			166.438.000		-		17.539.000		102.579.000		39.870.000		159.988.000	100	96,12		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			48.263.000		-		8.170.000		4.940.000		13.300.000		26.410.000	100	54,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			41.230.000		-		8.835.000		8.971.000		10.516.000		28.322.000	100	68,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			53.210.000		-		24.801.500		4.560.000		23.373.500		52.735.000	100	99,11		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			26.790.000		-		-		-		26.790.000		26.790.000	0	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		22		14		13		10		59		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			183.340.000		-		66.250.000		44.850.000		55.100.000		166.200.000	50	90,65		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			253.696.000		9.000.000		8.684.000		50.836.844		74.847.595		143.368.439	100	56,51		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			5.700.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1123		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			8.000.000		-		-		4.200.000		1.900.000		6.100.000	100	76,25		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		950.000		950.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			22.800.000		-		-		7.600.000		15.200.000		22.800.000	0	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0		0		0		0		1		1		0			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.320.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**100**	**0**	PUSKESMAS KALIBALANGAN	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			5.320.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1								1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			5.320.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1								1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.188.000.000**		**222.987.686**		**221.298.412**		**298.966.097**		**249.189.080**		992.441.275	**100**	**83,54**	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.188.000.000		222.987.686		221.298.412		298.966.097		249.189.080		992.441.275	100	83,54		
			Tersedia Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.188.000.000		222.987.686		221.298.412		298.966.097		249.189.080		992.441.275	100	83,54		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**985.794.000**		**5.872.524**		**99.257.832**		**313.037.948**		**420.281.579**		838.449.883	**100**	**85,05**	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			985.794.000		5.872.524		99.257.832		313.037.948		420.281.579		838.449.883	100	85,05		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	350		88		87		87		88		350		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)																
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	3017		755		754		754		754		3.017		100			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11780		2.945		2.945		2.945		2.945		11.780		100			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1825		457		456		456		456		1.825		100			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4054		1.014		1.013		1.013		1.014		4.054		100			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	31		8		7		7		9		31		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	312		78		78		78		78		312		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	40		10		10		10		10		40		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.140.000		-		19.810.000		22.890.000		27.440.000		70.140.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350		88		87		87		88		350		100			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.000.000		-		-		9.500.000		9.500.000		19.000.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3017		755		754		754		754		3.017		100			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			17.100.000		-		-		-		3.990.000		3.990.000	100	23,33		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11780		2.945		2.945		2.945		2.945		11.780		100			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			19.565.000		-		-		-		12.540.000		12.540.000	100	64,09		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1825		457		456		456		456		1.825		100			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			16.335.000		-		-		-		7.980.000		7.980.000	100	48,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4054		1.014		1.013		1.013		1.014		4.054		100			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		-		7.600.000		15.200.000		22.800.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	31		8		7		7		9		31		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			51.680.000		-		-		13.870.000		36.100.000		49.970.000	100	96,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	312		78		78		78		78		312		100			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			227.262.000		-		9.642.000		167.109.000		23.010.000		199.761.000	100	87,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			7.600.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			31.160.000		-		-		8.170.000		16.435.000		24.605.000	100	78,96		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.905.000		-		-		6.365.000		4.655.000		11.020.000	100	58,29		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.700.000		-		-		-		5.700.000		5.700.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	40		10		10		10		10		40		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			183.540.000		-		19.000.000		43.912.000		108.906.000		171.818.000	100	93,61		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			268.047.000		5.872.524		45.485.832		29.631.948		134.195.579		215.185.883	100	80,28		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			10.050.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		380.000		380.000	100	40		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.960.000		-		5.320.000		3.990.000		6.650.000		15.960.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**12.760.000**		**-**		**-**		**12.760.000**		**-**		12.760.000	**100**	**100**	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			12.760.000		-		-		12.760.000		-		12.760.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			12.760.000		-		-		12.760.000		-		12.760.000	100	100		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.707.545.702**		**342.214.855**		**314.005.166**		**315.658.805**		**401.946.838**		1.373.825.664	**100**	**80,46**	PUSKESMAS BUMI AGUNG	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		65		65		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.707.545.702		342.214.855		314.005.166		315.658.805		401.946.838		1.373.825.664	100	80,46		
			Tersedianya Dokumen peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.707.545.702		342.214.855		314.005.166		315.658.805		401.946.838		1.373.825.664	100	80,46		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.170.729.000**		**1.995.564**		**229.343.372**		**440.361.851**		**397.692.309**		1.069.393.096	**86,07**	**91,34**	PUSKESMAS BUMI AGUNG	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		28		28		0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.170.729.000		1.995.564		229.343.372		440.361.851		397.692.309		1.069.393.096	86,07	91,34		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683		126		125		136		142		529		77,45			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673		96		107		112		144		459		68,2			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	646		96		109		112		145		462		71,52			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2405		408		647		838		468		2.361		98,17			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5886		0		0		5.886		0		5.886		100			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22892		2.250		4.641		4.168		3.957		15.016		65,59			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4256		0		1.053		1.799		1.145		3.997		93,91			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7909		570		1.264		2.028		1.572		5.434		68,71			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	371		51		137		70		71		329		88,68			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	61		21		19		8		11		59		96,72			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	608		33		27		92		78		230		37,83			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	838		66		47		221		100		434		51,79			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	32		10		10		10		10		40		125			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			77.490.000		-		30.540.000		24.615.000		22.335.000		77.490.000	77,45	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683		126		125		136		142		529		77,45			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3.990.000		-		-		-		3.990.000		3.990.000	68,2	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673		96		107		112		144		459		68,2			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			12.540.000		-		-		-		4.560.000		4.560.000	71,52	36,36		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	646		96		109		112		145		462		71,52			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			7.980.000		-		-		-		7.980.000		7.980.000	98,17	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2405		408		647		838		468		2.361		98,17			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.700.000		-		-		21.850.000		21.850.000		43.700.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5886		0		0		5.886		0		5.886		100			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			8.890.000		-		-		-		-		-	65,59	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22892		2.250		4.641		4.168		3.957		15.016		65,59			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			9.120.000		-		-		-		-		-	93,91	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4256		0		1.053		1.799		1.145		3.997		93,91			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			9.500.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	68,71	80		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7909		570		1.264		2.028		1.572		5.434		68,71			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			11.970.000		-		-		-		-		-	88,68	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	371		51		137		70		71		329		88,68			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			37.700.000		-		12.540.000		12.540.000		12.540.000		37.620.000	96,72	99,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	61		21		19		8		11		59		96,72			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			31.160.000		-		12.350.000		7.790.000		11.020.000		31.160.000	37,83	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	608		33		27		92		78		230		37,83			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			120.000		-		-		-		-		-	51,79	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	838		66		47		221		100		434		51,79			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			271.155.000		-		120.185.000		134.535.000		11.400.000		266.120.000	100	98,14		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			16.720.000		-		8.360.000		-		8.360.000		16.720.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.710.000		-		7.315.000		7.315.000		6.080.000		20.710.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.835.000		-		2.280.000		8.490.000		6.840.000		17.610.000	100	73,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.040.000		-		-		1.520.000		1.520.000		3.040.000	125	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	32		10		10		10		10		40		125			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			244.920.000		-		-		160.180.000		72.960.000		233.140.000	50	95,19		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			277.669.000		1.995.564		12.973.372		47.846.851		180.417.309		243.233.096	100	87,6		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.280.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			27.360.000		-		11.400.000		6.840.000		9.120.000		27.360.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.520.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			27.360.000		-		11.400.000		6.840.000		9.120.000		27.360.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.650.000**		**-**		**-**		**-**		**20.850.000**		20.850.000	**100**	**84,58**	PUSKESMAS BUMI AGUNG	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			24.650.000		-		-		-		20.850.000		20.850.000	100	84,58		
			tersedianya Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			24.650.000		-		-		-		20.850.000		20.850.000	100	84,58		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.705.768.445**		**368.077.944**		**2.310.170.942**		**3.880.366.580**		**5.330.366.432**		11.888.981.898	**100**	**696,99**	PUSKESMAS KETAPANG	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.705.768.445		368.077.944		2.310.170.942		3.880.366.580		5.330.366.432		11.888.981.898	100	696,99		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedia Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.705.768.445		368.077.944		2.310.170.942		3.880.366.580		5.330.366.432		11.888.981.898	100	696,99		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**930.511.000**		**1.354.800**		**172.383.400**		**216.853.200**		**368.569.984**		759.161.384	**83,25**	**81,59**	PUSKESMAS KETAPANG	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73												0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan [deleted]	100		23		46		69,5		89,9		228,4		228,4			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		100		100		105,26			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		24,9		49,8		73,3		92,4		240,4		240,4			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		100		100		105,26			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			930.511.000		1.354.800		172.383.400		216.853.200		368.569.984		759.161.384	83,25	81,59		
			Tersedianya dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2730		108		216		336		438		1.098		40,22			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425		58		31		174		164		427		100,47			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136		34		34		34		34		136		100			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	224		50		56		61		57		224		100			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15097		3.774		3.774		3.774		3.775		15.097		100			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66		16		18		15		17		66		100			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5325		1.404		2.980		4.121		4.817		4.817		90,46			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	40		10		10		10		10		40		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	184		43		39		52		50		184		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	516		120		131		135		132		518		100,39			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	36		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	185		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			124.150.000		-		45.370.000		25.610.000		53.107.000		124.087.000	40,22	99,95		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2730		108		216		336		438		1.098		40,22			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-		-		-		-		-		-	100,47	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425		58		31		174		164		427		100,47			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			12.540.000		-		-		-		12.540.000		12.540.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136		34		34		34		34		136		100			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			21.280.000		-		7.790.000		13.490.000		-		21.280.000	100	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	224		50		56		61		57		224		100			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15097		3.774		3.774		3.774		3.775		15.097		100			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			6.270.000		-		-		-		6.270.000		6.270.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66		16		18		15		17		66		100			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.315.000		-		-		-		-		-	90,46	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5325		1.404		2.980		4.121		4.817		4.817		90,46			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.400.000		-		3.800.000		-		7.600.000		11.400.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	40		10		10		10		10		40		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			17.480.000		-		8.265.000		5.700.000		3.515.000		17.480.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	184		43		39		52		50		184		100			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-		-		-		-		-	100,39	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	516		120		131		135		132		518		100,39			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			292.690.000		-		48.165.000		122.480.000		46.550.000		217.195.000	100	74,21		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.995.000		-		-		950.000		-		950.000	100	47,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.140.000		-		8.930.000		1.710.000		7.220.000		17.860.000	100	88,68		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.080.000		-		950.000		-		5.130.000		6.080.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.420.000		-		-		-		3.420.000		3.420.000	0	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	36		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			88.883.000		-		23.750.000		20.710.000		30.210.000		74.670.000	100	84,01		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			293.308.000		1.354.800		21.183.400		22.403.200		181.987.984		226.929.384	100	77,37		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	185		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			4.560.000		-		-		1.520.000		2.090.000		3.610.000	100	79,17		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.800.000		-		-		190.000		-		190.000	100	5		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.200.000		-		4.180.000		2.090.000		8.930.000		15.200.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	PUSKESMAS KETAPANG	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.118.909.075**		**349.323.506**		**427.994.282**		**558.345.487**		**779.726.267**		2.115.389.542	**100**	**99,83**	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.118.909.075		349.323.506		427.994.282		558.345.487		779.726.267		2.115.389.542	100	99,83		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.118.909.075		349.323.506		427.994.282		558.345.487		779.726.267		2.115.389.542	100	99,83		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**688.189.000**		**6.995.600**		**123.560.784**		**154.704.364**		**204.367.192**		489.627.940	**112,07**	**71,15**	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama [deleted] (%)	100												0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		53,8		53,8		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			688.189.000		6.995.600		123.560.784		154.704.364		204.367.192		489.627.940	112,07	71,15		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490		167		415		775		1.161		2.518		513,88			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1617		426		415		453		437		1.731		107,05			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	873		0		0		3.022		0		3.022		346,16			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15661		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	42		7		7		7		6		27		64,29			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	387		19		8		10		47		84		21,71			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	18		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			69.720.000		-		17.220.000		22.620.000		24.900.000		64.740.000	513,88	92,86		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490		167		415		775		1.161		2.518		513,88			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			16.910.000		-		-		-		-		-	107,05	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1617		426		415		453		437		1.731		107,05			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			30.780.000		-		6.650.000		6.840.000		16.720.000		30.210.000	346,16	98,15		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	873		0		0		3.022		0		3.022		346,16			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			950.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15661		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			4.940.000		-		-		-		6.840.000		6.840.000	64,29	138,46		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	42		7		7		7		6		27		64,29			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.505.000		-		3.800.000		1.900.000		1.805.000		7.505.000	21,71	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	387		19		8		10		47		84		21,71			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			172.522.000		-		33.688.000		76.272.000		59.602.000		169.562.000	100	98,28		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.035.000		-		-		-		5.035.000		5.035.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.560.000		-		1.520.000		1.520.000		1.520.000		4.560.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.290.000		-		6.175.000		1.520.000		3.040.000		10.735.000	100	62,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	18		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			127.015.000		-		28.880.000		36.484.000		52.497.000		117.861.000	20	92,79		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5		0		0		0		1		1		20			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			214.432.000		6.995.600		19.927.784		6.028.364		27.278.192		60.229.940	100	28,09		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.280.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		950.000		950.000	20	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		0		0		0		1		1		20			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			11.400.000		-		5.700.000		1.520.000		4.180.000		11.400.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.994.319.718**		**342.939.763**		**582.589.170**		**452.386.913**		**1.014.178.555**		2.392.094.401	**100**	**79,89**	PUSKESMAS NEGARA RATU	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.994.319.718		342.939.763		582.589.170		452.386.913		1.014.178.555		2.392.094.401	100	79,89		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.994.319.718		342.939.763		582.589.170		452.386.913		1.014.178.555		2.392.094.401	100	79,89		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**979.100.000**		**6.946.000**		**129.862.100**		**281.341.009**		**265.330.128**		683.479.237	**278,88**	**69,81**	PUSKESMAS NEGARA RATU	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		0		0		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				15. Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan	74		0		0		0		37,66		37,66		50,89			
				1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			979.100.000		6.946.000		129.862.100		281.341.009		265.330.128		683.479.237	278,88	69,81		
			Tersedianya dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	656		101		96		117		148		462		70,43			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621		98		100		117		111		426		68,6			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		98		102		114		111		425		33,2			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		5.740		5.878		6.014		5.999		23.631		1846,17			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5654		970		1.369		2.581		860		860		15,21			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		4.398		4.895		5.909		7.073		22.275		1740,23			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		1.295		1.384		1.765		1.080		5.524		431,56			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		1.887		2.771		2.642		399		7.699		601,48			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1280		74		73		92		105		344		26,88			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1280		145		166		178		184		673		52,58			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	590		99		86		126		117		428		72,54			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1280		81		70		96		361		608		47,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			107.070.000		-		21.995.000		49.385.000		35.690.000		107.070.000	70,43	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	656		101		96		117		148		462		70,43			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			7.750.000		-		-		-		5.700.000		5.700.000	68,6	73,55		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621		98		100		117		111		426		68,6			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			7.750.000		196.000		-		-		3.895.000		4.091.000	33,2	52,79		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		98		102		114		111		425		33,2			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			7.750.000		-		-		-		6.080.000		6.080.000	1846,17	78,45		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		5.740		5.878		6.014		5.999		23.631		1846,17			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.175.000		-		-		7.600.000		16.625.000		24.225.000	15,21	96,23		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5654		970		1.369		2.581		860		860		15,21			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			7.750.000		-		-		-		1.900.000		1.900.000	1740,23	24,52		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		4.398		4.895		5.909		7.073		22.275		1740,23			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			7.750.000		-		-		-		1.520.000		1.520.000	431,56	19,61		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280		1.295		1.384		1.765		1.080		5.524		431,56			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.750.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	601,48	98,06		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1280		1.887		2.771		2.642		399		7.699		601,48			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			7.750.000		-		-		-		-		-	26,88	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1280		74		73		92		105		344		26,88			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		5.700.000		14.250.000		2.850.000		22.800.000	52,58	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1280		145		166		178		184		673		52,58			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			36.860.000		-		6.270.000		16.340.000		14.250.000		36.860.000	72,54	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	590		99		86		126		117		428		72,54			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.750.000		-		-		-		-		-	47,5	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1280		81		70		96		361		608		47,5			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			252.178.000		-		21.282.000		62.629.000		17.071.000		100.982.000	100	40,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			15.580.000		-		-		6.270.000		-		6.270.000	100	40,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.430.000		-		10.830.000		3.800.000		3.800.000		18.430.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.640.000		-		1.520.000		-		2.850.000		4.370.000	100	41,07		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			114.380.000		-		21.470.000		55.765.000		33.250.000		110.485.000	50	96,59		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			265.727.000		6.750.000		32.245.100		38.892.009		100.849.128		178.736.237	100	67,26		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			12.160.000		-		-		12.160.000		-		12.160.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.900.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			34.200.000		-		8.550.000		14.250.000		11.400.000		34.200.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**816.609.849**		**142.525.860**		**88.221.323**		**206.303.982**		**204.018.330**		641.069.495	**100**	**78,5**	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		65		65		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			816.609.849		142.525.860		88.221.323		206.303.982		204.018.330		641.069.495	100	78,5		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			816.609.849		142.525.860		88.221.323		206.303.982		204.018.330		641.069.495	100	78,5		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**788.552.000**		**15.272.800**		**99.287.100**		**218.734.040**		**297.667.293**		630.961.233	**52,13**	**80,02**	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		73		73		100			
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73												0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama (%)	100												0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95												0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			788.552.000		15.272.800		99.287.100		218.734.040		297.667.293		630.961.233	52,13	80,02		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275		9		10		10		10		39		14,18			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274		28		39		39		39		145		52,92			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1060		83		125		125		125		458		43,21			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2439		84		84		84		84		336		13,78			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9740		763		970		970		970		3.673		37,71			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1735		64		242		242		242		790		45,53			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125		121		141		141		141		544		48,36			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1125		52		67		67		67		253		22,49			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	26		5		7		7		7		26		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	236		7		11		11		11		40		16,95			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	341		27		45		45		45		162		47,51			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	25										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.200.000		8.250.000		20.600.000		12.450.000		28.900.000		70.200.000	14,18	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275		9		10		10		10		39		14,18			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-		-		-		-		-		-	52,92	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274		28		39		39		39		145		52,92			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			17.765.000		-		-		9.310.000		-		9.310.000	43,21	52,41		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1060		83		125		125		125		458		43,21			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			32.300.000		-		4.750.000		14.250.000		5.130.000		24.130.000	13,78	74,71		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2439		84		84		84		84		336		13,78			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			11.976.000		-		950.000		2.120.000		3.260.000		6.330.000	37,71	52,86		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9740		763		970		970		970		3.673		37,71			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			14.630.000		-		-		-		1.330.000		1.330.000	45,53	9,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1735		64		242		242		242		790		45,53			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			950.000		-		-		-		-		-	48,36	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1125		121		141		141		141		544		48,36			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.265.000		-		-		-		-		-	22,49	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1125		52		67		67		67		253		22,49			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.400.000		-		4.750.000		3.800.000		2.850.000		11.400.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	26		5		7		7		7		26		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			15.675.000		-		3.800.000		6.840.000		2.185.000		12.825.000	16,95	81,82		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	236		7		11		11		11		40		16,95			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-		-		-		-		-	47,51	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	341		27		45		45		45		162		47,51			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			218.010.000		-		13.280.000		110.247.000		86.849.000		210.376.000	100	96,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			8.550.000		-		-		2.660.000		5.890.000		8.550.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.725.000		-		950.000		3.800.000		1.900.000		6.650.000	100	45,16		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.720.000		-		570.000		-		950.000		1.520.000	100	14,18		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			9.120.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25										0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			127.315.000		3.705.000		20.900.000		42.115.000		54.525.000		121.245.000	100	95,23		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			212.741.000		3.317.800		28.737.100		11.142.040		103.898.293		147.095.233	100	69,14		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			1.140.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0										0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.120.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**100**	**0**	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.804.428.254**		**76.311.421**		**197.275.402**		**196.540.396**		**285.056.282**		755.183.501	**100**	**41,85**	PUSKESMAS OGAN LIMA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.804.428.254		76.311.421		197.275.402		196.540.396		285.056.282		755.183.501	100	41,85		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.804.428.254		76.311.421		197.275.402		196.540.396		285.056.282		755.183.501	100	41,85		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**834.393.000**		**29.138.000**		**156.194.000**		**162.010.000**		**155.370.509**		502.712.509	**72,31**	**60,25**	PUSKESMAS OGAN LIMA	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0		0		0		0		0		0		0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.393.000		29.138.000		156.194.000		162.010.000		155.370.509		502.712.509	72,31	60,25		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	376		49		53		40		55		197		52,39			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	356		48		53		44		55		200		56,18			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	342		48		53		44		55		200		58,48			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1324		325		320		324		173		1.142		86,25			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	3240		115		166		558		1.974		2.813		86,82			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12652		707		1.810		2.263		1.853		6.633		52,43			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1960		497		346		409		176		1.428		72,86			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4354		501		1.245		1.672		1.311		4.729		108,61			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4354		43		25		27		19		114		2,62			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	34		34		1		0		1		36		105,88			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	335		51		75		31		92		249		74,33			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	677		80		82		97		121		380		56,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	528		0		0		0		1		1		0,19			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			76.020.000		-		25.340.000		25.340.000		25.340.000		76.020.000	52,39	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376		49		53		40		55		197		52,39			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			7.600.000		-		-		-		-		-	56,18	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	356		48		53		44		55		200		56,18			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			9.120.000		-		-		-		-		-	58,48	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	342		48		53		44		55		200		58,48			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			8.170.000		-		-		-		-		-	86,25	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1324		325		320		324		173		1.142		86,25			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			12.825.000		-		-		12.825.000		-		12.825.000	86,82	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3240		115		166		558		1.974		2.813		86,82			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			8.630.000		-		-		-		-		-	52,43	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12652		707		1.810		2.263		1.853		6.633		52,43			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			15.200.000		-		-		-		-		-	72,86	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1960		497		346		409		176		1.428		72,86			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			11.400.000		-		-		-		-		-	108,61	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4354		501		1.245		1.672		1.311		4.729		108,61			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			11.400.000		-		-		-		-		-	2,62	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4354		43		25		27		19		114		2,62			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			5.320.000		-		2.660.000		-		2.660.000		5.320.000	105,88	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	34		34		1		0		1		36		105,88			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.640.000		-		1.710.000		3.040.000		5.890.000		10.640.000	74,33	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	335		51		75		31		92		249		74,33			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.980.000		-		-		-		-		-	56,13	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	677		80		82		97		121		380		56,13			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			183.958.000		29.138.000		55.760.000		65.070.000		-		149.968.000	100	81,52		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.130.000		-		5.130.000		-		-		5.130.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.040.000		-		4.940.000		3.990.000		9.500.000		18.430.000	100	83,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			27.045.000		-		15.580.000		-		-		15.580.000	100	57,61		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.600.000		-		-		3.800.000		3.800.000		7.600.000	0,19	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	528		0		0		0		1		1		0,19			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			128.660.000		-		19.548.000		22.778.000		45.030.000		87.356.000	50	67,9		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			220.140.000		-		8.192.000		8.213.000		46.196.509		62.601.509	100	28,44		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			2.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			34.995.000		-		11.634.000		11.634.000		11.634.000		34.902.000	100	99,73		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.900.000		-		380.000		-		-		380.000	100	20		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.960.000		-		5.320.000		5.320.000		5.320.000		15.960.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.797.644.256**		**401.241.408**		**183.965.035**		**624.351.021**		**978.440.079**		2.187.997.543	**100**	**78,21**	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.797.644.256		401.241.408		183.965.035		624.351.021		978.440.079		2.187.997.543	100	78,21		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.797.644.256		401.241.408		183.965.035		624.351.021		978.440.079		2.187.997.543	100	78,21		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.064.901.000**		**7.500.000**		**217.002.000**		**384.656.000**		**350.099.923**		959.257.923	**81,95**	**90,08**	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		0		0		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100		0		0		0		66,7		66,7		66,7			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.064.901.000		7.500.000		217.002.000		384.656.000		350.099.923		959.257.923	81,95	90,08		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	605		115		125		112		121		473		78,18			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573		84		122		102		90		398		69,46			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575		84		122		102		90		398		69,22			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2129		230		590		654		632		2.106		98,92			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5212		0		0		1.860		1.826		3.686		70,72			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20353		1.240		1.620		2.268		2.035		7.163		35,19			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3153		921		872		564		507		2.864		90,83			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1361		362		337		351		311		1.361		100			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	324		55		40		34		69		198		61,11			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	54		13		12		12		13		50		92,59			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	544		40		50		28		27		145		26,65			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1089		115		127		112		148		502		46,1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			149.150.000		-		59.660.000		59.660.000		29.830.000		149.150.000	78,18	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	605		115		125		112		121		473		78,18			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			17.304.400		-		-		-		9.975.000		9.975.000	69,46	57,64		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573		84		122		102		90		398		69,46			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			5.415.000		-		-		-		1.805.000		1.805.000	69,22	33,33		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575		84		122		102		90		398		69,22			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			9.595.000		-		-		-		9.405.000		9.405.000	98,92	98,02		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2129		230		590		654		632		2.106		98,92			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.325.000		-		-		22.325.000		-		22.325.000	70,72	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5212		0		0		1.860		1.826		3.686		70,72			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			9.975.000		-		-		-		9.975.000		9.975.000	35,19	100		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20353		1.240		1.620		2.268		2.035		7.163		35,19			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.830.000		-		-		-		10.830.000		10.830.000	90,83	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3153		921		872		564		507		2.864		90,83			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			14.440.000		-		-		-		14.440.000		14.440.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1361		362		337		351		311		1.361		100			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.805.000		-		-		-		1.805.000		1.805.000	61,11	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	324		55		40		34		69		198		61,11			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.050.000		-		-		10.830.000		7.220.000		18.050.000	92,59	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	54		13		12		12		13		50		92,59			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			19.665.000		-		4.180.000		13.680.000		-		17.860.000	26,65	90,82		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	544		40		50		28		27		145		26,65			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.610.000		-		-		-		-		-	46,1	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1089		115		127		112		148		502		46,1			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			198.744.000		-		70.395.000		95.790.000		3.610.000		169.795.000	100	85,43		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			11.400.000		-		5.700.000		5.700.000		-		11.400.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			23.465.000		-		7.220.000		10.830.000		-		18.050.000	100	76,92		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			26.220.000		-		7.220.000		6.270.000		3.610.000		17.100.000	100	65,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			236.930.000		-		49.020.000		105.715.000		68.859.000		223.594.000	100	94,37		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			281.417.600		7.500.000		13.322.000		50.246.000		178.735.923		249.803.923	100	88,77		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			3.610.000		-		-		3.610.000		-		3.610.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		285.000		-		-		285.000	100	30		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.808.998.041**		**386.198.199**		**347.421.212**		**407.700.452**		**814.286.823**		1.955.606.686	**100**	**69,62**	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.808.998.041		386.198.199		347.421.212		407.700.452		814.286.823		1.955.606.686	100	69,62		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.808.998.041		386.198.199		347.421.212		407.700.452		814.286.823		1.955.606.686	100	69,62		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.150.592.800**		**133.228.800**		**160.155.074**		**363.226.673**		**363.115.253**		1.019.725.800	**96,74**	**88,63**	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase Sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		97		97		97			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.150.592.800		133.228.800		160.155.074		363.226.673		363.115.253		1.019.725.800	96,74	88,63		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	784		190		181		210		188		769		98,09			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742		167		176		181		198		722		97,3			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745		167		176		181		198		198		26,58			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2759		870		735		840		433		2.878		104,31			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	6752		0		0		0		7.004		7.004		103,73			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26366		7.570		7.318		8.811		3.631		27.330		103,66			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4085		798		1.307		1.494		1.468		5.067		124,04			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8711		1.174		2.542		3.065		1.807		8.588		98,59			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	420		87		125		154		64		430		102,38			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	79		39		40		0		0		79		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	697		122		147		137		263		669		95,98			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	961		117		227		237		294		875		91,05			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	1085		990		0		0		990		1.980		182,49			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	4085		0		0		0		1		1		0,02			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			77.920.000		9.880.000		21.580.000		26.980.000		19.480.000		77.920.000	98,09	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784		190		181		210		188		769		98,09			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			9.120.000		-		-		-		4.560.000		4.560.000	97,3	50		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742		167		176		181		198		722		97,3			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			3.810.000		-		-		-		-		-	26,58	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745		167		176		181		198		198		26,58			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			14.440.000		-		-		-		7.220.000		7.220.000	104,31	50		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2759		870		735		840		433		2.878		104,31			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			38.950.000		-		-		-		38.950.000		38.950.000	103,73	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6752		0		0		0		7.004		7.004		103,73			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			9.120.000		-		-		-		-		-	103,66	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26366		7.570		7.318		8.811		3.631		27.330		103,66			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.830.000		-		-		-		3.610.000		3.610.000	124,04	33,33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4085		798		1.307		1.494		1.468		5.067		124,04			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			9.975.000		-		-		-		5.985.000		5.985.000	98,59	60		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8711		1.174		2.542		3.065		1.807		8.588		98,59			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			9.975.000		-		-		-		5.225.000		5.225.000	102,38	52,38		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	420		87		125		154		64		430		102,38			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			30.020.000		7.410.000		2.470.000		12.540.000		7.600.000		30.020.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	79		39		40		0		0		79		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			41.420.000		3.610.000		1.900.000		5.890.000		4.560.000		15.960.000	95,98	38,53		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	697		122		147		137		263		669		95,98			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			9.120.000		-		-		-		9.120.000		9.120.000	91,05	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	961		117		227		237		294		875		91,05			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			214.724.000		14.440.000		59.212.000		87.092.000		43.594.000		204.338.000	100	95,16		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			22.040.000		-		-		10.830.000		10.260.000		21.090.000	100	95,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			40.850.000		6.650.000		4.750.000		19.950.000		9.500.000		40.850.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12.803.000		3.800.000		-		380.000		190.000		4.370.000	100	34,13		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			12.540.000		6.270.000		-		-		6.270.000		12.540.000	182,49	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1085		990		0		0		990		1.980		182,49			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			220.155.000		50.350.000		13.300.000		99.120.000		53.235.000		216.005.000	100	98,11		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		2		2		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			341.310.800		26.258.800		55.423.074		92.844.673		126.916.253		301.442.800	100	88,32		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.280.000		-		-		-		2.280.000		2.280.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.240.000		4.560.000		1.520.000		7.600.000		4.560.000		18.240.000	0,02	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	4085		0		0		0		1		1		0,02			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**907.196.583**		**156.366.292**		**159.552.258**		**183.482.716**		**281.095.312**		780.496.578	**0**	**86,03**	PUSKESMAS PEKURUN	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			907.196.583		156.366.292		159.552.258		183.482.716		281.095.312		780.496.578	0	86,03		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			907.196.583		156.366.292		159.552.258		183.482.716		281.095.312		780.496.578	0	86,03		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	0		0		0		0		1		1		0			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**569.003.000**		**5.304.600**		**99.663.640**		**80.879.619**		**133.601.405**		319.449.264	**71,89**	**56,14**	PUSKESMAS PEKURUN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama [deleted] (%)	100												0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Cakupan UHC [deleted] (%)	100		0		0		0		82,84		82,84		82,84			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			569.003.000		5.304.600		99.663.640		80.879.619		133.601.405		319.449.264	71,89	56,14		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226		21		27		39		17		104		46,02			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224		34		29		38		10		111		49,55			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214		34		29		38		10		111		51,87			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795		130		140		388		57		715		89,94			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1947		0		0		792		399		1.191		61,17			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7903		1.428		1.185		1.393		602		4.608		58,31			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1408		348		380		437		115		1.280		90,91			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2651		478		375		583		257		1.693		63,86			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	123		14		11		25		30		80		65,04			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	20		6		6		6		1		19		95			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	201		31		10		150		15		206		102,49			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	407		44		19		51		31		145		35,63			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	0										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1								1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1								1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1								1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			67.230.000		-		20.520.000		10.935.000		-		31.455.000	46,02	46,79		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226		21		27		39		17		104		46,02			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			5.000.000		-		-		-		-		-	49,55	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224		34		29		38		10		111		49,55			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			5.000.000		-		-		-		3.895.000		3.895.000	51,87	77,9		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214		34		29		38		10		111		51,87			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			10.000.000		-		-		-		7.980.000		7.980.000	89,94	79,8		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795		130		140		388		57		715		89,94			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			18.240.000		-		2.850.000		8.360.000		-		11.210.000	61,17	61,46		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1947		0		0		792		399		1.191		61,17			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.000.000		-		-		-		-		-	58,31	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7903		1.428		1.185		1.393		602		4.608		58,31			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.000.000		-		-		-		6.840.000		6.840.000	90,91	68,4		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1408		348		380		437		115		1.280		90,91			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000		-		-		-		2.850.000		2.850.000	63,86	28,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2651		478		375		583		257		1.693		63,86			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			10.000.000		-		-		-		1.615.000		1.615.000	65,04	16,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	123		14		11		25		30		80		65,04			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.970.000		-		6.270.000		1.330.000		4.370.000		11.970.000	95	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	20		6		6		6		1		19		95			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			8.550.000		-		3.705.000		1.710.000		665.000		6.080.000	102,49	71,11		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	201		31		10		150		15		206		102,49			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			5.000.000		-		-		-		3.800.000		3.800.000	35,63	76		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	407		44		19		51		31		145		35,63			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			87.308.000		-		16.418.000		2.280.000		18.040.000		36.738.000	100	42,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			760.000		-		-		760.000		-		760.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.200.000		-		7.600.000		3.230.000		2.280.000		13.110.000	100	86,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.460.000		-		1.710.000		-		-		1.710.000	100	26,47		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			760.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0										0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			75.620.000		-		24.225.000		13.965.000		18.620.000		56.810.000	100	75,13		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1								1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			186.825.000		5.304.600		15.225.640		37.739.619		62.076.405		120.346.264	100	64,42		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1								1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.710.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5										0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.280.000		-		1.140.000		570.000		570.000		2.280.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1								1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			570.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			20.520.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0										0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**930.156.052**		**123.163.804**		**148.998.934**		**174.054.773**		**230.840.678**		677.058.189	**100**	**72,79**	PUSKESMAS CEMPAKA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			930.156.052		123.163.804		148.998.934		174.054.773		230.840.678		677.058.189	100	72,79		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			930.156.052		123.163.804		148.998.934		174.054.773		230.840.678		677.058.189	100	72,79		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**773.963.000**		**-**		**89.078.000**		**177.467.921**		**244.245.611**		510.791.532	**50,75**	**66**	PUSKESMAS CEMPAKA	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Cakupan UHC (%)	100		0		0		0		87,39		87,39		87,39			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			773.963.000		-		89.078.000		177.467.921		244.245.611		510.791.532	50,75	66		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	200		43		49		30		25		25		12,5			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182		37		41		16		22		22		12,09			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270		37		41		16		22		22		8,15			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1635		501		383		327		289		289		17,68			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7398		1.476		1.477		3.223		801		801		10,83			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1237		327		469		235		108		108		8,73			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210		429		430		872		454		454		216,19			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	0		18		20		57		10		10		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	50		4		5		5		4		4		8			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	175		41		18		45		34		34		19,43			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	0		0		0		0		1		1		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	10										0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			76.060.000		-		14.985.000		15.660.000		35.415.000		66.060.000	12,5	86,85		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200		43		49		30		25		25		12,5			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			10.260.000		-		-		-		5.130.000		5.130.000	12,09	50		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182		37		41		16		22		22		12,09			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			6.840.000		-		-		-		1.710.000		1.710.000	8,15	25		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270		37		41		16		22		22		8,15			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.760.000		-		4.940.000		14.820.000		-		19.760.000	17,68	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1635		501		383		327		289		289		17,68			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.000.000		-		-		-		5.130.000		5.130.000	10,83	51,3		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7398		1.476		1.477		3.223		801		801		10,83			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.000.000		-		-		-		4.465.000		4.465.000	8,73	44,65		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1237		327		469		235		108		108		8,73			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000		-		-		-		-		-	216,19	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210		429		430		872		454		454		216,19			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0		18		20		57		10		10		0			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.400.000		-		-		-		15.200.000		15.200.000	8	71,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	50		4		5		5		4		4		8			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			15.520.000		-		3.310.000		3.900.000		3.530.000		10.740.000	19,43	69,2		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	175		41		18		45		34		34		19,43			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			182.362.000		-		31.419.000		82.003.225		19.760.000		133.182.225	100	73,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			11.400.000		-		2.565.000		-		6.840.000		9.405.000	100	82,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.000.000		-		3.705.000		4.655.000		8.360.000		16.720.000	100	88		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			15.485.000		-		6.650.000		-		7.125.000		13.775.000	100	88,96		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.420.000		-		-		3.420.000		-		3.420.000	0	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			101.985.000		-		13.395.000		34.675.000		51.064.000		99.134.000	100	97,2		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			217.901.000		-		8.109.000		18.334.696		48.896.611		75.340.307	100	34,58		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	10										0		0			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			24.780.000		-		-		-		24.780.000		24.780.000	0	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.840.000		-		-		-		6.840.000		6.840.000	0	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	0		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.615.791.503**		**250.738.699**		**356.778.536**		**382.538.196**		**547.311.634**		1.537.367.065	**100**	**95,15**	PUSKESMAS TATA KARYA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.615.791.503		250.738.699		356.778.536		382.538.196		547.311.634		1.537.367.065	100	95,15		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.615.791.503		250.738.699		356.778.536		382.538.196		547.311.634		1.537.367.065	100	95,15		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**718.451.000**		**8.726.100**		**110.315.200**		**125.031.400**		**247.949.783**		492.022.483	**84,83**	**68,48**	PUSKESMAS TATA KARYA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Cakupan UHC (%)	100		0		0		0		82,84		82,84		82,84			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			718.451.000		8.726.100		110.315.200		125.031.400		247.949.783		492.022.483	84,83	68,48		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	548		165		97		77		93		432		78,83			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	518		64		72		90		85		311		60,04			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1929		461		241		1.770		2.220		4.692		243,23			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4722		1.476		0		0		164		1.640		34,73			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18441		1.104		644		1.008		1.011		3.767		20,43			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3564		891		590		792		735		3.008		84,4			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6092		328		291		342		627		1.588		26,07			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	49		19		8		9		11		47		95,92			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	488		60		67		23		71		221		45,29			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	987		73		40		42		71		226		22,9			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			57.330.000		-		13.905.000		15.840.000		21.510.000		51.255.000	78,83	89,4		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	548		165		97		77		93		432		78,83			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			3.800.000		-		-		-		-		-	60,04	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	518		64		72		90		85		311		60,04			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			6.125.000		-		-		-		-		-	243,23	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1929		461		241		1.770		2.220		4.692		243,23			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.780.000		-		-		-		11.780.000		11.780.000	34,73	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4722		1.476		0		0		164		1.640		34,73			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			1.945.000		-		-		-		-		-	20,43	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18441		1.104		644		1.008		1.011		3.767		20,43			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			13.680.000		-		-		-		-		-	84,4	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3564		891		590		792		735		3.008		84,4			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.600.000		-		-		-		-		-	26,07	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6092		328		291		342		627		1.588		26,07			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			10.260.000		-		-		-		10.260.000		10.260.000	95,92	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	49		19		8		9		11		47		95,92			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.650.000		-		2.565.000		-		23.085.000		25.650.000	45,29	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	488		60		67		23		71		221		45,29			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			2.280.000		-		-		-		-		-	22,9	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	987		73		40		42		71		226		22,9			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			207.335.000		-		59.225.000		90.900.000		41.745.000		191.870.000	100	92,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.280.000		-		-		-		2.280.000		2.280.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.845.000		-		2.185.000		-		2.660.000		4.845.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.890.000		-		760.000		-		-		760.000	100	12,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			102.030.000		-		16.435.000		-		42.275.000		58.710.000	100	57,54		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		1		1		2		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			219.671.000		8.726.100		13.530.200		13.181.400		65.014.783		100.452.483	100	45,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			14.480.000		-		1.710.000		5.110.000		6.820.000		13.640.000	100	94,2		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			20.520.000		-		-		-		20.520.000		20.520.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.650.333.520**		**160.905.123**		**212.430.201**		**171.061.133**		**195.990.876**		740.387.333	**1**	**44,86**	PUSKESMAS ULAK RENGAS	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.650.333.520		160.905.123		212.430.201		171.061.133		195.990.876		740.387.333	1	44,86		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	100		0		0		0		1		1		1			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			BLUD	Penunjang Pelayanan (Unit																
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang	Pelayanan BLUD		1.650.333.520		160.905.123		212.430.201		171.061.133		195.990.876		740.387.333	1	44,86		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	100		0		0		0		1		1		1			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**826.224.000**		-		**124.910.001**		**104.351.501**		**201.332.388**		430.593.890	**182,38**	**52,12**	PUSKESMAS ULAK RENGAS	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				15. Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan	74												0			
				1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			826.224.000		-		124.910.001		104.351.501		201.332.388		430.593.890	182,38	52,12		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321		90		74		75		80		319		99,38			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	319		86		75		80		77		318		99,69			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293		87		75		71		85		318		108,53			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1235		363		362		362		362		1.449		117,33			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2796		714		714		714		715		2.857		102,18			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11347		2.800		2.800		2.800		2.800		11.200		98,7			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2022		526		527		526		527		2.106		104,15			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3757		951		951		951		952		3.805		101,28			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	167		44		44		44		44		176		105,39			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	29		7		8		11		5		31		106,9			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	289		66		119		221		281		687		237,72			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	398		85		180		272		355		892		224,12			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		1		1		1		1		4		400			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	29		7		6		7		11		31		106,9			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	0								1		1		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			67.230.000		-		25.830.000		13.680.000		3.420.000		42.930.000	99,38	63,86		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321		90		74		75		80		319		99,38			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			7.600.000		-		-		-		-		-	99,69	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	319		86		75		80		77		318		99,69			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			7.600.000		-		-		-		-		-	108,53	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293		87		75		71		85		318		108,53			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			7.600.000		-		-		-		-		-	117,33	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1235		363		362		362		362		1.449		117,33			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			66.120.000		-		13.015.000		14.725.000		27.265.000		55.005.000	102,18	83,19		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2796		714		714		714		715		2.857		102,18			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.040.000		-		-		-		1.800.000		1.800.000	98,7	59,21		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11347		2.800		2.800		2.800		2.800		11.200		98,7			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			18.240.000		-		-		-		9.120.000		9.120.000	104,15	50		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2022		526		527		526		527		2.106		104,15			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.600.000		-		-		-		-		-	101,28	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3757		951		951		951		952		3.805		101,28			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			4.560.000		-		-		-		-		-	105,39	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	167		44		44		44		44		176		105,39			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		1.900.000		1.900.000		2.850.000		6.650.000	106,9	29,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	29		7		8		11		5		31		106,9			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			17.575.000		-		6.270.000		-		7.410.000		13.680.000	237,72	77,84		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	289		66		119		221		281		687		237,72			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.600.000		-		-		-		-		-	224,12	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	398		85		180		272		355		892		224,12			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			129.590.000		-		9.170.000		16.731.500		20.770.000		46.671.500	400	36,01		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			10.260.000		-		-		-		-		-	400	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			39.045.000		-		13.110.000		11.495.000		14.060.000		38.665.000	400	99,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.231.000		-		5.130.000		-		-		5.130.000	400	55,57		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			6.460.000		-		1.520.000		3.230.000		1.710.000		6.460.000	106,9	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	29		7		6		7		11		31		106,9			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			139.064.000		-		37.525.000		35.720.000		44.840.000		118.085.000	400	84,91		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			221.189.000		-		11.250.000		6.870.000		68.077.388		86.197.388	0	38,97		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		10.000		10.000	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	0								1		1		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			15.200.000		-		1		1		-		2	400	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		1		1		1		1		4		400			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			380.000		-		190.000		-		-		190.000	0	50		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.240.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**13.512.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	PUSKESMAS ULAK RENGAS	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			13.512.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			13.512.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**732.846.035**		**91.562.355**		**208.368.923**		**190.639.197**		**189.132.310**		679.702.785	**400**	**92,75**	PUSKESMAS KARANG SARI	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			732.846.035		91.562.355		208.368.923		190.639.197		189.132.310		679.702.785	400	92,75		
			terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			732.846.035		91.562.355		208.368.923		190.639.197		189.132.310		679.702.785	400	92,75		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		1		1		1		1		4		400			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**632.084.000**		**13.948.750**		**55.903.750**		**72.609.750**		**99.961.531**		242.423.781	**131,16**	**38,35**	PUSKESMAS KARANG SARI	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama (%)	100		0		0		0		67		67		67			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			632.084.000		13.948.750		55.903.750		72.609.750		99.961.531		242.423.781	131,16	38,35		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya dokumen Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23		5		5		5		8		23		100			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32		10		10		10		2		32		100			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46		10		10		10		16		46		100			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900		200		300		200		200		900		100			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2479		620		620		620		619		2.479		100			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50		10		20		10		10		50		100			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40		10		10		10		10		40		100			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18		5		5		5		3		18		100			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	70		30		20		10		10		70		100			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	12		8		6		6		6		26		216,67			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	6		2		1		2		1		6		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0,25		0,25		0,25		0,25		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0,25		0,25		0,25		0,25		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	26		5		5		5		11		26		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		1		1		1		1		4		400			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10		2		4		2		2		10		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			41.700.000		-		16.125.000		16.125.000		6.075.000		38.325.000	100	91,91		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23		5		5		5		8		23		100			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			1.045.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32		10		10		10		2		32		100			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			3.135.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46		10		10		10		16		46		100			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			6.080.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900		200		300		200		200		900		100			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.720.000		-		1.900.000		6.840.000		3.800.000		12.540.000	100	75		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2479		620		620		620		619		2.479		100			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			5.320.000		-		-		-		1.140.000		1.140.000	100	21,43		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50		10		20		10		10		50		100			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			6.270.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40		10		10		10		10		40		100			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			6.270.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18		5		5		5		3		18		100			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			6.270.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70		30		20		10		10		70		100			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.540.000		-		1.710.000		8.360.000		2.280.000		12.350.000	216,67	98,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	12		8		6		6		6		26		216,67			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.995.000		-		1.330.000		475.000		-		1.805.000	100	90,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6		2		1		2		1		6		100			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			6.270.000		-		-		-		-		-	100	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	4		1		1		1		1		4		100			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			210.666.000		-		19.200.000		24.671.000		21.183.500		65.054.500	100	30,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0,25		0,25		0,25		0,25		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			7.030.000		-		190.000		2.850.000		2.850.000		5.890.000	100	83,78		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0,25		0,25		0,25		0,25		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.755.000		688.750		688.750		688.750		688.750		2.755.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1		1		1		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			855.000		-		-		-		-		-	400	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.600.000		855.000		855.000		855.000		855.000		3.420.000	100	45		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	26		5		5		5		11		26		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			45.030.000		9.405.000		9.405.000		9.405.000		9.405.000		37.620.000	400	83,54		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			207.838.000		3.000.000		4.500.000		2.340.000		51.684.281		61.524.281	400	29,6		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		1		1		1		1		4		400			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			95.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10		2		4		2		2		10		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			9.120.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			25.080.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.135.257.240**		**165.139.263**		**130.376.772**		**214.945.417**		**343.198.324**		853.659.776	**100**	**75,2**	PUSKESMAS BATU NANGKOP	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.135.257.240		165.139.263		130.376.772		214.945.417		343.198.324		853.659.776	100	75,2		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.135.257.240		165.139.263		130.376.772		214.945.417		343.198.324		853.659.776	100	75,2		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**705.427.800**		**4.999.476**		**66.036.000**		**154.749.868**		**290.092.411**		515.877.755	**68,98**	**73,13**	PUSKESMAS BATU NANGKOP	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		0		0		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73												0			
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			705.427.800		4.999.476		66.036.000		154.749.868		290.092.411		515.877.755	68,98	73,13		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1800		104		120		114		108		446		24,78			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	307		41		66		46		46		199		64,82			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1195		200		203		206		207		816		68,28			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2749		0		0		2.305		0		2.305		83,85			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10977		1.694		1.930		1.591		391		5.606		51,07			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1956		404		683		150		189		1.426		72,9			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1715		550		672		528		120		120		7			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	0		40		47		45		18		150		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0		8		9		9		4		30		0			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	266		55		70		70		71		266		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	385		62		51		79		87		279		72,47			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	30		0		0		0		1		1		3,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.850.000		-		18.005.000		21.860.000		27.275.000		67.140.000	24,78	94,76		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1800		104		120		114		108		446		24,78			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-		-		-		-		-		-	64,82	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	307		41		66		46		46		199		64,82			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			6.035.000		-		-		-		-		-	68,28	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1195		200		203		206		207		816		68,28			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20.520.000		-		4.560.000		3.800.000		10.165.000		18.525.000	83,85	90,28		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2749		0		0		2.305		0		2.305		83,85			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			4.390.000		-		-		-		-		-	51,07	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10977		1.694		1.930		1.591		391		5.606		51,07			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			2.405.000		-		-		-		-		-	72,9	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1956		404		683		150		189		1.426		72,9			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			5.000.000		-		-		-		-		-	7	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1715		550		672		528		120		120		7			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			5.440.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0		40		47		45		18		150		0			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.240.000		-		3.420.000		5.700.000		4.560.000		13.680.000	0	75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0		8		9		9		4		30		0			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.975.000		-		2.660.000		2.565.000		4.750.000		9.975.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	266		55		70		70		71		266		100			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			6.730.000		-		-		-		2.470.000		2.470.000	72,47	36,7		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	385		62		51		79		87		279		72,47			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			128.186.000		-		13.836.000		41.378.500		25.989.500		81.204.000	100	63,35		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4.560.000		-		-		-		4.180.000		4.180.000	100	91,67		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.830.000		-		-		1.995.000		4.750.000		6.745.000	100	62,28		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8.785.000		-		4.370.000		-		1.995.000		6.365.000	100	72,45		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			10.640.000		-		2.470.000		2.850.000		5.320.000		10.640.000	3,33	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	30		0		0		0		1		1		3,33			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			76.240.000		-		10.545.000		24.130.000		30.409.000		65.084.000	100	85,37		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			302.816.800		4.999.476		5.600.000		46.006.368		161.198.911		217.804.755	100	71,93		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			95.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			3.420.000		-		570.000		950.000		1.425.000		2.945.000	100	86,11		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.150.000		-		-		285.000		95.000		380.000	100	33,04		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.120.000		-		-		3.230.000		5.510.000		8.740.000	100	95,83		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**23.471.000**		**-**		**8.075.000**		**5.760.000**		**7.980.000**		21.815.000	**100**	**92,94**	PUSKESMAS BATU NANGKOP	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			23.471.000		-		8.075.000		5.760.000		7.980.000		21.815.000	100	92,94		
			Tersedianya dokumen Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			23.471.000		-		8.075.000		5.760.000		7.980.000		21.815.000	100	92,94		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**998.323.560**		**154.403.719**		**176.707.224**		**192.940.033**		**230.570.798**		754.621.774	**100**	**75,59**	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			998.323.560		154.403.719		176.707.224		192.940.033		230.570.798		754.621.774	100	75,59		
			Tersedianya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			998.323.560		154.403.719		176.707.224		192.940.033		230.570.798		754.621.774	100	75,59		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**665.123.000**		**6.803.588**		**114.986.016**		**133.264.572**		**153.626.121**		408.680.297	**120,45**	**61,44**	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			665.123.000		6.803.588		114.986.016		133.264.572		153.626.121		408.680.297	120,45	61,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	285		64		70		70		75		279		97,89			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6678		277		277		253		260		1.067		15,98			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5853		9		9		2.011		478		2.507		42,83			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5853		1.725		1.710		1.659		4.940		10.034		171,43			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1044		473		575		461		1.831		3.340		319,92			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	146		21		17		12		105		155		106,16			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	26		10		7		5		5		27		103,85			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	256		20		11		10		205		246		96,09			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	93		30		48		37		196		311		334,41			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	2678		670		669		669		670		2.678		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			37.350.000		-		16.600.000		12.450.000		8.300.000		37.350.000	97,89	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285		64		70		70		75		279		97,89			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			14.820.000		-		-		-		13.875.000		13.875.000	15,98	93,62		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6678		277		277		253		260		1.067		15,98			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			34.200.000		-		7.695.000		11.780.000		1.425.000		20.900.000	42,83	61,11		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5853		9		9		2.011		478		2.507		42,83			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			8.360.000		-		-		-		1.900.000		1.900.000	171,43	22,73		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5853		1.725		1.710		1.659		4.940		10.034		171,43			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.600.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	319,92	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1044		473		575		461		1.831		3.340		319,92			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			7.600.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	106,16	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	146		21		17		12		105		155		106,16			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.800.000		-		7.600.000		7.600.000		7.600.000		22.800.000	103,85	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	26		10		7		5		5		27		103,85			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			26.600.000		-		9.310.000		9.880.000		7.410.000		26.600.000	96,09	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	256		20		11		10		205		246		96,09			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			4.940.000		-		-		-		4.940.000		4.940.000	334,41	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	93		30		48		37		196		311		334,41			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			94.034.000		-		15.964.000		54.400.000		-		70.364.000	100	74,83		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.700.000		-		5.700.000		-		-		5.700.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.050.000		-		7.410.000		6.840.000		950.000		15.200.000	100	84,21		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.500.000		-		3.800.000		-		-		3.800.000	100	40		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			22.800.000		-		1.900.000		-		11.780.000		13.680.000	100	60		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2678		670		669		669		670		2.678		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			97.470.000		-		26.600.000		27.740.000		19.190.000		73.530.000	100	75,44		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			237.719.000		6.803.588		7.847.016		2.574.572		51.936.121		69.161.297	100	29,09		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.280.000		-		760.000		-		1.520.000		2.280.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.900.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			11.400.000		-		3.800.000		-		7.600.000		11.400.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.067.180.628**		**147.235.822**		**125.461.617**		**224.896.923**		**404.836.000**		902.430.362	**100**	**84,56**	PUSKESMAS SUBIK	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.067.180.628		147.235.822		125.461.617		224.896.923		404.836.000		902.430.362	100	84,56		
			Tersediannya Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.067.180.628		147.235.822		125.461.617		224.896.923		404.836.000		902.430.362	100	84,56		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**651.074.000**		**16.793.460**		**53.170.000**		**102.032.728**		**57.641.000**		229.637.188	**920,39**	**35,27**	PUSKESMAS SUBIK	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100												0			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95												0			
				Cakupan UHC (%)	100												0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			651.074.000		16.793.460		53.170.000		102.032.728		57.641.000		229.637.188	920,39	35,27		
			Tersediannya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	310		0		0		0		100		100		32,26			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296										0		0			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1089										0		0			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2537										0		0			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10492										0		0			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1871										0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	28				30		18		29		29		103,57			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	281				35		24		36		36		12,81			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	703										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1				12						0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1				20						0		0			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	145										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1				250		178		200		200		20000			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0		58		70		131		91		91		0			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	1										0		0			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	703										0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	78										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			85.490.000		-		-		-		9.500.000		9.500.000	32,26	11,11		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310		0		0		0		100		100		32,26			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296										0		0			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1089										0		0			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.840.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2537										0		0			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.040.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10492										0		0			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4.085.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1871										0		0			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.540.000		-		2.850.000		1.710.000		2.280.000		6.840.000	103,57	54,55		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	28				30		18		29		29		103,57			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.820.000		-		3.325.000		2.280.000		3.420.000		9.025.000	12,81	60,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	281				35		24		36		36		12,81			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	703										0		0			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			192.030.000		-		19.026.000		68.686.400		14.711.600		102.424.000	100	53,34		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.090.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.320.000		-		1.190.000		-		-		1.190.000	0	22,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1				12						0		0			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.035.000		-		1.900.000		-		-		1.900.000	0	37,74		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1				20						0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			12.160.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	145										0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			75.430.000		-		23.750.000		16.910.000		19.000.000		59.660.000	20000	79,09		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1				250		178		200		200		20000			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			191.914.000		11.195.640		(5.597.820)		-		-		5.597.820	0	2,92		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		5.597.820		6.726.820		12.446.328		8.729.400		33.500.368	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0		58		70		131		91		91		0			
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	703										0		0			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			4.180.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	78										0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			2.280.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.280.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1										0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			12.540.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1										0		0			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**760.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	PUSKESMAS SUBIK	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			760.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersediannya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			760.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1										0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**595.618.769**		**55.586.773**		**82.409.686**		**145.771.460**		**255.151.533**		538.919.452	**100**	**90,48**	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			595.618.769		55.586.773		82.409.686		145.771.460		255.151.533		538.919.452	100	90,48		
			Tersedia Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			595.618.769		55.586.773		82.409.686		145.771.460		255.151.533		538.919.452	100	90,48		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**554.648.000**		**-**		**78.233.832**		**19.439.193**		**258.155.777**		355.828.802	**87,13**	**64,15**	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		0		0		0			
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan [deleted] (%)	100		0		0		0		59,46		59,46		59,46			
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		94,4		94,4		94,4			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			554.648.000		-		78.233.832		19.439.193		258.155.777		355.828.802	87,13	64,15		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	408		29		20		34		27		110		26,96			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666		208		180		165		148		701		105,26			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1630		394		116		486		0		996		61,1			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6365		982		1.016		1.109		1.433		4.540		71,33			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1179		167		541		289		144		1.141		96,78			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2191		165		160		222		359		906		41,35			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	17		5		3		5		4		17		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	33		28		9		70		33		33		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	29		0		5		3		11		19		65,52			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			84.660.000		-		15.845.000		12.375.000		36.415.000		64.635.000	26,96	76,35		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	408		29		20		34		27		110		26,96			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			10.000.000		-		-		-		-		-	105,26	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666		208		180		165		148		701		105,26			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.220.000		-		-		-		4.275.000		4.275.000	61,1	59,21		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1630		394		116		486		0		996		61,1			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.000.000		-		-		-		5.320.000		5.320.000	71,33	53,2		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6365		982		1.016		1.109		1.433		4.540		71,33			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			10.000.000		-		-		-		-		-	96,78	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1179		167		541		289		144		1.141		96,78			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000		-		-		-		1.330.000		1.330.000	41,35	13,3		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2191		165		160		222		359		906		41,35			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.660.000		-		-		-		2.660.000		2.660.000	100	21,01		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	17		5		3		5		4		17		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.470.000		-		760.000		-		1.520.000		2.280.000	100	92,31		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	33		28		9		70		33		33		100			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			107.866.000		-		11.638.000		-		72.270.000		83.908.000	100	77,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.850.000		-		-		-		2.850.000		2.850.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.640.000		-		5.320.000		-		5.320.000		10.640.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.750.000		-		2.090.000		-		2.470.000		4.560.000	100	96		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			6.080.000		-		760.000		-		5.320.000		6.080.000	65,52	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	29		0		5		3		11		19		65,52			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			64.600.000		-		16.055.000		-		44.235.000		60.290.000	100	93,33		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		1		0		1		2		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			172.914.000		-		17.025.832		7.064.193		58.020.777		82.110.802	100	47,49		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			30.528.000		-		6.080.000		-		12.160.000		18.240.000	100	59,75		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			760.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.650.000		-		2.660.000		-		3.990.000		6.650.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**100**	**0**	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**893.760.000**		**79.195.824**		**67.509.760**		**145.707.578**		**232.310.030**		524.723.192	**100**	**58,71**	PUSKESMAS KUBU HITU	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			893.760.000		79.195.824		67.509.760		145.707.578		232.310.030		524.723.192	100	58,71		
			tersedianya dokumen peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			893.760.000		79.195.824		67.509.760		145.707.578		232.310.030		524.723.192	100	58,71		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**613.581.000**		**7.447.164**		**39.537.124**		**73.170.412**		**260.889.423**		381.044.123	**68,12**	**62,1**	PUSKESMAS KUBU HITU	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100		0,05								0,05		0,05			
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100		0		0		0		78,8		78,8		78,8			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)			0		0		0		20		20		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			613.581.000		7.447.164		39.537.124		73.170.412		260.889.423		381.044.123	68,12	62,1		
			tersedianya dokumen peningkatan pelayanan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239		56		56		58		59		229		95,82			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211		40		45		48		53		186		88,15			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	839		191		213		193		213		810		96,54			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1296		279		278		280		283		1.120		86,42			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8629		656		665		674		675		2.670		30,94			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442		289		292		292		297		1.170		81,14			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000		128		130		133		134		525		26,25			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1		29		20		57		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	25		3		4		6		6		19		76			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	156		4		5		6		7		22		14,1			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	156		41		43		46		48		178		114,1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12		0		0		0		1		1		8,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	23		0		0		0		1		1		4,35			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12		0		0		0		17		17		141,67			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			52.200.000		-		3.400.000		11.400.000		37.380.000		52.180.000	95,82	99,96		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239		56		56		58		59		229		95,82			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			6.650.000		-		-		-		6.650.000		6.650.000	88,15	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211		40		45		48		53		186		88,15			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			24.890.000		-		-		-		20.520.000		20.520.000	96,54	82,44		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	839		191		213		193		213		810		96,54			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.600.000		-		-		6.270.000		1.330.000		7.600.000	86,42	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1296		279		278		280		283		1.120		86,42			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			19.000.000		-		-		-		3.990.000		3.990.000	30,94	21		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8629		656		665		674		675		2.670		30,94			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			-		-		-		-		-		-	81,14	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442		289		292		292		297		1.170		81,14			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			9.120.000		-		-		-		7.600.000		7.600.000	26,25	83,33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2000		128		130		133		134		525		26,25			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			9.120.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1		29		20		57		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.400.000		-		3.400.000		-		7.600.000		11.000.000	76	96,49		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	25		3		4		6		6		19		76			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.505.000		-		3.800.000		-		3.705.000		7.505.000	14,1	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	156		4		5		6		7		22		14,1			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.600.000		-		-		-		-		-	114,1	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	156		41		43		46		48		178		114,1			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			142.424.000		-		9.348.000		28.276.000		34.872.000		72.496.000	8,33	50,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			22.800.000		-		-		-		15.200.000		15.200.000	8,33	66,67		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12		0		0		0		1		1		8,33			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.220.000		-		-		-		5.700.000		5.700.000	100	33,1		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11.400.000		-		3.800.000		9.500.000		3.800.000		17.100.000	100	150		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.800.000		-		-		-		-		-	4,35	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	23		0		0		0		1		1		4,35			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			47.120.000		-		6.800.000		-		31.350.000		38.150.000	50	80,96		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2		0		0		0		1		1		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			181.432.000		7.447.164		8.989.124		11.074.412		55.542.423		83.053.123	141,67	45,78		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12		0		0		0		17		17		141,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			5.700.000		-		-		5.700.000		-		5.700.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.800.000		-		-		950.000		2.850.000		3.800.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			22.800.000		-		-		-		22.800.000		22.800.000	8,33	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12		0		0		0		1		1		8,33			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	PUSKESMAS KUBU HITU	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			1.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
			tersedianya dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			1.900.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.301.800.000**		**412.703.820**		**534.535.729**		**482.460.431**		**597.921.544**		2.027.621.524	**100**	**88,09**	PUSKESMAS SEMULI RAYA	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.301.800.000		412.703.820		534.535.729		482.460.431		597.921.544		2.027.621.524	100	88,09		
			tersedianya dokumen peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.301.800.000		412.703.820		534.535.729		482.460.431		597.921.544		2.027.621.524	100	88,09		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**840.700.000**		**10.514.304**		**112.454.204**		**179.138.322**		**231.596.078**		533.702.908	**96,57**	**63,48**	PUSKESMAS SEMULI RAYA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) [deleted]	0												0			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100								340		340		340			
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan [deleted]	100								5,05		5,05		5,05			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	73												0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73												0			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita									20		20		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			840.700.000		10.514.304		112.454.204		179.138.322		231.596.078		533.702.908	96,57	63,48		
			tersedianya dokumen Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	477		95		92		81		90		358		75,05			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	451		91		89		80		82		342		75,83			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	453		91		89		80		80		340		75,06			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1678		530		190		123		120		963		57,39			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4107		1.442		1.200		0		1.218		3.860		93,99			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16035		596		989		730		630		2.945		18,37			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2484		553		593		524		513		2.183		87,88			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5298		87		88		143		84		402		7,59			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	45		21		122		29		28		200		444,44			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	43		49		0		1		0		50		116,28			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	424		40		58		59		20		177		41,75			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	858		18		48		37		151		254		29,6			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	80		0		0		0		1		1		1,25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		2		2		200			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			47.600.000		-		14.280.000		19.040.000		14.280.000		47.600.000	75,05	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	477		95		92		81		90		358		75,05			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			5.700.000		-		-		-		5.700.000		5.700.000	75,83	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	451		91		89		80		82		342		75,83			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.750.000		-		-		-		-		-	75,06	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	453		91		89		80		80		340		75,06			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			15.580.000		-		-		-		14.440.000		14.440.000	57,39	92,68		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1678		530		190		123		120		963		57,39			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			38.000.000		-		9.500.000		6.175.000		21.375.000		37.050.000	93,99	97,5		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4107		1.442		1.200		0		1.218		3.860		93,99			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			11.020.000		-		-		-		5.035.000		5.035.000	18,37	45,69		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16035		596		989		730		630		2.945		18,37			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			15.960.000		-		-		-		7.980.000		7.980.000	87,88	50		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2484		553		593		524		513		2.183		87,88			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			8.550.000		-		-		-		1.520.000		1.520.000	7,59	17,78		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5298		87		88		143		84		402		7,59			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			6.080.000		-		-		-		-		-	444,44	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	45		21		122		29		28		200		444,44			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			30.400.000		-		1.140.000		14.820.000		9.690.000		25.650.000	116,28	84,38		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	43		49		0		1		0		50		116,28			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.030.000		-		2.375.000		2.375.000		1.140.000		5.890.000	41,75	83,78		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	424		40		58		59		20		177		41,75			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			1.360.000		-		-		-		1.330.000		1.330.000	29,6	97,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	858		18		48		37		151		254		29,6			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			211.331.000		-		23.261.000		64.618.750		24.557.750		112.437.500	100	53,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.900.000		-		-		-		1.900.000		1.900.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.590.000		-		5.320.000		1.900.000		1.900.000		9.120.000	100	78,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.275.000		-		1.425.000		2.850.000		-		4.275.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.230.000		-		-		3.230.000		-		3.230.000	1,25	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	80		0		0		0		1		1		1,25			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			125.210.000		-		28.215.000		38.380.000		48.908.000		115.503.000	200	92,25		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		2		2		200			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			255.984.000		10.514.304		15.538.204		14.159.572		60.440.328		100.652.408	100	39,32		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			18.240.000		-		6.080.000		6.080.000		6.080.000		18.240.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			950.000		-		-		190.000		-		190.000	100	20		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.960.000		-		5.320.000		5.320.000		5.320.000		15.960.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.520.000**		**-**		**-**		**-**		**760.000**		760.000	**100**	**50**	PUSKESMAS SEMULI RAYA	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			1.520.000		-		-		-		760.000		760.000	100	50		
			tersedianya dokumen	Jumlah Dokumen Hasil	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			tersedianya dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			1.520.000		-		-		-		760.000		760.000	100	50		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**845.800.000**		**145.510.854**		**176.713.211**		**192.205.640**		**209.610.235**		724.039.940	**100**	**85,6**	PUSKESMAS MULYOREJO	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			845.800.000		145.510.854		176.713.211		192.205.640		209.610.235		724.039.940	100	85,6		
			Tersedianya dokumen layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			845.800.000		145.510.854		176.713.211		192.205.640		209.610.235		724.039.940	100	85,6		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**520.911.000**		**5.714.800**		**44.304.923**		**75.847.835**		**98.014.339**		223.881.897	**1015,49**	**42,98**	PUSKESMAS MULYOREJO	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
				Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) (%)	0												0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	100		0		0		0		1,2		1,2		1,2			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan [deleted] (%)	73		0		0		0		1,2		1,2		1,64			
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis	95		0		0		0		95		95		100			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			520.911.000		5.714.800		44.304.923		75.847.835		98.014.339		223.881.897	1015,49	42,98		
			Tersedianya dokumen layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1		45		45		45		45		180		18000			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647		0		0		0		1		1		0,15			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1582		0		268		536		616		1.420		89,76			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6179		0		0		0		1		1		0,02			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1194		314		302		240		264		1.120		93,8			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2155		67		103		136		139		445		20,65			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	16		1		3		1		0		5		31,25			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	159		21		24		24		24		93		58,49			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	752		0		0		0		1		1		0,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			28.020.000		-		4.080.000		6.120.000		2.040.000		12.240.000	18000	43,68		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1		45		45		45		45		180		18000			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			17.670.000		-		-		-		-		-	0,15	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647		0		0		0		1		1		0,15			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			4.275.000		-		-		4.275.000		-		4.275.000	89,76	100		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1582		0		268		536		616		1.420		89,76			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			19.000.000		-		-		-		4.560.000		4.560.000	0,02	24		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6179		0		0		0		1		1		0,02			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			13.680.000		-		-		-		6.840.000		6.840.000	93,8	50		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1194		314		302		240		264		1.120		93,8			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.695.000		-		-		-		3.990.000		3.990.000	20,65	51,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2155		67		103		136		139		445		20,65			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			26.030.000		-		-		-		6.270.000		6.270.000	31,25	24,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	16		1		3		1		0		5		31,25			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.850.000		-		855.000		1.710.000		285.000		2.850.000	58,49	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	159		21		24		24		24		93		58,49			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			131.154.000		-		4.444.000		23.202.000		21.183.500		48.829.500	0,13	37,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	752		0		0		0		1		1		0,13			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6.460.000		-		-		2.280.000		-		2.280.000	100	35,29		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			23.560.000		-		2.660.000		665.000		3.610.000		6.935.000	100	29,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.080.000		-		1.615.000		1.140.000		1.425.000		4.180.000	100	68,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.040.000		-		1.140.000		1.520.000		-		2.660.000	100	87,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			40.754.000		-		11.495.000		12.444.000		8.645.000		32.584.000	100	79,95		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			177.372.000		5.714.800		14.595.923		18.501.835		35.745.839		74.558.397	100	42,04		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			286.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			5.250.000		-		1.140.000		1.140.000		1.710.000		3.990.000	100	76		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			895.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.840.000		-		2.280.000		2.850.000		1.710.000		6.840.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**11.596.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	PUSKESMAS MULYOREJO	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			11.596.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			11.596.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0		0		0		0		1		1		0			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.097.129.483**		**151.428.256**		**121.548.631**		**165.037.747**		**253.692.595**		691.707.229	**100**	**63,05**	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (persen)	75		0		0		0		75		75		100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.097.129.483		151.428.256		121.548.631		165.037.747		253.692.595		691.707.229	100	63,05		
			TERSEDIANYA DOKUMEN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.097.129.483		151.428.256		121.548.631		165.037.747		253.692.595		691.707.229	100	63,05		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**931.524.400**		**4.997.240**		**211.666.583**		**128.260.160**		**517.154.670**		862.078.653	**104,68**	**92,54**	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			0		0		0		20		20		0			
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))			0		0		0		0,47		0,47		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			931.524.400		4.997.240		211.666.583		128.260.160		517.154.670		862.078.653	104,68	92,54		
			Tersedianya dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	240		58		58		72		92		280		116,67			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1227		821		81		89		84		1.075		87,61			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	3004		1.224		149		1.027		604		3.004		100			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11703		1.304		1.221		994		994		4.513		38,56			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	31		6		8		10		9		33		106,45			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	310		31		64		76		77		248		80			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	12		6		8		10		9		33		275			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	0		31		64		76		77		77		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5		0		0		0		4		4		80			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			93.100.000		-		26.600.000		13.300.000		55.100.000		95.000.000	116,67	102,04		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240		58		58		72		92		280		116,67			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			12.350.000		-		-		-		-		-	87,61	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1227		821		81		89		84		1.075		87,61			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			47.690.000		-		-		-		41.610.000		41.610.000	100	87,25		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3004		1.224		149		1.027		604		3.004		100			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			6.840.000		-		-		-		-		-	38,56	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11703		1.304		1.221		994		994		4.513		38,56			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			7.010.000		-		-		-		6.840.000		6.840.000	100	97,57		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			17.100.000		-		3.990.000		3.040.000		10.070.000		17.100.000	106,45	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	31		6		8		10		9		33		106,45			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			27.360.000		-		9.975.000		5.415.000		11.970.000		27.360.000	80	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	310		31		64		76		77		248		80			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			249.393.000		-		69.199.000		96.142.000		76.387.000		241.728.000	100	96,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			9.880.000		-		4.180.000		760.000		4.940.000		9.880.000	100	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.860.000		-		2.280.000		-		13.110.000		15.390.000	100	86,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			28.405.000		-		8.550.000		-		15.700.000		24.250.000	100	85,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.790.000		-		3.990.000		760.000		3.040.000		7.790.000	275	100		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12		6		8		10		9		33		275			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			135.850.000		-		33.250.000		-		94.375.000		127.625.000	200	93,95		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		0		0		0		2		2		200			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			248.096.400		4.997.240		36.637.583		3.428.160		153.802.670		198.865.653	100	80,16		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		9.975.000		5.415.000		11.970.000		27.360.000	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	0		31		64		76		77		77		0			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.140.000		-		-		-		-		-	80	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	5		0		0		0		4		4		80			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			7.600.000		-		1.900.000		-		5.700.000		7.600.000	100	100		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		0		0		0		1		1		100			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			380.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			13.680.000		-		1.140.000		-		12.540.000		13.680.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**23.880.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM berstrata mandiri (%)	13		0		0		0		13		13		100			
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			23.880.000		-		-		-		-		-	0	0		
			tersedianya dokumen Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			23.880.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**125.457.535.338**		**15.968.947.133**		**4.401.570.285**		**7.518.880.966**		**52.969.446.945**		80.858.845.329	**64,06**	**64,45**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.895.589.200**		**1.927.721.633**		**2.176.523.075**		**1.800.578.298**		**2.115.063.075**		8.019.886.081	**82**	**90,16**	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									68.69		68.69		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		14,37		17,22		18,06		20,03		69,68		92,91			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.038.800		11.327.560		-		6.886.640		35.394.600		53.608.800	100	78,79		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			44.128.650		5.817.410		-		3.886.640		24.994.600		34.698.650	100	78,63		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		0		0		1		2		100			
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.910.150		5.510.150		-		3.000.000		10.400.000		18.910.150	100	79,09		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.762.896.226		1.774.110.615		2.062.549.320		1.662.510.464		1.781.501.788		7.280.672.187	100	93,79		
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		75		75		75		75		75		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.980.681.176		1.684.048.865		1.845.899.320		1.475.686.964		1.496.110.888		6.501.746.037	100	93,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		75		75		75		75		75		100			
		1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			734.540.000		84.160.000		216.650.000		181.610.000		252.120.000		734.540.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			47.675.050		5.901.750		-		5.213.500		33.270.900		44.386.150	100	93,1		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			75.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			216.093.005		31.899.565		14.472.090		24.851.109		104.741.373		175.964.137	92,86	81,43		
			Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4		0		0		0		2		2		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.692.780		4.313.840		-		-		2.378.940		6.692.780	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		1		0		0		1		2		100			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.516.225		8.636.725		7.753.700		3.231.141		20.383.800		40.005.366	100	98,74		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		1		2		100			
		1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.537.500		-		2.469.390		-		2.068.110		4.537.500	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.750.000		-		3.040.000		-		9.960.000		13.000.000	100	59,77		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45.848.500		6.650.000		-		11.925.000		17.436.670		36.011.670	100	78,54		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000		-		-		-		9.000.000		9.000.000	50	30		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4		0		0		0		2		2		50			
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.748.000		12.299.000		1.209.000		9.694.968		43.513.853		66.716.821	100	99,95		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.516.273		6.486.273		1.440.000		2.250.000		2.895.000		13.071.273	50	18,8		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.680.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			67.836.273		6.486.273		1.440.000		2.250.000		2.895.000		13.071.273	100	19,27		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			408.492.696		86.897.620		61.174.165		82.344.635		115.688.589		346.105.009	100	84,73		
			Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1								1		1		100			
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			120.876.696		22.547.620		17.803.665		17.012.635		30.344.089		87.708.009	100	72,56		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			287.616.000		64.350.000		43.370.500		65.332.000		85.344.500		258.397.000	100	89,84		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1								1		1		100			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295.552.200		17.000.000		36.887.500		21.735.450		74.841.725		150.464.675	63,33	50,91		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		1		1		1		2		5		50			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		2		0		0		2		40			
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			228.861.000		6.550.000		29.347.500		10.295.000		67.134.225		113.326.725	50	49,52		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		1		1		1		2		5		50			
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			49.351.200		10.450.000		3.880.000		11.440.450		7.707.500		33.477.950	100	67,84		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3		1		1		0		1		3		100			
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.340.000		-		3.660.000		-		-		3.660.000	40	21,11		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		2		0		0		2		40			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Meningkatnya Ketahanan	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**4.390.200.995**		**32.250.000**		**17.395.000**		**348.783.500**		**3.048.760.400**		3.447.188.900	**60**	**78,52**	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)									53,81		53,81		0			
				Presentase infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60		53,81		53,81		53,81		53,81		53,81		89,68			
				Rasio jaringan Irigasi (Rasio)	23,99		23,99		23,99		23,99		23,99		23,99		100			
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir									0		0		0			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.867.831.875		11.250.000		5.930.000		8.940.000		1.014.912.550		1.041.032.550	100	55,73		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			28.411.950		6.000.000		3.930.000		5.950.000		9.260.000		25.140.000	100	88,48		
			Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			1.839.419.925		5.250.000		2.000.000		2.990.000		1.005.652.550		1.015.892.550	100	55,23		
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.522.369.120		21.000.000		11.465.000		339.843.500		2.033.847.850		2.406.156.350	33,33	95,39		
			Panjang jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam keadaan baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0.79		0		0		0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.7		0		0		0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	20		3		4		6		7		20		100			
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			76.329.800		6.750.000		3.475.000		50.639.100		7.710.000		68.574.100	0	89,84		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0.79		0		0		0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			1.944.018.240		6.750.000		3.990.000		55.954.400		1.770.825.500		1.837.519.900	0	94,52		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.7		0		0		0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			502.021.080		7.500.000		4.000.000		233.250.000		255.312.350		500.062.350	100	99,61		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	20		3		4		6		7		20		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**76.508.130.001**		**13.921.933.700**		**49.313.000**		**3.301.259.629**		**27.725.482.204**		44.997.988.533	**48,57**	**58,81**	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (%)	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		100			
				Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)									44,12		44,12		0			
				Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap/baik	50,00		46,67		46,67		46,67		46,67		46,67		93,34			
				Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,99		0,99		0,99		0,99		0,99		0,99		100			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			76.508.130.001		13.921.933.700		49.313.000		3.301.259.629		27.725.482.204		44.997.988.533	48,57	58,81		
			Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	10		0		0		6		3		9		90			
				Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	11.9		0		0		0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1025.27		0		0		0		1.025,27		1.025,27		100			
		1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan			267.329.500		13.500.000		13.665.500		16.266.000		219.822.640		263.254.140	100	98,48		
			Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			5.241.748.200		11.745.800		5.673.750		15.273.750		4.740.409.604		4.773.102.904	90	91,06		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10		0		0		6		3		9		90			
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			43.291.017.716		13.866.327.300		14.313.500		2.312.729.241		10.502.764.900		26.696.134.941	0	61,67		
			Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	11.9		0		0		0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			22.177.237.725		23.610.600		11.482.250		926.688.138		10.663.555.350		11.625.336.338	0	52,42		
			Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan			936.195.755		2.250.000		1.498.250		23.521.580		319.375.210		346.645.040	0	37,03		
			Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			3.573.937.600		2.250.000		1.278.000		2.028.750		275.126.100		280.682.850	50	7,85		
			Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	2		0		0		0		1		1		50			
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			1.020.663.505		2.250.000		1.401.750		4.752.170		1.004.428.400		1.012.832.320	100	99,23		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1025.27		0		0		0		1.025,27		1.025,27		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**113.426.800**		**7.500.000**		**11.875.110**		**11.990.000**		**24.094.890**		55.460.000	**86,67**	**48,89**	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									0		0		0			
				Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100		0		100		100		100		100		100			
				Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi (rasio)	5		0		0		0		5		5		100			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			30.304.100		3.000.000		5.500.000		5.990.000		7.740.000		22.230.000	80	73,36		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	15		0		7		2		3		12		80			
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			30.304.100		3.000.000		5.500.000		5.990.000		7.740.000		22.230.000	80	73,36		
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	15		0		7		2		3		12		80			
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			48.441.950		4.500.000		5.168.980		6.000.000		11.105.270		26.774.250	100	55,27		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2		0		0		1		1		2		100			
		1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			48.441.950		4.500.000		5.168.980		6.000.000		11.105.270		26.774.250	100	55,27		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2		0		0		1		1		2		100			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			34.680.750		-		1.206.130		-		5.249.620		6.455.750	80	18,61		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket	25		0		2		4		14		20		80			
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			34.680.750		-		1.206.130		-		5.249.620		6.455.750	80	18,61		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	25		0		2		4		14		20		80			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan. Meningkatnya Ketahanan	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**16.585.070.276**		**69.883.500**		**-**		**1.889.268.800**		**4.115.661.753**		6.074.814.053	**61,33**	**36,63**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (Akses air minum	6,00								0,45		0,45		7,5			
				Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)									0,45		0,45		0			
				Persentase Fasilitasi Pemantauan kualitas SPAM	28,00								0		0		0			
				Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	72,00								71,35		71,35		99,1			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.585.070.276		69.883.500		-		1.889.268.800		4.115.661.753		6.074.814.053	61,33	36,63		
			Jumlah Rumah yang terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3		0		0		0		3		3		100			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2		0		0		1		1		1		50			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150		0		0		0		10		10		6,67			
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			489.595.150		69.883.500		-		24.969.800		209.546.050		304.399.350	100	62,17		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			590.217.750		-		-		-		581.332.500		581.332.500	100	98,49		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3		0		0		0		3		3		100			
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			7.059.141.310		-		-		1.507.902.500		3.238.713.003		4.746.615.503	50	67,24		
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2		0		0		1		1		1		50			
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			7.249.080.266		-		-		356.396.500		5.171.400		361.567.900	50	4,99		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2		0		0		0		1		1		50			
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			1.197.035.800		-		-		-		80.898.800		80.898.800	6,67	6,76		
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150		0		0		0		10		10		6,67			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			-		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (persen)	50								0		0		0			
				Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional									0		0		0			
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1								0		0		0			
				Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1								0		0		0			
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1								0		0		0			
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1								0		0		0			
		1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1								0		0		0			
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1								0		0		0			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**7.497.801.710**		**-**		**70.845.000**		**68.800.000**		**7.217.371.719**		7.357.016.719	**49,59**	**98,12**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))									4,58		4,58		0			
				Persentase rumah tinggsl berssanitasi dalam Kondisi Baik (sanitasi aman) (persen)	3,40								3,42		3,42		100,59			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.497.801.710		-		70.845.000		68.800.000		7.217.371.719		7.357.016.719	49,59	98,12		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1								0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	30								0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	430		0		0		0		423		423		98,37			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1								0		0		0			
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	30								0		0		0			
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			6.758.750.000		-		-		58.400.000		6.648.099.719		6.706.499.719	98,37	99,23		
			Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	430		0		0		0		423		423		98,37			
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			739.051.710		-		70.845.000		10.400.000		569.272.000		650.517.000	100	88,02		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**65.911.200**		**-**		**-**		**-**		**65.911.200**		65.911.200	**100**	**100**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Berkeadilan. Meningkatnya Ketahanan		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik									36		36		0			
				Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik (persen)	36								36		36		100			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			65.911.200		-		-		-		65.911.200		65.911.200	100	100		
			Panjang Saluran Drainase Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.06.2.01.002	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			65.911.200		-		-		-		65.911.200		65.911.200	100	100		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**10.999.636.070**		-		**2.039.774.100**		-		**8.552.086.150**		10.591.860.250	**75**	**96,29**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik									70		70		0			
				Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (rasio)	20								20		20		100			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			10.999.636.070		-		2.039.774.100		-		8.552.086.150		10.591.860.250	75	96,29		
			Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret) yang laik fungsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	2		0		1		0		1		1		50			
				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.08.2.01.002 1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			10.995.014.050		-		2.039.774.100		-		8.547.856.150		10.587.630.250	50	96,29		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	2		0		1		0		1		1		50			
		1.03.08.2.01.002 3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan			4.622.020		-		-		-		4.230.000		4.230.000	100	91,52		
			Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	1		0		0		0		1		1		100			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**401.769.086**		**9.658.300**		**35.845.000**		**98.200.739**		**105.015.554**		248.719.593	**33,33**	**61,91**	DINAS PERUMAHAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			401.769.000		9.658.300		32.860.000		86.260.739		58.395.554		240.749.593	59,93	61,91	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)									0		0		0			
				Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata	33,33								25		25		75,01			
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (persen)	100,00								100		100		100			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			333.769.086		3.658.300		32.860.000		86.260.739		58.395.554		181.174.593	50	54,28		
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1								0		0		0			
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW			297.522.086		3.658.300		32.860.000		86.260.739		58.395.554		181.174.593	100	60,89		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			36.247.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1								0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			68.000.000		6.000.000		2.985.000		11.940.000		46.620.000		67.545.000	0	99,33		
			Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			68.000.000		6.000.000		2.985.000		11.940.000		46.620.000		67.545.000	0	99,33		
			Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**9.124.852.601**		**1.538.124.009**		**1.929.829.424**		**1.444.480.817**		**3.226.384.945**		8.138.819.195	**90,61**	**89,19**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.009.941.321**		**1.531.351.609**		**1.687.738.974**		**1.435.778.067**		**1.490.486.197**		6.145.354.847	**87,5**	**87,67**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									65.92		65.92		0			
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.148.585		1.999.000		-		2.254.500		3.555.000		7.808.500	85,71	25,9		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		2		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1						0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4		1		0		2		1		4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1						0		1		100			
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.956.000		256.000		-		673.000		980.000		1.909.000	100	21,32		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		2		0		3		100			
		1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.639.800		442.000		-		-		700.000		1.142.000	0	31,38		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
		1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.263.600		-		-		367.000		-		367.000	100	11,25		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.671.100		465.000		-		-		-		465.000	100	17,41		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1						0		1		100			
		1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.002.400		-		-		-		475.000		475.000	100	47,39		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.959.435		465.000		-		688.000		904.000		2.057.000	100	25,84		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		1		0		2		1		4		100			
		1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.656.250		371.000		-		526.500		496.000		1.393.500	100	52,46		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1						0		1		100			
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.320.739.457		1.444.439.479		1.622.791.817		1.294.741.600		1.252.507.706		5.614.480.602	100	88,83		
			Jumlah Dokumen Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69		69		69		69		69		69		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12		3		3		3		3		12		100			
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.045.534.682		1.387.624.779		1.575.265.567		1.236.939.500		1.147.165.206		5.346.995.052	100	88,45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69		69		69		69		69		69		100			
		1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			254.436.075		51.473.200		44.571.250		52.598.350		98.396.500		247.039.300	100	97,09		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.768.700		5.341.500		2.955.000		5.203.750		6.946.000		20.446.250	100	98,45		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			70.318.180		1.965.500		21.309.566		5.133.500		17.201.000		45.609.566	66,67	64,86		
			Persentase Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40		0		10		2		28		40		100			
		1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.806.660		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.165.520		1.965.500		-		3.573.500		3.814.000		9.353.000	100	57,86		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.346.000		-		21.309.566		1.560.000		13.387.000		36.256.566	100	72,01		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		0		10		2		28		40		100			
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			282.659.270		58.517.630		43.637.591		53.466.253		82.673.028		238.294.502	100	84,3		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			82.589.270		19.217.630		18.845.591		16.303.253		17.658.028		72.024.502	100	87,21		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			200.070.000		39.300.000		24.792.000		37.163.000		65.015.000		166.270.000	100	83,11		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.075.829		24.430.000		-		80.182.214		134.549.463		239.161.677	100	78,14		
			Persentase Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			306.075.829		24.430.000		-		80.182.214		134.549.463		239.161.677	100	78,14		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**19.969.930**		**442.000**		**-**		**1.644.000**		**1.050.000**		3.136.000	**100**	**15,7**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerinta	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100								100		100		100			
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100								100		100		100			
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni									100		100		0			
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)									100		100		0			
				Rasio rumah layak huni (rasio)	0,847								0,97		0,97		114,52			
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			19.969.930		442.000		-		1.644.000		1.050.000		3.136.000	100	15,7		
			Jumlah Dokumen Pendataan rumah yang terdampak bencana alam	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			19.969.930		442.000		-		1.644.000		1.050.000		3.136.000	100	15,7		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Terwujudnya Kesehatan	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**736.828.600**		**6.330.400**		**2.883.750**		**7.058.750**		**615.942.698**		632.215.598	**97,78**	**85,8**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase areal kawasan kumuh (persen)	0,05								0,03		0,03		60			
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	0,27								0,28		0,28		103,7			
				Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditata	25,00								25		25		100			
				Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)									0,6		0,6		0			
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			35.877.380		2.495.500		1.462.500		3.866.250		15.312.000		23.136.250	100	64,49		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			35.877.380		2.495.500		1.462.500		3.866.250		15.312.000		23.136.250	100	64,49		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			700.951.220		3.834.900		1.421.250		3.192.500		600.630.698		609.079.348	96,67	86,89		
			Jumlah unit peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit	30		0		0		0		28		28		93,33			
				Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			641.950.000		-		-		-		580.480.000		580.480.000	93,33	90,42		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit	30		0		0		0		28		28		93,33			
		1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			59.001.220		3.834.900		1.421.250		3.192.500		20.150.698		28.599.348	100	48,47		
			Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**1.358.112.750**		**-**		**239.206.700**		**-**		**1.118.906.050**		1.358.112.750	**100**	**100**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas									53,85		53,85		0			
				Persentase penyediaan PSU dalam kondisi baik (persen)	10,53								9,5		9,5		90,22			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.358.112.750		-		239.206.700		-		1.118.906.050		1.358.112.750	100	100		
			Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1		0		0		0		1		1		100			
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			885.975.000		-		99.402.000		-		786.573.000		885.975.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			472.137.750		-		139.804.700		-		332.333.050		472.137.750	100	100		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**21.063.634.681**		**3.840.987.494**		**2.974.274.815**		**3.703.362.377**		**7.132.725.358**		17.651.350.044	**69,04**	**83,8**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.834.093.350**		**1.891.026.266**		**1.381.218.925**		**1.580.592.097**		**1.470.552.974**		6.323.390.262	**90,31**	**80,72**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Satuan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	85		34,12		8,33		18		24,55		85		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		66.67		66.67		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.617.618		9.047.455		8.374.110		-		-		17.421.565	100	93,58		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		2		2		2		1		7		100			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.529.800		4.193.740		4.423.860		-		-		8.617.600	100	90,43		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.734.018		1.733.890		-		-		-		1.733.890	100	99,99		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.353.800		3.119.825		3.950.250		-		-		7.070.075	100	96,14		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		2		2		2		1		7		100			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.741.677.231		1.674.893.400		1.339.948.747		1.525.863.797		1.422.765.474		5.963.471.418	76,15	88,46		
			Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98		78		78		78		78		78		79,59			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		1		25			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.477.895.970		1.649.397.790		1.325.948.747		1.325.948.747		1.399.245.474		5.700.540.758	79,59	88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98		78		78		78		78		78		79,59			
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			260.730.601		24.000.000		14.000.000		198.360.000		23.520.000		259.880.000	100	99,67		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.555.050		-		-		1.555.050		-		1.555.050	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.495.610		1.495.610		-		-		-		1.495.610	25	100		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		1		25			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.771.000		47.493.611		910.000		30.979.700		2.645.000		82.028.311	90	92,4		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4		1		1		0		2		2		50			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.100.300		1.100.300		-		-		-		1.100.300	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.000.000		9.000.000		-		16.680.000		-		25.680.000	100	285,33		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			29.848.700		15.549.000		-		14.299.700		-		29.848.700	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			670.000		-		-		-		670.000		670.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2		0		0		0		2		2		100			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.152.000		21.844.311		910.000		-		1.975.000		24.729.311	50	51,36		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		1		1		0		2		2		50			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			838.957.501		139.191.800		6.045.500		13.998.600		16.052.500		175.288.400	100	20,89		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.437.501		9.391.800		6.045.500		6.198.600		13.552.500		35.188.400	100	84,92		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		0		0		1		1		2		100			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			797.520.000		129.800.000		-		7.800.000		2.500.000		140.100.000	100	17,57		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146.070.000		20.400.000		25.940.568		9.750.000		29.090.000		85.180.568	100	58,31		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		2		2		2		3		9		100			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			146.070.000		20.400.000		25.940.568		9.750.000		29.090.000		85.180.568	100	58,31		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		2		2		2		3		9		100			
	Kehidupan Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.926.410.963**		**291.848.000**		**262.431.000**		**413.746.500**		**816.222.360**		1.784.247.860	**100**	**92,62**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			25		25		25		25		100		0			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			18.907.750		-		-		-		18.371.500		18.371.500	100	97,16		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	3		0		0		0		3		3		100			
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			18.907.750		-		-		-		18.371.500		18.371.500	100	97,16		
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			26.520.713		-		-		-		9.554.500		9.554.500	100	36,03		
			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	2		0		0		0		2		2		100			
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			26.520.713		-		-		-		9.554.500		9.554.500	100	36,03		
			TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	2		0		0		0		2		2		100			
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)			25		25		25		25		100		0			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.863.170.000		291.848.000		262.431.000		413.746.500		770.484.000		1.738.509.500	100	93,31		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	10		2		2		2		4		10		100			
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan			1.863.170.000		291.848.000		262.431.000		413.746.500		770.484.000		1.738.509.500	100	93,31		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	10		2		2		2		4		10		100			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			0		20		25		15		60		0			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			17.812.500		-		-		-		17.812.360		17.812.360	100	100		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			17.812.500		-		-		-		17.812.360		17.812.360	100	100		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.672.310.657**		**408.141.267**		**70.570.104**		**149.553.390**		**3.439.758.069**		4.068.022.830	**83,6**	**87,07**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan BPBD	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75				1		46,91		63		63		84			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									64.3		64.3		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.226.875		10.656.500		-		-		4.436.000		15.092.500	104,17	87,61		
			Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1						2		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1						1		2		200			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1						1		2		200			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4				2		1		1		1		25			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.565.505		2.804.500		-		-		1.727.500		4.532.000	100	99,27		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1						2		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.386.775		2.057.000		-		-		997.000		3.054.000	200	90,17		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1						1		2		200			
		1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1								0		0		0			
		1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.100.750		2.500.000		-		-		555.000		3.055.000	200	98,52		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1						1		2		200			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.228.035		1.900.000		-		-		625.000		2.525.000	100	78,22		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1								1		1		100			
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.945.810		1.395.000		-		-		531.500		1.926.500	25	65,4		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4				2		1		1		1		25			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.894.433.392		269.538.459		46.720.000		-		3.182.726.049		3.498.984.508	88,89	89,85		
			terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38								38		38		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3				1		1		1		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1								1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1						0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1						0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4				2		1		1		4		100			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.771.669.192		253.171.459		-		-		3.159.534.049		3.412.705.508	100	90,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38								38		38		100			
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			105.060.000		11.180.000		46.720.000		-		14.460.000		72.360.000	33,33	68,87		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3				1		1		1		1		33,33			
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			8.478.950		-		-		-		6.811.000		6.811.000	100	80,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1								1		1		100			
		1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.187.050		800.000		-		-		538.000		1.338.000	100	61,18		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1						0		1		100			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.179.700		2.072.000		-		-		-		2.072.000	100	65,16		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1						0		1		100			
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3.858.500		2.315.000		-		-		1.383.000		3.698.000	100	95,84		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4				2		1		1		4		100			
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.612.675		2.132.000		-		-		400.000		2.532.000	8,33	70,09		
			terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12				2		1		1		1		8,33			
		1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.612.675		2.132.000		-		-		400.000		2.532.000	8,33	70,09		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12				2		1		1		1		8,33			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49.302.535		13.900.000		-		-		28.295.670		42.195.670	91	85,59		
			terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		3		4		10		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1						0		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				1				0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25								16		16		64			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.950.000		3.850.000		-		-		6.250.000		10.100.000	100	77,99		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		3		4		10		100			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.950.000		4.050.000		-		-		-		4.050.000	100	50,94		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1						0		1		100			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.232.535		6.000.000		-		-		-		6.000.000	100	96,27		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				1				0		1		100			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.170.000		-		-		-		22.045.670		22.045.670	64	99,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25								16		16		64			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			455.941.180		93.914.308		23.850.104		72.433.390		223.900.350		414.098.152	62,5	90,82		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		3		3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			67.751.390		2.364.308		1.300.104		1.658.640		41.250.000		46.573.052	25	68,74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		3		3		3		25			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			388.189.790		91.550.000		22.550.000		70.774.750		182.650.350		367.525.100	100	94,68		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.794.000		18.000.000		-		77.120.000		-		95.120.000	50	37,78		
			terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1						1		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		1				3		0		4		100			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			168.200.000		6.000.000		-		53.720.000		-		59.720.000	0	35,51		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1						1		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			83.594.000		12.000.000		-		23.400.000		-		35.400.000	100	42,35		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		1				3		0		4		100			
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**560.485.055**		**102.650.000**		**85.050.000**		**69.032.850**		**179.603.950**		436.336.800	**30,95**	**77,85**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	100		102650000		85050000		69032850		100		100		100			
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									100		100		0			
				Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100								100		100		100			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			500.771.680		99.600.000		68.900.000		54.032.850		172.760.950		395.293.800	5,56	78,94		
			tersedianya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	1								0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman	12		1		4		3		2		2		16,67			
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	3								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			400.771.280		99.600.000		68.900.000		54.032.850		172.760.950		395.293.800	16,67	98,63		
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12		1		4		3		2		2		16,67			
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			100.000.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	3								0		0		0			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)									100		100		0			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			38.037.625		3.050.000		16.150.000		-		300.000		19.500.000	33,33	51,27		
			tersedianya penanganan bencana pada saat tanggap darurat nbencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	15								0		0		0			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian	250		50		200				0		250		100			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500								0		0		0			
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			15.106.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	15								0		0		0			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			22.931.625		3.050.000		16.150.000		-		300.000		19.500.000	100	85,04		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	250		50		200				0		250		100			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500								0		0		0			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)									100		100		0			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			21.675.750		-		-		15.000.000		6.543.000		21.543.000	100	99,39		
			tersedianya penangana bencana pada saat pasca bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1						1		0		1		100			
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			21.675.750		-		-		15.000.000		6.543.000		21.543.000	100	99,39		
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1						1		0		1		100			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.882.479.656**		**949.621.961**		**980.752.036**		**1.165.832.290**		**841.992.355**		3.938.198.642	**39,71**	**80,66**	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		16		16		19		14		65		81,25			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									64.5		64.5		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.140.000		3.663.430		-		17.640.000		-		21.303.430	25	84,74		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.140.000		-		-		7.140.000		-		7.140.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.000.000		-		-		5.000.000		-		5.000.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.500.000		3.663.430		-		-		-		3.663.430	0	48,85		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.500.000		-		-		5.500.000		-		5.500.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.215.074.656		831.378.373		933.703.766		1.016.292.420		655.081.785		3.436.456.344	58,33	81,53		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		33		28		28		30		30		75			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.022.534.656		831.378.373		898.243.766		966.992.420		594.971.785		3.291.586.344	75	81,83		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		33		28		28		30		30		75			
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			185.040.000		-		35.460.000		49.300.000		60.110.000		144.870.000	100	78,29		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000		2.794.200		-		4.705.800		-		7.500.000	0	100		
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		1		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			7.500.000		2.794.200		-		4.705.800		-		7.500.000	0	100		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		0		1		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.225.000		26.857.238		2.400.000		-		10.954.200		40.211.438	25	41,36		
			Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		3		0		0		6		50			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		4.773.710		-		-		10.954.200		15.727.910	50	62,91		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		1		50			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.469.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			53.256.000		22.083.528		2.400.000		-		-		24.483.528	50	45,97		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		0		0		6		50			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.410.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			18.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.010.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			425.410.000		56.133.720		38.878.270		121.987.870		145.224.120		362.223.980	100	85,15		
			Persentase jenis jasa penunjang urusan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.050.000		6.333.720		5.828.520		6.081.120		6.228.370		24.471.730	100	43,66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			369.360.000		49.800.000		33.049.750		115.906.750		138.995.750		337.752.250	100	91,44		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.720.000		28.795.000		5.770.000		5.206.200		30.732.250		70.503.450	100	99,69		
			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			70.720.000		28.795.000		5.770.000		5.206.200		30.732.250		70.503.450	100	99,69		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**1.187.855.000**		**197.700.000**		**194.252.750**		**324.605.250**		**384.595.650**		1.101.153.650	**71,43**	**92,7**	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap	76		12,6		12,4		20,8		25		70,8		93,16			
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	100		16,6		16,4		28,5		32		93,5		93,5			
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)									93		93		0			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			394.691.000		49.350.000		32.242.000		118.630.000		164.661.200		364.883.200	66,67	92,45		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	16		0		0		9		7		16		100			
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			14.899.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			203.792.000		49.350.000		32.242.000		46.630.000		74.809.000		203.031.000	100	99,63		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah,	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			176.000.000		-		-		72.000.000		89.852.200		161.852.200	100	91,96		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	16		0		0		9		7		16		100			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			8.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			8.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	1		0		0		0		0		0		0			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			46.200.000		-		19.500.000		1.000.000		24.720.000		45.220.000	100	97,88		
			Sosialiasi Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10		0		3		2		5		10		100			
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			46.200.000		-		19.500.000		1.000.000		24.720.000		45.220.000	100	97,88		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	10		0		3		2		5		10		100			
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)									94		94		0			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			738.964.000		148.350.000		142.510.750		204.975.250		195.214.450		691.050.450	100	93,52		
			Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12		3		3		2		4		12		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			684.964.000		148.350.000		116.060.750		202.875.250		169.896.250		637.182.250	100	93,02		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		3		3		2		4		12		100			
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			54.000.000		-		26.450.000		2.100.000		25.318.200		53.868.200	100	99,76		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	1		0		0		0		1		1		100			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**7.558.627.139**		**1.105.369.607**		**1.633.034.353**		**872.031.360**		**1.963.563.756**		5.573.999.076	**62,13**	**73,74**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.995.178.716**		**934.557.169**		**1.403.602.053**		**726.317.680**		**1.213.240.886**		4.277.717.788	**68,4**	**85,64**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		3,5		29,62		5,95		34,11		73,18		97,57			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.1		61.1		0			
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.503.650		3.863.050		3.754.150		3.954.850		1.791.600		13.363.650	100	86,2		
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6		1		2		2		1		6		100			
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.503.650		3.863.050		3.754.150		3.954.850		1.791.600		13.363.650	100	86,2		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		1		2		2		1		6		100			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.232.413.011		880.663.351		1.286.071.323		624.356.883		902.180.316		3.693.271.873	100	87,26		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		0		0		0		40		40		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.941.002.911		854.503.351		1.222.747.423		561.610.983		782.235.516		3.421.097.273	100	86,81		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		0		0		0		40		40		100			
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			277.214.300		22.625.400		57.510.000		59.578.900		118.440.000		258.154.300	100	93,12		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.195.800		3.534.600		5.813.900		3.167.000		1.504.800		14.020.300	100	98,76		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.894.975		1.504.500		5.421.300		3.215.500		6.101.300		16.242.600	100	102,19		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			15.894.975		1.504.500		5.421.300		3.215.500		6.101.300		16.242.600	100	102,19		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128.408.040		6.900.000		15.396.060		9.747.065		62.186.662		94.229.787	55	73,38		
			Tersedainya Dokumen Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		3		3		75			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		2		3		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3		1		1		0		1		3		100			
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.095.490		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.226.750		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			32.950.800		-		-		-		19.504.402		19.504.402	75	59,19		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		3		3		75			
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.810.000		-		1.850.000		-		5.960.000		7.810.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		2		3		100			
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			82.325.000		6.900.000		13.546.060		9.747.065		36.722.260		66.915.385	100	81,28		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.313.000		37.626.268		70.828.380		44.230.496		92.045.300		244.730.444	100	85,78		
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			71.385.000		4.776.268		32.728.380		3.830.496		24.850.300		66.185.444	100	92,72		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		0		1		0		1		2		100			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			213.928.000		32.850.000		38.100.000		40.400.000		67.195.000		178.545.000	100	83,46		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.846.040		4.000.000		22.130.840		40.812.886		148.935.708		215.879.434	46,93	72,48		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		1		0		1		2		66,67			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19		0		0		0		4		4		21,05			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			161.160.000		-		13.430.000		21.372.886		120.870.000		155.672.886	100	96,6		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			111.060.000		4.000.000		8.700.840		19.440.000		21.495.708		53.636.548	66,67	48,3		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		1		0		1		2		66,67			
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.080.000		-		-		-		6.570.000		6.570.000	21,05	40,86		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19		0		0		0		4		4		21,05			
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.546.040		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**158.825.500**		**4.108.240**		**1.000.000**		**1.499.880**		**18.558.010**		25.166.130	**51,81**	**15,85**	DINAS SOSIAL	
			pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial (%)													0			
				Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	100		0		0		4,26		21,28		25,54		25,54			
				Persentase Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial (%)													0			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			158.825.500		4.108.240		1.000.000		1.499.880		18.558.010		25.166.130	51,81	15,85		
			Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		0		0		0		20		20		86,96			
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	24		0		0		4		0		4		16,67			
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			103.736.500		2.610.060		-		-		18.558.010		21.168.070	86,96	20,41		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		0		0		0		20		20		86,96			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan			55.089.000		1.498.180		1.000.000		1.499.880		-		3.998.060	16,67	7,26		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	24		0		0		4		0		4		16,67			
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**22.999.554**		**1.539.554**		**1.423.500**		**-**		**-**		2.963.054	**33,33**	**12,88**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani													0			
				persentase terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi didaerah ke desa/kelurahan asal (persen)	100		0		33,33		0		0		33,33		33,33			
				Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan			0		0		0		1		1		0			
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			22.999.554		1.539.554		1.423.500		-		-		2.963.054	33,33	12,88		
			Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3		0		1		0		0		1		33,33			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			22.999.554		1.539.554		1.423.500		-		-		2.963.054	33,33	12,88		
			Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3		0		1		0		0		1		33,33			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**1.225.693.870**		**82.689.600**		**76.180.000**		**70.200.000**		**523.597.330**		752.666.930	**66,67**	**61,41**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam			0		0		0		0		0		0		
				Indeks Peranan Sosial (Nilai)													0			
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	100		0		0		0		51,02		51,02		51,02			
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			0		0		0		100		100		0			
				Indeks Kesejahteraan Sosial Disabilitas (Nilai)													0			
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	100		19,04		3,81		5,4		71,75		100		100			
				Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia (Nilai)													0			
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			0		0		0		100		100		0			
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			680.098.120		3.376.550		-		-		235.343.185		238.719.735	50	35,1		
			Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		25		25		50			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	49		0		0		0		49		49		100			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	800		0		0		0		400		400		50			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			63.876.695		-		-		-		42.757.695		42.757.695	50	66,94		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50		0		0		0		25		25		50			
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			64.069.560		1.733.025		-		-		45.769.740		47.502.765	100	74,14		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	49		0		0		0		49		49		100			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			187.191.175		1.643.525		-		-		-		1.643.525	0	0,88		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			364.960.690		-		-		-		146.815.750		146.815.750	50	40,23		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	800		0		0		0		400		400		50			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			545.595.750		79.313.050		76.180.000		70.200.000		288.254.145		513.947.195	100	94,2		
			Tersedianya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	600		120		16		27		437		600		100			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		8		7		15		30		100			
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			247.680.200		76.440.025		-		7.200.000		144.239.385		227.879.410	100	92,01		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	600		120		16		27		437		600		100			
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			297.915.550		2.873.025		76.180.000		63.000.000		144.014.760		286.067.785	100	96,02		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		8		7		15		30		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**595.863.925**		**75.676.850**		**45.960.000**		**68.970.000**		**117.324.150**		307.931.000	**66,67**	**51,68**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)													0			
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin													0			
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	100		46,81		0		0		3,19		50		50			
				Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)													0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)													0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)													0			
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			37.877.925		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			37.877.925		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			557.986.000		75.676.850		45.960.000		68.970.000		117.324.150		307.931.000	100	55,19		
			Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	140627		130.951		0		0		9.676		140.627		100			
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	76311		72.129		0		0		4.182		76.311		100			
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			427.957.550		72.579.050		45.960.000		68.970.000		93.093.500		280.602.550	100	65,57		
			Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	140627		130.951		0		0		9.676		140.627		100			
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			130.028.450		3.097.800		-		-		24.230.650		27.328.450	100	21,02		
			Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	76311		72.129		0		0		4.182		76.311		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**539.306.100**		**4.343.600**		**103.942.500**		**2.250.000**		**80.792.750**		191.328.850	**35**	**35,48**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	100		1,87		3,32		1,73		60,38		67,3		67,3			
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			0		0		0		98,67		98,67		0			
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)			0		0		0		98,67		98,67		0			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			517.306.100		1.335.100		103.942.500		2.250.000		74.412.750		181.940.350	18,75	35,17		
			Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	650		49		26		50		120		245		37,69			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	670		0		70		0		180		250		37,31			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25		5		0		0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			235.584.000		350.000		74.490.000		250.000		13.210.000		88.300.000	37,69	37,48		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	650		49		26		50		120		245		37,69			
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			71.150.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	100		0		0		0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			203.900.000		-		29.452.500		2.000.000		61.202.750		92.655.250	37,31	45,44		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	670		0		70		0		180		250		37,31			
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			6.672.100		985.100		-		-		-		985.100	0	14,76		
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25		5		0		0		0		0		0			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			22.000.000		3.008.500		-		-		6.380.000		9.388.500	100	42,68		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18		0		0		0		18		18		100			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			22.000.000		3.008.500		-		-		6.380.000		9.388.500	100	42,68		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18		0		0		0		18		18		100			
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**20.759.474**		**2.454.594**		**926.300**		**2.793.800**		**10.050.630**		16.225.324	**100**	**78,16**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase pemeliharaan TMP (persen)	100		0		100		0		0		100		100			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			20.759.474		2.454.594		926.300		2.793.800		10.050.630		16.225.324	100	78,16		
			Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1		0		1		0		0		1		100			
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			20.759.474		2.454.594		926.300		2.793.800		10.050.630		16.225.324	100	78,16		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1		0		1		0		0		1		100			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**245.863.650**		**10.200.000**		**2.400.000**		**15.154.000**		**205.240.200**		232.994.200	**136,86**	**94,77**		
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**100.000.000**		-		-		-		**94.833.000**		94.833.000	**112,5**	**94,83**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)			0		0		0		35,46		35,46		0			
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi*	78,75		0		0		0		78,75		78,75		100			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			89.760.000		-		-		-		89.713.000		89.713.000	100	99,95		
			Persentase Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40		0		0		0		40		40		100			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster			89.760.000		-		-		-		89.713.000		89.713.000	100	99,95		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	40		0		0		0		40		40		100			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			10.240.000		-		-		-		5.120.000		5.120.000	125	50		
			Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4		0		0		0		5		5		125			
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			10.240.000		-		-		-		5.120.000		5.120.000	125	50		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	4		0		0		0		5		5		125			
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**96.119.850**		**8.700.000**		**2.400.000**		**12.594.000**		**66.657.500**		90.351.500	**123,07**	**94**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)			1,13		15,73		15,56		22,23		22,23		0			
				Presentase pencari kerja yang ditempatkan (persen)	35,18		0,28		7,33333		7,25333		10,36		25,227		71,71			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			96.119.850		8.700.000		2.400.000		12.594.000		66.657.500		90.351.500	123,07	94		
			tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1500		21		550		544		777		1.892		126,13			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	10		0		0		0		12		12		120			
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			36.120.000		8.700.000		2.400.000		12.594.000		9.456.000		33.150.000	126,13	91,78		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1500		21		550		544		777		1.892		126,13			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			59.999.850		-		-		-		57.201.500		57.201.500	120	95,34		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	10		0		0		0		12		12		120			
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**49.743.800**		**1.500.000**		**-**		**2.560.000**		**43.749.700**		47.809.700	**175**	**96,11**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BP JS	7,88		1		0		2		6,93		9,93		126,02			
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)			1		0		2		6,93		6,93		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			49.743.800		1.500.000		-		2.560.000		43.749.700		47.809.700	175	96,11		
			Persentase perusahaan yang telah Melakukan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	2		1		0		2		0		3		150			
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1		0		0		0		2		2		200			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			5.000.000		1.500.000		-		2.560.000		-		4.060.000	150	81,2		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	2		1		0		2		0		3		150			
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			44.743.800		-		-		-		43.749.700		43.749.700	200	97,78		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		0		0		0		2		2		200			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**4.204.035.498**		**607.465.034**		**1.123.074.135**		**862.273.210**		**987.897.398**		3.580.709.777	**101,51**	**85,17**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.476.173.101**		**544.669.034**		**972.447.210**		**758.603.563**		**739.481.823**		3.015.201.630	**94,44**	**86,74**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		16,48		30,22		20,92		27,39		95,01		126,68			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.002.415		5.066.425		1.080.000		9.435.990		-		15.582.415	100	97,38		
			Tersedia nya dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6		2		1		3				6		100			
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16.002.415		5.066.425		1.080.000		9.435.990		-		15.582.415	100	97,38		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		2		1		3				6		100			
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.096.555.492		505.877.306		967.882.698		651.139.202		684.761.700		2.809.660.906	125	90,74		
			tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		40		40		40		40		40		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8		3		3		3		3		12		150			
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.998.125.492		478.144.806		939.497.698		630.659.202		671.081.700		2.719.383.406	100	90,7		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		40		40		40		40		40		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			98.430.000		27.732.500		28.385.000		20.480.000		13.680.000		90.277.500	150	91,72		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8		3		3		3		3		12		150			
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.941.350		4.344.350		-		-		-		4.344.350	100	87,92		
			tersedianya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		6		0		0		0		6		100			
		2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.941.350		4.344.350		-		-		-		4.344.350	100	87,92		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		6		0		0		0		6		100			
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.176.845		8.211.650		-		-		-		8.211.650	100	38,78		
			tersedianaya administras umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.176.845		8.211.650		-		-		-		8.211.650	100	38,78		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			127.531.367		19.169.303		3.484.512		30.878.371		41.120.123		94.652.309	100	74,22		
			tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.531.367		2.169.303		3.484.512		4.628.371		4.620.123		14.902.309	100	76,3		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			108.000.000		17.000.000		-		26.250.000		36.500.000		79.750.000	100	73,84		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209.965.632		2.000.000		-		67.150.000		13.600.000		82.750.000	50	39,41		
			tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			191.784.000		2.000.000		-		67.150.000		13.600.000		82.750.000	100	43,15		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.181.632		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**44.785.942**		**-**		**3.000.000**		**26.785.942**		**-**		29.785.942	**100**	**66,51**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)			0		0		0		26,91		26,91		0			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)			0		0		0		35		35		0			
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD* (persen)	30		0		0		0		26,91		26,91		89,7			
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga	60		0		0		0		60		60		100			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			44.785.942		-		3.000.000		26.785.942		-		29.785.942	100	66,51		
			terlaksananya pelembagaan pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)	32		0		0		32		0		32		100			
		2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			44.785.942		-		3.000.000		26.785.942		-		29.785.942	100	66,51		
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)	32		0		0		32		0		32		100			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**180.440.105**		**5.000.000**		**-**		**14.020.105**		**112.780.000**		131.800.105	**143,06**	**73,04**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (persen)	50		0		0		0		30		30		60			
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			100		100		100		100		100		0			
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan			111.420.105		5.000.000		-		14.020.105		43.760.000		62.780.105	164,58	56,35		
			tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	24		10		0		35		10		55		229,17			
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	20		0		0		0		20		20		100			
		2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan			62.020.105		5.000.000		-		14.020.105		3.000.000		22.020.105	229,17	35,5		
			Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	24		10		0		35		10		55		229,17			
		2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			49.400.000		-		-		-		40.760.000		40.760.000	100	82,51		
			Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	20		0		0		0		20		20		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.020.000		-		-		-		69.020.000		69.020.000	100	100		
			terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanaan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	50		0		0		0		50		50		100			
		2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			69.020.000		-		-		-		69.020.000		69.020.000	100	100		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	50		0		0		0		50		50		100			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**73.000.000**		-		-		-		**73.000.000**		73.000.000	**100**	**100**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai dengan 8 fungsi keluarga	100		0		0		0		100		100		100			
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah			73.000.000		-		-		-		73.000.000		73.000.000	100	100		
			terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	210		0		0		0		210		210		100			
		2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah			73.000.000		-		-		-		73.000.000		73.000.000	100	100		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	210		0		0		0		210		210		100			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**147.396.350**		-		**17.651.925**		**22.513.600**		**42.555.575**		82.721.100	**100**	**56,12**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara	Persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak (persen)	20		20		20		20		20		20		100			
				Persentase forum anak yang aktif (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)			0		0		0		61,7		61,7		0			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan			100.000.000		-		17.651.925		-		42.555.575		60.207.500	100	60,21		
			trsedianya pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	1		0		0		0		1		1		100			
		2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000		-		17.651.925		-		42.555.575		60.207.500	100	60,21		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan			47.396.350		-		-		22.513.600		-		22.513.600	100	47,5		
			terlaksanaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1		0		0		1		0		1		100			
		2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah			47.396.350		-		-		22.513.600		-		22.513.600	100	47,5		
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1		0		0		1		0		1		100			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**282.240.000**		**57.796.000**		**129.975.000**		**40.350.000**		**20.080.000**		248.201.000	**74**	**87,94**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan (persen)	100		100		100		100		100		100		100			
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)			100		100		100		100		100		0			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			101.500.000		-		96.500.000		-		-		96.500.000	100	95,07		
			terlaksanaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1		0		1		0		0		1		100			
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			101.500.000		-		96.500.000		-		-		96.500.000	100	95,07		
			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1		0		1		0		0		1		100			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat			180.740.000		57.796.000		33.475.000		40.350.000		20.080.000		151.701.000	48	83,93		
			tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (0)	25		3		3		3		3		12		48			
		2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah			180.740.000		57.796.000		33.475.000		40.350.000		20.080.000		151.701.000	48	83,93		
			Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (0)	25		3		3		3		3		12		48			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**6.378.407.725**		**523.013.680**		**1.640.550.278**		**707.134.421**		**2.273.501.924**		5.144.200.303	**82,01**	**80,65**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.573.849.770**		**505.509.680**		**1.636.350.278**		**691.836.921**		**919.982.371**		3.753.679.250	**92,03**	**82,07**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		17,86		12,76		25		25		80,62		107,49			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			17.86		12.76		25		25		25		0			
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.715.700		4.853.601		2.758.001		8.399.301		1.470.000		17.480.903	71,43	111,23		
			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		0		3		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	0		0		0		3		0		3		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		0		3		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7		1		1		1		0		3		42,86			
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.264.100		-		-		7.260.500		-		7.260.500	100	99,95		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		1		1		1		-		3	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		0		3		0			
		2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		2.758.000		1.138.800		-		3.896.800	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		0		3		0		3		0			
		2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		2.426.800		-		-		-		2.426.800	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		1		1		1		0		3		0			
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.451.600		2.426.800		-		-		1.470.000		3.896.800	42,86	46,11		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		1		1		1		0		3		42,86			
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.151.636.649		446.285.141		1.587.416.995		592.975.444		806.698.154		3.433.375.734	91,67	82,7		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		38		38		38		38		38		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		0		3		75			
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.951.908.449		440.065.141		1.528.956.995		592.975.444		806.698.154		3.368.695.734	100	85,24		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		38		38		38		38		38		100			
		2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			198.120.000		6.220.000		58.460.000		-		-		64.680.000	100	32,65		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.608.200		-		-		-		-		-	75	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		0		3		75			
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.173.273		16.531.500		2.661.500		42.563.500		18.886.000		80.642.500	116,67	82,99		
			Tersusunya Dokumen administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	0		0		0		1		0		1		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10		10		0		5		0		15		150			
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.572.273		7.201.500		2.661.500		27.673.500		7.546.000		45.082.500	100	98,93		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.184.000		-		-		6.500.000		1.670.000		8.170.000	100	57,6		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-		-		6.500.000		1.670.000		8.170.000	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	0		0		0		1		0		1		0			
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37.417.000		9.330.000		-		1.890.000		8.000.000		19.220.000	150	51,37		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		0		5		0		15		150			
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.310.000		-		-		-		12.299.999		12.299.999	100	92,41		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.310.000		-		-		-		12.299.999		12.299.999	100	92,41		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210.791.148		34.339.438		43.513.782		30.099.869		58.603.479		166.556.568	100	79,01		
			Tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4		2		0		0		2		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.522.798		8.510.438		15.710.782		7.890.369		11.017.479		43.129.068	100	68,98		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.268.350		5.329.000		-		3.687.000		3.925.000		12.941.000	100	97,53		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4		2		0		0		2		4		100			
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			135.000.000		20.500.000		27.803.000		18.522.500		43.661.000		110.486.500	100	81,84		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.223.000		3.500.000		-		17.798.807		22.024.739		43.323.546	28,57	50,84		
			Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		1		1		2		28,57			
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			85.223.000		3.500.000		-		17.798.807		22.024.739		43.323.546	28,57	50,84		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		1		1		2		28,57			
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**7.447.000**		**933.000**		**-**		**1.187.000**		**2.880.000**		5.000.000	**100**	**67,14**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)			0		0		70,21		0		17,553		0			
				Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan	100						70,21		60		32,553		32,55			
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah			7.447.000		933.000		-		1.187.000		2.880.000		5.000.000	100	67,14		
			Tersedianya Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan (%)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	4		2		0		1		1		4		100			
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			7.447.000		933.000		-		1.187.000		2.880.000		5.000.000	100	67,14		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	4		2		0		1		1		4		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**1.726.840.655**		**10.608.000**		**3.300.000**		**7.010.000**		**1.326.638.253**		1.347.556.253	**77,27**	**78,04**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	100		16,32		0		0		0		16,32		16,32			
				Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			16,32						88,51		26,208		0			
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			51.975.855		3.578.000		-		3.320.000		2.230.000		9.128.000	58,33	17,56		
			Tersedianya Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	4		2		0		0		0		2		50			
				Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang	1		2		0		0		0		2		200			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	20		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4		0		0		0		0		0		0			
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4		0		0		2		2		4		100			
				Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah	4		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			4.350.000		895.000		-		-		1.960.000		2.855.000	50	65,63		
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	4		2		0		0		0		2		50			
		2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			32.493.105		2.683.000		-		-		-		2.683.000	200	8,26		
			Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	1		2		0		0		0		2		200			
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			3.127.900		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	20		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			2.714.850		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			6.899.000		-		-		3.320.000		270.000		3.590.000	100	52,04		
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		2		2		4		100			
		2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			2.391.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			163.024.000		3.550.000		450.000		-		139.431.003		143.431.003	100	87,98		
			Tersedianya jumlah cadangan pangan yang tersalurkan ke daerah rawan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10		2		0		0		8		10		100			
				Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10		5		0		0		5		10		100			
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			142.880.000		1.000.000		450.000		-		134.898.003		136.348.003	100	95,43		
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10		2		0		0		8		10		100			
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			20.144.000		2.550.000		-		-		4.533.000		7.083.000	100	35,16		
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10		5		0		0		5		10		100			
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.511.840.800		3.480.000		2.850.000		3.690.000		1.184.977.250		1.194.997.250	100	79,04		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen pelaksanaan kegiatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita	1		1		0		0		0		1		100			
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			8.360.800		2.340.000		-		1.800.000		-		4.140.000	100	49,52		
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.500.000.000		-		2.400.000		-		1.184.977.250		1.187.377.250	100	79,16		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4		0		1		0		3		4		100			
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			3.480.000		1.140.000		450.000		1.890.000		-		3.480.000	100	100		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**35.553.300**		**2.970.000**		**-**		**1.760.000**		**20.861.300**		25.591.300	**66,67**	**71,98**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang ditangani (%)	100		8				1		0		2,25		2,25			
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			0		0		0		0		0		0			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			10.125.000		-		-		1.760.000		1.960.000		3.720.000	100	36,74		
			Tersusunnya dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			10.125.000		-		-		1.760.000		1.960.000		3.720.000	100	36,74		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.428.300		2.970.000		-		-		18.901.300		21.871.300	50	86,01		
			tersedianya persentase penanganan kerawanan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	4		1		0		0		3		4		100			
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.498.300		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			22.930.000		2.970.000		-		-		18.901.300		21.871.300	100	95,38		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	4		1		0		0		3		4		100			
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**34.717.000**		**2.993.000**		**900.000**		**5.340.500**		**3.140.000**		12.373.500	**72**	**35,64**	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan			0		0		0		0		0		0			
				Pangan segar aman konsumsi (%)	100		41,67		25		12,5		0		79,17		79,17			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			34.717.000		2.993.000		900.000		5.340.500		3.140.000		12.373.500	72	35,64		
			Tersedianya pangan segar aman konsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	5		1		0		1		1		3		60			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	4		2		0		1		1		4		100			
				Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		2		0		0		1		3		60			
				Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	5		0		3		0		0		3		60			
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5		3		0		1		0		4		80			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			5.807.000		450.000		-		1.750.000		900.000		3.100.000	60	53,38		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		1		1		3		60			
		2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			5.702.000		1.223.000		-		765.000		720.000		2.708.000	100	47,49		
			Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	4		2		0		1		1		4		100			
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			10.429.000		870.000		-		-		300.000		1.170.000	60	11,22		
			Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		2		0		0		1		3		60			
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			6.893.000		-		900.000		320.000		1.220.000		2.440.000	60	35,4		
			Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	5		0		3		0		0		3		60			
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			5.886.000		450.000		-		2.505.500		-		2.955.500	80	50,21		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		3		0		1		0		4		80			
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**34.144.026**		**2.530.000**		**1.380.000**		**6.212.500**		**12.464.750**		22.587.250	**100**	**66,15**		
		2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**34.144.026**		**2.530.000**		**1.380.000**		**6.212.500**		**12.464.750**		22.587.250	**100**	**66,15**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik	70								70		70		100			
				Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)									0		0		0			
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			34.144.026		2.530.000		1.380.000		6.212.500		12.464.750		22.587.250	100	66,15		
			Berita Acara Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita	2		0		0		1		1		2		100			
		2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.144.026		2.530.000		1.380.000		6.212.500		12.464.750		22.587.250	100	66,15		
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita	2		0		0		1		1		2		100			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**15.766.267.792**		**3.146.209.900**		**2.743.789.616**		**3.259.993.820**		**5.346.230.514**		14.496.223.850	**93,74**	**91,94**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.715.517.207**		**1.415.267.050**		**1.658.672.926**		**1.350.251.564**		**1.610.634.607**		6.034.826.147	**87,84**	**89,86**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		66.67		66.67		66.67		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		18,26		14,67		25,71		30,26		88,9		118,53			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.653.306		1.500.000		-		10.000.000		10.500.000		22.000.000	100	63,49		
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		0		2		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.569.626		290.000		-		2.023.500		2.740.000		5.053.500	100	43,68		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		0		2		3		100			
		2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.589.435		450.000		-		1.364.000		1.265.000		3.079.000	100	85,78		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.728.165		-		-		1.518.500		1.114.000		2.632.500	100	70,61		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.752.205		-		-		1.321.500		1.273.500		2.595.000	100	69,16		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.246.505		-		-		1.266.500		1.034.000		2.300.500	100	70,86		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.527.225		-		-		1.171.500		1.219.500		2.391.000	100	67,79		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		0		1		0		0		1		100			
		2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.240.145		760.000		-		1.334.500		1.854.000		3.948.500	100	75,35		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.834.937.452		1.328.033.379		1.495.700.580		1.209.776.912		1.246.696.852		5.280.207.723	97,08	90,49		
			Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		54		54		54		53		53		88,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16		4		4		4		4		16		100			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.548.961.004		1.260.189.379		1.430.510.580		1.156.211.912		1.155.325.852		5.002.237.723	88,33	90,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60		54		54		54		53		53		88,33			
		2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			253.500.000		65.190.000		65.190.000		43.460.000		78.450.000		252.290.000	100	99,52		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1		1		1		1		1		100			
		2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			16.356.769		1.375.500		-		5.050.500		7.187.500		13.613.500	100	83,23		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			16.119.679		1.278.500		-		5.054.500		5.733.500		12.066.500	100	74,86		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		4		4		4		4		16		100			
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.376.717		516.000		-		773.000		1.393.000		2.682.000	100	79,43		
			Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13		4		3		3		3		13		100			
		2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.376.717		516.000		-		773.000		1.393.000		2.682.000	100	79,43		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	13		4		3		3		3		13		100			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.383.322		-		-		1.033.000		1.720.500		2.753.500	66,67	11,29		
			Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.236.222		-		-		1.033.000		1.720.500		2.753.500	100	85,08		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.919.100		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.228.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.952.108		2.000.000		-		31.622.575		16.388.000		50.010.575	80,56	75,83		
			Tersedianya laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0		0		2		3		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		7		3		10		83,33			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.236.730		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.998.198		-		-		7.087.000		3.986.000		11.073.000	100	73,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.859.180		-		-		1.768.000		-		1.768.000	100	95,1		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.500.000		2.000.000		-		-		5.500.000		7.500.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		0		0		2		3		100			
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.900.000		-		-		5.112.000		932.000		6.044.000	100	76,51		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31.458.000		-		-		17.655.575		5.970.000		23.625.575	83,33	75,1		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		7		3		10		83,33			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76.670.000		-		-		-		76.667.001		76.667.001	100	100		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		0		0		0		9		9		100			
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			76.670.000		-		-		-		76.667.001		76.667.001	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		0		0		0		9		9		100			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			282.678.302		62.347.671		55.054.846		64.137.983		74.741.350		256.281.850	100	90,66		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.130.302		13.747.671		14.084.446		14.104.783		14.302.733		56.239.633	100	90,52		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			220.548.000		48.600.000		40.970.400		50.033.200		60.438.617		200.042.217	100	90,7		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			392.866.000		20.870.000		107.917.500		32.908.094		182.527.904		344.223.498	66,67	87,62		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpeliharanya Barang Milik Daeah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		7		7		7		7		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		0		0		0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			170.698.000		3.964.000		59.525.500		5.466.500		101.731.250		170.687.250	100	99,99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			213.438.000		16.906.000		48.392.000		27.441.594		80.796.654		173.536.248	100	81,31		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		7		7		7		7		100			
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.730.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13		0		0		0		0		0		0			
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**208.895.165**		**-**		**-**		**82.169.115**		**107.738.950**		189.908.065	**100**	**90,91**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			208.895.165		-		-		82.169.115		107.738.950		189.908.065	100	90,91		
			Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			208.895.165		-		-		82.169.115		107.738.950		189.908.065	100	90,91		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**221.865.857**		**-**		**37.690.000**		**5.923.450**		**110.606.250**		154.219.700	**100**	**69,51**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (Indeks)			0		0		0		76,64		76,64		0			
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)			0		0		0		74,48		74,48		0			
				Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			221.865.857		-		37.690.000		5.923.450		110.606.250		154.219.700	100	69,51		
			Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		0		1		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			103.791.637		-		37.690.000		1.179.100		50.059.100		88.928.200	100	85,68		
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		0		1		0		1		1		100			
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan			18.998.217		-		-		589.000		4.079.000		4.668.000	100	24,57		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan			17.897.720		-		-		2.762.850		-		2.762.850	100	15,44		
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			15.915.900		-		-		514.350		14.774.350		15.288.700	100	96,06		
			Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			8.172.473		-		-		312.500		792.500		1.105.000	100	13,52		
			Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			57.089.910		-		-		565.650		40.901.300		41.466.950	100	72,63		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**1.541.538.303**		**393.637.600**		**221.889.940**		**336.872.010**		**449.599.490**		1.401.999.040	**97,77**	**90,95**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman	Persentase ruang terbuka hijau (%)	10		4,65		4,65		4,65		4,65		18,6		186			
				Persentase RTH (Persentase)			4,65		4,65		4,65		4,65		18,6		0			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.541.538.303		393.637.600		221.889.940		336.872.010		449.599.490		1.401.999.040	97,77	90,95		
			Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.24		2,19		2,19		2,19		2,19		2,19		97,77			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.541.538.303		393.637.600		221.889.940		336.872.010		449.599.490		1.401.999.040	97,77	90,95		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.24		2,19		2,19		2,19		2,19		2,19		97,77			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN**			**139.253.660**		-		-		-		**105.779.827**		105.779.827	**100**	**75,96**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan (%)	80		0		0		0		100		100		125			
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			139.253.660		-		-		-		105.779.827		105.779.827	100	75,96		
			Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	6		0		0		0		6		6		100			
		2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan			139.253.660		-		-		-		105.779.827		105.779.827	100	75,96		
			Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	6		0		0		0		6		6		100			
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**7.669.865**		**913.000**		-		**200.000**		**1.800.000**		2.913.000	**62**	**37,98**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah			16		14		24		8		62		0			
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang	80		16		14		24		8		62		77,5			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.669.865		913.000		-		200.000		1.800.000		2.913.000	62	37,98		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50		8		7		12		4		31		62			
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan			7.669.865		913.000		-		200.000		1.800.000		2.913.000	62	37,98		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50		8		7		12		4		31		62			
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**210.600.350**		-		**43.062.000**		**82.210.750**		**59.690.350**		184.963.100	**102,5**	**87,83**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya			0		50		0		0		50		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	50		0		102,5		0		0		102,5		205			
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			210.600.350		-		43.062.000		82.210.750		59.690.350		184.963.100	102,5	87,83		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	200		0		205		0		0		205		102,5			
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			210.600.350		-		43.062.000		82.210.750		59.690.350		184.963.100	102,5	87,83		
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	200		0		205		0		0		205		102,5			
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**17.074.565**		**-**		**-**		**1.934.565**		**-**		1.934.565	**80**	**11,33**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan			0		0		0		80		80		0			
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Status)	100		50		50		50		100		100		100			
				Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi (%)	80		0		0		0		80		80		100			
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.074.565		-		-		1.934.565		-		1.934.565	80	11,33		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5		0		0		0		4		4		80			
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			17.074.565		-		-		1.934.565		-		1.934.565	80	11,33		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5		0		0		0		4		4		80			
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**12.609.180**		**2.126.000**		**-**		**400.000**		**4.800.000**		7.326.000	**266,67**	**58,1**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)			66,67		133,33		66,67		0		266,67		0			
				Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100		66,67		133,33		66,67		0		266,67		266,67			
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			12.609.180		2.126.000		-		400.000		4.800.000		7.326.000	266,67	58,1		
			Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3		2		4		2		0		8		266,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	0		2		4		2		0		8		0			
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			12.609.180		1.063.000		-		200.000		2.400.000		3.663.000	266,67	29,05		
			Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3		2		4		2		0		8		266,67			
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			-		1.063.000		-		200.000		2.400.000		3.663.000	0	0		
			Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	0		2		4		2		0		8		0			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**6.691.243.640**		**1.334.266.250**		**782.474.750**		**1.400.032.366**		**2.895.581.040**		6.412.354.406	**89,88**	**95,83**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	82,88		67,86		67,53		67,83		67,2		67,2		81,08			
				Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber	30		14,07		14,42		14,04		14,76		14,76		49,2			
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)			0		0		0		41,5		41,5		0			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6.684.956.075		1.334.266.250		782.474.750		1.400.032.366		2.893.461.040		6.410.234.406	88,43	95,89		
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	5		0		0		0		2		2		40			
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	68500		16.964		16.320		17.607		17.642		68.533		100,05			
				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	15		15		15		15		15		15		100			
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah	25		23,07		23,07		23,07		23,07		23,07		92,28			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau	68500		14.721		14.703		14.740		15.221		59.385		86,69			
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			24.542.100		-		-		-		19.351.600		19.351.600	100	78,85		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			13.500.000		-		-		-		9.000.000		9.000.000	40	66,67		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0		0		0		2		2		40			
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			55.106.705		-		-		-		53.395.000		53.395.000	100	96,89		
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1		0		0		0		1		1		100			
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			976.713.844		240.699.950		159.800.000		240.579.000		314.806.000		955.884.950	100,05	97,87		
			Sampah yang tertangani melalui proses	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	68500		16.964		16.320		17.607		17.642		68.533		100,05			
		2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			1.453.295.690		353.592.000		149.960.100		174.561.760		747.159.940		1.425.273.800	100	98,07		
			Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	15		15		15		15		15		15		100			
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			2.405.050.910		576.150.000		405.700.000		585.258.000		760.427.000		2.327.535.000	92,28	96,78		
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	25		23,07		23,07		23,07		23,07		23,07		92,28			
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			1.756.746.826		163.824.300		67.014.650		399.633.606		989.321.500		1.619.794.056	86,69	92,2		
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	68500		14.721		14.703		14.740		15.221		59.385		86,69			
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			6.287.565		-		-		-		2.120.000		2.120.000	100	33,72		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	2		0		0		1		1		2		100			
		2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			6.287.565		-		-		-		2.120.000		2.120.000	100	33,72		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	2		0		0		1		1		2		100			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**9.624.913.175**		**1.706.885.625**		**1.456.287.101**		**3.181.681.736**		**2.417.861.283**		8.762.715.745	**94,94**	**91,04**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.626.596.505**		**1.706.885.625**		**1.442.233.601**		**2.709.619.736**		**2.022.515.524**		7.881.254.486	**91,85**	**91,36**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	persentase Dokumen Administrasi keuangan (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		68.4		68.4		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.396.490		3.442.450		-		2.961.750		2.781.550		9.185.750	100	97,76		
			Tersedianya Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1		1		0		0		0		1		100			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.628.300		-		-		-		1.574.050		1.574.050	100	96,67		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.016.000		-		-		2.961.750		-		2.961.750	100	98,2		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.250.290		-		-		-		1.207.500		1.207.500	100	96,58		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.501.900		3.442.450		-		-		-		3.442.450	100	98,3		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1		0		0		0		1		100			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.740.245.868		1.542.370.766		1.348.010.568		1.696.140.538		1.680.745.538		6.267.267.410	108,33	92,98		
			Tersedia Dokumen Administrasi Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		65		65		75		75		75		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		4		4		4		4		16		133,33			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		1		1		1		1		4		100			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.655.638.793		1.540.266.616		1.327.070.568		1.661.695.538		1.661.695.538		6.190.728.260	100	93,01		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		65		65		75		75		75		100			
		2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			72.160.000		-		20.940.000		32.170.000		19.050.000		72.160.000	133,33	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		4		4		4		4		16		133,33			
		2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.289.030		-		-		2.275.000		-		2.275.000	100	99,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.158.045		2.104.150		-		-		-		2.104.150	100	20,71		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.527.000		1.818.000		-		-		-		1.818.000	100	51,55		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		1		0		1				2		100			
		2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.527.000		1.818.000		-		-		-		1.818.000	100	51,55		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		1		0		1				2		100			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			63.807.670		6.166.800		22.767.500		3.017.600		950.000		32.901.900	73,33	51,56		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		3		3		3		2		11		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2		0		0		2		0		2		100			
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.529.670		-		-		-		950.000		950.000	20	3,11		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		0		1		1		20			
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.800.000		3.500.000		-		-		-		3.500.000	100	92,11		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		3		3		3		2		11		100			
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.478.000		2.666.800		22.767.500		3.017.600		-		28.451.900	100	96,52		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		2		0		2		100			
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			930.663.425		-		-		821.719.730		-		821.719.730	100	88,29		
			Tersedianya Dokumen Pengadaan milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		5		0		5		100			
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			930.663.425		-		-		821.719.730		-		821.719.730	100	88,29		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		5		0		5		100			
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			785.081.542		153.087.609		47.950.702		149.140.696		316.838.436		667.017.443	100	84,96		
			Tersedianya Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			339.610.248		38.160.109		16.865.902		28.596.196		193.076.436		276.698.643	100	81,48		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			445.471.294		114.927.500		31.084.800		120.544.500		123.762.000		390.318.800	100	87,62		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.874.510		-		23.504.831		36.639.422		21.200.000		81.344.253	66,67	86,65		
			Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		7		0		7		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0										0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		4		0		4		100			
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			79.450.000		-		23.504.831		34.665.912		21.200.000		79.370.743	100	99,9		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		7		0		7		100			
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			1.471.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.980.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0										0		0			
		2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.973.510		-		-		1.973.510		-		1.973.510	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		4		0		4		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**902.345.050**		**-**		**7.200.000**		**444.562.519**		**376.687.247**		828.449.766	**100**	**91,81**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (persen)	97								97,3		97,3		100,31			
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital									2,46		2,46		0			
				Persentase penerbitan surat pindah datang penduduk	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (persen)	23,00								73,37		73,37		319			
				Persentase penerbitan KK (persen)	100								98,84		98,84		98,84			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)			0		0		0		73,37		73,37		0			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			783.584.000		-		-		416.531.919		298.876.997		715.408.916	100	91,3		
			Tersedianya Penerbitan Layanan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4		0		0		2		2		4		100			
		2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			783.584.000		-		-		416.531.919		298.876.997		715.408.916	100	91,3		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4		0		0		2		2		4		100			
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			5.094.000		-		-		3.000.000		700.000		3.700.000	100	72,63		
			Tersedianya Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	2		0		0		1		1		2		100			
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			5.094.000		-		-		3.000.000		700.000		3.700.000	100	72,63		
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	2		0		0		1		1		2		100			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			113.667.050		-		7.200.000		25.030.600		77.110.250		109.340.850	100	96,19		
			Tersedianya Dokumen Pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	2		0		0		0		2		2		100			
		2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait			113.667.050		-		7.200.000		25.030.600		77.110.250		109.340.850	100	96,19		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	2		0		0		0		2		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**21.002.700**		**-**		**-**		**13.962.731**		**6.220.000**		20.182.731	**100**	**96,1**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Bayi berakta kelahiran (persen)	100,00		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			14.303.075		-		-		13.637.731		-		13.637.731	100	95,35		
			Tersedianya Dokumen Pencatatn sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4						4				4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang	2		0		0		2		0		2		100			
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			12.553.075		-		-		11.887.731		-		11.887.731	100	94,7		
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4						4				4		100			
		2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			1.750.000		-		-		1.750.000		-		1.750.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2		0		0		2		0		2		100			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			6.699.625		-		-		325.000		6.220.000		6.545.000	100	97,69		
			Tersedianya Dokumen pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	4		0		0		2		2		4		100			
		2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait			6.699.625		-		-		325.000		6.220.000		6.545.000	100	97,69		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	4		0		0		2		2		4		100			
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**68.979.595**		**-**		**6.233.500**		**11.800.250**		**8.916.512**		26.950.262	**100**	**39,07**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	100		0		0		0		100		100		100			
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)			0		0		0		218		218		0			
				Persentase Informasi Kependudukan yang			0		0		0		50		50		0			
				Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (persen)	32								35		35		109,38			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			13.729.525		-		2.821.000		2.010.000		7.429.756		12.260.756	100	89,3		
			Tersedianya Dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			7.427.325		-		2.821.000		2.010.000		2.530.500		7.361.500	100	99,11		
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			6.302.200		-		-		-		4.899.256		4.899.256	100	77,74		
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			55.250.070		-		3.412.500		9.790.250		1.486.756		14.689.506	100	26,59		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4		0		2		0		2		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	5						5				5		100			
		2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			5.249.370		-		3.412.500		-		1.486.756		4.899.256	100	93,33		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4		0		2		0		2		4		100			
		2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			50.000.700		-		-		9.790.250		-		9.790.250	100	19,58		
			Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	5						5				5		100			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**5.989.325**		**-**		**620.000**		**1.736.500**		**3.522.000**		5.878.500	**100**	**98,15**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Lampung Utara (jumlah penduduk usia, kepadatan dll) (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			5.989.325		-		620.000		1.736.500		3.522.000		5.878.500	100	98,15		
			Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1		0		0		0		1		1		100			
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			5.989.325		-		620.000		1.736.500		3.522.000		5.878.500	100	98,15		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1		0		0		0		1		1		100			
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**6.596.486.141**		**1.445.397.652**		**2.122.657.605**		**1.189.593.408**		**1.330.454.026**		6.088.102.691	**84,07**	**92,29**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.771.808.676**		**510.151.689**		**1.739.853.295**		**972.591.228**		**1.116.131.521**		4.338.727.733	**85,64**	**90,92**	Plt. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		15		25		35		50		50		66,67			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		64.05		64.05		0			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.661.380		-		11.111.380		-		-		11.111.380	100	75,79		
			tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.572.440		-		5.072.440		-		-		5.072.440	100	66,99		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.088.940		-		6.038.940		-		-		6.038.940	100	85,19		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.311.030.576		472.078.120		1.605.274.549		905.566.692		1.037.129.869		4.020.049.230	100	93,25		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37		37		37		37		37		37		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		3		2		0		1		6		100			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.077.530.576		410.218.120		1.575.954.549		872.636.692		938.709.869		3.797.519.230	100	93,13		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37		37		37		37		37		37		100			
		2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			233.500.000		61.860.000		29.320.000		32.930.000		98.420.000		222.530.000	100	95,3		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		3		2		0		1		6		100			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			41.078.626		11.378.526		6.829.500		11.329.380		11.020.000		40.557.406	95,83	98,73		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		0		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12				3		3		4		10		83,33			
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.816.360		3.816.360		-		-		-		3.816.360	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		0		0		0		1		100			
		2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.257.266		4.267.166		-		979.880		-		5.247.046	100	99,81		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.655.000		3.295.000		830.000		2.530.000		-		6.655.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		0		2		100			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.350.000		-		5.999.500		7.819.500		11.020.000		24.839.000	83,33	97,98		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12				3		3		4		10		83,33			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.937.900		-		-		2.737.900		-		2.737.900	25	17,18		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2										0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		1		0		1		50			
		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2										0		0			
		2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.937.900		-		-		2.737.900		-		2.737.900	50	17,18		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		1		0		1		50			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237.710.584		18.386.514		95.266.425		48.022.756		65.421.652		227.097.347	100	95,54		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		3		10		6		5		24		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		4		3		4		12		100			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.015.200		3.553.569		17.484.995		10.469.756		12.418.962		43.927.282	100	87,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		3		10		6		5		24		100			
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			187.695.384		14.832.945		77.781.430		37.553.000		53.002.690		183.170.065	100	97,59		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		4		3		4		12		100			
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.389.610		8.308.529		21.371.441		4.934.500		2.560.000		37.174.470	80	24,56		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1		4		80			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0										0		0			
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			39.040.360		8.308.529		21.371.441		4.934.500		2.560.000		37.174.470	80	95,22		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1		4		80			
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			112.349.250		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0										0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**1.348.531.840**		**889.665.963**		**91.621.810**		**207.704.680**		**90.971.840**		1.279.964.293	**100**	**94,92**	Plt. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)			0		0		0		6		6		0			
				Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari	6,00		0		0		0		6		6		100			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			1.348.531.840		889.665.963		91.621.810		207.704.680		90.971.840		1.279.964.293	100	94,92		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0		0		0		0		1		1		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7		5		1		1		0		7		100			
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			153.371.840		-		-		-		90.971.840		90.971.840	0	59,31		
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0		0		0		0		1		1		0			
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1.195.160.000		889.665.963		91.621.810		207.704.680		-		1.188.992.453	100	99,48		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7		5		1		1		0		7		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**90.245.625**		**45.580.000**		**7.342.500**		**4.297.500**		**32.545.625**		89.765.625	**100**	**99,47**	Plt. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)			0		0		0		84,48		84,48		0			
				Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD (Nilai)	80,00		0		20		40		60		60		75			
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)			0		0		0		20		20		0			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			90.245.625		45.580.000		7.342.500		4.297.500		32.545.625		89.765.625	100	99,47		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	4		0		1		2		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3		3		0		0		0		3		100			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			44.665.625		-		7.342.500		4.297.500		32.545.625		44.185.625	100	98,93		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	4		0		1		2		1		4		100			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			45.580.000		45.580.000		-		-		-		45.580.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3		3		0		0		0		3		100			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**385.900.000**		**-**		**283.840.000**		**5.000.000**		**90.805.040**		379.645.040	**50**	**98,38**	Plt. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa (Nilai)	60		0		0		0		60		60		100			
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)			25		50		75		100		100		0			
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			25		50		75		100		100		0			
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			385.900.000		-		283.840.000		5.000.000		90.805.040		379.645.040	50	98,38		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2		0		0		1		1		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1										0		0			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan			385.900.000		-		283.840.000		5.000.000		90.805.040		379.645.040	100	98,38		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2		0		0		1		1		2		100			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**11.397.860.580**		**1.022.681.815**		**2.167.790.293**		**1.902.693.059**		**1.787.037.218**		6.880.202.385	**83,38**	**60,36**		
		2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.836.053.135**		**853.844.392**		**1.547.525.213**		**1.460.041.334**		**1.047.543.963**		4.908.954.902	**92,11**	**84,11**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		20		30		20		20		90		120			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		68.96		68.96		0			
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.500.088		1.961.110		2.000.447		6.169.531		5.369.000		15.500.088	100	100		
			tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		1		1		0		4		6		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		0		0		4		0		4		100			
		2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.057		1.961.110		2.000.447		669.500		5.369.000		10.000.057	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		1		1		0		4		6		100			
		2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			999.960		-		-		999.960		-		999.960	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			999.960		-		-		999.960		-		999.960	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.000.020		-		-		1.000.020		-		1.000.020	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			999.900		-		-		999.900		-		999.900	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.191		-		-		1.500.191		-		1.500.191	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		0		0		4		0		4		100			
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.256.349.965		805.069.757		1.498.029.363		1.322.516.507		978.212.983		4.603.828.610	100	87,59		
			Tersedianya Dokumen dan Laporan Administarsi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56		56		56		56		56		56		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.133.410.581		780.394.297		1.467.175.302		1.308.610.644		975.509.183		4.531.689.426	100	88,28		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56		56		56		56		56		56		100			
		2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			115.939.384		21.448.160		27.853.861		13.905.863		1.931.300		65.139.184	100	56,18		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.000.000		3.227.300		3.000.200		-		772.500		7.000.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.117.387		1.510.550		-		1.683.337		-		3.193.887	100	62,41		
			Tersedianya Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.117.387		1.510.550		-		1.683.337		-		3.193.887	100	62,41		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.123		4.054.650		4.113.633		2.366.240		1.750.000		12.284.523	100	81,9		
			TTersdiannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			
		2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			15.000.123		4.054.650		4.113.633		2.366.240		1.750.000		12.284.523	100	81,9		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			
		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			75.980.560		10.894.230		-		15.282.830		8.680.000		34.857.060	70	45,88		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersdiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		3				3				6		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		3				3				6		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		2		0		2		33,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1				2				3		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3						1		1		2		66,67			
		2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.073.550		6.661.050		-		412.500		-		7.073.550	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		3				3				6		100			
		2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.959.010		228.680		-		4.730.330		-		4.959.010	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		3				3				6		100			
		2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000.000		-		-		4.000.000		-		4.000.000	33,33	40		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		2		0		2		33,33			
		2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.748.000		4.004.500		-		5.000.000		-		9.004.500	50	57,18		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1				2				3		50			
		2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38.200.000		-		-		1.140.000		8.680.000		9.820.000	66,67	25,71		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3						1		1		2		66,67			
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280.845.012		30.354.095		40.320.270		39.281.589		43.441.980		153.397.934	100	54,62		
			Tersedianya jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		6		1		3		12		100			
		2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.465.112		4.020.365		1.470.270		490.089		2.494.350		8.475.074	100	10,94		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			203.379.900		26.333.730		38.850.000		38.791.500		40.947.630		144.922.860	100	71,26		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		6		1		3		12		100			
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187.260.000		-		3.061.500		72.741.300		10.090.000		85.892.800	100	45,87		
			Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1						1				1		100			
		2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			187.260.000		-		3.061.500		72.741.300		10.090.000		85.892.800	100	45,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1						1				1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**100.000.000**		-		-		**90.014.500**		**9.880.000**		99.894.500	**100**	**99,89**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita (%)	22,10		0		0		0		20,9		20,9		94,57			
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	15,15		0		0		0		25		25		165,02			
				Total Fertility Rate (TFR). (Orang)			0		0		0		2,26		2,26		0			
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)			0		0		0		19		19		0			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			100.000.000		-		-		90.014.500		9.880.000		99.894.500	100	99,89		
			Tersedianya Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			100.000.000		-		-		90.014.500		9.880.000		99.894.500	100	99,89		
			Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	1		0		0		1		0		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**5.430.548.445**		**168.837.423**		**620.265.080**		**352.637.225**		**729.613.255**		1.871.352.983	**72,39**	**34,46**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (%)	75,00		0		0		0		66,54		66,54		88,72			
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)			0		0		0		70		70		0			
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	13,00		0		0		0		10,6		10,6		81,54			
				Cakupan PUS yang ber-KB Aktif (%)	71,00		0		0		0		17,1		17,1		24,08			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan			5.000.000.000		136.920.000		469.061.200		280.932.400		708.020.650		1.594.934.250	100	31,9		
			Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12		3		3		3		3		12		100			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			5.000.000.000		136.920.000		469.061.200		280.932.400		708.020.650		1.594.934.250	100	31,9		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12		3		3		3		3		12		100			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			29.764.825		-		-		26.564.825		-		26.564.825	100	89,25		
			Tersedianya Jumah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan			29.764.825		-		-		26.564.825		-		26.564.825	100	89,25		
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	1		0		0		1		0		1		100			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			300.783.620		31.917.423		51.203.880		45.140.000		21.592.605		149.853.908	58,59	49,82		
			Tersedianya Jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	12		0		0		6		0		6		50			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1300		0		0		400		0		400		30,77			
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	50		0		0		20		0		20		40			
				Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	1300		0		0		400		0		400		30,77			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			29.699.101		8.947.381		979.440		9.350.000		-		19.276.821	50	64,91		
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12		0		0		6		0		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			89.302.310		10.410.215		1.893.665		16.440.000		2.081.280		30.825.160	30,77	34,52		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1300		0		0		400		0		400		30,77			
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			22.124.357		-		-		-		3.753.000		3.753.000	100	16,96		
			Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1								1		1		100			
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			118.949.152		12.559.827		46.400.000		11.200.000		15.758.325		85.918.152	100	72,23		
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	1		0		1		0		0		1		100			
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria			21.925.080		-		1.463.495		3.610.000		-		5.073.495	40	23,14		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	50		0		0		20		0		20		40			
		2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			18.783.620		-		467.280		4.540.000		-		5.007.280	30,77	26,66		
			Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	1300		0		0		400		0		400		30,77			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100.000.000		-		100.000.000		-		-		100.000.000	100	100		
			Tersedianya laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB			100.000.000		-		100.000.000		-		-		100.000.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Terpadu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung	1		0		1		0		0		1		100			
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**31.259.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase UPPKS (Unit Pelaksana Pembinaan Keluarga Sejahtera) yang melakukan pembinaan keluarga sesuai 8	55,00		0		0		0		36,7		36,7		66,73			
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga			0		0		0		0		0		0			
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)			0		0		0		0		0		0			
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)			0		0		0		0		0		0			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			31.259.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	1										0		0			
		2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor			31.259.000		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1										0		0			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**31.059.541.845**		**7.819.626.048**		**8.793.590.785**		**7.128.810.680**		**7.060.312.662**		30.802.340.175	**86,96**	**99,17**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.366.553.516**		**1.698.595.040**		**1.835.534.869**		**1.998.465.801**		**1.825.444.056**		7.358.039.766	**93,62**	**99,88**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		13		17		23		21		74		98,67			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									64.25		64.25		0			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.258.625		-		-		3.533.045		8.725.580		12.258.625	100	100		
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.261.150		-		-		1.077.320		2.183.830		3.261.150	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
		2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			913.775		-		-		-		913.775		913.775	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			913.775		-		-		-		913.775		913.775	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			913.775		-		-		210.925		702.850		913.775	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			913.775		-		-		-		913.775		913.775	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.074.500		-		-		966.400		1.108.100		2.074.500	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		1		1		1		1		4		100			
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.267.875		-		-		1.278.400		1.989.475		3.267.875	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.264.898.166		1.502.060.813		1.694.405.438		1.695.897.038		1.288.969.385		6.181.332.674	90,8	98,67		
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87		68		65		63		63		63		72,41			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		6		3		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.057.626.066		1.502.060.813		1.611.285.438		1.611.285.438		1.252.911.885		5.977.543.574	72,41	98,68		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87		68		65		63		63		63		72,41			
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			203.800.000		-		83.120.000		83.120.000		34.077.000		200.317.000	100	98,29		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		6		3		3		12		100			
		2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.472.100		-		-		1.491.600		1.980.500		3.472.100	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.434.850		-		-		309.275		1.125.575		1.434.850	100	100		
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.434.850		-		-		309.275		1.125.575		1.434.850	100	100		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.964.215		57.634.000		6.466.000		55.981.270		52.408.236		172.489.506	100	90,33		
			Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.411.390		-		-		-		2.384.000		2.384.000	100	98,86		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.442.825		-		1.666.000		-		10.869.600		12.535.600	100	47,41		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.815.000		-		-		6.352.500		7.462.500		13.815.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			148.295.000		57.634.000		4.800.000		49.628.770		31.692.136		143.754.906	100	96,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			561.197.660		130.525.727		87.220.931		121.511.544		336.644.780		675.902.982	100	120,44		
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			57.970.992		12.725.727		10.588.531		7.829.944		186.063.280		217.207.482	100	374,68		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			503.226.668		117.800.000		76.632.400		113.681.600		150.581.500		458.695.500	100	91,15		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.800.000		8.374.500		47.442.500		121.233.629		137.570.500		314.621.129	66,67	93,69		
			Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		4		4		4		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			161.160.000		-		-		80.580.000		80.580.000		161.160.000	0	100		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			172.610.000		8.374.500		47.442.500		40.653.629		54.960.500		151.431.129	100	87,73		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		4		4		4		100			
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.030.000		-		-		-		2.030.000		2.030.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**22.826.494.429**		**5.914.031.008**		**6.820.055.916**		**4.921.650.979**		**4.960.368.606**		22.616.106.509	**76,78**	**99,08**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota									100		100		0			
				Persentase Pemilikan KIR Angkutan Umum (persen)	81,61								89,96		89,96		110,23			
				Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan (persen)	77,77								77,78		77,78		100,01			
				Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	82,22								82,22		82,22		100			
				Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (rasio)	0,0044								0,0045		0,005		113,64			
				Konektivitas Darat (Persentase)									199		199		0			
				Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	86								37,42		37,42		43,51			
				Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (persen)	93,82								95		95		101,26			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			20.783.846.214		5.496.130.218		6.520.500.916		4.420.886.234		4.282.754.306		20.720.271.674	100	99,69		
			Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3675		3.675		3.675		3.675		3.675		3.675		100			
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			20.783.846.214		5.496.130.218		6.520.500.916		4.420.886.234		4.282.754.306		20.720.271.674	100	99,69		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	3675		3.675		3.675		3.675		3.675		3.675		100			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			9.322.490		-		-		-		-		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi	3		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			9.322.490		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			193.528.100		-		-		117.379.850		15.000.000		132.379.850	37,43	68,4		
			Jumlah unit Kendaraan Bermotor wajib uji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	3000		374		41		335		373		1.123		37,43			
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			193.528.100		-		-		117.379.850		15.000.000		132.379.850	37,43	68,4		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	3000		374		41		335		373		1.123		37,43			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.516.816.585		330.000.000		275.722.000		323.029.585		556.590.000		1.485.341.585	100	97,92		
			Jumlah laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.516.816.585		330.000.000		275.722.000		323.029.585		556.590.000		1.485.341.585	100	97,92		
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	12		3		3		3		3		12		100			
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			8.547.490		-		-		547.490		-		547.490	100	6,41		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Jumlah laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			8.547.490		-		-		547.490		-		547.490	100	6,41		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			306.865.500		87.900.790		23.833.000		57.839.770		100.424.300		269.997.860	100	87,99		
			Jumlah unit Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3		3		3		3		3		3		100			
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			306.865.500		87.900.790		23.833.000		57.839.770		100.424.300		269.997.860	100	87,99		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3		3		3		3		3		3		100			
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.568.050		-		-		1.968.050		5.600.000		7.568.050	100	100		
			Jumlah laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.568.050		-		-		1.968.050		5.600.000		7.568.050	100	100		
			Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	1		0		0		1		0		1		100			
		2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			**866.493.900**		**207.000.000**		**138.000.000**		**208.693.900**		**274.500.000**		828.193.900	**25**	**95,58**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)									100		100		0			
				Persentase keselamatan pada transportasi perkeretaapian di perlintasan sebidang (persen)	39		9,75		9,75		9,75		9,75		39		100			
		2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			866.493.900		207.000.000		138.000.000		208.693.900		274.500.000		828.193.900	25	95,58		
			Jumlah dokumen cakupan perlintasan kereta api yang tertangani	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang	12		3		3		3		3		3		25			
		2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan			866.493.900		207.000.000		138.000.000		208.693.900		274.500.000		828.193.900	25	95,58		
			Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang	12		3		3		3		3		3		25			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**10.660.897.177**		**2.367.735.185**		**1.892.227.298**		**401.320.042**		**5.450.732.347**		10.112.014.872	**50,29**	**94,85**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.328.681.988**		**544.650.085**		**260.984.900**		**249.134.894**		**4.735.899.898**		5.790.669.777	**52,94**	**91,5**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75								75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									64		64		0			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.047.625		10.456.400		6.089.450		3.300.900		187.200		20.033.950	125	99,93		
			jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		1		1		1		6		200			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4								2		2		50			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.044.850		4.642.800		2.968.850		2.245.900		187.200		10.044.750	200	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		1		1		1		6		200			
		2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.002.775		5.813.600		3.120.600		1.055.000		-		9.989.200	50	99,86		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4								2		2		50			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.503.526.264		425.139.454		61.270.000		58.220.000		4.647.500.609		5.192.130.063	60,63	94,34		
			jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80								57		57		71,25			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2								1		1		50			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.138.246.264		334.099.454		-		-		4.495.343.109		4.829.442.563	71,25	93,99		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80								57		57		71,25			
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			365.280.000		91.040.000		61.270.000		58.220.000		152.157.500		362.687.500	50	99,29		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2								1		1		50			
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.391.430		3.941.550		3.705.600		1.419.350		687.850		9.754.350	0	93,87		
			Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian secara tertib dan tepat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1								0		0		0			
		2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			10.391.430		3.941.550		3.705.600		1.419.350		687.850		9.754.350	0	93,87		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1								0		0		0			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			280.164.350		60.573.815		66.156.200		134.205.044		19.174.000		280.109.059	60,22	99,98		
			Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah secara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	32								14		14		43,75			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7								2		2		28,57			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12								13		13		108,33			
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.013.350		1.964.350		2.048.200		-		-		4.012.550	43,75	99,98		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	32								14		14		43,75			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			131.317.000		20.170.000		23.882.500		62.074.500		11.400.000		117.527.000	28,57	89,5		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7								2		2		28,57			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			144.834.000		38.439.465		40.225.500		72.130.544		7.774.000		158.569.509	108,33	109,48		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12								13		13		108,33			
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.092.319		21.320.331		12.772.850		15.294.500		62.525.239		111.912.920	27,78	97,24		
			laporan pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12								3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2								1		1		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12								1		1		8,33			
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			69.244.444		8.170.681		-		-		59.420.239		67.590.920	25	97,61		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12								3		3		25			
		2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.810.000		4.790.000		4.470.000		3.170.000		-		12.430.000	50	90,01		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2								1		1		50			
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.037.875		8.359.650		8.302.850		12.124.500		3.105.000		31.892.000	8,33	99,54		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12								1		1		8,33			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			399.460.000		23.218.535		110.990.800		36.695.100		5.825.000		176.729.435	0	44,24		
			Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2								0		0		0			
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			399.460.000		23.218.535		110.990.800		36.695.100		5.825.000		176.729.435	0	44,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2								0		0		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**3.854.434.500**		**1.776.669.000**		**1.626.080.948**		**35.550.000**		**412.152.952**		3.850.452.900	**50**	**99,9**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daera	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan	100								100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)									81,25		81,25		0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.854.434.500		1.776.669.000		1.626.080.948		35.550.000		412.152.952		3.850.452.900	50	99,9		
			Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan	2								0		0		0			
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2								1		1		50			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10								10		10		100			
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			3.584.162.700		1.755.670.000		1.609.996.198		7.600.000		210.896.502		3.584.162.700	0	100		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan	2								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			232.069.300		20.999.000		16.084.750		27.950.000		163.694.050		228.727.800	50	98,56		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2								1		1		50			
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			38.202.500		-		-		-		37.562.400		37.562.400	100	98,32		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10								10		10		100			
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**477.780.689**		**46.416.100**		**5.161.450**		**116.635.148**		**302.679.497**		470.892.195	**40**	**98,56**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)									3,51		3,51		0			
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi* (persen)	100,00								100		100		100			
				Nilai SPBE domain tatakelola, kebijakan, manajemen dan layanan (nilai)	1,45								1,45		1,45		100			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			477.780.689		46.416.100		5.161.450		116.635.148		302.679.497		470.892.195	40	98,56		
			Terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1								1		1		100			
				Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2								0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	10								2		2		20			
		2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			12.272.000		12.240.000		-		-		-		12.240.000	100	99,74		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1								1		1		100			
		2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			58.109.450		8.700.000		4.086.450		16.493.500		28.829.500		58.109.450	0	100		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			407.399.239		25.476.100		1.075.000		100.141.648		273.849.997		400.542.745	20	98,32		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	10								2		2		20			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**5.371.545.981**		**995.587.907**		**1.027.128.308**		**1.363.731.639**		**1.342.059.793**		4.728.507.647	**101,09**	**88,03**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.779.872.991**		**992.287.907**		**865.428.308**		**1.361.127.639**		**1.158.748.734**		4.377.592.588	**113,24**	**91,58**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			20.41		25.72		21.52		20.72		20.72		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		15,57		13,58		21,36		18,18		18,18		24,24			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.137.200		-		-		-		467.000		467.000	100	41,07		
			tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		1		1		1		1		4		200			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			670.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			467.000		-		-		-		467.000		467.000	200	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		1		1		1		1		4		200			
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.152.302.828		927.373.568		825.031.873		1.219.214.374		902.587.063		3.874.206.878	100	93,3		
			tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34		34		34		34		34		34		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.023.662.828		911.053.568		806.311.873		1.157.774.374		870.427.063		3.745.566.878	100	93,09		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34		34		34		34		34		34		100			
		2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			128.640.000		16.320.000		18.720.000		61.440.000		32.160.000		128.640.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			182.093.160		16.620.000		17.560.000		25.463.500		43.098.500		102.742.000	90,28	56,42		
			tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		1		2		2		2		7		116,67			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		2		7		116,67			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		1		0		0		0		1		16,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		0		3		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		2		7		116,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		4		4		4		15		125			
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.215.250		1.499.000		1.359.000		2.000.000		3.712.000		8.570.000	116,67	93		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		1		2		2		2		7		116,67			
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.074.650		5.408.000		5.777.000		9.974.500		16.505.500		37.665.000	116,67	93,99		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		2		7		116,67			
		2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.914.260		1.013.000		-		-		-		1.013.000	16,67	52,92		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		1		0		0		0		1		16,67			
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.900.000		1.700.000		1.185.000		-		-		2.885.000	50	99,48		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		0		3		50			
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.805.000		4.000.000		3.469.000		5.569.000		6.581.000		19.619.000	116,67	99,06		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		2		7		116,67			
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.184.000		3.000.000		5.770.000		7.920.000		16.300.000		32.990.000	125	30,49		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		4		4		4		15		125			
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.655.000		-		-		-		23.754.000		23.754.000	100	96,35		
			tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		10		10		100			
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.655.000		-		-		-		23.754.000		23.754.000	100	96,35		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		0		0		0		10		10		100			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.289.831		42.534.339		14.116.435		51.357.265		48.397.768		156.405.807	100	90,26		
			tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		9		9		9		9		36		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.177.831		9.384.339		3.131.685		7.319.765		6.160.268		25.996.057	100	66,35		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		9		9		9		9		36		100			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			134.112.000		33.150.000		10.984.750		44.037.500		42.237.500		130.409.750	100	97,24		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.394.972		5.760.000		8.720.000		65.092.500		140.444.403		220.016.903	170,83	89,29		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		1		2		2		4		9		450			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		1		2		5		2		10		83,33			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		3		2		5		100			
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			197.163.500		3.000.000		6.000.000		57.720.000		113.010.000		179.730.000	450	91,16		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		1		2		2		4		9		450			
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			16.400.000		-		-		-		7.800.403		7.800.403	50	47,56		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.870.000		2.760.000		2.720.000		5.220.000		2.140.000		12.840.000	83,33	99,77		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		1		2		5		2		10		83,33			
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			19.961.472		-		-		2.152.500		17.494.000		19.646.500	100	98,42		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		3		2		5		100			
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**48.538.740**		**900.000**		**-**		**-**		**45.952.059**		46.852.059	**100**	**96,53**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang menyelenggarakan RAT setiap tahunnya (%)	35		29		0		0		0		29		82,86			
				Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			54						0		0		0			
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			48.538.740		900.000		-		-		45.952.059		46.852.059	100	96,53		
			terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	35		0		0		0		35		35		100			
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	3		3		0		0		0		3		100			
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			47.188.740		-		-		-		45.952.059		45.952.059	100	97,38		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit	35		0		0		0		35		35		100			
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah			1.350.000		900.000		-		-		-		900.000	100	66,67		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	3		3		0		0		0		3		100			
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**1.350.000**		**900.000**		-		-		-		900.000	**100**	**66,67**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP koperasi dinilai kesehatan (%)	30		29		0		0		0		29		96,67			
				Persentase Koperasi Aktif (Persentase)			0		0		0		76,86		76,86		0			
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.350.000		900.000		-		-		-		900.000	100	66,67		
			terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	3		3		0		0		0		3		100			
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.350.000		900.000		-		-		-		900.000	100	66,67		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	3		3		0		0		0		3		100			
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**123.500.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)									0		0		0			
				Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi (persen)	0								0		0		0			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			123.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			123.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**10.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	0								0		0		0			
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)									0		0		0			
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)									0		0		0			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	30		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Kewirausahaan (Orang)																
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	30		0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**408.284.250**		**1.500.000**		**161.700.000**		**2.604.000**		**137.359.000**		303.163.000	**100**	**74,25**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor			0,03		0,33		0,034		0,433		0,433		0			
				Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya (%)	10,5		0,2625		2,625		0,2625		3,36429		3,364		32,04			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			408.284.250		1.500.000		161.700.000		2.604.000		137.359.000		303.163.000	100	74,25		
			terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		1		10		1		8		20		100			
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			408.284.250		1.500.000		161.700.000		2.604.000		137.359.000		303.163.000	100	74,25		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		1		10		1		8		20		100			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**7.718.871.628**		**1.323.964.489**		**1.819.843.510**		**1.680.955.119**		**1.905.424.001**		6.730.187.119	**101,87**	**87,19**		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.174.583.088**		**1.321.389.389**		**1.792.816.370**		**1.600.869.053**		**1.792.762.940**		6.507.837.752	**101,26**	**90,71**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		80		81		82		83		81,5		108,67			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									61.17		61.17		0			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.104.750		-		4.016.650		1.235.000		2.038.050		7.289.700	80	89,94		
			Tersedia dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		3		1		1		8		80			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.104.750		-		4.016.650		1.235.000		2.038.050		7.289.700	80	89,94		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		3		1		1		8		80			
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.377.349.096		1.071.566.686		1.379.447.092		1.224.047.379		1.180.523.163		4.855.584.320	86,94	90,3		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		44		44		44		44		44		97,78			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		4		5				11		91,67			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12						5		2		7		58,33			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2				1				1		2		100			
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.201.992.746		1.053.591.436		1.343.278.432		1.161.727.979		1.166.322.123		4.724.919.970	97,78	90,83		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45		44		44		44		44		44		97,78			
		2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			109.080.000		16.460.000		32.920.000		33.480.000		-		82.860.000	91,67	75,96		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		4		5				11		91,67			
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			51.620.000		-		-		22.520.000		10.628.000		33.148.000	58,33	64,22		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12						5		2		7		58,33			
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			14.656.350		1.515.250		3.248.660		6.319.400		3.573.040		14.656.350	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2				1				1		2		100			
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.363.050		1.000.000		1.000.000		1.220.000		5.143.050		8.363.050	100	100		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.363.050		1.000.000		1.000.000		1.220.000		5.143.050		8.363.050	100	100		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.060.000		-		-		-		-		-	200	0		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1								2		2		200			
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.060.000		-		-		-		-		-	200	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1								2		2		200			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.891.097		29.371.266		19.452.775		42.122.603		99.409.731		190.356.375	87,5	83,53		
			Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1						1				1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1								1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1								1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1				1		2		200			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2				1				1		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	480		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10		2		1		3		4		10		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.991.500		3.995.750		1.182.500		2.622.400		-		7.800.650	100	97,61		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1						1				1		100			
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			77.034.000		-		-		13.500.000		60.945.999		74.445.999	100	96,64		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1								1		1		100			
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.033.200		617.500		1.770.120		2.171.770		3.473.810		8.033.200	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1								1		1		100			
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			38.240.997		7.315.320		8.004.655		5.770.800		17.015.322		38.106.097	200	99,65		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1				1		2		200			
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.976.000		4.214.500		7.071.000		4.000.000		5.690.500		20.976.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2				1				1		2		100			
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	480		0		0		0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			62.993.000		13.228.196		1.424.500		14.057.633		11.754.100		40.464.429	100	64,24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		1		3		4		10		100			
		2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7.822.400		-		-		-		530.000		530.000	0	6,78		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		0		0		0			
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			78.127.800		-		72.127.800		-		6.000.000		78.127.800	100	100		
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		5		0		0		5		100			
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			6.000.000		-		-		-		6.000.000		6.000.000	100	100		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.127.800		-		72.127.800		-		-		72.127.800	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		5		0		0		5		100			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			985.936.500		210.907.437		279.861.093		227.116.676		223.139.146		941.024.352	100	95,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		2		3		4		12		100			
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			740.536.500		149.557.437		238.961.093		166.308.676		146.573.146		701.400.352	100	94,72		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		3		3		12		100			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			245.400.000		61.350.000		40.900.000		60.808.000		76.566.000		239.624.000	100	97,65		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		2		3		4		12		100			
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			483.750.795		8.544.000		36.910.960		105.127.395		276.509.800		427.092.155	133,33	88,29		
			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		13		7		10		30		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			240.610.000		7.000.000		20.740.160		21.500.000		160.725.800		209.965.960	100	87,26		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73.694.800		-		16.170.800		8.970.400		30.252.000		55.393.200	100	75,17		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		13		7		10		30		100			
		2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			169.445.995		1.544.000		-		74.656.995		85.532.000		161.732.995	200	95,45		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**139.411.920**		-		**794.620**		-		**58.745.000**		59.539.620	**50**	**42,71**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Meningkatnya kemudahan iklim berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)			19		141		35		31		226		0			
				Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			69.968.300		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen kemudahan/fasilitasi Penamanan Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1		0		0		0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			69.968.300		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			69.443.620		-		794.620		-		58.745.000		59.539.620	100	85,74		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			69.443.620		-		794.620		-		58.745.000		59.539.620	100	85,74		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**94.040.300**		**-**		**-**		**65.265.566**		**11.920.767**		77.186.333	**100**	**82,08**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi			0		0		0		92		92		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			94.040.300		-		-		65.265.566		11.920.767		77.186.333	100	82,08		
			Terllaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			94.040.300		-		-		65.265.566		11.920.767		77.186.333	100	82,08		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**113.130.750**		**2.575.100**		**16.813.050**		**8.940.500**		**9.595.349**		37.923.999	**174,4**	**33,52**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)			0		0		0		99,74		99,74		0			
				IKM atas pelayanan perizinan (persen)	92,00		0		0		0		92,15		92,15		100,16			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			113.130.750		2.575.100		16.813.050		8.940.500		9.595.349		37.923.999	174,4	33,52		
			Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Konsultasi Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1000		708		808		1.278		1.038		3.832		383,2			
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100		20		4		14		2		40		40			
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	3		0		2		0		1		3		100			
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara			29.026.500		-		-		6.154.400		-		6.154.400	383,2	21,2		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1000		708		808		1.278		1.038		3.832		383,2			
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			69.861.200		2.575.100		13.500.000		2.786.100		8.075.349		26.936.549	40	38,56		
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100		20		4		14		2		40		40			
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			14.243.050		-		3.313.050		-		1.520.000		4.833.050	100	33,93		
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	3		0		2		0		1		3		100			
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**187.155.850**		**-**		**8.762.000**		**3.425.000**		**28.039.330**		40.226.330	**69,59**	**21,49**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha			0		0		0		100		100		0			
				Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal (persen)	80		0		0		0		93,33		93,33		116,66			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			187.155.850		-		8.762.000		3.425.000		28.039.330		40.226.330	69,59	21,49		
			Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	15		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	205		0		0		0		100		100		48,78			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian	20		0		16		10		6		32		160			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			36.091.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	15		0		0		0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			117.743.850		-		-		-		22.689.330		22.689.330	48,78	19,27		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	205		0		0		0		100		100		48,78			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			33.321.000		-		8.762.000		3.425.000		5.350.000		17.537.000	160	52,63		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	20		0		16		10		6		32		160			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**10.549.720**		**-**		**657.470**		**2.455.000**		**4.360.615**		7.473.085	**100**	**70,84**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi (persen)	80		0		0		0		80		80		100			
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.549.720		-		657.470		2.455.000		4.360.615		7.473.085	100	70,84		
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	1		0		0		0		1		1		100			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			10.549.720		-		657.470		2.455.000		4.360.615		7.473.085	100	70,84		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	1		0		0		0		1		1		100			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**4.429.192.498**		**501.068.502**		**665.055.276**		**1.555.811.271**		**1.378.578.018**		4.100.513.067	**71,54**	**92,58**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.797.496.758**		**501.068.502**		**552.297.851**		**753.831.256**		**682.319.968**		2.489.517.577	**71,61**	**88,99**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		12		25		15		15		67		89,33			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									65.38		65.38		0			
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.092.024		-		4.092.024		-		-		4.092.024	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		3		0		0		3		100			
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.092.024		-		4.092.024		-		-		4.092.024	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		3		0		0		3		100			
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.238.769.719		447.425.242		480.422.682		608.224.506		451.105.398		1.987.177.828	88,33	88,76		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		17		17		17		17		17		85			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		1		1		1		1		4		80			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3				3						3		100			
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.157.556.669		424.352.192		454.582.682		595.304.506		431.725.398		1.905.964.778	85	88,34		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		17		17		17		17		17		85			
		2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			77.520.000		19.380.000		25.840.000		12.920.000		19.380.000		77.520.000	80	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		1		1		1		1		4		80			
		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.693.050		3.693.050		-		-		-		3.693.050	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3				3						3		100			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.316.015		6.202.500		13.371.515		1.520.000		5.349.500		26.443.515	48,57	72,82		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28		0		0		1		3		4		14,29			
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.398.135		2.913.500		6.484.635		-		-		9.398.135	60	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.706.880		897.000		1.809.880		-		-		2.706.880	60	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.469.000		2.392.000		5.077.000		-		-		7.469.000	60	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0		3		60			
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.742.000		-		-		1.520.000		5.349.500		6.869.500	14,29	41,03		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28		0		0		1		3		4		14,29			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236.539.000		36.940.760		36.600.440		66.966.750		71.116.260		211.624.210	100	89,47		
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28.339.000		3.440.760		3.100.440		3.400.500		7.050.010		16.991.710	100	59,96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			208.200.000		33.500.000		33.500.000		63.566.250		64.066.250		194.632.500	100	93,48		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			281.780.000		10.500.000		17.811.190		77.120.000		154.748.810		260.180.000	50	92,33		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		3		3		3		3		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6										0		0			
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			273.660.000		10.500.000		17.811.190		77.120.000		154.748.810		260.180.000	100	95,07		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		3		3		3		3		100			
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.120.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6										0		0			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**423.566.030**		**-**		**51.348.800**		**165.455.180**		**196.258.050**		413.062.030	**100**	**97,52**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif (%)	35		0		0		0		13		13		37,14			
				Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)									6,04		6,04		0			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda			100.307.980		-		51.348.800		15.455.180		23.000.000		89.803.980	100	89,53		
			Tersedianya pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepeduian, kesukarelawan dan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan	40		0		0		20		0		0		0			
				Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1		0		1		0		1		2		200			
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda			25.959.180		-		-		15.455.180		-		15.455.180	0	59,54		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	40		0		0		20		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			74.348.800		-		51.348.800		-		23.000.000		74.348.800	200	100		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1		0		1		0		1		2		200			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			323.258.050		-		-		150.000.000		173.258.050		323.258.050	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1		0		0		1		1		1		100			
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat			323.258.050		-		-		150.000.000		173.258.050		323.258.050	100	100		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1		0		0		1		1		1		100			
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**1.208.129.710**		**-**		**61.408.625**		**636.524.835**		**500.000.000**		1.197.933.460	**50**	**99,16**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)													0			
				Persentase Peningkatan prestasi olahraga (%)	10,0								3,9		3,9		39			
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			167.037.420		-		61.408.625		95.432.545		-		156.841.170	0	93,9		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		95		0		0		0			
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			61.408.625		-		61.408.625		-		-		61.408.625	0	100		
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2		0		1		0		0		0		0			
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			105.628.795		-		-		95.432.545		-		95.432.545	0	90,35		
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		95		0		0		0			
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.092.290		-		-		41.092.290		-		41.092.290	0	100		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan	50		0		0		50		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			41.092.290		-		-		41.092.290		-		41.092.290	0	100		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	50		0		0		50		0		0		0			
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.000.000.000		-		-		500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	200	100		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan	1		0		0		1		1		2		200			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.000.000.000		-		-		500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	200	100		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		1		1		2		200			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**120.000.000**		**11.000.000**		**2.000.000**		**9.377.432**		**9.200.000**		31.577.432	**0**	**26,31**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**120.000.000**		**11.000.000**		**2.000.000**		**9.377.432**		**9.200.000**		31.577.432	**0**	**26,31**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)									1,43		1,43		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100								100		100		100			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			120.000.000		11.000.000		2.000.000		9.377.432		9.200.000		31.577.432	0	26,31		
			Terselenggaranya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	1								0		0		0			
				Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1								0		0		0			
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			54.000.000		5.000.000		2.000.000		6.731.640		-		13.731.640	0	25,43		
			Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	1								0		0		0			
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			66.000.000		6.000.000		-		2.645.792		9.200.000		17.845.792	0	27,04		
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1								0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**119.438.915**		**10.000.000**		**2.055.175**		**12.424.150**		**24.977.500**		49.456.825	**25**	**41,41**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**119.438.915**		**10.000.000**		**2.055.175**		**12.424.150**		**24.977.500**		49.456.825	**25**	**41,41**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase sistem informasi pemerintah yang telah diamankan oleh system	10,00								10		10		100			
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (persen)	37,50								37,5		37,5		100			
				Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)									22,65		22,65		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			95.409.675		8.500.000		1.295.175		6.222.500		9.642.000		25.659.675	25	26,89		
			Terselenggaranya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4								1		1		25			
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			95.409.675		8.500.000		1.295.175		6.222.500		9.642.000		25.659.675	25	26,89		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4								1		1		25			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			24.029.240		1.500.000		760.000		6.201.650		15.335.500		23.797.150	25	99,03		
			Terselenggaranya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	8								2		2		25			
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			24.029.240		1.500.000		760.000		6.201.650		15.335.500		23.797.150	25	99,03		
			Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	8								2		2		25			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**755.208.000**		**55.208.000**		**199.280.000**		**53.270.000**		**351.044.400**		658.802.400	**80**	**87,23**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Kehidupan Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**255.208.000**		**55.208.000**		**199.280.000**		-		-		254.488.000	**100**	**99,72**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (%)	50		13		37		0		0		50		100			
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)			0		0		0		54		54		0			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			255.208.000		55.208.000		199.280.000		-		-		254.488.000	100	99,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		3		2		0		0		5		100			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			255.208.000		55.208.000		199.280.000		-		-		254.488.000	100	99,72		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		3		2		0		0		5		100			
		2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**110.855.000**		-		-		-		**110.855.000**		110.855.000	**100**	**100**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	75		0		0		0		75		75		100			
				Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan			0		0		0		75		75		0			
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			110.855.000		-		-		-		110.855.000		110.855.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	60								60		60		100			
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			110.855.000		-		-		-		110.855.000		110.855.000	100	100		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	60								60		60		100			
		2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**150.645.000**		-		-		**53.270.000**		**97.375.000**		150.645.000	**100**	**100**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)			0		0		0		80		80		0			
				Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilegalitas (%)	100		0		0		68		33		101		101			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			150.645.000		-		-		53.270.000		97.375.000		150.645.000	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	3		0		0		2		1		3		100			
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			150.645.000		-		-		53.270.000		97.375.000		150.645.000	100	100		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	3		0		0		2		1		3		100			
	Kehidupan Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**238.500.000**		-		-		-		**142.814.400**		142.814.400	**50**	**59,88**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100		0		0		0		60		60		60			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)			0		0		0		60		60		0			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			238.500.000		-		-		-		142.814.400		142.814.400	50	59,88		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			63.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1		0		0		0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			175.000.000		-		-		-		142.814.400		142.814.400	100	81,61		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3		0		0		0		3		3		100			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**4.579.091.061**		**325.148.139**		**77.343.038**		**295.892.589**		**1.098.793.311**		1.797.177.077	**77,76**	**39,25**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.379.780.733**		**304.848.139**		**31.553.038**		**90.658.291**		**271.798.311**		698.857.779	**82,58**	**20,68**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		72,37		72,37		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		10		20		25		25		25		33,33			
				Ã Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Nilai)	75		0		0		0		72,37		72,37		96,49			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.970.380		6.895.000		-		2.396.500		8.245.500		17.537.000	60	97,59		
			tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		1		0		0		2		3		60			
		2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.970.380		6.895.000		-		2.396.500		8.245.500		17.537.000	60	97,59		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		1		0		0		2		3		60			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.865.055.633		214.200.239		1.500.000		2.530.000		14.645.545		232.875.784	194,44	8,13		
			terlaksananya adminitrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32		32		32		32		32		128		400			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		2		3		2		10		83,33			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		1		0		0		1		2		100			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.667.080.383		178.940.239		-		-		3.260.295		182.200.534	400	6,83		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32		32		32		32		32		128		400			
		2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			193.380.000		35.260.000		1.500.000		2.530.000		6.790.000		46.080.000	83,33	23,83		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		2		3		2		10		83,33			
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.595.250		-		-		-		4.595.250		4.595.250	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		1		0		0		1		2		100			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.490.150		23.424.500		-		11.124.500		42.484.766		77.033.766	41,39	144,01		
			terlaksananya adminitrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		2		0		0		2		2		40			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		5		0		6		1		1		8,33			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		3		0		5		0		8		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10		4		0		0		6		10		100			
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.339.810		1.121.000		-		-		1.196.000		2.317.000	40	99,03		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		2		0		0		2		2		40			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.215.650		8.995.500		-		7.874.500		4.172.000		21.042.000	8,33	99,18		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		5		0		6		1		1		8,33			
		2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.548.690		1.393.000		-		-		-		1.393.000	0	89,95		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.610.000		4.665.000		-		-		3.945.000		8.610.000	0	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.076.000		3.250.000		-		3.250.000		4.576.000		11.076.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		3		0		5		0		8		100			
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.700.000		4.000.000		-		-		28.595.766		32.595.766	100	374,66		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		4		0		0		6		10		100			
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.636.012		46.216.400		30.053.038		45.000.000		59.100.000		180.369.438	100	73,13		
			tersedinya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		4		3		3		2		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		5		3		2		2		12		100			
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.636.012		1.216.400		227.288		-		-		1.443.688	100	2,38		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		4		3		3		2		12		100			
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			186.000.000		45.000.000		29.825.750		45.000.000		59.100.000		178.925.750	100	96,2		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		5		3		2		2		12		100			
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196.628.558		14.112.000		-		29.607.291		147.322.500		191.041.791	32,22	97,16		
			tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		2		0		2		0		4		44,44			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		0		0		0		2		20			
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			191.028.558		9.972.000		-		29.607.291		145.862.500		185.441.791	44,44	97,08		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		2		0		2		0		4		44,44			
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.600.000		4.140.000		-		-		1.460.000		5.600.000	20	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		0		0		0		2		20			
	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.161.026.055**		**20.300.000**		**45.790.000**		**205.234.298**		**792.195.000**		1.063.519.298	**55,34**	**91,6**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	0,8		15,5		15,5		15,5		0,75		0,75		93,75			
				Persentase Peningkatan kunjungan Perpustakaan	45		0		0		0		40		40		88,89			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			736.026.459		20.300.000		45.790.000		32.000.000		561.430.000		659.520.000	67,12	89,61		
			terlaksananya koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	110		0		10		12		8		30		27,27			
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota	81		10		0		15		35		60		74,07			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman	6000		0		0		0		6.000		6.000		100			
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			161.999.304		5.000.000		23.290.000		18.500.000		61.090.000		107.880.000	27,27	66,59		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	110		0		10		12		8		30		27,27			
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.999.900		15.300.000		22.500.000		13.500.000		21.600.000		72.900.000	74,07	97,2		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	81		10		0		15		35		60		74,07			
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			499.027.255		-		-		-		478.740.000		478.740.000	100	95,93		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000		0		0		0		6.000		6.000		100			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			424.999.596		-		-		173.234.298		230.765.000		403.999.298	20	95,06		
			terlaksananya penduduk usia 10 tahun yang berkunjung keperpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	100		3		4		7		6		20		20			
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			424.999.596		-		-		173.234.298		230.765.000		403.999.298	20	95,06		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	100		3		4		7		6		20		20			
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**38.284.273**		**-**		**-**		**-**		**34.800.000**		34.800.000	**100**	**90,9**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media/digitalisasi dan terdaftar	20		0		0		0		15		15		75			
				Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)			0		0		0		5,58		5,58		0			
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			38.284.273		-		-		-		34.800.000		34.800.000	100	90,9		
			tersedianya naskah kuno yang diakuisisi/dialih media digitalisasi dan terdaftar di wilayahnya	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	50		0		0		0		50		50		100			
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan			38.284.273		-		-		-		34.800.000		34.800.000	100	90,9		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	50		0		0		0		50		50		100			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**30.249.805**		**-**		**-**		**22.277.000**		**1.059.000**		23.336.000	**333,33**	**77,14**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**30.249.805**		**-**		**-**		**22.277.000**		**1.059.000**		23.336.000	**333,33**	**77,14**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)			10		0		30		15		55		0			
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	35		0		0		0		30		30		85,71			
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			10.188.000		-		-		10.188.000		-		10.188.000	0	100		
			terlaksananya Preversi Arsip terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan budaya	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	40		0		0		40		0		0		0			
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			10.188.000		-		-		10.188.000		-		10.188.000	0	100		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	40		0		0		40		0		0		0			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			20.061.805		-		-		12.089.000		1.059.000		13.148.000	500	65,54		
			terlaksananya penerapan e arsip teriitegrasi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	150		0		0		0		150		150		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	1		3		0		6		0		9		900			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			7.223.675		-		-		3.556.000		1.059.000		4.615.000	100	63,89		
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	150		0		0		0		150		150		100			
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			12.838.130		-		-		8.533.000		-		8.533.000	900	66,47		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		3		0		6		0		9		900			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**5.495.998.998**		**1.239.081.682**		**519.632.529**		**1.292.130.061**		**1.334.767.190**		4.385.611.462	**87,06**	**79,8**		
		3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.390.450.623**		**1.239.081.682**		**519.632.529**		**1.210.942.086**		**1.041.412.431**		4.011.068.728	**90,75**	**91,36**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									65		65		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	85		15		22		25		25		87		102,35			
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.440.305		7.499.500		-		2.504.000		9.098.000		19.101.500	100	75,08		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2						1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		4								4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			8.292.540		-		-		-		8.220.000		8.220.000	100	99,13		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2						1		1		2		100			
		3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.348.885		6.326.500		-		-		-		6.326.500	100	99,65		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		4								4		100			
		3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.798.880		1.173.000		-		2.504.000		878.000		4.555.000	100	42,18		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.921.684.552		1.132.509.360		488.821.487		1.087.044.544		875.193.341		3.583.568.732	95,39	91,38		
			Tersedianya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		33		32		33		33		32,75		86,18			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1								1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3		1				1		1		3		100			
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.824.033.402		1.119.389.360		488.821.487		1.049.275.344		830.563.341		3.488.049.532	86,18	91,21		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		33		32		33		33		32,75		86,18			
		3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			92.650.000		13.120.000		-		32.800.000		44.630.000		90.550.000	100	97,73		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1								1		100			
		3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.001.150		-		-		4.969.200		-		4.969.200	100	99,36		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		1				1		1		3		100			
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.000.000		1.897.000		-		1.350.000		3.701.000		6.948.000	100	99,26		
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		1		1		1				3		100			
		3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			7.000.000		1.897.000		-		1.350.000		3.701.000		6.948.000	100	99,26		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		1		1		1				3		100			
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40.005.172		6.509.500		-		1.108.000		15.704.256		23.321.756	93,75	58,3		
			Tersedianya Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						1				1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1								1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1								1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8		1						5		6		75			
		3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.086.672		-		-		1.108.000		4.896.000		6.004.000	100	98,64		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						1				1		100			
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.369.500		1.369.500		-		-		-		1.369.500	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1								1		100			
		3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.752.000		1.720.000		-		-		-		1.720.000	100	62,5		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1								1		100			
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.797.000		3.420.000		-		-		10.808.256		14.228.256	75	47,75		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		1						5		6		75			
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.173.994		75.166.322		30.811.042		103.435.542		115.715.834		325.128.740	100	97		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		1		1						2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1								1		100			
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			74.269.994		15.116.322		11.773.542		14.408.042		25.315.334		66.613.240	100	89,69		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		1		1						2		100			
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			260.904.000		60.050.000		19.037.500		89.027.500		90.400.500		258.515.500	100	99,08		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1								1		100			
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.146.600		15.500.000		-		15.500.000		22.000.000		53.000.000	50	86,68		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		1						1		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1										0		0			
		3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			53.013.000		15.500.000		-		15.500.000		22.000.000		53.000.000	100	99,98		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		1						1		2		100			
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.133.600		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1										0		0			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber	0								0		0		0			
				Persentase nelayan yang berdaya (persen)	0								0		0		0			
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)									122		122		0			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1										0		0			
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1										0		0			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.105.548.375**		**-**		**-**		**81.187.975**		**293.354.759**		374.542.734	**95**	**33,88**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)									8960,42		8.960,42		0			
				Persentase benih budidaya air tawar yang diproduksi (Persen)	100						57,67		0		57,67		57,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	36						36		0		36		100			
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten satuan ton (ton)	6544		1882,6		2603,9		1420,3		3053,62		8.960,42		136,93			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			100.007.260		-		-		81.187.975		-		81.187.975	100	81,18		
			Terlaksananya Pembudidaya yang dibina	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10				5		5				10		100			
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	10		1		6		3				10		100			
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			50.007.185		-		-		45.365.900		-		45.365.900	100	90,72		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10				5		5				10		100			
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			50.000.075		-		-		35.822.075		-		35.822.075	100	71,64		
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	10		1		6		3				10		100			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.005.541.115		-		-		-		293.354.759		293.354.759	90	29,17		
			Tersedianya Data dan Informasi tentang Kegiatan Budidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10								8		8		80			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	30								30		30		100			
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			862.569.500		-		-		-		166.296.500		166.296.500	80	19,28		
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10								8		8		80			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			142.971.615		-		-		-		127.058.259		127.058.259	100	88,87		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	30								30		30		100			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**5.749.978.891**		**935.205.491**		**1.107.560.494**		**986.519.589**		**906.326.822**		3.935.612.396	**37,96**	**68,45**		
		3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.691.641.241**		**935.205.491**		**1.107.560.494**		**986.519.589**		**906.326.822**		3.935.612.396	**68,33**	**83,89**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		18		19		19		19		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		64.33		64.33		0			
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.647.400		6.759.900		-		6.866.000		-		13.625.900	100	99,84		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Serta Laporan Evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		4		0		0		0		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4		0		0		4		0		4		100			
		3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.781.400		6.759.900		-		-		-		6.759.900	100	99,68		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		4		0		0		0		4		100			
		3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.866.000		-		-		6.866.000		-		6.866.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		0		0		4		0		4		100			
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.112.032.241		913.215.591		1.106.200.494		936.798.539		879.823.101		3.836.037.725	100	93,29		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35		35		35		35		35		35		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		2		2		1		5		100			
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.003.832.241		913.215.591		1.074.420.494		891.008.539		879.823.101		3.758.467.725	100	93,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35		35		35		35		35		35		100			
		3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			108.200.000		-		31.780.000		45.790.000		-		77.570.000	100	71,69		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		2		2		1		5		100			
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			229.200.600		15.230.000		1.360.000		42.855.050		26.503.721		85.948.771	94,44	37,5		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		3		1		5		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6		0		0		1		4		5		83,33			
		3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.545.600		-		1.360.000		9.707.550		-		11.067.550	100	9,18		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.065.000		9.990.000		-		21.127.500		4.932.500		36.050.000	100	99,96		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		3		1		5		100			
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72.590.000		5.240.000		-		12.020.000		21.571.221		38.831.221	83,33	53,49		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		0		0		1		4		5		83,33			
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			124.451.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8										0		0			
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.451.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8										0		0			
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			85.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8										0		0			
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			212.310.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3										0		0			
		3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			212.310.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3										0		0			
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**576.341.900**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			0		30		20		0		0		0			
				Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (persen)	35		0		30		20		0		50		142,86			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			576.341.900		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	5										0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			429.341.900		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5										0		0			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			147.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	5										0		0			
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**421.423.750**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)			0		0		0		20		20		0			
				Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	20		0		0		0		20		20		100			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÃ			421.423.750		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1										0		0			
		3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan			86.149.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	1										0		0			
		3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1										0		0			
		3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual			335.274.650		-		-		-		-		-	0	0		
			Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1										0		0			
Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya		**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**60.572.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)			0		0		0		20		20		0			
				"Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"	20												0			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			60.572.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	80										0		0			
				Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan	80										0		0			
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	80										0		0			
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			60.572.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	80										0		0			
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	80										0		0			
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	80										0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**30.430.432.785**		**5.980.313.158**		**6.237.053.832**		**6.256.433.467**		**8.541.101.673**		27.014.902.130	**94,43**	**88,78**		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.004.315.609**		**4.002.620.982**		**4.321.388.261**		**3.239.323.682**		**3.386.232.652**		14.949.565.577	**94,12**	**93,41**	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.1		61.1		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Persen)	75		18,75		18,75		18,75		18,75		75		100			
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.376.284		4.955.865		-		-		8.420.055		13.375.920	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000.180		530.505		-		-		469.675		1.000.180	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			354.680		354.680		-		-		-		354.680	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
		3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			354.680		354.680		-		-		-		354.680	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.157.364		3.716.000		-		-		7.441.000		11.157.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		0		0		0		4		4		100			
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			509.380		-		-		-		509.380		509.380	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.555.669.455		3.952.331.768		4.300.977.261		3.225.604.329		3.226.959.412		14.705.872.770	100	94,54		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201		201		201		201		201		201		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		1		2		1		2		6		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13		5		0		0		8		13		100			
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.260.555.455		3.941.752.528		4.188.297.261		3.225.604.329		3.221.396.647		14.577.050.765	100	95,52		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201		201		201		201		201		201		100			
		3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			283.060.000		8.760.000		112.680.000		-		1.360.000		122.800.000	100	43,38		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		1		2		1		2		6		100			
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.054.000		1.819.240		-		-		4.202.765		6.022.005	100	49,96		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13		5		0		0		8		13		100			
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.699.600		613.010		-		-		1.230.420		1.843.430	100	68,29		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.699.600		613.010		-		-		1.230.420		1.843.430	100	68,29		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.177.140		-		2.550.000		-		3.300.000		5.850.000	100	63,75		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2		0		1		0		1		2		100			
		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			9.177.140		-		2.550.000		-		3.300.000		5.850.000	100	63,75		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		1		0		1		2		100			
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.947.720		27.346.897		2.140.000		11.616.202		26.465.686		67.568.785	100	84,52		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6		1		1		2		2		6		100			
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.698.720		17.147.050		-		-		12.383.430		29.530.480	100	99,43		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		0		0		1		2		100			
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.572.000		3.759.000		-		-		-		3.759.000	100	82,22		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45.677.000		6.440.847		2.140.000		11.616.202		14.082.256		34.279.305	100	75,05		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		1		1		2		2		6		100			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.192.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			41.192.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0		0		0			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.250.310		5.541.142		15.000.000		-		108.067.529		128.608.671	100	51,19		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		5		4		0		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		0		6		0		0		6		100			
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91.242.310		5.541.142		15.000.000		-		24.375.029		44.916.171	100	49,23		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		5		4		0		12		100			
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			160.008.000		-		-		-		83.692.500		83.692.500	100	52,31		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		0		6		0		0		6		100			
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.003.000		11.832.300		721.000		2.103.151		11.789.550		26.446.001	100	51,85		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			51.003.000		11.832.300		721.000		2.103.151		11.789.550		26.446.001	100	51,85		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**67.171.496**		**13.371.281**		**-**		**-**		**42.148.150**		55.519.431	**100**	**82,65**	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian tanaman pangan dan	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)			0		0		0		75		75		0			
				Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	75		0		0		0		75		75		100			
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)			0		0		0		3,25		3,25		0			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			27.056.196		6.385.711		-		-		9.619.150		16.004.861	100	59,15		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			14.486.196		6.385.711		-		-		5.399.150		11.784.861	100	81,35		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			12.570.000		-		-		-		4.220.000		4.220.000	100	33,57		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			40.115.300		6.985.570		-		-		32.529.000		39.514.570	100	98,5		
			Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul	1		1		0		0		0		1		100			
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			510.220		510.220		-		-		-		510.220	100	100		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			36.784.030		3.654.300		-		-		32.529.000		36.183.300	100	98,37		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			2.821.050		2.821.050		-		-		-		2.821.050	100	100		
			Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul	1		1		0		0		0		1		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**96.220.550**		**1.950.000**		-		-		**39.628.680**		41.578.680	**100**	**43,21**	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian tanaman pangan dan	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (Persen)	75		0		0		0		75		75		100			
				Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	75		0		0		0		75		75		100			
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B			0		0		0		13555		13.555		0			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			96.220.550		1.950.000		-		-		39.628.680		41.578.680	100	43,21		
			Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1		0		0		0		1		1		100			
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			80.540.550		-		-		-		31.828.680		31.828.680	100	39,52		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1		0		0		0		1		1		100			
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			15.680.000		1.950.000		-		-		7.800.000		9.750.000	100	62,18		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**13.600.000**		**600.000**		**-**		**-**		**2.400.000**		3.000.000	**100**	**22,06**	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan dan hortikuluta	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)			25		25		0		25		25		0			
				Persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit (Persen)	75		25		25		0		20		70		93,33			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			13.600.000		600.000		-		-		2.400.000		3.000.000	100	22,06		
			Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	3		1		0		0		2		3		100			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			13.600.000		600.000		-		-		2.400.000		3.000.000	100	22,06		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	3		1		0		0		2		3		100			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**4.231.742.800**		**6.559.375**		**278.920.000**		**-**		**2.330.879.905**		2.616.359.280	**100**	**61,83**	DINAS TANAMAN PANGAN DAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian tanaman pangan dan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)			25		25		0		25		25		0			
				Persentase kelompok tani yang berdaya (Persen)	77		23		23		23		0		69		89,61			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.231.742.800		6.559.375		278.920.000		-		2.330.879.905		2.616.359.280	100	61,83		
			Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	23		0		5		7		11		23		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	167		0		0		0		167		167		100			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			3.275.020.050		2.724.200		-		-		1.705.544.500		1.708.268.700	100	52,16		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	23		0		5		7		11		23		100			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			42.180.470		2.390.375		-		-		31.948.225		34.338.600	100	81,41		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	2		1		0		0		1		2		100			
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			914.542.280		1.444.800		278.920.000		-		593.387.180		873.751.980	100	95,54		
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	167		0		0		0		167		167		100			
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.802.169.794**		**1.955.211.520**		**1.613.472.566**		**2.201.470.800**		**1.682.816.122**		7.452.971.008	**99,94**	**95,52**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		21,79		15,21		18,58		44,42		100		133,33			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									61.7		61.7		0			
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.470.500		4.230.940		1.600.000		1.024.110		1.615.450		8.470.500	100	100		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1				3		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1								1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.000.000		4.230.940		-		1.024.110		744.950		6.000.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1				3		100			
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000		-		1.000.000		-		-		1.000.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1								1		100			
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.470.500		-		600.000		-		870.500		1.470.500	100	100		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.509.630.591		1.897.417.681		1.569.747.910		2.156.651.521		1.605.409.776		7.229.226.888	99,73	96,27		
			Persentase Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92		92		91		91		91		91,25		99,18			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.323.830.591		1.886.617.681		1.512.241.910		2.074.171.521		1.570.921.796		7.043.952.908	99,18	96,18		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92		92		91		91		91		91,25		99,18			
		3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			183.800.000		10.800.000		57.506.000		82.480.000		32.492.000		183.278.000	100	99,72		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.000.000		-		-		-		1.995.980		1.995.980	100	99,8		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			83.274.430		34.516.850		20.595.008		4.889.000		15.358.700		75.359.558	100	90,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10		9		1						10		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		50		25		15		10		100		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		45		50		40		15		150		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12						8		4		12		100			
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.300.447		21.505.479		14.794.968		-		-		36.300.447	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10		9		1						10		100			
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.675.906		7.780.371		3.615.040		1.385.000		3.893.700		16.674.111	100	99,99		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		50		25		15		10		100		100			
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.305.077		5.231.000		2.185.000		1.984.000		905.000		10.305.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		45		50		40		15		150		100			
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.993.000		-		-		1.520.000		10.560.000		12.080.000	100	60,42		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12						8		4		12		100			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.981.192		-		-		-		31.975.000		31.975.000	100	94,1		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8								8		8		100			
		3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			33.981.192		-		-		-		31.975.000		31.975.000	100	94,1		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8								8		8		100			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.143.081		19.046.049		9.238.915		30.921.169		28.457.196		87.663.329	100	84,99		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		15		5		20		8		48		100			
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			46.119.081		5.546.049		4.818.915		12.921.169		10.747.196		34.033.329	100	73,79		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			57.024.000		13.500.000		4.420.000		18.000.000		17.710.000		53.630.000	100	94,05		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		15		5		20		8		48		100			
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.670.000		-		12.290.733		7.985.000		-		20.275.733	100	31,85		
			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6								6		6		100			
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			63.670.000		-		12.290.733		7.985.000		-		20.275.733	100	31,85		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6								6		6		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**248.453.080**		-		**7.715.600**		**31.823.445**		**183.918.724**		223.457.769	**80**	**89,94**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian / perkebunan dan peternakan	"Persentase penyediaan sarana perkebunan yang memadai" (persen)	70		8,33		41,67		8,33		41,67		100		142,86			
				Persentase Sarana Pertanian yang tersedia dan	70		8,33		41,67		8,33		41,67		100		142,86			
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan									0,019		0,019		0			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			40.777.710		-		3.367.350		9.630.000		21.247.800		34.245.150	50	83,98		
			Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	2										0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	2										0		0			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			40.777.710		-		3.367.350		9.630.000		21.247.800		34.245.150	100	83,98		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			153.826.070		-		-		13.989.570		121.375.499		135.365.069	100	88		
			Prsentase Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2				1				1		2		100			
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2				1				1		2		100			
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			13.579.750		-		-		9.759.570		2.985.180		12.744.750	100	93,85		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2				1				1		2		100			
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			140.246.320		-		-		4.230.000		118.390.319		122.620.319	100	87,43		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2				1				1		2		100			
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah			53.849.300		-		4.348.250		8.203.875		41.295.425		53.847.550	100	100		
			Persentase Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	2				1				1		2		100			
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			53.849.300		-		4.348.250		8.203.875		41.295.425		53.847.550	100	100		
			Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	2				1				1		2		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**1.020.306.960**		-		-		-		**818.099.960**		818.099.960	**50**	**80,18**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya distribusi dan	Persentase Penyediaan dan									0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			kualitas prasarana pertanian /perkebunan dan peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian (%)																
				Persentase prasarana perkebunan kondisi baik	70						70				70		100			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.020.306.960	-	-	-	-	-	818.099.960		818.099.960	50	80,18		
			Persentase prasarana yang digunakan dan dikembangkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2										0		0			
				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	5						5				5		100			
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2										0		0			
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			1.020.306.960	-	-	-	-	-	818.099.960		818.099.960	100	80,18		
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	5						5				5		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**794.257.501**		**-**		**4.446.125**		**678.682.425**		**35.070.000**		718.198.550	**100**	**90,42**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)									100		100		0			
				Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	70				41,67		16,67		41,67		100,01		142,87			
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)									1		1		0			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah			16.657.501		-		4.446.125		5.068.875		5.940.000		15.455.000	100	92,78		
			Persentase Penanggulangan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3				1		1		1		3		100			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.657.501		-		4.446.125		5.068.875		5.940.000		15.455.000	100	92,78		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3				1		1		1		3		100			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			777.600.000		-		-		673.613.550		29.130.000		702.743.550	100	90,37		
			Persentase pengujian sampel penyakit hewan dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	2				1				1		2		100			
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			777.600.000		-		-		673.613.550		29.130.000		702.743.550	100	90,37		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	2				1				1		2		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**35.214.995**		**-**		**5.076.775**		**14.139.920**		**6.000.180**		25.216.875	**100**	**71,61**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)									100		100		0			
				Persentase luas lahan perkebunan bebas serangan hama/penyakit (persen)	75						60		40		100		133,33			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			35.214.995		-		5.076.775		14.139.920		6.000.180		25.216.875	100	71,61		
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	5						3		2		5		100			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			35.214.995		-		5.076.775		14.139.920		6.000.180		25.216.875	100	71,61		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	5						3		2		5		100			
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**16.980.000**		**-**		**4.403.000**		**6.062.000**		**6.470.000**		16.935.000	**100**	**99,73**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase usulan ijin usaha pertanian di kab/kota (%)	100								100		100		100			
				Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan									100		100		0			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.980.000		-		4.403.000		6.062.000		6.470.000		16.935.000	100	99,73		
			Jumlah usulan ijin usaha pertanian di kabupaten	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1								1		1		100			
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			16.980.000		-		4.403.000		6.062.000		6.470.000		16.935.000	100	99,73		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1								1		1		100			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**100.000.000**		**-**		**1.631.505**		**84.931.195**		**7.437.300**		94.000.000	**100**	**94**	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Peternakan dan Perkebunan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)									0		0		0			
				Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	70								100		100		142,86			
				Persentase kelompok perkebunan yang berdaya	75						100				100		133,33			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			100.000.000		-		1.631.505		84.931.195		7.437.300		94.000.000	100	94		
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5						5				5		100			
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		-		1.631.505		84.931.195		7.437.300		94.000.000	100	94		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5						5				5		100			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**7.768.180.171**		**1.345.592.039**		**1.484.415.165**		**1.442.940.223**		**2.400.259.122**		6.673.206.549	**59,03**	**85,9**		
		3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.079.846.901**		**1.158.842.039**		**1.356.097.077**		**1.168.780.368**		**1.684.600.321**		5.368.319.805	**61,56**	**88,3**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		6,13		15,24		15,52		15,01		51,9		69,2			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		62.43		62.43		0			
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.474.490		-		17.872.870		11.288.000		28.463.910		57.624.780	100	95,29		
			Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		2		2		0		2		6		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31.871.000		-		8.346.000		10.540.500		12.917.265		31.803.765	100	99,79		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.185.800		-		3.379.800		747.500		58.500		4.185.800	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.069.120		-		-		-		422.120		422.120	100	13,75		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.086.370		-		3.829.370		-		8.185.430		12.014.800	100	99,41		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		2		2		0		2		6		100			
		3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.262.200		-		2.317.700		-		6.880.595		9.198.295	100	99,31		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.877.825.581		1.036.732.091		1.264.075.299		1.003.119.988		1.091.474.891		4.395.402.269	61,81	90,11		
			Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49		43		42		41		45		42,75		87,24			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20		0		5		4		3		12		60			
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.522.857.381		1.036.732.091		1.169.075.299		930.151.188		923.704.891		4.059.663.469	87,24	89,76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49		43		42		41		45		42,75		87,24			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			337.803.800		-		95.000.000		72.968.800		159.210.000		327.178.800	100	96,85		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.014.900		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.149.500		-		-		-		8.560.000		8.560.000	60	84,34		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		0		5		4		3		12		60			
		3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			22.132.500		-		-		4.000.000		-		4.000.000	50	18,07		
			Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.882.500		-		-		1.500.000		-		1.500.000	100	52,04		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.30.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			2.500.000		-		-		2.500.000		-		2.500.000	100	100		
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			9.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	3		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			7.750.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	12		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.107.500		-		2.502.600		2.366.650		3.568.750		8.438.000	100	59,81		
			Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			14.107.500		-		2.502.600		2.366.650		3.568.750		8.438.000	100	59,81		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			416.674.805		-		14.388.560		12.823.610		242.391.320		269.603.490	60	64,7		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0		0		2		2		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		0		1		50			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		6		0		6		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		6		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		3		3		6		50			
		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.161.840		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			301.686.100		-		-		-		205.172.400		205.172.400	0	68,01		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0		0		2		2		0			
		3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.600.610		-		-		1.600.610		-		1.600.610	50	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		0		1		50			
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.262.480		-		12.198.560		-		1.063.920		13.262.480	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		6		0		6		12		100			
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			56.227.775		-		2.190.000		3.299.000		30.435.000		35.924.000	100	63,89		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		6		3		3		12		100			
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.736.000		-		-		7.924.000		5.720.000		13.644.000	50	33,49		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		3		3		6		50			
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			390.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			390.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			549.441.889		122.109.948		57.257.748		135.182.120		208.449.050		522.998.866	66,67	95,19		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7		3		3		1		0		7		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	7		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			55.521.000		9.609.948		7.757.748		11.882.120		15.327.050		44.576.866	100	80,29		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7		3		3		1		0		7		100			
		3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			720.889		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	7		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			493.200.000		112.500.000		49.500.000		123.300.000		193.122.000		478.422.000	100	97		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.799.636		-		-		-		110.252.400		110.252.400	17,78	79,43		
			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			62.058.465		-		-		-		35.471.000		35.471.000	20	57,16		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		1		1		20			
		3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			76.741.171		-		-		-		74.781.400		74.781.400	33,33	97,45		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		1		1		33,33			
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**134.026.050**		**-**		**4.500.000**		**4.537.900**		**2.430.525**		11.468.425	**34**	**8,56**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	85		0		0		0		100		100		117,65			
				Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi			0		50		25		25		25		0			
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			114.827.900		-		-		2.587.900		1.740.000		4.327.900	100	3,77		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	3		0		0		1		2		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara			114.827.900		-		-		2.587.900		1.740.000		4.327.900	100	3,77		
			Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	3		0		0		1		2		3		100			
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			18.990.525		-		4.500.000		1.950.000		690.525		7.140.525	36	37,6		
			Terlaksananya Penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25		4		0		2		3		9		36			
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			18.990.525		-		4.500.000		1.950.000		690.525		7.140.525	36	37,6		
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25		4		0		2		3		9		36			
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			119.625		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			119.625		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi			88.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			88.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**1.138.360.040**		**186.750.000**		**75.281.998**		**221.986.485**		**586.399.740**		1.070.418.223	**33,33**	**94,03**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik (persen)	100		0		0		0		49,46		49,46		49,46			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			383.133.490		-		12.471.098		97.486.485		216.634.740		326.592.323	0	85,24		
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			383.133.490		-		12.471.098		97.486.485		216.634.740		326.592.323	0	85,24		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			755.226.550		186.750.000		62.810.900		124.500.000		369.765.000		743.825.900	50	98,49		
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	24		6		6		6		6		24		100			
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7.665.650		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12		0		0		0		0		0		0			
		3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			747.560.900		186.750.000		62.810.900		124.500.000		369.765.000		743.825.900	100	99,5		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	24		6		6		6		6		24		100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**95.420.360**		**-**		**5.435.970**		**15.937.170**		**40.510.000**		61.883.140	**50**	**64,85**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)			0		10		20		40		40		0			
				Persentase Bahan Pokok Penting yag harganya stabil	71		0		0		0		76,59		76,59		107,87			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			17.915.470		-		-		482.250		800.000		1.282.250	11,11	7,16		
			Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3		0		0		1		0		1		33,33			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	3		0		0		0		0		0		0			
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan			7.400.000		-		-		100.000		700.000		800.000	33,33	10,81		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			5.233.220		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3		0		0		0		0		0		0			
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			5.282.250		-		-		382.250		100.000		482.250	0	9,13		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3		0		0		0		0		0		0			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			64.133.970		-		3.635.970		10.784.000		39.710.000		54.129.970	77,78	84,4		
			Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	48		12		12		12		12		48		100			
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	3		0		1		0		2		3		100			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			22.284.000		-		-		10.784.000		1.496.000		12.280.000	100	55,11		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	48		12		12		12		12		48		100			
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			5.435.970		-		3.635.970		-		1.800.000		5.435.970	100	100		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3		0		1		0		2		3		100			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			36.414.000		-		-		-		36.414.000		36.414.000	33,33	100		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.370.920		-		1.800.000		4.670.920		-		6.470.920	66,67	48,4		
			Teralaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3		0		0		1		0		1		33,33			
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24		6		6		6		6		24		100			
		3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			4.970.920		-		-		2.270.920		-		2.270.920	33,33	45,68		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3		0		0		1		0		1		33,33			
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			8.400.000		-		1.800.000		2.400.000		-		4.200.000	100	50		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	24		6		6		6		6		24		100			
	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**81.900.000**		-		**4.268.000**		**3.942.000**		**4.888.000**		13.098.000	**83,33**	**15,99**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor (persen)	15		0		0		0		0		0		0			
				Nilai Ekspor Barang di Proviinsi (SBM/Milyar Rupiah)			0		0		0		0		0		0			
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			81.900.000		-		4.268.000		3.942.000		4.888.000		13.098.000	83,33	15,99		
			Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2		0		1		1		1		3		150			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2		0		1		1		0		2		100			
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			125.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	1		0		0		0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			47.680.000		-		3.427.000		3.096.000		3.627.000		10.150.000	150	21,29		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		0		1		1		1		3		150			
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			34.095.000		-		841.000		846.000		1.261.000		2.948.000	100	8,65		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2		0		1		1		0		2		100			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**122.889.720**		-		**26.832.120**		**15.756.300**		**49.873.436**		92.461.856	**107,27**	**75,24**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Peralatan UTTP yang Terstandarisasi (persen)	20		0		0		0		57,24		57,24		286,2			
				Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)			5		5		5		5		5		0			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			122.889.720		-		26.832.120		15.756.300		49.873.436		92.461.856	107,27	75,24		
			Terlaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	920		90		296		646		195		1.227		133,37			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	45		28		28		22		5		83		184,44			
				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	25		0		0		1		0		1		4			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			75.061.700		-		14.453.900		-		43.515.436		57.969.336	133,37	77,23		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	920		90		296		646		195		1.227		133,37			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			40.899.720		-		12.378.220		8.828.000		6.358.000		27.564.220	184,44	67,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	45		28		28		22		5		83		184,44			
		3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal			6.928.300		-		-		6.928.300		-		6.928.300	4	100		
			Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	25		0		0		1		0		1		4			
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**115.737.100**		**-**		**12.000.000**		**12.000.000**		**31.557.100**		55.557.100	**25**	**48**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)			0		0		0		20		20		0			
				Persentase Produk Lokal yang Meningkat Kapasitas Pemasarannya (persen)	71		0		0		0		25		25		35,21			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			115.737.100		-		12.000.000		12.000.000		31.557.100		55.557.100	25	48		
			Terlaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan	4		0		0		0		1		1		25			
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			115.737.100		-		12.000.000		12.000.000		31.557.100		55.557.100	25	48		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	4		0		0		0		1		1		25			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**57.036.000**		**-**		**4.265.080**		**7.209.900**		**8.684.020**		20.159.000	**52,08**	**35,34**		
	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**25.066.000**		**-**		**1.447.000**		**2.289.000**		**3.053.500**		6.789.500	**58,33**	**27,09**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)			0		0		0		5		5		0			
				Persentase Usaha Industri yang Mempunyai Produk dan Jasa Terstandarisasi (persen)	20		0		0		0		0		0		0			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			25.066.000		-		1.447.000		2.289.000		3.053.500		6.789.500	58,33	27,09		
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	3		0		0		0		1		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			8.270.000		-		-		1.089.000		-		1.089.000	0	13,17		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1		0		0		0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			5.800.000		-		1.447.000		1.200.000		1.660.000		4.307.000	100	74,26		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3		0		1		1		1		3		100			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			5.420.000		-		-		-		317.500		317.500	33,33	5,86		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	3		0		0		0		1		1		33,33			
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			5.576.000		-		-		-		1.076.000		1.076.000	100	19,3		
			Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**14.720.000**		**-**		**1.176.100**		**2.683.900**		**2.530.000**		6.390.000	**100**	**43,41**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor	Persentase IKM yang Mempunyai Izin Usaha Industri	20		0		0		0		30,2		30,2		151			
				Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)			0		0		0		20		20		0			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan			14.720.000		-		1.176.100		2.683.900		2.530.000		6.390.000	100	43,41		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			14.720.000		-		1.176.100		2.683.900		2.530.000		6.390.000	100	43,41		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1		0		0		0		1		1		100			
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**17.250.000**		**-**		**1.641.980**		**2.237.000**		**3.100.520**		6.979.500	**27,78**	**40,46**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	20		0		0		0		30,2		30,2		151			
				Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)			0		0		0		5		5		0			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			17.250.000		-		1.641.980		2.237.000		3.100.520		6.979.500	27,78	40,46		
			Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	12		0		3		0		3		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	12		0		0		2		0		2		16,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	6		0		0		0		1		1		16,67			
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional			4.200.000		-		1.641.980		-		1.958.020		3.600.000	50	85,71		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	12		0		3		0		3		6		50			
		3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			6.250.000		-		-		2.237.000		-		2.237.000	16,67	35,79		
			Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	12		0		0		2		0		2		16,67			
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			6.800.000		-		-		-		1.142.500		1.142.500	16,67	16,8		
			Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	6		0		0		0		1		1		16,67			
		3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**17.689.530**		**-**		**11.649.530**		**-**		**-**		11.649.530	**100**	**65,86**		
		3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**17.689.530**		**-**		**11.649.530**		**-**		**-**		11.649.530	**100**	**65,86**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)			0		25		50		75		75		0			
				Persentase pembinaan kawasan transmigrasi (%)	100		25		50		75		100		100		100			
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			17.689.530		-		11.649.530		-		-		11.649.530	100	65,86		
			Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan	1		0		1		0		0		1		100			
		3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			17.689.530		-		11.649.530		-		-		11.649.530	100	65,86		
			Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**61.117.058.533**		**11.821.454.795**		**11.112.662.615**		**12.151.917.999**		**21.639.631.829**		56.725.667.238	**96,66**	**92,81**		
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**52.137.892.653**		**10.999.092.998**		**9.931.114.669**		**9.661.743.078**		**17.959.609.710**		48.551.560.455	**95,8**	**93,12**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)									66		66		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa			Persentase Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (%)	100		28		23		21		25		97		97			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		11		21		16		32		80		100			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			347.130.485		38.179.750		41.043.500		67.655.000		83.535.050		230.413.300	100	66,38		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			54.241.790		11.764.000		6.303.500		15.785.000		7.464.000		41.316.500	100	76,17		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			60.053.265		11.630.000		4.332.500		7.112.000		5.791.800		28.866.300	100	48,07		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			90.134.370		-		10.127.000		22.494.250		49.879.250		82.500.500	100	91,53		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			53.358.025		8.640.750		14.579.500		1.470.000		3.701.000		28.391.250	100	53,21		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.266.395		-		-		10.071.750		10.086.000		20.157.750	100	40,1		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.076.640		6.145.000		5.701.000		10.722.000		6.613.000		29.181.000	100	74,68		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.467.161.506		4.154.933.647		5.402.516.980		4.653.026.770		4.563.249.183		18.773.726.580	100	91,73		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143		143		143		143		143		143		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.738.075.058		3.919.616.757		4.985.446.645		4.264.557.044		4.210.674.789		17.380.295.235	100	92,75		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143		143		143		143		143		143		100			
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			985.890.000		150.620.000		293.729.000		210.090.000		212.994.000		867.433.000	100	87,98		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			327.255.580		26.113.250		39.827.335		106.662.226		60.557.394		233.160.205	100	71,25		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			31.049.510		6.616.890		6.111.000		3.160.000		1.575.000		17.462.890	100	56,24		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.854.400		7.768.500		-		2.250.000		5.000.000		15.018.500	100	72,02		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			32.118.500		3.729.750		15.671.000		2.720.000		2.637.000		24.757.750	100	77,08		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			298.357.425		40.468.500		51.562.000		61.373.500		61.786.000		215.190.000	100	72,12		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			33.561.033		-		10.170.000		2.214.000		8.025.000		20.409.000	100	60,81		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			133.302.560		2.885.000		25.610.150		21.949.500		32.315.500		82.760.150	100	62,08		
			Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			44.649.750		2.885.000		5.283.000		4.810.000		11.840.000		24.818.000	100	55,58		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			16.247.465		-		8.102.500		2.500.000		4.719.000		15.321.500	100	94,3		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			27.771.900		-		3.066.150		3.300.000		4.067.500		10.433.650	100	37,57		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			44.633.445		-		9.158.500		11.339.500		11.689.000		32.187.000	100	72,11		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			175.445.000		-		102.500.000		-		-		102.500.000	100	58,42		
			Tersusunnya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			102.500.000		-		102.500.000		-		-		102.500.000	100	100		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			72.945.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.275.502.670		1.304.582.313		47.523.705		183.578.083		730.228.277		2.265.912.378	93,75	99,58		
			Terselenggaranya Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			160.583.600		43.272.750		-		57.022.750		60.287.873		160.583.373	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.977.920		-		-		8.976.000		14.400.000		23.376.000	100	97,49		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			52.202.000		38.222.000		-		13.162.800		-		51.384.800	100	98,43		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			170.798.650		45.253.185		13.625.680		20.529.430		89.185.950		168.594.245	100	98,71		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			134.019.500		51.625.000		12.040.000		24.398.000		44.259.200		132.322.200	100	98,73		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.250.000.000		1.010.750.000		-		6.000.000		230.000.000		1.246.750.000	50	99,74		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2		0		0		0		1		1		50			
		4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			60.000.000		30.000.000		-		-		29.941.000		59.941.000	100	99,9		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			423.921.000		85.459.378		21.858.025		53.489.103		262.154.254		422.960.760	100	99,77		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.278.078.416		400.580.000		743.500.000		498.735.000		2.281.778.128		3.924.593.128	58	91,74		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0		0		0		0		11		11		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0		2		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		20		20		40			
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		450.450.000		321.750.000		772.200.000	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0		0		0		0		11		11		0			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			772.200.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			446.500.000		25.100.000		-		-		329.177.200		354.277.200	100	79,35		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			169.937.140		-		-		-		159.407.700		159.407.700	100	93,8		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0		2		2		100			
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000		-		-		-		33.300.000		33.300.000	50	83,25		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		0		0		0		1		1		50			
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.849.441.276		375.480.000		743.500.000		48.285.000		1.438.143.228		2.605.408.228	40	91,44		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		20		20		40			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.780.935.486		1.170.023.619		1.023.051.160		1.367.682.074		2.543.725.933		6.104.482.786	100	90,02		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		0		2		2		2		6		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.000.000		-		15.202.500		13.292.500		12.645.000		41.140.000	100	82,28		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		0		2		2		2		6		100			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.482.012.336		301.563.619		309.653.963		419.051.074		434.590.233		1.464.858.889	100	98,84		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			990.120.000		69.750.000		87.896.000		12.070.000		502.790.000		672.506.000	100	67,92		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.258.803.150		798.710.000		610.298.697		923.268.500		1.593.700.700		3.925.977.897	100	92,19		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.731.822.284		2.366.057.326		556.908.997		776.827.923		3.813.157.195		7.512.951.441	100	97,17		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	48		12		12		12		12		48		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		0		0		2		4		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		2		2		4		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		4		4		100			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			1.614.440.000		192.639.226		534.760.297		365.790.123		552.759.404		1.645.949.050	100	101,95		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	48		12		12		12		12		48		100			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.800.303.943		2.136.368.100		16.342.700		376.962.800		2.143.500.641		4.673.174.241	100	97,35		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		0		0		2		4		100			
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			729.328.341		37.050.000		5.806.000		34.075.000		635.910.700		712.841.700	100	97,74		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		2		2		4		100			
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			587.750.000		-		-		-		480.986.450		480.986.450	100	81,84		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		4		4		100			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.951.142.244		75.658.434		306.028.675		693.435.752		659.735.279		1.734.858.140	100	88,92		
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	4		0		0		2		2		4		100			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			777.491.505		62.458.434		299.322.175		187.375.302		187.375.302		736.531.213	100	94,73		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2		2		2		2		2		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			423.650.000		13.200.000		-		202.930.200		203.944.990		420.075.190	100	99,16		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		1		0		1		1		3		100			
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			750.000.739		-		6.706.500		303.130.250		268.414.987		578.251.737	100	77,1		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	4		0		0		2		2		4		100			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			5.092.954.600		774.650.300		1.165.250.750		807.085.500		2.276.126.069		5.023.112.619	100	98,63		
			Terselenggaranya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		1		4		3		4		12		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.199.894.800		216.931.500		268.552.250		268.818.500		429.194.704		1.183.496.954	100	98,63		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			855.891.800		44.638.800		226.375.000		209.034.000		354.263.599		834.311.399	100	97,48		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		1		4		3		4		12		100			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			3.037.168.000		513.080.000		670.323.500		329.233.000		1.492.667.766		3.005.304.266	100	98,95		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			238.044.300		15.138.118		55.840.906		15.198.500		88.043.339		174.220.863	100	73,19		
			Terselenggaranya Penataan Organisasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4		0		1		1		2		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	3		0		1		0		2		3		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			83.505.336		8.326.695		13.425.250		6.152.500		32.490.559		60.395.004	100	72,32		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4		0		1		1		2		4		100			
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			33.271.935		-		8.044.400		3.746.000		19.201.500		30.991.900	100	93,15		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		0		1		1		1		3		100			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			98.437.025		5.358.923		26.242.356		5.300.000		30.284.280		67.185.559	100	68,25		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	3		0		1		0		2		3		100			
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			16.417.794		-		4.363.900		-		5.603.000		9.966.900	100	60,71		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			6.412.210		1.452.500		3.765.000		-		464.000		5.681.500	100	88,6		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2.666.373.102		696.404.491		461.339.846		576.568.976		887.715.757		2.622.029.070	111,11	98,34		
			Terwujudnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		4		0		4		4		12		100			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12		4		4		4		4		16		133,33			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			2.531.761.358		664.521.991		434.359.846		566.316.476		850.887.757		2.516.086.070	100	99,38		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			19.867.410		5.382.500		-		8.684.500		5.649.000		19.716.000	100	99,24		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		4		0		4		4		12		100			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			114.744.334		26.500.000		26.980.000		1.568.000		31.179.000		86.227.000	133,33	75,15		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		4		4		4		4		16		133,33			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**8.293.222.711**		**767.635.397**		**1.076.724.246**		**2.338.705.141**		**3.331.232.862**		7.514.297.646	**98,48**	**90,61**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (persen)	76,00								76		76		100			
				Persetase Peningkatan Kualitas Pembinaan Umat Beragama	100								99		99		99			
				Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai	95,00								95		95		100			
				Persentase Usulan Kerjasama Daerah yang di Fasilitasi	100,00								95		95		95			
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									95		95		0			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			1.085.177.000		282.250.823		146.846.956		205.515.900		245.834.101		880.447.780	94,44	81,13		
			Terwujudnya Perangkat daerah yang ditata dan diselesaikan permasalahan administrasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	6		0		3		2		0		5		83,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			72.034.195		2.850.000		15.088.700		13.122.000		9.580.700		40.641.400	83,33	56,42		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	6		0		3		2		0		5		83,33			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			514.931.410		103.590.156		96.768.756		140.405.500		125.422.533		466.186.945	100	90,53		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	3		1		0		1		1		3		100			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			498.211.395		175.810.667		34.989.500		51.988.400		110.830.868		373.619.435	100	74,99		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6.350.604.708		383.680.518		736.977.630		2.001.930.395		2.736.257.551		5.858.846.094	100	92,26		
			Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4		0		0		2		2		4		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			6.217.399.558		383.680.518		736.977.630		2.001.930.395		2.692.307.901		5.814.896.444	100	93,53		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4		0		0		2		2		4		100			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			133.205.150		-		-		-		43.949.650		43.949.650	100	32,99		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			532.626.523		101.704.056		147.094.340		73.585.990		182.744.393		505.128.779	100	94,84		
			Tersusunnya Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	50		4		12		20		14		50		100			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	10		2		5		0		3		10		100			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	50		0		4		26		20		50		100			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			107.077.123		1.140.000		14.072.505		55.511.320		27.110.070		97.833.895	100	91,37		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	50		4		12		20		14		50		100			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			343.029.530		100.564.056		130.998.915		3.154.200		100.000.000		334.717.171	100	97,58		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	10		2		5		0		3		10		100			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			82.519.870		-		2.022.920		14.920.470		55.634.323		72.577.713	100	87,95		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	50		0		4		26		20		50		100			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			324.814.480		-		45.805.320		57.672.856		166.396.817		269.874.993	100	83,09		
			Terwujudnya Kerjasama Daerah yang disepakati	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			303.902.260		-		41.180.820		56.113.856		163.518.817		260.813.493	100	85,82		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			13.036.640		-		2.429.000		-		2.578.500		5.007.500	100	38,41		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			7.875.580		-		2.195.500		1.559.000		299.500		4.054.000	100	51,48		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**685.943.169**		**54.726.400**		**104.823.700**		**151.469.780**		**348.789.257**		659.809.137	**99,25**	**96,19**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	45,00								45		45		100			
				Angka Inflasi ()													0			
				Persetase Peningkatan Kualitas Pembinaan Umat Beragama	100								95		95		95			
				Persentase Usulan Kerjasama Daerah yang di Fasilitasi	100,00								95		95		95			
				Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	45								45		45		100			
				Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai	95,00								95		95		100			
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan									75		75		0			
				Indeks Reformasi Hukum (persen)	76,00								76		76		100			
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan									75		75		0			
				Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal									0		0		0			
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)									85		85		0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			122.857.368		8.135.000		46.060.500		31.444.900		18.272.000		103.912.400	100	84,58		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			11.467.219		-		2.827.500		4.836.900		2.611.000		10.275.400	100	89,61		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			87.146.192		8.135.000		30.973.000		24.141.500		12.375.000		75.624.500	100	86,78		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			24.243.957		-		12.260.000		2.466.500		3.286.000		18.012.500	100	74,3		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			69.968.000		-		20.073.500		21.088.522		27.054.000		68.216.022	100	97,5		
			Terselenggaranya Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	4		0		1		2		1		4		100			
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			22.505.000		-		5.808.000		5.842.300		10.389.500		22.039.800	100	97,93		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			20.510.000		-		6.656.000		4.545.000		8.119.000		19.320.000	100	94,2		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2		0		0		1		1		2		100			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			26.953.000		-		7.609.500		10.701.222		8.545.500		26.856.222	100	99,64		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	4		0		1		2		1		4		100			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			483.874.840		46.591.400		38.089.700		94.817.358		299.496.257		478.994.715	97,5	98,99		
			Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	200		40		15		54		76		185		92,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5		0		0		2		3		5		100			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			143.264.680		35.030.000		5.103.000		45.590.300		56.571.700		142.295.000	92,5	99,32		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	200		40		15		54		76		185		92,5			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			107.950.500		9.518.500		21.578.000		17.530.000		57.754.557		106.381.057	100	98,55		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			232.659.660		2.042.900		11.408.700		31.697.058		185.170.000		230.318.658	100	98,99		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5		0		0		2		3		5		100			
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			9.242.961		-		600.000		4.119.000		3.967.000		8.686.000	100	93,97		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			9.242.961		-		600.000		4.119.000		3.967.000		8.686.000	100	93,97		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**59.844.504.613**		**10.850.062.696**		**12.573.799.488**		**15.560.085.024**		**17.749.932.099**		56.733.879.307	**97,04**	**94,8**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**40.961.455.236**		**9.241.637.852**		**9.725.167.031**		**9.612.893.839**		**9.643.944.553**		38.223.643.275	**95,61**	**93,32**	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		17,91		27,4		25,21		22,24		92,76		115,95			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		62.58		62.58		0			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			301.706.800		56.698.100		110.651.100		62.208.000		72.050.000		301.607.200	100	99,97		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		1		0		2		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2		0		1		1		0		2		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			73.875.100		18.815.900		10.851.200		27.472.000		16.736.000		73.875.100	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			52.007.600		17.762.200		11.509.400		16.736.000		6.000.000		52.007.600	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		1		0		1		0		2		100			
		4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			52.155.000		4.000.000		8.000.000		6.000.000		34.155.000		52.155.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			57.517.100		6.752.000		38.733.300		6.000.000		6.000.000		57.485.300	100	99,94		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2		0		1		1		0		2		100			
		4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66.152.000		9.368.000		41.557.200		6.000.000		9.159.000		66.084.200	100	99,9		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.070.605.703		1.360.355.628		1.594.704.793		1.203.706.592		1.392.000.607		5.550.767.620	100	91,44		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		60		60		60		60		60		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.148.287.503		1.201.153.028		1.321.717.393		1.058.534.692		1.047.431.607		4.628.836.720	100	89,91		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60		60		60		60		60		60		100			
		4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			620.424.500		107.073.000		206.559.500		79.282.000		227.510.000		620.424.500	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			87.668.100		16.129.600		43.059.900		6.000.000		22.104.000		87.293.500	100	99,57		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			120.670.400		20.000.000		15.368.000		24.701.400		60.588.300		120.657.700	100	99,99		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3		1		1		1		0		3		100			
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			46.366.700		8.000.000		4.000.000		6.000.000		28.366.700		46.366.700	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			47.188.500		8.000.000		4.000.000		29.188.500		6.000.000		47.188.500	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99.775.000		-		66.905.000		-		32.870.000		99.775.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	17		0		10		0		7		17		100			
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			99.775.000		-		66.905.000		-		32.870.000		99.775.000	100	100		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	17		0		10		0		7		17		100			
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.082.823.221		236.523.564		704.756.310		272.702.521		840.470.544		2.054.452.939	100	98,64		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3		2		0		0		1		3		100			
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			129.250.060		22.361.660		36.772.950		21.585.440		48.135.010		128.855.060	100	99,69		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			717.050.308		11.294.192		357.349.270		33.108.500		298.175.964		699.927.926	100	97,61		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			18.512.860		-		16.412.860		-		-		16.412.860	100	88,66		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.113.963.993		136.015.712		294.221.230		218.008.581		456.965.570		1.105.211.093	100	99,21		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			104.046.000		66.852.000		-		-		37.194.000		104.046.000	100	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		2		0		0		1		3		100			
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.509.921.425		308.231.300		391.430.186		224.308.206		494.267.473		1.418.237.165	100	93,93		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2		1		0		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			175.225.705		43.353.905		47.597.450		18.222.500		63.818.350		172.992.205	100	98,73		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			513.041.600		98.795.965		116.708.485		97.802.456		118.957.555		432.264.461	100	84,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.436.000		43.800.000		-		-		24.636.000		68.436.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2		1		0		0		1		2		100			
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			753.218.120		122.281.430		227.124.251		108.283.250		286.855.568		744.544.499	100	98,85		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.805.669.857		95.002.260		209.853.896		104.132.500		2.280.893.510		2.689.882.166	100	95,87		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		2		2		2		2		8		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		1		0		0		2		100			
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			558.351.300		55.400.000		171.400.000		93.600.000		235.975.778		556.375.778	100	99,65		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.108.907.622		-		-		-		1.996.635.453		1.996.635.453	100	94,68		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			138.410.935		39.602.260		38.453.896		10.532.500		48.282.279		136.870.935	100	98,89		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		1		0		0		2		100			
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			24.855.289.262		6.007.335.454		5.717.875.454		7.121.251.720		4.029.281.534		22.875.744.162	57,53	92,04		
			Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		45		45		45		45		100			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	62		0		45		0		0		45		72,58			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			24.516.829.262		6.007.335.454		5.534.835.454		7.121.251.720		4.029.281.534		22.692.704.162	100	92,56		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		45		45		45		45		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			194.610.000		-		183.040.000		-		-		183.040.000	72,58	94,05		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	62		0		45		0		0		45		72,58			
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			143.850.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45		0		0		0		0		0		0			
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.235.663.968		1.177.491.546		928.990.292		624.584.300		502.110.885		3.233.177.023	100	99,92		
			Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			477.388.143		52.153.416		113.089.727		225.512.000		84.857.000		475.612.143	100	99,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.758.275.825		1.125.338.130		815.900.565		399.072.300		417.253.885		2.757.564.880	100	99,97		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**18.883.049.377**		**1.608.424.844**		**2.848.632.457**		**5.947.191.185**		**8.105.987.546**		18.510.236.032	**100**	**98,03**	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)			0		0		0		66,66		66,66		0			
				Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar (persen)	75		16,67		10		56,67		16,66		100		133,33			
				Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang	100		6,67		0		36,67		56,66		100		100			
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3.628.303.920		561.090.102		573.649.064		1.356.738.393		1.103.817.763		3.595.295.322	100	99,09		
			Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4		2		0		1		1		4		100			
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			2.851.135.400		224.640.580		570.097.814		1.261.854.493		771.087.563		2.827.680.450	100	99,18		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			777.168.520		336.449.522		3.551.250		94.883.900		332.730.200		767.614.872	100	98,77		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4		2		0		1		1		4		100			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2.781.009.000		227.943.300		493.779.100		180.826.300		1.751.264.256		2.653.812.956	100	95,43		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8		8		8		8		8		8		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	2		1		0		1		0		2		100			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			698.197.750		4.848.350		63.464.400		1.200.000		569.022.256		638.535.006	100	91,45		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			274.587.800		3.000.000		166.000.000		100.432.100		5.155.700		274.587.800	100	100		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	8		8		8		8		8		8		100			
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			630.939.600		218.322.350		142.499.500		41.694.200		185.656.050		588.172.100	100	93,22		
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1.177.283.850		1.772.600		121.815.200		37.500.000		991.430.250		1.152.518.050	100	97,9		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	2		1		0		1		0		2		100			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			1.800.834.750		516.426.960		106.979.458		664.553.896		505.701.244		1.793.661.558	100	99,6		
			Tersedianya fasilitas Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			1.800.834.750		516.426.960		106.979.458		664.553.896		505.701.244		1.793.661.558	100	99,6		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1		0		0		0		1		1		100			
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			0		0		0		85		85		0			
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			7.547.281.813		32.961.245		1.423.225.110		2.810.645.336		3.278.832.911		7.545.664.602	100	99,98		
			Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1		0		1		0		0		1		100			
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1.346.538.370		3.000.000		8.860.000		-		1.334.538.370		1.346.398.370	100	99,99		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			939.162.649		1.500.000		10.775.320		898.254.000		28.633.329		939.162.649	100	100		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			1.282.255.653		1.500.000		1.462.500		-		1.278.731.053		1.281.693.553	100	99,96		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			1.322.157.690		1.500.000		19.523.190		690.295.300		609.934.089		1.321.252.579	100	99,93		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2.657.167.451		25.461.245		1.382.604.100		1.222.096.036		26.996.070		2.657.157.451	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1		0		1		0		0		1		100			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3.125.619.894		270.003.237		250.999.725		934.427.260		1.466.371.372		2.921.801.594	100	93,48		
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			900.137.420		226.119.000		235.906.725		8.247.260		429.550.135		899.823.120	100	99,97		
			Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1		0		0		0		1		1		100			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			2.225.482.474		43.884.237		15.093.000		926.180.000		1.036.821.237		2.021.978.474	100	90,86		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.01	**PERENCANAAN**			**11.522.585.322**		**1.481.916.647**		**3.371.172.775**		**2.325.586.025**		**2.519.913.093**		9.698.588.540	**91,28**	**84,17**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.675.307.468**		**1.388.577.019**		**3.246.329.555**		**2.225.313.557**		**2.334.599.748**		9.194.819.879	**79,55**	**86,13**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		0		0		0		74,36		74,36		92,95			
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			0		0		0		74,36		74,36		0			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.213.190		5.362.075		5.722.000		10.220.075		15.796.000		37.100.150	85,71	61,61		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		2		1		2		0		5		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.164.160		1.198.000		1.508.600		1.504.475		2.714.500		6.925.575	100	52,61		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.839.175		1.002.500		1.007.000		1.712.000		1.500.500		5.222.000	100	76,35		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.189.225		-		-		1.500.000		3.150.000		4.650.000	100	64,68		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.790.050		750.000		1.000.250		1.000.000		1.500.000		4.250.250	100	73,41		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.682.170		-		-		750.000		2.335.000		3.085.000	0	54,29		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.692.660		1.204.100		1.206.000		2.003.500		2.021.000		6.434.600	100	50,7		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		2		1		2		0		5		100			
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.855.750		1.207.475		1.000.150		1.750.100		2.575.000		6.532.725	100	73,77		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.443.605.368		1.268.349.463		3.094.361.872		2.003.763.342		2.078.398.674		8.444.873.351	99,66	89,42		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		72		72		72		72		72		97,3			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.950.649.688		1.202.653.638		2.953.031.222		1.905.731.542		1.963.059.274		8.024.475.676	97,3	89,65		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74		72		72		72		72		72		97,3			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			427.080.000		62.640.000		125.855.000		89.610.000		93.985.000		372.090.000	100	87,12		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.910.750		1.200.000		3.600.000		2.000.000		1.500.000		8.300.000	100	83,75		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			35.294.750		1.000.450		8.197.250		2.055.800		11.000.000		22.253.500	100	63,05		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.027.900		-		1.626.000		341.000		2.999.400		4.966.400	100	98,78		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			4.586.800		-		800.000		1.000.000		2.005.000		3.805.000	100	82,96		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.608.480		855.375		750.500		1.507.000		2.000.000		5.112.875	100	77,37		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4.447.000		-		501.900		1.518.000		1.850.000		3.869.900	100	87,02		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.893.150		3.753.575		1.411.125		4.593.125		2.717.500		12.475.325	100	66,03		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			11.288.775		2.079.000		551.350		2.530.425		-		5.160.775	100	45,72		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			7.604.375		1.674.575		859.775		2.062.700		2.717.500		7.314.550	100	96,19		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.504.400		23.582.469		23.068.520		70.697.701		91.465.180		208.813.870	59,67	92,6		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	300		0		3		3		5		11		3,67			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		3		3		3		3		12		8			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	200		3		3		3		3		12		6			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50		5		10		20		15		50		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.715.120		-		1.884.500		2.558.200		1.129.750		5.572.450	3,67	57,36		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	300		0		3		3		5		11		3,67			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.630.980		1.018.600		719.300		513.200		247.900		2.499.000	8	94,98		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		3		3		3		3		12		8			
		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.855.000		2.210.000		1.963.000		761.000		913.000		5.847.000	6	99,86		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	200		3		3		3		3		12		6			
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.662.500		4.509.000		4.842.500		7.009.000		7.802.000		24.162.500	100	97,97		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.950.000		1.082.500		1.517.500		1.170.000		3.610.000		7.380.000	100	56,99		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.150.000		11.126.000		4.869.000		55.043.441		68.777.266		139.815.707	100	99,05		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		5		10		20		15		50		100			
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			28.540.800		3.636.369		7.272.720		3.642.860		8.985.264		23.537.213	100	82,47		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			276.644.000		-		-		60.272.051		11.655.000		71.927.051	58,82	26		
			Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		100		0		100		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17		0		0		0		3		3		17,65			
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			75.690.000		-		-		60.272.051		-		60.272.051	100	79,63		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		0		100		0		100		100			
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.954.000		-		-		-		11.655.000		11.655.000	17,65	5,8		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17		0		0		0		3		3		17,65			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.127.360		30.336.446		87.555.219		63.861.096		107.497.467		289.250.228	100	75,11		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			166.327.360		16.136.446		33.255.219		25.011.096		44.236.467		118.639.228	100	71,33		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			218.800.000		14.200.000		54.300.000		38.850.000		63.261.000		170.611.000	100	77,98		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.320.000		57.192.991		34.210.819		11.906.167		27.069.927		130.379.904	44,44	49,14		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	31		31		31		31		31		31		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		5		5		10		20		33,33			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			246.170.000		57.192.991		33.195.819		9.406.167		19.549.927		119.344.904	100	48,48		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	31		31		31		31		31		31		100			
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.800.000		-		1.015.000		2.500.000		7.520.000		11.035.000	33,33	79,96		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		5		5		10		20		33,33			
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.350.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**371.147.724**		**72.521.503**		**96.431.820**		**71.097.038**		**31.640.762**		271.691.123	**104,17**	**73,2**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD# (persen)	80,00		0		0		80		0		80		100			
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD			0		0		100		0		0		0			
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			0		0		100		0		0		0			
				Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD# (persen)	100,00		0		100		0		0		100		100			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			265.305.680		68.784.060		84.816.300		48.629.095		18.243.000		220.472.455	108,33	83,1		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2		0		3		0		0		3		150			
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3		0		2		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3		1		2		0		0		3		100			
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3		0		2		1		0		3		100			
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	247		0		247		0		0		247		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			50.726.025		11.081.050		3.541.000		-		2.365.000		16.987.050	150	33,49		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2		0		3		0		0		3		150			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			5.438.775		-		-		5.438.775		-		5.438.775	100	100		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3		0		2		1		0		3		100			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			11.453.010		11.453.010		-		-		-		11.453.010	100	100		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3		1		2		0		0		3		100			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			57.359.800		-		48.695.800		-		-		48.695.800	100	84,9		
			Terlaksananya Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3		0		2		1		0		3		100			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			73.500.000		46.250.000		26.800.000		-		-		73.050.000	100	99,39		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	247		0		247		0		0		247		100			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			66.828.070		-		5.779.500		43.190.320		15.878.000		64.847.820	100	97,04		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			56.590.632		2.010.825		4.100.230		-		6.475.762		12.586.817	100	22,24		
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	56		0		0		0		56		56		100			
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			30.723.250		-		2.862.510		-		2.604.490		5.467.000	100	17,79		
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			14.488.032		2.010.825		-		-		1.667.527		3.678.352	100	25,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	56		0		0		0		56		56		100			
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			11.379.350		-		1.237.720		-		2.203.745		3.441.465	100	30,24		
			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			37.735.532		1.726.618		7.515.290		11.202.063		6.922.000		27.365.971	100	72,52		
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			18.686.052		588.218		1.663.850		11.202.063		3.966.500		17.420.631	100	93,23		
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			19.049.480		1.138.400		5.851.440		-		2.955.500		9.945.340	100	52,21		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			11.515.880		-		-		11.265.880		-		11.265.880	100	97,83		
			Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			11.515.880		-		-		11.265.880		-		11.265.880	100	97,83		
			Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**476.130.130**		**20.818.125**		**28.411.400**		**29.175.430**		**153.672.583**		232.077.538	**100**	**48,74**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)	80,00		0		0		0		80		80		100			
				Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan (persen)	80,00		0		0		0		80		80		100			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			0		0		0		80		80		0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			140.000.000		6.735.510		10.489.515		12.074.750		73.992.354		103.292.129	100	73,78		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,			8.630.220		1.885.235		-		930.000		1.277.235		4.092.470	100	47,42		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			10.647.230		-		2.849.090		2.700.000		3.421.800		8.970.890	100	84,26		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			6.790.950		549.610		3.155.850		386.750		-		4.092.210	100	60,26		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			26.493.430		1.899.875		860.120		1.125.000		16.148.775		20.033.770	100	75,62		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			10.667.850		-		2.091.550		450.000		3.597.575		6.139.125	100	57,55		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan			10.516.270		-		-		-		4.521.915		4.521.915	100	43		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			9.570.390		-		-		450.000		6.823.835		7.273.835	100	76		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan			56.683.660		2.400.790		1.532.905		6.033.000		38.201.219		48.167.914	100	84,98		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3		0		1		2		0		3		100			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)			0		0		0		80		80		0			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			124.999.630		8.115.000		11.010.000		9.405.000		32.134.124		60.664.124	100	48,53		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,			17.262.295		2.208.000		-		580.000		5.443.500		8.231.500	100	47,68		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			13.688.030		2.295.000		3.301.000		1.125.000		3.849.000		10.570.000	100	77,22		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			18.735.300		-		2.634.000		750.000		8.595.624		11.979.624	100	63,94		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			11.988.585		-		1.665.000		2.285.000		2.712.000		6.662.000	100	55,57		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,			16.417.490		645.000		350.000		1.555.000		3.781.500		6.331.500	100	38,57		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			17.886.960		1.625.000		3.060.000		1.125.000		3.435.500		9.245.500	100	51,69		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			15.300.180		683.000		-		-		1.795.000		2.478.000	100	16,2		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			13.720.790		659.000		-		1.985.000		2.522.000		5.166.000	100	37,65		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA			0		0		0		80		80		0			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			211.130.500		5.967.615		6.911.885		7.695.680		47.546.105		68.121.285	100	32,27		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3		1		1		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3		0		1		2		0		3		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4		0		2		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,			10.916.350		1.464.500		847.610		3.194.240		1.502.000		7.008.350	100	64,2		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			8.394.300		1.562.115		2.509.625		900.000		863.560		5.835.300	100	69,52		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			12.983.150		1.016.000		-		1.351.440		1.937.000		4.304.440	100	33,15		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			121.137.250		1.145.000		1.304.650		-		26.375.140		28.824.790	100	23,8		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3		0		1		2		0		3		100			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan			17.889.000		-		-		-		7.916.670		7.916.670	100	44,25		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			6.357.250		220.000		900.000		-		982.460		2.102.460	100	33,07		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3		1		1		1		0		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			17.727.500		560.000		-		900.000		1.533.300		2.993.300	100	16,89		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4		0		2		1		1		4		100			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			15.725.700		-		1.350.000		1.350.000		6.435.975		9.135.975	100	58,1		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	3		0		1		2		0		3		100			
		5.02	**KEUANGAN**			**394.697.668.328**		**8.197.031.423**		**6.469.077.292**		**11.865.479.668**		**128.693.331.105**		155.224.919.488	**71,39**	**39,33**		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.424.463.830**		**3.638.506.620**		**2.335.178.307**		**6.347.843.476**		**6.114.978.797**		18.436.507.200	**86,52**	**58,67**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan BPKAD	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80												0			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		66.57		66.57		0			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			521.547.360		138.608.220		31.120.000		237.393.644		101.051.605		508.173.469	89,29	97,44		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		0		2		1		4		100			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			123.669.025		54.826.825		1.910.000		46.643.090		18.743.475		122.123.390	100	98,75		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			57.680.795		-		-		43.683.795		12.048.000		55.731.795	100	96,62		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			56.750.505		-		11.025.000		44.363.335		-		55.388.335	100	97,6		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			58.696.695		4.389.355		4.687.000		7.971.180		40.366.770		57.414.305	100	97,82		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			58.247.560		-		-		46.808.595		10.971.360		57.779.955	100	99,2		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			71.924.045		46.079.040		13.498.000		7.654.900		-		67.231.940	25	93,48		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		0		0		0		1		1		25			
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			94.578.735		33.313.000		-		40.268.749		18.922.000		92.503.749	100	97,81		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		0		2		1		4		100			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.357.221.963		3.120.533.281		2.049.674.504		5.300.047.656		4.107.553.748		14.577.809.189	94,05	55,31		
			Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108		0		0		0		108		108		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		3		0		5		3		11		91,67			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3		0		0		1		1		2		66,67			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18		4		2		4		8		18		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.907.669.868		2.588.386.276		1.754.897.504		4.549.328.010		3.666.223.848		12.558.835.638	100	52,53		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108		0		0		0		108		108		100			
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.943.480.000		364.020.000		267.780.000		579.180.000		306.600.000		1.517.580.000	100	78,09		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			91.461.505		35.567.910		-		41.689.330		12.940.000		90.197.240	91,67	98,62		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		0		5		3		11		91,67			
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			65.157.420		-		-		14.483.530		49.787.920		64.271.450	100	98,64		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			122.786.590		36.090.495		-		42.543.330		42.916.365		121.550.190	66,67	98,99		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3		0		0		1		1		2		66,67			
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			96.129.420		36.688.410		9.997.000		22.058.065		26.568.975		95.312.450	100	99,15		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		2		4		8		18		100			
		5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			130.537.160		59.780.190		17.000.000		50.765.391		2.516.640		130.062.221	100	99,64		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			58.892.300		18.489.360		2.000.000		2.000.000		35.646.805		58.136.165	100	98,72		
			tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			58.892.300		18.489.360		2.000.000		2.000.000		35.646.805		58.136.165	100	98,72		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			547.191.390		49.383.541		12.996.000		62.379.541		409.911.717		534.670.799	100	97,71		
			Tertatanya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30		0		0		0		30		30		100			
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			297.500.000		-		-		62.379.541		229.448.359		291.827.900	100	98,09		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2		0		0		1		1		2		100			
		5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			124.691.390		49.383.541		12.996.000		-		55.463.358		117.842.899	100	94,51		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			125.000.000		-		-		-		125.000.000		125.000.000	100	100		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30		0		0		0		30		30		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.559.812.125		59.539.304		76.954.500		227.132.473		460.776.613		824.402.890	89,58	52,85		
			tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		2		0		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		1		2		3		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		1		1		33,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		0		2		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		2		2		3		10		83,33			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			58.239.750		-		-		45.799.828		12.439.000		58.238.828	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		2		0		2		100			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			293.238.200		-		-		65.523.300		182.617.200		248.140.500	100	84,62		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		1		2		3		100			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.948.500		1.402.300		15.610.250		-		-		17.012.550	100	94,79		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			557.804.175		7.000.000		30.000.000		26.710.825		108.000.000		171.710.825	33,33	30,78		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		1		1		33,33			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			67.250.000		27.492.280		-		20.514.831		-		48.007.111	100	71,39		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		0		2		100			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			42.500.000		10.000.000		6.000.000		22.000.000		-		38.000.000	100	89,41		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1		0		1		0		0		1		100			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			503.724.000		9.859.024		25.344.250		31.316.989		157.720.413		224.240.676	83,33	44,52		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		2		2		3		10		83,33			
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			19.107.500		3.785.700		-		15.266.700		-		19.052.400	100	99,71		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.368.553.860		236.429.151		139.439.277		518.890.162		359.005.019		1.253.763.609	97,92	91,61		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		4		0		4		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		2		5		1		11		91,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.971.860		10.654.165		9.265.310		-		-		19.919.475	100	99,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		4		0		4		12		100			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			566.256.000		127.524.986		29.798.967		230.810.166		131.909.772		520.043.891	91,67	91,84		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		2		5		1		11		91,67			
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			81.520.000		-		-		45.665.000		35.490.000		81.155.000	100	99,55		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			700.806.000		98.250.000		100.375.000		242.414.996		191.605.247		632.645.243	100	90,27		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.011.244.832		15.523.763		22.994.026		-		641.033.290		679.551.079	75	67,2		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21		4		4		4		9		21		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			643.320.000		15.523.763		22.994.026		-		470.168.340		508.686.129	100	79,07		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21		4		4		4		9		21		100			
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			367.924.832		-		-		-		170.864.950		170.864.950	50	46,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		1		1		50			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan. Terwujudnya Birokrasi	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**343.994.395.531**		**1.540.344.682**		**495.867.774**		**1.968.809.753**		**116.789.457.663**		120.794.479.872	**46,3**	**35,12**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini Laporan Keuangan (Predikat)	80		0		0		0		100		100		125			
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun *sebelumnya (Rasio)	2,64		0		0		0		0		0		0			
				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah* (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)			0		0		0		28,25		28,25		0			
				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	12,95		0		0		0		12,02		12,02		92,82			
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (di*kurangi transfer expenditures)* (Rasio)	14,05		0		0		0		2,75		2,75		19,57			
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD			0		0		0		40,23		40,23		0			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.862.926.130		237.487.940		97.577.000		124.572.300		957.743.789		1.417.381.029	50	76,08		
			Tersusunnya Dokumen Ranperda APBD dan Ranperbup Penjabaran APBD, Dokumen KUA/PPAS dan KUA/PPAS perubahan serta Dokumen Perbup	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		1		0		0		0		1		50			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	20		0		0		0		20		20		100			
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			109.271.300		-		9.107.000		27.454.300		71.357.000		107.918.300	100	98,76		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			97.811.300		-		-		62.691.000		21.434.900		84.125.900	100	86,01		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			70.874.680		-		-		12.437.000		39.251.000		51.688.000	100	72,93		
			Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			134.464.000		21.179.000		27.983.000		21.990.000		56.154.000		127.306.000	100	94,68		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran			281.079.450		96.105.050		-		-		178.257.190		274.362.240	50	97,61		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		1		0		0		0		1		50			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			427.125.400		120.203.890		60.487.000		-		226.786.840		407.477.730	100	95,4		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			742.300.000		-		-		-		364.502.859		364.502.859	100	49,1		
			Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	20		0		0		0		20		20		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)			0		0		0		43,69		43,69		0			
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			0		0		0		56,29		56,29		0			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.400.000.000		282.471.668		214.596.602		521.864.883		314.130.300		1.333.063.453	72,73	95,22		
			Tertatanya Administrasi pengelolaan Kas Daerah, Dana dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Administrasi Keuangan SKPD lebih cepat, SP2D Belanja tidak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			264.992.410		61.029.000		87.245.152		50.715.000		53.494.000		252.483.152	100	95,28		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			73.914.250		-		34.001.950		10.645.000		29.072.536		73.719.486	100	99,74		
			Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			253.049.510		94.408.575		40.419.000		36.203.000		77.965.000		248.995.575	100	98,4		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			341.175.660		-		-		215.552.110		98.926.764		314.478.874	100	92,18		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			46.025.310		12.000.000		-		33.787.512		-		45.787.512	100	99,48		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai			139.845.630		30.636.488		11.980.500		81.104.601		11.483.000		135.204.589	100	96,68		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi			240.224.420		84.397.605		40.950.000		54.440.300		43.189.000		222.976.905	100	92,82		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			40.772.810		-		-		39.417.360		-		39.417.360	100	96,68		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	1		0		0		1		0		1		100			
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			0		0		0		98		98		0			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			821.976.300		203.275.850		183.694.172		33.149.020		219.866.350		639.985.392	21,79	77,86		
			Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	12		3		3		0		4		10		83,33			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	55		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan			208.907.250		43.779.900		46.138.000		-		106.979.350		196.897.250	100	94,25		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			457.206.950		159.495.950		87.200.000		954.000		81.587.000		329.236.950	83,33	72,01		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	12		3		3		0		4		10		83,33			
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan			131.937.100		-		50.356.172		32.195.020		31.300.000		113.851.192	100	86,29		
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			23.925.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	55		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			339.909.493.101		817.109.224		-		1.289.223.550		115.297.717.224		117.404.049.998	43,75	34,54		
			Tersusunnya Analisis Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			3.000.000.000		-		-		-		2.897.892.381		2.897.892.381	100	96,6		
			Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			315.049.319.846		172.835.530		-		-		105.946.427.143		106.119.262.673	100	33,68		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			8.076.081.700		644.273.694		-		1.289.223.550		862.895.456		2.796.392.700	50	34,63		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	2		0		0		0		1		1		50			
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			13.784.091.555		-		-		-		5.590.502.244		5.590.502.244	100	40,56		
			Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**2.494.820.685**		**296.815.200**		**521.559.453**		**356.053.800**		**501.785.861**		1.676.214.314	**61,03**	**67,19**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)													0			
				Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku (%)	75		0		0		0		80		80		106,67			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.494.820.685		296.815.200		521.559.453		356.053.800		501.785.861		1.676.214.314	61,03	67,19		
			Jumlah aset tetap (gedung) yang dimanfaatkan sebagai pemasukan sumber pendapatan asli daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	4		1		1		0		2		4		100			
				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12		3		3		3		2		11		91,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	12		3		3		2		2		10		83,33			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	12		3		3		1		3		10		83,33			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	12		3		3		1		5		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	12		0		3		0		3		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	12		3		3		0		0		6		50			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	12		2		3		2		2		9		75			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		30		30		60			
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			156.876.500		37.853.900		74.860.065		1.100.000		3.482.050		117.296.015	100	74,77		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	4		1		1		0		2		4		100			
		5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			163.847.400		34.445.400		28.888.750		47.361.600		45.069.850		155.765.600	91,67	95,07		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12		3		3		3		2		11		91,67			
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			270.567.880		35.730.000		53.718.538		44.647.900		53.329.750		187.426.188	83,33	69,27		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	12		3		3		2		2		10		83,33			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			608.210.285		79.200.000		76.149.300		31.505.000		260.668.211		447.522.511	83,33	73,58		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	12		3		3		1		3		10		83,33			
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			156.277.800		2.320.000		16.835.650		12.435.550		785.400		32.376.600	100	20,72		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	12		3		3		1		5		12		100			
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			189.823.750		-		20.115.350		-		73.070.000		93.185.350	50	49,09		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12		0		3		0		3		6		50			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan			38.117.500		2.010.800		-		-		6.081.200		8.092.000	100	21,23		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			269.422.070		67.696.300		68.899.000		2.570.800		4.385.700		143.551.800	50	53,28		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	12		3		3		0		0		6		50			
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			262.131.900		32.508.000		10.012.800		115.576.950		46.447.500		204.545.250	75	78,03		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	12		2		3		2		2		9		75			
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			379.545.600		5.050.800		172.080.000		100.856.000		8.466.200		286.453.000	60	75,47		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		30		30		60			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.995.433.343**		**2.634.374.285**		**2.932.511.570**		**2.906.881.361**		**4.284.653.808**		12.758.421.024	**93,57**	**85,08**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Bapenda	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		18,86		23,08		19,65		44,14		105,73		132,16			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.330.130		4.925.755		5.108.124		9.295.779		12.067.352		31.397.010	100	63,65		
			tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5		3		0		2		0		5		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.804.630		-		5.108.124		2.753.089		4.943.417		12.804.630	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			11.771.500		-		-		2.681.305		7.123.935		9.805.240	100	83,3		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.754.000		4.925.755		-		3.861.385		-		8.787.140	100	59,56		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		3		0		2		0		5		100			
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.430.072.632		2.365.066.455		2.690.485.230		2.524.004.352		3.171.828.620		10.751.384.657	100	86,49		
			tersedianya dokumen adminisitrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		67		67		67		67		67		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2		0		1		0		1		2		100			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.810.293.852		2.304.571.950		2.520.045.865		2.381.261.522		2.942.856.280		10.148.735.617	100	85,93		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67		67		67		67		67		67		100			
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			592.793.360		55.566.950		165.534.310		137.412.600		218.809.500		577.323.360	100	97,39		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			26.985.420		4.927.555		4.905.055		5.330.230		10.162.840		25.325.680	100	93,85		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.974.000		4.983.965		4.983.965		5.405.065		10.221.285		25.594.280	100	98,54		
			tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.974.000		4.983.965		4.983.965		5.405.065		10.221.285		25.594.280	100	98,54		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			740.236.635		65.552.816		48.213.724		76.001.344		396.162.864		585.930.748	88	79,15		
			tersedianyan paket administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	8		2		2		2		2		8		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		2		2		2		2		8		40			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		6		5		2		2		15		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		7		6		5		2		20		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.992.000		7.474.170		4.983.330		10.509.000		2.025.500		24.992.000	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	8		2		2		2		2		8		100			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			50.000.070		4.143.174		4.143.174		15.677.188		26.036.534		50.000.070	40	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		2		2		2		2		8		40			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			54.720.000		7.680.000		15.360.000		11.520.000		18.840.000		53.400.000	100	97,59		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		6		5		2		2		15		100			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			493.064.565		42.723.610		21.447.220		32.396.900		343.742.830		440.310.560	100	89,3		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		7		6		5		2		20		100			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			117.460.000		3.531.862		2.280.000		5.898.256		5.518.000		17.228.118	100	14,67		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			551.128.400		-		-		-		247.516.252		247.516.252	100	44,91		
			tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		2		2		200			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		0		0		0		10		10		0			
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1										0		0			
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			348.888.400		-		-		-		47.300.002		47.300.002	200	13,56		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		2		2		200			
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			102.240.000		-		-		-		100.871.250		100.871.250	0	98,66		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		0		0		0		10		10		0			
		5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			100.000.000		-		-		-		99.345.000		99.345.000	100	99,35		
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1										0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			871.351.546		158.105.294		155.520.527		189.161.564		311.422.435		814.209.820	100	93,44		
			tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			87.102.400		11.816.470		5.907.135		17.276.395		52.102.400		87.102.400	100	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			240.108.146		71.186.294		53.118.487		51.616.104		53.064.535		228.985.420	100	95,37		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		1		1		1		1		4		100			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			544.141.000		75.102.530		96.494.905		120.269.065		206.255.500		498.122.000	100	91,54		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			327.340.000		35.740.000		28.200.000		103.013.257		135.435.000		302.388.257	62,5	92,38		
			tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		3		3		3		3		3		25			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		5		10		5		25		100			
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			302.340.000		33.240.000		25.700.000		96.013.257		131.935.000		286.888.257	25	94,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		3		3		3		3		3		25			
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		2.500.000		2.500.000		7.000.000		3.500.000		15.500.000	100	62		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		5		10		5		25		100			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**1.788.554.940**		**86.990.636**		**183.960.188**		**285.891.278**		**1.002.454.976**		1.559.297.078	**93,18**	**87,18**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			10,07		7,77		8,2		9,6		35,64		0			
				Rasio PAD (Rasio)	5,33		10,07		7,77		8,2		9,6		8,91		167,17			
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD* (Deviasi)	44,94		21		15,55		57,94		15,94		27,608		61,43			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.055.696.970		33.154.931		70.559.541		145.847.558		722.443.966		972.005.996	89,77	92,07		
			Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11		2		0		5		0		7		63,64			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11		0		3		5		3		11		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12		3		0		6		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	23		0		8		8		7		23		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12		3		0		3		3		9		75			
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			612.504.370		19.994.841		31.005.016		40.105.095		509.534.818		600.639.770	100	98,06		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			53.014.025		3.164.000		-		8.212.875		-		11.376.875	63,64	21,46		
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	11		2		0		5		0		7		63,64			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			86.625.225		-		23.719.750		39.533.413		17.941.438		81.194.601	100	93,73		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11		0		3		5		3		11		100			
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			62.033.100		3.464.190		-		7.781.200		50.712.710		61.958.100	100	99,88		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12		3		0		6		3		12		100			
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			122.330.450		-		15.834.775		30.077.075		75.195.000		121.106.850	100	99		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	23		0		8		8		7		23		100			
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			119.189.800		6.531.900		-		20.137.900		69.060.000		95.729.800	75	80,32		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12		3		0		3		3		9		75			
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)			15,79		36,84		52,63		89,47		194,73		0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			472.052.965		37.016.490		82.725.215		76.753.010		165.049.500		361.544.215	94,55	76,59		
			Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	2				1		1				2		100			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11		0		3		0		5		8		72,73			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	11		1		3		3		4		11		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11		3		4		4		0		11		100			
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			69.231.945		22.048.430		26.173.155		16.978.360		-		65.199.945	100	94,18		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	2				1		1				2		100			
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			88.007.140		-		17.933.890		-		70.069.250		88.003.140	72,73	100		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11		0		3		0		5		8		72,73			
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			120.096.410		3.503.760		5.206.700		22.365.950		52.210.000		83.286.410	100	69,35		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	11		1		3		3		4		11		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			141.631.500		9.964.300		9.052.500		30.811.700		42.770.250		92.598.750	100	65,38		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	12		3		3		3		3		12		100			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			53.085.970		1.500.000		24.358.970		6.597.000		-		32.455.970	100	61,14		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11		3		4		4		0		11		100			
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)			57,89		57,89		57,89		57,89		57,89		0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			260.805.005		16.819.215		30.675.432		63.290.710		114.961.510		225.746.867	100	86,56		
			Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	11		3		3		3		2		11		100			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	11		3		3		3		2		11		100			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			155.923.800		13.371.770		19.955.430		60.762.710		61.775.750		155.865.660	100	99,96		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	11		3		3		3		2		11		100			
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			104.881.205		3.447.445		10.720.002		2.528.000		53.185.760		69.881.207	100	66,63		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	11		3		3		3		2		11		100			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**9.267.183.638**		**1.722.340.898**		**2.403.294.337**		**1.652.144.340**		**1.988.394.584**		7.766.174.159	**82,67**	**83,8**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.760.232.201**		**1.704.403.450**		**1.878.542.496**		**1.531.217.731**		**1.479.510.560**		6.593.674.237	**81,67**	**84,97**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		0		0		0		91		91		113,75			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		75		75		0			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.599.035		3.080.200		2.187.800		3.872.700		1.053.300		10.194.000	100	96,18		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5		2		2		0		1		5		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.208.325		1.475.200		520.850		-		184.300		2.180.350	100	98,73		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
		5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.441.875		786.000		450		1.192.000		-		1.978.450	100	81,02		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.696.875		-		-		2.680.700		700.000		3.380.700	100	125,36		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.670.860		819.000		1.666.500		-		169.000		2.654.500	100	99,39		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		2		2		0		1		5		100			
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			581.100		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		1		1		4		100			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.217.623.236		1.611.514.430		1.796.806.366		1.394.834.263		1.323.400.146		6.126.555.205	100	84,88		
			Tersedianya Dokumen Administrrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		70		70		70		70		70		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		1		1		1		1		4		100			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.979.863.056		1.558.279.130		1.740.191.816		1.340.763.263		1.267.995.146		5.907.229.355	100	84,63		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		70		70		70		70		70		100			
		5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.760.000		50.610.000		53.752.500		52.752.500		55.405.000		212.520.000	100	92,1		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.000.180		2.625.300		2.862.050		1.318.500		-		6.805.850	100	97,22		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.808.091		27.931.612		7.005.500		43.716.770		41.719.560		120.373.442	100	92,73		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		0		0		3		5		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		2		0		2		0		4		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		2		2		0		6		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6		1		1		2		2		6		100			
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.642.750		1.368.500		-		-		1.249.500		2.618.000	100	99,06		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		2		0		0		3		5		100			
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.335.290		2.034.500		-		2.275.500		-		4.310.000	100	99,42		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		2		0		2		0		4		100			
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.286.000		1.992.000		2.274.000		1.020.000		-		5.286.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		2		2		0		6		100			
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.838.051		4.109.500		3.398.500		3.093.000		112.000		10.713.000	100	98,85		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		4		100			
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106.706.000		18.427.112		1.333.000		37.328.270		40.358.060		97.446.442	100	91,32		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		1		1		2		2		6		100			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53.108.459		-		-		-		45.772.498		45.772.498	66,67	86,19		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0		5		5		100			
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			33.528.459		-		-		-		28.012.498		28.012.498	100	83,55		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.580.000		-		-		-		17.760.000		17.760.000	100	90,7		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0		5		5		100			
		5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			267.301.380		34.727.208		60.518.130		54.547.404		63.770.056		213.562.798	66,67	79,9		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			135.301.380		18.727.208		36.682.380		30.784.404		32.412.556		118.606.548	100	87,66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			132.000.000		16.000.000		23.835.750		23.763.000		31.357.500		94.956.250	100	71,94		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.792.000		27.150.000		12.024.700		34.246.594		3.795.000		77.216.294	40	94,41		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		0		2		3		5		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		2		2		2		6		60			
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			72.340.000		27.150.000		11.076.100		32.266.594		1.845.000		72.337.694	100	100		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		0		2		3		5		100			
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.000.000		-		948.600		1.980.000		1.950.000		4.878.600	60	60,98		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		2		2		2		6		60			
		5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.452.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**1.506.951.437**		**17.937.448**		**524.751.841**		**120.926.609**		**508.884.024**		1.172.499.922	**83,77**	**77,81**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sesuai	61,00		0		0		0		0		0		0			
				Persentase ASN yang Mempunyai Nilai SKP	100,00		0		0		0		96,73		96,73		96,73			
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan	71,00		0		0		0		55		55		77,46			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase ASN yang terkena sanksi hukuman disiplin	0		0		0		0		0,08		0,08		0			
				Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (rasio)	6,00		0		0		0		13,55		13,55		225,83			
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (persen)	74,00		0		0		0		25,1		25,1		33,92			
				Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	82,00		0		0		0		0		0		0			
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya			0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.029.210.254		3.036.500		351.294.274		26.768.868		414.186.302		795.285.944	110	77,27		
			Terlaksananya ASN yang dimutasi dan yang mendapat promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	2000		100		100		200		200		600		30			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1		0		0		1		1		2		200			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			25.110.114		1.515.500		-		2.218.500		14.613.500		18.347.500	100	73,07		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			26.371.515		1.521.000		-		4.682.500		5.252.000		11.455.500	30	43,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	2000		100		100		200		200		600		30			
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			977.728.625		-		351.294.274		19.867.868		394.320.802		765.482.944	200	78,29		
			Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1		0		0		1		1		2		200			
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			6.009.115		1.709.048		60		54		3.724.036		5.433.198	42,17	90,42		
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1000		310		310		0		310		930		93			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	200				0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	2000		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50		10		10		0		10		30		60			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			2.359.275		740.000		-		-		1.067.500		1.807.500	93	76,61		
			Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1000		310		310		0		310		930		93			
		5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			-		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			-		48		60		54		36		198	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	200				0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Jabatan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	2000		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			2.759.500		600.000		-		-		2.137.500		2.737.500	60	99,2		
			Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50		10		10		0		10		30		60			
		5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			890.340		369.000		-		-		519.000		888.000	100	99,74		
			Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			106.997.180		7.769.500		6.925.000		17.700.470		47.680.110		80.075.080	95	74,84		
			Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	150		0		0		100		150		250		166,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15		1		1		2		10		14		93,33			
				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			26.387.295		2.737.000		-		4.056.000		14.622.000		21.415.000	100	81,16		
			Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			4.892.580		-		2.162.000		1.533.000		824.000		4.519.000	100	92,36		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			6.022.070		-		2.261.000		1.506.000		1.855.000		5.622.000	100	93,36		
			Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			15.095.480		-		-		9.479.470		5.367.560		14.847.030	166,67	98,35		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	150		0		0		100		150		250		166,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			19.561.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			29.110.555		2.974.500		450.000		1.126.000		23.217.550		27.768.050	93,33	95,39		
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15		1		1		2		10		14		93,33			
		5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			3.398.520		2.058.000		-		-		1.335.000		3.393.000	100	99,84		
			Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN			2.529.680		-		2.052.000		-		459.000		2.511.000	100	99,26		
			Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			364.734.888		5.422.400		166.532.507		76.457.217		43.293.576		291.705.700	100	79,98		
			Tersedianya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1.262.660		626.400		-		-		-		626.400	100	49,61		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			350.999.035		4.796.000		166.532.507		70.391.717		38.235.076		279.955.300	100	79,76		
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN			6.455.200		-		-		6.065.500		-		6.065.500	100	93,96		
			Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			4.433.063		-		-		-		4.015.000		4.015.000	100	90,57		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1.584.930		-		-		-		1.043.500		1.043.500	100	65,84		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**481.961.337**		**9.266.000**		**13.726.373**		**5.201.500**		**191.725.143**		219.919.016	**100**	**45,63**		
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**481.961.337**		**9.266.000**		**13.726.373**		**5.201.500**		**191.725.143**		219.919.016	**100**	**45,63**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (persen)	16,76		0		0		0		17,98		17,98		107,28			
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara Formal (persen)	1,03		0		0		0		0,78		0,78		75,73			
				Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
				Rata rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	20		0		0		0		16		16		80			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			-		457.000		330.000		-		-		787.000	0	0		
			Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	0		0		1		0		0		1		0			
		5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta			-		457.000		330.000		-		-		787.000	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan	0		0		1		0		0		1		0			
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)			0		0		0		0		0		0			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			50.425.630		4.084.500		7.904.973		1.730.000		15.212.024		28.931.497	100	57,37		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan	1		0		1		0		0		1		100			
		5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan			15.679.280		991.500		1.440.200		-		-		2.431.700	100	15,51		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100				
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	1		0		0		0		1		1		100				
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			34.746.350		3.093.000		6.464.773		1.730.000		15.212.024		26.499.797	100	76,27		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	1		0		0		0		1		1		100				
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)			0		0		0		0		0		0				
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			420.559.582		4.267.500		5.161.400		3.471.500		176.513.119		189.413.519	100	45,04		
			Tersertifikasinya ASN di Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100		25		25		25		25		100		100			
		5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			408.509.432		1.579.000		3.569.400		2.390.500		174.361.119		181.900.019	100	44,53		
			Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	100		25		25		25		25		100		100			
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100				
		5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			12.050.150		2.688.500		1.592.000		1.081.000		2.152.000		7.513.500	100	62,35		
			Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100				
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis			0		0		0		0		0		0				
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			10.976.125		457.000		330.000		-		-		787.000	100	7,17		
			Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	1		0		1		0		0		1		100				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang			10.976.125		457.000		330.000		-		-		787.000	100	7,17		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang	1		0		1		0		0		1		100				
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**207.367.569**		**11.069.919**		**31.774.987**		**60.534.375**		**46.499.153**		149.878.434	**100**	**72,28**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**207.367.569**		**11.069.919**		**31.774.987**		**60.534.375**		**46.499.153**		149.878.434	**100**	**72,28**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan # (persen)	100,00		0		0		0		100		100		100			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			144.396.324		10.060.904		26.969.807		33.083.195		39.034.558		109.148.464	100	75,59		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1		0		0		0		1		1		100				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1		0		0		0		1		1		100				
		5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			65.696.424		879.252		4.632.017		29.048.205		16.745.500		51.304.974	100	78,09		
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1		0		0		0		1		1		100				
		5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			78.699.900		9.181.652		22.337.790		4.034.990		22.289.058		57.843.490	100	73,5		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1		0		0		0		1		1		100				
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			62.971.245		1.009.015		4.805.180		27.451.180		7.464.595		40.729.970	100	64,68		
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100				
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			62.971.245		1.009.015		4.805.180		27.451.180		7.464.595		40.729.970	100	64,68		
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100				
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**20.917.200.739**		**3.964.291.074**		**3.923.794.843**		**4.658.291.834**		**3.670.547.119**		16.216.924.870	**111,43**	**77,53**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.686.867.069**		**3.629.537.514**		**3.635.275.784**		**3.856.621.011**		**2.823.667.484**		13.945.101.793	**104,9**	**83,57**	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	85		0		0		0		85		85		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.1		67.1		0			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111.232.510		-		-		-		34.766.400		34.766.400	136,9	31,26		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		2		0		4		133,33			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		2		0		2		200			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		2		0		2		200			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6		2		1		3		0		6		100			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		3		0		5		125			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.730.601		-		-		-		15.088.150		15.088.150	133,33	61,01		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		2		0		4		133,33			
		6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			14.723.750		-		-		-		2.220.000		2.220.000	200	15,08		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		2		0		2		200			
		6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.935.000		-		-		-		6.935.000		6.935.000	200	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		2		0		2		200			
		6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			14.642.709		-		-		-		1.630.000		1.630.000	100	11,13		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			12.347.650		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.045.000		-		-		-		6.842.750		6.842.750	100	23,56		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		2		1		3		0		6		100			
		6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.807.800		-		-		-		2.050.500		2.050.500	125	23,28		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		3		0		5		125			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.957.511.259		3.557.679.851		3.570.611.417		3.264.891.113		2.275.515.387		12.668.697.768	97,08	90,77		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		84		84		86		85		84,75		94,17			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		3		4		3		12		100			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.703.691.259		3.557.679.851		3.531.051.417		3.126.431.113		2.204.715.387		12.419.877.768	94,17	90,63		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90		84		84		86		85		84,75		94,17			
		6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			253.820.000		-		39.560.000		138.460.000		70.800.000		248.820.000	100	98,03		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		3		4		3		12		100			
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.279.950		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2.279.950		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			896.909.495		-		-		241.581.588		99.077.600		340.659.188	125	37,98		
			Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	20		0		0		15		15		30		150			
		6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1.676.495		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			895.233.000		-		-		241.581.588		99.077.600		340.659.188	150	38,05		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		15		15		30		150			
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			355.957.455		-		2.222.000		96.559.360		81.387.561		180.168.921	100	50,62		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		2		2		4		4		12		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.405.750		-		2.222.000		-		-		2.222.000	100	12,07		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			28.560.245		-		-		10.000.000		-		10.000.000	100	35,01		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			127.299.960		-		-		66.070.360		-		66.070.360	100	51,9		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.654.500		-		-		-		16.820.000		16.820.000	100	63,1		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			153.537.000		-		-		20.489.000		64.567.561		85.056.561	100	55,4		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		2		4		4		12		100			
		6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.500.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		0		0		0		1		1		100			
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			426.514.000		-		-		-		99.944.650		99.944.650	90	23,43		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		0		0		0		9		9		90			
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			426.514.000		-		-		-		99.944.650		99.944.650	90	23,43		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		0		0		0		9		9		90			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.496.000		71.857.663		29.942.367		122.996.568		138.019.886		362.816.484	100	65,55		
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		3		4		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		3		4		3		12		100			
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			281.496.000		13.147.663		11.873.617		25.101.568		68.719.886		118.842.734	100	42,22		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		3		4		3		12		100			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			272.000.000		58.710.000		18.068.750		97.895.000		69.300.000		243.973.750	100	89,7		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		3		4		3		12		100			
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			382.966.400		-		32.500.000		130.592.382		94.956.000		258.048.382	57,5	67,38		
			tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		1		1		3		2		7		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		2		0		8		2		12		30			
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			294.230.000		-		32.500.000		80.962.382		92.276.000		205.738.382	100	69,92		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		1		1		3		2		7		100			
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.300.000		-		-		14.780.000		2.680.000		17.460.000	30	86,01		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		2		0		8		2		12		30			
		6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			38.380.000		-		-		34.850.000		-		34.850.000	100	90,8		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.056.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan. Terwujudnya Birokrasi	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**3.253.575.910**		**334.753.560**		**288.519.059**		**780.545.793**		**532.758.616**		1.936.577.028	**142,38**	**59,52**	INSPEKTORAT	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Prioritas Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	95,00		0		0		0		95		95		100			
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1			0		0		0		85		85		0			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.386.449.580		307.350.000		152.989.059		571.440.728		381.439.000		1.413.218.787	147,35	59,22		
			Terwujudnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	16		1		1		7		7		16		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	9		2		2		2		3		9		100			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	8		1		1		3		3		8		100			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		0		1		0		2		200			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	70		0		30		80		122		232		331,43			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	3		0		0		1		2		3		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			112.250.480		-		-		-		4.833.000		4.833.000	100	4,31		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	16		1		1		7		7		16		100			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			117.905.800		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	9		2		2		2		3		9		100			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			65.910.600		-		-		-		-		-	100	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	8		1		1		3		3		8		100			
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			44.737.300		-		-		-		-		-	200	0		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		0		1		0		2		200			
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			1.163.191.500		204.600.000		83.850.000		338.250.000		263.850.000		890.550.000	331,43	76,56		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	70		0		30		80		122		232		331,43			
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			99.204.900		-		-		-		11.250.000		11.250.000	100	11,34		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	3		0		0		1		2		3		100			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			783.249.000		102.750.000		69.139.059		233.190.728		101.506.000		506.585.787	100	64,68		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			867.126.330		27.403.560		135.530.000		209.105.065		151.319.616		523.358.241	125	60,36		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2		1		0		1		1		3		150			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	14		2		2		7		3		14		100			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			426.805.330		15.988.300		38.160.700		81.548.020		14.418.720		150.115.740	150	35,17		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2		1		0		1		1		3		150			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			440.321.000		11.415.260		97.369.300		127.557.045		136.900.896		373.242.501	100	84,77		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	14		2		2		7		3		14		100			
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**976.757.760**		**-**		**-**		**21.125.030**		**314.121.019**		335.246.049	**92,2**	**34,32**	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)			0		0		0		3		3		0			
				Persentase Pemenuhan Perumusan Kebijakan	100,00		0		0		0		87,5		87,5		87,5			
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)			0		0		0		2,8		2,8		0			
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			85.147.060		-		-		-		15.753.410		15.753.410	87,5	18,5		
			Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		2		0		0		1		3		75			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		0		0		2		0		2		100			
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			37.440.650		-		-		-		-		-	75	0		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		2		0		0		1		3		75			
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			47.706.410		-		-		-		15.753.410		15.753.410	100	33,02		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		0		0		2		0		2		100			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			891.610.700		-		-		21.125.030		298.367.609		319.492.639	94,55	35,83		
			Tercapainya Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	55		33		10		15		0		58		105,45			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55		0		10		15		15		40		72,73			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat	55		0		20		32		3		55		100			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			178.014.000		-		-		-		-		-	105,45	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	55		33		10		15		0		58		105,45			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			63.144.000		-		-		-		11.573.750		11.573.750	72,73	18,33		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55		0		10		15		15		40		72,73			
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			472.453.800		-		-		21.125.030		224.021.359		245.146.389	100	51,89		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4		1		1		1		1		4		100			
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			177.998.900		-		-		-		62.772.500		62.772.500	100	35,27		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat	55		0		20		32		3		55		100			
		7.01	**KECAMATAN**			**73.475.562.229**		**11.093.858.840**		**15.207.677.934**		**12.150.617.167**		**15.281.602.229**		53.733.756.171	**78,65**	**73,13**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.652.853.079**		**1.292.386.286**		**4.068.765.395**		**2.323.598.108**		**2.310.419.450**		9.995.169.239	**195,86**	**93,83**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67,45		67,45		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		67,45		67,45		89,93			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.877.882		22.490.000		11.245.000		7.210.000		7.021.500		47.966.500	100	166,1		
			Terlaksana nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28.877.882		22.490.000		11.245.000		7.210.000		7.021.500		47.966.500	100	166,1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		1		0		3		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.943.458.697		1.242.046.236		3.856.649.195		2.180.191.018		2.067.435.760		9.346.322.209	141,82	93,99		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksana nya Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		101		101		101		101		101		183,64			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		1		1		1		0		3		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.850.938.697		1.195.786.236		3.848.939.195		2.149.351.018		2.044.305.760		9.238.382.209	183,64	93,78		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55		101		101		101		101		101		183,64			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			92.520.000		46.260.000		7.710.000		30.840.000		23.130.000		107.940.000	100	116,67		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		1		1		1		0		3		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.052.100		14.450.000		3.475.000		11.250.000		75.196.490		104.371.490	58,33	82,15		
			Terlaksana nya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		1		0		1		25			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2		1		1		0		0		2		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56.500.000		-		-		-		54.344.490		54.344.490	25	96,18		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		1		0		1		25			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.198.600		-		-		-		4.602.000		4.602.000	50	41,09		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			59.353.500		14.450.000		3.475.000		11.250.000		16.250.000		45.425.000	100	76,53		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		1		0		0		2		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			507.344.400		1.600.050		191.496.200		117.497.090		145.765.700		456.359.040	650	89,95		
			Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		3		3		3		12		1200			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.390.400		600.000		300.000		4.455.540		-		5.355.540	100	37,22		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			492.954.000		1.000.050		191.196.200		113.041.550		145.765.700		451.003.500	1200	91,49		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		3		3		3		3		12		1200			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.120.000		11.800.000		5.900.000		7.450.000		15.000.000		40.150.000	50	87,06		
			Terlaksana nya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		1		0		1		0		2		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			40.720.000		11.800.000		5.900.000		7.450.000		15.000.000		40.150.000	100	98,6		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		1		0		1		0		2		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**7.794.000**		**-**		**-**		**2.000.000**		**-**		2.000.000	**40**	**25,66**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,43		3,43		98			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.794.000		-		-		2.000.000		-		2.000.000	40	25,66		
			Terlaksana nya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		0		2		0		2		40			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.794.000		-		-		2.000.000		-		2.000.000	40	25,66		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		0		0		2		0		2		40			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**64.703.450**		**15.000.000**		**10.000.000**		**21.250.000**		**6.496.500**		52.746.500	**100**	**81,52**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		90		90		90			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			32.440.200		-		-		16.250.000		303.050		16.553.050	100	51,03		
			Terlaksana nya pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			32.440.200		-		-		16.250.000		303.050		16.553.050	100	51,03		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			23.983.250		15.000.000		7.500.000		5.000.000		6.193.450		33.693.450	100	140,49		
			Terlaksana nya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan (Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			12.433.250		15.000.000		7.500.000		-		943.450		23.443.450	100	188,55		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			11.550.000		-		-		5.000.000		5.250.000		10.250.000	100	88,74		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			8.280.000		-		2.500.000		-		-		2.500.000	100	30,19		
			Terlaksa nya Perberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0		5		5		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			8.280.000		-		2.500.000		-		-		2.500.000	100	30,19		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0		5		5		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**23.100.000**		**-**		**5.000.000**		**10.000.000**		**2.500.000**		17.500.000	**100**	**75,76**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		100		100		102,04			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			23.100.000		-		5.000.000		10.000.000		2.500.000		17.500.000	100	75,76		
			Terlaksana nya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			23.100.000		-		5.000.000		10.000.000		2.500.000		17.500.000	100	75,76		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**5.650.000**		**-**		**5.000.000**		**-**		**-**		5.000.000	**100**	**88,5**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		95		95		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.650.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	100	88,5		
			Terlaksana nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	5		1		2		2		0		5		100			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan			5.650.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	100	88,5		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	5		1		2		2		0		5		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8.850.000**		**-**		**3.330.000**		**-**		**-**		3.330.000	**70**	**37,63**	KECAMATAN KOTABUMI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		92		92		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		92		92		92			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.850.000		-		3.330.000		-		-		3.330.000	70	37,63		
			Terlaksana nya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5		0		2		1		1		4		80			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		0		2		1		0		3		60			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.200.000		-		2.500.000		-		-		2.500.000	80	59,52		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5		0		2		1		1		4		80			
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.650.000		-		830.000		-		-		830.000	60	17,85		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		0		2		1		0		3		60			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**492.772.000**		**77.250.000**		**86.597.850**		**84.874.400**		**156.220.177**		404.942.427	**100**	**82,18**	KELURAHAN REJOSARI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			492.772.000		77.250.000		86.597.850		84.874.400		156.220.177		404.942.427	100	82,18		
			Terlaksana nya kelurahan yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			492.772.000		77.250.000		86.597.850		84.874.400		156.220.177		404.942.427	100	82,18		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**405.364.000**		**36.833.460**		**89.796.270**		**65.588.400**		**120.817.260**		313.035.390	**100**	**77,22**	KELURAHAN CEMPEDAK	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			405.364.000		36.833.460		89.796.270		65.588.400		120.817.260		313.035.390	100	77,22		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		1		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			405.364.000		36.833.460		89.796.270		65.588.400		120.817.260		313.035.390	100	77,22		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		1		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**562.444.000**		**94.821.017**		**96.088.429**		**107.856.396**		**182.594.281**		481.360.123	**100**	**85,58**	KELURAHAN KOTABUMI UDIK	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			562.444.000		94.821.017		96.088.429		107.856.396		182.594.281		481.360.123	100	85,58		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			562.444.000		94.821.017		96.088.429		107.856.396		182.594.281		481.360.123	100	85,58		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**432.100.000**		**66.126.120**		**75.039.880**		**81.008.960**		**138.382.350**		360.557.310	**100**	**83,44**	KELURAHAN KOTABUMI TENGAH	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			432.100.000		66.126.120		75.039.880		81.008.960		138.382.350		360.557.310	100	83,44		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1				1				1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			432.100.000		66.126.120		75.039.880		81.008.960		138.382.350		360.557.310	100	83,44		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1				1				1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**304.504.000**		**36.911.920**		**51.619.815**		**47.450.825**		**88.807.395**		224.789.955	**100**	**73,82**	KELURAHAN KOTABUMI PASAR	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			304.504.000		36.911.920		51.619.815		47.450.825		88.807.395		224.789.955	100	73,82		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			304.504.000		36.911.920		51.619.815		47.450.825		88.807.395		224.789.955	100	73,82		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**455.920.000**		**73.893.377**		**79.306.071**		**86.250.585**		**143.541.837**		382.991.870	**100**	**84**	KELURAHAN KOTABUMI ILIR	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			455.920.000		73.893.377		79.306.071		86.250.585		143.541.837		382.991.870	100	84		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			455.920.000		73.893.377		79.306.071		86.250.585		143.541.837		382.991.870	100	84		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**488.068.000**		**81.286.800**		**89.023.560**		**63.683.240**		**193.777.890**		427.771.490	**100**	**87,65**	KELURAHAN SINDANG SARI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			488.068.000		81.286.800		89.023.560		63.683.240		193.777.890		427.771.490	100	87,65		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			488.068.000		81.286.800		89.023.560		63.683.240		193.777.890		427.771.490	100	87,65		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**540.328.000**		**89.100.000**		**96.894.248**		**109.012.128**		**175.839.108**		470.845.484	**100**	**87,14**	KELURAHAN SRIBASUKI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			540.328.000		89.100.000		96.894.248		109.012.128		175.839.108		470.845.484	100	87,14		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			540.328.000		89.100.000		96.894.248		109.012.128		175.839.108		470.845.484	100	87,14		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**358.060.000**		**47.529.488**		**59.840.489**		**58.822.788**		**106.744.760**		272.937.525	**100**	**76,23**	KELURAHAN GAPURA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95		95		95			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			358.060.000		47.529.488		59.840.489		58.822.788		106.744.760		272.937.525	100	76,23		
			Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			358.060.000		47.529.488		59.840.489		58.822.788		106.744.760		272.937.525	100	76,23		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.268.177.485**		**181.240.808**		**45.916.980**		**26.050.000**		**53.774.418**		306.982.206	**39,06**	**13,53**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.090.250		5.049.570		7.245.550		5.250.000		5.326.000		22.871.120	100	94,94		
			tersusunya dokumen perencanann dan evalausi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	2		0		1		0		1		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	2		0		1		1		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.042.550		1.373.530		1.000.000		1.750.000		756.000		4.879.530	100	96,77		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.577.550		1.513.020		1.181.510		500.000		1.220.000		4.414.530	100	96,44		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.315.050		750.000		1.838.020		-		1.450.000		4.038.020	100	93,58		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		0		1		2		100			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.577.550		1.163.020		1.753.000		1.500.000		900.000		5.316.020	100	95,31		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.577.550		250.000		1.473.020		1.500.000		1.000.000		4.223.020	100	92,26		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		1		1		0		2		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.986.997.875		141.927.738		-		-		-		141.927.738	0	7,14		
			Tersusunnya kinerja Laporan administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22		0		0		22		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		1		1		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.926.997.875		131.927.738		-		-		-		131.927.738	0	6,85		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22		0		0		22		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.000.000		10.000.000		-		-		-		10.000.000	0	16,67		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		1		1		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			102.237.360		12.084.900		22.987.595		7.900.000		31.601.400		74.573.895	16,67	72,94		
			Tercapainya pelaksaanna administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15		2		2		1		3		3		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		1		1		1		8		8		26,67			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		3		2		2		2		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		2		3		3		2		2		16,67			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.760		517.000		1.275.670		-		5.170.000		6.962.670	20	69,62		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15		2		2		1		3		3		20			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.564.600		516.000		1.144.100		600.000		1.020.000		3.280.100	26,67	92,02		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		1		1		1		8		8		26,67			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.940.000		1.883.000		2.405.000		1.250.000		1.360.000		6.898.000	20	99,39		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		3		2		2		2		20			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.232.000		4.168.900		8.162.825		2.550.000		9.151.400		24.033.125	0	61,26		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		1		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			42.500.000		5.000.000		10.000.000		3.500.000		14.900.000		33.400.000	16,67	78,59		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		3		3		2		2		16,67			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.620.000		16.924.100		1.971.419		-		2.997.018		21.892.537	20,83	22,66		
			Terpenihinya jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		1		4		3		3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		5		4		2		2		16,67			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.220.000		2.024.100		1.971.419		-		2.997.018		6.992.537	25	96,85		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		1		4		3		3		3		25			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			89.400.000		14.900.000		-		-		-		14.900.000	16,67	16,67		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		5		4		2		2		16,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.232.000		5.254.500		13.712.416		12.900.000		13.850.000		45.716.916	0	78,51		
			Terpeliharanya barang Milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		1		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			40.720.000		5.254.500		8.700.416		12.900.000		13.850.000		40.704.916	0	99,96		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			17.512.000		-		5.012.000		-		-		5.012.000	0	28,62		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		1		0		0		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**67.820.000**		**3.080.000**		**9.450.000**		**18.750.000**		**13.000.000**		44.280.000	**0**	**65,29**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,31		3,31		94,57			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			67.820.000		3.080.000		9.450.000		18.750.000		13.000.000		44.280.000	0	65,29		
			Nilai Kepuasan Layanan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		2		1		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			67.820.000		3.080.000		9.450.000		18.750.000		13.000.000		44.280.000	0	65,29		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		2		1		0		0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**122.920.000**		**2.350.000**		**11.450.000**		**21.000.000**		**18.500.000**		53.300.000	**75**	**43,36**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		66,67		66,67		66,67			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			76.920.000		1.100.000		3.300.000		10.500.000		6.000.000		20.900.000	25	27,17		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaaan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		1		1		1		1		1		25			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			76.920.000		1.100.000		3.300.000		10.500.000		6.000.000		20.900.000	25	27,17		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		1		1		1		1		1		25			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			30.000.000		-		6.750.000		7.000.000		12.500.000		26.250.000	0	87,5		
			Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasrakatan desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			30.000.000		-		6.750.000		7.000.000		12.500.000		26.250.000	0	87,5		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			16.000.000		1.250.000		1.400.000		3.500.000		-		6.150.000	200	38,44		
			Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1		1		0		1		0		2		200			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			16.000.000		1.250.000		1.400.000		3.500.000		-		6.150.000	200	38,44		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1		1		0		1		0		2		200			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**12.500.000**		**1.750.000**		**2.000.000**		**1.250.000**		**2.200.000**		7.200.000	**0**	**57,6**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12.500.000		1.750.000		2.000.000		1.250.000		2.200.000		7.200.000	0	57,6		
			Tercapainya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			12.500.000		1.750.000		2.000.000		1.250.000		2.200.000		7.200.000	0	57,6		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**45.000.000**		**6.000.000**		**8.250.000**		**11.500.000**		**2.350.000**		28.100.000	**0**	**62,44**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.000.000		6.000.000		8.250.000		11.500.000		2.350.000		28.100.000	0	62,44		
			terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2		0		0		2		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		0		0		2		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		2		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			12.500.000		1.750.000		1.000.000		-		-		2.750.000	0	22		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	2		0		0		2		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan			20.000.000		1.750.000		4.750.000		7.500.000		2.350.000		16.350.000	0	81,75		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		0		0		2		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12.500.000		2.500.000		2.500.000		4.000.000		-		9.000.000	0	72		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		2		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**14.300.050**		**2.406.930**		**2.933.020**		**1.450.000**		**5.233.000**		12.022.950	**0**	**84,08**	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14.300.050		2.406.930		2.933.020		1.450.000		5.233.000		12.022.950	0	84,08		
			terlaksananaya kegiatan pembinaan dan pengawasn desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		0		4		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			8.017.550		371.930		1.383.020		1.450.000		2.733.000		5.937.950	0	74,06		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			6.282.500		2.035.000		1.550.000		-		2.500.000		6.085.000	0	96,86		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.301.774.356**		**1.649.135.294**		**2.505.973.604**		**2.565.522.076**		**1.974.147.650**		8.694.778.624	**85,71**	**93,47**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80								67,17		67,17		83,96			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.17		67.17		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.512.207		16.670.000		2.233.000		-		3.940.000		22.843.000	100	123,39		
			Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.512.207		16.670.000		2.233.000		-		3.940.000		22.843.000	100	123,39		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.647.163.158		1.498.645.456		2.447.154.185		2.459.962.076		1.741.225.850		8.146.987.567	100	94,22		
			Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	102		102		102		102		102		102		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2		2		2		2		2		2		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.571.683.158		1.460.905.456		2.440.864.185		2.441.092.076		1.734.935.850		8.077.797.567	100	94,24		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102		102		102		102		102		102		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			75.480.000		37.740.000		6.290.000		18.870.000		6.290.000		69.190.000	100	91,67		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2		2		2		2		2		2		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			84.640.191		31.626.000		8.439.500		13.190.000		32.415.000		85.670.500	100	101,22		
			Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		0		2		0		2		4		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0		4		4		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		4		4		4		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3		3		3		4		4		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		12		12		12		12		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.146.600		-		3.700.000		-		4.446.000		8.146.000	100	99,99		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		0		2		0		2		4		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.469.240		5.670.000		1.585.000		-		7.384.000		14.639.000	100	127,64		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0		4		4		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.769.851		5.236.000		142.000		4.600.000		2.758.000		12.736.000	100	99,73		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		4		4		4		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.967.000		11.720.000		1.725.000		1.840.000		5.577.000		20.862.000	100	109,99		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		3		3		3		4		4		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33.287.500		9.000.000		1.287.500		6.750.000		12.250.000		29.287.500	100	87,98		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		12		12		12		100			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120.952.000		-		-		-		117.485.800		117.485.800	25	97,13		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		3		3		25			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.952.000		-		-		-		117.485.800		117.485.800	25	97,13		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		0		0		0		3		3		25			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			309.100.800		93.153.838		46.576.919		68.550.000		75.381.000		283.661.757	87,5	91,77		
			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3		3		3		3		3		75			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.588.800		1.353.838		676.919		-		6.831.000		8.861.757	100	45,24		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			289.512.000		91.800.000		45.900.000		68.550.000		68.550.000		274.800.000	75	94,92		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3		3		3		3		3		75			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.406.000		9.040.000		1.570.000		23.820.000		3.700.000		38.130.000	66,67	31,41		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		4		0		4		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			40.720.000		9.040.000		1.570.000		19.520.000		3.700.000		33.830.000	100	83,08		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.130.000		-		-		4.300.000		-		4.300.000	100	70,15		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		4		0		4		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			74.556.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**14.454.075**		**8.286.000**		**322.000**		**1.170.000**		**2.136.000**		11.914.000	**100**	**82,43**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,77		3,77		107,71			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.454.075		8.286.000		322.000		1.170.000		2.136.000		11.914.000	100	82,43		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2		2		2		2		2		2		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.454.075		8.286.000		322.000		1.170.000		2.136.000		11.914.000	100	82,43		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2		2		2		2		2		2		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**69.234.500**		**12.638.000**		**13.319.000**		**17.612.500**		**24.628.000**		68.197.500	**80**	**98,5**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		81,94		81,94		81,94			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.256.700		12.638.000		6.319.000		12.750.000		1.170.000		32.877.000	100	162,3		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		3		3		0		3		3		100			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		4		4		4		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7.146.700		12.638.000		6.319.000		-		810.000		19.767.000	100	276,59		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		3		3		0		3		3		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			13.110.000		-		-		12.750.000		360.000		13.110.000	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		4		4		4		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.500.000		-		2.000.000		4.500.000		-		6.500.000	0	86,67		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		2		2		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			7.500.000		-		2.000.000		4.500.000		-		6.500.000	0	86,67		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		2		2		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			41.477.800		-		5.000.000		362.500		23.458.000		28.820.500	100	69,48		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		0		30		0		30		30		100			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30		0		0		30		0		30		100			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			31.250.175		-		5.000.000		-		23.458.000		28.458.000	100	91,07		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		0		30		0		30		30		100			
		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			10.227.625		-		-		362.500		-		362.500	100	3,54		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30		0		0		30		0		30		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**25.800.000**		**4.000.000**		**2.000.000**		**5.000.000**		**11.000.000**		22.000.000	**50**	**85,27**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		100		100		102,04			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			25.800.000		4.000.000		2.000.000		5.000.000		11.000.000		22.000.000	50	85,27		
			Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		2		2		2		2		2		50			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			25.800.000		4.000.000		2.000.000		5.000.000		11.000.000		22.000.000	50	85,27		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		2		2		2		2		2		50			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**8.870.725**		**-**		**3.270.500**		**2.500.000**		**2.500.000**		8.270.500	**50**	**93,23**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		0		0		0			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.870.725		-		3.270.500		2.500.000		2.500.000		8.270.500	50	93,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		1		1		1		1		50			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.870.725		-		3.270.500		2.500.000		2.500.000		8.270.500	50	93,23		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		1		1		1		1		50			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**17.549.625**		**-**		**6.000.000**		**337.500**		**2.850.000**		9.187.500	**100**	**52,35**	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)													0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100								80		80		80			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.549.625		-		6.000.000		337.500		2.850.000		9.187.500	100	52,35		
			Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		4		4		4		4		100			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			17.549.625		-		6.000.000		337.500		2.850.000		9.187.500	100	52,35		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		4		4		4		4		100			
Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**558.908.000**		**126.683.840**		**137.374.420**		**122.680.000**		**49.094.500**		435.832.760	**166,67**	**77,98**	KELURAHAN KELAPA TUJUH	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100								81,94		81,94		81,94			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			558.908.000		126.683.840		137.374.420		122.680.000		49.094.500		435.832.760	166,67	77,98		
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Kelapa Tujuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri. Berdaya Saing			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		1		1		4		400			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.750.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.956.192		-		-		-		25.590.000		25.590.000	100	50,22		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			504.201.808		126.683.840		137.374.420		122.680.000		23.504.500		410.242.760	400	81,36		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		1		1		4		400			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri. Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**543.609.620**		**126.113.224**		**138.468.127**		**124.113.224**		**124.172.567**		512.867.142	**100**	**94,34**	KELURAHAN TANJUNG AMAN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100								88,01		88,01		88,01			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			543.609.620		126.113.224		138.468.127		124.113.224		124.172.567		512.867.142	100	94,34		
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Tanjung Aman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		1		3		300			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			36.807.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			499.802.220		126.113.224		138.468.127		124.113.224		124.172.567		512.867.142	300	102,61		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		1		3		300			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**576.516.346**		**143.894.152**		**121.142.131**		**123.110.400**		**132.953.021**		521.099.704	**250**	**90,39**	KELURAHAN KOTA ALAM	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		84,75		84,75		84,75			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			576.516.346		143.894.152		121.142.131		123.110.400		132.953.021		521.099.704	250	90,39		
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Kota Alam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		1		1		4		400			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			25.960.000		-		-		-		12.154.500		12.154.500	100	46,82		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			550.556.346		143.894.152		121.142.131		123.110.400		120.798.521		508.945.204	400	92,44		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		1		1		4		400			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**370.015.588**		**83.800.000**		**113.634.000**		**120.471.500**		**40.491.500**		358.397.000	**150**	**96,86**	KELURAHAN TANJUNG SENANG	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100								80		80		80			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			370.015.588		83.800.000		113.634.000		120.471.500		40.491.500		358.397.000	150	96,86		
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan Tanjung Senang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		1		3		300			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			366.515.588		83.800.000		113.634.000		120.471.500		40.491.500		358.397.000	300	97,78		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		1		3		300			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**491.360.000**		**119.341.850**		**116.070.925**		**112.298.176**		**40.491.500**		388.202.451	**450**	**79,01**	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		81,25		81,25		81,25			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			491.360.000		119.341.850		116.070.925		112.298.176		40.491.500		388.202.451	450	79,01		
			Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan Tanjung Harapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		3		0		9		900			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			29.078.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			462.282.000		119.341.850		116.070.925		112.298.176		40.491.500		388.202.451	900	83,98		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		3		0		9		900			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.172.928.486**		**486.523.510**		**536.476.705**		**429.327.132**		**466.982.655**		1.919.310.002	**79,51**	**88,33**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.08		67.08		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.869.975		3.070.000		490.000		852.000		4.839.000		9.251.000	150	85,11		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		3		0		3		150			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.869.975		3.070.000		490.000		852.000		4.839.000		9.251.000	150	85,11		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		3		0		3		150			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.959.949.283		456.613.510		516.980.705		414.767.132		419.129.655		1.807.491.002	68,75	92,22		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24		24		24		24		24		24		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24		3		0		3		3		9		37,5			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.925.149.283		451.313.510		511.680.705		409.467.132		400.229.655		1.772.691.002	100	92,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24		24		24		24		24		24		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.800.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		18.900.000		34.800.000	37,5	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24		3		0		3		3		9		37,5			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.397.560		5.730.000		6.243.000		2.950.000		6.853.000		21.776.000	29,17	51,36		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0		1		33,33			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0		1		33,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		0		0		2		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.510.760		870.000		350.000		300.000		500.000		2.020.000	33,33	57,54		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0		1		33,33			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.215.000		2.300.000		2.400.000		1.000.000		2.750.000		8.450.000	33,33	36,4		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0		1		33,33			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.671.800		2.560.000		3.493.000		1.650.000		3.603.000		11.306.000	50	72,14		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		1		0		0		2		50			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		2.000.000		-		-		-		2.000.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		1		2		4		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		2.000.000		-		-		-		2.000.000	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		0		1		1		2		4		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74.046.668		11.110.000		2.243.000		758.000		5.861.000		19.972.000	100	26,97		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		2		4		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.846.668		910.000		2.243.000		758.000		5.861.000		9.772.000	100	76,07		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		2		4		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			61.200.000		10.200.000		-		-		-		10.200.000	100	16,67		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.665.000		8.000.000		10.520.000		10.000.000		30.300.000		58.820.000	116,67	68,66		
			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		1		1		1		1		50			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		1		1		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			40.720.000		6.000.000		10.520.000		6.000.000		15.000.000		37.520.000	50	92,14		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		1		1		1		1		50			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.550.000		2.000.000		-		-		-		2.000.000	100	26,49		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		1		1		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			37.395.000		-		-		4.000.000		15.300.000		19.300.000	200	51,61		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		1		1		2		200			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**41.860.800**		**-**		**-**		**20.930.400**		**-**		20.930.400	**100**	**50**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,5		3,5		100			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			41.860.800		-		-		20.930.400		-		20.930.400	100	50		
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		0		0		1		2		3		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			41.860.800		-		-		20.930.400		-		20.930.400	100	50		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		0		1		2		3		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**30.268.300**		**9.750.000**		**-**		**14.440.000**		**5.000.000**		29.190.000	**100**	**96,44**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.119.550		9.750.000		-		14.440.000		-		24.190.000	100	96,3		
			Terlakasanaya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		3		0		0		0		3		100			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16		0		0		16		0		16		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.219.550		9.750.000		-		-		-		9.750.000	100	95,41		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		3		0		0		0		3		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.900.000		-		-		14.440.000		-		14.440.000	100	96,91		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16		0		0		16		0		16		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			5.148.750		-		-		-		5.000.000		5.000.000	200	97,11		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		2		2		0		4		200			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5.148.750		-		-		-		5.000.000		5.000.000	200	97,11		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		2		2		0		4		200			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	48		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	48		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**46.135.700**		**4.500.000**		**12.704.000**		**2.500.000**		**10.047.000**		29.751.000	**100**	**64,49**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			46.135.700		4.500.000		12.704.000		2.500.000		10.047.000		29.751.000	100	64,49		
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16		4		4		4		4		16		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			46.135.700		4.500.000		12.704.000		2.500.000		10.047.000		29.751.000	100	64,49		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16		4		4		4		4		16		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.434.400**		**2.740.000**		**2.500.000**		**3.200.000**		**4.000.000**		12.440.000	**100**	**75,69**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.434.400		2.740.000		2.500.000		3.200.000		4.000.000		12.440.000	100	75,69		
			Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		2		0		2		4		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.434.400		2.740.000		2.500.000		3.200.000		4.000.000		12.440.000	100	75,69		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		2		0		2		4		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG SELATAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.854.939.030**		**383.921.844**		**455.081.029**		**450.919.877**		**408.709.482**		1.698.632.232	**63,13**	**91,57**	KECAMATAN ABUNG BARAT	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.33		67.33		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		70		70		93,33			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.391.980		1.894.400		2.546.600		12.192.500		5.745.400		22.378.900	75	99,94		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.166.320		1.075.400		1.628.100		1.456.000		2.995.400		7.154.900	100	99,84		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.816.500		819.000		918.500		2.047.500		1.030.000		4.815.000	100	99,97		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.994.060		-		-		5.994.000		-		5.994.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.415.100		-		-		2.695.000		1.720.000		4.415.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.658.525.980		365.544.694		430.007.429		358.790.427		356.196.882		1.510.539.432	97,78	91,08		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		14		14		14		14		14		93,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		4		3		3		2		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.594.019.300		350.964.694		419.287.429		338.580.427		337.200.482		1.446.033.032	93,33	90,72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		14		14		14		14		14		93,33			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			58.320.000		14.580.000		9.720.000		19.440.000		14.580.000		58.320.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		4		3		3		2		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.186.680		-		1.000.000		770.000		4.416.400		6.186.400	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.093.570		3.038.400		5.401.550		10.639.700		13.981.500		33.061.150	60,42	99,9		
			Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Derah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		1		0		1		0		2		50			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		0		12		0		12		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		3		3		0		7		58,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		1		1		1		1		4		33,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.157.110		335.900		-		2.235.000		585.000		3.155.900	50	99,96		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		1		0		1		0		2		50			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.937.850		-		1.442.500		439.000		1.056.000		2.937.500	100	99,99		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.105.000		920.500		1.142.000		3.255.000		5.785.500		11.103.000	58,33	99,98		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		3		3		0		7		58,33			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.893.610		1.782.000		2.817.050		4.710.700		6.555.000		15.864.750	33,33	99,82		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		1		1		1		1		4		33,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.660.000		-		-		-		250.000		250.000	0	1,1		
			Terpenuhinya Inventaris Kebutuhan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.660.000		-		-		-		250.000		250.000	0	1,1		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.314.000		209.350		364.000		38.574.400		19.240.350		58.388.100	62,5	93,7		
			tersusunnya administrasi prubahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		3		0		3		25			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.610.000		209.350		364.000		559.400		460.100		1.592.850	100	44,12		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			58.704.000		-		-		38.015.000		18.780.250		56.795.250	25	96,75		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		3		0		3		25			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.953.500		13.235.000		16.761.450		30.722.850		13.295.350		74.014.650	25	132,28		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		0		0		0		1		50			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		0		0		1		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.700.000		-		16.761.450		11.346.850		9.404.950		37.513.250	0	99,5		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		1		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			18.253.500		6.617.500		-		9.688.000		1.945.200		18.250.700	50	99,98		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		0		0		0		1		50			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		6.617.500		-		9.688.000		1.945.200		18.250.700	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		0		0		1		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**30.033.600**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG BARAT	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (%)	100		0		0		0		82,5		82,5		82,5			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.033.600		-		-		-		-		-	0	0		
			terselenggaranya kegiatan pemerintah tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4										0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.033.600		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4										0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**47.482.750**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG BARAT	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			35.116.500		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1										0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4.300.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1										0		0			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			14.300.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16.516.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			6.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			TErlaksananya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1										0		0			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			6.400.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1										0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			5.966.250		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2										0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			5.966.250		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2										0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**13.300.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG BARAT	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		95		95		96,94			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.300.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum&	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3										0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			13.300.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3										0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**10.800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			10.800.000		-		-		-		-		-	0	0	KECAMATAN ABUNG BARAT	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			10.800.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG BARAT	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4										0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.711.451.700**		**130.040.091**		**24.525.475**		**15.260.650**		**18.750.000**		188.576.216	**5,43**	**11,02**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)													0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75												0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		1		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		1		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.498.835.225		110.100.441		8.250.000		5.500.000		13.750.000		137.600.441	24,26	9,18		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		4		4		4		4		4		23,53			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		3		25			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.465.835.225		104.600.441		-		-		-		104.600.441	23,53	7,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17		4		4		4		4		4		23,53			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.000.000		5.500.000		8.250.000		5.500.000		13.750.000		33.000.000	25	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		3		25			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50.975.775		19.939.650		16.275.475		9.760.650		5.000.000		50.975.775	4,17	100		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		8		0		4		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		5		2		3		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		4		1		3		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		8		2		0		2		2		16,67			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.472.000		1.614.500		-		2.857.500		-		4.472.000	0	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		8		0		4		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.319.400		3.263.700		1.419.550		2.636.150		-		7.319.400	0	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		5		2		3		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.309.375		8.061.450		3.980.925		4.267.000		-		16.309.375	0	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		4		1		3		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.875.000		7.000.000		10.875.000		-		5.000.000		22.875.000	16,67	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		8		2		0		2		2		16,67			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.030.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8										0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3										0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.398.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8										0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			106.632.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.610.700		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1										0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2										0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1										0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1										0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.664.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2										0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.926.700		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1										0		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**36.438.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5												0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			36.438.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4										0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			36.438.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4										0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100												0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1										0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98												0			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)													0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12										0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12										0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.195.725**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)													0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100												0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.195.725		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	12										0		0			
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan			1.195.725		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	12										0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TIMUR	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100												0			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)													0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4										0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4										0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4										0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.458.372.804**		**565.816.772**		**670.657.305**		**503.556.917**		**494.391.054**		2.234.422.048	**88,84**	**90,89**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.92		61.92		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.107.800		1.064.020		636.760		57.500		349.520		2.107.800	150	100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		3		0		3		150			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.107.800		1.064.020		636.760		57.500		349.520		2.107.800	150	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		3		0		3		150			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.242.684.300		524.448.192		588.791.555		455.354.767		457.094.234		2.025.688.748	91,3	90,32		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		19		18		19		19		19		82,61			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		6		3		3		12		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.209.684.300		524.448.192		572.291.555		447.104.767		448.844.234		1.992.688.748	82,61	90,18		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23		19		18		19		19		19		82,61			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.000.000		-		16.500.000		8.250.000		8.250.000		33.000.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		6		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72.212.720		18.797.900		22.156.350		22.817.410		8.441.060		72.212.720	100	100		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		6		4		2		0		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		4		5		3		0		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		6		0		12		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		5		1		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		6		0		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.876.830		1.344.200		803.550		729.080		-		2.876.830	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		6		4		2		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.647.390		5.117.990		6.627.150		5.902.250		-		17.647.390	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		4		5		3		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.176.600		1.844.480		1.085.590		2.246.530		-		5.176.600	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		6		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.520.800		1.520.400		1.861.200		2.303.200		836.000		6.520.800	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		5		1		12		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.522.000		743.000		1.010.000		769.000		-		2.522.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		6		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37.469.100		8.227.830		10.768.860		10.867.350		7.605.060		37.469.100	100	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.103.084		13.662.660		14.803.340		16.488.640		21.297.040		66.251.680	100	95,87		
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		2		4		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		4		4		2		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.503.084		762.660		1.236.340		588.640		319.040		2.906.680	100	52,82		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		4		2		4		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.600.000		12.900.000		13.567.000		15.900.000		20.978.000		63.345.000	100	99,6		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2		4		4		2		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.264.900		7.844.000		44.269.300		8.838.600		7.209.200		68.161.100	100	94,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		3		0		0		3		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			40.720.000		7.844.000		12.896.300		8.838.600		7.209.200		36.788.100	100	90,34		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			31.544.900		-		31.373.000		-		-		31.373.000	100	99,46		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		3		0		0		3		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**54.334.900**		**3.455.420**		**10.806.550**		**15.378.350**		**20.713.780**		50.354.100	**100**	**92,67**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,25		3,25		92,86			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			54.334.900		3.455.420		10.806.550		15.378.350		20.713.780		50.354.100	100	92,67		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			54.334.900		3.455.420		10.806.550		15.378.350		20.713.780		50.354.100	100	92,67		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		1		1		1		4		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.774.300**		**5.120.000**		**15.992.300**		**1.542.000**		**120.000**		22.774.300	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		66,67		66,67		66,67			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.872.000		5.120.000		5.440.000		192.000		120.000		10.872.000	100	100		
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		2		2		0		0		4		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.872.000		5.120.000		5.440.000		192.000		120.000		10.872.000	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		2		2		0		0		4		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.500.000		-		6.150.000		1.350.000		-		7.500.000	100	100		
			Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			7.500.000		-		6.150.000		1.350.000		-		7.500.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			4.402.300		-		4.402.300		-		-		4.402.300	100	100		
			meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7		0		7		0		0		7		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			4.402.300		-		4.402.300		-		-		4.402.300	100	100		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7		0		7		0		0		7		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.000.000**		**1.000.000**		**750.000**		**1.250.000**		**-**		3.000.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.000.000		1.000.000		750.000		1.250.000		-		3.000.000	100	100		
			Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		1		1		2		0		4		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			3.000.000		1.000.000		750.000		1.250.000		-		3.000.000	100	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		1		1		2		0		4		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.800.000**		**1.800.000**		**-**		**-**		**-**		1.800.000	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.800.000		1.800.000		-		-		-		1.800.000	0	100		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1.800.000		1.800.000		-		-		-		1.800.000	0	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		0		0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**9.194.300**		**156.000**		**7.575.400**		**1.277.500**		**185.400**		9.194.300	**33,33**	**100**	KECAMATAN ABUNG SEMULI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.194.300		156.000		7.575.400		1.277.500		185.400		9.194.300	33,33	100		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		0		1		0		0		1		33,33			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	3		0		1		0		0		1		33,33			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1.085.900		156.000		536.000		208.500		185.400		1.085.900	33,33	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		0		1		0		0		1		33,33			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			8.108.400		-		7.039.400		1.069.000		-		8.108.400	33,33	100		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	3		0		1		0		0		1		33,33			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.339.061.954**		**477.837.776**		**682.555.671**		**491.410.895**		**515.547.496**		2.167.351.838	**88,64**	**92,66**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)													0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.138.760.883		430.751.576		647.455.671		476.110.895		435.625.496		1.989.943.638	100	93,04		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		20		20		20		20		20		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		2		2		6		12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.064.147.083		416.137.776		635.455.671		464.110.895		399.625.496		1.915.329.838	100	92,79		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		20		20		20		20		20		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			72.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000		72.000.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		2		2		2		6		12		100			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.613.800		2.613.800		-		-		-		2.613.800	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.147.471		14.560.110		18.000.000		-		21.587.361		54.147.471	68,75	81,86		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		12		0		0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		1		1		0		3		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		1		5		0		3		9		75			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.291.900		1.291.900		-		-		-		1.291.900	0	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		12		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.100.120		2.100.120		-		-		-		2.100.120	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.755.451		6.168.090		2.000.000		-		12.587.361		20.755.451	100	95,4		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		1		1		0		3		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41.000.000		5.000.000		16.000.000		-		9.000.000		30.000.000	75	73,17		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		5		0		3		9		75			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.623.600		19.800.000		7.200.000		12.600.000		39.222.000		78.822.000	100	87,95		
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		1		5		0		6		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		1		5		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.605.600		900.000		900.000		-		1.800.000		3.600.000	100	41,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		1		5		0		6		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.018.000		18.900.000		6.300.000		12.600.000		37.422.000		75.222.000	100	92,85		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		1		5		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.530.000		12.726.090		9.900.000		2.700.000		19.112.639		44.438.729	100	99,8		
			Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		0		0		2		4		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		9.722.090		9.900.000		2.700.000		14.606.639		36.928.729	100	99,75		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.510.000		3.004.000		-		-		4.506.000		7.510.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		0		0		2		4		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**10.000.000**		**-**		**-**		**-**		**10.000.000**		10.000.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,2		3,2		91,43			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.000.000		-		-		-		10.000.000		10.000.000	100	100		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.000.000		-		-		-		10.000.000		10.000.000	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.500.000**		-		-		-		**3.500.000**		3.500.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.500.000		-		-		-		3.500.000		3.500.000	100	100		
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3.500.000		-		-		-		3.500.000		3.500.000	100	100		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**8.100.000**		-		-		-		**8.100.000**		8.100.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)													0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			8.100.000		-		-		-		8.100.000		8.100.000	100	100		
			Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			8.100.000		-		-		-		8.100.000		8.100.000	100	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**4.000.000**		-		-		-		**4.000.000**		4.000.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)													0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4.000.000		-		-		-		4.000.000		4.000.000	100	100		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4.000.000		-		-		-		4.000.000		4.000.000	100	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**29.600.000**		**9.200.000**		**11.200.000**		**9.200.000**		**-**		29.600.000	**100**	**100**	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		33,33		33,33		33,34		0		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)													0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			29.600.000		9.200.000		11.200.000		9.200.000		-		29.600.000	100	100		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4		4		0		0		0		4		100			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4		0		0		4		0		4		100			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4		0		4		0		0		4		100			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			9.200.000		9.200.000		-		-		-		9.200.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4		4		0		0		0		4		100			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.200.000		-		-		9.200.000		-		9.200.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4		0		0		4		0		4		100			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			11.200.000		-		11.200.000		-		-		11.200.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4		0		4		0		0		4		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.202.853.919**		**149.656.573**		**57.079.900**		**81.443.350**		**64.032.250**		352.212.073	**90,63**	**15,99**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		68.28		68.28		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.923.150		-		1.604.750		4.125.650		192.500		5.922.900	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		1		2		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.021.150		-		854.750		2.166.150		-		3.020.900	100	99,99		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		1		2		0		3		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.500.000		-		750.000		750.000		-		1.500.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.402.000		-		-		1.209.500		192.500		1.402.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.998.268.369		131.976.573		23.480.000		9.862.850		24.361.700		189.681.123	66,67	9,49		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		24		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.923.783.489		126.856.573		-		-		-		126.856.573	0	6,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24		24		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.440.000		5.120.000		23.480.000		7.920.000		22.260.000		58.780.000	100	83,45		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.044.880		-		-		1.942.850		2.101.700		4.044.550	100	99,99		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72.777.000		7.480.000		24.076.950		37.898.650		4.251.500		73.707.100	100	101,28		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		4		4		3		1		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.177.700		-		857.200		4.248.000		1.072.500		6.177.700	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.484.350		2.842.500		2.590.050		5.468.600		532.100		11.433.250	100	99,56		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.818.450		-		799.700		3.482.050		1.533.400		5.815.150	100	99,94		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.184.000		-		1.812.000		4.840.000		526.500		7.178.500	100	99,92		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.112.500		157.500		2.018.000		4.500.000		437.000		7.112.500	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35.000.000		4.480.000		16.000.000		15.360.000		150.000		35.990.000	100	102,83		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		4		4		3		1		12		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.870.000		10.200.000		433.750		7.222.700		18.038.900		35.895.350	75	45,51		
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		0		3		6		3		12		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		4		0		2		6		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.166.000		-		433.750		1.222.700		438.900		2.095.350	50	96,74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		0		3		6		3		12		50			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			76.704.000		10.200.000		-		6.000.000		17.600.000		33.800.000	100	44,07		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		4		0		2		6		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.015.400		-		7.484.450		22.333.500		17.187.650		47.005.600	100	99,98		
			Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		-		2.370.850		18.421.500		16.227.650		37.020.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.995.400		-		5.113.600		3.912.000		960.000		9.985.600	100	99,9		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**39.876.288**		**6.400.000**		**6.400.000**		**15.558.400**		**2.268.000**		30.626.400	**100**	**76,8**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,32		3,32		94,86			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39.876.288		6.400.000		6.400.000		15.558.400		2.268.000		30.626.400	100	76,8		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			39.876.288		6.400.000		6.400.000		15.558.400		2.268.000		30.626.400	100	76,8		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.660.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12.660.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4										0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.998.800**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		24,08		24,08		24,57			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.998.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1										0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			2.998.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1										0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**5.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**3.401.200**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG TINGGI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		13,64		13,64		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			3.401.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1										0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			3.401.200		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1										0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.106.204.227**		**34.000.000**		**7.977.000**		**35.545.000**		**2.716.572.717**		2.794.094.717	**91,11**	**89,95**	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		66.9		66.9		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.894.582.841		20.040.000		5.010.000		15.030.000		2.627.937.967		2.668.017.967	110	92,17		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		24		24		24		24		24		120			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.834.462.841		-		-		-		2.607.897.967		2.607.897.967	120	92,01		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		24		24		24		24		24		120			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.120.000		20.040.000		5.010.000		15.030.000		20.040.000		60.120.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			75.449.674		12.742.000		2.358.000		9.296.000		16.404.000		40.800.000	100	54,08		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		3		2		5		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.606.500		3.200.000		825.000		1.210.000		2.980.000		8.215.000	100	41,9		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		3		2		5		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.509.330		2.600.000		551.000		1.250.000		2.520.000		6.921.000	100	39,53		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			38.333.844		6.942.000		982.000		6.836.000		10.904.000		25.664.000	100	66,95		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.610.000		1.218.000		609.000		1.219.000		72.230.750		75.276.750	100	94,56		
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.610.000		1.218.000		609.000		1.219.000		1.624.500		4.670.500	100	61,37		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.000.000		-		-		-		70.606.250		70.606.250	100	98,06		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.561.712		-		-		10.000.000		-		10.000.000	50	17,68		
			Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			56.561.712		-		-		10.000.000		-		10.000.000	100	17,68		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**177.540.000**		**33.500.000**		**2.600.000**		**27.780.000**		**22.214.000**		86.094.000	**100**	**48,49**	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,33		3,33		95,14			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			177.540.000		33.500.000		2.600.000		27.780.000		22.214.000		86.094.000	100	48,49		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	4		0		0		2		2		4		100			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		1		1		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			26.500.000		-		-		4.000.000		2.500.000		6.500.000	100	24,53		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		0		0		2		2		4		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			151.040.000		33.500.000		2.600.000		23.780.000		19.714.000		79.594.000	100	52,7		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**37.500.000**		**-**		**3.000.000**		**3.000.000**		**7.530.000**		13.530.000	**100**	**36,08**	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			37.500.000		-		3.000.000		3.000.000		7.530.000		13.530.000	100	36,08		
			Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5		0		2		2		1		5		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			37.500.000		-		3.000.000		3.000.000		7.530.000		13.530.000	100	36,08		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5		0		2		2		1		5		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**76.600.000**		**-**		**11.000.000**		**-**		**10.930.000**		21.930.000	**0**	**28,63**	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.600.000		-		11.000.000		-		10.930.000		21.930.000	0	28,63		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			76.600.000		-		11.000.000		-		10.930.000		21.930.000	0	28,63		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**52.169.320**		**3.500.000**		**1.125.000**		**6.925.000**		**12.257.500**		23.807.500	**100**	**45,64**	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		100		100		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			52.169.320		3.500.000		1.125.000		6.925.000		12.257.500		23.807.500	100	45,64		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7		2		2		2		1		7		100			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			52.169.320		3.500.000		1.125.000		6.925.000		12.257.500		23.807.500	100	45,64		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7		2		2		2		1		7		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**694.444.382**		**168.900.000**		**38.050.000**		**3.175.200**		**415.852.950**		625.978.150	**100**	**90,14**	KELURAHAN BUKIT KEMUNING	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100								100		100		100			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			694.444.382		168.900.000		38.050.000		3.175.200		415.852.950		625.978.150	100	90,14		
			Terlaksanakanya pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			694.444.382		168.900.000		38.050.000		3.175.200		415.852.950		625.978.150	100	90,14		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.336.541.931**		**513.401.850**		**539.776.255**		**431.927.489**		**596.901.026**		2.082.006.620	**117,58**	**89,11**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75												0			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.73		67.73		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.880.610		1.295.000		1.475.000		1.175.000		1.978.000		5.923.000	200	54,44		
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		3		4		200			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.880.610		1.295.000		1.475.000		1.175.000		1.978.000		5.923.000	200	54,44		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		3		4		200			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.074.651.890		511.098.349		537.401.254		429.652.488		447.372.525		1.925.524.616	130	92,81		
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		1		2		5		8		160			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.014.531.890		501.078.349		527.381.254		414.622.488		422.322.525		1.865.404.616	100	92,6		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.120.000		10.020.000		10.020.000		15.030.000		25.050.000		60.120.000	160	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		0		1		2		5		8		160			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			47.922.163		1.008.501		900.001		1.100.001		15.363.501		18.372.004	125	38,34		
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		0		2		2		6		10		166,67			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		4		4		4		4		16		133,33			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0		1		2		1		1		5		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.123.950		500.000		500.000		600.000		1.550.000		3.150.000	166,67	44,22		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		0		2		2		6		10		166,67			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.310.050		508.500		400.000		500.000		1.400.000		2.808.500	133,33	38,42		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		4		4		4		4		16		133,33			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.275.000		-		-		-		2.038.500		2.038.500	100	21,98		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		12		12		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			24.213.163		-		-		-		10.375.000		10.375.000	100	42,85		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		12		12		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		1		1		1		1		4	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		1		2		1		1		5		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135.474.200		-		-		-		93.707.000		93.707.000	66,67	69,17		
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		0		12		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		0		0		0		2		2		33,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.954.200		-		-		-		8.468.000		8.468.000	100	53,08		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		0		12		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			119.520.000		-		-		-		85.239.000		85.239.000	33,33	71,32		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		0		0		0		2		2		33,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.613.068		-		-		-		38.480.000		38.480.000	100	56,91		
			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		-		-		-		29.500.000		29.500.000	100	79,69		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.593.068		-		-		-		8.980.000		8.980.000	100	29,35		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**96.096.000**		**-**		**-**		**-**		**49.880.000**		49.880.000	**37,5**	**51,91**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,42		3,42		97,71			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			96.096.000		-		-		-		49.880.000		49.880.000	37,5	51,91		
			Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		0		0		0		2		2		50			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.000.000		-		-		-		7.700.000		7.700.000	25	51,33		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			81.096.000		-		-		-		42.180.000		42.180.000	50	52,01		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		0		0		0		2		2		50			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**38.134.500**		**-**		**-**		**-**		**13.336.000**		13.336.000	**33,33**	**34,97**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0,000		0,000		0,000		77,780		77,78		77,78			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			38.134.500		-		-		-		13.336.000		13.336.000	33,33	34,97		
			Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3										0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		0		0		0		4		4		66,67			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			18.134.500		-		-		-		4.336.000		4.336.000	0	23,91		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3										0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20.000.000		-		-		-		9.000.000		9.000.000	66,67	45		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		0		0		0		4		4		66,67			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**22.000.000**		**-**		**-**		**-**		**1.814.000**		1.814.000	**116,67**	**8,25**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	"Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" (persen)	98								0		0		0			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0,000		0,000		0,000		100,000		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		53		53		54,08			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			22.000.000		-		-		-		1.814.000		1.814.000	116,67	8,25		
			Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		4		4		133,33			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3								3		3		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			17.000.000		-		-		-		1.814.000		1.814.000	133,33	10,67		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		4		4		133,33			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.000.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3								3		3		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**51.800.000**		**-**		**-**		**-**		**8.000.000**		8.000.000	**25**	**15,44**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (persen)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0,000		0,000		0,000		50,000		50		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			51.800.000		-		-		-		8.000.000		8.000.000	25	15,44		
			Terwujudny Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			51.800.000		-		-		-		8.000.000		8.000.000	25	15,44		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**30.916.650**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0,000		0,000		0,000		72,730		72,73		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.916.650		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6										0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			30.916.650		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	6										0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.046.739.161**		**147.098.733**		**48.901.800**		**28.892.550**		**71.188.000**		296.081.083	**75,63**	**14,47**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75								64,58		64,58		86,11			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		66.67		66.67		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.000.000		3.460.550		3.144.550		2.087.100		3.307.800		12.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.000.000		1.645.800		674.900		876.300		803.000		4.000.000	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.000.000		649.400		463.700		483.200		403.700		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.000.000		-		1.171.300		423.200		405.500		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.000.000		1.165.350		834.650		-		-		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.000.000		-		-		304.400		1.695.600		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.862.383.894		121.816.433		13.038.000		8.200.000		23.500.750		166.555.183	75	8,94		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.809.183.894		113.355.183		-		-		-		113.355.183	0	6,27		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24										0		0			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			49.200.000		8.200.000		12.300.000		8.200.000		20.500.000		49.200.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.000.000		-		-		-		2.000.000		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.000.000		261.250		738.000		-		1.000.750		2.000.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			48.506.900		6.653.900		15.777.800		7.448.700		11.125.700		41.006.100	100	84,54		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.037.000		609.400		840.400		1.496.000		1.091.200		4.037.000	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.547.900		442.500		4.645.400		2.535.200		924.000		8.547.100	100	99,99		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.420.000		652.000		1.992.000		1.110.000		666.000		4.420.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.502.000		1.200.000		4.550.000		2.307.500		3.444.500		11.502.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.000.000		3.750.000		3.750.000		-		5.000.000		12.500.000	100	62,5		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.550.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			11.950.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.600.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.839.848		4.613.900		6.764.400		4.496.400		7.821.200		23.695.900	6,25	68,01		
			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		0		0		0		1		1		4,17			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.639.848		413.900		464.400		296.400		1.521.200		2.695.900	4,17	27,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		0		0		0		1		1		4,17			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.200.000		4.200.000		6.300.000		4.200.000		6.300.000		21.000.000	8,33	83,33		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		1		1		8,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.458.519		10.553.950		10.177.050		6.660.350		25.432.550		52.823.900	100	74,97		
			Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			40.720.000		10.173.950		10.177.050		6.660.350		13.708.650		40.720.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			29.738.519		380.000		-		-		11.723.900		12.103.900	100	40,7		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**36.179.200**		-		-		**18.009.600**		-		18.009.600	**100**	**49,78**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,27		3,27		93,43			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			36.179.200		-		-		18.009.600		-		18.009.600	100	49,78		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			36.179.200		-		-		18.009.600		-		18.009.600	100	49,78		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**26.590.000**		**1.150.200**		**5.991.500**		-		**9.037.500**		16.179.200	**62,5**	**60,85**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		80		80		80			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18.590.000		-		4.829.200		-		3.350.000		8.179.200	25	44		
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			18.590.000		-		4.829.200		-		3.350.000		8.179.200	25	44		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			8.000.000		1.150.200		1.162.300		-		5.687.500		8.000.000	100	100		
			Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			8.000.000		1.150.200		1.162.300		-		5.687.500		8.000.000	100	100		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**10.022.000**		**297.650**		**298.750**		**3.000.000**		**6.425.600**		10.022.000	**100**	**100**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		33,05		33,05		33,72			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.022.000		297.650		298.750		3.000.000		6.425.600		10.022.000	100	100		
			Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			10.022.000		297.650		298.750		3.000.000		6.425.600		10.022.000	100	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.513.000**		**2.909.350**		**1.951.600**		**605.800**		**9.796.150**		15.262.900	**100**	**92,43**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.513.000		2.909.350		1.951.600		605.800		9.796.150		15.262.900	100	92,43		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan			8.513.000		1.848.100		675.900		605.800		4.133.100		7.262.900	100	85,32		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.000.000		1.061.250		1.275.700		-		5.663.050		8.000.000	100	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**16.513.000**		**1.899.250**		**2.856.350**		**1.501.650**		**7.752.750**		14.010.000	**100**	**84,84**	KECAMATAN TANJUNG RAJA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			16.513.000		1.899.250		2.856.350		1.501.650		7.752.750		14.010.000	100	84,84		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			8.513.000		1.281.250		1.725.250		650.650		2.355.850		6.013.000	100	70,63		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			8.000.000		618.000		1.131.100		851.000		5.396.900		7.997.000	100	99,96		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.037.263.156**		**438.996.369**		**494.204.819**		**410.714.504**		**438.245.634**		1.782.161.326	**85,96**	**87,48**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		69.2		69.2		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.975.120		936.590		600.350		-		438.180		1.975.120	100	100		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			600.350		-		600.350		-		-		600.350	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			477.350		477.350		-		-		-		477.350	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			459.240		459.240		-		-		-		459.240	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			438.180		-		-		-		438.180		438.180	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.798.452.858		403.535.869		475.422.219		396.067.494		400.713.634		1.675.739.216	100	93,18		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17		17		17		17		17		17		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.745.222.008		395.323.869		463.122.219		383.767.494		380.378.784		1.622.592.366	100	92,97		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17		17		17		17		17		17		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			52.440.000		8.212.000		12.300.000		12.300.000		19.544.000		52.356.000	100	99,84		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			790.850		-		-		-		790.850		790.850	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			68.003.460		10.524.160		7.658.780		3.800.000		20.242.520		42.225.460	100	62,09		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		1		5		0		0		6		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		3		6		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		3		6		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.283.830		1.452.330		1.831.500		-		-		3.283.830	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		1		5		0		0		6		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.956.500		1.551.800		1.490.000		-		3.056.700		6.098.500	100	87,67		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		3		6		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.382.530		737.230		490.280		-		2.155.020		3.382.530	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		1		2		0		3		6		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			41.905.600		4.527.800		1.127.000		3.000.000		12.500.800		21.155.600	100	50,48		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.475.000		2.255.000		2.720.000		800.000		2.530.000		8.305.000	100	66,57		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		1		2		2		1		6		100			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.782.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.000.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.782.400		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.313.120		12.142.920		3.115.012		2.215.396		3.355.276		20.828.604	100	22,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		2		3		5		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		2		3		4		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.778.640		2.842.920		2.451.832		1.610.096		2.905.276		9.810.124	100	58,47		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		2		2		3		5		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			77.534.480		9.300.000		663.180		605.300		450.000		11.018.480	100	14,21		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		2		3		4		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.736.198		11.856.830		7.408.458		8.631.614		13.496.024		41.392.926	77,78	81,58		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		0		0		0		1		33,33			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		7.153.282		7.408.458		7.211.614		10.856.024		32.629.378	100	88,14		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.060.000		-		-		1.420.000		2.640.000		4.060.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.656.198		4.703.548		-		-		-		4.703.548	33,33	48,71		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		0		0		0		1		33,33			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**46.825.750**		-		**706.550**		**9.000.000**		**22.453.275**		32.159.825	**66,67**	**68,68**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,53		3,53		100,86			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38.865.925		-		-		5.000.000		20.600.000		25.600.000	50	65,87		
			Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	4		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.825.925		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33.040.000		-		-		5.000.000		20.600.000		25.600.000	100	77,48		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			7.959.825		-		706.550		4.000.000		1.853.275		6.559.825	100	82,41		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			7.959.825		-		706.550		4.000.000		1.853.275		6.559.825	100	82,41		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**35.143.350**		**5.627.500**		**8.210.850**		**3.250.000**		**5.754.000**		22.842.350	**81,94**	**65**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		95,13		95,13		95,13			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.850		-		8.210.850		1.000.000		740.000		9.950.850	83,33	99,5		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		0		2		0		0		2		66,67			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		0		2		4		0		6		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5.000.850		-		4.260.850		-		740.000		5.000.850	66,67	100		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3		0		2		0		0		2		66,67			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000.000		-		3.950.000		1.000.000		-		4.950.000	100	99		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6		0		2		4		0		6		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			10.101.000		-		-		2.250.000		600.000		2.850.000	75	28,22		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		0		0		2		1		3		75			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			10.101.000		-		-		2.250.000		600.000		2.850.000	75	28,22		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		0		0		2		1		3		75			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			15.041.500		5.627.500		-		-		4.414.000		10.041.500	83,33	66,76		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		5		0		0		0		5		50			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	3		0		0		0		3		3		100			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	8		8		0		0		0		8		100			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			8.077.500		2.627.500		-		-		1.700.000		4.327.500	50	53,57		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		5		0		0		0		5		50			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			3.564.000		-		-		-		2.314.000		2.314.000	100	64,93		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga			3.400.000		3.000.000		-		-		400.000		3.400.000	100	100		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	8		8		0		0		0		8		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.616.100**		**-**		**-**		**-**		**3.616.100**		3.616.100	**50**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		12,95		12,95		13,21			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.616.100		-		-		-		3.616.100		3.616.100	50	100		
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			3.616.100		-		-		-		3.616.100		3.616.100	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**6.688.075**		-		-		-		**3.688.075**		3.688.075	**100**	**55,14**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6.688.075		-		-		-		3.688.075		3.688.075	100	55,14		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	6		0		0		0		6		6		100			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			3.401.250		-		-		-		3.401.250		3.401.250	100	100		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	6		0		0		0		6		6		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3.286.825		-		-		-		286.825		286.825	100	8,73		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**4.299.690**		-		-		**802.990**		**2.821.700**		3.624.690	**100**	**84,3**	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		98,2		98,2		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.299.690		-		-		802.990		2.821.700		3.624.690	100	84,3		
			Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembunaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6		0		0		0		6		6		100			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4		0		0		3		1		4		100			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			2.296.700		-		-		-		2.296.700		2.296.700	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6		0		0		0		6		6		100			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			2.002.990		-		-		802.990		525.000		1.327.990	100	66,3		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	4		0		0		3		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.749.289.261**		**381.135.170**		**456.009.414**		**403.534.153**		**367.096.399**		1.607.775.136	**100**	**91,91**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		76		76		101,33			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.8		67.8		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.744.900		5.736.750		5.166.700		7.644.550		193.150		18.741.150	100	99,98		
			Te4rlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.744.900		5.736.750		5.166.700		7.644.550		193.150		18.741.150	100	99,98		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.601.898.254		355.235.620		431.734.914		355.331.153		323.708.199		1.466.009.886	100	91,52		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.546.698.254		350.635.620		416.494.914		336.931.153		311.408.199		1.415.469.886	100	91,52		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			55.200.000		4.600.000		15.240.000		18.400.000		12.300.000		50.540.000	100	91,56		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			52.218.015		7.382.400		6.591.700		25.068.800		13.150.400		52.193.300	100	99,95		
			Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.142.115		417.000		483.900		845.900		382.200		2.129.000	100	99,39		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.194.900		1.435.400		1.212.800		4.220.400		1.314.700		8.183.300	100	99,86		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.336.000		4.030.000		2.395.000		14.252.500		1.658.500		22.336.000	100	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		1		3		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.545.000		1.500.000		2.500.000		5.750.000		9.795.000		19.545.000	100	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.408.092		1.600.000		5.996.500		5.500.000		22.470.000		35.566.500	100	90,25		
			Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.408.092		600.000		1.996.500		1.500.000		1.470.000		5.566.500	100	59,17		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			30.000.000		1.000.000		4.000.000		4.000.000		21.000.000		30.000.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.020.000		11.180.400		6.519.600		9.989.650		7.574.650		35.264.300	100	95,26		
			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		11.180.400		6.519.600		9.989.650		7.574.650		35.264.300	100	95,26		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**35.959.200**		**3.000.000**		**5.000.000**		**12.625.000**		**7.426.000**		28.051.000	**100**	**78,01**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,5		3,5		100			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.959.200		3.000.000		5.000.000		12.625.000		7.426.000		28.051.000	100	78,01		
			Telaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.959.200		3.000.000		5.000.000		12.625.000		7.426.000		28.051.000	100	78,01		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		1		1		1		3		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.025.628**		**4.500.000**		**8.875.500**		**7.750.000**		**900.000**		22.025.500	**100**	**100**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.350.000		4.500.000		-		3.600.000		250.000		8.350.000	100	100		
			Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3.350.000		3.000.000		-		100.000		250.000		3.350.000	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000.000		1.500.000		-		3.500.000		-		5.000.000	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			9.675.628		-		8.875.500		800.000		-		9.675.500	100	100		
			Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.675.628		-		8.875.500		800.000		-		9.675.500	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			4.000.000		-		-		3.350.000		650.000		4.000.000	100	100		
			Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		0		0		5		5		10		100			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			4.000.000		-		-		3.350.000		650.000		4.000.000	100	100		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		0		0		5		5		10		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**5.850.000**		**2.000.000**		**-**		**3.675.000**		**60.000**		5.735.000	**100**	**98,03**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.850.000		2.000.000		-		3.675.000		60.000		5.735.000	100	98,03		
			Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		5		0		5		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			2.925.000		2.000.000		-		750.000		60.000		2.810.000	100	96,07		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2.925.000		-		-		2.925.000		-		2.925.000	100	100		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		5		0		5		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**8.611.500**		**-**		**1.610.000**		**6.230.000**		**771.500**		8.611.500	**100**	**100**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.611.500		-		1.610.000		6.230.000		771.500		8.611.500	100	100		
			berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.611.500		-		1.610.000		6.230.000		771.500		8.611.500	100	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8.617.390**		**-**		**5.000.000**		**3.116.600**		**500.000**		8.616.600	**100**	**99,99**	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		100		100		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.617.390		-		5.000.000		3.116.600		500.000		8.616.600	100	99,99		
			Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11		0		5		6		0		11		100			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			3.618.640		-		2.500.000		618.600		500.000		3.618.600	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.998.750		-		2.500.000		2.498.000		-		4.998.000	100	99,98		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11		0		5		6		0		11		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.817.177.336**		**208.628.319**		**542.575.777**		**512.878.521**		**442.168.969**		1.706.251.586	**97,5**	**93,9**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)													0			
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100		14		18		15		75		75		75			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		14		18		15		75		75		100			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.464.320		-		-		-		4.214.320		4.214.320	100	94,4		
			Tersusun nya Capaian Kinerja Perngkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4								4		4		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.464.320		-		-		-		4.214.320		4.214.320	100	94,4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4								4		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.582.748.440		180.087.429		493.507.627		463.489.321		352.070.469		1.489.154.846	100	94,09		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		20		20		20		20		20		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		12		12		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.546.988.440		177.107.429		487.547.627		457.529.321		331.210.469		1.453.394.846	100	93,95		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20		20		20		20		20		20		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.760.000		2.980.000		5.960.000		5.960.000		20.860.000		35.760.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		12		12		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.890.960		16.631.130		10.469.415		13.425.530		17.238.655		57.764.730	93,75	86,36		
			tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1								1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12				6		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12						6		6		12		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16		10								10		62,5			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.118.145		1.876.600		1.403.325		-		2.789.325		6.069.250	100	99,2		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1								1		1		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.888.866		-		4.029.870		3.604.450		1.000.000		8.634.320	100	87,31		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12				6		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.990.250		-		-		1.954.460		1.679.700		3.634.160	100	91,08		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12						6		6		12		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.846.499		5.854.050		1.987.150		4.147.500		6.100.700		18.089.400	100	91,15		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.146.720		1.000.000		3.049.070		3.719.120		5.668.930		13.437.120	100	94,98		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.900.480		7.900.480		-		-		-		7.900.480	62,5	61,24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		10								10		62,5			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.357.500		1.982.640		5.891.100		3.964.600		7.519.160		19.357.500	100	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		1						1		2		100			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.357.500		1.982.640		5.891.100		3.964.600		7.519.160		19.357.500	100	100		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		1						1		2		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.089.276		-		19.624.765		16.599.800		33.090.145		69.314.710	100	97,5		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12				6		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12				3		3		6		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.448.472		-		1.070.805		483.550		889.845		2.444.200	100	99,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12				6		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.640.804		-		18.553.960		16.116.250		32.200.300		66.870.510	100	97,42		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12				3		3		6		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.626.840		9.927.120		13.082.870		15.399.270		28.036.220		66.445.480	100	91,49		
			terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1						1		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		1		0		1		3		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		4.560.590		7.373.840		6.966.870		11.937.340		30.838.640	100	83,3		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.910.000		1.460.000		-		-		3.450.000		4.910.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1						1		2		100			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.696.840		3.906.530		5.709.030		8.432.400		12.648.880		30.696.840	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		1		0		1		3		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**73.938.440**		-		**15.000.000**		**39.175.600**		**18.812.800**		72.988.400	**100**	**98,72**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5				3,5		3,5		3,5		3,5		100			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			73.938.440		-		15.000.000		39.175.600		18.812.800		72.988.400	100	98,72		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4				1		2		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			73.938.440		-		15.000.000		39.175.600		18.812.800		72.988.400	100	98,72		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4				1		2		1		4		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**33.255.800**		**-**		**-**		**21.300.800**		**11.800.000**		33.100.800	**100**	**99,53**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100						64		99		99		99			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			33.255.800		-		-		21.300.800		11.800.000		33.100.800	100	99,53		
			terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6						3		6		6		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			33.255.800		-		-		21.300.800		11.800.000		33.100.800	100	99,53		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6						3		6		6		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**15.360.000**		**-**		**-**		**5.000.000**		**10.000.000**		15.000.000	**100**	**97,66**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98						33		98		98		100			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)							33		98		98		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15.360.000		-		-		5.000.000		10.000.000		15.000.000	100	97,66		
			Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3						1		3		3		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			15.360.000		-		-		5.000.000		10.000.000		15.000.000	100	97,66		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3						1		3		3		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**10.200.000**		**2.160.000**		**-**		**3.000.000**		**5.000.000**		10.160.000	**100**	**99,61**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		21				29		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			21				29		100		100		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.200.000		2.160.000		-		3.000.000		5.000.000		10.160.000	100	99,61		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		1				1		4		4		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			10.200.000		2.160.000		-		3.000.000		5.000.000		10.160.000	100	99,61		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		1				1		4		4		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.539.960**		**4.249.960**		**4.130.000**		**-**		**2.160.000**		10.539.960	**25**	**100**	KECAMATAN BUNGA MAYANG	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			40		39				100		100		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		40		39				100		179		179			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.539.960		4.249.960		4.130.000		-		2.160.000		10.539.960	25	100		
			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desadan Pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		4								0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6				4						0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4				4						0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4								4		4		100			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.249.960		4.249.960		-		-		-		4.249.960	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4		4								0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			2.065.000		-		2.065.000		-		-		2.065.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6				4						0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.065.000		-		2.065.000		-		-		2.065.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4				4						0		0			
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			2.160.000		-		-		-		2.160.000		2.160.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4								4		4		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.437.655.736**		**286.768.883**		**348.372.541**		**313.815.698**		**268.865.709**		1.217.822.831	**127,27**	**84,71**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.878.120		-		-		-		2.578.120		2.578.120	100	43,86		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.239.060		-		-		-		1.739.060		1.739.060	100	53,69		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.639.060		-		-		-		839.060		839.060	100	31,79		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.310.448.241		259.440.808		322.233.837		273.866.733		256.125.709		1.111.667.087	100	84,83		
			Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		14		14		14		14		14		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.263.288.241		251.580.808		306.513.837		262.076.733		244.335.709		1.064.507.087	100	84,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		14		14		14		14		14		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			47.160.000		7.860.000		15.720.000		11.790.000		11.790.000		47.160.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.269.375		5.604.650		7.500.985		9.163.740		-		22.269.375	100	100		
			Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		2		2		2		0		6		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.450.500		828.750		1.043.750		578.000		-		2.450.500	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6		2		2		2		0		6		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.974.775		1.523.400		2.205.075		4.246.300		-		7.974.775	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.508.100		878.500		1.496.160		1.133.440		-		3.508.100	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.336.000		2.374.000		2.756.000		3.206.000		-		8.336.000	100	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000		12.872.071		4.931.852		12.912.640		5.042.767		35.759.330	100	68,77		
			Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.000.000		872.071		931.852		912.640		1.042.767		3.759.330	100	93,98		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.000.000		12.000.000		4.000.000		12.000.000		4.000.000		32.000.000	100	66,67		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.060.000		8.851.354		13.705.867		17.872.585		5.119.113		45.548.919	400	96,79		
			Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		3		3		3		12		400			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			47.060.000		8.851.354		13.705.867		17.872.585		5.119.113		45.548.919	400	96,79		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		3		3		3		3		12		400			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**34.346.200**		**3.873.700**		**7.421.100**		**3.147.400**		**14.904.000**		29.346.200	**100**	**85,44**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,4		3,4		97,14			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			34.346.200		3.873.700		7.421.100		3.147.400		14.904.000		29.346.200	100	85,44		
			Terlaksana Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			34.346.200		3.873.700		7.421.100		3.147.400		14.904.000		29.346.200	100	85,44		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		1		1		1		1		4		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.775.691**		**3.738.850**		**8.267.076**		**769.765**		-		12.775.691	**100**	**100**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		66,67		66,67		66,67			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.810.515		3.738.850		3.301.900		769.765		-		7.810.515	100	100		
			Terlaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.810.515		3.738.850		3.301.900		769.765		-		7.810.515	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			4.965.176		-		4.965.176		-		-		4.965.176	100	100		
			TerlaksanaPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4.965.176		-		4.965.176		-		-		4.965.176	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		1		1		1		1		4		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**4.200.000**		**-**		**2.200.000**		**2.000.000**		**-**		4.200.000	**100**	**100**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.200.000		-		2.200.000		2.000.000		-		4.200.000	100	100		
			Terlaksana Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			4.200.000		-		2.200.000		2.000.000		-		4.200.000	100	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**2.596.990**		**-**		**253.120**		**2.343.870**		**-**		2.596.990	**100**	**100**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			2.596.990		-		253.120		2.343.870		-		2.596.990	100	100		
			Terlaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2.596.990		-		253.120		2.343.870		-		2.596.990	100	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.236.375**		**1.199.375**		**-**		**-**		**-**		1.199.375	**100**	**97,01**	KECAMATAN HULU SUNGKAI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.236.375		1.199.375		-		-		-		1.199.375	100	97,01		
			Terlaksana Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.236.375		1.199.375		-		-		-		1.199.375	100	97,01		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.886.064.554**		**149.329.547**		**39.073.175**		**25.500.750**		**83.313.855**		297.217.327	**88,46**	**15,76**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		75		75		100			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.376.640		3.500.000		-		727.320		727.320		4.954.640	100	92,15		
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.376.640		3.500.000		-		727.320		727.320		4.954.640	100	92,15		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.713.314.524		121.310.507		8.340.000		8.340.000		21.756.440		159.746.947	100	9,32		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22		22		22		22		22		22		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.660.176.924		112.970.507		-		-		-		112.970.507	100	6,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22		22		22		22		22		22		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			53.137.600		8.340.000		8.340.000		8.340.000		21.756.440		46.776.440	100	88,03		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			39.028.070		6.249.780		3.999.700		3.166.350		18.281.926		31.697.756	80	81,22		
			Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.081.770		-		810.700		548.350		-		1.359.050	100	33,3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.890.380		4.268.780		-		-		621.600		4.890.380	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.824.420		1.981.000		2.662.500		868.000		6.310.326		11.821.826	100	99,98		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.205.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			14.026.500		-		526.500		1.750.000		11.350.000		13.626.500	100	97,15		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.395.490		9.752.300		11.703.058		5.702.392		24.263.604		51.421.354	100	81,11		
			Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.088.000		752.300		184.268		720.592		1.456.704		3.113.864	100	51,15		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			57.307.490		9.000.000		11.518.790		4.981.800		22.806.900		48.307.490	100	84,3		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.949.830		8.516.960		15.030.417		7.564.688		18.284.565		49.396.630	83,33	76,05		
			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		1		50			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			47.060.000		4.806.880		10.079.717		5.890.628		13.760.127		34.537.352	100	73,39		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		1		1		1		3		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.346.515		3.710.080		907.500		-		4.524.438		9.142.018	50	88,36		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		1		50			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.543.315		-		4.043.200		1.674.060		-		5.717.260	100	75,79		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**51.530.980**		**8.140.960**		**5.170.960**		**6.050.000**		**19.284.320**		38.646.240	**100**	**75**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,2		3,2		91,43			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			51.530.980		8.140.960		5.170.960		6.050.000		19.284.320		38.646.240	100	75		
			Telaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3		0		1		1		1		3		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			51.530.980		8.140.960		5.170.960		6.050.000		19.284.320		38.646.240	100	75		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		1		1		1		3		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**30.069.315**		-		**2.369.865**		**12.949.250**		**5.000.000**		20.319.115	**100**	**67,57**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		85		85		85			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14.584.065		-		2.369.865		-		5.000.000		7.369.865	100	50,53		
			Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.584.065		-		2.369.865		-		5.000.000		7.369.865	100	50,53		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			9.729.250		-		-		8.579.250		-		8.579.250	100	88,18		
			Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.729.250		-		-		8.579.250		-		8.579.250	100	88,18		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			5.756.000		-		-		4.370.000		-		4.370.000	100	75,92		
			Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		0		0		0		30		30		100			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			5.756.000		-		-		4.370.000		-		4.370.000	100	75,92		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30		0		0		0		30		30		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.195.000**		-		-		-		**6.195.000**		6.195.000	**100**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		98		98		100			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.195.000		-		-		-		6.195.000		6.195.000	100	100		
			Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			6.195.000		-		-		-		6.195.000		6.195.000	100	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**29.783.100**		-		**2.386.000**		-		**13.880.000**		16.266.000	**66,67**	**54,61**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		0		0		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		85		85		85			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			29.783.100		-		2.386.000		-		13.880.000		16.266.000	66,67	54,61		
			berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	30		0		30		0		0		30		100			
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			5.756.000		-		2.386.000		-		-		2.386.000	100	41,45		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	30		0		30		0		0		30		100			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan			16.380.000		-		-		-		13.880.000		13.880.000	100	84,74		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			7.647.100		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.731.500**		**-**		**-**		**-**		**4.023.000**		4.023.000	**50**	**37,49**	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				"Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa"	100		0		0		0		80		80		80			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.731.500		-		-		-		4.023.000		4.023.000	50	37,49		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			3.708.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			7.023.000		-		-		-		4.023.000		4.023.000	100	57,28		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.197.985.291**		**527.533.521**		**570.674.816**		**150.587.203**		**369.274.885**		1.618.070.425	**100**	**73,62**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67		67		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75								75		75		100			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.642.500		1.792.500		1.703.500		202.500		935.500		4.634.000	0	99,82		
			terlaksananya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0		2		0		2		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.642.500		1.792.500		1.703.500		202.500		935.500		4.634.000	0	99,82		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0		2		0		2		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.069.448.805		504.418.921		561.158.016		132.777.603		335.608.685		1.533.963.225	100	74,12		
			terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		0		0		23		0		23		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.007.048.805		491.478.921		545.558.016		119.717.603		314.808.685		1.471.563.225	100	73,32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23		0		0		23		0		23		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			62.400.000		12.940.000		15.600.000		13.060.000		20.800.000		62.400.000	0	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.435.940		3.519.700		1.313.500		-		6.820.000		11.653.200	100	49,72		
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0		0		12		0		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		2		0		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		3		0		3		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.425.720		1.019.700		1.313.500		-		-		2.333.200	100	96,19		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.225.220		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.035.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.750.000		2.500.000		-		-		6.820.000		9.320.000	100	95,59		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		12		0		12		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.438.046		9.900.000		500.000		10.100.000		10.300.000		30.800.000	100	48,55		
			tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		12		0		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.030.046		-		500.000		200.000		400.000		1.100.000	100	36,3		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			60.408.000		9.900.000		-		9.900.000		9.900.000		29.700.000	100	49,17		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.020.000		7.902.400		5.999.800		7.507.100		15.610.700		37.020.000	100	100		
			terlaksanaya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		7.902.400		5.999.800		7.507.100		15.610.700		37.020.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		1		0		1		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**24.034.400**		**2.500.000**		**2.217.500**		**9.372.200**		**3.594.300**		17.684.000	**100**	**73,58**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5								3,3		3,3		94,29			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24.034.400		2.500.000		2.217.500		9.372.200		3.594.300		17.684.000	100	73,58		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24.034.400		2.500.000		2.217.500		9.372.200		3.594.300		17.684.000	100	73,58		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		0		3		0		3		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.509.422**		**1.842.050**		**4.418.850**		**-**		**473.700**		6.734.600	**0**	**49,85**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100								66,67		66,67		66,67			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6.737.622		1.842.050		4.418.850		-		473.700		6.734.600	0	99,96		
			terlaksananya pelaksanaaan kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6.737.622		1.842.050		4.418.850		-		473.700		6.734.600	0	99,96		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			6.771.800		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			6.771.800		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98								48,53		48,53		49,52			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			2.500.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		50		50		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.250.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1.250.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		0		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		22,22		22,22		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.250.000		-		-		-		-		-	0	0		
			terlaksananya kegiatan pembinaan dan pegawasan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1.250.000		-		-		-		-		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.903.203.877**		**431.732.436**		**518.182.620**		**218.099.009**		**162.360.406**		1.330.374.471	**91,15**	**69,9**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		61.7		61.7		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.463.000		1.085.200		-		1.377.800		-		2.463.000	150	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		3		3		150			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.463.000		1.085.200		-		1.377.800		-		2.463.000	150	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		3		3		150			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.664.207.367		388.332.436		457.770.120		156.993.527		140.227.606		1.143.323.689	70	68,7		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		14		14		14		14		14		93,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		0		0		0		1		1		16,67			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.624.782.367		382.432.436		445.970.120		148.143.527		127.352.606		1.103.898.689	93,33	67,94		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		14		14		14		14		14		93,33			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.400.000		5.900.000		11.800.000		8.850.000		8.850.000		35.400.000	16,67	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6		0		0		0		1		1		16,67			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.025.000		-		-		-		4.025.000		4.025.000	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			94.884.810		20.514.800		33.170.000		30.845.970		10.307.580		94.838.350	81,25	99,95		
			Terlasananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.727.660		971.300		5.417.060		5.714.830		624.470		12.727.660	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		2		2		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.143.200		3.267.000		6.599.890		9.145.180		1.131.130		20.143.200	100	100		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.013.950		4.276.500		8.353.050		8.985.960		3.351.980		24.967.490	100	99,81		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37.000.000		12.000.000		12.800.000		7.000.000		5.200.000		37.000.000	25	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.214.000		13.300.000		8.000.000		6.959.512		6.825.220		35.084.732	100	41,17		
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.398.000		-		-		959.512		825.220		1.784.732	100	52,52		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.816.000		13.300.000		8.000.000		6.000.000		6.000.000		33.300.000	100	40,7		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.434.700		8.500.000		19.242.500		21.922.200		5.000.000		54.664.700	100	96,86		
			Terkasananya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		8.500.000		10.000.000		11.750.000		5.000.000		35.250.000	100	95,22		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.315.500		-		3.613.300		4.702.200		-		8.315.500	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.099.200		-		5.629.200		5.470.000		-		11.099.200	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**22.052.800**		**-**		**-**		**10.000.000**		**8.845.200**		18.845.200	**33,33**	**85,45**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,4		3,4		97,14			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.000.000		-		-		10.000.000		-		10.000.000	100	100		
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.000.000		-		-		10.000.000		-		10.000.000	100	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	3		0		0		0		3		3		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			8.035.200		-		-		-		4.914.000		4.914.000	0	61,16		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8.035.200		-		-		-		4.914.000		4.914.000	0	61,16		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			4.017.600		-		-		-		3.931.200		3.931.200	0	97,85		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4.017.600		-		-		-		3.931.200		3.931.200	0	97,85		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4		0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.000**		**-**		**5.000.000**		**-**		**5.000.000**		10.000.000	**100**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000	100	100		
			Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000	100	100		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			5.000.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	100	100		
			Tersedianya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5.000.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**4.800.000**		**-**		**-**		**-**		**4.800.000**		4.800.000	**0**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		100		100		102,04			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.800.000		-		-		-		4.800.000		4.800.000	0	100		
			Terselenggaranya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			4.800.000		-		-		-		4.800.000		4.800.000	0	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.000.000**		-		-		-		**1.000.000**		1.000.000	**0**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.000.000		-		-		-		1.000.000		1.000.000	0	100		
			Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1.000.000		-		-		-		1.000.000		1.000.000	0	100		
			Terlaksanaya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**2.787.500**		-		**2.787.500**		-		-		2.787.500	**100**	**100**	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2.787.500		-		2.787.500		-		-		2.787.500	100	100		
			Terlaksananya Dokumen Yang di Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2.787.500		-		2.787.500		-		-		2.787.500	100	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	4		0		0		0		4		4		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.306.658.922**		**43.110.716**		**31.523.792**		**72.340.437**		**81.542.238**		228.517.184	**43,37**	**9,91**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		617		617		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.070.050		-		-		-		4.070.050		4.070.050	75	100		
			tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		3		3		75			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.070.050		-		-		-		4.070.050		4.070.050	75	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		0		3		3		75			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.036.745.352		7.580.476		7.580.542		15.160.437		15.160.418		45.481.874	51,79	2,23		
			terlaksananya administrasi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21		5		5		5		6		6		28,57			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		0		1		1		1		3		75			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.991.265.352		476		542		437		418		1.874	28,57	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21		5		5		5		6		6		28,57			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.480.000		7.580.000		7.580.000		15.160.000		15.160.000		45.480.000	75	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		0		1		1		1		3		75			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.422.185		17.633.550		15.402.385		34.384.930		43.874.055		111.294.920	25,3	85,33		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7		0		0		0		1		1		14,29			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		1		1		1		3		50			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		0		1		1		1		3		37,5			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		1		1		16,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		1		1		25			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		1		1		1		1		8,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.390.700		789.250		1.280.570		2.649.730		4.617.690		9.337.240	14,29	99,43		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7		0		0		0		1		1		14,29			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.190.665		2.853.790		3.323.195		6.847.640		10.346.285		23.370.910	50	92,78		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		1		1		1		3		50			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.519.970		840.510		1.583.120		3.502.560		6.542.330		12.468.520	37,5	99,59		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		0		1		1		1		3		37,5			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.740.000		1.515.000		-		2.875.000		6.837.500		11.227.500	16,67	81,71		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		1		1		16,67			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.280.850		635.000		2.215.500		3.060.000		6.855.250		12.765.750	25	96,12		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		1		1		25			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			56.300.000		11.000.000		7.000.000		15.450.000		8.675.000		42.125.000	8,33	74,82		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		1		1		1		1		8,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.580.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.580.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.250.000		9.120.000		630.000		1.050.000		3.360.000		14.160.000	81,25	24,31		
			Tersedianya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		0		1		1		1		3		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		1		1		1		2		5		62,5			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.050.000		420.000		630.000		1.050.000		3.360.000		5.460.000	100	90,25		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		0		1		1		1		3		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.200.000		8.700.000		-		-		-		8.700.000	62,5	16,67		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		1		1		1		2		5		62,5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.591.335		8.776.690		7.910.865		21.745.070		15.077.715		53.510.340	57,14	99,85		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		0		1		1		14,29			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		8.776.690		7.910.865		13.568.462		6.729.672		36.985.689	14,29	99,91		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.571.335		-		-		8.176.608		8.348.043		16.524.651	100	99,72		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		1		1		2		100			
Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**10.343.350**		**2.944.530**		**-**		**-**		**5.673.420**		8.617.950	**21,43**	**83,32**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,25		3,25		92,86			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.343.350		2.944.530		-		-		5.673.420		8.617.950	21,43	83,32		
			Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	14		0		1		1		1		3		21,43			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.343.350		2.944.530		-		-		5.673.420		8.617.950	21,43	83,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	14		0		1		1		1		3		21,43			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**11.994.530**		**244.530**		**-**		**4.660.000**		**4.900.000**		9.804.530	**42,86**	**81,74**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	0		0		0		0		61		61		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			11.994.530		244.530		-		4.660.000		4.900.000		9.804.530	42,86	81,74		
			Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		0		1		1		1		3		42,86			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			11.994.530		244.530		-		4.660.000		4.900.000		9.804.530	42,86	81,74		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		0		1		1		1		3		42,86			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.750.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		40		40		40,82			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.750.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5										0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			6.750.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5										0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**12.959.600**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		76		76		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		76		76		76			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.959.600		-		-		-		-		-	0	0		
			berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	25										0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12.959.600		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	25										0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**25.312.425**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		0		100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			25.312.425		-		-		-		-		-	0	0		
			Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	17										0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	7										0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			15.155.350		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	17										0		0			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			10.157.075		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	7										0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.801.828.156**		**398.034.119**		**353.598.359**		**473.775.725**		**317.909.398**		1.543.317.601	**57,45**	**85,65**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		65		65		86,67			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		66.9		66.9		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.811.200		1.860.000		1.688.000		1.688.000		1.534.000		6.770.000	75	99,4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		3		0		3		75			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.811.200		1.860.000		1.688.000		1.688.000		1.534.000		6.770.000	75	99,4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0		3		0		3		75			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.652.980.194		367.901.119		317.391.359		448.315.725		294.917.398		1.428.525.601	63,33	86,42		
			Tersusunnya kinerja laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		12		12		12		12		12		26,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.544.020.194		349.741.119		311.561.359		442.485.725		294.917.398		1.398.705.601	26,67	90,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45		12		12		12		12		12		26,67			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			108.960.000		18.160.000		5.830.000		5.830.000		-		29.820.000	100	27,37		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1		1		1		1		4		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			64.920.070		11.753.200		11.768.900		11.569.300		7.100.000		42.191.400	79,17	64,99		
			Tercapainya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		0		0		6		0		6		75			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		20		20		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.088.780		1.968.000		1.842.500		1.850.000		1.345.000		7.005.500	100	98,83		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.465.770		1.124.200		1.246.000		1.093.500		-		3.463.700	75	99,94		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		0		0		6		0		6		75			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.583.520		2.781.000		2.680.400		2.625.800		2.402.000		10.489.200	100	99,11		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.382.000		5.880.000		6.000.000		6.000.000		3.353.000		21.233.000	100	99,3		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		20		20		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.400.000		-		-		-		-		-	100	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.153.692		7.106.640		6.801.014		5.399.876		5.034.302		24.341.832	100	96,77		
			Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		0		0		3		0		3		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		5		5		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.083.692		856.440		307.564		216.376		439.752		1.820.132	100	87,35		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		0		0		3		0		3		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.070.000		6.250.200		6.493.450		5.183.500		4.594.550		22.521.700	100	97,62		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		5		5		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.963.000		9.413.160		15.949.086		6.802.824		9.323.698		41.488.768	25	79,84		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		7		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	9		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			42.040.000		7.144.160		11.999.086		3.098.824		9.323.698		31.565.768	0	75,09		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		7		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	9		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.923.000		2.269.000		3.950.000		3.704.000		-		9.923.000	100	100		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**20.590.400**		**1.900.000**		**1.750.000**		**11.494.000**		-		15.144.000	**100**	**73,55**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,4		3,4		97,14			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.590.400		1.900.000		1.750.000		11.494.000		-		15.144.000	100	73,55		
			Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	14		0		0		14		0		14		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.590.400		1.900.000		1.750.000		11.494.000		-		15.144.000	100	73,55		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	14		0		0		14		0		14		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**26.296.500**		**4.467.000**		**11.913.000**		-		**1.008.000**		17.388.000	**734,29**	**66,12**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		75		75		75			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			19.913.500		2.608.000		10.236.000		-		1.008.000		13.852.000	1428,57	69,56		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		0		0		0		100		100		1428,57			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			19.913.500		2.608.000		10.236.000		-		1.008.000		13.852.000	1428,57	69,56		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		0		0		0		100		100		1428,57			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			6.383.000		1.859.000		1.677.000		-		-		3.536.000	40	55,4		
			Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		2		0		2		40			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			6.383.000		1.859.000		1.677.000		-		-		3.536.000	40	55,4		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		2		0		2		40			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7.600.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**1.800.000**		**-**		5.800.000	**75**	**76,32**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		74		74		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		74		74		75,51			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.600.000		2.000.000		2.000.000		1.800.000		-		5.800.000	75	76,32		
			Tercapainya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		3		0		3		75			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			7.600.000		2.000.000		2.000.000		1.800.000		-		5.800.000	75	76,32		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		3		0		3		75			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**2.060.500**		**600.000**		**1.400.000**		**-**		**-**		2.000.000	**40**	**97,06**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		40		40		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		40		40		40			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			2.060.500		600.000		1.400.000		-		-		2.000.000	40	97,06		
			Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	25		0		0		10		0		10		40			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2.060.500		600.000		1.400.000		-		-		2.000.000	40	97,06		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	25		0		0		10		0		10		40			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ABUNG KUNANG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	7		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	7		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.210.996.472**		**178.519.091**		**46.900.000**		**33.203.000**		**42.975.000**		301.597.091	**73,64**	**13,64**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		62.5		62.5		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah Kepuasan Layanan Kecamatan (%)	100		0		0		0		0		0		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.438.125		3.200.000		2.625.000		1.350.000		-		7.175.000	0	85,03		
			tersusunnya dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.438.125		3.200.000		2.625.000		1.350.000		-		7.175.000	0	85,03		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.027.667.097		145.726.591		7.950.000		7.950.000		10.600.000		172.226.591	100	8,49		
			Terlaksananya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		25		25		25		25		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.995.867.097		140.426.591		-		-		-		140.426.591	100	7,04		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			31.800.000		5.300.000		7.950.000		7.950.000		10.600.000		31.800.000	100	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			56.451.218		12.480.500		18.509.000		10.718.000		11.665.000		53.372.500	77,5	94,55		
			Terwujudnya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	40		0		0		40		0		40		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	40		0		0		40		0		40		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		0		5		0		5		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.753.860		1.575.000		1.200.000		1.200.000		1.400.000		5.375.000	100	93,42		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	40		0		0		40		0		40		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.099.200		2.025.500		1.250.000		950.000		1.410.000		5.635.500	100	92,4		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	40		0		0		40		0		40		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.098.158		6.380.000		6.059.000		4.568.000		2.855.000		19.862.000	10	89,88		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		0		5		0		5		10			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.500.000		2.500.000		10.000.000		4.000.000		6.000.000		22.500.000	100	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.610.000		11.112.000		3.416.000		3.285.000		3.210.000		21.023.000	100	29,77		
			Terlaksananya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		12		0		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.610.000		612.000		1.166.000		1.035.000		960.000		3.773.000	100	49,58		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		0		0		12		0		12		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			63.000.000		10.500.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		17.250.000	100	27,38		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.830.032		6.000.000		14.400.000		9.900.000		17.500.000		47.800.000	50	99,94		
			Terwujudny Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			37.020.000		6.000.000		9.000.000		6.000.000		16.000.000		37.000.000	0	99,95		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.810.032		-		5.400.000		3.900.000		1.500.000		10.800.000	100	99,91		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		2		0		2		100			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**40.101.600**		-		**540.000**		**31.095.800**		-		31.635.800	**100**	**78,89**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		3,2		3,2		91,43			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			40.101.600		-		540.000		31.095.800		-		31.635.800	100	78,89		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			40.101.600		-		540.000		31.095.800		-		31.635.800	100	78,89		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2		0		0		2		0		2		100			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.000.000**		**6.000.000**		**5.000.000**		-		**5.000.000**		16.000.000	**50**	**100**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		33,33		33,33		33,33			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			11.000.000		6.000.000		-		-		5.000.000		11.000.000	100	100		
			Tersedianya Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			11.000.000		6.000.000		-		-		5.000.000		11.000.000	100	100		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			5.000.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	0	100		
			Terlaksananya Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5.000.000		-		5.000.000		-		-		5.000.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		0		0		4		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**5.002.000**		-		**600.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		4.600.000	**100**	**91,96**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.002.000		-		600.000		2.000.000		2.000.000		4.600.000	100	91,96		
			Tersedianya terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7		0		0		7		0		7		100			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			5.002.000		-		600.000		2.000.000		2.000.000		4.600.000	100	91,96		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7		0		0		7		0		7		100			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**12.000.000**		**-**		**3.500.000**		**-**		**8.500.000**		12.000.000	**100**	**100**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		85,71		85,71		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.000.000		-		3.500.000		-		8.500.000		12.000.000	100	100		
			Tersedianya Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12.000.000		-		3.500.000		-		8.500.000		12.000.000	100	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**17.467.025**		**4.907.500**		**3.460.000**		**1.542.000**		**4.175.000**		14.084.500	**100**	**80,63**	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.467.025		4.907.500		3.460.000		1.542.000		4.175.000		14.084.500	100	80,63		
			Terlaksananya Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			17.467.025		4.907.500		3.460.000		1.542.000		4.175.000		14.084.500	100	80,63		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	2		0		0		2		0		2		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.841.075.356**		**443.055.529**		**473.665.446**		**345.013.926**		**353.569.072**		1.615.303.973	**29,82**	**87,74**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	75		0		0		0		67,73		67,73		90,31			
				Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		67.73		67.73		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.677.420		1.864.400		-		647.000		166.020		2.677.420	73,33	100		
			Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		0		1		2		66,67			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		3		0		3		300			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1										0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			594.520		431.500		-		-		163.020		594.520	66,67	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		0		1		2		66,67			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			807.900		807.900		-		-		-		807.900	0	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			325.000		-		-		322.000		3.000		325.000	300	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		3		0		3		300			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			625.000		625.000		-		-		-		625.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			325.000		-		-		325.000		-		325.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.706.007.536		405.188.429		455.565.446		316.383.926		338.706.572		1.515.844.373	50	88,85		
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22										0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1										0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		4		0		0		0		4		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.650.880.636		402.671.529		433.665.446		316.383.926		307.996.572		1.460.717.473	0	88,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22										0		0			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			52.560.000		-		21.900.000		-		30.660.000		52.560.000	0	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1										0		0			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.564.500		1.514.500		-		-		50.000		1.564.500	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.002.400		1.002.400		-		-		-		1.002.400	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0		0		0		4		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.466.400		7.243.700		-		1.074.000		5.148.700		13.466.400	0	100		
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12										0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2										0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3										0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12										0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			837.500		557.500		-		205.000		75.000		837.500	0	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12										0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.725.000		1.725.000		-		-		-		1.725.000	0	100		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2										0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.403.900		3.461.200		-		869.000		73.700		4.403.900	0	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3										0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.500.000		1.500.000		-		-		5.000.000		6.500.000	0	100		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12										0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3										0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1										0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3										0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1										0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.884.000		13.245.000		6.880.000		13.760.000		7.395.000		41.280.000	0	53,69		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12										0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12										0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.180.000		1.545.000		1.030.000		2.060.000		1.545.000		6.180.000	0	100		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12										0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			70.704.000		11.700.000		5.850.000		11.700.000		5.850.000		35.100.000	0	49,64		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12										0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.040.000		15.514.000		11.220.000		13.149.000		2.152.780		42.035.780	0	99,99		
			Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1										0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2										0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			42.040.000		15.514.000		11.220.000		13.149.000		2.152.780		42.035.780	0	99,99		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1										0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2										0		0			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**23.478.400**		**3.469.600**		**-**		**15.515.000**		**4.492.800**		23.477.400	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	
			Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)	3,5		0		0		0		87,44		87,44		2498,29			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.478.400		3.469.600		-		15.515.000		4.492.800		23.477.400	0	100		
			Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1										0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.478.400		3.469.600		-		15.515.000		4.492.800		23.477.400	0	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1										0		0			
	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.520.000**		**8.500.000**		**-**		**5.400.000**		**4.620.000**		18.520.000	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	
			Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	100		0		0		0		33,33		33,33		33,33			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18.520.000		8.500.000		-		5.400.000		4.620.000		18.520.000	0	100		
			Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1										0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1										0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.600.000		3.600.000		-		5.000.000		-		8.600.000	0	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1										0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.920.000		4.900.000		-		400.000		4.620.000		9.920.000	0	100		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1										0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5										0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5										0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**4.400.000**		**750.000**		**-**		**-**		**3.650.000**		4.400.000	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	98		0		0		0		100		100		102,04			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.400.000		750.000		-		-		3.650.000		4.400.000	0	100		
			Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12										0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			4.400.000		750.000		-		-		3.650.000		4.400.000	0	100		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12										0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**9.720.000**		**1.400.000**		**-**		**2.320.000**		**6.000.000**		9.720.000	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik	Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan (%)			0		0		0		100		100		0			
				Persentase konflik yang tertangani (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9.720.000		1.400.000		-		2.320.000		6.000.000		9.720.000	0	100		
			terlaksananya urusan Pemerintahan Umum yang baik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12										0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			9.720.000		1.400.000		-		2.320.000		6.000.000		9.720.000	0	100		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12										0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**566.000**		**566.000**		**-**		**-**		**-**		566.000	**0**	**100**	KECAMATAN ABUNG TENGAH	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa (%)			0		0		0		0		0		0			
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			566.000		566.000		-		-		-		566.000	0	100		
			Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1										0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4										0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			566.000		566.000		-		-		-		566.000	0	100		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	1										0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	4										0		0			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**12.301.162.498**		**914.171.937**		**2.103.489.184**		**3.487.807.847**		**4.458.155.838**		10.963.624.806	**61,67**	**89,13**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.756.168.471**		**509.171.937**		**821.143.054**		**1.151.183.591**		**766.213.718**		3.247.712.300	**47,73**	**86,46**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan	Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)			0		0		0		63.2		63.2		0			
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (%)	80		28		0		22		0		50		62,5			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.438.750		5.047.950		4.390.800		-		-		9.438.750	37,5	100		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		0		1		50			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		1		0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.323.250		1.321.650		1.001.600		-		-		2.323.250	50	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		0		1		50			
		8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.414.000		1.375.550		1.038.450		-		-		2.414.000	0	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0			
		8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.350.750		-		2.350.750		-		-		2.350.750	0	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.350.750		2.350.750		-		-		-		2.350.750	100	100		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.742.865.366		430.917.008		730.076.110		800.996.802		565.288.633		2.527.278.553	50	92,14		
			Tersedia nya Dokumen Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		25		25		25		25		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4		4		0		0		0		0		0			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.735.249.366		425.940.258		730.076.110		798.357.552		565.288.633		2.519.662.553	100	92,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25		25		25		25		25		25		100			
		8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.425.500		2.425.500		-		-		-		2.425.500	0	100		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1		0		0		0		0		0			
		8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.639.250		-		-		2.639.250		-		2.639.250	100	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.551.250		2.551.250		-		-		-		2.551.250	0	100		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		0		0		0		0		0			
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.294.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			42.294.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.683.650		1.805.210		-		4.878.440		-		6.683.650	0	100		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		5		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2.053.200		647.600		-		1.405.600		-		2.053.200	0	100		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		5		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.630.450		1.157.610		-		3.472.840		-		4.630.450	0	100		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			99.910.205		14.165.740		6.143.200		13.855.780		2.469.500		36.634.220	50	36,67		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		2		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		5		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5										0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		5		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5		1		0		4		0		5		100			
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.469.500		-		-		-		2.469.500		2.469.500	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		0		0		0		2		2		100			
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.086.525		3.021.600		6.143.200		-		-		9.164.800	100	75,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0		2		100			
		8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.465.180		616.200		-		1.848.980		-		2.465.180	0	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		5		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.385.000		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5										0		0			
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.700.000		2.850.000		-		2.850.000		-		5.700.000	0	100		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		5		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			56.804.000		7.677.940		-		9.156.800		-		16.834.740	100	29,64		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		0		4		0		5		100			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465.059.000		48.536.029		80.532.944		215.907.569		82.910.585		427.887.127	75	92,01		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		0		0		0		1		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.285.000		1.081.100		-		3.203.900		-		4.285.000	0	100		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		1		0		0		0			
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			76.776.000		9.671.729		11.056.144		13.825.479		40.631.085		75.184.437	100	97,93		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		0		0		0		1		1		100			
		8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.100.000		1.183.200		5.916.800		-		-		7.100.000	100	100		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1		0		1		0		0		1		100			
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			376.898.000		36.600.000		63.560.000		198.878.190		42.279.500		341.317.690	100	90,56		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			389.917.500		8.700.000		-		115.545.000		115.545.000		239.790.000	100	61,5		
			Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0		4		4		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0										0		0			
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			240.060.000		8.700.000		-		115.545.000		115.545.000		239.790.000	100	99,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0		4		4		100			
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			149.857.500		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0										0		0			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**958.678.586**		**-**		**70.577.130**		**722.224.256**		**146.788.000**		939.589.386	**100**	**98,01**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)			0		0		0		50		50		0			
				Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	46,67		0		15		15		16,67		46,67		100			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			958.678.586		-		70.577.130		722.224.256		146.788.000		939.589.386	100	98,01		
			Tersusunnya kebijakan dan regulasi teknis yang mendukung pembinaan ideologi Pancasila di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	100		0		0		0		100		100		100			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	300		0		0		300		0		300		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			159.172.500		-		-		-		146.788.000		146.788.000	100	92,22		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	100		0		0		0		100		100		100			
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			799.506.086		-		70.577.130		722.224.256		-		792.801.386	100	99,16		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	300		0		0		300		0		300		100			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**1.266.334.250**		**-**		**1.131.519.000**		**21.900.000**		**33.928.000**		1.187.347.000	**100**	**93,76**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	"Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik"	44,44		0		13		13		14		40		90,01			
				Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			0		0		0		77,78		77,78		0			
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.266.334.250		-		1.131.519.000		21.900.000		33.928.000		1.187.347.000	100	93,76		
			Tersusunnya kebijakan dan dokumen teknis yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	500		0		0		0		500		500		100				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	40		0		0		0		40		40		100				
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			59.234.000		-		-		-		27.508.000		27.508.000	100	46,44		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	500		0		0		0		500		500		100				
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.207.100.250		-		1.131.519.000		21.900.000		6.420.000		1.159.839.000	100	96,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	40		0		0		0		40		40		100			
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**1.599.518.250**		**405.000.000**		-		**245.000.000**		**929.078.250**		1.579.078.250	**100**	**98,72**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)			0		0		0		47		47		0			
				Persentase organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibina (%)	100		0		0		0		47		47		47			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			1.599.518.250		405.000.000		-		245.000.000		929.078.250		1.579.078.250	100	98,72		
			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ormas secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	5		0		0		0		5		5		100			
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas			1.599.518.250		405.000.000		-		245.000.000		929.078.250		1.579.078.250	100	98,72		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	5		0		0		0		5		5		100			
Kehidupan Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang		**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**12.427.000**		-		-		-		**124.250**		124.250	**100**	**1**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat			0		0		0		90		90		0			
				Persentase kebijakan teknis pembinaan ketahanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	85		0		0		0		0		0		0			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			12.427.000		-		-		-		124.250		124.250	100	1		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi secara mandiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	100		0		0		0		100		100		100			
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			12.427.000		-		-		-		124.250		124.250	100	1		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	100		0		0		0		100		100		100			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**4.708.035.941**		-		**80.250.000**		**1.347.500.000**		**2.582.023.620**		4.009.773.620	**100**	**85,17**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan konflik sosial yang terselesaikan. (%)	33,33		0		0		0		33,33		33,33		100			
				Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)			0		0		0		100		100		0			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4.708.035.941		-		80.250.000		1.347.500.000		2.582.023.620		4.009.773.620	100	85,17		
			Tersusunnya kebijakan teknis dan SOP kewaspadaan nasional dan penanganan konflik yang aplikatif	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	0										0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	500		0		0		0		500		500		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			123.592.050		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0										0		0			
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			4.062.912.871		-		-		1.285.250.000		2.420.512.600		3.705.762.600	100	91,21		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500		0		0		0		500		500		100			
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			521.531.020		-		80.250.000		62.250.000		161.511.020		304.011.020	100	58,29		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1		0		0		0		1		1		100			
				JUMLAH		**1.814.806.331.444**		**248.895.633.039**		**246.248.808.857**		**263.613.081.858**		**641.947.711.277**		**1.400.705.235.031**				
				Rata-rata capaian kinerja (%)													**100,48**	**77,18**		**SUB KEGIATAN**
				Predikat kinerja													**Sangat tinggi**	**Tinggi**		
				Rata-rata capaian kinerja (%)													**87,39**			**PROGRAM**
				Predikat kinerja													**Tinggi**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antarbidang dan lintas perangkat daerah mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Ketersediaan dukungan regulasi, anggaran, serta sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam pencapaian target kinerja. Sinergi antara perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat mendorong efektivitas pelaksanaan program sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Keterbatasan kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Perubahan regulasi, kendala administrasi, dan keterlambatan proses pengadaan maupun penyampaian data menyebabkan sebagian kegiatan belum terlaksana sesuai jadwal. Faktor eksternal seperti kondisi geografis, cuaca, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan turut memengaruhi pencapaian target kinerja.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala guna mempercepat pencapaian target kinerja. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda melalui penyusunan rencana aksi, pengendalian jadwal, dan penyelesaian hambatan administratif. Meningkatkan kualitas data pelaporan serta memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala guna mempercepat pencapaian target kinerja. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda melalui penyusunan rencana aksi, pengendalian jadwal, dan penyelesaian hambatan administratif. Meningkatkan kualitas data pelaporan serta memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

1. Aspek Geografi

Pada aspek geografi, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara, yaitu belum terwujudnya Kabupaten yang berwawasan lingkungan, belum optimalnya penataan ruang wilayah, belum optimalnya pengelolaan pertanahan serta belum optimalnya mitigasi bencana. Berikut penjabaran dari permasalahan pokok tersebut :

a. Belum terwujudnya Kabupaten yang berwawasan lingkungan, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas lingkungan hidup karena menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup; masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH); sering terjadi bencana banjir di daerah dekat aliran sungai yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan prilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai; belum maksimalnya pengelolaan sampah di TPA; belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai akibat dari belum teridentifikasinya keanekaragaman hayati; belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan; serta belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan limbah.
b. Belum optimalnya penataan ruang wilayah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang karena proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang hingga pada penetapannya membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang, serta masih adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan tata ruang; (b) belum optimalnya pengendalian dan pengawasan tata ruang sebagai akibat dari peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi kepada aspek pemanfaatan ruang/kajian pertimbangan untuk KKPR, dimana aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal; (c) belum optimalnya dukungan pada terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang karena belum optimalnya dukungan regulasi tata ruang, rendahnya kepedulian masyarakat akan ketertiban dalam pemanfaatan ruang, kurangnya dukungan pada aspek sumber daya manusia dan kebutuhan anggaran serta sarana dan prasarana, serta masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh UMK yang izinnya melalui aplikasi OSS.
c. Belum optimalnya pengelolaan pertanahan, yang disebabkan oleh (a) masih adanya ketidakjelasan status tanah dan kepemilikannya serta adanya tumpang tindih tanah desa dan warga; (b) terjadinya alih fungsi lahan sebagai akibat dari masih banyaknya tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, namun belum dilengkapi dengan izin; dan (c) belum optimalnya digitalisasi urusan pertanahan karena peta yang digunakan sebagai dasar penyelesaian urusan pertanahan belum selaras dengan peta desa, BPN maupun di Kabupaten.
d. Belum optimalnya mitigasi bencana, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai akibat dari belum optimalnya command center serta early warning systems, dimana peran command

center sangat krusial karena informasi dan komando ketika terjadi bencana atau pencegahan bencana terpusat dari command center; kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan tangguh bencana; sarana dan prasarana (peralatan penanggulangan bencana) yang dimiliki BPBD belum memadai; belum optimalnya kuantitas dan kompensasi sumber daya aparatur; (b) belum optimalnya penanganan bencana kebakaran sebagai akibat dari kurangnya wilayah manajemen kebakaran (WMK), terbatasnya personil pemadam kebakaran, sarana dan prasaranan penanggulangan kebakaran yang dimiliki masih belum memadai.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat tujuh permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara, terdiri dari relatif tingginya kemiskinan, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan, serta belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga. Berikut penjelasan dari masing-masing permasalahan pokok tersebut :

a. Relatif tingginya kemiskinan, yang disebabkan oleh (a) tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia sebagai akibat dari belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah; (b) rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak sebagai akibat kurangnya kesempatan produktif; (c) belum optimalnya kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitasi, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar di dalam dan/atau di luar panti sebagai akibat belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial.
b. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan program link and match ketenagakerjaan, serta belum optimalnya pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK; (b) belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi karena kurangnya daya tarik di daerah tujuan transmigrasi; dan (c) rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas tenaga kerja yang rendah, dimana jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh lulusan SD dan SMP.
c. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang disebabkan oleh (a) menurunnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan daerah sebagai akibat dari menurunnya produksi pertanian tanaman pangan; rendahnya pendapatan petani; menurunnya populasi dan produksi ternak; belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam serta masih terjadi fluktuasi harga komoditas yang berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi; (b) belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah karena belum optimalnya pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata; serta belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah; (c) belum optimalnya sektor perdagangan karena belum optimalnya kegiatan perdagangan; masih rendahnya daya saing produk daerah baik secara regional maupun nasional; masih belum optimalnya pengelolaan pasar; serta belum optimalnya layanan kemetrologian legal; (d) belum optimalnya pengembangan industri karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan hasil produk dan biaya produksi yang efisien; rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah; belum optimalnya

digitalisasi pemasaran; belum optimalnya pengembangan sentra, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kepemilikan legalitas usaha; (e) belum optimalnya pengembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global, serta terbatasnya pada akses permodalan; (f) belum optimalnya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga ekonomi lainnya karena belum optimalnya pengelolaan koperasi, rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat, serta terbatasnya sumber daya finansial koperasi.

d. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, yang disebabkan oleh (a) relatif rendahnya angka harapan hidup karena belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan; (b) belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif karena tingginya angka kematian ibu; angka kematian bayi, masih banyak penyakit endemis dan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV/AIDS, penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, penyakit kardiovaskular, dan gangguan jiwa, belum memenuhi target dalam pelayanan kepada masyarakat; serta masih tingginya stunting pada balita.
e. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB karena minimnya jumlah penyuluh keluarga berencanan, kurangnya dukungan operasional pada kader di lapangan, serta belum optimalnya kepesertaan KB baru; (b) belum optimalnya pemberdayaan keluarga karena lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga; serta (c) belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga sebagai akibat dari relatif tingginya pernikahan usia dini dan peningkatan angka perceraian.
f. Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya perlindungan perempuan sebagai akibat dari relatif tingginya perempuan dan anak perempuan yang mengalami KDRT dan kekerasan non-KDRT, serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) belum optimalnya pencapaian Kabupaten ramah anak karena belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
g. Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya prestasi olahraga sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan olahraga; dan (b) belum optimalnya peran pemuda di daerah karena adanya kecenderungan pemuda produktif yang lebih memilih untuk merantau ke luar daerah setelah lulus kuliah, salah satunya karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah; belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dala kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; serta belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan kepemudaan.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, terdapat empat permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara yaitu belum optimalnya kualitas daya saing sumber daya manusia, belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, serta belum optimalnya investasi di daerah. Berikut merupakan penjabaran masing-masing permasalahan pokok tersebut :

A. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya kualitas pendidikan karena belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan/atau fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar; belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; serta adanya kesenjangan antara jumlah siswa dan rombongan belajar yang tersedia; (b) rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah karena kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi; adanya keterbatasan secara ekonomi;

serta masih tingginya angka pernikahan dini; (c) belum optimalnya kemampuan literasi yang disebabkan oleh rendahnya minat baca masyarakat dan belum optimalnya layanan perpustakaan.

B. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan karena belum optimalnya aksesbilitas dan konektivitas wilayah; belum optimalnya akses pelayanan air bersih; rendahnya jangkauan akses air minum perpipaan; belum optimalnya penanganan genangan; masih rendahnya capaian akses sanitasi aman; belum optimalnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi; serta belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sumber daya air; (b) belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak dan berkualitas karena belum optimalnya ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas (PSU); masih adanya kawasan kumuh; masih adanya rumah tidak layak huni; masih adanya backlog perumahan; belum optimalnya penyediaan perumahan untuk MBR; serta belum adanya rencana terkait relokasi rumah untuk masyarakat terdampak program pemerintah; (c) belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas; rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas; terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan; (d) belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi karena masih banyaknya area-area *blankspot* yang belum mendapatkan akses internet; belum optimalnya jangkauan jaringan intra pemerintah daerah; serta belum optimalnya pusat data pemerintah daerah.

C. Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, yang disebabkan oleh belum terciptanya kondisi wilayah yang tertib, tentram dan aman karena masih banyaknya pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan); kurang optimalnya penyelenggaraan trantibum; masih adanya konflik sosial; belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi; belum optimalnya pemahanan dan penerapan atas nilai-nilai Pancasila di masyarakat; serta belum optimalnya kondusifitas wiayah, termasuk pada situasi politik.

D. Belum optimalnya investasi di daerah, yang disebabkan karena kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan iklim investasi; belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung seperti belum optimalnya penyediaan akses jalan, jaringan listrik, air, dan jaringan telekomunikasi; belum optimalnya layanan perizinan; serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi di daerah karena kualitas daya saing tenaga kerja masih rendah dan belum memenuhi kebutuhan dunia usaha.

4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, terdapat satu permasalahan pokok pembangunan daerah yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjabarannya :

A. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital; belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan:

a. Masih rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional karena kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan adanya keterbatasan secara ekonomi. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 sebesar 8,63 masih dibawah capaian nasional, artinya lama sekolah di Kabupaten Lampung Utara baru mencapai kelas 2 SMP. Harapan lama sekolah baru mencapai 12,64 tahun artinya belum memenuhi untuk wajib belajar 13 tahun.
b. Keterbatasan akses, kualitas PAUD yang belum merata, rendahnya kesadaran orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik hal ini terlihat dari APK PAUD sangat rendah hanya 48,81.
c. Kondisi fasilitas dan infrastruktur pendidikan kesetaraan yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang tidak layak, kurangnya buku pelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya, dapat mempengaruhi minat belajar siswa.
d. Masih adanya angka putus sekolah di seluruh jenjang pendidikan dengan angka paling tinggi ada pada jenjang SD sebesar 0,10%.

2.3.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan:

a. Masih adanya kematian ibu dan bayi hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana di Rumah Sakit untuk kegawatdaruratan neonatal, Keterlambatan Identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin dan Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.
b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan penyakit TBC, sehingga banyak penderita yang tidak melakukan pengobatan, selain itu masih cukup tingginya angka TB mangkir atau pengobatan yang tidak selesai.
c. Masih tingginya stunting pada balita, Lampung Utara ada posisi ketiga dari 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung.
d. Belum optimalnya distribusi tenaga kesehatan, masih terdistribusi di daerah perkotaan maupun wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat kota.

2.3.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

a. Belum optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air, Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota baru sebesar 106,56 dari luas total 237,8 ha.
b. Pemeliharaan jaringan irigasi yang tidak rutin dan tidak menyeluruh menyebabkan kerusakan pada saluran, bangunan irigasi, dan bangunan pelengkapnya.
c. Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi membutuhkan anggaran yang cukup. Jika anggaran terbatas, pemeliharaan dan perbaikan mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi jaringan.
d. Belum optimalnya kondisi jalan sebagai konektivitas dari/menuju pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis Kabupaten. Masih banyak kondisi jalan yang belum mantap yang menghubungkan

antar wilayah /kecamatan, menuju akses ekonomi seperti pasar, sentra produksi, sentra perdagangan, akses sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, akses pemerintahan dan pelayanan publik yang baru mencapai 46,67% pada tahun 2025.

e. Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum yang layak baru mencapai 73,33% pada tahun 2025.
f. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung hidup bersih dan sehat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya air bersih.
g. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sistem air limbah (sanitasi) yang aman hanya sebesar 3,36%.

2.3.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

a. Masih terbatasnya penyediaan hunian layak, pada tahun 2025 baru mencapai 55,9% hal ini terjadi dikarenakan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang berkurang juga tidak mencapai target, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 2.994 unit tetapi hanya berkurang sebanyak 1.836 unit.
b. Masih belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92,10% tetapi baru mencapai 74,36%.

2.3.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:

a. Rendahnya Penegakan Hukum dapat dilihat capaian penegakan perda dan perkada baru mencapai 75%. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya penegakan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Hal ini sering kali membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak terlindungi.
b. Kurangnya Sosialisasi Peraturan terlihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) baru mencapai 75%. Banyak masyarakat yang belum memahami peraturan daerah (Perda) dan kebijakan yang ada. Kurangnya sosialisasi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat sebanyak 74 orang, jumlah ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan luas wilayah jangkauan serta jumlah Desa/Kelurahan. Belum lagi selain masalah kuantitas, kualitas SDM dalam penegakan ketertiban umum seringkali tidak merata. Hal ini dapat menghambat efektivitas dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.
d. Belum optimalnya sosialisasi tentang informasi rawan bencana.
e. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam.

2.3.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial:

a. Masih adanya anak terlantar yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
b. Aksesibilitas yang terbatas: Banyak penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, yang membuat mereka sulit untuk mandiri.
c. Kebijakan yang tidak efektif: Meskipun ada kebijakan yang mendukung, implementasinya sering kali tidak memadai, sehingga

banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan.

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja:

a. Belum optimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja
b. Masih tingginya angka pengangguran.
c. Rendahnya daya saing tenaga kerja. Dari jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang masuk angkatan kerja yang bekerja masih didominasi tingkat SD menyebabkan kualitas tenaga kerja yang rendah.

2.3.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

a. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah berdasarkan gender di Kabupaten Lampung Utara, hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan merancang program yang responsif. Kurangnya data ini menyebabkan perencanaan anggaran menjadi tidak tepat sasaran. Hal tersebut juga mengakibatkan pengalokasian anggaran yang responsif gender belum optimal yang terlihat pada capaian anggaran yang responsif gender baru mencapai 14,21% sementara ditargetkan sebesar 53,64% pada tahun 2025.
b. Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di tahun 2025 sebanyak 47 kasus.
c. Masih terdapat pekerja anak dibawah umur dengan rentan usia 15-19 tahun.

2.3.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan:

a. Ketersediaan pangan kurang beragam dan tersedia melimpah hanya saat musim panen;
b. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c. Masih adanya masyarakat miskin yang memiliki kendala dalam mengakses pangan;
d. Masih terjadi fluktuasi harga dan pasokan pangan karena tidak seimbangnya produksi dengan kebutuhan;
e. Masih ada 4 desa rentan pangan.

2.3.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan:

a. Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah, serta kepemilikan lahan
b. Belum optimalnya penyediaan bidang tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

2.3.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:

a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2025 mencapai 14,76% dari target 12,55%. Meskipun target pengolahan sampah telah terlampaui, proporsi timbulan sampah yang terolah masih relatif rendah dibandingkan total timbulan sampah yang dihasilkan, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fasilitas pengolahan, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta belum optimalnya dukungan sarana, prasarana, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.
b. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 mencapai 71,62 dan melampaui target sebesar 68,62, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan yaitu belum optimalnya upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi peningkatan tekanan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga diperlukan penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan.

c. Rendahnya Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan serta banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan sesuai yang disyaratkan.

2.3.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a. Masih terdapat 6,21% penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el, sebanyak 7.291 warga Lampung Utara yang belum melakukan perekaman KTP-el.
b. Penonaktifan layanan di tingkat Kecamatan Sejak Februari 2025, jaringan data di Kecamatan dinonaktifkan oleh pusat guna efisiensi anggaran APBN/APBD. Akibatnya, masyarakat hanya bisa mengurus administrasi kependudukan (seperti perekaman KTP-el, KK, akta) di kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi yang berjarak jauh dari sebagian besar desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
c. Belum optimalnya kualitas pelayanan, budaya birokrasi hierarkis dan paternalistik, motif sosial (kedekatan), serta motif ekonomi karena sebagian besar yang menjadi petugas pelayanan berstatus non ASN, sehingga insentif rendah dan masih lemahnya penerapan sistem reward dan punishment.

2.3.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. Belum optimalnya Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), masih banyak kendala dan permasalahan dalam pemutakhiran data di tingkat kalurahan;
b. Adanya peralihan Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) di tahun 2025;
c. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok atau masyarakat;
d. Kinerja BUMDes belum maksimal. Secara umum, BUMDes di Lampung Utara masih menghadapi kendala seperti birokrasi pendaftaran, minimnya SDM akuntansi/finansial, akses permodalan yang masih terbatas, dan struktur organisasi yang belum optimal.
e. Relatif masih tingginya stunting dan akses sanitasi yang masih minim. Kondisi ini menunjukkan kurang optimalnya program pemberdayaan kesehatan masyarakat seperti STBM, penyuluhan MP ASI, dan intervensi kesehatan/lingkungan.
f. Masih rendahnya status desa mandiri, pada tahun 2025 mencapai 7,33% dari 232 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

2.3.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

a. Masih kurangnya pemahaman terkait 1.000 HPK ditandai masih terdapat keluarga beresiko stunting.
b. Program KB masih kurang terintegrasi dengan intervensi Gizi dan Kesehatan. Model program KB seperti yang dirumuskan BKKBN (Bangga Kencana) perlu diperkuat agar lebih menekankan pendidikan 1.000 HPK, penggunaan kontrasepsi efektif, dan nutrisi ibu dan bayi.

c. Tingginya PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) pada tahun 2025 sebanyak 6.466 PUS, dan jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.
d. Masih rendahnya cakupan peserta KB aktif dan tidak meratanya akses kontrasepsi di Desa-desa yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari ibukota Kecamatan maupun Kabupaten. Permasalahan ini menjadi krusial karena berdampak langsung pada tingkat kelahiran, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, serta angka stunting, yang masih tinggi di Kabupaten ini.
e. Tingkat partisipasi KB masih rendah dan belum stabil, kontrasepsi yang digunakan masih didominasi metode jangka pendek (pil dan suntik) yang memiliki tingkat keberhasilan rendah dibanding metode jangka panjang (IUD, implant).

2.3.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan:

a. Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak seimbang dengan pagu anggaran yang tersedia. sehingga berpengaruh pada pencapaian keselamatan berlalu lintas melalui rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
b. Belum optimalnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana lalu-lintas (rambu, traffic light, warning lamp, zebra cross, guardrail, marka, deliniator, cermin tikung, dan lainnya).
c. Belum selesainya proses meterisasi PJU menyebabkan tingginya beban tagihan listrik abonemen PJU sedangkan disisi lain masih dibutuhkan pemasangan PJU pada beberapa ruas jalan.
d. Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk memenuhi kelayakan kendaraan bermotor.
e. Perlunya penertiban parkir liar dan pemenuhan atas kebutuhan parkir.
f. Over Dimension Over Loading (ODOL) Menyebabkan Kerusakan Infrastruktur.

2.3.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika:

a. Masih terdapat Desa yang Blankspot Internet. Sebanyak 133 desa di Kabupaten Lampung Utara masih tergolong blankspot atau tidak terjangkau jaringan internet. Dari total 232 desa dan kelurahan di Lampung Utara, sekitar 57% wilayah pedesaan mengalami kendala sinyal atau koneksi lemah.
b. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Masih Terbatas yang berdampak terhadap kinerja layanan pemerintahan seperti PPID, Sistem Informasi Desa (SID), dan aplikasi pelayanan lainnya berjalan tidak efisien dan Sistem pengolahan dan penyimpanan data belum aman dan rawan gangguan.
c. Literasi digital dan kesadaran keamanan siber masih rendah. Berdasarkan studi lokal (UIN Raden Intan dan Universitas Lampung), masyarakat dan aparat desa masih kurang memahami bahaya kebocoran data dan etika digital dan Wi-Fi publik di ruang terbuka dan kantor pemerintahan sering tidak dilindungi dengan keamanan memadai (rawan sniffing atau man-in-the-middle attack).
d. Program Internet Desa dan Smart Village Belum Merata, terjadi kesenjangan digital antar desa, antara desa yang sudah melek teknologi dan yang masih tertinggal.
e. Potensi ekonomi digital dan kewirausahaan berbasis desa tidak berkembang optimal.

2.3.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

a. Masih banyak koperasi yang berstatus tidak aktif, Dari total 621 koperasi yang terdaftar, hanya sekitar 42% koperasi yang aktif berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) terakhir (Data Dinas Koperasi Lampung Utara, 2025). Artinya, lebih dari 50% koperasi tidak aktif secara administrasi maupun operasional di Lampung Utara.
b. Lemahnya manajemen dan SDM koperasi, Masih banyak koperasi yang dikelola secara tradisional dan tidak memiliki manajer profesional. Rendahnya pemahaman tentang prinsip koperasi dan pembukuan modern menyebabkan koperasi tidak berkembang.
c. Minimnya inovasi dan teknologi, Koperasi di Lampung Utara belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal, seperti aplikasi keuangan atau platform digital pemasaran.
d. Akses permodalan masih rendah, Banyak pelaku UKM kesulitan mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan.
e. Rendahnya daya saing produk, produk UKM masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, PIRT, BPOM, dan kemasan yang layak pasar. Lemahnya brand dan pemasaran membuat produk sulit menembus pasar luar daerah.
f. Akses permodalan yang terbatas, dikarenakan banyak pelaku UKM kesulitan mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan formal yang disebabkan tidak memiliki agunan yang cukup, dokumen administrasi usaha yang belum lengkap dan masih kurangnya literasi keuangan sehingga berdampak UKM sulit berkembang dan hanya mengandalkan modal sendiri yang terbatas.
g. Keterbatasan SDM dan kewirausahaan, SDM pelaku UKM umumnya belum memiliki keterampilan managerial dan wirausaha yang baik yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha, dan minimnya inkubator bisnis dan program mentoring.
h. Akses pasar yang terbatas, UKM kesulitan memasarkan produknya secara luas yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital, tidak adanya jaringan distribusi yang baik, ketergantungan pada pasar lokal yang berdampak pada volume penjualan rendah dan pertumbuhan lambat.

2.3.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal:

a. Pengembangan iklim investasi belum optimal. Kendala dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara, sehingga perizinan terkait pemanfaatan kawasan yang sesuai struktur ruang dan pola ruangnya sedikit terhambat.
b. Kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kewajiban penyampaian LKPM maupun tata cara penyampaian LKPM secara berkala.

2.3.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:

a. Pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan masih belum optimal;
b. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan kepemudaan belum optimal dan partisipasi pemuda dalam kemasyarakatan kepemudaan masih rendah;
c. Fasilitasi dan organisasi pembinaan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan belum optimal; dan
d. Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar.

2.3.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik:

a. Belum optimalnya pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Lampung Utara. Perangkat Daerah masih belum optimal dalam mengintegrasikan data sektoral dengan SDI.
b. Belum optimalnya Forum SDI sebagai sarana komunikasi dan koordinasi tentang data di Kabupaten Lampung Utara. Terdapat beragam data dengan metoda yang berbeda antar Perangkat Daerah;
c. Belum terintegrasikan secara optimal Data Geospasial dengan Data Statistik dalam SDI.

2.3.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian:

a. Belum optimalnya pemahaman tentang pengamanan informasi. Tidak semua pengakses data melakukan pakta integritas demi keamanan data dan informasi;
b. Masih rendahnya partisipasi stakeholder terkait keamanan informasi daerah.

2.3.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan:

a. Masih terdapat objek pemajuan kebudayaan yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal.
b. Keterbatasan jumlah kajian produk sejarah dan sarana prasarana akses informasi sejarah.
c. Masih minimnya TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya) yang bersertifikasi.
d. Menurut UNESCO dan tokoh budaya, bahasa Lampung berada di ambang kepunahan dalam 20–30 tahun jika tidak ada intervensi, karena hanya sekitar 13–20% populasi yang masih menggunakan bahasa asli sehari-hari. Dominasi bahasa dan budaya pendatang (Jawa, Sunda, Palembang, dsb) membuat masyarakat asli Lampung cenderung meninggalkan bahasa serta budaya leluhur.
e. Modernisasi dan globalisasi memudarkan budaya lokal. Masuknya budaya umum modern gadget, media sosial, hiburan barat/korea membuat generasi muda Kabupaten Lampung Utara kehilangan ketertarikan terhadap kearifan lokal seperti lima falsafah Pi'il Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Bejuluk Beadok. Banyak nilai-nilai luhur menjadi simbolis formalitas tanpa esensi, seperti penggunaan busana adat hanya pada acara adat dan bukan bagian dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan:

a. Penambahan koleksi menunjukkan perkembangan yang bagus, meskipun begitu belum mencapai kondisi ideal jumlah koleksi dibandingkan dengan populasi yang dilayani oleh dinas perpustakaan;
b. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi; dan
c. Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dari keseluruhan jumlah perpustakaan binaan.

2.3.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan:

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan lembaga/PD dalam pengelolaan arsip sebagai bagian dari budaya tertib dokumen tetapi jumlah sasaran pembinaan kearsipan di Kecamatan masih rendah;
b. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana kearsipan yang memenuhi standar di lembaga kearsipan dan PD;
c. Masih kurangnya jumlah pengelola arsip di PD.

2.3.2.3 Permasalahan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

a. Belum optimalnya upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya karena keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatasnya kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan;
b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar;
c. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan;
d. Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan;
e. Masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat; dan
f. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

2.3.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;

a. Konektivitas antar daya tarik wisata yang belum terbangun, sehingga pola perjalanan wisata belum terbentuk secara optimal (lama tinggal menjadi rendah);
b. Kualitas sarana dan prasarana (fasilitas umum dan fasilitas pariwisata) di destinasi yang belum merata;
c. Kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat yang belum merata, dengan persentase desa wisata berstatus mandiri yang masih rendah;
d. Belum optimalnya pembangunan aksesibilitas, akomodasi, infrastruktur dan atraksi wisata di destinasi

2.3.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;

a. Belum optimalnya produktivitas pertanian karena mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional;
b. Indeks pertanaman masih rendah karena mayoritas lahan pertanian adalah sawah tadah hujan;
c. Belum optimalnya penerapan usaha agribisnis pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
d. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian;
e. Masih adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang mengganggu upaya peningkatan produksi pertanian;
f. Masih adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian karena berkembangnya sektor usaha dan jasa yang memerlukan lahan;
g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian;
h. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan SDM petani dan peternak;
i. Masih berulangnya kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; dan
j. Masih kurangnya ketersediaan pakan ternak ruminansia, khususnya pada musim kemarau.

2.3.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;

a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat yang memadai;
b. Pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebarannya tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata.

2.3.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;

a. Rendahnya daya saing produk Industri Kecil dan Menengah. Jangkauan pemasaran yang masih bersifat lokal menunjukkan perlu adanya peningkatan daya saing produk IKM;

b. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kepemilikan legalitas usaha;
c. Belum optimalnya pengembangan sentra di Kabupaten Lampung Utara.

2.3.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
b. Daerah tujuan yang ditentukan oleh pemerintah pusat belum tentu sesuai dengan permintaan calon transmigran.
c. Kuota calon transmigran tergantung kebijakan pemerintah pusat.

2.3.2.4 Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.2.4.1 Sekretariat Daerah
a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas.
b. Belum optimalnya pelayanan administrasi umum dalam mendukung pencapaian kinerja bagian.
c. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi administrasi pemerintahan, kewilayahan dan kerja sama daerah.
d. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan bidang hukum, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan.
e. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa.

2.3.2.4.2 Sekretariat DPRD
a. Belum optimal hasil indentifikasi kebutuhan perda dalam penyusunan NA dan raperda inisiatif DPRD. Regulasi Peraturan pemerintah yang perlu ada tindak lanjut berupa peraturan daerah perlu ada identifikasi.
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil reses terhadap fungsi legislasi DPRD. Adanya kesempatan reses bagi anggota DPRD dengan menggunakan anggaran reses bisa dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat;
c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kegiatan terutama yang dilaksanakan oleh DPRD.

2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.2.5.1 Perencanaan
a. Belum terpenuhinya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana. Perubahan kebijakan penyederhanaan reformasi dengan menghilangkan eselon 4 menjadi fungsional perencanaan belum diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM penjenjangan/pengembangannya;
b. Belum optimalnya pengelolaan data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai sekretariat SDI yang meliputi standar data, meta data, kode referensi dan interoperabilitas;
c. Aturan terkait perencanaan daerah yang sangat dinamis perubahannya menyulitkan sinkronisasi dengan proses perencanaan sebelumnya serta evaluasi capaian target kinerja;
d. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan perencanaan.
e. Belum optimalnya sinkronisasi dan konsitensi antara perencanaan dan penganggaran.

2.3.2.5.2 Penelitian dan Pengembangan
a. Masih belum optimalnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif dan relevan, antara lembaga penelitian, universitas, dan instansi/lembaga swasta.
b. Belum optimalnya manfaat inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, masih di tahap pengumpulan dan penilaian, belum kebermanfaatan secara langsung.

2.3.2.5.3 Keuangan

a. Belum optimalnya penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) pada tahapan penatausahaan dan pelaporan;
b. Belum optimalnya perubahan regulasi yang terkait dengan pengelolaan BMD;
c. Belum optimalnya penyampaian data SPPT PBB-P2 wajib pajak yang berdomisili di luar daerah karena sulit/tidak diketahui alamatnya;
d. Belum tersedianya peta bidang poligon untuk pemutakhiran data PBB-P2;
e. Belum optimalnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BMD dengan regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pendapatan daerah;
g. Sistem informasi yang menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan sistem informasi terkait lainnya belum sepenuhnya terintegrasi;
h. Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
i. Pengendalian dan penatausahaan aset daerah belum optimal;
j. Kualitas perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan belum optimal; dan realisasi, serta
k. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal.

2.3.2.5.4 Kepegawaian

a. Belum optimalnya penerapan Merit Sistem, yaitu manajemen kepegawaian yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
b. Belum optimalnya Rekruitmen ASN yang profesional dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan untuk rekruitmen ASN;
c. Belum optimalnya pemetaan jalur karir bagi ASN. Penyederhanan birokrasi menyebabkan perpindahan struktural ke fungsional.

2.3.2.5.5 Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum terkoordinasinya dengan baik perencanaan dan hasil pengembangan kompetensi pasca diklat untuk acuan penataan pegawai.
b. Masih rendahnya peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.2.6.1.1 Inspektorat Daerah,

a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
b. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP.

2.3.2.7 Unsur Kewilayahan

2.3.2.7.1 Kecamatan

a. Belum optimalnya berbagai perizinan untuk level Kecamatan,Desa dan Kelurahan;
b. Belum optimal dan meratanya penguasaan TIK pegawai.
c. Belum optimalnya distribusi jumlah pegawai di Kecamatan
d. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja di Kecamatan.

2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Masih adanya adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat;

b. Kemudahan memperoleh informasi belum diimbangi dengan pengetahuan literasi/informasi dunia digital (media Sosial) sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar (HOAX), seperti adanya Apllikasi Pinjaman online dan Judi online di handphone yang merupakan ancaman bagi masyarakat sehingga dapat terjerat hutang dan menjadi pemicu konflik sosial;
c. Semakin meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima berita hoax dan membuka peluang terjadinya provokasi dan intimidasi yang berpeluang menjadi konflik sosial di masyarakat;
d. Belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi. Menurunnya partisipasi tersebut terlihat dari masih belum optimalnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, adanya masyarakat yang tidak memilih. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu;
e. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Utara sehingga menyebabkan belum optimalnya pencegahan Kabupaten pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Lampung Utara, sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang harus mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Kabupaten;
f. Sering terjadi perubahan pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti misalnya Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan di bawahnya, sering berubahnya ketentuan tersebut menyebabkan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan ormas kurang optimal, menimbulkan adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan meresahkan masyarakat;
g. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat serta cinta tanah air di kalangan masyarakat terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui smartphone dan kecanggihan teknologi Informasi.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 pada dasarnya masih dipengaruhi oleh tantangan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan dasar, keterbatasan fiskal daerah, serta kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Arah kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah Lampung Utara Tahun 2027 meliputi masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dasar, serta belum kuatnya struktur ekonomi daerah berbasis hilirisasi komoditas unggulan. Tingkat kemiskinan Lampung Utara pada tahun 2025 masih berada pada kisaran 15,78 persen meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah mulai membaik, namun masih perlu diperkuat agar lebih inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerataan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Penguatan kualitas SDM menjadi isu penting karena menjadi fondasi utama dalam mendukung produktivitas daerah dan daya saing ekonomi.

Dalam bidang infrastruktur, kondisi kemantapan jalan kabupaten masih relatif rendah dibanding kebutuhan pelayanan konektivitas wilayah. Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan layanan dasar lainnya masih memerlukan peningkatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung bahkan mengalokasikan dukungan pembangunan jalan dan jembatan di Lampung Utara pada tahun 2027 untuk memperkuat konektivitas wilayah. **Pada aspek ekonomi daerah**, struktur ekonomi Lampung Utara masih didominasi sektor primer terutama pertanian, namun nilai tambah hasil produksi belum optimal akibat terbatasnya hilirisasi dan pengolahan komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, ubi kayu, kopi, karet, dan pisang. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing produk daerah dan kesejahteraan petani belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi komoditas unggulan menjadi isu strategis pembangunan tahun 2027. Selain itu, **keterbatasan kapasitas fiskal daerah** juga menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada kewajiban pembiayaan daerah dan tekanan defisit anggaran sehingga diperlukan efisiensi belanja, penguatan pendapatan daerah, serta penetapan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. **Dari aspek tata kelola pembangunan**, masih diperlukan penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pemanfaatan data pembangunan yang terintegrasi. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian melalui penyusunan RDTR, RRTR dan RPPLH sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
5. Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan pemberdayaan UMKM.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penataan ruang yang berkelanjutan.
8. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 agar pembangunan lebih terarah, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.130
Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis Tahun 2027

No	Permasalahan Pembangunan Daerah	No	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	1	Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan.
2	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
4	Keterbatasan infrastruktur dasar	4	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
5	Kondisi kemantapan jalan kabupaten masih relatif rendah dibanding kebutuhan pelayanan konektivitas wilayah	5	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
6	Belum kuatnya struktur ekonomi daerah berbasis hilirisasi komoditas unggulan	6	Penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah
		7	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan pemberdayaan UMKM.
7	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah	8	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah
8	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang wilayah	9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penataan ruang yang berkelanjutan.
9	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pemanfaatan data pembangunan yang terintegrasi	10	Penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pelayanan publik.

Sumber : Hasil Analisis, 2026

2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Perkembangan teknologi informasi telah mendukung kecepatan dan perbaikan tata pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam mendorong *good governance*. Kecepatan informasi kebijakan publik, kecepatan layanan, hingga terbukanya aksesibilitas masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Di sisi lainnya, transformasi dan transparansi kebijakan publik kepada masyarakat luas bisa dilakukan dengan baik. Kemauan dan inisiatif baik dari pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam perbaikan kebijakan publik dengan mengikutsertakan atau mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya.

Isu – isu kebijakan publik dalam bidang pemerintahan tidak lagi didominasi oleh DPRD maupun pemerintah daerah sebagai mitra kerjanya, akan tetapi perhatian masyarakat luas telah menjadi nyata. Banyak kelompok masyarakat atau stakeholders telah secara spesifik melakukan advokasi kebijakan publik. DPRD dan pemerintah daerah tidak bisa lagi mendiamkan keinginan masyarakat dalam mendorong aktivitas dan advokasi kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat juga tersampaikan dalam tema pembangunan Daerah, prioritas dan sasaran daerah. Persoalan bidang pemerintahan harus disesuaikan dengan indikator yang hendak dicapai keunggulan daerah melalui sarana sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Menciptakan tata pemerintahan yang baik tentu harus mengidentifikasi permasalahan yang muncul, target yang dicapai, dan indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Tabel 2.131
Hasil Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)					
		1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
		1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	100 meter	Dusun 4 Desa Kemplas, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	14. a. Rehabilitasi Drainase lingkungan di Kawasan Permukiman b. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman
				200 meter	Jalan Way Seputih Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan , Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun V Karang Anyar Desa Talang Bojong, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun Tapa Mulya dan Dusun	Dinas Perumahan Rakyat,	Usulan ini diteruskan dan	

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sidokarto, Kab. Lampung Utara	Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	RK 03 DESA KISTANG ARAH TANJUNG AMAN JLN DUSUN 4 TEMBUS DUSUN 2 RK 4 RT 4, JALAN BATU NYERUDUNG, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	dusun widorokandang desa sawo jajar , Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	dusun sumur batu dan dusun trimulyo desa kali cinta, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Dusun satu Sudukayo, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa tulung balak dusun 01 Rt 001 Rw 001, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	jalan sinar mulya kecamatan tanjung raja , Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	jalan puskesmas/jam bu 1 Lk 1, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200 meter	Gang Dadali II.IV.V & VI LK6 Kelurahan Tanjung Aman kecamatan kotabumi selatan, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	jalan SDN. 02 Gg. Rubini desa suka menanti kecamatan abang tinggi, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa sido rahayu kecamatan abung semuli, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Jalan puskesmas/Jambu 1 LK.1 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Jalan RT.01,02,04 LK.06 JL. Jensu GG.Dadali Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Rw 003 Rt 001 Sugih Waras Kelurahan Sindang Sari, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun 1 dan Dusun II Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja	

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dan Penataan Ruang	perangkat daerah	
				200 meter	Jl. Negara Nomor 53 Desa Tanjung iman Kec.Belambangan pagar, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	20. Pemeliharaan Rutin Jalan (Ruas Jalan Kabupaten) Sesuai dengan SK Jalan Kabupaten B/486/06-LU/HK/2023
		1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 meter	Desa Talang Bojong dusun Satu dan Dusun Dua, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	15. a. Pembangunan drainase lingkungan di kawasan permukiman b. Pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman c. Pembangunan sumur bor untuk fasilitas umum
				200 meter	RK 03 DESA KISTANG ARAH TANJUNG AMAN JLN DUSUN 4 TEMBUS DUSUN 2 RK 4 RT 4, JALAN BATU NYERUDUNG , Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa bojong barat, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun 06 Desa Ogan Lima, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun giri mulyo desa pasar gading, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200 meter	Jalan Desa Gunung Betuah RT.06 RW.06, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Dusun 01 Priangan Baru, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa suka mulya, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Jalan Tulung Mas No.23 Lapang Besar Abung Barat, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa negara tulang bawang Rt 01 02 03 04 , Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Rejomulyo Kelurahan Kelapa Tujuh, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	desa sinar ogan, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				200 meter	Jl.Plongkowati No.1 Kode pos 34552 Desa Madukoro Baru Kecamatan Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				200 meter	Dusun II Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				1 Unit	Desa Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan					
		1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
		1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4,2 Km	desa sidomukti kecamatan abung timur kecamatan lampung uatara , Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	14. a. Rehabilitasi Drainase lingkungan di Kawasan Permukiman b. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman
				2,9 Km	Desa Tanjung Riang Kecamatan Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				3,1 Km	jalan sumber sari desa sidokayo keamtan abung tinggi kabupaten lampung utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
				2,4 Km	RT 001 dan RT 002 Dusun IV Desa Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	21. Rehabilitasi Jalan (Ruas Jalan Kabupaten) Sesuai dengan SK Jalan Kabupaten B/486/06-LU/HK/2023

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3,3 Km	jalan abdurahman desa ulak rengas kecamatan abung tinggi kabupaten lampung utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	14. a. Rehabilitasi Drainase lingkungan di Kawasan Permukiman b. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman
				9,5 Km	jl simpang tanjung iman menuju dusun sumber agung hingga talang duren, Kab. Lampung Utara	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	20. Pemeliharaan Rutin Jalan (Ruas Jalan Kabupaten) Sesuai dengan SK Jalan Kabupaten B/486/06-LU/HK/2023
3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat					
			Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota					
		2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
		2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	desa madukoro baru RT 002 RT 004 Dusun pongkowati dRT006 Dusun sukajaya RT 002 Sukajadi dan dusun jangkar bumi rt 002 dan Rt 004, Kab. Lampung Utara	Dinas Perhubungan	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Lampu Jalan, Rambu Lalu Lintas)
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B					
		3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang Digunakan					

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	350 meter	Dusun 002 dan Dusun 003 Desa Sumber Agung Kecamatan Muara Sungkai, Kab. Lampung Utara	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	7. Pembangunan jalan usaha tani
				350 meter	Dusun Sibangun Desa Wonomarto Kec.Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan					
		3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						
		3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5 Ekor	RT/RW 007/003 Desa Sumber Agung Kecamatan Muara Sungkai, Kab. Lampung Utara	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Usulan ini diteruskan dan dimasukkan ke renja perangkat daerah	6. Bantuan Bibit Ternak Sapi (Kec.Blambangan Pager, Kec.Abung Selatan, Kec.Abung Semuli, Kec.Abung Timur, Kec.Abung Surakarta, Kec.Kotabumi selatan, Kec.Kotabumi, Kec.Kotabumi Utara,Kec.Abung Tengah, Kec.Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Jaya, Kec.Sungkai Tengah, Kec.Hulu Sungkai, Kec. Muara Sungkai, Kec.Sungkai Utara, Kec.Bunga Mayang)
				1.250 batang	Desa Negeri Ratu Rt.002 Rw.004	Dinas Perkebunan	Usulan ini diteruskan dan	2. Pengadaan Bibit Kakao (Desa Bumi

No	SASARAN RKPD TAHUN 2027	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan	Usulan di Kamus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara	dan Peternakan	dimasukkan ke renja perangkat daerah	Ratu Kec.Sungkai Selatan, Desa Cabang Abung Raya Kec.Abung Selatan)

Sumber : Hasil Telaah, 2026

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027, sebagian besar usulan telah selaras dengan sasaran pembangunan daerah, terutama pada sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan serta Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Usulan didominasi oleh pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jalan lingkungan permukiman, drainase, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), perlengkapan jalan, jalan usaha tani, serta bantuan sarana produksi pertanian dan peternakan. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan-usulan tersebut telah dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai nomenklatur yang berlaku pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta kewenangan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait.

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan masukan dalam penyusunan RKPD yang berasal dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD. Oleh karena itu, setiap usulan Pokir dilakukan penelaahan secara teknis oleh perangkat daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan RPJMD, prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, kewenangan pemerintah daerah, serta nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam SIPD. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dinyatakan dapat diteruskan ke dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, sedangkan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi, kesiapan teknis, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Dominasi usulan pada sektor infrastruktur menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas wilayah masih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jalan lingkungan, drainase permukiman, serta penyediaan PSU diharapkan dapat meningkatkan kemantapan infrastruktur dasar, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung akses terhadap pelayanan publik, mengurangi kawasan permukiman kumuh, serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Sementara itu, usulan pada sektor pertanian dan peternakan, seperti pembangunan jalan usaha tani serta penyediaan bibit ternak dan komoditas perkebunan, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan peternak.

Secara keseluruhan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui proses verifikasi dan penyelarasan terhadap sasaran pembangunan, prioritas daerah, dan kemampuan fiskal, usulan Pokir diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran,

efektif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara, sekaligus mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027.

2.5. Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus mendorong lahirnya berbagai inovasi pada seluruh perangkat daerah sebagai upaya menjawab tantangan pembangunan, meningkatkan kinerja pelayanan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.132
Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1	Sinergi Kemanusiaan dan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (SEHATI)	Program SEHATI (Sinergi Kemanusiaan dan Administrasi Kependudukan Terintegrasi) merupakan inovasi pelayanan terpadu yang mengintegrasikan administrasi kependudukan dengan kegiatan sosial kemanusiaan melalui pendekatan kolaboratif, jemput bola, dan digitalisasi layanan. Program ini hadir sebagai solusi atas masih adanya masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, korban bencana, ODGJ, penghuni panti sosial, dan masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap sehingga mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PERISAI (Perencanaan, Standarisasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan)	PERISAI (Perencanaan, Standarisasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan) merupakan inovasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui sistem kerja yang terintegrasi, terstandar, dan akuntabel. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti belum seragamnya prosedur kerja, potensi kesalahan administrasi, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas daerah. PERISAI mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan pembayaran, penatausahaan bendahara, pengelolaan perpajakan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam satu mekanisme yang sistematis dan terukur. Dengan penerapan PERISAI, setiap proses pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas bendahara, meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko penyimpangan, mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	AKSELA (Akselerasi Kerja Singkat Modern dan Mudah Diingat)	AKSELA (Akselerasi Kerja Singkat, Modern, dan Mudah Diingat) merupakan inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara yang memanfaatkan rumus sederhana pada Microsoft Excel untuk mempercepat dan menstandarkan penerbitan surat	Sekretariat DPRD

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		tugas, Surat Perintah Dinas (SPD), absensi anggota DPRD, serta berbagai administrasi persuratan dan kepegawaian	
4	PROKASIH (Program Kali Bersih)	PROKASIH (Program Kali Bersih) merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan Sungai Way Sesah melalui pengelolaan sungai yang preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan penumpukan sampah, sedimentasi, dan material penghambat aliran air yang sebelumnya ditangani secara insidental. Melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, disertai edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, PROKASIH berhasil mewujudkan sungai yang lebih bersih, aliran air yang lebih lancar, mengurangi risiko penyumbatan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga menjadi model pengelolaan sungai berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.	Dinas Lingkungan Hidup
5	Si-Pantas (Sistem Pendistribusian Beras Tepat Sasaran)	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan instrumen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menjaga ketahanan pangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, bencana sosial, gagal panen, gangguan distribusi, maupun lonjakan harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Penyaluran beras CPPD dilakukan secara selektif sesuai kondisi yang ditetapkan oleh Bupati melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, kemudian diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data penerima dan mengkaji kondisi, jumlah calon penerima, kebutuhan beras, serta kelengkapan administrasi sebagai dasar rekomendasi penyaluran. Setelah mendapat persetujuan, beras CPPD disalurkan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan atau mekanisme lain yang ditetapkan, disertai penandatanganan berita acara serah terima dan dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas. Mekanisme ini memastikan penyaluran bantuan berlangsung cepat, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung stabilitas pangan daerah serta melindungi masyarakat pada saat menghadapi kondisi darurat atau kerawanan pangan sementara.	Dinas Ketahanan Pangan
6	Gerakan Gemar Membaca (GEMARCA)	Gerakan Gemar Membaca merupakan inovasi untuk meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda, melalui penyediaan pojok baca, kegiatan membaca rutin, diskusi buku, dan lomba literasi yang melibatkan sekolah, perpustakaan, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan wawasan, serta membentuk budaya belajar sepanjang hayat sehingga mampu mendukung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang unggul serta berdaya saing	
7	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Inovasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penanganan korban pada saat terjadi bencana melalui sistem respons yang terkoordinasi. Inovasi ini mengintegrasikan pelaporan kejadian, mobilisasi tim penyelamat, pemetaan lokasi terdampak, pencarian korban, pemberian pertolongan pertama, hingga proses evakuasi ke lokasi yang aman atau fasilitas kesehatan dengan melibatkan BPBD, TNI/Polri, tenaga kesehatan, relawan, pemerintah desa, dan unsur terkait lainnya. Dengan dukungan prosedur operasional yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, inovasi ini bertujuan mempercepat waktu tanggap darurat, meminimalkan risiko korban jiwa, meningkatkan keselamatan masyarakat terdampak, serta mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih cepat, terpadu, efektif, dan akuntabel.	Badan Penangulangan Bencana Daerah
8	E-GASTRIK (Edukasi Gas dan Listrik) Sobat DAMKAR	Inovasi Edukasi Keselamatan Penggunaan Gas LPG dan Listrik merupakan program sosialisasi dan pelatihan bagi ibu rumah tangga, anak-anak, dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaan kompor gas dan instalasi listrik yang aman, pencegahan kebocoran gas, serta penanganan awal kebakaran. Melalui metode presentasi dan simulasi, program ini terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan, sehingga mampu mengurangi risiko kebakaran dan kecelakaan akibat penggunaan LPG maupun listrik serta mendorong terbentuknya budaya keselamatan di lingkungan masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan	Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan merupakan inovasi untuk mewujudkan kepastian hukum wilayah, tertib administrasi pemerintahan, serta akurasi data spasial melalui proses yang sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan pemetaan berbasis teknologi GNSS, pemasangan pilar batas, serta legalisasi hasil melalui berita acara dan Peraturan Kepala Daerah dengan verifikasi teknis Badan Informasi Geospasial (BIG). Melalui pendekatan musyawarah dan pemanfaatan teknologi, inovasi ini mampu meminimalkan sengketa batas wilayah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
10	Pendampingan dan Evaluasi Risk Register (RR) Perangkat Daerah	Pendampingan dan Evaluasi Risk Register Perangkat Daerah merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja organisasi. Inovasi ini dilaksanakan melalui tahapan standardisasi instrumen, pendampingan interaktif, evaluasi dan validasi dokumen, serta monitoring berkala yang terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan pendampingan yang sistematis, setiap risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dimitigasi, dan dipantau secara terukur sehingga mendukung penguatan SPIP, Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pencapaian sasaran strategis perangkat daerah	Inspektorat
11	CHILBAS (Channel Informasi Layanan Bus Anak Sekolah)	CHILBAS (Channel Informasi Layanan Bus Anak Sekolah) merupakan inovasi digital Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara yang memanfaatkan WhatsApp Channel sebagai media resmi penyebaran informasi layanan Bus Sekolah Gratis. Inovasi ini hadir untuk memberikan informasi jadwal, rute, perubahan layanan, serta edukasi transportasi secara cepat, mudah diakses, transparan, dan akurat kepada pelajar, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Melalui CHILBAS, penyebaran informasi menjadi lebih efektif dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi pelajar, kepuasan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan Bus Sekolah Gratis	Dinas Perhubungan
12	PROGRAM REVIEW	Inovasi program review merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang mereplikasi praktik Program Review Pemerintah Jepang dengan pendampingan BSKDN Kemendagri, BPSDM, Yayasan Nusantara Sejati, dan Yayasan Koso Nippon Jepang. Inovasi ini mengubah pola evaluasi program pemerintah dari sekadar pelaporan administratif menjadi evaluasi yang partisipatif, transparan, dan berbasis bukti melalui pelibatan masyarakat sebagai warga penilai (citizen reviewer) serta tim evaluator yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, LSM, dan praktisi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)	Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu platform digital untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Di Kabupaten Lampung Utara, MPPD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan mempermudah pengajuan perizinan, khususnya Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan, melalui sistem daring yang terintegrasi dengan fitur pelacakan dan verifikasi otomatis. Inovasi ini mendukung transformasi birokrasi modern melalui peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi proses, kemudahan akses, serta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
14	IP KESBANGPOL	Inovasi Penguatan Ideologi Pancasila pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara merupakan program strategis untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter masyarakat melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Inovasi ini dilaksanakan melalui sosialisasi, pendidikan kebangsaan, pembentukan Duta Pancasila, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pemuda guna meningkatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat yang nasionalis, toleran, berintegritas, serta memiliki ketahanan terhadap radikalisme, intoleransi, hoaks, dan konflik sosial sehingga mampu memperkuat persatuan dan kesatuan di Kabupaten Lampung Utara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	GERBANG SEJAHTERA (Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan Terpadu Menuju Sejahtera)	GERBANG SEJAHTERA (Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan Terpadu Menuju Sejahtera) merupakan inovasi penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Inovasi ini menempatkan keluarga miskin sebagai pusat intervensi melalui pemutakhiran data, penyusunan rencana keluarga (One Family One Plan), pelaksanaan program terpadu seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, serta pendampingan, monitoring, dan evaluasi hingga tercapai kemandirian keluarga. Dengan pendekatan tersebut, GERBANG SEJAHTERA diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara berkelanjutan	Dinas Sosial
16	KENDALI PD: Kendali dan Evaluasi Kinerja Mandiri Perangkat Daerah Berbasis Data	Penyaluran beras CPPD dilakukan secara selektif sesuai kondisi yang ditetapkan oleh Bupati melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, kemudian diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data penerima dan mengkaji kondisi, jumlah calon penerima, kebutuhan beras, serta kelengkapan administrasi sebagai dasar rekomendasi penyaluran. Setelah mendapat persetujuan, beras CPPD disalurkan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan atau mekanisme lain yang ditetapkan, disertai penandatanganan berita acara serah terima dan dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas. Mekanisme ini memastikan penyaluran bantuan berlangsung cepat, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung stabilitas pangan daerah serta melindungi masyarakat pada saat menghadapi kondisi darurat atau kerawanan pangan sementara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
17	WO SPBE (Wokshop Online Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	WO SPBE (Workshop Online Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan inovasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui workshop daring dan pendampingan teknis oleh Tim SPBE Kementerian PANRB untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPBE serta melakukan pengisian aplikasi SPBE Versi 2 (SPBE V2). Kegiatan ini meliputi penyampaian materi, praktik pengisian aplikasi, konsultasi, verifikasi dokumen eviden, dan monitoring tindak lanjut sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, pemenuhan indikator penilaian yang lebih optimal, peningkatan nilai Indeks SPBE, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Unggul (PAKSU)	Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Unggul merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat desa melalui pendekatan berbasis teknologi, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini diawali dengan analisis kebutuhan penduduk, dilanjutkan dengan perencanaan layanan, penerapan pelayanan terpadu melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan program jemput bola, serta didukung monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, inovasi ini mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya desa yang unggul, mandiri, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Curahan Hati Kesehatan Reproduksi Remaja (CURHAT KEPO)	CURHAT KEPO (Curahan Hati Kesehatan Reproduksi Remaja) merupakan inovasi edukasi dan konsultasi kesehatan reproduksi bagi remaja yang bertujuan meningkatkan literasi, kesadaran, dan perilaku hidup sehat melalui pendekatan yang interaktif, aman, dan mudah diakses. Inovasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap masih rendahnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi, tingginya risiko pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS/HIV), kekerasan seksual, serta stunting. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di 23 kecamatan, penyuluhan di sekolah, penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), konsultasi dengan tenaga kesehatan, serta forum diskusi yang melibatkan remaja, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui inovasi ini diharapkan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi meningkat, perilaku berisiko dapat dicegah, angka pernikahan dini dan penyakit menular seksual menurun, serta terwujud generasi muda yang sehat, bertanggung jawab, dan berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
20	Olahan Ikan Kreatif Berkualitas Berdaya Saing (Oke Berdasi)	OKE BERDASI (Olahan Ikan Kreatif Berkualitas Berdaya Saing) merupakan inovasi pemberdayaan Poklahsar, UMKM, dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan melalui diversifikasi produk olahan ikan. Inovasi ini dilaksanakan melalui identifikasi potensi dan kebutuhan, pelatihan pengolahan produk, peningkatan kualitas dan legalitas usaha, penguatan kapasitas manajemen serta pemasaran digital, hingga pendampingan dan monitoring keberlanjutan usaha. Melalui OKE BERDASI diharapkan tercipta produk olahan ikan yang inovatif, aman, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan keterampilan, pendapatan, akses pasar, serta memperkuat pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah berbasis sektor perikanan	Dinas Perikanan
21	Kurikulum Hidup Dari Lemari Menuju Aksi Nyata (Panduan Praktis Merancang Kurikulum Hidup)	Kurikulum Hidup: Dari Lemari Menuju Aksi Nyata merupakan inovasi berupa panduan praktis penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun Pelajaran 2025/2026 yang bertujuan mengubah kurikulum dari sekadar dokumen administratif menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Inovasi ini menyediakan template yang komprehensif dan aplikatif bagi jenjang SD dan SMP, mencakup landasan regulasi, analisis karakteristik sekolah, penyusunan visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran dan asesmen yang selaras dengan profil lulusan. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam yang kontekstual, bermakna, dan menyenangkan, inovasi ini diharapkan meningkatkan kualitas implementasi kurikulum, memperkuat kapasitas pendidik, serta mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif, bermutu, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik	Dinas Pendidikan

Sumber : Analisis, 2026

Pada Tahun 2026, inovasi daerah yang dikembangkan menunjukkan karakteristik yang beragam dan mencakup berbagai urusan pemerintahan. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, hingga transformasi digital pemerintahan. Pada aspek pelayanan publik, inovasi seperti SEHATI, PAKSU, CHILBAS, Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), serta E-GASTRIK menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, kemudahan, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut memperkuat pendekatan pelayanan yang inklusif dengan menjangkau kelompok rentan, memanfaatkan teknologi informasi, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat desa.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, inovasi PERISAI, AKSELA, Pendampingan dan Evaluasi Risk Register, PROGRAM REVIEW, KENDALI PD, serta WO SPBE menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pengendalian kinerja berbasis data, penerapan manajemen risiko, dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Inovasi tersebut mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, inovasi GERBANG SEJAHTERA, Si-Pantas, CURHAT KEPO, OKE BERDASI, dan Gerakan Gemar Membaca (GEMARCA) menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi produktif masyarakat, serta penguatan budaya literasi. Berbagai inovasi tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah. Pada aspek lingkungan hidup dan ketahanan daerah, inovasi PROKASIH, Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan, serta inovasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kepastian tata kelola wilayah, serta memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara telah mengarahkan inovasi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ke depan, pengembangan inovasi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan teknologi digital, replikasi inovasi yang berhasil, serta penguatan budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, inovasi daerah diharapkan mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berdaya saing.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi, Prospek dan Tantangan Perekonomian Global

3.1.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Sepanjang tahun 2025, performa ekonomi global menunjukkan pola divergensi antarkawasan. Negara-negara berkembang di Asia, termasuk India, Vietnam, dan Indonesia, menjadi motor penggerak utama pertumbuhan dunia. Kinerja konsumsi domestik yang solid dan akselerasi investasi infrastruktur baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik maupun kemajuan digitalisasi (artificial intelligence/data center) mampu memperkuat prospek kawasan ini. Sebaliknya, negara-negara maju cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan akibat tekanan inflasi yang persisten, lonjakan biaya energi, serta pelemahan sektor industri manufaktur. Dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), hubungan ekonomi antara AS Tiongkok, dan eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi faktor yang menentukan arah perekonomian dunia. Ketegangan dagang yang meningkat melalui kebijakan tarif agresif menimbulkan ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan. Stabilitas hubungan AS-Tiongkok menjadi krusial karena setiap perubahan kebijakan dapat berpengaruh pada arus perdagangan, investasi, dan rantai pasok global secara signifikan. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah berpotensi menimbulkan rantai pasok energi yang akan memicu lonjakan harga komoditas dan tekanan inflasi. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah, mengalami tren menurun pada 2025, tetapi mengalami kenaikan di awal 2026 yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Pelemahan di 2025 tersebut disebabkan oleh proyeksi surplus produksi global dengan kisaran harga berada pada level USD60 per barel. Harga batu bara juga terus mengalami tren penurunan pada 2025 sejalan dengan komitmen banyak negara untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan rendah emisi. Penurunan harga komoditas energi akan memberikan tekanan pada pendapatan negara-negara pengekspor sumber daya alam, termasuk Indonesia. Potensi dampak dari hal-hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada penerimaan negara, tetapi juga pada strategi diversifikasi ekonomi yang semakin mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Pergerakan harga komoditas lain beragam, dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan percepatan transisi energi hijau. Harga emas mencetak rekor historis pada tahun 2025 dengan kenaikan rata-rata sebesar 65 persen sebagai dampak dari pelarian investor ke aset perlindungan nilai di tengah ketidakpastian global. Komoditas logam industri seperti tembaga juga mengalami penguatan signifikan yang didorong oleh lonjakan permintaan masif untuk pembangunan pusat data dan infrastruktur kendaraan listrik global. Tren ini sekaligus menegaskan pergeseran kebutuhan global menuju material yang mendukung transformasi digital dan energi bersih. Aktivitas manufaktur global menunjukkan fragmentasi antara ekspansi di Asia dan kontraksi di negara maju. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur India memimpin zona ekspansi dengan level 59,1 mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap permintaan domestik dan ekspor. Sebaliknya, Eropa dan Jepang terjebak dalam zona kontraksi akibat gangguan rantai pasok dan pelemahan ekspor.

Meskipun sektor jasa sempat menjadi penopang ekonomi, ketahanannya mulai tergerus oleh penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga pokok yang melampaui pertumbuhan upah riil juga menekan konsumsi global sehingga memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Kondisi sektor keuangan global masih volatil dengan sensitivitas tinggi terhadap arah kebijakan moneter bank sentral utama.

Pasar ekuitas global sempat mengalami penguatan yang didorong oleh optimisme terhadap sektor teknologi dan kecerdasan artifisial, namun kembali terkoreksi akibat indikasi inflasi yang persisten dan perubahan kebijakan suku bunga. Di pasar obligasi, selisih suku bunga US Treasury 10-Year Bond dan Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun cenderung terjaga stabil di kisaran 200 basis poin, mencerminkan persepsi risiko yang terjaga. Namun, volatilitas tetap tinggi karena investor berpotensi untuk menyesuaikan portofolionya terhadap ketidakpastian arah kebijakan moneter. Dominasi dolar Amerika Serikat memicu tekanan depresiasi pada mata uang negara berkembang. Hal tersebut juga meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing sehingga berpotensi mempersempit ruang fiskal negara berkembang. Ketidakpastian arah likuiditas global menuntut otoritas keuangan untuk selalu waspada terhadap potensi pembalikan arus modal secara tiba-tiba. Stabilitas sistem keuangan nasional akan menjadi prioritas utama mengingat guncangan eksternal dapat bertransmisi ke sektor riil dan memperburuk prospek ekonomi domestik.

3.1.1.2 Prospek serta Tantangan Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global di tahun 2027 diproyeksikan memasuki fase pemulihan yang lebih stabil, namun sangat rentan terhadap guncangan geopolitik. Momentum ini akan sangat dipengaruhi oleh tingginya investasi pada teknologi kecerdasan artifisial serta rekonfigurasi hubungan dagang antar kekuatan ekonomi besar dunia. Berakhirnya masa transisi tarif di akhir 2026 dan penguatan blok perdagangan regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan hilirisasi di pasar berkembang diprediksi menjadi katalis utama yang menentukan arah aliran modal global. Di sisi lain, tertahannya proses normalisasi kebijakan moneter pasca-era suku bunga tinggi karena eskalasi konflik geopolitik akan menjadi tantangan bagi ketahanan daya beli domestik serta keberlanjutan beban utang di berbagai negara berkembang yang memiliki ruang fiskal terbatas. Pertumbuhan ekonomi global dalam fase pemulihan ini diproyeksikan akan berada dalam tren stabil namun melambat. OECD memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,9 persen di 2026 dan 3,0 persen di 2027. Sejalan dengan itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 3,1 persen di 2026 dan 3,2 persen di 2027. Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan yang lebih pesimis dengan 2,6 persen di 2026 dan 2,7 persen di 2027. Meskipun angka tersebut menunjukkan moderasi dibandingkan dekade sebelumnya, resiliensi pertumbuhan ekonomi global pada jangka menengah didorong oleh adaptabilitas sektor swasta terhadap pergeseran kebijakan perdagangan serta kontribusi positif dari integrasi teknologi digital. Laju inflasi global diperkirakan terus melandai meskipun prosesnya berjalan cukup lambat. Bank Dunia memproyeksikan inflasi global diprediksi turun ke level 3,8 persen pada 2026 dan menyentuh 3,4 persen pada 2027 seiring dengan kebijakan moneter yang tetap relatif ketat di banyak negara. Penurunan ini didukung oleh normalisasi rantai pasok dan meredanya tekanan harga pangan, meskipun risiko proteksionisme pangan tetap membayangi. Persistensi tingkat upah pada sektor jasa tetap menjadi tantangan utama yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan. Selain itu, kesenjangan inflasi yang lebih lebar dibandingkan di negara berkembang juga menjadi tantangan. Laju kenaikan harga di wilayah ini diprediksi tetap tinggi akibat besarnya biaya distribusi domestik serta kerentanan yang lebih besar terhadap volatilitas nilai tukar.

Sejalan dengan melandainya inflasi, kebijakan moneter global akan memasuki fase normalisasi yang hati-hati untuk menghindari risiko resesi. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan secara bertahap menuju level netral di kisaran 3,0–3,5 persen pada akhir 2027, langkah yang kemungkinan diikuti oleh European Central Bank (ECB) ke level 2,5 persen. Sebaliknya, Bank of Japan diperkirakan tetap menaikkan suku bunga menuju 1,0 persen guna mengakhiri era kebijakan ultra-longgar. Meskipun tren suku bunga global menurun, suku bunga riil di berbagai negara maju dan berkembang diperkirakan tetap bertahan di level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata prapandemi

untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Harga komoditas global diprediksi akan mengalami koreksi struktural. Secara umum, indeks harga menunjukkan kecenderungan menurun hingga akhir 2027, kecuali jika terjadi eskalasi konflik di wilayah produsen utama. Indeks harga energi diperkirakan melemah seiring melimpahnya pasokan minyak mentah dari produsen non-OPEC+ yang berpotensi menahan harga Brent di bawah USD70 per barel, dalam skenario tanpa gangguan pasokan signifikan. Sebaliknya, harga logam dasar dan mineral kritis yang dibutuhkan untuk transisi energi diprediksi tetap tangguh karena permintaan jangka panjang untuk teknologi hijau terus meningkat secara konsisten, menjadikan mineral kritis sebagai komoditas geopolitik baru. Perdagangan dunia diperkirakan mengalami normalisasi setelah sempat bergejolak akibat penyesuaian kebijakan tarif AS. Pertumbuhan arus barang diprediksi melandai ke angka 2,6 persen pada 2026 sebelum menuju 3,1 persen pada 2027 seiring dengan terbentuknya koridor logistik baru yang lebih efisien, namun lebih terfragmentasi. Bank Dunia memproyeksikan bahwa laju pertumbuhan perdagangan di negara-negara berkembang akan melampaui negara maju, didorong oleh integrasi manufaktur regional. Secara permanen, pola perdagangan global mengalami pergeseran menuju fragmentasi geoekonomi, di mana aliran barang lebih terkonsentrasi pada kemitraan strategis berdasarkan kedekatan geopolitik daripada sekadar efisiensi biaya.

Tantangan perekonomian global dalam jangka menengah berasal dari lima faktor risiko utama. Faktor pertama adalah tensi geopolitik dan konflik antarnegara yang melibatkan rivalitas kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia, serta konflik di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Ketegangan ini menjadi sumber utama ketidakstabilan internasional yang mengganggu jalur logistik energi dan pangan dunia, yang pada gilirannya memicu volatilitas harga komoditas global. Faktor kedua berkaitan dengan kecenderungan proteksionisme dan fragmentasi ekonomi melalui kebijakan yang bersifat mementingkan kepentingan domestik secara sepihak, perluasan tantangan nontarif, serta strategi pengurangan risiko yang melemahkan sistem perdagangan bebas. Faktor ketiga adalah volatilitas sektor keuangan. Hal ini dipicu oleh fluktuasi suku bunga, beban utang pemerintah negara-negara maju, dan prediksi beberapa lembaga internasional yang menunjukkan adanya potensi bubble di pasar modal karena investasi sangat besar di sektor teknologi dan AI. Kombinasi ketiga faktor tersebut berpotensi mendorong aliran modal ke aset-aset safe-haven dan meningkatkan risiko pelarian modal dari pasar negara berkembang, dan pada gilirannya mempersempit ruang kebijakan stabilisasi global. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kuartal ke depan, bahkan hingga tahun 2027, risiko geopolitik, proteksionisme dan fragmentasi ekonomi masih menjadi faktor utama. Perang antara AS/Israel dengan Iran yang saat ini mengalami kecenderungan eskalasi serta meningkatkan volatilitas sektor keuangan, krisis energi, dan pangan yang mendorong kenaikan inflasi dan menurunkan outlook perekonomian global berujung pada stagflasi. Faktor risiko keempat mencakup disrupsi teknologi melalui adopsi AI. Perkembangan AI memunculkan peluang dan risiko yang berpotensi mengubah struktur ekonomi secara mendalam, seperti yang sebelumnya terjadi dengan listrik dan internet. AI berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi manfaat ini tidak muncul secara instan, dan harus dibarengi dengan upaya peningkatan investasi serta penguatan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. AI juga mendorong capital deepening melalui investasi besar pada pusat data, semikonduktor, dan layanan cloud computing, sehingga pola akumulasi modal bergeser dari industri fisik ke infrastruktur digital. Di sisi lain, AI mengubah pasar tenaga kerja dengan mengotomatisasi beberapa jenis tugas terutama di sektor jasa. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antarsektor, sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan di sektor riil. Transformasi AI juga membawa risiko makroekonomi dan keuangan. Investasi besar di sektor ini dapat memicu gelembung aset teknologi, seperti pada krisis dot-com atau telekomunikasi di awal tahun 2000-an dan berpotensi mengalami koreksi yang dapat berujung pada terjadinya krisis keuangan.

Faktor risiko kelima adalah perubahan iklim dan transisi energi semakin bersifat struktural. Tantangan ekonomi baru yang muncul dari risiko ini berupa tekanan pada biaya energi dan dampak turunan terhadap inflasi global yang sulit diprediksi secara akurat. Namun, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta transisi energi juga membuka peluang investasi dan adopsi teknologi di sektor energi yang dalam jangka panjang mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Global Risks Report 2026 (WEF, 2026) menunjukkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, dan ketidakpastian global telah menggeser perhatian dunia dari isu lingkungan dalam horizon dua tahun ke depan. Akan tetapi, perubahan iklim tetap menjadi risiko jangka panjang paling signifikan berupa gangguan rantai pasok, risiko inflasi pangan, serta potensi tantangan perdagangan berbasis lingkungan. Tanpa antisipasi melalui investasi ketahanan iklim, diversifikasi pembiayaan, dan kebijakan fiskal yang adaptif, akumulasi dampak perubahan iklim berisiko menggerus PDB, memperberat APBN, dan menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

3.1.2 Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Domestik

3.1.2.1 Kondisi Perekonomian Domestik

Perkembangan Ekonomi Sektor Riil

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan solid. Setelah tumbuh 3,70 persen pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022 dan tetap terjaga pada level tinggi sebesar 5,05 persen pada 2023. Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, serta didukung berbagai langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen dan melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Memasuki tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,11 persen. Secara umum, capaian tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Selain itu, penempatan kas negara pada bank komersial turut mendukung likuiditas perekonomian. Dari sisi produksi, sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi sumber utama pertumbuhan. Dalam konteks ini, APBN berperan strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan, sehingga perekonomian tidak hanya tumbuh kuat tetapi juga berkelanjutan dengan stabilitas makrofiskal yang tetap terjaga.

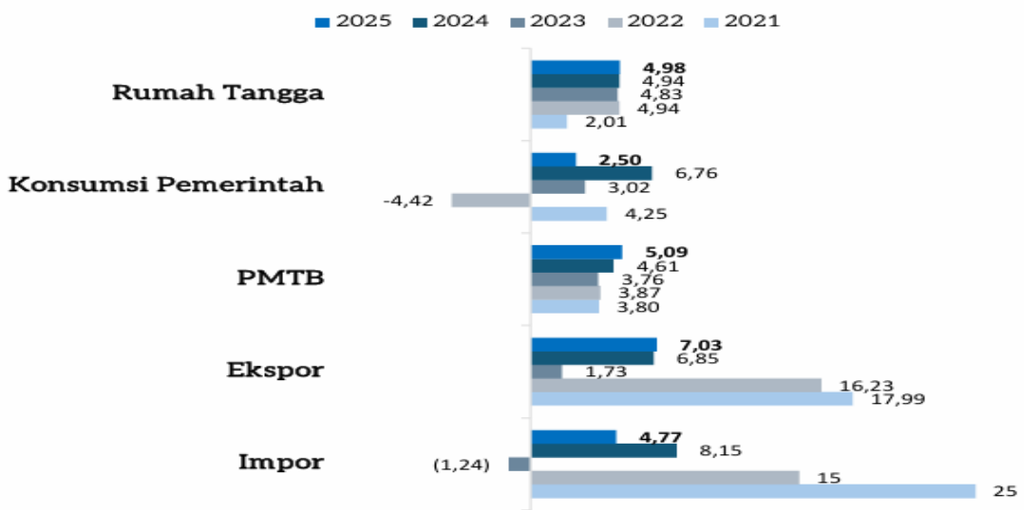
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2026

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kinerja yang kuat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2021 sebesar 2,01 persen menunjukkan pemulihan pascapandemi COVID-19. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga menunjukkan tren yang resilien dan kuat, yaitu sebesar 4,94 persen pada tahun 2022 menjadi 4,98 persen pada tahun 2025. Kinerja positif ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menekan gejolak kenaikan harga. Lebih lanjut, untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyalurkan berbagai program bantuan dan insentif sosial. Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), melaksanakan program magang, serta menerapkan kebijakan diskon transportasi yang membantu meningkatkan daya beli sekaligus mobilitas masyarakat. Selain itu, APBN juga berperan dalam mendukung stabilitas kondisi perekonomian dan kekondusifan kondisi ketenagakerjaan yang mampu mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga melalui paket stimulus ekonomi, antara lain melalui program magang perguruan tinggi, perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, dan program padat karya tunai.

Gambar 3.2
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran, 2021-2025 (% yoy)

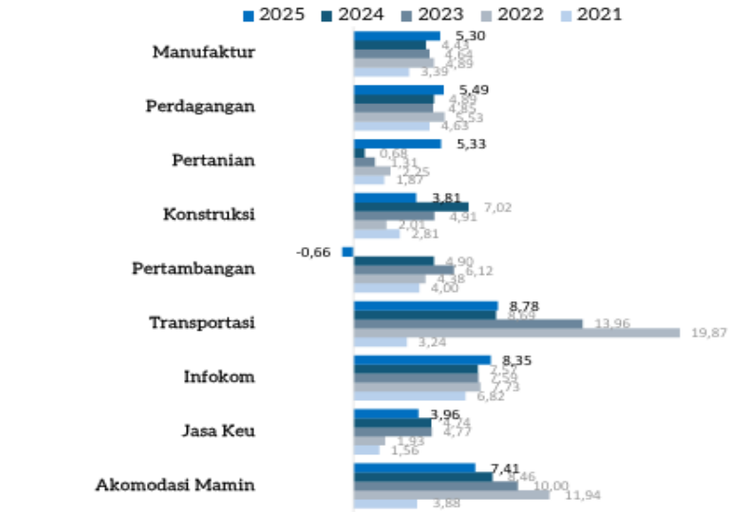


Sumber: BPS, 2026

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh positif. P-KP pada periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif namun selaras dengan dinamika belanja negara sebagai shock absorber dan katalis dalam merespon dinamika perekonomian, baik global maupun domestik. PMTB dapat tumbuh 5,09 persen pada tahun 2025, ditopang oleh kinerja komponen bangunan serta mesin dan bangunan. Investasi bangunan tumbuh sebesar 3,25 persen, seiring kuatnya realisasi belanja modal Pemerintah dan BUMN yang mendorong aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, investasi mesin dan perlengkapan meningkat signifikan sebesar 17,99 persen yang mengindikasikan penguatan kapasitas produksi dan aktivitas sektor industri pengolahan. Investasi kendaraan turut berekspansi sebesar 5,16 persen, sejalan dengan meningkatnya impor barang modal dan peralatan transportasi yang mendukung aktivitas logistik dan distribusi. Momentum investasi tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kepercayaan investor tetap kuat, tercermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 12,66 persen sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat didukung juga oleh kinerja ekspor barang dan jasa riil Indonesia yang terus tumbuh positif. Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, impor Indonesia mulai meningkat pascakontraksi tajam pada masa pandemi.

Gambar 3.3
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi, 2021-2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2026

Jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Sektor Manufaktur yang berekspansi kuat dan berkontribusi 19,01 persen terhadap PDB. Setelah tumbuh relatif stabil di tahun 2021-2024 pada kisaran di atas 4,5 persen, Sektor Manufaktur dapat terakselerasi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,30 persen pada tahun 2025. Kinerja ini sejalan dengan PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif. Kuatnya permintaan domestik dan pulihnya permintaan global menjadi motor penggerak utama. Secara struktural, pertumbuhan tersebut ditopang kuat oleh industri berbasis hilirisasi. Industri logam dasar melonjak tajam sebesar 15,71 persen didorong tingginya permintaan ekspor produk besi dan baja. Industri mesin dan perlengkapan juga tumbuh impresif mencapai 13,98 persen. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh 6,38 persen seiring peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya. Sektor Manufaktur diperkirakan tetap menjadi penopang utama perekonomian. Sektor ini diharapkan tumbuh persisten untuk memperkokoh struktur perekonomian nasional. Prospek positif tersebut bersumber dari keberlanjutan hilirisasi dan penguatan daya saing industri di pasar global. Pemerintah akan konsisten mendorong sektor strategis yang memiliki nilai tambah dan kapasitas produksi tinggi. Kebijakan transformasi industri guna memperkuat daya serap tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing terus didorong oleh Pemerintah. Sektor pertanian menunjukkan dinamika yang relatif resilien dan berperan penting dalam menopang pertumbuhan sisi sektoral. Pada 2023-2024, Sektor pertanian mengalami perlambatan dari 2,25 persen (2022) menjadi 1,31 persen (2023) dan 0,68 persen (2024) sebelum akhirnya melonjak signifikan pada 2025. Sektor pertanian tumbuh 5,33 persen pada tahun 2025 didorong panen raya padi dan jagung, penyempurnaan distribusi pupuk, dan penyempurnaan jaringan irigasi. Peningkatan permintaan domestik terkait kebutuhan program MBG serta membaiknya teknologi dan sarana budidaya turut mendorong pertumbuhan subsektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan tumbuh 9,94 persen, peternakan 7,78 persen, dan perikanan 4,95 persen. Pada tahun 2026, sektor pertanian diperkirakan masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional melalui produksi yang berkelanjutan dan stabilitas pasokan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor pada komoditas pangan strategis.

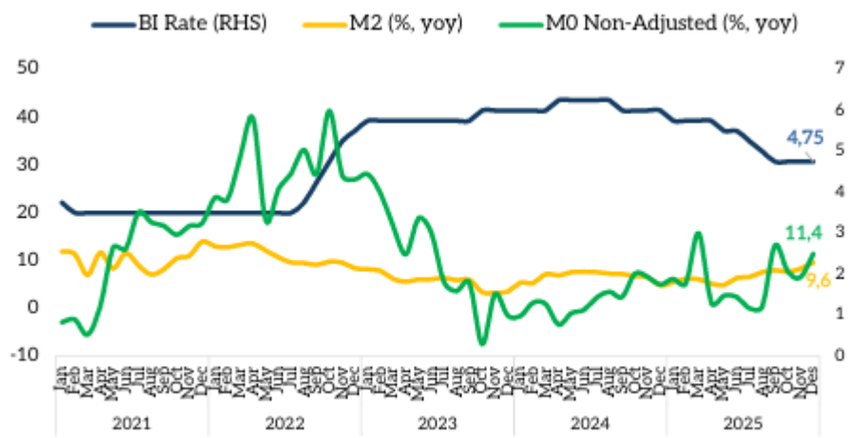
Perkembangan Sektor Moneter dan Keuangan

Kebijakan pelonggaran moneter Indonesia searah dengan tendensi pelonggaran moneter global. Peningkatan likuiditas terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

dengan tetap menjaga stabilitas. Pada tahun 2021, Indonesia masih dalam fase pemulihan ekonomi menerapkan suku bunga rendah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dilakukan The Fed. Pada pertengahan tahun 2022 hingga 2024, terjadi pengetatan kebijakan moneter di tengah gejolak ekonomi global akibat eskalasi konflik Rusia Ukraina sehingga mendorong kenaikan BI rate. Pada periode tersebut, terjadi fenomena "Higher for Longer" di mana suku bunga acuan dunia tetap tinggi untuk waktu yang lama guna meredam inflasi yang tinggi. Dengan kondisi fundamental ekonomi yang stabil, mulai bulan September 2024 hingga 2025, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI rate secara bertahap dari 6,25 persen menuju 4,75 persen. Sejak September 2025 hingga April 2026, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada level 4,75 persen, yang mencerminkan kebijakan moneter yang tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan uang beredar didorong melalui penguatan efektivitas ekspansi likuiditas moneter dan sinergi dengan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan uang primer (M0) sempat tumbuh tinggi pada periode pascapandemi tahun 2021 hingga semester I 2023 yang didorong oleh tingginya excess reserve bank di BI di tengah pengetatan kebijakan moneter. Namun, pada semester II 2023 hingga pertengahan 2025, pertumbuhan uang primer (M0) mengalami tren penurunan, antara lain dipengaruhi penurunan excess reserve bank dan penempatan pada instrumen moneter sehingga likuiditas pada perekonomian relatif terbatas. Pada periode yang sama, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) juga mengalami moderasi dan tumbuh stagnan mencerminkan peran intermediasi perlu ditingkatkan. Pada September 2025, Pemerintah melakukan pemindahan kas negara dari Bank Indonesia ke perbankan untuk mendorong likuiditas perekonomian. Strategi pengelolaan kas sebagai bagian dari kebijakan fiskal ini meningkatkan excess reserve bank sehingga mendorong pertumbuhan M0 sebesar 13,2 persen pada bulan September 2025. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga acuan rendah dan operasi moneter yang lebih longgar, serta didukung oleh penempatan dana Pemerintah di perbankan, mendorong pertumbuhan M0 tumbuh dua digit pada Maret 2026. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk peningkatan likuiditas guna menurunkan cost of fund dan meningkatkan penyaluran kredit dapat berdampak pada kinerja sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Gambar 3.4
Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan Uang Beredar, 2021-2025



Sumber: Bank Indonesia, 2026

Perkembangan pertumbuhan kredit di Indonesia periode 2021–2025 menunjukkan pertumbuhan pascapandemi yang terjaga. Pada 2021, pertumbuhan kredit mulai pulih setelah kontraksi di masa pandemi 2020, didorong pelonggaran kebijakan moneter dan program stimulus pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Memasuki 2022–2023, pertumbuhan kredit semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga, serta investasi dunia usaha. Momentum berlanjut sepanjang 2024 kredit mampu tumbuh dua digit di tengah peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pertumbuhan ini didukung oleh likuiditas perbankan yang kuat, peningkatan dana pihak ketiga, serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pada awal 2025, pertumbuhan kredit masih berada di sekitar 10 persen (yoy), namun dalam tren perlambatan hingga pertengahan tahun disebabkan oleh ekspansi dunia usaha yang lebih berhati-hati, pelonggaran kebijakan moneter yang kurang berdampak terhadap penurunan suku bunga kredit, serta preferensi perusahaan untuk menggunakan pembiayaan internal. Pada bulan September 2025, Pemerintah melakukan pemindahan kas negara sebesar Rp200 triliun di perbankan sebagai strategi cash management untuk turut mendorong likuiditas perekonomian. Penempatan kas negara di perbankan turut berkontribusi terhadap penurunan cost of fund ditunjukkan pada penurunan suku bunga INDONIA, suku bunga deposito, penurunan pemberian deposito special rate dan suku bunga kredit. Pertumbuhan kredit pada bulan Desember 2025 tumbuh tinggi 9,6 persen didorong oleh pertumbuhan kredit investasi. Transmisi terhadap sektor riil akan terus didorong melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat dalam menjaga likuiditas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh relatif stabil dalam mendukung pendanaan perbankan menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan DPK di tahun 2021 tumbuh tinggi didorong preferensi masyarakat untuk menabung di perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi selama pandemi. Memasuki 2022 2023, pertumbuhan DPK termoderasi seiring normalisasi aktivitas ekonomi. Sebagian dana masyarakat mulai dialihkan untuk konsumsi dan investasi sehingga terjadi penurunan pada giro dan tabungan. Setelah sempat menguat semester I 2024 yang didukung peningkatan DPK korporasi, pada semester II 2024 DPK mengalami tren penurunan hingga semester I 2025. Penurunan giro dan simpanan berjangka pada periode tersebut mengindikasikan adanya peralihan preferensi investasi masyarakat pada instrumen nonperbankan seperti emas. Selanjutnya di semester II 2025, DPK mengalami peningkatan dan turut didukung oleh penempatan kas negara pada perbankan, ditunjukkan pertumbuhan konsisten dua digit dari bulan September. Pada awal tahun 2026, DPK tumbuh tinggi didorong pertumbuhan simpanan berjangka dan giro bank. DPK perbankan bulan Maret 2026 tumbuh tinggi sebesar 13,6 persen (yoy) ditopang oleh peningkatan DPK dari korporasi. Peningkatan pertumbuhan giro yang tinggi dari peningkatan transaksi korporasi mengindikasikan adanya kebutuhan jangka pendek yang tinggi dalam waktu dekat untuk mendukung kebutuhan aktivitas bisnis. Ke depan, likuiditas perbankan akan terus dijaga dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong transmisi ke sektor riil.

3.1.2.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Domestik

Berkaca pada kinerja ekonomi tahun 2025, Pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2026 dapat tumbuh lebih kuat. Optimisme ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, kualitas belanja pemerintah yang semakin baik, kinerja sektor eksternal yang kompetitif, serta peningkatan investasi dengan peran sektor swasta yang semakin besar. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen (yoy), didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan akselerasi belanja negara seiring dengan berjalannya berbagai program prioritas pemerintah. Pemerintah akan terus mencermati dinamika ekonomi global dan domestik dengan memastikan kebijakan fiskal tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan selaras dengan kebijakan sektor keuangan. Melalui sinergi kebijakan tersebut, seluruh sumber pertumbuhan diharapkan dapat bergerak secara harmonis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Memasuki tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap akan tumbuh kuat. Sepanjang triwulan

I 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemerintah seperti bantuan pangan, pemberian THR, serta diskon tarif transportasi. Momentum Ramadhan dan Idulfitri juga mendorong peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode tersebut.

Peningkatan konsumsi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas transaksi perdagangan elektronik. Selain itu, berbagai program prioritas pemerintah seperti program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan relatif kuat dengan pertimbangan dinamika fiskal akhir 2025 serta peluang akselerasi belanja pada awal tahun anggaran. Pada triwulan I 2026 pertumbuhan P-KP mencapai 21,81 persen (yoy). Komponen konsumsi pemerintah (P-KP) masih berada pada tren ekspansi, ditopang oleh peningkatan belanja pegawai, terutama akibat kenaikan jumlah PNS, PPPK, TNI dan Polri, serta peningkatan belanja barang-jasa yang tumbuh signifikan seiring naiknya realisasi belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Akselerasi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 semakin mengoptimalkan konsumsi pemerintah baik pusat dan daerah melalui pencairan THR PNS, PPPK, TNI, dan Polri pada bulan Maret 2026. Selain itu, program MBG mendorong peningkatan belanja barang yang cukup tinggi, mengingat jumlah SPPG triwulan I 2026 jauh lebih banyak dibanding triwulan yang sama 2025. Sinergi antara percepatan belanja pegawai, intensifikasi pelaksanaan MBG, serta basis pertumbuhan yang relatif rendah pada periode yang sama tahun sebelumnya memberikan landasan yang cukup untuk P-KP tumbuh kuat. Peranan investasi diperkirakan terus meningkat seiring peningkatan partisipasi sektor swasta dan optimalisasi operasional Danantara. Pada triwulan I 2026, PMTB tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy). Peningkatan investasi ini didorong oleh proyek-proyek yang dilakukan Danantara dan realisasi investasi swasta yang cukup tinggi. Selain itu peningkatan investasi juga didukung oleh pelaksanaan program prioritas Presiden antara lain pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, Sekolah Garuda Baru, dan Sekolah Rakyat. Ke depan, prospek investasi diperkirakan tetap terjaga didukung stabilitas makroekonomi domestik serta kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha. Belanja modal Pemerintah terus dioptimalkan sebagai katalis strategis. Momentum positif ini turut dijaga melalui pelaksanaan PKPN yang difokuskan pada proyek-proyek strategis jangka menengah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong penguatan investasi melalui optimalisasi peran BPI Danantara dan peningkatan peran sektor swasta untuk memperkuat pembiayaan investasi strategis. Ekosistem investasi yang semakin tangguh ini mengakselerasi aliran PMA dan PMDN.

Walaupun outlook 2026 cukup positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk perlambatan pertumbuhan dunia, ketegangan perdagangan internasional. Secara khusus, ketidakpastian global saat ini disebabkan adanya konflik geopolitik yaitu perang Iran dan ketegangan di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global karena kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur utama distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan volatilitas pasar energi global, yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan inflasi dan biaya produksi. Bagi Indonesia, potensi kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan tekanan inflasi domestik, memperbesar beban subsidi energi dalam APBN, serta meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang dapat berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga.

Selain faktor eksternal tersebut, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan domestik yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan pada 2027. Tantangan utama antara lain adalah masih terbatasnya produktivitas sektor manufaktur, ketergantungan pada komoditas primer, serta rendahnya kedalaman sektor keuangan yang membatasi pembiayaan bagi sektor produktif. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja masih menjadi isu penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Tantangan lainnya adalah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar di tengah komitmen untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Dalam hal peningkatan investasi, Indonesia masih dihadapkan tantangan untuk mendorong investasi lebih tinggi. Peningkatan efisiensi regulasi dan koordinasi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik investasi jangka panjang merupakan hal penting yang harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi di 2027 bisa lebih kuat. Dalam jangka menengah, tantangan yang lebih fundamental berkaitan dengan transformasi struktural ekonomi dan peningkatan produktivitas.

Pertumbuhan Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas, sementara kontribusi sektor manufaktur berteknologi tinggi dan industri bernilai tambah masih relatif terbatas. Selain itu, peningkatan produktivitas industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti Indonesia akan menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup dan sesuai untuk penduduk Indonesia yang sebagian besar masih berusia produktif. Tanpa reformasi struktural yang memperkuat daya saing industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat diversifikasi ekonomi, Indonesia berpotensi mengalami “middle-income trap” dan kesulitan mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Di tengah tantangan tersebut, terdapat juga sejumlah peluang yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga memberikan bantalan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, potensi bonus demografi masih bisa dioptimalkan terutama dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan keuntungan struktur penduduk usia produktif maka peluang untuk peningkatan investasi dan produktivitas diberbagai sektor kunci dan unggulan masih terbuka. Selain itu, di Indonesia peluang agar ekonomi tumbuh tinggi masih sangat potensial jika Indonesia melakukan reformasi struktural secara berkelanjutan, peningkatan investasi infrastruktur, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Peran BPI Danantara dan swasta sebagai aktor ekonomi sebagai motor utama dalam mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas juga dapat terus diupayakan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan mengelola risiko eksternal serta domestik secara tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dalam jangka menengah.

3.1.2.3 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Kebijakan fiskal tetap kolaboratif dan terarah untuk mencapai target pembangunan nasional tahun 2027 yang salah satunya diarahkan untuk mendukung PKPN. Kebijakan tersebut memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai ketidakpastian global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi peran APBN menjadi penting untuk memastikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat dijalankan secara efektif. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan program yang lebih terfokus, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas nasional. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan secara efektif, kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan pada 8 klaster PKPN dan klaster pendukung (enabler) yang mencakup 60 program kerja. PKPN diposisikan sebagai instrumen dalam mendukung agenda strategis di bidang

kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Sebagai klaster pendukung (enabler) adalah pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Melalui penataan prioritas program yang lebih jelas, PKPN diharapkan dapat memperkuat efektivitas fungsi alokasi APBN, meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong sinergi pendanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah melalui APBN, Danantara, dan swasta.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,8 – 6,5	5,9 – 7,5	6,0 – 8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500	16.800-17.500	16.800-17.500	16.800-17.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	6,5 – 7,3	5,9 – 6,9	5,9 – 6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70	70 – 95	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (rbph)	610	602 - 615	585 – 677	602 - 797
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	984	934 - 977	956 - 1102	1076 - 1372

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 (Kementerian Keuangan, 2026)

Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian kedepan serta arah pembangunan jangka menengah, maka Pemerintah menyusun strategi fiskal yang menengah yang terefleksi pada postur makro fiskal jangka menengah. Penyusunan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah didesain agar kebijakan fiskal mampu mendukung agenda pembangunan secara optimal dengan tetap menjaga berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut upaya mendorong agar kebijakan fiskal kredibel dan sustainable ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, serta peningkatan kualitas belanja agar semakin produktif, tepat sasaran, dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Pada saat yang sama, pengelolaan defisit dan pembiayaan harus dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan efisien, dengan mengedepankan pengendalian risiko fiskal, pendalaman sumber pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan utang secara prudent untuk menjaga kepercayaan pasar dan ruang fiskal jangka menengah. Kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk memperkuat daya tahan APBN terhadap gejolak, meningkatkan efektivitas sinergi pusat dan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan masyarakat, dan transformasi struktural secara konsisten.

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2026	2027	2029
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5	0,0	0,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,30 – 4,87	4,00 – 4,71
Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,380	0,362 – 0,367	0,372–0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	0,575	0,61
Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	0,7731	0,8038	0,8599
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,00	40,81	46,00

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 (Bappenas, 2026)

3.1.3 Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Lampung

Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen (c to c), menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,55 persen (c to c). Pertumbuhan ini mencerminkan konsistensi positif dalam pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen (c to c). Ketimpangan ini menandakan perlunya optimalisasi sektor-sektor strategis di daerah, termasuk peningkatan nilai tambah produk unggulan, penguatan iklim investasi, serta akselerasi transformasi digital dan infrastruktur. Secara struktural, perekonomian Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 26,21 persen terhadap PDRB. Namun, sektor ini mengalami kontraksi sebesar –2,09 persen, menandakan tekanan produksi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem dan gangguan iklim. Di sisi lain, sektor industri pengolahan justru menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2024.

Dengan kontribusi sebesar 18,93 persen, sektor ini mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 9,09 persen dan menyumbang sekitar 1,60 poin pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan mulai menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan nilai tambah daerah. Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, turut memberikan kontribusi yang kuat dengan porsi 14,25 persen terhadap PDRB dan kontribusi pertumbuhan sekitar 1,03 poin. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 10,04 persen, sejalan dengan peningkatan aktivitas distribusi dan konektivitas wilayah. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy), mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada level 2,61 persen. Penurunan inflasi ini menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian harga di tingkat daerah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan musim panen raya. Inflasi Lampung pada tahun 2024 sejajar dengan inflasi nasional yang juga berada pada level 1,57 persen (yoy). Ini merupakan capaian yang relatif stabil dalam konteks tekanan harga pangan global dan fluktuasi nilai tukar. Sebagai provinsi lumbung pangan, pengendalian distribusi dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras menjadi kunci keberhasilan stabilitas harga. Dalam aspek Pembangunan Manusia, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Lampung mencapai 73,13, naik dari 72,48 di tahun 2023. Pertumbuhan sebesar 0,65 poin ini memperkuat posisi Lampung dalam kategori IPM “tinggi”, sebagaimana telah dicapai sejak tahun 2022. Meskipun demikian, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional maupun regional Sumatera. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus memperkuat program-program yang menyasar kelompok rentan, memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan primer, dan membuka peluang ekonomi yang lebih merata hingga ke desa-desa. Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentasependuduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif selama enam tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara gradual. Pada tahun 2024, NTP Lampung tercatat sebesar 124,98, melampaui NTP nasional yang berada di angka 119,62. Capaian ini mengindikasikan bahwa petani di Lampung mengalami perbaikan daya beli dan pendapatan riil yang lebih tinggi dibandingkan rerata petani

secara nasional. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung se Sumatera berada pada posisi ke 6 (enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Lampung Tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,2 - 5,7 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 - 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Lampung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,9 – 8,9 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,05 - 3,51 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,290 - 0,274 di Tahun 2026.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00
2	Inflasi	Persen	2,5 +- 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,4 - 3,85
4	PDRB Per Kapita ADHB	(Juta Rupiah)	65,3
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,79 - 8,79
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
7	Indeks Gini	Indeks	0273 - 0,279
8	Indeks Kualitas Lingkungan HIdup	Indeks	71,41
9	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	66,73

Sumber : Ranwal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027

Pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 diarahkan dengan tema Pembangunan : “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasi Potensi Daerah”. Arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2027 merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu :

a. Lampung beralih dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pusat pengolahan. Fokus hilirisasi pertanian dan perkebunan ditujukan pada hilirisasi kakao (disiapkan lahan 35.000 ha), kopi, lada, dan tebu.
b. Penguatan UMKM dengan mengintegrasikan produk turunan pertanian dengan UMKM lokal untuk meningkatkan nilai tambah di pasar domestik dan ekspor.
c. Dalam Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estates), Provinsi Lampung menyiapkan lima kawasan industri strategis (seperti di Way Kanan, Tanggamus, dan Mesuji) sebagai basis production estate.
d. Dari sektor Investasi Hijau, proyek strategis berbasis ekonomi karbon dan energi terbarukan untuk mendukung standar global.
e. Lampung fokus pada perbaikan jalur distribusi logistik. Dukungan terhadap reaktivasi atau pemisahan jalur kereta api (misalnya jalur logistik Babaranjang) untuk menurunkan biaya logistik industri.
f. Memperkuat konektivitas antar wilayah guna memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Bandar Lampung, tetapi merata hingga ke pelosok.
g. Penguatan Transformasi Digital dan SDM. Melakukan pembangunan berbasis data, merancang kebijakan ekonomi yang lebih presisi, dan penyiapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan kawasan industri baru guna menekan angka pengangguran.

h. Membangun Ekosistem Ekonomi Desa yang dimana kebijakan utamanya menjadikan ekosistem ekonomi berbasis desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program unggulan "Desaku Maju". Ini melibatkan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani;
i. Hilirisasi Komoditas Unggulan dilakukan sebagai percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) unggulan menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi. Komoditas utama meliputi kelapa sawit, kopi, lada, kakao, padi, jagung, ubi kayu, dan aneka ikan;
j. Peningkatan investasi dan infrastruktur. Pemerintah daerah berupaya mendorong investasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan mempermudah perizinan melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Trans Sumatera ruas Lematang–Pelabuhan Panjang dan pengembangan Kawasan Kota Baru juga diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung konektivitas dan distribusi logistik;
k. Peningkatan Kualitas SDM dan Pengendalian Kemiskinan: Fokus juga diberikan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi untuk mengurangi pengangguran lulusan SMA/SMK. Strategi penanggulangan kemiskinan melibatkan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan; dan
l. Untuk Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi, Lampung memposisikan diri sebagai Lumbung Pangan Nasional. Selain itu, inisiasi lumbung energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Sampah, dan Surya menunjukkan komitmen pada ekonomi hijau dan biru.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan. Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) Membangun Ekosistem ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Provinsi Lampung memegang keyakinan bahwa kekuatan pembangunan ekonomi daerah terletak di akar rumput—di desa-desa yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan lebih dari 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pedesaan, Lampung menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan yang harus diberdayakan, disambungkan, dan dinaikkan kelasnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Lampung tahun 2025–2026 dan ke depan diarahkan untuk membentuk ekosistem desa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing dalam jaringan ekonomi yang lebih luas.

2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah

Upaya meningkatan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik full employment. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

5) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat booming namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

6) Pemerataan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan kebijakan strategis dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya:

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek clean and clear, serta sinergi calender of event promosi investasi dan perdagangan antar intansi dan mendorong penggunaan Local Currency Settlement (LCS).
4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui behaviorally informed policy intervention) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.

5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melaui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.4 Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Lampung Utara

Pertumbuhan ekonomi perlu direlasikan dengan tingkat inflasi meskipun Kabupaten Lampung Utara tidak menjadi lokus perhitungan inflasi, tetapi untuk inflasi digunakan angka Kabupaten dengan karakteristik yang mendekati Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini yaitu Kota Bandar Lampung. Karena tingkat pertumbuhan yang lebih rendah daripada tingkat inflasi mengindikasikan bahwa kenaikan PDRB terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasanya. Namun perlu dicatat bahwa kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Konvergensi pertumbuhan ekonomi dianalisis melalui perbandingan selisih (gap) laju pertumbuhan antara Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung dan Nasional selama periode 2021–2025.

1. Konvergensi terhadap Nasional

Pada tahun 2021, selisih pertumbuhan antara Lampung Utara (2,82%) dan Nasional (3,69%) tercatat sebesar -0,87 persen. Pada tahun 2022, gap melebar menjadi -2,15 persen (3,16% berbanding 5,31%). Namun demikian, sejak tahun 2023 terjadi perbaikan selisih pertumbuhan, yaitu pada tahun 2023 gap -0,82 persen, pada tahun 2024 gap -0,92 persen dan pada tahun 2025 gap +0,01 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan Lampung Utara (5,12%) hampir setara bahkan sedikit melampaui Nasional (5,11%), yang menunjukkan terjadinya proses konvergensi (catching up) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, dalam periode 2021–2025 dapat disimpulkan bahwa terhadap Nasional terjadi pola konvergensi bertahap, khususnya setelah tahun 2022.

2. Konvergensi terhadap Provinsi Lampung

Terhadap Provinsi Lampung, selama periode 2021–2025 Lampung Utara secara konsisten tumbuh sedikit lebih rendah. Selisih pertumbuhan tercatat sebagai berikut : pada tahun 2021 +0,03 persen (sedikit lebih tinggi), pada 2022 -1,12 persen, pada tahun 2023 -0,33 persen, pada tahun 2024 -0,47 persen, dan pada tahun 2025 -0,16 persen. Meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi, selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan tren yang semakin mengecil hingga tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya proses konvergensi moderat terhadap Provinsi Lampung, meskipun belum sepenuhnya terjadi akselerasi yang mampu melampaui rata-rata provinsi secara konsisten.

Secara umum, selama periode 2021–2025 :

- Terhadap Nasional, Lampung Utara menunjukkan pola *catching up* (konvergen), terutama pada tahun 2025 ketika pertumbuhan hampir setara.
- Terhadap Provinsi Lampung, terjadi konvergensi parsial, dengan selisih yang semakin kecil namun belum sepenuhnya melampaui rata-rata provinsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lampung Utara memiliki kapasitas untuk tumbuh sejalan dengan tren nasional, namun masih memerlukan akselerasi sektor unggulan dan penguatan investasi produktif untuk meningkatkan daya saing di tingkat Provinsi. Dalam konteks target RPJMD 2025–2029 sebesar 6–7 persen, strategi pembangunan perlu difokuskan pada penciptaan sumber pertumbuhan baru (*new growth drivers*), peningkatan produktivitas sektor basis, hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan konektivitas dan iklim investasi agar proses konvergensi dapat berlanjut menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara sebelum (2019), semasa pandemi (2020) dan setelah pandemi COVID-19 (masa pemulihan) yaitu tahun 2021-2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari tabel terlihat bahwa proporsi atau kontribusi sektoral di PDRB ADHB dalam 6 (enam) periode tersebut cenderung tidak berubah. Hal ini dapat kita lihat dari besar rerata kontribusi sektoral sebelum COVID (2019) dengan besarannya setelah penurunan pandemi COVID-19, yaitu periode 2021-2025. Dalam tiga periode tersebut, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar, disusul oleh sektor industri pengoahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara yang diukur berdasarkan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 35,60 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan bertahap menjadi 32,28 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan proporsi, sektor ini tetap menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB, yang menunjukkan karakteristik ekonomi daerah yang masih berbasis agraris. Di sisi lain, sektor tersier menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang naik dari 13,41 persen pada tahun 2021 menjadi 15,09 persen pada tahun 2025, serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang meningkat signifikan dari 5,42 persen menjadi 8,34 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya aktivitas distribusi barang dan jasa serta meningkatnya mobilitas ekonomi masyarakat. Sektor Industri Pengolahan relatif stabil dengan kontribusi sebesar 13,70 persen pada tahun 2021 dan 13,7 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sektor industri dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah masih perlu diperkuat guna mempercepat transformasi struktur ekonomi. Secara umum, komposisi PDRB Kabupaten Lampung Utara selama periode 2021–2025 memperlihatkan adanya pergeseran bertahap dari dominasi sektor primer menuju penguatan sektor tersier, meskipun transformasi struktural tersebut belum berlangsung secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor pertanian, peningkatan daya saing industri pengolahan, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta penguatan konektivitas wilayah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang positif dan semakin menguat. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 2,82 persen pada tahun 2021 menjadi 5,12 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah secara bertahap. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi selama

periode tersebut terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh signifikan, yakni sebesar 17,79 persen pada tahun 2023 dan 19,42 persen pada tahun 2024, sebelum melambat menjadi 8,56 persen pada tahun 2025. Tingginya pertumbuhan sektor ini menunjukkan meningkatnya mobilitas barang dan jasa serta perbaikan konektivitas wilayah yang berkontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 8,39 persen pada tahun 2024 dan tetap tinggi sebesar 6,66 persen pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi dan pengolahan yang berpotensi memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai tambah. Sementara itu, sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif namun relatif tinggi, dengan puncak pertumbuhan sebesar 11,33 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan investasi di daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh stabil pada kisaran 4–10 persen selama periode 2021–2025, yang mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas distribusi yang tetap terjaga. Demikian pula sektor Informasi dan Komunikasi konsisten tumbuh positif di atas 5 persen setiap tahun, menunjukkan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor dominan mengalami fluktuasi, dengan kontraksi sebesar -5,28 persen pada tahun 2024 sebelum kembali tumbuh 4,62 persen pada tahun 2025. Fluktuasi ini menunjukkan kerentanan sektor pertanian terhadap faktor cuaca, harga komoditas, dan dinamika pasar.

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara menurut pendekatan pengeluaran selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus mengalami peningkatan proporsi, dari 61,12 persen pada tahun 2021 menjadi 65,32 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih sangat ditopang oleh tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan peran daya beli masyarakat yang cukup dominan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dari 3,20 persen pada tahun 2021 menjadi 3,63 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren menurun dari 6,87 persen pada tahun 2021 menjadi 5,64 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin terbatasnya peran belanja pemerintah dalam mendorong permintaan agregat dibandingkan dengan komponen konsumsi masyarakat. Pada sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih memberikan kontribusi cukup besar meskipun mengalami sedikit penurunan dari 33,76 persen pada tahun 2021 menjadi 31,99 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran investasi dalam mendorong ekspansi kapasitas produksi daerah perlu terus diperkuat guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan produktif. Komponen perubahan inventori relatif kecil dan cenderung fluktuatif, sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa selama periode tersebut bernilai negatif dan cenderung meningkat defisitnya, dari -4,96 persen pada tahun 2021 menjadi 6,40 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi dan struktur produksi daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun memperkuat daya saing ekspor.

Secara keseluruhan, struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih bersifat *consumption driven economy*,

dengan kontribusi investasi yang relatif stabil namun belum optimal, serta kinerja perdagangan luar daerah yang masih defisit. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan difokuskan pada penguatan investasi produktif, peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi komoditas unggulan, pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta peningkatan daya saing produk lokal guna memperbaiki kinerja neraca perdagangan antarwilayah. Dengan struktur pengeluaran yang lebih seimbang antara konsumsi dan investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara dapat menjadi lebih berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar dalam struktur PDRB menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan positif, yaitu sebesar 1,61 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 5,71 persen pada tahun 2023, serta tetap terjaga pada kisaran 4,87–4,91 persen pada periode 2024–2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 9,93 persen dan 11,26 persen, sebelum melambat menjadi 6,61 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan kontraksi pada tahun 2022 sebesar -2,63 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar -1,68 persen. Hal ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal serta penyesuaian belanja pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sepanjang periode pengamatan, meskipun dengan kecenderungan fluktuatif. Pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 4,18 persen pada tahun 2021, melambat pada tahun 2024 menjadi 1,23 persen, dan kembali meningkat menjadi 3,97 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi mulai menunjukkan perbaikan, namun masih memerlukan penguatan untuk mendorong ekspansi kapasitas produksi secara lebih signifikan. Secara umum, pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Utara masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan, sementara peran investasi dan belanja pemerintah perlu terus dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan kegiatan ekonomi primer juga menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan perekonomian daerah relatif rentan terhadap berbagai faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta produktivitas yang masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam mendukung daya saing ekonomi daerah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia telah mencapai 71,42 pada tahun 2025, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan tenaga kerja masih perlu terus didorong agar mampu mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif dan inovatif.

Prospek perekonomian Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2026 diperkirakan tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan didukung oleh potensi sumber daya ekonomi daerah, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta berbagai kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi regional dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,60 persen hingga 5,20

persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih diperkirakan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi komoditas pertanian yang cukup besar, terutama komoditas tanaman pangan dan perkebunan rakyat seperti padi, jagung, singkong, serta komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan tersebut melalui penerapan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses terhadap sarana produksi pertanian diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta peran Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu pusat perdagangan di wilayah utara Provinsi Lampung. Peningkatan konektivitas wilayah serta perkembangan kegiatan perdagangan antarwilayah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan distribusi barang.

Prospek perekonomian daerah juga didukung oleh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal. UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara lebih optimal. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan sektor industri pengolahan berbasis komoditas pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Pengembangan agroindustri diharapkan dapat memperkuat keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

Prospek perekonomian Kabupaten Lampung Utara juga didukung oleh upaya peningkatan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah yang dapat memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Infrastruktur jalan, pasar, serta sarana distribusi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi di daerah. Selain faktor sektoral, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung prospek perekonomian daerah. Dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia yang ditargetkan mencapai 71,75 pada tahun 2026, diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Namun demikian, prospek perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain fluktuasi harga komoditas pertanian, perubahan kondisi iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian, serta dinamika perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, peningkatan nilai tambah produk unggulan, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing tinggi. Dengan memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki serta didukung oleh kebijakan pembangunan yang tepat, perekonomian Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2026 memiliki prospek yang cukup baik untuk tumbuh secara stabil dan berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan bersifat *mandatory* seperti urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta urusan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi sebagaimana tertuang dalam indikasi RPJMD Tahun 2025-2029. Visi RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 yaitu Bersama Menuju Lampung Utara Bermartabat (Maju, Aman dan Sejahtera). Arah kebijakan keuangan pada RKPD tahun 2027 juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai program

prioritas pembangunan tahun 2027 yaitu 14 Program Prioritas serta 8 PHTC, dukungan terhadap program strategis nasional serta dukungan terhadap program unggulan Provinsi Lampung.

Kebijakan keuangan daerah juga disinergiskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Pemerintah yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2027. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung upaya peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan alokasi dana transfer, meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian daerah. Pengelolaan APBD sebagai instrumen kebijakan dalam mendukung visi dan misi daerah dilakukan melalui efektifitas dan efisiensi belanja sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah :

a. Mensinergikan kebijakan pembangunan dengan RPJMN, RKP, KEM PPKF, dan arahan Presiden yang telah mempertimbangkan berbagai usulan program strategis daerah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Penyelarasan dengan RPJM dan RKP dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah dengan prioritas nasional, termasuk pemenuhan target belanja wajib melalui rancangan awal RKP dan rancangan KEM PPKF yang disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional, selanjutnya diusulkan kembali untuk dilakukan pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan akhir RKP;
c. Berdasarkan hasil pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan akhir RKP sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar dalam perumusan pedoman penyusunan APBD dan penetapan RKP dan KEM PPKF. Selanjutnya berdasarkan RKP pemerintah daerah menetapkan RKPD.
d. Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah termasuk pemenuhan target belanja wajib yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF;
e. Pemenuhan target belanja wajib meliputi: belanja pendidikan, belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau ke desa, dan belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2027 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah

dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas: Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya.

Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Peningkatan rasio pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi sumber sumber pendapatan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan negara yang mengedepankan efektivitas administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar, serta perluasan basis perpajakan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari SDA, tanpa menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Optimalisasi pendapatan negara juga mendorong penguatan penegakan hukum dan pemberian insentif fiskal yang lebih terukur untuk menjaga iklim investasi yang atraktif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Kebijakan pendapatan negara dirancang agar selaras dengan dinamika ekonomi digital, perkembangan sistem perpajakan global, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2027 merupakan bagian tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Dengan adanya kebijakan opsen berdampak bagi hasil dari provinsi akan berkurang sedangkan pendapatan asli daerah akan bertambah setelah diterapkannya opsen PKB dan BBNKB.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan potensi memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat;

2. Peningkatan manajemen pengelolaan pajak daerah khususnya terkait penerapan opsen PKB, BBNKB;
3. Peningkatan pengelolaan retribusi daerah;
4. Penegakan Perda terkait pajak dan retribusi yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah;
5. Implementasi atas diterbitkannya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru khususnya terkait penyesuaian jenis pajak dan retribusi daerah.
6. Optimalisasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam pembayaran pajak dan retribusi;
7. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi guna mendukung penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai;
8. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi secara intensif;
9. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pemungutan pajak dan retribusi khususnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah;
11. Peningkatan kapasitas pengelola pendapatan;
12. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah;
13. Optimalisasi manajemen kinerja BUMD dan BLUD;
14. Kajian kebijakan eksplorasi potensi sumber-sumber pendapatan;
15. Kajian kebijakan tarif retribusi yang membuka ruang marketing;
16. Optimalisasi pengelolaan piutang daerah;
17. Meningkatkan kinerja dan inovasi daerah guna meraih dana insentif fiskal sebagai penghargaan atas kinerja pemerintah daerah.

Berikut adalah proyeksi pendapatan tahun 2027 RKPD menyesuaikan kondisi tahun sebelumnya :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2024 s.d Tahun 2028

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan Tw.1 2026 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun 2028 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN**	**1.689.523.778.415,88**	**1.683.961.905.809,05**	**419.634.059.848,22**	**1.672.147.948.393.98**	**2.024.980.608.856,00**
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	**119.317.446.394,88**	**162.278.268.403,05**	**44.176.960.446**	**155.082.862.460,78**	**210.316.602.229,00**
4.1.01.	Pajak daerah	50.569.895.187,12	86.881.607.653,39	17.359.996.672	87.303.328.938,78	-
4.1.02.	Retribusi daerah	4.048.799.391,00	2.725.791.795,00	256.606.637	3.051.654.454,00	-
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.353.652.738,43	7.522.014.055,83	5.284.525.763	9.076.775.956,00	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	54.345.099.078,33	65.148.854.898,83	21.275.831.374	55.651.103.112,00	-
4.2.	Pendapatan Transfer	**1.570.206.332.021,00**	**1.521.683.637.406,00**	**375.457.099.402**	**1,517,065,085,933.20**	**1.814.664.006.627,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.456.165.295.390,00	1.462.782.687.436,00	375.457.099.402	1,387,319,044,538.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.041.036.631,00	58.900.949.970,00	0	129.746.041.395,20	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0
4.3.01	Hibah	0	0	0	0	0
4.3.02	Dana darurat	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Lampung Utara, 2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Negara tahun 2027 akan didorong untuk mendukung agenda PKPN dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan. PKPN disusun ke dalam 8 klaster yang berorientasi pada isu-isu yang paling strategis serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

1. Kedaulatan Pangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan sistem distribusi, stabilisasi harga, pengembangan sarana infrastruktur pangan, serta stabilisasi harga guna menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.
2. Kemandirian Energi dan Air diarahkan pada pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
3. Pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan keterjangkauan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
4. Kesehatan difokuskan pada peningkatan akses fasilitas medis dan penguatan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi melalui peningkatan nilai tambah domestik dari komoditas unggulan melalui transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi untuk memperluas skala ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah
6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas dan penyediaan hunian layak tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa Pemberdayaan Desa dan Ekonomi Lokal diakselerasi melalui penguatan koperasi dan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan dan memperatakan kesejahteraan.
8. Penurunan Kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu, Belanja Negara juga diarahkan untuk mendukung faktor pendukung (enabler) yang meliputi pertahanan, kemananan, dan penegakan hukum, penguatan tata kelola dan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Belanja Negara tahun 2027 diarahkan untuk:

(i) melaksanakan rekonstruksi anggaran dengan mengedepankan belanja berkualitas dan efisiensi belanja;
(ii) memperkuat infrastruktur pendukung sektor strategis dan prioritas guna mencapai kedaulatan ekonomi;
(iii) mengoptimalkan belanja pegawai melalui digitalisasi birokrasi, remunerasi berbasis kinerja, dan reformasi sistem pensiun ASN;
(iv) menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran; serta
(v) memperkuat sinergi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan TKD dan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, maka arah kebijakan umum TKD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power;
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung PKPN utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan kedaulatan pangan; dan

4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD per jenis transfer tahun 2027 sebagai berikut.

Arah kebijakan DBH Tahun 2027, yaitu:

1. Mengalokasikan DBH yang selaras dengan kebijakan belanja negara dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Menyinergikan pemanfaatan DBH yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung program prioritas pemerintah;
3. Meningkatkan kualitas data dasar dan formula perhitungan realisasi DBH melalui sinkronisasi data pusat dan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi; dan
4. Memerhatikan kinerja daerah terkait pemeliharaan lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara dalam alokasi DBH.

Arah kebijakan DAU Tahun 2027 yaitu:

1. Mengalokasikan DAU untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung percepatan pemerataan keuangan dan layanan dasar antar daerah melalui penguatan afirmasi kepada daerah 3T;
2. Meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar untuk formulasi pengalokasian DAU yang lebih menunjukkan karakteristik kewilayahan; dan
3. Memperkuat efektivitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penyempurnaan tata kelola DAU untuk memastikan sinergi dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan DAK Tahun 2027 secara umum, yaitu:

1. Mendukung pencapaian program prioritas nasional percepatan pembangunan daerah, operasionalisasi layanan publik serta afirmasi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar);
2. Memperkuat sinergi DAK dengan Belanja K/L melalui prinsip keterpaduan; dan
3. Memperkuat kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan transformasi formula pengalokasian Dana Desa untuk meningkatkan transparansi, kepastian, dan keadilan;
2. Mendukung keberlanjutan implementasi KDMP;
3. Memperkuat tata kelola Dana Desa melalui peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa; dan
4. Memperkuat sinergi Dana Desa dengan instrumen pendanaan lain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2027, yaitu:

1. Menciptakan kompetisi sehat antardaerah untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung prioritas nasional;
2. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada dukungan kebijakan prioritas nasional;
3. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui diseminasi/edukasi/bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; dan
4. Meningkatkan pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui pemantauan dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2027 digunakan untuk pemenuhan belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan. Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah daerah dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Belanja operasi daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang bersifat wajib dan belanja yang mengikat.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja yang bersifat mengikat yaitu adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
3. Belanja operasi pada setiap Perangkat Daerah baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Belanja daerah berupa subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
7. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.
8. Belanja bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya.
9. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut :
    a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.

b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2027 digunakan untuk :

a. Percepatan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan kesetaraan;
b. Belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Prioritas kebijakan mandatori dimaksud menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik;
c. Belanja dalam rangka dukungan terhadap program strategis nasional, tematik pembangunan serta dukungan terhadap outcome prioritas pendukung asta cita;
d. Pembangunan infrastruktur prioritas penunjang layanan publik, investasi dan pariwisata;
e. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pemenuhan 29 (dua puluh sembilan) SPM pada 6 (enam) bidang urusan pemerintahan.
f. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
g. Percepatan penurunan stunting;
h. Peningkatan investasi;
i. Pengendalian inflasi;
j. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN);
k. Perwujudan reformasi desa;
l. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana;
m. Peningkatan efektivitas dan kualitas belanja dalam rangka mendukung pencapaian target IKU daerah;
n. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2027 pada RKPD menyesuaikan dengan proyeksi pelaksanaan tahun sebelumya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2024 s.d Tahun 2028

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan 2026 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun 2027	Proyeksi/Target pada Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
5	**BELANJA**	**1.656.525.807.872,50**	**1.633.781.636.638,40**	**243.500.499.572,00**	**1.649.647.948.393,98**	**2.027.318.608.856,00**
5.1	BELANJA OPERASI	1.210.720.791.398,50	1.229.504.037.120,40	227.471.792.245,00	**1.327.831.323.748,98**	1.301.645.368.177,00
5.1.1	Belanja Pegawai	769.925.078.485,00	785.419.963.594,00	194.509.491.721,00	802.301.991.518,52	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.877.312.387,50	415.149.881.545,40	32.532.572.630,00	491.621.301.730,46	
5.1.3	Belanja Bunga	4.705.764.576,00	2.897.892.381,00	429.727.894,00	9.000.000.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	63.212.635.950,00	25.476.299.600,00	0	23.608.030.500,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	560.000.000,00	0	1.300.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	131.999.981.511,00	87.662.518.427,00	995.000,00	**113.981.256.116,00**	318.863.008.588,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah			0	1.934.795.995,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.474.419.508,00	26.428.335.064,00	995.000,00	34.652.072.321,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.478.183.545,00	16.297.999.750,00	0	13.550.000.000,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.126.731.890,00	36.024.579.033,00	0	54.417.809.000,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.855.151.400,00	8.758.009.580,00	0	9.151.611.800,00	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.065.495.168,00	153.595.000,00	0	274.967.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.507.500.000,00	2.796.392.700,00		**3.000.000.000,00**	12.090.195.058,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.507.500.000,00	2.796.392.700,00		3.000.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	314.083.858.922,00	313.818.688.391,00	16.027.712.327,00	**204.835.368.529,00**	394.720.037.033,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.084.279.327,00	5.590.502.244,00	0,00	9.035.498.339,28	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	309.999.579.595,00	308.228.186.147,00	16.027.712.327,00	195.799.870.189,72	

Sumber : BPKAD Lampung Utara, 2026

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2027 sebagai berikut :

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. SiLPA;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2027 bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun 2026. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penerimaan SiLPA selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat tren flujtuatif namun SiLPA tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Karena itu, proyeksi SiLPA tahun 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan SiLPA tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Komponen SiLPA Tahun 2021-2025

NO	KOMPONEN SILPA	Realisasi Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kas di Kas Daerah	14.333.148.657,96	16.839.236.628,71	15.124.444.846,45	15.256.368.966,33	32.179.307.285,33
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.498.372,00	84.995.766,00	34.589.232,00	28.620,00	8.209.994,00
3	Kas di BLUD	14.604.692.674,33	212.744.839,08	5.737.742.778,33	6.062.676.948,83	5.901.821.090,48
4	Kas Dana BOSP	553.048.206,30	555.110.191,30	195.857.674,79	251.504.572,65	291.944.972,65
5	Kas Dana BOK Puskesmas				4.188.656.932,00	3.943.518.856,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	17.550.496.104,40	4.221.659.687,65			
7	Kas Lainnya			7.166.246.338,00		
	JUMLAH SILPA	47.105.884.014,99	21.913.747.112,74	28.258.880.869,57	25.759.236.039,81	42.324.802.198,46

Sumber : BPKAD Lampung Utara, 2026

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk :

a. Penyertaan modal daerah;
b. Pembentukan dana cadangan;
c. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penyertaan modal kepada BUMD tahun 2027 dialokasikan sedikit lebih besar karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang belum terpenuhi untuk penyertaan modal khususnya ke Bank Lampung dan Bank Syariah.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2024 s.d Tahun 2028

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan 2026 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun 2027	Proyeksi/Target pada Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
6	**PEMBIAYAAN**	**-5.461.062.895,43**	**-7.855.466.972,19**	**0**	**-22.500.000.000,00**	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	27.944.254.240,57	25.549.850.163,81	0	15.000.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.944.254.240,57	25.549.850.163,81	0		
6.1.1.7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		19.265.476.642,33	0		
6.1.1.7.1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja		19.265.476.642,33	0		
6.1.1.8	Sisa Belanja Lainnya		6.284.373.521,48	0		
6.1.1.8.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		6.062.676.948,83	0		
6.1.1.8.4	Sisa Dana BOSP		221.696.572,65	0		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	33.405.317.136,00	33.405.317.136,00	7.571.329.284,00		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.405.317.136,00	31.405.317.136,00	7.571.329.284,00	37.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	-5.461.062.895,43	-7.855.466.972,19	(7.571.329.284,00)	-22.500.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	25.750.583.688,95	42.324.802.198,46	165.916.740.218,61	0	

Sumber : Analisis TAPD, 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi dan Misi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Lampung Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 adalah :

"BERSAMA MENUJU LAMPUNG UTARA BERMARTABAT (MAJU,AMAN DAN SEJAHTERA)"

Visi tersebut ditopang oleh 3 pilar utama yaitu Maju, Aman dan Sejahtera.

MAJU dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Lampung Utara yang memiliki kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kemajuan tersebut mencakup :

1. Kemajuan Ekonomi Daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatnya pendapatan per kapita, berkurangnya ketimpangan, serta berkembangnya sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
2. Kemajuan Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat yang mendukung produktivitas dan daya saing daerah.
3. Kemajuan Infrastruktur dan Teknologi tercermin dari ketersediaan sarana prasarana dasar, transportasi, energi, komunikasi, serta adopsi teknologi digital yang mempercepat transformasi pembangunan.
4. Kemajuan Tata Kelola dan Inovasi Daerah ditunjukkan dengan pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, partisipatif, serta inovatif dalam memberikan pelayanan publik.
5. Kemajuan Sosial dan Budaya ditandai dengan masyarakat yang inklusif, toleran, berdaya, serta tetap menjaga identitas dan nilai-nilai lokal dalam arus perubahan global.
6. Keberlanjutan Pembangunan dicapai melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, adaptif terhadap isu lingkungan, dan responsif terhadap perubahan iklim global

AMAN dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang terbebas dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengurangi rasa tenteram, ketertiban, dan kenyamanan dalam beraktivitas. Keamanan daerah tidak hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga mencakup :

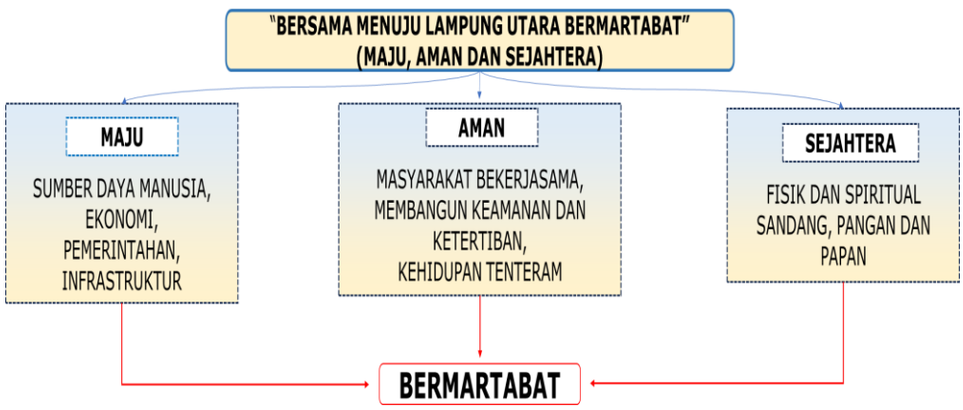
1. Ketertiban dan Kepastian Hukum yang tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap norma, aturan, dan hukum yang berlaku, serta tersedianya sistem penyelesaian konflik yang adil dan cepat
2. Perlindungan terhadap Ancaman Sosial, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kriminal, kekerasan, konflik sosial, serta potensi radikalisme yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat.

3. Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, kondisi masyarakat yang terlindungi dari risiko bencana alam maupun nonalam melalui sistem mitigasi, peringatan dini, serta respons cepat pemerintah daerah.
4. Lingkungan Sosial yang Kondusif yang tercermin dari terjaganya harmoni sosial, kohesi masyarakat, dan terbangunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah dan aparat keamanan.
5. Rasa Aman yang Dirasakan Masyarakat, tidak hanya pada level objektif (data kriminalitas rendah), tetapi juga secara subjektif, yaitu meningkatnya persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

SEJAHTERA dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, hidup dalam keadaan sehat, berpendidikan, memiliki penghasilan yang layak, serta dapat menikmati lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang adil, merata, dan berkelanjutan tercermin dalam beberapa aspek :

1. Kesejahteraan Ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, berkurangnya tingkat kemiskinan, menurunnya pengangguran, serta tersedianya lapangan kerja yang produktif dan layak bagi seluruh masyarakat.
2. Kesejahteraan Sosial diwujudkan melalui terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, akses terhadap layanan publik yang berkualitas, meningkatnya solidaritas sosial, serta perlindungan bagi kelompok rentan dan miskin.
3. Kesejahteraan Kualitas Hidup mencakup meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gizi, kesehatan, dan pendidikan, serta menurunnya kesenjangan sosial antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.
4. Kesejahteraan Lingkungan ditunjukkan dengan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat, air bersih, sanitasi layak, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan generasi kini dan mendatang.
5. Kesejahteraan Spiritual dan Budaya tercermin dari kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta memiliki rasa kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Gambar 4.1
Ilustrasi Visi RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber : Analisis, 2025

Misi merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat didalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut :

Misi 1. Mendorong Kemajuan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi yang berbasis pada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan

kemandirian ekonomi rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi yang berbasis pada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi rakyat. Pemberdayaan UMKM dan koperasi, Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, Peningkatan akses modal, teknologi, dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan Pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan langkah konkrit dalam menjalankan misi ini.

Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif
Menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan produktif adalah fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif
Secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah melalui berbagai upaya seperti standarisasi pelayanan, sosialisasi budaya pelayanan prima, survei kepuasan, dan pemberian penghargaan atau sanksi terhadap kinerja pelayanan. Selain itu, inovasi juga mendorong terciptanya terobosan dalam jenis pelayanan publik, baik berupa gagasan baru maupun adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Seluruh Sektor
Misi ini memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup upaya seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan.

Misi 5. Penguatan Sektor Pertanian Dan Perkebunan Yang Andal, Maju, Partisipatif Dan Ramah Lingkungan.
Misi ini memiliki beberapa penjabaran utama, ini mencakup peningkatan SDM petani dan aparatur pertanian, optimalisasi pemanfaatan SDA, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nilai tambah komoditas. Peningkatan SDM petani melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti pupuk organik dan pengendalian hama dengan cara alami, serta peningkatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi pertanian. Pengembangan komoditas pertanian unggulan di wilayah Lampung Utara, seperti padi, karet, dan kelapa sawit, dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi pasar. Dan penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian presisi dan pertanian organik, untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasakan visi dan misi yang telah ditetapkan selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah kondisi yang akan menggambarkan tercapaianya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,41-5,77	5,12
				2	Indeks Gini	Persen	0,275	0,269
		T1.S1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,2	13,70
				4	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0,22	1,27
				5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,25	1,21
		T1.S2	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	6	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,91-15,91	15,78
				7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60-5,79	5,78
				8	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	80,75	83,58
		T1.S3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	45	NA
		T1.S4	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	10	Indeks Desa	Persen	3,88	7,33
				11	Persentase BUMDes Berkembang dan Maju	Persen	18,1	15,95
		T1.S5	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	12	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	1,3	5,28
T2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing.			13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,75	72,28
		T2.S1	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Tahun	8,395	8,63
				15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,57	12,64
		T2.S2		16	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,28	74,41

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	17	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	17,3	20
		T2.S3	Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	18	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	9.984	10.160
				19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	58.349.445	112.790.000
		T2.S4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	64,3	62,97
				21	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,55	63,2
				22	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,445	0,492
		T2.S5	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	23	Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	58,5	72,4
				24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	58,12	86,18
T3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif			25	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/Skor	4,45	4,42
						Predikat / Status	A-	A-
		T3.S1	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	26	Indeks Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	91	78,85
						Predikat / Status	(A) Kualitas tertinggi	Baik
		T3.S2	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	27	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	71,8	65
				28	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100
T.4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan			29	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	67,02
						Kategori	B	B
		T4.S1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	30	Nilai SAKIP	Skor	61,5	61,26
						Predikat	B	B
				31	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP
				32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks	3,15	3,25
						Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Elektronik (SPBE)			
				33	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/ Skor	64,5	77,78
						Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		T4.S2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	34	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,12	15,21
T5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi			35	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	0,2	4,62
		T5.S1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	36	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Jeruk)	Persen	4,25	9,78
				37	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Karet, Lada, Kopi dan Tebu)	Persen	0,25	4,00
				38	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Peternakan (Sapi, Kambing, Kerbau, dan Unggas)	Persen	1,5	0,00
				39	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan	Persen	1	6,37
		T5.S2	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	40	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,59	68,21
				41	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	450,19	442,15
				42	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum	Persen	97,6	97,52
		T5.S3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,68	71,62

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,30	0,32
				45	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	86.393,74	NA

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 dan Laporan Pengendalian Evaluasi Tahun 2025

4.1.3. Tema dan Fokus Pembangunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selain mengacu pada RPJMD juga disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

4.1.3.1. Nasional

Tema RKP Nasional Tahun 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” dengan 8 prioritas nasional yang diselaraskan dengan asta cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirasisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serat peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Tabel 4.2

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara pemeliharaan dan hubungan interansional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota kota inovatif, karateristik mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan rumah sakit membangun lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu program kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Tabel 4.3
Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest
3		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
4		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
5		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
6		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
7		Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
8		Pengembangan Pangan Hewani
9		Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
10		Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
11		Peningkatan Penyediaan Energi
12		Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
13		Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
14		Konservasi Sumber Daya Air
15		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir
16		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
17		Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
18		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
19		Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
20		Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
21		Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
23		Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
24		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
25		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
26		Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut
27	Prioritas Nasional 3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
28		Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
29		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta Prambanan
30		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena
31		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
32		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
33		Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
34		Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
35	Prioritas Nasional 4	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
36		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
37		Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
38		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
40		Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
41		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
42		Penurunan Kematian Ibu dan Anak
43		Pencegahan dan Penurunan Stunting
44		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
45		Penuntasan TBC
46		Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
47		Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
48		Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
49		Investasi pelayanan kesehatan primer
50		Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
55	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Nikel

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
56		Pengembangan Hilirisasi Tembaga
57		Pengembangan Hilirisasi Bauksit
58		Pengembangan Hilirisasi Timah
59		Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
60		Pengembangan Hilirisasi Kelapa
61		Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut
62		Pengembangan Industri Kimia
63		Pembangunan Industri Semikonduktor
64		Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
65		Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
66		Pengembangan Industri Dirgantara
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei
68		Pengembangan KIT Batang
69		Pengembangan KI Weda Bay
70	Prioritas Nasional 6	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
71		Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif
72		Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
73		Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
74		Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
75		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
76	Prioritas Nasional 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
77		Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
78		Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
79		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
80		Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
81	Prioritas Nasional 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
82		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
83		Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026

Selain kegiatan prioritas utama, juga perlu memperhatikan proyek strategis nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional merupakan klasifikasi atas program kerja prioritas nasional atau kumpulan program kerja pemerintah sebagai implementasi prioritas nasional yang dilaksanakan kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah sesuai direktif presiden untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, dan sinkronisasi baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalisasinya. Pelaksanaan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Program kerja prioritas nasional dalam 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dimaksud, antara lain:

Tabel 4.4

Daftar Program Kerja Prioritas Nasional

No	Program Kerja Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Prioritas Nasional
1	Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	FP: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi	Prioritas Nasional 4
2	Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah		
3	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas		
4	20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi		
5	500 Sekolah Rakyat		
6	66 Rumah Sakit Upgrade		
7	Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
8	Penuntasan Tuberkolosis		

No	Program Kerja Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Prioritas Nasional
9	Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)		
10	Studio Guru		
11	Bantuan Perlengkapan Sekolah		
12	SMK Go Global		
13	10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM		
14	Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional		
15	500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)		
16	Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan		
17	Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS		
18	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi	FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	Prioritas Nasional 6
19	PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja		
20	Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih		
21	Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng		
22	Program 3 juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah		
23	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera		Prioritas Nasional 8
24	Pusat Data Nasional (Enabler)	FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Prioritas Nasional 3
25	Pemberantasan Judi Online (Enabler)	FP: Regulasi dan Hukum	Prioritas Nasional 2
26	Pemberantasan Narkoba (Enabler)		Prioritas Nasional 7
27	Pemberantasan Penyelundupan (Enabler)		
28	PLTA Skala Besar Terintegrasi	FP: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Prioritas Nasional 3
29	Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga		
30	Elektrifikasi 10.000 Desa		
31	Percepatan Pembangunan Daerah 3T		Prioritas Nasional 6
32	Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional		Prioritas Nasional 3
33	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu di 514 Kab/Kota	FP: Industri Nasional	Prioritas Nasional 2
34	Pengelolaan Sampah menjadi PSEL		
35	Mobil Nasional		
36	Motor Nasional		
37	Pengembangan Industri Semikonduktor		
38	Ekosistem Industri Kedirgantaraan		
39	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (2.000 Hektar)	FP: Hilirisasi SDA Strategis	Prioritas Nasional 2
40	Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek)		Prioritas Nasional 5
41	Mandatori Biodiesel 50 persen (B50)	FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Prioritas Nasional 2
42	Mandatori Bioetanol 20 persen (E20)		
43	Program PLTS 100 GW		
44	Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)		
45	Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik		
46	Pengembangan kawasan pangan terintegrasi		
47	Pengembangan Kawasan Perkebunan		
48	Giant Sea Wall		
49	5.000 Kampung Nelayan Merah Putih		
50	Revitalisasi Tambak Nila Salin		
51	Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi		
52	Budidaya Ikan Darat Tematik		
53	Kapal Ikan Modern		
54	Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur		
55	Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi		

No	Program Kerja Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Prioritas Nasional
56	Eksplorasi 10 Blok Migas Baru		
57	Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat		
58	Optimalisasi Lifting di 13.000 Sumur Minyak Tua		
59	Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR)		
60	10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (*Deployable Mass Model*)		
61	Swasembada Air		
62	Gerakan ASRI: Penghijauan		

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026

4.1.3.2. Provinsi Lampung

Tema, dan fokus pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027 : "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri berbasis Potensi Daerah**" Pemerintah daerah berkomitmen mendorong pergeseran ekonomi dari sektor primer menuju sektor yang memiliki nilai tambah tinggi melalui strategi hilirisasi industri, pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tahun 2027 ditetapkan sebagai periode krusial dalam transformasi ekonomi daerah. Tema ini menandai fase transisi strategis. pada tahun 2027 arah kebijakan ditarik lebih luas menuju penguatan struktur ekonomi. Fokus utama adalah bagaimana daerah mampu menghasilkan nilai tambah melalui optimalisasi investasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor unggulan. Untuk mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan pendekatan Trisula Pembangunan sebagai mekanisme transmisi utama:

- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas: Dilakukan melalui penguatan investasi yang terarah, reformasi tata kelola perizinan, dan digitalisasi pajak untuk mengoptimalkan PAD. Upaya ini dibarengi dengan pemberian subsidi teknologi bagi petani agar mampu mengolah produk mentah (seperti gabah) menjadi produk turunan (olahan) yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Fokus pada penguatan layanan dasar (Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun dan Kesehatan Primer) serta peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi guna mendukung peningkatan produktivitas di sektor formal dan industri.
- Penurunan Kemiskinan secara Struktural: Diarahkan untuk memperluas akses pekerjaan formal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa. Langkah konkret mencakup memberdayakan desa melalui penguatan ekonomi, inovasi lokal dan peningkatan SDM khusunya generasi muda dan warga miskin serta gudang logistik untuk menjaga stabilitas harga produk petani serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Seluruh kebijakan ini akan diakomodasi melalui Tujuh (7) Program Unggulan yang sinergikan melalui program "DESAKU MAJU" yang bersifat high-impact. Intervensi tidak hanya dilakukan pada aspek ekonomi makro, tetapi juga menyentuh aspek kewilayahan dengan dukungan kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat. Dengan sinergi antara investasi yang masuk dan peningkatan produktivitas masyarakat, RKPD 2027 diharapkan menjadi katalisator bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1.3.3. Kabupaten Lampung Utara

Tema RKPD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2027 "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Sektor Unggulan Daerah, Penguatan Infrastruktur dan Optimalisasi Potensi Desa**" yang dijabarkan dalam prioritas daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya Saing
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan
5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi.

Kelima prioritas tersebut saling terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal. Fokus pembangunan pada sektor unggulan daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditas strategis, menarik investasi, mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat hingga tingkat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selanjutnya, berdasarkan tema dan prioritas pembangunan tersebut, disusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 yang merupakan bagian dari arah kebijakan lima tahunan yang telah tersaji di dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam strategi pembangunan yang memuat langkah-langkah operasional, pendekatan, serta intervensi pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan. Penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya pembangunan dapat diarahkan secara efektif, efisien, terukur, dan terintegrasi guna mencapai target kinerja pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Provinsi Lampung, dan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Utara secara berkelanjutan.

Tabel 4.5

Arah Kebijakan serta Strategi Pembangunan Tahun 2027

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
1	1.1. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata sebagai Sumber	Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal serta berkembangnya sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru	1. Peningkatan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Peningkatan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Identifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
	Pertumbuhan Baru		5. Peningkatan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulani serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah 6. Peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Peningkatan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk 8. Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 9. Peningkatan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis 10. Peningkatan pembangunan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Pembangunan Kawasan Industri 11. Peningkatan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah. 12. Peningkatan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 13. Peningkatan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 14. Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan Peningkatan peran kelembagaan pariwisata/Pokdar wis dan pelaku ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata 15. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 16. Peningkatan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 17. Peningkatan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif. 18. Peningkatan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan.
	1.2. Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatkan akselerasi penurunan kemiskinan secara terintegrasi melalui perluasan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan sosial yang adaptif	1. Peningkatan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 2. Peningkatan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Peningkatan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
	1.3. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan	1. Pemetaan kebutuhan infrastruktur. 2. Peningkatan dan pembangunan jalan penghubung antar pusat pertumbuhan ekonomi serta perluasan infrastruktur digital 3. Penyusunan rencana induk konektivitas daerah berbasis RPJMN dan RTRW 4. Integrasi data infrastruktur dengan sistem informasi geografis (GIS) untuk prioritas pembangunan. 5. Berkolaborasi Dengan Pemerintah Pusat Dalam Mengembangan Infrastruktur Nasional Yang Terintegrasi Untuk Mencapai Efek Ganda Bagi Ekonomi Kawasan 6. Meningkatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan, Transportasi Umum, Air Bersih, Pengolahan Air Limbah, Dan Pengolahan Sampah Yang Mudah, Terjangkau Dan Merata Di Seluruh Kabupaten Lampung Utara 7. Menjadikan Lampung Utara Sebagai Kawasan Perlintasan Yang Menunjang Inti Mobilitas Provinsi Lampung Melalui Penyediaan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Olahraga Serta Perdagangan Bagi Masyarakat Yang Mendorong Iklim Investasi Di Kabupaten Lampung Utara 8. Konsolidasi dan evaluasi jaringan konektivitas daerah untuk efektivitas distribusi barang/jasa. 9. Penguatan kemitraan publik-swasta untuk investasi infrastruktur berkelanjutan. 10. Pemeliharaan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat dan sistem pembiayaan berkelanjutan.

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
			11. Dukungan terhadap program Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial. 12. Dukungan terhadap Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi.
	1.4. Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatkan optimalisasi peran desa sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan	1. Peningkatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 3. Peningkatan Pemberdayaan UMKM pertanian dan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM 4. Peningkatan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Peningkatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy 7. Peningkatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembanagan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Peningkatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju. 9. Peningkatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 10. Peningkatan Digitalisasi dan Aksesibilitas infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan 12. Peningkatan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.
	1.5. Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan peluang investasi dan iklim usaha yang kondusif	1. Diversifikasi investasi di sektor energi terbarukan, teknologi, dan pariwisata, melalui insentif dan kebijakan investasi 2. Membentuk kemitraan strategis untuk menarik investasi global 3. Pengembangan kawasan pariwisata berstandar internasional guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Perluasan Promosi dan Fasilitasi Investasi 5. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung Lampug Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman) 6. Penanggulangan judi dan penyelundupan 7. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
2	2.1. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Optimalisasi pendidikan berkualitas yang merata	1. Pelatihan berkelanjutan guru sesuai kurikulum nasional dan pendekatan pembelajaran aktif. 2. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah 4. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 5. Insentif dan distribusi guru ke daerah terpencil untuk pemerataan kualitas. 6. Penguatan komunitas belajar guru berbasis digital untuk berbagi praktik baik. 7. Penyediaan seragam sekolah untuk siswa baru di semua jenjang kecuali PAUD. 8. Penyediaan insentif bagu guru bukan ASN penerimaTPG yang bertugas di sekolah negeri 9. Fasilitasi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di satuan pendidikan 10. Fasilitasi pelaksanaan sekolah rakyat 11. Pelatihan SDM digital dan literasi
	2.2. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan primer dan rujukan 2. Meningkatkan kepesertaan dan keaktifan Jaminan Kesehatan 3. Penyediaan bantuan medis darurat dan kebencanaan

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
			4. Meningkatkan gizi masyarakat 5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Menguatkan jangkauan akses pelayanan kepada masyarakat melalui Puskesmas mider 7. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat 8. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi 9. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat 10. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan 11. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola 12. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak 13. Pencegahan dan penanggulangan serta penurunan stunting pada balita 14. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan Iansia serta KB dan kespro 15. Penuntasan TBC 16. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa 17. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
	2.3. Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	Meningkatkan standar hidup layak dan dan produktivitas masyarakat	1. Pelatihan vokasi dan upskilling berbasis kebutuhan industri lokal. 2. Pengembangan sentra UMKM dan koperasi modern di setiap kecamatan. 3. Pengelolaan luasan wilayah kumuh 4. Penyediaan akses pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. 5. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi tepat guna. 6. Penguatan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal.
	2.4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, perempuan, anak, pemuda dan olahraga, serta masyarakat yang inklusif	1. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses modal. 2. Pembentukan pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di desa/kelurahan 4. Pengembangan kurikulum pendidikan yang ramah gender dan inklusif. 5. Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan karakter dan literasi digital. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 7. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan. 8. Penguatan pembinaan olahraga usia dini dan pelajar.
	2.5. Kehidupan Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasila	1. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terintegrasi di semua jenjang pendidikan. 2. Pelatihan aparatur dan tokoh masyarakat untuk menjadi agen penguatan nilai Pancasila. 3. Peningkatan literasi hukum dan konstitusi bagi masyarakat. 4. Pembentukan forum dialog lintas agama, budaya, dan generasi. 5. Kampanye anti intoleransi dan radikalisme berbasis komunitas. 6. Pengembangan desa/kelurahan Pancasila sebagai model kehidupan toleran dan gotong royong. 7. Penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menginternalisasi nilai Pancasila. 8. Mendorong media lokal untuk memproduksi konten edukasi kebangsaan. 9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan. 10. Festival budaya, sejarah, dan kebangsaan tahunan untuk memperkuat identitas nasional. 11. Evaluasi indeks pengamalan Pancasila di daerah secara partisipatif. 12. Penguatan jejaring nasional–daerah untuk pertukaran praktik baik pengamalan Pancasila. 13. Program regenerasi kader penggerak nilai Pancasila lintas generasi. 14. Pembentukan zona integritas Pancasila di lembaga pendidikan dan pemerintahan.

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
			15. Penguatan ldeologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional 16. Penguatan Komunikasi Publik dan Media 17. Penguatan Lembaga Demokrasi 18. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil 19. Pengarusutamaan, Pemajuan dan Penegakan HAM.
3	3.1. Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	Peningkatan Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	1. Implementasi sistem layanan terpadu berbasis elektronik (e-service) di OPD strategis. 2. Pengembangan dashboard keterbukaan informasi publik yang real-time. 3. Integrasi data layanan antar-OPD untuk mengurangi duplikasi dan birokrasi berbelit. 4. Penambahan sarana layanan publik ramah disabilitas di kantor pemerintah 5. Program literasi digital bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan online. 6. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Diselesaikan Di Kecamatan 7. Akselerasi Penyelesaian Pelayanan Publik Di Kecamatan 8. Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN 9. Digitalisasi layanan publik prioritas 10. Pengembangan ekosistem layanan Publik digital
	3.2. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	1. Program mediasi komunitas untuk mencegah eskalasi konflik sosial. 2. Pelatihan aparat dan masyarakat tentang manajemen kerumunan dan mitigasi risiko keamanan. 3. Penyusunan peta kerawanan sosial berbasis data partisipatif. 4. Peningkatan kualitas penerangan jalan dan infrastruktur keamanan publik. 5. Penguatan sistem peringatan dini untuk potensi konflik horizontal. 6. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
4	4.1. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	1. Digitalisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis e-government. 2. Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis kebutuhan (competency based training). 3. Penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi. 4. Penetapan service charter untuk memastikan standar layanan publik yang terukur. 5. Peningkatan implementasi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah 6. Mendorong daya saing daerah melalui inovasi 7. Mendorong inovasi daerah melalui sinergi lintas sektor dan pengembangan ekosistem inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 8. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Data 9. Penerapan Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi 10. Standardisasi SOP berbasis digital di seluruh lini pelayanan publik. 11. Penerapan zero tolerance terhadap korupsi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. 12. Replikasi praktik terbaik (best practice) birokrasi adaptif ke seluruh OPD. 13. Integrasi penuh layanan publik lintas sektor dalam satu platform digital daerah 14. Penguatan change management untuk keberlanjutan reformasi birokrasi.
	4.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	1. Optimalisasi pendapatan dari aset daerah melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, dan *build-operate-transfer*. 2. Perluasan basis pajak daerah melalui integrasi data wajib pajak lintas sektor. 3. Penguatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemungutan pajak dan retribusi berbasis teknologi. 4. Penerapan *tax compliance system* berbasis insentif dan sanksi. 5. Revitalisasi BUMD agar lebih profit oriented dan mampu menyetor dividen ke PAD.

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
5	5.1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	1. Peningkatan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan terpadu pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 5. Peningkatan mutu produk pertanian unggulan melalui pengembangan bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara 6. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inven tarisasi pasca produksi 7. Peningkatan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan 8. Peningkatan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian di Provinsi Lampung 9. Peningkatan peran, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUMD, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian Masyarakat 10. Peningkatan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui LP2B serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau 11. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta pemanfaatan teknologi digital 12. Peningkatan infrastruktur jalan dan sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
	5.2. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan energi, pangan, dan air yang berkualitas secara berkelanjutan.	1. Implementasi program *energy mix* dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) minimal 10% dari kebutuhan lokal. 2. Pengembangan teknologi hemat air di sektor pertanian (irigasi tetes, sprinkler, smart irrigation). 3. Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. 4. Penerapan post-harvest technology untuk menekan kehilangan hasil pangan. 5. Penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air berbasis DAS (*watershed management*). 6. Dukungan terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis melalui Penjaminan standar mutu dan keamanan bahan pangan segar; Pengawasan mutu dan keamanan makanan; Pengembangan modul dan penyelenggaraan pelatlhan penjamah makanan 7. Pemenuhan layanan dasar air minum
	5.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pemilahan Sampah Energi Listrik (PSEL). 2. Peningkatan kegiatan pengurangan emisi GRK Sektor Sampah dan Limbah serta peningkatan teknologi pengelolaan limbah. 3. Peningkatan jumlah komunitas iklim dan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal 4. Penerapan sistem pelaporan GRK lintas sektor yang efektif dan terintegrasi, pendidikan dan pelatihan SDM 5. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 6. Peningkatan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PEMBANGUNAN
			2027
1	2	3	4
			7. Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry. 8. Menguatkan pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. 9. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. 10. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 11. Menyusun Rencana Kontijensi 12. Melaksanakan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 13. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 14. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 15. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 16. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 17. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 18. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 19. Melaksanakan Pengelolaan Risiko Bencana 20. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 21. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana 22. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 23. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 24. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 25. Menyediakan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 26. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 27. Merespon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 28. Melatih Keluarga Tanggap Bencana alam 29. Penanganan Pasca Bencana 30. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 31. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 32. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor 33. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 (diolah)

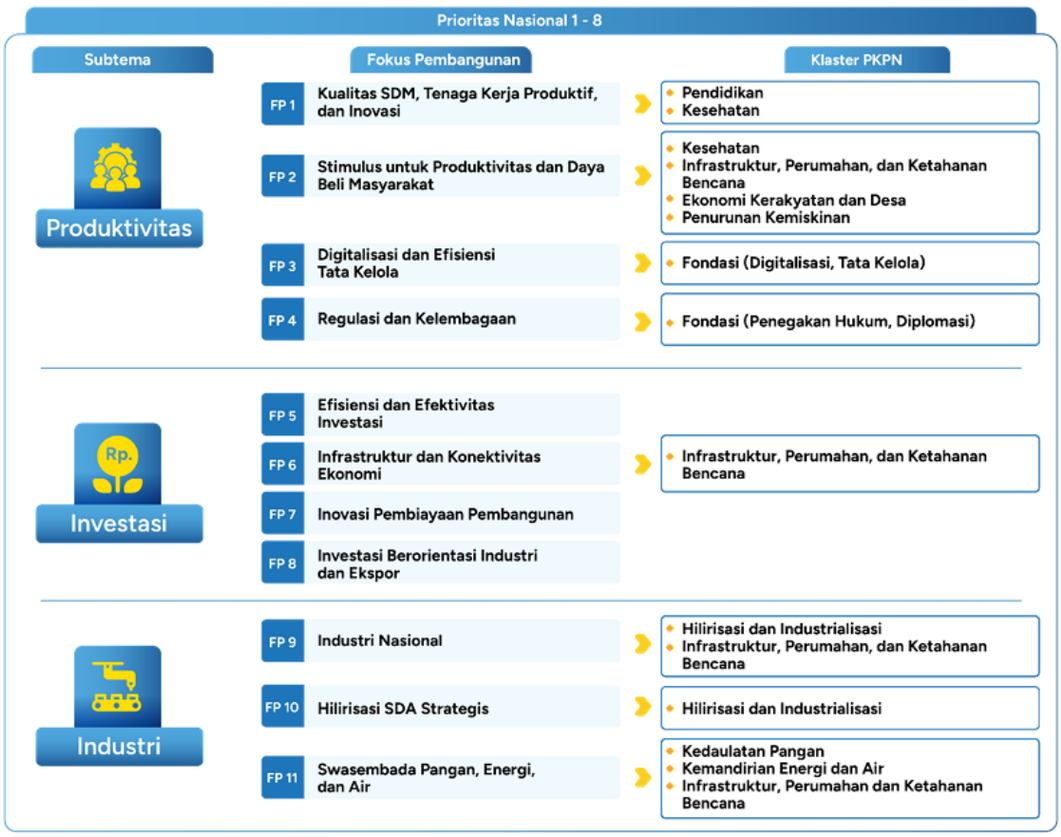
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Ketiga subtema RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui sebelas Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Kesebelas FP tersebut yaitu (1) Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi; (2) Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat; (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola; (4) Regulasi dan Kelembagaan; (5) Efisiensi dan Efektivitas Investasi; (6) Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; (7) Inovasi Pembiayaan Pembangunan; (8) Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor; (9) Industri Nasional; (10) Hilirisasi SDA Strategis; serta (11) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam intervensi yang lebih konkret, terarah, dan terukur. Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Penjabaran daftar program PKPN, keterpaduan program dengan PN, serta strategi pembiayaan program secara lebih detail dijabarkan dalam Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2027. Penajaman prioritas pembangunan melalui intervensi kebijakan strategis bertujuan untuk menjawab ketercapaian Trisula Pembangunan. Melalui klaster PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan tahunan. Dalam RKP Tahun 2027, PKPN terhimpun

dalam delapan klaster, yaitu (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) penurunan kemiskinan; (6) hilirisasi dan industrialisasi; (7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta (8) ekonomi kerakyatan dan desa. Adapun delapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Kedelapan klaster beserta pendukungnya ini memberikan dukungan terhadap sebelas FP.

Gambar 4.2
Kerangka Keterkaitan Prioritas Nasional, Subtema, Fokus Pembangunan, dan Klaster PKPN RKP Tahun 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

Dengan demikian, PKPN berperan sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi untuk mendukung pencapaian subtema RKP Tahun 2027. Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berlandaskan pada Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar arah kebijakan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah. Pada pilar pertumbuhan ekonomi berkualitas, sasaran pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang didukung oleh peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional bruto per kapita, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pada pilar penurunan kemiskinan dan ketimpangan, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan antara lain, meliputi

(1) penguatan perlindungan sosial, (2) peningkatan kesempatan kerja, serta (3) stabilisasi harga kebutuhan pokok. Indikator yang digunakan meliputi tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan rasio gini, yang secara bersama-sama mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat secara luas. Selanjutnya, pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas tenaga kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pengangguran terbuka dan indeks modal manusia sebagai ukuran kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Gambar 4.3
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2027 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS), Prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2027, meliputi :

Tabel 4.6
Prioritas Sasaran dan Indikator Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027

No	Prioritas Daerah Pembangunan	Sasaran	Indikator	OPD Pengampu
1	Penguatan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	1. Dinas Perindustrian dan Perdaganga 2. Biro Perekonomian 3. PKPCK 4. DPMPTSP
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	

No	Prioritas Daerah Pembangunan	Sasaran	Indikator	OPD Pengampu
		Meningkatnya Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	5. Dinas KPTPH 6. Disnaker 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Peternakan dan Keswan 9. Dinas PSDA 10. Dinas PMDT 11. Dinas Parekraf 12. Dishub 13. Dinas BMBK 14. Disbun 15. Diskop UMKM 16. Disnaker 17. Dinas Kelautan dan Perikanan 18. Dinas Peternakan dan Keswan 19. Dinas PSDA 20. Dinas PMDT 21. Dinas Parekraf
		Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kemantapan Jalan	
		Menjaga Stabilitas Harga	Tingkat Inflasi	
2	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	1. Dinas KPTPH 2. Dinas Peternakan 3. Dinas Kelautan Perikanan 4. Disperindag 5. Dinas Parekraf 6. BMBK 7. PKPCK 8. Dishut 9. Dinas ESDM 10. Diskop UKM 11. Disdik 12. Dinsos 13. Dinkes 14. Biro Perekonomian 15. Dishub 16. Disnaker 17. Dinas PMDT 18. Dinas PPPA 19. Dinas PSDA
		Menurunnya Ketimpangan Ekonomi di Masyarakat	1. Gini Rasio 2. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	
3	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Modal Manusia	1. Indeks Modal Manusia 2. Indeks Pembangunan Manusia	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Sosial 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dispora 6. Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Dibidang Olahraga	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
		Penyerapan Tenaga Kerja	Indeks Ketimpangan Gender	
4	Penurunan Prevalensi Stunting dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Sosial 4. Dinkes 5. RSUD Abdul Muluk 6. Dinas Peternakan 7. Dinas KPTPH 8. Dinas DKP
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting (%)	

No	Prioritas Daerah Pembangunan	Sasaran	Indikator	OPD Pengampu
				9. Dinas PMDT
5	Pembangunan Rendah Karbon dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	1. Peternakan Keswan 2. KPTPH 3. Dinas LH 4. DKP 5. PKPCK 6. ESDM 7. Dishub 8. Dishut 9. BPBD 10. Disbun
		Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	
		Meningkatnya Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	
6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan Pemerataan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Inspektorat 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. BPSDM 4. BPKAD 5. BAPPEDA 6. BAPENDA 7. Balitbangda 8. Sekretariat DPRD 9. Dinas Perpustakaan dan Arsip 10. Disdukcapil 11. Biro Perekonomian 12. Biro Pem dan OTDA 13. Biro Organisasi 14. Biro Hukum 15. Dinas Kominfotik 16. Biro Umum
7	Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya dan Harmonisasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Indeks Demokrasi Provinsi Lampung	1. Biro Kesra 2. Kesbangpol 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Pariwisata dan Ekraf 5. Satpol PP 6. Dinas PMDT
		Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya	Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya	

Sumber : Ranhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2027 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Prioritas 1 : Penguatan Ekonomi, Inklusif, Mandiri dan Inovatif

Fokus Kegiatan 2027 :

1. Penguatan Program Desaku Maju melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDM, Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produksi, Kemandirian Desa & Kerjasama Lembaga Ekonomi di Desa.
2. Penanganan infrastruktur jalan, jembatan, beserta fasilitas keselamatannya dan irigasi kewenangan provinsi.
3. Mendukung program strategis nasional 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
4. Memperkuat ketahanan pangan dengan harga terkendali dan sertifikasi halal.

5. Pengembangan simpul transportasi kewenangan provinsi (terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional)
6. Penguatan Tata Kelola Perkoperasian (KDKMP) dalam bentuk Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen dan Standarisasi.
7. Peningkatan Kapasitas Petani, Peternak, Nelayan, dan Pokdarwis

Prioritas 2 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Fokus Kegiatan 2027 :

1. Pemanfaatan dan Pemuktahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Prioritas penanganan infrastruktur dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) untuk penduduk miskin.
3. Bantuan Pasang Baru Listrik untuk masyarakat miskin.
4. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
5. Peningkatan Program Bantuan Sosial yang Responsif dan Pemberian bantuan iuran JKN bagi peserta PBI dan PBPU.
6. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Pelatihan Vokasi, pelatihan kewirausahaan, Bantuan Alat Usaha Ekonomi Produktif, pendampingan akses modal usaha dan bantuan pengurusan izin usaha

Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Fokus Kegiatan 2027 :

1. Mewujudkan Wajib Belajar 13 Tahun (pendidikan PAUD 1 tahun, SD, SMP dan SMA sederajat) dengan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah untuk setiap jenjangnya (kolaborasi dengan Kab/Kota sesuai kewenangannnya) dan Penguatan literasi
2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebagai pengganti uang komite bagi seluruh siswa Sekolah Menengah (SMA, SMK dan SLB) di Provinsi Lampung.
3. Pembangunan sekolah unggul Garuda dan dukungan pembangunan sekolah rakyat
4. Perluasan pelaksanaan Kelas Vokasi dan Perlindungan Pekerja Migran.
5. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan siswa/i daerah 3T.
6. Mendorong pembangunan Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).
7. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta dukungan event-event olahraga nasional 8. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Prioritas 4 : Penurunan Prevalensi Stunting dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Fokus Kegiatan 2027 :

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan primer
2. Meningkatkan status gizi masyarakat (Dukungan MBG) dan percepatan penurunan stunting.
3. Penguatan peran Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga
4. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
5. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik.
6. Pemerataan tenaga kesehatan khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
7. Peningkatan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
9. Pendampingan dan Pelayanan terhadap Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

Prioritas 5 : Pembangunan Rendah Karbon dan Peningkatan Ketahanan Bencana
Fokus Kegiatan 2027 :

1. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan sesuai kewenangan
2. Peningkatan luasan kawasan hijau
3. Pemantauan kualitas air sungai, pemantauan air laut dan pemantauan onlimo (online monitoring) di sungai-sungai besar.
4. Pengelolaan sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan Rehabilitasi Ringan Rumah Tipe B.

Prioritas 6 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas
Fokus Kegiatan 2027 :

1. Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2. Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur digital untuk informasi publik (Lampung-In)
3. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Tata Kelola Data melalui Forum satu Data Provinsi Lampung.
4. Peningkatan pengelolaan arsip statis dan dinamis
5. Perluasan Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama antar Perangkat Daerah di Provinsi Lampung
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil
7. Penguatan sistem pengawasan intern pemerintah daerah yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan, melalui penguatan MCSP KPK dan pendampingan pembangunan Zona Integritas.
8. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, Penguatan regulasi dan Penyusunan standar Pelayanan serta pengembangan inovasi layanan dan menyediakan fasilitas publik yang ramah dan dapat diakses oleh kelompok rentan.

Prioritas 7 : Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya dan Harmonisasi Masyarakat
Fokus Kegiatan :

1. Penyuluhan terhadap masyarakat, Pelaku Usaha dan Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Menambah jumlah warisan budaya benda dan tak benda daerah Lampung yang bersertifikat Nasional dan pengembangan serta pelestarian warisan budaya.
3. Penyelenggaraan event/festival seni dan budaya Lampung (LASQI).
4. Dukungan Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah dan pengembangan desa budaya.
5. Penguatan koordinasi lintas agama, lembaga, dan ormas 6. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Penetapan target indikator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi.

Tabel 4.7
Target dan Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2027

Indikator Makro		Capaian Tahun 2025 [1)]	Target Tahun 2026 [2)]	Target Tahun 2027 [3)]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,20 – 5,70	5,3 – 6,1
2.	PDRB Per Kapita (Juta Rp/Kapita)	55,01	60,1	59,0 - 65,3
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2,2 (2024)	2,2	2,2
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,66	9,9 – 8,9	8,20 – 9,00
5.	Rasio Gini (indeks)	0,287	0,290 – 0,274	0,273 – 0,287
	Inflasi	1,25	2,5-/+ 1,0	2,5-/+ 1,0
6.	- Indeks Modal Manusia (indeks) - IPM	0,52 (2023) 73,98	0,55 73,98-74,4	0,56 – 0,57 74,40-74,82
7.	Penurunan Persentase Emisi GRK	17,11	9,95	10,47
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	60,64 (2024)	64,03	67,96
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,81	74,48	75,16
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	4,05 – 3,51	3,56 – 4,14
11.	Tingkat Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	79,79	83,55	84,05
12.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,90	-5,68	-1,94

Sumber : [1)] Badan Pusat Statistik dan Kementerian/Lembaga
[2)] RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026
[3)] Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Lampung 2026

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara disusun untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah sekaligus mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah melalui pelaksanaan program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Setiap prioritas daerah telah dijabarkan ke dalam program-program unggulan yang saling mendukung sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Tabel 4.8
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN
1	2	4
PD1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Program Prioritas** 1 Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Lampung Utara Hingga Menjadi Produk Bernilai Tinggi 4 Pemberantasan Kemiskinan dan Menuju Zero Stunting 5 Penguatan UMKM dan Koperasi Melalui Program Kredit Usaha dan Ekonomi Digital 11 Membangun Dari Desa, Akselerasi Pembangunan Pedesaan melalui Pengelolaan BUMDes untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa 13 Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar **PHTC** Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Pendampingan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu.
PD2		**Program Prioritas** 4 Pemberantasan Kemiskinan dan Menuju Zero Stunting

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN
1	2	4
	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing.	6 Menjamin Ketersediaan dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan 7 Menjamin Ketersediaan dan Aksesbilitas Pendidikan 8 Penguatan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia 9 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan Guna Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja **PHTC** 8 Pemberian Insentif Bagi Guru Bukan ASN Penerima Tunjangan Profesi Guru yang Bertugas pada Sekolah Negeri, Guru Ngaji, Marbot Masjid/Rumah Ibadah Lain, Dan Tenaga Kesehatan Serta Babinsa Dan Babinkamtibmas. 5 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Keliling (Puskesmas Mider) Integrasi Layanan Primer Yang Dilengkapi Peralatan Medis, Tenaga Kesahatan Dan Obat-Obatan 1 Optimalisasi Manajemen RSUD Mayjend HM. RYACUDU 4 Penyediaan Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru Jenjang SD Dan SMP 3 Bantuan Pendidikan Bagi Anak Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi
PD3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif	**Program Prioritas** 11 Memastikan Keamanan dan Menjamin Kerukunan antar Umat Beragama. **PHTC** 6 Akselerasi Penyelesaian Pelayanan Publik Di Kecamatan 2 Kemudahan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Diselesaikan Di Kecamatan
PD4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan	**Program Prioritas** 10 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Sistem Informasi serta Implementasi Reformasi Birokrasi
PD5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi	**Program Prioritas** 2. Menjamin Ketersediaan Sarana Produksi Bagi Petani 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 14. Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Sumber Energi Bersih dan Berkelanjutan.

Sumber : Analisis, 2026

Prioritas Daerah 1 diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, berbasis ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas ini diwujudkan melalui program hilirisasi produk pertanian unggulan, pemberantasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, penguatan UMKM dan koperasi berbasis ekonomi digital, pembangunan desa melalui optimalisasi BUMDes, serta percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar. Sebagai Program Hasil Terbaik Cepat, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni melalui pendampingan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Daerah 2 difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang unggul, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, serta peningkatan kualitas sumber

daya manusia. Implementasinya didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat berupa pemberian insentif bagi guru non-ASN, guru ngaji, marbot rumah ibadah, tenaga kesehatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, penyediaan pelayanan kesehatan keliling (Puskesmas Mider), optimalisasi manajemen RSUD Mayjend HM. Ryacudu, penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.

Prioritas Daerah 3 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, responsif, akuntabel, serta menjamin rasa aman dan kerukunan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat melalui akselerasi penyelesaian pelayanan di kecamatan dan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Prioritas Daerah 4 menitikberatkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, dan terintegrasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi, pemanfaatan sistem informasi, serta percepatan implementasi reformasi birokrasi. Prioritas ini menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, **Prioritas Daerah 5** diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta penguatan ketahanan ekologi. Implementasinya dilakukan melalui penyediaan sarana produksi bagi petani, penguatan ketahanan pangan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sumber energi bersih dan berkelanjutan. Prioritas ini diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor unggulan daerah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara prioritas daerah dengan program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mengintegrasikan agenda pembangunan jangka menengah ke dalam program-program yang berorientasi pada hasil (result-oriented), sehingga setiap prioritas pembangunan dapat diwujudkan melalui intervensi yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah.

Sasaran makro pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 menunjukkan arah pembangunan yang semakin progresif sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Target indikator makro disusun dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, proyeksi kondisi ekonomi nasional dan daerah, serta kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.9
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET P-RKPD 2026 (HASIL FASILITASI)	TARGET HASIL FASILITASI RKPD TAHUN 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,8-5,1	5,12	5,62 - 5,8	5,65 - 6,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,60	5,78	5,5 - 5,7	5,50 - 5,70

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET P-RKPD 2026 (HASIL FASILITASI)	TARGET HASIL FASILITASI RKPD TAHUN 2027
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,91-16,1	15,78	14,5-15,78	14,00 - 14,5
4	Rasio Gini	Rasio	0,282-0,293	0,269	0,265-0,269	0,259 - 0,263
5	Indeks Pembangunan Manusia	NIlai	71,70-72,9	72,28	72,34	73,03
6	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2e	86.393,74	NA	92.974,00	100.314,07
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	68,69	71,62	71,88	72,19
8	PDRB Per Kapita (juta)	Juta Rp	51,41	51,76	54,73	57,50
9	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Persen	6,66	6,58	6,80	6,82

Sumber : Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026
Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Kesepakatan Hasil Fasilitasi

Target laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2027 ditetapkan sebesar **5,65–6,00 persen**, meningkat dibandingkan target Tahun 2026 sebesar **5,62–5,80 persen**. Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah untuk mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2025 telah mencapai **5,12 persen**, melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas pertanian, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada pada kisaran **5,50–5,70 persen**, dengan tetap mempertahankan kecenderungan penurunan dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar **5,78 persen**. Upaya tersebut didukung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi **14,00–14,50 persen** dari realisasi Tahun 2025 sebesar **15,78 persen**. Penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini ditargetkan menurun menjadi **0,259–0,263**, lebih baik dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar **0,269**. Kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui perluasan kesempatan berusaha, peningkatan akses ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi **73,03**, lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar **72,28**. Peningkatan IPM mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan, akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Pada aspek pembangunan berkelanjutan, target intensitas penurunan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi **100.314,07 ton CO_2e**, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ditargetkan mencapai **72,19**, meningkat dari realisasi Tahun 2025 sebesar **71,62**. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari sisi kesejahteraan ekonomi, PDRB per kapita ditargetkan meningkat menjadi **Rp57,50 juta**, lebih tinggi

dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar **Rp51,76 juta**, yang mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Utara terhadap PDRB Provinsi Lampung ditargetkan meningkat menjadi **6,82 persen**, mengindikasikan semakin besarnya peran Kabupaten Lampung Utara dalam perekonomian Provinsi Lampung melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, sasaran makro Tahun 2027 menggambarkan arah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pencapaian target-target tersebut memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor, konsistensi pelaksanaan program prioritas daerah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara optimal.

4.2.4. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Program prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara. Perumusan program prioritas dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan isu strategis, kebutuhan masyarakat, potensi dan keunggulan daerah, serta kemampuan keuangan daerah, sehingga program yang ditetapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan. Selain berorientasi pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Lampung Utara, penyusunan program prioritas juga memperhatikan sinergi dan harmonisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung serta prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antartingkatan pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Melalui penyelarasan tersebut, program prioritas Kabupaten Lampung Utara diharapkan tidak hanya mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Lampung dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara terintegrasi, sinergis, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2.4.1. Program Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan tahapan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029. Penyusunan program prioritas dilakukan dengan mengacu pada tema pembangunan Tahun 2027 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis daerah, dan target indikator kinerja yang harus dicapai pada periode RPJMD. Setiap program prioritas dirancang untuk memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Keterkaitan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terpadu, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Selain mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, program prioritas Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan keterpaduan dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan prioritas pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi pembangunan antartingkatan pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional. Keterkaitan antara program prioritas dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Sub Kegiatan dan Program Prioritas Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
T1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
S1.1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Job Fair/Bursa Kerja	
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	
		Program Pengembangan UMKM	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	
			Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	
			Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	
			Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengembangan Pendidikan	
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
S1.2.	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Program Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi
			Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kotabumi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Kotabumi
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Kotabumi Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Selatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Selatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Barat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Barat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Timur
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Timur
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Semuli

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Semuli
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Semuli
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Semuli
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Semuli
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Abung Semuli
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Abung Semuli
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Surakarta
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Surakarta
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tinggi
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Tinggi
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bukit Kemuning
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bukit Kemuning
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Bukit Kemuning
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Bukit Kemuning
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Selatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Selatan
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sungkai Selatan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Sungkai Selatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Tanjung Raja
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Tanjung Raja
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Sungkai Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Utara
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Sungkai Utara
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Muara Sungkai
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Sungkai
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Muara Sungkai
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Sungkai
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Muara Sungkai
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Muara Sungkai
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Muara Sungkai
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bunga Mayang
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bunga Mayang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bunga Mayang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Bunga Mayang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Bunga Mayang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Hulu Sungkai
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Hulu Sungkai
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Tengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Sungkai Tengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Pekurun
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Pekurun
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Jaya
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Jaya
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Jaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Jaya
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Jaya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Barat
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Barat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Kecamatan Sungkai Barat

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Barat
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Kunang
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Kunang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Kunang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Blambangan Pagar
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Blambangan Pagar
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Blambangan Pagar
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tengah
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Tengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Tengah
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Tengah
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Abung Tengah
S1.3.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pembangunan Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Penggantian Jembatan	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Pembangunan Jembatan	
		Program Pengembangan Permukiman	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			Pembangunan Puskesmas	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
S1.4.	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	
		Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengembangan Pendidikan	
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Utara
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Barat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Timur
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Semuli
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Surakarta
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tinggi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bukit Kemuning
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Selatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tanjung Raja
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Utara
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Muara Sungkai
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bunga Mayang
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Hulu Sungkai
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Tengah
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Pekurun
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Jaya
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Barat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Kunang
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Blambangan Pagar
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tengah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
S1.5.	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
T2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing			
S2.1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
S2.2.	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kotabumi
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kotabumi Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Barat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Semuli
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Surakarta
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	Kecamatan Abung Tinggi

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bukit Kemuning
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Selatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Tanjung Raja
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Utara
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Muara Sungkai
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bunga Mayang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Tengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Pekurun
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Jaya
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Barat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Kunang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Blambangan Pagar
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Tengah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 1
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 2

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kotabumi 2
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Wonogiri
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonogiri
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Madukoro
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Madukoro
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kalibalangan
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalibalangan
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Blambangan Pagar
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Blambangan Pagar
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Bumi Agung
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ketapang
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketapang
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Negara Ratu
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Negara Ratu
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Gedung Negara
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ogan Lima
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ogan Lima
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tanjung Raja
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjung Raja
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Bukit Kemuning
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Puskesmas Bukit Kemuning

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Pekurun
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pekurun
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Cempaka
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Cempaka
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tata Karya
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tata Karya
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ulak Rengas
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ulak Rengas
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Karang Sari
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Karang Sari
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Batu Nangkop
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Batu Nangkop
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi Udik
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kotabumi Udik
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Subik
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Abung Kunang
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Abung Kunang
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kubu Hitu
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kubu Hitu
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Semuli Raya
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Semuli Raya
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kemalo Abung
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kemalo Abung
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
		Program Pengendalian Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
S2.3.	Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Job Fair/Bursa Kerja	
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
S2.4.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Program Perlindungan Perempuan	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	
			Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	
			Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	
			Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	
			Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	
			Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	
			Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota	
			Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat	
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
S2.5.	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
			Pelindungan Cagar Budaya	
			Pemanfaatan Cagar Budaya	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pengembangan Pendidikan	
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
T3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif			
S3.1.	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
		Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
		Program Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kotabumi 1

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kotabumi 1
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kotabumi 2
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Wonogiri

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Wonogiri
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Madukoro
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kalibalangan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kalibalangan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Blambangan Pagar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bumi Agung

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Bumi Agung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Ketapang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tulang Bawang Baru

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Tulang Bawang Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Negara Ratu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gedung Negara

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Gedung Negara
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Ogan Lima
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Tanjung Raja

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Tanjung Raja
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Bukit Kemuning
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Pekurun
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Cempaka

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Cempaka
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Tata Karya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Ulak Rengas

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Ulak Rengas
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Karang Sari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Batu Nangkop

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Batu Nangkop
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kotabumi Udik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Subik

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Subik
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Subik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Abung Kunang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kubu Hitu

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kubu Hitu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Semuli Raya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Mulyorejo

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Puskesmas Kemalo Abung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Puskesmas Kemalo Abung
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SMP)	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SMP)	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi Utara
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Selatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Selatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Selatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Barat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Barat
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Semuli
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Semuli
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Surakarta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Surakarta
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Tinggi

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Tinggi
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bukit Kemuning
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bukit Kemuning
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Tanjung Raja
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Tanjung Raja
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Utara
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bunga Mayang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bunga Mayang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Hulu Sungkai
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Hulu Sungkai
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Tengah
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Tengah

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Pekurun
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Pekurun
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Barat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Barat
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Kunang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Blambangan Pagar
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Blambangan Pagar
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Blambangan Pagar
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Tengah
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Tengah
S3.2.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
		Program Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Dinas Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PAUD)	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Kesetaraan)	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Blambangan Pagar
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
T4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan			
S4.1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bag. Organisasi)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
			Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
			Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
			Evaluasi Pemberhentian ASN	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	
			Pembinaan Disiplin ASN	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
			Evaluasi Disiplin ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			Pengelolaan Assessment Center	
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
S4.2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
T5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi			
S5.1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
S5.2.	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Utara
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Selatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Selatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Barat
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Semuli
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Surakarta
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tinggi
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bukit Kemuning
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Tanjung Raja
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Utara
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Sungkai
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bunga Mayang
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Tengah
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Pekurun
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Jaya
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Barat
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Kunang
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Blambangan Pagar
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tengah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
S5.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
		Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
		Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Lampung Utara Tahun 2025-2029 (diolah)

4.2.4.2. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap PHTC dan Program Unggulan Daerah Tahun 2027

Tabel 4.11

Mapping Sub Kegiatan Pendukung PHTC Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Manajemen RSUD Mayjend HM. RYACUDU	Dinas Kesehatan (RSUD HM. Ryacudu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
2	Kemudahan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Diselesaikan Di Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
			Program Pendafataran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
				Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
3	Bantuan Pendidikan Bagi Anak Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	Penyediaan Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru Jenjang SD Dan SMP	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SMP)
5	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Keliling (Puskesmas Mider) Integrasi Layanan Primer Yang Dilengkapi Peralatan Medis, Tenaga Kesahatan Dan Obat-Obatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Dinas Kesehatan		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
6	Akselerasi Penyelesaian Pelayanan Publik Di Kecamatan	KECAMATAN KOTABUMI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN KOTABUMI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN KOTABUMI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN SUNGKAI SELATAN		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Pendampingan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
8	Pemberian Insentif Bagi Guru Bukan ASN Penerima Tunjangan Profesi Guru yang Bertugas pada Sekolah Negeri, Guru Ngaji, Marbot Masjid/Rumah Ibadah Lain, Dan Tenaga Kesehatan Serta Babinsa Dan Babinkamtibmas.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Badan Kesbangpol	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

NO	PROGRAM UNGGULAN/PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sumber : Diolah, 2026

Tabel 4.12

Mapping Sub Kegiatan Pendukung 14 Program Unggulan Daerah Tahun 2027

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1	Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Lampung Utara Hingga Menjadi Produk Bernilai Tinggi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Menjamin Ketersediaan Sarana Produksi Bagi Petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan	Dinas Perikanan

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
4	Pemberantasan Kemiskinan dan Menuju Zero Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
5	Penguatan UMKM dan Koperasi Melalui Program Kredit Usaha dan Ekonomi Digital	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
6	Menjamin Ketersediaan dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Menjamin Ketersediaan dan Aksesbilitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
8	Penguatan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia	Program Perlindungan Perempuan	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Alat Bantu	DINAS SOSIAL
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Kedaruratan	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Rujukan	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	DINAS SOSIAL
9	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan Guna Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Sistem Informasi serta Implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korups	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Membangun Dari Desa, Akselerasi Pembangunan Pedesaan melalui Pengelolaan BUMDes untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
12	Memastikan Keamanan dan Menjamin Kerukunan antar Umat Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penggantian Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Rehabilitasi Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Rekonstruksi Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Pembangunan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Pehubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dinas Pehubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Pehubungan
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Pehubungan
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan	Dinas Pehubungan

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
14	Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Sumber Energi Bersih dan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Analisis dan Diolah, 2026

4.2.4.3. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2027

Tabel 4.13

Mapping Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1	Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
		Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Dinas PMDT

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA
			Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA
			layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA
2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas SDA, BM dan BK
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas SDA, BM dan BK
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dinas SDA, BM dan BK
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
3	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setdakab
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Setdakab
4	Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Naker
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Naker
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas PMDT
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
5	Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia Di Pasar Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setdakab
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Pehubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dinas Pehubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Pehubungan
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Pehubungan
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Relasi Media	Dinas Kominfo
			Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Kominfo

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
			Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dinas Kominfo
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Dinas Kominfo
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Kominfo
			Penyusunan Konten	Dinas Kominfo
6	Pemerataan Akses dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perkimciptaru
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkimciptaru
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkimciptaru
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkimciptaru
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkimciptaru

Sumber : Analisis dan Diolah, 2026

4.2.4.4. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, penyusunan RKPD harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN). Penyelarasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga target pembangunan nasional dapat dicapai secara efektif melalui dukungan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengintegrasikan Program Strategis Nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, permasalahan, serta kewenangan daerah. Program prioritas daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Pro-SN melalui penguatan sektor-sektor strategis, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan,

peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas, transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional dilaksanakan melalui sinergi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas Kabupaten Lampung Utara tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Keterkaitan antara program prioritas daerah dengan Program Strategis Nasional tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Mapping Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2027

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan		Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	
									1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
									1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Dinas Sosial	
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan		Sosial		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
							Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
								LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
									1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
									1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
										Permukiman Kumuh baru		
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	
									1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	
									1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	
									1.03.02.2.02.0127	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
										hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	Bina Konstruksi	
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP).	Operasionalisasi BPP	Unit	Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
									3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP nya	Hektare	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
							Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	
									2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
							Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Tata Kelola	Produksi Garam	Ton			PROGRAM PENGAWASAN	3.25.03.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Non Kewenangan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
			Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan			Kelautan dan Perikanan		SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
									3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Perikanan	
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	Kelautan dan Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
									3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Perikanan	
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	
									1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Dinas Kesehatan	
							Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Kesehatan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
								PANGAN MASYARAKAT				
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
									1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	
									1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Dinas Sosial	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
								DAN JAMINAN SOSIAL		Daerah Kabupaten/kota		
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Cakupan Penemuan Kasus TBC	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
									1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Dinas Pendidikan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
										Bidang Pendidikan		
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita			Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	
							Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
							Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	Dinas Perikanan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
										Usaha dan Risiko		
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus							1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
									1.01.02.1.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Perdagangan	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)										
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	
									2.11.11.2.01.0016	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan	Dinas Lingkungan Hidup	
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	
				Penurunan Emisi GRK	%	Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
									2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 (Analisis dan Diolah, 2026)

4.2.4.5. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Nasional

Sinkronisasi program tematik pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 untuk memastikan adanya keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, pemerintah daerah perlu menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan tema pembangunan nasional, prioritas nasional, serta program tematik yang menjadi fokus pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara, sinkronisasi program tematik pembangunan nasional dilakukan melalui pengintegrasian berbagai kebijakan pembangunan ke dalam prioritas daerah dan program perangkat daerah. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM dan koperasi, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, penguatan investasi, pemberdayaan desa, serta pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Melalui sinkronisasi tersebut, setiap program prioritas daerah diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan karakteristik pembangunan Kabupaten Lampung Utara. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan sasaran pembangunan nasional secara terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing. Keterkaitan antara program prioritas daerah dengan program tematik pembangunan nasional selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Mapping Sub Kegiatan Pendukung Tematik Pembangunan Nasional Tahun 2027

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Sosial	PROGRAM REHIBILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial.	Dinas Sosial	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.022.020.060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.022.020.046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
						Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.042.010.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA	%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.062.020.012	Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hak Anak dalam Proses Pembangunan							Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.022.020.055	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Dinas Pendidikan	
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
						Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	106.042.010.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
						Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	
3	Masyarakat Adat	Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	213.052.010.001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
								213.052.010.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
4	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	
			Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
					Pariwisata	Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
					Perindustrian	Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Bukan kewenangan	
						Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4..01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.	Bukan kewenangan	
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan	
					Kesbangpol		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Badan Kesbangpol	

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
								8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	
								8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Badan Kesbangpol	
6	Penanggulangan Bencana	Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	Nilai	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim	%				1.05.03.1.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
								1.05.03.1.04.0008	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
								1.05.03.1.04.008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 (Analisis dan Diolah, 2026)

4.2.4.6. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap Astacita/Outcome Prioritas

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai outcome prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita, sebagaimana tabel berikut. Target dan pagu anggaran disesuaikan dengan hasil Rakortekbang Tahun 2026, pengendalian dan evaluasi RKPD/Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4.16

Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan	URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Infrastruktur	Jumlah Luas Kawasan yang	Ha	PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Sumber Daya Air Bina

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)		SUMBER DAYA AIR (SDA)			Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Persentase kondisi mantap jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.10.2.01.005	Rekonstruksi Jalan	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Penetapan RDTR	Perda/Perkada		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban	Nilai	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum		DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Nilai	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Dinas Sosial
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,			Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
				Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan	Orang		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Perlindungan Hak hak Pekerja dan Dialog Sosial				dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02.0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0016	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
				Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	%		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi	Bidang Tanah		2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang adil dan makmur.							Pengelolaan Lingkungan Hidup	
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,						2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.							kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
				Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%		2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur			Rasio Konektivitas Simpul	Rasio		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi.			Transportasi di Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bukan kewenangan
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bukan kewenangan
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi,dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal	Rasio Kewirausahaan	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahn, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan Seni	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan						2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	%	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai						2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat yang adil dan makmur.							Dilestarikan dan Didayagunakan	
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
				Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Dinas Perkebunan dan Peternakan
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Hektar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari						
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Swasembada Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%				

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru								
				Rasio Elektrifikasi	%				
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/ Milyar Rupiah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Membangun dari desa dan dari	URUSAN PEMERINTAHAN	Mewujdukan transformasi	Persentase Dukungan	%	PROGRAM PEMBANGUNAN	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	BIDANG TRANSMIGRASI	kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi		KAWASAN TRANSMIGRASI			Masyarakat Desa dan Transmigrasi
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Badan Kesbangpol

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.					FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol

Sumber : Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 (Analisis dan Diolah, 2026)

4.2.4.7. Program Prioritas sebagai Dukungan Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. SPM menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar minimum pada urusan pemerintahan wajib, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam penyusunan RKPD ini, pemenuhan SPM ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target indikator, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, namun juga dari kemampuan daerah dalam menghadirkan layanan dasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, masyarakat miskin, wilayah terpencil, dan kawasan dengan akses pelayanan yang masih terbatas.

Dukungan terhadap SPM dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kebutuhan pelayanan dasar, penajaman program dan kegiatan perangkat daerah, penguatan kelembagaan dan sumber daya pelayanan, optimalisasi pembiayaan, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Selain itu, pemenuhan SPM juga diarahkan untuk memperkecil kesenjangan pelayanan antar wilayah sekaligus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu pelayanan dasar mengintegrasikan target dan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian output program, tetapi juga pada terjaminnya pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tabel dukungan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada tahun 2027.

Tabel 4.17

Dukungan Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
2	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
3	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	6 Unit
4	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
5	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
6	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
7	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	115 Satuan Pendidikan
8	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
9	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	115 Orang
10	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
11	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
12	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
13	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
14	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
15	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
16	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
17	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
18	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	9154 Paket
19	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	6 Ruang
20	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	10 Unit
21	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
22	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
23	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	8 Ruang
24	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
25	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	115 Peserta Didik
26	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
27	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
28	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	6 Unit
29	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	5 Ruang
30	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	2 Unit
31	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
32	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
33	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	250 Peserta Didik
34	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
35	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
				Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
36	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	115 Satuan Pendidikan
37	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	115 Orang
38	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
39	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
40	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
41	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
42	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
43	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
44	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	114 Satuan Pendidikan
45	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
46	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	300 Orang
47	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
48	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	9800 Paket
49	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
50	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
51	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	4 Paket
52	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
53	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	400 Peserta Didik

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	BIDANG PENDIDIKAN		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Personil Peserta Didik PAUD					
54	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
55	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
56	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	100 Satuan Pendidikan
57	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
58	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
59	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
60	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
61	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	4 Komunitas
62	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	BIDANG PENDIDIKAN		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
63	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
64	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	60 Orang
65	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
66	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
67	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
68	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
69	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
70	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
71	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	30 Paket
72	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
73	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
74	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
75	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
76	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	16 Satuan Pendidikan
77	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
78	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
79	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
80	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Dokumen	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	1 Dokumen

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	BIDANG PENDIDIKAN		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Layanan di Bidang Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan				
81	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
82	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
83	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
84	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
85	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
86	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
87	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
88	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
89	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
90	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	125 Peserta Didik
91	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
92	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
93	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
94	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
95	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
96	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
99	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
100	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	1 Dokumen

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
101	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	
102	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	1 Dokumen
103	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	2 Laporan
108	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen	Layanan	DINAS PENDIDIKAN	
109	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0008 Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	Buku	Aktifitas	DINAS PENDIDIKAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
110	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
111	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
112	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
113	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
114	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
115	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
			Daerah Kabupaten/Kota						
116	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
117	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
118	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
119	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
120	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	
121	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Layanan	DINKES DAN PUSKESMAS	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
122	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	5 Unit
123	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
124	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen
125	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	2 Liter/Detik
126	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
127	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	2 Liter/Detik
128	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
129	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
130	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
131	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	210 SR
132	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PENATAAN RUANG								
133	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
134	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0035 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Sambungan Rumah melalui Perluasan, Peningkatan, atau Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Sambungan Rumah (SR)	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
135	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Unit
136	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 M^3/Hari
137	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
138	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	UMUM DAN PENATAAN RUANG		dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa				KARYA DAN PENATAAN RUANG	
139	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	200 M^3/Hari
140	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	100 Unit
141	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
142	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
143	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
144	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	1.03.05.2.01.0046 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik (SPALD) Terpusat				PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
145	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0047 Pengukuran kualitas emisi SPALD	Kegiatan pengujian baku mutu efluen IPALD dan IPLT sesuai Parameter Baku Mutu Kementerian Lingkungan Hidup yang dilakukan	Kegiatan	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
146	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0048 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
147	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0049 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
148	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0050 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
149	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai	Rumah Tangga	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
					SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				
150	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0052 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPALD-Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sambungan Rumah (SR)	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
151	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0010 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
152	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SR	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
153	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
154	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
155	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada	1.03.07.2.01.0025 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi			PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
156	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
157	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
158	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0034 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
159	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
160	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0037 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
161	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0038 1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
162	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0039 1.03.07.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
163	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0040 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
164	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0041 1.03.07.2.01.0011 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
165	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0042 1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	M^3/Hari	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
166	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
167	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
168	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
169	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
170	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
171	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
172	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
173	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
174	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
175	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
176	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
177	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan	1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
178	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
179	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
180	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	20 Unit
181	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
182	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
183	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
184	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
185	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
186	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
187	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0003 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
188	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
189	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN		atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					KARYA DAN PENATAAN RUANG	
190	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
191	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha	Layanan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
192	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
193	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
194	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
195	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0026 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
196	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
197	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0014 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
198	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
199	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	Aktifitas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
200	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	106405 Orang
201	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
202	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100 unit
203	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80 orang

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT				(per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				
204	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
205	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
206	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
207	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500 org
208	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar	Laporan	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Evakuasi Korban Bencana	Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				
209	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
210	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Layanan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1000org
211	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	Aktifitas	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
212	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT		dalam Daerah Kabupaten/Kota						
213	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
214	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
215	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
216	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
			dalam Daerah Kabupaten/Kota						
217	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0028 Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Dokumen	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
218	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
219	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
220	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
221	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Orang	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
222	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Layanan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
223	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
224	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
225	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Unit	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Membahayakan Manusia	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				
226	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0006 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Aktifitas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
227	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	100 org
228	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	50 org
229	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	12 org

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
230	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	8 org
231	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	10 org
232	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	
233	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	23 org
234	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	75 org

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
			Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
235	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	100 org
236	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	
237	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	15 org
238	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	OPD PENGAMPU	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
239	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	
240	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	50 ORG
241	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	
242	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	100 ORG
243	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	4 org
244	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	DINAS SOSIAL	

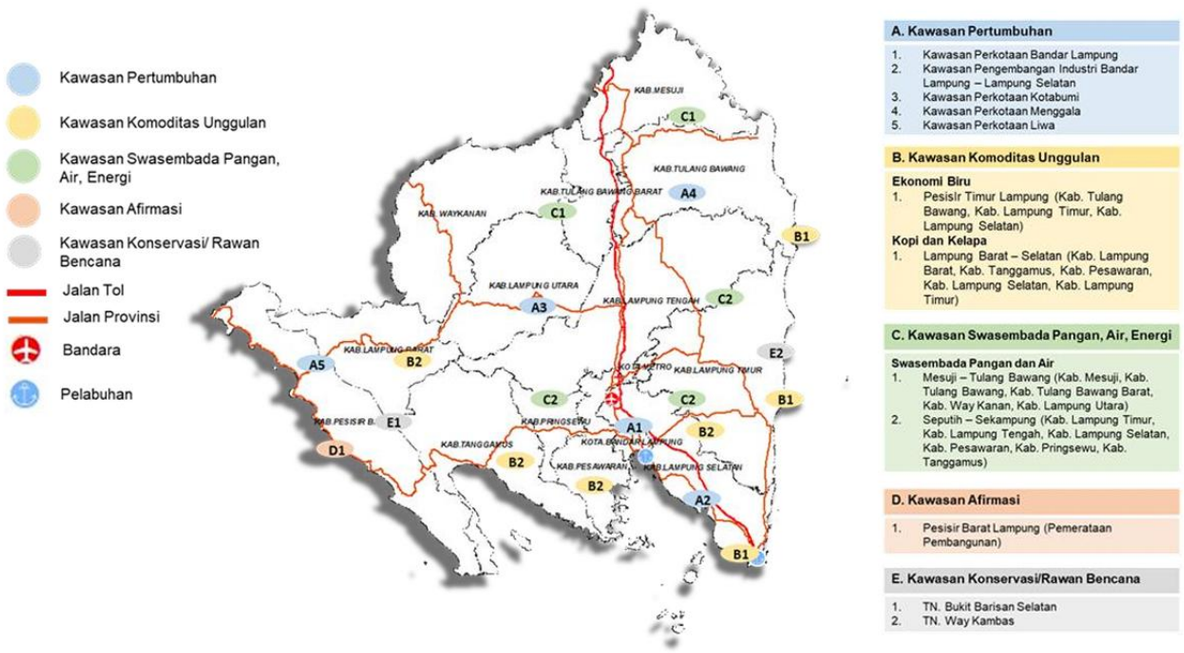
4.2.5. Tematik Kewilayahan

4.2.5.1. Rencana Pembangunan Infrastruktur Provinsi di Kabupaten Lampung Utara

Arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 secara strategis dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta diperkuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 2045. Arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMN difokuskan pada program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan arah kebijakan dalam RPJPD Lampung diimplementasikan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta sumber pembiayaan lainnya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pinjaman daerah, dan dana bantuan pusat. Rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung mencakup sektor-sektor utama seperti transportasi, sumber daya air, energi dan ketenagalistrikan, permukiman, sanitasi dan air minum, telekomunikasi dan digitalisasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka akses terhadap layanan dasar di seluruh kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Lampung pada RPJMN dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu: Kawasan Pertumbuhan; Kawasan Komoditas Unggul; Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; Kawasan Afirmasi serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.4
Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029, 2026

Dukungan program dan kegiatan pada Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN 2025-2029, tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada Bab IV. Lokasi prioritas rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan highlight indikasi intervensi antara lain :

Tabel 4.18
Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara Pada RPJMN 2025-2029

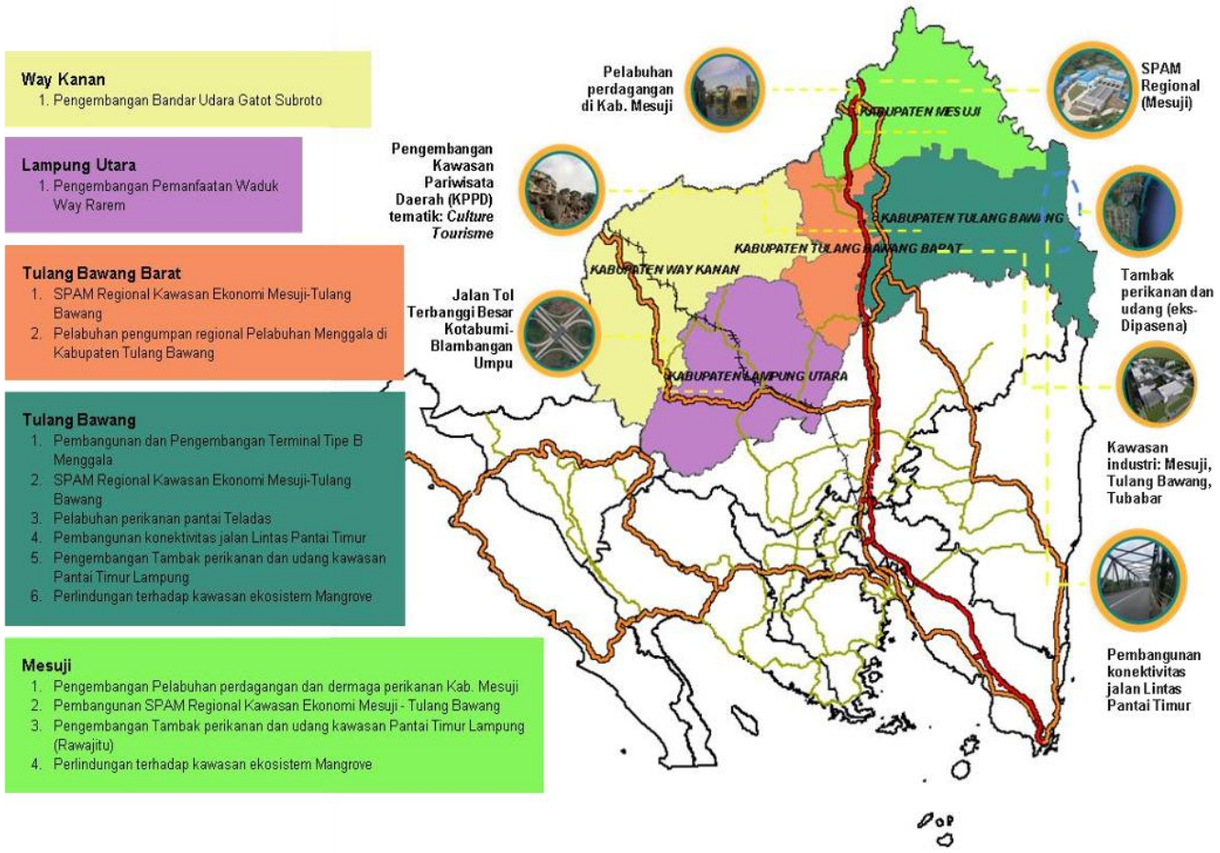
Lokasi Prioritas				*Highlight* Indikasi Intervensi
A.	**3.**	**Kawasan Perkotaan Kotabumi**	a.	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui : - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
			b.	Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
			c.	Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi
			d.	Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukitkemuning–Blambangan Umpu
			e.	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC)
			f.	Pengembangan kota agropolitan Kotabumi
C.	**KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI**			
	1.	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)	a.	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas
			b.	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
			c.	Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)
			d.	Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan)
			e.	Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
			f.	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
			g.	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
			h.	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub DAS Way Umpu

Lokasi Prioritas				*Highlight* Indikasi Intervensi
			i.	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
			j.	Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
			k.	Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana ber gulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
			l.	Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

Sumber : Diolah, 2026

Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur untuk Kabupaten Lampung Utara berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

Gambar 4.5
Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II



Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Arah pengembangan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Lampung yang sebagian besar dilaksanakan melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan fokus pada pemanfaatan potensi wilayah dalam tiga koridor ekonomi utama untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 4.19
Arah Pengembangan Infastruktur Kewilayahan Kabupaten Lampung Utara

No	Kabupaten/Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism			
1	Lampung Utara	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Kotabumi	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Pemanfaatan Waduk Way Rarem
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SMA
			Dukungan Untuk Kabupaten Afirmatif Berbasis Tingkat Kemiskinan

Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

4.2.5.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lampung Utara

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara secara lebih implementatif dan terukur, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan **Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap I (2026–2029)** sebagai instrumen kunci pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 43 ayat (1), indikasi program utama tersebut memuat lima komponen utama, yaitu program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Kelima komponen ini dirancang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna memastikan bahwa setiap arah kebijakan tata ruang dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan turunan langsung dari kebijakan pengembangan wilayah kabupaten yang diarahkan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, serta pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. Program ini tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga lintas sektor dan wilayah, sehingga mampu mendorong keterpaduan pembangunan antar kawasan. Selanjutnya, pada ayat (3) ditegaskan bahwa setiap program utama harus memiliki kejelasan lokasi pelaksanaan. Penentuan lokasi ini menjadi sangat penting untuk menjamin ketepatan sasaran intervensi pembangunan, sekaligus sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pada ayat (4), diatur bahwa pembiayaan pelaksanaan program dapat bersumber dari berbagai skema pendanaan, baik dari pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi, pemerintah kabupaten melalui APBD Kabupaten, maupun dari sektor swasta dan masyarakat. Pendekatan multi-sumber pendanaan ini mencerminkan prinsip kolaboratif dan kemitraan dalam pembangunan wilayah. Lebih lanjut, ayat (5) menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta peran aktif swasta dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bersifat partisipatif dan membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan.

Terakhir, sebagaimana diatur dalam ayat (6), waktu pelaksanaan program direncanakan dalam horizon lima tahunan (2026–2029) dan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam program tahunan. Dengan demikian, indikasi program utama ini menjadi jembatan antara dokumen RTRW yang bersifat makro-spasial dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan seperti RKPD dan Renja perangkat daerah. Secara keseluruhan, pengaturan dalam Pasal 43 ini menegaskan bahwa RTRW Kabupaten Lampung Utara tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan ruang, tetapi juga sebagai dasar operasional pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lampung Utara. Tahapan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah.

Rencana kerja disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan stunting serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan penunjang dan pendukung urusan pemerintahan. Program prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis dan SPM;

2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Nasional

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk mendukung secara aktif pelaksanaan Program Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengintegrasikan prioritas nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pendekatan ini juga memperkuat prinsip money follows program priority, sehingga alokasi anggaran daerah difokuskan pada program-program yang memiliki dampak strategis dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program prioritas nasional antara lain diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi produktif, percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan wilayah, termasuk sektor pertanian, UMKM, dan industri berbasis sumber daya lokal. Sinergi pendanaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung program prioritas nasional. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBD, dukungan APBN, maupun keterlibatan sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan fiskal daerah dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Tabel 5.1
Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional
Tahun 2027

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027	KET
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penanggulangan Bencana	2.818.581.797,00	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.195.929.893,83	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	744.938.442,00	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.425.599.500,00	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.138.087.100,00	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.618.328.500,00	
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	8.000.000.000,00	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	299.998.500,00	
		Program Penyelenggaraan Jalan	90.991.952.300,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.317.471.400,00	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.017.497.200,00	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	900.000.000,00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027	KET
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	782.835.030,00	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	409.061.849,00	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.958.400,00	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	616.596.631,00	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	26.410.500,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.523.827.435,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.728.128.400,00	
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra produksi melalui peran koperasi.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	121.924.900,00	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	18.523.440.700,00	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	159.475.500,00	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	159.475.500,00	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	142.659.000,00	
		Program Pengembangan Kebudayaan	353.250.000,00	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	265.000.000,00	
		Program Pemasaran Pariwisata	1.185.350.000,00	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	419.755.000,00	
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	113.578.107.000,91	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78.430.615.476	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.267.747.800,00	
		Program Penanggulangan Bencana	2.818.581.797,00	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.195.929.893,83	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	744.938.442,00	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.375.000,00	
		Program Hubungan Industrial	81.321.700,00	
		Program Perlindungan Perempuan	85.402.500,00	
		Program Perlindungan Khusus Anak	355.840.800,00	
		Program Pendaftaran Penduduk	862.240.300,00	
		Program Pencatatan Sipil	50.000.000,00	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.431.830.995,00	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	70.362.820,00	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	289.631.250,00	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.596.809.480,00	
		Program Pembinaan Perpustakaan	596.733.000,00	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	22.761.500,00	
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	18.523.440.700,00	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.548.000,00	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	152.854.190,00	
		Program Pengembangan Ekspor	623.119.000,00	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	122.367.900,00	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	23.250.000,00	
6		Program Kawasan Permukiman	818.150.500,00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027	KET
	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	10.955.211.900,00	
		Program Pemberdayaan Sosial	348.308.910,00	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	289.156.250,00	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.375.000,00	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	134.830.500,00	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	131.480.000,00	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.138.087.100,00	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	113.000.000,00	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	103.958.400,00	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.796.982.000,00	
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	72.913.700,00	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	134.830.500,00	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	436.330.000,00	
		Program Pengembangan Kebudayaan	353.250.000,00	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	265.000.000,00	
		Program Pembinaan Perpustakaan	596.733.000,00	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	22.761.500,00	
		Program Pengelolaan Arsip	135.943.560,00	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.796.982.000,00	
	Jumlah		392.978.627.842,57	

Sumber : Diolah, 2026

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) merupakan bagian penting dalam memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional melalui sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dalam dokumen RKPD ini, dukungan terhadap Pro-SN diarahkan pada penguatan intervensi pembangunan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, serta pengembangan wilayah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengintegrasian kebijakan nasional ke dalam perencanaan daerah secara terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan daerah. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa pelaksanaan Pro-SN tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penajaman lokus intervensi, optimalisasi pendanaan pembangunan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di tingkat lapangan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah didorong untuk menjadikan Pro-SN sebagai bagian integral dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Melalui dukungan terhadap Pro-SN, diharapkan tercipta sinergi pembangunan pusat dan daerah yang semakin kuat sehingga mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab berbagai isu strategis dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut tabel yang berisi dukungan program kegiatan beserta sub kegiatan yang telah diinput pada aplikasi SIPD-RI :

Tabel 5.2

Rencana Dukungan Kabupaten Lampung Utara terhadap Pro-SN Tahun 2027

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan		Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	77089 Orang	26.078.500,00	Dinas Sosial
									1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	693648 Usulan	38.247.000,00	Dinas Sosial
									1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	100 Orang	21.000.000,00	Dinas Sosial
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	16.269.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan		Sosial		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	693648 Usulan	38.247.000,00	Dinas Sosial
							Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	1 Dokumen	9.999.700,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
									1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 Unit	1.292.650.000,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
									1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Permukiman Kumuh baru			
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2 Km	420.744.000,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
									1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
									1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
									1.03.02.2.02.0127	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										konstruksi air tanah dan air baku			
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP).	Operasionalisasi BPP	Unit	Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Unit	6.100.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP nya	Hektare	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Unit	22.641.600,00	Dinas Ketahanan Pangan
									2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	28.070.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
							Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	7 Ha	7.750.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan	Produksi Garam	Ton	Kelautan dan Perikanan		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	3.25.03.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam			Non Kewenangan

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perikanan yang Berkelanjutan					KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1 Unit	12.061.600,00	Dinas Perikanan
									3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	20 Unit	34.705.600,00	Dinas Perikanan
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	Kelautan dan Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1 Unit	12.061.600,00	Dinas Perikanan
									3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	20 Unit	34.705.600,00	Dinas Perikanan
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	5.132.911.000,00	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	155.515.000,00	Dinas Kesehatan
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	0	0	Dinas Kesehatan
							Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	9.736.450,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								PANGAN MASYARAKAT					
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	11.138.341.476,00	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	695.496.500,00	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1.115.937.000,00	Dinas Kesehatan
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	10.001.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	11.138.341.476,00	Dinas Kesehatan
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	693648 Usulan	38.247.000,00	Dinas Sosial

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								DAN JAMINAN SOSIAL		Daerah Kabupaten/kota			
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	10.001.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Cakupan Penemuan Kasus TBC	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7416 Orang	1.598.389.750,00	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	211 Orang	7.600.000,00	Dinas Kesehatan
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	77089 Orang	26.078.500,00	Dinas Sosial
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	10.001.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	37.484.838.000,00	Dinas Kesehatan
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	552 Orang	512.463.600,00	Dinas Kesehatan
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	422 Orang	120.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.						dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita			Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0,00	Dinas Kesehatan
							Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	20 KM	38.474.353.200,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	38.632.900,00	Dinas Ketahanan Pangan
							Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan	10 Unit Usaha	6.435.600,00	Dinas Perikanan

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	465 Dokumen	102.767.600,00	Dinas Pendidikan
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus							1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	Dinas Pendidikan
									1.01.02.1.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	208.812.500,00	Dinas Pendidikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Perdagangan	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan	34.160.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Keluraha n Merah Putih	Proporsi Koperasi Desa/Kelura han Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	82 Unit Usaha	154.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)											
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Lingkunga n Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	71.500 Ton	30.258.135,00	Dinas Lingkungan Hidup
									2.11.11.2.01.0016	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan	29%	141.881.780,00	Dinas Lingkungan Hidup
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Penurunan Emisi GRK	%	Lingkunga n Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.114.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
									2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	1 Dokumen	34.728.300,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.3

Rencana Dukungan Kabupaten Lampung Utara terhadap Tematika Pembangunan Tahun 2027

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	32 Lembaga	34.797.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Sosial	PROGRAM REHIBILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial.	80 Orang	756.082.200,00	Dinas Sosial
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.022.020.060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	345 Orang	409.993.500,00	Dinas Pendidikan
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.022.020.046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	161.880.000,00	Dinas Kesehatan
						Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.042.010.005	Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	165.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	23 Orang	11.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	%	Pemberdayaan Perempuan dan	Pemberdayaan Perempuan dan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.062.020.012	Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga	150 Orang	32.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan	Peringkat dalam KLA		Perlindungan Anak	Perlindungan Anak			Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			Perlindungan Anak
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.022.020.055	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	423 Kegiatan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	161.880.000,00	Dinas Kesehatan
						Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	106.042.010.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	80 Orang	756.082.200,00	Dinas Sosial
						Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	80.487.300,00	Bappeda
3	Masyarakat Adat	Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	213.052.010.001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
								213.052.010.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
4	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	109.612.750,00	Dinas Sosial
			Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	25 Unit Usaha	10.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Pariwisata	Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Perindustrian	Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi			Bukan kewenangan
						Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4..01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.			Bukan kewenangan
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0	0	Dinas Pendidikan
					Kesbangpol		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	100 Orang	213.924.500,00	Badan Kesbangpol

NO	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
								8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 DOkumen	10.000.000,00	Badan Kesbangpol
								8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	300 Orang	966.230.500,00	Badan Kesbangpol
6	Penanggulangan Bencana	Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	Nilai	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Bukan kewenangan
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim	%				1.05.03.1.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.315.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.03.1.04.0008	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	31.322.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.03.1.04.008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	135.386.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.4

Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita Tahun 2027

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	422 Orang	120.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	345 Orang	409.993.500,00	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	0	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	15 Paket	739.295.000,00	Dinas Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	27 Unit	1.199.085.000,00	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	22.076.185.800,00	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	3.304.581.850,00	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	512.463.600,00	Dinas Kesehatan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	penyandang disabilitas.										
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	20 Paket Pekerjaan	82.887.500,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	10 Lembaga	56.529.500,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Persentase kondisi mantap jalan	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	0	0	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
							1.03.10.2.01.005	Rekonstruksi Jalan	8.25 KM	33.950.000.000,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4 Dokumen	432.150.800,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	160 SR	1.161.408.200,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Unit	124.208.300,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 Dokumen	230.545.400,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Penetapan RDTR	Perda/Perkada		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
											dan Penataan Ruang
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15 Unit Rumah	488.150.000,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	0	0	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	35 Lokasi	5.223.195.700,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	28 Lokasi	5.810.016.300,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	300 Orang	121.336.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda						1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	80 Orang	68.556.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum	Nilai	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Nilai	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	120.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	95.673.600,00	Dinas Sosial
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	6 Orang	42.072.500,00	Dinas Sosial
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	77089 Orang	26.078.500,00	Dinas Sosial
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	693648 Usulan	38.247.000,00	Dinas Sosial

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
								Daerah Kabupaten/Kota			
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	60 Orang	160.375.000,00	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan	12 Perusahaan	2.499.800,00	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
				Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	836 Orang	168.537.600,00	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02.0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	24 Orang	10.218.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	12 Lembaga	13.525.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Anak Korban Kekerasan	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0016	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan	60 Orang	165.007.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.			yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				Tingkat Daerah Kab/Kota			dan Perlindungan Anak
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	1 Lembaga	44.950.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	9.736.450,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	%		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan	34.160.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	57.552.000,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
				Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi	Bidang Tanah		2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	64.372.900,00	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7 Lokasi	207.588.609,00	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	2 Dokumen	76.757.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 Dokumen	9.999.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 Badan Usaha	36.768.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	10.342.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	770.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	6.930.000,00	Dinas Kependuduk

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										an dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	21.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang						2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	adil dan makmur.			Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	46 Orang	62.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 DOkumen	48.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kegiatan	13.800.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%		2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	15.011.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	1 Laporan / Dokumen	15.205.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	15.010.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1000 Unit	4.600.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur			Rasio Konektivitas Simpul	Rasio		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	2 Unit	63.356.000,00	Dinas Perhubungan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi.			Transportasi di Daerah				Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			Bukan kewenangan
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			Bukan kewenangan
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	300000 Orang	33.790.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1 Dokumen	2.259.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	45 Titik	1.904.722.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi,dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi.	2 Layanan	147.412.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal	Rasio Kewirausahaan	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha	154.000.000,00	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahn, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	0	0	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			terhadap PDRB		PERLINDUNGAN KOPERASI		Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha			
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	40 Orang	43.371.300,00	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	0	0	Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	29.721.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	16.318.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	154.999.550,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	1 Organisasi	59.999.100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional			2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	31 Orang	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	80%	43.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	70%	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.762.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	92.196.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	56.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	KEBUDAYAAN		Pertunjukan Seni							
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	%	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	5 Objek	56.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	4 Objek	65.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan	42.733.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	21.272.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25 Orang	5.003.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	17.758.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Laporan	24.014.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	22.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	266.675.400,00	Dinas Perikanan
				Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	1 Dokumen	3.685.200,00	Dinas Perikanan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	5.204.800,00	Dinas Perikanan
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Pelaku Usaha	7.511.700,00	Dinas Perikanan
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	949.850.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	50.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	2 Unit	51.080.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	30 Kegiatan	177.598.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	22.270.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
									4 Laporan	26.140.035,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	50 Ton	87.580.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	hijau, dan ekonomi biru			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Hektar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	1 DOkumen	17.237.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1 DOkumen	10.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari								
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Swasembada Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%						
				Rasio Elektrifikasi	%						

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/ Milyar Rupiah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	10.235.970,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	16.999.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73.169.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	16.033.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.250.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1 Dokumen	12.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujdukan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	50.000.000,00	Badan Kesbangpol
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	1.206.006.500,00	Badan Kesbangpol

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	Target Sub Kegiatan 2027	Pagu RKPD 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	291.600.000,00	Badan Kesbangpol
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	2.097.735.000,00	Badan Kesbangpol
	JUMLAH TOTAL DIKUNGAN									**91.844.306.664,00**	

Sumber : Hasil Analisis, 2026

5.1.3. Dukungan Terhadap SPM

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. SPM menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar minimum pada urusan pemerintahan wajib, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam penyusunan RKPD ini, pemenuhan SPM ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target indikator, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, namun juga dari kemampuan daerah dalam menghadirkan layanan dasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, masyarakat miskin, wilayah terpencil, dan kawasan dengan akses pelayanan yang masih terbatas.

Dukungan terhadap SPM dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kebutuhan pelayanan dasar, penajaman program dan kegiatan perangkat daerah, penguatan kelembagaan dan sumber daya pelayanan, optimalisasi pembiayaan, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Selain itu, pemenuhan SPM juga diarahkan untuk memperkecil kesenjangan pelayanan antar wilayah sekaligus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu pelayanan dasar mengintegrasikan target dan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian output program, tetapi juga pada terjaminnya pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tabel dukungan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada tahun 2027.

Tabel 5.5
Dukungan Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
2	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
3	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	3.175.404.500,00	DINAS PENDIDIKAN	26 Unit
4	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	454.177.500,00	DINAS PENDIDIKAN	6 Unit
5	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
6	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Layanan	202.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN	422 Orang
7	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	Layanan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	422 Satuan Pendidikan
8	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Aktifitas	54.955.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN	422 Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
9	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Layanan	101.721.600,00	DINAS PENDIDIKAN	424 Orang
10	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	86.161.000,00	DINAS PENDIDIKAN	422 Konten Digital
11	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	423 Orang
12	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	102.767.600,00	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
13	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
14	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
15	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	423 Kegiatan
16	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
17	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pendidikan Sekolah Dasar	Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						
18	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	1.966.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN	8700 Paket
19	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	1.353.798.500,00	DINAS PENDIDIKAN	5 Ruang
20	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	1.147.816.500,00	DINAS PENDIDIKAN	7 Unit
21	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Aktifitas	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	422 Orang
22	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
23	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	3.710.514.500,00	DINAS PENDIDIKAN	8 Ruang
24	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
25	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	74.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN	92 Peserta Didik
26	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pendidikan Sekolah Dasar							
27	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
28	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	1.309.785.000,00	DINAS PENDIDIKAN	6 Unit
29	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	690.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	5 Ruang
30	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2 Unit
31	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
32	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	250 Peserta Didik
33	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Layanan	297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	250 Peserta Didik
34	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
35	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
36	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Layanan	385.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN	115 Satuan Pendidikan
37	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Layanan	267.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	115 Orang
38	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
39	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
40	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	208.812.500,00	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
41	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
42	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	150.441.600,00	DINAS PENDIDIKAN	3 Komunitas
43	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Kegiatan	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
44	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Layanan	287.306.236,00	DINAS PENDIDIKAN	112 Satuan Pendidikan
45	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
46	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	409.993.500,00	DINAS PENDIDIKAN	345 Orang
47	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
48	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	6515 Paket
49	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
50	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
51	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	4 Paket

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
52	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
53	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	263.997.804,91	DINAS PENDIDIKAN	500 Peserta Didik
54	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
55	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
56	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Layanan	292.120.400,00	DINAS PENDIDIKAN	387 Satuan Pendidikan
57	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
58	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
59	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
60	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
61	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
62	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
63	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
64	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
65	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
66	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
67	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	
68	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
69	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan	1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						
70	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
71	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	Layanan	739.295.000,00	DINAS PENDIDIKAN	15 Paket
72	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
73	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
74	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
75	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
76	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Aktifitas	2.682.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	16 Satuan Pendidikan
77	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
78	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
79	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
80	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Layanan	275.508.000,00	DINAS PENDIDIKAN	4 Dokumen
81	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
82	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
83	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
84	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
85	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
86	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
87	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
88	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
89	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
90	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Layanan	56.737.300,00	DINAS PENDIDIKAN	125 Peserta Didik
91	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
92	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
93	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
94	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
95	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
96	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
99	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0
100	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	Layanan	0,00	DINAS PENDIDIKAN	0
101	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	Aktifitas	47.631.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2 Dokumen
102	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	Aktifitas	399.407.600,00	DINAS PENDIDIKAN	1 Dokumen
103	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	Aktifitas	208.223.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1 Laporan
108	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan	1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Dokumen	Layanan	0	DINAS PENDIDIKAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	BAHASA DAN SASTRA	Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersusun					
109	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0008 Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	Buku	Aktifitas	0	DINAS PENDIDIKAN	0
110	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	1.290.065.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	146879 Orang
111	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	277.765.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	21131 Orang
112	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	1.315.135.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	21436 Orang
113	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	305.890.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	45066 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Daerah Kabupaten/Kota							
114	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	557.450.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	219723 Orang
115	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	260.630.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	1172112 Orang
116	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	321.005.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	67409 Orang
117	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	254.390.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	123137 Orang
118	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Layanan	207.580.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	20975 Orang
119	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Orang	Layanan	306.739.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	3490 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					
120	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Layanan	2.022.399.750,00	DINKES DAN PUSKESMAS	16867 Orang
121	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Layanan	235.530.000,00	DINKES DAN PUSKESMAS	93510 Orang
122	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	Layanan	714.111.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	11 Unit
123	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
124	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	Aktifitas	432.150.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	4 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
125	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	2 Liter/Detik
126	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
127	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	Layanan	2.009.800.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	2 Liter/Detik
128	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
129	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
130	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
131	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air	SR	Layanan	1.161.408.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	160 SR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	(SPAM) Jaringan Perpipaan	Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				KARYA DAN PENATAAN RUANG	
132	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
133	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
134	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0035 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Sambungan Rumah melalui Perluasan, Peningkatan, atau Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Sambungan Rumah (SR)	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
135	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	299.984.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Unit
136	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 M^3/Hari
137	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
138	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan	1.03.05.2.01.0034 Pembinaan	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem	Desa	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
139	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M^3/Hari	Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0 M^3/Hari
140	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0 Unit
141	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Layanan	124.208.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Unit
142	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0043 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
143	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	Aktifitas	230.545.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	2 Dokumen
144	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01.0046 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit Rumah	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		dalam Daerah Kabupaten/Kota						KARYA DAN PENATAAN RUANG	
145	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0047 Pengukuran kualitas emisi SPALD	Kegiatan pengujian baku mutu efluen IPALD dan IPLT sesuai Parameter Baku Mutu Kementerian Lingkungan Hidup yang dilakukan	Kegiatan	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
146	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0048 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
147	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0049 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
148	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0050 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
149	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	Layanan	2.362.759.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	150 Rumah Tangga
150	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	1.03.05.2.01.0052 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air	Sambungan Rumah (SR)	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik (SPALD) Terpusat Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPALD-Terpusat	LImbah Domestik (SPALD) Terpusat				PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	
151	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0010 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
152	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SR	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
153	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
154	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
155	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0025 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
156	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
157	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
158	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0034 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
159	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
160	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0037 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
161	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	1.03.07.2.01.0038 1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis	Unit	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Daerah Kabupaten/Kota	Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				KARYA DAN PENATAAN RUANG	
162	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0039 1.03.07.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
163	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0040 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0 Rumah Tangga
164	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0041 1.03.07.2.01.0011 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
165	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0042 1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	M^3/Hari	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
166	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
167	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
168	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	Aktifitas	30.576.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen
169	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
170	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
171	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
172	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	53.081.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Relokasi Program Kabupaten/Kota						KARYA DAN PENATAAN RUANG	
173	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Aktifitas	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen
174	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
175	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
176	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
177	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Relokasi Program Kabupaten/Kota							
178	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
179	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
180	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0 Unit Rumah
181	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
182	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
183	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Relokasi Program Kabupaten/Kota	Program Pemerintah Kabupaten/Kota	yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				KARYA DAN PENATAAN RUANG	
184	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
185	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
186	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
187	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0003 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
188	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
189	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
190	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
191	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha	Layanan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	0
192	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Aktifitas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0
193	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Aktifitas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0
194	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	Aktifitas	64.795.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	205 Orang
195	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0026 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Aktifitas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
			PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						
196	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	Aktifitas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0
197	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0014 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Aktifitas	1.995.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2 Dokumen
198	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Aktifitas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0
199	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	Aktifitas	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2 Laporan
200	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Layanan	121.336.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
201	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Layanan	120.783.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Dokumen
202	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	Layanan	500.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100 Unit
203	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	68.556.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80 Orang
204	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Aktifitas	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
205	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	Aktifitas	612.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12 laporan
206	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan	Dokumen	Aktifitas	114.315.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					
207	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	Aktifitas	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
208	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Aktifitas	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
209	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	Layanan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
210	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Layanan	188.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500 Orang
211	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	Aktifitas	47.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12 Laporan
212	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Layanan	12.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
213	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Layanan	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	60 Laporan
214	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Layanan	55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5 Laporan
215	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Layanan	2.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5 Dokumen
216	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Aktifitas	169.130.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
217	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0028 Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0
218	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Layanan	10.004.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	247 Orang
219	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Layanan	12.000.042,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5 Desa/Kelurahan
220	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit	Aktifitas	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0
221	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Orang	Aktifitas	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
222	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Layanan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12 Laporan
223	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Aktifitas	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0
224	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Aktifitas	13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12 Laporan
225	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Aktifitas	82.689.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22 Unit
226	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0006 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Aktifitas	55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
227	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	52.528.600,00	DINAS SOSIAL	25 Orang
228	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0,00	DINAS SOSIAL	0
229	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	291.199.500,00	DINAS SOSIAL	144 Orang
230	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	71.454.000,00	DINAS SOSIAL	50 Orang
231	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	756.082.200,00	DINAS SOSIAL	80 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
232	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0	DINAS SOSIAL	0
233	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	219.111.200,00	DINAS SOSIAL	300 Orang
234	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0,00	DINAS SOSIAL	0 Orang
235	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	230.016.900,00	DINAS SOSIAL	500 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Pengemis di Luar Panti Sosial							
236	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0	DINAS SOSIAL	0
237	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0,00	DINAS SOSIAL	0 Orang
238	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	14.035.200,00	DINAS SOSIAL	20 Orang
239	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	0,00	DINAS SOSIAL	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	JENIS	RENCANA PENDANAAN TAHUN 2027 (Rp)	OPD PENGAMPU	KET
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
240	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	615.902.200,00	DINAS SOSIAL	1000 Orang
241	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	28.817.100,00	DINAS SOSIAL	50 Orang
242	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	106.714.040,00	DINAS SOSIAL	150 Orang
243	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	11.935.300,00	DINAS SOSIAL	20 Orang
244	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Layanan	23.626.700,00	DINAS SOSIAL	400 Orang

Sumber : SIPD Pemutakhiran 2027 (diolah), 2026

5.2. Rencana Kerja dalam Rangka Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi Lampung

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi arah pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dalam konteks tersebut, dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung menjadi bagian penting dalam memastikan terciptanya pembangunan wilayah yang terintegrasi, selaras, dan saling menguatkan antar tingkatan pemerintahan.

Rencana kerja dalam rangka dukungan terhadap Prioritas Provinsi Lampung diarahkan pada upaya memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi, khususnya pada bidang penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, pengembangan wilayah, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai kewenangan dan karakteristik daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memandang bahwa keberhasilan Prioritas Provinsi Lampung tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah kabupaten sebagai pelaksana pembangunan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa intervensi pembangunan daerah memiliki kontribusi nyata terhadap target pembangunan Provinsi Lampung.

Selain sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan provinsi, sinkronisasi prioritas pembangunan ini juga menjadi strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis daerah melalui pendekatan pembangunan yang lebih terarah, fokus, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara kepentingan pembangunan kabupaten dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 5.6
Sinkronisasi Program Unggulan Provinsi Lampung Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan	7.387.900,00	6 Dokumen
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	38.632.900,00	6 Dokumen
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan	16.065.900,00	10 DOkumen
		Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.026.900,00	2 Unit
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Dinas Ketahanan Pangan	15.001.200,00	4 Laporan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.683.700,00	1 DOkumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	48.163.280,00	4 Laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	12.110.000,00	4 Laporan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	143.745.607,00	4 Laporan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.000.000,00	4 Laporan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan	39.875.415,00	4 Laporan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	13.711.965,00	12 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	7.314.000,00	4 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	13.053.052,00	6 Kelompok
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	50.006.814,00	15 Kelompok
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	5.165.200,00	4 Dokumen
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	400.440.000,00	2 Unit
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	31.442.400,00	15 Ton
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	0	0
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.304.000,00	23 Unit Usaha

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
				Dan Tenaga Kerja		
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	25 Unit Usaha
		Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMDT	125.480.000,00	1 Dokumen
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	2 Unit
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.778.200,00	10 Ha
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	103.352.000,00	10 Ha
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan	Dinas Perkebunan	16.250.000,00	23 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	dan Peternakan		
			Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.100.000,00	1 Unit
			Koordinasi pengawalan penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.150.000,00	2 Laporsn
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.568.000,00	22 Unit
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	156.741.100,00	1 Dokumen
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	54.955.360.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	27.750.000.000,00	115 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	6.153.300.000,00	349 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	2.682.500.000,00	16 Satuan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	5.132.911.000,00	1 DOkumen
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	231.135.600,00	1 DOkumen
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	155.515.000,00	1 DOkumen
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	4.382.800,00	1 DOkumen
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	1 DOkumen
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta	Dinas Kesehatan	5.882.800,00	15 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Tindak Lanjut Pengawasan			
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	67.309.600,00	2 Laporan
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.000.000,00	4 UMKM
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA	18.169.000,00	1 Lembaga
			layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Dinas PP dan PA	56.386.000,00	2 Orang
2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	87.580.000,00	50 Ton
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.270.000,00	1 Laporan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.000.000,00	1 Laporan
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	119.751.250,00	2125 Batang
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan	263.255.900,00	4 Dokumen
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20.959.100,00	4 Dokumen
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	29.994.400,00	2 Ton
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.018.467.400,00	205 Ekor
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	2 Unit
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.778.200,00	10 Ha
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	103.352.000,00	10 Ha
		Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.026.900,00	2 Unit
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.001.200,00	4 Laporan
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.683.700,00	1 DOkumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	48.163.280,00	4 Laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	12.110.000,00	4 Laporan
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Perkebunan dan Peternakan	16.250.000,00	23 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.100.000,00	1 Unit
			Koordinasi pengawalan penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.150.000,00	2 Laporsn
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.568.000,00	22 Unit
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	156.741.100,00	1 Dokumen
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	20.607.530,00	70 Orang
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	4.879.000,00	6 Kelompok
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.169.600,00	1 Dokumen
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas SDA, BM dan BK	1.660.931.000,00	0,5 Km
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK	4.036.475.000,00	2,1 Km
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK	420.744.000,00	2 Km
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	143.745.607,00	4 Laporan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.000.000,00	4 Laporan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan	39.875.415,00	4 Laporan
3	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	12.360.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	11.820.600,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	34.728.300,00	1 Dokumen

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	31.916.900,00	2 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	21.416.800,00	2 Laporan
4	Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	109.000.700,00	106 Orang
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	153.408.100,00	90 Unit Usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	29.844.000,00	72 Unit Usaha
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	491.021.000,00	5 Pelaku Usaha
			Pameran Dagang Lokal		29.165.000,00	8 Pelaku Usaha
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		16.999.000,00	5 Pelaku Usaha
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		20.146.000,00	2 Produk
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.000.000,00	4 UMKM
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.169.600,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		23.533.000,00	1 Dokumen
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas PMDT	62.000.000,00	46 Orang
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas PMDT	52.000.000,00	1 Dokumen
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMDT	125.480.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dinas PMDT	46.000.000,00	50 Dokumen
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas PMDT	48.000.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas PMDT	90.850.000,00	1 Dokumen
		Program Penyediaan dan	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman	Dinas Tanaman	87.580.000,00	50 Ton

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Sarana Pertanian	Pangan Berbentuk Biji/Benih	Pangan dan Hortikultura		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.270.000,00	1 Laporan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.000.000,00	1 Laporan
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	119.751.250,00	2125 Batang
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan	263.255.900,00	4 Dokumen
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20.959.100,00	4 Dokumen
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	29.994.400,00	2 Ton
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.018.467.400,00	205 Ekor
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi,	Dinas Perkebunan	35.000.000,00	2 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	dan Peternakan		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	13.711.965,00	12 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	7.314.000,00	4 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	13.053.052,00	6 Kelompok
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	50.006.814,00	15 Kelompok
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	5.165.200,00	4 Dokumen
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	400.440.000,00	2 Unit
5	Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia Di Pasar Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.968.000,00	2 Laporan
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.082.200,00	2 Laporan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.980.000,00	2 Laporan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.235.970,00	12 Laporan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.391.100,00	2 Laporan
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	4 Dokumen
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.070.920,00	4 Laporan

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	72.939.000,00	6 Unit
			Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.661.700,00	1 Kegiatan
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.951.100,00	2 Dokumen
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setdakab	172.993.644,00	1 Laporan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	2 Unit
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	20.607.530,00	70 Orang
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	4.879.000,00	6 Kelompok
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	13.711.965,00	12 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Dinas Perikanan	7.314.000,00	4 Kelompok

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	13.053.052,00	6 Kelompok
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	50.006.814,00	15 Kelompok
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	5.165.200,00	4 Dokumen
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	400.440.000,00	2 Unit
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	3.330.500,00	5 Rekomendasi
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan	12.087.600,00	4 Dokumen
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan	6.435.600,00	2 Unit Usaha
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	31.442.400,00	15 Ton
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	67.056.300,00	11 Pelaku Usaha
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	410.000.000,00	1 Dokumen
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	4.600.000.000,00	1000 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Pehubungan	12.568.004.200,00	3785 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Pehubungan	63.356.000,00	2 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	90.752.000,00	30 Unit
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	20.000.000,00	1 Laporan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	16.190.000,00	10 Unit
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dinas Pehubungan	9.370.000,00	4 Unit
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	236.000.000,00	12 Laporan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Pehubungan	149.500.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	7.715.500,00	2 Laporan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	166.000.000,00	4 Unit
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Pehubungan	11.000.000,00	4 Unit
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	11.000.000,00	2 DOkumen
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	14.700.000,00	2 Laporan
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	224.346.000,00	1 DOkumen
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	0	36 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	554.818.500,00	4 Laporan
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	166.220.500,00	4 Laporan
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000,00	1 Laporan
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	70.000.000,00	4 Laporan
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Relasi Media	Dinas Kominfo	2.168.757.900,00	2 Laporan
			Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Kominfo	57.481.600,00	70%
			Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	33.790.000,00	300000 Oran
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	2.259.000,00	1 DOkumen
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Dinas Kominfo	18.961.000,00	7 Rekomendasi
			Penyusunan Konten	Dinas Kominfo	150.000.000,00	80 Konten
6	Pemerataan Akses dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN	3.175.404.500,00	26 Unit
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD)	DINAS PENDIDIKAN	1.353.798.500,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN	1.147.816.500,00	7 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN	3.710.514.500,00	8 Ruang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	DINAS PENDIDIKAN	1.309.785.000,00	6 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	690.000.000,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	DINAS PENDIDIKAN	420.000.000,00	2 Unit

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perkimciptaru	209.999.900,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkimciptaru	112.000.000,00	1 Laporan
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkimciptaru	5.223.195.700,00	35 Lokasi
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkimciptaru	5.810.016.300,00	28 Lokasi
	JUMLAH				**164.218.263.691,00**	

Sumber : Hasil Analisis, 2026

5.3. Rencana Kerja dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas/Unggulan Kabupaten Lampung Utara

Rencana kerja dalam rangka pemenuhan Program Prioritas/Unggulan Kabupaten Lampung Utara disusun sebagai penjabaran operasional arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Penyusunan program tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki fokus pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program prioritas yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara terdiri atas tiga kelompok utama. Pertama, program prioritas pendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang merupakan program-program strategis perangkat daerah untuk mendukung pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Kedua, 14 Program Unggulan Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan komitmen kepala daerah dalam mewujudkan visi pembangunan melalui berbagai intervensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai program percepatan yang difokuskan pada pencapaian hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Ketiga kelompok program tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027. Dengan demikian, seluruh sumber daya pembangunan dapat diarahkan secara sinergis untuk mempercepat pencapaian visi Kabupaten Lampung Utara yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 5.7
Sinkronisasi Program Prioritas Pendukung Tujuan dan Sasaran Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
T1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
S1.1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	150.820.000,00	1 Dokumen
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		160.375.000,00	60 Orang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
	sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	165.000.000,00	80 Orang
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		25.830.200,00	1650 Orang
			Job Fair/Bursa Kerja		52.164.000,00	12 Orang
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	2.499.800,00	12 Perusahaan
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		2.499.800,00	3 Perusahaan
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		40.231.100,00	1 Laporan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12.087.700,00	2 Perkara
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.843.300,00	2 Perkara
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		168.537.600,00	836 Orang
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	23.300.000,00	23 Orang
			Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM		-	0 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha		11.000.000,00	23 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM		11.304.000,00	23 Unit Usaha
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk		10.000.000,00	25 Unit Usaha
		Program Pengembangan UMKM	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Dinas Koperasi Usaha Kecil	-	0 Unit Usaha

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Menengah dan Tenaga Kerja	10.775.000,00	20 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik		22.280.000,00	20 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM		24.250.000,00	20 Unit Usaha
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM		77.687.400,00	40 Unit Usaha
			Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM		34.682.000,00	50 Unit Usaha
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.080.000,00	2 Unit
			Pengembangan Pendidikan		65.457.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual		177.598.000,00	30 Kegiatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	112.935.820,00	80 Orang
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		36.987.075,00	25 Orang
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		23.126.597,00	2 Laporan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.033.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		10.000.000,00	1 Dokumen
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123.956.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		22.200.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		62.370.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Peta Potensi dan Peluang		15.150.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Investasi Kabupaten/Kota			
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.780.000,00	2 Dokumen
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		119.405.500,00	1 Dokumen
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.798.800,00	1 Dokumen
			Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		12.761.000,00	1 laporan
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		15.960.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		6.225.800,00	1 Dokumen
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		1.597.800,00	1 Laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		5.425.800,00	1 Dokumen
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	491.021.000,00	5 Pelaku Usaha
			Pameran Dagang Lokal		29.165.000,00	8 Pelaku Usaha
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		16.999.000,00	5 Pelaku Usaha
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		20.146.000,00	2 Produk
S1.2.	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	94.218.000,00	171290 Orang
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	109.612.750,00	10 Orang
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	26.078.500,00	77089 Orang
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	38.247.000,00	693648 Usulan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
	Sosial yang Adaptif		Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		21.000.000,00	100 Orang
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	52.528.600,00	25 Orang
			Penyediaan Alat Bantu		291.199.500,00	144 Orang
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		71.454.000,00	50 Orang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		756.082.200,00	80 Orang
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		219.111.200,00	300 Orang
			Pemberian Layanan Kedaruratan		230.016.900,00	500 Orang
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		14.035.200,00	20 Orang
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		-	0 Orang
			Pemberian Layanan Rujukan		-	0 Orang
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		46.428.200,00	80 Orang
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		-	80 Orang
		Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial	615.902.200,00	1000 Orang
			Penyediaan Sandang		28.817.100,00	50 Orang
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		106.714.040,00	150 Orang
			Pelayanan Dukungan Psikososial		11.935.300,00	20 Orang
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		21.928.200,00	19 Orang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		23.626.700,00	400 Orang
			Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana		193.999.900,00	60 Keluarga
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	209.999.900,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		112.000.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		5.223.195.700,00	35 Lokasi
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		5.810.016.300,00	28 Lokasi
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	-
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	1.292.650.000,00	50 Unit Rumah
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		-	0 Orang
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		121.540.000,00	1 Dokumen
		Program Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	100.000.000,00	1 Laporan
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		100.000.000,00	1 Dokumen
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		488.150.000,00	15 Unit Rumah
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		130.000.000,00	1 Dokumen
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	43.371.300,00	40 Orang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi	11.500.000,00	1 Laporan
			Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kotabumi	7.000.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kotabumi	14.953.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi	6.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi	10.000.000,00	91 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga	Kecamatan Kotabumi	3.125.000,00	91 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi	4.700.000,00	91 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi	8.300.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara	5.145.960,00	4 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Utara	3.125.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Utara	2.000.000,00	1 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Kotabumi Utara	2.000.000,00	1 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi Utara	2.000.000,00	1 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi Utara	10.494.400,00	2 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.862.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.550.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.100.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.000.000,00	70 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Kotabumi Selatan	6.560.000,00	70 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.000.000,00	70 Keluarga
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.000.000,00	70 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Selatan	10.557.100,00	3 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Selatan	5.810.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Selatan	8.350.000,00	48 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Selatan	6.292.600,00	90 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Selatan	4.711.000,00	100 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Barat	14.895.400,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat	23.910.300,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Barat	5.620.000,00	2 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Barat	5.754.400,00	25 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Barat	5.120.000,00	25 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Barat	5.700.000,00	25 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Timur	5.240.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Timur	5.000.000,00	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli	5.960.500,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Semuli	780.400,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Semuli	6.571.000,00	49 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Semuli	2.095.400,00	21 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Semuli	5.099.900,00	21 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Semuli	7.971.100,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Abung Semuli	5.166.400,00	7 Keluarga
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Abung Semuli	2.948.300,00	7 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta	8.500.650,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Surakarta	9.761.300,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Surakarta	5.841.900,00	36 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Surakarta	5.563.650,00	36 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Surakarta	4.970.950,00	36 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Surakarta	14.383.950,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi	13.547.160,00	4 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tinggi	4.350.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tinggi	2.350.000,00	32 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	Kecamatan Abung Tinggi	2.950.000,00	32 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Tinggi	4.700.000,00	32 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Tinggi	9.852.500,00	4 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bukit Kemuning	5.790.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning	8.255.300,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bukit Kemuning	2.000.000,00	1 Laporan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Bukit Kemuning	2.000.000,00	24 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Bukit Kemuning	4.700.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	7.300.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Selatan	-	-
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Selatan	20.025.000,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	3.500.000,00	1 Dokumen
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Selatan	-	-
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Selatan	-	-
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Sungkai Selatan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Tanjung Raja	10.634.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tanjung Raja	12.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Tanjung Raja	10.587.400,00	76 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Tanjung Raja	8.000.000,00	76 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Tanjung Raja	9.000.000,00	76 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tanjung Raja	14.400.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Utara	10.604.600,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara	5.957.100,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Utara	11.162.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Utara	3.974.000,00	5 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Sungkai Utara	5.359.000,00	5 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Utara	5.919.500,00	5 Keluarga
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Sungkai Utara	7.307.000,00	5 Keluarga
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Sungkai Utara	5.625.800,00	5 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Muara Sungkai	17.420.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Sungkai	7.999.800,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Muara Sungkai	7.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Sungkai	7.360.000,00	55 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Muara Sungkai	5.000.000,00	110 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Muara Sungkai	3.000.000,00	110 Keluarga
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Muara Sungkai	5.000.000,00	110 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang	9.510.000,00	12 Laporan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bunga Mayang	6.975.000,00	4 Pokmas / Ormas
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bunga Mayang	5.100.000,00	6 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bunga Mayang	14.539.250,00	1 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Bunga Mayang	3.300.000,00	1 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Bunga Mayang	5.625.000,00	1 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai	27.600.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Hulu Sungkai	6.000.000,00	1 Laporan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Kecamatan Hulu Sungkai	2.700.000,00	10/Desa Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Ekonomi Lainnya			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah	2.500.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Tengah	2.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Tengah	10.055.000,00	16 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Sungkai Tengah	3.401.500,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Tengah	2.100.000,00	16 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Tengah	16.929.500,00	2 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Tengah	-	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Pekurun	7.300.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Pekurun	2.000.000,00	3 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Pekurun	7.700.000,00	10 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun	6.250.000,00	3 Laporan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Pekurun	2.000.000,00	15 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Pekurun	3.000.000,00	15 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sungkai Jaya	17.500.000,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Jaya	14.900.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Jaya	16.300.000,00	10 Keluarga
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sungkai Jaya	-	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Jaya	7.500.000,00	0 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat	3.663.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Barat	4.160.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Barat	10.473.600,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Sungkai Barat	4.604.000,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungkai Barat	4.438.100,00	30 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang	5.503.300,00	4 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Kunang	5.356.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Kunang	6.499.200,00	4 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Kunang	7.848.630,00	1 Laporan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Kunang	2.350.000,00	24 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Kunang	3.035.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Blambangan Pagar	7.300.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Blambangan Pagar	12.469.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Blambangan Pagar	2.940.000,00	30 Keluarga
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah	13.596.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tengah	20.000.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tengah	6.800.000,00	11 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Abung Tengah	6.800.000,00	11 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Abung Tengah	6.800.000,00	11 Keluarga
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Abung Tengah	10.000.000,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Abung Tengah	14.520.000,00	1 Lembaga Kemasyarakatan
S1.3.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	714.111.800,00	11 Unit
					-	-
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		432.150.800,00	4 Dokumen
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		-	2 Liter/Detik
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		2.009.800.600,00	2 Liter/Detik
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.161.408.200,00	160 SR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.660.931.000,00	0;5 KM
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		-	0 Dokumen
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		4.036.475.000,00	2;1 KM

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		420.744.000,00	2 KM
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000,00	10 Lembaga
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa		1.831.850.000,00	10 Dokumen
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 M
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		-	0 Sistem Drainase Lingkungan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		-	0 Dokumen
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		-	1 Sistem Drainase Perkotaan
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Sistem Drainase Perkotaan
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Sistem Drainase Perkotaan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Dokumen
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.000.000.000,00	18 Dokumen
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2.809.180.200,00	21 Dokumen
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan		1.099.999.900,00	1025;27 KM
			Pemeliharaan Rutin Jalan		1.500.000.000,00	2;5 KM
			Pembangunan Jalan		-	0 KM
			Pemeliharaan Berkala Jalan		38.474.353.200,00	20 KM
			Penggantian Jembatan		5.500.000.000,00	10 Meter
			Rehabilitasi Jembatan		1.100.000.000,00	10 Meter
			Rekonstruksi Jalan		33.950.000.000,00	8.25 KM
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		2.000.000.000,00	48;5 KM
			Pembangunan Jembatan		2.558.419.000,00	10 Meter
		Program Pengembangan Permukiman	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 UNIT
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		-	0 Rumah Tangga
		Program Peningkatan Prasarana,	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat,	209.999.900,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	112.000.000,00	1 Laporan
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		-	0 Lokasi
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		5.223.195.700,00	35 Lokasi
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		5.810.016.300,00	28 Lokasi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	410.000.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		13.684.000,00	1 Dokumen
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		4.600.000.000,00	1000 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		12.568.004.200,00	3785 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		63.356.000,00	2 Unit
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1.000.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		16.765.000,00	1 Laporan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		90.752.000,00	30 Unit
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		77.500.000,00	3100 Dokumen
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		20.000.000,00	1 Laporan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		16.190.000,00	10 Unit

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		17.224.000,00	4 Laporan
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		9.370.000,00	4 Unit
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		5.000.000,00	1 Dokumen
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		236.000.000,00	12 Laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		14.000.000,00	1 Laporan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		149.500.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		7.715.500,00	2 Laporan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		166.000.000,00	4 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		11.000.000,00	4 Unit
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11.000.000,00	2 Dokumen
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan		14.700.000,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	1.199.085.000,00	27 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		2.700.000.000,00	2 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		60.000.000,00	1 Unit
			Pembangunan Puskesmas		4.000.000.000,00	0
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	3.175.404.500,00	26 Unit
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		454.177.500,00	6 Unit
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		220.421.710,00	300 Peserta Didik
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		202.540.000,00	422 Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100.000.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		54.955.360.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		101.721.600,00	424 Orang
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		86.161.000,00	422 Konten Digital
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		100.000.000,00	423 Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		102.767.600,00	4 Dokumen
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		100.000.000,00	4 Dokumen
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100.000.000,00	423 Kegiatan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.966.700.000,00	8700 Paket
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.353.798.500,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.147.816.500,00	7 Unit
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau		120.000.000,00	422 Orang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.710.514.500,00	8 Ruang
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		74.680.000,00	92 Peserta Didik
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.175.404.500,00	26 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.710.514.500,00	8 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.147.816.500,00	7 Unit
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		250.000.000,00	250 Peserta Didik
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		220.421.710,00	300 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100.000.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		27.750.000.000,00	115 Satuan Pendidikan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		101.721.600,00	424 Orang
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		287.306.236,00	112 Satuan Pendidikan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		120.000.000,00	422 Orang
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.966.700.000,00	8700 Paket
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		250.000.000,00	4 Paket
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		263.997.804;91	500 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		292.120.400,00	387 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		6.153.300.000,00	349 Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		220.801.800,00	1038 Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		102.767.600,00	4 Dokumen
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		150.441.600,00	3 Komunitas

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		120.000.000,00	422 Orang
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		739.295.000,00	15 Paket
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2.682.500.000,00	16 Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		38.215.500,00	70 Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		102.767.600,00	4 Dokumen
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		287.306.236,00	112 Satuan Pendidikan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		101.721.600,00	424 Orang
S1.4.	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	43.371.300,00	40 Orang
			Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM		-	0 Orang
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	7.500.000,00	2 Unit Usaha
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.250.000,00	2 Unit Usaha
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	153.408.100,00	90 Unit Usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		29.844.000,00	72 Unit Usaha
		Program Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Koperasi Usaha Kecil	8.501.000,00	15 Unit Usaha

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		KSP/USP Koperasi	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Menengah dan Tenaga Kerja		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	109.000.700,00	106 Orang
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	9.950.500,00	38 Unit Usaha
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		154.000.000,00	85 Unit Usaha
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67.883.000,00	1 Lokasi
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		253.300.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha		30.000.000,00	25 Pelaku Usaha
		Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	949.850.000,00	5 Kegiatan
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		50.000.000,00	1 Promosi
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.080.000,00	2 Unit
			Pengembangan Pendidikan		65.457.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual		177.598.000,00	30 Kegiatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	112.935.820,00	80 Orang
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		36.987.075,00	25 Orang
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		23.126.597,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.169.600,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		23.533.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		16.033.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		10.000.000,00	1 Dokumen
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi	6.500.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Utara	3.125.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.100.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Selatan	5.810.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Barat	5.620.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Timur	5.000.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Semuli	780.400,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Surakarta	9.761.300,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tinggi	4.350.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bukit Kemuning	2.000.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Selatan	-	-
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tanjung Raja	12.500.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Utara	11.162.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Muara Sungkai	7.500.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bunga Mayang	5.100.000,00	6 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Hulu Sungkai	6.000.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Tengah	2.500.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Pekurun	2.000.000,00	3 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Jaya	14.900.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sungkai Barat	4.160.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Kunang	7.848.630,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Blambangan Pagar	12.469.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Abung Tengah	20.000.000,00	1 Laporan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	62.000.000,00	46 Orang
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		52.000.000,00	1 Dokumen
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		125.480.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		46.000.000,00	50 Dokumen
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		48.000.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		90.850.000,00	1 Dokumen
S1.5.	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	123.956.000,00	1 Dokumen
					-	-
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		22.200.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		62.370.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota		15.150.000,00	1 Dokumen
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.780.000,00	2 Dokumen
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		119.405.500,00	1 Dokumen
T2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Berdaya saing					
					3.175.404.500,00	26 Unit

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
S2.1.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan		
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		454.177.500,00	6 Unit
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		220.421.710,00	300 Peserta Didik
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		202.540.000,00	422 Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100.000.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		54.955.360.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		101.721.600,00	424 Orang
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		86.161.000,00	422 Konten Digital
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		100.000.000,00	423 Orang
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.966.700.000,00	8700 Paket
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.353.798.500,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.147.816.500,00	7 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.710.514.500,00	8 Ruang
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		74.680.000,00	92 Peserta Didik
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.309.785.000,00	6 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		690.000.000,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		420.000.000,00	2 Unit
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		250.000.000,00	250 Peserta Didik
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		297.000.000,00	250 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		385.625.000,00	115 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		27.750.000.000,00	115 Satuan Pendidikan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		267.000.000,00	115 Orang
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		287.306.236,00	112 Satuan Pendidikan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		409.993.500,00	345 Orang
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.500.000.000,00	6515 Paket
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		250.000.000,00	4 Paket
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		263.997.804;91	500 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		292.120.400,00	387 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		6.153.300.000,00	349 Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		220.801.800,00	1038 Orang
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		150.441.600,00	3 Komunitas
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		232.873.000,00	150 Orang
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		739.295.000,00	15 Paket
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2.682.500.000,00	16 Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		38.215.500,00	70 Orang
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		56.737.300,00	125 Peserta Didik
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		130.575.000,00	250 Orang
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.733.500,00	25 Perpustakaan
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		58.993.000,00	64 Perpustakaan
			Pembinaan Perpustakaan Umum		21.272.000,00	20 Perpustakaan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		26.250.000,00	1200 Eksemplar
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		124.172.000,00	100 Orang
S2.2.	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	90.529.760,00	27 Unit
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		3.304.581.850,00	1 Paket
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		100.391.600,00	28 Paket
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		10.000.000,00	10876 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		39.120.000,00	10833 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.088.690.000,00	10458 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		30.000.000,00	2869 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		10.000.000,00	126630 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16.260.000,00	420913 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		10.000.000,00	4976 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		16.260.000,00	8979 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		16.260.000,00	415 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		16.260.000,00	1135 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		1.598.389.750,00	7416 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		22.284.000,00	12056 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		10.000.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		10.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		212.135.600,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		7.200.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		266.360.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		32.581.515.065,00	1 Dokumen
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		50.200.000,00	1 Dokumen
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10.000.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		16.750.000,00	27 Unit
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		23.319.000,00	662 Orang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		17.318.000,00	147 Orang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		9.000.000,00	908 Orang
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		117.160.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Layanan Imunisasi		10.350.000,00	1 Dokumen
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		15.000.000,00	12 Unit
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		24.950.000,00	106 Unit
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		23.510.000,00	1 Dokumen
			Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		79.745.800,00	35 Paket
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja		10.000.000,00	1 Laporan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular		20.000.000,00	1 Laporan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular		16.260.000,00	1 Laporan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Kecamatan Kotabumi	24.165.500,00	91 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kotabumi Utara	3.200.000,00	1 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kotabumi Selatan	11.060.000,00	65 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Selatan	6.335.900,00	100 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Barat	5.750.000,00	25 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Semuli	17.791.155,00	56 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Surakarta	14.871.300,00	36 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Tinggi	2.750.000,00	32 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bukit Kemuning	2.000.000,00	24 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Selatan	5.500.000,00	11 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Tanjung Raja	25.593.200,00	32 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Utara	7.872.000,00	5 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Muara Sungkai	5.313.500,00	55 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Bunga Mayang	5.289.390,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Tengah	2.500.000,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Pekurun	6.463.580,00	15 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Sungkai Jaya	7.500.000,00	10 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Kecamatan Sungkai Barat	4.359.600,00	20 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Kunang	5.020.000,00	24 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Blambangan Pagar	3.100.000,00	30 Keluarga
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Abung Tengah	6.800.000,00	11 Keluarga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	38.828.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	41.239.600,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 1	10.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi 2	72.010.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kotabumi 2	48.624.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Wonogiri	12.335.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonogiri	10.248.300,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	Puskesmas Madukoro	46.541.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Madukoro	16.274.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kalibalangan	1.900.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalibalangan	22.800.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Blambangan Pagar	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Blambangan Pagar	14.958.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Bumi Agung	10.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ketapang	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketapang	8.676.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tulang Bawang Baru	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tulang Bawang Baru	30.984.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Negara Ratu	9.050.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Negara Ratu	44.715.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Gedung Negara	10.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ogan Lima	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ogan Lima	61.900.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tanjung Raja	-	0
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjung Raja	32.347.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Bukit Kemuning	3.420.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bukit Kemuning	17.336.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Pekurun	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pekurun	15.810.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Cempaka	5.130.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Puskesmas Cempaka	60.370.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Tata Karya	3.475.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tata Karya	16.263.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Ulak Rengas	9.880.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ulak Rengas	34.451.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Karang Sari	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Karang Sari	1.401.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Batu Nangkop	13.200.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Batu Nangkop	18.150.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kotabumi Udik	21.940.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kotabumi Udik	18.035.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Subik	10.000.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Abung Kunang	19.380.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Abung Kunang	15.314.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kubu Hitu	15.010.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kubu Hitu	19.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Semuli Raya	10.000.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Semuli Raya	70.700.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Mulyorejo	6.080.000,00	1 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo	8.620.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Puskesmas Kemalo Abung	-	0 Dokumen
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kemalo Abung	150.000,00	1 Dokumen
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	14.691.200,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		4.382.800,00	1 Dokumen
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		10.000.000,00	1 Dokumen
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		5.882.800,00	15 produk
		Program Pengendalian Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	1 Laporan
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		25.001.300,00	1 Dokumen
			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		50.700.000,00	1 Unit
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas		125.000.750,00	5 Kelompok
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas		40.000.000,00	5 Kampung KB
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai		20.000.130,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.174.750.000,00	12 laporan Laporan
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		48.380.000,00	1 Laporan
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		35.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		29.998.095,00	1300 Orang
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		20.000.000,00	1 Laporan
			Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan		20.096.400,00	1 Laporan / Dokumen
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.352.120,00	1 Laporan
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		40.000.600,00	250 Orang
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga		15.010.100,00	1 Laporan
		Program Perumahan Dan Kawasan	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh	Dinas Perumahan Rakyat,	-	0 Orang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Permukiman Kumuh	dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang		
		Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	488.150.000,00	15 Unit Rumah
S2.3.	Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	150.820.000,00	1 Dokumen
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		160.375.000,00	60 Orang
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	165.000.000,00	80 Orang
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		25.830.200,00	1650 Orang
			Job Fair/Bursa Kerja		52.164.000,00	12 Orang
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	2.499.800,00	12 Perusahaan
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		2.499.800,00	3 Perusahaan
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		40.231.100,00	1 Laporan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12.087.700,00	2 Perkara
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.843.300,00	2 Perkara
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		168.537.600,00	836 Orang
S2.4.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan	Program Perlindungan Perempuan	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	25.784.500,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
	Gender, dan Masyarakat Inklusif		terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	dan Perlindungan Anak		
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		10.218.000,00	24 Orang
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		-	3 Orang
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		-	10 Orang
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		49.400.000,00	25 Orang
			Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		-	3 Orang
			Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		-	1 Dokumen
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		-	1 Orang
			Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota		-	1 Laporan
			Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		13.525.000,00	12 Lembaga
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1 Kebijakan
			Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		18.169.000,00	1 Lembaga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
			layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		56.386.000,00	2 Orang
		Program Perlindungan Khusus Anak	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1 Dokumen
			Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota		-	1 Kebijakan
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota		116.949.000,00	1 Kegiatan
			Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota		15.409.800,00	1 Laporan
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		165.007.000,00	60 Orang
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		-	25 Orang
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		-	12 Orang
			Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		-	12 Orang
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		-	25 Orang
			Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		-	12 Orang
			Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota		44.950.000,00	1 Lembaga
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia		-	1 Orang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota			
			Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota		-	1 Dokumen
			Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota		-	1 Laporan
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.420.800,00	1 Laporan
			Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		34.797.900,00	32 Lembaga
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota		-	23 Orang
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota		-	32 Lembaga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	154.999.550,00	50 Orang
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota		-	80 Orang
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota		50.282.700,00	80 Orang
			Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		24.349.900,00	1 Organisasi
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		59.999.100,00	1 Organisasi

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	2 Dokumen
			Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		199.999.980,00	1 Unit
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		1.096.809.500,00	400 Orang
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		50.000.000,00	31 Orang
			Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah		50.000.000,00	50 Orang
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		100.000.000,00	1 Kerja Sama
			Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat		50.000.000,00	100 Orang
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	291.199.500,00	144 Orang
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		14.035.200,00	20 Orang
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		46.428.200,00	80 Orang
S2.5.	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50.000.000,00	2 Objek
			Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda		56.000.000,00	5 Objek
			Pelindungan Cagar Budaya		40.000.000,00	4 Objek
			Pemanfaatan Cagar Budaya		65.000.000,00	4 Objek
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.080.000,00	2 Unit
			Pengembangan Pendidikan		65.457.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual		177.598.000,00	30 Kegiatan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	225.250.000,00	5 Objek
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		56.000.000,00	60 Orang
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.647.000,00	100 Orang
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		57.793.000,00	100 Orang
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		10.000.000,00	1 Laporan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	166.220.500,00	4 Laporan
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		50.000.000,00	1 Laporan
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		224.346.000,00	1 Dokumen
T3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan					

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
	Menjamin Rasa Aman yang Inklusif					
S3.1.	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	70.000.000,00	4 Laporan
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		554.818.500,00	4 laporan
		Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.500.000,00	4 Layanan
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		11.250.000,00	4 Laporan
		Program Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	770.000.000,00	4 Dokumen
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		5.000.000,00	2 Dokumen
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		10.342.000,00	1 Laporan
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		69.968.300,00	2 Dokumen
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		6.930.000,00	1 Laporan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.359.000,00	2500 Pelaku Usaha
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		8.219.000,00	100 Pelaku Usaha
		Program Pemenuhan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	10.000.000,00	10876 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	39.120.000,00	10833 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	1.088.690.000,00	10458 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	30.000.000,00	2869 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	10.000.000,00	126630 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	16.260.000,00	420913 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	10.000.000,00	4976 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	16.260.000,00	8979 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	16.260.000,00	415 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	1.598.389.750,00	7416 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN	22.284.000,00	12056 0rang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	23.319.000,00	662 0rang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DINAS KESEHATAN	17.318.000,00	147 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KOTABUMI 1	79.080.000,00	752 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	749 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	723 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KOTABUMI 1	7.000.000,00	2889 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KOTABUMI 1	18.525.000,00	6741 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	26976 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	4796 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	8979 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	415 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	662 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KOTABUMI 1	10.000.000,00	837 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KOTABUMI 2	33.200.000,00	868 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KOTABUMI 2	8.000.000,00	866 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KOTABUMI 2	22.800.000,00	965 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KOTABUMI 2	15.960.000,00	3312 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KOTABUMI 2	34.580.000,00	7780 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KOTABUMI 2	11.400.000,00	31135 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KOTABUMI 2	17.100.000,00	5743 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KOTABUMI 2	15.200.000,00	8979 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KOTABUMI 2	2.850.000,00	479 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KOTABUMI 2	18.190.000,00	764 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KOTABUMI 2	17.100.000,00	966 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS WONOGIRI	41.535.000,00	379 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS WONOGIRI	1.805.000,00	378 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS WONOGIRI	10.000.000,00	363 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS WONOGIRI	24.700.000,00	1763 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS WONOGIRI	53.840.000,00	3653 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS WONOGIRI	10.830.000,00	13865 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS WONOGIRI	11.970.000,00	2153 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS WONOGIRI	15.900.000,00	4782 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS WONOGIRI	5.000.000,00	222 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS WONOGIRI	18.810.000,00	368 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS WONOGIRI	2.091.000,00	929 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MADUKORO	59.020.000,00	615 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MADUKORO	27.360.000,00	613 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS MADUKORO	23.180.000,00	588 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS MADUKORO	23.940.000,00	2357 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MADUKORO	42.275.000,00	5425 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS MADUKORO	17.670.000,00	19495 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS MADUKORO	17.480.000,00	3861 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS MADUKORO	6.080.000,00	5957 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS MADUKORO	6.080.000,00	332 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS MADUKORO	41.800.000,00	526 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS MADUKORO	1.900.000,00	1175 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KALIBALANGAN	65.610.000,00	560 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KALIBALANGAN	1.900.000,00	560 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KALIBALANGAN	3.800.000,00	560 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KALIBALANGAN	14.820.000,00	2483 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KALIBALANGAN	34.200.000,00	5162 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KALIBALANGAN	3.800.000,00	16300 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KALIBALANGAN	22.800.000,00	3407 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KALIBALANGAN	3.800.000,00	5862 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KALIBALANGAN	1.900.000,00	356 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KALIBALANGAN	39.710.000,00	526 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KALIBALANGAN	3.800.000,00	361 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	49.140.000,00	350 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	332 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	306 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	1233 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	19.000.000,00	3017 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	11780 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	31.640.000,00	1825 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	4054 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	189 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	13.870.000,00	312 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR	10.000.000,00	630 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BUMI AGUNG	79.200.000,00	683 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	683 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	683 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	2406 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BUMI AGUNG	17.100.000,00	5886 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	22892 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS BUMI AGUNG	7.000.000,00	4258 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	7909 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	297 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS BUMI AGUNG	17.480.000,00	608 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS BUMI AGUNG	10.000.000,00	630 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KETAPANG	66.520.000,00	124150 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	745 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	745 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KETAPANG	7.000.000,00	2867 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KETAPANG	11.115.000,00	224 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	420920 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	66 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	7315 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	6586 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KETAPANG	20.900.000,00	184 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KETAPANG	10.000.000,00	65894 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	1840 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	454 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	1.000.000,00	439 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	7.000.000,00	2148 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	27.930.000,00	313 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	16355 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	3017 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	2066 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	2176 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	12.065.000,00	310 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU	10.000.000,00	456 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS NEGARA RATU	74.800.000,00	656 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS NEGARA RATU	10.000.000,00	651 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS NEGARA RATU	3.040.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS NEGARA RATU	855.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS NEGARA RATU	19.760.000,00	5654 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS NEGARA RATU	825.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS NEGARA RATU	1.425.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS NEGARA RATU	10.000.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS NEGARA RATU	855.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS NEGARA RATU	26.030.000,00	590 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS NEGARA RATU	10.000.000,00	2320 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	56.700.000,00	275 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	273 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	263 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	1060 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.640.000,00	2459 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	9740 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	7.000.000,00	1735 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	1125 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	1125 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	9.500.000,00	236 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA	10.000.000,00	1280 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS OGAN LIMA	58.722.000,00	376 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	356 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	342 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS OGAN LIMA	7.000.000,00	1324 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS OGAN LIMA	6.840.000,00	3240 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	12652 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	1960 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS OGAN LIMA	9.050.000,00	4354 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	4354 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS OGAN LIMA	6.840.000,00	335 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS OGAN LIMA	10.000.000,00	677 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	120.080.000,00	555 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	17.245.000,00	553 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	5.415.000,00	534 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	9.595.000,00	2056 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	12.160.000,00	5323 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	9.975.000,00	21489 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	10.830.000,00	4048 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	14.440.000,00	7190 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	1.805.000,00	332 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	8.455.000,00	428 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS TANJUNG RAJA	3.610.000,00	555 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	49.160.000,00	719 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	9.120.000,00	716 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	7.410.000,00	692 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	10.000.000,00	2663 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	46.740.000,00	6896 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	9.120.000,00	27873 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	7.000.000,00	5308 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	9.975.000,00	9314 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	9.975.000,00	431 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	24.890.000,00	559 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING	9.120.000,00	878 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PEKURUN	28.620.000,00	226 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	207 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	199 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	963 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PEKURUN	19.095.000,00	1988 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	8028 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS PEKURUN	7.000.000,00	1531 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	2686 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	124 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS PEKURUN	10.450.000,00	197 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS PEKURUN	10.000.000,00	309 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS CEMPAKA	36.735.000,00	200 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS CEMPAKA	5.130.000,00	1 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS CEMPAKA	5.130.000,00	120 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS CEMPAKA	10.260.000,00	2103 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS CEMPAKA	25.080.000,00	1635 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS CEMPAKA	5.130.000,00	110 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS CEMPAKA	10.260.000,00	1193 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS CEMPAKA	7.965.000,00	2103 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS CEMPAKA	7.965.000,00	356 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS CEMPAKA	25.810.000,00	537 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS CEMPAKA	9.310.000,00	261 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TATA KARYA	44.820.000,00	548 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TATA KARYA	855.000,00	519 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS TATA KARYA	950.000,00	518 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS TATA KARYA	855.000,00	1929 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TATA KARYA	14.250.000,00	4722 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS TATA KARYA	890.000,00	18441 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS TATA KARYA	980.000,00	2857 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS TATA KARYA	950.000,00	6092 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS TATA KARYA	950.000,00	279 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS TATA KARYA	15.390.000,00	488 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS TATA KARYA	570.000,00	987 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS ULAK RENGAS	22.194.000,00	162 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	319 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	323 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	1235 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS ULAK RENGAS	22.230.000,00	2796 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	11347 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS ULAK RENGAS	6.840.000,00	2022 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	3757 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	167 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS ULAK RENGAS	950.000,00	289 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS ULAK RENGAS	3.040.000,00	398 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KARANG SARI	23.380.000,00	32 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	32 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	90 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KARANG SARI	7.000.000,00	900 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KARANG SARI	10.830.000,00	2479 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	50 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	70 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	40 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	40 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KARANG SARI	3.990.000,00	50 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KARANG SARI	10.000.000,00	2 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BATU NANGKOP	47.280.000,00	288 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BATU NANGKOP	6.080.000,00	287 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS BATU NANGKOP	9.120.000,00	277 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS BATU NANGKOP	27.235.000,00	1067 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BATU NANGKOP	13.890.000,00	2762 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS BATU NANGKOP	2.090.000,00	11149 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS BATU NANGKOP	29.830.000,00	2126 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS BATU NANGKOP	9.120.000,00	3730 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS BATU NANGKOP	9.120.000,00	173 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS BATU NANGKOP	18.620.000,00	228 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS BATU NANGKOP	2.755.000,00	346 0rang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	PUSKESMAS BATU NANGKOP	-	0 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	20.400.000,00	285 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	260 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	247 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	7.000.000,00	247 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	25.650.000,00	2507 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	9733 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	7.000.000,00	1851 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	3382 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	156 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	19.000.000,00	207 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK	10.000.000,00	322 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SUBIK	43.543.000,00	50 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	567 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	11 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	60 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SUBIK	6.840.000,00	11 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS SUBIK	9.050.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS SUBIK	7.000.000,00	15 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	12 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	12 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS SUBIK	10.070.000,00	17 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS SUBIK	10.000.000,00	15 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	48.690.000,00	156 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	950.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	950.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	950.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	4.150.000,00	422 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	21.280.000,00	224 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	950.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	7.980.000,00	84 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	7.980.000,00	84 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	8.375.000,00	80 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS ABUNG KUNANG	950.000,00	10 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KUBU HITU	30.690.000,00	237 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KUBU HITU	12.250.000,00	220 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KUBU HITU	5.700.000,00	213 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KUBU HITU	30.690.000,00	818 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KUBU HITU	13.300.000,00	2119 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KUBU HITU	21.360.000,00	8554 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KUBU HITU	22.800.000,00	1632 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KUBU HITU	9.500.000,00	2862 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KUBU HITU	5.700.000,00	132 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KUBU HITU	14.600.000,00	211 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KUBU HITU	1.900.000,00	329 0rang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	PUSKESMAS KUBU HITU	7.600.000,00	211 0rang
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	PUSKESMAS KUBU HITU	1.900.000,00	329 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SEMULI RAYA	28.651.000,00	517 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	514 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	498 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS SEMULI RAYA	7.000.000,00	1969 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SEMULI RAYA	31.730.000,00	4628 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	18522 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	3417 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	6166 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS SEMULI RAYA	9.050.000,00	286 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS SEMULI RAYA	5.700.000,00	455 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS SEMULI RAYA	10.000.000,00	521 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MULYOREJO	26.550.000,00	181 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MULYOREJO	10.000.000,00	180 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS MULYOREJO	10.000.000,00	174 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS MULYOREJO	6.080.000,00	688 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MULYOREJO	5.700.000,00	1618 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS MULYOREJO	10.000.000,00	6473 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS MULYOREJO	7.000.000,00	1194 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS MULYOREJO	6.080.000,00	2155 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS MULYOREJO	10.000.000,00	100 0rang

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS MULYOREJO	3.895.000,00	159 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS MULYOREJO	10.000.000,00	1 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	35.745.000,00	343 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	7.000.000,00	341 Orang 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	7.000.000,00	330 Orang 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	7.000.000,00	1115 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	7.980.000,00	5262 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	3.000.000,00	12289 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	17.100.000,00	2267 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	1.140.000,00	4090 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	1.140.000,00	189 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	18.620.000,00	301 0rang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PUSKESMAS KEMALO ABUNG	17.100.000,00	381 0rang
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	54.955.360.000,00	422 Satuan Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)			
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SMP)			
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SMP)			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
			Pengelolaan Dana BOP PAUD			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	77.865.030,00	3 Laporan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi	8.585.000,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi	39.374.000,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi	10.399.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi	9.230.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara	5.000.050,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara	4.000.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi Utara	4.000.025,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi Utara	4.750.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan	14.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan	14.500.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kotabumi Selatan	13.750.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kotabumi Selatan	13.555.800,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Selatan	1.610.300,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Selatan	1.798.300,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Selatan	3.088.600,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat	6.567.800,00	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat	12.693.700,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Barat	5.330.000,00	2 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Barat	5.330.000,00	2 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli	5.341.800,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli	1.504.600,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Semuli	816.400,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Semuli	763.400,00	1 Laporan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli	2.821.900,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta	7.001.300,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta	17.468.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Surakarta	6.109.050,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Surakarta	6.003.450,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi	4.864.700,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi	20.119.200,00	4 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Tinggi	5.192.300,00	4 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Tinggi	6.154.500,00	4 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning	4.360.000,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning	6.410.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bukit Kemuning	5.100.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bukit Kemuning	5.170.000,00	1 Laporan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	2.475.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	7.500.000,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	5.000.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja	9.000.000,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja	31.568.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Tanjung Raja	6.398.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Tanjung Raja	6.000.000,00	1 Laporan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara	7.036.200,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara	3.398.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara	4.885.500,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Utara	5.750.700,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Utara	3.348.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang	8.040.000,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan Bunga Mayang	39.122.300,00	4 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bunga Mayang	6.434.000,00	12 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bunga Mayang	7.389.000,00	12 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Hulu Sungkai	3.150.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Hulu Sungkai	2.700.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai	10.800.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai	7.200.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah	10.485.300,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah	13.381.950,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Tengah	4.062.200,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Tengah	6.225.900,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun	3.200.000,00	3 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun	19.049.900,00	4 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Pekurun	2.529.500,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Pekurun	4.856.100,00	2 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat	4.894.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan Sungkai Barat	7.963.950,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Sungkai Barat	5.036.500,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Sungkai Barat	4.850.000,00	1 Laporan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang	3.789.500,00	2 Dokumen
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang	7.372.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang	8.457.800,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Kunang	5.400.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Kunang	6.279.800,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Blambangan Pagar	3.812.500,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Blambangan Pagar	5.393.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Blambangan Pagar	5.000.000,00	1 Laporan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah	9.205.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah	13.500.000,00	1 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Abung Tengah	13.500.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Abung Tengah	13.500.000,00	1 Laporan
S3.2.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65.171.700,00	1 Naskah
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Badan Perencanaan	15.000.200,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pembangunan Daerah		
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	157.326.900,00	1 Laporan
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.501.200,00	1 Laporan
		Program Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.342.000,00	1 Laporan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.806.000,00	4 Kegiatan Usaha
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	1
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		10.000.000,00	6
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		21.600.000,00	7
		Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Dinas Pendidikan		
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		100.000.000,00	4 Dokumen
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100.000.000,00	423 Kegiatan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		120.000.000,00	422 Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PAUD)			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Kesetaraan)			
		Program Penunjang Urusan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	Sekretariat Daerah	61.474.620,00	2 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Publik dan Tata Laksana			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi	39.374.000,00	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Utara	4.000.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kotabumi Selatan	14.500.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Selatan	1.610.300,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Barat	12.693.700,00	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Semuli	1.504.600,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Surakarta	17.468.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tinggi	20.119.200,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bukit Kemuning	6.410.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Selatan	5.000.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Raja	31.568.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Utara	4.885.500,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunga Mayang	39.122.300,00	4 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Hulu Sungkai	7.200.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Tengah	13.381.950,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Pekurun	19.049.900,00	4 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sungkai Barat	7.963.950,00	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Kunang	7.372.000,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Blambangan Pagar	3.812.500,00	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Abung Tengah	13.500.000,00	1 Laporan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	554.818.500,00	4 laporan
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		224.346.000,00	1 Dokumen
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.000.000,00	50 Keluarga
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		10.004.500,00	247 Orang
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		12.000.042,00	5 Desa/Kelurahan
		Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	121.336.500,00	300 Orang
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		120.783.900,00	1 Dokumen
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		500.040.000,00	100 Unit
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		68.556.100,00	80 Orang
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		91.658.000,00	200 Orang
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap		612.000.000,00	12 laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Bencana Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		114.315.500,00	1 Dokumen
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		100.428.000,00	4 Dokumen
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		66.200.000,00	4 Laporan
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		117.547.500,00	80 Orang
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		35.300.000,00	12 Laporan
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		188.750.000,00	500 Orang
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota		153.480.000,00	300 Orang
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		158.321.000,00	1000 Orang
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		59.871.297,00	160 Orang
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		47.150.000,00	12 Laporan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.647.000,00	100 Orang
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		57.793.000,00	100 Orang
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan		10.000.000,00	1 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
T4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan					
S4.1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bag. Organisasi)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	210.000.000,00	6 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	35.441.550,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	169.518.800,00	4 Dokumen
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	61.474.620,00	2 Dokumen
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	77.865.030,00	3 Laporan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	237.827.000,00	25 Laporan
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		808.400.000,00	100 Laporan
			Reviu Laporan Kinerja		621.360.000,00	100 Laporan
			Reviu Laporan Keuangan		256.465.000,00	4 Laporan
			Pengawasan Desa		865.514.000,00	100 Laporan
			Kerja Sama Pengawasan Internal		267.512.000,00	3 Kesepakatan
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		642.250.000,00	2 Dokumen
			Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daera h		402.075.000,00	10 Laporan
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		520.215.000,00	20 Laporan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	0 Laporan
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		157.731.500,00	1 Dokumen
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban		-	0 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		238.098.750,00	1 Laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		85.792.000,00	2 Dokumen
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	0 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		8.750.800,00	1 Dokumen
			Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	0 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		-	0 Dokumen
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	0 Dokumen
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		-	0 Orang
			Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		-	0 Dokumen
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah		-	0 Laporan
			Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		-	0 Laporan
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		9.000.000.000,00	1 Laporan
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan		-	0 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pemberian Pinjaman Daerah			
			Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	1 Laporan
			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		-	0 Laporan
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		196.031.259.989;72	1 Laporan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		3.000.000.000,00	1 Laporan
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		9.035.498.339;28	1 Laporan
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		77.784.000,00	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		74.561.600,00	2 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		42.142.900,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		47.461.500,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		-	0 Dokumen
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		-	0 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		201.912.000,00	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		201.926.000,00	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		-	0 Dokumen
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		-	0 Dokumen
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		-	0 Dokumen
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		199.762.000,00	10 Orang
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		108.106.900,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		76.967.800,00	5 Laporan
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		76.030.600,00	0 Dokumen
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah		-	0 Dokumen
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		-	0 Dokumen
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		56.640.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		81.826.700,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		80.994.500,00	1 Dokumen
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		85.411.500,00	1 Dokumen
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		39.672.000,00	1 Dokumen
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	0 Orang
		Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	45.000.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Sumber Daya Manusia	35.000.000,00	1 Laporan
			Evaluasi Pemberhentian ASN		18.000.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		8.000.000,00	1 Lembaga
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		15.000.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		25.000.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		20.000.000,00	1 Dokumen
			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		319.996.600,00	1 Laporan
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		16.240.000,00	150 Orang
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		15.000.000,00	1 Dokumen
			Pembinaan Disiplin ASN		15.000.000,00	10 Orang
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		4.000.000,00	1 Dokumen
			Evaluasi Disiplin ASN		10.000.000,00	1 Laporan
			Pengelolaan Mutasi ASN		17.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		29.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Promosi ASN		350.000.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		9.116.000,00	1000 Orang
			Pengelolaan Assessment Center		8.000.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		8.000.000,00	200 Orang
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		8.000.000,00	2000 Orang
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		8.000.000,00	50 Orang
			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		8.000.000,00	1 Laporan
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		155.000.000,00	1 Dokumen
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	184.995.000,00	1 Laporan
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang		20.000.000,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		30.000.000,00	1 Dokumen
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		50.000.000,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		110.000.000,00	8 Orang
			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		50.000.000,00	1 Laporan
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.673.100,00	2 Dokumen
			Pelaksanaan Konsultasi Publik		37.425.000,00	1 Berita Acara
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		12.662.000,00	56 Berita Acara
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		80.487.300,00	1 Berita Acara
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		14.599.500,00	247 Usulan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		79.769.400,00	2 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		26.240.400,00	1 Dokumen
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		11.686.000,00	56 Orang
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		28.137.900,00	1 Buku
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		35.396.200,00	2 Laporan
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		45.053.500,00	4 Laporan
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		2.650.100,00	1 Dokumen
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		6.219.600,00	1 Dokumen
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.555.000,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		12.319.400,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		52.239.400,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		31.916.900,00	2 Laporan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		31.666.500,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		12.055.300,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen		26.830.700,00	4 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		21.416.800,00	2 Laporan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		25.660.500,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		17.505.600,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		18.829.300,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		53.220.000,00	2 Laporan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		33.621.200,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		17.225.500,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16.628.300,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		67.309.600,00	2 Laporan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		22.193.300,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		27.913.100,00	2 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		27.741.900,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		46.199.500,00	2 Laporan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		24.387.700,00	2 Dokumen
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		19.807.800,00	2 Laporan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		26.485.300,00	4 Laporan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		30.271.400,00	2 Laporan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.660.500,00	1 Dokumen
			Penyediaan Akses Internet		1.904.722.400,00	45 Titik
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK		34.503.800,00	4 Dokumen
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi		147.412.000,00	2 Layanan
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		14.932.000,00	15 Titik
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan		31.856.400,00	15 Aplikasi

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pusat Kendali Pemerintah Daerah			
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	103.605.000,00	4 Rekomendasi
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		88.150.000,00	2 Rekomendasi
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		243.750.000,00	55 perangkat daerah
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		196.305.000,00	55 perangkat daerah
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		836.785.000,00	4 Kegiatan
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		380.776.000,00	55 perangkat daerah
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65.171.700,00	1 Naskah
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.200,00	1 Laporan
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	157.326.900,00	1 Laporan
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.501.200,00	1 Laporan
S4.2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	0 Dokumen
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	65.069.900,00	2 Obyek Pajak
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		52.364.900,00	11 Layanan
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		65.586.400,00	11 Dokumen
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		110.900.100,00	12 Dokumen
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		98.628.500,00	11 Laporan
			Penagihan Pajak Daerah		211.311.300,00	11 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		191.997.200,00	11 Laporan
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		7.854.700,00	11 Dokumen
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		92.871.300,00	11 Laporan
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		234.416.100,00	11 Laporan
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		50.789.500,00	12 Laporan
			Penetapan Wajib Pajak Daerah		181.149.900,00	23 Dokumen
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		91.933.100,00	12 Dokumen
T5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi					
S5.1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	2 Unit
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	87.580.000,00	50 Ton
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.270.000,00	1 Laporan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.000.000,00	1 Laporan
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	119.751.250,00	2125 Batang
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan	263.255.900,00	4 Dokumen
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20.959.100,00	4 Laporan
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	29.994.400,00	2 Ton
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.018.467.400,00	205 Ekor
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan dan Peternakan	143.745.607,00	4 Laporan
			Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.000.000,00	4 Laporan
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan	39.875.415,00	4 Laporan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.778.200,00	10 Ha
			Pengendalian Organisme Pengganggu	Dinas Perkebunan	103.352.000,00	10 Ha

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	dan Peternakan		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	20.607.530,00	70 Orang
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	4.879.000,00	6 Kelompok
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	13.711.965,00	12 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	7.314.000,00	4 Kelompok
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	13.053.052,00	6 Kelompok
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	50.006.814,00	25 Kelompok
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	5.165.200,00	4 Dokumen
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	400.440.000,00	2 Unit
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	3.330.500,00	5 Rekomendasi
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan	12.087.600,00	4 Dokumen
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan	6.435.600,00	10 Unit Usaha
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Dinas Perikanan	31.442.400,00	15 Ton

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	67.056.300,00	11 Pelaku Usaha
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.968.000,00	2 Laporan
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.082.200,00	2 Laporan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.980.000,00	2 Laporan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.235.970,00	12 Laporan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.391.100,00	2 Laporan
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	4 Dokumen
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.070.920,00	4 Laporan
S5.2.	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan	Dinas Tanaman	550.000.000,00	5 Unit

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pangan dan Hortikultura		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Perkebunan dan Peternakan	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	2 Unit
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	87.580.000,00	50 Ton
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.270.000,00	1 Laporan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.000.000,00	1 Laporan
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	119.751.250,00	2125 Batang
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perkebunan dan Peternakan	263.255.900,00	4 Dokumen
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20.959.100,00	4 Laporan
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	29.994.400,00	2 Ton
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.018.467.400,00	205 Ekor
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.026.900,00	2 Unit
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Dinas Ketahanan Pangan	15.001.200,00	4 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.683.700,00	1 Dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	48.163.280,00	4 Laporan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan	12.110.000,00	4 Laporan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	31.442.400,00	15 Ton
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	67.056.300,00	11 Pelaku Usaha
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	9.736.450,00	20 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi	10.000.000,00	91 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Utara	2.000.000,00	1 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Kotabumi Selatan	8.000.000,00	70 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Selatan	8.350.000,00	48 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Barat	5.754.400,00	25 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Semuli	6.571.000,00	49 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Surakarta	5.841.900,00	36 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tinggi	2.350.000,00	32 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bukit Kemuning	5.790.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Tanjung Raja	10.587.400,00	76 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Utara	3.974.000,00	5 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Muara Sungkai	7.360.000,00	55 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Bunga Mayang	14.539.250,00	1 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Tengah	10.055.000,00	16 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Pekurun	7.700.000,00	10 Keluarga

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Jaya	16.300.000,00	10 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sungkai Barat	10.473.600,00	30 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Kunang	5.356.000,00	24 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Blambangan Pagar	2.940.000,00	30 Keluarga
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Abung Tengah	6.800.000,00	11 Keluarga
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	714.111.800,00	11 Unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	432.150.800,00	4 Dokumen
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	2 Liter/Detik
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	2.009.800.600,00	2 Liter/Detik
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	1.161.408.200,00	160 SR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas SDA, BM dan BK	1.660.931.000,00	0;5 KM
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK	4.036.475.000,00	2;1 KM
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas SDA, BM dan BK	420.744.000,00	2 KM
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 M
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		-	0 Sistem Drainase Lingkungan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		-	0 Dokumen
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		-	1 Sistem Drainase Perkotaan
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Sistem Drainase Perkotaan
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Sistem Drainase Perkotaan
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-	0 Dokumen
S5.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	12.360.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	11.820.600,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	31.406.640,00	1 Kegiatan
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	34.728.300,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	207.588.609,00	7 Lokasi
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	11.114.700,00	1 Laporan
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup	76.757.500,00	2 Dokumen
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	23.285.500,00	1 Paket
		Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	22.208.900,00	2 Kelompok
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	252.040.000,00	12 Unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	Dinas Lingkungan Hidup	80.125.200,00	1 Dokumen

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Sampah kabupaten/kota			
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	30.258.135,00	71.500 Ton
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1.190.925.073,00	15 Unit
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	141.881.780,00	29 Persentase
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	1.583.227.505,00	71.500 Ton
			Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	44.069.000,00	1 Unit
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	14.339.000,00	2 Laporan
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 Ton/hari
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		100.000.000,00	1 Dokumen
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		-	0 Unit
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R		-	0 Ton/hari
		Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	121.336.500,00	300 Orang
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		120.783.900,00	1 Dokumen
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		500.040.000,00	100 Unit
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		68.556.100,00	80 Orang
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		91.658.000,00	200 Orang
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		612.000.000,00	12 laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		114.315.500,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		117.547.500,00	80 Orang
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		188.750.000,00	500 Orang
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota		153.480.000,00	300 Orang
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		158.321.000,00	1000 Orang
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		47.150.000,00	12 Laporan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.200.000,00	1 Dokumen
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		2.229.400,00	50 Orang
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		20.000.000,00	50 Desa/Kelurahan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		60.038.000,00	16 Unit
			Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		5.000.000,00	100 Laporan
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		120.000.000,00	60 Laporan
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		16.000.000,00	5 Dokumen
			Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		1.600.000,00	60 Laporan
			Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		5.000.000,00	60 Laporan
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		25.000.000,00	12 Laporan

TUJUAN/SASARAN		PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		82.689.600,00	22 Unit
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar		37.296.900,00	5 Unit
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		55.000.000,00	5 Laporan

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.8
Sinkronisasi 8 Program Hasil Terbaik Cepat Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Manajemen RSUD Mayjend HM. RYACUDU	Dinas Kesehatan (RSUD HM. Ryacudu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	22.076.185.800,00	1 Unit
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.717.039.000,00	1 Unit
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.304.581.850,00	1 Paket
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100.391.600,00	28 Paket
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	718.546.000,00	120 SDM
				Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.733.000,00	1 Dokumen
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	512.463.600,00	552
2	Kemudahan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Diselesaikan Di Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.500.000,00	4 Layanan
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	11.250.000,00	4 Laporan
			Program Pendafataran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	770.000.000,00	4 Dokumen
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait	5.000.000,00	2 Dokumen

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
				Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
				Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.342.000,00	1 Laporan
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	69.968.300,00	2 Dokumen
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	6.930.000,00	1 Laporan
3	Bantuan Pendidikan Bagi Anak Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.824.999.850,00	6 Dokumen
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	331.510.220,00	1 Dokumen
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	33.074.560,00	2 Laporan
4	Penyediaan Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru Jenjang SD Dan SMP	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	1.966.700.000,00	8700 Paket
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SMP)	1.500.000.000,00	6515 Paket
5	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Keliling (Puskesmas Mider) Integrasi Layanan Primer Yang Dilengkapi Peralatan Medis, Tenaga Kesahatan Dan Obat-Obatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.304.581.850,00	1 Paket
		Dinas Kesehatan		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100.391.600,00	28 Paket
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.000.000,00	10876 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.120.000,00	10833 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.088.690.000,00	10458 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.000.000,00	2869 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000,00	126630 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.260.000,00	420913 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	4976 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.260.000,00	8979 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.260.000,00	415 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.598.389.750,00	7416 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22.284.000,00	12056 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	23.319.000,00	662 Orang
		DINAS KESEHATAN		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	17.318.000,00	147 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.080.000,00	752 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	749 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	723 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	2889 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.525.000,00	6741 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	26976 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	4796 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	8979 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	415 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000,00	662 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	837 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.200.000,00	868 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.000.000,00	866 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.800.000,00	965 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.960.000,00	3312 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.580.000,00	7780 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.400.000,00	31135 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.100.000,00	5743 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.200.000,00	8979 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.850.000,00	479 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.190.000,00	764 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.100.000,00	966 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.535.000,00	379 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.805.000,00	378 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	363 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.700.000,00	1763 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.840.000,00	3653 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.830.000,00	13865 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.970.000,00	2153 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.900.000,00	4782 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000,00	222 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.810.000,00	368 Orang
		PUSKESMAS WONOGIRI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.091.000,00	929 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.020.000,00	615 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.360.000,00	613 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.180.000,00	588 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.940.000,00	2357 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.275.000,00	5425 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.670.000,00	19495 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.480.000,00	3861 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.080.000,00	5957 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.080.000,00	332 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.800.000,00	526 Orang
		PUSKESMAS MADUKORO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.900.000,00	1175 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.610.000,00	560 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.900.000,00	560 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.800.000,00	560 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.820.000,00	2483 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.200.000,00	5162 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.800.000,00	16300 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.800.000,00	3407 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.800.000,00	5862 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.900.000,00	356 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39.710.000,00	526 Orang
		PUSKESMAS KALIBALANGAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.800.000,00	361 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.140.000,00	350 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	332 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	306 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	1233 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.000.000,00	3017 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	11780 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.640.000,00	1825 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	4054 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	189 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.870.000,00	312 Orang
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	630 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.200.000,00	683 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	683 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	683 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	2406 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.100.000,00	5886 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	22892 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	4258 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	7909 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	297 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.480.000,00	608 Orang
		PUSKESMAS BUMI AGUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	630 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.520.000,00	124150 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	745 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	745 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	2867 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.115.000,00	224 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	420920 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	66 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	7315 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	6586 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.900.000,00	184 Orang
		PUSKESMAS KETAPANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	65894 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.000.000,00	1840 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	454 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.000.000,00	439 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	2148 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.930.000,00	313 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	16355 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	3017 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	2066 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	2176 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.065.000,00	310 Orang
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	456 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.800.000,00	656 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	651 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.040.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	855.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.760.000,00	5654 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	825.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.425.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	855.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26.030.000,00	590 Orang
		PUSKESMAS NEGARA RATU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	2320 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56.700.000,00	275 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	273 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	263 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	1060 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.640.000,00	2459 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	9740 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	1735 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	1125 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	1125 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.500.000,00	236 Orang
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	1280 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.722.000,00	376 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	356 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	342 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	1324 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.840.000,00	3240 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	12652 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	1960 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.050.000,00	4354 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	4354 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.840.000,00	335 Orang
		PUSKESMAS OGAN LIMA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	677 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.080.000,00	555 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.245.000,00	553 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.415.000,00	534 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.595.000,00	2056 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.160.000,00	5323 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.975.000,00	21489 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.830.000,00	4048 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.440.000,00	7190 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.805.000,00	332 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.455.000,00	428 Orang
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.610.000,00	555 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.160.000,00	719 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.120.000,00	716 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.410.000,00	692 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	2663 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.740.000,00	6896 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.120.000,00	27873 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	5308 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.975.000,00	9314 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.975.000,00	431 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.890.000,00	559 Orang
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.120.000,00	878 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.620.000,00	226 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	207 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	199 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	963 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.095.000,00	1988 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	8028 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	1531 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	2686 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	124 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.450.000,00	197 Orang
		PUSKESMAS PEKURUN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	309 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.735.000,00	200 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.130.000,00	1 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.130.000,00	120 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.260.000,00	2103 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.080.000,00	1635 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.130.000,00	110 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.260.000,00	1193 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.965.000,00	2103 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.965.000,00	356 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.810.000,00	537 Orang
		PUSKESMAS CEMPAKA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.310.000,00	261 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.820.000,00	548 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	855.000,00	519 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	950.000,00	518 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	855.000,00	1929 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.250.000,00	4722 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	890.000,00	18441 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	980.000,00	2857 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	950.000,00	6092 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	950.000,00	279 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.390.000,00	488 Orang
		PUSKESMAS TATA KARYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	570.000,00	987 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.194.000,00	162 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	950.000,00	319 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	950.000,00	323 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	950.000,00	1235 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.230.000,00	2796 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	950.000,00	11347 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.840.000,00	2022 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	950.000,00	3757 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	950.000,00	167 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	950.000,00	289 Orang
		PUSKESMAS ULAK RENGAS		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.040.000,00	398 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.380.000,00	32 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	32 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	90 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	900 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.830.000,00	2479 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	50 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	70 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	40 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	40 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.990.000,00	50 Orang
		PUSKESMAS KARANG SARI		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	2 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.280.000,00	288 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.080.000,00	287 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.120.000,00	277 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.235.000,00	1067 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.890.000,00	2762 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.090.000,00	11149 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	29.830.000,00	2126 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.120.000,00	3730 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.120.000,00	173 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.620.000,00	228 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.755.000,00	346 Orang
		PUSKESMAS BATU NANGKOP		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	0 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.400.000,00	285 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	260 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	247 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	247 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.650.000,00	2507 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	9733 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	1851 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	3382 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	156 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.000.000,00	207 Orang
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	322 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.543.000,00	50 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	567 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	11 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	60 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.840.000,00	11 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.050.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	15 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	12 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	12 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.070.000,00	17 Orang
		PUSKESMAS SUBIK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	15 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.690.000,00	156 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	950.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	950.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	950.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.150.000,00	422 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.280.000,00	224 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	950.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.980.000,00	84 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.980.000,00	84 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.375.000,00	80 Orang
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	950.000,00	10 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.690.000,00	237 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.250.000,00	220 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.700.000,00	213 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.690.000,00	818 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.300.000,00	2119 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21.360.000,00	8554 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.800.000,00	1632 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.500.000,00	2862 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.700.000,00	132 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.600.000,00	211 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.900.000,00	329 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.600.000,00	211 Orang
		PUSKESMAS KUBU HITU		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.900.000,00	329 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.651.000,00	517 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	514 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	498 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	1969 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.730.000,00	4628 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	18522 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	3417 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000,00	6166 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.050.000,00	286 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.700.000,00	455 Orang
		PUSKESMAS SEMULI RAYA		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	521 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.550.000,00	181 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000,00	180 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	174 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.080.000,00	688 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.700.000,00	1618 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000,00	6473 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000,00	1194 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.080.000,00	2155 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	100 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.895.000,00	159 Orang
		PUSKESMAS MULYOREJO		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	1 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.745.000,00	343 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.000.000,00	341 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.000.000,00	330 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000,00	1115 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.980.000,00	5262 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.000.000,00	12289 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.100.000,00	2267 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.140.000,00	4090 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.140.000,00	189 Orang
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.620.000,00	301 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.100.000,00	381 Orang
6	Akselerasi Penyelesaian Pelayanan Publik Di Kecamatan	KECAMATAN KOTABUMI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.374.000,00	2 Laporan
		KECAMATAN KOTABUMI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.399.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN KOTABUMI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.230.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.000.025,00	1 Dokumen
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.750.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.500.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.750.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.555.800,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.610.300,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.798.300,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG SELATAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.088.600,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.693.700,00	2 Laporan
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.330.000,00	2 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.330.000,00	2 Laporan
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.504.600,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	816.400,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	763.400,00	1 Laporan

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		KECAMATAN ABUNG SEMULI		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.821.900,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.468.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.109.050,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.003.450,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.119.200,00	4 Laporan
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.192.300,00	4 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG TINGGI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.154.500,00	4 Laporan
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.410.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.100.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.170.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI SELATAN		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.475.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN SUNGKAI SELATAN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.568.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.398.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN TANJUNG RAJA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.000.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.036.200,00	1 Dokumen
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.885.500,00	1 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.750.700,00	1 Dokumen
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.348.000,00	1 Laporan

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.122.300,00	4 Laporan
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.434.000,00	12 Dokumen
		KECAMATAN BUNGA MAYANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.389.000,00	12 Laporan
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.150.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.700.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN HULU SUNGKAI		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.200.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.381.950,00	1 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.062.200,00	1 Dokumen
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.225.900,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.049.900,00	4 Laporan
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.529.500,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.856.100,00	2 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.963.950,00	2 Laporan
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.036.500,00	1 Dokumen
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.850.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.789.500,00	2 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.372.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.400.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG KUNANG		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.279.800,00	1 Laporan

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.812.500,00	1 Laporan
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.393.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.000.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.500.000,00	1 Laporan
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.500.000,00	1 Dokumen
		KECAMATAN ABUNG TENGAH		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.500.000,00	1 Laporan
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Pendampingan Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.292.650.000,00	50 Unit Rumah
			Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	488.150.000,00	15 Unit Rumah
8	Pemberian Insentif Bagi Guru Bukan ASN Penerima Tunjangan Profesi Guru yang Bertugas pada Sekolah Negeri, Guru Ngaji, Marbot Masjid/Rumah Ibadah Lain, Dan Tenaga Kesehatan Serta Babinsa Dan Babinkamtibmas.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.257.800.000,00	1 Laporan
		Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.259.360.500,00	12 Laporan
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.824.999.850,00	6 Dokumen
		Badan Kesbangpol	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	291.600.000,00	100 Orang
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	2.097.735.000,00	500 Orang

NO	PROGRAM UNGGULAN/ PHTC	PD PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
				Penanganan Konflik di Daerah		

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.9

Sinkronisasi 14 Program Unggulan Daerah Terhadap Program dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Lampung Utara Hingga Menjadi Produk Bernilai Tinggi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-	0 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	11.304.000,00	23 Unit Usaha
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	25 Unit Usaha
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.169.600,00	1 Dokumen
2	Menjamin Ketersediaan Sarana Produksi Bagi Petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	63.008.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	7.750.000,00	10 Ha
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	17.237.000,00	1 Dokumen
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	550.000.000,00	5 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	256.000.000,00	2 Unit
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	44.142.500,00	4 Laporan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	199.124.500,00	7 Ha
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	566.050.000,00	5 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	97.900.000,00	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	35.000.000,00	2 Unit
3	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	15.162.500,00	4 Laporan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	9.736.450,00	20 Keluarga

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	34.160.000,00	10 laporan
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.026.900,00	2 Unit
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.001.200,00	4 Laporan
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	15.683.700,00	1 Dokumen
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	3.330.500,00	5 Rekomendasi
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan	12.087.600,00	4 Dokumen
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan	6.435.600,00	10 Unit Usaha
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	31.442.400,00	15 Ton
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	67.056.300,00	11 Pelaku Usaha
4	Pemberantasan Kemiskinan dan Menuju Zero Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	10876 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	39.120.000,00	10833 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	1.088.690.000,00	10458 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	30.000.000,00	2869 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	126630 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	16.260.000,00	420913 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	4976 Orang

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	16.260.000,00	8979 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	16.260.000,00	415 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	16.260.000,00	1135 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	1.598.389.750,00	7416 Orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	22.284.000,00	12056 Orang
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	3.304.581.850,00	1 Paket
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100.391.600,00	28 Paket
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	212.135.600,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	266.360.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	32.581.515.065,00	1 Dokumen
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	117.160.000,00	1 Dokumen
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan	10.350.000,00	1 Dokumen
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	-	0 Orang
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	94.218.000,00	171290 Orang
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	109.612.750,00	10 Orang
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	26.078.500,00	77089 Orang
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	38.247.000,00	693648 Usulan
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	95.673.600,00	15 Lembaga
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	86.364.500,00	23 Orang

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	160.375.000,00	60 Orang
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	150.820.000,00	1 Dokumen
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	25.830.200,00	1650 Orang
		Program Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	40.231.100,00	1 Laporan
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	12.087.700,00	2 Perkara
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	168.537.600,00	836 Orang
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	1.292.650.000,00	50 Unit Rumah
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 Orang
		Program Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	100.000.000,00	1 Laporan
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	100.000.000,00	1 Dokumen
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 Dokumen
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	488.150.000,00	15 Unit Rumah

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	130.000.000,00	1 Dokumen
5	Penguatan UMKM dan Koperasi Melalui Program Kredit Usaha dan Ekonomi Digital	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-	0 Orang
			Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	11.304.000,00	23 Unit Usaha
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	25 Unit Usaha
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	7.500.000,00	2 Unit Usaha
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	6.250.000,00	2 Unit Usaha
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	153.408.100,00	90 Unit Usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	29.844.000,00	72 Unit Usaha
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	8.501.000,00	15 Unit Usaha
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	109.000.700,00	106 Orang
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	9.950.500,00	38 Unit Usaha
6	Menjamin Ketersediaan dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU	22.076.185.800,00	1
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU	4.717.039.000,00	1

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	4.000.000.000,00	0
			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	1.199.085.000,00	27 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	2.700.000.000,00	2 Unit
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	90.529.760,00	27 Unit
7	Menjamin Ketersediaan dan Aksesbilitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.175.404.500,00	26 Unit
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN	1.353.798.500,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	1.147.816.500,00	7 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.710.514.500,00	8 Ruang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.175.404.500,00	26 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.710.514.500,00	8 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	1.147.816.500,00	7 Unit
8	Penguatan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Lansia	Program Perlindungan Perempuan	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.784.500,00	1 Laporan
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.218.000,00	24 Orang
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	3 Orang
			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	10 Orang
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.400.000,00	25 Orang
		Program Perlindungan Khusus Anak	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1 Dokumen

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	165.007.000,00	60 Orang
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	25 Orang
			Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	12 Orang
		Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	DINAS SOSIAL	52.528.600,00	25 Orang
			Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL	28.817.100,00	50 Orang
			Penyediaan Alat Bantu	DINAS SOSIAL	291.199.500,00	144 Orang
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINAS SOSIAL	71.454.000,00	50 Orang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL	756.082.200,00	80 Orang
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINAS SOSIAL	219.111.200,00	300 Orang
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINAS SOSIAL	-	0 Orang
			Pemberian Layanan Kedaruratan	DINAS SOSIAL	230.016.900,00	500 Orang
			Pemberian Layanan Rujukan	DINAS SOSIAL	-	0 Orang
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	DINAS SOSIAL	-	0
9	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan Guna Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.420.800,00	1 Laporan
			Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.797.900,00	32 Lembaga
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	23 Orang
			Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	0
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	32 Lembaga

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	80 Orang
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	154.999.550,00	50 Orang
			Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.349.900,00	1 Organisasi
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	59.999.100,00	1 Organisasi
10	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Sistem Informasi serta Implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	210.000.000,00	6 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	35.441.550,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	169.518.800,00	4 Dokumen
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	61.474.620,00	2 Dokumen
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	77.865.030,00	3 Laporan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.660.500,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	0 Laporan
			Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.904.722.400,00	45 Titik
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.503.800,00	4 Dokumen
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	147.412.000,00	2 Layanan
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.932.000,00	15 Titik
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.856.400,00	15 Aplikasi
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	243.750.000,00	55 perangkat daerah

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	196.305.000,00	55 perangkat daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korups	Inspektorat	-	0
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	380.776.000,00	55 perangkat daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65.171.700,00	1 Naskah
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.200,00	1 Laporan
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	157.326.900,00	1 Laporan
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.501.200,00	1 Laporan
11	Membangun Dari Desa, Akselerasi Pembangunan Pedesaan melalui Pengelolaan BUMDes untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	125.480.000,00	1 Dokumen
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	52.000.000,00	1 Dokumen
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	46.000.000,00	50 Dokumen
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	90.850.000,00	1 Dokumen
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	134.830.500,00	1 Dokumen
12	Memastikan Keamanan dan Menjamin Kerukunan antar Umat Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.647.000,00	100 Orang
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.793.000,00	100 Orang

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	1 Laporan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	224.346.000,00	1 Dokumen
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	-	36 Orang
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satuan Polisi Pamong Praja	554.818.500,00	4 laporan
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	166.220.500,00	4 Laporan
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000,00	1 Laporan
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	70.000.000,00	4 Laporan
13	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.660.931.000,00	0;5 KM
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	4.036.475.000,00	2;1 KM
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	420.744.000,00	2 KM
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.000.000.000,00	18 Dokumen
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.809.180.200,00	21 Dokumen

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.099.999.900,00	1025;27 KM
			Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	-	0 KM
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	38.474.353.200,00	20 KM
			Penggantian Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	5.500.000.000,00	10 Meter
			Rehabilitasi Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.100.000.000,00	10 Meter
			Rekonstruksi Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	33.950.000.000,00	8.25 KM
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.000.000.000,00	48;5 KM
			Pembangunan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.558.419.000,00	10 Meter
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	714.111.800,00	11 Unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	432.150.800,00	4 Dokumen
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	2 Liter/Detik
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	2.009.800.600,00	2 Liter/Detik
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	1.161.408.200,00	160 SR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	299.984.000,00	1 Unit
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	1 M^3/Hari

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 M^3/Hari
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	0 Unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	230.545.400,00	2 Dokumen
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	410.000.000,00	1 Dokumen
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	4.600.000.000,00	1000 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Pehubungan	12.568.004.200,00	3785 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Pehubungan	63.356.000,00	2 Unit
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	90.752.000,00	30 Unit
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	20.000.000,00	1 Laporan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Pehubungan	16.190.000,00	10 Unit
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dinas Pehubungan	9.370.000,00	4 Unit
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	236.000.000,00	12 Laporan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Dinas Pehubungan	149.500.000,00	1 Laporan
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	7.715.500,00	2 Laporan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	166.000.000,00	4 Unit
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Dinas Pehubungan	11.000.000,00	4 Unit

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	11.000.000,00	2 Dokumen
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pehubungan	14.700.000,00	2 Laporan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.175.404.500,00	26 Unit
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN	1.353.798.500,00	5 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	1.147.816.500,00	7 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.710.514.500,00	8 Ruang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.175.404.500,00	26 Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	3.710.514.500,00	8 Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	1.147.816.500,00	7 Unit
14	Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Sumber Energi Bersih dan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	12.360.000,00	1 Dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	11.820.600,00	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	31.406.640,00	1 Kegiatan
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan Hidup	34.728.300,00	1 Dokumen
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	207.588.609,00	7 Lokasi
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	11.114.700,00	1 Laporan

NO	14 UNGGULAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PAGU INDIKATIF RKPD 2027	TARGET SUB KEGIATAN TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup	76.757.500,00	2 Dokumen
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	23.285.500,00	1 Paket
		Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	22.208.900,00	2 Kelompok
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	252.040.000,00	12 Unit
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	80.125.200,00	1 Dokumen
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	30.258.135,00	71.500 Ton
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1.190.925.073,00	15 Unit
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	141.881.780,00	29 Persentase
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	1.583.227.505,00	71.500 Ton
			Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	44.069.000,00	1 Unit
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	14.339.000,00	2 Laporan

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.10
Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara Tahun 2027

NAMA SKPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU TOTAL OPD	PAGU SUB UNIT
DINAS PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	543.608.862.371,81	543.608.862.371,81
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	246.482.294.455,19	150.801.620.271,19
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU		36.793.224.800,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0002	PUSKESMAS KOTABUMI 1		2.553.946.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0003	PUSKESMAS KOTABUMI 2		4.079.051.234,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0004	PUSKESMAS WONOGIRI		1.666.666.321,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0005	PUSKESMAS MADUKORO		3.006.826.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0006	PUSKESMAS KALIBALANGAN		2.828.600.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0007	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR		2.045.872.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0008	PUSKESMAS BUMI AGUNG		2.632.589.131,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0009	PUSKESMAS KETAPANG		2.366.958.445,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0010	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU		3.385.187.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0011	PUSKESMAS NEGARA RATU		3.237.232.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0012	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA		1.599.792.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0013	PUSKESMAS OGAN LIMA		1.520.657.477,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0014	PUSKESMAS TANJUNG RAJA		3.576.198.500,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0015	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING		3.483.308.668,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0016	PUSKESMAS PEKURUN		1.200.421.836,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0017	PUSKESMAS CEMPAKA		1.481.267.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0018	PUSKESMAS TATA KARYA		2.162.324.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0019	PUSKESMAS ULAK RENGAS		1.513.927.100,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0020	PUSKESMAS KARANG SARI		1.343.478.720,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0021	PUSKESMAS BATU NANGKOP		1.736.315.383,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0022	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK		1.716.887.232,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0023	PUSKESMAS SUBIK		1.801.413.672,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0024	PUSKESMAS ABUNG KUNANG		1.101.275.718,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0025	PUSKESMAS KUBU HITU		1.367.239.201,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0026	PUSKESMAS SEMULI RAYA		2.675.884.746,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0027	PUSKESMAS MULYOREJO		1.310.341.000,00
DINAS KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.02.0028	PUSKESMAS KEMALO ABUNG		1.493.789.000,00
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	109.328.101.255,14	109.328.101.255,14
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG	44.420.164.114,02	44.420.164.114,02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.994.888.730,33	10.994.888.730,33
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.262.666.170,14	10.262.666.170,14
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.239.369.388,04	6.239.369.388,04
DINAS SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	9.977.107.048,14	9.977.107.048,14
DINAS PEMBERDAYAAN	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.425.411.197,24	4.425.411.197,24

NAMA SKPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU TOTAL OPD	PAGU SUB UNIT
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.257.558.760,14	6.257.558.760,14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.576.437.979,23	16.576.437.979,23
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.577.045.015,14	9.577.045.015,14
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI	2.13.3.32.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI	7.727.415.035,04	7.727.415.035,04
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.885.828.298,54	9.885.828.298,54
DINAS PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	29.556.984.020,83	29.556.984.020,83
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.810.061.120,93	11.810.061.120,93
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2.17.2.07.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.597.070.131,00	6.597.070.131,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.602.187.271,74	7.602.187.271,74
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.744.426.998,00	4.744.426.998,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.602.900.616,84	7.602.900.616,84
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.032.932.491,14	4.032.932.491,14
DINAS PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	5.649.362.225,44	5.649.362.225,44
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	7.290.246.898,84	7.290.246.898,84
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	3.27.0.00.0.00.03.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	9.983.232.317,74	9.983.232.317,74
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.250.473.903,14	8.250.473.903,14
SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	53.625.351.634,89	53.625.351.634,89
SEKRETARIAT DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	55.529.135.277,64	55.529.135.277,64
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.101.265.669,64	13.101.265.669,64
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	248.577.844.156,69	248.577.844.156,69
BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16.901.354.727,40	16.901.354.727,40
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.355.271.453,70	9.355.271.453,70
INSPEKTORAT	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	26.794.912.148,60	26.794.912.148,60
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KOTABUMI	14.592.430.671,14	11.178.032.571,14
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN REJOSARI		400.817.000,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN CEMPEDAK		321.520.500,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN KOTABUMI UDIK		476.727.400,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN KOTABUMI TENGAH		372.730.000,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN KOTABUMI PASAR		250.728.000,00

NAMA SKPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU TOTAL OPD	PAGU SUB UNIT
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN KOTABUMI ILIR		385.355.000,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN SINDANG SARI		429.068.000,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0008	KELURAHAN SRIBASUKI		481.023.500,00
KECAMATAN KOTABUMI	7.01.0.00.0.00.01.0009	KELURAHAN GAPURA		296.428.700,00
KECAMATAN KOTABUMI UTARA	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KOTABUMI UTARA	14.306.001.388,18	2.514.558.476,24
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN		9.617.305.711,94
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN KELAPA TUJUH		486.605.000,00
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0002	KELURAHAN TANJUNG AMAN		462.741.000,00
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0003	KELURAHAN KOTA ALAM		532.340.200,00
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0004	KELURAHAN TANJUNG SENANG		300.114.000,00
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN	7.01.0.00.0.00.03.0005	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN		392.337.000,00
KECAMATAN ABUNG SELATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN ABUNG SELATAN	2.422.072.287,84	2.422.072.287,84
KECAMATAN ABUNG BARAT	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN ABUNG BARAT	2.095.423.235,34	2.095.423.235,34
KECAMATAN ABUNG TIMUR	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN ABUNG TIMUR	1.920.183.000,94	1.920.183.000,94
KECAMATAN ABUNG SEMULI	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN ABUNG SEMULI	2.787.293.156,84	2.787.293.156,84
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA	2.576.874.818,54	2.576.874.818,54
KECAMATAN ABUNG TINGGI	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN ABUNG TINGGI	2.400.055.143,44	2.400.055.143,44
KECAMATAN BUKIT KEMUNING	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN BUKIT KEMUNING	4.268.129.652,94	3.558.774.652,94
KECAMATAN BUKIT KEMUNING	7.01.0.00.0.00.11.0001	KELURAHAN BUKIT KEMUNING		709.355.000,00
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN	2.689.550.051,04	2.689.550.051,04
KECAMATAN TANJUNG RAJA	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TANJUNG RAJA	2.430.569.329,94	2.430.569.329,94
KECAMATAN SUNGKAI UTARA	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN SUNGKAI UTARA	2.216.833.437,64	2.216.833.437,64
KECAMATAN MUARA SUNGKAI	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN MUARA SUNGKAI	1.927.733.853,54	1.927.733.853,54
KECAMATAN BUNGA MAYANG	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BUNGA MAYANG	2.105.384.797,24	2.105.384.797,24
KECAMATAN HULU SUNGKAI	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN HULU SUNGKAI	1.849.256.115,24	1.849.256.115,24
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	2.141.892.954,34	2.141.892.954,34
KECAMATAN ABUNG PEKURUN	7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN ABUNG PEKURUN	2.389.000.773,14	2.389.000.773,14
KECAMATAN SUNGKAI JAYA	7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN SUNGKAI JAYA	2.066.452.540,14	2.066.452.540,14
KECAMATAN SUNGKAI BARAT	7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN SUNGKAI BARAT	2.510.784.570,84	2.510.784.570,84
KECAMATAN ABUNG KUNANG	7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN ABUNG KUNANG	1.947.326.055,96	1.947.326.055,96
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR	2.435.442.854,90	2.435.442.854,90
KECAMATAN ABUNG TENGAH	7.01.7.01.0.00.09.0000	KECAMATAN ABUNG TENGAH	2.015.578.145,64	2.015.578.145,64
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.785.516.676,84	10.785.516.676,84
JUMLAH TOTAL			**1.649.647.948.393,98**	**1.649.647.948.393,98**

Tabel 5.10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lampung Utara Tahun 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LAMPUNG UTARA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN						**543.608.862.371,81**							**597.969.748.608,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**543.608.862.371,81**							**597.969.748.608,70**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**543.608.862.371,81**							**597.969.748.608,70**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**429.486.281.220,90**							**472.055.336.063,70**	
		Tercapainya kinerja urusan pemerintahan						***429.486.281.220,90***							***472.055.336.063,70***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	429.486.281.220,90						67-67.2 Nilai	472.055.336.063,70	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						76.028.088,00					-		83.630.897,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						76.028.088,00					-		83.630.897,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	27.500.320,00						2 Dokumen	30.250.352,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.780.005,00						2 Dokumen	37.158.006,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.747.763,00						4 Laporan	16.222.539,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.780.005,00							37.158.006,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.780.005,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	37.158.006,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.747.763,00							16.222.539,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.747.763,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Laporan	16.222.539,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						27.500.320,00							30.250.352,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	27.500.320,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	30.250.352,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						418.325.337.252,90					-		460.145.622.599,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan						418.325.337.252,90					-		460.145.622.599,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	743.640.000,00						12 Dokumen	809.677.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.844.000,00						4 Dokumen	6.907.560,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4148 Orang/bulan		4148 Orang/bulan	4148 Orang/bulan	417.571.853.252,90						4148 Orang/bulan	459.329.038.039,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						417.571.853.252,90							459.329.038.039,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4148 Orang/bulan		4148 Orang/bulan	4148 Orang/bulan	417.571.853.252,90	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4148 Orang/bulan	459.329.038.039,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						743.640.000,00							809.677.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	743.640.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Dokumen	809.677.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						9.844.000,00							6.907.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.844.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Dokumen	6.907.560,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11.847.800,00					-		13.309.890,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11.847.800,00					-		13.309.890,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.847.800,00						2 Laporan	13.309.890,00	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						11.847.800,00							13.309.890,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	11.847.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Laporan	13.309.890,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.856.620,00					-		107.848.197,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.856.620,00					-		107.848.197,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	86.567.620,00						2 Dokumen	87.861.884,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	5 Unit	23.289.000,00						5 Unit	19.986.313,00	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						23.289.000,00							19.986.313,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	5 Unit	23.289.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	19.986.313,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						86.567.620,00							87.861.884,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	86.567.620,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	87.861.884,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.821.100,00					-		130.315.493,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.821.100,00					-		130.315.493,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	71.772.000,00						15 Laporan	78.949.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		75 Paket	75 Paket	20.243.000,00						75 Paket	24.379.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	18.107.100,00						15 Paket	19.955.210,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	8.699.000,00						10 Paket	7.031.783,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.107.100,00							19.955.210,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	18.107.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		15 Paket	19.955.210,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.699.000,00							7.031.783,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	8.699.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Paket	7.031.783,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.243.000,00							24.379.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		75 Paket	75 Paket	20.243.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		75 Paket	24.379.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						71.772.000,00							78.949.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	71.772.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		15 Laporan	78.949.200,00	DINAS PENDIDIKAN
		Tersediannya Barang Milik Daerah						1.136.433.460,00					-		905.929.200,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	526.168.660,00						5 Unit	220.770.000,00	
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						526.168.660,00							220.770.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	129 Unit	526.168.660,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	220.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.363.360.500,00					-		10.276.313.740,00	
		Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Kantor						9.363.360.500,00					-		10.276.313.740,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	104.000.000,00						24 Laporan	105.733.540,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.259.360.500,00						12 Laporan	10.170.580.200,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.000.000,00							105.733.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	104.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		24 Laporan	105.733.540,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.259.360.500,00							10.170.580.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.259.360.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Laporan	10.170.580.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						344.596.400,00					-		392.366.047,70	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						344.596.400,00					-		392.366.047,70	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	13.310.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	101.256.200,00						2 Unit	111.381.827,70	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	193.340.200,00						6 Unit	212.674.220,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00						4 Unit	55.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						193.340.200,00							212.674.220,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	5 Unit	193.340.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Unit	212.674.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							13.310.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	13.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						101.256.200,00							111.381.827,70	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	101.256.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Unit	111.381.827,70	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Unit	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.136.433.460,00					-		905.929.200,00	
		Tersediannya Barang Milik Daerah						1.136.433.460,00					-		905.929.200,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	610.264.800,00						-	685.159.200,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						610.264.800,00							685.159.200,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	610.264.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	685.159.200,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**113.333.951.050,91**							**124.959.437.821,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***112.783.951.050,91***							***124.134.437.821,00***	
			999.Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	112.783.951.050,91						100,00 Persentase	124.134.437.821,00	
			999.Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	112.783.951.050,91						100 Persentase	124.134.437.821,00	
			999.Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	112.783.951.050,91						100 Persentase	124.134.437.821,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100 %		100 %	100 %	112.783.951.050,91						100 %	124.134.437.821,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						68.072.063.410,00					-		75.059.820.770,00	
		Jumlah Sarana dan Prasaran Sekolah Dasar yang dikelola						68.072.063.410,00					-		75.059.820.770,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	102.767.600,00						4 Dokumen	113.044.360,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	425 Kegiatan		425 Kegiatan	425 Kegiatan	100.000.000,00						425 Kegiatan	110.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	2 Konten Digital	86.161.000,00						2 Konten Digital	110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	425 Orang		425 Orang	425 Orang	101.721.600,00						425 Orang	111.893.760,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	202.540.000,00						300 Orang	242.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10350 Paket		10350 Paket	10350 Paket	1.966.700.000,00						10350 Paket	2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang		400 Orang	400 Orang	120.000.000,00						400 Orang	132.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	74.680.000,00						500 Peserta Didik	110.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	425 Orang		425 Orang	425 Orang	100.000.000,00						425 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang		12 Ruang	11 Ruang	1.353.798.500,00						11 Ruang	1.489.178.350,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		10 Ruang	9 Ruang	3.710.514.500,00						10 Ruang	4.081.565.950,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit		20 Unit	20 Unit	454.177.500,00						20 Unit	499.595.250,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		5 Unit	5 Unit	3.175.404.500,00						5 Unit	3.492.944.950,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit		15 Unit	15 Unit	1.147.816.500,00						17 Unit	1.262.598.150,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	425 Satuan Pendidikan		425 Satuan Pendidikan	425 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						425 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	420 Satuan Pendidikan		420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	54.955.360.000,00						420 Satuan Pendidikan	60.500.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	220.421.710,00						300 Peserta Didik	275.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.175.404.500,00							3.492.944.950,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		5 Unit	26 Unit	3.175.404.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	3.492.944.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						454.177.500,00							499.595.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit		20 Unit	6 Unit	454.177.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		20 Unit	499.595.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						220.421.710,00							275.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	220.421.710,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		300 Peserta Didik	275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						202.540.000,00							242.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang		300 Orang	422 Orang	202.540.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		300 Orang	242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	425 Satuan Pendidikan		425 Satuan Pendidikan	422 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		425 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						54.955.360.000,00							60.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	420 Satuan Pendidikan		420 Satuan Pendidikan	422 Satuan Pendidikan	54.955.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		420 Satuan Pendidikan	60.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						101.721.600,00							111.893.760,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	425 Orang		425 Orang	424 Orang	101.721.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		425 Orang	111.893.760,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						86.161.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	422 Konten Digital	86.161.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Konten Digital	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	425 Orang		425 Orang	423 Orang	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		425 Orang	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						102.767.600,00							113.044.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	102.767.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Dokumen	113.044.360,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	425 Kegiatan		425 Kegiatan	423 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		425 Kegiatan	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.966.700.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10350 Paket		10350 Paket	8700 Paket	1.966.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10350 Paket	2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						1.353.798.500,00							1.489.178.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang		12 Ruang	5 Ruang	1.353.798.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11 Ruang	1.489.178.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.147.816.500,00							1.262.598.150,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit		15 Unit	7 Unit	1.147.816.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		17 Unit	1.262.598.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						120.000.000,00							132.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang		400 Orang	422 Orang	120.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		400 Orang	132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						3.710.514.500,00							4.081.565.950,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		10 Ruang	8 Ruang	3.710.514.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Ruang	4.081.565.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						74.680.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	92 Peserta Didik	74.680.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		500 Peserta Didik	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						33.816.709.736,00					-		37.286.401.995,00	
		Jumlah Sarana dan Prasaran Sekolah Menengah Pertama yang dikelola						33.816.709.736,00					-		37.286.401.995,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	114 Paket		114 Paket	114 Paket	250.000.000,00						114 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	267.000.000,00						50 Orang	293.700.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10200 Paket		10200 Paket	10200 Paket	1.500.000.000,00						10200 Paket	1.650.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	350 Orang		350 Orang	350 Orang	409.993.500,00						350 Orang	469.150.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	585 Peserta Didik		400 Peserta Didik	440 Peserta Didik	250.000.000,00						484 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	287.306.236,00						112 Satuan Pendidikan	316.036.860,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang		15 Ruang	13 Ruang	690.000.000,00						10 Ruang	759.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit		30 Unit	30 Unit	1.309.785.000,00						25 Unit	1.440.763.500,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	30 Unit	420.000.000,00						30 Unit	462.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	385.625.000,00						112 Satuan Pendidikan	494.051.635,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	113 Satuan Pendidikan		113 Satuan Pendidikan	113 Satuan Pendidikan	27.750.000.000,00						113 Satuan Pendidikan	30.800.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		200 Peserta Didik	225 Peserta Didik	297.000.000,00						230 Peserta Didik	326.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.309.785.000,00							1.440.763.500,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit		30 Unit	6 Unit	1.309.785.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		25 Unit	1.440.763.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						690.000.000,00							759.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang		15 Ruang	5 Ruang	690.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Ruang	759.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						420.000.000,00							462.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit		30 Unit	2 Unit	420.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		30 Unit	462.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						250.000.000,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	585 Peserta Didik		400 Peserta Didik	250 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		484 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						297.000.000,00							326.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		200 Peserta Didik	250 Peserta Didik	297.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		230 Peserta Didik	326.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						385.625.000,00							494.051.635,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	385.625.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		112 Satuan Pendidikan	494.051.635,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						27.750.000.000,00							30.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	113 Satuan Pendidikan		113 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	27.750.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		113 Satuan Pendidikan	30.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						267.000.000,00							293.700.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	115 Orang	267.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		50 Orang	293.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						287.306.236,00							316.036.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	287.306.236,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		112 Satuan Pendidikan	316.036.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						409.993.500,00							469.150.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	350 Orang		350 Orang	345 Orang	409.993.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		350 Orang	469.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.500.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10200 Paket		10200 Paket	6515 Paket	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10200 Paket	1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	114 Paket		114 Paket	4 Paket	250.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		114 Paket	275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang dikelola						8.392.217.104,91					Peserta Didik		9.177.591.918,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	739.295.000,00						3 Paket	813.224.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	208.812.500,00						4 Dokumen	229.693.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas		3 Komunitas	3 Komunitas	150.441.600,00						3 Komunitas	165.486.068,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	292.120.400,00						100 Satuan Pendidikan	172.517.620,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	400 Satuan Pendidikan		400 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	6.153.300.000,00						400 Satuan Pendidikan	6.768.630.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	232.873.000,00						150 Orang	256.160.300,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	263.997.804,91						300 Peserta Didik	385.365.200,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200 Orang		200 Orang	200 Orang	220.801.800,00						200 Orang	242.881.980,00	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						263.997.804,91							385.365.200,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	500 Peserta Didik	263.997.804,91	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		300 Peserta Didik	385.365.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						292.120.400,00							172.517.620,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	387 Satuan Pendidikan	292.120.400,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		100 Satuan Pendidikan	172.517.620,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						6.153.300.000,00							6.768.630.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	400 Satuan Pendidikan		400 Satuan Pendidikan	349 Satuan Pendidikan	6.153.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		400 Satuan Pendidikan	6.768.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						220.801.800,00							242.881.980,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200 Orang		200 Orang	1038 Orang	220.801.800,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		200 Orang	242.881.980,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						208.812.500,00							229.693.750,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	208.812.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Dokumen	229.693.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						150.441.600,00							165.486.068,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas		3 Komunitas	3 Komunitas	150.441.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Komunitas	165.486.068,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						232.873.000,00							256.160.300,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	232.873.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		150 Orang	256.160.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						739.295.000,00							813.224.500,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	15 Paket	739.295.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Paket	813.224.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.052.960.800,00					-		3.435.623.138,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola						3.052.960.800,00					-		3.435.623.138,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	275.508.000,00						4 Dokumen	303.058.910,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	125 Peserta Didik		125 Peserta Didik	125 Peserta Didik	56.737.300,00						125 Peserta Didik	62.411.428,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan		16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.682.500.000,00						16 Satuan Pendidikan	3.028.115.750,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32 Orang		32 Orang	32 Orang	38.215.500,00						32 Orang	42.037.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						2.682.500.000,00							3.028.115.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan		16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.682.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		16 Satuan Pendidikan	3.028.115.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						38.215.500,00							42.037.050,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32 Orang		32 Orang	70 Orang	38.215.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		32 Orang	42.037.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						275.508.000,00							303.058.910,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	275.508.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Dokumen	303.058.910,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						56.737.300,00							62.411.428,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	125 Peserta Didik		125 Peserta Didik	125 Peserta Didik	56.737.300,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		125 Peserta Didik	62.411.428,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						8.392.217.104,91					Peserta Didik		9.177.591.918,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD yang dikelola						8.392.217.104,91					Peserta Didik		9.177.591.918,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	130.575.000,00						-	143.632.500,00	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						130.575.000,00							143.632.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	250 Orang	130.575.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	143.632.500,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**47.631.000,00**							**52.394.144,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan						***47.631.000,00***							***52.394.144,00***	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	47.631.000,00						100 Persentase	52.394.144,00	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						47.631.000,00					-		52.394.144,00	
		Jumlah Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						47.631.000,00					-		52.394.144,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.631.000,00						2 Dokumen	52.394.144,00	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						47.631.000,00							52.394.144,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	47.631.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	52.394.144,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**607.630.600,00**							**755.873.580,00**	
		Meningkatknya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***607.630.600,00***							***755.873.580,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Pemerataan Guru	99.98 Rasio		97.98 Rasio	98.31 Rasio	607.630.600,00						98.98 Rasio	755.873.580,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	99.98 Persentase		97.98 Persentase	98.31 Persentase	607.630.600,00						98.98 Persentase	755.873.580,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						607.630.600,00					-		755.873.580,00	
		Jumlah Dokumen dan Laporan pemerataan tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Menengah, Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan						607.630.600,00					-		755.873.580,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	399.407.600,00						2 Dokumen	505.564.620,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	208.223.000,00						1 Laporan	250.308.960,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						399.407.600,00							505.564.620,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	399.407.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	505.564.620,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						208.223.000,00							250.308.960,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	208.223.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	250.308.960,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**133.368.500,00**							**146.707.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						***133.368.500,00***							***146.707.000,00***	
			999.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	87.44 Persentase		74.74 Persentase	77.73 Persentase	133.368.500,00						80.84 Persentase	146.707.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						133.368.500,00					-		146.707.000,00	
		Jumlah Dokumen Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat						133.368.500,00					-		146.707.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	39.369.900,00						10 Dokumen	43.307.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	93.998.600,00						10 Dokumen	103.400.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						93.998.600,00							103.400.000,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	20 Dokumen	93.998.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Dokumen	103.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						39.369.900,00							43.307.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	39.369.900,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Dokumen	43.307.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**150.801.620.271,19**							**166.708.745.904,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150.801.620.271,19**							**166.708.745.904,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**150.801.620.271,19**							**166.708.745.904,00**	
6.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah						***100.908.362.646,19***							***115.205.949.130,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.66-66.68 Nilai	66.68-67 Nilai	100.908.362.646,19						67-67.2 Nilai	115.205.949.130,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.700.000,00					-		70.922.355,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.700.000,00					-		70.922.355,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.850.000,00						1 Dokumen	16.060.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.150.000,00						3 Dokumen	44.845.815,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.700.000,00						4 Laporan	10.015.740,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						34.150.000,00							44.845.815,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.150.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	44.845.815,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.700.000,00							10.015.740,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	10.015.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						8.850.000,00							16.060.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.850.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	16.060.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						98.342.475.817,19					-		113.039.178.324,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						98.342.475.817,19					-		113.039.178.324,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	799.680.000,00						1 Dokumen	167.811.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.532.600,19						1 Dokumen	14.046.945,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.990.000,00						1 Dokumen	26.133.345,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1289 Orang/bulan		1289 Orang/bulan	1289 Orang/bulan	97.458.273.217,00						1289 Orang/bulan	112.831.187.034,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						97.458.273.217,00							112.831.187.034,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1289 Orang/bulan		1289 Orang/bulan	1289 Orang/bulan	97.458.273.217,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1289 Orang/bulan	112.831.187.034,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						799.680.000,00							167.811.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	799.680.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	167.811.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						32.990.000,00							26.133.345,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.990.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	26.133.345,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						51.532.600,19							14.046.945,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.532.600,19	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	14.046.945,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		11.229.610,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		11.229.610,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.229.610,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							11.229.610,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	11.229.610,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.426.500,00					-		76.367.445,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.426.500,00					-		76.367.445,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.383.000,00						1 Laporan	55.909.875,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.983.500,00						1 Paket	2.405.655,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.062.000,00						3 Paket	13.211.940,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.998.000,00						1 Paket	4.839.975,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.983.500,00							2.405.655,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.983.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	2.405.655,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.062.000,00							13.211.940,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.062.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Paket	13.211.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.998.000,00							4.839.975,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.998.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	4.839.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.383.000,00							55.909.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.383.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	55.909.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.365.800.000,00					-		1.973.089.911,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.365.800.000,00					-		1.973.089.911,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	108.000.000,00						2 Laporan	143.727.411,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.257.800.000,00						1 Laporan	1.829.362.500,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						108.000.000,00							143.727.411,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	108.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	143.727.411,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.257.800.000,00							1.829.362.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.257.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	1.829.362.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.960.329,00					-		35.161.485,00	
		Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.960.329,00					-		35.161.485,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.320.624,00						5 Unit	17.210.785,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.639.705,00						2 Unit	17.950.700,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.639.705,00							17.950.700,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.639.705,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	17.950.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.320.624,00							17.210.785,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.320.624,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	17.210.785,00	DINAS KESEHATAN
			indeks akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-		-	66.68-67 nilai	600.000.000,00						-	1.851.015.600,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00					-		1.851.015.600,00	
		-						600.000.000,00					-		1.851.015.600,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	1.851.015.600,00	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000.000,00							1.851.015.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.851.015.600,00	DINAS KESEHATAN
7.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***47.755.445.425,00***							***47.901.420.629,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	47.755.445.425,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	47.901.420.629,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	47.755.445.425,00						15.4 (%)	47.901.420.629,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						33.530.774.010,00					FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		40.550.320.997,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit		27 Unit	27 Unit	90.529.760,00						27 Unit	72.776.550,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.391.600,00						1 Paket	105.411.180,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.304.581.850,00						1 Paket	4.073.429.850,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	27 Unit		27 Unit	27 Unit	1.199.085.000,00						27 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	42 Unit		42 Unit	42 Unit	60.000.000,00						42 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	27 Unit		27 Unit	27 Unit	2.700.000.000,00						27 Unit	1.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						1.199.085.000,00							0,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	27 Unit		27 Unit	27 Unit	1.199.085.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		27 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						2.700.000.000,00							1.350.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	27 Unit		27 Unit	2 Unit	2.700.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		27 Unit	1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						60.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	42 Unit		42 Unit	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		42 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						90.529.760,00							72.776.550,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit		27 Unit	27 Unit	90.529.760,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		27 Unit	72.776.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						3.304.581.850,00							4.073.429.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.304.581.850,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Paket	4.073.429.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						100.391.600,00							105.411.180,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket		1 Paket	28 Paket	100.391.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Paket	105.411.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.581.515.065,00						1 Dokumen	37.549.731.764,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	231.135.600,00						1 Dokumen	242.692.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.200.000,00						1 Dokumen	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.500.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	61 Unit		57 Unit	58 Unit	16.750.000,00						59 Unit	451.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	294 Orang	19.218.000,00						290 Orang	19.828.900,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.114 Orang		1.772 Orang	1.526 Orang	30.919.000,00						1.351 Orang	31.964.950,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang		6 Orang	6 Orang	9.000.000,00						5 Orang	9.881.550,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	9.000.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan		5 Tatanan	5 Tatanan	21.600.000,00						7 Tatanan	22.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10876 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						39.120.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10833 Orang	39.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.088.690.000,00							1.164.140.250,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	10458 Orang	1.088.690.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	1.164.140.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						30.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2869 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	126630 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						16.260.000,00							17.260.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	420913 Orang	16.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	17.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	4976 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						16.260.000,00							17.260.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	8979 Orang	16.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	17.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						16.260.000,00							17.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	415 Orang	16.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	17.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						16.260.000,00							17.260.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	1135 Orang	16.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	17.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.598.389.750,00							1.691.875.605,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7416 Orang	1.598.389.750,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	1.691.875.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						22.284.000,00							32.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	12056 Orang	22.284.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	32.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						10.000.000,00							36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						212.135.600,00							222.742.380,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	212.135.600,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	222.742.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						7.200.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						266.360.000,00							512.379.966,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	266.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	512.379.966,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						10.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						32.581.515.065,00							37.549.731.764,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.581.515.065,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	37.549.731.764,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						50.200.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						16.750.000,00							451.880.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	61 Unit		57 Unit	27 Unit	16.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		59 Unit	451.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						10.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Unit	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						23.319.000,00							23.984.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.114 Orang		1.772 Orang	662 Orang	23.319.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1.351 Orang	23.984.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						17.318.000,00							17.833.900,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	147 Orang	17.318.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		290 Orang	17.833.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						9.000.000,00							9.881.550,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang		6 Orang	908 Orang	9.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Orang	9.881.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						21.600.000,00							22.680.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan		5 Tatanan	7 Tatanan	21.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		7 Tatanan	22.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						117.160.000,00							133.518.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	133.518.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.350.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.350.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						39.950.000,00					-		52.950.000,00	
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						39.950.000,00					-		52.950.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	105 Unit		85 Unit	90 Unit	24.950.000,00						95 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	15.000.000,00						6 Unit	22.950.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						15.000.000,00							22.950.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6 Unit		6 Unit	12 Unit	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Unit	22.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						24.950.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	105 Unit		85 Unit	106 Unit	24.950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		95 Unit	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						33.530.774.010,00					FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		40.550.320.997,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						33.530.774.010,00					FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		40.550.320.997,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-		-	-	4.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						4.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-		-	0 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	23.510.000,00						-	28.397.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	79.745.800,00						-	181.447.434,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						23.510.000,00							28.397.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	23.510.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	28.397.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						79.745.800,00							181.447.434,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	35 Paket	79.745.800,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	181.447.434,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						16.260.000,00							5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	16.260.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
8.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.267.747.800,00**							**1.175.419.455,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatn						***1.267.747.800,00***							***1.175.419.455,00***	
			999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	12 Persentase		3.48 Persentase	5.61 Persentase	1.267.747.800,00						7.74 Persentase	1.175.419.455,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						10.021.600,00					-		6.704.880,00	
		Tersedianya Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						10.021.600,00					-		6.704.880,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.021.600,00						1 Dokumen	6.704.880,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						10.021.600,00							6.704.880,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.021.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	6.704.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						539.180.200,00					-		414.241.275,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						539.180.200,00					-		414.241.275,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.983.600,00						1 Dokumen	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						11.983.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.983.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						718.546.000,00					-		754.473.300,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						718.546.000,00					-		754.473.300,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	420 Orang		330 Orang	350 Orang	718.546.000,00						370 Orang	754.473.300,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						718.546.000,00							754.473.300,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	420 Orang		330 Orang	120 Orang	718.546.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		370 Orang	754.473.300,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						539.180.200,00					-		414.241.275,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	14.733.000,00						-	11.671.275,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	512.463.600,00						-	402.570.000,00	
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						14.733.000,00							11.671.275,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	14.733.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	11.671.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						512.463.600,00							402.570.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	552 Orang	512.463.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	402.570.000,00	DINAS KESEHATAN
9.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**34.956.800,00**							**305.590.110,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman						***34.956.800,00***							***305.590.110,00***	
			1.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	34.956.800,00						100 Persentase	305.590.110,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						14.691.200,00					-		102.038.895,00	
		Tersedianya Dokumen Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						14.691.200,00					-		102.038.895,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.691.200,00						2 Dokumen	102.038.895,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						14.691.200,00							102.038.895,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	14.691.200,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	102.038.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						4.382.800,00					-		10.167.570,00	
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						4.382.800,00					-		10.167.570,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.382.800,00						2 Dokumen	10.167.570,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						4.382.800,00							10.167.570,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	4.382.800,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Dokumen	10.167.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00					-		10.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00					-		10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.500.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						5.882.800,00					-		182.883.645,00	
		Tersedianya Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						5.882.800,00					-		182.883.645,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit		80 Unit	80 Unit	5.882.800,00						80 Unit	182.883.645,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						5.882.800,00							182.883.645,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit		80 Unit	15 Unit	5.882.800,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		80 Unit	182.883.645,00	DINAS KESEHATAN
10.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***80.067.600,00***							***84.070.980,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	80.067.600,00						100 Persentase	84.070.980,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						38.828.000,00					-		40.769.400,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						38.828.000,00					-		40.769.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.828.000,00						1 Dokumen	40.769.400,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						38.828.000,00							40.769.400,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.828.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	40.769.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						41.239.600,00							43.301.580,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.239.600,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	43.301.580,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU						**36.793.224.800,00**							**48.597.274.367,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.793.224.800,00**							**48.597.274.367,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**36.793.224.800,00**							**48.597.274.367,00**	
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	10.000.000.000,00						-	8.925.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						10.000.000.000,00							8.925.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	8.925.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***26.793.224.800,00***							***39.672.274.367,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	26.793.224.800,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	39.672.274.367,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	26.793.224.800,00						15.4 (%)	39.672.274.367,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						33.530.774.010,00					-		40.550.320.997,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						33.530.774.010,00					-		40.550.320.997,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	22.076.185.800,00						-	34.948.703.417,00	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						22.076.185.800,00							34.948.703.417,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	22.076.185.800,00	Kab. Lampung Utara	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	34.948.703.417,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	4.717.039.000,00						-	4.723.570.950,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						4.717.039.000,00							4.723.570.950,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	4.717.039.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.723.570.950,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HM. RYACUDU
		PUSKESMAS KOTABUMI 1						**2.553.946.000,00**							**997.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.553.946.000,00**							**997.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.553.946.000,00**							**997.500,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.995.620.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.995.620.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.995.620.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***468.326.000,00***							***997.500,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	468.326.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	997.500,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	468.326.000,00						15.4 (%)	997.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						79.080.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	752 Orang	79.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	749 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	723 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2889 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						18.525.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	6741 Orang	18.525.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	26976 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	4796 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	8979 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	415 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	73 Orang	13.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	662 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	837 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						197.188.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	197.188.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.675.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.913.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.913.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						12.723.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	12.723.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.040.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	415 Orang	3.040.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.381.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.381.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						49.431.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	49.431.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***10.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 1
		PUSKESMAS KOTABUMI 2						**4.079.051.234,00**							**4.485.504.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.079.051.234,00**							**4.485.504.300,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.079.051.234,00**							**4.485.504.300,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.951.005.234,00						-	3.316.551.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.951.005.234,00							3.316.551.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.951.005.234,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	3.316.551.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***840.544.500,00***							***924.532.725,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	840.544.500,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	924.532.725,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	840.544.500,00						15.4 (%)	924.532.725,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						33.200.000,00							34.860.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	868 Orang	33.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	34.860.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						8.000.000,00							8.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	866 Orang	8.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	8.400.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						22.800.000,00							23.940.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	965 Orang	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	23.940.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						15.960.000,00							16.758.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	3312 Orang	15.960.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	16.758.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.580.000,00							36.309.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	7780 Orang	34.580.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	36.309.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						11.400.000,00							11.970.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	31135 Orang	11.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	11.970.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						17.100.000,00							17.955.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	5743 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	17.955.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						15.200.000,00							15.960.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	8979 Orang	15.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	15.960.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						2.850.000,00							2.992.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	479 Orang	2.850.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	2.992.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						27.360.000,00							30.096.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	84 Orang	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	30.096.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.190.000,00							19.099.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	764 Orang	18.190.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	19.099.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						17.100.000,00							17.955.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	966 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	17.955.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						303.068.000,00							318.221.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	303.068.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	318.221.400,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.310.000,00							9.775.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.310.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.775.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						27.360.000,00							28.728.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	28.728.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	997.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						72.390.000,00							76.009.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.390.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	76.009.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						141.839.000,00							160.795.950,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	141.839.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	160.795.950,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						11.300.000,00							11.865.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	11.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	11.865.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						27.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	84 Orang	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						95.047.500,00							99.799.875,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	95.047.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	99.799.875,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						95.047.500,00							99.799.875,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	95.047.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	99.799.875,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
18.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***120.634.000,00***							***126.665.700,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	120.634.000,00						100 Persentase	126.665.700,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						72.010.000,00							75.610.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.010.000,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	75.610.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						48.624.000,00							51.055.200,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.624.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	51.055.200,00	PUSKESMAS KOTABUMI 2
		PUSKESMAS WONOGIRI						**1.666.666.321,00**							**1.883.004.476,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.666.666.321,00**							**1.883.004.476,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.666.666.321,00**							**1.883.004.476,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	943.736.321,00						-	1.123.931.676,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						943.736.321,00							1.123.931.676,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	943.736.321,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.123.931.676,00	PUSKESMAS WONOGIRI
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***687.426.700,00***							***721.795.800,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	687.426.700,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	721.795.800,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	687.426.700,00						15.4 (%)	721.795.800,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.535.000,00							43.611.750,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	379 Orang	41.535.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	43.611.750,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.805.000,00							1.895.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	378 Orang	1.805.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	1.895.250,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	363 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						24.700.000,00							25.935.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1763 Orang	24.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	25.935.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						53.840.000,00							56.532.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	3653 Orang	53.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	56.532.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.830.000,00							11.371.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	13865 Orang	10.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	11.371.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						11.970.000,00							12.568.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	2153 Orang	11.970.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		71.650 Orang	12.568.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						15.900.000,00							16.695.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	4782 Orang	15.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		73.009 Orang	16.695.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						5.000.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	222 Orang	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		33.770 Orang	5.250.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.550.000,00							8.975.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	24 Orang	8.550.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	8.975.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.810.000,00							19.750.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	368 Orang	18.810.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	19.750.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.091.000,00							2.195.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	929 Orang	2.091.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	2.195.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						204.330.000,00							214.546.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	204.330.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	214.546.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						11.970.000,00							12.568.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.970.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	12.568.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						17.099.000,00							17.953.950,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.099.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	17.953.950,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						950.000,00							997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	997.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						34.865.000,00							36.608.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.865.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	36.608.250,00	PUSKESMAS WONOGIRI
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						95.648.700,00							100.431.100,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	95.648.700,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	100.431.100,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.700.000,00							5.985.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	24 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.985.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						30.000.000,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	31.500.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						93.803.000,00							98.493.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	93.803.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	98.493.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
21.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***22.583.300,00***							***23.711.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	22.583.300,00						100 Persentase	23.711.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.335.000,00							12.951.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.335.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	12.951.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.248.300,00							10.760.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.248.300,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.760.000,00	PUSKESMAS WONOGIRI
		PUSKESMAS MADUKORO						**3.006.826.000,00**							**3.888.941.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.006.826.000,00**							**3.888.941.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.006.826.000,00**							**3.888.941.000,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.040.000.000,00						-	2.825.432.400,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.040.000.000,00							2.825.432.400,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.040.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.825.432.400,00	PUSKESMAS MADUKORO
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***897.931.000,00***							***987.724.100,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	897.931.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	987.724.100,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	897.931.000,00						15.4 (%)	987.724.100,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						59.020.000,00							64.922.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	615 Orang	59.020.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	64.922.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						27.360.000,00							30.096.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	613 Orang	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	30.096.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						23.180.000,00							25.498.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	588 Orang	23.180.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	25.498.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						23.940.000,00							26.334.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2357 Orang	23.940.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	26.334.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						42.275.000,00							46.502.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5425 Orang	42.275.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	46.502.500,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						17.670.000,00							19.437.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	19495 Orang	17.670.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	19.437.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						17.480.000,00							19.228.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	3861 Orang	17.480.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	19.228.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						6.080.000,00							6.688.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	5957 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	6.688.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						6.080.000,00							6.688.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	332 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	6.688.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						28.500.000,00							31.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	59 Orang	28.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	31.350.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						41.800.000,00							45.980.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	526 Orang	41.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	45.980.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.900.000,00							2.090.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	1175 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	2.090.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						225.650.000,00							248.215.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.650.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	248.215.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						17.100.000,00							18.810.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	18.810.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						35.150.000,00							38.665.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.150.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	38.665.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						9.176.000,00							10.093.600,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.176.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.093.600,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						50.540.000,00							55.594.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.540.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	55.594.000,00	PUSKESMAS MADUKORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						193.020.000,00							212.322.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	193.020.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	212.322.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.830.000,00							11.913.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	11.913.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						19.000.000,00							20.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	500 Orang	19.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	20.900.000,00	PUSKESMAS MADUKORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						16.150.000,00							17.765.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	16.150.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	17.765.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						32.110.000,00							35.321.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	32.110.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	35.321.000,00	PUSKESMAS MADUKORO
24.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***62.815.000,00***							***69.096.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	62.815.000,00						100 Persentase	69.096.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						46.541.000,00							51.195.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.541.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	51.195.100,00	PUSKESMAS MADUKORO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						16.274.000,00							17.901.400,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.274.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	17.901.400,00	PUSKESMAS MADUKORO
		PUSKESMAS KALIBALANGAN						**2.828.600.000,00**							**3.404.190.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.828.600.000,00**							**3.404.190.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.828.600.000,00**							**3.404.190.000,00**	
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.950.000.000,00						-	2.486.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.950.000.000,00							2.486.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.950.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.486.000.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***748.450.000,00***							***781.619.000,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	748.450.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	781.619.000,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	748.450.000,00						15.4 (%)	781.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						65.610.000,00							68.760.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	560 Orang	65.610.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	68.760.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.900.000,00							1.992.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	560 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	1.992.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						3.800.000,00							3.990.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	560 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	3.990.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						14.820.000,00							15.300.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2483 Orang	14.820.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	15.300.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.200.000,00							35.600.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5162 Orang	34.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	35.600.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						3.800.000,00							3.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	16300 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	3.990.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						22.800.000,00							23.920.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	3407 Orang	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	23.920.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.800.000,00							3.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	5862 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	3.990.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.900.000,00							1.992.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	356 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	1.992.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						22.800.000,00							23.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	56 Orang	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	23.920.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						39.710.000,00							41.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	526 Orang	39.710.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	41.650.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.800.000,00							3.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	361 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	3.990.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						147.160.000,00							153.560.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	147.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	153.560.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						36.200.000,00							37.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	37.320.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						45.600.000,00							47.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	47.860.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						950.000,00							997.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	997.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						45.600.000,00							47.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	47.860.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						197.100.000,00							206.500.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	197.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	206.500.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						22.800.000,00							23.920.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	56 Orang	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	23.920.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						11.600.000,00							132.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	11.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	132.000.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						127.000.000,00							12.170.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	127.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	12.170.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
27.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***24.700.000,00***							***25.912.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	24.700.000,00						100 Persentase	25.912.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						1.900.000,00							1.992.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	1.992.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						22.800.000,00							23.920.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	23.920.000,00	PUSKESMAS KALIBALANGAN
		PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR						**2.045.872.000,00**							**2.137.865.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.045.872.000,00**							**2.137.865.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.045.872.000,00**							**2.137.865.600,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.368.620.000,00						-	1.510.551.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.368.620.000,00							1.510.551.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.368.620.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.510.551.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***591.344.000,00***							***610.611.200,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	591.344.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	610.611.200,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	591.344.000,00						15.4 (%)	610.611.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						49.140.000,00							51.597.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	350 Orang	49.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	51.597.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	332 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	306 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1233 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.000.000,00							19.950.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	3017 Orang	19.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	19.950.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	11780 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						31.640.000,00							33.222.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1825 Orang	31.640.000,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	33.222.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	4054 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	189 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.260.000,00							10.773.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	56 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	10.773.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.870.000,00							14.563.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	312 Orang	13.870.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	14.563.500,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	630 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						192.642.000,00							202.274.100,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	192.642.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	202.274.100,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						8.360.000,00							8.778.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	8.778.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.130.000,00							5.386.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.130.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	5.386.500,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						500.000,00							525.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	525.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						31.160.000,00							32.718.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	32.718.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						190.563.000,00							200.291.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	190.563.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	200.291.150,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	40 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						9.500.000,00							14.835.450,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.835.450,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						18.629.000,00							14.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	18.629.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.700.000,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
30.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***24.958.000,00***							***15.705.900,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	24.958.000,00						100 Persentase	15.705.900,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						14.958.000,00							15.705.900,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.958.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	15.705.900,00	PUSKESMAS BLAMBANGAN PAGAR
		PUSKESMAS BUMI AGUNG						**2.632.589.131,00**							**137.056.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.632.589.131,00**							**137.056.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.632.589.131,00**							**137.056.500,00**	
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.768.829.631,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.768.829.631,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.768.829.631,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
32.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***793.759.500,00***							***137.056.500,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	793.759.500,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	137.056.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	793.759.500,00						15.4 (%)	137.056.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						79.200.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	683 Orang	79.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	683 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	683 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2406 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						17.100.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5886 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	22892 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	4258 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	7909 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	297 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	24 Orang	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						17.480.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	608 Orang	17.480.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	630 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						282.871.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	838 Dokumen	282.871.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.630.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.630.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						760.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						130.435.000,00							137.056.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.435.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	137.056.500,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						154.345.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	154.345.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.040.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	25 Orang	3.040.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						4.085.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	4.085.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						54.723.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	54.723.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
33.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***10.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS BUMI AGUNG
		PUSKESMAS KETAPANG						**2.366.958.445,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.366.958.445,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.366.958.445,00**							**0,00**	
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.705.768.445,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.705.768.445,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.705.768.445,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***537.696.500,00***							***0,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	537.696.500,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	537.696.500,00						15.4 (%)	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						66.520.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	124150 Orang	66.520.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	745 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	745 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2867 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						11.115.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	224 Orang	11.115.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	420920 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	66 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	7315 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	6586 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.334.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	40 Orang	6.334.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						20.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	184 Orang	20.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	65894 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						296.639.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	296.639.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						11.210.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.210.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11.550.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						380.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						60.281.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	60.281.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						950.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	40 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						34.817.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	34.817.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						34.817.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	34.817.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
36.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***18.676.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	18.676.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.676.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.676.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KETAPANG
		PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU						**3.385.187.000,00**							**997.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.385.187.000,00**							**997.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.385.187.000,00**							**997.500,00**	
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.740.620.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.740.620.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.740.620.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
38.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***531.683.000,00***							***997.500,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	531.683.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	997.500,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	531.683.000,00						15.4 (%)	997.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.160.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	1840 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	454 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	439 Orang	1.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2148 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						27.930.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	313 Orang	27.930.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	16355 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	3017 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	2066 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	2176 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.260.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	100 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.065.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	310 Orang	12.065.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	456 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						301.228.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	301.228.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						20.710.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.710.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.815.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.815.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						31.160.000,00							0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	31.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Laporan	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						66.994.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	66.994.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	42 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						3.671.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	3.671.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
39.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***40.984.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	40.984.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						30.984.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.984.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TULANG BAWANG BARU
		PUSKESMAS NEGARA RATU						**3.237.232.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.237.232.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.237.232.000,00**							**0,00**	
40.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.572.600.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.572.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.572.600.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
41.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***530.564.500,00***							***0,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	530.564.500,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	530.564.500,00						15.4 (%)	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						74.800.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	656 Orang	74.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	651 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						3.040.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	1280 Orang	3.040.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						855.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1280 Orang	855.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.760.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5654 Orang	19.760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						825.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	1280 Orang	825.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						1.425.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1280 Orang	1.425.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	1280 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						855.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	1280 Orang	855.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						15.960.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	1280 Orang	15.960.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						26.030.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	590 Orang	26.030.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	2320 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						208.087.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.087.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11.875.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.875.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						951.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	951.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						85.659.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	85.659.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	42 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						49.447.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	49.447.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						49.447.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	49.447.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
42.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***53.765.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	53.765.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						9.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.050.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						44.715.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.715.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS NEGARA RATU
		PUSKESMAS GEDUNG NEGARA						**1.599.792.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.599.792.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.599.792.000,00**							**0,00**	
43.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.053.020.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.053.020.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.053.020.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
44.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***433.448.000,00***							***0,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	433.448.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	433.448.000,00						15.4 (%)	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						56.700.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	275 Orang	56.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	273 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	263 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1060 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.640.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2459 Orang	10.640.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	9740 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1735 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	1125 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	1125 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	26 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	236 Orang	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	1280 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						247.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	247.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.690.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.690.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.445.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.445.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						38.999.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	38.999.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						33.324.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	33.324.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						33.324.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	33.324.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
45.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***10.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS GEDUNG NEGARA
		PUSKESMAS OGAN LIMA						**1.520.657.477,00**							**950.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.520.657.477,00**							**950.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.520.657.477,00**							**950.000,00**	
46.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	935.567.877,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						935.567.877,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	935.567.877,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***446.349.600,00***							***950.000,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	446.349.600,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	950.000,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	446.349.600,00						15.4 (%)	950.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						58.722.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	376 Orang	58.722.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	356 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	342 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1324 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						6.840.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	3240 Orang	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	12652 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1960 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						9.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	4354 Orang	9.050.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	4354 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	34 Orang	3.990.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	335 Orang	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	677 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						250.361.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.361.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.385.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.385.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.332.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						9.969.600,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	9.969.600,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		-	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	950.000,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	34 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						1.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	1.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
48.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***71.900.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	71.900.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						61.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	61.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS OGAN LIMA
		PUSKESMAS TANJUNG RAJA						**3.576.198.500,00**							**3.814.858.425,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.576.198.500,00**							**3.814.858.425,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.576.198.500,00**							**3.814.858.425,00**	
49.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.670.620.000,00						-	2.864.001.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.670.620.000,00							2.864.001.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.670.620.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	2.864.001.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
50.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***869.621.500,00***							***913.102.575,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	869.621.500,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	913.102.575,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	869.621.500,00						15.4 (%)	913.102.575,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						120.080.000,00							126.084.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	555 Orang	120.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11.000 Orang	126.084.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						17.245.000,00							18.107.250,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	553 Orang	17.245.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11.000 Orang	18.107.250,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5.415.000,00							5.685.750,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	534 Orang	5.415.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		9.950 Orang	5.685.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						9.595.000,00							10.074.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2056 Orang	9.595.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		43.000 Orang	10.074.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.160.000,00							12.768.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5323 Orang	12.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		135.000 Orang	12.768.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						9.975.000,00							10.473.750,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	21489 Orang	9.975.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		218.120 Orang	10.473.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.830.000,00							11.371.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	4048 Orang	10.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		71.650 Orang	11.371.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						14.440.000,00							15.162.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	7190 Orang	14.440.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		73.009 Orang	15.162.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.805.000,00							1.895.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	332 Orang	1.805.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		33.770 Orang	1.895.250,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						7.980.000,00							8.379.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	58 Orang	7.980.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		44.160 Orang	8.379.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.455.000,00							8.877.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	428 Orang	8.455.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6.564 Orang	8.877.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.610.000,00							3.790.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	555 Orang	3.610.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		14.400 Orang	3.790.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						277.555.000,00							291.432.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	277.555.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	291.432.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.600.000,00							7.980.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	7.980.000,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.010.000,00							16.810.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.010.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	16.810.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.330.000,00							1.396.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.330.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	1.396.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						82.555.000,00							86.682.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.555.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	86.682.750,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						222.796.500,00							233.936.325,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	222.796.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	233.936.325,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.610.000,00							3.790.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	54 Orang	3.610.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.790.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						3.230.000,00							3.391.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	3.230.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.391.500,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						36.005.000,00							37.805.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	36.005.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	37.805.250,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
51.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***32.347.000,00***							***33.964.350,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	32.347.000,00						100 Persentase	33.964.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	-	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						32.347.000,00							33.964.350,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.347.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	33.964.350,00	PUSKESMAS TANJUNG RAJA
		PUSKESMAS BUKIT KEMUNING						**3.483.308.668,00**							**3.845.149.850,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.483.308.668,00**							**3.845.149.850,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.483.308.668,00**							**3.845.149.850,00**	
52.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.597.981.668,00						-	2.919.357.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.597.981.668,00							2.919.357.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.597.981.668,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.919.357.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***826.381.000,00***							***863.899.550,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	826.381.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	863.899.550,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	826.381.000,00						15.4 (%)	863.899.550,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						49.160.000,00							51.618.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	719 Orang	49.160.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	51.618.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						9.120.000,00							9.576.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	716 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	9.576.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						7.410.000,00							7.780.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	692 Orang	7.410.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	7.780.500,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2663 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						46.740.000,00							49.077.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	6896 Orang	46.740.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	49.077.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						9.120.000,00							9.576.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	27873 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	9.576.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	5308 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						9.975.000,00							10.473.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	9314 Orang	9.975.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	10.473.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						9.975.000,00							10.473.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	431 Orang	9.975.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	10.473.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						15.390.000,00							16.159.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	75 Orang	15.390.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	16.159.500,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						24.890.000,00							26.134.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	559 Orang	24.890.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	26.134.500,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						9.120.000,00							9.576.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	878 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	9.576.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						347.276.000,00							364.639.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	347.276.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	364.639.800,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.975.000,00							10.473.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.975.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.473.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						9.310.000,00							9.975.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.310.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.975.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						675.000,00							708.750,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	675.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	708.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						63.935.000,00							63.131.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.935.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	63.131.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						165.175.000,00							173.433.750,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	165.175.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	173.433.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.220.000,00							7.581.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	75 Orang	7.220.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	7.581.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						14.155.000,00							14.862.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	14.155.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.862.750,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						38.000.000,00							39.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	39.900.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
54.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***20.756.000,00***							***21.793.800,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	20.756.000,00						100 Persentase	21.793.800,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						3.420.000,00							3.591.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.420.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	3.591.000,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						17.336.000,00							18.202.800,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.336.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	18.202.800,00	PUSKESMAS BUKIT KEMUNING
		PUSKESMAS PEKURUN						**1.200.421.836,00**							**1.442.008.595,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.200.421.836,00**							**1.442.008.595,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.200.421.836,00**							**1.442.008.595,00**	
55.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	889.345.836,00						-	1.115.379.295,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						889.345.836,00							1.115.379.295,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	889.345.836,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.115.379.295,00	PUSKESMAS PEKURUN
56.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***225.266.000,00***							***236.528.800,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	225.266.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	236.528.800,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	225.266.000,00						15.4 (%)	236.528.800,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.620.000,00							30.051.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	226 Orang	28.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	30.051.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	207 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	199 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	963 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.095.000,00							20.049.750,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	1988 Orang	19.095.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	20.049.750,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	8028 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1531 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	2686 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	124 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.700.000,00							5.985.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	22 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	5.985.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.450.000,00							10.972.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	197 Orang	10.450.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	10.972.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	309 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						48.502.000,00							50.927.100,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.502.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	50.927.100,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.880.000,00							10.374.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.880.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.374.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						8.360.000,00							8.778.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	8.778.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						582.000,00							611.100,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	582.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	611.100,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						9.430.000,00							9.901.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.430.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.901.500,00	PUSKESMAS PEKURUN
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						6.505.000,00							6.830.250,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	6.505.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	6.830.250,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						570.000,00							598.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	570.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	598.500,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						760.000,00							798.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	798.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						9.812.000,00							10.302.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	9.812.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.302.600,00	PUSKESMAS PEKURUN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	52.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN
57.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***25.810.000,00***							***27.100.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	25.810.000,00						100 Persentase	27.100.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	PUSKESMAS PEKURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						15.810.000,00							16.600.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.810.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	16.600.500,00	PUSKESMAS PEKURUN
		PUSKESMAS CEMPAKA						**1.481.267.000,00**							**2.000.262.250,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.481.267.000,00**							**2.000.262.250,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.481.267.000,00**							**2.000.262.250,00**	
58.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	891.052.000,00						-	1.296.763.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						891.052.000,00							1.296.763.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	891.052.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.296.763.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***485.970.000,00***							***565.919.000,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	485.970.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	565.919.000,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	485.970.000,00						15.4 (%)	565.919.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						36.735.000,00							54.044.250,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	200 Orang	36.735.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	54.044.250,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						5.130.000,00							5.899.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	1 Orang	5.130.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	5.899.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5.130.000,00							5.899.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	120 Orang	5.130.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	5.899.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.260.000,00							11.799.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	2103 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	11.799.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.080.000,00							28.842.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	1635 Orang	25.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	28.842.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.130.000,00							5.899.500,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	110 Orang	5.130.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	5.899.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.260.000,00							11.799.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1193 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	11.799.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						7.965.000,00							9.159.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	2103 Orang	7.965.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	9.159.750,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						7.965.000,00							9.159.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	356 Orang	7.965.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	9.159.750,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						17.100.000,00							19.665.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	56 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	19.665.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						25.810.000,00							35.581.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	537 Orang	25.810.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	35.581.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						9.310.000,00							11.799.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	261 Orang	9.310.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	11.799.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						117.992.000,00							135.690.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.992.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	135.690.800,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						6.460.000,00							7.429.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.460.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	7.429.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.043.000,00							18.449.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.043.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	18.449.450,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						190.000,00							280.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	280.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						70.395.000,00							80.954.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.395.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	80.954.250,00	PUSKESMAS CEMPAKA
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						79.930.000,00							91.919.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	79.930.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	91.919.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							1.092.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	1.092.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.260.000,00							11.799.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	76 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	11.799.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						18.430.000,00							21.194.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	18.430.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	21.194.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						38.190.000,00							43.918.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	38.190.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	43.918.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
60.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***65.500.000,00***							***81.224.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	65.500.000,00						100 Persentase	81.224.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.130.000,00							5.899.500,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.130.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	5.899.500,00	PUSKESMAS CEMPAKA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						60.370.000,00							75.325.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.370.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	75.325.000,00	PUSKESMAS CEMPAKA
		PUSKESMAS TATA KARYA						**2.162.324.000,00**							**332.594.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.162.324.000,00**							**332.594.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.162.324.000,00**							**332.594.500,00**	
61.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.729.348.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.729.348.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.729.348.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
62.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***409.533.000,00***							***332.594.500,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	409.533.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	332.594.500,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	409.533.000,00						15.4 (%)	332.594.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						44.820.000,00							47.061.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	548 Orang	44.820.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	47.061.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						855.000,00							30.096.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	519 Orang	855.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	30.096.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						950.000,00							25.498.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	518 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	25.498.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						855.000,00							26.334.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1929 Orang	855.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	26.334.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						14.250.000,00							14.962.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	4722 Orang	14.250.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	14.962.500,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						890.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	18441 Orang	890.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						980.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	2857 Orang	980.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	6092 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	279 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.260.000,00							10.773.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	52 Orang	10.260.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	10.773.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						15.390.000,00							16.159.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	488 Orang	15.390.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	16.159.500,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	987 Orang	570.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						140.140.000,00							147.147.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	147.147.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.120.000,00							9.576.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.576.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.370.000,00							4.588.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.370.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	4.588.500,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						206.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						48.165.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.165.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						95.387.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	95.387.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						380.000,00							399.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	52 Orang	380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	399.000,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						6.840.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						15.960.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	15.960.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
63.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***19.738.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	19.738.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						3.475.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.475.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						16.263.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.263.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS TATA KARYA
		PUSKESMAS ULAK RENGAS						**1.513.927.100,00**							**43.254.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.513.927.100,00**							**43.254.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.513.927.100,00**							**43.254.000,00**	
64.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.056.624.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.056.624.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.056.624.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
65.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***403.282.100,00***							***43.254.000,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	403.282.100,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	43.254.000,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	403.282.100,00						15.4 (%)	43.254.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						22.194.000,00							43.254.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	162 Orang	22.194.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		11.000 Orang	43.254.000,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						950.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	319 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						950.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	323 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						950.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1235 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						22.230.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2796 Orang	22.230.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	11347 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						6.840.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	2022 Orang	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	3757 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	167 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.880.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	29 Orang	9.880.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	289 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.040.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	398 Orang	3.040.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						140.938.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.938.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.710.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.710.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						380.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						22.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						114.315.100,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	114.315.100,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.040.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	29 Orang	3.040.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						29.830.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	29.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						9.975.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	9.975.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
66.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***44.331.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	44.331.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						9.880.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.880.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						34.451.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.451.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ULAK RENGAS
		PUSKESMAS KARANG SARI						**1.343.478.720,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.343.478.720,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.343.478.720,00**							**0,00**	
67.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	983.474.720,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						983.474.720,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	983.474.720,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
68.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***226.303.000,00***							***0,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	226.303.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	226.303.000,00						15.4 (%)	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						23.380.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	32 Orang	23.380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	32 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	90 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	900 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.830.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2479 Orang	10.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	70 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	40 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	40 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.080.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	26 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	50 Orang	3.990.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						122.871.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	122.871.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						6.270.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.270.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.660.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.660.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						162.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	162.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						760.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						32.300.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	32.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						32.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	32.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
69.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***11.401.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	11.401.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.401.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.401.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KARANG SARI
		PUSKESMAS BATU NANGKOP						**1.736.315.383,00**							**2.158.187.677,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.736.315.383,00**							**2.158.187.677,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.736.315.383,00**							**2.158.187.677,00**	
70.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.077.055.383,00						-	1.452.577.602,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.077.055.383,00							1.452.577.602,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.077.055.383,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.452.577.602,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
71.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***609.670.000,00***							***629.729.525,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	609.670.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	629.729.525,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	609.670.000,00						15.4 (%)	629.729.525,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	294 Orang	19.218.000,00						290 Orang	19.828.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						47.280.000,00							48.280.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	288 Orang	47.280.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	48.280.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						6.080.000,00							6.140.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	287 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	6.140.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						9.120.000,00							9.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	277 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	9.880.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						27.235.000,00							27.235.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1067 Orang	27.235.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	27.235.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.890.000,00							13.993.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2762 Orang	13.890.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	13.993.500,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.090.000,00							2.730.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	11149 Orang	2.090.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	2.730.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						29.830.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	2126 Orang	29.830.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	30.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						9.120.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	3730 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						9.120.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	173 Orang	9.120.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						11.400.000,00							11.970.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	30 Orang	11.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	11.970.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.620.000,00							19.473.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	228 Orang	18.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	19.473.750,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.755.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	346 Orang	2.755.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						136.140.000,00							142.213.050,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	142.213.050,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						8.740.000,00							9.177.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.177.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						14.220.000,00							14.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.220.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	14.990.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		290 Orang	0,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.140.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	1.200.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						33.630.000,00							34.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.630.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	34.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						185.750.000,00							193.056.675,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	185.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	193.056.675,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						4.750.000,00							5.510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	4.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.510.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.160.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	30 Orang	12.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	13.000.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						12.540.000,00							33.880.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	12.540.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	33.880.550,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						32.300.000,00							33.880.550,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	32.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	33.880.550,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
72.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***31.350.000,00***							***32.000.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	31.350.000,00						100 Persentase	32.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						13.200.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	13.500.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.150.000,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.150.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	18.500.000,00	PUSKESMAS BATU NANGKOP
		PUSKESMAS KOTABUMI UDIK						**1.716.887.232,00**							**1.911.935.088,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.716.887.232,00**							**1.911.935.088,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.716.887.232,00**							**1.911.935.088,00**	
73.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.140.740.232,00						-	1.306.980.738,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.140.740.232,00							1.306.980.738,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.140.740.232,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.306.980.738,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
74.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***467.772.000,00***							***491.160.600,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	467.772.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	491.160.600,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	467.772.000,00						15.4 (%)	491.160.600,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						20.400.000,00							21.420.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	285 Orang	20.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	21.420.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	260 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	247 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	247 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.650.000,00							26.932.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2507 Orang	25.650.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	26.932.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	9733 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							7.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1851 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	3382 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	156 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						11.400.000,00							11.970.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	27 Orang	11.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	11.970.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						19.000.000,00							19.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	207 Orang	19.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	19.950.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	322 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						178.620.000,00							187.551.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	178.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	187.551.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.700.000,00							5.985.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	5.985.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						9.500.000,00							9.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.975.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						770.000,00							808.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	770.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	808.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						29.640.000,00							31.122.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.640.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	31.122.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						125.556.000,00							131.833.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	125.556.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	131.833.800,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.400.000,00							11.970.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2678 Orang	11.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	11.970.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						15.580.000,00							16.359.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	15.580.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	16.359.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						8.006.000,00							8.406.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	8.006.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	8.406.300,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
75.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***39.975.000,00***							***41.973.750,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	39.975.000,00						100 Persentase	41.973.750,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.940.000,00							23.037.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.940.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	23.037.000,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.035.000,00							18.936.750,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.035.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	18.936.750,00	PUSKESMAS KOTABUMI UDIK
		PUSKESMAS SUBIK						**1.801.413.672,00**							**1.868.888.355,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.801.413.672,00**							**1.868.888.355,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.801.413.672,00**							**1.868.888.355,00**	
76.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	1.142.511.672,00						-	1.177.041.255,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.142.511.672,00							1.177.041.255,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.142.511.672,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	1.177.041.255,00	PUSKESMAS SUBIK
77.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***588.902.000,00***							***618.347.100,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	588.902.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	618.347.100,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	588.902.000,00						15.4 (%)	618.347.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						43.543.000,00							45.720.150,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	50 Orang	43.543.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	45.720.150,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	567 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	11 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	60 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						6.840.000,00							7.182.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	11 Orang	6.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	7.182.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						9.050.000,00							9.502.500,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	10 Orang	9.050.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	9.502.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	15 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	12 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	12 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.750.000,00							4.987.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	7 Orang	4.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	4.987.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.070.000,00							10.573.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	17 Orang	10.070.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	10.573.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	15 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						104.076.000,00							109.279.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	104.076.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	109.279.800,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.180.000,00							4.389.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.180.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	4.389.000,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.090.000,00							2.194.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.090.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	2.194.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						306.350.000,00							321.667.500,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	306.350.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	321.667.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.003.000,00							52.503.150,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.003.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	52.503.150,00	PUSKESMAS SUBIK
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						30.000.000,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	31.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
78.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***10.000.000,00***							***10.500.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00						100 Persentase	10.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	10.500.000,00	PUSKESMAS SUBIK
		PUSKESMAS ABUNG KUNANG						**1.101.275.718,00**							**1.304.667.807,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.101.275.718,00**							**1.304.667.807,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.101.275.718,00**							**1.304.667.807,00**	
79.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	705.573.718,00						-	889.180.707,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						705.573.718,00							889.180.707,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	705.573.718,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	889.180.707,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
80.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***348.278.000,00***							***365.691.900,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	348.278.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	365.691.900,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	348.278.000,00						15.4 (%)	365.691.900,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						48.690.000,00							51.124.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	156 Orang	48.690.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	51.124.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						950.000,00							997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						950.000,00							997.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	10 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						950.000,00							997.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	10 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.150.000,00							4.357.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	422 Orang	4.150.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	4.357.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						21.280.000,00							22.344.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	224 Orang	21.280.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	22.344.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	10 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						7.980.000,00							8.379.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	84 Orang	7.980.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	8.379.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						7.980.000,00							8.379.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	84 Orang	7.980.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	8.379.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.140.000,00							1.197.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	8 Orang	1.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	1.197.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.375.000,00							8.793.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	80 Orang	8.375.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	8.793.750,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	10 Orang	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						70.819.000,00							74.359.950,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.819.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	74.359.950,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.620.000,00							19.551.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	19.551.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.800.000,00							3.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	3.990.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						713.000,00							748.650,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	713.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	748.650,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.485.000,00							21.509.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.485.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	21.509.250,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						123.606.000,00							129.786.300,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	123.606.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	129.786.300,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						760.000,00							798.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	798.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						14.250.000,00							14.962.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	14.250.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.962.500,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						2.660.000,00							2.793.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	2.660.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	2.793.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
81.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***34.694.000,00***							***36.428.700,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	34.694.000,00						100 Persentase	36.428.700,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.380.000,00							20.349.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	20.349.000,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						15.314.000,00							16.079.700,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.314.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	16.079.700,00	PUSKESMAS ABUNG KUNANG
		PUSKESMAS KUBU HITU						**1.367.239.201,00**							**674.602.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.367.239.201,00**							**674.602.950,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.367.239.201,00**							**674.602.950,00**	
82.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	694.070.201,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						694.070.201,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	694.070.201,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS KUBU HITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
83.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***540.069.000,00***							***567.072.450,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	540.069.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	567.072.450,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	540.069.000,00						15.4 (%)	567.072.450,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	231.135.600,00						1 Dokumen	242.692.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	294 Orang	19.218.000,00						290 Orang	19.828.900,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.114 Orang		1.772 Orang	1.526 Orang	30.919.000,00						1.351 Orang	31.964.950,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						30.690.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	237 Orang	30.690.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						12.250.000,00							12.862.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	220 Orang	12.250.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	12.862.500,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5.700.000,00							5.985.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	213 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	5.985.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						30.690.000,00							32.224.500,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	818 Orang	30.690.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	32.224.500,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.300.000,00							13.965.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	2119 Orang	13.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	13.965.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						21.360.000,00							22.428.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	8554 Orang	21.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	22.428.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						22.800.000,00							23.940.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1632 Orang	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	23.940.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						9.500.000,00							9.975.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	2862 Orang	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	9.975.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						5.700.000,00							5.985.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	132 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	5.985.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.500.000,00							9.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	21 Orang	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	9.975.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						14.600.000,00							15.330.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	211 Orang	14.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	15.330.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.900.000,00							1.995.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	329 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	1.995.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						136.760.000,00							143.598.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.760.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	143.598.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.300.000,00							13.965.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.300.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	13.965.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						19.000.000,00							19.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	19.950.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						9.500.000,00							9.975.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	9.975.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						7.600.000,00							7.980.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.114 Orang		1.772 Orang	211 Orang	7.600.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1.351 Orang	7.980.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.900.000,00							1.995.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	281 Orang		299 Orang	329 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		290 Orang	1.995.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						5.700.000,00							5.985.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	5.985.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						42.000.000,00							44.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	44.100.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						167.578.000,00							175.956.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	167.578.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	175.956.900,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						11.700.000,00							12.285.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	11.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	12.285.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.800.000,00							3.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	21 Orang	3.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.990.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						19.531.000,00							20.507.550,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	19.531.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	20.507.550,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						22.800.000,00							23.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	22.800.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	23.940.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
84.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***34.010.000,00***							***35.710.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	34.010.000,00						100 Persentase	35.710.500,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						15.010.000,00							15.760.500,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.010.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	15.760.500,00	PUSKESMAS KUBU HITU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						19.000.000,00							19.950.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	19.950.000,00	PUSKESMAS KUBU HITU
		PUSKESMAS SEMULI RAYA						**2.675.884.746,00**							**997.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.675.884.746,00**							**997.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.675.884.746,00**							**997.500,00**	
85.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	2.134.853.746,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.134.853.746,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.134.853.746,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
86.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***393.681.000,00***							***997.500,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	393.681.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	393.681.000,00						15.4 (%)	997.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.651.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	517 Orang	28.651.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	514 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	498 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1969 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						31.730.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	4628 Orang	31.730.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	18.522 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	3417 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	6.166 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						9.050.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	286 Orang	9.050.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	62 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	455 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	521 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						173.838.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	173.838.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.890.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.890.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						19.380.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						950.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						18.840.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	18.840.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						950.000,00							997.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 dokumen Laporan	950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	997.500,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2795 Orang	1.900.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.752.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.752.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
87.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***80.700.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	80.700.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						70.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS SEMULI RAYA
		PUSKESMAS MULYOREJO						**1.310.341.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.310.341.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.310.341.000,00**							**0,00**	
88.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	938.756.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						938.756.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	938.756.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
89.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***273.445.000,00***							***0,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	273.445.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	273.445.000,00						15.4 (%)	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						26.550.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	181 Orang	26.550.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	180 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						10.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	174 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						6.080.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	688 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						5.700.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	1618 Orang	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	6473 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	1194 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						6.080.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	2155 Orang	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.420.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	18 Orang	3.420.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.895.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	159 Orang	3.895.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						76.685.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.685.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.945.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.945.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.960.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						4.560.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						15.295.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.295.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						73.878.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	73.878.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.117.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1 Orang	3.117.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						27.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						27.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	27.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
90.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***14.700.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	14.700.000,00						100 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						6.080.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.080.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.620.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MULYOREJO
		PUSKESMAS KEMALO ABUNG						**1.493.789.000,00**							**1.568.477.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.493.789.000,00**							**1.568.477.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.493.789.000,00**							**1.568.477.650,00**	
91.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**152.977.557.330,19**							**151.122.301.403,00**	
			-	-		-	-	791.800.000,00						-	856.590.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
		-						51.469.194.684,00					-		34.065.336.673,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	51.469.194.684,00						-	34.065.336.673,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						791.800.000,00							856.590.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	791.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari BLUD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	856.590.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
92.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**91.185.487.625,00**							**98.931.469.646,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***669.599.000,00***							***628.387.450,00***	
			999.Angka Kematian Ibu (AKI)	40 (per 100.000 kelahiran hidup)		50 (per 100.000 kelahiran hidup)	49.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	669.599.000,00						48.5 (per 100.000 kelahiran hidup)	628.387.450,00	
			999.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.46 (%)		16.72 (%)	15.87 (%)	669.599.000,00						15.4 (%)	628.387.450,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	130.000 Orang	565.430.000,00						135.000 Orang	500.402.250,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	42.500 Orang	312.890.000,00						43.000 Orang	249.691.750,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	9.800 Orang	1.315.135.000,00						9.950 Orang	1.328.644.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	938.670.000,00						1 Dokumen	814.997.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.132.911.000,00						1 Dokumen	2.997.935.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.640.000,00						1 Dokumen	211.414.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	610.923.000,00						1 Dokumen	758.380.366,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.515.000,00						1 Dokumen	159.166.350,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	277.765.000,00						11.000 Orang	175.412.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	10.900 Orang	1.290.065.000,00						11.000 Orang	830.439.900,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	13.715 Orang	235.530.000,00						14.400 Orang	139.343.500,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	7.416 Orang	2.022.399.750,00						6.564 Orang	2.024.315.855,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	43.650 Orang	306.739.000,00						44.160 Orang	236.901.750,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	33.380 Orang	207.580.000,00						33.770 Orang	112.772.250,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	72.155 Orang	254.390.000,00						73.009 Orang	156.439.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	71.440 Orang	321.005.000,00						71.650 Orang	242.856.500,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	216.430 Orang	263.630.000,00						218.120 Orang	167.982.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						35.745.000,00							37.532.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	343 Orang	35.745.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	37.532.250,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.400 Orang		10.800 Orang	341 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		11.000 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.100 Orang		9.650 Orang	330 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		9.950 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						7.000.000,00							7.350.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.000 Orang		42.100 Orang	1115 Orang	7.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		43.000 Orang	7.350.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						7.980.000,00							8.379.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145.000 Orang		125.000 Orang	5262 Orang	7.980.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		135.000 Orang	8.379.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.310 Orang		221.000 Orang	12289 Orang	3.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		218.120 Orang	0,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						17.100.000,00							17.955.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73.000 Orang		71.110 Orang	2267 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		71.650 Orang	17.955.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						1.140.000,00							1.197.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.658 Orang		71.289 Orang	4090 Orang	1.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		73.009 Orang	1.197.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.140.000,00							1.197.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.360 Orang		32.980 Orang	189 Orang	1.140.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		33.770 Orang	1.197.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.825.000,00							13.466.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45.160 Orang		43.120 Orang	33 Orang	12.825.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		44.160 Orang	13.466.250,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						18.620.000,00							19.551.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.416 Orang		8.610 Orang	301 Orang	18.620.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6.564 Orang	19.551.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						17.100.000,00							17.955.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.129 Orang		13.062 Orang	381 Orang	17.100.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14.400 Orang	17.955.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						194.075.000,00							203.778.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	194.075.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	203.778.750,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.060.000,00							14.763.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.060.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	14.763.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.316.000,00							7.681.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.316.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	7.681.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						285.000,00							299.250,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	285.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	299.250,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						35.000.000,00							36.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	36.750.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57.614.763.615,00					-		58.328.198.649,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.138.282.900,00						-	2.544.009.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	695.496.500,00						-	552.739.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	1.132.197.000,00						-	579.102.675,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	156.827.000,00						-	109.519.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	95.750.000,00						-	77.656.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						195.475.000,00							205.248.750,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	195.475.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	205.248.750,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						11.400.000,00							11.970.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	11.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	11.970.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.420.000,00							3.591.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	35 Orang	3.420.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	3.591.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						31.110.000,00							38.875.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	31.110.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	38.875.200,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						74.048.000,00							38.875.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	74.048.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	38.875.200,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
93.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.016.544.900,00**							**676.631.180,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						***150.000,00***							***10.773.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	150.000,00						100 Persentase	10.773.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	
		Tersedianya Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						349.351.000,00					-		244.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	349.351.000,00						1 Dokumen	244.885.600,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						628.365.900,00					-		390.976.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	628.365.900,00						1 Dokumen	390.976.180,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						150.000,00							10.773.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.773.000,00	PUSKESMAS KEMALO ABUNG
		DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI						**109.328.101.255,14**							**67.282.208.745,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.328.101.255,14**							**67.282.208.745,70**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**109.328.101.255,14**							**67.282.208.745,70**	
94.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.036.150.455,14**							**9.742.832.296,70**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah						***10.036.150.455,14***							***9.591.582.296,70***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65.2-65.2 Nilai		64.3-64.3 Nilai	64.5-64.5 Nilai	10.036.150.455,14						64.7-64.7 Nilai	9.591.582.296,70	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.605.235,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		84.700.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.605.235,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		84.700.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.250.000,00						1 Berita Acara	24.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	26.320.125,00						2 Dokumen	18.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.560.540,00						1 Dokumen	12.100.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.729.815,00						1 Dokumen	12.100.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.744.755,00						4 Laporan	18.150.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.320.125,00							18.150.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	26.320.125,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	18.150.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						12.729.815,00							12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.729.815,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	12.100.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.560.540,00							12.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.560.540,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	12.100.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.744.755,00							18.150.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	7 Laporan	12.744.755,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	18.150.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.250.000,00							24.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	24.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.943.350.507,14					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		8.217.967.426,28	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.943.350.507,14					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		8.217.967.426,28	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	573.240.000,00						4 Dokumen	430.514.694,28	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	42.904.900,00						4 Dokumen	30.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	7.327.205.607,14						74 Orang/bulan	7.757.202.732,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.327.205.607,14							7.757.202.732,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	7.327.205.607,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		74 Orang/bulan	7.757.202.732,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						573.240.000,00							430.514.694,28	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	573.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	430.514.694,28	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						42.904.900,00							30.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	42.904.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	30.250.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	50.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Orang	50.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						288.920.970,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		308.063.612,82	
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						288.920.970,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		308.063.612,82	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	209.950.000,00						4 Laporan	201.263.612,82	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.954.000,00						1 Paket	36.300.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.909.670,00						1 Paket	30.250.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.363.100,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.521.600,00						2 Paket	18.150.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.222.600,00						1 Paket	12.100.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.363.100,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.363.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	10.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.521.600,00							18.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.521.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	18.150.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.222.600,00							12.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.222.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	12.100.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.954.000,00							36.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.954.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	36.300.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.909.670,00							30.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.909.670,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	30.250.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						209.950.000,00							201.263.612,82	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	209.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	201.263.612,82	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						429.506.440,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah						429.506.440,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	116.000.000,00						3 Unit	6.050.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	54.450.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	313.506.440,00						1 Unit	0,00	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						116.000.000,00							6.050.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	145 Unit	116.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	6.050.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						313.506.440,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	313.506.440,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	0,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							54.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	54.450.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						967.800.000,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		590.236.257,60	
		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						967.800.000,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		590.236.257,60	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	48.000.000,00						4 Laporan	166.736.257,60	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	919.800.000,00						4 Laporan	423.500.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.000.000,00							166.736.257,60	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	166.736.257,60	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						919.800.000,00							423.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	919.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	423.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.967.303,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		431.365.000,00	
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						287.967.303,00					Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		431.365.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	80.523.180,00						3 Unit	60.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	187.544.123,00						28 Unit	310.365.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	19.900.000,00						5 Unit	60.500.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						187.544.123,00							310.365.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	187.544.123,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		28 Unit	310.365.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						80.523.180,00							60.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	80.523.180,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	60.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.900.000,00							60.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	30 Unit	19.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	60.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
95.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**8.000.000.000,00**							**2.175.010.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***8.000.000.000,00***							***1.775.010.000,00***	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	65.00 Persentase		57.00 Persentase	60.00 Persentase	8.000.000.000,00						62.00 Persentase	1.775.010.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	10.00 Persentase		6.00 Persentase	7.00 Persentase	8.000.000.000,00						8.00 Persentase	1.775.010.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.660.931.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		1.180.010.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.660.931.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		1.180.010.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	1.660.931.000,00						0.5 KM	480.010.000,00	
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						1.660.931.000,00							480.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.5 KM		0.5 KM	0,5 KM	1.660.931.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		0.5 KM	480.010.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.339.069.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		995.000.000,00	
		Panjang jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam keadaan baik						6.339.069.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		995.000.000,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.831.850.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	50.000.000,00						2 Lembaga	100.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM		2 KM	2 KM	420.744.000,00						2 KM	200.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM		1 KM	1 KM	4.036.475.000,00						1 KM	495.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						4.036.475.000,00							495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM		1 KM	2,1 KM	4.036.475.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 KM	495.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						420.744.000,00							200.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM		2 KM	2 KM	420.744.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 KM	200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Lembaga	100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						1.831.850.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	1.831.850.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
96.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**90.991.952.300,00**							**55.153.571.449,00**	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***88.991.952.300,00***							***53.153.571.449,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan	56.45 Persentase		48.62 Persentase	50.57 Persentase	88.991.952.300,00						52.52 Persentase	53.153.571.449,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						90.991.952.300,00					Masyarakat, Pengguna Jalan, Pelaku Usaha dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		55.153.571.449,00	
		Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik						90.991.952.300,00					Masyarakat, Pengguna Jalan, Pelaku Usaha dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		55.153.571.449,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	2.809.180.200,00						15 Dokumen	2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	25 KM		25 KM	25 KM	2.000.000.000,00						25 KM	3.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1025.27 KM		1025.27 KM	1025.27 KM	1.099.999.900,00						1025.27 KM	2.100.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	17 KM		15 KM	15 KM	0,00						17 KM	17.653.571.449,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	25 KM		20 KM	20 KM	38.474.353.200,00						25 KM	13.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM		30 KM	30 KM	1.500.000.000,00						30 KM	6.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM		10 KM	10 KM	33.950.000.000,00						10 KM	1.500.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter		10 Meter	10 Meter	2.558.419.000,00						10 Meter	4.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	10 Meter		10 Meter	10 Meter	5.500.000.000,00						10 Meter	1.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		10 Meter	10 Meter	1.100.000.000,00						10 Meter	2.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	18 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2.809.180.200,00							2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen		15 Dokumen	21 Dokumen	2.809.180.200,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		15 Dokumen	2.900.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						1.099.999.900,00							2.100.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1025.27 KM		1025.27 KM	1025,27 KM	1.099.999.900,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1025.27 KM	2.100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						1.500.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM		30 KM	2,5 KM	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 KM	6.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						0,00							17.653.571.449,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	17 KM		15 KM	0 KM	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		17 KM	17.653.571.449,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						38.474.353.200,00							13.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	25 KM		20 KM	20 KM	38.474.353.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		25 KM	13.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						5.500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	10 Meter		10 Meter	10 Meter	5.500.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Sari || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tulung Singkip || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Way Wakak || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Meter	1.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						1.100.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		10 Meter	10 Meter	1.100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Sumber Tani || 1	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Meter	2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						33.950.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM		10 KM	8.25 KM	33.950.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Ogan Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Merambung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Mulyo Rejo I || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Hujan Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 KM	1.500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						2.000.000.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	25 KM		25 KM	48,5 KM	2.000.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		25 KM	3.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						2.558.419.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter		10 Meter	10 Meter	2.558.419.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tulung Singkip || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Meter	4.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
97.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**299.998.500,00**							**210.795.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***299.998.500,00***							***210.795.000,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	13 Persentase		5 Persentase	7 Persentase	299.998.500,00						9 Persentase	210.795.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						90.560.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		89.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						90.560.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		89.900.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	10 Orang		10 Orang	10 Orang	90.560.000,00						10 Orang	89.900.000,00	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						90.560.000,00							89.900.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	10 Orang		10 Orang	30 Orang	90.560.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Orang	89.900.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						70.021.500,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						70.021.500,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	60.021.500,00						2 Orang	40.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						60.021.500,00							40.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	60.021.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Orang	40.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						139.417.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.895.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						139.417.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		60.895.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	56.529.500,00						1 Lembaga	25.895.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	82.887.500,00						20 Paket Pekerjaan	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						82.887.500,00							35.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	82.887.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 Paket Pekerjaan	35.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						56.529.500,00							25.895.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga		1 Lembaga	10 Lembaga	56.529.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Lembaga	25.895.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG						**44.420.164.114,02**							**44.116.389.156,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.143.417.019,02**							**40.121.389.156,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**19.554.077.700,00**							**13.742.696.838,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
98.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**4.317.471.400,00**							**5.052.792.538,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***4.317.471.400,00***							***5.052.792.538,00***	
			1.Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	55.34 %		54.63 %	54.81 %	4.317.471.400,00						54.99 %	5.052.792.538,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						4.317.471.400,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		5.052.792.538,00	
		Jumlah Rumah yang terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						4.317.471.400,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		5.052.792.538,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	432.150.800,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR		180 SR	210 SR	1.161.408.200,00						240 SR	1.569.797.038,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	714.111.800,00						5 Unit	500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.009.800.600,00						2 Liter/Detik	1.733.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	0,00						2 Liter/Detik	949.995.500,00	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						714.111.800,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	5 Unit		5 Unit	11 Unit	714.111.800,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						432.150.800,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	432.150.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00							949.995.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Liter/Detik	949.995.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						2.009.800.600,00							1.733.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.009.800.600,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Liter/Detik	1.733.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.161.408.200,00							1.569.797.038,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR		180 SR	160 SR	1.161.408.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		240 SR	1.569.797.038,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
99.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**100.000.000,00**							**912.750.000,00**	
		Meningkatnya layanan persampahan regional						***100.000.000,00***							***812.750.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	56.96 Persentase		50.00 Persentase	51.74 Persentase	100.000.000,00						53.48 Persentase	812.750.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		912.750.000,00	
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan						100.000.000,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		912.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	10 Ton/hari		0 Ton/hari	10 Ton/hari	0,00						10 Ton/hari	512.750.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0.3 Ton/hari		0.3 Ton/hari	0.3 Ton/hari	0,00						0.3 Ton/hari	200.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						0,00							512.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	10 Ton/hari		0 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		10 Ton/hari	512.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0.3 Ton/hari		0.3 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		0.3 Ton/hari	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
100.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.017.497.200,00**							**4.365.025.200,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***3.017.497.200,00***							***4.365.025.200,00***	
			1.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	5.18 (%)		4.70 (%)	4.82 (%)	3.017.497.200,00						4.94 (%)	4.365.025.200,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.017.497.200,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		4.365.025.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.017.497.200,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		4.365.025.200,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	230.545.400,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	299.984.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0.5 M³/Hari		0 M³/Hari	0.5 M³/Hari	0,00						0.5 M³/Hari	250.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						299.984.000,00							200.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	299.984.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0.5 M³/Hari		0 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		0.5 M³/Hari	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						230.545.400,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	230.545.400,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.017.497.200,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		4.365.025.200,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	2.362.759.500,00						-	3.460.800.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	124.208.300,00						-	94.225.100,00	
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0,00							0,00	
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	0 M³/Hari	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						124.208.300,00							94.225.100,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	124.208.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	94.225.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						2.362.759.500,00							3.460.800.100,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	150 Rumah Tangga	2.362.759.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	3.460.800.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
101.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**0,00**							**1.874.250.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***0,00***							***1.624.250.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	39,56 Persentase		36,00 Persentase	36,89 Persentase	0,00						37,78 Persentase	1.624.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		1.874.250.000,00	
		Panjang Saluran Drainase Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik						0,00					MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA		1.874.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan		1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	0,00						1 Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00						2 Sistem Drainase Perkotaan	464.250.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	215.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	250 M		200 M	200 M	0,00						200 M	305.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						0,00							305.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	250 M		200 M	0 M	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		200 M	305.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan		1 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						0,00							280.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan						0,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Sistem Drainase Perkotaan	215.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						0,00							250.000.000,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						0,00							464.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Sistem Drainase Perkotaan	464.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						0,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
102.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**0,00**							**244.225.100,00**	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman						***0,00***							***244.225.100,00***	
			999.Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	244.225.100,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		244.225.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		jumlah pembangunan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		244.225.100,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 UNIT		1 UNIT	1 UNIT	0,00						1 UNIT	150.000.000,00	
	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 UNIT		1 UNIT	0 UNIT	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 UNIT	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
		jumlah pembangunan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		244.225.100,00	
			Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-		-	-	0,00						-	94.225.100,00	
	1.03.07.2.01.0040	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						0,00							94.225.100,00	
		Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-		-	0 Rumah Tangga	0,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	94.225.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
103.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**11.219.109.100,00**							**1.293.654.000,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***11.219.109.100,00***							***1.293.654.000,00***	
			999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	11.219.109.100,00						100 Persentase	1.293.654.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						11.219.109.100,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		1.293.654.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret) yang laik fungsi						11.219.109.100,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		1.293.654.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	215.924.800,00						50 Dokumen	141.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						215.924.800,00							141.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	215.924.800,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		50 Dokumen	141.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret) yang laik fungsi						11.219.109.100,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		1.293.654.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.920.073.300,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	7.083.111.000,00						-	1.002.654.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						7.083.111.000,00							1.002.654.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	16 Bangunan Gedung	7.083.111.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	1.002.654.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3.920.073.300,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	6 Bangunan Gedung	3.920.073.300,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
104.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**900.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***900.000.000,00***							***0,00***	
			999.Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	900.000.000,00						1 Kasus	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						530.000.000,00					Pelaku Usaha/Investor Yang Berinvestasi di Kabupaten Lampung Utara		0,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kot						530.000.000,00					Pelaku Usaha/Investor Yang Berinvestasi di Kabupaten Lampung Utara		0,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	430.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						430.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	430.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		0 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						320.500.000,00					Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
		Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						320.500.000,00					Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	27.090.000,00						1 Layanan	0,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	293.410.000,00						1 Sistem Informasi	0,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						27.090.000,00							0,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	27.090.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Layanan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						293.410.000,00							0,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	293.410.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Sistem Informasi	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						49.500.000,00					Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						49.500.000,00					Jumlah Layanan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		0,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						49.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**22.589.339.319,02**							**26.378.692.318,00**	
105.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.882.319.819,02**							**9.271.692.318,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah						***8.882.319.819,02***							***8.367.692.318,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	8.882.319.819,02						64.5-64.7 Nilai	8.367.692.318,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.331.700,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		57.357.200,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.331.700,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		57.357.200,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.202.500,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.912.500,00						1 Dokumen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.357.200,00						2 Dokumen	29.357.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	814.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.338.500,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.369.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.141.500,00						1 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.196.500,00						1 Laporan	4.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.357.200,00							29.357.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.357.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	29.357.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.369.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.369.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.338.500,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.338.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.912.500,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.912.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						814.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	814.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.141.500,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.141.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.196.500,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.196.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.202.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.202.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.688.750.119,02					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		7.850.835.118,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat daerah						6.688.750.119,02					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		7.850.835.118,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	564.918.000,00						12 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	2.592.000,00						0 Dokumen	2.592.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.918.500,00						1 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.918.500,00						4 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	6.067.403.119,02						66 Orang/bulan	7.478.743.118,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.067.403.119,02							7.478.743.118,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		66 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.067.403.119,02	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		66 Orang/bulan	7.478.743.118,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						564.918.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	564.918.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.592.000,00							2.592.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.592.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		0 Dokumen	2.592.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.918.500,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.918.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	4.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.918.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.918.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.038.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.038.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.038.000,00						1 Laporan	4.000.000,00	
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.038.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.038.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.370.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		2.500.000,00	
		Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.370.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						2.370.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						59.102.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		32.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						59.102.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.102.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	5 Orang	55.000.000,00						5 Orang	30.000.000,00	
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.102.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.102.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	11 Orang	55.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Orang	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						440.918.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		235.000.000,00	
		Persentase Dokumen Administrasi Umum						440.918.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	40 Laporan	177.136.000,00						40 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.184.500,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	231.340.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.257.500,00						1 Paket	5.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						231.340.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	231.340.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.257.500,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.257.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.184.500,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.184.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						177.136.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	40 Laporan	177.136.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						375.600.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		150.000.000,00	
		Persentase Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						375.600.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	375.600.000,00						9 Unit	150.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						375.600.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	40 Unit	375.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		9 Unit	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						732.500.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		470.000.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor						732.500.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		470.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	579.500.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						579.500.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	579.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						526.710.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						526.710.000,00					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG		470.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	74.220.000,00						2 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	422.040.000,00						14 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	30.450.000,00						30 Unit	30.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						422.040.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	422.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		14 Unit	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						74.220.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	74.220.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.450.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	30.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		30 Unit	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
106.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**119.467.600,00**							**855.000.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerinta						***119.467.600,00***							***855.000.000,00***	
			999.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	119.467.600,00						100 %	855.000.000,00	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	119.467.600,00						100 %	855.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						93.657.100,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		240.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan rumah yang terdampak bencana alam						93.657.100,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.081.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.576.100,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						30.576.100,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.576.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						53.081.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.081.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	0,00						20 Unit Rumah	600.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						0,00							600.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	Kab. Lampung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		20 Unit Rumah	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						25.810.500,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		15.000.000,00	
		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						25.810.500,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.810.500,00						1 Laporan	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						25.810.500,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.810.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
107.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**818.150.000,00**							**2.505.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***718.150.000,00***							***2.505.000.000,00***	
			1.Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	3.21 %		2.84 %	2.93 %	718.150.000,00						3.01 %	2.505.000.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						100.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		120.000.000,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						100.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		700.000.000,00	
		luasan (Ha) kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha						100.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						100.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						618.150.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Lampung Utara		1.685.000.000,00	
		Jumlah unit peningkatan Kualitas RTLH						618.150.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Lampung Utara		1.685.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah		75 Unit Rumah	30 Unit Rumah	488.150.000,00						30 Unit Rumah	1.400.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						488.150.000,00							1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah		75 Unit Rumah	15 Unit Rumah	488.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Unit Rumah	1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						130.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
108.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.414.190.000,00**							**1.695.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perumahan dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh						***1.414.190.000,00***							***1.695.000.000,00***	
			1.Persentase Penurunan RTLH	6.99 %		5.47 %	5.78 %	1.414.190.000,00						6.14 %	1.695.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.414.190.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Lampung Utara		1.695.000.000,00	
		Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.414.190.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Lampung Utara		1.695.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	65 Unit Rumah		50 Unit Rumah	55 Unit Rumah	1.292.650.000,00						60 Unit Rumah	1.400.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.292.650.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak	Jumlah Rumah Tidak Layak	65 Unit		50 Unit	50 Unit	1.292.650.000,00	Provinsi	Dana Alokasi	3.Melanjutk	2. Meningka		60 Unit	1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah		Rumah	Rumah		Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Tanah Abang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Kota Napal || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Ulak Ata || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Umum (DAU)	an pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	tnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		Rumah		RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		50 Orang	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.414.190.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Lampung Utara		1.695.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terverifikasi	-		-	-	121.540.000,00						-	145.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						121.540.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Data Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terverifikasi	-		-	1 Dokumen	121.540.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	145.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
109.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**11.355.211.900,00**							**12.052.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***11.355.211.900,00***							***12.052.000.000,00***	
			999.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	12.53 Persentase		10.53 Persentase	11.53 Persentase	11.355.211.900,00						11.53 Persentase	12.052.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						11.355.211.900,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		12.052.000.000,00	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU						11.355.211.900,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		12.052.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.999.900,00						1 Dokumen	380.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	112.000.000,00						4 Laporan	112.000.000,00	
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		0 Lokasi	1 Lokasi	0,00						1 Lokasi	60.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi		20 Lokasi	20 Lokasi	5.810.016.300,00						20 Lokasi	6.500.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi		15 Lokasi	15 Lokasi	5.223.195.700,00						15 Lokasi	5.000.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						209.999.900,00							380.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.999.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	380.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						112.000.000,00							112.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	112.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	112.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Lokasi	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						5.223.195.700,00							5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi		15 Lokasi	35 Lokasi	5.223.195.700,00	Kab. Lampung Utara	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		15 Lokasi	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						5.810.016.300,00							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi		20 Lokasi	28 Lokasi	5.810.016.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 Lokasi	6.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.276.747.095,00**							**3.995.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2.276.747.095,00**							**3.995.000.000,00**	
110.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**121.340.700,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan						***121.340.700,00***							***225.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	121.340.700,00						100,00 Persentase	225.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						121.340.700,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		225.000.000,00	
		Berita Acara Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi						121.340.700,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		225.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	121.340.700,00						2 Berita Acara	225.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						121.340.700,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	121.340.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Berita Acara	225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
111.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**2.033.481.495,00**							**3.650.000.000,00**	
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						***2.033.481.495,00***							***3.650.000.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.033.481.495,00						100 Persentase	3.650.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.033.481.495,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		3.650.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						2.033.481.495,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		3.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.033.481.495,00						1 Laporan	3.500.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.033.481.495,00							3.500.000.000,00	
		Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.033.481.495,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	3.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
112.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**121.924.900,00**							**120.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola redistribusi tanah, ganti rugi dan tanah absantee						***121.924.900,00***							***60.000.000,00***	
			999.Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	25 %		25 %	25 %	121.924.900,00						25 %	60.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						121.924.900,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		120.000.000,00	
		jumlah dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						121.924.900,00					Masyarakat Kabupaten Lampung Utara		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	64.372.900,00						1 Berita Acara	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.552.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						57.552.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.552.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						64.372.900,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	64.372.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Berita Acara	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**10.994.888.730,33**							**10.798.994.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.994.888.730,33**							**10.798.994.029,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.994.888.730,33**							**10.798.994.029,00**	
113.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.812.713.730,33**							**9.758.069.636,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Satuan Pol PP						***9.812.713.730,33***							***9.753.469.636,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	64.5-64.65 Nilai		62.75-62.85 Nilai	63-63.25 Nilai	9.812.713.730,33						63.5-63.65 Nilai	9.753.469.636,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.272.843,83					-		14.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.272.843,83					-		14.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.812.843,00						2 Dokumen	4.600.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.100.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.460.000,83						2 Laporan	4.600.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.812.843,00							4.600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.812.843,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	4.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.460.000,83							4.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.460.000,83	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	4.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.526.188.866,50					-		7.524.949.866,00	
		Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan						7.526.188.866,50					-		7.524.949.866,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	262.920.000,00						4 Dokumen	262.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.499.000,00						1 Laporan	1.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	7.260.269.866,50						90 Orang/bulan	7.260.269.866,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.260.269.866,50							7.260.269.866,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	7.260.269.866,50	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		90 Orang/bulan	7.260.269.866,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						262.920.000,00							262.930.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	262.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	262.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.499.000,00							1.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.499.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	1.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.500.000,00							150.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.142.100,00					-		150.449.850,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.142.100,00					-		150.449.850,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	65.930.000,00						4 Laporan	49.930.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.991.500,00						1 Paket	39.998.700,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.749.500,00						1 Paket	49.999.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.971.100,00						1 Paket	9.971.200,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.971.100,00							9.971.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.971.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	9.971.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.991.500,00							39.998.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.991.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	39.998.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.749.500,00							49.999.950,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.749.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	49.999.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.500.000,00							550.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						65.930.000,00							49.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	65.930.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	49.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						63.280.000,00					-		15.000.000,00	
		tersediannya Barang Milik Daerah						63.280.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	11.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	53.280.000,00						4 Unit	4.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						53.280.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	53.280.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.768.249.920,00					-		1.768.249.920,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor						1.768.249.920,00					-		1.768.249.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	69.499.920,00						2 Laporan	69.499.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.750.000,00						1 Laporan	1.698.750.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.499.920,00							69.499.920,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	69.499.920,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	69.499.920,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.698.750.000,00							1.698.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	1.698.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.580.000,00					-		285.120.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						284.580.000,00					-		285.120.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	284.580.000,00						9 Unit	285.120.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						284.580.000,00							285.120.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	284.580.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		9 Unit	285.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
114.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.182.175.000,00**							**1.040.924.393,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS						***50.000.000,00***							***55.000.000,00***	
			999.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	75 Persentase		56 Persentase	58 Persentase	50.000.000,00						60 Persentase	55.000.000,00	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***1.132.175.000,00***							***985.924.393,00***	
			999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	353.010.500,00						100 %	209.994.500,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	166.220.500,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	166.220.500,00						4 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						166.220.500,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	166.220.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						121.995.000,00					-		120.199.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00						4 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						70.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						***1.010.180.000,00***							***865.724.893,00***	
			2.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	619.613.500,00						100 Persentase	617.677.500,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	554.818.500,00						4 laporan	552.882.500,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	554.818.500,00						4 laporan	552.882.500,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						554.818.500,00							552.882.500,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	554.818.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 laporan	552.882.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***1.010.180.000,00***							***865.724.893,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	289.141.000,00						100 Persentase	287.842.393,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	36 Orang		0 Orang	36 Orang	0,00						36 Orang	88.202.953,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	36 Orang		0 Orang	36 Orang	0,00						36 Orang	88.202.953,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	224.346.000,00						1 Dokumen	134.844.440,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	224.346.000,00						1 Dokumen	134.844.440,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						224.346.000,00							134.844.440,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	224.346.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	134.844.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						0,00							88.202.953,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	36 Orang		0 Orang	36 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		36 Orang	88.202.953,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.010.180.000,00					-		865.724.893,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	64.795.000,00						-	64.795.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	64.795.000,00						-	64.795.000,00	
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						64.795.000,00							64.795.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	205 Orang	64.795.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	64.795.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						121.995.000,00					-		120.199.500,00	
		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						121.995.000,00					-		120.199.500,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	1.995.000,00						-	199.500,00	
	1.05.02.2.02.0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.995.000,00							199.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	2 Dokumen	1.995.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	199.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**10.262.666.170,14**							**9.281.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.262.666.170,14**							**9.281.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.262.666.170,14**							**9.281.500.000,00**	
115.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.450.170.873,14**							**6.611.500.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan BPBD						***7.067.670.873,14***							***6.339.500.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	7.067.670.873,14						64.5-64.7 Nilai	6.339.500.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.000.000,00					BPBD		41.500.000,00	
		Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.000.000,00					BPBD		41.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00						2 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00						1 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00						1 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						8.500.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.365.578.873,14					BPBD		4.293.000.000,00	
		terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.365.578.873,14					BPBD		4.293.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00						2 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.997.578.873,14						40 Orang/bulan	4.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.997.578.873,14							4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.997.578.873,14	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Orang/bulan	4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						350.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					BPBD		2.000.000,00	
		terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					BPBD		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.059.151.500,00					BPBD		500.000.000,00	
		terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.059.151.500,00					BPBD		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		23 Laporan	25 Laporan	250.000.000,00						35 Laporan	260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	100.000.000,00						5 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	75.000.000,00						5 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	634.151.500,00						1 Paket	30.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						634.151.500,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	10 Paket	634.151.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Paket	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	100.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Paket	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	75.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Paket	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		23 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		35 Laporan	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.240.000.500,00					BPBD		995.000.000,00	
		terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.240.000.500,00					BPBD		995.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.500,00						12 Laporan	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.150.000.000,00						12 Laporan	900.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.500,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.150.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.150.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						741.440.000,00					BPBD		780.000.000,00	
		terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						741.440.000,00					BPBD		780.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	350.000.000,00						6 Unit	360.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4 Unit	1 Unit	241.440.000,00						1 Unit	260.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	5 Unit	150.000.000,00						5 Unit	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						241.440.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4 Unit	1 Unit	241.440.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	350.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 Unit	360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	20 Unit	150.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
116.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.812.495.297,00**							**2.670.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***1.688.561.297,00***							***1.325.000.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.688.561.297,00						100 Persentase	1.325.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						242.120.400,00					masyarakat		285.000.000,00	
		tersedianya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						242.120.400,00					masyarakat		285.000.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		Dokumen	Dokumen	120.783.900,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	106405 Orang		11000 Orang	106405 Orang	121.336.500,00						106405 Orang	175.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						121.336.500,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	106405 Orang		11000 Orang	300 Orang	121.336.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		106405 Orang	175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						120.783.900,00							110.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	120.783.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		tersedianya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						1.446.440.897,00					masyarakat/ BPBD		1.620.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.315.500,00						1 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan		12 laporan	4 laporan	612.000.000,00						4 laporan	620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.040.000,00						5 Unit	260.000.000,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang		0 Orang	30 Orang	91.658.000,00						30 Orang	160.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	20 Orang		40 Orang	30 Orang	68.556.100,00						20 Orang	160.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						500.040.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit	100 Unit	500.040.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						68.556.100,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	20 Orang		40 Orang	80 Orang	68.556.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		20 Orang	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						91.658.000,00							160.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang		0 Orang	200 Orang	91.658.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		30 Orang	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						612.000.000,00							620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan		12 laporan	12 laporan	612.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 laporan	620.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						114.315.500,00							260.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.315.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana						***576.233.000,00***							***370.000.000,00***	
			999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	576.233.000,00						100 Persentase	370.000.000,00	
		tersedianya penangana bencana pada saat pasca bencana						576.233.000,00					masyarakat/ BPBD		530.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.428.000,00						1 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	35.300.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	66.200.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30 Orang		60 Orang	30 Orang	117.547.500,00						30 Orang	160.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						100.428.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	100.428.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						66.200.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	66.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						117.547.500,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30 Orang		60 Orang	80 Orang	117.547.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		30 Orang	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota						35.300.000,00							0,00	
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	4 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.300.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat						***547.701.000,00***							***235.000.000,00***	
			999.Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100 %		100 %	100 %	547.701.000,00						100 %	235.000.000,00	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						547.701.000,00					masyarakat/ BPBD		235.000.000,00	
		tersedianya penanganan bencana pada saat tanggap darurat nbencana						547.701.000,00					masyarakat/ BPBD		235.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang		0 Orang	40 Orang	153.480.000,00						40 Orang	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	158.321.000,00						1000 Orang	0,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang		700 Orang	1000 Orang	188.750.000,00						1000 Orang	0,00	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						188.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang		700 Orang	500 Orang	188.750.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1000 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota						153.480.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang		0 Orang	300 Orang	153.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Orang	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						158.321.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	158.321.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1000 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1.446.440.897,00					masyarakat/ BPBD		1.620.000.000,00	
		tersedianya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						1.446.440.897,00					masyarakat/ BPBD		1.620.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	59.871.297,00						-	160.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	2 Kegiatan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						59.871.297,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	160 Orang	59.871.297,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		tersedianya penanganan bencana pada saat tanggap darurat nbencana						547.701.000,00					masyarakat/ BPBD		235.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	47.150.000,00						-	75.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						47.150.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	12 Laporan	47.150.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						576.233.000,00					masyarakat/ BPBD		530.000.000,00	
		tersedianya penangana bencana pada saat pasca bencana						576.233.000,00					masyarakat/ BPBD		530.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	135.386.500,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	90.049.000,00						-	0,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	31.322.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						135.386.500,00							0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	50 Orang	135.386.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						31.322.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	31.322.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						90.049.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	90.049.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**6.239.369.388,04**							**7.502.655.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.239.369.388,04**							**7.502.655.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.239.369.388,04**							**7.502.655.000,00**	
117.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.494.430.946,04**							**6.603.025.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						***5.479.430.946,04***							***6.593.525.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.5 Nilai		62.5-63 Nilai	63.5-64 Nilai	5.479.430.946,04						64-64.5 Nilai	6.593.525.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.551.900,00					-		15.900.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.551.900,00					-		15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.351.900,00						3 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00						3 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.351.900,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.351.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00							1.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Laporan	4.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.700.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.207.959.546,04					-		5.330.100.000,00	
		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah						4.207.959.546,04					-		5.330.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.440.000,00						1 Dokumen	121.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.994.400,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	2.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.996.525.146,04						40 Orang/bulan	5.200.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.996.525.146,04							5.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.996.525.146,04	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Orang/bulan	5.200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						199.440.000,00							121.800.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	199.440.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	121.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.000.000,00							2.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	2.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						4.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.994.400,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	3.994.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.000.000,00					-		3.700.000,00	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.000.000,00					-		3.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	3.700.000,00	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.000.000,00							3.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.960.000,00					-		94.485.000,00	
		Persentase administrasi umum perangkat daerah						117.960.000,00					-		94.485.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.004.000,00						12 Laporan	42.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.000.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	22.500.000,00						1 Paket	16.985.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.456.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.456.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	7.456.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	10 Paket	26.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.500.000,00							16.985.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	6 Paket	22.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Paket	16.985.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						62.004.000,00							42.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	60 Laporan	62.004.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	42.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.022.000,00					-		0,00	
		Persentase pengadaan barang milik daerah						41.022.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.862.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	16.160.000,00						10 Unit	0,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						24.862.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	24.862.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.160.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	2 Unit	16.160.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Unit	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.032.960.000,00					-		1.101.410.000,00	
		Persentase jenis jasa penunjang urusan kantor						1.032.960.000,00					-		1.101.410.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.002.960.000,00						12 Laporan	1.076.410.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.002.960.000,00							1.076.410.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.002.960.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	1.076.410.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.977.500,00					-		57.430.000,00	
		Persentase barang milik daerah yang terpelihara						73.977.500,00					-		57.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	69.507.500,00						2 Unit	42.430.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.470.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						69.507.500,00							42.430.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	69.507.500,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Unit	42.430.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.470.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	5 Unit	4.470.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
118.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**744.938.442,00**							**899.630.000,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***484.351.942,00***							***639.130.000,00***	
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	95,00 Persentase		85,00 Persentase	90,00 Persentase	364.351.942,00						92,00 Persentase	289.130.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						439.347.400,00					-		632.630.000,00	
		Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran						439.347.400,00					-		632.630.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		10 Orang	10 Orang	2.229.400,00						10 Orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	47 Desa/Kelurahan		50 Desa/Kelurahan	50 Desa/Kelurahan	20.000.000,00						50 Desa/Kelurahan	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169.130.000,00						1 Dokumen	169.130.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 Keluarga		30 Keluarga	35 Keluarga	16.000.000,00						40 Keluarga	17.000.000,00	
			Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit		4 Unit	4 Unit	60.038.000,00						4 Unit	25.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						12.200.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.250.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						169.130.000,00							169.130.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169.130.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	169.130.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						2.229.400,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		10 Orang	50 Orang	2.229.400,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Orang	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	47 Desa/Kelurahan		50 Desa/Kelurahan	50 Desa/Kelurahan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		50 Desa/Kelurahan	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						60.038.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit		4 Unit	16 Unit	60.038.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						15.500.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga						16.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 Keluarga		30 Keluarga	50 Keluarga	16.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Keluarga	17.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0025	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0027	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						38.000.000,00					-		22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran						38.000.000,00					-		22.500.000,00	
			Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 Orang		2 Orang	2 Orang	3.000.000,00						2 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						15.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0004	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 Orang		2 Orang	10 Orang	3.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Orang	4.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Laporan		2 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						22.004.542,00					-		24.000.000,00	
		Sosialiasi Pencegahan Kebakaran						22.004.542,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	47 Desa/Kelurahan		50 Desa/Kelurahan	50 Desa/Kelurahan	12.000.042,00						50 Desa/Kelurahan	14.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.004.500,00						50 Orang	10.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						10.004.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang		50 Orang	247 Orang	10.004.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		50 Orang	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						12.000.042,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	47 Desa/Kelurahan		50 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	12.000.042,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		50 Desa/Kelurahan	14.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						***658.933.900,00***							***811.130.000,00***	
			999.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	365.586.500,00						100 Persentase	570.500.000,00	
		Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran						439.347.400,00					-		632.630.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						120.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	60 Laporan	120.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran						22.600.000,00					-		40.500.000,00	
		Persentase Kejadian Kebakaran						22.600.000,00					-		40.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00						1 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00						12 Laporan	17.500.000,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						16.000.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0002	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						1.600.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	12 Laporan		12 Laporan	60 Laporan	1.600.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	17.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	12 Laporan		12 Laporan	60 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						222.986.500,00					-		180.000.000,00	
		Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						222.986.500,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00						12 Laporan	13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit		10 Unit	8 Unit	82.689.600,00						6 Unit	26.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.296.900,00						5 Unit	40.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						13.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	13.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						82.689.600,00							26.500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit		10 Unit	22 Unit	82.689.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 Unit	26.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0008	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar						37.296.900,00							40.000.000,00	
		Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.296.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran						38.000.000,00					-		22.500.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						222.986.500,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	55.000.000,00						-	60.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						55.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	5 Laporan	55.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**9.977.107.048,14**							**10.895.826.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.977.107.048,14**							**10.895.826.700,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**9.977.107.048,14**							**10.895.826.700,00**	
119.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.555.638.848,14**							**6.553.233.729,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***6.525.638.848,14***							***6.324.233.729,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.20-0 Nilai		67.50-0 Nilai	67.60-0 Nilai	6.525.638.848,14						67.70-0 Nilai	6.324.233.729,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.629.900,00					-		148.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.629.900,00					-		148.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	6.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	0,00						1 Data	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	23.629.900,00						6 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		1 Substansi	1 Substansi	0,00						1 Substansi	5.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						23.629.900,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	23.629.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Laporan	22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	0 Data	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Data	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							5.000.000,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		1 Substansi	0 Substansi	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Substansi	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.445.336.978,14					-		4.461.331.729,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan						4.445.336.978,14					-		4.461.331.729,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	204.203.500,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.125.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.842.500,00						1 Laporan	11.415.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	9.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.230.290.978,14						40 Orang/bulan	4.230.291.229,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.230.290.978,14							4.230.291.229,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.230.290.978,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Orang/bulan	4.230.291.229,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						204.203.500,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	204.203.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.842.500,00							11.415.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.842.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	11.415.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							9.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	9.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							10.125.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.125.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		28.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		28.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							7.800.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	7.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.852.000,00					-		109.546.500,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian						39.852.000,00					-		109.546.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.852.000,00						1 Dokumen	14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	6.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	0,00						70 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	7.500.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit		20 Unit	20 Unit	30.000.000,00						20 Unit	52.846.500,00	
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						30.000.000,00							52.846.500,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit		20 Unit	75 Unit	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Unit	52.846.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		70 Paket	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						9.852.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.852.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Orang	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Orang	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							6.700.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Orang	6.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.709.900,00					-		138.324.900,00	
		Tersedainya Dokumen Administrasi Umum Perangkat						114.709.900,00					-		138.324.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	99.170.000,00						5 Laporan	104.695.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	8 Paket	4.210.000,00						8 Paket	3.962.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.850.000,00						4 Paket	7.530.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	2.810.000,00						10 Paket	2.968.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	2.669.900,00						10 Paket	2.669.900,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.810.000,00							2.968.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	6 Paket	2.810.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Paket	2.968.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.669.900,00							2.669.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	6 Paket	2.669.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Paket	2.669.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.210.000,00							3.962.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	4 Paket	4.210.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Paket	3.962.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.850.000,00							7.530.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	5.850.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	7.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						99.170.000,00							104.695.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	99.170.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	104.695.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						852.266.070,00					-		494.000.000,00	
		tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah						852.266.070,00					-		494.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	23.500.000,00						5 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	553.750.000,00						4 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	116.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		5 Unit	8 Unit	275.016.070,00						8 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	13.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							116.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	116.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						553.750.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	553.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						23.500.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	9 Unit	23.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						275.016.070,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		5 Unit	21 Unit	275.016.070,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Unit	13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						750.400.000,00					-		763.659.200,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						750.400.000,00					-		763.659.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00						2 Laporan	25.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	720.400.000,00						1 Laporan	720.659.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	7.500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	7.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							25.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						720.400.000,00							720.659.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	720.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	720.659.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						329.444.000,00					-		409.571.400,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						329.444.000,00					-		409.571.400,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.364.000,00						1 Unit	7.291.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	111.060.000,00						3 Unit	111.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	203.590.000,00						4 Unit	203.590.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	6.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	7.430.000,00						10 Unit	7.430.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						203.590.000,00							203.590.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	1 Unit	203.590.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	203.590.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						111.060.000,00							111.060.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	111.060.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	111.060.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							6.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	6.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.430.000,00							7.430.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	11 Unit	7.430.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	7.430.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.364.000,00							7.291.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.364.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	7.291.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
120.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**348.308.910,00**							**726.714.053,00**	
		pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial						***348.308.910,00***							***726.714.053,00***	
			4.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %	100 %	348.308.910,00						100 %	726.714.053,00	
			5.Persentase Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	75 %		75 %	75 %	348.308.910,00						75 %	726.714.053,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		19.320.694,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kota						0,00					-		19.320.694,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	19.320.694,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						0,00							19.320.694,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Dokumen	19.320.694,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						348.308.910,00					-		707.393.359,00	
		Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah						348.308.910,00					-		707.393.359,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga		24 Lembaga	24 Lembaga	95.673.600,00						24 Lembaga	300.929.500,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	23 Orang		23 Orang	23 Orang	86.364.500,00						23 Orang	173.417.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	28.544.500,00						3 Orang	31.306.359,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						95.673.600,00							300.929.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga		24 Lembaga	15 Lembaga	95.673.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		24 Lembaga	300.929.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						28.544.500,00							31.306.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	30 Orang	28.544.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Orang	31.306.359,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						86.364.500,00							173.417.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	23 Orang		23 Orang	23 Orang	86.364.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		23 Orang	173.417.000,00	DINAS SOSIAL
		Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah						348.308.910,00					-		707.393.359,00	
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	-		-	-	17.072.500,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	-	25.206.900,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	42.072.500,00						-	86.364.500,00	
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	-	11.200.900,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	-	42.173.510,00						-	56.376.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						42.173.510,00							56.376.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	74 Orang	42.173.510,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	56.376.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						25.206.900,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	100 Orang	25.206.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota						11.200.900,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	2 Lembaga	11.200.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						42.072.500,00							86.364.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	6 Orang	42.072.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	86.364.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial						17.072.500,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	-		-	2 Laporan	17.072.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
121.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**28.007.100,00**							**28.007.100,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***28.007.100,00***							***28.007.100,00***	
			1.Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam Dan Luar Negeri Yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	28.007.100,00						3 Orang	28.007.100,00	
			999.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	28.007.100,00						100 Persentase	28.007.100,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						28.007.100,00					-		28.007.100,00	
		Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						28.007.100,00					-		28.007.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	28.007.100,00						5 Orang	28.007.100,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						28.007.100,00							28.007.100,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	3 Orang	28.007.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Orang	28.007.100,00	DINAS SOSIAL
122.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.723.181.200,00**							**1.928.315.618,00**	
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial						***1.723.181.200,00***							***1.595.693.318,00***	
			6.Indeks Kesejahteraan Sosial Disabilitas	5 Nilai		5 Nilai	5 Nilai	1.723.181.200,00						5 Nilai	1.595.693.318,00	
			6.Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia	5 Nilai		5 Nilai	5 Nilai	1.723.181.200,00						5 Nilai	1.595.693.318,00	
			999.Indeks Peranan Sosial	10 Nilai		10 Nilai	10 Nilai	1.723.181.200,00						10 Nilai	1.595.693.318,00	
			999.Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.723.181.200,00						100 Persentase	1.595.693.318,00	
			999.Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.723.181.200,00						100 Persentase	1.595.693.318,00	
			999.Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.723.181.200,00						100 Persentase	1.595.693.318,00	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	55 Persentase		55 Persentase	55 Persentase	1.723.181.200,00						55 Persentase	1.595.693.318,00	
			999.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.723.181.200,00						100 Persentase	1.595.693.318,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.680.855.800,00					-		1.331.612.118,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		10 Orang	12 Orang	0,00						15 Orang	130.654.918,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		23 Orang	23 Orang	219.111.200,00						23 Orang	229.622.300,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		12 Orang	30 Orang	291.199.500,00						40 Orang	280.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	75 Orang	0,00						75 Orang	61.206.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	230.016.900,00						100 Orang	229.622.300,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	8 Orang	71.454.000,00						8 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	52.528.600,00						100 Orang	78.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	14.035.200,00						10 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	756.082.200,00						10 Orang	115.078.200,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						52.528.600,00							78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	25 Orang	52.528.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	78.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						291.199.500,00							280.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		12 Orang	144 Orang	291.199.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Orang	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						71.454.000,00							75.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	50 Orang	71.454.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						756.082.200,00							115.078.200,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	80 Orang	756.082.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Orang	115.078.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						219.111.200,00							229.622.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		23 Orang	300 Orang	219.111.200,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		23 Orang	229.622.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						0,00							61.206.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		75 Orang	61.206.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						230.016.900,00							229.622.300,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	500 Orang	230.016.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		100 Orang	229.622.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						0,00							130.654.918,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		15 Orang	130.654.918,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						14.035.200,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	20 Orang	14.035.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Tersedianya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan Napza Diluar Panti Sosial						42.325.400,00					-		596.703.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	52.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	15 Orang	35.561.900,00						15 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	93.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		100 Orang	120 Orang	6.763.500,00						130 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	98.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	38.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	162.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	38.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						6.763.500,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		100 Orang	10 Orang	6.763.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		130 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						0,00							98.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	98.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						0,00							162.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	162.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						0,00							38.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	38.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						0,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		8 Orang	38.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						0,00							93.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	93.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						35.561.900,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	10 Orang	35.561.900,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		15 Orang	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						0,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	52.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.680.855.800,00					-		1.331.612.118,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.680.855.800,00					-		1.331.612.118,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	46.428.200,00						-	47.428.400,00	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						46.428.200,00							47.428.400,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	46.428.200,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	47.428.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)						0,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						42.325.400,00					-		596.703.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan Napza Diluar Panti Sosial						42.325.400,00					-		596.703.500,00	
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	35.703.500,00	
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						0,00							35.703.500,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	35.703.500,00	DINAS SOSIAL
123.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**289.156.250,00**							**682.836.200,00**	
		Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial						***289.156.250,00***							***652.836.200,00***	
			3.Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %		100 %	100 %	289.156.250,00						100 %	652.836.200,00	
			4.Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	20 %		20 %	20 %	289.156.250,00						20 %	652.836.200,00	
			999.Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	49 Keluarga		49 Keluarga	49 Keluarga	289.156.250,00						49 Keluarga	652.836.200,00	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	15 Persentase		15 Persentase	15 Persentase	289.156.250,00						15 Persentase	652.836.200,00	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	15 Persentase		15 Persentase	15 Persentase	289.156.250,00						15 Persentase	652.836.200,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						0,00					-		60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak						0,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		10 Orang	15 Orang	0,00						20 Orang	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		10 Orang	15 Orang	0,00						20 Orang	30.000.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		20 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		20 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						289.156.250,00					-		622.836.200,00	
		Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah						289.156.250,00					-		622.836.200,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15 Orang		10 Orang	15 Orang	94.218.000,00						15 Orang	94.218.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		5 Orang	8 Orang	109.612.750,00						8 Orang	289.445.200,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72.129 Orang		25.898 Orang	72.129 Orang	26.078.500,00						72.129 Orang	64.173.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	130951 Usulan		130951 Usulan	130951 Usulan	38.247.000,00						130951 Usulan	150.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						94.218.000,00							94.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15 Orang		10 Orang	171290 Orang	94.218.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		15 Orang	94.218.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						109.612.750,00							289.445.200,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		5 Orang	10 Orang	109.612.750,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		8 Orang	289.445.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						26.078.500,00							64.173.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72.129 Orang		25.898 Orang	77089 Orang	26.078.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		72.129 Orang	64.173.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						38.247.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	130951 Usulan		130951 Usulan	693648 Usulan	38.247.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		130951 Usulan	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah						289.156.250,00					-		622.836.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	21.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						21.000.000,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	21.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
124.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**1.002.923.440,00**							**906.720.000,00**	
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana						***1.002.923.440,00***							***871.720.000,00***	
			2.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %	100 %	1.002.923.440,00						100 %	871.720.000,00	
			999.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	1.002.923.440,00						100 %	871.720.000,00	
			999.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	10 %		10 %	10 %	1.002.923.440,00						10 %	871.720.000,00	
		Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						786.995.340,00					-		691.500.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	11.935.300,00						4 Orang	15.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	28.817.100,00						50 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		100 Orang	100 Orang	106.714.040,00						100 Orang	66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	615.902.200,00						50 Orang	540.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						615.902.200,00							540.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	1000 Orang	615.902.200,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		50 Orang	540.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						28.817.100,00							35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	28.817.100,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		50 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						106.714.040,00							66.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		100 Orang	150 Orang	106.714.040,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						11.935.300,00							15.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	20 Orang	11.935.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Orang	15.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						215.928.100,00					-		215.220.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						215.928.100,00					-		215.220.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung		1 Kampung	1 Kampung	0,00						1 Kampung	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		19 Orang	19 Orang	21.928.200,00						19 Orang	22.220.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						0,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung		1 Kampung	0 Kampung	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Kampung	8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						21.928.200,00							22.220.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		19 Orang	19 Orang	21.928.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		19 Orang	22.220.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						786.995.340,00					-		691.500.000,00	
		Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						786.995.340,00					-		691.500.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	23.626.700,00						-	35.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						23.626.700,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	400 Orang	23.626.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						215.928.100,00					-		215.220.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-		-	-	193.999.900,00						-	185.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana						193.999.900,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-		-	60 Keluarga	193.999.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	185.000.000,00	DINAS SOSIAL
125.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**29.891.300,00**							**70.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan						***29.891.300,00***							***35.000.000,00***	
			999.Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	29.891.300,00						100 Persentase	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						29.891.300,00					-		70.000.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional						29.891.300,00					-		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	29.891.300,00						1 Makam	35.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						29.891.300,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	29.891.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Makam	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**4.425.411.197,24**							**4.137.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.425.411.197,24**							**4.137.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.425.411.197,24**							**4.137.000.000,00**	
126.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.728.247.497,24**							**3.329.500.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***3.711.247.497,24***							***3.094.500.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65.00-65.10 Nilai		64.10-64.30 Nilai	64.30-64.50 Nilai	3.711.247.497,24						64.50-64.70 Nilai	3.094.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00					dinas pppa		75.000.000,00	
		Tersedia nya dokumen perencanaan						25.000.000,00					dinas pppa		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00						6 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00						6 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.278.655.310,24					ASN PPPA		2.975.000.000,00	
		tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah						3.278.655.310,24					ASN PPPA		2.975.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.828.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00						6 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.176.827.310,24						40 Orang/bulan	2.950.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.176.827.310,24							2.950.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.176.827.310,24	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Orang/bulan	2.950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						101.828.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.828.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					dinas pppa		15.000.000,00	
		tersedianya adminstrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah						0,00					dinas pppa		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.216.500,00					dinas pppa		7.500.000,00	
		tersedianya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						7.216.500,00					dinas pppa		7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.216.500,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.216.500,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.216.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.833.500,00					dinas pppa		45.000.000,00	
		tersedianaya administras umum Perangkat Daerah						46.833.500,00					dinas pppa		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	21.308.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.093.400,00						2 Paket	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.432.100,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.432.100,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.432.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.093.400,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.093.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21.308.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	21.308.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.670.800,00					dinas pppa		50.000.000,00	
		tersdianya pengadaan Barang Milik Derah penunjang urusan Pemerintah Daearah						40.670.800,00					dinas pppa		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	40.670.800,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	5.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.670.800,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	40.670.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						140.892.787,00					dinas pppa		105.000.000,00	
		tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						140.892.787,00					dinas pppa		105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.112.787,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.780.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.112.787,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.112.787,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.780.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.780.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						126.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	126.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.978.600,00					dinas pppa		57.000.000,00	
		tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah						188.978.600,00					dinas pppa		57.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	12.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	183.600.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.378.600,00						1 Unit	10.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						183.600.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	183.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00								12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00								5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.378.600,00								10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.378.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**67.218.700,00**							**53.000.000,00**	
		kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***67.218.700,00***							***26.500.000,00***	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15.9 Persentase		11.8 Persentase	12.9 Persentase	67.218.700,00						13.8 Persentase	26.500.000,00	
			999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44,68 %		36,92 %	38,86 %	67.218.700,00						40,80 %	26.500.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						67.218.700,00					Perangkat Daerah		33.000.000,00	
		terlaksananya pelembagaan pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ Kota						67.218.700,00					Perangkat Daerah		33.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	32.420.800,00						-	16.500.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	34.797.900,00						-	16.500.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						32.420.800,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	32.420.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						34.797.900,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	32 Lembaga	34.797.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00					lembaga		10.000.000,00	
		terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/ Kota						0,00					lembaga		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	23 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00					lembaga		10.000.000,00	
		terlaksanaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaaan perempuan kewenangan Kabupaen/ Kota						0,00					lembaga		10.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	32 Lembaga	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
128.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**98.927.500,00**							**165.000.000,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***98.927.500,00***							***110.000.000,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	98.927.500,00						100 %	110.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						25.784.500,00					kegiatan		25.000.000,00	
		terlaksananya pencegahan keerasan terhadap perempuan Lingkup Daearah Kabupaten/ Kota						25.784.500,00					kegiatan		25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	25.784.500,00						-	25.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						25.784.500,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	25.784.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						59.618.000,00					perempuan korban kekerasan		115.000.000,00	
		tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupeten						59.618.000,00					perempuan korban kekerasan		115.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	10.218.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	49.400.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						10.218.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	24 Orang	10.218.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	3 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	10 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						49.400.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	25 Orang	49.400.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	3 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						13.525.000,00					lembaga penyedia layanan		25.000.000,00	
		terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanaan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten						13.525.000,00					lembaga penyedia layanan		25.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	13.525.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	1 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						13.525.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	12 Lembaga	13.525.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
129.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**74.555.000,00**							**32.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***74.555.000,00***							***21.500.000,00***	
			999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	100,00 Indeks		100,00 Indeks	100,00 Indeks	74.555.000,00						100,00 Indeks	21.500.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					kegiatan		11.000.000,00	
		meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten						0,00					kegiatan		11.000.000,00	
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		1 Kebijakan	1 Kebijakan	0,00						1 Kebijakan	11.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		1 Kebijakan	1 Kebijakan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Kebijakan	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						18.169.000,00					lembaga penyedia layanan		11.000.000,00	
		terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak dalam Daerah Kabupaten						18.169.000,00					lembaga penyedia layanan		11.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	18.169.000,00						1 Lembaga	11.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						18.169.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	18.169.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Lembaga	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						56.386.000,00					keluarga		10.500.000,00	
		tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak dalam Daerah Kabupaten						56.386.000,00					keluarga		10.500.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	56.386.000,00						2 Orang	10.500.000,00	
	2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						56.386.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	56.386.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Orang	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
130.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**10.145.900,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak						***10.145.900,00***							***30.000.000,00***	
			999.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.145.900,00						100 Persentase	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.145.900,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
		tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data Kabupaten/Kota						10.145.900,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	10.145.900,00						-	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						10.145.900,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	10.145.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
131.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**104.000.800,00**							**182.000.000,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***104.000.800,00***							***107.000.000,00***	
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65 Indeks		62 Indeks	62.5 Indeks	104.000.800,00						63 Indeks	107.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						72.000.800,00					lembaga		75.000.000,00	
		trsedianya pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten						72.000.800,00					lembaga		75.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	24.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	48.000.800,00						-	25.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						48.000.800,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	32 Lembaga	48.000.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						24.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						32.000.000,00					lembaga penyedia layanan		107.000.000,00	
		terlaksanaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten						32.000.000,00					lembaga penyedia layanan		107.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	32.000.000,00						-	32.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						32.000.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	150 Orang	32.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
132.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**342.315.800,00**							**345.000.000,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan						***342.315.800,00***							***115.000.000,00***	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	342.315.800,00						100 Persentase	115.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						132.358.800,00					kegiatan		100.000.000,00	
		terlaksanaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten						132.358.800,00					kegiatan		100.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	116.949.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	15.409.800,00						-	25.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0013	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						116.949.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	1 Kegiatan	116.949.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						15.409.800,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	15.409.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						165.007.000,00					anak korban kekerasan		205.000.000,00	
		tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten						165.007.000,00					anak korban kekerasan		205.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	165.007.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						165.007.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	60 Orang	165.007.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	25 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	12 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	12 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	25 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	12 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						44.950.000,00					-		40.000.000,00	
		terlaksananya penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten						44.950.000,00					-		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	44.950.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						44.950.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	44.950.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**6.257.558.760,14**							**6.268.405.960,14**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.257.558.760,14**							**6.268.405.960,14**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**6.257.558.760,14**							**6.268.405.960,14**	
133.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.078.198.130,14**							**4.895.273.260,14**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***5.078.198.130,14***							***4.895.273.260,14***	
			1.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	5.078.198.130,14						67.2-67.4 Nilai	4.895.273.260,14	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38.678.400,00					dinas ketahanan pangan		46.713.400,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah						38.678.400,00					dinas ketahanan pangan		46.713.400,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.092.900,00						1 Berita Acara	4.092.900,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	3.040.000,00						4 Data	7.693.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.506.000,00						1 Dokumen	3.506.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.326.000,00						2 Dokumen	6.941.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.146.500,00						1 Dokumen	3.146.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.737.500,00						1 Dokumen	3.737.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.174.000,00						1 Dokumen	3.163.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	11.655.500,00						7 Laporan	14.433.500,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.326.000,00							6.941.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.326.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Dokumen	6.941.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.174.000,00							3.163.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.174.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.163.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.737.500,00							3.737.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.737.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.737.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.506.000,00							3.506.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.506.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.506.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.146.500,00							3.146.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.146.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.146.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.655.500,00							14.433.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	11.655.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		7 Laporan	14.433.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						3.040.000,00							7.693.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	3.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Data	7.693.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.092.900,00							4.092.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.092.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	4.092.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.313.611.690,14					dinas ketahanan pangan		4.314.183.680,14	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						4.313.611.690,14					dinas ketahanan pangan		4.314.183.680,14	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	180.840.000,00						12 Dokumen	185.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.807.000,00						4 Dokumen	7.179.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.121.964.690,14						38 Orang/bulan	4.121.964.680,14	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.121.964.690,14							4.121.964.680,14	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.121.964.690,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		38 Orang/bulan	4.121.964.680,14	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						180.840.000,00							185.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	180.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	185.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.807.000,00							7.179.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.807.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	7.179.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.638.040,00					dinas ketahanan pangan		107.557.100,00	
		Tersusunya Dokumen administrasi Umum						160.638.040,00					dinas ketahanan pangan		107.557.100,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	103.688.000,00						12 Laporan	50.112.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.800.540,00						1 Paket	45.295.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.149.500,00						1 Paket	12.150.000,00	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						44.800.540,00							45.295.100,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	44.800.540,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	45.295.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.149.500,00							12.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.149.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	12.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						103.688.000,00							50.112.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	103.688.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.112.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						87.520.000,00					dinas ketahanan pangan		85.249.080,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						87.520.000,00					dinas ketahanan pangan		85.249.080,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	28.900.000,00						1 Unit	28.576.380,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	58.620.000,00						3 Unit	56.672.700,00	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						28.900.000,00							28.576.380,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	6 Unit	28.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	28.576.380,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.620.000,00							56.672.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	6 Unit	58.620.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	56.672.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						156.000.000,00					dinas ketahanan pangan		174.500.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan kantor						156.000.000,00					dinas ketahanan pangan		174.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00						12 Laporan	60.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00						12 Laporan	114.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00							60.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.000.000,00							114.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	114.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.750.000,00					dinas ketahanan pangan		167.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara						321.750.000,00					dinas ketahanan pangan		167.070.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.520.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	104.160.000,00						15 Unit	104.160.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	191.760.000,00						2 Unit	42.430.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	7.310.000,00						5 Unit	5.480.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						191.760.000,00							42.430.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	191.760.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	42.430.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						104.160.000,00							104.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	8 Unit	104.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		15 Unit	104.160.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.310.000,00							5.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	11 Unit	7.310.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	5.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.520.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
134.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**63.979.600,00**							**32.822.600,00**	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***63.979.600,00***							***32.822.600,00***	
			1.Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100,00 Persentase		99,58 Persentase	100,00 Persentase	63.979.600,00						100,00 Persentase	32.822.600,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						63.979.600,00					Lumbung Pangan gapoktan		32.822.600,00	
		Tersedianya Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan (%)						63.979.600,00					Lumbung Pangan gapoktan		32.822.600,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	6 unit		6 unit	6 unit	28.070.000,00						6 unit	7.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	22.641.600,00						5 Unit	5.822.600,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.268.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						22.641.600,00							5.822.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	1 Unit	22.641.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Suka Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Unit	5.822.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						13.268.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.268.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Mulya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Suka Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						28.070.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	6 unit		6 unit	1 unit	28.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Surakarta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 unit	7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
135.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**781.935.030,00**							**996.563.500,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***781.935.030,00***							***996.563.500,00***	
			1.Skor Pola Pangan Harapan	90,32 Nilai		86,22 Nilai	87,24 Nilai	781.935.030,00						88,27 Nilai	996.563.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						104.770.750,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		123.556.200,00	
		Tersedianya Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan						104.770.750,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		123.556.200,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.683.700,00						1 Dokumen	15.683.800,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.001.200,00						4 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan		10 laporan	10 laporan	34.160.000,00						10 laporan	50.069.900,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.026.900,00						2 Unit	15.740.500,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	9.736.450,00						20 Keluarga	6.773.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.162.500,00						4 Laporan	20.289.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						15.162.500,00							20.289.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.162.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kemalo Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	20.289.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						9.736.450,00							6.773.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	9.736.450,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kemalo Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		20 Keluarga	6.773.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						34.160.000,00							50.069.900,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan		10 laporan	10 laporan	34.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Muara Aman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 laporan	50.069.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						15.026.900,00							15.740.500,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.026.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Unit	15.740.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						15.001.200,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.001.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						15.683.700,00							15.683.800,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.683.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	15.683.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						608.663.000,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		770.256.900,00	
		Tersedianya jumlah cadangan pangan yang tersalurkan ke daerah rawan pangan						608.663.000,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		770.256.900,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Ton		35 Ton	35 Ton	568.099.000,00						35 Ton	749.979.300,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	35 Ton		35 Ton	35 Ton	40.564.000,00						35 Ton	20.277.600,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						568.099.000,00							749.979.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Ton		35 Ton	38 Ton	568.099.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		35 Ton	749.979.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						40.564.000,00							20.277.600,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	35 Ton		35 Ton	5 Ton	40.564.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		35 Ton	20.277.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						68.501.280,00					Kelompok wanita tani dan PKK		102.750.400,00	
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan kegiatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi						68.501.280,00					Kelompok wanita tani dan PKK		102.750.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.110.000,00						4 Laporan	12.110.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	48.163.280,00						4 Laporan	65.640.400,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.228.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						8.228.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	8.228.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						48.163.280,00							65.640.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	48.163.280,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Ratu Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Tanjung Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	65.640.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						12.110.000,00							12.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.110.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Trimodadi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	12.110.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
136.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**271.359.300,00**							**288.582.100,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***271.359.300,00***							***288.582.100,00***	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	100 %		100 %	100 %	271.359.300,00						100 %	288.582.100,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						24.782.200,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		19.923.800,00	
		Tersusunnya dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan						24.782.200,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		19.923.800,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.782.200,00						1 Dokumen	19.923.800,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						24.782.200,00							19.923.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.782.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sinar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	19.923.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						246.577.100,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		268.658.300,00	
		tersedianya persentase penanganan kerawanan pangan						246.577.100,00					MASYARAKAT Daerah rawan pangan		268.658.300,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	190.701.800,00						6 Dokumen	190.702.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	39.606.300,00						6 Laporan	67.956.300,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	16.269.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.269.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	16.269.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Karang Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						39.606.300,00							67.956.300,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	39.606.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Laporan	67.956.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						190.701.800,00							190.702.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	190.701.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Mulya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Dokumen	190.702.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
137.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**62.086.700,00**							**55.164.500,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***62.086.700,00***							***55.164.500,00***	
			1.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	62.086.700,00						100 Persentase	55.164.500,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						62.086.700,00					kelompok pengilingan padi		55.164.500,00	
		Tersedianya pangan segar aman konsumsi						62.086.700,00					kelompok pengilingan padi		55.164.500,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	16.065.900,00						10 Dokumen	17.143.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	7.387.900,00						10 Dokumen	7.331.900,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	38.632.900,00						6 Dokumen	30.689.600,00	
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						7.387.900,00							7.331.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	7.387.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Mekar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Karya Sakti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Dokumen	7.331.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						38.632.900,00							30.689.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	38.632.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Sumber Arum || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sumber Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kemalo Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Dokumen	30.689.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						16.065.900,00							17.143.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	16.065.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sumber Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kemalo Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Sumber Arum || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Dokumen	17.143.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**16.576.437.979,23**								**16.672.413.522,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.576.437.979,23**								**16.672.413.522,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**16.576.437.979,23**								**16.672.413.522,00**	
138.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.377.176.897,23**								**11.744.098.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***11.377.176.897,23***								***11.650.098.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	11.377.176.897,23						67-67.2 Nilai	11.650.098.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.179.000,00					DLH dan ASN		37.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.179.000,00					DLH dan ASN		37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.223.800,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.965.800,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.111.700,00						2 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.066.800,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.090.300,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.061.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.683.600,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.976.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.111.700,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.111.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.061.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.061.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.090.300,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.090.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.965.800,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.965.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.066.800,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.066.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.683.600,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.683.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.976.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.976.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.223.800,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.223.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.889.946.607,23					DLH dan ASN		5.948.520.000,00	
		Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.889.946.607,23					DLH dan ASN		5.948.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	322.490.000,00						1 Dokumen	323.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.232.100,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	15.648.400,00						18 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5.538.576.107,23						56 Orang/bulan	5.600.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.538.576.107,23							5.600.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5.538.576.107,23	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Orang/bulan	5.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						322.490.000,00							323.520.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	322.490.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	323.520.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.232.100,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.232.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.648.400,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	15.648.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		18 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.732.000,00					DLH		5.000.000,00	
		Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.732.000,00					DLH		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.732.000,00						13 Laporan	5.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.732.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.732.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		13 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.324.100,00					DLH dan ASN		29.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.324.100,00					DLH dan ASN		29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.877.500,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.866.600,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	16.580.000,00						2 Orang	20.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.866.600,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.866.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.877.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.877.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						16.580.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	16.580.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Orang	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.074.600,00					DLH dan ASN		123.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.074.600,00					DLH dan ASN		123.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.725.500,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.490.000,00						12 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.640.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.116.700,00						1 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.356.400,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.746.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.116.700,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.116.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.356.400,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.356.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.746.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.746.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.640.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	15.640.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						58.490.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.490.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.725.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.725.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						89.757.590,00					DLH dan ASN		95.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						89.757.590,00					DLH dan ASN		95.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	28.285.000,00						8 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	61.472.590,00						8 Unit	65.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						28.285.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	10 Unit	28.285.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.472.590,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	7 Unit	61.472.590,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.743.000.000,00					DLH dan ASN		5.015.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor						4.743.000.000,00					DLH dan ASN		5.015.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.701.000.000,00						12 Laporan	4.965.600.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.701.000.000,00							4.965.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.701.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	4.965.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						467.163.000,00					DLH dan ASN		490.978.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daeah						467.163.000,00					DLH dan ASN		490.978.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	62.065.000,00						1 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	200.160.000,00						8 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	188.088.000,00						1 Unit	184.128.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	16.850.000,00						25 Unit	16.850.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						188.088.000,00							184.128.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	188.088.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	184.128.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.160.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	200.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.850.000,00							16.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	16.850.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		25 Unit	16.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						62.065.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	3 Unit	62.065.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
139.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**400.395.100,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***400.395.100,00***							***300.000.000,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	400.395.100,00						100,00 Persentase	300.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						139.174.300,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		300.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)						139.174.300,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.174.300,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						139.174.300,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.174.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						261.220.800,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)						261.220.800,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	261.220.800,00						Dokumen	0,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						261.220.800,00							0,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	261.220.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
140.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**409.061.849,00**							**321.058.000,00**	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						***409.061.849,00***							***291.058.000,00***	
			999.Indeks Kualitas Air	73,99 Indeks		73,19 Indeks	73,39 Indeks	409.061.849,00						73,59 Indeks	291.058.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Kualitas Udara	72,61 Indeks		71.01 Indeks	71,41 Indeks	409.061.849,00						71,81 Indeks	291.058.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						409.061.849,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		321.058.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						409.061.849,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		321.058.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	7 Lokasi		7 Lokasi	7 Lokasi	207.588.609,00						7 Lokasi	150.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.728.300,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.820.600,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.757.500,00						1 Dokumen	29.744.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.360.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.406.640,00						1 Kegiatan	30.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.114.700,00						1 Laporan	11.314.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.285.500,00						1 Paket	30.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						12.360.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.360.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						11.820.600,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.820.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						31.406.640,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.406.640,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Kegiatan	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						34.728.300,00							35.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.728.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						207.588.609,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	7 Lokasi		7 Lokasi	7 Lokasi	207.588.609,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		7 Lokasi	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						11.114.700,00							11.314.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.114.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Laporan	11.314.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						76.757.500,00							29.744.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	76.757.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	29.744.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						23.285.500,00							30.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.285.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Paket	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
141.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**774.850.940,00**							**770.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***774.850.940,00***							***770.000.000,00***	
			999.Persentase RTH	30,00 Persentase		20,00 Persentase	20,00 Persentase	774.850.940,00						25,00 Persentase	770.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						774.850.940,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		770.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						774.850.940,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Masyarakat		770.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit		10 Unit	10 Unit	621.850.040,00						10 Unit	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.44 Ha		2.29 Ha	2.34 Ha	153.000.900,00						2.39 Ha	170.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						153.000.900,00							170.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.44 Ha		2.29 Ha	10 Ha	153.000.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2.39 Ha	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						621.850.040,00							600.000.000,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit		10 Unit	14 Unit	621.850.040,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Unit	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
142.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**39.884.300,00**							**40.000.000,00**	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						***39.884.300,00***							***40.000.000,00***	
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100,00 Persentase		80,00 Persentase	90,00 Persentase	39.884.300,00						95,00 Persentase	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						39.884.300,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3						39.884.300,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	35 Usaha		30 Usaha	30 Usaha	39.884.300,00						35 Usaha	40.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						39.884.300,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	35 Usaha		30 Usaha	30 Usaha	39.884.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		35 Usaha	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**72.913.700,00**							**106.776.500,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***72.913.700,00***							***106.776.500,00***	
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100,00 %		100,00 %	100,00 %	72.913.700,00						100,00 %	106.776.500,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						72.913.700,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		106.776.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						72.913.700,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		106.776.500,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha		30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	36.768.000,00						35 Badan Usaha	70.000.000,00	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	26.146.000,00						1 Orang	26.776.500,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.700,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						9.999.700,00							10.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						26.146.000,00							26.776.500,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang		1 Orang	2 Orang	26.146.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Orang	26.776.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						36.768.000,00							70.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha		30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	36.768.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		35 Badan Usaha	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**87.346.000,00**							**85.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup						***87.346.000,00***							***85.000.000,00***	
			999.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100,00 Persentase		75,00 Persentase	80,00 Persentase	87.346.000,00						85,00 Persentase	85.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87.346.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87.346.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		85.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang		100 Orang	100 Orang	87.346.000,00						100 Orang	85.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						87.346.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang		100 Orang	300 Orang	87.346.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		100 Orang	85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**32.361.000,00**							**26.985.200,00**	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan						***32.361.000,00***							***26.985.200,00***	
			999.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00 Persentase		75,00 Persentase	80,00 Persentase	32.361.000,00						85,00 Persentase	26.985.200,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						32.361.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Sekolah, Swasta, Masyarakat		26.985.200,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						32.361.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Sekolah, Swasta, Masyarakat		26.985.200,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas		5 Entitas	5 Entitas	32.361.000,00						5 Entitas	26.985.200,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						32.361.000,00							26.985.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas		5 Entitas	3 Entitas	32.361.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Entitas	26.985.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**23.373.600,00**							**23.332.300,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup						***23.373.600,00***							***23.332.300,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	23.373.600,00						100,00 Persentase	23.332.300,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						23.373.600,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		23.332.300,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						23.373.600,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Pelaku Usaha, Masyarakat		23.332.300,00	
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi		1 Sanksi	1 Sanksi	10.000.000,00						1 Sanksi	10.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan		3 Pengaduan	3 Pengaduan	13.373.600,00						3 Pengaduan	13.332.300,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						13.373.600,00							13.332.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan		3 Pengaduan	3 Pengaduan	13.373.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		3 Pengaduan	13.332.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi		1 Sanksi	1 Sanksi	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Sanksi	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**3.359.074.593,00**							**3.255.163.522,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***3.359.074.593,00***							***3.255.163.522,00***	
			999.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	65 poin		60 poin	62 poin	3.359.074.593,00						64 poin	3.255.163.522,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						3.300.666.593,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Swasta, Masyarakat		3.194.723.922,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah						3.300.666.593,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Swasta, Masyarakat		3.194.723.922,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.125.200,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok		2 Kelompok	3 Kelompok	22.208.900,00						3 Kelompok	25.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	74.500 Ton		70.000 Ton	71.500 Ton	1.583.227.505,00						73.000 Ton	1.399.723.922,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	74.500 Ton		70.000 Ton	71.500 Ton	30.258.135,00						73.000 Ton	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit		10 Unit	10 Unit	252.040.000,00						12 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.190.925.073,00						15 Unit	1.250.000.000,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	29 Persentase		27 Persentase	27 Persentase	141.881.780,00						29 Persentase	150.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						22.208.900,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	22.208.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		3 Kelompok	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						252.040.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit		10 Unit	12 Unit	252.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Sari || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Priangan Baru || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		12 Unit	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						80.125.200,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.125.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						30.258.135,00							40.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	74.500 Ton		70.000 Ton	71.500 Ton	30.258.135,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		73.000 Ton	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						1.190.925.073,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.190.925.073,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		15 Unit	1.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						141.881.780,00							150.000.000,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	29 Persentase		27 Persentase	29 Persentase	141.881.780,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		29 Persentase	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	-	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						1.583.227.505,00							1.399.723.922,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	74.500 Ton		70.000 Ton	71.500 Ton	1.583.227.505,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		73.000 Ton	1.399.723.922,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						58.408.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Swasta, Masyarakat		60.439.600,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						58.408.000,00					Pemkab Lampung Utara, DLH, Swasta, Masyarakat		60.439.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.339.000,00						2 Laporan	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.069.000,00						1 Unit	45.439.600,00	
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						44.069.000,00							45.439.600,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.069.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Unit	45.439.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah						14.339.000,00							15.000.000,00	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.339.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.577.045.015,14**							**3.873.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.577.045.015,14**							**3.873.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.577.045.015,14**							**3.873.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
148.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.589.802.915,14**							**2.805.500.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***8.586.302.915,14***							***2.761.000.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.4-68.5 Nilai		68-68.1 Nilai	68.1-68.2 Nilai	8.586.302.915,14						68.2-68.3 Nilai	2.761.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.677.300,00					astacita		27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen perencanaan						25.677.300,00					astacita		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.499.900,00						3 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.200,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.676.900,00						1 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.300,00						4 Laporan	3.500.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.499.900,00							7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	3.499.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.500.200,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.000.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.676.900,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.676.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.300,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.760.896.965,14					astacita		843.000.000,00	
		Tersedia Dokumen Administrasi Perangkat Daerah						6.760.896.965,14					astacita		843.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.860.000,00						12 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.800.100,00						1 Laporan	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.499.400,00						4 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		65 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.635.737.465,14						75 Orang/bulan	700.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.635.737.465,14							700.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		65 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.635.737.465,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		75 Orang/bulan	700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.860.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.860.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.800.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.800.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.499.400,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.499.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00					astacita		4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00					astacita		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00						2 Dokumen	4.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						130.749.800,00					astacita		151.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Perangkat Daerah						130.749.800,00					astacita		151.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	74.951.000,00						2 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.002.000,00						10 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	9.037.000,00						11 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5 Paket	5 Paket	7.491.800,00						5 Paket	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	19.280.800,00						7 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	7.487.200,00						22 Paket	10.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.491.800,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5 Paket	5 Paket	7.491.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Paket	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.280.800,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	19.280.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		7 Paket	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.487.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	7.487.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		22 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.002.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.002.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Paket	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.037.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	9.037.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		11 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.951.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	74.951.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						842.110.850,00					astacita		1.000.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengadaan milik daerah						842.110.850,00					astacita		1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	842.110.850,00						5 Unit	1.000.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						842.110.850,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	842.110.850,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						664.800.000,00					astacita		600.000.000,00	
		Tersedianya Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah						664.800.000,00					astacita		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	543.000.000,00						2 Laporan	450.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.800.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						543.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	543.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						162.068.000,00					astacita		180.000.000,00	
		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						162.068.000,00					astacita		180.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.498.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	87.120.000,00						2 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	23.430.000,00						4 Unit	30.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						87.120.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	87.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Unit	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.020.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.430.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	23.430.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Unit	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.498.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.498.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
149.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**862.240.300,00**							**908.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***862.240.300,00***							***908.000.000,00***	
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25 %		10 %	15 %	862.240.300,00						20 %	908.000.000,00	
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	72,85 Persentase		66,57 Persentase	68,14 Persentase	862.240.300,00						69,71 Persentase	908.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						770.000.000,00					Astacita dan phtc		800.000.000,00	
		Tersedianya Penerbitan Layanan Kependudukan						770.000.000,00					Astacita dan phtc		800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	770.000.000,00						4 Dokumen	800.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						770.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	770.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00					phtc		10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00					phtc		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						87.240.300,00					Astacita dan phtc		98.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pendaftaran penduduk						87.240.300,00					Astacita dan phtc		98.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	69.968.300,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.930.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.342.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						10.342.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.342.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						69.968.300,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	69.968.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						6.930.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.930.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
150.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**50.000.000,00**							**60.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***50.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			0.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	50.000.000,00						100,00 Persentase	50.000.000,00	
			1.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	50.000.000,00						100,00 Persentase	50.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	50.000.000,00						100,00 Persentase	50.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	50.000.000,00						100,00 Persentase	50.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						7.500.000,00					phtc		25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pencatatn sipil						7.500.000,00					phtc		25.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	7.500.000,00						4 Layanan	25.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						7.500.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Layanan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						42.500.000,00					Astacita dan phtc		35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen pencatatan sipil						42.500.000,00					Astacita dan phtc		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.250.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.250.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						11.250.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						21.250.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
151.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**60.001.600,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***60.001.600,00***							***65.000.000,00***	
			2.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	61 %		21 %	30 %	60.001.600,00						45 %	65.000.000,00	
			999.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	50,00 Persentase		35,00 Persentase	38,00 Persentase	60.001.600,00						44,00 Persentase	65.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						25.000.200,00					astacita		35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						25.000.200,00					astacita		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.100,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen		7 Dokumen	10 Dokumen	15.000.100,00						15 Dokumen	20.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						10.000.100,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						15.000.100,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen		7 Dokumen	10 Dokumen	15.000.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		15 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						35.001.400,00					astacita		45.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan						35.001.400,00					astacita		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.001.000,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.400,00						5 Laporan	30.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						10.001.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.001.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						25.000.400,00							30.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	25.000.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
152.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**15.000.200,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***15.000.200,00***							***20.000.000,00***	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	15.000.200,00						100,00 Persentase	20.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						15.000.200,00					astacita		20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan						15.000.200,00					astacita		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.200,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						15.000.200,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI						**7.727.415.035,04**							**2.227.402.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.560.455.035,04**							**2.007.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**7.560.455.035,04**							**2.007.000.000,00**	
153.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.121.964.535,04**							**423.000.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***5.117.964.535,04***							***407.000.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	5.117.964.535,04						64.5-64.7 Nilai	407.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.127.000,00					Dokumen Perencanaan di Dinas PMDT		10.000.000,00	
		tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi						36.127.000,00					Dokumen Perencanaan di Dinas PMDT		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.020.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.227.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.880.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.020.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.227.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.227.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.880.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.880.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.679.469.135,04					Dokumen Administrasi Dinas PMDT		100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.679.469.135,04					Dokumen Administrasi Dinas PMDT		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	244.920.000,00						6 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.434.549.135,04						Orang/bulan	0,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.434.549.135,04							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.434.549.135,04	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		Orang/bulan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						244.920.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	244.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.000.000,00					Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.000.000,00					Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.262.400,00					Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		49.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.900.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00						2 Paket	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.010.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.010.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.010.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						79.900.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.900.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.656.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.656.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.056.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	177.600.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.056.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.056.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						177.600.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	177.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.450.000,00					Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.450.000,00					Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	79.450.000,00						5 Unit	60.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.450.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	2 Unit	79.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.262.400,00					Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		49.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.262.400,00					Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		49.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.352.400,00						-	12.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.352.400,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.352.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
154.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**52.000.000,00**							**370.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						***52.000.000,00***							***370.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	20 Persentase		20 Persentase	20 Persentase	52.000.000,00						20 Persentase	370.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						52.000.000,00					wilayah desa di Lampung Utara		370.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa						52.000.000,00					wilayah desa di Lampung Utara		370.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa		5 Desa	5 Desa	52.000.000,00						5 Desa	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	250.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						52.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa		5 Desa	5 Desa	52.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Desa	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						0,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit		5 Unit	46 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Unit	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
155.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**134.830.500,00**							**175.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***134.830.500,00***							***175.000.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	8.5 %		6.5 %	7 %	134.830.500,00						7.5 %	175.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						134.830.500,00					wilayah desa di Lampung Utara		175.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						134.830.500,00					wilayah desa di Lampung Utara		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.830.500,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						134.830.500,00							175.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.830.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
156.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**424.330.000,00**							**1.035.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***424.330.000,00***							***1.035.000.000,00***	
			2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	20 Persentase		20 Persentase	20 Persentase	424.330.000,00						20 Persentase	1.035.000.000,00	
			999.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00 Persentase		84,48 Persentase	88,79 Persentase	424.330.000,00						93,10 Persentase	1.035.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						424.330.000,00					wilayah desa di Lampung Utara		1.035.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						424.330.000,00					wilayah desa di Lampung Utara		1.035.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang		50 Orang	50 Orang	62.000.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.850.000,00						1 Dokumen	195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.480.000,00						1 Dokumen	140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	232 Dokumen		232 Dokumen	232 Dokumen	46.000.000,00						232 Dokumen	150.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						62.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang		50 Orang	46 Orang	62.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		50 Orang	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						52.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						125.480.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						46.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	232 Dokumen		232 Dokumen	50 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		232 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						48.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						90.850.000,00							195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.850.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
157.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1.827.330.000,00**							**4.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						***1.827.330.000,00***							***2.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	1.827.330.000,00						100,00 Persentase	2.000.000,00	
			999.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	1.827.330.000,00						100,00 Persentase	2.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.827.330.000,00					Lembaga-lembaga yang ada di desa		4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.827.330.000,00					Lembaga-lembaga yang ada di desa		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	685.480.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	996.370.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.480.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						135.480.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	135.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						996.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	996.370.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						685.480.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	685.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**166.960.000,00**							**220.402.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**166.960.000,00**							**220.402.000,00**	
158.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**131.480.000,00**							**210.402.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan kawasan Transmigrasi						***131.480.000,00***							***110.402.000,00***	
			999.Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	131.480.000,00						100 Persentase	110.402.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						131.480.000,00					Penduduk dalam kawasan transmigrasi di Lampung Utara		210.402.000,00	
		terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						131.480.000,00					Penduduk dalam kawasan transmigrasi di Lampung Utara		210.402.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	5.200.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	46.000.000,00						1 Lokasi	5.202.000,00	
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal						0,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	5 Orang		5 Orang	25 Orang	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Orang	5.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						46.000.000,00							5.202.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	46.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Lokasi	5.202.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
		terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						131.480.000,00					Penduduk dalam kawasan transmigrasi di Lampung Utara		210.402.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	35.480.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		-	3 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						35.480.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	6 Kepala Keluarga	35.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
159.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**35.480.000,00**							**10.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***35.480.000,00***							***10.000.000,00***	
			999.Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	35.480.000,00						100 Persentase	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						35.480.000,00					Penduduk Transmigrasi di Lampung Utara		10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						35.480.000,00					Penduduk Transmigrasi di Lampung Utara		10.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25 Kepala Keluarga		25 Kepala Keluarga	25 Kepala Keluarga	35.480.000,00						25 Kepala Keluarga	10.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						35.480.000,00							10.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25 Kepala Keluarga		25 Kepala Keluarga	25 Kepala Keluarga	35.480.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		25 Kepala Keluarga	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**9.885.828.298,54**							**10.878.145.198,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.885.828.298,54**							**10.878.145.198,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**9.885.828.298,54**							**10.878.145.198,00**	
160.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.137.226.803,54**							**6.133.043.198,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***5.102.226.803,54***							***6.078.043.198,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-63.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	5.102.226.803,54						64.5-64.7 Nilai	6.078.043.198,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.500.045,00					-		17.500.000,00	
		tersedianya dokumen perencanaan						17.500.045,00					-		17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00						5 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	5.000.045,00						6 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00						5 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00						4 Laporan	2.500.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.045,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		7 Dokumen	2 Dokumen	5.000.045,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		4 Laporan	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.500.601.258,54					-		5.341.603.398,00	
		Tersedianya Dokumen dan Laporan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah						4.500.601.258,54					-		5.341.603.398,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	167.032.000,00						1 Dokumen	229.230.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4.323.569.258,54						56 Orang/bulan	5.102.373.398,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.323.569.258,54							5.102.373.398,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4.323.569.258,54	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		56 Orang/bulan	5.102.373.398,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						167.032.000,00							229.230.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	167.032.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	229.230.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.229.300,00					-		10.229.300,00	
		TTersdiannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.229.300,00					-		10.229.300,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.229.300,00						3 Dokumen	10.229.300,00	
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.229.300,00							10.229.300,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.229.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Dokumen	10.229.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.999.600,00					-		115.000.000,00	
		Tersdiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.999.600,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00						3 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	35.000.000,00						6 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.000.000,00						66 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.999.600,00						6 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	25.000.000,00						6 Paket	25.000.000,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.999.600,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	19.999.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Paket	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Paket	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		6 Paket	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		66 Paket	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						190.939.800,00					-		190.950.000,00	
		tersediannya unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						190.939.800,00					-		190.950.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.939.800,00						1 Unit	175.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	15.000.000,00						7 Unit	15.000.000,00	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.939.800,00							175.950.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.939.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Unit	175.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		7 Unit	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.063.400,00					-		387.856.500,00	
		Tersedianya jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.063.400,00					-		387.856.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.450.000,00						12 Laporan	70.524.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.613.400,00						12 Laporan	317.332.500,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.450.000,00							70.524.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.450.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Laporan	70.524.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						162.613.400,00							317.332.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.613.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Laporan	317.332.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.893.400,00					-		59.904.000,00	
		Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.893.400,00					-		59.904.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	59.893.400,00						15 Unit	59.904.000,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						59.893.400,00							59.904.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	2 Unit	59.893.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		15 Unit	59.904.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
161.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**285.702.180,00**							**285.722.000,00**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***285.702.180,00***							***260.722.000,00***	
			3.Total Fertility Rate (TFR).	2.20 Orang		2.25 Orang	2.24 Orang	285.702.180,00						2.22 Orang	260.722.000,00	
			4.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17.02-16.15 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		21.13-20.01 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20.01-18.95 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	285.702.180,00						18.95-17.96 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	260.722.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100.701.300,00					-		100.722.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100.701.300,00					-		100.722.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.001.300,00						1 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.700.000,00						5 Unit	50.722.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						25.001.300,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.001.300,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						50.700.000,00							50.722.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	5 Unit		5 Unit	1 Unit	50.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Unit	50.722.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						185.000.880,00					-		185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						185.000.880,00					-		185.000.000,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	20.000.130,00						-	20.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	125.000.750,00						-	125.000.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						125.000.750,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	5 Kelompok	125.000.750,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	5 Kampung KB	40.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						20.000.130,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	1 Dokumen	20.000.130,00	Kab. Lampung Utara	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
162.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**4.357.035.795,00**							**4.328.380.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***4.357.035.795,00***							***4.298.380.000,00***	
			3.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	6.1 Persentase		9.3 Persentase	8.2 Persentase	4.357.035.795,00						7.3 Persentase	4.298.380.000,00	
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	90.06 Persentase		90.02 Persentase	90.03 Persentase	4.357.035.795,00						90.04 Persentase	4.298.380.000,00	
			999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,94 %		13,46 %	11,33 %	4.357.035.795,00						9,20 %	4.298.380.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						4.258.130.000,00					-		4.083.380.000,00	
		Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						4.258.130.000,00					-		4.083.380.000,00	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.174.750.000,00						12 Laporan	4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.380.000,00						1 Laporan	48.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						4.174.750.000,00							4.000.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan		12 Laporan	12 laporan Laporan	4.174.750.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 Laporan	4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						48.380.000,00							48.380.000,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.380.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	48.380.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						98.905.795,00					-		245.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1300 Orang		1300 Orang	1300 Orang	29.998.095,00						1300 Orang	30.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						29.998.095,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1300 Orang		1300 Orang	1300 Orang	29.998.095,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1300 Orang	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						98.905.795,00					-		245.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						98.905.795,00					-		245.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	-	13.800.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	-	20.096.400,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	15.011.300,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	20.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						13.800.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	1 Kegiatan	13.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						20.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0032	Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan						20.096.400,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait KB Pascapersalinan, promosi dan edukasi KB Pascapersalinan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	1 Laporan / Dokumen	20.096.400,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						15.011.300,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	15.011.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
163.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**105.863.520,00**							**131.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***105.863.520,00***							***131.000.000,00***	
			2.Indeks Lansia Berdaya	63 Indeks		60.3 Indeks	61 Indeks	105.863.520,00						61.7 Indeks	131.000.000,00	
			3.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	90.4 Indeks		86.5 Indeks	87.6 Indeks	105.863.520,00						88.6 Indeks	131.000.000,00	
			999.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	80,00 Persentase		60,00 Persentase	65,00 Persentase	105.863.520,00						70,00 Persentase	131.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						70.558.420,00					-		81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	23 Orang		23 Orang	23 Orang	40.000.600,00						23 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.352.120,00						1 Laporan	16.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						15.352.120,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.352.120,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						40.000.600,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	23 Orang		23 Orang	250 Orang	40.000.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		23 Orang	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						35.305.100,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan aan keluarga						35.305.100,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan		12 laporan	12 laporan	20.295.000,00						12 laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.010.100,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						20.295.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan		12 laporan	1 laporan	20.295.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		12 laporan	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						15.010.100,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.010.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						70.558.420,00					-		81.000.000,00	
		Tersedianya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						70.558.420,00					-		81.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	15.205.700,00						-	25.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						15.205.700,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	15.205.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**29.556.984.020,83**							**29.153.641.846,34**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.556.984.020,83**							**29.153.641.846,34**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**29.556.984.020,83**							**29.153.641.846,34**	
164.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.960.043.320,83**							**11.070.141.846,34**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***10.944.543.320,83***							***11.046.641.846,34***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.67-70.00 Nilai		64.95-65.49 Nilai	65.49-66.75 Nilai	10.944.543.320,83						66.75-67.48 Nilai	11.046.641.846,34	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						163.055.000,00					Seluruh bidang pada Dinas Perhubungan		82.008.500,00	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi daerah						163.055.000,00					Seluruh bidang pada Dinas Perhubungan		82.008.500,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00						1 Berita Acara	5.508.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						1 Dokumen	11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00						2 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						1 Dokumen	11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.400.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	113.155.000,00						4 Laporan	8.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.500.000,00							9.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8.000.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						8.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.500.000,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.500.000,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.400.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						113.155.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	113.155.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.508.500,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	5.508.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.495.764.720,83					Pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan ang melaksanakan pengelolaan keuangan		6.438.100.346,34	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.495.764.720,83					Pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan ang melaksanakan pengelolaan keuangan		6.438.100.346,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	284.820.000,00						12 Dokumen	345.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		80 Orang/bulan	82 Orang/bulan	6.195.944.720,83						82 Orang/bulan	6.076.760.346,34	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.195.944.720,83							6.076.760.346,34	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		80 Orang/bulan	82 Orang/bulan	6.195.944.720,83	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		82 Orang/bulan	6.076.760.346,34	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						284.820.000,00							345.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	284.820.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	345.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.000.000,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	15.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan seluruh staf Dinas Perhubungan		9.506.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan seluruh staf Dinas Perhubungan		9.506.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	9.506.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00							9.506.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	9.506.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						520.333.600,00					ASN dan Non-ASN pada Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan perangkat daerah		680.557.000,00	
		Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						520.333.600,00					ASN dan Non-ASN pada Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan perangkat daerah		680.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	399.424.000,00						12 Laporan	530.792.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	62.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	37.472.400,00						3 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.258.000,00						1 Paket	15.265.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.179.200,00						1 Paket	27.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.258.000,00							15.265.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.258.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	15.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.179.200,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.179.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	62.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.472.400,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	37.472.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Paket	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						399.424.000,00							530.792.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	399.424.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	530.792.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		25 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		25 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.346.800.000,00					Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan staf PPPK Paruh Waktu serta outsourcing		3.412.160.000,00	
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.346.800.000,00					Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan staf PPPK Paruh Waktu serta outsourcing		3.412.160.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.282.600.000,00						12 Laporan	3.347.160.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						64.200.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.282.600.000,00							3.347.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.282.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	3.347.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						424.090.000,00					Perangkat Daerah beserta aparatur yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD)		447.810.000,00	
		Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara						424.090.000,00					Perangkat Daerah beserta aparatur yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD)		447.810.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		10 Unit	12 Unit	244.010.000,00						12 Unit	246.650.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	161.160.000,00						1 Unit	161.160.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	24 Unit	18.920.000,00						12 Unit	40.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						161.160.000,00							161.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	161.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	161.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						244.010.000,00							246.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		10 Unit	7 Unit	244.010.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Unit	246.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.920.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	28 Unit	18.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Unit	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
165.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**18.528.760.700,00**							**17.993.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***18.517.760.700,00***							***17.938.500.000,00***	
			999.Konektivitas Darat	255.9 Persentase		207.9 Persentase	207.9 Persentase	18.094.076.700,00						226.9 Persentase	17.938.500.000,00	
			999.Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	92,01 Persentase		88,69 Persentase	89,52 Persentase	18.094.076.700,00						90,35 Persentase	17.938.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						423.684.000,00					Masyarakat pengguna jalan, Operator transportasi, Pemerintah daerah, Instansi vertikal/penegak hukum, Pelaku usaha dan kawasan strategis, Wilayah/kawasan perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten/kota		0,00	
		-						423.684.000,00					Masyarakat pengguna jalan, Operator transportasi, Pemerintah daerah, Instansi vertikal/penegak hukum, Pelaku usaha dan kawasan strategis, Wilayah/kawasan perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten/kota		0,00	
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.684.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	410.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						410.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	410.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						13.684.000,00							0,00	
		Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.684.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						17.168.004.200,00					Masyarakat Umum Pengguna Jalan		17.000.000.000,00	
		Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						17.168.004.200,00					Masyarakat Umum Pengguna Jalan		17.000.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Unit		160 Unit	60 Unit	4.600.000.000,00						90 Unit	4.500.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3785 Unit		3785 Unit	3785 Unit	12.568.004.200,00						3785 Unit	12.500.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						4.600.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Unit		160 Unit	1000 Unit	4.600.000.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		90 Unit	4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						12.568.004.200,00							12.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3785 Unit		3785 Unit	3785 Unit	12.568.004.200,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3785 Unit	12.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						63.356.000,00					Penumpang angkutan umum, pemilik dan operator angkutan umum serta masyarakat		60.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Terminal Penumpang Tipe C						63.356.000,00					Penumpang angkutan umum, pemilik dan operator angkutan umum serta masyarakat		60.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	63.356.000,00						3 Unit	60.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						63.356.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	2 Unit	63.356.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Unit	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						17.765.000,00					Pengelola Parkir, petugas parkir, pemilik lahan parkir, dan masyarakat pengguna parkir		19.500.000,00	
		Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						17.765.000,00					Pengelola Parkir, petugas parkir, pemilik lahan parkir, dan masyarakat pengguna parkir		19.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.765.000,00						1 Laporan	17.500.000,00	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						16.765.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.765.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						221.666.000,00					Pemilik kendaraan wajib uji, Perusahaan angkutan umum dan perusahaan logistik, dan Pengemudi atau operator kendaraan		230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah unit Kendaraan Bermotor wajib uji						221.666.000,00					Pemilik kendaraan wajib uji, Perusahaan angkutan umum dan perusahaan logistik, dan Pengemudi atau operator kendaraan		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3400 Dokumen		3000 Dokumen	3100 Dokumen	77.500.000,00						3200 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	17.224.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit		0 Unit	4 Unit	16.190.000,00						4 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3400 Unit		3000 Unit	3100 Unit	90.752.000,00						3200 Unit	95.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						90.752.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3400 Unit		3000 Unit	30 Unit	90.752.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3200 Unit	95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						77.500.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3400 Dokumen		3000 Dokumen	3100 Dokumen	77.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3200 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						16.190.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit		0 Unit	10 Unit	16.190.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Unit	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						17.224.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	17.224.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						250.370.000,00					Instansi Pemerintah terkait, operator angkutan jalan, masyarakat pengguna jalan, dan LSM		271.000.000,00	
		Jumlah laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						250.370.000,00					Instansi Pemerintah terkait, operator angkutan jalan, masyarakat pengguna jalan, dan LSM		271.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	236.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 Unit		0 Unit	4 Unit	9.370.000,00						4 Unit	15.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)						9.370.000,00							15.000.000,00	
		Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 Unit		0 Unit	4 Unit	9.370.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Unit	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						236.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	236.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						163.500.000,00					Pihak Swasta, Instansi Pemerintah terkait, masyarakat terdampak, pemilik dan pengelola kawasan		170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						163.500.000,00					Pihak Swasta, Instansi Pemerintah terkait, masyarakat terdampak, pemilik dan pengelola kawasan		170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	149.500.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						14.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						149.500.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	149.500.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						173.715.500,00					Pelajar, Wilayah yang belum terlayani atau kurang terlayani angkutan umum, dan Pelaku usaha angkutan umum		178.000.000,00	
		Jumlah unit Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						173.715.500,00					Pelajar, Wilayah yang belum terlayani atau kurang terlayani angkutan umum, dan Pelaku usaha angkutan umum		178.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	166.000.000,00						4 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	7.715.500,00						2 Laporan	8.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						7.715.500,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	7.715.500,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						166.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	166.000.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Unit	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						21.000.000,00					Perusahaan Angkutan Umum, Pelaku Usaha Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum, Pemerintah Daerah, dan Pengemudi dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						21.000.000,00					Perusahaan Angkutan Umum, Pelaku Usaha Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum, Pemerintah Daerah, dan Pengemudi dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit		0 Unit	4 Unit	11.000.000,00						4 Unit	13.000.000,00	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						11.000.000,00							13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit		0 Unit	4 Unit	11.000.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Unit	13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.700.000,00					Perusahaan Angkutan Umum, Pelaku Usaha Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum, Pemerintah Daerah, dan Pengemudi dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi		40.000.000,00	
		Jumlah laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.700.000,00					Perusahaan Angkutan Umum, Pelaku Usaha Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum, Pemerintah Daerah, dan Pengemudi dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00						2 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.700.000,00						2 Laporan	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						11.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Dokumen	18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						14.700.000,00							22.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.700.000,00	Kab. Lampung Utara	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
166.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**						**68.180.000,00**							**90.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api						***68.180.000,00***							***90.000.000,00***	
			999.Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	68.180.000,00						100,00 Persentase	90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						68.180.000,00					Dinas Perhubungan, Petugas Jalur Lintasan, dan Masyarakat umum pengguna jalan		90.000.000,00	
		Jumlah dokumen cakupan perlintasan kereta api yang tertangani						68.180.000,00					Dinas Perhubungan, Petugas Jalur Lintasan, dan Masyarakat umum pengguna jalan		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.180.000,00						12 Dokumen	90.000.000,00	
	2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota						68.180.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Ciamis || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**11.810.061.120,93**							**10.210.618.993,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.810.061.120,93**							**10.200.618.993,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**11.593.102.720,93**							**9.958.106.660,00**	
167.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.023.766.120,93**							**5.014.648.876,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***7.023.766.120,93***							***4.802.648.876,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	7.023.766.120,93						64.5-64.7 Nilai	4.802.648.876,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.343.100,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		25.000.000,00	
		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						39.343.100,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.863.500,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.859.000,00						5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.700.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.544.600,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.456.000,00						5 Laporan	10.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.859.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	10.859.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.920.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.544.600,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.544.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.863.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	3.863.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.700.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.456.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	7 Laporan	10.456.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.211.994.290,93					Dinas Komunikasi dan Informatika		4.661.148.876,00	
		jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah						5.211.994.290,93					Dinas Komunikasi dan Informatika		4.661.148.876,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	241.440.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.090.200,00						4 Laporan	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	4.958.464.090,93						90 Orang/bulan	4.503.148.876,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.958.464.090,93							4.503.148.876,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		85 Orang/bulan	59 Orang/bulan	4.958.464.090,93	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		90 Orang/bulan	4.503.148.876,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						241.440.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	241.440.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.090.200,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.090.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.403.700,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		6.500.000,00	
		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah						9.403.700,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						5 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.219.500,00						4 Laporan	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	6.184.200,00						3 Dokumen	2.500.000,00	
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						6.184.200,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.184.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.219.500,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.219.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						67.443.400,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		65.000.000,00	
		Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian secara tertib dan tepat waktu						67.443.400,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	10.038.400,00						4 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		2 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		2 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		85 Paket	85 Paket	49.000.000,00						85 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		5 Unit	5 Unit	8.405.000,00						5 Unit	20.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						8.405.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		5 Unit	6 Unit	8.405.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						49.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		85 Paket	59 Paket	49.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		85 Paket	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.038.400,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	10.038.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Orang	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		2 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Orang	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang		2 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Orang	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						595.313.700,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		115.000.000,00	
		Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan tepat						595.313.700,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	376.580.000,00						10 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	17.119.500,00						2 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		3 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	4 Paket	176.612.000,00						4 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.022.200,00						10 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	9.980.000,00						3 Paket	35.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.022.200,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.022.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Paket	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.980.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	9.980.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Paket	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.119.500,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	6 Paket	17.119.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						176.612.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	4 Paket	176.612.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Paket	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						376.580.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	376.580.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						514.208.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		40.000.000,00	
		jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah						514.208.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	5 Unit	514.208.000,00						5 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						514.208.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	5 Unit	514.208.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						258.974.200,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		37.000.000,00	
		laporan pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah						258.974.200,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	78.000.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.974.200,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	2.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						78.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	78.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						180.974.200,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.974.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						327.085.730,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		65.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah						327.085.730,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		65.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.375.730,00						10 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		6 Unit	6 Unit	295.950.000,00						8 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		3 Unit	5 Unit	26.760.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						295.950.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		6 Unit	6 Unit	295.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.375.730,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	6 Unit	4.375.730,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.760.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		3 Unit	5 Unit	26.760.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
168.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**2.431.249.500,00**							**4.084.292.584,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daera						***2.431.249.500,00***							***4.076.292.584,00***	
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	84.53 %		81.25 %	81.90 %	2.431.249.500,00						82.56 %	4.076.292.584,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.431.249.500,00					Masyarakat Lampung Utara		4.084.292.584,00	
		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.431.249.500,00					Masyarakat Lampung Utara		4.084.292.584,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.168.757.900,00						1 Laporan	3.200.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						2.168.757.900,00							3.200.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	2.168.757.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	3.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.431.249.500,00					Masyarakat Lampung Utara		4.084.292.584,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	33.790.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	150.000.000,00						-	374.292.584,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	18.961.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	2.259.000,00						-	2.000.000,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	57.481.600,00						-	400.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						57.481.600,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	70 %	57.481.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						33.790.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	300000 Orang	33.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						2.259.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	2.259.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0028	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	0 %	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						18.961.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	7 Rekomendasi	18.961.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						0,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	0 Komunitas	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						150.000.000,00							374.292.584,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	80 Konten	150.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	374.292.584,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
169.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.138.087.100,00**							**859.165.200,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***2.138.087.100,00***							***859.165.200,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00 Indeks		3,51 Indeks	3,90 Indeks	2.138.087.100,00						4,28 Indeks	859.165.200,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						4.660.500,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		10.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan nama domain pemerintah daerah dan sub-domain di lingkup perangkat daerah sesuai ketentuan						4.660.500,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.660.500,00						5 Dokumen	10.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						4.660.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	5 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	4.660.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.133.426.600,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		849.165.200,00	
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota						2.133.426.600,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		849.165.200,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	5 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	5 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	4 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota						2.133.426.600,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		849.165.200,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	31.856.400,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	34.503.800,00						-	169.165.200,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	147.412.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.904.722.400,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	14.932.000,00						-	200.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						1.904.722.400,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	45 Titik	1.904.722.400,00	Kab. Lampung Utara	Pajak Reklame	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						34.503.800,00							169.165.200,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	4 Dokumen	34.503.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	169.165.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						147.412.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	2 Layanan	147.412.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						14.932.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	15 Titik	14.932.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						31.856.400,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	15 Aplikasi	31.856.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**113.000.000,00**							**135.512.333,00**	
170.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**113.000.000,00**							**135.512.333,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***113.000.000,00***							***131.512.333,00***	
			999.Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,87 Poin		1,43 Poin	2,04 Poin	113.000.000,00						2,65 Poin	131.512.333,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						113.000.000,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		135.512.333,00	
		Terselenggaranya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota						113.000.000,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		135.512.333,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	15 Orang		5 Orang	7 Orang	0,00						10 Orang	2.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		70 %	80 %	43.000.000,00						85 %	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	65.000.000,00						100 %	55.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		60 %	70 %	0,00						80 %	24.512.333,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						65.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	65.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		100 %	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						43.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		70 %	80 %	43.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		85 %	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						0,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	15 Orang		5 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Orang	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						0,00							24.512.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		60 %	0 %	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		80 %	24.512.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terselenggaranya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota						113.000.000,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		135.512.333,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						5.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	70 %	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**103.958.400,00**							**107.000.000,00**	
171.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**103.958.400,00**							**107.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***103.958.400,00***							***107.000.000,00***	
			999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	33,27 Angka		22,65 Angka	25,31 Angka	103.958.400,00						27,96 Angka	107.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						103.958.400,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		107.000.000,00	
		Terselenggaranya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah						103.958.400,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		107.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terselenggaranya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah						103.958.400,00					seluruh OPD, Pemkab Lampung Utara		107.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	11.762.300,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	92.196.100,00						-	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						11.762.300,00							30.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	11.762.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						92.196.100,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	2 Laporan	92.196.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X							**0,00**							**10.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**10.000.000,00**	
172.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	64.3-64.5 Nilai	0,00						-	10.000.000,00	
			Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	64.3-64.5 Nilai Indeks	0,00						-	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		10.000.000,00	
		jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah						0,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						5 Laporan	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA						**6.597.070.131,00**							**6.605.787.822,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.597.070.131,00**							**6.605.787.822,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**783.888.500,00**							**769.410.500,00**	
173.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**150.820.000,00**							**51.005.000,00**	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja						***150.820.000,00***							***51.005.000,00***	
			999.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	25,00 %		21,00 %	23,00 %	150.820.000,00						24,00 %	51.005.000,00	
			999.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		100 %	100 %	150.820.000,00						100 %	51.005.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						150.820.000,00					Pemerintah daerah, dunia usaha, tenaga kerja, pencari kerja		51.005.000,00	
		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja						150.820.000,00					Pemerintah daerah, dunia usaha, tenaga kerja, pencari kerja		51.005.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.820.000,00						1 Dokumen	51.005.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						150.820.000,00							51.005.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.820.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	51.005.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
174.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**160.375.000,00**							**316.231.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						***160.375.000,00***							***316.231.000,00***	
			999.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	37,33 %		35,46 %	35,93 %	160.375.000,00						36,39 %	316.231.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						160.375.000,00					Pencari kerja, tenaga kerja		316.231.000,00	
		Persentase Pelatihan berdasarkan unit kompetensi						160.375.000,00					Pencari kerja, tenaga kerja		316.231.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	160.375.000,00						-	316.231.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						160.375.000,00							316.231.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	60 Orang	160.375.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sri Basuki || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	316.231.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
175.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**242.994.200,00**							**315.466.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***242.994.200,00***							***259.360.500,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	77,37 Persentase		75,50 Persentase	75,97 Persentase	242.994.200,00						76,43 Persentase	259.360.500,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						165.000.000,00					-		203.255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri						165.000.000,00					-		203.255.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	7 Orang		5 Orang	6 Orang	165.000.000,00						6 Orang	203.255.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						165.000.000,00							203.255.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	7 Orang		5 Orang	80 Orang	165.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		6 Orang	203.255.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						77.994.200,00					Pencari kerja, perusahaan/pemberi kerja		112.211.000,00	
		tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						77.994.200,00					Pencari kerja, perusahaan/pemberi kerja		112.211.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1997 Orang		1500 Orang	1650 Orang	25.830.200,00						1815 Orang	56.105.500,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	13 Orang		10 Orang	11 Orang	52.164.000,00						12 Orang	56.105.500,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						25.830.200,00							56.105.500,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1997 Orang		1500 Orang	1650 Orang	25.830.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1815 Orang	56.105.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						52.164.000,00							56.105.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	13 Orang		10 Orang	12 Orang	52.164.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Orang	56.105.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
176.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**229.699.300,00**							**86.708.500,00**	
		Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi						***227.199.500,00***							***63.756.250,00***	
			999.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	9,40 Orang		7,88 Orang	8,26 Orang	227.199.500,00						8,64 Orang	63.756.250,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.230.700,00					Perusahaan dan pekerja		56.105.500,00	
		Persentase perusahaan yang telah Melakukan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama						45.230.700,00					Perusahaan dan pekerja		56.105.500,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.231.100,00						1 Laporan	51.005.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan		2 Perusahaan	2 Perusahaan	2.499.800,00						2 Perusahaan	2.550.250,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan		1 Perusahaan	1 Perusahaan	2.499.800,00						1 Perusahaan	2.550.250,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						2.499.800,00							2.550.250,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan		2 Perusahaan	12 Perusahaan	2.499.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Perusahaan	2.550.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						2.499.800,00							2.550.250,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan		1 Perusahaan	3 Perusahaan	2.499.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Perusahaan	2.550.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						40.231.100,00							51.005.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.231.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	51.005.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						184.468.600,00					Pekerja/buruh, serikat pekerja, perusahaan		30.603.000,00	
		terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						184.468.600,00					Pekerja/buruh, serikat pekerja, perusahaan		30.603.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara		2 Perkara	2 Perkara	3.843.300,00						2 Perkara	10.201.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara		2 Perkara	2 Perkara	12.087.700,00						2 Perkara	10.201.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75 Orang		75 Orang	75 Orang	168.537.600,00						75 Orang	10.201.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12.087.700,00							10.201.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara		2 Perkara	2 Perkara	12.087.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Perkara	10.201.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.843.300,00							10.201.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara		2 Perkara	2 Perkara	3.843.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Perkara	10.201.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						168.537.600,00							10.201.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75 Orang		75 Orang	836 Orang	168.537.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		75 Orang	10.201.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.813.181.631,00**							**5.836.377.322,00**	
177.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.066.077.631,00**							**4.845.525.107,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***5.060.457.931,00***							***4.797.525.107,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65.8-66 Nilai		65-65.2 Nilai	65.2-65.4 Nilai	5.060.457.931,00						65.4-65.6 Nilai	4.797.525.107,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.120.250,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.120.250,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		19.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	9.599.950,00						2 Berita Acara	10.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	1.087.700,00						4 Data	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	997.200,00						2 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.087.700,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	997.200,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.087.700,00						1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	815.700,00						2 Laporan	1.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						997.200,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	997.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						997.200,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	997.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						815.700,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						815.700,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.087.700,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.087.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.087.700,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.087.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						815.700,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	815.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						815.700,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	815.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.087.700,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	1.087.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Data	1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.599.950,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	9.599.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Berita Acara	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.295.278.881,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		4.364.025.107,00	
		tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.295.278.881,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		4.364.025.107,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	138.720.000,00						12 Dokumen	103.552.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.156.558.881,00						34 Orang/bulan	4.260.472.607,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.156.558.881,00							4.260.472.607,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.156.558.881,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		34 Orang/bulan	4.260.472.607,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						138.720.000,00							103.552.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	138.720.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	103.552.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.430.700,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		2.500.000,00	
		tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.430.700,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.430.700,00						2 Laporan	2.500.000,00	
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.430.700,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.430.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	2.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						203.992.900,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						203.992.900,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.319.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	5.344.400,00						6 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	24.675.000,00						6 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.806.400,00						6 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	44.848.100,00						6 Paket	5.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.806.400,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	7 Paket	6.806.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.848.100,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	7 Paket	44.848.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.344.400,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	7 Paket	5.344.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.675.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	7 Paket	24.675.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						122.319.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.319.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62.810.000,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		75.000.000,00	
		tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62.810.000,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		75.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	25.100.000,00						30 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.710.000,00						5 Unit	30.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.100.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	25.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		30 Unit	45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.710.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	3 Unit	37.710.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.200.000,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		165.000.000,00	
		tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.200.000,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	20.800.000,00						36 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.400.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.800.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	20.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		36 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						176.400.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	176.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	160.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.244.900,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		100.000.000,00	
		tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.244.900,00					Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja		100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	32.194.700,00						5 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	47.060.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	197.410.200,00						2 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	9.580.000,00						12 Unit	5.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						197.410.200,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	197.410.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						47.060.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	3 Unit	47.060.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.580.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	14 Unit	9.580.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Unit	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						32.194.700,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	6 Unit	32.194.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
178.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**13.750.000,00**							**10.201.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						***13.750.000,00***							***5.100.500,00***	
			999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	16,50 Persentase		8,50 Persentase	10,50 Persentase	13.750.000,00						12,50 Persentase	5.100.500,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.500.000,00					Koperasi (khususnya KSP/USP)		5.100.500,00	
		terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.500.000,00					Koperasi (khususnya KSP/USP)		5.100.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	7.500.000,00						2 Unit Usaha	5.100.500,00	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.500.000,00							5.100.500,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Unit Usaha	5.100.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.250.000,00						Koperasi		5.100.500,00	
		terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.250.000,00						Koperasi		5.100.500,00	
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	6.250.000,00							2 Unit Usaha	5.100.500,00	
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.250.000,00							5.100.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	6.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Unit Usaha	5.100.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
179.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**183.252.100,00**							**61.206.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***183.252.100,00***							***61.206.000,00***	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	65,00 Persentase		35,00 Persentase	40,00 Persentase	183.252.100,00						46,00 Persentase	61.206.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						183.252.100,00					Koperasi dan pengelola koperasi		61.206.000,00	
		terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						183.252.100,00					Koperasi dan pengelola koperasi		61.206.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	29 Unit Usaha		20 Unit Usaha	22 Unit Usaha	153.408.100,00						24 Unit Usaha	40.804.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	127 Unit Usaha		87 Unit Usaha	96 Unit Usaha	29.844.000,00						105 Unit Usaha	20.402.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						153.408.100,00							40.804.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	29 Unit Usaha		20 Unit Usaha	90 Unit Usaha	153.408.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		24 Unit Usaha	40.804.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						29.844.000,00							20.402.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	127 Unit Usaha		87 Unit Usaha	72 Unit Usaha	29.844.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		105 Unit Usaha	20.402.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
180.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**8.501.000,00**							**20.402.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***8.501.000,00***							***20.402.000,00***	
			999.Persentase Koperasi Aktif	48,27 Persentase		47,01 Persentase	47,33 Persentase	8.501.000,00						47,65 Persentase	20.402.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						8.501.000,00					Koperasi simpan pinjam/USP		20.402.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						8.501.000,00					Koperasi simpan pinjam/USP		20.402.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	127 Unit Usaha		87 Unit Usaha	96 Unit Usaha	8.501.000,00						105 Unit Usaha	20.402.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						8.501.000,00							20.402.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	127 Unit Usaha		87 Unit Usaha	15 Unit Usaha	8.501.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		105 Unit Usaha	20.402.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
181.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**109.000.700,00**							**363.155.600,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						***109.000.700,00***							***363.155.600,00***	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	9,32 Persentase		7,88 Persentase	8,24 Persentase	109.000.700,00						8,60 Persentase	363.155.600,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						109.000.700,00					Pengurus, pengawas, anggota koperasi		363.155.600,00	
		terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						109.000.700,00					Pengurus, pengawas, anggota koperasi		363.155.600,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	37 Orang		25 Orang	28 Orang	109.000.700,00						30 Orang	363.155.600,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						109.000.700,00							363.155.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	37 Orang		25 Orang	106 Orang	109.000.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Sukadana Ilir || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Orang	363.155.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
182.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**163.950.500,00**							**154.625.500,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						***163.950.500,00***							***154.625.500,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1,58 Persentase		0,33 Persentase	0,64 Persentase	163.950.500,00						0,95 Persentase	154.625.500,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						163.950.500,00					Koperasi dan anggota koperasi		154.625.500,00	
		tersedianya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						163.950.500,00					Koperasi dan anggota koperasi		154.625.500,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	9.950.500,00						2 Unit Usaha	5.100.500,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	154.000.000,00						2 Unit Usaha	149.525.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						9.950.500,00							5.100.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	38 Unit Usaha	9.950.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Unit Usaha	5.100.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						154.000.000,00							149.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha		2 Unit Usaha	85 Unit Usaha	154.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Unit Usaha	149.525.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
183.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**98.975.300,00**							**192.846.600,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***98.975.300,00***							***172.646.600,00***	
			999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	14,50 Persentase		10,50 Persentase	11,50 Persentase	98.975.300,00						12,50 Persentase	172.646.600,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	1,33 Persentase		1,29 Persentase	1,30 Persentase	98.975.300,00						1,31 Persentase	172.646.600,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						98.975.300,00					Pelaku usaha mikro		192.846.600,00	
		terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						98.975.300,00					Pelaku usaha mikro		192.846.600,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	0,00						-	45.904.500,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	43.371.300,00						-	60.637.600,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	23.300.000,00						-	20.200.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	11.000.000,00						-	20.200.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	10.000.000,00						-	40.804.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	11.304.000,00						-	5.100.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01.0017	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						23.300.000,00							20.200.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	23 Orang	23.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	20.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0							
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						43.371.300,00							60.637.600,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	40 Orang	43.371.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	60.637.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0020	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						0,00							45.904.500,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	45.904.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						11.000.000,00							20.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	23 Orang	11.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang		-	20.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1			Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat			
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						11.304.000,00							5.100.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	23 Unit Usaha	11.304.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	5.100.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						10.000.000,00							40.804.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	25 Unit Usaha	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		-	40.804.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1		dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat			
184.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**169.674.400,00**							**188.415.515,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM						***169.674.400,00***							***168.013.515,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.70 Persentase		1.35 Persentase	1.68 Persentase	169.674.400,00						2.02 Persentase	168.013.515,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						169.674.400,00					Pelaku usaha mikro		188.415.515,00	
		terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						169.674.400,00					Pelaku usaha mikro		188.415.515,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	77.687.400,00						-	77.687.400,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	34.682.000,00						-	34.682.115,00	
			Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	0,00						-	20.402.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	24.250.000,00						-	10.201.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	22.280.000,00						-	20.402.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	10.775.000,00						-	25.041.000,00	
	2.17.08.2.01.0007	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up						0,00							20.402.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	0 Unit Usaha	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	20.402.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						10.775.000,00							25.041.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	20 Orang	10.775.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	25.041.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						22.280.000,00							20.402.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	20 Orang	22.280.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan	1. Meningkatnya Pertumbuhan		-	20.402.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Gading || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1		infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						24.250.000,00							10.201.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	20 Unit Usaha	24.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	10.201.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						77.687.400,00							77.687.400,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	40 Unit Usaha	77.687.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	77.687.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						34.682.000,00							34.682.115,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	50 Unit Usaha	34.682.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	34.682.115,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**7.602.187.271,74**							**7.655.438.711,10**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.602.187.271,74**							**7.655.438.711,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.602.187.271,74**							**7.655.438.711,10**	
185.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.995.358.771,74**							**6.973.365.584,10**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***6.991.358.771,74***							***6.955.365.584,10***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.4-68.5 Nilai		68-68.1 Nilai	68.1-68.2 Nilai	6.991.358.771,74						68.2-68.3 Nilai	6.955.365.584,10	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.424.500,00					DPMPTSP		12.500.000,00	
		Tersedia dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.424.500,00					DPMPTSP		12.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.355.700,00						1 Berita Acara	2.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	1.760.800,00						4 Data	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.300.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.508.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00						4 Laporan	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.300.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.508.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.508.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.760.800,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	1.760.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Data	1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.355.700,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.355.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Berita Acara	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.821.285.671,74					DPMPTSP		5.861.335.584,10	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.821.285.671,74					DPMPTSP		5.861.335.584,10	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.080.000,00						12 Dokumen	109.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.160.000,00						12 Dokumen	38.160.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.872.600,00						2 Laporan	8.672.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.667.173.071,74						48 Orang/bulan	5.705.422.984,10	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.667.173.071,74							5.705.422.984,10	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.667.173.071,74	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		48 Orang/bulan	5.705.422.984,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.080.000,00							109.080.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Dokumen	109.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						38.160.000,00							38.160.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Dokumen	38.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.872.600,00							8.672.600,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.872.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	8.672.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.632.000,00					DPMPTSP		10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.632.000,00					DPMPTSP		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.632.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.632.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.632.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					Aparatur DPMPTSP		5.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					Aparatur DPMPTSP		5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00						2 Orang	5.000.000,00	
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Orang	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						108.355.600,00					DPMPTSP		111.800.000,00	
		Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						108.355.600,00					DPMPTSP		111.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen		480 Dokumen	480 Dokumen	1.050.000,00						480 Dokumen	4.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	63.000.000,00						10 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	18.482.800,00						2 Paket	19.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.312.000,00						2 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.059.500,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.451.300,00						2 Paket	7.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.059.500,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.059.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Paket	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.451.300,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.451.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.482.800,00							19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	18.482.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	19.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.312.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.312.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.050.000,00							4.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen		480 Dokumen	25 Dokumen	1.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		480 Dokumen	4.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						63.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	63.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Laporan	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						202.870.000,00					DPMPTSP		120.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah						202.870.000,00					DPMPTSP		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		10 Unit	5 Unit	16.000.000,00						5 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	186.870.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						16.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		10 Unit	5 Unit	16.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						186.870.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	9 Unit	186.870.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Unit	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.000.000,00					DPMPTSP		545.400.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.000.000,00					DPMPTSP		545.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	249.600.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	236.400.000,00						12 Laporan	245.400.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						249.600.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	249.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						236.400.000,00							245.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	236.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	245.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						346.791.000,00					DPMPTSP		307.330.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD						346.791.000,00					DPMPTSP		307.330.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	61.211.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	227.180.000,00						2 Unit	227.180.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	58.400.000,00						32 Unit	30.150.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						227.180.000,00							227.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	227.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Unit	227.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.400.000,00							30.150.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	36 Unit	58.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		32 Unit	30.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						61.211.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	61.211.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Unit	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
186.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**223.676.000,00**							**180.522.319,00**	
		Meningkatnya kemudahan iklim berinvestasi						***223.676.000,00***							***180.522.319,00***	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						146.156.000,00					Masyarakat dan Kegiatan Usaha		160.522.319,00	
		-						146.156.000,00					Masyarakat dan Kegiatan Usaha		160.522.319,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.956.000,00						1 Dokumen	110.522.319,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						123.956.000,00							110.522.319,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.956.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	110.522.319,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						22.200.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						77.520.000,00					Masyarakat dan Investor		20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal						77.520.000,00					Masyarakat dan Investor		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	15.150.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	62.370.000,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						62.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	62.370.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						15.150.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	15.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
187.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**245.185.500,00**							**267.550.808,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***245.185.500,00***							***267.550.808,00***	
			999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	78,75 Persentase		75,75 Persentase	76,50 Persentase	245.185.500,00						77,25 Persentase	267.550.808,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						245.185.500,00					Masyarakat dan Investor		267.550.808,00	
		Terllaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal						245.185.500,00					Masyarakat dan Investor		267.550.808,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	125.780.000,00						2 Dokumen	267.550.808,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	119.405.500,00						Dokumen	0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						125.780.000,00							267.550.808,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	125.780.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Dokumen	267.550.808,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						119.405.500,00							0,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.405.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
188.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**34.384.000,00**							**36.000.000,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***34.384.000,00***							***28.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	34.384.000,00						100,00 Persentase	28.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						34.384.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		36.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Konsultasi Perizinan						34.384.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		36.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	8.219.000,00						100 Pelaku Usaha	8.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha		2000 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	18.359.000,00						3000 Pelaku Usaha	20.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						18.359.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha		2000 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	18.359.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3000 Pelaku Usaha	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						8.219.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	8.219.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Pelaku Usaha	8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Konsultasi Perizinan						34.384.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		36.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	7.806.000,00						-	8.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						7.806.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	4 Kegiatan Usaha	7.806.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Hanakau Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Kota Negara || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
189.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**95.548.000,00**							**190.000.000,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***95.548.000,00***							***190.000.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	95.548.000,00						100,00 Persentase	190.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						95.548.000,00					Kegiatan Usaha		190.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						95.548.000,00					Kegiatan Usaha		190.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	29.721.000,00						30 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	205 Pelaku Usaha		205 Pelaku Usaha	205 Pelaku Usaha	49.509.000,00						205 Pelaku Usaha	60.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						49.509.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	205 Pelaku Usaha		205 Pelaku Usaha	205 Pelaku Usaha	49.509.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Tulang Bawang Baru || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		205 Pelaku Usaha	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						29.721.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	29.721.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Tulung Buyut || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Talang Jembatan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Negara || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tanjung Iman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Pakuon Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Banjar Negeri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Kota Negara || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Simpang Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bumi Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kotabumi Utara || Desa Kali Cinta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Hanakau Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Margo Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1							
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						95.548.000,00					Kegiatan Usaha		190.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	16.318.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						16.318.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	20 Kegiatan Usaha	16.318.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
190.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**8.035.000,00**							**8.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						***8.035.000,00***							***8.000.000,00***	
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	8.035.000,00						100,00 Persentase	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.035.000,00					Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masrakat		8.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi						8.035.000,00					Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masrakat		8.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.035.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						8.035.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.035.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**4.744.426.998,00**							**7.647.736.762,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.524.489.872,00**							**5.427.800.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.524.489.872,00**							**5.427.800.000,00**	
191.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**638.049.142,00**							**617.800.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***628.049.142,00***							***604.800.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	628.049.142,00						64.5-64.7 Nilai	604.800.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.889.700,00					-		15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.889.700,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	7.380.200,00						2 Dokumen	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.509.500,00						2 Dokumen	6.500.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.380.200,00							7.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.380.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.509.500,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	6.509.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	6.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	01 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						104.670.100,00					-		82.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						104.670.100,00					-		82.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	102.740.000,00						4 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.930.100,00						2 Laporan	2.800.000,00	
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						102.740.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	102.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.930.100,00							2.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.930.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	2.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.966.842,00					-		58.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.966.842,00					-		58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	21.383.000,00						20 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.587.800,00						6 Paket	13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	2.996.042,00						4 Paket	3.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.996.042,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	2.996.042,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Paket	3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.587.800,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.587.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	13.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21.383.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	21.383.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Laporan	22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00					-		229.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						230.000.000,00					-		229.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00						12 Laporan	14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00						12 Laporan	215.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.000.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Laporan	14.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						216.000.000,00							215.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	216.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						237.522.500,00					-		233.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang terpelihara						237.522.500,00					-		233.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	234.192.500,00						3 Unit	230.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	3.330.000,00						2 Unit	3.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						234.192.500,00							230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	234.192.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Unit	230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.330.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	3.330.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
192.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**289.631.250,00**							**380.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***289.631.250,00***							***260.000.000,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	67,21 Persentase		43,56 Persentase	49,47 Persentase	289.631.250,00						55,38 Persentase	260.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						205.282.250,00					Masyarakat		295.000.000,00	
		Tersedianya pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepeduian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda						205.282.250,00					Masyarakat		295.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	50.282.700,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	154.999.550,00						-	175.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	80 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						154.999.550,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	50 Orang	154.999.550,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						50.282.700,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	80 Orang	50.282.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						84.349.000,00					Masyarakat		85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						84.349.000,00					Masyarakat		85.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	24.349.900,00						-	25.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						24.349.900,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	24.349.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						59.999.100,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	59.999.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
193.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.596.809.480,00**							**4.430.000.000,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						***1.446.809.480,00***							***2.315.000.000,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0,22 Persentase		0,15 Persentase	0,22 Persentase	1.446.809.480,00						0,22 Persentase	2.315.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						299.999.980,00					Masyarakat		330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	199.999.980,00						1 Unit	200.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						199.999.980,00							200.000.000,00	
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	199.999.980,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Unit	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.196.809.500,00					Masyarakat		2.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.196.809.500,00					Masyarakat		2.100.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	1.096.809.500,00						-	2.000.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						1.096.809.500,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	400 Orang	1.096.809.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	31 Orang	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						100.000.000,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						100.000.000,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	100.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						100.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						299.999.980,00					Masyarakat		330.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						299.999.980,00					Masyarakat		330.000.000,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	65.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X							**2.219.937.126,00**							**2.219.936.762,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.219.937.126,00**							**2.219.936.762,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
194.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.219.937.126,00**							**2.219.936.762,00**	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	64.3-64.5 Nilai	2.219.937.126,00						-	2.219.936.762,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.219.937.126,00					-		2.219.936.762,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.219.937.126,00					-		2.219.936.762,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.219.937.126,00						20 Orang/bulan	2.219.936.762,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.219.937.126,00							2.219.936.762,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.219.937.126,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Orang/bulan	2.219.936.762,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**7.602.900.616,84**							**8.059.694.716,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.784.683.124,84**							**6.244.694.716,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.784.683.124,84**							**6.244.694.716,00**	
195.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.061.933.124,84**							**5.484.694.716,00**	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	62.75-63 Nilai	997.870.300,00						-	1.207.620.200,00	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 Nilai	4.064.062.824,84						-	4.277.074.516,00	
			Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	63 nilai	997.870.300,00						-	1.207.620.200,00	
			Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 nilai	4.064.062.824,84						-	4.277.074.516,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.151.900,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		35.620.200,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Serta Laporan Evaluasi Rencana Kerja						27.151.900,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		35.620.200,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.672.800,00						1 Berita Acara	8.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.529.000,00						1 Data	3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.882.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.061.100,00						2 Dokumen	4.670.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.800,00						1 Dokumen	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.320.400,00						1 Dokumen	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.709.100,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.094.000,00						4 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.747.700,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.061.100,00							4.670.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.061.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	4.670.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.709.100,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.709.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	4.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.320.400,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.320.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.882.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.882.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.135.800,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.094.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.094.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	7.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.747.700,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	2.747.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.529.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.529.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Data	3.300.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.672.800,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.672.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	8.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.064.062.824,84					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		4.277.074.516,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.064.062.824,84					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		4.277.074.516,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	118.720.000,00						4 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.326.500,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.940.016.324,84						40 Orang/bulan	4.132.074.516,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.940.016.324,84							4.132.074.516,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.940.016.324,84	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Orang/bulan	4.132.074.516,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						118.720.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	118.720.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.326.500,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.326.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.928.400,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		210.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.928.400,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	84.455.000,00						2 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	41.381.100,00						5 Paket	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.092.300,00						5 Paket	80.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.092.300,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.092.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Paket	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.381.100,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	41.381.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Paket	45.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						84.455.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	84.455.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						557.000.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		557.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						557.000.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		557.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.000.000,00						1 Unit	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00						1 Unit	550.000.000,00	
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						550.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	550.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147.000.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		170.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147.000.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	117.000.000,00						4 Laporan	130.000.000,00	
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						117.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	117.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.790.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		235.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.790.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		235.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	120.790.000,00						4 Unit	235.000.000,00	
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.790.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	2 Unit	120.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	235.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
196.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**311.750.000,00**							**265.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***311.750.000,00***							***265.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	87.93 Persentase		87.93 Persentase	87.93 Persentase	311.750.000,00						87.93 Persentase	265.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						311.750.000,00					Cagar Budaya		265.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						311.750.000,00					Cagar Budaya		265.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	225.250.000,00						5 Objek	170.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	56.000.000,00						60 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						225.250.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	225.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Objek	170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						56.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	56.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		60 Orang	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						30.500.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
197.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						***100.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			999.Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	4.65 Persentase		4.65 Persentase	4.65 Persentase	100.000.000,00						4.65 Persentase	110.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Kelompok Seni/Tenaga Kesenian		110.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Kelompok Seni/Tenaga Kesenian		110.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100.000.000,00						60 Orang	110.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		60 Orang	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
198.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						***100.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	87,93 Persentase		87,93 Persentase	87,93 Persentase	100.000.000,00						87,93 Persentase	110.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Utara, mahasiswa,guru, OPD		110.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Utara, mahasiswa,guru, OPD		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
199.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**211.000.000,00**							**275.000.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***211.000.000,00***							***275.000.000,00***	
			999.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	211.000.000,00						100,00 Persentase	275.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						106.000.000,00					Cagar Budaya		160.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						106.000.000,00					Cagar Budaya		160.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek		3 Objek	3 Objek	50.000.000,00						3 Objek	60.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek		3 Objek	2 Objek	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Gunung Labuhan || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Objek	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						106.000.000,00					Cagar Budaya		160.000.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	56.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						56.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	5 Objek	56.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Cagar Budaya		115.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Cagar Budaya		115.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	40.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	65.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						40.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	4 Objek	40.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Hanakau Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	45.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						65.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	4 Objek	65.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Hanakau Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tanjung Iman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sekipi || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.818.217.492,00**							**1.815.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.818.217.492,00**							**1.815.000.000,00**	
200.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**351.183.000,00**							**170.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***321.183.000,00***							***120.000.000,00***	
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	25,83 Persentase		13,15 Persentase	16,32 Persentase	321.183.000,00						19,49 Persentase	120.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						321.183.000,00					destinasi wisata lampung utara		120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						321.183.000,00					destinasi wisata lampung utara		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	253.300.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	67.883.000,00						1 Lokasi	90.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						67.883.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	67.883.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Jagang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Lokasi	90.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						253.300.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	253.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-		-	16,32 persen	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					PELAKU USAHA		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						30.000.000,00					PELAKU USAHA		50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	25 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
201.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**999.850.000,00**							**1.050.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***999.850.000,00***							***1.050.000.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	50.00 Persentase		35.00 Persentase	40.00 Persentase	999.850.000,00						45.00 Persentase	1.050.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						999.850.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		1.050.000.000,00	
		Terlaksananya Pemasaran Pariwisata						999.850.000,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		1.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	3 Promosi	50.000.000,00						3 Promosi	50.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	949.850.000,00						5 Kegiatan	1.000.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						949.850.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	949.850.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Kegiatan	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	1 Promosi	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Promosi	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
202.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**294.135.000,00**							**210.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif						***294.135.000,00***							***210.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50.00 Persentase		25.00 Persentase	30.00 Persentase	294.135.000,00						35.00 Persentase	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						51.080.000,00					Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Utara		100.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						51.080.000,00					Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Utara		100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.080.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						51.080.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	2 Unit	51.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Unit	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						243.055.000,00					pelaku ekonomi kreatif		110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						243.055.000,00					pelaku ekonomi kreatif		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.457.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	177.598.000,00						1 Kegiatan	50.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan						65.457.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.457.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						177.598.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan		1 Kegiatan	30 Kegiatan	177.598.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
203.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**173.049.492,00**							**385.000.000,00**	
		Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***173.049.492,00***							***385.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	49,00 Persentase		42,00 Persentase	45,00 Persentase	173.049.492,00						47,00 Persentase	385.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						173.049.492,00					Pokdarwis,Pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat umum		385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						173.049.492,00					Pokdarwis,Pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat umum		385.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.126.597,00						2 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	25 Orang		25 Orang	25 Orang	36.987.075,00						25 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang		80 Orang	80 Orang	112.935.820,00						80 Orang	300.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						112.935.820,00							300.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang		80 Orang	80 Orang	112.935.820,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		80 Orang	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						36.987.075,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	25 Orang		25 Orang	25 Orang	36.987.075,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		25 Orang	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						23.126.597,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.126.597,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.032.932.491,14**							**3.713.256.134,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.011.716.891,14**							**3.663.256.134,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.875.773.331,14**							**3.538.256.134,00**	
204.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.256.278.831,14**							**3.388.256.134,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***3.256.278.831,14***							***3.382.256.134,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65-65.2 Nilai		64.1-64.3 Nilai	64.3-64.5 Nilai	3.256.278.831,14						64.5-64.7 Nilai	3.382.256.134,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.615.100,00					-		15.000.000,00	
		tersedianya dokumen perencanaan						11.615.100,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	11.615.100,00						8 Laporan	15.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.615.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	5 Laporan	11.615.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		8 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.884.217.331,14					-		2.981.116.134,00	
		terlaksananya adminitrasi keuangan						2.884.217.331,14					-		2.981.116.134,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.780.000,00						12 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.595.000,00						1 Laporan	7.242.840,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.755.842.331,14						32 Orang/bulan	2.848.873.294,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.755.842.331,14							2.848.873.294,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.755.842.331,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		32 Orang/bulan	2.848.873.294,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						123.780.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.780.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.595.000,00							7.242.840,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.595.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	7.242.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.982.000,00					-		31.000.000,00	
		terlaksananya adminitrasi umum perangkat daerah						17.982.000,00					-		31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	9.100.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	792.000,00						12 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		8 Paket	10 Paket	4.203.000,00						12 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	6 Paket	2.339.800,00						10 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	10 Paket	1.547.200,00						12 Paket	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.339.800,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	5 Paket	2.339.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		10 Paket	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.547.200,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	12 Paket	1.547.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Paket	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						792.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	792.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.203.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		8 Paket	8 Paket	4.203.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	9.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.400.000,00					-		175.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tersedinya jasa penunjang perangkat daerah						131.400.000,00					-		175.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.400.000,00						12 Laporan	125.400.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.400.000,00							125.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	125.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211.064.400,00					-		185.740.000,00	
		tersedianya barang milik daerah yang dipelihara						211.064.400,00					-		185.740.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		9 Unit	10 Unit	205.464.400,00						12 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		10 Unit	12 Unit	5.600.000,00						12 Unit	10.740.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						205.464.400,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		9 Unit	9 Unit	205.464.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Unit	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.600.000,00							10.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		10 Unit	10 Unit	5.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Unit	10.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
205.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**596.733.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***596.733.000,00***							***150.000.000,00***	
			999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,80 Nilai		0,80 Nilai	0,80 Nilai	596.733.000,00						0,80 Nilai	150.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						305.019.500,00					-		150.000.000,00	
		terlaksananya koleksi perpustakaan dengan penduduk						305.019.500,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar		6000 Eksemplar	6000 Eksemplar	26.250.000,00						6000 Eksemplar	0,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120 Perpustakaan		110 Perpustakaan	110 Perpustakaan	42.733.500,00						115 Perpustakaan	150.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan		40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	21.272.000,00						40 Perpustakaan	0,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	40 Perpustakaan		40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	58.993.000,00						40 Perpustakaan	0,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						42.733.500,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120 Perpustakaan		110 Perpustakaan	25 Perpustakaan	42.733.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		115 Perpustakaan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						58.993.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	40 Perpustakaan		40 Perpustakaan	64 Perpustakaan	58.993.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Perpustakaan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						21.272.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan		40 Perpustakaan	20 Perpustakaan	21.272.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Perpustakaan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						26.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar		6000 Eksemplar	1200 Eksemplar	26.250.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6000 Eksemplar	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						291.713.500,00					-		0,00	
		terlaksananya penduduk usia 10 tahun yang berkunjung keperpustakaan						291.713.500,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	135 Orang		100 Orang	120 Orang	124.172.000,00						125 Orang	0,00	
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						124.172.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	135 Orang		100 Orang	100 Orang	124.172.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		125 Orang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		terlaksananya koleksi perpustakaan dengan penduduk						305.019.500,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	-	155.771.000,00						-	0,00	
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						155.771.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	1 Eksemplar	155.771.000,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		terlaksananya penduduk usia 10 tahun yang berkunjung keperpustakaan						291.713.500,00					-		0,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	167.541.500,00						-	0,00	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						167.541.500,00							0,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	1 Lokus	167.541.500,00	Kab. Lampung Utara	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
206.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**22.761.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***22.761.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	6.67 Persentase		6.67 Persentase	6.67 Persentase	22.761.500,00						6.67 Persentase	0,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						22.761.500,00					-		0,00	
		tersedianya naskah kuno yang diakuisisi/dialih media digitalisasi dan terdaftar di wilayahnya						22.761.500,00					-		0,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	25 Orang		10 Orang	15 Orang	5.003.500,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	90 Eksemplar		70 Eksemplar	80 Eksemplar	17.758.000,00						85 Eksemplar	0,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						5.003.500,00							0,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	25 Orang		10 Orang	25 Orang	5.003.500,00	Kab. Lampung Utara	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		20 Orang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						17.758.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	90 Eksemplar		70 Eksemplar	1 Eksemplar	17.758.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		85 Eksemplar	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**135.943.560,00**							**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
207.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**135.943.560,00**							**125.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***135.943.560,00***							***95.000.000,00***	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	77,61 Persentase		51,88 Persentase	58,31 Persentase	135.943.560,00						64,75 Persentase	95.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						35.943.900,00					-		0,00	
		tersedianya Naskah dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan						35.943.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.014.400,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas		150 Berkas	200 Berkas	11.929.500,00						200 Berkas	0,00	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						11.929.500,00							0,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas		150 Berkas	33 Berkas	11.929.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		200 Berkas	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						24.014.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		1 Laporan	33 Laporan	24.014.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		30.000.000,00	
		terlaksananya Preversi Arsip terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan budaya						25.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		45 Arsip	50 Arsip	25.000.000,00						55 Arsip	30.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		45 Arsip	15 Arsip	25.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		55 Arsip	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						74.999.660,00					-		95.000.000,00	
		terlaksananya penerapan e arsip teriitegrasi						74.999.660,00					-		95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	52.999.660,00						100 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	175 Pengguna		150 Pengguna	160 Pengguna	22.000.000,00						165 Pengguna	30.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						22.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	175 Pengguna		150 Pengguna	150 Pengguna	22.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		165 Pengguna	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						52.999.660,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	52.999.660,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X							**21.215.600,00**							**50.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**21.215.600,00**							**50.000.000,00**	
208.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.600,00**							**50.000.000,00**	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	64.3-64.5 Nilai	21.215.600,00						-	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						21.215.600,00					-		50.000.000,00	
		terlaksananya adminitrasi umum perangkat daerah						21.215.600,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	21.215.600,00						12 Paket	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.215.600,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	21.215.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		12 Paket	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						**5.649.362.225,44**							**5.616.900.509,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.649.362.225,44**							**5.616.900.509,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5.649.362.225,44**							**5.616.900.509,00**	
209.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.664.862.364,44**							**4.706.400.509,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***4.664.862.364,44***							***4.676.400.509,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65.2-65.2 Nilai		64.3-64.3 Nilai	64.5-64.5 Nilai	4.664.862.364,44						64.7-64.7 Nilai	4.676.400.509,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.207.500,00					Dinas Perikanan		42.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.207.500,00					Dinas Perikanan		42.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.421.400,00						1 Berita Acara	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	4.916.000,00						1 Data	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.400,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.247.100,00						2 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.800,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.456.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.833.600,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.680.200,00						4 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.740.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						34.247.100,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.247.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.833.600,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.833.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.456.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.456.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.400,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.412.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.680.200,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.680.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	4.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.740.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						4.916.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	4.916.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Data	6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.421.400,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.421.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Berita Acara	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.941.048.144,44					Dinas Perikanan		4.004.200.509,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan						3.941.048.144,44					Dinas Perikanan		4.004.200.509,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	109.740.000,00						1 Dokumen	154.200.509,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.002.400,00						3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.822.305.744,44						38 Orang/bulan	3.840.000.000,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.822.305.744,44							3.840.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.822.305.744,44	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		38 Orang/bulan	3.840.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.740.000,00							154.200.509,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	109.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	154.200.509,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						9.002.400,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	9.002.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dinas Perikanan		2.000.000,00	
		Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah						5.000.000,00					Dinas Perikanan		2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	2.000.000,00	
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						28.774.100,00					Dinas Perikanan		20.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian						28.774.100,00					Dinas Perikanan		20.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.174.100,00						3 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.600.000,00						1 Paket	15.000.000,00	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						19.600.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						9.174.100,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.174.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						81.568.300,00					Dinas Perikanan		73.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Umum						81.568.300,00					Dinas Perikanan		73.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	62.236.000,00						15 Laporan	44.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.709.500,00						1 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.647.500,00						1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.360.500,00						1 Paket	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.614.800,00						1 Paket	10.500.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.360.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.360.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.614.800,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.614.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	10.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.709.500,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.709.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	9.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.647.500,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.647.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						62.236.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	62.236.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Laporan	44.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						173.560.000,00					Dinas Perikanan		138.000.000,00	
		Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah						173.560.000,00					Dinas Perikanan		138.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.000.000,00						1 Unit	14.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	160.560.000,00						1 Unit	124.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						13.000.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	13.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	14.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						160.560.000,00							124.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	21 Unit	160.560.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	124.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						298.204.320,00					Dinas Perikanan		332.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor						298.204.320,00					Dinas Perikanan		332.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	63.004.320,00						2 Laporan	66.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	235.200.000,00						1 Laporan	266.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63.004.320,00							66.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	63.004.320,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	66.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.200.000,00							266.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	235.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	266.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82.500.000,00					Dinas Perikanan		93.700.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						82.500.000,00					Dinas Perikanan		93.700.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	79.450.000,00						3 Unit	87.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	3.050.000,00						10 Unit	6.700.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.450.000,00							87.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	2 Unit	79.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	87.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00							6.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	5 Unit	3.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Unit	6.700.000,00	DINAS PERIKANAN
210.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**77.685.330,00**							**113.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***77.685.330,00***							***98.000.000,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	183 Ton		134 Ton	148 Ton	77.685.330,00						162 Ton	98.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						17.493.200,00					Kelompok Usaha Bersama, Nelayan		26.000.000,00	
		Tersedianya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya						17.493.200,00					Kelompok Usaha Bersama, Nelayan		26.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.431.600,00						4 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.061.600,00						1 Unit	15.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						5.431.600,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.431.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						12.061.600,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.061.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Unit	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						60.192.130,00					Kelompok Usaha Bersama, Nelayan		87.000.000,00	
		Terlaksananya Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan						60.192.130,00					Kelompok Usaha Bersama, Nelayan		87.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok	4.879.000,00						5 Kelompok	34.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	10 Orang	20.607.530,00						10 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.705.600,00						10 Unit	38.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						20.607.530,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	70 Orang	20.607.530,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Orang	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						4.879.000,00							34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok		5 Kelompok	6 Kelompok	4.879.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Suka Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Jagang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Kelompok	34.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						34.705.600,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit		10 Unit	20 Unit	34.705.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Unit	38.000.000,00	DINAS PERIKANAN
211.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**760.051.631,00**							**689.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***760.051.631,00***							***679.000.000,00***	
			999.Produksi Perikanan Budidaya	9092.84 Ton		8916.28 Ton	8960.42 Ton	760.051.631,00						9004.56 Ton	679.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						84.085.831,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		137.000.000,00	
		Terlaksananya Pembudidaya yang dibina						84.085.831,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		137.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	7.314.000,00						2 Kelompok	10.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	9 Kelompok		5 Kelompok	7 Kelompok	13.711.965,00						7 Kelompok	50.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	50.006.814,00						12 Kelompok	55.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	8 Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok	13.053.052,00						6 Kelompok	22.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						13.711.965,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	9 Kelompok		5 Kelompok	12 Kelompok	13.711.965,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor		7 Kelompok	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sekipi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sri Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sindang Agung || 1		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi			
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						7.314.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok		2 Kelompok	4 Kelompok	7.314.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sekipi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Kelompok	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						13.053.052,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	8 Kelompok		5 Kelompok	6 Kelompok	13.053.052,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sekipi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Kelompok	22.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						50.006.814,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14 Kelompok		10 Kelompok	25 Kelompok	50.006.814,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Nabung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Surakarta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Papan Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		12 Kelompok	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tanjung Iman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sekipi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Nyapah Banyu || 1						
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						675.965.800,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		552.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi tentang Kegiatan Budidaya Ikan						675.965.800,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		552.000.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.685.200,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.165.200,00						4 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5 Unit	5 Unit	266.675.400,00						5 Unit	260.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit		8 Unit	8 Unit	400.440.000,00						8 Unit	270.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.165.200,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.165.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						266.675.400,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5 Unit	40 Unit	266.675.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Muara Dua || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Sido Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Unit	260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						400.440.000,00							270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit		8 Unit	2 Unit	400.440.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		8 Unit	270.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						3.685.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.685.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
212.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**26.410.500,00**							**28.500.000,00**	
		Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman hayati						***26.410.500,00***							***28.500.000,00***	
			999.Luasan Kawasan Konservasi	1200 Km²		480 Km²	720 Km²	26.410.500,00						870 Km²	28.500.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						26.410.500,00					Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan, Kelompok Usaha Bersama, Pelaku Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan		28.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan						26.410.500,00					Kelompok Pembudidaya Ikan, Nelayan, Kelompok Usaha Bersama, Pelaku Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan		28.500.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7.511.700,00						5 Pelaku Usaha	8.500.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.204.800,00						5 Pelaku Usaha	12.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	13.694.000,00						5 Pelaku Usaha	8.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						5.204.800,00							12.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	5.204.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Pelaku Usaha	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						7.511.700,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	7.511.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Pelaku Usaha	8.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						13.694.000,00							8.000.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	13.694.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Pakuon Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Sido Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Pelaku Usaha	8.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Negara Agung || 1							
213.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**120.352.400,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						***120.352.400,00***							***80.000.000,00***	
			999.Angka Konsumsi Ikan	37.12 Kg/KAP/TH		35.95 Kg/KAP/TH	36.25 Kg/KAP/TH	120.352.400,00						36.32 Kg/KAP/TH	80.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						15.418.100,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar		17.000.000,00	
		Terlaksananya Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1(Satu) Daerah Kab/Kota						15.418.100,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar		17.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.087.600,00						4 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.330.500,00						1 Rekomendasi	4.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						3.330.500,00							4.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	3.330.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Rekomendasi	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						12.087.600,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.087.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						6.435.600,00					Pelaku Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan		7.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan dan Pembinaan Mutu bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (UMKM)						6.435.600,00					Pelaku Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan		7.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	6.435.600,00						2 Unit Usaha	7.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						6.435.600,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	10 Unit Usaha	6.435.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Unit Usaha	7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						98.498.700,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar		56.000.000,00	
		Terlaksananya kelompok yang menerima bantuan bahan baku dan sarana prasarana pengolahan ikan						98.498.700,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar		56.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	67.056.300,00						5 Pelaku Usaha	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Ton		15 Ton	15 Ton	31.442.400,00						15 Ton	39.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						31.442.400,00							39.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Ton		15 Ton	15 Ton	31.442.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		15 Ton	39.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						67.056.300,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	67.056.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Kotabumi Tengah Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Labuhan Ratu Pasar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Tanjung Baru Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Pelaku Usaha	17.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**7.290.246.898,84**							**8.035.921.391,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.290.246.898,84**							**8.035.921.391,20**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7.290.246.898,84**							**8.035.921.391,20**	
214.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.049.591.098,84**							**6.398.110.591,20**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						***6.045.353.598,84***							***6.396.370.591,20***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73.21-76.62 Nilai		64.00-66.39 Nilai	66.39-69.80 Nilai	6.045.353.598,84						69.80-73.21 Nilai	6.396.370.591,20	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.144.600,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.144.600,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		50.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.321.400,00						1 Berita Acara	11.450.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data		7 Data	7 Data	11.821.000,00						7 Data	11.550.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00						1 Dokumen	580.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.371.000,00						2 Dokumen	5.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00						1 Dokumen	580.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00						1 Dokumen	580.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00						1 Dokumen	580.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.043.400,00						3 Laporan	14.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.937.800,00						8 Laporan	4.900.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.371.000,00							5.280.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.371.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	5.280.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.412.500,00							580.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	580.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.412.500,00							580.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	580.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.412.500,00							580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	580.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.412.500,00							580.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.412.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	580.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.043.400,00							14.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.043.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Laporan	14.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.937.800,00							4.900.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.937.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Laporan	4.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						11.821.000,00							11.550.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data		7 Data	7 Data	11.821.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		7 Data	11.550.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.321.400,00							11.450.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.321.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	11.450.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.557.614.811,20					Dinas tanaman Pangan Dan Hortikultura		5.857.490.511,20	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.557.614.811,20					Dinas tanaman Pangan Dan Hortikultura		5.857.490.511,20	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.280.000,00						12 Dokumen	495.875.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.719.800,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	5.346.615.011,20						60 Orang/bulan	5.346.615.011,20	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.346.615.011,20							5.346.615.011,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	5.346.615.011,20	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		60 Orang/bulan	5.346.615.011,20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						206.280.000,00							495.875.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.280.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	495.875.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.719.800,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.719.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.036.791,64					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		3.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.036.791,64					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.036.791,64						2 Laporan	3.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.036.791,64							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.036.791,64	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	3.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		11.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		11.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00						4 Orang	11.000.000,00	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Orang	11.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.976.514,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		80.750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.976.514,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		80.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	71.301.500,00						15 Laporan	52.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.147.014,00						1 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.528.000,00						1 Paket	6.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.147.014,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.147.014,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.528.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.528.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	6.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						71.301.500,00							52.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	12 Laporan	71.301.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		15 Laporan	52.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.660.000,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.660.000,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6.660.000,00						6 Unit	0,00	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.660.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	1 Unit	6.660.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.749.718,00					Perangkat Daerah		306.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.749.718,00					Perangkat Daerah		306.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61.949.718,00						12 Laporan	64.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.800.000,00						12 Laporan	242.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						61.949.718,00							64.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61.949.718,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	64.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						178.800.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	242.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.408.664,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		89.870.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.408.664,00					Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		89.870.080,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	89.408.664,00						2 Unit	89.870.080,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						89.408.664,00							89.870.080,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	4 Unit	89.408.664,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	89.870.080,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
215.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**265.064.600,00**							**266.660.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura						***265.064.600,00***							***266.660.000,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura	2.00 Persentase		1.60 Persentase	1.70 Persentase	265.064.600,00						1.80 Persentase	266.660.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.40 Persentase		3.25 Persentase	3.35 Persentase	265.064.600,00						3.45 Persentase	266.660.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						265.064.600,00					Kelompok Tani		266.660.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian						265.064.600,00					Kelompok Tani		266.660.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 Ton		10 Ton	10 Ton	87.580.000,00						10 Ton	80.400.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	163.990.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.270.000,00						1 Laporan	22.270.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						22.270.000,00							22.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.270.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Papan Asri || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Laporan	22.270.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						15.000.000,00							163.990.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Laporan	163.990.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						87.580.000,00							80.400.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 Ton		10 Ton	50 Ton	87.580.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Ulak Ata || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Ton	80.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian						265.064.600,00					Kelompok Tani		266.660.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	-	119.751.250,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-		-	-	20.463.350,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						20.463.350,00							0,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-		-	2 Laporan	20.463.350,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						119.751.250,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	2125 Batang	119.751.250,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
216.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**903.995.000,00**							**1.268.567.600,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura						***903.995.000,00***							***1.268.567.600,00***	
			999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	13555,00 Ha		13555,00 Ha	13555,00 Ha	903.995.000,00						13555,00 Ha	1.268.567.600,00	
		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian						97.995.000,00					Kelompok Tani		188.567.600,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.008.000,00						1 Laporan	175.592.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.237.000,00						1 Dokumen	1.840.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha		10 Ha	10 Ha	7.750.000,00						10 Ha	11.135.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						63.008.000,00							175.592.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.008.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Sari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Laporan	175.592.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						7.750.000,00							11.135.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha		10 Ha	10 Ha	7.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Ha	11.135.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						17.237.000,00							1.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.237.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Dokumen	1.840.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						806.000.000,00					Kelompok Tani		1.080.000.000,00	
		Terbangunnya Prasarana Pertanian						806.000.000,00					Kelompok Tani		1.080.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00						1 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	256.000.000,00						3 Unit	330.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						550.000.000,00							750.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	5 Unit	550.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Sumber Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Karang Sari || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Ulak Ata || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Sidodadi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Unit	750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						256.000.000,00							330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	2 Unit	256.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sinar Mulya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		3 Unit	330.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						97.995.000,00					Kelompok Tani		188.567.600,00	
		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian						97.995.000,00					Kelompok Tani		188.567.600,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						10.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
217.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**17.778.200,00**							**19.883.200,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan dan hortikuluta						***17.778.200,00***							***19.883.200,00***	
			999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	95.00 Persentase		75.00 Persentase	80.00 Persentase	17.778.200,00						85.00 Persentase	19.883.200,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						17.778.200,00					Kelompok Tani		19.883.200,00	
		Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						17.778.200,00					Kelompok Tani		19.883.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha		5 Ha	5 Ha	17.778.200,00						5 Ha	19.883.200,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						17.778.200,00							19.883.200,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha		5 Ha	10 Ha	17.778.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Sukoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Ha	19.883.200,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
218.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**53.818.000,00**							**82.700.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura						***53.818.000,00***							***82.700.000,00***	
			1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	77 Persentase		75 Persentase	77 Persentase	53.818.000,00						77 Persentase	82.700.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						53.818.000,00					BPP Kecamatan se Lampung Utara		82.700.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Pertanian						53.818.000,00					BPP Kecamatan se Lampung Utara		82.700.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	6.100.000,00						-	37.112.000,00	
			Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	-	30.150.000,00						-	17.602.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	-	17.568.000,00						-	27.986.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						6.100.000,00							37.112.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	1 Unit	6.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Batu Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	37.112.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0012	Koordinasi pengawalan penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kab/kota						30.150.000,00							17.602.000,00	
		Terlaksananya koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	2 Laporan	30.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	17.602.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota						17.568.000,00							27.986.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	23 Unit	17.568.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	27.986.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**9.983.232.317,74**							**10.281.622.158,59**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.983.232.317,74**							**10.281.622.158,59**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**9.983.232.317,74**							**10.281.622.158,59**	
219.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.131.029.460,74**							**7.612.699.432,84**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Dinas Perkebunan dan Peternakan						***7.129.864.460,74***							***7.611.476.182,84***	
			1.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69-70 Nilai		67-67.4 Nilai	67.5-67.9 Nilai	7.129.864.460,74						68-68.4 Nilai	7.611.476.182,84	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.370.420,00					dinas perkebunan dan peternakan		32.938.804,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.370.420,00					dinas perkebunan dan peternakan		32.938.804,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.904.000,00						1 Berita Acara	3.049.200,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	10.144.120,00						4 Data	10.651.620,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.082.500,00						1 Dokumen	1.136.625,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.099.800,00						2 Dokumen	9.554.359,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.165.000,00						1 Dokumen	1.223.250,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.165.000,00						1 Dokumen	1.223.250,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.082.500,00						1 Dokumen	2.186.625,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.555.000,00						3 Laporan	1.632.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.172.500,00						4 Laporan	2.281.125,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.099.800,00							9.554.359,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen Dokumen	9.099.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	9.554.359,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.082.500,00							2.186.625,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.082.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.186.625,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.165.000,00							1.223.250,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.165.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.223.250,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.082.500,00							1.136.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.082.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.136.625,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.165.000,00							1.223.250,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.165.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.223.250,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.555.000,00							1.632.750,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan Laporan	1.555.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Laporan	1.632.750,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.172.500,00							2.281.125,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan Laporan	2.172.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	2.281.125,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.144.120,00							10.651.620,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data Data	10.144.120,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Data	10.651.620,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.904.000,00							3.049.200,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 BAC Berita Acara	2.904.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	3.049.200,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.349.383.394,74					dinas perkebunan dan peternakan		6.800.285.977,84	
		Persentase Administrasi Keuangan						6.349.383.394,74					dinas perkebunan dan peternakan		6.800.285.977,84	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	203.480.000,00						12 Dokumen	347.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.080.000,00						12 Dokumen	2.184.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.045.300,00						2 Laporan	1.097.565,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	6.142.778.094,74						92 Orang/bulan	6.449.916.412,84	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.142.778.094,74							6.449.916.412,84	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		92 Orang/bulan	56 OB Orang/bulan	6.142.778.094,74	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		92 Orang/bulan	6.449.916.412,84	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						203.480.000,00							347.088.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen Dokumen	203.480.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	347.088.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.080.000,00							2.184.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen Dokumen	2.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	2.184.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.045.300,00							1.097.565,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 laporan Laporan	1.045.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	1.097.565,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.055.300,00					dinas perkebunan dan peternakan		2.158.065,00	
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah						2.055.300,00					dinas perkebunan dan peternakan		2.158.065,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.055.300,00						2 Laporan	2.158.065,00	
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.055.300,00							2.158.065,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 laporan Laporan	2.055.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	2.158.065,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.573.800,00					dinas perkebunan dan peternakan		1.652.490,00	
		Persentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.573.800,00					dinas perkebunan dan peternakan		1.652.490,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.573.800,00						12 Dokumen	1.652.490,00	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.573.800,00							1.652.490,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen Dokumen	1.573.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	1.652.490,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.058.800,00					dinas perkebunan dan peternakan		28.007.490,00	
		Persentase Administrasi Kepegawaian						45.058.800,00					dinas perkebunan dan peternakan		28.007.490,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.473.800,00						2 Dokumen	1.547.490,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	43.585.000,00						2 Orang	26.460.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.473.800,00							1.547.490,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen Dokumen	1.473.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	1.547.490,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.585.000,00							26.460.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	43.585.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Orang	26.460.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.202.700,00					dinas perkebunan dan peternakan		246.165.160,00	
		Persentase Administrasi Umum						166.202.700,00					dinas perkebunan dan peternakan		246.165.160,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	133.284.000,00						12 Laporan	87.597.300,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	18.657.700,00						2 Paket	19.590.585,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	14.261.000,00						2 Paket	138.977.275,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.657.700,00							19.590.585,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket Paket	18.657.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Paket	19.590.585,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.261.000,00							138.977.275,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket Paket	14.261.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	138.977.275,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.284.000,00							87.597.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan Laporan	133.284.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	87.597.300,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						136.446.830,00					dinas perkebunan dan peternakan		143.367.946,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						136.446.830,00					dinas perkebunan dan peternakan		143.367.946,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	44.588.830,00						10 Unit	46.818.272,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	91.858.000,00						3 Unit	96.549.674,00	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						44.588.830,00							46.818.272,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	24 Unit Unit	44.588.830,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	46.818.272,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						91.858.000,00							96.549.674,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	12 Unit Unit	91.858.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	96.549.674,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						282.468.216,00					dinas perkebunan dan peternakan		235.830.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor						282.468.216,00					dinas perkebunan dan peternakan		235.830.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.868.216,00						12 Laporan	71.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	255.600.000,00						12 Laporan	164.430.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.868.216,00							71.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan Laporan	26.868.216,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	71.400.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						255.600.000,00							164.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan Laporan	255.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	164.430.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.470.000,00					dinas perkebunan dan peternakan		122.293.500,00	
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara						116.470.000,00					dinas perkebunan dan peternakan		122.293.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	116.470.000,00						2 Unit	122.293.500,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						116.470.000,00							122.293.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	3 Unit Unit	116.470.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	122.293.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
220.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.405.021.735,00**							**1.163.955.794,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian / perkebunan dan peternakan						***1.405.021.735,00***							***1.163.955.794,00***	
			1.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	9 Persentase		3 Persentase	4.5 Persentase	1.405.021.735,00						5.5 Persentase	1.163.955.794,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						72.344.935,00					Kelompok Tani		75.607.952,00	
		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						72.344.935,00					Kelompok Tani		75.607.952,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	46.204.900,00						4 Laporan	44.170.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.140.035,00						4 Laporan	31.437.562,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						26.140.035,00							31.437.562,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.140.035,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Pulau Panggung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sri Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Sumber Tani || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Udik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Muara Aman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Pekurun Selatan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	31.437.562,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						46.204.900,00							44.170.390,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	46.204.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Kali Cinta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Pulau Panggung || 1 || Provinsi Lampung || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	44.170.390,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Marga || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bumi Raya || 1						
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						263.255.900,00					Kelompok Tani		112.675.242,00	
		Prsentase Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme						263.255.900,00					Kelompok Tani		112.675.242,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	263.255.900,00						4 Dokumen	112.675.242,00	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						263.255.900,00							112.675.242,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	263.255.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Cabang Abung Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Sidodadi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sri Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Muara Aman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negeri Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Pulau Panggung || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Dokumen	112.675.242,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.959.100,00					Kelompok Tani dan pelaku usaha pada bidang peternakan		22.007.055,00	
		Persentase Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak						20.959.100,00					Kelompok Tani dan pelaku usaha pada bidang peternakan		22.007.055,00	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.959.100,00						4 Laporan	22.007.055,00	
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak						20.959.100,00							22.007.055,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.959.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Karang Rejo I || 1 || Provinsi Lampung || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan		4 Laporan	22.007.055,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Sumber Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab.		dan pemberantasan kemiskinan.	Ekologi				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Surakarta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Sido Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Sumber Arum || 1						
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						1.048.461.800,00					Kelompok Tani		953.665.545,00	
		Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						1.048.461.800,00					Kelompok Tani		953.665.545,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor		50 Ekor	50 Ekor	1.018.467.400,00						50 Ekor	922.171.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	24 Ton		20 Ton	20 Ton	29.994.400,00						22 Ton	31.494.120,00	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						29.994.400,00							31.494.120,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	24 Ton		20 Ton	2 Ton	29.994.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Karang Rejo I || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Sumber Agung || 1 ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		22 Ton	31.494.120,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Sido Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Sumber Arum || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Abung Timur || Desa Surakarta || 1							
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						1.018.467.400,00							922.171.425,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor		50 Ekor	205 Ekor	1.018.467.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Sido Mulyo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Sumber Arum || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Karang Rejo I || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Surakarta ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		50 Ekor	922.171.425,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Curup Guruh || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Sakti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Sumber Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Raja || 1							
221.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**942.217.000,00**							**974.774.504,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian /perkebunan dan peternakan						***942.217.000,00***							***974.774.504,00***	
			1.Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	95 %		75 %	80 %	942.217.000,00						85 %	974.774.504,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						243.267.000,00					Kelompok Tani dan Dinas Perkebunan dan Peternakan		255.524.325,00	
		Persentase prasarana yang digunakan dan dikembangkan						243.267.000,00					Kelompok Tani dan Dinas Perkebunan dan Peternakan		255.524.325,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.142.500,00						4 Laporan	46.349.625,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	7 Ha		7 Ha	7 Ha	199.124.500,00						7 Ha	209.174.700,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						44.142.500,00							46.349.625,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.142.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	46.349.625,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						199.124.500,00							209.174.700,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	7 Ha		7 Ha	7 Ha	199.124.500,00	Kab. Lampung Utara	DBH Sawit	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		7 Ha	209.174.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						698.950.000,00					Kelompok Tani dan Dinas Perkebunan dan Peternakan		719.250.179,00	
		Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia dan dikembangkan						698.950.000,00					Kelompok Tani dan Dinas Perkebunan dan Peternakan		719.250.179,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	566.050.000,00						7 Unit	577.500.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	97.900.000,00						2 Unit	105.000.179,00	
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	6 Unit		2 Unit	6 Unit	35.000.000,00						6 Unit	36.750.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						566.050.000,00							577.500.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit		7 Unit	5 Unit	566.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Kotabumi Tengah Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Tanjung Iman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Negeri Galih Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		7 Unit	577.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						97.900.000,00							105.000.179,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	97.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Unit	105.000.179,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan						35.000.000,00							36.750.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	6 Unit		2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		6 Unit	36.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
222.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**213.621.022,00**							**224.262.172,75**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***213.621.022,00***							***224.262.172,75***	
			1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	213.621.022,00						4 Dokumen	224.262.172,75	
			2.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	213.621.022,00						85 Persentase	224.262.172,75	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						143.745.607,00					masyarakat yang memiliki hewan kesayangan dan ternak		150.932.887,00	
		Persentase Penanggulangan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular						143.745.607,00					masyarakat yang memiliki hewan kesayangan dan ternak		150.932.887,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.745.607,00						4 Laporan	150.932.887,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						143.745.607,00							150.932.887,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.745.607,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	150.932.887,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Peternak,pelaku usaha ternak dan produk hewan		31.500.000,00	
		Persentasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Peternak,pelaku usaha ternak dan produk hewan		31.500.000,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	31.500.000,00	
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						30.000.000,00							31.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	31.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						39.875.415,00					Kelompok Tani dan Masyarakat yang memikili hewan ternak dan hewan kesayangan		41.829.285,75	
		Persentase pengujian sampel penyakit hewan dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten						39.875.415,00					Kelompok Tani dan Masyarakat yang memikili hewan ternak dan hewan kesayangan		41.829.285,75	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	39.875.415,00						4 Laporan	41.829.285,75	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						39.875.415,00							41.829.285,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	39.875.415,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Sidomukti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	41.829.285,75	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
223.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**103.352.000,00**							**108.519.600,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***103.352.000,00***							***108.519.600,00***	
			1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	103.352.000,00						100 Persentase	108.519.600,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						103.352.000,00					Kelompok Tani		108.519.600,00	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten						103.352.000,00					Kelompok Tani		108.519.600,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha		10 Ha	10 Ha	103.352.000,00						10 Ha	108.519.600,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						103.352.000,00							108.519.600,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha		10 Ha	10 Ha	103.352.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Tanjung Baru || 1 || Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan		10 Ha	108.519.600,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Nyapah Banyu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Mulya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tulung Balak || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sri Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Mekar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Muara Aman || 1		pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Serta Ketahanan Ekologi				
224.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**15.000.000,00**							**15.750.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian						***15.000.000,00***							***15.750.000,00***	
			1.Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00						100 Persentase	15.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Pelaku Usaha pada sektor pertanian		15.750.000,00	
		Jumlah usulan ijin usaha pertanian di kabupaten						15.000.000,00					Pelaku Usaha pada sektor pertanian		15.750.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00						2 Laporan	15.750.000,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						15.000.000,00							15.750.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madokoro Baru || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Buring Kencana || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Laporan	15.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
225.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**172.991.100,00**							**181.660.655,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Peternakan dan Perkebunan						***172.991.100,00***							***181.660.655,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	95 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	172.991.100,00						85 Persentase	181.660.655,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						172.991.100,00					Kelompok Tani		181.660.655,00	
		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						172.991.100,00					Kelompok Tani		181.660.655,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	156.741.100,00						10 Dokumen	164.578.155,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						156.741.100,00							164.578.155,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	156.741.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Karya Sakti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Ibul Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Karang Rejo I || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Dokumen	164.578.155,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						172.991.100,00					Kelompok Tani		181.660.655,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	16.250.000,00						-	17.082.500,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						16.250.000,00							17.082.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	23 Unit	16.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	17.082.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**8.250.473.903,14**							**9.024.947.775,14**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.250.473.903,14**							**9.024.947.775,14**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**8.091.288.303,14**							**8.648.429.575,14**	
226.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.043.098.513,14**							**6.851.714.221,14**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***7.039.648.713,14***							***6.843.824.421,14***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	64-64.5 Nilai		62.65-62.75 Nilai	62.75-63 Nilai	7.039.648.713,14						63-63.5 Nilai	6.843.824.421,14	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49.043.400,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		39.187.372,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49.043.400,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		39.187.372,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00						1 Berita Acara	2.595.472,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.150.000,00						1 Data	2.150.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00						1 Dokumen	4.440.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00						1 Dokumen	3.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.373.100,00						2 Dokumen	5.798.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.800,00						1 Dokumen	3.449.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.800,00						1 Dokumen	3.449.800,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.816.500,00						1 Dokumen	4.440.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00						7 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.614.200,00						4 Laporan	4.614.200,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.373.100,00							5.798.100,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.373.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	5.798.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.816.500,00							4.440.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.816.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.440.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.449.800,00							3.449.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.449.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.440.000,00							4.440.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.440.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.449.800,00							3.449.800,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.449.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		7 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.614.200,00							4.614.200,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.614.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	4.614.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						3.250.000,00							3.250.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.150.000,00							2.150.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	2.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Data	2.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							2.595.472,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	2.595.472,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.074.603.013,14					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.119.031.549,14	
		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.074.603.013,14					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.119.031.549,14	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	216.240.000,00						4 Dokumen	255.840.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.165.500,00						1 Laporan	10.350.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.872.000,00						12 Laporan	10.516.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.842.325.513,14						45 Orang/bulan	4.842.324.649,14	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.842.325.513,14							4.842.324.649,14	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.842.325.513,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		45 Orang/bulan	4.842.324.649,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						216.240.000,00							255.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	216.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	255.840.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.165.500,00							10.350.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.165.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.350.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.872.000,00							10.516.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.872.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	10.516.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.000.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.983.700,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.983.700,00	
		Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.983.700,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.983.700,00	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.983.700,00						6 Dokumen	3.983.700,00	
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						3.983.700,00							3.983.700,00	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.983.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Dokumen	3.983.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.785.200,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		10.785.200,00	
		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.785.200,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		10.785.200,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.785.200,00						1 Dokumen	10.785.200,00	
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.785.200,00							10.785.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.785.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.785.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.963.700,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		43.807.700,00	
		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.963.700,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		43.807.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.238.000,00						4 Laporan	13.621.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.481.500,00						12 Paket	5.481.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	36.881.500,00						12 Paket	16.342.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.859.200,00						12 Paket	5.859.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.503.500,00						2 Paket	2.503.500,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.859.200,00							5.859.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.859.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	5.859.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.503.500,00							2.503.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.503.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	2.503.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.481.500,00							5.481.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.481.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	5.481.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.881.500,00							16.342.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	36.881.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	16.342.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.238.000,00							13.621.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.238.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	13.621.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.480.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		19.760.000,00	
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.480.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		19.760.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	186.480.000,00						3 Unit	19.760.000,00	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						186.480.000,00							19.760.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	11 Unit	186.480.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	19.760.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.339.030.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.484.640.000,00	
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.339.030.000,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.484.640.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00						2 Laporan	61.570.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.287.000.000,00						1 Laporan	1.413.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.030.000,00						1 Laporan	10.070.000,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00							61.570.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	61.570.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.030.000,00							10.070.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.030.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.070.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.287.000.000,00							1.413.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.287.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	1.413.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						312.209.500,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		127.518.700,00	
		Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						312.209.500,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		127.518.700,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	138.639.500,00						1 Unit	67.557.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	173.570.000,00						4 Unit	59.961.700,00	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						173.570.000,00							59.961.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	8 Unit	173.570.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	59.961.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						138.639.500,00							67.557.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	138.639.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	67.557.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
227.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**50.769.200,00**							**83.893.600,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***50.769.200,00***							***83.893.600,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	50.769.200,00						100,00 Persentase	83.893.600,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						21.559.800,00					Pelaku usaha perdagangan		38.183.700,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						21.559.800,00					Pelaku usaha perdagangan		38.183.700,00	
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan		1 laporan	1 laporan	12.761.000,00						1 laporan	26.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.798.800,00						1 Dokumen	12.183.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						8.798.800,00							12.183.700,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.798.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sindang Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	12.183.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik						12.761.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan		1 laporan	1 laporan	12.761.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Gedung Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 laporan	26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						15.960.000,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki gudang		21.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan tanda daftar gudang						15.960.000,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki gudang		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.960.000,00						1 Dokumen	21.000.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						15.960.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.960.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						6.225.800,00					Pelaku usaha perdagangan beralkohol Gol B dan C		6.668.900,00	
		Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						6.225.800,00					Pelaku usaha perdagangan beralkohol Gol B dan C		6.668.900,00	
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.225.800,00						1 Dokumen	6.668.900,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						6.225.800,00							6.668.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.225.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	6.668.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						1.597.800,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki bahan berbahaya		10.499.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						1.597.800,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki bahan berbahaya		10.499.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.597.800,00						1 Laporan	10.499.000,00	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						1.597.800,00							10.499.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.597.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	10.499.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)						5.425.800,00					Pelaku usaha perdagangan		7.542.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)						5.425.800,00					Pelaku usaha perdagangan		7.542.000,00	
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.425.800,00						1 Dokumen	7.542.000,00	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						5.425.800,00							7.542.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.425.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	7.542.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
228.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**93.551.800,00**							**111.550.114,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						***93.551.800,00***							***111.550.114,00***	
			999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	15.27 Persentase		6.87 Persentase	8.97 Persentase	93.551.800,00						11.07 Persentase	111.550.114,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						83.600.700,00					Pelaku usaha perdagangan		101.550.114,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						83.600.700,00					Pelaku usaha perdagangan		101.550.114,00	
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.661.700,00						1 Kegiatan	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	72.939.000,00						10 Unit	86.550.114,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						72.939.000,00							86.550.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		10 Unit	6 Unit	72.939.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Mekar Sari || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Unit	86.550.114,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota						10.661.700,00							15.000.000,00	
		Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.661.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Kegiatan	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || Desa Muara Aman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Gedung Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kembang Tanjung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0						
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						9.951.100,00					Pelaku usaha perdagangan		10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						9.951.100,00					Pelaku usaha perdagangan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.951.100,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						9.951.100,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.951.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Iso Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1		mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				
229.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**146.728.190,00**							**163.386.640,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***146.728.190,00***							***148.386.640,00***	
			999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	82,84 Persentase		70,56 Persentase	73,63 Persentase	146.728.190,00						76,70 Persentase	148.386.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						23.050.200,00					Pelaku usaha Barang kebutuhan pokok dan barang penting		25.082.250,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						23.050.200,00					Pelaku usaha Barang kebutuhan pokok dan barang penting		25.082.250,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.968.000,00						2 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.082.200,00						2 Laporan	10.082.250,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						12.968.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.968.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						10.082.200,00							10.082.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.082.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	10.082.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						98.607.070,00					Pelaku usaha Barang kebutuhan pokok dan barang penting		113.233.470,00	
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						98.607.070,00					Pelaku usaha Barang kebutuhan pokok dan barang penting		113.233.470,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.391.100,00						2 Laporan	64.997.500,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.235.970,00						2 Laporan	10.235.970,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	37.980.000,00						48 Laporan	38.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						37.980.000,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan		48 Laporan	2 Laporan	37.980.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		48 Laporan	38.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						10.235.970,00							10.235.970,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	10.235.970,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	10.235.970,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						50.391.100,00							64.997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.391.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Bindu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	64.997.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.070.920,00					Distributor Pupuk dan Pestisida bersubsidi		25.070.920,00	
		Teralaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.070.920,00					Distributor Pupuk dan Pestisida bersubsidi		25.070.920,00	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.070.920,00						4 Laporan	10.070.920,00	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						10.070.920,00							10.070.920,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.070.920,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	10.070.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
230.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**557.331.000,00**							**758.035.400,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						***557.331.000,00***							***758.035.400,00***	
			999.Nilai Ekspor Barang di Proviinsi	2,20 SBM/Milyar Rupiah		1,35 SBM/Milyar Rupiah	1,62 SBM/Milyar Rupiah	557.331.000,00						1,89 SBM/Milyar Rupiah	758.035.400,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						557.331.000,00					Pelaku usaha perdagangan yang berorientasi ekspor		758.035.400,00	
		Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						557.331.000,00					Pelaku usaha perdagangan yang berorientasi ekspor		758.035.400,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	16.999.000,00						5 Pelaku Usaha	20.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	491.021.000,00						5 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	29.165.000,00						8 Pelaku Usaha	518.815.400,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk		2 Produk	2 Produk	20.146.000,00						2 Produk	19.220.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						491.021.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	491.021.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						29.165.000,00							518.815.400,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	29.165.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		8 Pelaku Usaha	518.815.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						16.999.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	16.999.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Pelaku Usaha	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor						20.146.000,00							19.220.000,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk		2 Produk	2 Produk	20.146.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Retribusi Jasa Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Produk	19.220.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
231.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**119.809.600,00**							**99.849.600,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***119.809.600,00***							***99.849.600,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase penanganan pengaduan konsumen	100,00 %		100,00 %	100,00 %	119.809.600,00						100,00 %	99.849.600,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						119.809.600,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki alat ukur		99.849.600,00	
		Terlaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						119.809.600,00					Pelaku usaha perdagangan yang memiliki alat ukur		99.849.600,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit		950 Unit	960 Unit	93.487.300,00						970 Unit	75.037.300,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 Orang		60 Orang	60 Orang	26.322.300,00						60 Orang	24.812.300,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						93.487.300,00							75.037.300,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit		950 Unit	960 Unit	93.487.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		970 Unit	75.037.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						26.322.300,00							24.812.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 Orang		60 Orang	60 Orang	26.322.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		60 Orang	24.812.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
232.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**80.000.000,00**							**580.000.000,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***80.000.000,00***							***580.000.000,00***	
			999.Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	85,72 Persentase		75,00 Persentase	77,55 Persentase	80.000.000,00						80,19 Persentase	580.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						80.000.000,00					Pelaku usaha perdagangan		580.000.000,00	
		Terlaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						80.000.000,00					Pelaku usaha perdagangan		580.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	4 UMKM		4 UMKM	4 UMKM	80.000.000,00						4 UMKM	580.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						80.000.000,00							580.000.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk	Jumlah UMKM yang	4 UMKM		4 UMKM	4 UMKM	80.000.000,00	Provinsi	Dana Alokasi	3.Melanjutk	1. Meningka		4 UMKM	580.000.000,00	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi						Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tulung Balak || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Tanjung Baru || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kemalo Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Suka Mulya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan	Umum (DAU)	an pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	tnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0							
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**159.185.600,00**							**376.518.200,00**	
233.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**122.735.600,00**							**340.068.200,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***122.735.600,00***							***329.878.200,00***	
			999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	33,00 Persentase		25,00 Persentase	30,00 Persentase	122.735.600,00						31,00 Persentase	329.878.200,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						122.735.600,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		340.068.200,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						122.735.600,00					Dinas Perindustrian dan Perdagangan		340.068.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.533.000,00						1 Dokumen	10.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.033.000,00						1 Dokumen	10.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.169.600,00						1 Dokumen	278.175.200,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	41.513.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						73.169.600,00							278.175.200,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.169.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	278.175.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						23.533.000,00							10.190.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.533.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan menge	1. Meningkatnya Pertumbuhan		1 Dokumen	10.190.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sumber Daya Industri						Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sri Basuki || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan		mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Tanjung Raja || Desa Mekar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0							
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						16.033.000,00							10.190.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.033.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bumi Restu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Subik || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Mekar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sri Basuki || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	10.190.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Sido Kayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0						
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						10.000.000,00							41.513.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	41.513.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
234.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**23.250.000,00**							**23.250.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***23.250.000,00***							***23.250.000,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100.00 Persentase		100.00 Persentase	100.00 Persentase	23.250.000,00						100.00 Persentase	23.250.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						23.250.000,00					Pelaku usaha industri		23.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						23.250.000,00					Pelaku usaha industri		23.250.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000,00						1 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						11.250.000,00							11.250.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Margo Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	11.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || Desa Muara Aman || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Suka Maju || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Papan Asri || 1					
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						12.000.000,00						12.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan menge	1. Meningkatnya Pertumbuhan		1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						Kecamatan Abung Semuli || Desa Papan Asri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Sawo Jajar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Candimas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Wono Marto || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa		mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1						
235.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**13.200.000,00**							**13.200.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***13.200.000,00***							***13.200.000,00***	
			999.Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100.00 Persentase		100.00 Persentase	100.00 Persentase	13.200.000,00						100.00 Persentase	13.200.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						13.200.000,00					Pelaku usaha industri		13.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						13.200.000,00					Pelaku usaha industri		13.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00						1 Dokumen	9.200.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Kotabumi Tengah Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Papan Asri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Mekar Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Karang Waringin || 1	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						9.200.000,00							9.200.000,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Margo Rejo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan	Retribusi Jasa Umum	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	9.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Suka Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sindang Sari || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sinar Mulya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Sabuk Empat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Kali Cinta || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Dwikora || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Talang Bojong || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Desa Muara Aman || 1						
		SEKRETARIAT DAERAH						**53.625.351.634,89**							**53.296.179.621,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**53.625.351.634,89**							**53.296.179.621,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**53.625.351.634,89**							**53.296.179.621,00**	
236.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**44.717.006.116,89**							**44.212.490.603,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***44.677.006.116,89***							***44.172.490.603,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-68 Nilai		66.8-67 Nilai	67-67.2 Nilai	44.677.006.116,89						67.2-67.4 Nilai	44.172.490.603,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						330.794.485,00					-		330.794.485,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						330.794.485,00					-		330.794.485,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.358.025,00						1 Dokumen	53.358.025,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	54.241.790,00						2 Dokumen	54.241.790,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.266.395,00						1 Dokumen	40.266.395,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.782.370,00						1 Dokumen	63.782.370,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.061.265,00						1 Dokumen	65.061.265,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.084.640,00						4 Laporan	44.084.640,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						54.241.790,00							54.241.790,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	54.241.790,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	54.241.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						65.061.265,00							65.061.265,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.061.265,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	65.061.265,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						63.782.370,00							63.782.370,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.782.370,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	63.782.370,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						53.358.025,00							53.358.025,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.358.025,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	53.358.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						40.266.395,00							40.266.395,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.266.395,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.266.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.084.640,00							44.084.640,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.084.640,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	44.084.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.999.851.524,00					-		21.999.851.524,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan						21.999.851.524,00					-		21.999.851.524,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.626.500,00						1 Dokumen	39.626.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	761.040.000,00						1 Dokumen	761.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.049.510,00						1 Dokumen	31.049.510,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.519.333,00						1 Dokumen	43.519.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	586.705.240,00						2 Dokumen	586.705.240,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	20.854.400,00						1 Laporan	20.854.400,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	298.357.425,00						1 Laporan	298.357.425,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan		152 Orang/bulan	152 Orang/bulan	20.218.699.116,00						152 Orang/bulan	20.218.699.116,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.218.699.116,00							20.218.699.116,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan		152 Orang/bulan	152 Orang/bulan	20.218.699.116,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		152 Orang/bulan	20.218.699.116,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						761.040.000,00							761.040.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	761.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	761.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						586.705.240,00							586.705.240,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	586.705.240,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	586.705.240,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						31.049.510,00							31.049.510,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.049.510,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	31.049.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.854.400,00							20.854.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	20.854.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	20.854.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						39.626.500,00							39.626.500,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.626.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	39.626.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						298.357.425,00							298.357.425,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	298.357.425,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	298.357.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						43.519.333,00							43.519.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.519.333,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	43.519.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						133.311.460,00					-		133.311.460,00	
		Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						133.311.460,00					-		133.311.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.249.115,00						1 Laporan	16.249.115,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.640.395,00						1 Laporan	44.640.395,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.772.000,00						1 Laporan	27.772.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.649.950,00						1 Dokumen	44.649.950,00	
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						44.649.950,00							44.649.950,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.649.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	44.649.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						16.249.115,00							16.249.115,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.249.115,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	16.249.115,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						27.772.000,00							27.772.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.772.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	27.772.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						44.640.395,00							44.640.395,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.640.395,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	44.640.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						225.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian						225.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	80.000.000,00						15 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						105.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	80.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		15 Orang	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.037.870.070,00					-		2.037.870.070,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum						2.037.870.070,00					-		2.037.870.070,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.636.500,00						1 Dokumen	15.636.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	545.426.000,00						4 Laporan	545.426.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	79.448.650,00						1 Paket	79.448.650,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	184.633.500,00						2 Paket	184.633.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	86.545.500,00						1 Paket	86.545.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.977.920,00						1 Paket	23.977.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.202.000,00						1 Paket	52.202.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						86.545.500,00							86.545.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	86.545.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	86.545.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.977.920,00							23.977.920,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.977.920,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	23.977.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						52.202.000,00							52.202.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.202.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	52.202.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						79.448.650,00							79.448.650,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	79.448.650,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	79.448.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						184.633.500,00							184.633.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	184.633.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	184.633.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						545.426.000,00							545.426.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	545.426.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	545.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.636.500,00							15.636.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.636.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.636.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.960.492.940,00					-		2.960.492.940,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						2.960.492.940,00					-		2.960.492.940,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	82.000.000,00						2 Unit	82.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	955.246.800,00						11 Unit	955.246.800,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	483.480.000,00						1 Unit	483.480.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	60.487.140,00						2 Unit	60.487.140,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	40.000.000,00						2 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.339.279.000,00						1 Unit	1.339.279.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						483.480.000,00							483.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	483.480.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	483.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						955.246.800,00							955.246.800,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	955.246.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Unit	955.246.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						82.000.000,00							82.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	82.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.487.140,00							60.487.140,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	60.487.140,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	60.487.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.339.279.000,00							1.339.279.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.339.279.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	1.339.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.780.083.571,89					-		4.275.568.058,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor						4.780.083.571,89					-		4.275.568.058,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.151.453.408,00						12 Laporan	976.109.908,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.309.000.163,89						12 Laporan	2.979.828.150,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.630.000,00						12 Laporan	224.630.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						95.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.151.453.408,00							976.109.908,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.151.453.408,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	976.109.908,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						224.630.000,00							224.630.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.630.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	224.630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.309.000.163,89							2.979.828.150,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.309.000.163,89	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	2.979.828.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.894.660.000,00					-		4.894.660.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara						4.894.660.000,00					-		4.894.660.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.770.000.000,00						4 Unit	2.770.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		48 Unit	48 Unit	1.945.670.000,00						48 Unit	1.945.670.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	105.590.000,00						4 Unit	105.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	73.400.000,00						4 Unit	73.400.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.945.670.000,00							1.945.670.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		48 Unit	48 Unit	1.945.670.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		48 Unit	1.945.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.770.000.000,00							2.770.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.770.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	2.770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						105.590.000,00							105.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	105.590.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	105.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						73.400.000,00							73.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	73.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	73.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.494.592.244,00					-		1.494.592.244,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.494.592.244,00					-		1.494.592.244,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	777.491.505,00						2 Orang/Bulan	777.491.505,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	500.000.739,00						4 Orang	500.000.739,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	217.100.000,00						3 Paket	217.100.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						777.491.505,00							777.491.505,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	777.491.505,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Orang/Bulan	777.491.505,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						217.100.000,00							217.100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	217.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Paket	217.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.739,00							500.000.739,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	500.000.739,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Orang	500.000.739,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.056.049.600,00					-		3.056.049.600,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.056.049.600,00					-		3.056.049.600,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	854.650.800,00						12 Paket	854.650.800,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.526.748.000,00						12 Paket	1.526.748.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	674.650.800,00						12 Paket	674.650.800,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						854.650.800,00							854.650.800,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	854.650.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	854.650.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						674.650.800,00							674.650.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	674.650.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	674.650.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1.526.748.000,00							1.526.748.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.526.748.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	1.526.748.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						554.300.000,00					-		554.300.000,00	
		Terselenggaranya Penataan Organisasi Kepegawaian						554.300.000,00					-		554.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.441.550,00						1 Dokumen	35.441.550,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	61.474.620,00						2 Dokumen	61.474.620,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	210.000.000,00						6 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	169.518.800,00						4 Dokumen	169.518.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	77.865.030,00						3 Laporan	77.865.030,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						210.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						77.865.030,00							77.865.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	77.865.030,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Laporan	77.865.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						169.518.800,00							169.518.800,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	169.518.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	169.518.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						61.474.620,00							61.474.620,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	61.474.620,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	61.474.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						35.441.550,00							35.441.550,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.441.550,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	35.441.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.250.000.222,00					-		2.250.000.222,00	
		Terwujudnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.250.000.222,00					-		2.250.000.222,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.139.739.358,00						12 Laporan	2.139.739.358,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.395.330,00						12 Laporan	23.395.330,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.865.534,00						12 Laporan	86.865.534,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						2.139.739.358,00							2.139.739.358,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.139.739.358,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	2.139.739.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						23.395.330,00							23.395.330,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.395.330,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	23.395.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						86.865.534,00							86.865.534,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.865.534,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	86.865.534,00	SEKRETARIAT DAERAH
237.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**7.577.464.736,00**							**7.681.010.236,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***7.577.464.736,00***							***7.681.010.236,00***	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	7.577.464.736,00						100,00 Persentase	7.681.010.236,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						1.424.760.000,00					-		1.424.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Perangkat daerah yang ditata dan diselesaikan permasalahan administrasi dan kelembagaan						1.424.760.000,00					-		1.424.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	152 Dokumen		152 Dokumen	152 Dokumen	555.520.130,00						152 Dokumen	555.520.130,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	127.678.245,00						10 Dokumen	127.678.245,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	741.561.625,00						5 Dokumen	741.561.625,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						127.678.245,00							127.678.245,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	11 Dokumen	127.678.245,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Dokumen	127.678.245,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						741.561.625,00							741.561.625,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	741.561.625,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Dokumen	741.561.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						555.520.130,00							555.520.130,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	152 Dokumen		152 Dokumen	6 Dokumen	555.520.130,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		152 Dokumen	555.520.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						5.021.454.650,00					-		5.125.000.150,00	
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat						5.021.454.650,00					-		5.125.000.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.824.999.850,00						6 Dokumen	4.824.999.850,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	196.454.800,00						1 Dokumen	196.454.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	103.545.500,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						4.824.999.850,00							4.824.999.850,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.824.999.850,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Dokumen	4.824.999.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						0,00							103.545.500,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	103.545.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						196.454.800,00							196.454.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	196.454.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	196.454.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						743.249.846,00					-		743.249.846,00	
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah						743.249.846,00					-		743.249.846,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	27 Kasus		23 Kasus	24 Kasus	378.786.200,00						25 Kasus	378.786.200,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	346 Dokumen		346 Dokumen	346 Dokumen	228.650.046,00						346 Dokumen	228.650.046,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	346 Dokumen		346 Dokumen	346 Dokumen	135.813.600,00						346 Dokumen	135.813.600,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						228.650.046,00							228.650.046,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	346 Dokumen		346 Dokumen	346 Dokumen	228.650.046,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		346 Dokumen	228.650.046,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						378.786.200,00							378.786.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	27 Kasus		23 Kasus	24 Kasus	378.786.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		25 Kasus	378.786.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						135.813.600,00							135.813.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	346 Dokumen		346 Dokumen	346 Dokumen	135.813.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		346 Dokumen	135.813.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						388.000.240,00					-		388.000.240,00	
		Terwujudnya Kerjasama Daerah yang disepakati						388.000.240,00					-		388.000.240,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	331.510.220,00						2 Dokumen	331.510.220,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.415.460,00						1 Dokumen	23.415.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.074.560,00						1 Laporan	33.074.560,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						331.510.220,00							331.510.220,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	331.510.220,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	331.510.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						23.415.460,00							23.415.460,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.415.460,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	23.415.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						33.074.560,00							33.074.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	33.074.560,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	33.074.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
238.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.330.880.782,00**							**1.402.678.782,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***1.330.880.782,00***							***1.382.678.782,00***	
			1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	75 Persentase		55 Persentase	60 Persentase	1.330.880.782,00						65 Persentase	1.382.678.782,00	
			999.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	85 %		70 %	70 %	1.330.880.782,00						75 %	1.382.678.782,00	
			999.Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0.25 %		1.50 %	1.25 %	1.330.880.782,00						0.75 %	1.382.678.782,00	
			999.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	75 %		55 %	60 %	1.330.880.782,00						65 %	1.382.678.782,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						328.508.673,00					-		348.508.673,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian						328.508.673,00					-		348.508.673,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.237.760,00						1 Dokumen	76.237.760,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	79.277.269,00						1 Dokumen	79.277.269,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	172.993.644,00						1 Laporan	172.993.644,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						76.237.760,00							76.237.760,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.237.760,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	76.237.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						172.993.644,00							172.993.644,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	172.993.644,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	172.993.644,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						79.277.269,00							79.277.269,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	79.277.269,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	79.277.269,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						264.000.000,00					-		264.000.000,00	
		Terselenggaranya Penyusunan Program Pembangunan						264.000.000,00					-		264.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.838.000,00						1 Dokumen	65.838.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.127.000,00						4 Laporan	80.127.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	118.035.000,00						2 Laporan	118.035.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						65.838.000,00							65.838.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.838.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	65.838.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						118.035.000,00							118.035.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	118.035.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	118.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						80.127.000,00							80.127.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.127.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	80.127.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						708.291.155,00					-		708.291.155,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa						708.291.155,00					-		708.291.155,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	176.878.000,00						2 Dokumen	176.878.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	274.600.310,00						150 Dokumen	274.600.310,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang		5 Orang	5 Orang	256.812.845,00						5 Orang	256.812.845,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						274.600.310,00							274.600.310,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	274.600.310,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		150 Dokumen	274.600.310,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						176.878.000,00							176.878.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	176.878.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	176.878.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						256.812.845,00							256.812.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang		5 Orang	5 Orang	256.812.845,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Orang	256.812.845,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						30.080.954,00					-		81.878.954,00	
		Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan SDA						30.080.954,00					-		81.878.954,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	41.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.080.954,00						1 Dokumen	30.080.954,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						30.080.954,00							30.080.954,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.080.954,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	30.080.954,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						0,00							41.798.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	41.798.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**55.529.135.277,64**							**62.170.107.820,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**55.529.135.277,64**							**62.170.107.820,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**55.529.135.277,64**							**62.170.107.820,00**	
239.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**41.544.406.477,64**							**41.572.785.825,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***41.537.381.377,64***							***41.512.395.575,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	64-64.5 Nilai		62.65-62.75 Nilai	62.75-63 Nilai	41.537.381.377,64						63-63.5 Nilai	41.512.395.575,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						186.185.600,00					SEKRETARIAT DPRD		291.079.175,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						186.185.600,00					SEKRETARIAT DPRD		291.079.175,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.025.100,00						1 Dokumen	21.755.738,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.879.100,00						2 Dokumen	59.642.100,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.025.100,00						1 Dokumen	23.890.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.209.100,00						1 Dokumen	23.890.250,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.837.100,00						1 Dokumen	21.755.737,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.102.600,00						2 Laporan	97.750.100,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.107.500,00						4 Laporan	42.395.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						31.879.100,00							59.642.100,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.879.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	59.642.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.837.100,00							21.755.737,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.837.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	21.755.737,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.209.100,00							23.890.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.209.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	23.890.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.025.100,00							21.755.738,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.025.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	21.755.738,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.025.100,00							23.890.250,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.025.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	23.890.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						86.102.600,00							97.750.100,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.102.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	97.750.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.107.500,00							42.395.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.107.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	42.395.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.474.130.515,64					SEKRETARIAT DPRD		6.460.107.192,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.474.130.515,64					SEKRETARIAT DPRD		6.460.107.192,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	120.687.100,00						3 Dokumen	120.670.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	615.240.000,00						1 Dokumen	590.233.500,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	34.361.400,00						4 Dokumen	36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.592.900,00						1 Laporan	87.668.100,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.233.000,00						4 Laporan	36.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.555.016.115,64						55 Orang/bulan	5.588.535.192,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.555.016.115,64							5.588.535.192,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.555.016.115,64	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		55 Orang/bulan	5.588.535.192,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						615.240.000,00							590.233.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	615.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	590.233.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						75.592.900,00							87.668.100,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.592.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	87.668.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						120.687.100,00							120.670.400,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	120.687.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	120.670.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						73.233.000,00							36.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.233.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	36.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						34.361.400,00							36.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	34.361.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	36.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						319.455.000,00					SEKRETARIAT DPRD		155.115.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						319.455.000,00					SEKRETARIAT DPRD		155.115.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	17 Orang	319.455.000,00						17 Orang	155.115.000,00	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						319.455.000,00							155.115.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	11 Orang	319.455.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		17 Orang	155.115.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.124.576.290,00					SEKRETARIAT DPRD		1.881.788.321,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.124.576.290,00					SEKRETARIAT DPRD		1.881.788.321,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	473.371.000,00						3 Laporan	173.184.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	881.787.500,00						1 Paket	1.120.620.709,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.274.800,00						4 Paket	6.656.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.736.000,00						1 Paket	190.509.920,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	674.806.990,00						1 Paket	325.217.492,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.600.000,00						1 Paket	50.600.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						60.736.000,00							190.509.920,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.736.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	190.509.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						674.806.990,00							325.217.492,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	674.806.990,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	325.217.492,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.600.000,00							50.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	50.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						881.787.500,00							1.120.620.709,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	881.787.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	1.120.620.709,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.274.800,00							6.656.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.274.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	6.656.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						473.371.000,00							173.184.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	473.371.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Laporan	173.184.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						885.000.000,00					SEKRETARIAT DPRD		852.209.551,00	
		Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						885.000.000,00					SEKRETARIAT DPRD		852.209.551,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	159.010.919,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	885.000.000,00						2 Unit	693.198.632,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						885.000.000,00							693.198.632,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	885.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	693.198.632,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							159.010.919,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	159.010.919,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.474.400.000,00					SEKRETARIAT DPRD		1.387.391.650,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.474.400.000,00					SEKRETARIAT DPRD		1.387.391.650,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	510.000.000,00						2 Laporan	520.721.080,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.857.000.000,00						12 Laporan	776.930.570,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	107.400.000,00						2 Laporan	79.740.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						510.000.000,00							520.721.080,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	510.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	520.721.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						107.400.000,00							79.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	107.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	79.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.857.000.000,00							776.930.570,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.857.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	776.930.570,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						690.151.778,00					SEKRETARIAT DPRD		2.057.983.674,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						690.151.778,00					SEKRETARIAT DPRD		2.057.983.674,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	327.092.200,00						2 Unit	1.447.745.799,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	319.073.278,00						8 Unit	528.056.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.986.300,00						2 Unit	82.181.075,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						319.073.278,00							528.056.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	319.073.278,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	528.056.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						327.092.200,00							1.447.745.799,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	327.092.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	1.447.745.799,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						43.986.300,00							82.181.075,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.986.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	82.181.075,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.997.579.674,00					DPRD		25.087.111.262,00	
		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.997.579.674,00					DPRD		25.087.111.262,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24.264.829.674,00						45 Orang/Bulan	24.516.829.262,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	137.250.000,00						45 Orang	143.850.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	595.500.000,00						45 Paket	426.432.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						24.264.829.674,00							24.516.829.262,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24.264.829.674,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		45 Orang/Bulan	24.516.829.262,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						595.500.000,00							426.432.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	595.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		45 Paket	426.432.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						137.250.000,00							143.850.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	137.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		45 Orang	143.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						3.392.927.620,00					DPRD		3.400.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD						3.392.927.620,00					DPRD		3.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	802.117.870,00						1 Dokumen	652.117.870,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.590.809.750,00						1 Laporan	2.747.882.130,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						802.117.870,00							652.117.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	802.117.870,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	652.117.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						2.590.809.750,00							2.747.882.130,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.590.809.750,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	2.747.882.130,00	SEKRETARIAT DPRD
240.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**13.984.728.800,00**							**20.597.321.995,00**	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***8.363.992.400,00***							***9.358.097.812,00***	
			999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	8.363.992.400,00						100,00 Persentase	9.358.097.812,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						6.327.713.400,00					DPRD		8.970.372.230,00	
		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran						6.327.713.400,00					DPRD		8.970.372.230,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	664.006.500,00						1 Dokumen	1.554.111.695,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	546.823.800,00						1 Dokumen	1.554.111.695,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	544.344.400,00						1 Dokumen	1.654.111.695,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.027.957.800,00						1 Dokumen	2.553.925.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.580.900,00						1 Dokumen	1.654.111.695,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						544.344.400,00							1.654.111.695,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	544.344.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.654.111.695,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						1.544.580.900,00							1.654.111.695,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.580.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.654.111.695,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						664.006.500,00							1.554.111.695,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	664.006.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.554.111.695,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						546.823.800,00							1.554.111.695,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	546.823.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.554.111.695,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						3.027.957.800,00							2.553.925.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.027.957.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.553.925.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2.036.279.000,00					DPRD		3.595.948.972,00	
		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2.036.279.000,00					DPRD		3.595.948.972,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.108.663.800,00						2 Dokumen	2.197.441.237,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.064.700,00						1 Dokumen	28.093.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	869.550.500,00						2 Laporan	1.370.413.935,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						869.550.500,00							1.370.413.935,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	869.550.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	1.370.413.935,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						58.064.700,00							28.093.800,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.064.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	28.093.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						1.108.663.800,00							2.197.441.237,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.108.663.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.197.441.237,00	SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan						***5.620.736.400,00***							***8.031.000.793,00***	
			999.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	5.620.736.400,00						100,00 Persentase	8.031.000.793,00	
			999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100.00 Persentase		75.00 Persentase	80.00 Persentase	5.620.736.400,00						85.00 Persentase	8.031.000.793,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.275.815.400,00					DPRD		3.075.189.384,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.275.815.400,00					DPRD		3.075.189.384,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.576.655.400,00						4 Dokumen	2.278.258.510,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	699.160.000,00						4 Dokumen	716.077.724,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	80.853.150,00	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.576.655.400,00							2.278.258.510,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.576.655.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	2.278.258.510,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						0,00							80.853.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	80.853.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						699.160.000,00							716.077.724,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	699.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	716.077.724,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						1.800.540.600,00					DPRD		2.563.410.097,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD						1.800.540.600,00					DPRD		2.563.410.097,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	834.356.600,00						1 Dokumen	970.943.097,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	621.939.500,00						2 Dokumen	558.939.600,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.244.500,00						2 Dokumen	758.939.600,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	300.000.000,00						8 Orang	274.587.800,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						834.356.600,00							970.943.097,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	834.356.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	970.943.097,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						300.000.000,00							274.587.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	300.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Orang	274.587.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						621.939.500,00							558.939.600,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	621.939.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	558.939.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						44.244.500,00							758.939.600,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.244.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	758.939.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						1.544.380.400,00					DPRD		2.392.401.312,00	
		Tersedianya fasilitas Tugas DPRD						1.544.380.400,00					DPRD		2.392.401.312,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.380.400,00						1 Dokumen	2.392.401.312,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.544.380.400,00							2.392.401.312,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.544.380.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	2.392.401.312,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**13.101.265.669,64**							**11.587.897.969,64**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.101.265.669,64**							**11.587.897.969,64**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**12.851.265.669,64**							**11.437.634.369,64**	
241.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.751.265.669,64**							**10.903.531.329,64**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***11.746.517.169,64***							***10.898.678.729,64***	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.705.600,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		50.245.660,00	
		-						43.705.600,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		50.245.660,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	2.039.400,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	0,00						2 Data	2.736.200,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.748.500,00						1 Dokumen	4.852.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.886.900,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.907.400,00						3 Dokumen	7.771.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.800,00						2 Dokumen	2.673.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.748.500,00						1 Dokumen	485.260,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.845.300,00						1 Dokumen	4.852.600,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.996.000,00						1 Dokumen	5.005.600,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.894.400,00						5 Laporan	9.981.300,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.924.700,00						4 Laporan	5.961.400,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.907.400,00							7.771.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.907.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	7.771.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.996.000,00							5.005.600,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.996.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.005.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.845.300,00							4.852.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.845.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.852.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.748.500,00							4.852.600,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.748.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	4.852.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.748.500,00							485.260,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.748.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	485.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.894.400,00							9.981.300,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	9.894.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	9.981.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.924.700,00							5.961.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.924.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	5.961.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							3.886.900,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.886.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							2.736.200,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	0 Data	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Data	2.736.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							2.039.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Berita Acara	2.039.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						2.640.800,00							2.673.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	2.673.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.297.754.119,64					Bappeda Kab. Lampung Utara		9.303.797.369,64	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.297.754.119,64					Bappeda Kab. Lampung Utara		9.303.797.369,64	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.875.400,00						1 Dokumen	5.098.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.080.000,00						1 Dokumen	212.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.342.300,00						1 Dokumen	6.300.500,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.269.600,00						2 Dokumen	4.572.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.731.800,00						1 Dokumen	6.860.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.601.100,00						1 Laporan	3.801.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.395.500,00						4 Laporan	5.857.100,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	9.058.458.419,64						72 Orang/bulan	9.058.427.069,64	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.058.458.419,64							9.058.427.069,64	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.058.458.419,64	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		72 Orang/bulan	9.058.427.069,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						208.080.000,00							212.880.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	208.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	212.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.731.800,00							6.860.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.731.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	6.860.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						6.342.300,00							6.300.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.342.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	6.300.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.601.100,00							3.801.600,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.601.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	3.801.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						4.875.400,00							5.098.500,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.875.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	5.098.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.395.500,00							5.857.100,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.395.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	5.857.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						4.269.600,00							4.572.100,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.269.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	4.572.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						335.826.700,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		204.804.200,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						335.826.700,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		204.804.200,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.963.600,00						1 Dokumen	7.891.900,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.848.100,00						1 Dokumen	8.462.300,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	287.615.000,00						10 Orang	98.150.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	34.400.000,00						90 Paket	90.300.000,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						34.400.000,00							90.300.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		90 Paket	86 Paket	34.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		90 Paket	90.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.848.100,00							8.462.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.848.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	8.462.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5.963.600,00							7.891.900,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.963.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	7.891.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						287.615.000,00							98.150.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	30 Orang	287.615.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Orang	98.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						311.107.850,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		237.692.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						311.107.850,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		237.692.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	262.380.000,00						50 Laporan	186.179.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.070.000,00						12 Paket	28.495.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.030.000,00						12 Paket	9.647.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.383.500,00						12 Paket	6.768.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.612.350,00						12 Paket	3.087.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.632.000,00						12 Paket	3.515.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.383.500,00							6.768.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.383.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	6.768.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.612.350,00							3.087.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.612.350,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	3.087.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.632.000,00							3.515.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.632.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	3.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.070.000,00							28.495.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	28.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.030.000,00							9.647.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.030.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	9.647.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						262.380.000,00							186.179.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	262.380.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		50 Laporan	186.179.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						889.170.800,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		161.949.200,00	
		Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						889.170.800,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		161.949.200,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	138.154.800,00						100 Unit	48.640.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	550.680.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		17 Unit	17 Unit	200.336.000,00						17 Unit	113.309.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						550.680.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	1 Unit	550.680.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						138.154.800,00							48.640.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	10 Unit	138.154.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		100 Unit	48.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.336.000,00							113.309.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		17 Unit	15 Unit	200.336.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		17 Unit	113.309.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						403.635.600,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		336.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						403.635.600,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		336.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	148.635.600,00						12 Laporan	136.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00						12 Laporan	200.400.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						148.635.600,00							136.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	148.635.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	136.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						255.000.000,00							200.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	200.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470.065.000,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		608.642.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470.065.000,00					Bappeda Kab. Lampung Utara		608.642.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.655.000,00						1 Unit	39.872.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	380.010.000,00						Unit	541.170.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	41.400.000,00						40 Unit	27.600.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						380.010.000,00							541.170.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit		31 Unit	30 Unit	380.010.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		Unit	541.170.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.400.000,00							27.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	41.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Unit	27.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48.655.000,00							39.872.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.655.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	39.872.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
242.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**400.000.000,00**							**204.103.040,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***400.000.000,00***							***191.053.040,00***	
			1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	400.000.000,00						100 Persentase	191.053.040,00	
			2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	400.000.000,00						100 Persentase	191.053.040,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						244.616.300,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		148.227.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan						244.616.300,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		148.227.800,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	56 Berita Acara		56 Berita Acara	56 Berita Acara	12.662.000,00						56 Berita Acara	7.862.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	37.425.000,00						3 Berita Acara	16.900.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	80.487.300,00						3 Berita Acara	48.723.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	79.769.400,00						3 Dokumen	23.354.100,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.673.100,00						3 Dokumen	7.759.500,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						3 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	247 Usulan		247 Usulan	247 Usulan	14.599.500,00						247 Usulan	39.729.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						19.673.100,00							7.759.500,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.673.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	7.759.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						0,00							3.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	3.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						37.425.000,00							16.900.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	37.425.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Berita Acara	16.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						12.662.000,00							7.862.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	56 Berita Acara		56 Berita Acara	56 Berita Acara	12.662.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Berita Acara	7.862.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						80.487.300,00							48.723.200,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	80.487.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Berita Acara	48.723.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						14.599.500,00							39.729.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	247 Usulan		247 Usulan	247 Usulan	14.599.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		247 Usulan	39.729.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						79.769.400,00							23.354.100,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	79.769.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Dokumen	23.354.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						66.064.300,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		21.000.840,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						66.064.300,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		21.000.840,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku	1 Buku	28.137.900,00						1 Buku	10.000.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.240.400,00						1 Dokumen	1.000.040,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang		56 Orang	56 Orang	11.686.000,00						56 Orang	10.000.400,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						26.240.400,00							1.000.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.240.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.000.040,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						11.686.000,00							10.000.400,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang		56 Orang	56 Orang	11.686.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Orang	10.000.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						28.137.900,00							10.000.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku	1 Buku	28.137.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Buku	10.000.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.449.700,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		25.001.100,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.449.700,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		25.001.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.053.500,00						4 Laporan	15.000.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	35.396.200,00						2 Laporan	10.001.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						35.396.200,00							10.001.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	35.396.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	10.001.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						45.053.500,00							15.000.100,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.053.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	15.000.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						8.869.700,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		9.873.300,00	
		Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						8.869.700,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		9.873.300,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.100,00						1 Dokumen	3.049.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.774.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.219.600,00						1 Dokumen	3.049.600,00	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						2.650.100,00							3.049.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.049.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						6.219.600,00							3.049.600,00	
		Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.219.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.049.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							3.774.100,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	3.774.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
243.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**700.000.000,00**							**330.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						***225.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	225.000.000,00						95 Persentase	110.000.000,00	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						225.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						225.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.555.000,00						2 Dokumen	21.596.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.666.500,00						2 Dokumen	20.988.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.319.400,00						2 Laporan	11.277.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.055.300,00						2 Laporan	11.488.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	52.239.400,00						4 Laporan	8.306.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.830.700,00						4 Laporan	8.413.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	31.916.900,00						2 Laporan	13.983.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	21.416.800,00						2 Laporan	13.946.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						36.555.000,00							21.596.100,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.555.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	21.596.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						12.319.400,00							11.277.100,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.319.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	11.277.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						52.239.400,00							8.306.400,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	52.239.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	8.306.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						31.916.900,00							13.983.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	31.916.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	13.983.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						31.666.500,00							20.988.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.666.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	20.988.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						12.055.300,00							11.488.600,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.055.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	11.488.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						26.830.700,00							8.413.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.830.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	8.413.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						21.416.800,00							13.946.100,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	21.416.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	13.946.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						***250.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	250.000.000,00						95 Persentase	110.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						250.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						250.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.621.200,00						2 Dokumen	8.269.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.660.500,00						2 Dokumen	6.844.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	17.225.500,00						2 Laporan	7.976.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	17.505.600,00						2 Laporan	11.692.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.628.300,00						4 Laporan	10.905.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	67.309.600,00						2 Laporan	47.534.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	53.220.000,00						2 Laporan	11.953.700,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.829.300,00						4 Laporan	4.824.800,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						25.660.500,00							6.844.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.660.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	6.844.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						17.505.600,00							11.692.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	17.505.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	11.692.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						18.829.300,00							4.824.800,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.829.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	4.824.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						53.220.000,00							11.953.700,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	53.220.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	11.953.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						33.621.200,00							8.269.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.621.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	8.269.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						17.225.500,00							7.976.800,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	17.225.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	7.976.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						16.628.300,00							10.905.200,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.628.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	10.905.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						67.309.600,00							47.534.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	67.309.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	47.534.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						***225.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	225.000.000,00						95 Persentase	110.000.000,00	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						225.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA						225.000.000,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.300,00						2 Dokumen	24.056.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.387.700,00						2 Dokumen	16.352.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.913.100,00						2 Laporan	6.028.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.807.800,00						2 Laporan	5.550.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.741.900,00						4 Laporan	5.706.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.485.300,00						4 Laporan	6.328.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	46.199.500,00						2 Laporan	35.696.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.271.400,00						2 Laporan	10.280.600,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						22.193.300,00							24.056.200,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	24.056.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						27.913.100,00							6.028.800,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.913.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	6.028.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						27.741.900,00							5.706.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.741.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	5.706.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						46.199.500,00							35.696.700,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	46.199.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	35.696.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						24.387.700,00							16.352.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.387.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	16.352.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						19.807.800,00							5.550.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.807.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	5.550.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						26.485.300,00							6.328.600,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.485.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	6.328.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						30.271.400,00							10.280.600,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.271.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	10.280.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**250.000.000,00**							**150.263.600,00**	
244.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**250.000.000,00**							**150.263.600,00**	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah						***250.000.000,00***							***150.263.600,00***	
			999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	85,00 Persentase		85,00 Persentase	85,00 Persentase	12.501.200,00						85,00 Persentase	12.501.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Invensi dan Inovasi						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
		Tersedianya Laporan Invensi dan Inovasi Daerah						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.501.200,00						1 Laporan	12.501.700,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.501.200,00						1 Laporan	12.501.700,00	
		Tersedianya Naskah Invensi dan Inovasi						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.501.200,00						1 Laporan	12.501.700,00	
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						12.501.200,00							12.501.700,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.501.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	12.501.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kaiian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah						***250.000.000,00***							***150.263.600,00***	
			1.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	65 Persentase		50 Persentase	60 Persentase	65.171.700,00						60 Persentase	65.171.700,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						80.171.900,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		80.171.900,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	65.171.700,00						1 Naskah	65.171.700,00	
		Tersedianya Naskah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						80.171.900,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		80.171.900,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	65.171.700,00						1 Naskah	65.171.700,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						65.171.700,00							65.171.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	65.171.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Naskah	65.171.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah						***250.000.000,00***							***150.263.600,00***	
			1.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	65 Persentase		50 Persentase	50 Persentase	15.000.200,00						65 Persentase	15.000.200,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						80.171.900,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		80.171.900,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						80.171.900,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		80.171.900,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.200,00						1 Laporan	15.000.200,00	
		Tersedianya Naskah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						80.171.900,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		80.171.900,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.200,00						1 Laporan	15.000.200,00	
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						15.000.200,00							15.000.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	15.000.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan						***169.828.100,00***							***70.091.700,00***	
			1.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	157.326.900,00						100 Persentase	57.590.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
		Tersedianya Laporan Invensi dan Inovasi						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
		Tersedianya Laporan Invensi dan Inovasi Daerah						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	157.326.900,00						1 Laporan	57.590.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	157.326.900,00						1 Laporan	57.590.000,00	
		Tersedianya Naskah Invensi dan Inovasi						169.828.100,00					Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara		70.091.700,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	157.326.900,00						1 Laporan	57.590.000,00	
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						157.326.900,00							57.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	157.326.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	57.590.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**248.577.844.156,69**							**396.514.601.620,60**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**248.465.031.856,69**							**396.352.601.620,60**	
	5.02	**KEUANGAN**						**248.465.031.856,69**							**396.352.601.620,60**	
245.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.200.781.577,69**							**86.013.326.484,60**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan BPKAD						***28.200.781.577,69***							***85.363.326.484,60***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77.50-78 Nilai		72.05-73.50 Nilai	73.50-75 Nilai	28.200.781.577,69						75-77 Nilai	85.363.326.484,60	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275.765.800,00					-		433.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275.765.800,00					-		433.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	10.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	25.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	0,00						1 Data	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.728.800,00						2 Dokumen	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.265.600,00						1 Dokumen	56.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.519.000,00						1 Dokumen	62.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.061.200,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.191.200,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.728.800,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.728.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						68.061.200,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.061.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						51.519.000,00							62.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.519.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						51.265.600,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.265.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	56.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						61.191.200,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.191.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							15.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	0 Data	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Data	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							25.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	O Berita Acara	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.443.154.584,69					-		24.467.326.484,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.443.154.584,69					-		24.467.326.484,60	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.175.800,00						1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.800.000,00						1 Dokumen	1.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.945.800,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.918.500,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	66.988.000,00						18 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	22.392.326.484,69						107 Orang/bulan	22.392.326.484,60	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.392.326.484,69							22.392.326.484,60	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	108 Orang/bulan	22.392.326.484,69	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		107 Orang/bulan	22.392.326.484,60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.756.800.000,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						74.945.800,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.945.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						70.918.500,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.918.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						41.175.800,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	41.175.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						66.988.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	66.988.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		18 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		57.000.000,00	
		tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah						0,00					-		57.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.084.600,00					-		200.000.000,00	
		Tertatanya Administrasi Kepegawaian						57.084.600,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.084.600,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	17 Orang	0,00						17 Orang	85.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00						6 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						57.084.600,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.084.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Orang	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		17 Orang	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						935.622.420,00					-		60.260.000.000,00	
		tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah						935.622.420,00					-		60.260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	173.961.000,00						12 Laporan	60.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.438.000,00						2 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	65.220.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.869.300,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	549.189.700,00						2 Paket	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	17.944.020,00						2 Paket	15.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						28.869.300,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.869.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						549.189.700,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	549.189.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.944.020,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	17.944.020,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.438.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	100.438.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.220.400,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	65.220.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Paket	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						173.961.000,00							60.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	173.961.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	60.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						550.000.000,00					-		105.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						550.000.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00						1 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	10.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						550.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	4 Unit	550.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.666.691.673,00					-		250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.666.691.673,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	193.338.673,00						2 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.370.160.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.240.000,00						Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.953.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.953.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.953.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						193.338.673,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	193.338.673,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						93.240.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.370.160.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.370.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.462.500,00					-		241.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.462.500,00					-		241.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.470.000,00						2 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	259.992.500,00						23 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	0,00						40 Unit	6.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						259.992.500,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	259.992.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		23 Unit	210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Unit	6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.470.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.470.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
246.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**219.008.331.379,00**							**309.085.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan						***217.557.131.379,00***							***304.637.000.000,00***	
			999.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	217.557.131.379,00						100 Persentase	304.637.000.000,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						490.373.050,00					-		587.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						490.373.050,00					-		587.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.800,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	157.731.500,00						1 Dokumen	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	238.098.750,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00						18 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.792.000,00						1 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	42.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						157.731.500,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	157.731.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		18 Laporan	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						238.098.750,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	238.098.750,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						85.792.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	85.792.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						8.750.800,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						0,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Orang	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						217.066.758.329,00					-		307.260.000.000,00	
		Tersusunnya Analisis Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						217.066.758.329,00					-		307.260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000.000,00						1 Laporan	3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	196.031.259.989,72						1 Laporan	293.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.035.498.339,28						1 Laporan	8.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	3.000.000.000,00						0 Laporan	3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						9.000.000.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.000.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Kembali Pinjaman Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						0,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						196.031.259.989,72							293.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	196.031.259.989,72	Kab. Lampung Utara	Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	293.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		0 Laporan	3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						9.035.498.339,28							8.200.000.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.035.498.339,28	Kab. Lampung Utara	Opsen PKB	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	8.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola anggaran						***845.550.000,00***							***439.000.000,00***	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	45.28 Persentase		38.24 Persentase	40.00 Persentase	845.550.000,00						41.76 Persentase	439.000.000,00	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30 Persentase		30 Persentase	30 Persentase	845.550.000,00						30 Persentase	439.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						845.550.000,00					-		594.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Ranperda APBD dan Ranperbup Penjabaran APBD, Dokumen KUA/PPAS dan KUA/PPAS perubahan serta Dokumen Perbup Pedoman Penyusunan APBD						845.550.000,00					-		594.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	77.784.000,00						2 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	74.561.600,00						2 Dokumen	38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	39.000.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	0,00						56 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	199.762.000,00						20 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.912.000,00						2 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.926.000,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	0,00						56 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	47.461.500,00						56 Dokumen	62.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	42.142.900,00						56 Dokumen	55.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						77.784.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	77.784.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						74.561.600,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	74.561.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	38.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						42.142.900,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	1 Dokumen	42.142.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						47.461.500,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	1 Dokumen	47.461.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Dokumen	62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						0,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen		56 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		56 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						201.912.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.912.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						201.926.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	201.926.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						0,00							39.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						199.762.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	10 Orang	199.762.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Orang	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						***605.650.000,00***							***534.000.000,00***	
			999.Persentase Penurunan SILPA	79.07 Persentase		42.91 Persentase	51.95 Persentase	605.650.000,00						60.99 Persentase	534.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	83.90 Persentase		57.90 Persentase	64.40 Persentase	605.650.000,00						70.90 Persentase	534.000.000,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						605.650.000,00					-		644.000.000,00	
		Tertatanya Administrasi pengelolaan Kas Daerah, Dana dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Administrasi Keuangan SKPD lebih cepat, SP2D Belanja tidak Langsung pegawai terbit tepat waktu						605.650.000,00					-		644.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	108.106.900,00						1 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	67.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.640.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.994.500,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.030.600,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.411.500,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	76.967.800,00						1 Laporan	42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.826.700,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.672.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						108.106.900,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	108.106.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						76.967.800,00							42.000.000,00	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	76.967.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						76.030.600,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	76.030.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						0,00							67.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	67.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						56.640.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.640.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						81.826.700,00								75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	81.826.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						80.994.500,00								35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.994.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						85.411.500,00								40.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.411.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						39.672.000,00								20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.672.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Orang	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
247.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.255.918.900,00**							**1.254.275.136,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***1.255.918.900,00***							***1.104.275.136,00***	
			999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	55,20 Persentase		22,19 Persentase	26,08 Persentase	1.255.918.900,00						39,12 Persentase	1.104.275.136,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.255.918.900,00					-		1.254.275.136,00	
		Jumlah aset tetap (gedung) yang dimanfaatkan sebagai pemasukan sumber pendapatan asli daerah						1.255.918.900,00					-		1.254.275.136,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.551.000,00						1 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.301.200,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.059.500,00						1 Laporan	320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.479.400,00						1 Laporan	52.955.580,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.986.900,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.577.600,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	148.795.500,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	203.721.500,00						30 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.446.300,00						1 Dokumen	69.319.556,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						35.446.300,00							69.319.556,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	35.446.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	69.319.556,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						0,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						148.795.500,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	148.795.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						123.301.200,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.301.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						170.059.500,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.059.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						118.986.900,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.986.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						99.479.400,00							52.955.580,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.479.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	52.955.580,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						0,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						205.577.600,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.577.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						150.551.000,00							67.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.551.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	67.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						203.721.500,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	20 Orang	203.721.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		30 Orang	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X							**112.812.300,00**							**162.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**112.812.300,00**							**162.000.000,00**	
248.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**112.812.300,00**							**162.000.000,00**	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	73.50-75 Nilai	112.812.300,00						-	162.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						112.812.300,00					-		162.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						112.812.300,00					-		162.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.830.200,00						1 Dokumen	67.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.982.100,00						4 Laporan	95.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						52.830.200,00							67.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.830.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	67.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.982.100,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.982.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**16.901.354.727,40**							**19.186.066.195,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.901.354.727,40**							**19.186.066.195,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**16.901.354.727,40**							**19.186.066.195,00**	
249.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.446.481.827,40**							**16.847.199.626,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Bapenda						***15.397.481.827,40***							***16.787.199.626,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.2-67.6 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	15.397.481.827,40						67-67.2 Nilai	16.787.199.626,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.920.900,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		194.323.890,00	
		tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						72.920.900,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		194.323.890,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	16.921.000,00						1 Berita Acara	15.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	7.000.000,00						4 Data	15.453.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00						2 Dokumen	36.273.300,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	20.000.215,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7.000.000,00						7 Laporan	47.597.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.999.900,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.000.000,00							36.273.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	36.273.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.000.000,00							20.000.215,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	20.000.215,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.000.000,00							47.597.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		7 Laporan	47.597.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.999.900,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.999.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						7.000.000,00							15.453.375,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Data	15.453.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.921.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	16.921.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Berita Acara	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.820.847.927,40					BADAN PENDAPATAN DAERAH		12.372.802.056,00	
		tersedianya dokumen adminisitrasi keuangan perangkat daerah						10.820.847.927,40					BADAN PENDAPATAN DAERAH		12.372.802.056,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	276.212.000,00						12 Dokumen	491.023.356,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00						2 Laporan	20.604.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	10.537.635.927,40						67 Orang/bulan	11.861.174.200,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.537.635.927,40							11.861.174.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	10.537.635.927,40	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		67 Orang/bulan	11.861.174.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						276.212.000,00							491.023.356,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	276.212.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	491.023.356,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.000.000,00							20.604.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	20.604.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.282.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		5.151.125,00	
		Tersedianya administrasi barang milik daerah						5.282.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		5.151.125,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.282.000,00						12 Laporan	5.151.125,00	
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.282.000,00							5.151.125,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.282.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	5.151.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						312.418.300,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		335.906.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah						312.418.300,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		335.906.750,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.418.300,00						4 Dokumen	30.906.750,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	240.000.000,00						1 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	50.000.000,00						1 Orang	55.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						22.418.300,00							30.906.750,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.418.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	30.906.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	65 Orang	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Orang	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						240.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	30 Orang	240.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Orang	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.622.091.400,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.550.821.255,00	
		tersedianyan paket administrasi umum perangkat daerah						1.622.091.400,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.550.821.255,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	494.455.000,00						12 Laporan	695.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	13.862.000,00						20 Paket	61.813.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	721.520.500,00						30 Paket	665.910.035,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	33.800.000,00						8 Paket	33.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	301.696.200,00						4 Paket	36.440.020,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	56.757.700,00						20 Paket	57.757.700,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						33.800.000,00							33.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	33.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Paket	33.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						301.696.200,00							36.440.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	301.696.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Paket	36.440.020,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						56.757.700,00							57.757.700,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	56.757.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Paket	57.757.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.862.000,00							61.813.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	13.862.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		20 Paket	61.813.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						721.520.500,00							665.910.035,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	721.520.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		30 Paket	665.910.035,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						494.455.000,00							695.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	494.455.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	695.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.661.527.800,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.044.756.005,00	
		tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						1.661.527.800,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.044.756.005,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	195.700.000,00						2 Unit	196.295.300,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.500.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	1.211.160.000,00						4 Unit	661.160.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	209.167.800,00						8 Unit	182.300.705,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.211.160.000,00							661.160.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	11 Unit	1.211.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	661.160.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						195.700.000,00							196.295.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	148 Unit	195.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Unit	196.295.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						209.167.800,00							182.300.705,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	23 Unit	209.167.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Unit	182.300.705,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						45.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	40 Unit	45.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						458.926.500,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		850.971.545,00	
		tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						458.926.500,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		850.971.545,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.526.500,00						12 Laporan	100.977.745,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	377.400.000,00						12 Laporan	749.993.800,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						81.526.500,00							100.977.745,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.526.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	100.977.745,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						377.400.000,00							749.993.800,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	377.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	749.993.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						492.467.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		492.467.000,00	
		tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara						492.467.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		492.467.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	233.977.000,00						4 Unit	233.977.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	223.380.000,00						12 Unit	223.380.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	35.110.000,00						25 Unit	35.110.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						223.380.000,00							223.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	19 Unit	223.380.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Unit	223.380.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.110.000,00							35.110.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	35.110.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		25 Unit	35.110.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						233.977.000,00							233.977.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	233.977.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Unit	233.977.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
250.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.454.872.900,00**							**2.338.866.569,00**	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						***1.454.872.900,00***							***2.338.866.569,00***	
			999.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	392.549.800,00						100,00 Persentase	1.026.152.912,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.454.872.900,00					WAJIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		2.338.866.569,00	
		Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah						1.454.872.900,00					WAJIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		2.338.866.569,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	110.900.100,00						12 Dokumen	218.643.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	65.586.400,00						11 Dokumen	206.852.303,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	98.628.500,00						11 Laporan	199.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	11 Layanan	52.364.900,00						11 Layanan	206.945.084,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak		2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	65.069.900,00						2 Obyek Pajak	194.712.525,00	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						65.069.900,00							194.712.525,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak		2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	65.069.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Obyek Pajak	194.712.525,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0							
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						52.364.900,00							206.945.084,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	11 Layanan	52.364.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Layanan	206.945.084,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Nyapah Banyu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1						
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						65.586.400,00							206.852.303,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	65.586.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Dokumen	206.852.303,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning ||					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0							
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						110.900.100,00							218.643.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	110.900.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	218.643.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									|| Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1						
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						98.628.500,00							199.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	98.628.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Laporan	199.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1						
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						***1.454.872.900,00***							***2.338.866.569,00***	
			999.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	403.308.500,00						100,00 Persentase	589.000.000,00	
		Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah						1.454.872.900,00					WAJIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		2.338.866.569,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	211.311.300,00						11 Dokumen	289.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	191.997.200,00						11 Laporan	300.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						211.311.300,00							289.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	211.311.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel		11 Dokumen	289.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit		erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pem bangunan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1					
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						191.997.200,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	191.997.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi	4. Meningkatnya Tata Kelola		11 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1						
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***1.454.872.900,00***							***2.338.866.569,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,56 Persentase		13,16 Persentase	19,26 Persentase	659.014.600,00						25,36 Persentase	723.713.657,00	
		Tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah						1.454.872.900,00					WAJIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		2.338.866.569,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	91.933.100,00						12 Dokumen	142.087.197,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	7.854.700,00						11 Dokumen	103.022.500,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	181.149.900,00						23 Dokumen	141.779.110,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	234.416.100,00						11 Laporan	234.524.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.789.500,00						12 Laporan	50.789.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	92.871.300,00						11 Laporan	51.511.250,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						7.854.700,00							103.022.500,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	7.854.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Bandar Kagungan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Dokumen	103.022.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Raya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun ||							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1							
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						92.871.300,00							51.511.250,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	92.871.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Laporan	51.511.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Alam Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik ||						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Gunung Katon || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Bangun Jaya || 1						
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						234.416.100,00							234.524.100,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	234.416.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		11 Laporan	234.524.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1						
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						50.789.500,00							50.789.500,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.789.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	50.789.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 ||						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1					
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						181.149.900,00							141.779.110,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	181.149.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		23 Dokumen	141.779.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Abung Selatan || Desa Abung Jayo || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Gunung Keramat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Banjar Ketapang || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Banjar Wangi || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Beringin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Kebun Dalam || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara ||						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Bandar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Bumi Mandiri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Desa Bojong Barat || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Campang Gijul || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Bandar Abung || 1					
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						91.933.100,00							142.087.197,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	91.933.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	142.087.197,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**9.355.271.453,70**							**10.514.180.915,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.355.271.453,70**							**10.514.180.915,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**8.910.276.453,70**							**10.069.185.459,00**	
251.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.763.923.853,70**							**8.931.033.859,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***7.684.723.853,70***							***8.812.533.859,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.4-68.5 Nilai		68-68.1 Nilai	68.1-68.2 Nilai	7.684.723.853,70						68.2-68.3 Nilai	8.812.533.859,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.161.219,00					-		38.981.919,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.161.219,00					-		38.981.919,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000,00						2 Dokumen	4.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.022.300,00						1 Dokumen	4.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.857.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00						1 Dokumen	4.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.200.000,00						5 Laporan	9.200.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.281.919,00						4 Laporan	7.281.919,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.100.000,00							4.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.200.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6.857.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.857.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.022.300,00							4.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.022.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.200.000,00							9.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	9.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.281.919,00							7.281.919,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.281.919,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	7.281.919,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.800.438.434,70					-		7.967.551.940,00	
		Tersedianya Dokumen Administrrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.800.438.434,70					-		7.967.551.940,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00						1 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	6.595.438.434,70						70 Orang/bulan	7.762.551.940,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.595.438.434,70							7.762.551.940,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	6.595.438.434,70	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		70 Orang/bulan	7.762.551.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						190.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						260.154.200,00					-		259.500.000,00	
		Tersedianya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						260.154.200,00					-		259.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	169.950.000,00						8 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	23.993.600,00						7 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.514.400,00						5 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.496.200,00						4 Paket	4.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.200.000,00						4 Paket	7.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.496.200,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.496.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.200.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.993.600,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	23.993.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Paket	24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.514.400,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.514.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Paket	24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						169.950.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	24 Laporan	169.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						154.760.000,00					-		160.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						154.760.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	79.760.000,00						5 Unit	80.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.760.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	8 Unit	79.760.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.960.000,00					-		280.000.000,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.960.000,00					-		280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	195.000.000,00						1 Laporan	195.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.960.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.960.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.960.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						195.000.000,00							195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	195.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.450.000,00					-		225.000.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.450.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	54.970.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	163.530.000,00						5 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	9.950.000,00						10 Unit	10.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						163.530.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	15 Unit	163.530.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.950.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	20 Unit	9.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Unit	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						54.970.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	54.970.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
252.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.146.352.600,00**							**1.138.151.600,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						***276.000.000,00***							***268.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	34,66 Persentase		12,05 Persentase	17,70 Persentase	276.000.000,00						23,35 Persentase	268.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						276.000.000,00					-		276.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						276.000.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00						1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	190.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	8.000.000,00						1 Lembaga	8.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						35.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN						18.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						8.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Lembaga	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***410.236.600,00***							***410.240.000,00***	
			999.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100,00 Persentase		100,00 Persentase	100,00 Persentase	410.236.600,00						100,00 Persentase	410.240.000,00	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						425.236.600,00					-		425.240.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						425.236.600,00					-		425.240.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	16.240.000,00						150 Orang	16.240.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.000.000,00						10 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	319.996.600,00						1 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						319.996.600,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	319.996.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						16.240.000,00							16.240.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	16.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		150 Orang	16.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Orang	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***396.000.000,00***							***396.000.000,00***	
			999.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	56,95 Persentase		12,47 Persentase	23,59 Persentase	396.000.000,00						34,71 Persentase	396.000.000,00	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						396.000.000,00					-		396.000.000,00	
		Terlaksananya ASN yang dimutasi dan yang mendapat promosi						396.000.000,00					-		396.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00						1 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000,00						1 Dokumen	29.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						29.000.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	29.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN						***17.116.000,00***							***8.911.600,00***	
			999.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	34,66 Persentase		12,05 Persentase	17,70 Persentase	17.116.000,00						23,35 Persentase	8.911.600,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						49.116.000,00					-		40.911.600,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN						49.116.000,00					-		40.911.600,00	
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	2000 Orang		2000 Orang	2000 Orang	8.000.000,00						2000 Orang	8.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	8.000.000,00						50 Orang	8.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	8.000.000,00						200 Orang	8.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	9.116.000,00						1000 Orang	911.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						9.116.000,00							911.600,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	9.116.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1000 Orang	911.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						8.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		200 Orang	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	2000 Orang		2000 Orang	2000 Orang	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2000 Orang	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Orang	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Tersedianya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						276.000.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	155.000.000,00						-	0,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						155.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**444.995.000,00**							**444.995.456,00**	
253.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**444.995.000,00**							**444.995.456,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi						***394.995.000,00***							***394.995.456,00***	
			999.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	62,00 Persentase		17,52 Persentase	28,64 Persentase	204.995.000,00						39,76 Persentase	204.995.456,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00						1 Laporan	184.995.456,00	
		Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00						1 Laporan	184.995.456,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00						1 Laporan	184.995.456,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00						1 Laporan	184.995.456,00	
		Tersertifikasinya ASN di Lingkup Kabupaten/Kota						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00						1 Laporan	184.995.456,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						184.995.000,00							184.995.456,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	184.995.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	184.995.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional						***394.995.000,00***							***394.995.456,00***	
			999.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	12,00 Persentase		3,48 Persentase	5,61 Persentase	30.000.000,00						7,74 Persentase	30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama						394.995.000,00					-		394.995.456,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga						394.995.000,00					-		394.995.456,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		Tersertifikasinya ASN di Lingkup Kabupaten/Kota						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis						***50.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			999.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	56,95 Persentase		12,47 Persentase	23,59 Persentase	50.000.000,00						34,71 Persentase	50.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						50.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi						***394.995.000,00***							***394.995.456,00***	
			999.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	60,79 Persentase		55,39 Persentase	56,74 Persentase	160.000.000,00						58,09 Persentase	160.000.000,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	110.000.000,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						394.995.000,00					-		394.995.456,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	110.000.000,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	110.000.000,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	110.000.000,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersertifikasinya ASN di Lingkup Kabupaten/Kota						394.995.000,00					-		394.995.456,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	110.000.000,00						150 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						110.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	8 Orang	110.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		150 Orang	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**26.794.912.148,60**							**28.063.809.011,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.794.912.148,60**							**28.063.809.011,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**26.794.912.148,60**							**28.063.809.011,00**	
254.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.323.923.148,60**							**20.910.702.311,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***20.278.923.148,60***							***20.840.702.311,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.5-68.6 Nilai		68.1-68.2 Nilai	68.2-68.3 Nilai	20.278.923.148,60						68.3-68.4 Nilai	20.840.702.311,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						347.125.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		205.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						347.125.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		205.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000.000,00						6 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.125.000,00						4 Laporan	65.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	70.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Laporan	70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						97.125.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.125.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Laporan	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.378.691.453,60					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		14.939.231.322,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.378.691.453,60					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		14.939.231.322,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	278.120.000,00						12 Dokumen	338.660.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	14.100.571.453,60						95 Orang/bulan	14.600.571.322,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.100.571.453,60							14.600.571.322,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	14.100.571.453,60	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		95 Orang/bulan	14.600.571.322,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						278.120.000,00							338.660.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	278.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Pendapatan dari Pengembalian	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	338.660.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.615.000,00					ASN Inspektorat		15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.615.000,00					ASN Inspektorat		15.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.615.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						18.615.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.615.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.848.189.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		2.990.248.000,00	
		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.848.189.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		2.990.248.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	2.848.189.000,00						15 Orang	2.990.248.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.848.189.000,00							2.990.248.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	55 Orang	2.848.189.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Pendapatan dari Pengembalian	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		15 Orang	2.990.248.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						872.664.825,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		865.382.400,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						872.664.825,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		865.382.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00						12 Laporan	355.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	225.000.000,00						1 Paket	255.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.664.825,00						1 Paket	155.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	45.382.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.000.000,00							45.382.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	45.382.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						225.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	255.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						97.664.825,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.664.825,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	155.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						450.000.000,00							355.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	355.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						892.660.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		909.935.589,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						892.660.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		909.935.589,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.975.000,00						1 Unit	184.705.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	716.685.000,00						10 Unit	725.230.589,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						175.975.000,00							184.705.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	175.975.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	184.705.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						716.685.000,00							725.230.589,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	716.685.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		10 Unit	725.230.589,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.127.870,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		479.380.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.127.870,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		479.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.127.870,00						12 Laporan	146.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.000.000,00						12 Laporan	333.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.127.870,00							146.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.127.870,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	146.380.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						365.000.000,00							333.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	333.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						479.850.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		506.525.000,00	
		tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						479.850.000,00					Aparatur Inspektorat Kabupaten Lampung Utara		506.525.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	69.000.000,00						1 Unit	70.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	289.650.000,00						7 Unit	314.650.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	76.200.000,00						40 Unit	61.500.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						289.650.000,00							314.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	289.650.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		7 Unit	314.650.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						76.200.000,00							61.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	76.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		40 Unit	61.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						45.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						69.000.000,00							70.375.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	69.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Unit	70.375.000,00	INSPEKTORAT
255.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**4.621.618.000,00**							**5.352.090.000,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***4.621.618.000,00***							***5.352.090.000,00***	
			999.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100,00 Persentase		89,00 Persentase	92,63 Persentase	4.621.618.000,00						96,10 Persentase	5.352.090.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						3.699.328.000,00					Perangkat Daerah		4.379.801.300,00	
		Terwujudnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan						3.699.328.000,00					Perangkat Daerah		4.379.801.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	642.250.000,00						2 Dokumen	696.950.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	267.512.000,00						3 Kesepakatan	227.749.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	865.514.000,00						70 Laporan	930.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	808.400.000,00						9 Laporan	1.001.165.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	237.827.000,00						16 Laporan	555.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.465.000,00						1 Laporan	261.636.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	621.360.000,00						8 Laporan	707.300.300,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						237.827.000,00							555.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		16 Laporan	25 Laporan	237.827.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		16 Laporan	555.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						808.400.000,00							1.001.165.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 Laporan		9 Laporan	100 Laporan	808.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		9 Laporan	1.001.165.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						621.360.000,00							707.300.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		8 Laporan	100 Laporan	621.360.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		8 Laporan	707.300.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						256.465.000,00							261.636.500,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	256.465.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari Pengembalian	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	261.636.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						865.514.000,00							930.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan		70 Laporan	100 Laporan	865.514.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		70 Laporan	930.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						267.512.000,00							227.749.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	267.512.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari Pengembalian	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Kesepakatan	227.749.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						642.250.000,00							696.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	642.250.000,00	Kab. Lampung Utara	Pendapatan dari Pengembalian	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	696.950.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						922.290.000,00					Perangkat Daerah		972.288.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						922.290.000,00					Perangkat Daerah		972.288.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	520.215.000,00						14 Laporan	545.217.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	402.075.000,00						2 Laporan	427.071.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						402.075.000,00							427.071.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	10 Laporan	402.075.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Laporan	427.071.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						520.215.000,00							545.217.700,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan		14 Laporan	20 Laporan	520.215.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		14 Laporan	545.217.700,00	INSPEKTORAT
256.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.849.371.000,00**							**1.801.016.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						***1.849.371.000,00***							***1.801.016.700,00***	
			999.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,40 Nilai		3,00 Nilai	3,10 Nilai	1.849.371.000,00						3,20 Nilai	1.801.016.700,00	
			999.Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.5 Nilai		2 Nilai	2 Nilai	1.849.371.000,00						2.2 Nilai	1.801.016.700,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						191.755.000,00					ASN Inspektorat		146.722.500,00	
		Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						191.755.000,00					ASN Inspektorat		146.722.500,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	88.150.000,00						2 Rekomendasi	81.722.500,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	103.605.000,00						4 Rekomendasi	65.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						103.605.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	103.605.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Rekomendasi	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						88.150.000,00							81.722.500,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	88.150.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Rekomendasi	81.722.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						1.657.616.000,00					Perangkat Daerah		1.654.294.200,00	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi						1.657.616.000,00					Perangkat Daerah		1.654.294.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	836.785.000,00						4 Kegiatan	846.788.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	380.776.000,00						55 perangkat daerah	405.754.600,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	196.305.000,00						55 perangkat daerah	206.304.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	243.750.000,00						55 perangkat daerah	195.446.600,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						243.750.000,00							195.446.600,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	243.750.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		55 perangkat daerah	195.446.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						196.305.000,00							206.304.500,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	196.305.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		55 perangkat daerah	206.304.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						836.785.000,00							846.788.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	836.785.000,00	Kab. Lampung Utara	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Kegiatan	846.788.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						380.776.000,00							405.754.600,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55 perangkat daerah		55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	380.776.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		55 perangkat daerah	405.754.600,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTABUMI						**11.178.032.571,14**							**11.093.355.638,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.178.032.571,14**							**11.093.355.638,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**11.178.032.571,14**							**11.093.355.638,00**	
257.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.913.198.571,14**							**10.857.464.008,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***10.876.698.571,14***							***10.817.286.608,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	10.876.698.571,14						67.2-67.4 Nilai	10.817.286.608,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33.472.500,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		33.098.481,00	
		Terlaksana nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33.472.500,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		33.098.481,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.702.500,00						2 Dokumen	31.018.481,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.770.000,00						2 Dokumen	2.080.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						31.702.500,00							31.018.481,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	31.702.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	31.018.481,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.770.000,00							2.080.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.770.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.080.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.112.554.071,14					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		9.949.102.097,00	
		Terlaksana nya Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah						10.112.554.071,14					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		9.949.102.097,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	93.200.000,00						2 Dokumen	92.522.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.687.700,00						3 Laporan	2.080.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.248.000,00						2 Laporan	1.560.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan		101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	10.014.418.371,14						101 Orang/bulan	9.852.938.697,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.014.418.371,14							9.852.938.697,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan		101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	10.014.418.371,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		101 Orang/bulan	9.852.938.697,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						93.200.000,00							92.522.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	93.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	92.522.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.687.700,00							2.080.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.687.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	2.080.800,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.248.000,00							1.560.600,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.248.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	1.560.600,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.120.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		2.006.000,00	
		Terlaksana nya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						2.120.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		2.006.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.120.000,00						2 Dokumen	2.006.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.120.000,00							2.006.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.006.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.202.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		129.884.200,00	
		Terlaksana nya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.202.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		129.884.200,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00						2 Dokumen	1.560.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.820.000,00						2 Laporan	55.125.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.194.500,00						4 Paket	11.192.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.500.000,00						2 Paket	2.006.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.625.500,00						2 Paket	1.500.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	1.812.000,00						8 Paket	58.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.625.500,00							1.500.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.625.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	1.500.600,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.812.000,00							58.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	1.812.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Paket	58.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.194.500,00							11.192.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.194.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	11.192.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.006.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	2.006.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.250.000,00							1.560.600,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.560.600,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.820.000,00							55.125.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.820.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	55.125.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						618.840.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		574.419.180,00	
		Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor						618.840.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		574.419.180,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	9.192.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	612.840.000,00						12 Laporan	565.227.180,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00							9.192.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	9.192.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						612.840.000,00							565.227.180,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	612.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	565.227.180,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.510.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		134.343.250,00	
		Terlaksana nya Barang Milik Daerah yang dipelihara						81.510.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		134.343.250,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.870.000,00						2 Unit	80.403.250,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00						2 Unit	42.040.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.400.000,00						3 Unit	7.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.070.000,00						2 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.130.000,00						2 Unit	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.040.000,00							42.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	42.040.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.400.000,00							7.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	7.900.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.870.000,00							80.403.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	25.870.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	80.403.250,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.070.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.130.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.130.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
			Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	67-67,2 NILAI	36.500.000,00						-	34.610.800,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.500.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		34.610.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						36.500.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		34.610.800,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	36.500.000,00						-	34.610.800,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.500.000,00							34.610.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	36.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	34.610.800,00	KECAMATAN KOTABUMI
258.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**81.588.000,00**							**43.794.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***81.588.000,00***							***43.794.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	89 %		82.50 %	82.50 %	81.588.000,00						85 %	43.794.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.000.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		12.000.000,00	
		Terlaksana nya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.000.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.000.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						47.959.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		15.848.000,00	
		Terlaksana nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						47.959.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		15.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.585.000,00						2 Laporan	7.900.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.374.000,00						2 Laporan	7.948.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						8.585.000,00							7.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.585.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	7.900.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						39.374.000,00							7.948.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.374.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	7.948.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.629.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		15.946.000,00	
		Terlaksana nya dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat						19.629.000,00					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		15.946.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.399.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.230.000,00						1 Laporan	7.946.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						10.399.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.399.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.230.000,00							7.946.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.230.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	7.946.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***90.243.500,00***							***127.972.230,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	90.243.500,00						80 %	127.972.230,00	
		Terlaksana nya pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.800.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		42.027.098,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00						1 Laporan	33.527.098,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						11.500.000,00							33.527.098,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	33.527.098,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		4.627.766.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						7.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						21.453.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		60.150.620,00	
		Terlaksana nya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan (Lembaga)						21.453.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		60.150.620,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00						1 Laporan	12.016.620,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.953.000,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	48.134.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						14.953.000,00							48.134.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.953.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Lembaga Kemasyarakatan	48.134.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						6.500.000,00							12.016.620,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	12.016.620,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						41.990.500,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		20.794.512,00	
		Terlaksa nya Perberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan						41.990.500,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		20.794.512,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	10.000.000,00						91 Keluarga	8.614.512,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	24.165.500,00						91 Keluarga	5.060.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	4.700.000,00						91 Keluarga	4.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	3.125.000,00						91 Keluarga	3.060.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						10.000.000,00							8.614.512,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		91 Keluarga	8.614.512,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						24.165.500,00							5.060.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	24.165.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		91 Keluarga	5.060.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						3.125.000,00							3.060.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	3.125.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		91 Keluarga	3.060.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.700.000,00							4.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	95 Keluarga		91 Keluarga	91 Keluarga	4.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		91 Keluarga	4.060.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.800.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		42.027.098,00	
		Terlaksana nya pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.800.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		42.027.098,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	8.300.000,00						-	8.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						8.300.000,00							8.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.300.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	8.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
260.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**38.800.000,00**							**27.680.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***38.800.000,00***							***27.680.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	38.800.000,00						100 %	27.680.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						38.800.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		27.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana nya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						38.800.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		27.680.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.800.000,00						1 Laporan	27.680.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						38.800.000,00							27.680.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	27.680.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
261.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**35.010.000,00**							**12.945.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***35.010.000,00***							***12.945.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	35.010.000,00						100 %	12.945.000,00	
		Terlaksana nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						35.010.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		12.945.000,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00						5 Dokumen	6.035.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	95 Orang		91 Orang	91 Orang	16.610.000,00						91 Orang	1.510.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						16.610.000,00							1.510.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	95 Orang		91 Orang	91 Orang	16.610.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		91 Orang	1.510.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						6.000.000,00							6.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	6.035.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						35.010.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		12.945.000,00	
		Terlaksana nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						35.010.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		12.945.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	12.400.000,00						-	5.400.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						12.400.000,00							5.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	91 Orang	12.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.400.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
262.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**19.192.500,00**							**23.500.400,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***16.692.500,00***							***23.500.400,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		75 %	80 %	16.692.500,00						80 %	23.500.400,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						19.192.500,00					APARATUR DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		23.500.400,00	
		Terlaksana nya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa						19.192.500,00					APARATUR DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		23.500.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00						2 Dokumen	2.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	4.650.000,00						5 Dokumen	5.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00						2 Dokumen	8.650.400,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.542.500,00						5 Dokumen	4.810.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						6.542.500,00							4.810.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	6.542.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	4.810.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.500.000,00							2.020.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.020.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4.650.000,00							5.020.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	4.650.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	5.020.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						2.500.000,00							8.650.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	8.650.400,00	KECAMATAN KOTABUMI
		Terlaksana nya rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa						19.192.500,00					APARATUR DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		23.500.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI
		KELURAHAN REJOSARI						**400.817.000,00**							**556.778.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**400.817.000,00**							**556.778.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**400.817.000,00**							**556.778.000,00**	
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***400.817.000,00***							***556.778.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	400.817.000,00						80 %	556.778.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.935.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.935.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Rejo Sari || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.000.000,00	KELURAHAN REJOSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						396.882.000,00							552.778.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	396.882.000,00	Kab. Lampung Utara	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	552.778.000,00	KELURAHAN REJOSARI
		KELURAHAN CEMPEDAK						**321.520.500,00**							**471.364.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**321.520.500,00**							**471.364.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**321.520.500,00**							**471.364.000,00**	
264.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***321.520.500,00***							***471.364.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	321.520.500,00						80 %	471.364.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.690.000,00							6.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.690.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	6.000.000,00	KELURAHAN CEMPEDAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						315.830.500,00							465.364.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	315.830.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Cempedak || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	465.364.000,00	KELURAHAN CEMPEDAK
		KELURAHAN KOTABUMI UDIK						**476.727.400,00**							**634.644.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**476.727.400,00**							**634.644.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**476.727.400,00**							**634.644.000,00**	
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***476.727.400,00***							***634.644.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	476.727.400,00						80 %	634.644.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000,00							12.200.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	12.200.000,00	KELURAHAN KOTABUMI UDIK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						464.727.400,00							622.444.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	464.727.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	622.444.000,00	KELURAHAN KOTABUMI UDIK
		KELURAHAN KOTABUMI TENGAH						**372.730.000,00**							**493.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**372.730.000,00**							**493.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**372.730.000,00**							**493.600.000,00**	
266.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***372.730.000,00***							***493.600.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	372.730.000,00						80 %	493.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.070.000,00							3.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Tengah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.500.000,00	KELURAHAN KOTABUMI TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						369.660.000,00							490.100.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	369.660.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Tengah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	490.100.000,00	KELURAHAN KOTABUMI TENGAH
		KELURAHAN KOTABUMI PASAR						**250.728.000,00**							**368.504.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**250.728.000,00**							**368.504.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**250.728.000,00**							**368.504.000,00**	
267.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***250.728.000,00***							***368.504.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	250.728.000,00						80 %	368.504.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.778.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.778.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.000.000,00	KELURAHAN KOTABUMI PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						246.950.000,00							364.504.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	246.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Pasar || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	364.504.000,00	KELURAHAN KOTABUMI PASAR
		KELURAHAN KOTABUMI ILIR						**385.355.000,00**							**519.920.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**385.355.000,00**							**519.920.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**385.355.000,00**							**519.920.000,00**	
268.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***385.355.000,00***							***519.920.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	385.355.000,00						80 %	519.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.435.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.435.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.000.000,00	KELURAHAN KOTABUMI ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						381.920.000,00							515.920.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	381.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	515.920.000,00	KELURAHAN KOTABUMI ILIR
		KELURAHAN SINDANG SARI						**429.068.000,00**							**551.568.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**429.068.000,00**							**551.568.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**429.068.000,00**							**551.568.000,00**	
269.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***429.068.000,00***							***551.568.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	429.068.000,00						80 %	551.568.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.435.000,00							3.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.435.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sindang Sari || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.500.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						425.633.000,00							548.068.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	425.633.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sindang Sari || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	548.068.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
		KELURAHAN SRIBASUKI						**481.023.500,00**							**604.328.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**481.023.500,00**							**604.328.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**481.023.500,00**							**604.328.000,00**	
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***481.023.500,00***							***604.328.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	481.023.500,00						80 %	604.328.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.570.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.570.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sri Basuki || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.000.000,00	KELURAHAN SRIBASUKI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						477.453.500,00							600.328.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	477.453.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Sri Basuki || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	600.328.000,00	KELURAHAN SRIBASUKI
		KELURAHAN GAPURA						**296.428.700,00**							**422.060.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**296.428.700,00**							**422.060.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**296.428.700,00**							**422.060.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
271.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.504.641.600,00**							**4.750.738.230,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***296.428.700,00***							***422.060.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		75 %	80 %	296.428.700,00						80 %	422.060.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
		Terlaksana nya Kelurahan (Kelurahan) yang diberdayakan						3.421.398.100,00					Lembaga masyarakat dan Masyarakat di desa dan kelurahan		4.627.766.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	41.983.000,00						-	45.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	3.372.415.100,00						-	4.577.566.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.070.000,00							4.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	4.000.000,00	KELURAHAN GAPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						293.358.700,00							418.060.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	293.358.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Ilir || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	418.060.000,00	KELURAHAN GAPURA
		KECAMATAN KOTABUMI UTARA						**2.514.558.476,24**							**2.644.558.476,24**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.514.558.476,24**							**2.644.558.476,24**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.514.558.476,24**							**2.644.558.476,24**	
272.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.351.406.741,24**							**2.549.464.316,24**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.151.509.081,24***							***2.295.679.264,24***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.8-68 Nilai		67-67.2 Nilai	67.2-67.4 Nilai	2.151.509.081,24						67.4-67.6 Nilai	2.295.679.264,24	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00					Aparatur Kecamatan		27.500.000,00	
		tersusunya dokumen perencanann dan evalausi kinerja						25.000.000,00					Aparatur Kecamatan		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	Dokumen	4.000.000,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00						2 Dokumen	9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00						Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.000.000,00							9.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.000.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.945.207.981,24					Aparatur Kecamatan		2.007.654.276,24	
		Tersusunnya kinerja Laporan administrasi keuangan						1.945.207.981,24					Aparatur Kecamatan		2.007.654.276,24	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	77.440.000,00						5 Dokumen	27.640.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.867.767.981,24						22 Orang/bulan	1.980.014.276,24	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.867.767.981,24							1.980.014.276,24	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.867.767.981,24	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		22 Orang/bulan	1.980.014.276,24	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						77.440.000,00							27.640.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	77.440.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	27.640.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
		Tercapainya pelaksaanna administrasi umum Perangkat Daerah						59.994.100,00					Aparatur Kecamatan		84.337.073,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.030.000,00						12 Laporan	31.288.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.470.000,00						10 Paket	12.702.700,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.249.000,00						1 Paket	16.442.850,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	10.215.800,00						15 Paket	11.240.705,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	Paket	5.662.200,00						35 Paket	6.662.818,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.215.800,00							11.240.705,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	10.215.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Paket	11.240.705,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.662.200,00							6.662.818,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	5.662.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		35 Paket	6.662.818,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.470.000,00							12.702.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.470.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Paket	12.702.700,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.249.000,00							16.442.850,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.249.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	16.442.850,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.030.000,00							31.288.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.030.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	31.288.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.880.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, masyarakat		130.081.021,00	
		Terpenihinya jasa penunjang urusan pemerintahan						77.880.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, masyarakat		130.081.021,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.480.000,00						12 Laporan	11.778.836,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.400.000,00						12 Laporan	118.302.185,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.480.000,00							11.778.836,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.480.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	11.778.836,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						59.400.000,00							118.302.185,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	118.302.185,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.427.000,00					Aparatur kecamatan		59.606.894,00	
		Terpeliharanya barang Milik daerah						55.427.000,00					Aparatur kecamatan		59.606.894,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	13.387.000,00						2 Unit	13.392.834,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00						1 Unit	46.214.060,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							46.214.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	46.214.060,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.387.000,00							13.392.834,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	13.387.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	13.392.834,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
			-	-		-	-	187.897.660,00						-	240.285.052,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						59.994.100,00					Aparatur Kecamatan		84.337.073,00	
		Tercapainya pelaksaanna administrasi umum Perangkat Daerah						59.994.100,00					Aparatur Kecamatan		84.337.073,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.367.100,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.367.100,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	18.367.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						187.897.660,00					Aparatur kecamatan dan Masyrakat		240.285.052,00	
		-						187.897.660,00					Aparatur kecamatan dan Masyrakat		240.285.052,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	88.947.660,00						-	2.642.880,24	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	98.950.000,00						-	237.642.171,76	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						88.947.660,00							2.642.880,24	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	100 Unit	88.947.660,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.642.880,24	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						98.950.000,00							237.642.171,76	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	100 Unit	98.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	237.642.171,76	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
273.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**55.336.375,00**							**22.249.500,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***55.336.375,00***							***8.749.500,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	91,50 %		86,10 %	87,45 %	55.336.375,00						88,80 %	8.749.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						37.586.300,00					Masyarakat Desa		4.249.500,00	
		Nilai Kepuasan Layanan kecamatan						37.586.300,00					Masyarakat Desa		4.249.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.586.300,00						4 Dokumen	4.249.500,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						37.586.300,00							4.249.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.586.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	4.249.500,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.000.050,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		9.000.000,00	
		Telaksananya fasilitasi percepatan pencapaian SPM dan program prioritas di kecamatan						9.000.050,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	5.000.050,00						1 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						5.000.050,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.050,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.750.025,00					Masyarakat Desa		9.000.000,00	
		Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan						8.750.025,00					Masyarakat Desa		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.025,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.750.000,00						1 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.000.025,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.025,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						4.750.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**29.465.360,00**							**21.745.960,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***25.465.360,00***							***9.245.960,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %		83 %	85 %	25.465.360,00						86 %	9.245.960,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.640.360,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		7.745.960,00	
		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaaan pemberdayaan desa						15.640.360,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		7.745.960,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.145.960,00						4 Laporan	5.245.960,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.145.960,00							5.245.960,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.145.960,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	5.245.960,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						3.125.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamata		2.500.000,00	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasrakatan desa						3.125.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamata		2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.125.000,00						1 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.125.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.125.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						10.700.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		11.500.000,00	
		Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga						10.700.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		11.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00						1 Keluarga	2.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	3.200.000,00						1 Keluarga	2.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00						1 Keluarga	2.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00						1 Keluarga	2.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.000.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Keluarga	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						3.200.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	3.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Keluarga	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Keluarga	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		1 Keluarga	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaaan pemberdayaan desa						15.640.360,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		7.745.960,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	10.494.400,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.494.400,00							2.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.494.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
		Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga						10.700.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		11.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	2 Keluarga	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
275.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**12.900.000,00**							**6.917.500,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***12.900.000,00***							***6.917.500,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	12.900.000,00						100 %	6.917.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.900.000,00					Masyarakat Desa		6.917.500,00	
		Tercapainya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum						12.900.000,00					Masyarakat Desa		6.917.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.900.000,00						4 Laporan	6.917.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12.900.000,00							6.917.500,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.917.500,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
276.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**49.850.000,00**							**10.220.300,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***49.850.000,00***							***6.720.300,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	49.850.000,00						100 %	6.720.300,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.850.000,00					Aparatur Desa, aparatur kecamatan, masyarakat desa		10.220.300,00	
		terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						49.850.000,00					Aparatur Desa, aparatur kecamatan, masyarakat desa		10.220.300,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00						2 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000,00						3 Dokumen	3.220.300,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Orang		2 Orang	2 Orang	33.650.000,00						2 Orang	3.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						33.650.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Orang		2 Orang	8 Orang	33.650.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Orang	3.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						10.800.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Talang Jali || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						5.400.000,00							3.220.300,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	3.220.300,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
277.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.600.000,00**							**33.960.900,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***11.100.000,00***							***29.460.900,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	90 %		78 %	80 %	11.100.000,00						83 %	29.460.900,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.600.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		33.960.900,00	
		terlaksananaya kegiatan pembinaan dan pengawasn desa						15.600.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		33.960.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.950.000,00						4 Laporan	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.650.000,00						4 Laporan	15.460.900,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.650.000,00							15.460.900,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.650.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	15.460.900,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						3.950.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.950.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananaya kegiatan pembinaan dan pengawasn desa						15.600.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat Di wilayah kecamatan		33.960.900,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Utara || Desa Madukoro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN KOTABUMI SELATAN						**9.617.305.711,94**							**9.591.557.355,94**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.617.305.711,94**							**9.591.557.355,94**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.617.305.711,94**							**9.591.557.355,94**	
278.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.419.896.624,94**							**9.394.152.024,94**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***9.419.896.624,94***							***9.374.152.024,94***	
			1.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.8 Nilai		66.72-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	9.419.896.624,94						67-67.2 Nilai	9.374.152.024,94	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.022.000,00					-		21.246.000,00	
		Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						18.022.000,00					-		21.246.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.464.000,00						2 Dokumen	5.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.050.000,00						2 Dokumen	8.090.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.508.000,00						2 Dokumen	8.106.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.050.000,00							8.090.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	8.090.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.508.000,00							8.106.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.508.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	8.106.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.464.000,00							5.050.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.464.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	5.050.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.833.009.024,94					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		8.918.399.024,94	
		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah						8.833.009.024,94					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		8.918.399.024,94	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.120.000,00						1 Dokumen	75.480.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.030.000,00						1 Laporan	5.060.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan		102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	8.737.859.024,94						102 Orang/bulan	8.837.859.024,94	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.737.859.024,94							8.837.859.024,94	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan		102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	8.737.859.024,94	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		102 Orang/bulan	8.837.859.024,94	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.120.000,00							75.480.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	75.480.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.030.000,00							5.060.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.030.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	5.060.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.398.000,00					-		62.275.000,00	
		Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah						45.398.000,00					-		62.275.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.273.000,00						12 Laporan	28.060.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	4 Paket	7.025.000,00						4 Paket	7.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.050.000,00						3 Paket	10.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.020.000,00						2 Paket	7.025.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.030.000,00						4 Paket	10.055.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.020.000,00							7.025.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	7.025.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.030.000,00							10.055.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.030.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	10.055.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.025.000,00							7.065.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	4 Paket	7.025.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	7.065.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.050.000,00							10.070.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	10.070.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.273.000,00							28.060.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	11.273.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	28.060.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.556.600,00					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		15.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.556.600,00					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		15.090.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		7 Unit	6 Unit	40.556.600,00						3 Unit	15.090.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.556.600,00							15.090.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		7 Unit	6 Unit	40.556.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	15.090.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						414.800.000,00					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		314.552.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						414.800.000,00					Pemerintah Kabupaten Lampung Utara		314.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	394.800.000,00						4 Laporan	294.552.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						394.800.000,00							294.552.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	394.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	294.552.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.111.000,00					-		62.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.111.000,00					-		62.590.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.220.000,00						1 Unit	5.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.370.000,00						1 Unit	37.370.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.370.000,00							37.370.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.370.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.370.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.220.000,00							5.220.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.220.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	5.220.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.111.000,00					-		62.590.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.521.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.521.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.521.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Desa Mulang Maya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
279.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**56.305.800,00**							**56.314.875,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***41.805.800,00***							***41.814.875,00***	
			1.Nilai kepuasan layanan kecamatan	92 %		87.5 %	89 %	41.805.800,00						90 %	41.814.875,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						29.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						29.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.500.000,00						4 Laporan	14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.500.000,00						4 Laporan	14.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						14.500.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	14.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						14.500.000,00							14.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	14.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						27.305.800,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		27.314.875,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						27.305.800,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		27.314.875,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.750.000,00						1 Dokumen	13.750.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.555.800,00						4 Laporan	13.564.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						13.750.000,00							13.750.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.750.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	13.750.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						13.555.800,00							13.564.875,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	13.555.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	13.564.875,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***51.132.000,00***							***25.000.000,00***	
			1.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %		84 %	85 %	51.132.000,00						86 %	25.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						17.412.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		17.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						17.412.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.550.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	8.862.000,00						20 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						8.862.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.862.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.550.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	8.550.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.100.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.100.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.100.000,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						8.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	8.100.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						41.620.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						41.620.000,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga		40 Keluarga	30 Keluarga	8.000.000,00						30 Keluarga	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		50 Keluarga	30 Keluarga	8.000.000,00						30 Keluarga	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga		50 Keluarga	30 Keluarga	11.060.000,00						30 Keluarga	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga		50 Keluarga	30 Keluarga	8.000.000,00						30 Keluarga	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		50 Keluarga	30 Keluarga	6.560.000,00						30 Keluarga	8.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		50 Keluarga	70 Keluarga	8.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		30 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						11.060.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga		50 Keluarga	65 Keluarga	11.060.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		30 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						6.560.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		50 Keluarga	70 Keluarga	6.560.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga		50 Keluarga	70 Keluarga	8.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		30 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga		40 Keluarga	70 Keluarga	8.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		30 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
281.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**20.994.900,00**							**21.373.404,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***20.994.900,00***							***21.373.404,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	20.994.900,00						100 %	21.373.404,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						20.994.900,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		21.373.404,00	
		Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						20.994.900,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		21.373.404,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.794.900,00						2 Laporan	11.073.404,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.200.000,00						2 Laporan	10.300.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.794.900,00							11.073.404,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.794.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	11.073.404,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						10.200.000,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	10.300.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
282.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.391.587,00**							**39.999.805,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***40.391.587,00***							***39.999.805,00***	
			1.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	40.391.587,00						100 %	39.999.805,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.391.587,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		39.999.805,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.391.587,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		39.999.805,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.168.900,00						1 Dokumen	5.840.565,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						6.168.900,00							5.840.565,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.168.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.840.565,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.391.587,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		39.999.805,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	26.848.800,00						-	26.848.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	7.373.887,00						-	7.310.440,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						7.373.887,00							7.310.440,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	70 Orang	7.373.887,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.310.440,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						26.848.800,00							26.848.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	280 Orang	26.848.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	26.848.800,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
283.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.584.800,00**							**12.717.247,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***12.584.800,00***							***12.717.247,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	90 %		86 %	87 %	12.584.800,00						88 %	12.717.247,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.584.800,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		12.717.247,00	
		Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						12.584.800,00					Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan		12.717.247,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.584.800,00						4 Laporan	6.717.247,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.584.800,00							6.717.247,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.584.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.717.247,00	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
		KELURAHAN KELAPA TUJUH						**486.605.000,00**							**343.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**486.605.000,00**							**343.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**486.605.000,00**							**343.880.000,00**	
284.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
			-	-		-	-	486.605.000,00						-	343.880.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Kelapa Tujuh		1.719.419.848,00	
		-						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Kelapa Tujuh		1.719.419.848,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	2.124.137.200,00						-	1.669.419.848,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	KELURAHAN KELAPA TUJUH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						476.605.000,00							333.880.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	476.605.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kelapa Tujuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	333.880.000,00	KELURAHAN KELAPA TUJUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KELURAHAN TANJUNG AMAN						**462.741.000,00**							**343.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**462.741.000,00**							**343.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**462.741.000,00**							**343.880.000,00**	
285.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
			-	-		-	-	462.741.000,00						-	343.880.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman		1.719.419.848,00	
		-						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman		1.719.419.848,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	2.124.137.200,00						-	1.669.419.848,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG AMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						452.741.000,00							333.880.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	452.741.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungaman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	333.880.000,00	KELURAHAN TANJUNG AMAN
		KELURAHAN KOTA ALAM						**532.340.200,00**							**343.899.848,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**532.340.200,00**							**343.899.848,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**532.340.200,00**							**343.899.848,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
286.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
			-	-		-	-	532.340.200,00						-	343.899.848,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Kota Alam		1.719.419.848,00	
		-						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Kota Alam		1.719.419.848,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	2.124.137.200,00						-	1.669.419.848,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	KELURAHAN KOTA ALAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						522.340.200,00							333.899.848,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	522.340.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Kota Alam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	333.899.848,00	KELURAHAN KOTA ALAM
		KELURAHAN TANJUNG SENANG						**300.114.000,00**							**343.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**300.114.000,00**							**343.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**300.114.000,00**							**343.880.000,00**	
287.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
			-	-		-	-	300.114.000,00						-	343.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.174.137.200,00					Masyarakat akelurahan Tanjung Senang		1.719.419.848,00	
		-						2.174.137.200,00					Masyarakat akelurahan Tanjung Senang		1.719.419.848,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	2.124.137.200,00						-	1.669.419.848,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						290.114.000,00							333.880.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	290.114.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungsenang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	333.880.000,00	KELURAHAN TANJUNG SENANG
		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN						**392.337.000,00**							**343.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**392.337.000,00**							**343.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**392.337.000,00**							**343.880.000,00**	
288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.241.269.200,00**							**1.786.419.848,00**	
			-	-		-	-	392.337.000,00						-	343.880.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan		1.719.419.848,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.174.137.200,00					Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan		1.719.419.848,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	2.124.137.200,00						-	1.669.419.848,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	10.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						382.337.000,00							333.880.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	382.337.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi Selatan || Kelurahan Tanjungharapan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	333.880.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
		KECAMATAN ABUNG SELATAN						**2.422.072.287,84**							**2.576.681.689,84**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.422.072.287,84**							**2.576.681.689,84**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.422.072.287,84**							**2.576.681.689,84**	
289.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.220.323.787,84**							**2.262.720.287,84**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.220.323.787,84***							***2.262.720.287,84***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.8 Nilai		66.72-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	2.220.323.787,84						67-67.2 Nilai	2.262.720.287,84	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.255.800,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		26.320.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.255.800,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		26.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.107.200,00						2 Dokumen	11.320.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.107.200,00							11.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.107.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	11.320.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.012.411.387,84					ASN Kecamatan Abung Selatan		2.019.458.687,84	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Kecamatan						2.012.411.387,84					ASN Kecamatan Abung Selatan		2.019.458.687,84	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.920.000,00						12 Dokumen	58.520.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.951.491.387,84						24 Orang/bulan	1.960.938.687,84	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.951.491.387,84							1.960.938.687,84	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.951.491.387,84	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		24 Orang/bulan	1.960.938.687,84	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						60.920.000,00							58.520.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	60.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	58.520.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.321.600,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		67.042.600,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan						32.321.600,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		67.042.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	10.520.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.867.000,00						3 Paket	18.707.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.310.000,00						4 Paket	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.624.600,00						3 Paket	7.335.500,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.624.600,00							7.335.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	3.624.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	7.335.500,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.867.000,00							18.707.100,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	12.867.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	18.707.100,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.310.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	5.310.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	21.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.520.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37.790.000,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		4.659.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37.790.000,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		4.659.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	37.790.000,00						0 Unit	4.659.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.790.000,00							4.659.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	37.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Unit	4.659.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.800.000,00					-		99.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.800.000,00					-		99.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00						12 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00						12 Laporan	77.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.600.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	21.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							77.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	43.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	77.700.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.745.000,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		45.540.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.745.000,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		45.540.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.725.000,00						1 Unit	15.540.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	37.020.000,00						2 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.725.000,00							15.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.725.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	15.540.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.255.800,00					ASN Kecamatan Abung Selatan		26.320.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	8.485.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	6.663.600,00						-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8.485.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	8.485.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.663.600,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	6.663.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	8.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
290.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.839.000,00**							**54.200.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***10.839.000,00***							***54.200.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85.50 %		85.10 %	85.20 %	10.839.000,00						85.30 %	54.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.341.800,00					Masyarakat Keamatan Abung Selatan		41.200.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.341.800,00					Masyarakat Keamatan Abung Selatan		41.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.341.800,00						3 Dokumen	41.200.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.341.800,00							41.200.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.341.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Dokumen	41.200.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.610.300,00					-		10.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.610.300,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.610.300,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.610.300,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.610.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.886.900,00					-		3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.886.900,00					-		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.798.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.088.600,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						1.798.300,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.798.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.088.600,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.088.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
291.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**42.056.600,00**							**109.586.802,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***42.056.600,00***							***103.586.802,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		85.9 %	90.6 %	42.056.600,00						95.3 %	103.586.802,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.557.100,00					Masyarakat Kecamatan Abung Selatan		15.500.000,00	
		Terlakasanaya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.557.100,00					Masyarakat Kecamatan Abung Selatan		15.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.557.100,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.557.100,00							15.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.557.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Lembaga Kemasyarakatan	15.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.810.000,00					Perangkat Desa, Pengurus BUMDES, Pengawas BUMDES, BPD, LPM		13.300.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.810.000,00					Perangkat Desa, Pengurus BUMDES, Pengawas BUMDES, BPD, LPM		13.300.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.810.000,00						2 Laporan	13.300.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.810.000,00							13.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.810.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	13.300.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.689.500,00					Masyarakat Abung Selatan		80.786.802,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.689.500,00					Masyarakat Abung Selatan		80.786.802,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	48 Keluarga		48 Keluarga	48 Keluarga	8.350.000,00						48 Keluarga	8.786.802,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48 Keluarga		48 Keluarga	48 Keluarga	6.335.900,00						48 Keluarga	6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	48 Keluarga		48 Keluarga	48 Keluarga	4.711.000,00						48 Keluarga	6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	48 Keluarga		48 Keluarga	48 Keluarga	6.292.600,00						48 Keluarga	60.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						8.350.000,00							8.786.802,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	48 Keluarga		48 Keluarga	48 Keluarga	8.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		48 Keluarga	8.786.802,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						6.335.900,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48 Keluarga		48 Keluarga	100 Keluarga	6.335.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		48 Keluarga	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						6.292.600,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	48 Keluarga		48 Keluarga	90 Keluarga	6.292.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		48 Keluarga	60.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.711.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	48 Keluarga		48 Keluarga	100 Keluarga	4.711.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		48 Keluarga	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
292.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.105.000,00**							**20.310.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***6.105.000,00***							***20.310.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.105.000,00						100 %	20.310.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.105.000,00					Masyarakat Kecamatan Abung Selatan		20.310.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.105.000,00					Masyarakat Kecamatan Abung Selatan		20.310.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	6.105.000,00						16 Laporan	20.310.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.105.000,00							20.310.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	1 Laporan	6.105.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Laporan	20.310.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
293.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**80.815.000,00**							**81.068.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***80.815.000,00***							***81.068.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	80.815.000,00						100 %	81.068.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						80.815.000,00					Masyarakat, Perangkat Desa Kecamatan Abung Selatan		81.068.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						80.815.000,00					Masyarakat, Perangkat Desa Kecamatan Abung Selatan		81.068.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	21.360.000,00						4 Dokumen	9.068.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						21.360.000,00							9.068.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	21.360.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	9.068.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
		Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						80.815.000,00					Masyarakat, Perangkat Desa Kecamatan Abung Selatan		81.068.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	21.155.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	38.300.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						38.300.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	38.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	60.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						21.155.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	21.155.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	12.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
294.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**61.932.900,00**							**48.796.600,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***61.932.900,00***							***48.796.600,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	61.932.900,00						100 %	48.796.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.932.900,00					Perangkat Desa dan BPD Kecamatan Abung Selatan		48.796.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.932.900,00					Perangkat Desa dan BPD Kecamatan Abung Selatan		48.796.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	30.796.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.900.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.200.000,00							30.796.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	30.796.600,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						48.900.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.932.900,00					Perangkat Desa dan BPD Kecamatan Abung Selatan		48.796.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	5.832.900,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						5.832.900,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	16 Dokumen	5.832.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Selatan || Desa Kalibalangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SELATAN
		KECAMATAN ABUNG BARAT						**2.095.423.235,34**							**1.995.687.922,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.095.423.235,34**							**1.995.687.922,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.095.423.235,34**							**1.995.687.922,00**	
295.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.911.208.685,34**							**1.910.806.744,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.911.208.685,34***							***1.897.231.228,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	1.911.208.685,34						67-67.2 Nilai	1.897.231.228,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.281.750,00					ASN KECAMATAN		2.520.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan						18.281.750,00					ASN KECAMATAN		2.520.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.866.000,00						2 Dokumen	1.020.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.645.750,00						1 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	3.770.000,00						2 Dokumen	750.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.866.000,00							1.020.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.866.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.020.200,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.770.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	3.770.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.645.750,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.645.750,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.706.552.135,34					ASN KECAMATAN		1.733.169.519,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.706.552.135,34					ASN KECAMATAN		1.733.169.519,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.040.000,00						1 Dokumen	65.631.825,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.487.000,00						1 Laporan	4.410.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.490.000,00						1 Laporan	1.050.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.634.535.135,34						19 Orang/bulan	1.662.077.694,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.634.535.135,34							1.662.077.694,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.634.535.135,34	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		19 Orang/bulan	1.662.077.694,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						65.040.000,00							65.631.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	65.631.825,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.487.000,00							4.410.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.487.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	4.410.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.490.000,00							1.050.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.490.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.050.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60.046.300,00					ASN KECAMATAN		45.460.340,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Derah						60.046.300,00					ASN KECAMATAN		45.460.340,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00						4 Laporan	7.681.808,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.659.100,00						12 Paket	8.415.516,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.618.900,00						12 Paket	16.537.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.344.800,00						6 Paket	4.410.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.423.500,00						1 Paket	8.415.516,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.344.800,00							4.410.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.344.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	4.410.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.423.500,00							8.415.516,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.423.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	8.415.516,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.659.100,00							8.415.516,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.659.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	8.415.516,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.618.900,00							16.537.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.618.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	16.537.500,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.000.000,00							7.681.808,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	7.681.808,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.196.000,00					ASN KECAMATAN		70.685.685,00	
		tersusunnya administrasi prubahan						65.196.000,00					ASN KECAMATAN		70.685.685,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.996.000,00						12 Laporan	5.512.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.200.000,00						12 Laporan	65.173.185,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.996.000,00							5.512.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.996.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	5.512.500,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						58.200.000,00							65.173.185,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	65.173.185,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.132.500,00					ASN KECAMATAN		58.971.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana						61.132.500,00					ASN KECAMATAN		58.971.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	37.154.250,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.260.000,00						2 Unit	1.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							37.154.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.154.250,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.260.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.260.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	1.200.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
		Tersedianya sarana dan prasarana						61.132.500,00					ASN KECAMATAN		58.971.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	19.852.500,00						-	20.616.750,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.852.500,00							20.616.750,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	19.852.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Barat || Desa Ogan Lima || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.616.750,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
296.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**58.277.100,00**							**26.613.489,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***52.947.100,00***							***26.613.489,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	95 %		87.5 %	89 %	52.947.100,00						91 %	26.613.489,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						28.355.600,00					MASYARAKAT		9.512.937,00	
		terselenggaranya kegiatan pemerintah tingkat kecamatan						28.355.600,00					MASYARAKAT		9.512.937,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.355.600,00						4 Dokumen	9.512.937,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						28.355.600,00							9.512.937,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.355.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	9.512.937,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						19.261.500,00					MASYARAKAT		6.840.221,00	
		Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkatdaerah yg ada di kecamatan						19.261.500,00					MASYARAKAT		6.840.221,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.567.800,00						4 Laporan	3.420.111,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.693.700,00						44 Laporan	3.420.110,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						6.567.800,00							3.420.111,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	6.567.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	3.420.111,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12.693.700,00							3.420.110,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	12.693.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		44 Laporan	3.420.110,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.660.000,00					MASYARAKAT		10.260.331,00	
		terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimahkan kepada camat						10.660.000,00					MASYARAKAT		10.260.331,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.330.000,00						4 Dokumen	5.130.165,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.330.000,00						4 Laporan	5.130.166,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.330.000,00							5.130.165,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	5.330.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	5.130.165,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.330.000,00							5.130.166,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	5.330.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	5.130.166,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**66.750.100,00**							**28.225.758,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***66.750.100,00***							***12.584.837,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		82.5 %	84 %	66.750.100,00						85 %	12.584.837,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						38.805.700,00					MASYARAKAT		12.513.590,00	
		terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayan desa						38.805.700,00					MASYARAKAT		12.513.590,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.910.300,00						2 Laporan	6.256.795,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.895.400,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	6.256.795,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.895.400,00							6.256.795,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.895.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Lembaga Kemasyarakatan	6.256.795,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						23.910.300,00							6.256.795,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.910.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	6.256.795,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.620.000,00					MASYARAKAT		3.200.000,00	
		TErlaksananya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						5.620.000,00					MASYARAKAT		3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.620.000,00						2 Laporan	3.200.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.620.000,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.620.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	3.200.000,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						22.324.400,00					MASYARAKAT		12.512.168,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan&						22.324.400,00					MASYARAKAT		12.512.168,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14 Keluarga		14 Keluarga	14 Keluarga	5.754.400,00						14 Keluarga	3.128.042,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	14 Keluarga		14 Keluarga	14 Keluarga	5.750.000,00						14 Keluarga	3.128.042,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	5.700.000,00						3 Keluarga	3.128.042,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6 Keluarga		2 Keluarga	4 Keluarga	5.120.000,00						4 Keluarga	3.128.042,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						5.754.400,00							3.128.042,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14 Keluarga		14 Keluarga	25 Keluarga	5.754.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14 Keluarga	3.128.042,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.750.000,00							3.128.042,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	14 Keluarga		14 Keluarga	25 Keluarga	5.750.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		14 Keluarga	3.128.042,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5.120.000,00							3.128.042,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6 Keluarga		2 Keluarga	25 Keluarga	5.120.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Keluarga	3.128.042,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						5.700.000,00							3.128.042,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4 Keluarga		2 Keluarga	25 Keluarga	5.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		3 Keluarga	3.128.042,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
298.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**13.500.000,00**							**8.957.219,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***13.500.000,00***							***8.957.219,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	13.500.000,00						100 %	8.957.219,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.500.000,00					MASYARAKAT		8.957.219,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum&						13.500.000,00					MASYARAKAT		8.957.219,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.500.000,00						4 Laporan	8.957.219,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13.500.000,00							8.957.219,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	13.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	8.957.219,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
299.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**32.887.350,00**							**12.806.548,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***32.887.350,00***							***12.806.548,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	32.887.350,00						100 %	12.806.548,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.887.350,00					MASYARAKAT		12.806.548,00	
		terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala desa						32.887.350,00					MASYARAKAT		12.806.548,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.600.000,00						4 Dokumen	6.435.131,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.287.350,00						2 Laporan	6.371.417,00	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						5.287.350,00							6.371.417,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.287.350,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	6.371.417,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						27.600.000,00							6.435.131,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	27.600.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	6.435.131,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
300.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.800.000,00**							**8.278.164,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***6.400.000,00***							***4.139.082,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		82.5 %	84 %	6.400.000,00						85 %	4.139.082,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.800.000,00					MASYARAKAT		8.278.164,00	
		Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa&						12.800.000,00					MASYARAKAT		8.278.164,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.400.000,00						5 Dokumen	4.139.082,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.400.000,00						6 Dokumen	4.139.082,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						6.400.000,00							4.139.082,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Dokumen	4.139.082,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						6.400.000,00							4.139.082,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	4.139.082,00	KECAMATAN ABUNG BARAT
		KECAMATAN ABUNG TIMUR						**1.920.183.000,94**							**1.939.082.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.920.183.000,94**							**1.939.082.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.920.183.000,94**							**1.939.082.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
301.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.825.593.700,94**							**1.823.531.000,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.792.293.700,94***							***1.790.231.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	1.792.293.700,94						67.2-67.4 Nilai	1.790.231.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.603.152.700,94					-		1.599.900.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.603.152.700,94					-		1.599.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	71.880.000,00						2 Dokumen	69.900.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.531.272.700,94						17 Orang/bulan	1.530.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.531.272.700,94							1.530.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.531.272.700,94	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		17 Orang/bulan	1.530.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						71.880.000,00							69.900.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	71.880.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	69.900.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.839.000,00					-		37.731.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.839.000,00					-		37.731.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.695.400,00						12 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	13.143.600,00						8 Paket	13.731.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.143.600,00							13.731.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	13.143.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Paket	13.731.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.695.400,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	6.695.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	24.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.808.000,00					-		111.350.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.808.000,00					-		111.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.200.000,00						8 Laporan	2.850.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	124.608.000,00						3 Laporan	108.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00							2.850.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	2.850.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.608.000,00							108.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	124.608.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	108.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.494.000,00					-		41.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah						40.494.000,00					-		41.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	40.494.000,00						2 Unit	41.250.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.494.000,00							41.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	40.494.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	41.250.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
			-	-		-	-	33.300.000,00						-	33.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.300.000,00					-		33.300.000,00	
		-						33.300.000,00					-		33.300.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	33.300.000,00						-	33.300.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.300.000,00							33.300.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	33.300.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	33.300.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
302.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11.799.000,00**							**32.141.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***11.799.000,00***							***32.141.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	90 %		87 %	87 %	11.799.000,00						89 %	32.141.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.507.000,00					-		26.241.000,00	
		Tersedianya dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan						6.507.000,00					-		26.241.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.507.000,00						4 Dokumen	26.241.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.507.000,00							26.241.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	6.507.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	26.241.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.090.000,00					-		2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.090.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.090.000,00						1 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.090.000,00							2.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.090.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.202.000,00					-		3.400.000,00	
		Terlaksana nya dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat						3.202.000,00					-		3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.202.000,00						1 Laporan	1.200.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.000.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.202.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.202.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
303.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.040.000,00**							**36.240.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***20.040.000,00***							***36.240.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	20.040.000,00						100 %	36.240.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.040.000,00					-		21.740.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.040.000,00					-		21.740.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.240.000,00						1 Laporan	5.740.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.240.000,00							5.740.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	5.740.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					-		14.500.000,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					-		14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	14.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.000.000,00							14.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.040.000,00					-		21.740.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	9.800.000,00						-	16.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.800.000,00							16.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	250 Lembaga Kemasyarakatan	9.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	16.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
304.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**8.870.000,00**							**9.370.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***8.870.000,00***							***9.370.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	8.870.000,00						100 %	9.370.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.870.000,00					-		9.370.000,00	
		Tersedianya dokumen Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						8.870.000,00					-		9.370.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.870.000,00						12 Laporan	9.370.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.870.000,00							9.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.870.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	9.370.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
305.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**38.190.000,00**							**21.300.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***38.190.000,00***							***21.300.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	38.190.000,00						100 %	21.300.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.190.000,00					-		21.300.000,00	
		Tersedianya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa						38.190.000,00					-		21.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	-	290.000,00						-	300.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	17.850.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	20.050.000,00						-	15.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						20.050.000,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	300 Orang	20.050.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	15.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						17.850.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	17.850.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	5.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						290.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	0 Dokumen	290.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	300.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
306.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.690.300,00**							**16.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***15.690.300,00***							***16.500.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	15.690.300,00						100 %	16.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.690.300,00					-		16.500.000,00	
		Persentase Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa						15.690.300,00					-		16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.571.900,00						4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.118.400,00						4 Dokumen	10.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						10.118.400,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.118.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	10.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.571.900,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.571.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Timur || Desa Bumi Agung Marga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TIMUR
		KECAMATAN ABUNG SEMULI						**2.787.293.156,84**							**3.003.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.787.293.156,84**							**3.003.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.787.293.156,84**							**3.003.000.000,00**	
307.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.624.903.301,84**							**2.811.000.000,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.624.903.301,84***							***2.803.500.000,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	2.624.903.301,84						67.2-67.4 Nilai	2.803.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.755.900,00					Bappeda, BPKAD, ASN Kecamatan		7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						3.755.900,00					Bappeda, BPKAD, ASN Kecamatan		7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	588.600,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.266.000,00						2 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	683.600,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	554.600,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	663.100,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.266.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.266.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						663.100,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	663.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						554.600,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	554.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						588.600,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	588.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						683.600,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	683.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.420.900.001,84					Bappeda, BPKAD, ASN Kecamatan		2.571.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.420.900.001,84					Bappeda, BPKAD, ASN Kecamatan		2.571.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.520.000,00						12 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	930.600,00						4 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.355.449.401,84						23 Orang/bulan	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.355.449.401,84							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.355.449.401,84	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		23 Orang/bulan	2.500.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						64.520.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	64.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	70.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						930.600,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	930.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.286.400,00					ASN Kecamatan		78.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.286.400,00					ASN Kecamatan		78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.088.700,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.223.500,00						12 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.004.500,00						12 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.981.700,00						12 Paket	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	34.000.000,00						12 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.988.000,00						12 Paket	3.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.981.700,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	1.981.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	34.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.988.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	2.988.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.223.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	4.223.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.004.500,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	6.004.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.088.700,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	7.088.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.856.000,00					ASN Kecamatan		99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.640.000,00						12 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.640.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.640.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.105.000,00					ASN Kecamatan		55.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						51.105.000,00					ASN Kecamatan		55.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.065.000,00						3 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00						2 Unit	45.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.065.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.065.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.856.000,00					ASN Kecamatan		99.000.000,00	
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.856.000,00					ASN Kecamatan		99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	84.216.000,00						-	90.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						84.216.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	84.216.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	90.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
308.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.248.100,00**							**28.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***11.248.100,00***							***12.000.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	95 %		87.5 %	90 %	11.248.100,00						92.5 %	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						9.668.300,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	5.341.800,00						6 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	1.504.600,00						6 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						5.341.800,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.341.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.504.600,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.504.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.579.800,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.579.800,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	816.400,00						6 Dokumen	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	763.400,00						2 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						816.400,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	816.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		6 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						763.400,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	763.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.668.300,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		11.000.000,00	
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						9.668.300,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	2.821.900,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.821.900,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	2.821.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
309.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**54.384.155,00**							**61.000.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***54.384.155,00***							***61.000.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %		82.5 %	85 %	54.384.155,00						87.5 %	61.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.931.600,00					Lembaga kemasyarakatan, Kepala Desa, Aparatur Desa		15.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.931.600,00					Lembaga kemasyarakatan, Kepala Desa, Aparatur Desa		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.960.500,00						2 Laporan	6.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.960.500,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.960.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						780.400,00					PKK, RT, RW, Karang Taruna, BPD, Posyandu, UKBM,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), dan Lembaga Adat		1.000.000,00	
		Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						780.400,00					PKK, RT, RW, Karang Taruna, BPD, Posyandu, UKBM,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), dan Lembaga Adat		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	780.400,00						8 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						780.400,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	780.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		8 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						39.672.155,00					Forkopimcam, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat Desa se – Kecamatan Abung Semuli		45.000.000,00	
		meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						39.672.155,00					Forkopimcam, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat Desa se – Kecamatan Abung Semuli		45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 Keluarga		7 Keluarga	14 Keluarga	6.571.000,00						21 Keluarga	7.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35 Keluarga		7 Keluarga	14 Keluarga	17.791.155,00						21 Keluarga	20.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35 Keluarga		7 Keluarga	14 Keluarga	5.099.900,00						21 Keluarga	6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga		7 Keluarga	14 Keluarga	2.095.400,00						21 Keluarga	3.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						6.571.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 Keluarga		7 Keluarga	49 Keluarga	6.571.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		21 Keluarga	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						17.791.155,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35 Keluarga		7 Keluarga	56 Keluarga	17.791.155,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		21 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.095.400,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga		7 Keluarga	21 Keluarga	2.095.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		21 Keluarga	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						5.099.900,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35 Keluarga		7 Keluarga	21 Keluarga	5.099.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		21 Keluarga	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.931.600,00					Lembaga kemasyarakatan, Kepala Desa, Aparatur Desa		15.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.971.100,00						-	8.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.971.100,00							8.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.971.100,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	8.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
		meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						39.672.155,00					Forkopimcam, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat Desase – Kecamatan Abung Semuli		45.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	-	5.166.400,00						-	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	-	2.948.300,00						-	3.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						5.166.400,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	7 Keluarga	5.166.400,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	5.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						2.948.300,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	7 Keluarga	2.948.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	3.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
310.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.950.000,00**							**2.500.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***1.950.000,00***							***2.500.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	1.950.000,00						100 %	2.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.950.000,00					Forkopimcam, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat Desa se – Kecamatan Abung Semuli		2.500.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						1.950.000,00					Forkopimcam, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat Desa se – Kecamatan Abung Semuli		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.950.000,00						4 Laporan	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.950.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
311.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**82.756.600,00**							**96.500.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***82.756.600,00***							***96.500.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	82.756.600,00						100 %	96.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						82.756.600,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		96.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						82.756.600,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		96.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.549.300,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						31.549.300,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.549.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						82.756.600,00					Forkopimcam, ASN, Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat		96.500.000,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.102.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	10.740.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	16.637.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	22.728.300,00						-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						10.740.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	200 Orang	10.740.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						22.728.300,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	200 Orang	22.728.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						16.637.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	16.637.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						1.102.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Laporan	1.102.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
312.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.051.000,00**							**4.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***2.051.000,00***							***2.000.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	70 %		57.5 %	60 %	2.051.000,00						62.5 %	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.051.000,00					Kepala Desa, Aparatur Desa		4.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.051.000,00					Kepala Desa, Aparatur Desa		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.051.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	7 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.051.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	1.051.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SEMULI
		KECAMATAN ABUNG SURAKARTA						**2.576.874.818,54**							**2.576.891.918,54**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.576.874.818,54**							**2.576.891.918,54**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.576.874.818,54**							**2.576.891.918,54**	
313.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.416.159.718,54**							**2.406.982.718,54**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.416.159.718,54***							***2.394.982.718,54***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.6-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	2.416.159.718,54						67-67.2 Nilai	2.394.982.718,54	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.831.000,00					ASN Kecamatan		10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						10.831.000,00					ASN Kecamatan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.256.800,00						1 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.180.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.997.600,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.952.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.444.600,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.180.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.444.600,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.444.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.952.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.952.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.256.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.256.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.997.600,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.997.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.236.726.318,54					ASN Kecamatan		2.236.796.118,54	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.236.726.318,54					ASN Kecamatan		2.236.796.118,54	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.840.000,00						12 Dokumen	69.840.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.931.500,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.998.700,00						4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.162.956.118,54						20 Orang/bulan	2.162.956.118,54	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.162.956.118,54							2.162.956.118,54	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.162.956.118,54	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang/bulan	2.162.956.118,54	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						69.840.000,00							69.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	69.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	69.840.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.931.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.931.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.998.700,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.998.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.987.400,00					ASN Kecamatan		27.631.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.987.400,00					ASN Kecamatan		27.631.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00						12 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	13.018.000,00						3 Paket	11.591.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.181.400,00						1 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.181.400,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.181.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.018.000,00							11.591.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	13.018.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	11.591.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.500.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.950.000,00					ASN Kecamatan		83.485.600,00	
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.950.000,00					ASN Kecamatan		83.485.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	4.885.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.950.000,00						12 Laporan	78.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							4.885.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	4.885.600,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.950.000,00							78.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	78.600.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.665.000,00					ASN Kecamatan		49.070.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						56.665.000,00					ASN Kecamatan		49.070.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	14.625.000,00						2 Unit	12.050.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00						1 Unit	37.020.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							37.020.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.020.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.625.000,00							12.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	14.625.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	12.050.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.987.400,00					ASN Kecamatan		27.631.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.288.000,00						-	2.040.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.288.000,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	24.288.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.040.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
314.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**41.566.800,00**							**45.786.100,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***36.581.800,00***							***45.784.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	82 %		74 %	76 %	36.581.800,00						78 %	45.784.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						24.469.300,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa,		33.684.000,00	
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						24.469.300,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa,		33.684.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.001.300,00						4 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	17.468.000,00						4 Laporan	26.684.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						7.001.300,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.001.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						17.468.000,00							26.684.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	17.468.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	26.684.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.112.500,00					Masyarakat, Aparatur Desa		12.100.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.112.500,00					Masyarakat, Aparatur Desa		12.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.109.050,00						4 Dokumen	6.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	6.003.450,00						5 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						6.109.050,00							6.100.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	6.109.050,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	6.100.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.003.450,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	6.003.450,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
			-	-		-	-	4.985.000,00						-	2.100,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.985.000,00					-		2.100,00	
		-						4.985.000,00					-		2.100,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	4.985.000,00						-	2.100,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.985.000,00							2.100,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	4.985.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	2.100,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
315.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.893.700,00**							**72.763.100,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***63.893.700,00***							***72.763.100,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		80 %	85 %	63.893.700,00						90 %	72.763.100,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						22.884.600,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa,		22.883.300,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.500.650,00						1 Laporan	8.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.500.650,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.500.650,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	8.500.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						9.761.300,00					Pokmas, Aparatur Desa		12.400.000,00	
		Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						9.761.300,00					Pokmas, Aparatur Desa		12.400.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.761.300,00						9 Laporan	12.400.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						9.761.300,00							12.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	9.761.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		9 Laporan	12.400.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						31.247.800,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa, Masyarakat		37.479.800,00	
		meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						31.247.800,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa, Masyarakat		37.479.800,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	5.841.900,00						45 Keluarga	5.716.800,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	14.871.300,00						45 Keluarga	19.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	4.970.950,00						45 Keluarga	7.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	5.563.650,00						45 Keluarga	5.563.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						5.841.900,00							5.716.800,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	5.841.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		45 Keluarga	5.716.800,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						14.871.300,00							19.200.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	14.871.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		45 Keluarga	19.200.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5.563.650,00							5.563.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	5.563.650,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		45 Keluarga	5.563.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.970.950,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga		27 Keluarga	36 Keluarga	4.970.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		45 Keluarga	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						22.884.600,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa,		22.883.300,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						22.884.600,00					Perangkat Daerah Pengampu, Forkopimcam, Aparat Desa,		22.883.300,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	14.383.950,00						-	14.383.300,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.383.950,00							14.383.300,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.383.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.383.300,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
316.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**8.750.000,00**							**5.614.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***8.750.000,00***							***5.614.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	8.750.000,00						100 %	5.614.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.750.000,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		5.614.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						8.750.000,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		5.614.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	8.750.000,00						9 Laporan	5.614.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.750.000,00							5.614.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	8.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		9 Laporan	5.614.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
317.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.004.600,00**							**39.534.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***40.004.600,00***							***39.534.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	40.004.600,00						100 %	39.534.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.004.600,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		39.534.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	3.500.000,00						9 Dokumen	7.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						3.500.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		9 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.004.600,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		39.534.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.004.600,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		39.534.000,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	-	4.050.650,00						-	4.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	10.903.300,00						-	11.084.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	21.550.650,00						-	17.400.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						21.550.650,00							17.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	200 Orang	21.550.650,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	17.400.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						10.903.300,00							11.084.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	40 Orang	10.903.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.084.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						4.050.650,00							4.050.000,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	1 Dokumen	4.050.650,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.050.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
318.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**6.500.000,00**							**6.212.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***6.500.000,00***							***6.212.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		65 %	70 %	6.500.000,00						75 %	6.212.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.500.000,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		6.212.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.500.000,00					Masyarakat, Aparatur Desa, Forkopimcam		6.212.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	3.000.000,00						-	3.212.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.000.000,00							3.212.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.212.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Surakarta || Desa Tatakarya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
		KECAMATAN ABUNG TINGGI						**2.400.055.143,44**							**8.474.485.233,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.400.055.143,44**							**8.474.485.233,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.400.055.143,44**							**8.474.485.233,00**	
319.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.279.101.883,44**							**2.287.853.919,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.277.446.883,44***							***2.256.353.919,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.8-68 Nilai		67-67.2 Nilai	67.2-67.4 Nilai	2.277.446.883,44						67.4-67.6 Nilai	2.256.353.919,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.462.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						8.462.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.230.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.547.500,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.230.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.230.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.655.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.655.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.375.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.375.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.547.500,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.547.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.036.796.083,44					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		2.097.983.919,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.036.796.083,44					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		2.097.983.919,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.520.000,00						12 Dokumen	38.650.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.064.400,00						1 Laporan	3.757.072,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.968.211.683,44						24 Orang/bulan	2.053.576.847,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.968.211.683,44							2.053.576.847,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.968.211.683,44	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		24 Orang/bulan	2.053.576.847,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						64.520.000,00							38.650.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	64.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	38.650.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.064.400,00							3.757.072,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.064.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	3.757.072,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.361.300,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		67.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.361.300,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.581.500,00						1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.034.400,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.148.500,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.900.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.696.900,00						1 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.148.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.148.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.900.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.696.900,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.696.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.581.500,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.581.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.034.400,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.034.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.270.000,00					-		20.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.270.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	39.270.000,00						4 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.270.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	39.270.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.517.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		47.500.000,00	
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.517.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		47.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.317.000,00						12 Laporan	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.317.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.317.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						49.200.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.695.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		47.370.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						51.695.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		47.370.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	9.655.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00						2 Unit	37.370.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							37.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	37.370.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.655.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	9.655.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
320.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**36.330.700,00**							**39.876.288,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***36.330.700,00***							***30.876.288,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85 %		83 %	83 %	36.330.700,00						84 %	30.876.288,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						24.983.900,00					MASYARAKAT KECAMATAN		21.876.288,00	
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daearh yang ada di Kecamatan						24.983.900,00					MASYARAKAT KECAMATAN		21.876.288,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.864.700,00						4 Laporan	9.876.288,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.119.200,00						4 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						4.864.700,00							9.876.288,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.864.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	9.876.288,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.119.200,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.119.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.346.800,00					MASYARAKAT KECAMATAN		18.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.346.800,00					MASYARAKAT KECAMATAN		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.192.300,00						4 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.154.500,00						4 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.192.300,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.192.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.154.500,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.154.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**40.499.660,00**							**15.154.109,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***40.499.660,00***							***7.154.109,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		80 %	85 %	40.499.660,00						90 %	7.154.109,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						23.399.660,00					MASYARAKAT KECAMATAN		4.410.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						23.399.660,00					MASYARAKAT KECAMATAN		4.410.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.547.160,00						4 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.547.160,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.547.160,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						4.350.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		2.000.000,00	
		Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						4.350.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.350.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.350.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						12.750.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		8.744.109,00	
		meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						12.750.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		8.744.109,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.350.000,00						40 Keluarga	2.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.750.000,00						40 Keluarga	2.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	4.700.000,00						40 Keluarga	2.744.109,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.950.000,00						40 Keluarga	2.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.350.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		40 Keluarga	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						2.750.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.750.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		40 Keluarga	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.950.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	2.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		40 Keluarga	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.700.000,00							2.744.109,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	60 Keluarga		24 Keluarga	32 Keluarga	4.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		40 Keluarga	2.744.109,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						23.399.660,00					MASYARAKAT KECAMATAN		4.410.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	9.852.500,00						-	2.410.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.852.500,00							2.410.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.852.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.410.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
322.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.048.000,00**							**6.105.299.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***6.048.000,00***							***6.105.299.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.048.000,00						100 %	6.105.299.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.048.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN FORKOFINCAM		6.105.299.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						6.048.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN FORKOFINCAM		6.105.299.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.048.000,00						4 Laporan	6.105.299.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.048.000,00							6.105.299.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.048.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.105.299.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
323.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.735.400,00**							**10.240.700,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***25.735.400,00***							***10.240.700,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	25.735.400,00						100 %	10.240.700,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.735.400,00					MASYARAKAT KECAMATAN		10.240.700,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.735.400,00					MASYARAKAT KECAMATAN		10.240.700,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.885.000,00						4 Dokumen	4.140.700,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.400.400,00						4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						2.885.000,00							4.140.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.885.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	4.140.700,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.400.400,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.400.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.735.400,00					MASYARAKAT KECAMATAN		10.240.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	12.450.000,00						-	3.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12.450.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	24 Orang	12.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.100.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
324.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.339.500,00**							**16.061.217,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***9.339.500,00***							***16.061.217,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	67.5 %		57.5 %	60 %	9.339.500,00						62.5 %	16.061.217,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.339.500,00					masyarakat dan aparatur desa		16.061.217,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.840.000,00						8 Laporan	6.411.217,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00						8 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						2.840.000,00							6.411.217,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tinggi || Desa Ulak Rengas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	6.411.217,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.339.500,00					masyarakat dan aparatur desa		16.061.217,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.339.500,00					masyarakat dan aparatur desa		16.061.217,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	3.499.500,00						-	3.650.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.499.500,00							3.650.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	8 Dokumen	3.499.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	3.650.000,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	8 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	KECAMATAN ABUNG TINGGI
		KECAMATAN BUKIT KEMUNING						**3.558.774.652,94**							**2.408.526.853,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.558.774.652,94**							**2.408.526.853,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.558.774.652,94**							**2.408.526.853,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
325.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.363.253.352,94**							**2.251.583.648,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***3.363.253.352,94***							***2.243.583.648,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	3.363.253.352,94						67.2-67.4 Nilai	2.243.583.648,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.777.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		4.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						13.777.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		4.750.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.028.000,00						1 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.500,00						1 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.225.000,00						1 Dokumen	750.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.225.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.225.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.475.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.028.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.028.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.049.500,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.105.896.352,94					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		2.072.133.589,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.105.896.352,94					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		2.072.133.589,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.520.000,00						12 Dokumen	45.325.677,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.033.376.352,94						24 Orang/bulan	2.022.807.912,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.033.376.352,94							2.022.807.912,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.033.376.352,94	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		24 Orang/bulan	2.022.807.912,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						67.520.000,00							45.325.677,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	67.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	45.325.677,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.935.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		95.782.437,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.935.500,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		95.782.437,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.724.500,00						4 Paket	16.483.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	85.441.000,00						2 Paket	15.384.429,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.770.000,00						2 Paket	53.914.208,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						85.441.000,00							15.384.429,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	85.441.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	15.384.429,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.770.000,00							53.914.208,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.770.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	53.914.208,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.724.500,00							16.483.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	22.724.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	16.483.800,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71.500.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71.500.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00						12 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						63.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.144.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		69.917.622,00	
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						57.144.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		69.917.622,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00						1 Unit	54.806.122,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							54.806.122,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	54.806.122,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.105.896.352,94					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		2.072.133.589,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.550.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.450.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.550.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	2.550.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.450.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	2.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						57.144.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		69.917.622,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.104.000,00						-	15.111.500,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.104.000,00							15.111.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	15.104.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.111.500,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
326.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**95.359.000,00**							**115.421.288,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***21.040.000,00***							***37.246.288,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	92.5 %		82.5 %	85 %	21.040.000,00						87.5 %	37.246.288,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.770.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		15.246.288,00	
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						10.770.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		15.246.288,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.360.000,00						1 Laporan	4.370.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.410.000,00						1 Laporan	10.876.288,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						4.360.000,00							4.370.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.360.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.370.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.410.000,00							10.876.288,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.410.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	10.876.288,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.270.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		22.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.270.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.170.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.100.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.170.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.170.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	-		-	85 PERSEN	74.319.000,00						-	78.175.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						74.319.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		78.175.000,00	
		-						74.319.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		78.175.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	74.319.000,00						-	78.175.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						74.319.000,00							78.175.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	2 Dokumen	74.319.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	78.175.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
327.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**734.100.300,00**							**676.155.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***12.490.000,00***							***9.300.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	12.490.000,00						100 %	9.300.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi tanggap Bencana dan ketahanan pangan						14.490.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		11.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	5.790.000,00						20 Keluarga	2.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						5.790.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga		20 Keluarga	24 Keluarga	5.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan , Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		20 Keluarga	2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 PERSEN	10.255.300,00						-	16.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.435.300,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		21.180.000,00	
		-						15.435.300,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		21.180.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	8.255.300,00						-	14.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.255.300,00							14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	8.255.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	14.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		2.500.000,00	
		-						2.000.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						14.490.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		11.300.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi tanggap Bencana dan ketahanan pangan						14.490.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		11.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	4.700.000,00						-	4.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	24 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	24 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.700.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	24 Keluarga	4.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	4.800.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
328.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.500.000,00**							**2.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***6.500.000,00***							***2.500.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.500.000,00						100 %	2.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.500.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		2.500.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						6.500.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00						1 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
329.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**43.770.000,00**							**6.810.700,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***43.770.000,00***							***6.810.700,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	43.770.000,00						100 %	6.810.700,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						43.770.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		6.810.700,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						43.770.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		6.810.700,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.600.000,00						1 Dokumen	3.640.700,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						35.600.000,00							3.640.700,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	3.640.700,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						43.770.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		6.810.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	8.170.000,00						-	3.170.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						8.170.000,00							3.170.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	24 Orang	8.170.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.170.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
330.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**25.147.000,00**							**4.411.217,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***25.147.000,00***							***4.411.217,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	25.147.000,00						100 %	4.411.217,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						25.147.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		4.411.217,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						25.147.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		4.411.217,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.647.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00						1 Laporan	2.411.217,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						21.647.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.647.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						3.500.000,00							2.411.217,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.411.217,00	KECAMATAN BUKIT KEMUNING
		KELURAHAN BUKIT KEMUNING						**709.355.000,00**							**648.355.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**709.355.000,00**							**648.355.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**709.355.000,00**							**648.355.000,00**	
331.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**734.100.300,00**							**676.155.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***702.175.000,00***							***641.175.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	702.175.000,00						100 %	641.175.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						702.175.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		641.175.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						702.175.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN		641.175.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.400.000,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	3.400.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	698.775.000,00						7 Pokmas / Ormas	637.775.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.400.000,00							3.400.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		1 Lembaga Kemasyarakatan	3.400.000,00	KELURAHAN BUKIT KEMUNING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						698.775.000,00							637.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	698.775.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		7 Pokmas / Ormas	637.775.000,00	KELURAHAN BUKIT KEMUNING
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 PERSEN	7.180.000,00						-	7.180.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.435.300,00					-		21.180.000,00	
		-						15.435.300,00					-		21.180.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.180.000,00						-	7.180.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.180.000,00							7.180.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bukit Kemuning || Kelurahan Bukit Kemuning || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	7.180.000,00	KELURAHAN BUKIT KEMUNING
		KECAMATAN SUNGKAI SELATAN						**2.689.550.051,04**							**2.093.874.051,04**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.689.550.051,04**							**2.093.874.051,04**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.689.550.051,04**							**2.093.874.051,04**	
332.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.503.341.651,04**							**1.999.374.051,04**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.503.341.651,04***							***1.999.374.051,04***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.8-68 Nilai		67-67.2 Nilai	67.2-67.4 Nilai	2.503.341.651,04						67.4-67.6 Nilai	1.999.374.051,04	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.366.500,00					-		0,00	
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.366.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.366.500,00						4 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.366.500,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.366.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.069.894.051,04					-		1.999.374.051,04	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.069.894.051,04					-		1.999.374.051,04	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	70.520.000,00						5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.999.374.051,04						25 Orang/bulan	1.999.374.051,04	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.999.374.051,04							1.999.374.051,04	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.999.374.051,04	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Orang/bulan	1.999.374.051,04	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						70.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	70.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.113.600,00					-		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.113.600,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	17.000.000,00						16 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.570.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.463.500,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	8.953.500,00						6 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.126.600,00						12 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.953.500,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	8.953.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.126.600,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	7.126.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.570.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	7.570.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.463.500,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	6.463.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan		16 Laporan	2 Laporan	17.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.660.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.660.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	78.660.000,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						78.660.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	78.660.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234.620.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234.620.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	156.060.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	78.560.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						156.060.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	156.060.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78.560.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	78.560.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.687.500,00					-		0,00	
		Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.687.500,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	22.667.500,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	37.020.000,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						22.667.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	22.667.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
333.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**34.017.000,00**							**50.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***19.042.000,00***							***25.000.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85 %		83 %	83 %	19.042.000,00						84 %	25.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.542.000,00					-		22.500.000,00	
		Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.542.000,00					-		22.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.458.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.084.000,00						4 Laporan	22.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.084.000,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.084.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	22.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.458.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.458.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
			-	-		-	-	14.975.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						14.975.000,00					-		25.000.000,00	
		-						14.975.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	2.475.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.475.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	2.475.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						7.500.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	17.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.500.000,00					-		2.500.000,00	
		Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.500.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
334.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**36.325.000,00**							**44.500.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***36.325.000,00***							***44.500.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		82 %	82 %	36.325.000,00						84 %	44.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						30.825.000,00					-		44.500.000,00	
		Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						30.825.000,00					-		44.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.300.000,00						4 Laporan	17.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.300.000,00							17.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	7.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	17.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5.500.000,00					-		0,00	
		Terwujydny Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Keluarga		Keluarga	Keluarga	5.500.000,00						4 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4 Keluarga		Keluarga	11 Keluarga	5.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Keluarga	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
		Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						30.825.000,00					-		44.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	3.500.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.025.000,00						-	23.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.025.000,00							23.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.025.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	23.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	3.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
335.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**24.160.000,00**							**0,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***17.990.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	17.990.000,00						100 %	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.990.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.990.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.990.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	13.990.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		4 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
			-	-		-	-	6.170.000,00						-	0,00	
		Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.990.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						6.170.000,00					-		0,00	
		-						6.170.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	6.170.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						6.170.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	6.170.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
336.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**68.681.400,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***68.681.400,00***							***0,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	68.681.400,00						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						68.681.400,00					-		0,00	
		Terwujudny Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						68.681.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
		Terwujudny Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						68.681.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	46.181.400,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	10 Orang	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						46.181.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	10 Orang	46.181.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	0 Orang	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasiberdasarkan Pancasila						0,00							0,00	
		Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-		-	0 Lembaga Masyarakat	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
337.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.025.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***21.525.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	87 %		84 %	84 %	21.525.000,00						85 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.025.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.025.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.400.000,00						4 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	-	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
		Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.025.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	7.250.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	5.375.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	-	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						7.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	7.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.375.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	5.375.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Selatan || Desa Ketapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
		KECAMATAN TANJUNG RAJA						**2.430.569.329,94**							**2.430.569.329,94**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.430.569.329,94**							**2.430.569.329,94**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.430.569.329,94**							**2.430.569.329,94**	
338.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.230.552.729,94**							**2.230.552.729,94**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.220.552.729,94***							***2.213.552.729,94***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70-70 Nilai		67-67.9 Nilai	68-68.9 Nilai	2.220.552.729,94						69-69.9 Nilai	2.213.552.729,94	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000,00					ASN Kecamatan		12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						12.000.000,00					ASN Kecamatan		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00						2 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.072.580.129,94					ASN Kecamatan		2.072.565.381,94	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.072.580.129,94					ASN Kecamatan		2.072.565.381,94	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.840.000,00						12 Dokumen	69.840.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.998.740.129,94						20 Orang/bulan	1.998.725.381,94	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.998.740.129,94							1.998.725.381,94	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.998.740.129,94	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang/bulan	1.998.725.381,94	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						69.840.000,00							69.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	69.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	69.840.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.866.600,00					ASN Kecamatan		53.181.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.866.600,00					ASN Kecamatan		53.181.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.200.000,00						8 Laporan	22.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.518.000,00						4 Paket	5.518.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.463.500,00						4 Paket	11.463.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.994.600,00						4 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.690.500,00						4 Paket	7.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.994.600,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.994.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.690.500,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.690.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.518.000,00							5.518.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.518.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	5.518.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.463.500,00							11.463.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.463.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	11.463.500,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.200.000,00							22.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	22.200.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.996.000,00					ASN Kecamatan		31.695.848,00	
		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.996.000,00					ASN Kecamatan		31.695.848,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	5.796.000,00						36 Laporan	6.495.848,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.200.000,00						12 Laporan	25.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.796.000,00							6.495.848,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	5.796.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		36 Laporan	6.495.848,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.200.000,00							25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	25.200.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.110.000,00					ASN Kecamatan		61.110.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah						61.110.000,00					ASN Kecamatan		61.110.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.070.000,00						2 Unit	19.070.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00						2 Unit	42.040.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							42.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	42.040.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.070.000,00							19.070.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.070.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	19.070.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
339.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**52.966.000,00**							**52.966.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***52.966.000,00***							***52.966.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	97.5 %		87.5 %	90 %	52.966.000,00						92.5 %	52.966.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						40.568.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		40.568.000,00	
		Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						40.568.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		40.568.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00						4 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.568.000,00						4 Laporan	31.568.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						31.568.000,00							31.568.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	31.568.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	31.568.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.398.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		12.398.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.398.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		12.398.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.398.000,00						4 Dokumen	6.398.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						6.398.000,00							6.398.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	6.398.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	6.398.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
340.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**90.714.600,00**							**90.714.600,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***90.714.600,00***							***90.714.600,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	92.5 %		82.5 %	85 %	90.714.600,00						87.5 %	90.714.600,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.034.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		25.034.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.034.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		25.034.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.634.000,00						4 Laporan	10.634.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.634.000,00							10.634.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.634.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	10.634.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12.500.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		12.500.000,00	
		Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12.500.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00						4 Laporan	12.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						53.180.600,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		53.180.600,00	
		meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						53.180.600,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		53.180.600,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	10.587.400,00						95 Keluarga	10.587.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	25.593.200,00						95 Keluarga	25.593.200,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	9.000.000,00						95 Keluarga	9.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	8.000.000,00						95 Keluarga	8.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						10.587.400,00							10.587.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	10.587.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		95 Keluarga	10.587.400,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						25.593.200,00							25.593.200,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	133 Keluarga		57 Keluarga	32 Keluarga	25.593.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		95 Keluarga	25.593.200,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	8.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		95 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	133 Keluarga		57 Keluarga	76 Keluarga	9.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		95 Keluarga	9.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.034.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		25.034.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	14.400.000,00						-	14.400.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.400.000,00							14.400.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	14.400.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
341.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10.022.000,00**							**10.022.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***10.022.000,00***							***10.022.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	10.022.000,00						100 %	10.022.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.022.000,00					Masyarakat Kecamatan		10.022.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum						10.022.000,00					Masyarakat Kecamatan		10.022.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.022.000,00						4 Laporan	10.022.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.022.000,00							10.022.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.022.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	10.022.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
342.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**38.260.000,00**							**38.260.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***38.260.000,00***							***38.260.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	38.260.000,00						100 %	38.260.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.260.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		38.260.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.260.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		38.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.755.300,00						4 Dokumen	3.755.300,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						3.755.300,00							3.755.300,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	3.755.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	3.755.300,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.260.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		38.260.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	9.144.600,00						-	9.144.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	18.360.100,00						-	18.360.100,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						18.360.100,00							18.360.100,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	200 Orang	18.360.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.360.100,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						9.144.600,00							9.144.600,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	40 Orang	9.144.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.144.600,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
343.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8.054.000,00**							**8.054.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***8.054.000,00***							***8.054.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	92.5 %		82.5 %	85 %	8.054.000,00						87.5 %	8.054.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.054.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		8.054.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.054.000,00					Masyarakat Kecamatan, Forkopimcam, Aparatur Desa		8.054.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.866.000,00						4 Laporan	2.866.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.188.000,00						4 Laporan	5.188.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.188.000,00							5.188.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.188.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	5.188.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						2.866.000,00							2.866.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.866.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Tanjung Raja || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.866.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAJA
		KECAMATAN SUNGKAI UTARA						**2.216.833.437,64**							**2.227.321.459,64**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.216.833.437,64**							**2.227.321.459,64**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.216.833.437,64**							**2.227.321.459,64**	
344.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.002.721.837,64**							**2.063.421.459,64**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.002.721.837,64***							***2.061.821.459,64***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.8-68 Nilai		67-67.2 Nilai	67.2-67.4 Nilai	2.002.721.837,64						67.4-67.6 Nilai	2.061.821.459,64	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.293.100,00					-		4.020.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.293.100,00					-		4.020.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	822.000,00						1 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.053.100,00						2 Dokumen	760.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	806.000,00						1 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	736.000,00						1 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	876.000,00						1 Dokumen	860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.053.100,00							760.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.053.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	760.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						876.000,00							860.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	876.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	860.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						736.000,00							800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	736.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						822.000,00							800.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	822.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						806.000,00							800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	806.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.818.409.317,64					-		1.819.860.959,64	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.818.409.317,64					-		1.819.860.959,64	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.146.000,00						12 Dokumen	68.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	602.000,00						1 Laporan	700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.750.661.317,64						17 Orang/bulan	1.750.660.959,64	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.750.661.317,64							1.750.660.959,64	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.750.661.317,64	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		17 Orang/bulan	1.750.660.959,64	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						67.146.000,00							68.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	67.146.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	68.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						602.000,00							700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	602.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	700.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.508.420,00					-		62.600.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.508.420,00					-		62.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.627.700,00						3 Paket	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.250.000,00						3 Paket	9.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.219.100,00						3 Paket	4.100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	5.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.411.620,00						3 Paket	7.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.219.100,00							4.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	3.219.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	4.100.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.400.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	5.400.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.411.620,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	7.411.620,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	7.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.627.700,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	20.627.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	36.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.250.000,00							9.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	9.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	9.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.385.000,00					-		31.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.385.000,00					-		31.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.885.000,00						5 Unit	11.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	9.500.000,00						5 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.885.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	3.885.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	11.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	9.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.657.000,00					-		91.220.500,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.657.000,00					-		91.220.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.005.000,00						12 Laporan	13.000.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.652.000,00						12 Laporan	78.220.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.005.000,00							13.000.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.005.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	13.000.500,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.652.000,00							78.220.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.652.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	78.220.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.469.000,00					-		54.720.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						52.469.000,00					-		54.720.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.969.000,00						3 Unit	10.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	37.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.480.000,00						3 Unit	7.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							37.020.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.020.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.480.000,00							7.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.480.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	7.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.969.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.969.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	10.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
345.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**78.990.400,00**							**40.900.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***78.990.400,00***							***40.900.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	92.45 %		88.50 %	89 %	78.990.400,00						90.45 %	40.900.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						54.572.000,00					-		24.600.000,00	
		Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						54.572.000,00					-		24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.425.000,00						1 Dokumen	21.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.147.000,00						1 Laporan	3.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						29.147.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.147.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	3.100.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.425.000,00							21.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.425.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						15.319.700,00					-		10.900.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						15.319.700,00					-		10.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	7.036.200,00						2 Dokumen	3.700.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.398.000,00						1 Laporan	3.800.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.885.500,00						1 Laporan	3.400.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						7.036.200,00							3.700.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.036.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.700.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.398.000,00							3.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.398.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	3.800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.885.500,00							3.400.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.885.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	3.400.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.098.700,00					-		5.400.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat						9.098.700,00					-		5.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.750.700,00						1 Dokumen	2.800.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.348.000,00						1 Laporan	2.600.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.750.700,00							2.800.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.750.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.348.000,00							2.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.348.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	2.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
346.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.781.000,00**							**54.800.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***63.781.000,00***							***49.600.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	63.781.000,00						100 %	49.600.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.561.700,00					-		17.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.561.700,00					-		17.100.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.957.100,00						1 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.604.600,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.604.600,00							12.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.604.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.957.100,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.957.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						11.162.000,00					-		5.200.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						11.162.000,00					-		5.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.162.000,00						1 Laporan	5.200.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						11.162.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.162.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	5.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						36.057.300,00					-		32.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						36.057.300,00					-		32.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	3.974.000,00						5 Keluarga	3.900.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	7.872.000,00						5 Keluarga	8.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	5.919.500,00						5 Keluarga	5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	5.359.000,00						5 Keluarga	5.300.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						3.974.000,00							3.900.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	3.974.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Keluarga	3.900.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						7.872.000,00							8.300.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	7.872.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		5 Keluarga	8.300.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5.359.000,00							5.300.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	5.359.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		5 Keluarga	5.300.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						5.919.500,00							5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	5.919.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Keluarga	5.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						36.057.300,00					-		32.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	-	7.307.000,00						-	4.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	-	5.625.800,00						-	5.600.000,00	
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						7.307.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	5 Keluarga	7.307.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						5.625.800,00							5.600.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	5 Keluarga	5.625.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
347.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**8.969.000,00**							**8.900.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***8.969.000,00***							***8.900.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	8.969.000,00						100 %	8.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.969.000,00					-		8.900.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8.969.000,00					-		8.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.160.000,00						1 Laporan	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.809.000,00						1 Laporan	5.600.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.160.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	3.300.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.809.000,00							5.600.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.809.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	5.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
348.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**53.363.000,00**							**48.700.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***53.363.000,00***							***48.700.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	53.363.000,00						100 %	48.700.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						53.363.000,00					-		48.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						53.363.000,00					-		48.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.207.000,00						1 Dokumen	3.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Orang		5 Orang	5 Orang	22.249.000,00						5 Orang	21.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						22.249.000,00							21.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Orang		5 Orang	5 Orang	22.249.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Orang	21.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						9.207.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.207.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	3.300.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						53.363.000,00					-		48.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	21.907.000,00						-	23.800.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						21.907.000,00							23.800.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	21.907.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
349.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.008.200,00**							**10.600.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***9.008.200,00***							***10.600.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	9.008.200,00						100 %	10.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.008.200,00					-		10.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembunaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.008.200,00					-		10.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	962.100,00						1 Dokumen	1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.218.300,00						1 Dokumen	1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	593.400,00						1 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.810.000,00						1 Dokumen	2.200.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.810.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.810.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						593.400,00							800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	593.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						962.100,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	962.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.218.300,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.218.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.700.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembunaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.008.200,00					-		10.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	3.424.400,00						-	4.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						3.424.400,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	3.424.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Utara || Desa Negara Ratu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.700.000,00	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
		KECAMATAN MUARA SUNGKAI						**1.927.733.853,54**							**1.944.764.403,54**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.927.733.853,54**							**1.944.764.403,54**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.927.733.853,54**							**1.944.764.403,54**	
350.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.769.057.553,54**							**1.801.970.703,54**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.769.057.553,54***							***1.798.970.703,54***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	1.769.057.553,54						67.2-67.4 Nilai	1.798.970.703,54	
		Te4rlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat						15.054.000,00					Kecamatan Muara Sungkai		18.744.900,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.849.100,00						3 Dokumen	14.744.900,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.849.100,00							14.744.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.849.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	14.744.900,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.586.448.953,54					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		1.587.216.103,54	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.586.448.953,54					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		1.587.216.103,54	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		9 Dokumen	12 Dokumen	55.880.000,00						12 Dokumen	55.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.529.516.153,54						25 Orang/bulan	1.529.516.103,54	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.529.516.153,54							1.529.516.103,54	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.529.516.153,54	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Orang/bulan	1.529.516.103,54	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						55.880.000,00							55.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	55.880.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	55.200.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.053.500,00					Pegawai kecamatan Muara Sungkai		62.989.700,00	
		Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.053.500,00					Pegawai kecamatan Muara Sungkai		62.989.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.940.000,00						12 Laporan	19.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	22.536.300,00						3 Paket	22.336.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	7.566.100,00						25 Paket	8.189.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.291.800,00						1 Paket	8.564.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.566.100,00							8.189.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	1 Paket	7.566.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Paket	8.189.500,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.291.800,00							8.564.200,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.291.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	8.564.200,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.536.300,00							22.336.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	22.536.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	22.336.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.940.000,00							19.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	18.940.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	19.400.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.967.100,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		40.000.000,00	
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.967.100,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.500.000,00						1 Unit	13.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.567.100,00						1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.500.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	17.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.567.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.567.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.000.000,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		41.000.000,00	
		Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.000.000,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		41.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00						5 Laporan	35.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.534.000,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		52.020.000,00	
		Terwujudnaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.534.000,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		52.020.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	37.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.450.000,00						4 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.064.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							37.020.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.020.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.450.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	3.450.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.064.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.064.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.054.000,00					Kecamatan Muara Sungkai		18.744.900,00	
		Te4rlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat						15.054.000,00					Kecamatan Muara Sungkai		18.744.900,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	999.600,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.152.200,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.053.200,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	999.900,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						999.900,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	999.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.053.200,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.053.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						999.600,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	999.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.152.200,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.152.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.586.448.953,54					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		1.587.216.103,54	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.052.800,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.052.800,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.052.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
		Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.053.500,00					Pegawai kecamatan Muara Sungkai		62.989.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.719.300,00						-	4.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.719.300,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.719.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.500.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.967.100,00					Seluruh pegawai kecamatan muara sungkai		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	9.900.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.900.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	9.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
351.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35.440.300,00**							**28.219.200,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***17.624.300,00***							***23.219.200,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85 %		85 %	85 %	17.624.300,00						85 %	23.219.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.624.300,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		23.219.200,00	
		Telaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.624.300,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		23.219.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.624.300,00						4 Dokumen	23.219.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.624.300,00							23.219.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	17.624.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	23.219.200,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
			-	-		-	-	17.816.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						17.816.000,00					-		5.000.000,00	
		-						17.816.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	17.816.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						17.816.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	17.816.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
352.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**58.593.300,00**							**56.400.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***53.593.300,00***							***48.400.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		80 %	85 %	53.593.300,00						85 %	48.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.419.800,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		24.500.000,00	
		Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.419.800,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		24.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.999.800,00						2 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	17.420.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.420.000,00							16.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	17.420.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.999.800,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.999.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7.500.000,00					-		7.600.000,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7.500.000,00					-		7.600.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00						1 Laporan	7.600.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						7.500.000,00							7.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	7.600.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.673.500,00					-		24.300.000,00	
		Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.673.500,00					-		24.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	7.360.000,00						10 Keluarga	8.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00						10 Keluarga	5.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						7.360.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	55 Keluarga	7.360.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	8.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga		10 Keluarga	110 Keluarga	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	5.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
		Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.673.500,00					-		24.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	-	5.000.000,00						-	2.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	5.313.500,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.313.500,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	55 Keluarga	5.313.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	6.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	110 Keluarga	3.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	3.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						5.000.000,00							2.300.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	110 Keluarga	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.300.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
353.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10.920.000,00**							**10.954.500,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***10.920.000,00***							***10.954.500,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	10.920.000,00						100 %	10.954.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.920.000,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		10.954.500,00	
		Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						10.920.000,00					Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		10.954.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.966.000,00						12 Laporan	4.954.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.954.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.966.000,00							4.954.500,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	4.966.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	4.954.500,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.954.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.954.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Pakuon Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
354.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**33.062.500,00**							**33.300.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***33.062.500,00***							***33.300.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	33.062.500,00						100 %	33.300.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.062.500,00					Camat dan Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		33.300.000,00	
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.062.500,00					Camat dan Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		33.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.322.500,00						2 Dokumen	8.050.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						8.322.500,00							8.050.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	8.322.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	8.050.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.062.500,00					Camat dan Masyarakat Kecamatan Muara Sungkai		33.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	14.740.000,00						-	15.250.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						14.740.000,00							15.250.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	200 Orang	14.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Negeri Ujung Karang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.250.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	60 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
355.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**20.660.200,00**							**13.920.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***20.660.200,00***							***13.920.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		85 %	85 %	20.660.200,00						85 %	13.920.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.660.200,00					Camat dan Aparat Desa Kecamatan Muara Sungkai		13.920.000,00	
		Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.660.200,00					Camat dan Aparat Desa Kecamatan Muara Sungkai		13.920.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.701.700,00						4 Dokumen	5.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	6.792.500,00						11 Dokumen	8.200.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.701.700,00							5.720.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	5.701.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	5.720.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						6.792.500,00							8.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	6.792.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		11 Dokumen	8.200.000,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
		Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.660.200,00					Camat dan Aparat Desa Kecamatan Muara Sungkai		13.920.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	8.166.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						8.166.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	4 Dokumen	8.166.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
		KECAMATAN BUNGA MAYANG						**2.105.384.797,24**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.105.384.797,24**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.105.384.797,24**							**0,00**	
356.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.897.085.857,24**							**0,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.897.085.857,24***							***0,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.7-66.9 Nilai	66.9-67.2 Nilai	1.897.085.857,24						67.2-67.4 Nilai	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.747.000,00					-		0,00	
		Tersusun nya Capaian Kinerja Perngkat Daerah						4.747.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.747.000,00						2 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.747.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.747.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.659.260.997,24					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan						1.659.260.997,24					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.520.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.594.740.997,24						20 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.594.740.997,24							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.594.740.997,24	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						64.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.657.470,00					-		0,00	
		tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.657.470,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.400.000,00						16 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.206.510,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.792.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.601.500,00						6 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.314.260,00						12 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.343.200,00						12 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.601.500,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	12 Paket	6.601.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.314.260,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.314.260,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.343.200,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.343.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.206.510,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.206.510,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.792.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.792.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.934.390,00					-		0,00	
		terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.934.390,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.488.390,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.446.000,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.488.390,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	20 Unit	10.488.390,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.446.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.446.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.080.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota						73.080.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.080.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67.080.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.406.000,00					-		0,00	
		terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.406.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.180.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	28.206.000,00						3 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.180.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.206.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	28.206.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
357.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**60.985.300,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***60.985.300,00***							***0,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	91,50 %		86,10 %	87,45 %	60.985.300,00						88,80 %	0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						47.162.300,00					-		0,00	
		terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						47.162.300,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.040.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	39.122.300,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						8.040.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						39.122.300,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	39.122.300,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.823.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.823.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.434.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.389.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						6.434.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.434.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.389.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.389.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
358.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**56.538.640,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***56.538.640,00***							***0,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		100 %	100 %	56.538.640,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.710.000,00					-		0,00	
		terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan						15.710.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	9.510.000,00						6 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9.510.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	9.510.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						6.975.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan						6.975.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.975.000,00						1 Pokmas / Ormas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						6.975.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6.975.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Pokmas / Ormas	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.100.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.100.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	5.100.000,00						6 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	5.100.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						28.753.640,00					-		0,00	
		terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						28.753.640,00					-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	14.539.250,00						1 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	5.289.390,00						1 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	5.625.000,00						1 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	3.300.000,00						1 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						14.539.250,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	14.539.250,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Keluarga	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.289.390,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga		1 Keluarga	30 Keluarga	5.289.390,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Keluarga	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						3.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	3.300.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Keluarga	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						5.625.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	5.625.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Keluarga	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
		terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan						15.710.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	6.200.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						6.200.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
359.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**9.900.000,00**							**0,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***9.900.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	9.900.000,00						100 %	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.900.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum						9.900.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.900.000,00						3 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						9.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	9.900.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
360.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**54.775.000,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***54.775.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	54.775.000,00						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.775.000,00					-		0,00	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.775.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.200.000,00						4 Dokumen	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						9.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	9.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.775.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	40.575.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						40.575.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	40.575.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	50 Orang	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Negara Tulang Bawang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
361.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**26.100.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***17.100.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	17.100.000,00						100 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.100.000,00					-		0,00	
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desadan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.100.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.600.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00						6 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000,00						4 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						9.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUNGA MAYANG
		KECAMATAN HULU SUNGKAI						**1.849.256.115,24**							**1.502.202.515,24**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.849.256.115,24**							**1.502.202.515,24**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.849.256.115,24**							**1.502.202.515,24**	
362.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.668.220.515,24**							**1.502.202.515,24**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.668.220.515,24***							***1.502.202.515,24***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.95-67 Nilai	67-67.2 Nilai	1.668.220.515,24						67.2-67.4 Nilai	1.502.202.515,24	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.476.368.415,24					-		1.481.168.415,24	
		Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.476.368.415,24					-		1.481.168.415,24	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	55.160.000,00						12 Dokumen	59.960.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	794.800,00						1 Laporan	794.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.420.413.615,24						14 Orang/bulan	1.420.413.615,24	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.420.413.615,24							1.420.413.615,24	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.420.413.615,24	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		14 Orang/bulan	1.420.413.615,24	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						55.160.000,00							59.960.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	55.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Dokumen	59.960.000,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						794.800,00							794.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	794.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	794.800,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.815.200,00					-		18.045.700,00	
		Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.815.200,00					-		18.045.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.855.600,00						12 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.671.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.277.700,00						6 Paket	6.316.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	11.729.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.010.900,00						12 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.277.700,00							6.316.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	6.277.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		6 Paket	6.316.700,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							11.729.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	11.729.000,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.010.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	7.010.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.855.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.855.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.671.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	11.671.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Paket	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	35.000.000,00						3 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	35.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.002.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.002.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.850.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.152.000,00						12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.850.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	5.850.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.152.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	70.152.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		12 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.040.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.040.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	42.040.000,00						3 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		3 Unit	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.994.900,00					-		2.988.400,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.994.900,00					-		2.988.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.994.900,00						-	2.988.400,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.994.900,00							2.988.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	2.994.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	2.988.400,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
363.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**59.435.600,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***41.435.600,00***							***0,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	91,50 %		86,10 %	87,45 %	41.435.600,00						88,80 %	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						33.785.600,00					-		0,00	
		Terlaksana Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						33.785.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.904.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.881.600,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						12.881.600,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	12.881.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.904.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	20.904.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.650.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.650.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.150.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.700.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						3.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
			-	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.000.000,00					-		0,00	
		-						18.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.200.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						10.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.200.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	7.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
		Terlaksana Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.650.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	1.800.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
364.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**62.800.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***60.100.000,00***							***0,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		82 %	82 %	60.100.000,00						84 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						46.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						46.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.600.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						27.600.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	27.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						6.000.000,00					-		0,00	
		TerlaksanaPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						6.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						10.800.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						10.800.000,00					-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	2.700.000,00						10 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	5.400.000,00						10 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	2.700.000,00						10 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	2.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga		10 Keluarga	10/Desa Keluarga	2.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
		Terlaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						46.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	18.400.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						18.400.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	30 Lembaga Kemasyarakatan	18.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
365.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**14.000.000,00**							**0,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***9.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	9.500.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.500.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00						3 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		3 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
			-	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						4.500.000,00					-		0,00	
		-						4.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	4.500.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						4.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
366.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.800.000,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***40.800.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	40.800.000,00						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.800.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.800.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6 Orang		6 Orang	6 Orang	26.950.000,00						6 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						26.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6 Orang		6 Orang	150 Orang	26.950.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Orang	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						11.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
		Terlaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.800.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	-	1.350.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-		-	-	1.500.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasiberdasarkan Pancasila						1.500.000,00							0,00	
		Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-		-	5 Lembaga Masyarakat	1.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						1.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-		-	1 Dokumen	1.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
367.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***4.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	87 %		84 %	84 %	4.000.000,00						85 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksana Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
		Terlaksana Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Hulu Sungkai || Desa Gedung Makrifat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		-	0,00	KECAMATAN HULU SUNGKAI
		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH						**2.141.892.954,34**							**2.118.437.354,34**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.116.232.954,34**							**2.118.437.354,34**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.116.232.954,34**							**2.118.437.354,34**	
368.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.961.253.604,34**							**1.922.227.229,34**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.961.253.604,34***							***1.918.627.229,34***	
			1.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.8-67 Nilai	67-67.2 Nilai	1.961.253.604,34						67.4-67.4 Nilai	1.918.627.229,34	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.927.700,00					-		4.800.000,00	
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.927.700,00					-		4.800.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	949.600,00						1 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.043.500,00						2 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.039.000,00						1 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	895.600,00						1 Laporan	1.200.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.043.500,00							1.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.043.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.039.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.039.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						949.600,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	949.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						895.600,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	895.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.770.350.477,34					ASN KECAMATAN		1.764.370.029,34	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.770.350.477,34					ASN KECAMATAN		1.764.370.029,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.920.000,00						1 Dokumen	65.320.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		23 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.711.430.477,34						25 Orang/bulan	1.699.050.029,34	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.711.430.477,34							1.699.050.029,34	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.711.430.477,34	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Orang/bulan	1.699.050.029,34	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						58.920.000,00							65.320.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	58.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	65.320.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.130.127,00					seluruh pegawai kecamatan		49.237.200,00	
		Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.130.127,00					seluruh pegawai kecamatan		49.237.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	11.302.900,00						3 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	9.520.900,00						3 Paket	15.569.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	7.563.000,00						3 Paket	16.678.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	2 Paket	6.420.500,00						2 Paket	6.464.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	2 Paket	11.322.827,00						2 Paket	1.524.900,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.420.500,00							6.464.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	20 Paket	6.420.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	6.464.800,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.322.827,00							1.524.900,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	25 Paket	11.322.827,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	1.524.900,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.520.900,00							15.569.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	4 Paket	9.520.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	15.569.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.563.000,00							16.678.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	7.563.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	16.678.500,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.302.900,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.302.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.000.000,00					seluruh pegawai kecamatan		10.000.000,00	
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.000.000,00					seluruh pegawai kecamatan		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	2 Unit	7.000.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.336.300,00					seluruh pegawai kecamatan		67.386.000,00	
		Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.336.300,00					seluruh pegawai kecamatan		67.386.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.400.000,00						3 Laporan	6.886.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	72.936.300,00						3 Laporan	60.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.400.000,00							6.886.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	6.886.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.936.300,00							60.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	72.936.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	60.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.509.000,00					seluruh pegawai kecamatan		26.434.000,00	
		Terwujudnaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.509.000,00					seluruh pegawai kecamatan		26.434.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		3 Unit	3 Unit	37.020.000,00						3 Unit	6.582.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							6.582.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		3 Unit	2 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	6.582.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
		Terwujudnaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.509.000,00					seluruh pegawai kecamatan		26.434.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	18.489.000,00						-	19.852.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.489.000,00							19.852.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	18.489.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.852.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
369.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**45.205.350,00**							**56.276.817,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***45.205.350,00***							***56.276.817,00***	
			2.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85 %		83 %	83 %	45.205.350,00						84 %	56.276.817,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.050.000,00					masyarakat kecamatan		23.355.000,00	
		Telaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.050.000,00					masyarakat kecamatan		23.355.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.050.000,00						3 Dokumen	23.355.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.050.000,00							23.355.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	11.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		3 Dokumen	23.355.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						23.867.250,00					Camat dan aparat desa		22.261.500,00	
		Tercapaianya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						23.867.250,00					Camat dan aparat desa		22.261.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.485.300,00						1 Laporan	9.567.800,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.381.950,00						1 Laporan	12.693.700,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						10.485.300,00							9.567.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.485.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	9.567.800,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.381.950,00							12.693.700,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.381.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	12.693.700,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.288.100,00					camat		10.660.317,00	
		Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kapada camat						10.288.100,00					camat		10.660.317,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.062.200,00						1 Dokumen	5.330.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.225.900,00						1 Laporan	5.330.317,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.062.200,00							5.330.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.062.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.330.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.225.900,00							5.330.317,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.225.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	5.330.317,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
370.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**39.986.000,00**							**82.983.800,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***34.986.000,00***							***82.983.800,00***	
			3.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		82 %	82 %	34.986.000,00						84 %	82.983.800,00	
		Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.429.500,00					masyarakat kecamatan		31.635.300,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	23.910.300,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							23.910.300,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	23.910.300,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.500.000,00					masyarakat kecamatan		18.763.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	868.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						2.500.000,00							868.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	868.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						18.056.500,00					masyarakat kecamatan		32.585.000,00	
		Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						18.056.500,00					masyarakat kecamatan		32.585.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	10.055.000,00						30 Keluarga	7.755.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	32 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	2.500.000,00						30 Keluarga	9.730.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	33 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	2.100.000,00						30 Keluarga	7.800.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	3.401.500,00						32 Keluarga	7.300.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						10.055.000,00							7.755.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32 Keluarga		30 Keluarga	16 Keluarga	10.055.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		30 Keluarga	7.755.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						2.500.000,00							9.730.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	32 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	2.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		30 Keluarga	9.730.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						3.401.500,00							7.300.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	3.401.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		32 Keluarga	7.300.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						2.100.000,00							7.800.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	33 Keluarga		30 Keluarga	16 Keluarga	2.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		30 Keluarga	7.800.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.429.500,00					masyarakat kecamatan		31.635.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.429.500,00					masyarakat kecamatan		31.635.300,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	16.929.500,00						-	7.725.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16.929.500,00							7.725.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.929.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	7.725.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.500.000,00					masyarakat kecamatan		18.763.500,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.500.000,00					masyarakat kecamatan		18.763.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	17.895.500,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							17.895.500,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	17.895.500,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
371.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.226.800,00**							**15.500.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***6.226.800,00***							***15.500.000,00***	
			4.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.226.800,00						100 %	15.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.226.800,00					Masyarakat		15.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						6.226.800,00					Masyarakat		15.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.226.800,00						2 Laporan	15.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.226.800,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	6.226.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	15.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
372.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**58.561.200,00**							**28.649.508,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***58.561.200,00***							***28.649.508,00***	
			4.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	58.561.200,00						100 %	28.649.508,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						58.561.200,00					camat		28.649.508,00	
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						58.561.200,00					camat		28.649.508,00	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	8.172.758,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.961.200,00						1 Dokumen	20.476.750,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32 Orang		30 Orang	30 Orang	37.200.000,00						30 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						37.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32 Orang		30 Orang	100 Orang	37.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang	0,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						5.000.000,00							8.172.758,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	8.172.758,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.961.200,00							20.476.750,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.961.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	20.476.750,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						58.561.200,00					camat		28.649.508,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	5.400.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						5.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	50 Orang	5.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
373.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**12.800.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***5.000.000,00***							***6.400.000,00***	
			5.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	87 %		84 %	84 %	5.000.000,00						85 %	6.400.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Aprat desa terkait		12.800.000,00	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						5.000.000,00					Aprat desa terkait		12.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						3 Laporan	6.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00						3 Laporan	6.400.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	6.400.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						0,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Tengah || Desa Batu Nangkop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	6.400.000,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
	X							**25.660.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**25.660.000,00**							**0,00**	
374.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.660.000,00**							**0,00**	
			1.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	67-67.2 Nilai	25.660.000,00						-	0,00	
			Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	66.8-67 NILAI	25.660.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.660.000,00					seluruh pegawai kecamatan		0,00	
		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.660.000,00					seluruh pegawai kecamatan		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	25.660.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.660.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	25.660.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
		KECAMATAN ABUNG PEKURUN						**2.389.000.773,14**							**2.405.455.359,14**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.389.000.773,14**							**2.405.455.359,14**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.389.000.773,14**							**2.405.455.359,14**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
375.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.261.504.193,14**							**2.290.479.973,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.261.504.193,14***							***2.290.479.973,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		69-67 Nilai	67-67.2 Nilai	2.261.504.193,14						67.2-67.4 Nilai	2.290.479.973,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.083.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		6.083.000,00	
		terlaksananya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						6.083.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		6.083.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.353.000,00						2 Dokumen	3.353.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.190.000,00						2 Dokumen	1.190.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.540.000,00						2 Dokumen	1.540.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.353.000,00							3.353.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.353.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.353.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.540.000,00							1.540.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.540.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.540.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.190.000,00							1.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.190.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	1.190.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.093.802.543,14					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		2.107.276.623,00	
		terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.093.802.543,14					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		2.107.276.623,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.120.000,00						12 Dokumen	60.120.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.033.682.543,14						23 Orang/bulan	2.047.156.623,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.033.682.543,14							2.047.156.623,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.033.682.543,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		23 Orang/bulan	2.047.156.623,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						60.120.000,00							60.120.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	60.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	60.120.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.242.900,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		53.136.600,00	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						41.242.900,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		53.136.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00						12 Laporan	12.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		3 Paket	3 Paket	17.033.800,00						6 Paket	12.116.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.734.300,00						12 Paket	11.791.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.674.800,00						2 Paket	16.469.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.734.300,00							11.791.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	11.734.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	11.791.500,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.674.800,00							16.469.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	10.674.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	16.469.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.033.800,00							12.116.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		3 Paket	4 Paket	17.033.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	12.116.100,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.800.000,00							12.760.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	12.760.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						535.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						535.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	535.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						535.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	535.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.280.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		65.290.000,00	
		tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor						77.280.000,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		65.290.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	2.890.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.280.000,00						12 Laporan	62.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000,00							2.890.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	2.890.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						74.280.000,00							62.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.280.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	62.400.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksanaya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara						42.560.750,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		43.693.750,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	37.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.330.000,00						4 Unit	3.330.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							37.020.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.020.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.330.000,00							3.330.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	3.330.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	3.330.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.560.750,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		43.693.750,00	
		terlaksanaya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara						42.560.750,00					BPKAD ,BAPPEDA, ASN KECAMATAN DAN INSTANSI TERKAIT KECAMATAN		43.693.750,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.210.750,00						-	3.343.750,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.210.750,00							3.343.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.210.750,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.343.750,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
376.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**29.635.500,00**							**19.931.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***29.635.500,00***							***19.931.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	90 %		80 %	85 %	29.635.500,00						85 %	19.931.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						22.249.900,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		12.386.000,00	
		nilai kepuasan layanan kecamatan						22.249.900,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		12.386.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.200.000,00						4 Laporan	5.773.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.049.900,00						4 Laporan	6.612.500,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.200.000,00							5.773.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	3.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	5.773.500,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						19.049.900,00							6.612.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.049.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	6.612.500,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.385.600,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		7.545.000,00	
		terlaksananya realisasi kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat						7.385.600,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		7.545.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.529.500,00						1 Dokumen	2.670.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.856.100,00						1 Laporan	4.875.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						2.529.500,00							2.670.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.529.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	2.670.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						4.856.100,00							4.875.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.856.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	4.875.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
377.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**34.713.580,00**							**40.599.986,14**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***32.713.580,00***							***35.599.986,14***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	67.8 %		67 %	67.2 %	32.713.580,00						67.4 %	35.599.986,14	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.550.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		18.099.986,14	
		terlaksananya pelaksanaaan kegiatan pemberdayaan desa						13.550.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		18.099.986,14	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	15.600.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.300.000,00							15.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Lembaga Kemasyarakatan	15.600.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		5.000.000,00	
		terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa						2.000.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						2.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
		terlaksananya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamtan kelurahan						19.163.580,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		17.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	7.700.000,00						10 Keluarga	5.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						7.700.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	7.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		10 Keluarga	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
		terlaksananya pelaksanaaan kegiatan pemberdayaan desa						13.550.000,00					MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA		18.099.986,14	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	6.250.000,00						-	2.499.986,14	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.250.000,00							2.499.986,14	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	3 Laporan	6.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.499.986,14	KECAMATAN ABUNG PEKURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						19.163.580,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		17.500.000,00	
		terlaksananya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamtan kelurahan						19.163.580,00					MASYARAKAT DESA DAN KECAMATAN		17.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	6.463.580,00						-	5.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	3.000.000,00						-	4.800.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						6.463.580,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	15 Keluarga	6.463.580,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	5.200.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	15 Keluarga	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						3.000.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	15 Keluarga	3.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	4.800.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
378.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**17.500.000,00**							**15.000.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***17.500.000,00***							***15.000.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	17.500.000,00						100 %	15.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.500.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		5.000.000,00	
		terlaksananya peningkatan keamanan dan ketertiban umum						7.500.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						10.000.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya capaian koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						10.000.000,00					LINMAS , KORAMIL , DANRAMIL DAN POLSEK DAN MASYARAKAT		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
379.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.700.000,00**							**18.850.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***25.700.000,00***							***18.850.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	25.700.000,00						100 %	18.850.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.700.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		18.850.000,00	
		terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah						25.700.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		18.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.350.000,00						12 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.350.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	7.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah						25.700.000,00					MASYARAKAT ,LEMBAGA DAN INSTANSI DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		18.850.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	7.150.000,00						-	4.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	11.200.000,00						-	6.200.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						11.200.000,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	30 Orang	11.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.200.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						7.150.000,00							4.650.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	15 Orang	7.150.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.650.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
380.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**19.947.500,00**							**20.594.400,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***19.947.500,00***							***20.594.400,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		80 %	80 %	19.947.500,00						80 %	20.594.400,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						19.947.500,00					APARATUR DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		20.594.400,00	
		terlaksananya kegiatan pembinaan dan pegawasan desa						19.947.500,00					APARATUR DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN		20.594.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	13.447.500,00						2 Dokumen	14.094.400,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00						4 Dokumen	6.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						13.447.500,00							14.094.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	13.447.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Pekurun || Desa Pekurun Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	14.094.400,00	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
		KECAMATAN SUNGKAI JAYA						**2.066.452.540,14**							**1.953.273.427,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.066.452.540,14**							**1.953.273.427,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.066.452.540,14**							**1.953.273.427,00**	
381.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.891.887.040,14**							**1.862.443.052,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.890.887.040,14***							***1.795.943.052,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.72-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	1.890.887.040,14						67-67.2 Nilai	1.795.943.052,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.130.000,00					-		10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						3.130.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.130.000,00						2 Dokumen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cahaya Makmur || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.130.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.130.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Barat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.588.873.260,14					-		1.520.354.252,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.588.873.260,14					-		1.520.354.252,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.520.000,00						1 Dokumen	37.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		17 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.515.353.260,14						20 Orang/bulan	1.482.954.252,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.515.353.260,14							1.482.954.252,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.515.353.260,14	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang/bulan	1.482.954.252,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						73.520.000,00							37.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	73.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	37.400.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.729.580,00					-		111.000.000,00	
		Terlasananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.729.580,00					-		111.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	37.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	29.457.500,00						2 Paket	29.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.162.000,00						2 Paket	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.110.080,00						2 Paket	29.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.162.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.162.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.110.080,00							29.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.110.080,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Lepang Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	29.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.457.500,00							29.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	29.457.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Lepang Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	29.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						107.614.700,00					-		73.500.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.614.700,00					-		73.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.594.700,00						1 Unit	16.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.000.000,00						1 Unit	19.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						66.594.700,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.594.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	16.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	19.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.000.000,00					-		101.588.800,00	
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Kantor						84.000.000,00					-		101.588.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.200.000,00						4 Laporan	3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.800.000,00						4 Laporan	97.988.800,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Lepang Tengah || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						79.800.000,00							97.988.800,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	97.988.800,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.539.500,00					-		46.000.000,00	
		Terkasananya Barang Milik Daerah Yang Dipelihara						42.539.500,00					-		46.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.542.500,00						2 Unit	18.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	14.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	22.997.000,00						4 Unit	14.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	9 Unit	0,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.997.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	2 Unit	22.997.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.542.500,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.542.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.614.700,00					-		73.500.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	37.020.000,00						-	38.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							38.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.500.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
382.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**25.100.000,00**							**16.830.375,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***25.100.000,00***							***16.830.375,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	80 %		75 %	75 %	25.100.000,00						75 %	16.830.375,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.100.000,00					RT, Perangkat Desa, Polri, TNI, UPTD Se-Kecamatan Sungkai Jaya		16.830.375,00	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						25.100.000,00					RT, Perangkat Desa, Polri, TNI, UPTD Se-Kecamatan Sungkai Jaya		16.830.375,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.400.000,00						2 Dokumen	8.415.188,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.700.000,00						2 Laporan	8.415.187,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						14.700.000,00							8.415.187,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	8.415.187,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.400.000,00							8.415.188,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	8.415.188,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
383.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.700.000,00**							**32.000.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***56.200.000,00***							***12.000.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		75 %	75 %	56.200.000,00						75 %	12.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						17.500.000,00					BPD,LPM,,Karang Taruna,PKK dan Posyandu		7.000.000,00	
		Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa						17.500.000,00					BPD,LPM,,Karang Taruna,PKK dan Posyandu		7.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.500.000,00							7.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		Tersedianya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						14.900.000,00					Musrenbang Desa dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.900.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						14.900.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						31.300.000,00					onsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bersama Dinas Ketahanan pangan		15.000.000,00	
		Tersedianya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan						31.300.000,00					onsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bersama Dinas Ketahanan pangan		15.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	16.300.000,00						10 Keluarga	5.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						16.300.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	16.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		10 Keluarga	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						14.900.000,00					Musrenbang Desa dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan		10.000.000,00	
		Tersedianya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						14.900.000,00					Musrenbang Desa dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		Tersedianya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan						31.300.000,00					onsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bersama Dinas Ketahanan pangan		15.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	7.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	7.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	10 Keluarga	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	0 Keluarga	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
384.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**32.400.000,00**							**14.000.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***32.400.000,00***							***7.000.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	32.400.000,00						100 %	7.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.400.000,00					Kampanye anti hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme bersama kesbangpol, polsek dan koramil		14.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah						32.400.000,00					Kampanye anti hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme bersama kesbangpol, polsek dan koramil		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						15.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah						32.400.000,00					Kampanye anti hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme bersama kesbangpol, polsek dan koramil		14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	17.400.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						17.400.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	40 Orang	17.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Cempaka Timur || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
385.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**53.365.500,00**							**28.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***53.365.500,00***							***7.000.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	80 %		75 %	75 %	53.365.500,00						75 %	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
		Terlaksananya Dokumen Yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.400.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	16.204.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.412.500,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
		Terlaksananya Jumlah Dokumen yang diFasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.400.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	16.204.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.412.500,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
		Terselenggaranya Dokumen Fasilitasi Pelaksaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.400.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	16.204.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.412.500,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						16.204.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	16.204.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Suka Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						13.412.500,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	13.412.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Sri Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						11.400.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	11.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Negara Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		Terlaksananya Dokumen Yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	12.349.000,00						-	7.000.000,00	
		Terlaksananya Jumlah Dokumen yang diFasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	12.349.000,00						-	7.000.000,00	
		Terselenggaranya Dokumen Fasilitasi Pelaksaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						53.365.500,00					Pengelolaan Keuangan Desa bersama Inspektorat dan BPKAD		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	12.349.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.349.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	12.349.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Jaya || Desa Suka Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	7.000.000,00	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
		KECAMATAN SUNGKAI BARAT						**2.510.784.570,84**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.510.784.570,84**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.510.784.570,84**							**0,00**	
386.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.385.906.320,84**							**0,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.385.906.320,84***							***0,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.72-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	2.385.906.320,84						67-67.2 Nilai	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.765.300,00					-		0,00	
		tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah						7.765.300,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.889.600,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.007.200,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.670.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.197.700,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.007.200,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.007.200,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.670.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.670.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.889.600,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.889.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.197.700,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.197.700,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.182.995.220,84					-		0,00	
		terlaksananya administrasi perangkat daerah						2.182.995.220,84					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.840.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.123.155.220,84						23 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.123.155.220,84							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.123.155.220,84	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		23 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.840.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.154.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.154.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.600.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	10.029.400,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	4.501.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	5.467.500,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	2.556.900,00						3 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.501.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	4.501.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.467.500,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	5.467.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.556.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	2.556.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.029.400,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	4 Paket	10.029.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	3 Paket	7.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.700.000,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.700.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	39.700.000,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	39.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.005.000,00					-		0,00	
		Tersedianya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						58.005.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.005.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.005.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.005.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						45.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.286.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.286.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	2 Unit	10.366.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.366.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	2 Unit	10.366.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.286.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	12.900.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	12.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
387.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**29.144.350,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***29.144.350,00***							***0,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	86 %		83 %	83 %	29.144.350,00						84 %	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.399.900,00					-		0,00	
		Nilai kepuasan layanan kecamatan (Nilai)						6.399.900,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.399.900,00						2 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.399.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.399.900,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						12.857.950,00					-		0,00	
		Telaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.857.950,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.894.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.963.950,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						4.894.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.894.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.963.950,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.963.950,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Gunung Maknibai || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Negeri Batin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Cahaya Mas || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.886.500,00					-		0,00	
		Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kapada camat						9.886.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.036.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.850.000,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.036.500,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.036.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						4.850.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.850.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
388.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**49.045.300,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***49.045.300,00***							***0,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %		88 %	89 %	49.045.300,00						89 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21.010.000,00					-		0,00	
		Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21.010.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.663.000,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.663.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.663.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Negeri Batin Jaya || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Kubu Hitu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Gunung Maknibai || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						4.160.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						4.160.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.160.000,00						2 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.160.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						23.875.300,00					-		0,00	
		Tercapainaya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						23.875.300,00					-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	31 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	10.473.600,00						30 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	22 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	4.359.600,00						20 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	23 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	4.438.100,00						21 Keluarga	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	4.604.000,00						20 Keluarga	0,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						10.473.600,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	31 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	10.473.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Keluarga	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						4.359.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	22 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	4.359.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 Keluarga	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						4.604.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21 Keluarga		20 Keluarga	30 Keluarga	4.604.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Tanjung Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		20 Keluarga	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						4.438.100,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	23 Keluarga		20 Keluarga	30 Keluarga	4.438.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Kubu Hitu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		21 Keluarga	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
		Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21.010.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	17.347.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.347.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	10 Lembaga Kemasyarakatan	17.347.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Sungkai Barat || Desa Sinar Harapan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
389.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.750.000,00**							**0,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***6.750.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.750.000,00						100 %	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.750.000,00					-		0,00	
		Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						6.750.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	6.750.000,00						3 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.750.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
390.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**27.438.600,00**							**0,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***27.438.600,00***							***0,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	27.438.600,00						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.438.600,00					-		0,00	
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.438.600,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26 Orang		25 Orang	25 Orang	22.438.600,00						25 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						22.438.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26 Orang		25 Orang	50 Orang	22.438.600,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Orang	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						0,00							0,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
		berjalannya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.438.600,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	6 Orang	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
391.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.500.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***12.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	100 %		100 %	100 %	12.500.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.500.000,00					-		0,00	
		Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	0,00	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
		Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
		KECAMATAN ABUNG KUNANG						**1.947.326.055,96**							**2.451.332.359,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.947.326.055,96**							**2.451.332.359,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.947.326.055,96**							**2.451.332.359,00**	
392.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.799.047.225,96**							**2.351.158.922,00**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.799.047.225,96***							***2.312.908.922,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.9-67 Nilai	67-67.2 Nilai	1.799.047.225,96						67.2-67.4 Nilai	2.312.908.922,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.944.100,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		27.400.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.944.100,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		27.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.962.900,00						1 Dokumen	2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.851.000,00						2 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.313.000,00						1 Dokumen	2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	834.400,00						1 Dokumen	2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	835.000,00						1 Dokumen	2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.432.500,00						4 Laporan	4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.715.300,00						4 Laporan	6.200.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.851.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.851.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						835.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	835.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.750.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						834.400,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	834.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.750.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.962.900,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.962.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.750.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.313.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.313.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.750.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.432.500,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.432.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	4.200.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.715.300,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.715.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.200.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.584.670.451,96					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		1.907.818.922,00	
		Tersusunnya kinerja laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.584.670.451,96					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		1.907.818.922,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	66.920.000,00						4 Dokumen	180.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.517.750.451,96						26 Orang/bulan	1.727.718.922,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.517.750.451,96							1.727.718.922,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		25 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.517.750.451,96	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		26 Orang/bulan	1.727.718.922,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						66.920.000,00							180.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	66.920.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	180.100.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57.733.324,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		158.900.000,00	
		Tercapainya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						57.733.324,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		158.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.226.900,00						4 Paket	45.100.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.768.800,00						4 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.951.500,00						1 Paket	12.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.427.200,00						1 Paket	22.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.758.924,00						1 Paket	23.600.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.951.500,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.951.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	12.600.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.427.200,00							22.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.427.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	22.600.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.758.924,00							23.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.758.924,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	23.600.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.226.900,00							45.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.226.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	45.100.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.768.800,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.768.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.600.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						51.472.350,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		70.000.000,00	
		Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						51.472.350,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	36.072.350,00						5 Unit	40.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.072.350,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	36.072.350,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.496.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		50.000.000,00	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.496.000,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00						12 Laporan	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.096.000,00						12 Laporan	37.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.400.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.096.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.096.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	37.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.731.000,00					-		137.040.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.731.000,00					-		137.040.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00						2 Unit	52.040.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	8.691.000,00						2 Unit	85.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.040.000,00							52.040.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.040.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	52.040.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.691.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	8.691.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	85.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
		Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						51.472.350,00					BPKAD,BAPPEDA, ASN KECAMATAN		70.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.400.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.400.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	15.400.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
393.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**39.723.100,00**							**25.843.350,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***28.043.300,00***							***19.343.350,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	91.50 %		87.45 %	88.80 %	28.043.300,00						90.15 %	19.343.350,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.424.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		5.343.350,00	
		Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.424.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN		5.343.350,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.424.000,00						2 Dokumen	5.343.350,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.424.000,00							5.343.350,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.424.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	5.343.350,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						19.619.300,00					MASYARAKAT KECAMATAN		14.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						19.619.300,00					MASYARAKAT KECAMATAN		14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.789.500,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.372.000,00						1 Laporan	7.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						3.789.500,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.789.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.372.000,00							7.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.372.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
			Nilai kepuasan layanan kecamatan (%)	-		-	88,8 NILAI	11.679.800,00						-	6.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						19.619.300,00					MASYARAKAT KECAMATAN		14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	8.457.800,00						-	4.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						8.457.800,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	8.457.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	4.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.679.800,00					MASYARAKAT KECAMATAN		6.500.000,00	
		-						11.679.800,00					MASYARAKAT KECAMATAN		6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	-	5.400.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	6.279.800,00						-	4.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.400.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.279.800,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	1 Laporan	6.279.800,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	4.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
394.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**35.612.130,00**							**31.770.047,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***27.763.500,00***							***26.770.047,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %		82 %	84 %	27.763.500,00						86 %	26.770.047,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12.002.500,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		15.570.047,00	
		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaan pemberdayaan desa						12.002.500,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		15.570.047,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.503.300,00						7 Laporan	12.570.047,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.503.300,00							12.570.047,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	4 Laporan	5.503.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		7 Laporan	12.570.047,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
		Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga						15.761.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		13.700.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	5.356.000,00						5 Keluarga	6.700.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						5.356.000,00							6.700.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	24 Keluarga	5.356.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Keluarga	6.700.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
			-	-		-	-	7.848.630,00						-	2.500.000,00	
		Terpenuhinya kegiatan pelaksanaan pemberdayaan desa						12.002.500,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		15.570.047,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	6.499.200,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						6.499.200,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.499.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	3.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7.848.630,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		2.500.000,00	
		-						7.848.630,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	7.848.630,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						7.848.630,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	7.848.630,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						15.761.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		13.700.000,00	
		Tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga						15.761.000,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		13.700.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	5.020.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	-	3.035.000,00						-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	-	2.350.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						5.020.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		-	24 Keluarga	5.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		-	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						2.350.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	24 Keluarga	2.350.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		-	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						3.035.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-		-	24 Keluarga	3.035.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		-	2.500.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
395.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**11.493.600,00**							**6.010.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***11.493.600,00***							***6.010.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	11.493.600,00						100 %	6.010.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						11.493.600,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		6.010.000,00	
		Tercapainya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						11.493.600,00					MASYARAKAT KECAMATAN DAN DESA		6.010.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.493.600,00						4 Laporan	6.010.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						11.493.600,00							6.010.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.493.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.010.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
396.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**54.350.000,00**							**26.550.040,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***54.350.000,00***							***26.550.040,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	54.350.000,00						100 %	26.550.040,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.350.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		26.550.040,00	
		Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						54.350.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		26.550.040,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000,00						12 Dokumen	11.450.040,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.400.000,00							11.450.040,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	10.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	11.450.040,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
		Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						54.350.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		26.550.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	10.250.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	33.700.000,00						-	3.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						33.700.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	24 Orang	33.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.100.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						10.250.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	24 Orang	10.250.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
397.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**7.100.000,00**							**10.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***7.100.000,00***							***5.000.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	88 %		82 %	84 %	7.100.000,00						85 %	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.100.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		10.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan desa						7.100.000,00					APARATUR DESA DAN KECAMATAN		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						2.100.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Kunang || Desa Aji Kagungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG KUNANG
		KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR						**2.435.442.854,90**							**2.482.942.254,90**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.435.442.854,90**							**2.482.942.254,90**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.435.442.854,90**							**2.482.942.254,90**	
398.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.294.813.354,90**							**2.298.450.654,90**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***2.294.813.354,90***							***2.292.950.654,90***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.6-67.8 Nilai		66.8-67 Nilai	67-67.1 Nilai	2.294.813.354,90						67.1-67.4 Nilai	2.292.950.654,90	
		tersusunnya dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja						13.262.300,00					Pegawai Kecamatan		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.806.800,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.540.600,00						1 Dokumen	500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.806.800,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	8.806.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.540.600,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.540.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.102.140.454,90					Pegawai Kecamatan		2.115.620.354,00	
		Terlaksananya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						2.102.140.454,90					Pegawai Kecamatan		2.115.620.354,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.520.000,00						1 Dokumen	81.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.034.620.454,90						25 Orang/bulan	2.034.620.354,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.034.620.454,90							2.034.620.354,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.034.620.454,90	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25 Orang/bulan	2.034.620.354,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						67.520.000,00							81.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	67.520.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	81.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.031.600,00					Pegawai Kecamatan		49.922.650,00	
		Terwujudnya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						25.031.600,00					Pegawai Kecamatan		49.922.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.740.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	4.500.000,00						50 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	9.861.900,00						40 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	4.929.700,00						40 Paket	7.922.650,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.861.900,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	2 Paket	9.861.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.929.700,00							7.922.650,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	3 Paket	4.929.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Paket	7.922.650,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	3 Paket	4.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.740.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	5.740.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.568.500,00					Pegawai Kecamatan		72.537.650,90	
		Terlaksananya Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						99.568.500,00					Pegawai Kecamatan		72.537.650,90	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.853.500,00						12 Laporan	7.615.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	69.720.000,00						40 Laporan	58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.995.000,00						1 Laporan	6.922.650,90	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.853.500,00							7.615.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	6.853.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	7.615.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.995.000,00							6.922.650,90	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	22.995.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	6.922.650,90	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						69.720.000,00							58.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		40 Laporan	2 Laporan	69.720.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Laporan	58.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.810.500,00					-		54.370.000,00	
		Terwujudny Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						54.810.500,00					-		54.370.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	37.370.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.060.000,00						3 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							37.370.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	37.370.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.060.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.262.300,00					Pegawai Kecamatan		6.000.000,00	
		tersusunnya dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja						13.262.300,00					Pegawai Kecamatan		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.914.900,00						-	500.000,00	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.914.900,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.914.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
		Terwujudny Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						54.810.500,00					-		54.370.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	13.730.500,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.730.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	13.730.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
399.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**39.205.500,00**							**67.601.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***14.205.500,00***							***37.601.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	90 %		85 %	87 %	14.205.500,00						87 %	37.601.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.812.500,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		7.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit jerja Perangkat Daerah yang ad di kecamatan						3.812.500,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.812.500,00						1 Laporan	7.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.812.500,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.812.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.393.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		30.101.000,00	
		Terlaksananya Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						10.393.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		30.101.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.393.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	15.101.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.393.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.393.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.000.000,00							15.101.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	15.101.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
			-	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		-	30.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
400.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**33.884.000,00**							**47.200.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***33.884.000,00***							***21.700.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80.2 %		78.5 %	79 %	33.884.000,00						79.5 %	21.700.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		10.000.000,00	
		Tersedianya Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						7.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.300.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12.469.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		10.000.000,00	
		Terlaksananya Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						12.469.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.469.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						12.469.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.469.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						14.115.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		27.200.000,00	
		Terlaksananya Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						14.115.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		27.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	2.940.000,00						30 Keluarga	6.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga		30 Keluarga	35 Keluarga	3.100.000,00						35 Keluarga	10.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	3.975.000,00						30 Keluarga	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	4.100.000,00						30 Keluarga	5.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.940.000,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	2.940.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		30 Keluarga	6.200.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						3.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga		30 Keluarga	30 Keluarga	3.100.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		35 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						4.100.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga		30 Keluarga	50 Keluarga	4.100.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Keluarga	5.500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						3.975.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga		30 Keluarga	50 Keluarga	3.975.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Keluarga	5.500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
401.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**12.500.000,00**							**27.845.300,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***12.500.000,00***							***27.845.300,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	12.500.000,00						100 %	27.845.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.500.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		27.845.300,00	
		Tersedianya terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						12.500.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		27.845.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00						1 Laporan	27.845.300,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12.500.000,00							27.845.300,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	27.845.300,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
402.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**43.100.000,00**							**33.845.300,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***43.100.000,00***							***33.845.300,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	43.100.000,00						100 %	33.845.300,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						43.100.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		33.845.300,00	
		Tersedianya Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						43.100.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		33.845.300,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.700.000,00						1 Dokumen	27.845.300,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						16.700.000,00							27.845.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.700.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	27.845.300,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
		Tersedianya Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						43.100.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		33.845.300,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	15.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	11.200.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						11.200.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	24 Orang	11.200.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						15.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	24 Orang	15.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Blambangan Pagar || Desa Blambangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
403.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**11.940.000,00**							**8.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***11.940.000,00***							***5.000.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85.5 %		82.5 %	83.5 %	11.940.000,00						84.5 %	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						11.940.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		8.000.000,00	
		Terlaksananya Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						11.940.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.590.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						5.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.590.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.590.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
		Terlaksananya Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						11.940.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	4.350.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.350.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	4.350.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	3.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
		KECAMATAN ABUNG TENGAH						**2.015.578.145,64**							**2.020.536.245,64**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.015.578.145,64**							**2.020.536.245,64**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.015.578.145,64**							**2.020.536.245,64**	
404.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.747.361.145,64**							**1.786.298.245,64**	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						***1.739.361.145,64***							***1.778.298.245,64***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67.4-67.6 Nilai		66.72-66.8 Nilai	66.8-67 Nilai	1.739.361.145,64						67-67.2 Nilai	1.778.298.245,64	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.562.575.745,64					-		1.562.573.945,64	
		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.562.575.745,64					-		1.562.573.945,64	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.840.000,00						12 Dokumen	69.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.492.735.745,64						22 Orang/bulan	1.492.733.945,64	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.492.735.745,64							1.492.733.945,64	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.492.735.745,64	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		22 Orang/bulan	1.492.733.945,64	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						69.840.000,00							69.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	69.840.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	69.840.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.885.400,00					-		69.438.800,00	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.885.400,00					-		69.438.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00						12 Laporan	32.980.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.330.900,00						2 Paket	10.567.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	18.316.000,00						3 Paket	15.260.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.738.500,00						12 Paket	10.631.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.738.500,00							10.631.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.738.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	10.631.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.330.900,00							10.567.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	9.330.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	10.567.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.316.000,00							15.260.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	18.316.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	15.260.800,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.500.000,00							32.980.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	32.980.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.500.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.500.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.500.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	9.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.380.000,00					-		69.800.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor						67.380.000,00					-		69.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.180.000,00						12 Laporan	6.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00						12 Laporan	63.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.180.000,00							6.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	6.180.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	6.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61.200.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	61.200.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	63.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.020.000,00					-		49.485.500,00	
		Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara						37.020.000,00					-		49.485.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00						1 Unit	49.485.500,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.020.000,00							49.485.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	49.485.500,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.500.000,00					-		25.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.500.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
405.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**61.400.000,00**							**72.975.000,00**	
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik						***34.400.000,00***							***28.825.000,00***	
			999.Nilai kepuasan layanan kecamatan	85 %		85 %	85 %	34.400.000,00						85 %	28.825.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.695.000,00					-		15.325.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.695.000,00					-		15.325.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.695.000,00						2 Dokumen	15.325.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.695.000,00							15.325.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	11.695.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	15.325.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						22.705.000,00					-		30.650.000,00	
		Terselenggaranya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan						22.705.000,00					-		30.650.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.205.000,00						4 Laporan	15.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.500.000,00						4 Laporan	15.325.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						9.205.000,00							15.325.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	9.205.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	15.325.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.500.000,00							15.325.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Laporan	15.325.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						27.000.000,00					-		27.000.000,00	
		Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan						27.000.000,00					-		27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000,00						2 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.500.000,00						2 Laporan	13.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						13.500.000,00							13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Dokumen	13.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						13.500.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Laporan	13.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
406.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**85.316.000,00**							**88.000.000,00**	
		Meningkatnya Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***64.916.000,00***							***47.600.000,00***	
			999.Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85 %		80 %	80 %	64.916.000,00						85 %	47.600.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						23.596.000,00					-		20.800.000,00	
		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan						23.596.000,00					-		20.800.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.596.000,00						1 Laporan	10.800.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.596.000,00							10.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	13.596.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan	10.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						34.520.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						27.200.000,00					-		27.200.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						27.200.000,00					-		27.200.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	5 Keluarga	6.800.000,00						5 Keluarga	6.800.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	6.800.000,00						2 Keluarga	6.800.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	6.800.000,00						2 Keluarga	6.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2 Keluarga		2 Keluarga	2 Keluarga	6.800.000,00						2 Keluarga	6.800.000,00	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						6.800.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga		5 Keluarga	11 Keluarga	6.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		5 Keluarga	6.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						6.800.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Keluarga		2 Keluarga	11 Keluarga	6.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul, Produktif, Dan Berdaya Saing		2 Keluarga	6.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						6.800.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2 Keluarga		2 Keluarga	11 Keluarga	6.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		2 Keluarga	6.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						6.800.000,00							6.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2 Keluarga		2 Keluarga	11 Keluarga	6.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi		2 Keluarga	6.800.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan						23.596.000,00					-		20.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						34.520.000,00					-		40.000.000,00	
		terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						34.520.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	14.520.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						14.520.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.520.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
407.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**17.887.000,00**							**15.363.000,00**	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum						***17.887.000,00***							***15.363.000,00***	
			999.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	17.887.000,00						100 %	15.363.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.887.000,00					-		15.363.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum						17.887.000,00					-		15.363.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.887.000,00						12 Laporan	15.363.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						17.887.000,00							15.363.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	17.887.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	15.363.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
408.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**61.300.000,00**							**24.500.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang baik						***61.300.000,00***							***19.500.000,00***	
			999.Persentase tingkat partisipasi fokopimcam dalam deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan	100 %		100 %	100 %	61.300.000,00						100 %	19.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						61.300.000,00					-		24.500.000,00	
		terlaksananya urusan Pemerintahan Umum yang baik						61.300.000,00					-		24.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.500.000,00						12 Dokumen	14.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						14.500.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	14.500.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		terlaksananya urusan Pemerintahan Umum yang baik						61.300.000,00					-		24.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	13.700.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	33.100.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						33.100.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	33.100.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						13.700.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	13.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
409.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**42.314.000,00**							**33.400.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***32.314.000,00***							***33.400.000,00***	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	85 %		85 %	85 %	32.314.000,00						85 %	33.400.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42.314.000,00					-		33.400.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan pemerintahan Desa						42.314.000,00					-		33.400.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.984.000,00						4 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						8.984.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	8.984.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Tengah || Desa Gunung Besar || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan pemerintahan Desa						42.314.000,00					-		33.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	13.330.000,00						-	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	5.400.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						10.000.000,00							5.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.400.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						13.330.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	13.330.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	KECAMATAN ABUNG TENGAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**10.785.516.676,84**							**11.284.075.376,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**10.785.516.676,84**							**11.284.075.376,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**10.785.516.676,84**							**11.284.075.376,00**	
410.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.749.155.676,84**							**3.770.383.376,00**	
		Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan						***3.674.155.676,84***							***3.685.383.376,00***	
			999.Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75-75 Nilai		66-67 Nilai	67-73 Nilai	3.674.155.676,84						73-74 Nilai	3.685.383.376,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		45.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan						45.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		45.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	5.000.000,00						0 Berita Acara	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	0 Data	5.000.000,00						0 Data	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00						0 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kotabumi Udik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		0 Data	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		0 Berita Acara	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		0 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.006.012.176,84					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		2.951.793.376,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia nya Dokumen Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.006.012.176,84					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		2.951.793.376,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169.680.000,00						1 Dokumen	122.920.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.826.332.176,84						31 Orang/bulan	2.818.873.376,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.826.332.176,84							2.818.873.376,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.826.332.176,84	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		31 Orang/bulan	2.818.873.376,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						169.680.000,00							122.920.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169.680.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Dokumen	122.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						78.390.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						78.390.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		50.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.390.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						78.390.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.390.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.000.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Efisien, Akuntabel Dan Terintegrasi Di Seluruh Sektor Pembangunan		5 Unit	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						92.903.500,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		115.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						92.903.500,00					Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan		115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	Laporan	66.872.000,00						5 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.497.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.000.000,00						5 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.426.500,00						2 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.108.000,00						5 Paket	5.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.426.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.426.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.108.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.108.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.497.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	5 Paket	5.497.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Paket	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Paket	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						66.872.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	66.872.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						283.600.000,00					-		350.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						283.600.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	213.600.000,00						1 Laporan	260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						213.600.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	213.600.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.250.000,00					-		248.590.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						233.250.000,00					-		248.590.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.660.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	42.430.000,00						4 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	161.160.000,00						4 Unit	203.590.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						161.160.000,00							203.590.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	1 Unit	161.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Unit	203.590.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.430.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	2 Unit	42.430.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		4 Unit	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.660.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.660.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Unit	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
411.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.250.155.000,00**							**1.251.701.000,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						***1.210.155.000,00***							***1.141.701.000,00***	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	57,00 Persentase		50,00 Persentase	51,66 Persentase	1.210.155.000,00						53,38 Persentase	1.141.701.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.250.155.000,00					Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.251.701.000,00	
		Tersusunnya kebijakan dan regulasi teknis yang mendukung pembinaan ideologi Pancasila di daerah						1.250.155.000,00					Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.251.701.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	213.924.500,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	300 Orang		300 Orang	300 Orang	966.230.500,00						300 Orang	921.701.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00						100 Orang	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						213.924.500,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	213.924.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Muara Sungkai || Desa Banjar Negeri || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Tanjung Raja || Desa Sri Menanti || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Bunga Mayang || Desa Haduyang Ratu || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Abung Semuli || Desa Semuli Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						966.230.500,00							921.701.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	300 Orang		300 Orang	300 Orang	966.230.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		300 Orang	921.701.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
412.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.618.328.500,00**							**1.642.240.250,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***1.618.328.500,00***							***1.642.240.250,00***	
			999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	92,54 Persentase		77,78 Persentase	81,23 Persentase	1.618.328.500,00						84,84 Persentase	1.642.240.250,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.618.328.500,00					Meningkatnya etika dan budaya politik		1.642.240.250,00	
		Tersusunnya kebijakan dan dokumen teknis yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah						1.618.328.500,00					Meningkatnya etika dan budaya politik		1.642.240.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.100.000,00					1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	229.222.000,00						2 Kegiatan	185.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.206.006.500,00					40 Orang	1.256.440.250,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00					100 Orang	50.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.206.006.500,00							1.256.440.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	1.206.006.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		40 Orang	1.256.440.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						133.100.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.100.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka						229.222.000,00							185.800.000,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	229.222.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		2 Kegiatan	185.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
413.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**1.245.455.500,00**							**1.191.553.500,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***1.245.455.500,00***							***1.166.553.500,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	58,00 Persentase		47,00 Persentase	50,00 Persentase	1.245.455.500,00						53,00 Persentase	1.166.553.500,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						1.245.455.500,00					Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		1.191.553.500,00	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ormas secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.						1.245.455.500,00					Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		1.191.553.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.196.655.500,00						5 Laporan	1.141.553.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00						100 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	38.800.000,00						100 Orang	25.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						38.800.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	38.800.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						1.196.655.500,00							1.141.553.500,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan		5 Laporan	100 Laporan	1.196.655.500,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		5 Laporan	1.141.553.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
414.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**125.440.000,00**							**90.000.000,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***125.440.000,00***							***70.000.000,00***	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100,00 Persentase		90,00 Persentase	96,00 Persentase	125.440.000,00						98,00 Persentase	70.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						125.440.000,00					Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		90.000.000,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi secara mandiri						125.440.000,00					Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	57.793.000,00						100 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	57.647.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						57.647.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	57.647.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						57.793.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	57.793.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
415.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**2.796.982.000,00**							**3.338.197.250,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***2.796.982.000,00***							***3.338.197.250,00***	
			1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.796.982.000,00						100 Persentase	3.338.197.250,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						2.796.982.000,00					Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		3.338.197.250,00	
		Tersusunnya kebijakan teknis dan SOP kewaspadaan nasional dan penanganan konflik yang aplikatif						2.796.982.000,00					Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		3.338.197.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	230.525.000,00						1 Dokumen	257.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	177.122.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.097.735.000,00						500 Orang	2.297.022.250,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	291.600.000,00						100 Orang	583.200.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						291.600.000,00							583.200.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	291.600.000,00	Kab. Lampung Utara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		100 Orang	583.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						2.097.735.000,00							2.297.022.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.097.735.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		500 Orang	2.297.022.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						177.122.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	177.122.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Laporan	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						230.525.000,00							257.975.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	230.525.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Lampung Utara || Kecamatan Kotabumi || Kelurahan Kota Gapura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Responsif, Akuntabel Dan Menjamin Rasa Aman Yang Inklusif		1 Dokumen	257.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.649.647.948.393,98**							**1.819.663.162.754,13**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah Kabupaten Lampung Utara merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029. Kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah merupakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi dan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Secara teknis penentuan indikator kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembanguan. Sedangkan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

6.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Penetapan target kinerja dilakukan secara terukur dengan memperhatikan capaian indikator pada tahun sebelumnya, kemampuan fiskal daerah, potensi dan permasalahan pembangunan, serta proyeksi kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan strategis.

Seluruh target kinerja juga disusun secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pada Tahun 2027, fokus pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, pemerataan pembangunan hingga tingkat desa, reformasi birokrasi, penguatan ketahanan pangan dan ketahanan daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027, yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Sektor Unggulan Daerah, Penguatan Infrastruktur dan Optimalisasi Potensi Desa.**"

Kinerja tujuan dan sasaran pembangunan diukur melalui indikator-indikator makro pembangunan daerah yang menggambarkan outcome dari pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Indikator tersebut meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja, pembangunan manusia, kualitas infrastruktur, pembangunan desa, perlindungan anak, kesetaraan gender, ketahanan sosial budaya, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, kualitas lingkungan hidup, ketahanan daerah, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Setiap indikator memiliki target yang realistis namun progresif sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2027 memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, serta seluruh pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan akan difokuskan pada program prioritas daerah, 14 Program Unggulan Kabupaten Lampung Utara, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang didukung oleh perencanaan berbasis kinerja, penganggaran yang efektif, penguatan inovasi daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan setiap target pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Tabel 6.1

Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkelanjutan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,65 - 6,00
				2	Indeks Gini	Persen	0,269	0,259 - 0,263
		T1.S1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal serta Berkembangnya Sektor Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	13,70	16
				4	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	1,27	1,47
				5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,21	1,32
		T1.S2	Meningkatnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Secara Terintegrasi melalui Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	6	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,78	14,00 - 14,5
				7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,78	5,50 - 5,70
				8	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	83,58	84
		T1.S3	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	93,29	50
		T1.S4	Meningkatnya Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	10	Indeks Desa	Persen	7,33	7,76
				11	Persentase BUMDes Berkembang dan Maju	Persen	15,95	22,41
		T1.S5	Meningkatnya Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	12	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	5,28	5,5
T2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul,			13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,28	73,03
		T2.S1	Meningkatnya Pendidikan	14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,63	8,72

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produktif, dan Berdaya saing.		Berkualitas yang Merata		Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun			
				15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,69
		T2.S2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	16	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,41	74,47
				17	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	20	15,87
		T2.S3	Meningkatnya Standar Hidup Layak dan dan Produktivitas Masyarakat	18	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	10.160	10.387
				19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	112.790.000	113.170.083
		T2.S4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	62,97	77,5
				21	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,2	65,5
				22	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,492	0,43
		T2.S5	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila	23	Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	72,4	73,8
				24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,18	88,5
T3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Menjamin Rasa Aman yang Inklusif			25	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/Skor	4,42	4,54
						Predikat / Status	A-	A
		T3.S1	Terwujudnya Layanan Publik yang Akuntabel, Transparan, Inovatif dan Mudah Diakses oleh Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi, Termasuk Kelompok Rentan	26	Indeks Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	78,85	92,5
						Predikat / Status	Baik	(A) Kualitas tertinggi
		T3.S2	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	27	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	65	73
				28	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100
T.4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Efisien, Akuntabel dan			29	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,02	68
						Kategori	B	B
		T4.S1	Terwujudnya Birokrasi	30	Nilai SAKIP	Skor	61,26	63,5
						Predikat	B	B

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terintegrasi di Seluruh Sektor Pembangunan		Pemerintah yang Akuntabel dan Adaptif	31	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP
				32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25	3,5
						Predikat	Sangat Baik	Baik
				33	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/ Skor	77,78	79
						Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		T4.S2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Guna Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Pembangunan	34	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,21	17,87
T5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Ketahanan Ekologi			35	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	4,62	4,82
		T5.S1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	36	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Jeruk)	Persen	9,78	5,5
				37	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Karet, Lada, Kopi dan Tebu)	Persen	4,00	0,5
				38	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Peternakan (Sapi, Kambing, Kerbau, dan Unggas)	Persen	0,00	2,5
				39	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan	Persen	6,37	7,5
		T5.S2	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	40	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,21	77,9
				41	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	442,15	
				42	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap	Persen	97,52	

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecukupan Air Minum			
		T5.S3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,62	72,19
				44	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,32	0,33
				45	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	NA	100.314,07

Sumber : Laporan Dalev 2025 dan Hasil Analisis

6.2. Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan dan sasaran yang **terseleksi** sebagaimana ditampilkan dan tabel berikut :

Tabel 6.2

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027
1	2	3	4	5
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,65 - 6,00
2	Indeks Gini	Persen	0,269	0,259 - 0,263
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,78	14,00 - 14,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,78	5,50 - 5,70
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	93,29	50
6	Indeks Desa	Persen	7,33	7,76
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,28	73,03
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	20 *)	15,87
9	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,2	65
10	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,492 *)	0,43
11	Ketahanan Sosial Budaya	Persen	57,82	60,8
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,02	68
		Kategori	B	B
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,21	77,9
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,62	72,19
15	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,32	0,33
16	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	Belum Rilis	100.314,07

Sumber : Laporan Dalev 2025 dan Hasil Analisis

Tabel target indikator pembangunan daerah Tahun 2027 menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang berkelanjutan. Target-target tersebut disusun dengan mempertimbangkan capaian tahun dasar (baseline), proyeksi kemampuan daerah, serta sinkronisasi dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Lampung, dan arah kebijakan RKPD Tahun 2027. Pada aspek ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 5,12 persen menjadi 5,65–6,00 persen melalui penguatan produktivitas sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas pertanian, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun dari 15,78 persen menjadi 14,00–14,50 persen, tingkat

pengangguran terbuka turun dari 5,78 persen menjadi 5,50–5,70 persen, dan Indeks Gini membaik dari 0,269 menjadi 0,259–0,263 sebagai indikator semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Pada dimensi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 72,28 menjadi 73,03 yang didukung oleh peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan juga diarahkan pada percepatan penurunan prevalensi stunting dari 20 persen menjadi 15,87 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu. Di sisi lain, Indeks Perlindungan Anak ditargetkan meningkat dari 63,2 menjadi 65, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender ditargetkan menurun dari 0,492 menjadi 0,43 yang mencerminkan semakin baiknya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam rangka memperkuat daya saing wilayah dan kualitas pembangunan, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan Indeks Desa dari 7,33 menjadi 7,76 melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan potensi ekonomi desa. Selain itu, Ketahanan Sosial Budaya ditargetkan meningkat dari 57,82 menjadi 60,8 sebagai wujud penguatan harmonisasi sosial, pelestarian budaya, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial. Pada aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan meningkat dari 67,02 menjadi 68 dengan tetap mempertahankan kategori **B**. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan pemerintahan digital, serta penguatan manajemen sumber daya aparatur.

Sementara itu, pada dimensi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan, Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan meningkat dari 68,21 menjadi 77,9 melalui peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan, dan stabilisasi distribusi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditingkatkan dari 71,62 menjadi 72,19 sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indeks Ketahanan Daerah juga ditargetkan meningkat dari 0,32 menjadi 0,33 untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif sebesar 100.314,07 ton CO_2e sebagai implementasi pembangunan rendah karbon dan upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

Secara keseluruhan, target indikator pembangunan daerah Tahun 2027 menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, ketahanan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan. Seluruh target tersebut menjadi dasar penyusunan program prioritas, kegiatan, dan alokasi pendanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan RKPD Tahun 2027 mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2029.

6.3. Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD dibagi dalam beberapa aspek yaitu: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Apek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun

2025-2029 diperlukan kerjasama dari perangkat daerah terkait sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	68,21	77,9	BapanasRI, Dinas Ketahanan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	10,56	9,6	Dinas Ketahanan Pangan
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	5,09	470,75	PT PLN, BPS
4	Intensitas Energi Primer *	SBM/Rp milyar	116,41	167	Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK, Dinas Perkimciptaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman Menurut Kabupaten/Kota (%)	Persen	4,58	54,81	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum	Persen	97,90	98	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
7	Kapasitas Air Baku *	(m3/detik)	0,421	0,3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	72,00	75,12	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	71,62	72,19	Dinas Lingkungan Hidup
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	4,58	4,82	BPS, Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	14,76	15	Dinas Lingkungan Hidup
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	17,76 *)	20	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK *	Persen	270 (3,16%)	101725,915	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkimciptaru, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *	Persen	28,37	38,5	Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK, Dinas Perkimciptaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Indeks Risiko Bencana	Skor	161,97	127,7	BPBD
15	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,32	0,33	BPBD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,60	1,38	BPS, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
17	Rasio Penduduk	Persen	103,5	104,34	BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18	Kepadatan Penduduk	Orang/m²	257	257	BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	100	100	Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,65 - 6,00	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,78	14,00 - 14,5	BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	51,76	57,50	BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,78	5,50 - 5,70	BPS
5	Indeks Gini	Indeks	0,269	0,259 - 0,263	BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,28	73,03	BPS
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,41	74,47	BPS
8	Angka Melek Huruf	Persen	97,67	97,70	BPS
9	Prevalensi Stunting	Persen	20 *)	15,87	Dinas Kesehatan
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	52,05	49,05	Dinas Kesehatan
11	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	6,5	4,5	Dinas Kesehatan
12	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case notification rate*)	Persen	61,65	67	Dinas Kesehatan
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,69	BPS, Dinas Pendidikan
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,63	8,72	BPS, Dinas Pendidikan
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	a. Literasi Membaca	Persen	56,54	62,18	Dinas Pendidikan
	b. Numerasi	Persen	56,54	57,85	Dinas Pendidikan
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	a. Literasi Membaca	Persen	24,03	32,45	Dinas Pendidikan
	b. Numerasi	Persen	24,03	26,1	Dinas Pendidikan
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	6,3	20	BPS, Dinas Pendidikan
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	56,2	60	BPS, Dinas Pendidikan
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	Persen	4,1	5	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	10,98	65,01	BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Indeks Literasi Digital	Indeks	49,99	80	Dinas Komunikasi dan Informastika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	31,17	40,5	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan
24	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	83,58	84	Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama*	Indeks	74,5	75,6	Badan Kesbangpol dan Kanwil Kementerian Agama
26	Indeks Perlindungan Anak*	Indeks	63,2	65,5	BPS, Dinas PP dan PA
27	Indeks Pemenuhan Hak Anak*	Indeks	61,65	62,5	Dinas PP dan PA
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*	Indeks	76,49	77,5	Dinas PP dan PA dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
29	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,492	0,43	BPS, Dinas PP dan PA
30	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,17	53,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	10.160	10.387	BPS
32	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	Badan Kesbangpol
33	Indeks Zakat Nasional	Persen	0	0,26	Baznas, Setdakab, Kemenag
34	Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	72,4	73,8	Badan Kesbangpol, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Angka Ketergantungan	Persen	48,44	49,75	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	13,70	16	BPS
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,27	1,32	BPS
4	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	1,2	2,5	BPS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	2,8	3	BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	1,7	2	BPS dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten	Persen	94,2	92	BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,68	0,788	BPS dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	2,3	0,05	Bagian Perekonomian Setdakab
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	34,5	35	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,85	5,9	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,34	69	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	50,44	51	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Dinas PP dan PA
14	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	112.790.000	113.170.083	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	77,78	79	BRIN, Bappeda
16	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	29,63	30	Dinas Perikanan
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,91	6,0	BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten *	Persen	5,15	4,6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
19	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	5,28	5,5	BPS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	55,9	63,2	BPS, Dinas Perumahan Permukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
21	Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	46,67	50,57	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
22	Rasio Konektivitas	Persen	0,56	0,42	Dinas Perhubungan
23	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	93,29	50	Dinas Perumahan Permukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan
24	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	Persen	7,33	7,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan
25	Persentase BUMDes Berkembang dan Maju	Persen	15,95 *)	22,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan
26	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	231,66	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Milyar)	Rp	5.776,40	5.816,50	BPS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,25	0,5	BPS dan Bapenda
29	Tingkat Inflasi	Persen	1,67	2,5+1	BPS
30	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,5	3,57	BRIN, Bappeda
31	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (ADHB)	Persen	6,58	6,82	BPS
32	Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	70,4	75	Bagian Kerjasama Setdakab
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	3,1	19,5	Bank Lampung, BPS, BPKAD
34	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,19	0,2	Bank Lampung, BPS, BPKAD
35	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Nilai	3.000	4.800	Bank Lampung, BPS, BPKAD
36	Total Kredit/PDRB	Persen	15,6	19	Bank Lampung, BPS, BPKAD
37	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,7	3,81	Bappenas, Bagian Perekonomian Setdakab
38	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	1,27	1,47	BPS, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
39	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-6,4	-5,45	BPS
40	Tingkat Kriminalitas	Per 100.000 penduduk per tahun	17	124	BPS dan Polres
41	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB	Indeks	4,62	4,82	BPS
42	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Jeruk)	Persen	4	5,5	BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
43	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Karet, Lada, Kopi dan Tebu)	Persen	0,2	0,5	BPS, Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
44	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Peternakan (Sapi, Kambing, Kerbau, dan Unggas)	Persen	1	2,5	BPS, Dinas Perkebunan dan Peternakan
45	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan	Persen	6,38	7,5	BPS dan Dinas Perikanan
46	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% Kontribusi)	Persen	31,99	34,5	BPS
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,18	88,5	Sekretariat Daerah
		Predikat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Predikat	Baik	Baik	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	4,54	Menpan RB, Sekretariat Daerah
4	Indeks Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	78,85	92,5	Ombudsman, Sekretariat Daerah
		Predikat / Status	Baik	(A) Kualitas tertinggi	
5	Persentase Penduduk Rentan/Marjinal yang Terlayani dalam Program Layanan Publik (Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dsb.)	Persen	71	50	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,02	68	Menpan RB dan Sekretariat Daerah
		Kategori	B	B	
7	Nilai SAKIP	Skor	61,26	63,5	Menpan RB, Sekretariat Daerah
		Predikat	B	B	
8	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	BPK, BPKAD
9	Indeks Profesional ASN	Indeks	74,18	77	BKPSDM
		Kategori	Sedang	Tinggi	
10	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,10)	BPKP, Inspektorat
11	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,21	17,87	BPKAD dan Bapenda
12	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	19,58	19,87	Bapenda
13	Persentase Penegakan Hukum Perda	Persen	75 *)	85	Satpol PP
14	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	88,62 *)	90	Sekretariat Daerah, Bappeda
15	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	78,32 *)	81	Badan Kesbangpol
16	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	65 *)	73	BPS, Polres, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Perhubungan
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**				
	URUSAN PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,00	100	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	97,00	100	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	99,00	100	Dinas Pendidikan

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
	pendidikan menengah pertama				
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	20,00	33,24	Dinas Pendidikan
5	Persentase Penduduk Rentan/Marjinal (Anak-Anak Berkebutuhan Khusus serta Kelompok Rentan Lainnya) yang Terlayani Layanan Pendidikan Inklusif agar Memperoleh Hak Pendidikan yang Layak	Persen	13,84	14,56	Dinas Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN				
6	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,20	1,2	Dinas Kesehatan
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	67,00	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,00	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	79,17	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	80,39	100	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	84,46	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,17	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	82,86	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	91,50	100	Dinas Kesehatan
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,68	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95,91	100	Dinas Kesehatan
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	91,41	100	Dinas Kesehatan
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	70,96	100	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	7	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	23,99	60	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	71,35	69,6	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	99,18	82,7	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	20,00	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	46,67	50,57	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5,00	10	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	0,60	2,93	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,76	12,5	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	5,30	11,53	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA				
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Angka	96,67	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Angka	96,67	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Angka	95,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	93,00	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
39	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	NA	25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	URUSAN SOSIAL				
40	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	10,00	10	Dinas Sosial
41	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tergraduasi	Persen	13,30	98,25	Dinas Sosial
42	Persentase Penduduk Rentan (Lansia, disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, orang terlantar, dan kelompok miskin ekstrem) yang Terlayani dalam Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Persen	49,71	100	Dinas Sosial
43	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	96,27	100	Dinas Sosial
44	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	98,67	100	Dinas Sosial
	URUSAN TENAGA KERJA				
45	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	78,75	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
46	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	112.790.000,00	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
47	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	62,94	63,75	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
48	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	40,51	50	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
49	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	78,75	80	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
50	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	21,89	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
51	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	16,20	10,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53	Strata Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Strata	Pratama	Madya	
	URUSAN PANGAN				
54	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	122,75	100	Dinas Ketahanan Pangan
	URUSAN PERTANAHAN				
55	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
56	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	0	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks/ Skor	71,62	72,19	Dinas Lingkungan Hidup
59	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	81,96	83,33	Dinas Lingkungan Hidup
60	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	62,00	75	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
61	Perekaman KTP elektronik	Persen	97,30	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
62	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	73,37	77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
64	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	50,00	60	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
65	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	87,99	90,3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
66	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persen	95,28	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
67	Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar	Persen	0,00	15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
68	Persentase Penduduk Rentan (Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dsb.) yang	Persen	100,00	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
	Terlayani Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan				
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
69	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7,33	7,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
70	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Indeks	0,70	0,715	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Status	Berkembang	Maju	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
71	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,32	2,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
72	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	70,00	68,77	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
73	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,60	8,43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PERHUBUNGAN				
74	Rasio Konektivitas	Rasio	0,56	0,42	Dinas Perhubungan
75	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,47	0,46	Dinas Perhubungan
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
76	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	3,03	0,03	Dinas Komunikasi dan Informatika
77	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	27,03	0,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
78	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	65,08	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
79	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	0,00	48,97	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
80	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,18	15	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
81	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	231,66	100,00	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
82	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	6,04	9	Dinas Pemuda dan Olahraga
83	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	13,00	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
84	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	3,90	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
	URUSAN STATISTIK				
85	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
	perencanaan pembangunan daerah				
86	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	0,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN KEBUDAYAAN				
88	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	60,00	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	URUSAN PERPUSTAKAAN				
89	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		59,24	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
90	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks/ Skor	10,98	64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN KEARSIPAN				
91	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persen	15,00	52,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
92	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	0,00	48,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PERIKANAN				
93	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	9.082,42	9091	Dinas Perikanan
	URUSAN PARIWISATA				
94	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	0,00	35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
95	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	9,98	66	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	Tingkat hunian akomodasi	Persen	0,25	3,2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
97	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,21	2,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
98	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,11	1,9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	URUSAN PERTANIAN				
99	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	0,02	0,02	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
100	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan	Desa/Kel	4,5	5	Dinas Ketahanan Pangan
101	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis Kab/Kota	Persen	0,00	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
102	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Persen	0,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PERDAGANGAN				
103	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100,00	85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
104	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen		85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
105	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	57,24	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PERINDUSTRIAN				
106	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen		90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
107	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen		100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
108	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
109	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
110	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
111	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100,00	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)				
112	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	39,34	30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
113	Rasio PAD	Persen	9,64	7,27	Bapenda
114	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 3 (3,10)	Inspektorat
115	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,75	Level 3 (3,20)	Inspektorat
116	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Level 3	91,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
	(dikurangi transfer expenditures)				
117	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)				
118	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	0	Sekretariat Daerah
119	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	2,44	57,5	Sekretariat Daerah
120	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	0,00	43	Sekretariat Daerah
121	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	35,02	40	Sekretariat Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)				
122	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	33,92	77,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
123	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	13,55	19,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
124	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	77,46	6,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)				
125	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-10,04	-7,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
126	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-15,94	-17,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
127	Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	Ya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
128	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	2,62	1,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)				
129	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	Persen	100,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
130	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	Persen	100,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
131	Persentase perda yang di tetapkan	Persen	100,00	100	Sekretariat DPRD

NO	ASPEK/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
132	Persentase Ranperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	66,67	100	Sekretariat DPRD
133	Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	85,00	100	Sekretariat DPRD

Sumber : Laporan Dalev Tahun 2025 dan Analisis

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan tahun pertama dari tahapan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045. RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RKPD ini telah melalui berbagai tahapan penyempurnaan dari berbagai masukan yang telah diberikan oleh Masyarakat, Akademisi, Pimpinan Daerah, dan juga Pemerintah Pusat dan Provinsi baik melalui forum Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah, forum Musrenbang, dan Forum Fasilitasi RKPD Tahun 2027. RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027 ini selanjutnya digunakan sebagai :

1. Dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
2. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
3. Bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
4. Bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

TEMA PEMBANGUNAN 2027

Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Sektor Unggulan Daerah, Penguatan Infrastruktur dan Optimalisasi Potensi Desa.

BAPPEDA LAMPUNG UTARA